LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2024
AUDITED

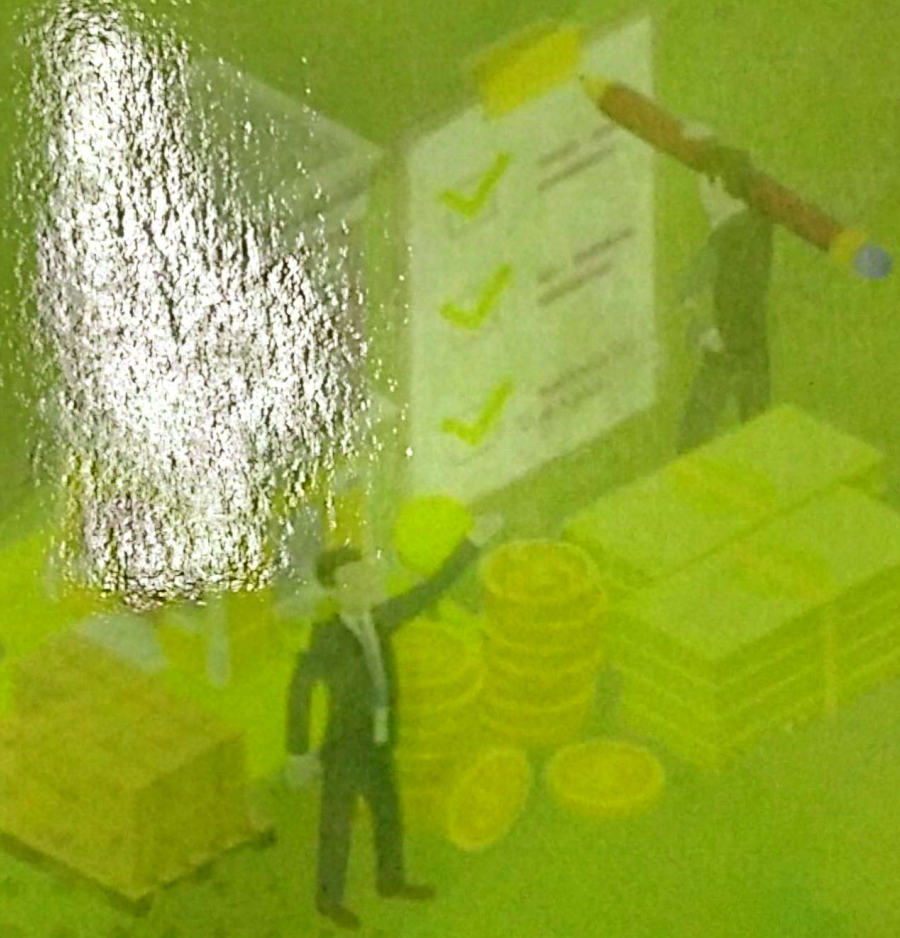

PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2024

PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA BARAT

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Gubernur selaku pemegang kuasa pengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam pemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yang dipimpinnya. Disamping itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan APBD dengan menyusun Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Perubahan SAL (c) Laporan Operasional, (d) Neraca, (e) Laporan Perubahan Ekuitas, (f) Laporan Arus Kas, dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024, telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan.

Laporan Keuangan disusun dan disampaikan kepada kelompok utama pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, namun tidak terbatas pada masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa serta pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan juga pemerintah. Diharapkan, melalui media pelaporan ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Padang, Mei 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

INDEKS ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

INDEKS ISI ii

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB iv

INDEKS DAFTAR LAMPIRAN v

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

II. LAPORAN PERUBAHAN SAL

III. NERACA

IV. LAPORAN OPERASIONAL

V. LAPORAN ARUS KAS

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

VII.CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1.	Informasi Umum	1
1.2.	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3.	Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan	4
1.4.	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	5
1.5.	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	6

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1.	Ekonomi Makro	7
2.2.	Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024	12
2.3.	Kebijakan Umum Keuangan Daerah Pada Perubahan 2024	20
2.4.	Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	27

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1.	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	31
3.2.	Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan	35

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1.	Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	36
4.2.	Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan	40
4.3.	Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	40
4.4.	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	60

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1.	Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	61
5.1.1.	Pendapatan LRA	61
5.1.2.	Belanja	80
5.1.3.	Surplus/Defisit	100
5.1.4.	Pembiayaan	101
5.1.5.	SILPA	101
5.2.	Penjelasan Laporan Perubahan SAL	104
5.3.	Penjelasan Neraca	106
5.3.1.	Aset	106
5.3.2.	Kewajiban	155
5.3.3.	Ekuitas	162
5.4.	Penjelasan Laporan Operasional (LO)	163
5.4.1.	Pendapatan LO	163
5.4.2.	Beban	174
5.4.3.	Surplus/Defisit Operasional Kegiatan Non Operasional	205
5.4.4.	Pos Luar Biasa	206
5.4.5.	Surplus/Defisit Laporan Operasional	206
5.5.	Penjelasan Laporan Arus Kas	207
5.6.	Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	212
5.7.	Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas	219

BAB VI. INFORMASI NON KEUANGAN 220

BAB VII. PENUTUP 314

GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari (I) Laporan Realisasi Anggaran, (II) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (III) Neraca, (IV) Laporan Operasional, (V) Laporan Arus Kas, (VI) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (VII) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padang, Mei 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

INDEKS DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	*NO*	*URAIAN*
LAMPIRAN	1	Daftar Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) dan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran.
LAMPIRAN	2	Daftar Anggaran dan Realisasi Pendapatan Per Rincian Objek Pendapatan dan SKPD nya Tahun 2024
LAMPIRAN	3	Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun
LAMPIRAN	4	Daftar Sub Kegiatan SKPD yg Realisasi Keuangannya Dibawah 50% dan Penjelasannya Tahun 2024
LAMPIRAN	5	Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per SKPD Tahun 2024
LAMPIRAN	6	Ringkasan LRA-Pendapatan Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Tahun 2024
LAMPIRAN	7	Daftar Rekapitulasi Anggaran, Realisasi dan Sisa Dana DAK Fisik dan Non Fisik Tahun 2024
LAMPIRAN	8	Daftar Rekapitulasi Anggaran, Realisasi dan Sisa Dana DAU SG Tahun 2024
LAMPIRAN	9	Rekapitulasi Belanja per SKPD Tahun Anggaran 2024
LAMPIRAN	10	Rekapitulasi Belanja Operasi Per SKPD Tahun Anggaran 2024
LAMPIRAN	11	Rekapitulasi Belanja Pegawai Per SKPD Tahun Anggaran 2024
LAMPIRAN	12	Rekapitulasi Belanja Barang dan Jasa Per SKPD Tahun Anggaran 2024
LAMPIRAN	13	Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2024
LAMPIRAN	14	Rekapitulasi Penerbitan dan Pencairan SP2D per SKPD Tahun Anggaran 2024
LAMPIRAN	15	Rekapitulasi Setoran Pengembalian Belanja per SKPD Tahun 2024
LAMPIRAN	16	Rekapitulasi Belanja Modal Per SKPD Tahun Anggaran 2024
LAMPIRAN	17	Rekapitulasi Data Dana BOS Tahun 2023 SMA/SMK/SLB Negeri Se Sumatera Barat , Sisa Saldo Dana BOS 2021 per 31
LAMPIRAN	18	Rekapitulasi Belanja BOS Reguler Tahun 2024
LAMPIRAN	19	Rekapitulasi Realisasi BOS Kinerja Tahun 2024
LAMPIRAN	20	Rekapitulasi Hasil Rekonsiliasi Dana BOS Tahun 2024 SMA/SMK/SLB Negeri Se Sumatera Barat per 31 Desember 2024
LAMPIRAN	21	Realisasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024
LAMPIRAN	22	BLUD-Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang berakhir sd 31 Desember Tahun
LAMPIRAN	23	Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Sub Rincian Objek Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024
LAMPIRAN	24	Daftar Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024 dan 2023
LAMPIRAN	25	Daftar Penghapusan dan Penjualan Aset Tahun 2024
LAMPIRAN	26	Daftar Piutang dan Penyisihannya per 31 Desember 2024
LAMPIRAN	27	Piutang/Tagihan Kerugian Daerah Yang Diproses Melalui Sidang TPKD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan telah
LAMPIRAN	28	Daftar Beban Bayar di Muka SKPD per 31 Desember 2024
LAMPIRAN	29	Daftar Persediaan per 31 Desember 2024
LAMPIRAN	30	Daftar Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)
LAMPIRAN	31	Daftar Investasi Permanen per 31 Desember 2024 (Un-Audited)
LAMPIRAN	32	Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sd 31 Desember 2024
LAMPIRAN	33	Daftar Barang Jasa Yg Dikapitalisir ke Aset Tetap Tahun 2024
LAMPIRAN	34	Daftar Realisasi BM, BM Tdk dikapitalisir, BM Dikapitalisir Tahun 2024
LAMPIRAN	35	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap dan Aset Lainnya
LAMPIRAN	36	Daftar Mutasi Aset tetap dan Aset lainnya
LAMPIRAN	37	Daftar Aktiva Tetap per 31 Desember 2024 - Tanah
LAMPIRAN	38	Daftar Aktiva Tetap per 31 Desember 2024 - Peralatan dan Mesin
LAMPIRAN	39	Daftar Aktiva Tetap per 31 Desember 2024 - Gedung dan Bangunan
LAMPIRAN	40	Daftar Aktiva Tetap per 31 Desember 2024 - Jalan Irigasi Jaringan
LAMPIRAN	41	Daftar Aktiva Tetap per 31 Desember 2024 - Aset Tetap Lainnya
LAMPIRAN	42	Daftar Aktiva Tetap per 31 Desember 2024 - KDP
LAMPIRAN	43	Daftar Aktiva Tetap per 31 Desember 2024 - Aset Tidak Berwujud
LAMPIRAN	44	Daftar Aktiva Tetap per 31 Desember 2024 -Aset Tidak Bermanfaat
LAMPIRAN	45	Daftar Aktiva Tetap per 31 Desember 2024 - Aset Dimanfaatkan Pihak Lain
LAMPIRAN	46	Daftar Aktiva Tetap per 31 Desember 2024 - Aset Dalam Penelusuran
LAMPIRAN	47	Daftar Hibah Masuk Tahun 2024
LAMPIRAN	48	Daftar Tanah Pada OPD di Lingkungan Pemprov. Sumbar Yang Belum Bersertifikat
LAMPIRAN	49	Daftar Rumah Dinas Beserta Surat Izin Penghunian (SIP)
LAMPIRAN	50	Penetapan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun
LAMPIRAN	51	Rekapitulasi Kendaraan Bermotor Yang Belum Mendaftar Ulang Jatuh Tempo Tahun 2020 sd 2024
LAMPIRAN	52	Perhitungan Pokok dan Bagi Hasil Deposito PT. Rajawali Tahun 2024 Nisbah Bagi Hasil
LAMPIRAN	53	Rekap BMD Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dipinjampakaikan TA 2024
LAMPIRAN	54	Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Pemotongan Pajak atas SP2D yg dicairkan melalui Kas Daerah Tahun 2024
LAMPIRAN	55	Daftar Utang Pihak ketiga
LAMPIRAN	56	Daftar Hutang Belanja Tahun per 31 Desember 2024
LAMPIRAN	57	Daftar Pendapatan Diterima Di Muka Tahun 2024
LAMPIRAN	58	Perbedaan LRA dan LO 2024
LAMPIRAN	59	Rekapitulasi Aset Tetap Properti Investasi

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN 2024

PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024 AUDITED	%	REALISASI 2023 AUDITED
1	2	3	4	5	6
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**6.857.294.152.520,00**	**6.482.418.683.405,20**	**94,53**	**6.263.878.436.851,68**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**3.342.769.899.590,00**	**2.942.563.617.866,20**	**88,03**	**2.784.774.801.212,68**
4.1.01.	Pajak Daerah	2.693.451.041.456,00	2.338.112.925.264,00	86,81	2.236.722.695.545,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	414.280.722.633,00	382.306.933.091,49	92,28	16.049.240.433,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	129.624.977.090,00	122.018.602.181,00	94,13	117.084.599.941,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	105.413.158.411,00	100.125.157.329,71	94,98	414.918.265.293,68
4.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.497.500.252.930,00**	**3.525.560.271.539,00**	**100,80**	**3.464.761.720.139,00**
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.466.843.452.930,00	3.496.315.733.539,00	100,85	3.437.048.050.139,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	3.453.594.168.930,00	3.483.066.449.539,00	100,85	3.428.427.025.139,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	196.062.191.930,00	196.436.458.000,00	100,19	186.817.960.171,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	2.062.837.785.000,00	2.146.789.947.987,00	104,07	1.989.337.430.162,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	253.614.707.000,00	217.864.557.320,00	85,90	365.925.325.993,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	941.079.485.000,00	921.975.486.232,00	97,97	886.346.308.813,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	8.621.025.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	13.249.284.000,00	13.249.284.000,00	100,00	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.656.800.000,00	29.244.538.000,00	95,39	27.713.670.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	30.656.800.000,00	29.244.538.000,00	95,39	27.713.670.000,00
4.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**17.024.000.000,00**	**14.294.794.000,00**	**83,97**	**14.341.915.500,00**
4.3.01.	Pendapatan Hibah	17.024.000.000,00	14.294.794.000,00	83,97	14.341.915.500,00
5.	**BELANJA**	**7.017.741.696.945,19**	**6.524.664.745.123,96**	**92,97**	**6.352.991.353.499,87**
5.1.	**BELANJA OPERASI**	**4.853.518.637.062,19**	**4.614.017.505.277,85**	**95,07**	**4.419.911.196.951,35**
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.588.514.014.191,16	2.490.554.904.931,00	96,22	2.195.331.447.151,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.935.171.371.802,03	1.803.917.885.970,85	93,22	1.964.366.347.631,35
5.1.04.	Belanja Subsidi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	-
5.1.05.	Belanja Hibah	328.202.803.569,00	317.914.266.876,00	96,87	260.213.402.169,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	130.447.500,00	130.447.500,00	100,00	-
5.2.	**BELANJA MODAL**	**856.550.234.585,00**	**765.506.194.874,35**	**89,37**	**991.975.692.930,52**
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	2.478.117.620,00	2.464.373.669,00	99,45	2.854.444.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	223.905.542.378,00	189.146.437.545,00	84,48	306.440.774.536,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	254.114.942.168,00	212.226.274.577,89	83,52	318.703.801.324,52
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	332.313.610.530,00	317.619.554.844,46	95,58	323.497.539.237,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	43.719.921.889,00	44.031.478.988,00	100,71	40.479.133.833,00
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	18.100.000,00	18.075.250,00	99,86	-
5.3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**10.487.887.909,00**	**5.222.259.811,30**	**49,79**	**-**
5.3.1.	Belanja Tidak Terduga	10.487.887.909,00	5.222.259.811,30	49,79	-
5.4.	**BELANJA TRANSFER**	**1.297.184.937.389,00**	**1.139.918.785.160,46**	**87,88**	**941.104.463.618,00**
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	1.249.538.837.389,00	1.098.402.469.691,00	87,90	908.031.786.786,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	47.646.100.000,00	41.516.315.469,46	87,13	33.072.676.832,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(160.447.544.425,19)**	**(42.246.061.718,76)**	**(26,33)**	**(89.112.916.648,19)**
6.	**PEMBIAYAAN**	**160.447.544.425,19**	**159.981.015.714,19**	**99,71**	**269.560.461.073,38**
6.1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**180.447.544.425,19**	**179.981.015.714,19**	**99,74**	**289.560.461.073,38**
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	180.447.544.425,19	179.981.015.714,19	99,74	289.560.461.073,38
6.2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**20.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**	**100,00**	**20.000.000.000,00**
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(0,00)**	**117.734.953.995,43**	**-**	**180.447.544.425,19**

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

2.LAPORAN PERUBAHAN SAL

TAHUN 2024

PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Nomor	Uraian	2024 AUDITED	2023 AUDITED
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	180.447.544.425,19	289.279.692.879,38
2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(179.981.015.714,19)	(289.560.461.073,38)
	Sub Total	**466.528.711,00**	**(280.768.194,00)**
3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	117.734.953.995,43	180.447.544.425,19
4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(466.528.711,00)	322.477.368,00
5	Lain-lain	-	(41.709.174,00)
6	**Saldo Anggaran Lebih Akhir**	**117.734.953.995,43**	**180.447.544.425,19**

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

3.NERACA

TAHUN 2024

PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian Akun	Tahun 2024 AUDITED	Tahun 2023 AUDITED
1	**ASET**	**12.360.751.333.086,70**	**12.191.738.756.207,30**
1.1	**ASET LANCAR**	**701.386.987.150,03**	**760.336.459.551,71**
1.1.01	**Kas dan Setara Kas**	**117.734.953.995,43**	**180.447.544.425,19**
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	88.147.677.797,12	148.044.084.493,35
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	5.600.000,00	930.000,00
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	323.138.845,31	4.100.000,00
1.1.01.04	Kas di BLUD	28.036.491.064,00	30.888.069.226,84
1.1.01.05	Kas Dana BOS	-	1.510.360.705,00
1.1.01.07	Kas Lainnya	-	-
1.1.01.08	Setara Kas	-	-
1.1.01.10	Kas Dana BOSP	1.222.046.289,00	-
1.1.02	**Investasi Jangka Pendek**	**-**	**-**
1.1.02.02	Investasi dalam Deposito	-	-
1.1.03	**Piutang Pajak Daerah**	**59.890.385.232,00**	**51.514.670.887,00**
1.1.04	**Piutang Retribusi Daerah**	**11.583.451.751,00**	**1.620.058.378,00**
1.1.05	**Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**127.297.967.456,00**	**122.018.602.181,00**
1.1.06	**Piutang Lain-lain PAD yang Sah**	**2.711.795.855,20**	**19.675.506.112,47**
1.1.07	**Piutang Transfer Pemerintah Pusat**	**6.441.442.000,00**	**-**
1.1.09	**Piutang Lainnya**	**28.800.000,00**	**55.200.000,00**
1.1.09.04	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	28.800.000,00	55.200.000,00
1.1.10	**Penyisihan Piutang**	**(12.149.166.360,11)**	**(7.596.538.361,27)**
1.1.10.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	(12.149.022.360,11)	(7.596.262.361,27)
1.1.10.02	Penyisihan Piutang Lainnya	(144.000,00)	(276.000,00)
1.1.11	**Beban Dibayar Dimuka**	**3.509.417.517,00**	**3.846.284.775,21**
1.1.12	**Persediaan**	**384.337.939.703,51**	**388.755.131.154,11**
1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**1.716.313.928.343,58**	**1.625.650.736.106,10**
1.2.01	**Investasi Jangka Panjang Non Permanen**	**3.135.244.683,00**	**3.132.703.183,00**
1.2.01.05	Dana Bergulir	10.581.879.188,00	10.581.879.188,00
	Penyisihan Dana Bergulir / Diragukan Ditagih	(7.446.634.505,00)	(7.449.176.005,00)
1.2.02	**Investasi Jangka Panjang Permanen**	**1.713.178.683.660,58**	**1.622.518.032.923,10**
1.2.02.02	Penyertaan Modal	1.713.178.683.660,58	1.622.518.032.923,10
1.3	**ASET TETAP**	**9.662.183.012.990,35**	**9.554.409.391.954,95**
1.3.01	**Tanah**	**2.317.257.971.575,32**	**2.309.015.698.531,82**
1.3.02	**Peralatan dan Mesin**	**3.100.523.394.031,89**	**2.905.254.397.064,63**
1.3.03	**Gedung dan Bangunan**	**4.876.017.515.758,74**	**4.627.403.775.024,23**
1.3.04	**Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**7.128.701.627.636,34**	**6.886.411.506.934,38**
1.3.05	**Aset Tetap Lainnya**	**472.833.248.677,75**	**429.240.113.127,75**
1.3.06	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	**1.008.192.923.821,67**	**1.030.070.802.347,65**
1.3.07	**Akumulasi Penyusutan**	**(9.241.343.668.511,36)**	**(8.632.986.901.075,51)**
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.541.843.355.236,40)	(2.322.700.129.644,24)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.200.198.046.068,18)	(1.100.759.868.734,32)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(5.484.889.516.019,23)	(5.195.510.308.392,07)
1.3.07.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(14.412.751.187,55)	(14.016.594.304,88)

Kode Akun	Uraian Akun	Tahun 2024 AUDITED	Tahun 2023 AUDITED
1.4	**DANA CADANGAN**	**-**	**-**
1.4.01	**Dana Cadangan**	**-**	**-**
1.4.01.01	Dana Cadangan	-	-
1.5	**ASET LAINNYA**	**191.911.213.762,74**	**251.342.168.594,51**
1.5.01	**Tagihan Jangka Panjang**	**49.976.619.769,00**	**49.976.619.769,00**
1.5.01.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	49.976.619.769,00	49.976.619.769,00
1.5.02	**Kemitraan dengan Pihak Ketiga**	**-**	**19.856.938.752,53**
1.5.03	**Aset Tidak Berwujud**	**33.449.565.365,00**	**33.468.540.115,00**
1.5.04	**Aset Lain-lain**	**220.067.058.415,09**	**271.107.417.795,61**
1.5.04.01	Aset Lain-lain	220.067.058.415,09	271.107.417.795,61
	- Aset Rusak Berat/Usang	127.829.488.311,09	141.166.494.691,61
	- Aset Yang Dibatasi Penggunaannya PT.Rajawali	92.237.570.104,00	91.732.570.104,00
	- Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	38.208.353.000,00
1.5.05	**Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**	**(33.090.404.483,00)**	**(32.771.818.808,50)**
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(33.090.404.483,00)	(32.771.818.808,50)
1.5.06	**Akumulasi Penyusutan Aset Lain lain**	**(78.491.625.303,35)**	**(90.295.529.029,13)**
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(78.491.625.303,35)	(90.295.529.029,13)
	- Akumulasi Penyusutan Rusak Berat/Usang	(78.491.625.303,35)	(90.295.529.029,13)
1.5.08	**Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)**	**-**	**-**
1.6	**PROPERTI INVESTASI**	**88.956.190.840,00**	**-**
1.6.01	Properti Investasi Tanah	76.232.200.000,00	-
1.6.02	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	35.344.419.000,00	-
1.6.04	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(22.620.428.160,00)	-
2	**KEWAJIBAN**	**563.800.368.534,48**	**493.355.576.175,84**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**563.800.368.534,48**	**401.623.006.071,84**
2.1.01	**Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**	**56.258.668,00**	**56.258.668,00**
2.1.02	**Utang Bunga**	**-**	**-**
2.1.05	**Pendapatan Diterima Dimuka**	**25.417.880.044,90**	**2.084.549.215,17**
2.1.06	**Utang Belanja**	**510.698.511.821,58**	**398.879.854.718,67**
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	34.335.621.211,00	10.033.370.562,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	81.400.664.565,58	66.027.303.099,67
2.1.06.07	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.105.081.802,00	2.134.072.330,00
2.1.06.08	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.001.779.730,00	3.385.886.489,00
2.1.06.09	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.502.587.466,00	-
2.1.06.12	Utang Belanja Bagi Hasil	356.352.777.047,00	317.299.222.238,00
2.1.07	**Utang Jangka Pendek Lainnya**	**27.627.718.000,00**	**602.343.470,00**
2.2	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**-**	**91.732.570.104,00**
2.2.01	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	91.732.570.104,00
3	**EKUITAS**	**11.796.950.964.552,20**	**11.698.383.180.031,40**
3.1	**EKUITAS**	**11.796.950.964.552,20**	**11.698.383.180.031,40**
3.1.01	Ekuitas	11.796.950.964.552,20	11.698.383.180.031,40
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**12.360.751.333.086,70**	**12.191.738.756.207,30**

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

4.LAPORAN OPERASIONAL

TAHUN 2024

PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

AKUN	URAIAN	2024 AUDITED	2023 AUDITED	KENAIKAN / PENURUNAN	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	**PENDAPATAN DAERAH-LO**				
7.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**				
7.1.01	Pajak Daerah-LO	2.331.128.478.240,00	2.232.449.649.662,00	98.678.828.578,00	4,23
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	376.121.559.262,83	16.613.881.058,00	359.507.678.204,83	95,58
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	127.297.967.456,00	122.018.602.181,00	5.279.365.275,00	4,15
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	92.100.710.941,93	420.873.566.358,62	(328.772.855.416,69)	(356,97)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**2.926.648.715.900,76**	**2.791.955.699.259,62**	**134.693.016.641,14**	**4,60**
7.2	**PENDAPATAN TRANSFER-LO**				
7.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO**				
7.2.01.01.01	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO*	*158.228.105.000,00*	*207.643.304.000,00*	*(49.415.199.000,00)*	*(31,23)*
7.2.01.01.02	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO*	*2.146.789.947.987,00*	*1.989.337.430.162,00*	*157.452.517.825,00*	*7,33*
7.2.01.01.03	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO*	*217.864.557.320,00*	*365.925.325.993,00*	*(148.060.768.673,00)*	*(67,96)*
7.2.01.01.04	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO*	*921.975.486.232,00*	*886.346.308.813,00*	*35.629.177.419,00*	*3,86*
7.2.01.02.01	*Dana Insentif Daerah (DID)-LO*	-	*8.621.025.000,00*	*(8.621.025.000,00)*	-
7.2.01.06.01	*Insentif Fiskal*	*13.249.284.000,00*	-	*13.249.284.000,00*	*100,00*
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	**3.458.107.380.539,00**	**3.457.873.393.968,00**	**233.986.571,00**	**0,01**
7.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO**				
7.2.02.02	Bantuan Keuangan -LO	29.244.538.000,00	27.713.670.000,00	1.530.868.000,00	5,23
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	**29.244.538.000,00**	**27.713.670.000,00**	**1.530.868.000,00**	**5,23**
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER-LO	**3.487.351.918.539,00**	**3.485.587.063.968,00**	**1.764.854.571,00**	**0,05**
7.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO**				
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	141.448.740.315,60	178.135.578.104,00	(36.686.837.788,40)	(25,94)
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH-LO	**141.448.740.315,60**	**178.135.578.104,00**	**(36.686.837.788,40)**	**(25,94)**
	JUMLAH PENDAPATAN-LO	**6.555.449.374.755,36**	**6.455.678.341.331,62**	**99.771.033.423,74**	**1,52**
8	**BEBAN DAERAH**				
8.1	**BEBAN OPERASI**				
8.1.01	Beban Pegawai	2.515.997.454.980,00	2.204.814.649.540,00	311.182.805.440,00	12,37
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	1.798.554.944.588,19	1.948.667.137.396,29	(150.112.192.808,10)	(8,35)
8.1.02.01	*Beban Barang*	*631.917.871.572,32*	*560.076.533.537,47*	*71.841.338.034,85*	*11,37*
8.1.02.02	*Beban Jasa*	*830.687.902.585,57*	*776.716.452.914,21*	*53.971.449.671,36*	*6,50*
8.1.02.03	*Beban Pemeliharaan*	*104.610.506.777,30*	*85.700.909.339,85*	*18.909.597.437,45*	*18,08*
8.1.02.04	*Beban Perjalanan Dinas*	*231.338.663.653,00*	*243.612.287.499,00*	*(12.273.623.846,00)*	*(5,31)*
8.1.02.05	*Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat*	-	-	-	-
8.1.02.88	*Beban Barang dan Jasa BOS*	-	*280.090.037.482,76*	*(280.090.037.482,76)*	-
8.1.02.99	*Beban Barang dan Jasa BLUD*	-	*2.470.916.623,00*	*(2.470.916.623,00)*	-
8.1.03	Beban Bunga	-	-	-	-
8.1.04	Beban Subsidi	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	100,00
8.1.05	Beban Hibah	317.914.266.876,00	260.213.402.169,00	57.700.864.707,00	-
8.1.06	Bantuan Sosial	130.447.500,00	-	130.447.500,00	100,00
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	6.585.362.941,09	3.044.465.981,17	3.540.896.959,92	53,77

AKUN	URAIAN	2024 AUDITED	2023 AUDITED	KENAIKAN / PENURUNAN	%
8.1.08	**Beban Penyusutan dan Amortisasi**	**591.492.702.995,20**	**622.538.533.241,63**	**(31.045.830.246,43)**	**(5,25)**
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	203.555.135.875,93	246.838.071.006,36	(43.282.935.130,43)	(21,26)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	99.453.715.891,08	94.905.223.525,27	4.548.492.365,81	4,57
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	287.665.701.305,62	278.716.484.563,46	8.949.216.742,16	3,11
8.1.08.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	396.156.883,07	387.612.725,52	8.544.157,55	2,16
8.1.08.05	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	1.011.121.517,30	(1.011.121.517,30)	-
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	363.085.674,50	680.019.903,72	(316.934.229,22)	(87,29)
8.1.08.08	Beban Penyusutan Properti Investasi	58.907.365,00	-	58.907.365,00	100,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI	**5.232.175.179.880,48**	**5.039.278.188.328,09**	**192.896.991.552,39**	**3,69**
8.2	**BEBAN TIDAK TERDUGA**				
8.2.01	Beban Tidak Terduga	5.182.916.341,30	-	5.182.916.341,30	
	JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA	**5.182.916.341,30**	**-**	**5.182.916.341,30**	
8.3	**BEBAN TRANSFER**				
8.3.01	Beban Bagi Hasil	1.137.456.024.500,00	1.077.505.625.075,00	59.950.399.425,00	5,27
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan	41.516.315.469,46	33.072.676.832,00	8.443.638.637,46	20,34
	JUMLAH BEBAN TRANSFER	**1.178.972.339.969,46**	**1.110.578.301.907,00**	**68.394.038.062,46**	**5,80**
	Beban Lain-lain	-	-	-	-
	JUMLAH BEBAN	**6.416.330.436.191,24**	**6.149.856.490.235,09**	**266.473.945.956,15**	**4,15**
	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	**139.118.938.564,12**	**305.821.851.096,53**	**(166.702.912.532,41)**	**(119,83)**
	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4.01	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	585.058.880,00	1.347.353.327,00	(762.294.447,00)	(130,29)
7.4.02	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-	-
7.4	**Jumlah Surplus Kegiatan Non Operasional**	**585.058.880,00**	**1.347.353.327,00**	**(762.294.447,00)**	**(130,29)**
8.4.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	8.754.284.281,44	6.090.109.804,12	2.664.174.477,32	30,43
8.4.02	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-	-
8.4	**Jumlah Desfisit Kegiatan Non Operasional-LO**	**8.754.284.281,44**	**6.090.109.804,12**	**2.664.174.477,32**	**30,43**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	**(8.169.225.401,44)**	**(4.742.756.477,12)**	**(3.426.468.924,32)**	**41,94**
	SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**130.949.713.162,68**	**301.079.094.619,41**	**(170.129.381.456,73)**	**(129,92)**
	POS LUAR BIASA				
7.5.01	Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-
8.5.01	Beban Luar Biasa	-	-	-	-
	JUMLAH POS LUAR BIASA	**-**	**-**	**-**	**-**
	SURPLUS/DEFISIT LO	**130.949.713.162,68**	**301.079.094.619,41**	**(170.129.381.456,73)**	**(129,92)**

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

5.LAPORAN ARUS KAS

TAHUN 2024

PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	2024 AUDITED	2023 AUDITED
1	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**		
2	**ARUS MASUK KAS**		
3	Penerimaan Pajak Daerah	2.338.112.925.264,00	2.236.722.695.545,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	382.306.933.091,49	16.049.240.433,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	122.018.602.181,00	117.084.599.941,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Syah	99.540.098.449,71	413.570.911.966,68
7	Penerimaan Perimbangan- Dana Bagi Hasil	196.436.458.000,00	186.817.960.171,00
8	Penerimaan Perimbangan Dana Alokasi Umum	2.146.789.947.987,00	1.989.337.430.162,00
9	Penerimaan Perimbangan Dana Alokasi Khusus	1.139.840.043.552,00	1.252.271.634.806,00
10	Penerimaan Dana Penyesuaian/DID	13.249.284.000,00	8.621.025.000,00
11	Penerimaan Hibah	14.294.794.000,00	14.341.915.500,00
12	Penerimaan Lainnya	29.244.538.000,00	27.713.670.000,00
13	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
14	**Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 13)**	**6.481.833.624.525,20**	**6.262.531.083.524,68**
15	**ARUS KELUAR KAS**		
16	Pembayaran Pegawai	2.490.554.904.931,00	2.195.331.447.151,00
17	Pembayaran Barang	1.803.917.885.970,85	1.964.366.347.631,35
18	Pembayaran Subsidi	1.500.000.000,00	-
19	Pembayaran Hibah	317.914.266.876,00	260.213.402.169,00
20	Pembayaran Bantuan Sosial	130.447.500,00	-
21	Pembayaran Tak Terduga	5.222.259.811,30	-
22	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Ke Kab/Kota	1.098.402.469.691,00	908.031.786.786,00
23	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota	-	-
24	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Kab/Kota	41.516.315.469,46	33.072.676.832,00
25	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
26	**Jumlah Arus Keluar Kas (16 s.d 25)**	**5.759.158.550.249,61**	**5.361.015.660.569,35**
27	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (14-26)**	**722.675.074.275,59**	**901.515.422.955,33**
28	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**		
29	**ARUS MASUK KAS**		
30	Penjualan atas Tanah	-	-
31	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	1.347.353.327,00
32	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
33	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
34	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	-	-
35	Penjualan atas Aset Lainnya	585.058.880,00	-
36	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
37	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	-	-
38	**Jumlah Arus Masuk Kas (30 s.d 37)**	**585.058.880,00**	**1.347.353.327,00**
39	**ARUS KELUAR KAS**		
40	PerolehanTanah	2.464.373.669,00	2.854.444.000,00
41	Perolehan Peralatan dan Mesin	189.146.437.545,00	306.440.774.536,00
42	Perolehan Gedung dan Bangunan	212.226.274.577,89	318.703.801.324,52
43	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	317.619.554.844,46	323.497.539.237,00
44	Perolehan Aset Tetap Lainnya	44.031.478.988,00	40.479.133.833,00
45	Perolehan Aset Lainnya	18.075.250,00	-

NO.	URAIAN	2024 AUDITED	2023 AUDITED
46	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
47	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
48	**Jumlah Arus Keluar Kas (40 s.d 47)**	**785.506.194.874,35**	**1.011.975.692.930,52**
49	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (38-48)**	**(784.921.135.994,35)**	**(1.010.628.339.603,52)**
50	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**		
51	**ARUS MASUK KAS**		
52	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	-	-
53	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-
54	**Jumlah Arus Masuk Kas (52 s.d 53)**	**-**	**-**
55	**ARUS KELUAR KAS**		
56	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-
57	Pemberian Pinjaman	-	-
58	**Jumlah Arus Keluar Kas (56 s.d 57)**	**-**	**-**
59	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (54-58)**	**-**	**-**
60	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS**		
61	**ARUS MASUK KAS**		
62	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	247.245.079.465,20	270.515.554.556,00
63	Penerimaan koreksi SiLPA	-	322.477.368,00
64	**Jumlah Arus Masuk Kas (62 s.d 63)**	**247.245.079.465,20**	**270.838.031.924,00**
65	**ARUS KELUAR KAS**		
66	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	247.245.079.465,20	270.515.554.556,00
67	Pengeluaran koreksi SiLPA	466.528.711,00	41.709.174,00
68	**Jumlah Arus Keluar Kas (66 s.d 67)**	**247.711.608.176,20**	**270.557.263.730,00**
69	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (63-67)**	**(466.528.711,00)**	**280.768.194,00**
70	**Kenaikan/Penurunan Kas (27+49+59+69)**	**(62.712.590.429,76)**	**(108.832.148.454,19)**
71	**Saldo Awal Kas di Kasda & Kas di Bendahara (72 s.d 78)**	**180.447.544.425,19**	**289.279.692.879,38**
72	Kas di Kas Daerah	148.044.084.493,35	220.852.557.928,75
73	Kas BLUD	30.888.069.226,84	38.788.664.902,63
74	Kas BOS	1.510.360.705,00	2.179.476.928,00
75	Kas Bendahara Pengeluaran	4.100.000,00	528.993.120,00
76	Kas Bendahara Penerimaan	930.000,00	-
77	Kas Lainnya	-	26.930.000.000,00
78	Koreksi Kasda	-	-
79	**Saldo Akhir Kas di Kasda & Kas di Bendahara (70 + 71)**	**117.734.953.995,43**	**180.447.544.425,19**
80	**Saldo Akhir Kas di Kasda & Kas di Bendahara (81 s.d 88)**	**117.734.953.995,43**	**180.447.544.425,19**
81	Kas di Kas Daerah	88.147.677.797,12	148.044.084.493,35
82	Kas BLUD	28.036.491.064,00	30.888.069.226,84
83	Kas BOS	-	1.510.360.705,00
84	Kas Bendahara Pengeluaran	323.138.845,31	4.100.000,00
85	Kas Bendahara Penerimaan	5.600.000,00	930.000,00
86	Kas Lainnya	-	-
87	Setara Kas	-	-
88	Kas Dana BOSP	1.222.046.289,00	-
89	**Jumlah Kas Per 31 Desember 2023/2022 (76)**	**117.734.953.995,43**	**180.447.544.425,19**

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

6.LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TAHUN 2024

PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	2024 AUDITED	2023 AUDITED
1	Ekuitas Awal	11.698.383.180.031,40	11.505.410.775.094,10
2	Surplus/Defisit-LO	130.949.713.162,68	301.079.094.619,41
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(32.381.928.641,89)	(108.106.689.682,09)
	KOREKSI TAMBAH	**415.690.225.713,54**	**361.061.125.033,00**
a	Koreksi Aset Lancar	96.297.145.207,74	116.424.435.199,87
b	Koreksi Piutang dan Penyisihan Piutang	8.350.473.870,81	33.910.540.133,39
c	Koreksi Investasi Jangka Panjang	70.663.192.237,48	72.483.801.902,71
d	Koreksi Aset Tetap	54.077.941.240,26	137.689.589.172,30
e	Koreksi Aset Lainnya	91.719.680.247,47	19.603.789,29
f	Koreksi Kewajiban Jangka Pendek	2.344.222.805,78	533.154.835,44
g	Koreksi Kewajiban Jangka Panjang	92.237.570.104,00	-
	KOREKSI KURANG	**(448.072.154.355,43)**	**(469.167.814.715,09)**
a	Koreksi Aset Lancar	(342.082.569.257,98)	(322.708.127.213,79)
b	Koreksi Piutang dan Penyisihan Piutang	(1.239.647.270,45)	(79.979.588,00)
c	Koreksi Investasi Jangka Panjang	-	(1.287.000,00)
d	Koreksi Aset Tetap	(40.023.283.061,89)	(129.220.431.705,22)
e	Koreksi Aset Lainnya	(25.328.798.590,72)	(8.343.280.174,08)
f	Koreksi Kewajiban Jangka Pendek	(39.397.856.174,39)	(8.814.709.034,00)
g	Koreksi Kewajiban Jangka Panjang	-	-
4	**Ekuitas Akhir (1+2+3)**	**11.796.950.964.552,20**	**11.698.383.180.031,40**

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

7.CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2024

PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA BARAT

BAB 1. PENDAHULUAN

PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA BARAT

BAB I
PENDAHULUAN

1.2. I.1 Informasi Umum

Dalam rangka mencapai visi Provinsi Sumatera Barat yaitu ***"TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI, UNGGUL DAN BERKELANJUTAN"*** maka pada Tahun 2024 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2024 tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. Selain itu dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dimana didalam kedua regulasi tersebut yang mengamanatkan bahwa penyusunan perencanaan program dan kegiatan Tahun 2024 menggunakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang diatur dalam Permendagri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas.

Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan perubahan RKPD Tahun 2024 melalui Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Berdasarkan Peraturan tersebut dijelaskan arah kebijakan perubahan RKPD 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2024;
2. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil daripada kegiatan;
3. Penyesuaian pendapatan baik dana transfer maupun PAD, pemanfaatan Silpa berdasarkan hasil audit laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 oleh BPK;
4. Mengakomodir kewajiban kebijakan anggaran yang belum terpenuhi pada penyusunan APBD Tahun 2024 seperti Silpa yang besifat earmark;
5. Rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan basca bencana yang terjadi di Sumatera Barat terutama pada perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana infrastruktur;
6. Evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan II Tahun 2024.

Berdasarkan dokumen RKPD tersebut diatas, kemudian dijabarkan lagi kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yaitu Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Tahun 2024 sesuai dengan Nota Kesepakatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 120-131-GSB/2023, Nomor 120-5-2023 dan Nomor 120-55/GSB-2024 Nomor 120-6-2024 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Nomor 120-9-2023, Nomor 120-156/GSB-2023 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2024 dengan Nota Kesepakatan Nomor 120-9-2024, Nomor 120-156/GSB-2024, dengan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK);
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan infrastrukstur yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas..

I.2. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebagai bentuk Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dimana didalam Permendagri tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi kerja.

Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

   Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran

   Lebih Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

3. Neraca

   Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

   Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

   Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

   Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

   CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2024 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/ penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/ penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2024.

1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

3. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi, yang mengakomodir Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2021 berupa pernyataan nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi dan pernyataan nomor 17 Properti Investasi.
4. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.

LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 merupakan hasil konsolidasi dari Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014; dan

13. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2024 meliputi hal-hal berikut:

1. Kebijakan keuangan, ekonomi makro dan pencapaian target kinerja APBD;
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;
3. Kebijakan akuntansi;
4. Penjelasan pos-pos laporan keuangan; dan
5. Penjelasan informasi-informasi non keuangan lainnya.

BAB II.
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA BARAT

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Kondisi Ekonomi Makro

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, Prioritas pembangunan Tahun 2024 merupakan penjabaran secara lebih operasional terhadap Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, dan juga hasil penyelarasan dengan Prioritas Nasional, dengan titik berat pada penyelesaian masalah–masalah yang mendesak dan berdampak luas bagi kesejahteraan. Dampak yang masih tersisa dari terjadinya wabah covid-19,isu-isu global seperti konflik yang terjadi diberbagai belahan dunia, resesi yang diprediksi disebabkan adanya krisi pangan.krisis energi hingga kenaikan harga bahan pokok merupakan hal yang menjadi perhatian bagi pemerintah khususnya provinsi Sumatera Barat dalam menetapkan rencana kerja pemerintah di Tahun 2024, sehingga RKPD Tahun 2024 di tujukan pada upaya menjagapertumbuhan ekonomi tetap berada pada trend positif, memastikan upaya pencapaian pembangunan dapat tetap berkesinambungan, terencana dengan baik sesuai dengan koridor target pembangunan jangka menengah agar dapat tercapai dengan tepat waktu. Untuk itu maka 7 (tujuh) Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 tetap dipertahankan menjadi Tujuh Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Tahun 2024. Hal tersebut sekali lagi di lakukan sebagai upaya menjaga kesinambungan RKPD dengan RPJMD,serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan untuk mengawal pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 terdiri dari :

1. Prioritas Pembangunan 1 yakni Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat,Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing;
2. Prioritas Pembangunan 2 yakni Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah
3. Prioritas Pembangunan 3 yakni Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian,perkebunan, peternakan dan perikanan
4. Prioritas Pembangunan 4 yakni Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital
5. Prioritas Pembangunan 5 yakni Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan
6. Prioritas Pembangunan 6 yakni Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan
7. Prioritas Pembangunan 7 yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas

Dalam mendorong daya ungkit dari pencapaian masing-masing Prioritas Pembangunan tersebut maka terdapat 25 (dua puluh lima) Program Unggulan yang tetap dilanjutkan dan dipertajam pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Penajaman dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan program unggulan dilakukan dengan mekanisme *Clearing House*, yang bertujuan untuk menjamin tercapainya output program unggulan dan memastikan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat pada akhir periode RPMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2O26.

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan

dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Sumber pendanaan lain berasal dari peningkatan partisipasi masyarakat, yaitu kebijakan, program pemerintah daerah yang didanai APBD yang dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.

Sejalan dengan dasar-dasar dan landasan pikir sebagai satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan nasional sebagai hal tersebut maka tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yakni :

"Transformasi Sektor Strategis yang inklusif dan berkelanjutan"

Adapun narasi penjelasan Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Transformasi ekonomi difokuskan pada 3 sektor strategis Sumatera Barat dengan istribusi PDRB terbesar yakni Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan dan Industri serta Sektor bagi penumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat yakni sektor Pariwisata.
2. Transformasi ekonomi yakni menggeser struktur ekonomi yang semula berbasis Komoditas,menjadi ekonomi berbasis investasi, produksi, dan pelayanan yang memiliki nilai tambah RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 tinggi guna meningkatkan daya saing perekonomian daerah serta peningkatan kualitas hidup masyarakat
3. Trasnformasi ekonomi diarahkan untuk peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang
4. Transformasi ekonomi merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan
5. Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan diarahkan pada :
   a. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, yang menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja
   b. Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan yang memastikan bahwa ekonomi yang tumbuh juga merata dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat
   c. Perluasan Akses dan Kesempatan yang memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap Pelayanan Dasar Minimal guna peningkatan kuallitas Sumber Daya Manusia.

Dengan demikian prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada Tahun 2024 akan lebih difokuskan pada pencapaian Tema Pembangunan tersebut, dengan tetap tidak mengabaikan :

1. upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tetap dilakukan secara bertahap dan menjaga agar berada pada tren positif yang diikuti dengan adanya pemerataan pembangunan ekonomi yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat serta tetap waspada terhadapdampak akibat dari isu resesi ekonomi dengan fokus mengupayakan penanganan pada kemungkinan kenaikan lonjakan harga komoditas pangan.

2. mendukung secara maksimal penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah secara serentak.
3. pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana amanat pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
4. pencapaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
5. pencapaian terhadap target kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021-2026.

Indikator makro pada Tahun 2024 merupakan indikator kinerja utama Gubernur yang menjadi alat ukur ketercapaian visi dan misi sebagai periode keempat RPJMD Tahun 2021-2026. Capaian indikator makro pembangunan Sumatera Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 menggambarkan kinerja aspek pembangunan manusia yang diwakili oleh indikator Indeks Pembangunan Manusia dan aspek Pembangunan Ekonomi yang diwakili oleh indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, dan Tingkat Kemiskinan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Target dan Realisasi Indikator Makro Daerah Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024		Realisasi 2024 Trw I - II	Ket
		(RPJMD)	(RKPD-P)		
1.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	73,62	74,25	75,64	(2023)
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,60	4,9-5,3	4,37	(tw 1,2024)
3.	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	6,31	5,60 - 5,80	5,79	(feb 2024)
4.	Gini Ratio (Poin)	0,293	0,290	0,283	(maret 2023)
5.	Kemiskinan (%)	6,03	5,45 - 5,85	5,97	(maret 2024)

Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026,
Pergub Nomor 18 Tahun 2023 ttg RKP 2024 &
Publikasi BPS Sumatera Barat Tahun 2022-2023

1. Indeks Pembangunan Manusia;

   Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia dalam suatu wilayah berdasarkan tiga dimensi utama yang meliputi dimensi kesehatan yang mencakup angka harapan hidup, dimensi pendidikan yang meliputi rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah serta dimensi standar layak hidup yang dilihat dari pendapatan perkapita yang disesuaikan dengan daya beli. Jika dilihat dari data pada tabel diatas, realisasi IPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah sebesar 75,64 (kondisi 2023) lebih tinggi 1,39 point dibandingkan target pada Perubahan RKPD. Peningkatan IPM ini dikarenakan semua komponen pembentuk IPM Sumatera Barat mengalami peningkatan selama Tahun 2024.Perkembangan Indikator IPM Provinsi Sumatera Barat juga menunjukan hasil menggembirakan jika

disandingkan dengan capaian nasional, dimana selalu meningkat dari tahun ke tahun diatas rata-rata nasional yang hanya 74,39 point.

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi;
   Untuk laju pertumbuhan ekonomi jika dilihat dari data BPS pada triwulan I Tahun 2024, perekonomian Provinsi Sumatera Barat baru tumbuh diangka 4,37% berada dibawah target yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun Perubahan RKPD Tahun 2024 yang berada di kisaran 4,6 s/d 5,3% hal ini disebabkan karena komponen dari sisi sisi ekspor turun cukup signifikan pada Triwulan I-2024 tersebut, pressure ekspor masih berlanjut akibat menurunnya permintaan komoditas utama ekspor, terutama CPO dan karet,sementara itu peningkatan Impor didorong kenaikan volume impor dan harga minyak dunia.

3. Tingkat Pengangguran terbuka;
   Sektor ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dalam sektor ini akan terlihat kualitas sumber daya manusia sekaligus pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
   Dalam pembahasan ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang relevan dalam melihat pencapaian tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dimana semakin turun tingkat pengangguran mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia karena diasumsikan pendapatan rumah tangga yang meningkat.
   Pada Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, telah diproyeksikan target TPT berada dikisaran adalah 5,6 s/d 5,80%, sementara data terakhir dalam Berita Resmi Statistik (BRS) menunjukkan bahwa pada Bulan Februari 2024 TPT Provinsi Sumatera Barat berada pada angka 5,79% jauh berkurang bila dibandingkan dengan Bulan Februari 2023 pada angka 5,90%. Pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020 yang meningkatkan jumlah pengangguran baru yang terlihat pada angka pengangguran bulan Agustus 2020 yang mencapai 6,88%, mampu ditekan hingga turun ke angka 6,17% pada bulan Februari 2022, 5,90% pada Bulan Februari 2023 dan terus berkurang ke angka 5,79% di bulan Februari 2024. angka pengangguran ini relatif masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka pengangguran sebelum pandemi yang berada pada kisaran 5,25%. Persiapan Ramadhan dan lebaran meningkatkan aktivitas perekonomian pada berbagai sektor ekonomi untuk menyambut diaspora Sumatera Barat. Perbaikan ekonomi masyarakat akan menurunkan angka pengangguran. Angka TPT Sumatera Barat yang pada Bulan Februari 2024 berada pada angka 5,79% diprediksi akan terus membaik seiring dengan kembali pulihnya beberapa lapangan usaha akibat pandemi.

4. Gini Ratio;
   Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi/mendekati angka satu, menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Pada Maret 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Barat yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,283. Angka ini naik jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,280. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,310, naik sebesar 0,005 poin dibandingkan Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,305. Sementara itu, Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,228, atau turun sebesar 0,004 poin dibanding angka Maret 2023 sebesar 0,232.
   Pada Maret 2024, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 23,61 persen, artinya pengeluaran penduduk berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.
   Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 22,28 persen, sedangkan perdesaaan mencatat angka yang lebih tinggi, yaitu sebesar 26,07 persen. Artinya, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan di Sumatera Barat termasuk dalam

kategori ketimpangan rendah. Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Sumatera Barat bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode Maret 2023–Maret 2024, diantaranya adalah:

1. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) di Sumatera Barat tercatat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk naik sebesar 4,89 persen. Persentase kenaikan terbesar berada di kelompok 20 persen teratas (sebesar 5,85 persen), pada kelompok 40 persen terbawah tercatat kenaikan sebesar 4,33 persen dan pada kelompok 40 persen menengah naik sebesar 4,22 persen. Hal ini sedikit banyak menjelaskan fenomena angka Gini Ratio di Sumatera Barat yang naik pada Maret 2024 menjadi sebesar 0,283.
2. Di daerah perkotaan, kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan mengalamipertumbuhan positif sebesar 5,59 persen, artinya rata-rata pengeluaran penduduk di daerah perkotaan mengalami kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya dari periode Maret 2023 ke Maret 2024. Secara berturut-turut, penduduk kelompok 40 persenterbawah mengalami kenaikan sebesar 4,70 persen, penduduk kelompok 40 persen menengah mengalami kanaikan sebesar 4,22 persen, dan penduduk kelompok 20 persen teratas tercatat terjadi kenaikan sebesar 7,22 persen.
3. Di perdesaan, terjadi pola yang sama. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,35 persen untuk periode Maret 2023 ke Maret 2024. Penduduk kelompok 40 persen terbawah mengalami kenaikan sebesar 4,09 persen, kelompok 40 persen menengah mengalami kenaikan sebesar 3,59 persen, dan 20 persen teratas mengalami kenaikan sebesar 2,50 persen

5. Kemiskinan;

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun ke tahun terus mengupayakan program dan kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan. Dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, telah ditetapkan target Tingkat Kemiskinan diproyeksi pada 5,62%. Pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020 telah meningkatkan jumlah penduduk miskin dari 344,23 ribu pada Maret 2020 menjadi 364,79 ribu pada bulan September 2020. Berbagai kebijakan pemulihan ekonomi yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah membuat jumlah penduduk miskin terus berkurang hingga menjadi 343,82 ribu jiwa pada Bulan September 2022 dan menjadi 340,37 ribu jiwa pada bulan Maret tahun 2023. Angka kemiskinan Sumatera Barat pada Bulan September 2022 tercatat berada pada angka 6,04% relatif sama dengan angka kemiskinan di tahun 2021 dan menyentuh angka 5,95% pada kondisi Maret 2023. Angka ini diprediksi akan terus membaik seiring dengan kembali pulihnya beberapa lapangan usaha akibat pandemi. Perbaikan ini diprediksi cenderung lebih lambat dari pada target awal dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, sehingga angka 5,62% harus terkoreksi menjadi 5,45% - 5,85% berdasarkan hasil analisis Pemerintah Daerah.Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat, bahwa pada bulan Maret 2024, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Sumatera Barat mencapai 345,73 ribu orang (**5,97** persen), bertambah sebesar 5,36 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 yang sebesar 340,37 ribu orang. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2023 sebesar 4,67 persen naik menjadi 4,72 persen pada Maret 2024. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2023 sebesar 7,23 persen naik menjadi 7,28 persen pada Maret 2024.

Dalam upaya mendukung arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah telah dilaksanakan singkronisasi kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Kebijakan umum anggaran yang dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD sebagai bagian dari upaya membangun komitmen bersama dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya

Kebijakan-kebijakan ini akan dijadikan sebagai dasar dan panduan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2024.

2.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola, yang dimulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Kebijakan Umum pengelolaan Keuangan Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah;
2. Fungsi APBD antara lain yakni otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi; dan
3. Prinsip-prinsip penganggaran diantaranya terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Selanjutnya dalam kedua peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa dalam penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Kebijakan Pemerintah Daerah pada KUA 2024 terintegrasi pada tema Renxcana Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yakni transformasi sektor strategis yang inklusif dan berkelanjutan yang berfokus pada 3 sektor strategis dengan distribusi PDRB terbesar yakni sektor pertanian, perdagangan dan industri serta sektor pariwisata.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Tahun 2024 ditujukan pada upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-

sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kebijakan sbb :

1. Pendapatan Asli Daerah ;

   a. Penganggaran pajak daerah:
      Penetapan target pajak daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah di provinsi serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.
   b. Penganggaran retribusi daerah:
      Penetapan target retribusi daerah didasarkan pada data potensi retribusi daerah di provinsi serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.
   c. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
      Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
         1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
         2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
         3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangku tan;
         4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/ atau peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;
   d. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah;
      Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah akan mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2. Pendapatan Transfer
   Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Penganggaran pendapatan transfer Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
   Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

Terkait dengan kebijakan tersebut maka dalam Tahun 2021-2026 strategi dalam upaya peningkatan kapasitas fiskal dalam upaya peningkatan pendapatan daerah adalah :

1. Mengoptimalkan kinerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) melalui :
   a. Mengembangkan pelaksanaan *Payment Point System* bekerjasama dengan Bank Nagari, dan Bank Pemerintah lainnya pada seluruh kantor SAMSAT di Sumatera Barat dalam rangka Peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak.
   b. Mengoperasikan Kantor SAMSAT di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kanto SAMSAT Nagari di seluruh Kabupaten yang mempunyai wilayah jauh dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada pemilik kendaraan bermonotor atau wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.
   c. Mengoperasikan Mobil Pelayanan SAMSAT Keliling untuk menjangkau pelayanan Pembayaran PKB/BBNKB ke daerah yang jaraknya jauh dari Kantor SAMSAT.
   d. Melakukan pembebasan Denda PKB/BBNKB untuk periode waktu tertentu.
   e. e. Melakukan pembebasan BBNKB II bagi Kendaraan Bermotor luar Provinsi Sumatera Barat untuk periode waktu tertentu.
   f. Melaksanakan Razia Terpadu PKB/BBNKB secara rutin dan berkesinambungan.
   g. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Dit Lantas Polda Sumatera Barat dan PT. Jasa Raharja dan melibatkan PT. Bank Nagari, dalam rangka kelancaran urusan pelayanan kepada masyarakat pada seluruh kantor SAMSAT se Provinsi Sumatera Barat.
   h. Meningkatkan kinerja pelayanan pada kantor UPT/SAMSAT dengan melakukan pemeliharaan dan perbaikan kantor UPT-UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat secara berkala dan bertahap dan melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan baik pelayanan *online* maupun pelayanan yang dilakukan secara *offline.*
   i. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada petugas terkait tentang tugas pelayanan dilapangan.
   j. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian secara rutin dan langsung terhadap semua tugas pada semua UPT.
   k. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka inventarisasi aset kendaraan bermotor yang menjadi Objek Pajaknya.
   l. Meningkatkan kualitas pemutakhiran data objek Pajak Kendaraan Bermotor melalui status objek pajak.
   m. Melaksanakan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan tugas-tugas dengan seluruh kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Melakukan pendataan potensi, evaluasi penerimaan dan melakukan kajian dalam upaya memprediksi kondisi ekonomi tahun berikutnya untuk menghitung penetapan target APBD tahun anggaran berikutnya.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu dengan mengimplementasi Teknologi Informasi pada seluruh OPD Dinas/Instansi pengelola pelayanan Retribusi serta menjaring potensi-potensi baru yang selama ini belum terpungut.
4. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pada kantor OPD Dinas/Instansi pelayanan Retribusi dengan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, melakukan pemeliharaan dan berbaikan kantor secara berkala, dan bertahap dan melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan.
5. Meningkatkan pelaksanaan *Good Coorporate Governance* (GCG) pada semua BUMD sehingga dapat memberikan peningkatan jumlah deviden kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

6. Mengoptimalkan aset-aset pemerintah daerah yg masih *idle* dan berpotensi sebagai sumber penerimaan dengan cara kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain sehingga memberikan konstribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
7. Meningkatkan kinerja dan pelayanan seluruh OPD Dinas/Instansi yang berkaitan dengan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terutama OPD Dinas/Instansi Pengelola BLUD, Pengelola Keuangan dan Kas Daerah, Pengelola Pelayanan Persampahan, Pengelola Pendidikan dan Pelatihan, Pengelola Pertanian dan Peternakan dan lain-lain sehingga dapat meningkatan penerimaan dan berkonstribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
8. Meningkatkan koordinasi, konfirmasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan penerimaan dari Dana Bagi Hasil.
9. Meningkatkan koordinasi dan konfirmasi dengan Pemerintah Pusat dan Pihak Swasta dalam rangka peningkatan penerimaan DID, IPDMIP, PHJD, Hibah dan lainnya serta sumbangan Pihak Ketiga.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan pengalokasian belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Belanja daerah Tahun 2024 disusun dengan menggunakan pendekatan :

1. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah;

   Dilaksanakan dengan menyusun perkiraan maju yang dilakukan secara bertahap.

2. Penganggaran terpadu;

   Berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

3. Penganggaran berbasis kinerja;

   Dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan serta efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Alokasi belanja diprioritaskan untuk membiayai program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah sesuai yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal.

Selanjutnya dalam Pasal 55 dan 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah dijelaskan bahwa klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Kebijakan Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/ uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN,belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/ jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan,
2) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) disesuaikan dengan formasi pegawai Tahun 2024. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai disusun dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta **ASN/PNS** dan PPPK dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
7) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
8) Penganggaran lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
2) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

3) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.
4) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya.
5) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk mengganggarkan pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.

c. **Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Belanja ini digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran,rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program,kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

d. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi digunakan untuk menanggarkan pemberian subsidi kepada **B**UMN/BUMD/ Badan Usaha Milik Swasta yang menghasilkan produk barang atau jasa agar harga dari produk barang atau jasa tersebut dapat terjangkau oleh masyarakat.Disamping itu belanja subsisi juga digunakan untuk menganggarkan pemberian subsidi bunga dan bagihasil kepada UMKM sesuai kewenangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merencanakan alokasi anggaran belanja Subsidi sebesar Rp. 6.500.000.000,00 yang diperuntukkan untuk subsidi bunga atas pemberian pinjaman kepada usaha kecil dan micro.

e. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

1) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dianggarkan dalam APSD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain.
2) Belanja Hibah secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
3) Peruntukan Belanja Hibah Tahun 2024 diarahkan untuk menunjang pencapaian sasaran program pemerintah daerah sebagaimana yang diatur oleh ketentuan yang berlaku;
4) Belanja hibah Tahun 2024 dialokasikan kepada Badan/ Lembaga yang wajib sebagaimana telah diatur oleh undang-undang, seperti KONI, Pramuka, PMI serta Sadan/ Lembaga yang telah memenuhi mekanisme penganggaran hibah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah.
5) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja

urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Santuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

B. Kebijakan belanja modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Untuk Aset Tetap memiliki kriteria yaitu:

1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
2) Digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah;
3) Batas minimal kapitalisasi asset;
4) Berwujud;
5) Biaya perolehan dapat diukur secara andal;
6) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
7) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Berdasarkan kriteria diatas, pada APBD Perubahan Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi yang meliputi aset tetap sebagai berikut:

1) Belanja modal tanah sebesar Rp2.478.117.620;
2) Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp223.905.542.378;
3) Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp254.114.942.168;
4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp332.313.610.530;
5) Belanja modal Aset tetap Lainnya sebesar Rp43.719.821.889.

Sedangkan untuk Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan Aset yang tidak memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset Lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

1) Dapat diidentifikasi;
2) Tidak mempunyai wujud fisik;
3) Dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
4) Dapat dikendalikan oleh entitas; dan
5) Memiliki manfaat ekonomi.

Untuk tahun 2024 belanja aset tetap lainnya dianggar sebesar Rp18.100.000,-

C. Kebijakan Belanja Transfer

Merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD yang terdiri dari :

a. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak yang menjadi kewenangan provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) serta Pajak Air Permukaan (PAP) kepada kabupaten /Kota diwilayah Provinsi Sumatera Barat.
2) Penganggaran Belanja Bagi Hasil pajak provinsi ke kabupaten/kota didasarkan kepada target penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024 dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
3) Dianggarkan ke dalam Belanja Transfer dan dikelola oleh SKPD selaku PPKD.

Terkait belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota tersebut pada APBD Perubahan Tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp1.249.538.837.389,00.

b. Belanja Bantuan Keuangan (BKK)

1. Bantuan keuangan kepada Kabupaten/kota yang bersifat khusus (*specific grant*) digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan sesuai dengan usulan pemerintah yang menjadi kewenangannya.
2. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus merupakan Bantuan Keuangan yang diberikan oleh pemerintah provinsi yang peruntukannya sudah ditentukan oleh pemberi bantuan. Kegiatan yang dibiayai dari BKK adalah kegiatan yang menjadi prioritas bagi penerima bantuan dan pemerintah daerah tersebut tidak memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk membiayai kegiatan tersebut.
3. Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus kepada kabupaten/kota lebih diarahkan kepada kegiatan yang bersifat barang modal (Belanja modal) yang pada intinya menambah aset bagi daerah penerima bantuan keuangan.

Berdasarkan kebijakan tersebut maka pada APBD Perubahan Tahun 2024 besaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp47.646.100.000,00.

D. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

1. Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
2. Alokasi Belanja Tidak Terduga tersebut diperuntukkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta mendanai tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial serta mendanai kegiatan yang bersifat mendesak yang kriterianya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penganggaran Belanja Tidak Terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya, dan memperhatikan kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi seperti

penanganan tanggap darurat dan pengeluaran mendesak yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan kebijakan tersebut maka pada APBD Perubahan Tahun 2024 besaran Belanja Tak Terduga sebesar Rp10.487.887.909,00.

E. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksud untuk menutupi defisit anggaran atau pemanfaatan dari surplus anggaran pada APBD.

a. **Kebijakan penerimaan pembiayaan untuk Tahun 2024**

1. Penerimaan pembiayaan yaitu semua penerimaan yang akan dibayarkan kembali baik dalam tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan terdiri dari:
   a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu;
   b. Pencairan dana cadangan; dan
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
2. Dalam KUA-PPAS Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hanya menganggarkan sumber penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu dengan alokasi diperkirakan sebesar Rp251.444.175.049,00.
3. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu tersebut sudah didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun 2024, dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu yang direncanakan.

b. Kebijakan pengeluaran pembiayaan untuk Tahun 2024

1. Pengeluaran pembiayaan yaitu semua pengeluaran yang akan diterima kembali dalam tahun anggaran berjalan maupun dalam tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:
   a. Pembentukan dana cadangan;
   b. Penyertaan modal pemerintah daerah;
   c. Pembayaran pokok hutang; dan
   d. Pemberian pinjaman daerah;
2. Dalam KUA-PPAS Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menganggarkan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal yang diperkirakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 yang diperuntukkan bagi penyertaan modal kepada Bank Nagari.
3. Kebijakan penyertaan modal ini dilakukan dalam rangka memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus penyertaan modal kepada Bank Nagari juga dapat diarahkan untuk modal inti guna memenuhi rasio kecukupan modal yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

2.3. Kebijakan Umum Keuangan Daerah Pada Perubahan 2024

Dalam rangka menghadapi dinamika pembangunan dan kondisi ekonomi daerah serta nasional yang dinamis, penyesuaian kebijakan keuangan daerah dengan

perkembangan terkini, memastikan efisiensi pengelolaan anggaran, serta meningkatkan efektivitas program dan kegiatan pembangunan dengan arah kebijakan yang tepat merupakan hal mutlak yang harus dilakukan untuk memastikan kinerja keuangan daerah semakin optimal dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Serangkaian kebijakan diambil beserta langkah-langkah terpadu sebagai respons terhadap perkembangan yang terjadi sepanjang tahun anggaran berjalan, termasuk capaian realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Terkait ha;l tersebut maka arah kebijakan umum keuangan daerah pada perubahan 2024 diarahkan kepada :

1. Penyesuaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2024;
2. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil daripada kegiatan.
3. Penyesuaian pendapatan baik dana transfer maupun PAD, pemanfaatan Silpa berdasarkan hasil audit laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 oleh BPK.
4. Mengakomodir kewajiban kebijakan anggaran yang belum terpenuhi pada penyusunan APBD Tahun 2024 seperti Silpa yang bersifat *earmark*.
5. Rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan basca bencana yang terjadi di Sumatera Barat terutama pada perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana infrastruktur.

2.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

A. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun 2024

Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, Perubahan Pendapatan Daerah terjadi hampir di setiap Jenis Pendapatan. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan Kondisi Makro Masyarakat, Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, Realisasi Penerimaan Pendapatan tahun sebelumnya, dan Realisasi Penerimaan hingga Semester I Tahun 2024.

Selain itu, perubahan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 juga dipengaruhi oleh kejadian bencana yang banyak terjadi dan melanda Provinsi Sumatera Barat pada Semester I Tahun 2024. Peristiwa -peristiwa bencana tersebut menumbuhkan empati dan kepedulian dari beberapa daerah di Indonesia. Beberapa Provinsi dan daerah kabupatan/Kota berkontribusi dalam memberikan bantuan yang disalurkan dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

B. Perubahan Target Pendapatan Daerah

Perubahan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Daerah secara total pada APBD Perubahan Tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp6.857.294.152.520,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp270.717.934.620,00 atau 3,84% dari alokasi APBD sebesar Rp7.037.741.696.945,19. Kenaikan pendapatan daerah tersebut berasal dari kenaikan pendapatan asli daerah serta pendapatan transfer. Secara lebih rinci proyeksi pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada APBD Perubahan 2024

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG / BERTAMBAH	%
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)		
	PENDAPATAN DAERAH	**6 .586.576.217.900,00**	**6.857.294.152.520,00**	**70.717.934.620,00**	4,11
I.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**3.118.242.050.900,00**	**3.342.769.899.590,00**	**224.527.848.690,00**	7,20
1	Pajak Daerah	2.554.336.907.537,00	2.693.451.041.456,00	139.114.133.919,00	5,45
2	Retribusi Daerah	384.295.538.231,00	414.280.722.633,00	29.985.184.402,00	7,80
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	125.495.605.132,00	129.624.977.090,00	4.129.371.958,00	3,29
4	Lain-lain PAD yang Sah	54.114.000.000,00	105.413.158.411,00	51.299.158.411,00	94,80
II.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.451.310.167.000,00**	**3.497.500.252.930,00**	**46.190.085.930,00**	1,34
1,1,00	**Transfer Pemerintah Pusat**	**3.422.903.367.000,00**	**3.466.843.452.930,00**	**43.940.085.930,00**	1,28
1	a. Dana Perimbangan	3.415.221.261.000,00	3.453.594.168.930,00	38.372.907.930,00	1,12
	- DBH	157.689.284.000,00	196.062.191.930,00	38.372.907.930,00	24,33
	- DAU	2.062.837.785.000,00	2.062.837.785.000,00	-	-
	- DAK Fisik	253.614.707.000,00	253.614.707.000,00	-	-
	- DAK Non Fisik	941.079.485.000,00	941.079.485.000,00	-	-
	b. DID	7.682.106.000,00	13.249.284.000,00	5.567.178.000,00	72,47
2	**Transfer Antar Daerah**	**28.406.800.000,00**	**30.656.800.000,00**	**2.250.000.000,00**	7,92
	- Bantuan Keuangan	28.406.800.000,00	30.656.800.000,00	2.250.000.000,00	7,92
III.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**17.024.000.000,00**	**17.024.000.000,00**	-	-
	Pendapatan Hibah	17.024.000.000,00	17.024.000.000,00	-	-
	- Sumbangan Pihak Ketiga	17.024.000.000,00	17.024.000.000,00	-	

Sumber : Pergub Nomor 20 Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat proyeksi pendapatan daerah pada APBD Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada APBD Perubahan Tahun 2024, Pendapatan Asli Daerah diperkirakan mengalami kenaikan Rp. 224.527.848.690 atau meningkat 7,20% dari perkiraan semula sebesar Rp 3.0118.242.050.000,00 menjadi Rp 3.342.769.899.590,00 Peningkatan tersebut diperkirakan berasal dari :

a. Pajak Daerah

Target Pajak Daerah pada APBD perubahan 2024 diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 5,45% atau sebesar Rp.139.114.133.919,00 dari anggaran semula sebesar Rp. 2.554.336.907.537,00 menjadi Rp.2.693.451.041.456,00. Kenaikan ini terlihat pada peningkatan pendapatan yang bersumber dari Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dari Rp. 689.300.000.460,00 menjadi Rp.893.928.065.344 atau naik sebesar 29,68%. Kenaikan tersebut diasumsikan terjadi seiring dengan pemulihan ekonomi global setelah periode resesi atau pandemi yang meningkatkan permintaan energi, termasuk minyak bumi. Aktivitas industri yang meningkat, perjalanan udara yang kembali normal, dan sektor transportasi yang pulih semuanya berkontribusi pada kenaikan permintaan minyak.Disamping itu Situasi geopolitik yang tidak

stabil, seperti ketegangan di Timur Tengah dan sanksi terhadap negara-negara produsen minyak, meningkatkan risiko gangguan pasokan, sehingga mendorong harga minyak naik. Kebijakan pemerintah berupa pengurangan /penghapusan subsidi Bahan Bakar Minyak mendorong peningkatan harga Bahan Bakar Minyak non subsidi sehingga pajak yang dipungut juga semakin besar. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat rasio Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari sektor pajak ini akan berbanding lurus, dimana semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka peningkatan PAD juga akan signifikan.

b. Retribusi Daerah
Retribusi daerah diperkirakan mengalami kenaikan pada APBD Perubahan Tahun 2024 sebesar 7,80% dari semula Rp.384.295.538.231,00 pada APBD awal menjadi sebesar Rp.414.280.722.633,00.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Jika dilihat pada APBD Tahun 2024 pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yaitu sebesar Rp125.495.605.132,00. pada APBD Perubahan menjadi Rp129.624.977.090,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp4.129.371.958,00 atau 3,29%. Hal ini didasari pertimbangan kemampuan BUMD yang semakin meningkat yang diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD dalam bentuk dividen.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Untuk penerimaan dari Lain-lain PAD Yang Sah pada APBD Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp54.114.000.000,00 diperkirakan mengalami kenaikan 94,80% menjadi Rp105.413.158.411,00 pada APBD Perubahan Tahun 2024. Adapun kenaikan tersebut diperkirakan berasal dari hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipishkan, hasi kerjasama daerah,pendapatan bunga deposito, jasa giro, pendapatan BLUD, denda pajak dan lain-lain pendapatan yang sah lainnya.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada APBD Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp3.451.310.167,00 mengalami kenaikan sebesar 1,34% pada APBD Perubahan menjadi Rp.3,497.500.252.930,00 atau naik sebesar Rp.46.190.085.930,00. peningkatan ini disebabkan adanya kenaikan terget penerimaan yang bersumber dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat yaitu :

- Dana Bagi Hasil dari semula sebesar RP.157.589.284.000,- naik 24,33% atau sebesar Rp.38.372.907.930,0 sehingga menjadi Rp.196.082.191.930,00. kenaikan ini bersumber dari penerimaan kurang bayar dan lebih DBH 2023 berdasarkan KMK Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran kurang bayar DBH dan Penyaluran Lebih Bayar DBH Tahun 2023.
- Dana Insentif Daerah (DID) dari semula Rp.7.682.106.000,- menjadi Rp.13.249.284.000,00 atau naik Rp.5.567.178.000,- atau sebesar 72,47%. kenaikan alokasi ini didasari oleh terbitnya KMK Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian alokasi insentif fiskal T.A 2024 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kelompok kategori kesejahteraan masyarakat

b. Pendapatan transfer antar daerah, dari semula Rp.28.406.800.000,- menjadi Rp.30.656.800.000 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.2.250.000.000,- yakni sebesar 7,92%. Kenaikan ini bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Provinsi Riau,Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Karimun yang ditujukan untuk bantuan penanganan bencana alam di Provinsi Sumatera Barat yang terjadi dalam Tahun 2024.

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada APBD Tahun 2024 adalah sebesar Rp.17.024.000.000,00 tidak mengalami perubahan pada Perubahan APBD Tahun 2024.

2.3.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam satu periode anggaran, dikelola secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada efektivitas dan efisiensi guna mendukung kesejahteraan masyarakat.Alokasi belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2024 diprioritaskan untuk membiayai program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan serta kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal.

Pada APBD Perubahan Tahun 2024, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp7.017.741.696.945,19 mengalami kenaikan sebesar Rp. 199.721.303.996,19 atau 2,93% dari anggaran semula sebesar Rp.6.818.020.392.949,00. Kenaikan Alokasi belanja tersebut terdistribusi pada komponen belanja operasi meliputi belanja barang dan jasa serta belanja hibah. Pada komponen belanja modal kenaikan terdistribusi pada semua objek belanja yaitu belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,jalan dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya, sementara di beberapa objek belanja mengalami penurunan.

1. Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Tahun 2024

Perubahan alokasi Belanja daerah pada belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer pada Perubahan APBD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Belanja Daerah pada APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG / BERTAMBAH	%
		APBD 2024 (Rp)	APBD-P 2024 (Rp)		
	BELANJA DAERAH				
I.	**BELANJA OPERASI**	**4.686.643.781.871,00**	**4.853.518.637.062,19**	**166.874.855.191,19**	3,56
1	Belanja Pegawai	2.596.150.706.205,00	2.588.514.014.191,16	(7.636.692.013,84)	(0,29)
2	Belanja Barang dan Jasa	1.808.037.125.332,00	1.935.171.371.802,03	127.134.246.470,03	7,03
3	Belanja Subsidi	6.500.000.000,00	1.500.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(76,92)
4	Belanja Hibah	275.955.950.334,00	328.202.803.569,00	52.246.853.235,00	18,93
5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	130.447.500,00	130.447.500,00	

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG / BERTAMBAH	%
		APBD 2024 (Rp)	APBD-P 2024 (Rp)		
II.	**BELANJA MODAL**	**782.793.429.669,00**	**856.550.234.585,00**	**73.756.804.916,00**	9,42
	Belanja Modal Tanah	271.009.860,00	2.478.117.620,00	2.207.107.760,00	814,40
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	223.075.772.338,00	223.905.542.378,00	829.770.040,00	0,37
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	246.546.952.450,00	254.114.942.168,00	7.567.989.718,00	3,07
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	272.132.130.340,00	332.313.610.530,00	60.181.480.190,00	22,11
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	40.733.064.681,00	43.719.921.889,00	2.986.857.208,00	7,33
	Belanja Modal Aset Lainnya	34.500.000,00	18.100.000,00	(16.400.000,00)	(47,54)
III.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**46.942.466.244,00**	**10.487.887.909,00**	**(36.454.578.335,00)**	(77,66)
	Belanja Tidak Terduga	46.942.466.244,00	10.487.887.909,00	(36.454.578.335,00)	(77,66)
IV.	**BELANJA TRANSFER**	**1.301.640.715.165,00**	**1.297.184.937.389,00**	**(4.455.777.776,00)**	(0,34)
1	Belanja Bagi Hasil	1.253.494.615.165,00	1.249.538.837.389,00	(3.955.777.776,00)	(0,32)
2	Belanja Bantuan Keuangan	48.146.100.000,00	47.646.100.000,00	(500.000.000,00)	(1,04)
	Jumlah Belanja	**6.818.020.392.949,00**	**7.017.741.696.945,19**	**199.721.303.996,19**	2,93

Sumber : Pergub Nomor 20 Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.3 diatas, dapat diuraikan proporsi belanja daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada APBD Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut:

a) Belanja Operasi

Secara keseluruhan Belanja Operasi pada APBD Perubahan Tahun 2024 mengalami kenaikan 3,56% atau sebesar Rp.166.874.855,191,19 dari alokasi awal sebesar Rp 4.686.643.781.871,00 menjadi Rp.4.853.518.637.062,19 yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai

   Alokasi Belanja Pegawai pada APBD Perubahan Tahun 2024 di proyeksikan sebesar Rp.2.588.514.014.191,16 turun 0,29% atau sebesar Rp.7.636.692.013,84 dibandingkan dengan alokasi pada APBD awal sebesar Rp.2.596.150.706.205,00. Objek Belanja Pegawai ini terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, 6Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dan Belanja Pegawai BLUD.

2. Belanja Barang dan Jasa

   Belanja Barang dan Jasa pada APBD Perubahan Tahun 2024 secara total mengalami peningkatan sebesar Rp127.134.246.470,03 atau 7,03% dari APBD Awal sebesar Rp1.808.037.125.332,00 menjadi Rp1.935.171.371.802,03 pada APBD Perubahan Tahun 2024. Kenaikan Belanja Barang dan Jasa ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

   a. Belanja Barang; diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 15,4% atau Rp48.244.128.255,70 dari semula Rp.312.373.652.728 menjadi Rp. 360.617.780.983,70;

b. Belanja Jasa; diproyeksikan turun sebesar Rp.30.381.332.657,67 atau 5,11% dari semula Rp.593.770.251.9098 menjadi Rp. 563.388.919.251,33

c. Belanja pemeliharaan mengalami peningkatan sebesar Rp4.114.620.156.00 atau 5,06% dari sebelumnya Rp.81.818.985.657,00 menjadi Rp. 85.933.605.813,00 pada perubahan APBD Tahun 2024;

d. Belanja Perjalanan dinas diproyeksikan turun sebesar Rp.4.781.080.256 atau 1,95% dari Rp.244.761.804.444,00 menjadi sebesar Rp.239.980.724,77 pada Perubahan APBD

e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat mengalami peningkatan sebesar Rp1.678.595.000,00 dari sebelumnya Rp.11.688.760.000,00 menjadi Rp.13.377.355.000,00 atau 14,34%;

f. Belanja barang dan jasa BOS mengalami peningkatan sebesar Rp30.143.503.805,00 dari sebelumnya Rp.246.263.842.396,00 menjadi Rp.276.407.346.201,00 atau naik 12,24%; dan

g. Belanja barang dan jasa BLUD mengalami peningkatan sebesar Rp78.115.812.178,00 dari sebelumnya Rp.317.349.828.198,00 menjadi Rp.395.465.640.376,00 atau 24,61%;

3. Belanja Hibah pada APBD Perubahan Tahun 2024 adalah sebesar Rp.328.202.803.569,00 mengalami penambahan sebesar Rp.52.246.853.235,00 atau 18,93%. dari anggaran semula sebesar Rp.275.955.950.344,00, kenaikan ini di proyeksikan untuk dialokasikan kepada Badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, dana BOS serta bantuan keuangan kepada partai politik.

4. Belanja Subsidi
   Belanja subsidi dialokasikan sebesar Rp6.500.000.000,00 dan pada APBD Perubahan Tahun 2024 turun Rp.5.000.000.000,- atau 76,92% sehingga menjadi Rp.1500.000.000,-. Penurunan besaran subsidi ini disebabkan belum efektifnya pelaksanaan pengelolaan subsidi sampai dengan triwulan ketiga 2024.

b) Belanja Modal

Belanja Modal pada APBD Perubahan Tahun 2024 mengalami kenaikan dari alokasi semula sebesar Rp.782.793.429.669,00 menjadi Rp.856.550.234.585,00 atau naik sebesar Rp.73.756.804.916,00 atau 9,42%.

c) Belanja Tidak Terduga

Alokasi Belanja Tidak Terduga semula pada APBD Tahun 2024 berjumlah Rp.46.942.466.244,00 turun menjadi Rp.10.487.887.909,00 turun 77,66% atau berkurang sebesar Rp.36.454.578.335,00 pada APBD Perubahan Tahun 2024. Pengurangan tersebut dikarenakan adanya realokasi kepada beberapa SKPD untuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana yang terjadi pada beberapa daerah di Sumatera Barat

d) Belanja Transfer

Belanja Transfer mengalami penurunan sebesar Rp4.455.777.776,00 atau 0,34% dari anggaran semula pada APBD Tahun 2024 Rp1.301.640.715.165,00 menjadi Rp.1.297.184.937.389,00 Pada APBD Perubahan Tahun 2024.

2.3.3 Perubahan Target Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Proyeksi target penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Proyeksi Penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada APBD Perubahan Tahun 2024

NO	URAIAN	APBD 2024 (Rp)	APBD PERUBAHAN 2024 (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
	Surplus/Defisit	**(231.444.175.049,00)**	**(160.447.544.425,19)**	**70.996.630.623,81**	**(30,68)**
I	**Penerimaan Pembiayaan**	**251.444.175.049,00**	**180.447.544.425,19**	**(70.996.630.623,81)**	**(28,24)**
1	SiLPA	251.444.175.049,00	180.447.544.425,19	(70.996.630.623,81)	(28,24)
II	**Pengeluaran Pembiayaan**	**20.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**	**-**	**-**
1	Penyertaan modal	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	-
	Pembiayaan Netto (I-II)	**231.444.175.049,00**	**160.447.544.425,19**	**(70.996.630.623,81)**	**(28,24)**
	SiLPA Tahun berkenaan (defisit-pembiayaan Netto)	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber: Pergub nomor 20 Tahun 2024

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada APBD Tahun Anggaran 2024 awal berasal dari Sisa Lebih Perhitrungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp. 251.444.175.049,-. Sesuai Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sumatera Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 Nomor 47.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 ditetapkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 180.447.544.425,19. Dengan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 audited tersebut, maka dilakukan penyesuaian terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024, sehingga SiLPA awal APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.251.444.175.049,-, pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp.180.447.544.425,-, atau mengalami penurunan 28,24% atau sebesar Rp.70.996.630.624,-.

Terhadap Proyeksi pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp.20.000.000.000,00 yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera barat kepada Bank Nagari.

Dari selisih proyeksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada APBD Perubahan Tahun 2024 seperti yang dikemukakan diatas, maka diperoleh pembiayaan neto yang berjumlah sebesar Rp.160.447.544.425,19

2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024 sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang

Perubahan APBD Tahun 2024 dapat digambarkan secara garis besar Anggaran dan Realisasi APBD Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2024

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**6.857.294.152.520,00**	**6.482.418.683.405,20**	**94,53**	**6.263.878.436.851,68**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**3.342.769.899.590,00**	**2.942.563.617.866,20**	**88,08**	**2.784.774.801.212,68**
4.1.01	Pajak Daerah	2.693.451.041.456,00	2.338.112.925.264,00	86,81	2.236.722.695.545,00
4.1.02	Retribusi Daerah	414.280.722.633,00	382.306.933.091,49	92,28	16.049.240.433,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	129.624.977.090,00	122.018.602.181,00	94,13	117.084.599.941,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	105.413.158.411,00	100.125.157.329,71	94,98	414.918.265.293,68
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.497.500.252.930,00**	**3.525.560.271.539,00**	**100,80**	**3.464.761.720.139,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.466.843.452.930,00	3.496.315.733.539,00	100,85	3.437.048.050.139,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.656.800.000,00	29.244.538.000,00	95,39	27.713.670.000,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**17.024.000.000,00**	**14.294.794.000,00**	**83,97**	**14.341.915.500,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	17.024.000.000,00	14.294.794.000,00	83,97	14.341.915.500,00
5	**BELANJA DAERAH**	**7.017.741.696.945,19**	**6.524.664.745.123,96**	**92,97**	**6.352.991.353.501,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**4.853.518.637.062,19**	**4.614.017.505.277,85**	**95,07**	**4.419.911.196.952,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	2.588.514.014.191,16	2.490.554.904.931,00	96,22	2.195.331.447.151,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.935.171.371.802,03	1.803.917.885.970,85	93,22	1.964.366.347.632,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	-
5.1.05	Belanja Hibah	328.202.803.569,00	317.914.266.876,00	96,87	260.213.402.169,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	130.447.500,00	130.447.500,00	100,00	-
5.2	**BELANJA MODAL**	**856.550.234.585,00**	**765.480.831.680,35**	**89,37**	**991.975.692.931,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.478.117.620,00	2.464.373.669,00	99,45	2.854.444.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	223.905.542.378,00	189.121.074.351,00	84,46	306.440.774.536,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	254.114.942.168,00	212.226.274.577,89	83,52	318.703.801.325,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	332.313.610.530,00	317.619.554.844,46	95,58	323.497.539.237,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	43.719.921.889,00	44.031.478.988,00	100,71	40.479.133.833,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	18.100.000,00	18.075.250,00	99,86	-
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**10.487.887.909,00**	**5.222.259.811,30**	**49,79**	**-**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.487.887.909,00	5.222.259.811,30	49,79	-
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**1.297.184.937.389,00**	**1.139.918.785.160,46**	**87,88**	**941.104.463.618,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.249.538.837.389,00	1.098.402.469.691,00	87,90	908.031.786.786,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	47.646.100.000,00	41.516.315.469,46	87,13	33.072.676.832,00
	SURPLUS/DEFISIT	**(160.447.544.425,19)**	**(42.246.061.718,76)**	**26,33**	**(89.112.916.649,32)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**160.447.544.425,19**	**159.981.015.714,19**	**99,71**	**269.560.461.073,38**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**180.447.544.425,19**	**179.981.015.714,19**	**99,74**	**289.560.461.073,38**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	180.447.544.425,19	179.981.015.714,19	99,74	289.560.461.073,38
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**20.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**	**100,00**	**20.000.000.000,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**160.447.544.425,19**	**159.981.015.714,19**	**99,71**	**269.560.461.073,38**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**-**	**117.734.953.995,43**	**-**	**180.447.544.424,06**

2.4.1. Capaian Taget Kinerja Pendapatan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah secara umum dapat dilihat pada tabel 2.5 bahwa sampai dengan akhir Tahun 2024

realisasi pendapatan daerah mencapai Rp6.482.418.683.405,20 atau 94,53% dari target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp6.263.878.436.851,68 maka realisasi pendapatan Tahun 2024 ini mengalami kenaikan sebesar 3,37% atau sebesar Rp218.540.246.553,52. Capaian target pendapatan Tahun 2024 tersebut dapat dirinci berdasarkan sumber sebagai berikut :

- Realisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), mencapai Rp2.942.563.617.866,20 atau 88,03% dari target yang telah ditetapkan semula yaitu Rp.3.342.769.899.590,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun 2023 sebesar Rp2.784.774.801.212,68 maka dapat dilihat bahwa realisasi PAD Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp157.788.816.653,52 atau 5,36%.
- Pendapatan Transfer yang bersumber dari Dana Perimbangan yaitu transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah yang berasal dari bantuan keuanga, pada Tahun 2024 mencapai realisasi sebesar Rp3.525.560.271.593,00 atau 100,80% dari target yang di tetapkan pada perubahan APBD sebesar Rp3.497.500.252.930,00. Apabila dibanadingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp3.464.761.720.139,00, realisasi Tahun 2024 ini mengalami kenaikan sebesar Rp60.798.551.400,00 atau 1,72%, kenaikan pendapatan dari dana transfer ini disebabkan adanya dana tambahan TPP dan THR guru Tahun 2024 yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan KMK 416 Tahun 2024.
- Sedangkan realisasi pencapaian target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan akhir TA 2024 mencapai Rp14.294.794.000,00 atau 83,97% dari target yang diproyeksi sebesar Rp17.024.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp14.341.915.500,00 pencapaian Tahun 2024 turun 0,33% atau sebesar Rp47.121.500,00.

2.4.2. Capaian Target Kinerja Belanja Daerah

Penyusunan APBD Tahun 2024 dilaksanakan secara terintegtrasi dimana alokasi anggaran disesuaikan dengan perkiraan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu Tahun anggaran diformulasikan dan dilengkapi dengan indikator kinerja. Pada akhir tahun, program diukur dan dilaporkan hasil capaian sasarannya secara lengkap dan komprehensif. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada TA 2024 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026. Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, ditetapkan tujuh prioritas utama pembangunan daerah tahunan yang dijabarkan ke dalam fokus, program dan kegiatan pokok pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan pada 25 (dua puluh lima) program unggulan.

Adapun pencapaian Belanja Daerah sampai akhir Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp6.524.664.745.123,96 atau 92,97% dari target yang ditetapkan yaitu Rp7.017.741.696.945,19. Apabila dibandingkan dengan Kinerja Belanja Tahun 2023 sebesar Rp6.352.991.353.501,00 terlihat bahwa realisai Belanja Daerah Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp171.673.391.622,96 atau 2,63%.

Adapun rincian capaian target kinerja belanja menurut struktur urusan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, dijelaskan rinciannya pada **Lampiran 3**.

2.4.3. Capaian Target Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Realisasi Pembiayaan Daerah sampai dengan akhir Tahun 2024 sebagai berikut:

1) Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp179.981.015.714,19 atau 99,74% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp180.447.544.425,19. Nilai ini sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 sebesar Rp180.447.544.425,19 dari penyajian SiLPA pada laporan keuangan *audited* Tahun 2023 dikurangi dengan nadanya koreksi SiLPA sebesar Rp466.528.711,00 yang merupakan Kas BOS tahun lalu.
2) Realisasi Pengeluaran Pembiayaan, sampai dengan akhir Tahun 2024 yaitu sebesar Rp20.000.000.000,00 merupakan penambahan modal dan investasi daerah kepada Bank Pembangunan Sumatera Barat (Bank Nagari).

Adapun penggunaan pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran Tahun 2024 adalah sebesar Rp160.447.544.425,19 namun realisasinya pada pelaksanaan Tahun 2024 defisit sebesar Rp42.246.061.718,76. Hal ini dipengaruhi oleh realisasi pendapatan daerah yang tidak tercapai sebesar 5,47% dari anggaran yang ditetapkan dan realisasi belanja daerah yang berada 7,03% dibawah target anggaran serta realisasi penerimaan pembiayaan dibawah target yaitu sebesar 99,74% atau senilai Rp.179.981.015.714,19 Dari pembiayaan Netto yang digunakan untuk menutupi defisit didapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 sebesar Rp117.734.953.995,43 yang bersumber dari sisa dana Earmark atas penerimaan DAU Tambahan TPP/THR guru sesuai KMK Nomor 416 Tahun 2024,SiLPA kas BOS, Kas BLUD serta sisa dana bea siswa dari bunga deposito PT. Rajawali Tahun 2024 Rincian SiLPA sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 25.**

BAB III.
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA BARAT

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan penganggaran berbasis kas secara luas. Secara umum gambaran pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Adapun capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD Tahun 2024 secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Ringkasan Anggaran Dan Realisasi APBD
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**6.857.294.152.520,00**	**6.482.418.683.405,20**	**94,53**	**(374.875.469.114,80)**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**3.342.769.899.590,00**	**2.942.563.617.866,20**	**88,03**	**(400.206.281.723,80)**
4.1.01.	Pajak Daerah	2.693.451.041.456,00	2.338.112.925.264,00	86,81	(355.338.116.192,00)
4.1.02.	Retribusi Daerah	414.280.722.633,00	382.306.933.091,49	92,28	(31.973.789.541,51)
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	129.624.977.090,00	122.018.602.181,00	94,13	(7.606.374.909,00)
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	105.413.158.411,00	100.125.157.329,71	94,98	(5.288.001.081,29)
4.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.497.500.252.930,00**	**3.525.560.271.539,00**	**100,80**	**28.060.018.609,00**
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.466.843.452.930,00	3.496.315.733.539,00	100,85	29.472.280.609,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.656.800.000,00	29.244.538.000,00	95,39	(1.412.262.000,00)
4.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**17.024.000.000,00**	**14.294.794.000,00**	**83,97**	**(2.729.206.000,00)**
4.3.01.	Pendapatan Hibah	17.024.000.000,00	14.294.794.000,00	83,97	(2.729.206.000,00)
5.	**BELANJA DAERAH**	**7.017.741.696.945,19**	**6.524.664.745.123,96**	**92,97**	**493.076.951.821,23**
5.1.	**BELANJA OPERASI**	**4.853.518.637.062,19**	**4.614.017.505.277,85**	**95,07**	**239.501.131.784,34**
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.588.514.014.191,16	2.490.554.904.931,00	96,22	97.959.109.260,16
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.935.171.371.802,03	1.803.917.885.970,85	93,22	131.253.485.831,18
5.1.04.	Belanja Subsidi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.	Belanja Hibah	328.202.803.569,00	317.914.266.876,00	96,87	10.288.536.693,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	130.447.500,00	130.447.500.00	100,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
5.2.	**BELANJA MODAL**	**856.550.234.585,00**	**765.506.194.874,35**	**89,37**	**91.044.039.710,65**
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	2.478.117.620,00	2.464.373.669,00	99,45	13.743.951,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	223.905.542.378,00	189.146.437.545,00	84,48	34.759.104.833,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	254.114.942.168,00	212.226.274.577,89	83,52	41.888.667.590,11
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	332.313.610.530,00	317.619.554.844,46	95,58	14.694.055.685,54
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	43.719.921.889,00	44.031.478.988,00	100,71	(311.557.099,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	18.100.000,00	18.075.250,00	99,86	24.750,00
5.3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**10.487.887.909,00**	**5.222.259.811,30**	**49,79**	**5.265.628.097,70**
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	10.487.887.909,00	5.222.259.811,30	49,79	5.265.628.097,70
5.4.	**BELANJA TRANSFER**	**1.297.184.937.389,00**	**1.139.918.785.160,46**	**87,88**	**157.266.152.228,54**
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	1.249.538.837.389,00	1.098.402.469.691,00	87,90	151.136.367.698,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	47.646.100.000,00	41.516.315.469,46	87,13	6.129.784.530,54
	SURPLUS/DEFISIT	**(160.447.544.425,19)**	**(42.246.061.718,76)**	**26,33**	**(89.112.916.649,32)**
6.	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**160.447.544.425,19**	**159.981.015.714,19**	**99,71**	**(466.528.711,00**
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	180.447.544.425,19	179.981.015.714,19	99,74	(466.528.711,00)
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0,00**	**117.734.953.995,43**		**117.734.953.995,43**

Adapun realisasi belanja per urusan dan fungsi dapat pada pelaksanaan APBD Tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 13.

Selanjutnya dapat dijelaskan capaian kinerja dari setiap komponen APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai berikut:

3.1.1. Pendapatan

Dari hasil pelaksanaan Perubahan APBD Tahun 2024 diperoleh realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp6.482.418.683.405,20. Jumlah tersebut mencapai 94,53% dari jumlah pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp6.857.294.152.520,00. Realisasi tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp374.875.469.114,80. Secara rinci capaian perolehan pendapatan Tahun 2024 jika dibanding dengan realisasi Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Tahun 2024 dan Realisasi Tahun 2023

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
4.	**Pendapatan Daerah**	**6.857.294.152.520,00**	**6.482.418.683.405,20**	**94,53**	**6.263.878.436.851,68**
4.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**3.342.769.899.590,00**	**2.942.563.617.866,20**	**88,03**	**2.784.774.801.212,68**
4.1.01	Pajak Daerah	2.693.451.041.456,00	2.338.112.925.264,00	86,81	2.236.722.668.545,00
4.1.02	Retribusi Daerah	414.280.722.633,00	382.306.933.091,49	92,28	16.049.240.433,00

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	129.624.977.090,00	122.018.602.181,00	94,13	117.084.599.941,00
4.1.04.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	105.413.158.411,00	100.125.157.329,71	94,98	414.918.265.293,68
4.2.	**Pendapatan Transfer**	**3.497.500.252.930,00**	**3.525.560.271.539,00**	**100,80**	**3.464.761.720.139,00**
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.466.843.452.930,00	3.496.315.733.539,00	100,85	3.437.048.050.139,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.656.800.000,00	29.244.538.000,00	95,39	27.713.670.000,00
4.3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**17.024.000.000,00**	**14.294.794.000,00**	**83,97**	**14.341.915.500,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	17.024.000.000,00	14.294.794.000,00	83,97	14.341.915.500,00

Pada tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan seluruh komponen utama pendapatan daerah untuk Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah tidak ada yang melebihi target dari yang telah ditetapkan. Untuk Pendapatan Asli Daerah rata-rata terealisasi sebesar 88,03% yang terdiri dari pajak daerah sebesar 86,81%. sedangkan retribusi daerah hanya sebesar 92,28%. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya mencapai 94,13% serta lain-lain PAD yang sah sebesar 94,98%.

Sedangkan untuk Pendapatan Transfer pada Tahun 2024 tercapai sebesar 100,80% dari target yang ditetapkan, sedangkan untuk Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 83,97%.

Adapun Daftar Anggaran dan Realisasi Pendapatan per rincian objek per SKPD serta penjelasannya dapat dilihat pada Lampiran 2.

3.1.2. Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah**,** penyajian belanja dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer.

Pengertian dan maksud dari masing-masing jenis belanja dan transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu tahun anggaran);

3. Belanja Tak Terduga merupakan belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial (Pandemi Covid-19), pengembalian pendapatan tahun lalu dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah; dan
4. Transfer merupakan pengeluaran bagi hasil ke kabupaten/kota dan bantuan keuangan ke kabupaten/kota.

Adapun jumlah realisasi masing-masing jenis belanja dan pengeluaran dibanding anggarannya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2043 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
5.	**Belanja**	**7.017.741.696.945,19**	**6.524.664.745.123,96**	**92,97**	**6.352.991.353.499,87**
5.1.	**Belanja Operasi**	**4.853.518.637.062,19**	**4.614.017.505.277,85**	**95,07**	**4.419.911.196.951,35**
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.588.514.014.191,16	2.490.554.904.931,00	96,22	2.195.331.447.151,00
5.1.02.	Belanja Barang Dan Jasa	1.935.171.371.802,03	1.803.917.885.970,85	93,22	1.964.366.347.631,35
5.1.04.	Belanja Subsidi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.	Belanja Hibah	328.202.803.569,00	317.914.266.876,00	96,87	260.213.402.169,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	130.447.500,00	130.447.500.00	100,00	0,00
5.2.	**Belanja Modal**	**856.550.234.585,00**	**765.506.194.874,35**	**89,37**	**991.975.692.930,52**
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	2.478.117.620,00	2.464.373.669,00	99,45	2.854.444.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	223.905.542.378,00	189.146.437.545,00	84,48	306.440.774.536,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	254.114.942.168,00	212.226.274.577,89	83,52	318.703.801.324,52
5.2.04.	Belanja Modal Jalan,Irigasi Dan Jaringan	332.313.610.530,00	317.619.554.844,46	95,58	323.497.539.237,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	43.719.921.889,00	44.031.478.988,00	100,71	40.479.133.833,00
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	18.100.000,00	18.075.250,00	99,86	0,00
5.3.	**Belanja Tidak Terduga**	**10.487.887.909,00**	**5.222.259.811,30**	**49,79**	**0,00**
5.3.1.	Belanja Tidak Terduga	10.487.887.909,00	5.222.259.811,30	49,79	0,00
5.4.	**Belanja Transfer**	**1.297.184.937.389,00**	**1.139.918.785.160,46**	**87,88**	**941.104.463.618,00**
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	1.249.538.837.389,00	1.098.402.469.691,00	87,90	908.031.786.786,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	47.646.100.000,00	41.516.315.469,46	87,13	33.072.676.832,00

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat dilihat hanya 3 (tiga) belanja yang terealisasi sebesar 100% yaitu belanja subsidi, belanja bantuan sosial dan belanja modal aset tetap lainnya. Sedangkan komponen belanja yang lain rata-rata terealisasi dibawah 100%.

3.1.3. Pembiayaan Daerah

Pada APBD, selain komponen pendapatan dan belanja daerah juga terdapat komponen pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 sedangkan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada Bank Nagari.

Adapun secara umum gambaran umum pembiayaan daerah Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.4

Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024

kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	SURPLUS/DEFISIT	**(160.447.544.425,19)**	**(42.246.061.718,76)**	**26,33**	**(89.112.916.648,19)**
6.	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**160.447.544.425,19**	**159.981.015.714,19**	**99,71**	**269.560.461.073,38**
6.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**180.447.544.425,19**	**179.981.015.714,19**	**99,74**	**289.560.461.073,38**
6.1.01	Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	180.447.544.425,19	179.981.015.714,19	99,74	289.560.461.073,38
6.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**20.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**	**100,00**	**20.000.000.000,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**117.734.953.995,43**		**180.447.544.425,19**

Berdasarkan tabel diatas bahwa dapat dilihat bahwa anggaran dan realisasi pembiayaan daerah dari sisi penerimaan terealisasi sebesar 99,74% dan pengeluaran dapat memenuhi target 100%.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Jika dilihat dari persentase pelaksanaan masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2024 dibanding Tahun 2023 terjadi penurunan capaian realisasi keuangan yaitu sebesar 92,97% dibanding Tahun 2023 yang terealisasi sebesar 94,96% atau mengalami penurunan sebesar 1,99%. Selain itu pada Tahun 2024 terdapat 4 (empat) kali pergeseran anggaran dan 1 (satu) kali mengalami perubahan. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya adanya regulasi tentang petunjuk teknis pengelolaan dana alokasi khusus yang keluar setelah penetapan APBD, adanya penyelenggaraan kegiatan tingkat nasional, adanya pembayaran utang belanja dan lain-lain. Adapun hambatan dan permasalahan dalam pencapaian target kegiatan pada tahun 2024, dapat dilihat pada Lampiran 4.

BAB IV.
KEBIJAKAN AKUNTANSI

PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA BARAT

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 serta Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi, yang mengakomodir Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2021 berupa pernyataan nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi dan pernyataan nomor 17 Properti Investas. dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tatacara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam Tahun 2024 adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pengguna anggaran/barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas yang disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

Organisasi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berperan sebagai entitas akuntansi terdiri dari:

A DINAS

1	Dinas Pendidikan	14	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan PTSP
2	Dinas Kesehatan	15	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	16	Dinas Kebudayaan

4	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	18	Dinas Kelautan dan Perikanan
6	Dinas Sosial	19	Dinas Pariwisata
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik`
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
9	Dinas Pangan	22	Dinas Kehutanan
10	Dinas Lingkungan Hidup	23	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25	Dinas Koperasi dan UMKM
13	Dinas Perhubungan	26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

B BADAN

1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	Badan Pendapatan Daerah	7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia
4	Badan Penelitian dan Pengembangan	9	Badan Kepegawaian Daerah
5	Badan Penghubung		

C RUMAH SAKIT

1	RS. Ahmad Muchtar Bukittinggi	3	RSUD. M.Natsir Solok
2	RSUD Pariaman	4	RSJ PROF HB SAANIN

D SEKRETARIAT

1 Sekretariat DPRD

2 Sekretariat Daerah

a.	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	f.	Biro Perekonomian
b.	Biro Adm. Pembangunan	g.	Biro Kesejahteraan Rakyat
c.	Biro Hukum	h.	Biro Administasi Pimpinan

d. Biro Organisasi
e. Biro Umum
i. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

E LAINNYA

1 Inspektorat Daerah Provinsi
2 Satuan Polisi Pamong Praja

Sebagai entitas pelaporan, maka Laporan Keuangan yang disusun oleh SKPKD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari:

a. Laporan Realisasi APBD

Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah disusun merupakan gabungan dari seluruh Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan SKPKD sebagai PPKD/Bendahara Umum Daerah. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas untuk tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda.

- *Angka Realisasi Pendapatan* yang disajikan pada Laporan Realisasi APBD Tahun 2024 adalah menurut kelompok pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan selaku Bendahara Umum Daerah atas seluruh penerimaan uang yang masuk pada rekening Kas Daerah dan ditambah dengan realisasi pendapatan BLUD yang dikelola oleh 4 (empat) Rumah Sakit yaitu RSAM Bukittinggi, RSJ. HB. Sa'anin Padang, RSUD Solok dan RSUD Pariaman dan 1 (satu) Balai Kesehatan Indera dan Mata dan 1 (satu) Labor Kesehatan serta Rumah Sakit Paru pada Dinas Kesehatan serta SMK pada Dinas Pendidikan, realisasi pendapatan Hibah DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (Reguler, Afirmasi dan Kinerja) pada SKPKD/PPKD yang tidak melalui rekening kas daerah.
- *Angka Realisasi Belanja* yang disajikan pada Laporan Realisasi APBD Tahun 2024 berdasarkan kompilasi realisasi belanja seluruh SKPD, dimana pengguna anggaran bertanggung jawab atas seluruh pengeluaran yang dibelanjakannya. Sedangkan data realisasi pengeluaran kas daerah yang dikelola oleh Bidang Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Daerah berfungsi sebagai kontrol melalui rekonsiliasi dengan SKPD, dan ditambah dengan realisasi belanja BLUD yang dikelola oleh 4 (empat) Rumah Sakit. Empat rumah sakit tersebut adalah RSAM Bukittinggi, RSJ. HB. Sa'anin Padang, RSUD Solok dan RSUD Pariaman serta 1 (satu) Balai Kesehatan Indera dan Mata, dan 1 (satu) Labor Kesehatan serta Rumah Sakit Paru pada Dinas Kesehatan dan SMK pada Dinas Pendidikan. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal BOS (SLBN/SMAN/SMKN) pada Dinas Pendidikan yang tidak melalui rekening kas daerah.

- *Angka Realisasi Pembiayaan* yang disajikan pada Laporan Realisasi APBD Tahun 2024 berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

Dalam Laporan Realisasi APBD tidak dilakukan konversi disebabkan nomenklatur akun-akun pendapatan dan belanja pada APBD Tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 telah sama dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (lampiran II) tentang SAP.

b. Laporan Operasional

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
b) Beban dari kegiatan operasional;
c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
d) Pos Luar Biasa, bila ada; dan
e) Surplus/defisit-LO.

Laporan Operasional disusun merupakan gabungan dari seluruh Laporan Operasional SKPD dan PPKD.

c. Neraca

Neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan konsolidasi Neraca SKPD dan SKPKD/PPKD. Dalam penyusunan Neraca, rekening-rekening yang sifatnya *reciprocal* (timbal balik antar unit dalam satu Pemda) harus dihilangkan terlebih dahulu. Mekanisme penghilangan akun *reciprocal* tersebut, yaitu melalui proses eliminasi akun–akun *reciprocal*. Akun-akun *reciprocal* yang terjadi dalam sistem akuntansi keuangan daerah ini adalah akun RK-SKPD dan akun RK-PPKD. Akun RK-SKPD dicatat oleh PPKD, sedangkan akun RK-PPKD dicatat oleh SKPD. Kedua akun tersebut digunakan untuk menggambarkan transaksi yang dilakukan antar unit tersebut, dan akan berpengaruh terhadap Neraca kedua unit tersebut yang menggambarkan posisi keuangan SKPD/PPKD/Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah.

e. Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

a) Saldo Anggaran Lebih awal;
b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;

d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
e) Lain-lain; dan
f) Saldo Anggaran Lebih akhir.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:
a) Ekuitas awal;
b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas; dan
d) Ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Selain itu juga meliputi kinerja keuangan entitas akuntansi/pelaporan dalam Laporan Realisasi Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam satu periode pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan
- Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah basis akrual kecuali untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; dan
- Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Keandalan Pengukuran adalah kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak

mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah:

1. **Pendapatan-LRA** adalah sebagai berikut:
   a. Diakui pada saat penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
   b. Diakui pada saat diterima di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD; dan
   c. Diakui pada saat diterima oleh entitas penerimaan diluar entitas bendahara.
   d. Pendapatan BLUD/BOS diakui sesuai ketentuan tentang BLUD/BOS yaitu setiap akhir bulan berdasarkan laporan pendapatan BLUD/BOS yang disampaikan oleh masing-masing Pengelola BLUD/BOS kepada PPKD selaku SKPKD.

   Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
   Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
   Pendapatan LRA disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
   a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
   b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
   c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
   d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. **Pendapatan LO** diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun yang masih piutang (realizable).

   Pendapatan LO adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*)

Pengakuan pendapatan-LO pada SKPD dan SKPKD terdiri dari :

a. Pajak Daerah-LO

1) Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP Daerah) atas pendapatan terkait.

   Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) diterbitkan pada saat registrasi/pendaftaran oleh Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pendapatan Provinsi (SAMSAT) dilingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Pada akhir tahun tidak dilakukannya penyesuaian terhadap pajak yang diterima dimuka. Pendapatan ini langsung dicatat dan diakui seluruhnya sebagai pendapatan tahun berjalan karena sifat pajak ini adalah tahunan dan dibayar sekaligus, yang terdiri dari :

   - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
   - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

2) Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

   Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Kurang Bayar (SK-KB) yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SK-LB) yang akan dijadikan pengurangan pendapatan LO. Selanjutnya, pada akhir Semester dan akhir tahun , dilakukan penyesuaian mengurangi pendapatan-LO sebesar Saldo Piutang, yang terdiri dari :

   - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
   - Pajak Air Permukaan
   - Pajak Rokok

b. Retribusi Daerah-LO

   Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima atau pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D) dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga. Sedangkan SKR-D diterbitkan pada saat wajib Retribusi melakukan pembayaran kepada Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu atau pembayaran langsung ke Kas Daerah.

   Selanjutnya pada akhir Semester dan/atau akhir tahun dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan retribusi yang telah dicatat dan diakui

sebagai pendapatan, namun ternyata sebagiannya belum menjadi hak tahun berjalan atau hak tahun ini atau merupakan penerimaan piutang tahun lalu.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat Kas diterima di Kas Daerah dan pada akhir tahun dilakukan penyesuaian pendapatan berdasarkan hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan/atau berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang terhadap laporan keuangan tahun berjalan.

d. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO
   1) Lain-lain PAD Yang Sah yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan.
      Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah yang didahului dengan penerbitan surat ketetapan/surat keputusan atas pendapatan terkait diakui setelah terbitnya surat ketetapan/surat keputusan, yang masuk ke dalam kategori ini antara lain hasil sewa BMD, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan lainnya sejenis.
   2) Lain-lain PAD Yang Sah tanpa penetapan/keputusan diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerima SKPD atau kas daerah, yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari pengembalian. dan lainnya sejenis.
      Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.
      Pendapatan hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan tidak masuk dalam kelompok PAD-LO melainkan akan masuk ke dalam akun Surplus/deficit dari kegiatan non operasional, yaitu sebesar jumlah kas hasil penjualan dikurangi dengan nilai buku asset yang dijual tersebut.
      Sedangkan untuk Pendapatan BLUD diakui setiap akhir bulan berdasarkan laporan pendapatan BLUD yang disampaikan oleh masing-masing BLUD kepada PPKD/Bendahara Umum Daerah. Setiap akhir bulan atau paling sedikitnya setiap akhir Semester dan pada akhir tahun, masing-masing BLUD akan melakukan penyesuaian terhadap pendapatan BLUD sebesar mutasi kurang piutang awal tahun dan atau piutang tahun berjalan.

e. Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut.
Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur. Khusus

pendapatan transfer berupa Treasury Dana Facility-TDF diakui pada akhir tahun melalui mekanisme jurnal penyesuaian apabila adanya dana TDF milik pemerintah daerah yang masuk ke rekening TDF di Bank Indonesia milik pemerintah daerah dan belum ditransfer ke RKUD pada tahun pelaporan.

f. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah, antara lain meliputi pendapatan hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan.
Diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah, karena Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.
Penerimaan hibah berupa barang yang diterima dari Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah Lainnya/ Pihak Lainnya dicatat sebagai pendapatan hibah pada akhir tahun dengan mekanisme Jurnal Penyesuaian berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lainnya antara SKPD dan Bidang Pengelolaan BMD pada akhir tahun beserta SK. Hibah/dokumen yg sah lainnya. Nilai pendapatan Hibah adalah sebesar Harga Perolehan Barang tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya atau nilai buku.

g. Pendapatan Non Operasional
Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui pada akhir tahun melalui mekanisme jurnal penyesuaian berdasarkan dokumen sumber berupa Berita Acara Rekonsiliasi BMD SKPD dan Berita Acara Penjualan/Lelang telah diterima.

h. Pendapatan Luar Biasa
Diakui pada akhir tahun dengan mekanisme jurnal penyesuaian berdasarkan disposisi persetujuan Gubernur pada lembaran Nota Dinas dari SKPKD.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

Pendapatan LO atas hibah barang, diukur dengan nilai wajar pada saat/waktu barang tersebut diperoleh.

Pendapatan LO disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Operasional dan rinciannya lebih lanjut jenis pendapatan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus terhadap kenaikan/penurunan yang sangat signifikan; dan
c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Belanja

Belanja diakui pada saat:

a. Belanja melalui SP2D-LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan/ pada saat terbitnya SP2D dan telah disampaikan ke Bank untuk dicairkan.
b. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD;
c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD yaitu setiap akhir bulan berdasarkan Laporan Realisasi bulanan yang disampaikan oleh masing-msing BLUD kepada PPKD; dan
d. Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D-LS diakui pada saat penerbitan SP2D-LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah, Pengeluaran SP2D-LS tersebut menjadi bagian dari kas yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas.

Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rinciannya lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan belanja adalah:

a. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah; dan
c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4. Pembiayaan

a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; dan
b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rinciannya lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, hal-hal yang diungkapkan adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah; dan
c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5. Beban

a. Beban Pegawai
Beban pegawai dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU atau melalui mekanisme LS.
1) Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui saat terjadi pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan/disetujui oleh PA/KPA setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD;
2) Dalam mekanisme LS, beban pegawai diakui pada saat dicairkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan
3) Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D-LS diakui pada saat penerbitan SP2D-LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah, Pengeluaran SP2D-LS tersebut menjadi bagian dari kas yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas.

b. Beban Barang
1) Beban barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU ataupun dengan mekanisme LS. Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban barang diakui ketika bukti-bukti pembayaran beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah diverifikasi oleh PPK-SKPD yang terangkum dalam surat pengesahan pertanggungjawaban yang disahkan/disetujui oleh PA/KPA; dan
2) Sedangkan dalam mekanisme LS, beban barang diakui ketika Berita Acara Serah Terima (BAST) sudah ditandatangani oleh Panitia Penerima Barang, dimana mengindikasikan telah diterimanya barang oleh SKPD atau telah selesainya jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang dikelola oleh penyimpan barang/belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

c. Beban Bunga
Beban Bunga diakui pada akhir tahun atau ketika pinjaman telah jatuh tempo atau pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.

d. Beban Subsidi
Beban Subsidi diakui saat ketika SP2D atas beban ini sudah diterbitkan atau saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul dengan diterbitkannya rekomendasi pencairan dana dari SKPD yang berwenang.

e. Beban Hibah
Beban hibah diakui saat timbulnya kewajiban atau sesuai dengan NPHD yang dilakukan bersamaan dengan penyaluran hibah, mengingat kepastian

beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi persyaratan penyaluran hibah.

f. Beban Bantuan Sosial
Beban bantuan sosial diakui bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran beban sosial tersebut.

g. Beban Penyisihan Piutang
Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun. Disetiap akhir tahun dilakukan pencatatan akan beban penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki pemerintah daerah.

h. Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun, disetiap akhir tahun dilakukan pencatatan akan beban penyusutan terhadap aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah yaitu Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya. Sedangkan amortisasi dibebankan terhadap aset tidak berwujud.
Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan Metode garis lurus (*straight line methode*).
Untuk Aset Tetap perolehan 2024, aplikasi BMD sudah mengakomodir perhitungan beban penyusutan dan amortisasi dihitung berdasarkan tanggal perolehan atau bulananan.

i. Beban Transfer
Beban Transfer diakui saat SP2D diterbitkan. Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima berdasarkan SK Kepala Daerah terhadap adanya kurang salur, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

j. Beban tidak terduga
Beban tidak terduga diakui bersamaan dengan pengeluaran kas di rekening kas daerah dan/atau saat penerbitan SP2D-LS untuk diserahkan ke bank.

k. Beban Lain-lain
Beban Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang atau untuk menampung koreksi kesalahan atas beban yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan.

l. Defisit Non Operasional
Defisit Non Operasional terdiri dari Defisit Penjualan Aset Non Lancar, Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.
Defisit Non Operasional diakui pada saat terjadinya transaksi penjualan aset tetap, penyelesaian kewajiban jangka panjang, atau terjadinya transaksi yang memicu munculnya defisit non operasional lainnya, atau akhir tahun melalui mekanisme jurnal penyesuaian berdasarkan Berita Acara atas penjualan Aset Non Lancar pada tahun berjalan (dilengkapi data Harga

perolehan, akm penyusutan dan harga penjualan aset tsb). Begitu juga Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang dan defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya, diakui pada akhir tahun dengan mekanisme jurnal penyesuaian berdasarkan disposisi/ persetujuan Gubernur pada lembaran Nota Dinas dari SKPKD atau Keputusan Gubernur.

m. Beban Luar Biasa
Beban Luar Biasa diakui apabila saat SK Kepala Daerah telah diterbitkan.
Sesuai dengan panduan dari KSAP terhadap realisasi Belanja Tidak Terduga pada Laporan Realisasi Anggaran yang sebelumnya di-*mapping* ke Beban Luar Biasa pada Laporan Operasional, khusus untuk Belanja Tidak Terduga yang terkait dengan penanganan bencana Covid-19, maka pada Laporan Operasional di-*mapping* ke beban yang berkenaan dengan realisasi belanja SKPD penerima Belanja Tidak Terduga.

Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam Laporan Operasional dan rinciannya lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

a. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka; dan
b. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

6. Kas

Kas diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu /Rekening Kas Umum Daerah.

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Rincian kas dan setara kas;
b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

7. Piutang

Piutang Pendapatan Asli Daerah

a. Piutang Pajak
Pada dasarnya diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih piutang pajak atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang pajak/dokumen yang dipersamakan.
1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Diakui dan dicatat sebagai Piutang PKB dan Piutang BBNKB pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D). Sedangkan SKP-D diterbitkan pada saat registrasi/pendaftaran oleh wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pendapatan Provinsi (SAMSAT) dilingkungan Pemerintahan

Provinsi Sumatera Barat termasuk Gerai Samsat, *Drive Thru*, Samsat Keliling dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh Kantor Pelayanan Pendapatan Provinsi.

Terhadap potensi/tunggakan pajak dari wajib pajak PKB yang tidak mendaftar saat jatuh tempo sehingga tidak diterbitkan SKP-D nya, tetap dicatat dan diungkap dalam Laporan Keuangan SKPD/Pemda untuk waktu 5 tahun bersama denda PKB nya. Proses penghapusan tunggakan pajak tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok

Piutang PBBKB, PAP dan Pajak Rokok diakui berdasarkan hasil inventarisasi SKP untuk mengetahui adanya pajak yang kurang bayar hingga tanggal akhir tahun periode pelaporan, disebabkan wajib pajak membayar sendiri pajak tersebut tanpa didahului dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) berdasarkan perhitungan *self-assessment*.

b. Piutang Retribusi

Pada dasarnya diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih pendapatan retribusi, atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang retribusi dan naskah perjanjian sewa menyewa.

Untuk transaksi normal, maka langsung dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan bukan sebagai Piutang Retribusi, karena penerbitan SKR dilakukan oleh Bendahara Penerimaan pada saat wajib retribusi membayar. Dan minimal pada akhir tahun periode pelaporan, berdasarkan hasil inventarisasi terhadap naskah perjanjian sewa menyewa, pelayanan yang telah diberikan berdasarkan dokumen yang sah, namun belum dibayar oleh wajib Retribusi, maka akan diakui dan dicatat sebagai piutang retribusi.

c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Diakui pada akhir tahun berdasarkan dokumen hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham namun sampai dengan tanggal akhir tahun belum dilakukan pembayaran dividen atau terdapat kekurangan pembayaran dividen. Jadi, piutang dividen diakui berdasarkan hasil keputusan RUPS tentang pembagian laba perusahaan BUMD, BUMN maupun swasta/*joint venture*.

d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Diakui sebagai piutang apabila telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihannya serta sampai dengan akhir periode pelaporan belum dilunasi.

Pengakuan ini sesuai untuk objek Lain-Lain PAD yang Sah antara lain Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain; Hasil Sewa BMD; Hasil Kerja Sama Daerah; Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan piutang lainnya yang sejenis.

Khusus untuk Piutang Lain-Lain PAD yang Sah-Denda Pajak yg terdiri dari denda pajak kendaraan bermotor (denda PKB) dan denda bea balik nama kendaraan bermotor (denda BBN-KB) diakui setelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D). Sedangkan SKP-D diterbitkan pada saat registrasi/pendaftaran oleh wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pendapatan

Provinsi (SAMSAT) dilingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat termasuk Gerai Samsat, *Drive Thru*, Samsat Keliling dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh Kantor Pelayanan Pendapatan Provinsi.

Dan Piutang Ganti Kerugian Daerah harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKTJM, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada PPKD yang bersangkutan, dengan pengertian tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut dan apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.Sebaliknya, apabila pihak yang bersangkutan memilih menggunakan jalur pengadilan, selama proses pengadilan masih berlangsung, cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah terdapat Surat Ketetapan dan telah diterbitkan Surat Penagihan.

Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Sedangkan piutang Lain-lain PAD yang Sah dari pendapatan BLUD sesuai dengan peraturan BLUD yang berlaku.

Piutang yang diharapkan akan dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun diakui sebagai Aset Lancar, sedangkan piutang yang pelunasannya lebih dari 1 (satu) tahun diakui dan disajikan dalam Aset Tidak Lancar/Aset Lainnya.

e. Piutang Transfer

Diakui pada akhir tahun periode pelaporan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan terkait dengan adanya kurang bayar untuk Pemerintah Provinsi. Khusus untuk piutang DAK Fisik diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh pemerintah daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

f. Transfer Antar Daerah

Diakui apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

g. Piutang Kelebihan Transfer

Diakui pada akhir periode tahun pelaporan suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
c. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
d. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan; dan
e. Penghapus-bukuan piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi yang diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapus-bukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

8. Penyisihan Piutang

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*. Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas lancar, yaitu umur piutang kurang dari 1 tahun;
b. Kualitas kurang lancar, yaitu umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
c. Kualitas diragukan, yaitu umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun; dan
d. Kualitas macet, yaitu umur piutang lebih dari 5 tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas lancar, yaitu umur piutang sampai dengan 1 bulan;
b. Kualitas kurang lancar, yaitu umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
c. Kualitas diragukan, yaitu umur piutang lebih 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan
d. Kualitas macet, yaitu umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Lainnya selain Pajak dan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

b. Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
c. Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
d. Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Apabila pada saat tahun pelaporan tidak/belum ada surat tagihan di terbitkan maka kualitas piutang dapat dihitung berdasarkan objek pendapatan terkait yaitu sesuai penggolongan kualitas piutang pajak, kecuali pendapatan BLUD sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait BLUD.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan dalam tabel berikut:

Penetapan Kategori Kualitas Piutang

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4	Macet	100%

Penyisihan dilakukan pada akhir periode pelaporan/tanggal pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

9. Persediaan

a. Pengakuan Persediaan
   1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
   2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

b. Pengakuan Beban Persediaan
   Beban persediaan dicatat sebagai pendekatan beban (metode periodik) yaitu setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. Pada akhir periode pelaporan (akhir semester dan akhir tahun) berdasarkan Berita Acara *Stock Opname* yang dilakukan oleh Pengurus Barang/Penyimpan Barang/Kasubag Umum/Petugas yang ditunjuk, maka bagian akuntansi akan melakukan jurnal untuk penyesuaian pemakaian beban persediaan periode berjalan dibandingkan dengan saldo awal persediaan dengan saldo akhir persediaan sebesar selisihnya.

c. Selisih Persediaan

   Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut Bendahara Barang/Pengurus Barang atau catatan persediaan menurut fungsi

akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kedaluwarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang tidak material (kurang dari 5% dari total nilai persediaan hasil *stock opname*), maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang material, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Catatan: Sifat dari persediaan, kondisi *force majoure*. Penentuan sebagai beban atau kerugian ditetapkan berdasarkan hasil pengujian oleh auditor internal.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; dan
b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

10. Investasi

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6) Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih, saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
7) Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir; dan
8) Perubahan pos investasi.

11. Aset

Aset Tetap

a. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal;

b. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;
c. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
   1) Berwujud;
   2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
   3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
   4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
   5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
   6) Memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
d. Nilai perolehan aset tetap tersebut harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap yang telah ditetapkan;
e. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terdiri dari:
   1) Tanah, tidak ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan tanah akan dikapitalisasi;
   2) Peralatan dan Mesin dengan nilai sebesar Rp1.000.000,00;
   3) Peralatan dan Mesin yang sifatnya mudah rusak, mudah pecah tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap tetapi dicatat sebagai ekstrakomptabel seperti karpet, gorden/*vertical blind*, pecah belah, alat-alat dapur, alat-alat informasi dan lain-lain yang sejenisnya, kecuali yang digunakan untuk rumah jabatan (Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daaerah):
   4) Gedung dan Bangunan dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00;
   5) Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tidak ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikapitalisasi yaitu untuk pekerjaan berupa pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan irigasi dan jaringan;
   6) Aset Tetap Lainnya hewan ternak sebesar Rp1.000.000,00 sedangkan buku-buku perpustakaan Rp1,00 atau lebih; dan
   7) Aset tetap renovasi sebesar Rp20.000.000,00
f. Metode Penyusutan Aset yang digunakan adalah metode garis lurus.

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai barang inventaris ekstrakomptabel yang tidak disajikan dalam Neraca tetapi dicatat dalam Kartu Inventaris Ekstrakomptabel.

Aset Lainnya

a. Tagihan Jangka Panjang
   1) Tagihan Penjualan Angsuran, diakui setelah diterbitkannya SK pelelangan aset tersebut/dokumen yang disamakan.
   2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah, diakui berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dan atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Apabila penyelesaian tuntutan kerugian daerah tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi berwenang.
b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa, diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).
3) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer-BOT*), Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam Bangun Guna Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
4) Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate-BTO*), diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
5) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, dapat diakui sejak perjanjian sebagai Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan lainnya ditandatangani dan telah mendapat persetujuan oleh Menteri PPN/Kepala BAPPENAS dan masuk dalam Rencana KPBU.

c. Aset Tidak Berwujud (ATB), dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan kriteria pengakuan.
   Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal.
   Pengakuan awal sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas.
   Nilai wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.
   Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

d. Aset Lain-Lain
   Terdiri dari:
   1) Aset Rusak Berat/Usang,
   2) Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
   3) Dana yang Dibatasi Penggunaannya-TDF

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap dan aset lainnya sebagai berikut:

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
b. Kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap;
c. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

1) Penambahan aset (pembelian, hibah/donasi, pertukaran, reklasifikasi dan lain-lain);
2) Pengurangan aset (penjualan, penghapusan, reklasifikasi dan lain-lain);
3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
4) Mutasi aset tetap lainnya.

d. Informasi penyusutan, meliputi:
1) Nilai penyusutan;
2) Metode penyusutan yang digunakan;
3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

e. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

f. Untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) perlu diungkapkan:
1) Rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaiannya dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaan; dan
3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca.

g. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

12. **Dana Cadangan,** merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
Pembentukan dana cadangan akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.
Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme-LS.
Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

13. **Kewajiban** diakui pada saat:
a. Dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah; atau
b. Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
c. Pada saat kewajiban timbul.

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya;
c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
   1) Pengurangan pinjaman;
   2) Modifikasi persyaratan utang;
   3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
   4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
   5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
   6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur; dan
g. Biaya pinjaman:
   1) Perlakuan biaya pinjaman;
   2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
   3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

14. Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang dihentikan.

a. Perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan pilihan dari berbagai kebijakan akuntansi yang tersedia dalam Kebijakan Akuntansi menjadi sebuah kebijakan akuntansi yang lain dibanding kebijakan akuntansi periode lalu bagi entitas.

Bila entitas melakukan perubahan kebijakan akuntansi, entitas mengungkapkan:

1) Sifat perubahan kebijakan akuntansi;
2) Alasan penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang andal dan relevan;
3) Nilai penyesuaian untuk setiap item laporan keuangan yang terdampak perubahan kebijakan akuntansi untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya yang disajikan, sepanjang memungkinkan;
4) Laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulangi pengungkapan yang sama; dan
5) Dalam hal perubahan kebijakan akuntansi disebabkan adanya penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang baru, maka pengungkapan ditambahkan dengan judul standar yang baru dan tanggal efektif penerapan standar tersebut.

b. Kesalahan

Kesalahan periode sebelumnya adalah pencatatan atau penyajian yang tidak sesuai dengan seharusnya dan dikoreksi dalam laporan keuangan tahun berjalan yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi andal yang:

1) Tersedia pada saat laporan keuangan periode tersebut diotorisasi untuk terbit; dan
2) Secara rasional dapat diperoleh dan digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.

Koreksi merupakan tindakan pembetulan laporan keuangan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

c. Perubahan Estimasi Akuntansi

Estimasi mencakup pertimbangan berdasarkan informasi yang andal dan mutakhir. Estimasi diperlukan antara lain dalam menentukan:

1) Persediaan usang.
2) Penyisihan piutang pajak yang berisiko tidak tertagih.
3) Masa manfaat atau pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan atau potensi jasa yang berasal dari asset yang disusutkan/diamortisasi.
4) Pendapatan pajak.
5) Kewajiban garansi.

d. Operasi Yang Dihentikan

Operasi yang dihentikan antara lain berupa:

1) Entitas pelaporan/entitas akuntansi yang dihentikan operasinya berdasarkan ketentuan perundangan atau penetapan pemerintah.
2) Penghentian tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek yang signifikan mempengaruhi laporan keuangan entitas pelaporan/entitas akuntansi.

15. Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi

adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:

a. pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jasa publik atas jenis jasa yang disediakan oleh mitra, kepada siapa serta penerapan tarifnya; dan
b. pemberi konsesi mengendalikan melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat, yang disyaratkan pada huruf a diatas terpenuhi.

16. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan).
b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan).

Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan pemerintah berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada:

a. Apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan
b. Apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

17. Properti investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
b. Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Entitas pemerintah dapat memiliki properti investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai pada sejumlah keadaan. Misalnya, entitas pemerintah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersil.

Hal yang membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap) karena properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas.

Dalam hal pemerintah daerah memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasi asetnya sebagai berikut:

a. Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, maka mempertanggungjawabkannya secara terpisah;
b. Apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan (kurang dari 20% aset tetap) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

Properti investasi diakui pada saat diperolehnya kontrak/perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan kepala daerah. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

c. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
d. biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos Laporan Keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada Tahun 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh Aset Tetap.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah Tahun 2005, penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran *(at cost)*.

Mulai Tahun 2015, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan basis akrual, sehingga adanya akun-akun yang timbul karena penerapan basis akrual ini yaitu:

- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya;
- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud;
- Beban Penyusutan Aset Tetap;
- Beban Amortisasi Aset Lainnya;
- Akumulasi Penyisihan Piutang;
- Beban Penyisihan Piutang;
- Pendapatan diterima dimuka;
- Beban dibayar dimuka;
- Piutang; dan
- Utang Belanja

BAB V.
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA BARAT

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 Sedangkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 7 Oktober 2024 dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2024 Tanggal 7 Oktober 2024.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 setelah perubahan menetapkan target pendapatan sebesar Rp6.857.294.152.520,00 dan Belanja sebesar Rp7.017.741.696.945,19 dan Defisit sebesar (Rp160.447.544.425,19). Defisit Anggaran Tahun 2024 ditutup dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp160.447.544.425,19.

Gambaran secara keseluruhan tentang target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.1. PENDAPATAN

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Ringkasan anggaran dan realisasi pendapatan SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5 dan 6. Kelompok Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.1.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**6.857.294.152.520,00**	**6.482.418.683.405,20**	**94,53**	**6.263.878.436.851,68**
4.1	Pendapatan Asli Daerah	3.342.769.899.590,00	2.942.563.617.866,20	88,03	2.784.774.801.212,68
4.2	Pendapatan Transfer	3.497.500.252.930,00	3.525.560.271.539,00	100,80	3.464.761.720.139,00
4.3	Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	17.024.000.000,00	14.294.794.000,00	83,97	14.341.915.500,00

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan Tahun 2024 mencapai 94,53% dari total pagu anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi

Tahun 2023 maka terdapat kenaikan sebesar Rp218.540.246.553,52 atau 3,49%. Adapun Penjelasan anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.342.769.899.590,00	2.942.563.617.866,20	88,03	2.784.774.801.212,68

Jumlah tersebut diatas merupakan realisasi dan anggaran Pendapatan Asli Daerah dalam Tahun 2024 dan Tahun 2023. Untuk realisasi Tahun 2024 mencapai 88,03% dari anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp157.788.816.653,52 atau 5,67%. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

Tabel 5.1.1.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2024		%	Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.342.769.899.590,00	2.942.563.617.866,20	88,03	2.784.774.801.212,68
4.1.01	Pajak Daerah	2.693.451.041.456,00	2.338.112.925.264,00	86,81	2.236.722.695.545,00
4.1.02	Retribusi Daerah	414.280.722.633,00	382.306.933.091,49	92,28	16.049.240.433,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	129.624.977.090,00	122.018.602.181,00	94,13	117.084.599.941,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	105.413.158.411,00	100.125.157.329,71	94,98	414.918.265.293,68

Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

5.1.1.1.1. PAJAK DAERAH

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.1.01	Pajak Daerah	2.693.451.041.456,00	2.338.112.925.264,00	86,81	2.236.722.695.545,00

Jumlah tersebut diatas merupakan realisasi dan anggaran Pendapatan Pajak Daerah dalam Tahun 2024 dan 2023. Untuk realisasi Tahun 2024 mencapai 86,81% dari anggarannya dan tidak tercapai sebesar Rp355.338.116.192,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 maka terdapat kenaikan sebesar Rp101.390.229.719,00 atau 4,53%. Pendapatan Pajak Daerah terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.

Penerimaan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan berikut:

a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
b. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan
c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Objek Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024 dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.1.3
Anggaran dan Realisasi Rincian Pendapatan Pajak Daerah
Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.1.01	**Pajak Daerah**	**2.693.451.041.456,00**	**2.338.112.925.264,00**	**86,81**	**2.236.722.695.545,00**
4.1.01.01	**Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**	**867.217.461.437,00**	**844.845.392.450,00**	**97,42**	**811.565.504.450,00**
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	15.255.110.900,00	16.983.869.850,00	111,33	18.439.236.600,00
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	77.776.178.750,00	77.665.572.450,00	99,86	70.663.844.400,00
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	448.999.090.000,00	426.776.415.550,00	95,05	401.227.567.175,00
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	3.803.409.100,00	4.016.590.550,00	105,61	3.552.404.900,00
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	825.134.300,00	655.901.800,00	79,49	500.002.450,00
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	68.179.535.850,00	66.599.508.700,00	97,68	68.250.140.600,00
4.1.01.01.07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	47.336.301.900,00	45.629.780.600,00	96,39	50.554.942.350,00
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	33.241.962.900,00	33.381.752.200,00	100,42	33.342.969.400,00
4.1.01.01.09	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	3.192.057.650,00	3.142.902.800,00	98,46	2.828.447.550,00
4.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	168.483.451.800,00	169.863.208.700,00	100,82	162.080.874.075,00
4.1.01.01.11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	123.836.700,00	129.509.800,00	104,58	124.656.950,00
4.1.01.01.14	PKB-Mobil Roda Tiga	1.391.587,00	379.450,00	27,27	418.000,00
4.1.01.02	**Bea Balik Nama**	**399.134.592.491,00**	**395.873.654.800,00**	**99,18**	**401.816.543.050,00**

	Kendaraan Bermotor (BBNKB)				
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	1.478.217.200,00	1.276.617.000,00	86,36	2.292.838.650,00
4.1.01.02.02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	30.759.742.500,00	30.480.826.700,00	99,09	28.362.355.800,00
4.1.01.02.03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	159.670.973.200,00	152.472.265.550,00	95,49	156.146.269.650,00
4.1.01.02.04	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	3.021.692.600,00	3.911.017.500,00	129,43	2.552.718.700,00
4.1.01.02.05	BBNKB-Mobil Bus-Bus	1.349.854.050,00	1.374.536.000,00	101,83	430.029.000,00
4.1.01.02.06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	24.197.701.350,00	24.357.489.600,00	100,66	31.146.872.850,00
4.1.01.02.07	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	7.973.010.000,00	7.716.691.300,00	96,79	11.664.214.450,00
4.1.01.02.08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	7.788.855.400,00	11.586.279.200,00	148,75	11.635.166.250,00
4.1.01.02.09	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	1.680.760.791,00	1.921.557.000,00	114,33	1.233.785.000,00
4.1.01.02.10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	160.416.896.100,00	160.121.081.950,00	99,82	155.691.977.250,00
4.1.01.02.11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	796.889.300,00	655.293.000,00	82,23	660.315.450,00
4.1.01.03	**Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)**	**893.928.065.344,00**	**638.993.534.545,00**	**71,48**	**587.376.804.979,00**
4.1.01.03.02	PBBKB-Bahan Bakar Solar	1.565.328.940,00	795.371.124,00	50,81	976.058.345,00
4.1.01.03.04	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	892.362.736.404,00	638.198.163.421,00	71,52	586.400.746.634,00
4.1.01.04	**Pajak Air Permukaan**	**20.001.992.700,00**	**14.677.021.417,00**	**73,38**	**10.884.901.663,00**
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	20.001.992.700,00	14.677.021.417,00	73,38	10.884.901.663,00
4.1.01.05	**Pajak Rokok**	**513.168.929.484,00**	**443.723.322.052,00**	**86,47**	**425.078.941.403,00**
4.1.01.05	Pajak Rokok	513.168.929.484,00	443.723.322.052,00	86,47	425.078.941.403,00

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp844.845.392.450,00 atau sebesar 97,42%, tidak tercapai dari target sebesar Rp22.372.068.987,00, bila dibandingkan dengan Tahun 2023 realisasi terjadi kenaikan sebesar Rp33.279.888.000,00 atau 4,10%.

Pajak Daerah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp395.873.654.800,00 atau sebesar 99,18%, tidak tercapai dari target sebesar Rp3.260.937.691,00, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp5.942.888.250,00 atau 1,48%.

Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor (PBBKB) Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp638.993.534.545,00 atau sebesar 71,48%, tidak tercapai dari target sebesar Rp254.934.530.799,00, apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp51.616.729.566,00 atau 8,79%.

Pajak Air Permukaan Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp14.677.021.417,00 atau sebesar 73,38%, tidak tercapai dari target sebesar Rp5.324.971.283,00, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.792.119.754,00 atau 34,84%

Pajak Rokok Tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp443.723.322.052,00 atau sebesar 86,47%, tidak tercapai dari target sebesar Rp69.445.607.432,00, apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp18.644.380.649,00 atau 4,39%

5.1.1.1.2 RETRIBUSI DAERAH

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.1.02	**Retribusi Daerah**	**414.280.722.633,00**	**382.306.933.091,49**	**92,28**	**16.049.240.433,00**

Jika dilihat dari realisasi Tahun 2024 mencapai 92,28% dari pagu anggarannya atau tidak tercapai dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp31.973.789.541,51. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 maka terdapat kenaikan sebesar Rp366.257.692.658,49 atau 2.282,09%.

Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari:

Tabel 5.1.1.4
Anggaran dan Realisasi Objek Pendapatan Retribusi Daerah
Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.1.02	**Retribusi Daerah**	**414.280.722.633,00**	**382.306.933.091,49**	**92,28**	**16.049.240.433,00**
4.1.02.1	Retribusi Jasa Umum	372.952.717.795,00	374.139.936.380,49	100,32	4.921.368.272,00
4.1.02.2	Retribusi Jasa Usaha	40.757.696.254,00	7.882.036.311,00	19,34	10.922.444.661,00
4.1.02.3	Retribusi Perizinan Tertentu	570.308.584,00	284.960.400,00	49,97	205.427.500,00

Dapat juga kami informasikan rincian dari masing-masing objek retribusi diatas yaitu:

- Retribusi Jasa Umum

Tabel 5.1.1.5
Anggaran dan Realisasi Objek Pendapatan Retribusi Jasa Umum
Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.1.02.1	**Retribusi Jasa Umum**	**372.952.717.795,00**	**374.139.936.380,49**	**100,32**	**4.921.368.272,00**
4.1.02.01.01	**Retribusi Pelayanan Kesehatan**	**372.652.264.505,00**	**374.139.936.380,49**	**100,40**	**4.921.368.272,00**
4.1.02.01.01.0004.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan	4.456.734.704,00	5.196.463.122,00	116,60	0,00
	Dinas Kesehatan	4.456.734.704,00	5.196.463.122,00	116,60	0,00

4.1.02.01.01.0005.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	361.916.652.215,00	362.611.101.094,49	100,19	4.921.368.272,00
	Dinas Kesehatan	7.416.652.215,00	7.977.002.000,99	107,56	4.921.368.272,00
	Rumah Sakit Achmad Muchtar Bukittinggi	145.000.000.000,00	141.745.330.961,50	97,76	0,00
	RSJ Prof. HB. Saanin	27.500.000.000,00	28.883.738.650,00	105,03	0,00
	RSUD Pariaman	82.000.000.000,00	81.311.894.592,00	99,16	0,00
	RSUD Moh Natsir	100.000.000.000,00	102.693.134.890,00	102,69	0,00
4.1.02.01.01.0006.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	6.278.877.586,00	6.332.372.164,00	100,85	0,00
	Dinas Kesehatan	6.278.877.586,00	6.332.372.164,00	100,85	0,00
4.1.02.01.02	**Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan**	**300.453.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.02.01.02.0001.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	300.453.290,00	0,00	0,00	0,00
	Dinas Lingkungan Hidup	300.453.290,00	0,00	0,00	0,00

Retribusi Jasa Umum terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan. Pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp374.139.936.380,49 atau sebesar 100,32%, dan melebihi dari target sebesar Rp1.187.218.585,49, bila dibandingkan dengan Tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp369.218.568.108,49 atau 7.502,36%. Hal ini dipengaruhi oleh adanya reklasifikasi pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah berupa Pendapatan BLUD yang direklas menjadi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan, sesuai dengan ketentuan dalam PP 35/2023 dan Lampiran PMDN 15/2023 tentang Pedoman Umum APBD 2024.

- Retribusi Jasa Usaha

Tabel 5.1.1.6
Anggaran dan Realisasi Objek Pendapatan Retribusi Jasa Usaha
Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.1.02.02	**Retribusi Jasa Usaha**	**40.757.696.254,00**	**7.882.036.311,00**	**19,34**	**10.922.444.661,00**
4.1.02.02.01.	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**	**34.895.222.314,00**	**4.776.818.527,00**	**13,69**	**7.852.638.721,00**
4.1.02.02.01.0001.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	291.433.320,00	207.598.070,00	71,23	1.742.109.106,00
	Dinas Pendidikan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
	Dinas Kehutanan	106.429.500,00	113.557.500,00	106,70	92.401.497,00
	Dinas Perkebunan Tanamanan Pangan & Holtikultura	30.000.000,00	34.647.162,00	115,49	291.488.000,00
	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	8.316.000,00	8.316.000,00	100,00	8.316.000,00
	Dinas Pariwisata	20.196.000,00	20.196.000,00	100,00	5.049.000,00
	Dinas Kelautan dan	10.000.000,00	9.356.408,00	93,56	36.691.809,00

	Perikanan				
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	111.491.820,00	16.525.000,00	14,82	21.605.000,00
	Dinas Pemuda dan Olahraga				1.242.185.000,00
	Dinas Kebudayaan				34.000.000,00
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				10.372.800,00
4.1.02.02.01.0002.	Retribusi Penyewaan Tanah	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	5.000.000,00
	Dinas Kebudayaan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
	Dinas Pendidikan				5.000.000,00
4.1.02.02.01.0003.	Retribusi Penyewaan Bangunan	1.789.117.285,00	2.222.110.457,00	124,20	562.142.640,00
	Dinas Koperasi dan UKM	332.135.945,00	224.400.000,00	67,56	289.300.000,00
	Dinas Pemuda dan Olahraga	225.000.000,00	939.098.000,00	417,38	
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	546.098.685,00	709.738.930,00	129,97	259.972.640,00
	BPSDM	63.707.356,00	9.500.000,00	14,91	
	Dinas Kebudayaan	25.000.000,00	34.000.000,00	136,00	
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	28.261.313,00	33.058.527,00	116,97	
	Dinas Perkebunan Tanamanan Pangan & Holtikultura	568.913.986,00	272.315.000,00	47,87	
	Dinas Pariwisata				12.870.000,00
4.1.02.02.01.0004.	Retribusi Pemakaian Laboratorium	25.617.017.771,00	206.838.400,00	0,81	3.386.347.450,00
	Dinas Lingkungan Hidup	24.495.631.280,00	126.729.100,00	0,52	1.561.257.400,00
	Dinas Pangan	406.226.491,00	-	-	
	Dinas Perkebunan Tanamanan Pangan & Holtikultura	710.000.000,00	75.159.300,00	10,59	102.369.000,00
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.160.000,00	4.950.000,00	95,93	118.781.000,00
	Dinas BMCKTR				472.515.000,00
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				646.438.900,00
	Dinas Kelautan dan Perikanan				1.111.150,00
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				483.875.000,00
4.1.02.02.01.0005.	Retribusi Pemakaian Ruangan	2.194.653.938,00	1.686.466.600,00	76,84	1.819.174.525,00
	Dinas Kesehatan	1.117.499.063,00	1.098.545.000,00	98,30	1.301.652.500,00
	Sekretariat Daerah	580.533.371,00	377.100.000,00	64,96	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	241.790.003,00	80.551.600,00	33,31	102.056.525,00
	Badan Penghubung	216.391.601,00	51.370.000,00	23,74	94.620.000,00
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	36.939.900,00	78.900.000,00	213,59	49.350.000,00
	Dinas Kebudayaan	1.500.000,00	-	-	
	Dinas Kearsipan				3.545.500,00
	Biro Umum				267.950.000,00

4.1.02.02.01.0006.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	5.000.000.000,00	450.805.000,00	9,02	337.865.000,00
	Dinas BMCKTR	5.000.000.000,00	450.805.000,00	9,02	337.865.000,00
4.1.02.02.04	**Retribusi Terminal**	**472.186.963,00**	**286.614.000,00**	**60,70**	**287.579.000,00**
4.1.02.02.04.0001.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	297.186.963,00	176.127.500,00	59,26	192.847.000,00
	Dinas Perhubungan	297.186.963,00	176.127.500,00	59,26	192.847.000,00
4.1.02.02.04.0002.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	50.000.000,00	52.000.000,00	104,00	
	Dinas Perhubungan	50.000.000,00	52.000.000,00	104,00	
4.1.02.02.04.0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	125.000.000,00	58.486.500,00	46,79	94.732.000,00
	Dinas Perhubungan	125.000.000,00	58.486.500,00	46,79	94.732.000,00
4.1.02.02.08	**Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan**	**2.537.291.394,00**	**932.707.684,00**	**36,76**	**1.098.370.000,00**
4.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.537.291.394,00	932.707.684,00	36,76	1.098.370.000,00
	Dinas Kelautan Perikanan	2.537.291.394,00	932.707.684,00	36,76	1.098.370.000,00
4.1.02.02.09	**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**	**620.383.781,00**	**381.768.000,00**	**61,54**	**296.851.000,00**
4.1.02.02.09.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	620.383.781,00	381.768.000,00	61,54	296.851.000,00
	Dinas Kebudayaan	452.600.355,00	318.448.000,00	70,36	242.092.000,00
	Dinas Kelautan Perikanan	167.783.426,00	63.320.000,00	37,74	54.759.000,00
4.1.02.02.11	**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**	**2.232.611.802,00**	**1.504.128.100,00**	**67,37**	**1.387.005.940,00**
4.1.02.02.11.0001.	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	800.359.951,00	428.927.800,00	53,59	479.589.390,00
	Dinas Perkebunan Tanamanan Pangan & Holtikultura	800.359.951,00	428.927.800,00	53,59	479.589.390,00
4.1.02.02.11.0002.	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	772.685.000,00	890.615.300,00	115,26	519.948.550,00
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	772.685.000,00	890.615.300,00	115,26	519.948.550,00
4.1.02.02.11.0003.	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	659.566.851,00	184.585.000,00	27,99	387.468.000,00
	Dinas Kelautan Perikanan	659.566.851,00	184.585.000,00	27,99	387.468.000,00

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Terminal; Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp7.882.036.311,00 atau sebesar 19,34%, tidak tercapai dari target sebesar Rp32.875.659.943,00. Hal ini

dipengaruhi oleh tidak tercapainya target dari Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp3.040.408.350,00 atau 27,84%.

- Retribusi Perizinan Tertentu

Tabel 5.1.1.7
Anggaran dan Realisasi Objek Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu
Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.1.02.03	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**570.308.584,00**	**284.960.400,00**	**49,97**	**205.427.500,00**
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	29.902.500,00
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	175.525.000,00
4.1.02.03.08	**Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)**	**570.308.584,00**	**284.960.400,00**	**49,97**	**0,00**
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	570.308.584,00	284.960.400,00	49,97	0,00

Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum, Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp284.960.400,00 atau sebesar 49,97%, tidak tercapai dari target sebesar Rp285.348.184,00, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp79.532.900,00 atau 38,72%.

Pendapatan Retribusi Daerah ini dilaksanakan berdasarkan peraturan berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.1.1.1.3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**	**129.624.977.090,00**	**122.018.602.181,00**	**94,13**	**117.084.599.941,00**

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Tahun 2024 mencapai 94,13% dari pagu anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp4.934.002.240,00 atau 4,21%.

Bahwa sampai saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) yaitu PT Bank Nagari, PT Grafika Jaya Sumbar, PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP), PT Balairung. PT Jamkrida Sumbar serta perusahaan patungan/milik swasta yaitu PT Pembangunan Sumbar dan PT Bangun Askrida serta PT Sijunjung Sumber Energi.

Adapun penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2024 berasal dari pembagian deviden sebagai berikut:

a. PT Bank Nagari sebesar Rp117.919.220.213,00; dan

b. PT Jamkrida sebesar Rp4.099.381.968,00.

5.1.1.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	**105.413.158.411,00**	**100.125.157.329,71**	**94,98**	**414.918.265.293,68**

- Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Tahun 2024 terealisasi sebesar 94,98% dari pagu anggarannya. Namun dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 terdapat penurunan sebesar Rp314.793.107.963,97 atau 75,87%. Hal ini disebabkan oleh karena adanya reklasifikasi pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah berupa Pendapatan BLUD yang direklas menjadi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan, sesuai dengan ketentuan dalam PP 35/2023 dan Lampiran PMDN 15/2023 tentang Pedoman Umum APBD 2024.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari:

Tabel 5.1.1.8
Anggaran dan Realisasi Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	**105.413.158.411,00**	**100.125.157.329,71**	**94,98**	**414.918.265.293,68**
4.1.04.1	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	581.300.000,00	585.058.880,00	100,65	1.347.353.327,00
4.1.04.3	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	19.427.050.874,00	13.915.100.000,00	71,63	2.859.450.000,00
4.1.04.4	Hasil Kerja Sama Daerah	1.976.420.000,00	1.850.191.000,00	93,61	1.937.782.800,00
4.1.04.5	Jasa Giro	7.500.000.000,00	8.490.270.476,08	113,20	11.951.998.104,69
4.1.04.7	Pendapatan Bunga	13.020.000.000,00	17.333.203.315,00	133,13	15.752.208.066,00

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.1.04.8	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	6.813.000.000,00	11.729.731.654,22	172,17	18.972.813.595,78
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	19.738.030.000,00	14.460.403.950,00	73,26	10.496.346.100,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	36.357.357.537,00	31.761.198.054,41	87,36	351.600.313.300,21

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan yang terealisasi sebesar Rp585.058.880,00 atau 100,65%, melebihi anggaran sebesar Rp3.758.880,00 dari target yang ditetapkan Rp581.300.000,00 yang merupakan hasil penjualan aset lainnya. Rincian lebih lengkap pada Lampiran 25;
- Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan yang terealisasi sebesar Rp13.915.100.000,00 atau 71,63%, tidak tercapai sebesar Rp5.511.950.874,00 dari target yang ditetapkan Rp19.427.050.874,00 yang merupakan kerja sama pemanfaatan aset antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pihak ketiga atas Hotel Triple Tree Bukittinggi, eks. Novotel oleh PT. Garahamas dan Sewa tanah ATM Bank Nagari, Gedung Rohana Kudus dan lainnya;
- Hasil Kerja Sama Daerah yang terealisasi sebesar Rp1.850.191.000,00 atau 93,61% tidak tercapai target sebesar Rp126.229.000,00 dari target yang ditetapkan Rp1.976.420.000,00 yang merupakan pendapatan yang berasal dari kabupaten/kota yang menyerahkan pengelolaan sampahnya kepada UPT Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan kontribusi Pendidikan dan pelatihan pada Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
- Pendapatan Jasa Giro yang terealisasi sebesar Rp8.490.270.476,08 atau 113,20% yang melebihi target sebesar Rp990.270.476,08 dari target yang ditetapkan sebesar Rp7.500.000.000,00 yang terdiri dari Jasa Giro Kas Daerah dan Jasa Giro Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penerimaan Jasa Giro dari BPD Sumatera Barat atau Bank Nagari;
- Pendapatan Bunga atas penempatan uang pemerintah/pendapatan yang berasal dari Deposito dan Remunerasi TDF 2023 yang terealisasi sebesar Rp17.333.203.315,00 atau 133,13%, berlebih dari target sebesar Rp4.313.203.315,00 dari yang ditetapkan sebesar Rp13.020.000.000,00. Pendapatan bunga Deposito berasal atas dana Rajawali, Remunisasi TDF pada Bank Indonesia, selain itu pendapatan Bunga juga diperoleh dari Deposito Kas Daerah di Bank Nagari yang dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen dan Pengendalian Kas Umum, yang terdiri dari :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Bunga Deposito PT. Rajawali	4.539.640.025,00
2.	Bunga Deposito Kas Daerah	12.359.722.235,00
3.	Remunerasi TDF pada Bank Indonesia	433.841.055,00
	Jumlah	**17.333.203.315,00**

Dapat kami informasikan bahwa terhadap Pendapatan Bunga Deposito PT Rajawali sudah dikurangi sebesar Rp.505.000.000,00 yang digunakan untuk pembentukan deposito baru PT. Rajawali sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bea Siswa Yang Bersumber Dari Hibah PT Rajawali dan dalam hal penyaluran remunerasi Dana Bagi Hasil (DBH)/Dana Alokasi Umum (DAU) melalui fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF):

a. Dalam hal Bank Indonesia memberikan remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD, maka pemerintah daerah mencatat sebagai piutang Lain-lain PAD-Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah yang Sah dineraca pada pendapatan Bunga atas penempatan uang pemerintah-LO;

b. Dalam hal remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF telah disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) maka pemerintah daerah mencatat sebagai Kas di Kas Daerah pada piutang Lain-lain PAD Yang Sah- Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah dineraca dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan SAL pada Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LRA.

❖ Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan yang terealisasi sebesar Rp11.729.731.654,22atau 172,17% yang melebihi sebesar Rp4.916.731.654,22 dari target yang ditetapkan Rp6.813.000.000,00 yang merupakan pendapatan yang berasal dari pengembalian belanja tahun lalu yang berdasarkan hasil temuan pemeriksaan, denda kegiatan, potongan uang pensiun melalui PT Taspen dan lainnya;

❖ Pendapatan Denda Pajak Daerah yang terealisasi sebesar Rp14.460.403.950,00 atau 73,26% yang kurang sebesar Rp5.277.626.050,00 dari target sebesar Rp19.738.030.000,00 berasal dari denda atas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang telah melewati waktu jatuh tempo, denda Pajak Air Permukaan; dan

❖ Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp31.761.198.054,41 atau 87,36% dan kurang sebesar Rp4.596.159.482,59 dari target yang ditetapkan Rp36.357.357.537,00 berasal dari pendapatan yang asal dari penerimaan langsung oleh SKPD ataupun UPTD yang berstatus BLUD pada Tahun

2024 berupa Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan pada SMKN pada Dinas Pendidikan.

5.1.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.497.500.252.930,00	3.525.560.271.539,00	100,80	3.464.761.720.139,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.525.560.271.539,00 atau 100,80% dari pagu anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp60.798.551.400,00 atau 1,75%.

Pendapatan Transfer terdiri dari :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

5.1.1.2.1. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.466.843.452.930,00	3.496.315.733.539,00	100,85	3.437.048.050.139,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat Tahun 2024 terdapat kenaikan bila dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp59.267.683.400,00 atau 1,72%.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari;
1. Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH);
2. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU);
3. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
4. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik; dan
5. Dana Insentif Daerah (DID) dan atau Insentif Fiskal.

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2024 dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.1.9
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.466.843.452.930,00	3.496.315.733.539,00	100,85	3.437.048.050.139,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-	196.062.191.930,00	196.436.458.000,00	100,19	186.817.960.171,00

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
	Dana Bagi Hasil (DBH)				
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	2.062.837.785.000,00	2.146.789.947.987,00	104,07	1.989.337.430.162,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	253.614.707.000,00	217.864.557.320,00	85,90	365.925.325.993,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	941.079.485.000,00	921.975.486.232,00	97,97	886.346.308.813,00
4.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	8.621.025.000,00
4.2.01.06.	Insentif Fiskal	13.249.284.000,00	13.249.284.000,00	100,00	0,00

Secara rinci pendapatan dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) adalah sebagai berikut:

- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), terdiri dari:

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.2.01.01	**Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)**	**196.062.191.930,00**	**196.436.458.000,00**	**100,19**	**186.817.960.171,00**
4.2.01.01.01.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	18.161.506.000,00	18.161.506.000,00	100,00	16.484.542.454,00
4.2.01.01.02.	DBH PPh Pasal 21	22.442.263.000,00	106.454.381.000,00	474,35	0,00
4.2.01.01.03	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	88.730.942.000,00	4.718.824.000,00	5,32	104.906.677.289,00
4.2.01.01.04	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	682.139.930,00	582.336.000,00	85,37	702.106.525,00
4.2.01.01.07	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	6.038.647.000,00	6.038.647.000,00	100,00	6.065.091.298,00
4.2.01.01.08	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	10.336.727.000,00	162.476.000,00	1,57	46.021.014.795,00
4.2.01.01.09	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	9.720.918.000,00	19.895.169.000,00	204,66	907.118.714,00
4.2.01.01.10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	29.311.897.000,00	29.311.897.000,00	100,00	1.791.727.841,00
4.2.01.01.11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	0,00	0,00	97.425,00
4.2.01.01.12	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	10.637.152.000,00	11.111.222.000,00	104,46	9.939.583.830,00

Dapat juga diinformasikan sebagai berikut:

a. Untuk realisasi DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp106.454.381.000,00 atau sebesar 474,35% disebabkan karena anggaran DBH PPh Pasal 21

teranggarkan pada DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN pada APBD awal 2024.

b. Untuk realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty sebesar Rp19.895.169.000,00 atau 204,66% disebabkan karena anggaran DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty teranggarkan pada DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent pada APBD awal 2024.

c. Untuk realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp29.311.897.000,00 termasuk DBH Perkebunan Sawit sebesar Rp28.313.151.000,00 sehingga realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) seharusnya sebesar Rp998.746.000,00 hal ini disebabkan karena anggaran DBH Perkebunan Sawit tidak tersedia pada APBD 2024.

- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
  Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) yang terealisasi sebesar Rp2.146.789.947.987,00 termasuk DAU yang ditentukan penggunaannya, dengan rincian :

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	1.797.505.162.000,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	36.482.588.987,00
3	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	238.094.588.000,00
4	Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan	38.286.764.000,00
5	Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum	36.420.845.000,00
	Jumlah	**2.146.789.947.987,00**

Dapat juga diinformasikan bahwa untuk realisasi DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp1.797.505.162.000,00 termasuk realisasi DAU Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah sebesar Rp85.428.406.000,00 hal ini disebabkan karena anggaran DAU Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah belum tersedia pada APBD 2024.

- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.2.01.03	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**	**253.614.707.000,00**	**217.864.557.320,00**	**85,90**	**365.925.325.993,00**
4.2.01.03.04	DAK Fisik-Bidang	47.947.455.000,00	46.301.382.190,00	96,57	42.601.990.800,00

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
	Pendidikan-Reguler-SMA				
4.2.01.03.05	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	22.186.699.000,00	21.154.123.878,00	95,35	6.130.512.998,00
4.2.01.03.10	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	98.431.152.000,00	68.930.425.979,00	70,03	94.256.186.248,00
4.2.01.03.13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	7.500.000.000,00	7.073.890.400,00	94,32	0,00
4.2.01.03.31	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	11.847.887.268,00
4.2.01.03.32	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	5.278.901.000,00	3.695.230.700,00	70,00	9.170.407.420,00
4.2.01.03.33	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0,00	0,00	0,00	7.438.058.875,00
4.2.01.03.35	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	44.154.458.000,00	43.552.950.817,00	98,64	45.582.993.184,00
4.2.01.03.43	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	16.436.043.000,00	15.651.462.520,00	95,23	17.380.001.200,00
4.2.01.03.58	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	11.679.999.000,00	11.505.090.836,00	98,50	0,00
4.2.01.03.60	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	131.517.288.000,00

- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.2.01.04	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**	**941.079.485.000,00**	**921.975.486.232,00**	**97,97**	**886.346.308.813,00**
4.2.01.04.01	DAK Non Fisik-BOS Reguler	417.109.620.000,00	414.278.707.711,00	99,32	410.650.078.399,00
4.2.01.04.03	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	8.543.750.000,00	8.241.250.000,00	96,46	10.355.000.000,00
4.2.01.04.04	DAK Non Fisik-TPG PNSD	489.226.856.000,00	474.423.233.850,00	96,97	447.521.828.020,00
4.2.01.04.05	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	4.859.852.000,00	4.859.852.000,00	100,00	3.756.808.687,00
4.2.01.04.06	DAK Non Fisik-TKG PNSD	3.026.016.000,00	3.312.510.000,00	109,47	2.551.508.000,00
4.2.01.04.09	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	2.000.000.000,00	1.984.225.868,00	99,21	2.000.000.000,00
4.2.01.04.10	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman	2.000.000.000,00	1.894.804.865,00	94,74	1.973.421.167,00

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
	Budaya-Taman Budaya				
4.2.01.04.11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6.991.591.000,00	5.776.249.709,00	82,62	3.437.352.107,00
4.2.01.04.16	DAK Non Fisik-PK2UKM	5.246.077.000,00	5.214.735.390,00	99,40	2.879.903.830,00
4.2.01.04.20	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	1.669.723.000,00	1.646.183.638,00	98,59	947.626.703,00
4.2.01.04.22	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	343.733.201,00	84,66	272.781.900,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.2.01.02.	**Dana Insentif Daerah (DID)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.621.025.000,00**
4.2.01.02.01	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	8.621.025.000,00
4.2.01.06.	**Insentif Fiskal**	**13.249.284.000,00**	**13.249.284.000,00**	**100,00**	**0,00**
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	13.249.284.000,00	13.249.284.000,00	100,00	0,00

Dapat kami informasikan bahwa dalam hal pengakuan penyaluran pokok Dana Bagi Hasil (DBH)/Dana Alokasi Umum (DAU) melalui Treasury Deposit Facility (TDF) sesuai dengan Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan-Kementerian Keuangan Nomor ND-202/PB.6.2023 tanggal 10 Maret 2023, perihal Penyesuaian Kebijakan Akuntansi atas Penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum melalui Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD), yaitu:

a. Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke rekening TDF atas nama pemerintah daerah maka pemerintah daerah mencatat sebagai Aset Lainnya-Dana Treasury Deposit Facility (TDF) dineraca pada pendapatan DBH/DAU-LO;

b. Dalam hal pokok DBH/DAU telah dilakukan penarikan oleh pemerintah daerah dari rekening TDF dan telah disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) maka pemerintah daerah mencatat sebagai Kas di Kas Daerah pada Aset Lainnya-Dana Treasury Deposit Facility (TDF) dineraca dan mengakui pendapatan dengan dengan mencatat dengan mencatat Estimasi Perubahan SAL pada pendapatan Dana Transfer DBH/DAU-LRA.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan berdasarkan:

a. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024;

b. PMK Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;

c. PMK Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya;

d. PMK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
e. PMK Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan;
f. PMK Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
g. PMK Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum;
h. PMK Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum;
i. PMK Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024;
j. KMK Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Dana Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024;
k. KMK Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara Di Daerah;
l. Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-100/PK.2/2024 tentang Tindak Lanjut Pasca Penetapan PMK Nomor 89 Tahun 2024 Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024;

Rincian anggaran dan realisasi serta sisa DAK Fisik dan Non Fisik dapat dilihat pada Lampiran 7 dan 8.

5.1.1.2.1. PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**30.656.800.000,00**	**29.244.538.000,00**	**95,39**	**27.713.670.000,00**
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	0,00
4.2.02.02.04	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	29.156.800.000,00	27.744.538.000,00	95,16	27.713.670.000,00

Jumlah tersebut diatas merupakan realisasi dan anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam Tahun 2024 dan 2023. Untuk Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp29.244.538.000,00 atau 95,39% dan tidak tercapai dari target sebesar Rp1.412.262.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp1.530.868.000,00 atau 5,52%. Pendapatan Transfer Antar Daerah berasal dari:

No	Uraian	Realisasi (Rp)
A	**Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi**	**1.500.000.000,00**
1	BKK dari Prov. Kep. Riau	500.000.000,00
2	BKK dari Provinsi Riau	1.000.000.000,00
B	**Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota**	**27.744.538.000,00**
1	BKK Kab. Sijunjung	5.604.000.000,00
2	BKK Bukittinggi	9.597.200.000,00
3	BKK Kab Pasaman	8.557.658.000,00
4	BKK Kota Pariaman	3.235.680.000,00
5	BKK Kab Karimun	250.000.000,00
6	BKK Kab. Cianjur	500.000.000,00
	Jumlah	**29.244.538.000,00**

Dapat juga kami informasikan bahwa jumlah Bantuan Keuangan Khusus ini ini sebesar Rp29.244.538.000,00 dan digunakan untuk penanggulangan pasca bencana banjir bandang akibat meletusnya gunung marapi sebesar Rp2.250.000.000,00 yang berasal dari Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Cianjur, dan sebesar Rp26.994.538.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa bantuan keuangan dari kabupaten/kota lingkup Provinsi Sumatera Barat khusus untuk Pendidikan yaitu yang berasal dari kabupaten/kota dilingkungan Provinsi Sumatera Barat Penggunaan dana ini yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan untuk sekolah-sekolah sesuai naskah nota bantuan tersebut. Dapat kami informasikan dana tersebut telah direalisasikan sebesar Rp27.430.821.621,00. dan sisa BKK sampai tahun ini sebesar Rp2.130.719.360,52 yang akan dianggarkan kembali pada Tahun 2025 sesuai dengan Nota Bantuan Keuangan Khusus.

5.1.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**17.024.000.000,00**	**14.294.794.000,00**	**83,97**	**14.341.915.500,00**

Jika dilihat tabel di atas maka dapat diketahui bahwa realisasi dan anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp14.294.794.000,00 atau sebesar 83,97% dari pagu anggarannya. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 terdapat penurunan sebesar Rp47.121.500,00 atau 0,33%.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat; dan
2. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis.

Tabel 5.1.1.10
Anggaran dan Realisasi Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.3	**Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**17.024.000.000,00**	**14.294.794.000,00**	**83,97**	**14.341.915.500,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	99.091.500,00
4.3.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	17.024.000.000,00	14.294.794.000,00	83,97	14.242.824.000,00

Jika dilihat dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Hibah dari sumbangan pihak ketiga terdiri dari sumbangan dieler kendaraan bermotor, PT. Jasa Raharja dan PT Semen Padang. Sumbangan Pihak Ketiga ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga dan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga.

No	Uraian	Realisasi (Rp)
A	**Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**14.294.794.000,00**
1	Hibah Dealer Kendaraan Bermotor	1.297.794.000,00
2	Hibah PT Jasa Raharja	2.997.000.000,00
3	Hibah PT Semen Padang	10.000.000.000,00

Sub. Rincian masing-masing objek Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Lampiran 2.

5.1.2. BELANJA

Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 terdiri dari:

1. Belanja Operasi;
2. Belanja Modal;
3. Belanja Tidak Terduga; dan
4. Belanja Transfer.

Adapun Perbandingan Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.2.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5	**BELANJA DAERAH**	**7.017.741.696.945,19**	**6.524.664.745.123,96**	**92,97**	**6.352.991.353.499,87**

5.1	Belanja Operasi	4.853.518.637.062,19	4.614.017.505.277,85	95,07	4.419.911.196.951,35
5.2	Belanja Modal	856.550.234.585,00	765.506.194.874,35	89,37	991.975.692.930,52
5.3	Belanja Tidak Terduga	10.487.887.909,00	5.222.259.811,30	49,79	0,00
5.4	Belanja Transfer	1.297.184.937.389,00	1.139.918.785.160,46	87,88	941.104.463.618,00

Jika dilihat dari realisasi dan anggaran Belanja Daerah dalam Tahun 2024 mencapai 92,97% dari pagu anggarannya dengan sisa anggaran sebesar Rp493.076.951.821,23. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp171.673.391.624,09 atau 2,70%.

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan Tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 3, Rekapitulasi Belanja per SKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 9. Sedangkan Rekapitulasi Penerbitan dan Pencairan SP2D per SKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 14 dan Rekapitulasi setoran pengembalian belanja per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 15.

Penjelasan anggaran dan realisasi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1	**BELANJA OPERASI**	**4.853.518.637.062,19**	**4.614.017.505.277,85**	**95,07**	**4.419.911.196.951,35**

Jumlah tersebut diatas merupakan realisasi dan anggaran belanja operasi dalam Tahun 2024 dan 2023. Untuk Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp4.614.017.505.277,85 atau sebesar 95,07% dari pagu anggarannya dengan sisa anggaran sebesar Rp239.501.131.784,34. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp194.106.308.326,50 atau 4,39%.

Belanja Operasi terdiri dari:

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1	**BELANJA OPERASI**	**4.853.518.637.062,19**	**4.614.017.505.277,85**	**95,07**	**4.419.911.196.951,35**
5.1.01	Belanja Pegawai	2.588.514.014.191,16	2.490.554.904.931,00	96,22	2.195.331.447.151,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.935.171.371.802,03	1.803.917.885.970,85	93,22	1.964.366.347.631,35
5.1.04	Belanja Subsidi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	328.202.803.569,00	317.914.266.876,00	96,87	260.213.402.169,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	130.447.500,00	130.447.500,00	100,00	0,00

Rekapitulasi belanja operasi per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 10.

Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen belanja operasi adalah sebagai berikut:

5.1.2.1.1. BELANJA PEGAWAI

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	2.588.514.014.191,16	2.490.554.904.931,00	96,22	2.195.331.447.151,00

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi dan anggaran Belanja Pegawai Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp2.490.554.904.931,00 atau sebesar 96,22% dari pagu anggarannya dengan sisa anggaran sebesar Rp97.959.109.260,16. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp295.223.457.780,00 atau 13,45%. Belanja Pegawai terdiri dari:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan;
4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD; dan
7. Belanja Pegawai BLUD.

Objek Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.01	**BELANJA PEGAWAI**	**2.588.514.014.191,16**	**2.490.554.904.931,00**	**96,22**	**2.195.331.447.151,00**
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.468.930.028.509,16	1.453.653.152.151,00	98,96	1.278.422.254.523,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	496.155.650.820,00	446.780.453.124,00	90,06	392.632.787.075,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	576.239.121.042,00	543.426.045.788,00	94,32	478.365.057.312,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	40.903.890.441,00	40.807.622.530,00	99,76	40.953.439.716,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.692.199.376,00	1.325.604.130,00	78,34	243.027.548,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pim.DPRD	4.408.447.459,00	4.378.447.459,00	99,32	4.526.882.533,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	184.676.544,00	183.579.749,00	99,41	187.998.444,00

Ringkasan Belanja Pegawai per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 11.

5.1.2.1.2. BELANJA BARANG DAN JASA

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.02	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**1.935.171.371.802,03**	**1.803.917.885.970,85**	**93,22**	**1.964.366.347.631,35**

Jika dilihat dari tabel di atas realisasi Belanja Barang Jasa Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 1.803.917.885.970,85 atau sebesar 93,22% dari pagu anggarannya dengan sisa anggaran sebesar Rp131.253.485.831,18. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 terdapat penurunan sebesar Rp160.448.461.660,50 atau 8,17%.

Objek Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.02	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**1.935.171.371.802,03**	**1.803.917.885.970,85**	**93,22**	**1.964.366.347.631,35**
5.1.02.01	Belanja Barang	360.617.780.983,70	321.311.498.511,00	89,10	433.387.614.014,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	563.388.919.251,33	527.911.367.951,75	93,70	566.716.490.449,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	85.933.605.813,00	81.258.413.720,36	94,56	91.416.243.047,35
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	239.980.724.177,00	209.229.543.077,00	87,19	240.783.824.900,00
5.1.02.05	Belanja uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lainnya	13.377.355.000,00	11.704.898.750,00	87,50	15.829.303.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa Bos	276.407.346.201,00	274.150.899.411,00	99,18	279.832.836.184,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	395.465.640.376,00	378.351.264.549,74	95,67	336.400.036.037,00

Dari tabel diatas dapat di dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Barang

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**360.617.780.983,70**	**321.311.498.511,00**	**89,10**	**433.387.614.014,00**
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	360.269.371.453,70	320.971.941.161,00	89,09	432.498.438.564,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	177.242.530,00	176.053.850,00	99,33	889.175.450,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	171.167.000,00	163.503.500,00	95,52	0,00

Dari belanja barang pakai habis terdapat sub rincian objek Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya, yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD, yaitu :

a. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, yaitu:

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	%	Uraian
1	Dinas Pendidikan	12.935.255.000,00	12.248.472.400,00	94,69	Pengadaan Seragam Sekolah Murid, Perlengkapan Peserta Didik.
2	Dinas Perkimtan	520.000.000,00	520.000.000,00	100,00	Pengadaan Bahan bangunan dan Upah.
3	Dinas Sosial	768.256.200,00	694.955.250,00	90,46	Pengadaan Tempat Penampungan Pengungsian, Pengadaan Toolkit Keterampilan dan Toolkit Tata Boga Bagi Anak Terlantar, Pakan Pelet Ikan, Tabung Gas Oksigen, Gerobak, dll
4	Dinas Pangan	3.217.025.000,00	2.921.482.750,00	90,81	Pengadaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, logistik kebencanaan, bibit tanaman NMP (BIbit/Benih Manggis), ayam dan pakan ayam dll.
5	Dinas Lingkungan Hidup	647.100.000,00	620.745.000,00	95,93	Becak Motor sampah, Mesin Pencacah Sampah Plastik.
6	Dinas Koperasi dan UKM	59.386.415,00	58.830.000,00	99,06	Bahan utk pelatihan.
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	12.481.559.518,00	12.036.875.792,00	96,44	Pengadaan Benih Ikan Mas dan Kepiting dengan Bobot 1 - 2 ons, Pakan Ikan Mas, Timbangan Digital, Benur Udang Vaname, Mesin Long Tail 9PK,13PK), Mesin Tempel (4PK,2,5PK,15PK, 20PK) Benih Ikan Lele, Nila, Kerapu dan Pakan, Pekerjaan Restocking Perairan Umum, Pengadaan Jaring Langli dan Gillnet, Pakan dan Benih Ikan Gurami dan Lobster, Pengadaan Jaring Hijau, Trammel Net, Calon Induk Ikan Nila, Lele, Mas, Gurame dan Pakan, Bahan Pendukung Pengolahan (Garam), Apartemen Cacing Sutera dan Kepiting, Bibit dan Penanaman Mangrove, Fishbox 100 L dan 200 L, Perahu Fiberglass, Keramba Jaring Apung (KJA) Lobster, Mesin Diesel Kapal Perikanan, SPG Roda 3, dll.
8	Dinas Pariwisata	438.931.400,00	428.227.800,00	97,56	Bahan Pokdarwis
9	Diinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura	80.638.605.240,00	63.897.878.325,00	79,24	Pengadaan Benih Padi, Alpukat Sambung (Benih Alpukat), Bibit Kayu Manis, Cengkeh, Pala, pengembangan alpukat Pengadaan Pupuk Kompos, Benih Jagung, Bawang, Cabe, pengembangan durian dan Jeruk,

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	%	Uraian
					Benih Sawit, Bibit Pisang, Benih Manggis dan pupuk kompos, Benih Kelapa, tanaman Rempah, Cultivator (pergerakan Mesin 6,5 HP), Corn Shealer dan Power Thresher, pembangunan screen house kentang dan instalasi pendukungnya Pengadaan Larutan Nutrisi Mix, Benih Kopi Robusta dan Arabika, Sekam Bakar, Cocopit, Genset, Becak Motor, pekerjaan JUT (Peningkatan Jalan Beton K-175), Mesin Potong Rumput, TR2 Rotary 10,5 HP, TR2 Bjk Singkal 8,5 PK, Bjk Singkal TR2 6,5 HP, Mulsa Plastik, Aeroponik, Con Shealer, Combaine Harvester, Hand Sprayer, Hydrotiller, Alat Press Gambir, Mesin Pengupas kulit kopi Basah /Pulper, Mesin Pengupas kulit kopi kering /Huller, Atabela, Mesin Pengupas Sabut kelapa, Mesin Pemarut kelapa, Mesin Pengurai sabut kelapa, Traktor Roda 4, Emposan Tikus/Hama, dll.
10	Dinas Peternakan dan Keswan	25.383.246.515,19	25.295.656.750,00	99,65	Pakan, Obat-obatan dan Ternak (Ayam, Puyuh, Itik, Kambing), Peralatan Bimtek Juru Sembelih Halal (Juleha) Ruminansia, mesin Alat Pencacah Pupuk Organik (APPO), Sapi Pesisir Jantan Bibit, Mesin Tetas, dll.
11	Dinas Kehutanan	9.900.817.504,00	9.584.429.347,00	96,80	pengadaan alat penen trigona dan pakaian pelindung panen madu, papan nama/informasi dan papan larangan, Pengadaan Bibit (Gaharu,Kopi,Rotan), alat panen madu galo galo, bibit bunga pakan ternak lebah galo-galo, Stup Lebah Madu, bibit durian Musangking (MK), Alat Ekonomi Produktif (AEP), Pupuk, bibit tanaman gaharu, Bibit Bunga Kemuning, dan Bibit Bunga Xanthostemon, Pengadaan ATV, mesin generator bensin, mesin pengiris pinang dan mesin pengupas biji pinang, Tenda Camping dan Tenda Glamping, Pengadaan Ajir, Peralatan Paralayang, Drone dan Action Camera, Gazebo untuk Pengembangan Sarpras Ekowisata, dll.
12	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.683.000.000,00	3.456.435.996,00	93,85	Pemasangan Instalasi Listrik untuk Rumah Tangga Sederhana, Pembangunan PLTS, dll.
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.926.966.522,00	1.826.817.540,00	94,80	gerobak dorong, Mesin Jahit, Peralatan pada Bimtek, dll
	JUMLAH	**152.600.149.314,19**	**133.590.806.950,00**	**87,54**	

b. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan uraian sebagai berikut:

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	%	Uraian
1	Dinas Sosial	142.574.040,00	142.021.000,00	99,61	Penyediaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan, enyediaan sandang (Pengadaan Pakaian, Alas kaki dll), Penyediaan Asrama yang Mudah di Akses Anak Terlantar dll.
	JUMLAH	**142.574.040,00**	**142.021.000,00**	**99,61**	

2. Belanja Jasa

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**563.388.919.251,33**	**527.911.367.951,75**	**93,70**	**566.716.490.449,00**
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	344.818.008.247,61	322.517.754.025,42	93,53	326.938.702.759,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	114.097.463.920,72	111.363.525.149,00	97,60	105.261.791.333,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	14.445.149.046,00	11.604.232.527,00	80,33	22.890.682.432,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	34.696.149.561,00	30.735.905.855,00	88,59	50.402.630.319,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	235.600.000,00	208.350.000,00	88,43	154.050.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	24.829.944.229,00	23.633.451.583,33	95,18	27.014.531.342,00
5.1.02.02. 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	15.038.070.969,00	13.709.871.812,00	91,17	8.039.063.843,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00	31.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	15.033.433.278,00	13.989.877.000,00	93,06	25.983.538.421,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	153.600.000,00	110.400.000,00	71,88	0,00

3. Belanja Pemeliharaan

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**85.933.605.813,00**	**81.258.413.720,36**	**94,56**	**91.416.243.047,35**
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	87.190.000,00	0,00	0,00	64.144.000,00
5.1.02.03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.715.377.081,00	25.547.267.866,00	92,18	28.762.577.219,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	22.955.239.782,00	20.927.790.483,36	91,17	21.695.375.790,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.175.798.950,00	34.783.355.371,00	98,88	40.894.146.038,35

4. Belanja Perjalanan Dinas

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**239.980.724.177,00**	**209.229.543.077,00**	**87,19**	**240.783.824.900,00**
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	231.598.801.824,00	201.609.214.191,00	87,05	237.658.242.400,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	8.381.922.353,00	7.620.328.886,00	90,91	3.125.582.500,00

5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**13.377.355.000,00**	**11.704.898.750,00**	**87,50**	**15.829.303.000,00**
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.370.005.000,00	11.697.548.750,00	87,49	15.826.603.000,00
5.1.02.05 02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.350.000,00	7.350.000,00	100,00	2.700.000,00

Adapun untuk Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, dilaksanakan oleh SKPD sebagai berikut:

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	6.075.265.000,00	4.896.110.000,00	80,59	Hadiah Juara Perlombaan, Piagam Penghargaan, medali,
2	Dinas Kesehatan	90.000.000,00	40.515.000,00	45,02	Hadiah perlombaan dan penghargaan atas prestasi
3	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	Hadiah Perlombaan
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.890.000,00	13.890.000,00	100,00	Hadiah perlombaan dan penghargaan atas prestasi
5	Dinas Sosial	2.219.345.000,00	2.192.622.250,00	98,80	Hadiah perlombaan, penghargaan atas prestasi dan Penanganan dampak sosial kemasyarakatan
6	Dinas Pangan	201.390.000,00	197.845.000,00	98,24	Hadiah perlombaan dan penghargaan atas prestasi
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA dan KB	166.370.000,00	159.776.500,00	96,04	Hadiah perlombaan
8	Dinas Lingkungan Hidup	40.450.000,00	40.450.000,00	100,00	Penghargaan atas prestasi
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	73.000.000,00	69.725.000,00	95,51	Hadiah perlombaan dan penghargaan atas prestasi

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
10	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa	806.970.000,00	806.790.000,00	99,98	Hadiah perlombaan
11	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.581.940.000,00	1.542.637.000,00	97,52	Hadiah perlombaan dan penghargaan atas prestasi
12	Dinas Kebudayaan	637.560.000,00	615.990.000,00	96,62	Hadiah perlombaan
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	98.550.000,00	93.150.000,00	94,52	Hadiah perlombaan
14	Dinas Pariwisata	306.000.000,00	296.500.000,00	96,90	Hadiah perlombaan
15	Dinas Perkebunan, TPH	108.500.000,00	108.500.000,00	100,00	Hadiah perlombaan
16	Dinas Peternakan dan Keswan	352.770.000,00	322.960.000,00	91,55	Hadiah perlombaan
17	Dinas Kehutanan	25.245.000,00	24.000.000,00	95,07	Hadiah perlombaan dan penghargaan atas prestasi
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	Hadiah perlombaan
19	Sekretariat Daerah	368.770.000,00	190.000.000,00	51,52	Hadiah perlombaan dan penghargaan atas prestasi
20	Badan Kepegawaian Daerah	6.240.000,00	6.240.000,00	100,00	Hadiah perlombaan
21	Badan Pengembangan SDM	11.250.000,00	10.848.000,00	96,43	Penghargaan atas prestasi
22	Badan Penelitian dsn Pengembangan	117.500.000,00	0,00	0,00	Hadiah perlombaan
	JUMLAH	**13.370.005.000,00**	**11.697.548.750,00**	**87,49**	

Untuk Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

6. Belanja Barang dan Jasa BOS dan BLUD

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.02.88	**Belanja Barang dan Jasa BOS**	**276.407.346.201,00**	**274.150.899.411,00**	**99,18**	**279.832.836.184,00**
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	276.407.346.201,00	274.150.899.411,00	99,18	279.832.836.184,00
5.1.02.99	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**395.465.640.376,00**	**378.351.264.549,74**	**95,67**	**336.400.036.037,00**
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	395.465.640.376,00	378.351.264.549,74	95,67	336.400.036.037,00

Rekapitulasi Belanja Barang dan Jasa per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 12. Dari realisasi Belanja Barang dan Jasa terdapat beberapa kejadian dikapitalisasi menjadi Aset Tetap dan Aset Lainnya sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 33.

Dikapitalisasinya Belanja Barang dan Jasa tersebut sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Pergub Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi. Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat

Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi yang baru dan dalam pengajuan proses harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat.

5.1.2.1.3. BELANJA SUBSIDI

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.04	BELANJA SUBSIDI	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Subsidi Tahun 2024 dan 2023. Pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.500.000.000,00 atau sebesar 100,00% sedangkan realisasi Tahun 2023 Nihil.

Hal ini sesuai Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2023 tentang penugasan kepada PT Bank Nagari dalam penyaluran Subsidi Bunga/Marjin kepada usaha kecil yang dilaksanakan bersama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sesuai deangan perjanjian kerjasama antara Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat dengan Bank Nagari

Pada Tahun 2024, Belanja Subsidi terealisasi 100% yang digunakan untuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga/Margin kepada Usaha Kecil, dengan jumlah usaha kecil yang dapat difasilitasi subsidi sebanyak 181 orang yang menyebar pada 19 Kab/Kota se-Sumatera Barat dengan total pinjaman yang diberikan sebesar Rp13.893.000.000,00.

5.1.2.1.4. BELANJA HIBAH

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.05	BELANJA HIBAH	328.202.803.569,00	317.914.266.876,00	96,87	260.213.402.169,00

Jika dilihat dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp317.914.266.876,00 atau sebesar 96,87% dari pagu anggarannya dengan sisa anggaran sebesar Rp10.288.536.693,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 terdapat kenaikan realisasi Belanja Hibah sebesar Rp57.700.864.707,00 atau 22,17%.

Rincian anggaran dan realisasi atas Belanja Hibah sebagai berikut:

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.05	BELANJA HIBAH	328.202.803.569,00	317.914.266.876,00	96,87	260.213.402.169,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	117.549.488.584,00	117.199.488.584,00	99,70	65.616.710.389,00
5.1.05.05	Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum	131.483.245.785,00	121.981.317.412,00	92,77	117.620.042.104,00

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
	Indonesia				
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	76.166.350.000,00	75.729.741.680,00	99,43	74.126.510.476,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.003.719.200,00	3.003.719.200,00	100,00	2.850.139.200,00

Belanja Hibah kepada partai politik berdasarkan jumlah kursi yang dimiliki oleh masing-masing partai politik di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Daftar partai politik yang menerima hibah Tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 21.

Belanja Hibah Tahun 2024 dilaksanakan oleh SKPD sebagai berikut :

No	SKPD	Tahun 2024		%	Ket
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dinas Pendidikan	76.166.350.000,00	75.729.741.680,00	99,43	Hibah Dana BOS utk Satdikmen dan Satdiksus Swasta
2	Dinas Kesehatan	2.315.650.000,00	2.290.200.000,00	98,90	Hibah kpd Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sumatera Barat
3	Dinas Sosial	41.572.305.450,00	40.496.863.450,00	97,41	Sarana dan Prasarana Panti, Penyediaan Makanan PSAA, Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar PA.
4	Dinas Pangan	2.599.708.000,00	2.599.708.000,00	100,00	Hibah kpd P-KRPL Kelompok Wanita Tani
5	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	4.000.000.000,00	3.980.104.631,00	99,50	Hibah kpd Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar,
6	Dinas Koperasi dan UKM	580.082.335,00	567.114.500,00	97,76	Hibah barang kepada koperasi berupa coffe maker, sound system, PC unit, perlengkapan rumah tangga, Mesin Digital Printing dan Sablon.
7	Dinas Pemuda dan Olahraga	37.205.000.000,00	37.158.165.000,00	98,87	Hibah kpd Kwarda 03 Gerakan Pramuka Prov.Sumbar, KONI, Soina, NPC, KORMI
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.350.000.000,00	1.312.960.086,00	97,26	Hibah kpd BPSK Kab/Kota,
9	Sekretariat Daerah	39.860.500.000,00	32.085.500.000,00	80,49	Hibah kpd Masjid, Mushalla, Surau, HKPB, Majelis Taklim, Kelompok Yasin, TPQ, MDTA, TK, PAUD, Gereja GKPM EL-BETHEL,
10	Badan Kepegawaian	2.000.000.000,00	1.490.701.745,00	74,54	Hibah kpd KOPRI Provinsi Sumbar,
11	Kesatuan Bangsa dan Politik	120.553.207.784,00	120.203.207.784,00	99,71	Hibah kpd KPU, Bawaslu, Kepolisian Daerah Sumbar, Komando Resor Militer 032/Wirabraja.

5.1.2.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.06	BELANJA BANTUAN SOSIAL	130.447.500,00	130.447.500,00	100,00	0,00

Pada Tahun 2024 Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar 100% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp130.447.500,00. Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 dialokasikan untuk individu atas kehilangan Hasil Tanaman terjadinya Bencana Longsor TPA Regional Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No.520-726-2024 tgl 16 Oktober 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura.

5.1.2.2. BELANJA MODAL

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.2	BELANJA MODAL	856.550.234.585,00	765.506.194.874,35	89,37	991.975.692.930,52

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023. Realisasi Tahun 2024 sebesar Rp765.506.194.874,35 atau 89,37% dari pagu anggarannya dengan sisa anggaran sebesar Rp91.044.039.710,65. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 terdapat penurunan sebesar Rp226.469.498.056,17 atau 22,83%. Belanja Modal terdiri dari:

A. Belanja Modal Tanah;
B. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
C. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
D. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan
E. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Adapun perbandingan anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.2.	**BELANJA MODAL**	**856.550.234.585,00**	**765.506.194.874,35**	**89,37**	**991.975.692.930,52**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.478.117.620,00	2.464.373.669,00	99,45	2.854.444.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	223.905.542.378,00	189.146.437.545,00	84,48	306.440.774.536,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	254.114.942.168,00	212.226.274.577,89	83,52	318.703.801.324,52
5.2.04	Belanja Modal Jalan,	332.313.610.530,00	317.619.554.844,46	95,58	323.497.539.237,00

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
	Jaringan dan Irigasi				
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	43.719.921.889,00	44.031.478.988,00	100,71	40.479.133.833,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	18.100.000,00	18.075.250,00	99,86	0,00

Realisasi belanja hibah dana BOS melebihi pagu anggaran yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena terdapat sisa anggaran minus dimana realisasi belanja lebih besar dari anggaran dana BOSP untuk Belanja Aset Tetap Lainnya Pengelolaa BOS SMA, Belanja Barang Jasa Pengelolaan BOS SMK dan Belanja Aset Tetap Lainnya Pengelolaan BOS SLB. Hal ini disebabkan pada saat jadwal entry akhir SIPD untuk penetapan APBD Perubahan TA 2024 jadwal perubahan RKAS BOS sekolah belum selesai, sehingga belum didapat angka pasti rincian belanja BOSP untuk masing-masing sekolah pada aplikasi ARKAS.

Rekapitulasi realisasi Belanja Modal per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 16.

Perbandingan antara anggaran dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Belanja Modal adalah sebagai berikut:

5.1.2.2.1. BELANJA MODAL TANAH

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.478.117.620,00	2.464.373.669,00	99,45	2.854.444.000,00

Jika dilihat dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.464.373.669,00 atau sebesar 99,45% dari pagu anggarannya dengan sisa anggaran sebesar Rp13.743.951,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 terdapat penurunan sebesar Rp390.070.331,00 atau 13,67%. Adapun anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah ini dilaksanakan oleh SKPD Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan serta Dinas Lingkungan Hidup.

Dari realisasi belanja modal Tanah tersebut diatas sebesar Rp2.464.373.669,00, tidak dikapitalisir menjadi aset sebesar Rp3.123.500,00.

5.1.2.2.2. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	223.905.542.378,00	189.146.437.545,00	84,48	306.440.774.536,00

Jika dilihat dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp189.146.437.545,00 atau sebesar

84,48% dengan sisa anggaran sebesar Rp34.759.104.833,00 Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 terdapat penurunan sebesar Rp117.294.336.991,00 atau 38,28%.

Adapun rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 20223 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.2.02	**BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN**	**223.905.542.378,00**	**189.146.437.545,00**	**84,48**	**306.440.774.536,00**
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	3.914.089.400,00	3.868.715.500,00	98,84	543.008.450,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkut	4.264.768.326,00	3.872.792.500,00	90,81	11.415.802.104,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel & alat ukur	27.944.000,00	26.959.000,00	96,48	1.192.242.943,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.486.540.000,00	1.378.796.139,00	92,75	2.074.262.692,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan RT	44.754.622.523,00	37.510.264.777,00	83,81	37.382.405.287,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	20.338.760.810,00	18.734.351.272,00	92,11	16.422.256.676,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	22.751.925.861,00	22.057.221.318,00	96,95	114.782.051.044,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	19.514.670.039,00	13.595.496.537,00	69,67	4.655.091.171,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	20.065.389.050,00	18.169.023.441,00	90,55	18.065.408.070,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	713.125.360,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	31.302.291.187,00	20.699.906.434,00	66,13	31.102.090.750,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	120.000.000,00	117.500.000,00	97,92	378.941.025,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	17.145.556.996,00	16.583.232.791,00	96,72	27.590.840.810,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	12.687.975.836,00	12.246.428.224,00	96,52	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	25.531.008.350,00	20.285.749.612,00	79,46	40.123.248.154,00

Dari realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tersebut diatas sebesar Rp189.146.437.545,00, tidak dikapitalisir menjadi aset sebesar Rp8.881.201.184,00.

5.1.2.2.3. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**254.114.942.168,00**	**212.226.274.577,89**	**83,52**	**318.703.801.324,52**

Jika dilihat dari tabel di atas realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp212.226.274.577,89 atau 83,52% dari pagu anggarannya dengan sisa anggaran sebesar Rp41.888.667.590,11.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp106.477.526.747,11 atau 33,41%.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan terdiri dari:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
2. Belanja Modal Bangunan Menara;
3. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
4. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

Adapun rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.2.03	**BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN**	**254.114.942.168,00**	**212.226.274.577,89**	**83,52**	**318.703.801.324,52**
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	236.212.944.168,00	203.063.622.060,89	85,97	308.697.266.812,00
5.2.03.02	Belanja Modal Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	103.300.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	98.448.703,52
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	17.901.998.000,00	9.162.652.517,00	51,18	9.804.785.809,00

Dari realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tersebut diatas sebesar Rp212.226.274.577,89 tidak dikapitalisir menjadi aset sebesar Rp989.628.750,00

5.1.2.2.4. BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi**	**332.313.610.530,00**	**317.619.554.844,46**	**95,58**	**323.497.539.237,00**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp317.619.554.844,46 atau 95,58% dari pagu anggarannya dengan sisa anggaran sebesar Rp14.694.055.685,54. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp5.877.984.392,54 atau 1,82%.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri dari:

1. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
2. Belanja Modal Bangunan Air;
3. Belanja Modal Instalasi;

4. Belanja Modal Jaringan; dan
5. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.

Adapun perbandingan realisasi rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi**	**332.313.610.530,00**	**317.619.554.844,46**	**95,58**	**323.497.539.237,00**
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	247.617.673.769,00	241.973.552.124,46	97,72	238.836.347.895,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	78.876.064.600,00	71.471.485.752,00	90,61	84.241.932.352,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	5.030.504.161,00	3.405.050.798,00	67,69	205.741.381,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD	789.368.000,00	769.466.170,00	97,48	209.717.609,00

Dari realisasi belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tersebut diatas sebesar Rp317.619.554.844,46, tidak dikapitalisir menjadi aset sebesar Rp523.648.942,00.

5.1.2.2.5. BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	**43.719.921.889,00**	**44.031.478.988,00**	**100,71**	**40.479.133.833,00**

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp44.031.478.988,00 atau 100,71% dari pagu anggarannya dengan sisa anggaran sebesar Rp311.557.099,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp3.552.345.155,00 atau 8,78%.

Belanja Modal Aset Lainnya terdiri dari:

1. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
2. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
3. Belanja Modal Hewan;
4. Belanja Modal Aset Tak Berwujud; dan
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.

Adapun rincian Belanja Modal Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.2.05	**BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA**	**43.719.921.889,00**	**44.031.478.988,00**	**100,71**	**40.479.133.833,00**
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	192.417.922,00	155.932.678,00	81,04	169.789.890,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	96.863.000,00	96.805.000,00	99,94	136.736.500,00
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	159.500.000,00	147.300.000,00	92,35	21.000.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	33.400.996.497,00	34.316.220.024,00	102,74	40.151.607.443,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	9.845.144.470,00	9.315.221.286,00	94,62	0,00
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Pada belanja modal aset tetap lainnya terdapat realisasi yang melebihi anggaran, Hal ini disebabkan pada saat jadwal entry akhir SIPD untuk penetapan APBD Perubahan TA 2024 jadwal perubahan RKAS BOS sekolah belum selesai, sehingga belum didapat angka pasti rincian belanja BOSP untuk masing-masing sekolah pada aplikasi ARKAS.

Dari realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya tersebut diatas sebesar Rp44.031.478.988,00, tidak dikapitalisir menjadi aset sebesar Rp109.187.050,00.

5.1.2.2.6. BELANJA MODAL ASET LAINNYA

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**	**18.100.000,00**	**18.075.250,00**	**99,86**	**0,00**

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp18.075.250,00 atau 99,86% dari pagu anggarannya dengan sisa anggaran sebesar Rp24.750,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 100%.

5.1.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.487.887.909,00	5.222.259.811,30	49,79	0,00

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp5.222.259.811,30 atau 49,79% dari pagu anggarannya dengan sisa anggaran sebesar Rp5.265.628.097,70. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 100%.

Belanja Tidak Terduga dilaksanakan untuk :

No	Uraian	Rp
A	**REALISASI BERDASARKAN SP2D DANA BTT**	
1	Penanganan Banjir dan Tanah Longsor di Kab. Pesisir Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur No.: 903-2952024 tgl 13 April 2024	2.212.343.203,30
2	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir Lahar Dingin, Banjir Bandang dan Longsor di Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 903-384-2024 tgl 20 Mei 2024	580.967.416,00
3	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir Lahar Dingin, Banjir Bandang dan Longsor di Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 903-384-2024 tgl 20 Mei 2024	1.016.668.200,00
4	Penanganan Banjir Lahar Dingin, Banjir Bandang dan Longsor di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Gubernur No.: 903-384-2024 tgl 20 Mei 2024	1.500.000.000,00
5	Penanganan Banjir Lahar Dingin Keputusan Gubernur Nomor: 903-410-2024 tgl 3 Juni 2024	1.100.000.000,00
6	Pengembalian Bunga/Jasa Giro Rekening BOS SD/SMP Negeri Tahun 2018 Pemerintah Kab. Pesisir Selatan, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-555-2024 tgl 7 Agustus 2024	39.343.470,00
	Jumlah Realisasi Berdasarkan SP2D Dana BTT	**6.449.322.289,30**
B.	**PENGEMBALIAN BELANJA BTT (Contra Post)**	
1	Pengembalian Dana BTT Tahap I - Dinas BMCKTR	455.926.132,00
2	Pengembalian BTT Tahap II - Dinas SDABK	165.764.000,00
3	Pengembalian Dana BTT Tahap II - Dinas Sosial	63.847.600,00
4	Pengembalian Dana BTT Tahap II - Dinas Kesehatan	490.340.816,00
5	Pengembalian Dana BTT Tahap III - Dinas BMCKTR	227.130,00
6	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pek. Harian Dana BTT Benacana Banjir dan Tanah Longsor Kab. Pesisir Selatan, CV Hamda Karya	27.185.800,00
7	Pengembalian Dana BTT Tahap II - Dinas Sosial	5.000.000,00
8	Pengembalian TU BTT Tahap II - Dinas SDABK	10.686.000,00
9	Pengembalian TU BTT Tahap II - Dinas SDABK	6.060.000,00
10	Pengembalian TU BTT Tahap II - Dinas SDABK	2.025.000,00
	Jumlah Pengembalian Dana BTT (Contra Post)	**1.227.062.478,00**
	REALISASI BERSIH BELANJA TIDAK TERDUGA (A-B)	**5.222.259.811,30**

5.1.2.4. BELANJA TRANSFER

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**1.297.184.937.389,00**	**1.139.918.785.160,46**	**87,88**	**941.104.463.618,00**

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat realisasi Belanja Transfer Tahun 2024 sebesar Rp1.139.918.785.160,46 atau sebesar 87,88% dari pagu anggarannya dengan sisa anggaran sebesar Rp157.266.152.228,54. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp198.814.321.542,46 atau 21,13%.

Belanja Transfer Tahun 2024 terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2.9
Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer
Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**1.297.184.937.389,00**	**1.139.918.785.160,46**	**87,88**	**941.104.463.618,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.249.538.837.389,00	1.098.402.469.691,00	87,90	908.031.786.786,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	47.646.100.000,00	41.516.315.469,46	87,13	33.072.676.832,00

Adapun rincian Belanja Transfer Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Belanja bagi hasil yang terealisasi sebesar Rp1.098.402.469.691,00 atau 87,90% merupakan hak pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari bagi hasil PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

   Berikut rincian Belanja Bagi Hasil Pajak ke pemerintah kabupaten/kota Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.10
Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil
Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.4.01	**BELANJA BAGI HASIL**	**1.249.538.837.389,00**	**1.098.402.469.691,00**	**87,90**	**908.031.786.786,00**
5.4.01	Kab. Pesisir Selatan	104.439.639.179,00	90.894.504.934,00	87,03	73.356.154.358,00
5.4.01	Kab. Solok	73.463.312.821,00	64.771.401.350,00	88,17	54.852.811.351,00
5.4.01	Kab. Sijunjung	62.635.950.499,00	54.697.719.049,00	87,33	44.519.103.726,00
5.4.01	Kab. Tanah Datar	73.747.727.997,00	64.411.262.206,00	87,34	54.090.701.124,00
5.4.01	Kab. Padang Pariaman	87.374.225.537,00	63.494.188.992,00	72,67	61.858.378.407,00

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.4.01	Kab. Agam	91.524.391.536,00	80.074.349.068,00	87,49	68.294.414.202,00
5.4.01	Kab. Lima Puluh Kota	72.186.809.866,00	63.905.443.504,00	88,53	55.552.292.238,00
5.4.01	Kab. Pasaman	61.593.509.466,00	54.723.800.152,00	88,85	44.279.359.230,00
5.4.01	Kab. Mentawai	47.291.093.523,00	43.907.408.501,00	92,84	41.977.007.014,00
5.4.01	Kab. Pasaman Barat	73.116.982.448,00	64.732.768.492,00	88,53	50.539.469.007,00
5.4.01	Kab. Solok Selatan	60.374.294.308,00	52.808.641.848,00	87,47	39.025.311.603,00
5.4.01	Kab. Dharmasraya	67.254.038.253,00	58.241.057.201,00	86,60	48.627.484.675,00
5.4.01	Kota Padang	150.544.206.102,00	147.177.486.547,00	97.76	106.253.440.150,00
5.4.01	Kota Solok	36.071.749.840,00	31.937.605.666,00	88,54	26.684.448.503,00
5.4.01	Kota Sawahlunto	38.132.546.839,00	33.566.161.577,00	88,02	27.492.214.002,00
5.4.01	Kota Padang Panjang	31.988.184.915,00	24.332.323.909,00	76,07	23.956.098.245,00
5.4.01	Kota Bukittinggi	38.446.688.323,00	34.409.535.374,00	89,50	28.741.470.215,00
5.4.01	Kota Payakumbuh	42.198.268.712,00	37.352.853.288,00	88,52	30.942.154.700,00
5.4.01	Kota Pariaman	37.155.217.225,00	32.963.958.033,00	88,72	26.989.474.036,00

2. Belanja Bantuan Keuangan yang terealisasi sebesar Rp41.516.315.469,46. Merupakan Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota, yang penganggarannya dilakukan berdasarkan surat permohonan (rekomendasi) dari Bupati/Walikota yang disampaikan kepada pemerintah provinsi. Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota yang dialokasikan pada Tahun 2024 adalah Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus (BKK) yaitu alokasi bantuan keuangan yang peruntukannya telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi selaku pemberi bantuan berdasarkan kegiatan yang diusulkan oleh Bupati/Walikota.

   Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Pergub Nomor 06 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Kepada pemerintah kabupaten/kota dan Keputusan Gubernur sebagai berikut:

   a) Keputusan Gubernur No: 903-122-2024 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemkab Padang Pariaman TA 2024 tgl 6 Jan 2024;
   b) SK Gubernur Nomor: 900.1.1-244-2024 tentang Alokasi Dana BKK kepada Pemkab Sijunjung TA 2024 tgl 25 Maret 2024;
   c) SK Gubernur Nomor: 900.1.1-239-2024 tentang Alokasi Dana BKK kepada Pemko Bukittinggi TA 2024 tgl 22 Maret 2024;
   d) SK Gubernur No.: 900.1.1-246-2024 tentang Alokasi Dana BKK kepada Pemkab Solok Selatan TA 2024 tgl 25 Maret 2024;
   e) SK Gubernur No.: 900.1.1-245-2024 tentang Alokasi Dana BKK kepada Pemkab Tanah Datar TA 2024 tgl 25 Maret 2024;
   f) SK Gubernur No.: 900.1.1.248-2024 tentang Alokasi BKK kepada Pemkab Pasaman TA 2024 tgl 25 Maret 2024;

g) SK Gubernur No.: 900.1.1.247-2024 tentang Alokasi BKK kepada Pemko Padang TA 2024 tgl 25 Maret 2024;

h) SK Gubernur No.: 900.1.1.250-2024 tentang Alokasi BKK kepada Pemko Padang Panjang TA 2024 tgl 25 Maret 2024;

i) SK Gubernur Sumatera Barat No.: 900.1.1-249-2024 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemkab Pasaman Barat TA 2024 tgl 25 Maret 2024.

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota yaitu:

Tabel 5.1.2.11
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan
Tahun 2024 dan 2023

Kode Rek	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.4.02	**BELANJA BANTUAN KEUANGAN**	**41.516.315.469,46**	**33.072.676.832,00**
5.4.02	Kab. Solok Selatan	5.885.786.600,00	7.000.000.000,00
5.4.02	Kab. Lima Puluh Kota	0,00	1.628.848.000,00
5.4.02	Kab. Solok	0,00	4.650.000.000,00
5.4.02	Kab. Mentawai	0,00	1.660.000.000,00
5.4.02	Kab. Tanah Datar	17.148.242.130,00	2.960.000.000,00
5.4.02	Kab. Pasaman	3.387.189.600,00	1.500.000.000,00
5.4.02	Kab. Agam	0,00	500.000.000,00
5.4.02	Kab. Pesisir Selatan	0,00	200.000.000,00
5.4.02	Kab. Pasaman Barat	499.000.000,00	2.044.151.000,00
5.4.02	Kota Solok	0,00	1.000.000.000,00
5.4.02	Kota Bukit Tinggi	10.424.350.506,46	0,00
5.4.02	Kota Sawahlunto	0,00	3.800.000.000,00
5.4.02	Kota Padang Panjang	1.135.373.000,00	0,00
5.4.02	Kota Payakumbuh	0,00	0,00
5.4.02	Kota Padang	1.336.373.633,00	4.579.875.432,00
5.4.02	Kab. Sijunjung	500.000.000,00	609.802.400,00
5.4.02	Kab. Padang Pariaman	1.200.000.000,00	300.000.000,00
5.4.02	Kota Pariaman	0,00	640.000.000,00

5.1.3 SURPLUS/(DEFISIT)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
	SURPLUS (DEFISIT)	**(160.447.544.425,19)**	**(42.246.061.718,76)**	**(26,33)**	**(89.112.916.648,19)**

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Surplus/(Defisit) Tahun 2024 dan 2023 berasal dari pendapatan dikurangi dengan belanja. Realisasi Tahun 2024 sebesar (Rp42.246.061.718,76) atau sebesar 26,33% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp 46.866.854.929,43.

5.1.4. PEMBIAYAAN

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
6	PEMBIAYAAN	160.447.544.425,19	159.981.015.714,19	99,71	269.560.461.073,38

Jumlah di atas merupakan anggaran dan realisasi Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023. Untuk membiayai defisit APBD 2024 dianggarkan pembiayaan sebesar Rp160.447.544.425,19 dalam pelaksanaan APBD 2024 dan terealisasi sebesar Rp159.981.015.714,19 atau sebesar 99,71% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp109.579.445.359,19. Sebab terjadi lebih besarnya realisasi pembiayaan dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Pembiayaan terdiri :

A. Penerimaan Pembiayaan
   Penerimaan Pembiayaan berupa SiLPA tahun sebelumnya yang dianggarkan sebesar Rp180.447.544.425,19 dan terealisasi sebesar Rp179.981.015.714,19 atau 99,74% yang berasal dari SiLPA tahun lalu sesuai LKPD *audited* Tahun 2023 dan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 Nomor 2 Tahun 2024, tanggal 27 September 2024 sebesar Rp180.447.544.425,19 dan adanya koreksi kurang kas BOS tahun lalu sebesar Rp466.528.711,00 pada Dinas Pendidikan yang disebabkan karena sisa uang atau SiLPA tersebut sudah dikembalikan ke Kas negara karena adanya pembatalan oleh kementerian terhadap sekolah untuk menerima bos kinerja dikarenakan sekolah tersebut sudah menerima dana SMK PK, tetapi masih tercatat di BAR sebelumnya karena tidak dilakukan koreksi saldo awal di tahun terjadinya pengembalian sehingga masih tercatat sebagai SILPA pada Laporan Keuangan Tahun 2023

B. Pengeluaran Pembiayaan
   Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp20.000.000.000,00 atau 100%. Realisasi atas Pengeluaran Pembiayaan merupakan tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada BUMD PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Bank Nagari) Tahun 2024 dengan SP2D Nomor 13.00/04.0/000001/Pembiayaan/ 5.02.0.00.0.00.01.0000/M/8/2024 sebesar Rp20.000.000.000,00.

5.1.5. SILPA

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
	SiLPA	0,00	117.734.953.995,43	-	180.447.544.425,19

Jumlah tersebut di atas merupakan SiLPA Tahun 2024 dan 2023. Berikut ini perhitungan SiLPA Tahun 2024 dan 2023.

Tabel 5.1.2.12
Perhitungan SiLPA Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Realisasi Pendapatan	6.482.418.683.405,20	6.263.878.436.851,68
Realisasi Belanja	6.524.664.745.123,96	6.352.991.353.499,87
Surplus/(Defisit) Anggaran	**(42.246.061.718,76)**	**(89.112.916.648,19)**
Pembiayaan		
Penerimaan Pembiayaan	179.981.015.714,19	289.560.461.073,38
Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	**159.981.015.714,19**	**269.560.461.073,38**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**117.734.953.995,43**	**180.447.544.425,19**

Rincian atas Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA):

Kas di Kas Daerah	Rp	88.147.677.797,12
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	323.138.845,31
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	5.600.000,00
Kas BLUD	Rp	28.036.491.064,00
Kas BOS	Rp	1.222.046.289,00
Kas Lainnya	Rp	0,00
Jumlah	**Rp**	**117.734.953.995,43**

Sedangkan rincian atas Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berdasarkan APBD sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.13
Ringkasan Anggaran Dan Realisasi APBD
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**6.857.294.152.520,00**	**6.482.418.683.405,20**	**94,53**	**(374.875.469.114,80)**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**3.342.769.899.590,00**	**2.942.563.617.866,20**	**88,03**	**(400.206.281.723,80)**
4.1.01.	Pajak Daerah	2.693.451.041.456,00	2.338.112.925.264,00	86,81	(355.338.116.192,00)
4.1.02.	Retribusi Daerah	414.280.722.633,00	382.306.933.091,49	92,28	(31.973.789.541,51)
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	129.624.977.090,00	122.018.602.181,00	94,13	(7.606.374.909,00)
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	105.413.158.411,00	100.125.157.329,71	94,98	(5.288.001.081,29)
4.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.497.500.252.930,00**	**3.525.560.271.539,00**	**100,80**	**28.060.018.609,00**
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.466.843.452.930,00	3.496.315.733.539,00	100,85	29.472.280.609,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.656.800.000,00	29.244.538.000,00	95,39	(1.412.262.000,00)
4.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**17.024.000.000,00**	**14.294.794.000,00**	**83,97**	**(2.729.206.000,00)**

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
4.3.01.	Pendapatan Hibah	17.024.000.000,00	14.294.794.000,00	83,97	(2.729.206.000,00)
5.	**BELANJA DAERAH**	**7.017.741.696.945,19**	**6.524.664.745.123,96**	**92,97**	**493.076.951.821,23**
5.1.	**BELANJA OPERASI**	**4.853.518.637.062,19**	**4.614.017.505.277,85**	**95,07**	**239.501.131.784,34**
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.588.514.014.191,16	2.490.554.904.931,00	96,22	97.959.109.260,16
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.935.171.371.802,03	1.803.917.885.970,85	93,22	131.253.485.831,18
5.1.04.	Belanja Subsidi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.	Belanja Hibah	328.202.803.569,00	317.914.266.876,00	96,87	10.288.536.693,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	130.447.500,00	130.447.500.00	100,00	0,00
5.2.	**BELANJA MODAL**	**856.550.234.585,00**	**765.506.194.874,35**	**89,37**	**91.044.039.710,65**
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	2.478.117.620,00	2.464.373.669,00	99,45	13.743.951,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	223.905.542.378,00	189.146.437.545,00	84,48	34.759.104.833,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	254.114.942.168,00	212.226.274.577,89	83,52	41.888.667.590,11
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	332.313.610.530,00	317.619.554.844,46	95,58	14.694.055.685,54
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	43.719.921.889,00	44.031.478.988,00	100,71	(311.557.099,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	18.100.000,00	18.075.250,00	99,86	24.750,00
5.3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**10.487.887.909,00**	**5.222.259.811,30**	**49,79**	**5.265.628.097,70**
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	10.487.887.909,00	5.222.259.811,30	49,79	5.265.628.097,70
5.4.	**BELANJA TRANSFER**	**1.297.184.937.389,00**	**1.139.918.785.160,46**	**87,88**	**157.266.152.228,54**
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	1.249.538.837.389,00	1.098.402.469.691,00	87,90	151.136.367.698,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	47.646.100.000,00	41.516.315.469,46	87,13	6.129.784.530,54
	SURPLUS/DEFISIT	**(160.447.544.425,19)**	**(42.246.061.718,76)**	**26,33**	**(117.090.798.475,46)**
6.	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**160.447.544.425,19**	**159.981.015.714,19**	**99,71**	**(466.528.711,00)**
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	180.447.544.425,19	179.981.015.714,19	99,74	(466.528.711,00)
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0,00**	**117.734.953.995,43**		**-117.734.953.995,43**

5.2 Penjelasan atas Laporan Perubahan SAL (Saldo Anggaran Lebih)

Nomor	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023 (Audited)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	180.447.544.425,19	289.279.692.879,38
2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(179.981.015.714,19)	(289.560.461.073,38)
3	**Sub Total**	**466.528.711,00**	**(280.768.194,00)**
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	117.734.953.995,43	180.447.544.425,19
5	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(466.528.711,00)	322.477.368,00
6	Lain-lain	0,00	(41.709.174,00)
7	**Saldo Anggaran Lebih Akhir**	**117.734.953.995,43**	**180.447.544.425,19**

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SILPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lainnya yang diperkenankan. Saldo Anggaran lebih awal tahun 2024 sebesar **Rp180.447.544.425,19** merupakan saldo SILPA (Sisa Anggaran Lebih Pembiayaan Anggaran) audited tahun anggaran 2023;
2. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar **(Rp179.981.015.714,19)** merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang merupakan SiLPA audited Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp180.447.544.425,19** dikurangi dengan koreksi kurang SiLPA sebesar Rp466.528.711,00 yang merupakan koreksi kas BOS pada Dinas Pendidikan.
3. Sub Total **Rp466.528.711,00** merupakan selisih antara Saldo Anggaran Lebih Awal dan Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar **Rp117.734.953.995,43** adalah selisih pendapatan LRA dengan belanja dan LRA tahun 2024 ditambah dengan pembiayaan netto tahun 2024;
5. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya adalah sebesar **Rp466.528.711,00** yang merupakan koreksi kas BOS pada Dinas Pendidikan.
6. Lain-lain adalah sebesar **Rp0,00** yang merupakan koreksi SilPA tahun berjalan.
7. Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp117.734.953.995,43.**
8. **SiLPA sebesar Rp117.734.953.995,43 terdiri dari:**

No	Uraian		Jumlah
1.	**Kas Daerah**		**88.147.677.797,12**
2.	**Kas BLUD**		**28.036.491.064,00**
	a	RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukit Tinggi	11.552.737.052,51
	b	RSJ HB Saa;nin Padang	1.787.968.539,66
	c	RSUD M. Natsir Solok	4.741.919.520,50
	d	RSUD Pariaman	5.030.961.338,03
	e	BKIM, LABKES dan RS. Paru - Dinkes	1.912.588.192,99
	f	Dinas Pendididkan (SMK)	3.010.316.420,31
3	**Kas di Bendahara Pengeluaran**		**323.138.845,31**
	a	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	470.000,00
	b	Dinas Pendidikan	322.668.845,31
4	**Kas di Bendahara Penerimaan**		**5.600.000,00**
	a	Dinas Kesehatan	5.600.000,00
5	**Kas BOSP**		**1.222.046.289,00**
	a	Satdikmen dan Satdiksus pada Dinas Pendidikan	1.222.046.289,00
6	**Kas Lainnya**		
	a	Kas Internal Acconut/Escrow Account Bank Nagari (Dinas Pendidikan)	

5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.3.1. ASET

5.3.1.1. ASET LANCAR

5.3.1.1.1. Kas dan Setara Kas

5.3.1.1.1.1 Kas Di Kas Daerah

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	88.147.677.797,12	148.044.084.493,35

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023. yang terdiri dari:

No Rekening	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023
71000106009291	Rekening Kas Umum Daerah (Bank Nagari)	88.138.604.344,12	147.868.502.164,35
71000106009346	Rekening Pengeluaran (Bank Nagari)	0,00	0,00
71000106009372	Rekening Penerimaan (Bank Nagari)	0,00	0,00
7517054530	Rekening Penerimaan (Bank BNI)	9.073.453,00	175.582.329,00

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerapkan *Single Treasury Account* untuk Rekening Kas Daerah. Pada akhir tahun anggaran, saldo pada rekening khusus pengeluaran daerah dan rekening khusus penerimaan daerah dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah, namun saldo sebesar Rp9.073.453,00 yang berada pada rekening penerimaan di Bank BNI belum dipindahbukukan karena merupakan pendapatan pajak daerah yang dipungut pada saat telah dilakukannya pemindahbukuan Tahun 2024.

Pada Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka rekening penerimaan di Bank BNI (Persero) Tbk Kantor Utama Padang berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 903-719-2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 903-148-2021 tentang Penetapan Nomor Rekening Kas Pemerintah Daerah dan Rekening Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Bank Pembangunan Daerah dan Bank Lainnya di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022. Pembukaan rekening ini berdasarkan Perjanjian Kerjasama Tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Barat dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Padang Nomor WPD/1/3240/R tanggal 28 Oktober 2020 tentang Pelayanan Pembayaran Pajak kendaraan Bermotor (PKB). Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Seluruh Unit Kerja dan Jaringan Elektronik PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Hal ini

ditindaklanjuti dengan kerja sama antara Bendahara Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan PT Bank Negara Indonesia (perseroan) Tbk Kantor Utama Padang Nomor 910/1659/B.Keuda/2020 dan Nomor PDG/03/6885 tanggal 30 Desember 2020.

Pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan perubahan rekening RKUD dari konvensional ke syariah pada Bank Nagari. Saldo Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari saldo pada RKUD Bank Nagari (71000106009291) per 31 Desember 2024 sebesar Rp88.693.488.294,12 dan saldo pada rekening operasional penerimaan BNI (7517054530) sebesar Rp9.073.453,00. Adapun saldo pada RKUD Bank Nagari sebesar Rp88.693.488.294,12 lebih besar sebesar Rp554.883.950,00 dibandingkan saldo Kas di Kas Daerah di Rekening Kas Umum Daerah (71000106009291) yang dilaporkan sebesar Rp88.138.604.344,12, disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. *Double entry* atau lebih setor pendapatan oleh Bank Nagari sebesar Rp49.883.950,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
06/12/2024	PKB UPTD Pasaman Barat (Dobel Entri)	11.441.950,00
04/12/2024	PKB UPTD Pesisir Selatan (Lebih Setor)	342.000,00
09/12/2024	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan DINKES (Dobel Entri)	38.100.000,00
	TOTAL	**49.883.950,00**

   Seluruh *double entry* dan *lebih setor* tersebut sudah dilakukan pendebitan oleh Bank Nagari atas izin BUD pada tanggal 31 Januari 2025 melalui Surat Nomor 901/12/Perbend-Aklap/BPKAD/2025.

2. Pembentukan deposito baru PT Rajawali sebesar Rp505.000.000,00 yang berasal dari sisa bunga deposito PT Rajawali Tahun 2024 yang merupakan koreksi SiLPA Tahun 2024, tidak diakui sebagai Kas di Kas Daerah melainkan Aset Lainnya-Aset yang Dibatasi Penggunaannya.

   Dapat juga diinformasikan bahwa realisasi bunga atas penempatan deposito Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 adalah sebesar Rp17.838.203.315,00, terdiri dari bunga deposito Dana Rajawali sebesar Rp5.044.640.025,00 dan bunga deposito dana kas daerah sebesar Rp12.359.722.235,00 serta bunga Remunerasi TDF-TKD (penempatan dana transfer Provinsi Sumatera Barat pada Bank Indonesia dengan nomor rekening 519000214980 sebesar Rp433.841.055,00. Untuk saldo bunga deposito Dana Rajawali sebesar Rp5.044.640.025,00 tersebut, sebesar Rp505.000.000,00 menjadi penambah pokok deposito Dana Rajawali tahun 2024, sedangkan sisanya sebesar Rp4.539.640.025,00 diakui sebagai pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan dialokasikan untuk kegiatan dana beasiswa pada Dinas Pendidikan, sehingga realisasi bunga atas penempatan deposito Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp17.333.203.315,00

   Sisa Kas Daerah sebesar Rp88.147.677.797,12 ini terdiri dari :

No	Uraian		Jumlah Rp	
a.	**Sisa *Earmarked* DAU**			**104.020.278.049,00**
	-DAU Tambahan THR Bagi ASN Guru Daerah	*Rp*	*85.428.406.000,00*	
	-DAU Penggajian Formasi PPPK	*Rp*	*24.058.050,00*	
	-DAU SG - (Bidang Pendidikan)	*Rp*	*13.936.405.434,00*	
	-DAU SG - (Bidang Kesehatan)	*Rp*	*3.583.411.082,00*	
	-DAU SG - (Bidang Pekerjaan Umum)	*Rp*	*1.047.997.483,00*	
b.	***Sisa Earmark DBH***			**3.454.356.698,00**
	DBH Perkebunan Sawit	Rp	1.655.627.015,00	
	DBH CHT	Rp	115.963.812,00	
	DBH DR	Rp	1.682.765.871	
c.	**Sisa *Earmarked* DAK Fisik**			**576.000.097,00**
	-Bid. Pendidikan (SMA, SMK, SLB)	*Rp*	*558.465.211,00*	
	-Bid. Kesehatan dan KB	*Rp*	*0,00*	
	-Bid. Jalan	*Rp*	*0,00*	
	-Bid. Irigasi	*Rp*	*4.658.800,00*	
	-Bid. Kelautan dan Perikanan	*Rp*	*12.876.086,00*	
d.	**Sisa *Earmarked* DAK Non Fisik**			**12.156.499.332,00**
	DAK Non Fisik – TPG	*Rp*	*10.415.657.613,00*	
	DAK Non Fisik – TKG	*Rp*	*43.292.300,00*	
	DAK Non Fisik – Tamsil	*Rp*	*581.342.344,00*	
	DAK Non Fisik – BOP Museum	*Rp*	*21.358.020,00*	
	DAK Non Fisik – BOP Taman Budaya	*Rp*	*39.111.423,00*	
	Dana Bantuan Operasional Kesehatan	*Rp*	*752.332.750,00*	
	DAK Non Fisik – PK2UKM	*Rp*	*178.849.035,00*	
	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	*Rp*	*24.962.299,00*	
	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	*Rp*	*99.593.548,00*	
e.	***Insentif Fiskal***			***376.564.510,00***
	IF – Kinerja Tahun Sebelumnya	*Rp*	*376.563.510,00*	
	IF – Kinerja Tahun Berjalan	*Rp*	*1.000,00*	
f.	**Sisa Dana BKK**			**2.130.719.360,52**
g.	**Jumlah *Earmarked (a+b+c+d+e+f)***			**122.714.418.046,52**
h.	**Sisa Kas di Kas Daerah**			**88.147.677.797,12**
i.	**Sisa APBD Murni (h - g)**			**(34.566.740.249,40)**

Terhadap sisa dana Earmarked tersebut diatas dianggarkan kembali pada APBD Tahun 2025. Dapat juga kami informasikan bahwa dikarenakan capaian PAD yang tidak sesuai dengan target, maka terhadap sisa earmarked ini digunakan dalam rangka membayar belanja yang telah dilaksanakan oleh SKPD dalam APBD Tahun 2024.

5.3.1.1.1.2. Kas Di Bendahara Penerimaan

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerima	5.600.000,00	930.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023. Saldo pada Bendahara Penerimaan sampai akhir Tahun 2024 bernilai Rp5.600.000,00 ini merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan pada tanggal 31 Desember 2024.

5.3.1.1.1.3. Kas Di Bendahara Pengeluaran

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	323.138.845,31	4.100.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023. Sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat saldo kas Di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp323.138.845,31 yang terdiri dari:

1. Sebesar Rp 322.668.845,31 pada Dinas Pendidikan Prov Sumbar yaitu pada rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Cabang Dinas VIII dan *Internal Account/ Escrow Account* pada Bank Nagari yang digunakan sebagai alat/ *tools* oleh untuk keperluan internal Bank Nagari dalam mempermudah proses transaksi pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta Tambahan Penghasilan ASN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Sisa saldo tersebut terdiri dari gaji dan tunjangan serta Tambahan Penghasilan ASN Dinas Pendidikan yang masih belum tuntas proses penyalurannya oleh Bank Nagari sebesar Rp139.052.352,00 dan sebesar Rp183.616.493,31 merupakan pengembalian belanja yang harus disetorkan kembali ke Kas Daerah.
2. Sebesar Rp470.000,00 pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang.

Pada saat laporan keuangan ini disusun seluruh Kas di bendahara Pengeluaran tersebut sudah disetor ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Rincian UP dan SPJ UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 1.

5.3.1.1.1.4. Kas Di Bendahara BLUD

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.1.01.04	Kas di Bendahara BLUD	28.036.491.064,00	30.888.069.226,84

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara BLUD RSAM Bukittinggi, RSJ. HB. Sa'anin Padang, RSUD Pariaman, RSUD M.Natsir dan BKIM-Labkes-RS.Paru (Dinas Kesehatan) serta SMK layanan BLUD (Dinas Pendidikan) per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan uraian sebagai berikut:

N0.	SKPD	SALDO AWAL (Rp)	PENDAPATAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
1	RSAM BKT	24.807.541.142,01	141.745.330.961,50	155.000.135.051,00	11.552.737.052,51
2	RSJ HB SAANIN	2.672.093.078,66	28.883.738.650,00	29.767.863.189,00	1.787.968.539,66
3	RS. M NATSIR SOLOK	493.250.694,50	102.693.134.890,00	98.444.466.064,00	4.741.919.520,50

N0.	SKPD	SALDO AWAL (Rp)	PENDAPATAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
4	RS. PARIAMAN	2.134.799.013,67	81.311.894.592,00	78.415.732.267,64	5.030.961.338,03
5	DINKES	270.234.757,00	19.505.837.286,99	17.863.483.851,00	1.912.588.192,99
6	DISDIK	510.150.541,00	31.761.198.054,41	29.261.032.175,10	3.010.316.420,31
	TOTAL	**30.888.069.226,84**	**405.901.134.434,90**	**408.752.712.597,74**	**28.036.491.064,00**

Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja serta sisa Kas BLUD tersebut di atas dapat dilihat pada Lampiran 22.

5.3.1.1.1.5. Kas BOS

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.1.01.05	Kas BOS	00,00	1.510.360.705,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran BOS SMA/SMK/SLB Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dan 2023.

Pengelolaan urusan pendidikan menengah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilimpahkan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi. Terhitung mulai 1 Januari 2017 pengelolaan sekolah menengah tersebut berada di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.07 tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Non Fisik dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang dana BOP PAUD, BOS dan BOP Kesetaraan. Dana BOS ini ditransfer dari Rekening Kas Negara langsung ke rekening sekolah.

Pada Tahun 2024 terjadi reklasifikasi Kas BOS ke Kas BOSP yang disebabkan karena perubahan nomenklatur dari Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler menjadi Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam rangka meningkatkan efektifitas bantuan operasional yang diberikan kepada sekolah, serta untuk menyesuaikan dengan perubahan struktur dan kebijakan yang lebih terintegrasi.

5.3.1.1.1.6. Kas Lainnya

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.1.01.07	Kas Lainnya	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023.

5.3.1.1.1.7. Setara Kas

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.1.01.08	Setara Kas	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo setara kas pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023.

5.3.1.1.1.8. Kas Dana BOSP

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.1.01.10	Kas Dana BOSP	1.222.046.289,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo pada Kasa Dana BOSP pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2024 dan 2023.

Pada Tahun 2024 terjadi reklasifikasi Kas BOS ke Kas BOSP yang disebabkan karena perubahan nomenklatur dari Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler menjadi Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam rangka meningkatkan efektifitas bantuan operasional yang diberikan kepada sekolah, serta untuk menyesuaikan dengan perubahan struktur dan kebijakan yang lebih terintegrasi.

Rincian Saldo Kas BOS terdiri dari:

NO.	URAIAN	NILAI (Rp)
A	**Sisa Saldo Tahun Sebelumnya**	**51.462.511,00**
1	SMA	43.233.704,00
2	SMK	8.161.303,00
3	SLB	67.504,00
B.	**Reguler 2024**	**844.074.315,00**
1	SMA	502.224.230,00
2	SMK	284.982.214,00
3	SLB	56.867.871,00
C.	**Kinerja 2024**	**326.509.463,00**
1	SMA	219.075.569,00
2	SMK	47.000,00
3	SLB	107.386.894,00
TOTAL		**1.222.046.289,00**

Rincian saldo dana BOSP masing-masing sekolah disajikan pada Lampiran 17 sampai dengan 20.

5.3.1.1.2. Investasi Jangka Pendek

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.1.02.	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dan 2023 dalam bentuk Deposito. Pada Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membentuk deposito sebesar Rp300.000.000.000,00 yang terdiri dari 6 (enam) bilyet deposito dengan nomor DS 018158, 018159, 018160, 018095, 018096 dan 018097 yang masing-masingnya bernilai sebesar Rp50.000.000.000,00. Deposito tersebut telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 19 November dan 27 Desember 2024 untuk membiayai pelaksanaan APBD Tahun 2024.

5.3.1.1.3. Piutang Pajak Daerah

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	59.890.385.232,00	51.514.670.887,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

No	URAIAN	SALDO AWAL (*audited* 2023) (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024 (Rp)
I	PIUTANG PAJAK DAERAH	51.514.670.887,00	59.755.411.562,00	51.379.697.217,00	59.890.385.232,00
1	PBB-KB	49.854.748.495,00	59.620.110.062,00	49.854.748.495,00	59.620.110.062,00
2	PAJAK AIR PERMUKAAN	1.659.922.392,00	135.301.500,00	1.524.948.722,00	270.275.170,00

Adapun rincian Piutang Pajak Daerah terdapat pada Lampiran 26**.**

Saldo Piutang Pajak Daerah tersebut tidak termasuk potensi penerimaan Pajak dari PKB kendaraan yang tidak mendaftar ulang s.d. 31 Desember 2024 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 51.

5.3.1.1.4. Piutang Retribusi Daerah

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	11.583.451.751,00	1.620.058.378,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 yang dirinci sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO AWAL (*audited* 2023) (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024 (Rp)
II	**PIUTANG RETRIBUSI DAERAH**	**1.620.058.378,00**	**38.490.199.099,33**	**28.526.805.726,33**	**11.583.451.751,00**
1	Dinas Kesehatan	897.004.378,00	1.717.124.900,00	1.463.888.278,00	1.150.241.000,00
2	RSUD Achmad Muchtar Bkt	0,00	19.219.262.949,33	11.772.039.446,33	7.447.223.503,00
3	RSJ HB Sa'anin	0,00	857.853.645,00	147.664.804,00	710.188.841,00
4	RSUD M. Natsir Solok	0,00	16.219.007.105,00	14.564.071.598,00	1.654.935.507,00
5	RSUD Pariaman	0,00	470.380.500,00	452.412.500,00	17.968.000,00
6	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	711.344.000,00	0,00	126.729.100,00	584.614.900,00
8	DKP	11.250.000,00	0,00	0,00	11.250.000,00
9	D. Perkebunan dan TPH	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00

Piutang Retribusi terdiri dari :

NO	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI JASA UMUM	PIUTANG RETRIBUSI JASA USAHA	PIUTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	JUMLAH
II	**PIUTANG RETRIBUSI DAERAH**	**10.980.556.851,00**	**602.894.900,00**	**0,00**	**11.583.451.751,00**
1	Dinas Kesehatan	1.150.241.000,00	0,00	0,00	1.150.241.000,00
2	RSUD Achmad Muchtar Bkt	7.447.223.503,00	0,00	0,00	7.447.223.503,00
3	RSJ HB Sa'anin	710.188.841,00	0,00	0,00	710.188.841,00
4	RSUD M. Natsir Solok	1.654.935.507,00	0,00	0,00	1.654.935.507,00
5	RSUD Pariaman	17.968.000,00	0,00	0,00	17.968.000,00
6	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	584.614.900,00	0,00	584.614.900,00
8	DKP	0,00	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00
9	D. Perkebunan dan TPH	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00

Dapat kami informasikan bahwa bertambahnya nilai piutang retribusi secara signifikan karena adanya reklasifikasi penerimaan jasa Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan yang awalnya merupakan penerimaan Lain-Lain PAD-Pendapatan BLUD.

5.3.1.1.5. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.1.05	**Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**	**127.297.967.456,00**	**122.018.602.181,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2024 dan 2023, yang terdiri dari:

No	Uraian	SALDO AWAL (AUDITED 2023)	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024
	PIUTANG PKD YG DIPISAHKAN	**122.018.602.181,00**	**127.297.967.456,00**	**122.018.602.181,00**	**127.297.967.456,00**
1	PT GRAFIKA JAYA SUMBAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BANK NAGARI	117.919.220.213,00	122.736.659.559,00	117.919.220.213,00	122.736.659.559,00
3	PT BANGUN ASKRIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PT JAMKRIDA	4.099.381.968,00	4.561.307.897,00	4.099.381.968,00	4.561.307.897,00

a. Penambahan Piutang Tahun 2024 merupakan jumlah dividen sebesar Rp127.297.967.456,00 yang diperkirakan diterima pada Tahun 2025 yaitu:
   - PT Jamkrida sesuai dengan surat Nomor 375/B-02/DIR/II-2025 tanggal 21 Pebruari 2025 perihal estimasi deviden tahun buku 2024 sebesar Rp.4.561.307.897,00;
   - PT Bank Nagari sesuai surat Nomor SR/010/TRS/PD/02-2025 tanggal 21 Pebruari 2025 perihal konfirmasi estimasi deviden Tahun Buku 2024 sebesar Rp122.736.659.559,00.

b. Pengurangan Piutang Tahun 2024 berasal dari dividen Tahun Buku 2023 yang di terima Tahun 2024 yaitu dari PT Bank Nagari sebesar Rp117.919.220.213,00 dan PT Jamkrida sebesar Rp4.099.381.968,00.

5.3.1.1.6. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.1.06	**Piutang Lain-lain PAD yang Sah**	**2.711.795.855,20**	**19.675.506.112,47**

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023, yang terdiri dari:

NO	URAIAN	SALDO AWAL (*audited* 2023) (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024 (Rp)
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	**19.675.506.112,47**	**513.738.380,20**	**17.477.448.637,47**	**2.711.795.855,20**
1	RSAM Bukittinggi	6.780.807.590,33	0,00	6.780.807.590,33	0,00
2	RSJ. HB. Sa'anin Padang	827.731.981,00	0,00	827.731.981,00	0,00
3	RSUD M. Natsir Solok	7.703.322.953,00	0,00	7.703.322.953,00	0,00
4	RSUD Pariaman	69.153.200,00	0,00	69.153.200,00	0,00
5	Dinas Kesehatan	606.183.900,00	0,00	606.183.900,00	0,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	2.042.658.660,00	502.600.000,00	57.670.000,00	2.487.588.660,00
7	Dinas Pendidikan	45.079.013,14	11.138.380,20	45.079.013,14	11.138.380,20
8	BPKAD	1.600.568.815,00	0,00	1.387.500.000,00	213.068.815,00

Piutang-piutang sebagaimana tercantum dalam tabel di atas berasal dari:

1. Piutang RSAM, RSJ HB Saanin, RSUD M. Natsir Solok, RSUD Pariaman dan Dinas Kesehatan berasal dari piutang pelayanan kesehatan terhadap pasien mandiri dan piutang klaim ke BPJS Kesehatan yang pada tahun 2024 di

reklasifikasi ke piutang retribusi serta piutang Dinas Pendidikan yang berasal dari layanan BLUD pada SMK Negeri Rp 11.138.380,20

2. Piutang pada Dinas Lingkungan Hidup berasal dari piutang kabupaten/kota yang memanfaatkan pengelolaan sampah yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup.
3. Piutang pada BPKAD merupakan piutang Lain-Lain PAD Yang Sah yang merupakan piutang denda deviden PT Grafika sebesar Rp60.000.000,00 dan PT Balairung sebesar Rp153.068.815,00. Piutang Denda Deviden merupakan denda atas keterlambatan penyetoran Deviden Tahun Buku 2016. Adapun Piutang Dividen Tahun Buku 2016 adalah sebesar Rp637.786.731,00, telah diterima di Rekening Kas Daerah pada Tahun 2019. Pengenaan denda atas piutang deviden tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif pada Perseroan Terbatas atas Keterlambatan Pencatatan Penyertaan Modal dan Penyetoran Deviden Bagian Daerah.

5.3.1.1.7. Piutang Transfer

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.1.07	Piutang Transfer	6.441.442.000,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Transfer dari Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 dan 2023.

Hal ini sesuai KMK Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024 dan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerrian Keuangan RI Nomor S-100/PK.2/2024 perihal Tindak Lanjut Pasca Penetapan PMK No. 89 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024 dimana Penetapan kurang bayar dan lebih bayar (KB/LB) DBH pada tahun 2024 dalam PMK tersebut agar dicatat sebagai pengakuan atas utang piutang antara pemerintah pusat dan daerah. Penyaluran KB/LB DBH akan memperhatikan kondisi APBN dan perekonomian sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan tentang penyaluran KB dan penyelesaian LB DBH. selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 26.

5.3.1.1.8. Piutang Lainnya

5.3.1.1.8.1. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/TGR

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.1.09.04	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/TGR	28.800.000,00	55.200.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/TGR per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp28.800.000,00 berasal dari 3 (tiga) orang pensiunan Pegawai Dinas Pendidikan yaitu Sdri Hamida sejumlah Rp22.200.000,00,

Sdr Amsir sejumlah Rp6.000.000,00 dan Sdr Wirmizal sejumlah Rp600.000,00 sesuai dengan Kepts. Gubernur No.903-1197-2016 tanggal 1 Nov 2016 tentang Pembebanan Penggantian Keruda Sementara kepada Sdr.Dra.Hj.Hamida.M.Si; Kepts. Gubernur No.903-1406-2016 tanggal 27 Des 2016 tentang Pembebanan Penggantian Keruda Sementara kepada Sdr.Drs.Amsir dan Kepts. Gubernur No.903-1198-2016 tanggal 1 Nov 2016 tentang Pembebanan Penggantian Keruda Sementara kepada Sdr.Drs. Wirmizal.

5.3.1.1.9. Penyisihan Piutang

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.1.10.	Penyisihan Piutang	(12.149.166.360,11)	(7.596.538.361,27)

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023, yang terdiri dari:

5.3.1.1.9.1. Penyisihan Piutang Pendapatan

5.3.1.1.9.1.1. Penyisihan Piutang Pajak

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.1.10.01.01	Penyisihan Piutang Pajak	(568.375.720,31)	(463.125.996,59)

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023.

Piutang Pajak dan Penyisihannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Umur Piutang				Jumlah Penyisihan Piutang Per 31 Des 2024 (Rp)
		< 1 BLN (Rp)	1-3 BLN (Rp)	3-12 BLN (Rp)	>12 BLN (Rp)	
		0.50%	10%	50%	100%	
I	PIUTANG PAJAK	59.620.110.062,00	0,00	0,00	270.275.170,00	568.375.720,31
1	PBB-KB	59.620.110.062,00	0,00	0,00	0,00	298.100.550,31
2	PAJAK AIR PERMUKAAN	0,00	0,00	0,00	270.275.170,00	270.275.170,00

Untuk rincian Piutang Pajak dan penyisihannya dapat dilihat pada Lampiran 26.

5.3.1.1.9.1.2. Penyisihan Piutang Retribusi

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.1.10.01.02.	Penyisihan Piutang Retribusi	(8.472.346.225,62)	(625.574.438,74)

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	< 1 BLN (Rp)	1-3 BLN (Rp)	3-12 BLN (Rp)	>12 BLN (Rp)	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DES 2024 (Rp)
		0.50%	10%	50%	100%	
	PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI	**1.075.248.104,00**	**1.088.165.451,00**	**2.123.769.512,00**	**7.296.268.684,00**	**8.472.346.225,62**
1	Dinas Kesehatan	644.935.500,00	460765500	2.015.000,00	42.525.000,00	92.833.727,50
2	RSAM Bukittinggi	257.285.000,00	282.158.792,00	1.166.520.976,00	5.741.258.735,00	6.354.021.527,20
3	RSJ. HB. Sa'anin	11.614.800,00	0,00	18.506.864,00	680.067.177,00	689.378.683,00
4	RSUD M. Natsir Solok	143.444.804,00	338.671.159,00	936.726.672,00	236.092.872,00	739.040.547,92
5	RSUD Pariaman	17.968.000,00	0,00	0,00	0,00	89.840,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	584.614.900,00	584.614.900,00
7	Dinas Pemuda dan Olaharaga	0,00	6.570.000,00	0,00	0,00	657.000,00
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00
9	D. Perkebunan dan TPH	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00

Selengkapnya daftar Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan penyisihannya dapat dilihat pada Lampiran 26.

5.3.1.1.9.1.3. Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.1.10.01.03	**Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**(636.489.837,28)**	**(610.093.010,91)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	LANCAR (Rp)	KURANG LANCAR (Rp)	DIRAGUKAN (Rp)	MACET (Rp)	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DES 2024 (Rp)
		0.50%	10%	50%	100%	
	PENYISIHAN PIUTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	**127.297.967.456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**636.489.837,28**
1	PT GRAFIKA JAYA SUMBAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BANK NAGARI	122.736.659.559,00	0,00	0,00	0,00	613.683.297,80
3	PT BANGUN ASKRIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PT JAMKRIDA	4.561.307.897,00	0,00	0,00	0,00	22.806.539,48

5.3.1.1.9.1.4. Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.1.10.01.04	**Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**	**(2.439.603.366,90)**	**(5.897.468.914,76)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian pada tabel berikut:

No	URAIAN	LANCAR (Rp)	KURANG LANCAR (Rp)	DIRAGUKAN (Rp)	MACET (Rp)	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DES 2024 (Rp)
		0.50%	10%	50%	100%	
	PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN PAD YG SAH	**18.678.380,20**	**0,00**	**507.215.000,00**	**2.185.902.475,00**	**2.439.603.366,90**
1	Dinas Lingkungan Hidup	7.540.000,00	0,00	507.215.000,00	1.972.833.660,00	2.226.478.860,00
2	Dinas Pendidikan	11.138.380,20	0,00	0,00	0,00	55.691,90
3	BPKAD	0,00	0,00	0,00	213.068.815,00	213.068.815,00

Selengkapnya daftar Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan penyisihannya dapat dilihat pada Lampiran 26.

5.3.1.1.9.1.5. Penyisihan Piutang Transfer

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.1.10.01.05	**Penyisihan Piutang Transfer**	**(32.207.210,00)**	**0,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Transfer per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian pada tabel berikut:

No	URAIAN	LANCAR (Rp)	KURANG LANCAR (Rp)	DIRAGUKAN (Rp)	MACET (Rp)	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DES 2024 (Rp)
		0.50%	10%	50%	100%	
	PENYISIHAN PIUTANG TRANSFER-PEMERINTAH PUSAT	**6.441.442.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.207.210,00**
1	Penyisihan Piutang Transfer-Pemerintah Pusat	6.441.442.000,00	0,00	0,00	0,00	32.207.210,00

Selengkapnya daftar Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan penyisihannya dapat dilihat pada Lampiran 26.

5.3.1.1.9.2. Penyisihan Piutang Lainnya

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.1.10.02.04	**Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/TGR**	**(144.000,00)**	**(276.000,00)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/TGR per 31 Desember 2024 dan 2023, terdapat pengurangan sebesar Rp132.000 yang merupakan penyisihan bagian lancar tuntutan perbendaharaan/TGR an. Hamida, Wirmizal dan Amsir yang merupakan Pensiunan PNS Dinas Pendidikan. Selengkapnya daftar piutang TGR dan Tuntutan Perbendaharaan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran 27.

5.3.1.1.10 Beban Dibayar Dimuka

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	3.509.417.517,00	3.846.284.775,21

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023, yaitu beban premi asuransi kendaraan dan sewa Gedung oleh SKPD. Rincian selengkapnya untuk seluruh SKPD dapat dilihat pada Lampiran 28.

5.3.1.1.11 Persediaan

No	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.1.12	Persediaan	384.337.939.703,51	388.755.131.154,11

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023. Persediaan sebesar Rp384.337.939.703,51 tersebut merupakan persediaan bahan pakai habis yang terdiri dari alat/bahan untuk kegiatan kantor dan persediaan bahan material/tidak pakai habis dan natura/pakan sebesar Rp89.628.138.535,02 dan persediaan untuk dijual/diserahkan sebesar Rp294.709.801.168,49. Rincian persediaan per SKPD selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 29.

Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Tahun 2024 sebesar Rp294.709.801.168,49 mencakup saldo Persediaan pada tujuh SKPD yang berasal dari Belanja Barang/Belanja Modal maupun Aset Tetap Renovasi yang ditujukan untuk Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga, dengan rincian sebagai berikut.

No.	SKPD	Nilai Persediaan (Rp)
1	Dinas Pendidikan	21.425.065.482,00
2	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	67.843.967.492,04
3	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	4.613.913.995,00
4	Dinas Perkimtan	195.010.955.703,45
5	Dinas Sosial	29.775.000,00
6	Dinas Pangan	1.359.856.496,00
7	Dinas Perkebunan TPH	4.426.267.000,00
	Jumlah	**294.709.801.168,49**

Dari nilai Persediaan untuk Dijual/Diserahkan pada tabel di atas, dapat dijelaskan hal-hal berikut, antara lain:

1. **Dinas Pendidikan**

   Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp21.425.065.482,00 terdiri dari: bangunan sebesar Rp8.628.891.200,00 dan peralatan dan mesin sebesar Rp12.796.174.282,00

2. Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR)

Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan pada Dinas BMCKTR per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp67.843.967.492,04, terdiri dari:

a. Aset Tetap Renovasi sebesar Rp21.759.573.000,00 pada Tahun 2022 berupa Belanja Pemeliharaan oleh Dinas BMCKTR (PUPR) atas jalan ataupun bangunan milik instansi vertikal di kabupaten/kota se-Sumatera Barat pada Tahun 2023 tidak terdapat penyerahan dan penghapusan aset tersebut sehingga masih bersisa sebesar Rp10.586.203.000,00, dan pada Tahun 2024 belum ada penyerahan aset tersebut, sesuai dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal	Diserahkan	Penghapusan	Jumlah	Sisa
1	Kab. Pasaman Barat	-	-	-	-	-
2	Kab. Pasaman	-	-	-	-	-
3	Kab. Lima Puluh Kota	2.448.198.000,00	-	2.448.198.000,00	2.448.198.000,00	-
4	Kota Payakumbuh	-	-	-	-	-
5	Kab. Agam	-	-	-	-	-
6	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-
7	Kab. Tanah Datar	1.507.975.000,00	395.488.000,00	1.112.487.000,00	1.507.975.000,00	-
8	Kota Padang Panjang	158.698.000,00	-	-	-	158.698.000,00
9	Kab. Padang Pariaman	1.563.721.000,00	1.307.259.000,00	256.462.000,00	1.563.721.000,00	-
10	Kota Pariaman	-	-	-	-	-
11	Kota Padang	6.769.036.000,00	-	-	-	6.769.036.000,00
12	Kota Solok	-	-	-	-	-
13	Kab. Solok	5.128.437.000,00	1.013.187.000,00	2.325.347.000,00	3.338.534.000,00	1.789.903.000,00
14	Kab. Solok Selatan	281.024.000,00	-	281.024.000,00	281.024.000,00	-
15	Kota Sawahlunto	-	-	-	-	-
16	Kab. Sijunjung	621.746.000,00	346.470.000,00	-	346.470.000,00	275.276.000,00
17	Kab. Dharmasraya	-	-	-	-	-
18	Kab. Pesisir Selatan	1.687.448.000,00	1.687.448.000,00	-	1.687.448.000,00	-
19	Kab. Kep. Mentawai	-	-	-	-	-
20	Selisih Hasil Data Temuan Inspektorat	1.593.290.000,00		-	-	1.593.290.000,00
	Jumlah	**21.759.573.000,00**	**4.749.852.000,00**	**6.423.518.000,00**	**11.173.370.000,00**	**10.586.203.000,00**

b. Belanja Barang/Belanja Modal yang ditujukan untuk Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga sisanya sebesar Rp57.257.764.492,04, masih dalam proses hibah maupun penghapusan dan mutasi.

3. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

Dari nilai persediaan untuk Dijual/Diserahkan Tahun 2024 sebesar Rp4.613.913.995,00 berupa embung pada kegiatan PENAS TANI dan Aset Tetap Renovasi sebesar Rp325.870.000,00.00 berupa Galian Sedimen Batang Anai belum diserahterimakan ke Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sampai dengan 31 Desember 2024.

4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan)

Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan pada Dinas Perkimtan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp195.010.955.703,45, merupakan hasil realisasi Belanja Barang maupun Belanja Modal perolehan sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 yang diperuntukkan bagi masyarakat/pihak lain, namun serah terima masih dalam proses.

5. Dinas Sosial

Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan pada Dinas Sosial per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp29.775.000,00, merupakan hasil realisasi Belanja Barang perolehan sejak tahun 2024 yang diperuntukkan bagi masyarakat/pihak lain, namun serah terima masih dalam proses.

6. Dinas Pangan

Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan pada Dinas Pangan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.359.856.496,00, merupakan hasil realisasi Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat sampai dengan 2024 yang diperuntukkan bagi masyarakat/pihak lain, namun serah terima masih dalam proses.

7. Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Hortikultura

Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan pada Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Hortikultura per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.426.267.000,00, merupakan hasil realisasi Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat sampai dengan 2024 yang diperuntukkan bagi masyarakat/pihak lain, namun serah terima masih dalam proses.

5.3.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

5.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

5.3.1.2.1.1. Dana Bergulir

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.2.01.05	Dana Bergulir	10.581.879.188,00	10.581.879.188,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

NO	DINAS	PLAFON	SALDO PER 31 DES 2023		RANS/ KOREKSI TAHUN 2024	SALDO PER 31 DES 2024		
			BAKI DEBIT	*LINKAGE*		BAKI DEBIT	*LINKAGE*	TOTAL
1	Dinas Perindustrian & Perdagangan	1.137.500.000,00	784.495.843,00	353.004.157,00	2.541.500,00	781.954.343,00	355.545.657,00	1.137.500.000,00
2	Dinas Koperasi dan UKM	2.000.000.000,00	955.957.000,00	1.044.043.000,00	-	955.957.000,00	1.044.043.000,00	2.000.000.000,00
3	Biro Perekonomian	1.000.000.000,00	669.142.330,00	330.857.670,00	-	669.142.330,00	330.857.670,00	1.000.000.000,00
4	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura (ex Dinas Perkebunan)	235.000.000,00	221.413.000,00	13.587.000,00	-	221.413.000,00	13.587.000,00	235.000.000,00
5	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura (Ex D Pertanian)	1.265.047.000,00	1.099.863.573,00	165.183.427,00	-	1.099.863.573,00	165.183.427,00	1.265.047.000,00
6	Dinas Peternakan	3.251.672.188,00	2.254.581.625,00	997.090.563,00	-	2.254.581.625,00	997.090.563,00	3.251.672.188,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	190.990.000,00	156.759.601,00	34.230.399,00	-	156.759.601,00	34.230.399,00	190.990.000,00
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.501.670.000,00	1.306.963.033,00	194.706.967,00	-	1.306.963.033,00	194.706.967,00	1.501.670.000,00
JUMLAH		**10.581.879.188,00**	**7.449.176.005,00**	**3.132.703.183,00**	**2.541.500,00**	**7.446.634.505,00**	**3.135.244.683,00**	**10.581.879.188,00**

Investasi dimaksud berupa penyaluran dana bergulir kepada sekelompok masyarakat unit usaha kecil dan menengah. Penerima berkewajiban mengembalikan dana tersebut ke instansi teknis pengelola untuk digulirkan kembali ke masyarakat atau kelompok lainnya yang memerlukan.

Sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor 580-304-2006 dan Nomor PKS/058/DIR/08-2006 tanggal 30-08-2006. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, ikut serta mengelola, mencairkan dan menerima setoran atas sebagian dari Dana Bergulir dimaksud di atas dan membuka rekening atas nama Dana Bergulir Provinsi Sumatera Barat (Linkage Program) untuk menampung dana dimaksud. Disamping itu Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyalurkan bantuan/kredit tersebut serta menandatangani perjanjiannya. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat diperbaharui pada tanggal 9 Februari 2015 dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 120/3/GSB-2015 dan Nomor PKS/011/DIR/02-2015.

Jika dibandingkan saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2024 dan 2023 terjadi penurunan sebesar Rp2.541.000,00 yang disebabkan karena penurunan nilai penyisihan karena perubahan status performing

5.3.1.2.1.2. Penyisihan Dana Bergulir

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.2.01.05	Penyisihan Dana Bergulir	(7.446.634.505,00)	(7.449.176.005,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2024 dan 2023 berupa dana bergulir yang diragukan dapat ditagih, terdapat perbedaan antara tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp2.541.500,00 yang merupakan setoran dari debitur pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mempengaruhi penyisihan dana bergulir dan menambah dana yang terdapat pada Linkage yang berada pada Bank Nagari.

NO.	DINAS	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)
1	Dinas Perindustrian & Perdagangan	781.954.343,00	784.495.843,00
2	Dinas Koperasi dan UKM	955.957.000,00	955.957.000,00
3	Biro Perekonomian	669.142.330,00	669.142.330,00
4	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura (ex Dinas Perkebunan)	221.413.000,00	221.413.000,00
5	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura (Ex D Pertanian)	1.099.863.573,00	1.099.863.573,00
6	Dinas Peternakan	2.254.581.625,00	2.254.581.625,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	156.759.601,00	156.759.601,00
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.306.963.033,00	1.306.963.033,00
JUMLAH		**7.446.634.505,00**	**7.464.026.005,00**
	Program *Linkage* - Bank Nagari	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**7.446.634.505,00**	**7.449.176.005,00**

Penyisihan Dana Bergulir disajikan mulai Tahun 2012 setelah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuat Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Data selengkapnya tentang mutasi Tahun 2024 dan saldo per 31 Desember 2024 serta umur piutang Dana Bergulir tersebut dapat dilihat pada Buku Investasi Non Permanen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 30.

5.3.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

5.3.1.2.2.1. Penyertaan Modal

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.2.02.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.713.178.683.660,58	1.622.518.032.923,10

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Permanen milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dan 2023 berupa penyertaan modal pada tujuh BUMD dan tiga perusahaan patungan/milik swasta, yaitu:

No.	BUMD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	PT BANK NAGARI	1.435.407.052.285,39	1.347.858.665.801,93
2	PT BANGUN ASKRIDA	48.820.000.000,00	48.820.000.000,00
3	PT PEMBANGUNAN SUMBAR	113.650.729,83	113.650.729,83
4	PT ATS	1.606.759.288,45	1.606.759.288,45
5	PT GRAFIKA JAYA SUMBAR	9.111.392.456,46	9.176.471.718,24
6	PT DINAMIKA SUMBAR JAYA	5.025.265.932,79	5.025.265.932,79
7	PT ARP	2.700.750.447,45	2.700.750.447,45
8	PT BALAIRUNG	100.896.742.010,23	101.846.248.487,62
9	PT JAMKRIDA	109.083.970.509,98	104.957.120.516,79
10	PT SIJUNJUNG SUMBAR ENERGI	413.100.000,00	413.100.000,00
Nilai Penyertaan Modal Per 31 Des 2024		**1.713.178.683.660,58**	**1.622.518.032.923,10**

Jumlah setoran modal dan penambahannya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada BUMD dan perusahaan patungan/milik swasta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	BUMD	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Penambahan Modal Disetor (Rp)
1	PT BANK NAGARI	621.224.000.000,00	601.224.000.000,00	20.000.000.000,00
2	PT BANGUN ASKRIDA	48.820.000.000,00	48.820.000.000,00	
3	PT PEMBANGUNAN SUMBAR	275.950.000,00	275.950.000,00	
4	PT ATS	3.708.000.000,00	3.708.000.000,00	
5	PT GRAFIKA JAYA SUMBAR	14.005.000.000,00	14.005.000.000,00	
6	PD DINAMIKA SUMBAR JAYA	7.590.000.000,00	7.590.000.000,00	
7	PT ARP	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
8	PT BALAIRUNG	130.767.000.000,00	130.767.000.000,00	
9	PT JAMKRIDA	89.304.804.000,00	89.304.804.000,00	
10	PT SIJUNJUNG SUMBAR ENERGI	413.100.000,00	413.100.000,00	
Nilai Penyertaan Modal Per 31 Des 2024		**919.107.854.000,00**	**899.107.854.000,00**	**20.000.000.000,00**

Pada Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima dividen dari dua BUMD/Perusahaan yaitu PT Bank Nagari, PT Jamkrida. Sedangkan untuk laporan keuangan BUMD, sampai dengan laporan keuangan pemerintah daerah ini diterbitkan, hanya sebanyak lima perusahaan yang menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 yaitu PT Bank Nagari (Unaudit), PT Balairung (Unaudit), PT Jamkrida (Unaudit), PT Grafika Jaya Sumbar (Unaudit), dan PT Bangun Askrida (Unaudit), lima perusahaan lainnya yaitu PT Pembangunan Sumbar, PT ATS, PT Dinamika Sumbar Jaya, PT Sijunjung Sumbar Energi, dan PT ARP belum menyampaikan laporan keuangan.

Porsi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada masing-masing BUMD dan perusahaan patungan/milik swasta tersebut adalah sebagai berikut:

No.	BUMD	2024 (%)	2023 (%)
1	PT BANK NAGARI	32,62	32,51
2	PT BANGUN ASKRIDA	15,31	15,31
3	PT PEMBANGUNAN SUMBAR	35,52	35,52
4	PT ATS	98,60	98,60
5	PT GRAFIKA JAYA SUMBAR	95,66	95,66
6	PT DINAMIKA SUMBAR JAYA	96,56	96,56
7	PT ARP	50,00	50,00
8	PT BALAIRUNG	79,72	79,72
9	PT JAMKRIDA	99,89	99,89
10	PT SIJUNJUNG SUMBAR ENERGI	51,00	51,00

Untuk Tahun 2024, pencatatan dan pelaporan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada semua BUMD dan perusahaan patungan/milik swasta dilakukan dengan metode ekuitas, karena porsi kepemilikan Pemerintah Provinsi melebihi 20% dari total saham. Hal tersebut dikecualikan untuk PT Bangun Askrida yang Penyertaan Modal Tahun 2024 dicatat dan dilaporkan dengan metode biaya karena porsi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih dibawah 20%.

Pada tahun 2024 ini dilakukan koreksi terhadap perhitungan Penyertaan Modal Tahun 2023, yaitu pada:

1. PT Bank Nagari sebesar Rp9.180.810.859,28 disebabkan karena koreksi laba tahun lalu yang semula tercatat sebesar Rp537.613.000.000,00 menjadi sebesar Rp565.848.623.317,00 pada Laporan Keuangan Tahun 2023 (*audited),* sehingga penyertaan modal yang tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebesar Rp1.347.858.665.801,93 menjadi sebesar Rp1.357.039.476.661,21;
2. PT Jamkrida sebesar (Rp121.534.325,11) disebabkan koreksi laba tahun lalu yang semula tercatat pada Laporan Keuangan Tahun 2023 (*unaudited)* sebesar Rp8.209.436.204,00 menjadi sebesar Rp8.209.436.204,00 pada Laporan Keuangan Tahun 2023 (*audited),* sehingga penyertaan modal yang tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebesar Rp104.957.120.516,79 menjadi sebesar Rp104.835.586.191,68.

Data lengkap mengenai Investasi Permanen ini dapat dilihat pada Lampiran 31.

Bukti kepemilikan atas penyertaan modal tersebut berupa sertifikat saham dapat dilihat pada Lampiran 32.

5.3.1.3. Aset Tetap

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.3	Aset Tetap	9.662.183.012.990,35	9.554.409.391.954,95

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan jenis sebagai berikut:

Uraian	2024 (*Unaudited*) (Rp)	2023 (*Audited*) (Rp)
ASET TETAP		
Tanah	2.317.257.971.575,32	2.309.015.698.531,82
Peralatan dan Mesin	3.100.523.394.031,89	2.905.254.397.064,63
Gedung dan Bangunan	4.876.017.515.758,74	4.627.403.775.024,23
Jalan. Irigasi. dan Jaringan	7.128.701.627.636,34	6.886.411.506.934,38
Aset Tetap Lainnya	472.833.248.677,75	429.240.113.127,75
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.008.192.923.821,67	1.030.070.802.347,65
Akumulasi Penyusutan		
Akm Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.541.843.355.236,40)	(2.322.700.129.644,24)
Akm Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.200.198.046.068,18)	(1.100.759.868.734,32)
Akm Penyusutan Jalan. Irigasi. dan Jaringan	(5.484.889.516.019,23)	(5.195.510.308.392,07)
Akm Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(14.412.751.187,55)	(14.016.594.304,88)
Jumlah Aset Tetap	**9.662.183.012.990,35**	**9.554.409.391.954,95**

Rincian per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 35, mutasi aset tetap pada Lampiran 36 sampai dengan Lampiran 46.

Daftar Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Lainnya serta Konstruksi Dalam Pengerjaan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dalam bentuk KIB A, B, C, D, E dan F dapat dilihat pada Buku Inventaris Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Mutasi Tambah Kurang Aset Tetap Tahun 2024

Nilai Perolehan

	Uraian	Aset Tetap (Rp)
	Saldo *Audited* per 31 Des 2023	**18.187.396.293.030,90**
Mutasi Tambah		
	Belanja Modal dari Aset Tetap Tahun 2024	765.488.119.624,35
	Belanja Barang dan Jasa	13.091.965.511,14
	Koreksi Nilai	50.116.093.961,48
	Hibah	56.897.426.579,00
	Mutasi antar SKPD	8.691.906.824,00
	Reklasifikasi	110.520.437.852,50
	Beban Penyusutan	-
	Total Mutasi Tambah	***1.004.805.950.352,47***
Mutasi Kurang		
	Barang Modal yang tidak dikapitalisasi	10.506.789.426,00
	Koreksi Nilai	5.193.710.819,00
	Penghapusan	4.520.456.414,50
	Mutasi antar SKPD	8.691.906.824,00
	Reklasifikasi	259.762.698.397,72
	Total Mutasi Kurang	***288.675.561.881.22***
Total Mutasi		**716.130.388.471,25**
	Saldo per 31 Des 2024	**18.903.526.681.501,70**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024. Total penambahan sebesar Rp1.004.805.950.352,47 dengan total pengurangan sebesar Rp288.675.561.881.22 Penambahan dan pengurangan nilai berasal dari transaksi sebagaimana tabel di atas diterangkan per kelompok Aset Tetap pada laporan ini.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

	Uraian	Akumulasi Aset Tetap (Rp)
	Saldo *Audited* per 31 Des 2023	**8.632.986.901.075,51**
Mutasi Tambah		
	Belanja Modal Tahun 2024	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	-
	Koreksi Nilai	2.655.106.568,26
	Hibah	23.560.793.996.71
	Mutasi antar SKPD	8.005.086.824,20
	Reklasifikasi	2.584.763.404,00
	Beban Penyusutan	591.070.709.955,70
	Total Mutasi Tambah	***627.876.460.748,87***
Mutasi Kurang		
	Barang Modal yang tidak dikapitalisasi	-
	Koreksi Nilai	3.506.205,46
	Penghapusan	1.088.097.392,00
	Mutasi antar SKPD	8.005.086.824,20
	Reklasifikasi	10.423.002.891,36
	Beban Penyusutan	0,00

	Uraian	Akumulasi Aset Tetap (Rp)
	Total Mutasi Kurang	***19.519.693.313,02***
Total Mutasi		**608.356.767.435,85**
	Saldo per 31 Des 2024	**9.241.343.668.511,36**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024. Total penambahan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp627.876.460.748,87 dengan total pengurangan sebesar Rp19.519.693.313,02 Penambahan dan pengurangan nilai akumulasi penyusutan telah dihitung sesuai metode penyusutan, masa manfaat dan penambahan masa manfaat sesuai dengan ketentuan berlaku. Metode Penyusutan dan masa manfaat Aset Tetap dan Aset Lainnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.

5.3.1.3.1. Aset Tetap-Tanah

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.3.01	**Aset Tetap-Tanah**	**2.317.257.971.575,32**	**2.309.015.698.531,82**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap-Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dan 2023. Terdapat penambahan nilai asset tetap tanah kondisi per 31 Desember 2024 audited sebesar Rp8.242.273.043,50 apabila dibandingkan dengan nilai aset tetap tanah per 31 Desember 2023 audited, dengan uraian sebagai berikut:

	Uraian	Tanah (Rp)
	Saldo *Audited* Per 31 Des 2023	**2.309.015.698.531,82**
Mutasi Tambah		
	Belanja Modal Tanah Tahun 2024	2.464.373.669,00
	Belanja Barang dan Jasa	-
	Koreksi Nilai	7.948.955.195,00
	Hibah	122.400.002,00
	Mutasi antar SKPD	198.995.000,00
	Reklasifikasi	198.995.000,00
	Beban Penyusutan	-
	Total Mutasi Tambah	***10.933.718.866,00***
Mutasi Kurang		
	Belanja Modal Tanah yang tidak dikapitalisasi	3.123.500,00 -
	Koreksi Nilai	-
	Penghapusan	2.489.327.322,50
	Mutasi antar SKPD	198.995.000,00
	Reklasifikasi	-
	Total Mutasi Kurang	***2.691.445.822,50***
Total Mutasi		**8.242.273.043,50**
	Saldo per 31 Des 2024	**2.317.257.971.575,32**

Mutasi Tambah sebesar Rp10.933.718.866,00 dan Mutasi Kurang sebesar Rp2.691.445.822,50 diuraikan sebagai berikut:

a. Penambahan nilai Aset Tetap Tanah sesuai tabel di atas berasal dari:
   1. Belanja Modal Tanah sebesar Rp2.464.373.669,00 (belanja modal Tanah dari Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.703.196.169,00, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp758.054.000,00 dan Dinas Permukiman, Kawasan dan Pertanahan Rp.3.123.500,00);
   2. Penambahan nilai dari koreksi nilai sebesar Rp7.948.955.195,00 yakni koreksi dari pencatatan Aset Tetap Tanah yang belum bernilai terdiri atas 6 persil tanah yang tercatat di Dinas Pendidikan sebanyak 3 persil dengan nilai sebesar Rp5.500.547.998,00, di Pengelola BMD sebanyak 2 persil dengan nilai sebesar Rp1.694.347.198,00 dan di Badan Penghubung 1 persil dengan nilai sebesar Rp754.059.999,00.
   3. Penambahan Hibah Tanah sebesar Rp122.400.002,00 (hibah berasal dari Perkumpulan Masyarakat Perantau Minang Semarang sebesar Rp.1,00, luas 148 M², hibah dari komite SMAN 1 Rambatan sebesar Rp22.400.000,00, luas 140 M2, Hibah dari masyarakat untuk SMKN 2 Padang Panjang sebesar Rp.1,00 luas 165 M2 dan hibah dari masyarakat SMAN 1 Sei Aur Pasaman Barat sebesar Rp.100.000.000,00, luas 500 M2. Untuk 2 persil tanah masih dicatat dengan nilai Rp.1,00, karena belum dinilai dan akan direncanakan dinilai pada tahun 2025.
   4. Penambahan nilai Tanah juga berasal dari transaksi Mutasi Antar SKPD sebesar Rp198.995.000,00 yang disebabkan karena perpindahan aset antar SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
   5. Penambahan Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp198.995.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencara Daerah dan dimutasikan ke Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura.

b. Pengurangan sebesar Rp2.691.445.822,50, sesuai tabel di atas disebabkan karena adanya:
   1. Pengurangan nilai asset tanah karena belanja modal tanah yang tidak dikapitalisir sebesar Rp3.123.500,00 pada Dinas Perkimtan berupa ganti rugi bangunan diatas lahan Poltekpel Pariaman, secara tanggung jawab renteng antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Poltekpel Pariaman atas pelaksanaan putusan pengadilan atas perkara perdata nomor 47/Pdt.G/2019/PN.Pmn.
   2. Pengurangan nilai aset tanah karena adanya penghapusan aset tanah sebesar Rp2.489.327.322,50 (hibah ke Kota Padang sebesar Rp931.250.000,00, hibah ke Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp.58.077.322,50 dan Hibah ke BNPB sebesar Rp1.500.000.000,00).
   3. Pengurangan dari Mutasi antar SKPD sebesar Rp198.995.000,00 yang disebabkan karena perpindahan aset antar SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

5.3.1.3.2. Aset Tetap-Peralatan dan Mesin

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.3.02	Aset Tetap-Peralatan dan Mesin	3.100.523.394.031,89	2.905.254.397.064,63

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Peralatan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024, dengan uraian sebagai berikut:

	Uraian	Peralatan dan Mesin (Rp)
	Saldo *Audited* per 31 Des 2023	**2.905.254.397.064,63**
Mutasi Tambah		
	Belanja Modal Peralatan MesinTahun 2024	189.146.437.545,00
	Belanja Barang dan Jasa	853.988. 880,00
	Koreksi Nilai	18.951.654.329,00
	Hibah	26.767.036.877,00
	Mutasi antar SKPD	8.492.911.824,00
	Reklasifikasi	4.178.440.295,00
	Beban Penyusutan	-
	Total Mutasi Tambah	***248.390.469.750,00***
Mutasi Kurang		
	Belanja Modal Peralatan Mesin yang tidak dikapitalisasi	8.881.201.184,00
	Koreksi Nilai	2.131.572.330,00
	Penghapusan	2.031.129.092,00
	Mutasi antar SKPD	8.492.911.824,00
	Reklasifikasi	31.584.658.352,74
	Total Mutasi Kurang	***53.121.472.782,74***
Total Mutasi		**195.268.996.967,26**
	Saldo per 31 Des 2024	**3.100.523.394.031,89**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Peralatan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024. Total penambahan sebesar Rp248.390.469.750,00 dengan total pengurangan sebesar Rp53.121.472.782,74 dengan uraian sebagai berikut:

a. Mutasi tambah sebesar Rp248.390.469.750,00 berasal dari:

1. Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp189.146.437.545,00 terdiri dari Belanja Modal sebesar Rp160.316.776.530,00 dan Belanja Modal BOS sebesar Rp28.829.661.015,00;
2. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi yang merupakan transaksi belanja dari anggaran Belanja Barang dan Jasa tapi dicatat sebagai aset tetap sebesar Rp853.988.880,00 terdiri dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp243.734.997,00 dan Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp610.253.883,00;
3. Transaksi koreksi nilai mencatat koreksi terhadap perubahan nilai aset yang ada sebesar Rp 18.951.654.329,00, yaitu pencatatan aset yang belum dilakukan pembayaran/utang belanja modal sebesar Rp16,102,581,802.00 yang berasal dari aset utang belanja modal sebesar Rp15.417.929.285,00 pada Dinas Pendidikan, utang belanja modal sebesar Rp31.221.180,00 pada SKPD Dinas Kesehatan, utang belanja modal sebesar Rp1.887.000,00 pada SKPD RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi, utang belanja modal sebesar

Rp132.065.252,00 pada SKPD RSUD M.Natsir, utang belanja modal sebesar Rp173.879.085,00 pada SKPD RSUD Pariaman, utang belanja modal sebesar Rp28.400.000,00 pada SKPD Dinas Lingkungan Hidup, utang belanja modal sebesar Rp 317.200.000,00 pada SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Koreksi nilai saldo awal sebesar Rp156.920.000 pada SKPD Badan Penghubung dan koreksi pencatatan hibah pada BPBD sebesar Rp1.099.214.000,00 yang merupakan hasil inventasisasi serta koreksi pencatatan nilai sebesar Rp1.592.938.527,00 (pencatatan aset pada Dinas BMCKTR sebesar Rp104.995.000,00 dan koreksi nilai Hibah Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura yang dicatat pada Aset Pengelola BMD sebesar Rp1.487.943.527,00 yang merupakan koreksi hasil temuan pemeriksa);

4. Penambahan dari Hibah sebesar Rp26,767,036,877 untuk tujuh SKPD yang terdiri dari Hibah dari Pemerintah Pusat/Kabupaten/Kota dan Hibah dari Pihak Lainnya.
5. Mutasi antar SKPD yang merupakan transaksi perpindahan aset dari satu SKPD ke SKPD yang lain dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 8.492.911.824,00.
6. Reklasifikasi antar kelompok aset sebesar Rp 4.178.440.295,00.

b. Mutasi kurang sebesar Rp53.121.472.782,74 berasal dari:

1. Belanja Modal tidak dikapitalisasi merupakan belanja modal yang tidak memenuhi ketentuan kapitalisasi sebagai Aset Tetap sebesar Rp 8.881.201.184,00, berasal dari transaksi 8 SKPD. Belanja Modal tidak dikapitalisasi ini terdiri atas Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp 7.500.255.894,00 dan Belanja Modal BOS tidak dikapitalisasi sebesar Rp 1.380.945.290,00;
2. Koreksi Belanja Modal atas penyesuaian pembayaran utang yang asetnya telah dicatat pada periode sebelumnya sebesar Rp 2.131.572.330,00;
3. Penghapusan sebesar Rp2.031.129.092,00 merupakan penghapusan karena hibah (pada Dinas Kesehatan sebesar Rp 1.571.719.500,00, pada Pengelola BMD sebesar Rp 412.790.250,00, pada Inspektorat sebesar Rp6.495.000,00 dan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp 40.124.342,00);
4. Mutasi antar SKPD yang merupakan transaksi keluar antar SKPD sebesar Rp 8.492.911.824,00.
5. Reklasifikasi antar kelompok aset sebesar Rp31.584.658.352,74.

Pada BPBD terdapat dua kendaraan yaitu Mitsubishi Colt Diesel Mobil Barang (Truk) Nomor Polisi BA 8917 BN dengan tahun perolehan 2010 dan Mitsubishi Colt Diesel (Light Truk) Nomor Polisi BA 8918 BN tahun perolehan 2010 belum dicatat dikarenakan dokumen pengadaan belum ditemukan. Kedua kendaraan tersebut belum diketahui nilai perolehannya. Pencatatan aset akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

5.3.1.3.3. Aset Tetap-Gedung dan Bangunan

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.3.03	Aset Tetap-Gedung dan Bangunan	4.876.017.515.758,74	4.627.403.775.024,23

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Gedung Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024, dengan uraian sebagai berikut:

	Uraian	Gedung dan Bangunan (Rp)
	Saldo *Audited* per 31 Des 2023	**4.627.403.775.024,23**
Mutasi Tambah		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2024	212.226.274.577,89
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2024	11.562.648.220,14
	Koreksi Nilai	15.712.896.971,48
	Hibah	20.631.703.400,00
	Mutasi antar SKPD	
	Reklasifikasi	37.455.342.596,00
	Beban Penyusutan	-
	Total Mutasi Tambah	***297.588.865.765,51***
Mutasi Kurang		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak dikapitalisasi	989.628.750,00
	Koreksi Nilai	3.002.143.489,00
	Penghapusan	
	Mutasi antar SKPD	
	Reklasifikasi	44.983.352.792,00
	Total Mutasi Kurang	***48.975.125.031,00***
Total Mutasi		**248.613.740.734,51**
	Saldo per 31 Des 2024	**4.876.017.515.758,74**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Gedung Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024. Total penambahan sebesar Rp297.588.865.765,51 dengan total pengurangan sebesar Rp48.975.125.031,00. Mutasi tambah dan kurang Aset Tetap Gedung Bangunan tersebut antara lain terdiri dari:

a. Mutasi tambah sebesar Rp297.588.865.765,51 berasal dari:
   1) Belanja Modal Gedung Bangunan merupakan belanja penambahan aset Gedung Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp212.226.274.577,89;

   2) Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi merupakan transaksi dari anggaran Belanja Barang dan Jasa namun dicatat sebagai aset tetap sebesar Rp11.562.648.220,14, terdiri dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp

11.538.228.220,14 dan Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar 24.420.000,00;

3) Koreksi nilai merupakan utang Belanja Modal dan Belanja Jasa yakni sebagai penambah aset sebesar Rp 15.712.896.971,48 sudah termasuk koreksi nilai penggabungan aset sebesar Rp195.078.000 pada RSUD Prof.H.Muhammad Yamin, SH yang merupakan koreksi hasil temuan pemeriksa.

4) Hibah masuk sebesar Rp 20.631.703.400,00 berasal dari hibah Pihak Lainnya pada SKPD Dinas Pendidikan sebesar Rp 17.631.703.400,00 dan pada SKPD RSUD M. Natsir Solok sebesar Rp3.000.000.000,00;

5) Reklasifikasi antar Kelompok Aset sebesar 37.455.342.596,00;

b. Mutasi kurang sebesar Rp48.975.125.031,00 terdiri dari transaksi sebagaimana berikut :
1) Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp 989.628.750,00;
2) Koreksi Belanja Modal atas penyesuaian pembayaran utang yang asetnya telah dicatat pada periode sebelumnya sebesar Rp 3.002.143.489,00;
3) Reklasifikasi antar Kelompok Aset sebesar Rp 44.983.352.792,00

5.3.1.3.4. Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.3.04	Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.128.701.627.636,34	6.886.411.506.934,38

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024, dengan uraian sebagai berikut:

	Uraian	Jalan Irigasi dan Jaringan (Rp)
	Saldo *Audited* per 31 Des 2023	**6.886.411.506.934,38**
Mutasi Tambah		
	Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan tahun 2024	317.619.554.844,46
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2024	435.460.392,00
	Koreksi Nilai	7.502.587.466,00
	Hibah	9.365.486.300,00
	Mutasi antar SKPD	0,00
	Reklasifikasi	59.214.646.922,50
	Beban Penyusutan	-
	Total Mutasi Tambah	***394.137.735.924,96***
Mutasi Kurang		
	Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan yang tidak dikapitalisasi	523.648.942,00

	Uraian	Jalan Irigasi dan Jaringan (Rp)
	Koreksi Nilai	34.995.000,00
	Penghapusan	-
	Mutasi antar SKPD	0,00
	Reklasifikasi	151.288.971.281,00
	Total Mutasi Kurang	***151.847.615.223,00***
Total Mutasi		**242.290.120.701,96**
	Saldo per 31 Des 2024	**7.128.701.627.636,34**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024. Total penambahan sebesar Rp394.137.735.924,96 dan total pengurangan sebesar Rp151.847.615.223,00. Penambahan dan pengurangan nilai berasal dari transaksi sebagaimana berikut:

a. Mutasi tambah sebesar Rp394.137.735.924,96 terdiri dari:
   1. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 merupakan belanja penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp317.619.554.844,46 (empat SKPD);
   2. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi merupakan transaksi belanja dari anggaran Barang dan Jasa tapi dicatat sebagai aset tetap sebesar Rp435.460.392,00;
   3. Koreksi Nilai merupakan koreksi belanja modal yang mencatat penambahan aset dari utang sebesar Rp7.502.587.466,00 berasal dari aset utang belanja modal sebesar Rp 2.311.928.825,00 pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, utang belanja modal sebesar Rp 4.934.725.641,00 pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi dan utang belanja modal sebesar Rp255.933.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
   4. Hibah masuk sebesar Rp9.365.486.300,00 merupakan hibah dari Pemerintah Pusat (Kementerian PU) berupa Jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat yang berlokasi di jalan batas kota Payakumbuh – Sitangkai.
   5. Reklasifikasi antar kelompok aset sebesar Rp59.214.646.922,50 merupakan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang).

b. Mutasi kurang sebesar Rp151.847.615.223,00 terdiri dari:
   1. Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp523.648.942,00 merupakan Belanja Modal yang tidak dicatatkan sebagai aset tetap sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ada;
   2. Koreksi dari hasil temuan pemeriksa sebesar Rp34.995.000,00 karena koreksi dan reklasifikasi pencatatan dari aset Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Peralatan dan Mesin yang merupakan hasil kegiatan Core Team pada SKPD Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
   3. Reklasifikasi kurang antar kelompok aset sebesar Rp151.288.971.281,00 yang terdiri dari reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar

Rp769.466.170,00 (pada Rumah Sakit Jiwa Prof.HB. Saanin), reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan untuk pekerjaan yang sampai akhir periode pelaporan belum selesai sebesar Rp59.813.976.411,00 (pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang) dan reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp90.705.528.700,00 (pekerjaaan fisik untuk diserahkan ke masyarakat dari SKPD Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan).

Terdapat 9 (sembilan) ruas jalan dengan total panjang 183,91km dengan nilai minimal Rp78.519.584.215,61 beserta tanah dibawah jalan senilai Rp7.157.561.632,28 yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 620-357-2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya sebagai Jalan Provinsi Tanggal 6 Februari 2023 belum tercatat sebagai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dikarenakan belum ada serah terima aset dan dalam proses hibah. Pencatatan ini dilakukan sebagai bentuk pengungkapan informasi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BMD, serta sebagai dasar untuk pencatatan BMD tahun anggaran berikutnya.

5.3.1.3.5. Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.3.05	**Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya**	**472.833.248.677,75**	**429.240.113.127,75**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024, dengan uraian sebagai berikut:

	Uraian	Aset Tetap lainnya
	Saldo *Audited* per 31 Des 2023	**429.240.113.127,75**
Mutasi Tambah		
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2024	44.031.478.988,00
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2024	239.868.019,00
	Koreksi Nilai	0,00
	Hibah	10.800.000,00
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	362.174.389,00
	Beban Penyusutan	-
	Total Mutasi Tambah	***44.644.321.396,00***
Mutasi Kurang		
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi	109.187.050,00
	Koreksi Nilai	0,00
	Penghapusan	-
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	941,998,796.00
	Total Mutasi Kurang	***1.051.185.846,00***

	Uraian	Aset Tetap lainnya
Total Mutasi		**43.593.135.550,00**
	Saldo per 31 Des 2024	**472.833.248.677,75**

Mutasi Tambah sebesar Rp44.644.321.396,00 dan Mutasi Kurang sebesar Rp1.051.185.846,00 berasal dari transaksi sebagaimana berikut:

a. Mutasi tambah sebesar Rp44.644.321.396,00 terdiri dari:
   1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 merupakan belanja penambahan aset Aset Tetap Lainnya sebesar Rp44.031.478.988,00 yang terdiri dari Belanja Modal sebesar Rp400.037.678,00 dan Belanja Modal BOS sebesar Rp43.631.441.310,00;
   2. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi merupakan transaksi belanja dari anggaran barang dan jasa tapi dicatat sebagai aset tetap sebesar Rp 239.868.019,00 yang merupakan Belanja Barang dan Jasa BOS pada SKPD Dinas Pendidikan;
   3. Hibah sebesar Rp10.800.000,00 berasal dari hibah dari pihak lainnya yang dicatatkan di Dinas Pendidikan; dan
   4. Reklasifikasi antar kelompok aset sebesar Rp 362.174.389,00.

b. Mutasi kurang sebesar Rp 1.051.185.846,00 terdiri dari:
   1. Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp 109.187.050,00 merupakan belanja modal yang tidak dicatatkan sebagai aset tetap sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ada (merupakan Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi BOS pada SKPD Dinas Pendidikan);
   2. Reklasifikasi kurang antar kelompok aset sebesar Rp 941.998.796,00.

5.3.1.3.6. Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.3.06	Aset Tetap-Kostruksi Dalam Pengerjaan	1.008.192.923.821,67	1.030.070.802.347,65

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024, dengan uraian sebagai berikut:

	Uraian	KDP
	Saldo *Audited* per 31 Des 2023	**1.030.070.802.347,65**
Mutasi Tambah		
	Belanja Modal tahun 2024	-
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2024	-
	Koreksi Nilai	0,00
	Hibah	-
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	9.110.838.650,00
	Beban Penyusutan	-

	Uraian	KDP
	Total Mutasi Tambah	***9.110.838.650,00***
Mutasi Kurang		
	Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	-
	Koreksi Nilai	25.000.000,00
	Penghapusan	-
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	30.963.717.175,98
	Total Mutasi Kurang	***30.988.717.175,98***
Total Mutasi		**(21.877.878.525,98)**
	Saldo per 31 Des 2023	**1.008.192.923.821,67**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024. Total penambahan sebesar Rp9.110.838.650,00 dengan total pengurangan sebesar Rp30.988.717.175,98. Penambahan dan pengurangan nilai berasal dari transaksi sebagaimana berikut:

a. Reklasifikasi antar Kelompok Aset sebesar Rp9.110.838.650,00 untuk kegiatan fisik 7 SKPD yang belum selesai sampai akhir perode pelaporan sehingga harus direklasifikasi kedalam Konstruksi dalam Pengerjaan berasal reklasifikasi dari Gedung Bangunan sebesar Rp 4.981.918.577,00 dan reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 4.128.920.073,00.

b. Mutasi kurang sebesar Rp30.988.717.175,98 terdiri:

1. Koreksi nilai sebesar Rp25.000.000,00 adalah koreksi hasil temuan pemeriksa atas kegiatan Core Team pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang yang merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin;
2. Reklasifikasi antar Kelompok Aset sebesar Rp30.963.717.175,98 untuk pekerjaan yang telah selesai pada akhir periode pelaporan berasal dari reklasifikasi ke Gedung Bangunan dan reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan.

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

5.3.1.3.7.1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

No	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.541.843.355.236,40)	(2.322.700.129.644,24)

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024, dengan uraian sebagai berikut:

	Uraian	Akm. Penyusutan
	Saldo *Audited* per 31 Des 2023	**2.322.700.129.644,24**

	Uraian	Akm. Penyusutan
Mutasi Tambah		
	Koreksi Nilai Penyusutan	2.650.140.441,43
	Hibah	21.630.636.383,47
	Mutasi antar SKPD	8.005.086.824,20
	Reklasifikasi	2.584.763.404,00
	Beban Penyusutan	203.555.135.875,93
	Total Mutasi Tambah	***238.425.762.929,03***
Mutasi Kurang		
	Koreksi Nilai Penyusutan	5,61
	Penghapusan	1.088.097.392,00
	Mutasi antar SKPD	8.005.086.824,20
	Reklasifikasi	10.189.353.115,06
	Total Mutasi Kurang	***19.282.537.336,87***
Total Mutasi		**219.143.225.592,16**
	Saldo per 31 Des 2024	**2.541.843.355.236,40**

Mutasi Tambah sebesar Rp238.425.762.929,03 dan Mutasi Kurang sebesar Rp19.282.537.336,87 berasal dari transaksi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah sebesar Rp238.425.762.928,20 terdiri dari:
   1. Koreksi Nilai Penyusutan sebesar Rp2.650.140.441,43 yang berasal dari koreksi saldo awal untuk mengkoreksi saldo pencatatan periode lalu sebesar Rp158.120.016,13 dikarenakan adanya koreksi nilai dan pembulatan, koreksi dari hibah Pemerintah Pusat ke BPBD yang merupakan hasil inventarisasi sebesar Rp1.099.214.000,00 serta koreksi nilai yang disebabkan adanya temuan pemeriksa sebesar Rp1.392.806.425,30.
   2. Hibah sebesar 21.630.636.383,47, merupakan nilai akumulasi penyusutan dari penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat/Kabupaten, Kota dan pihak lainnya;
   3. Mutasi antar SKPD merupakan transaksi masuk keluar antar SKPD dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp8.005.086.824,20;
   4. Reklasifikasi sebesar Rp2.584.763.404,00 berasal dari nilai akumulasi penyusutan transaksi reklasifikasi.
   5. Beban Penyusutan Aset Peralatan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp203.555.135.875,93 nilai ini sudah termasuk nilai koreksi beban penyusutan karena temuan pemeriksa pada SKPD Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp12.749.000,00 dan pada SKPD Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura sebesar Rp22.427.220,30

b. Mutasi kurang sebesar Rp19.282.537.336,04 terdiri dari:
   1. Koreksi Nilai Penyusutan sebesar Rp5,61 berasal dari koreksi saldo awal untuk mengkoreksi saldo pencatatan periode lalu dikarenakan adanya pembulatan;
   2. Penghapusan dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp1.088.097.392,00 berasal dari hibah keluar dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke instansi lain (hibah ke KPID dengan BAST Nomor 030/362/BAST/PBMD/BPKAD/2024 tanggal 16 Oktober 2024, hibah ke IPSI dengan BAST Nomor 030/361/BAST/PBMD/BPKAD/2024 tanggal 16 oktober 2024, hibah ke Media Minangkabau Sumbar News dengan

BAST Nomor 030/401/BAST/PBMD/BPKAD/2024 tanggal 6 Mei 2024, hibah ke Pengadilan Tinggi Padang dengan BAST Nomor 030/135/BAST/PBMD/BPKAD/2024 tanggal 6 Mei 2024);

3. Mutasi antar SKPD merupakan transaksi masuk keluar antar SKPD dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp Rp8.005.086.824,20; dan
4. Reklasifikasi keluar dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp10.189.353.115,06;

5.3.1.3.7.2. Akumulasi Penyusutan Gedung Bangunan

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.200.198.046.068,18)	(1.100.759.868.734,32)

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024, dengan uraian sebagai berikut:

	Uraian	Akm. Penyusutan
	Saldo *Audited* per 31 Des 2023	**1.100.759.868.734,32**
Mutasi Tambah		
	Koreksi Nilai Penyusutan	4.966.126,83
	Hibah	213.151.792,33
	Mutasi antar SKPD	0,00
	reklasifikasi	0,00
	Beban Penyusutan	99.453.715.891,08
	Total Mutasi Tambah	***99.671.833.810,24***
Mutasi Kurang		
	Koreksi Nilai Penyusutan	6.700,08
	Penghapusan	0,00
	Mutasi antar SKPD	0,00
	Reklasifikasi	233.649.776,30
	Beban Penyusutan	0,00
	Total Mutasi Kurang	***233.656.476,38***
Total Mutasi		**99.438.177.333,86**
	Saldo per 31 Des 2024	**1.200.198.046.068,18**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024. Total penambahan sebesar Rp99.671.833.810,24 dengan total pengurangan sebesar Rp233.656.476,38. Penambahan dan pengurangan nilai berasal dari transaksi sebagaimana berikut:

a. Mutasi tambah sebesar Rp99.671.833.810,24 terdiri dari:
   1. Koreksi nilai penyusutan sebesar Rp4.966.126,83 yang merupakan koreksi saldo pencatatan periode lalu karena pembulatan sebesar Rp0,02 dan koreksi akumulasi penyusutan karena koreksi hasil temuan pemeriksa untuk

penggabungan aset Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada SKPD RSUD Prof. Muhammad Yamin, SH sebesar Rp4.966.126,81;
2. Hibah dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp213.151.792,33 pada SKPD Dinas Pendidikan ;
3. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp99.453.715.891,08;

b. Mutasi kurang sebesar Rp233.656.476,38 terdiri dari:
1. Koreksi nilai penyusutan sebesar Rp6.700,08 pada SKPD Badan Penghubung;
2. Reklasifikasi antar kelompok aset dengan nilai penyusutan sebesar Rp233.649.776,30

5.3.1.3.7.3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(5.484.889.516.019,23)	(5.195.510.308.392,07)

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024, dengan uraian sebagai berikut:

	Uraian	Akm. Penyusutan
	Saldo *Audited* per 31 Des 2023	**5.195.510.308.392,07**
Mutasi Tambah		
	Koreksi Nilai Penyusutan	0,00
	Hibah	1.717.005.821,74
	Mutasi antar SKPD	-
	reklasifikasi	0,00
	Beban Penyusutan	287.665.701.305,62
	Total Mutasi Tambah	***289.382.707.127,36***
Mutasi Kurang		
	Koreksi Nilai Penyusutan	3.499.500,20
	Penghapusan	-
	Mutasi antar SKPD	-
	reklasifikasi	-
	Beban Penyusutan	0,00
	Total Mutasi Kurang	3.499.500,20
Total Mutasi		**289.379.207.627,16**
	Saldo per 31 Des 2024	**5.484.889.516.019,23**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024. Total penambahan sebesar Rp289.382.707.127,36 dengan total pengurangan

sebesar Rp3.499.500,20 Penambahan dan pengurangan nilai berasal dari transaksi sebagaimana berikut:

a. Mutasi tambah sebesar Rp289.382.707.127,36 terdiri dari:
   1. Hibah dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp1.717.005.821,74 (Hibah pada Pengelola BMD);
   2. Beban penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebesar 287.665.701.305,62.

b. Mutasi kurang sebesar Rp3.499.500,20 merupakan koreksi penyusutan saldo awal dan termasuk koreksi hasil temuan pemeriksa pada SKPD Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang.

5.3.1.3.7.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.3.07.04	**Akumulasi Penyusutan Aset tetap Lainnya**	**(14.412.751.187,55)**	**(14.016.594.304,88)**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024, dengan uraian sebagai berikut:

	Uraian	Akm. Penyusutan
	Saldo *Audited* per 31 Des 2023	**14.016.594.304,88**
Mutasi Tambah		
	Koreksi Nilai Penyusutan	0,00
	Hibah	-
	Mutasi antar SKPD	-
	reklasifikasi	0,00
	Beban Penyusutan	396.156.883,07
	Total Mutasi Tambah	***396.156.883,07***
Mutasi Kurang		
	Koreksi Nilai Penyusutan	0,40
	Penghapusan	-
	Mutasi antar SKPD	-
	reklasifikasi	-
	Total Mutasi Kurang	***0,40***
Total Mutasi		**396.156.882,67**
	Saldo per 31 Des 2024	**14.412.751.187,55**

Jumlah Mutasi Tambah sebesar Rp396.156.883,07 dan Mutasi Kurang sebesar Rp0,00 berasal dari transaksi sebagaimana berikut:

a. Mutasi tambah sebesar Rp396.156.883,07 merupakan beban penyusutan tahun 2024.
b. Mutasi kurang sebesar Rp0,40 merupakan koreksi saldo awal untuk mengkoreksi saldo pencatatan periode lalu dikarenakan pembulatan pada SKPD Biro Umum.

Penjelasan Khusus Lainnya:

Aset Tetap Tanah

a) Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat audited 31 Desember 2024 berjumlah 1.037 persil tanah dengan nilai sebesar Rp 2.317.257.971.575,32 terdiri dari :
   1. Tanah yang sudah bersertipikat 705 persil dengan nilai Rp.1.796.501.938.820,61, termasuk tanah yang sudah terbit sertipikatnya tahun 2024 sebanyak 34 persil dengan nilai Rp. Rp.520.756.032.754,71.
   2. Tanah yang belum bersertipikat 332 persil dengan nilai Rp.520.756.032.754,71, dapat dilihat pada lampiran 48

b) Pada tahun 2024 telah terbit sertifikat tanah sebanyak 34 persil, dengan nilai sebesar Rp.56.625.334.604,00 yaitu terdiri dari :
   1. Tanah untuk Pelabuhan/Dermaga 1 Persil
   2. Tanah Perkebunan sebanyak 3 Persil
   3. Tanah Sekolah sebanyak 8 Persil
   4. Tanah Jalan sebanyak 22 Persil

Dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD Pengguna	Status Tanah				Nilai Asset (Rupiah)	Alamat
		Status Hak	Sertifikat				
			No/Nibel	Luas (M2)	Tgl/Thn		
A.	**TANAH UNTUK PELABUHAN /DERMAGA**						
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	HP	00019	14.380	05/01/2024	414.000.000	Nagari Sasak, Kec. Sasak Ranah Pasisie Kab. Pasaman Barat
B.	**TANAH PERKEBUNAN**						
2	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	HP	30200000 00040	237	23/04/2024	24.298.312.500	Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi
3	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	HP	30200000 00060	239	23/04/2024		Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi
4	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	HP	30200000 00050	320	23/04/2024		Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi
C	**TANAH SEKOLAH**						
5	SMAN 1 Batang Gasan	HP	14	6.332	19/03/2024	-	Nagari Malay V Suku Kec. Batang Gasan Kab. Padang Pariaman
6	SMAN 1 Silaut	HP	03.14.000 000069.0	13.000	27/06/2024	10.000.000	Nagari Lubuk Bunta, Kec. Silaut Kab. Pesisir

No	SKPD Pengguna	Status Tanah				Nilai Asset (Rupiah)	Alamat
		Status Hak	Sertifikat				
			No/Nibel	Luas (M2)	Tgl/Thn		
							Selatan
7	SMAN 2 Basa Ampek Balai	HP	03.14000000027.0	14.170	27/06/2024	280.000.000	Nagari Ampang Tulak, Kec. Basa Ampek Balai Tapan Kab. Pesisir Selatan
8	SMKN 1 SULIKI	HP	03.05.000000704.0	8.808	13/08/2024	65.349.104	Nagari Sungai Rimbang, Kec. Suliki Kab. Lima Puluh Kota
9	SMKN 2 Pulau Punjung	HP	03.18000000491.0	10.000	03/06/2024	75.000.000	Nagari Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya
10	SMAN 6 Pariaman	HP	03.16.000000780.0	9.045	11/11/2024	422.310.000	Nagari Sungai Rambai, Kec. Pariaman Utara, Kota Pariaman
11	SMKN 1 Pantai Cermin	HP	03.08.000001128.0	50.085	25/11/2024	300.000.000	Nagari Lolo, Kecamatan Pantai Cermin, Kab. Solok
12	SMAN 2 Sitiung	HP	03.18.000000168.0	8.821	03/06/2024	405.000.000	Nagari Siguntur Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya
D	**TANAH JALAN**						
13	Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	30400000 00420	25.150	30/04/2024	7.712.750.000	
14	Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	30400000 00410	11.110	30/04/2024		
15	Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	30400000 00430	9.232	30/04/2024		
16	Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	30400000 00440	17.480	30/04/2024		
17	Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	30400000 21030	6.469	27/12/2024	6.289.800.000	
18	Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	30400000 21010	814	27/12/2024		
19	Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	30400000 21040	738	27/12/2024		
20	Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	30400000 21020	3.846	27/12/2024		
21	Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	31600000 09370	18.634	09/12/2024	6.042.950.000	
22	Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	31600000 09360	5.899	09/12/2024		
23	Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	31600000 09350	4.245	09/12/2024		

No	SKPD Pengguna	Status Tanah				Nilai Asset (Rupiah)	Alamat
		Status Hak	Sertifikat				
			No/Nibel	Luas (M2)	Tgl/Thn		
24	Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	31300000 26820	449	20/11/2024		
25	Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	31300000 26830	63	20/11/2024		
26	Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	31300000 26800	35	14/11/2024		
27	Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	31300000 26420	150	20/11/2024		
28	Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	31300000 26470	611	15/11/2024		
29	Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	31300000 26430	225	20/11/2024	10.309.863.000	
30	Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	31300000 26440	36	20/11/2024		
31	Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	31300000 26450	63	15/11/2024		
32	Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	31300000 26810	1.056	19/11/2024		
33	Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	31300000 26460	83	15/11/2024		
34	Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	31300000 26400	120	20/11/2024		
	TOTAL			**241.945**		**56.625.334.604,00**	

c) Didalam Aset Tetap Tanah ini, terdapat tanah yang berlokasi di Rimbo Kaluang (GOR. H. Agus Salim Padang) seluas 25.075 M². Tanah tersebut saat ini tercatat sebagai Aset Tetap Tanah pada Dinas Pemuda dan Olah Raga. Tanah sebagaimana dimaksud merupakan tanah milik BNI yang ditukargulingkan dengan tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat seluas 62.687,50 m^2 yang terletak di Kecamatan Koto Tangah.

Adapun tindak lanjut penyelesaian permasalahan tukar guling tanah ini adalah telah dirapatkan secara bersama antara Pemprov dengan BNI pada tanggal 13 Februari 2024 menindaklanjuti **hasil Legal Opini dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia** atas penyelesaian permasalahan tukar guling tanah yakni membentuk **Tim Bersama dan Tim Satgas** penyelesaian permasalahan tukar guling tanah Pemprov dan BNI. Secara lengkap kronologis penyelesaian permasalahan aset tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan BNI dijelaskan pada Bab VI Informasi Non Keuangan.

5.3.1.4. DANA CADANGAN

5.3.1.4.1. Dana Cadangan

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.4.01	Dana Cadangan	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo dana cadangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dan 2023. Tidak ada dana cadangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sampai dengan 31 Desember 2024 yang ditetapkan.

5.3.1.5. ASET LAINNYA

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.5	Aset Lainnya	191.911.213.762,74	251.342.168.594,51

Aset lainnya terdiri dari tagihan jangka panjang, aset tidak berwujud dan aset lain-lain, dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.5.1. Tagihan Jangka Panjang

5.3.1.5.1.1. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.5.01.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	49.976.619.769,00	49.976.619.769,00

Jumlah tersebut merupakan saldo aset lainnya tuntutan ganti kerugian daerah per 31 Desember 2024 dan 2023, terdiri dari:

a) Tagihan tuntutan perbendaharaan atas UUDP Setda tahun 2005 yaitu an. Sdr. Drs. Zulkifli Yasin sebesar Rp351.798.311,00 namun yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tgl 16 Agustus 2008. Khusus Tuntutan Ganti Rugi an. Sdr. Drs. Zulkifli Yasin menyerahkan jaminan berupa: 1 (satu) buah BPKB Nomor D.0211183 C kendaraan roda dua merk Modenas BA 4008 TP Tahun 2003 dan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2867 tanggal 26 Januari 2008 atas tanah perumahan seluas 260 m2 yang berlokasi di Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Padang. Dan berdasarkan hasil keputusan sidang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Provinsi Sumatera Barat tanggal 25 sampai dengan 28 Oktober 2012 merekomendasikan pelimpahan kasus TP/TGR Provinsi Sumatera Barat kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dengan surat pada tanggal No.903/2284/DPKD-Akt-2010. tanggal 28 Desember 2010, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum ada perkembangan cicilannya dan pada tahun 2017 dan 2020 di reklasifikasi dari Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan. Saat ini dalam proses di KPKNL.

b) Sisa TGR Yusafni sebesar Rp48.939.322.300,00 terdiri dari Rp5.556.836.000,00 (awal sebesar Rp6.080.836.000,00 dan Rp524.000.000,00 sudah disetor ke Kasda tahun 2016 dan 2017) dan sebesar Rp43.382.486.300,00 reklasifikasi dari bagian lancar TGR.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI dalam LHP Nomor 45/LHP/XVIII.PDG/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016 bahwa realisasi Belanja Modal Tahun 2014, 2015 dan 2016 untuk penggantian Tanah/Bangunan/Tanaman pada Dinas Prasjal Tarkim tidak sesuai dengan fakta dan merugikan keuangan daerah minimal sebesar Rp16.098.242.500,00 dan terdapat pengeluaran yang tidak dibayarkan kepada pihak yang tercantum dalam Dokumen Pertanggungjawaban yang berindikasi merugikan keuangan daerah minimal sebesar Rp27.284.243.800,00, termasuk di dalamnya pembayaran ganti rugi Tahun 2016 sebesar Rp16.783.550.000,00.

Selanjutnya Gubernur memerintahkan Inspektorat Provinsi untuk melakukan pemeriksaan atas Belanja Modal Tanah Dinas Prasjal Tarkim Tahun 2013 s.d. 2016. Hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dalam Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor 31/INSP-K/XIII-2016 tanggal 13 Desember 2016 menyatakan bahwa terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp49.463.322.300,00 selama Tahun 2013 s.d. 2016 yang terdiri dari kerugian sesuai LHP BPK sebesar Rp43.382.486.300,00 dan SPJ Fiktif Belanja Modal Tanah Tahun 2013 sebesar Rp6.080.836.000,00. LHA tersebut disampaikan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan perintah Gubernur pada Nota Dinas Inspektur Provinsi Sumatera Barat kepada Gubernur Nomor 700/355/Insp-Wil III/2016 tanggal 23 November 2016.

Selanjutnya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah telah melaksanakan sidang terhadap kasus Sdr. Yusafni. PPTK Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Jalan/Jembatan Strategis Tahun 2013 dan PPTK Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Infrastruktur Strategis Tahun 2014 s.d. 2016. Yang bersangkutan telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 07/TPKD/SKTJM/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 senilai Rp43.382.486.300,00 dan SKTJM Nomor 08/TPKD/SKTJM/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 senilai Rp6.080.836.000,00. Yang bersangkutan juga telah menandatangani Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji kepada Pembantu Bendahara Pembuat Daftar Gaji Dinas Prasjal Tarkim untuk melakukan pemotongan gaji sebesar Rp4.000.000,00 per bulan mulai bulan Januari 2017 dan disetorkan ke Rekening Kas Daerah Nomor 2100.0101.01374-0.

Disamping itu ybs juga telah menyerahkan jaminan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa 1 buah BPKB No-03068794 Kendaraan Volkswagen Type GOLF 1.4 Tahun 2012 senilai Rp250.000.000,00, namun BPKB tersebut telah disita oleh pihak Bareskrim saat kasusnya diproses. Sesuai dengan SKTJM tersebut, ybs akan melunasinya selama 2 tahun terhitung sejak 5 Desember 2016, Berdasarkan SKTJM-nya, ybs. harus mengembalikan kerugian daerah per 31 Desember 2016 sebesar Rp16.783.550.000,00.

Namun sampai dengan saat Laporan Keuangan ini disusun, ybs. belum melakukan pembayaran sesuai kewajibannya. Pembayaran yang dilakukan selama tahun 2016 adalah sebesar Rp24.000.000,00 yang dipotong dari gaji ybs. sesuai Surat Kuasa

Pemotongan Gaji kepada Pembantu Bendahara Pembuat Daftar Gaji. Pemotongan dihentikan sesuai dengan SK Gubernur tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Yusafni sebagai PNS Provinsi Sumatera Barat. Total nilai yang tercatat sebagai TGR dari Sdr. Yusafni adalah sejumlah Rp48.939.322.300,00**.**

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg tanggal tahun 2020, Sdr. Yusafni terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani, dijatuhkan pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider selama satu tahun kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp62.506.191.351,25. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda atau aset terdakwa dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka akan dipidana penjara selama lima tahun.

Dapat juga kami informasikan bahwa terhadap Tuntutan Perbendaharaan/TGR an. Yusafni ini, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) berencana untuk mengusulkan penghapusan kerugian daerah atas nama YUSAFNI ini sebesar Rp48.939.322.300,00 dari daftar kerugian daerah dan laporan keuangan daerah sesuai putusan No.01/MPPKD/XI/2023 tanggal 23 November 2023.

c) TGR atas nama Yelnazi Rinto Bendahara Pengeluaran pembantu pada Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah sebesar Rp685.499.158,00. Jumlah tersebut merupakan sisa Tuntutan Kerugian Daerah yang terdiri dari sisa UYHD sebesar Rp629.240.490,00 dan pajak sebesar Rp56.258.668,00. Dapat juga diinformasikan bahwa sisa UYHD tersebut telah dikurangi setoran ke kas daerah pada Tahun 2020 sebesar Rp205.279.512,00. (Rp834.520.002 – Rp205.279.512,00 = Rp629.240.490,00) dan saat ini yang bersangkutan telah divonis selama 7 tahun kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Padang.

d) TGR atas nama Erman Rahman Kepala BPBD Prov Sumbar atas temuan BPK pada LHP Nomor 40.C/LHP/XVIII.PDG/12/2021 tentang Laporan Hasil Permeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada Pemprov Sumbar Tahun 2021 tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp6.531.548.000,00 dan tahun 2021 telah dilakukan pengembalian ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp1.120.000.000,00 serta selama tahun 2022 juga telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp1.740.000.000,00 sehingga per 31 Desember 2022 jumlah TGR atas nama E.Rahman senilai Rp3.671.548.000,00 dan pada Tahun 2023 sisa tersebut telah dilunasi oleh yang bersangkutan.

Mutasi tambah kurang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 27.

5.3.1.5.2. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	19.856.938.752,53

Jumlah tersebut merupakan saldo rekening kemitraan dengan pihak ketiga pada posisi per 31 Desember 2024 dan 2023.

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut direklasifikasi ke Properti Investasi pada Tahun 2024.

5.3.1.5.3. Aset Tidak Berwujud

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.5.03	**Aset Tidak Berwujud**	**33.449.565.365,00**	**33.468.540.115,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo rekening Aset Tidak Berwujud pada posisi per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan uraian:

No	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
30.4.	Aset Tidak Berwujud	33.449.565.365,00	33.468.540.115,00
	Akm.Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(33.090.404.483,00)	(32.771.818.808,50)
	Nilai Buku	359.160.882,00	696.721.306,50

Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tidak Berwujud sebagai berikut:

	Uraian	Aset Tidak Berwujud
	Saldo *Audited* per 31 Des 2023	**33.468.540.115,00**
Mutasi Tambah		
	Belanja Modal tahun 2024	18.075.250,00
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2024	-
	Koreksi Nilai	-
	Hibah	-
	Mutasi antar SKPD	109.615.000,00
	Reklasifikasi	7.450.000,00
	Beban Penyusutan	-
	Total Mutasi Tambah	***135.140.250,00***
Mutasi Kurang		
	Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	-
	Koreksi Nilai	-
	Penghapusan	-
	Mutasi antar SKPD	109.615.000,00
	Reklasifikasi	44.500.000,00
	Total Mutasi Kurang	***154.115.000,00***
Total Mutasi		**(18.974.750,00)**
	Saldo per 31 Des 2024	**33.449.565.365,00**

Mutasi Tambah sebesar Rp135.140.250,00 dan Mutasi Kurang sebesar Rp154.115.000,00 berasal dari transaksi sebagaimana berikut:

a. Mutasi tambah sebesar Rp135.140.250,00 terdiri dari:

1. Belanja Modal Aset Tidak Bewujud Tahun 2024 merupakan belanja penambahan aset Aset Tidak Bewujud sebesar Rp18.075.250,00;
2. Mutasi antar SKPD yang merupakan transaksi perpindahan aset dari satu SKPD ke SKPD yang lain dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.109.615.000,00
3. Reklasifikasi antar kelompok aset sebesar Rp7.450.000,00 berasal dari reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BOS ke Aset tidak berwujud

b. Mutasi kurang sebesar Rp154.115.000,00 terdiri dari:
   1. Mutasi antar SKPD yang merupakan transaksi perpindahan aset dari satu SKPD ke SKPD yang lain dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.109.615.000,00;
   2. Reklasifikasi antar kelompok aset sebesar Rp44.500.000,00 berasal dari reklasifikasi ke Aset Tidak Bermanfaat pada SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB.

5.3.1.5.4. Aset Lain-lain

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.5.04	Aset Lain-lain	220.067.058.415,09	271.107.417.795,61

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023, yang terdiri dari:

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Aset Lain-lain		
Aset Tidak Bermanfaat/Rusak Berat	127.829.488.311,09	141.166.494.691,61
Aset Dalam Penelusuran	0,00	0,00
Akm. Penyusutan Aset Dalam Penelusuran	0,00	0,00
Aset Dimanfaatkan Pihak Lain	0,00	0,00
Aset Yang Dibatasi Penggunaannya	92.237.570.104,00	91.732.570.104,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	38.208.353.000,00
Jumlah Aset Lain-lain	**220.067.058.415,09**	**271.107.417.795,61**

5.3.1.5.4.1. Aset Rusak Berat/Usang

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.5.04.01	Aset Rusak Berat/Usang	127.829.488.311,09	141.166.494.691,61

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Rusak Berat/Usang per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan uraian sebagai berikut:

	Uraian	Aset Tidak Bermanfaat
	Saldo *Audited* per 31 Des 2023	**141.166.494.691,61**
Mutasi Tambah		
	Belanja Modal tahun 2024	-
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2024	-
	Koreksi Nilai	0,01
	Hibah	-
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	6.995.489.936,74
	Beban Penyusutan	-
	Total Mutasi Tambah	***6.995.489.936,75***
Mutasi Kurang		
	Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	-
	Koreksi Nilai	-
	Penghapusan	17.747.732.913,27
	Mutasi antar SKPD	0,00
	Reklasifikasi	2.584.763.404,00
	Total Mutasi Kurang	***20.332.496.317,27***
Total Mutasi		**(13.337.006.380,52)**
	Saldo per 31 Des 2024	**127.829.488.311,09**

Jumlah Mutasi Tambah sebesar Rp6.995.489.936,75 dan Mutasi Kurang sebesar Rp20.332.496.317,27 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi tambah sebesar Rp6.995.489.936,75 terdiri dari:
   1. Koreksi Nilai Penyusutan sebesar Rp0,01 berasal dari koreksi saldo awal untuk mengkoreksi saldo pencatatan periode lalu dikarenakan adanya pembulatan
   2. Reklasifikasi sebesar Rp6.995.489.936,74 berasal dari reklasifikasi Peralatan dan Mesin.

b. Mutasi kurang sebesar Rp20.332.496.317,27 terdiri dari:
   1. Penghapusan dengan SK Gubernur sebesar Rp 17.747.732.913,27 yang merupakan penghapusan dengan penjualan; dan
   2. Reklasifikasi sebesar 2.584.763.404,00 berasal reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin (SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dan SKPD Biro Pengadaan Barang dan Jasa).

5.3.1.5.4.2. Aset Dalam Penelusuran

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.5.04.02a	Aset Dalam Penelusuran	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Dalam Penelusuran milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 merupakan nilai buku yang terdiri dari Nilai Perolehan sebesar Rp0,00 dan Akumulasi Penyusutan Aset sebesar Rp0,00.

5.3.1.5.4.3. Aset Dimanfaatkan Pihak Lain

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.5.04.02b	Aset Dimanfaatkan Pihak Lain	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Dimafaatkan Pihak Lain milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 merupakan nilai buku yang terdiri dari Nilai Perolehan sebesar Rp0,00 dan Akumulasi Penyusutan Aset sebesar Rp0,00.

5.3.1.5.4.4. Aset Yang Dibatasi Penggunaannya

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.5.04.02	Aset Yang Dibatasi Penggunaannya	92.237.570.104,00	91.732.570.104,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 2023. Saldo ini merupakan saldo dana sumbangan dari PT Rajawali. Dana tersebut didepositokan pada Bank Nagari sejumlah Rp91.091.548.298,00 berdasarkan Adendum X Perjanjian Kerjasama Nomor: 910/1256/Perbend/B.Keuda-2021. Nomor: PKS/089/DIR/07-2021 antara Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tentang Investasi Jangka Pendek Dalam Bentuk Deposito Mudharabah Jangka waktu deposito mudharabah yaitu 3 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis. Pembentukan deposito pada Tahun 2023 sebesar Rp80.435.430,00 sehingga menjadi sebesar Rp91.732.570.104,00. Pada Tahun 2024 menjadi sebesar Rp92.237.570.104,00 yang berasal dari sisa pendapatan bunga deposito dari Dana Rajawali tahun 2024 setelah dikurangi dana untuk kegiatan bea siswa tahun ini yaitu sebesar Rp505.000.000,00 yang akan didepositokan di Tahun 2025.

Data selengkapnya tentang Nomor Deposito dan Nisbah Bagi Hasilnya tahun 2024, dapat dilihat pada Lampiran 52.

5.3.1.5.4.5. Dana Transfer-Treasury Deposit Facility (TDF)

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.5.04.03	Dana Transfer-Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	38.208.353.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Dana Transfer-Treasury Deposit Facility (TDF) Kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 2023 yang merupakan Rekening *Treasury Deposit Transfer*-TKD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Bank Indonesia dengan nomor rekening 519000214980 atas nama

Rekening Lain BI TDF-TKD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp0,00 sesuai dengan data Simtrada Kemenkeu yaitu:

Uraian	Periode	Nilai Kotor	Potongan	Nilai Bersih
Alokasi Dana Bagi Hasil Yang Disalurkan	TDF 2024	1.205.206.000,00	1.205.206.000,00	0,00

Sedangkan Dana Transfer-Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun 2023 sebesar Rp38.208.353.000,00 telah masuk ke Kas Daerah pada tanggal 25 Maret 2024.

Hal ini sesuai dengan Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan-Kementerian Keuangan Nomor ND-202/PB.6.2023 tanggal 10 Maret 2023, perihal Penyesuaian Kebijakan Akuntansi atas Penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum melalui Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD).

5.3.1.5.5. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.5.05	**Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**	**(33,090,404,483.00)**	**(32.771.818.808,50)**

Jumlah tersebut merupakan saldo rekening Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada posisi per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan uraian sebagai berikut:

	Uraian	Akm. Penyusutan
	Saldo *Audited* per 31 Des 2023	**32.771.818.808,50**
Mutasi Tambah		
	Belanja Modal tahun 2024	-
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2024	-
	Koreksi Nilai	-
	Hibah	-
	Mutasi antar SKPD	109.615.000,00
	reklasifikasi	
	Beban Penyusutan	363.085.674,50
	Total Mutasi Tambah	***472.700.674,50***
Mutasi Kurang		
	Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	-
	Koreksi Nilai	-
	Penghapusan	-
	Mutasi antar SKPD	109.615.000,00
	Reklasifikasi	44.500.000,00
	Total Mutasi Kurang	***154.115.000,00***
Total Mutasi		**318.585.674,50**
	Saldo per 31 Des 2024	**33.090.404.483,00**

Jumlah Mutasi Tambah sebesar Rp472.700.674,50 dan Mutasi Kurang sebesar Rp154.115.000,00 berasal dari transaksi sebagaimana berikut:

a. Mutasi tambah sebesar Rp472.700.674,50 terdiri dari:

1. Mutasi antar SKPD sebesar Rp109.615.000,00 berasal dari nilai akumulasi penyusutan transaksi mutasi antar SKPD
2. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2024 sebesar Rp363.085.674,50 yang dihitung seusai dengan aturan yang berlaku pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

b. Mutasi kurang sebesar Rp154.115.000,00 terdiri dari:
1. Mutasi antar SKPD sebesar Rp109.615.000,00 berasal dari nilai akumulasi penyusutan transaksi mutasi antar SKPD
2. Reklasifikasi sebesar Rp44.500.000,00 berasal dari nilai akumulasi penyusutan transaksi reklasifikasi ke Aset Tidak Bermanfaat pada SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB.

5.3.1.5.6. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.5.06	**Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain**	**(78.491.625.303,35)**	**(90.295.529.029,13)**

Jumlah tersebut merupakan saldo rekening Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain pada posisi per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		
Akm Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat/Rusak Berat	(78.491.625.303,35)	(90.295.529.029,13)
Akm Penyusutan Aset Dimanfaatkan Pihak Lain	-	-
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	**(78.491.625.303,35)**	**(90.295.529.029,13)**

5.3.1.5.6.1. Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.5.06.01	**Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang**	**(78.491.625.303,35)**	**(90.295.529.029,13)**

Jumlah tersebut merupakan saldo rekening Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang pada posisi per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan uraian sebagai berikut:

	Uraian	Akm. Penyusutan
	Saldo *Audited* per 31 Des 2023	**90.295.529.029,13**
Mutasi Tambah		
	Belanja Modal tahun 2024	-
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2024	-
	Koreksi Nilai	0,01
	Hibah	-
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	5.761.314.796,64

	Uraian	Akm. Penyusutan
	Beban Penyusutan	-
	Total Mutasi Tambah	***5.761.314.796,65***
Mutasi Kurang		
	Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	-
	Koreksi Nilai	0,88
	Penghapusan	14.980.455.117,55
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	2.584.763.404,00
	Total Mutasi Kurang	***17.565.218.522,43***
Total Mutasi		**(11.803.903.725,79)**
	Saldo per 31 Des 2024	**78.491.625.303,35**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat/Rusak Berat/Usang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024. Penambahan dan pengurangan nilai dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi tambah sebesar Rp5.761.314.796,65
   1. Koreksi nilai penyusutan sebesar Rp0,01 merupakan koreksi saldo pencatatan periode lalu karena pembulatan.
   2. Reklasifikasi akumulasi penyusutan sebesar Rp5.761.314.796,64

b. Mutasi kurang sebesar Rp17.565.218.522,43 terdiri dari:
   1. Koreksi kurang nilai saldo awal akumulasi penyusutan sebesar Rp0,88 merupakan koreksi saldo awal untuk mengkoreksi saldo pencatatan akumulasi penyusutan periode lalu pada SKPD Dinas Pendidikan;
   2. Penghapusan dengan SK Gubernur sebesar Rp14.980.455.117,55;
   3. Reklasifikasi akumulasi penyusutan sebesar Rp2.584.763.404,00 merupakan reklasifikasi ke Peralatan Mesin (SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dan SKPD Biro Pengadaaan Barang dan Jasa.

5.3.1.5.6.2. Akumulasi Penyusutan Aset Dimanfaatkan Pihak lain

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.5.06.02	**Akumulasi Penyusutan Aset Dipakai Pihak Lainn**	**0,00**	**0,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo rekening Akumulasi Penyusutan Aset Dipakai Pihak Lain pada posisi per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan uraian sebagai berikut:

	Uraian	Akm. Penyusutan
	Saldo *Audited* per 31 Des 2024	**0,00**
Mutasi Tambah		
	Belanja Modal tahun 2023	-
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2023	-
	Koreksi Nilai	-

	Uraian	Akm. Penyusutan
	Hibah	-
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	-
	Beban Penyusutan	-
	Total Mutasi Tambah	**-**
Mutasi Kurang		
	Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	-
	Koreksi Nilai	-
	Penghapusan	-
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	-
	Total Mutasi Kurang	**-**
Total Mutasi		**-**
	Saldo per 31 Des 2024	**-**

Mutasi tambah kurang untuk Aset Tidak Bermanfaat, Aset Dalam Penelusuran dan Aset Dimanfaatkan Pihak Lain dapat dilihat pada Lampiran 45 dan 46.

5.3.1.6 Properti Investasi

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.6	**Properti Investasi**	**111.576.619.000,00**	**0,00**
1.6.01	Properti Investasi Tanah	76.232.200.000,00	0,00
1.6.02	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	35.344.419.000,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023.

Aset tanah dan bangunan serta peralatan mesin Hotel Monopoli Bukittinggi senilai Rp111.576.619.000,00 yang terletak dikelurahan Bukit Cangang Kecamatan Guguk Panjang Kotamadya Tk II Bukittinggi disewakan kepada PT. IFLEX Indonesia berdasarkan Perjanjian Sewa Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan PT. IFLEX Indonesia No.030/885/PBMD/2024 dan No.002/SSKI/Konsorsium/VIII/2024 dengan nilai sewa Rp.10.935.000.000,00. Nilai asset tanah, bangunan dan peralatan mesin Hotel Monopoli tersebut berdasarkan hasil Penilaian/appraisal oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & rekan Tahun 2023. Rincian asset dapat dilihat pada Lampiran 60.

5.3.1.6.1 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.6.04	**Akumulasi Penyusutan Properti Investasi**	**22.620.428.160,00**	**0,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023.

5.3.2. Kewajiban

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
2.1.01.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	56.258.668,00	56.258.668,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023. Utang PFK muncul karena masih adanya pungutan atau potongan rekening pihak ketiga oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yaitu Biro Bina Mental dan Kesra Setda Rp56.258.668,00 yang telah di reklas ke Aset Lainnya-Tuntutan Kerugian Daerah karena yang bersangkuatan an. Sdr. Yelnazi Rinto (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Bina Sosial dan Kesra Sekretariat Daerah) telah divonis selama 7 tahun kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Padang.

Utang tersebut belum disetorkan ke rekening Kas Negara sampai akhir TA per 31 Desember 2024. Rincian per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 55.

5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	25.417.880.044,90	2.084.549.215,17

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan yang diterima dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 yaitu pendapatan Sewa Ruangan ATM pada RSUD Achmad Muchtar, RSUD M.Natsir Solok, Mesjid Raya, Paviliun Istana Bung Hatta, Kompleks Eks. Novotel dan Balai Sidang Bung Hatta serta Tanah Komplek GOR, Tanah untuk ATM Bank Nagari di beberapa kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Gedung Rohana Kudus, Ruang Escape Building Kantor Gubernur. Tanah dan Bangunan Kantor Diniyah Putri Padang Panjang serta Tanah dan Bangunan Balai Transmigrasi dan lain-lain pada BPKAD.

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 57.

5.3.2.1.3. Utang Belanja

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
2.1.06.	Utang Belanja	510.698.511.821,58	398.879.854.718,67

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
2.1.06	**Utang Belanja**		
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	34.335.621.211,00	10.033.370.562,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang Jasa	81.400.664.565,58	66.027.303.099,67
2.1.06.07	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.105.081.802,00	2.134.072.330,00
2.1.06.08	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.001.779.730,00	3.385.886.489,00
2.1.06.09	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.502.587.466,00	0,00
2.1.06.12	Utang Belanja Bagi Hasil	356.352.777.047,00	317.299.222.238,00
	TOTAL	**510.698.511.821,58**	**398.879.854.718,67**

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023 yaitu:

1. Utang Belanja Pegawai sebesar Rp34.335.621.211,00 merupakan utang kekurangan pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS dan PPPK bulan Desember 2024 yang belum terbayarkan bagi seluruh SKPD dilingkup pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Khusus untuk utang belanja pegawai Dinas Pendidikan sebesar Rp139.052.352,00 terdiri dari gaji dan tunjangan serta Tambahan Penghasilan ASN Dinas Pendidikan yang masih belum tuntas proses penyalurannya oleh Bank Nagari pada rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Cabang Dinas VIII dan *Internal Account/ Escrow Account* pada Bank Nagari yang digunakan sebagai alat/ *tools* oleh untuk keperluan internal Bank Nagari dalam mempermudah proses transaksi pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta Tambahan Penghasilan ASN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

2. Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp81.400.664.565,58 yaitu utang belanja telp. listrik. air. internet yang merupakan pemakaian bulan Desember 2024 yang dibayarkan Tahun 2025 dan termasuk beberapa utang belanja barang jasa lainnya sebagai berikut:

SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
DINAS PENDIDIKAN	742.272.197,00	Jasa Kantor, Jasa Konstruksi, Barang diserahkan
DINAS KESEHATAN	2.801.258.290,00	Barang dan Jasa BLUD, Jasa Kantor, Barang Pakai Habis dll
RSUD. Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	33.337.762.697,00	Barang dan Jasa BLUD
RS. JIWA Prof. HB SAANIN	1.083.711.484,00	Barang dan Jasa BLUD
RSUD M. NATSIR SOLOK	23.529.731.304,83	Barang dan Jasa BLUD
RSUD PARIAMAN	10.789.828.509,00	Barang dan Jasa BLUD
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	126.962.043,00	Jasa Kantor
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	171.664.605,00	Jasa Kantor, Jasa Konstruksi dan Pemeliharaan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11.573.517,00	Jasa Kantor
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	16.589.335,00	Jasa Kantor
DINAS SOSIAL	122.775.162,00	Jasa Kantor dan Pemeliharaan
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	33.312.869,00	Jasa Kantor
DINAS P. PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PP & KB	18.974.352,00	Jasa Kantor
DINAS PANGAN	46.666.319,00	Jasa Kantor
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	564.695.690,75	Jasa Kantor, Barang habis pakai dan Pemeliharaan
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	12.895.991,00	Jasa Kantor
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.398.900,00	Jasa Kantor
DINAS PERHUBUNGAN	19.006.231,00	Jasa Kantor
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	206.093.831,00	Jasa Kantor, Pemeliharaan, Konsultasi dll
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH	47.041.754,00	Jasa Kantor
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PTSP	102.022.263,00	Jasa Kantor, Jasa Tenaga Kebersihan dan Keamanan
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	21.715.498,00	Jasa Kantor, Jasa Tenaga Keamanan
DINAS KEBUDAYAAN	133.585.440,00	Jasa Kantor, Barang cetakan
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	35.434.321,00	Jasa Kantor
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	17.471.243,00	Jasa Kantor
DINAS PARIWISATA	21.160.627,00	Jasa Kantor
DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	4.112.865.079,00	Jasa Kantor, Barang diserahkan
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	47.324.235,00	Jasa Kantor, Jasa Tenaga Teknis
DINAS KEHUTANAN	21.090.675,00	Jasa Kantor
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	23.811.490,00	Jasa Kantor
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	40.813.522,00	Jasa Kantor
SETDA-BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	4.513.936,00	Jasa Kantor
SETDA-BIRO HUKUM	153.558,00	Jasa Kantor
SETDA-BIRO UMUM	336.819.685,00	Jasa Kantor
SEKRETARIAT DPRD	1.023.370.785,00	Jasa Kantor, Jasa Konstruksi dan Pemeliharaan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	22.767.462,00	Jasa Kantor
BADAN PENDAPATAN DAERAH	176.273.018,00	Jasa Kantor
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	20.617.520,00	Jasa Kantor dan Beasiswa Pendidikan PNS
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	120.779.204,00	Jasa Kantor, Jasa Tenaga Kebersihan dan Sopir
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.983.986,00	Jasa Kantor
BADAN PENGHUBUNG	1.417.617.251,00	Jasa Kantor, Pemeliharaan dan Sewa Gedung
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	6.422.558,00	Jasa Kantor
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.836.128,00	Jasa Kantor
JUMLAH	**81.400.664.565,58**	

3. Utang Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp38.609.448.998,00 terdiri dari utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp16.105.081.802,00 dan Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp15.001.779.730,00 serta Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp7.502.587.466,00 dengan uraian sebagai berikut:

SKPD	BELANJA MODAL	KETRANGAN
DINAS PENDIDIKAN	28.399.897.921,00	Peralatan dan Mesin, Gedung Bangunan
DINAS KESEHATAN	31.221.180,00	Peralatan dan Mesin BLUD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT	262.962.000,00	Peralatan Mesin BLUD dan Gedung Bangunan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M NATSIR	134.565.252,00	Peralatan dan Mesin BLUD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	722.489.485,00	Peralatan dan Mesin BLUD dan Gedung BLUD
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	2.588.791.203,00	Gedung dan Jalan, Jaringan dan Irigasi
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	4.934.725.641,00	Jalan, Jaringan dan Irigasi
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	255.933.000,00	Jalan, Jaringan dan Irigasi
DINAS SOSIAL	126.291.380,00	Gedung dan Bangunan
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	197.966.317,00	Gedung dan Bangunan
DINAS PANGAN	165.381.000,00	Gedung dan Bangunan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	250.980.800,00	Peralatan dan Mesin, Gedung Bangunan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	317.200.000,00	Peralatan dan Mesin
SEKRETARIAT DPRD	157.000.000,00	Gedung dan Bangunan
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	64.043.819,00	Gedung dan Bangunan
JUMLAH	**38.609.448.998,00**	

Rincian Utang belanja barang dan jasa tersebut dapat dilihat pada Lampiran 56.

Selain itu dapat juga diinformasikan bahwa ada pekerjaan yang dilanjutkan lewat tahun anggaran, sehingga akan dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.808.462.600,00 pada beberapa SKPD, yaitu:

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DAFTAR PAKET PEKERJAAN MELEWATI TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Paket	Pagu Awal (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Penyedia	Realisasi Terakhir			Tunda Bayar/Hutang	Dana Lewat Tahun/Sisa Bayar	Jumlah	Keterangan/Alasan
					Fisik (%)	Keuangan (%)	Keuangan (Rp)				
A. Dinas BMCKTR											
1	Penanganan Mata Air dan Air Lindi di TPA serta Pembangunan Tanggul dan Sel Sampah	4.711.623.661	4.236.170.000	CV. Nugraha Dhikarya Konstruksi	95,00%	75,50%	3.198.308.350	624.835.075,00	413.026.575,00	1.037.861.650	Tunda bayar Rp 624.835.075,00 + sisa bayar 2025 Rp 413.026.575,00
2	RTH (Ruang Terbuka Hijau) Perbatasan Sumatera Barat dengan Provinsi Tetangga (Batas Provinsi Sumatera Barat - Provinsi Bengkulu)	396.988.530	317.279.200	CV. Yohandra Konstruksi	95,25%	62,50%	198.299.500	88.044.978,00	30.934.722,00	118.979.700	Tunda bayar Rp 88.044.978,00+ sisa bayar 2025 Rp 30.934.722,00
3	DED Rehabilitasi Stadion dan Kawasan GOR H Agus Salim	790.000.000	678.432.000	PT. Calvindam Jaya EC	35,00%	30,00%	203.529.600	33.921.600,00	440.980.800,00	474.902.400	Tunda bayar Rp 33.921.600,00 + sisa bayar (45%) akibat keterlambatan lewat TA 2024 sebesar Rp 305.294.400,00 5. Sisa 20% (Rp 135.686.400,00) dari nilai kontrak adalah biaya pengawasan berkala yang dibayarkan saat pekerjaan konstruksi selesai.
	Jumlah (A)							**746.801.653,00**	**884.942.097,00**	**1.631.743.750,00**	
B. Dinas Pendidikan											
1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	1.670.000.000	1.670.000.000	CV. ARIFAN	91%	24,36%	406.897.050	0,00	1.263.102.950,00	1.263.102.950,00	diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan melewati tahun anggaran
2	Belanja Pakaian Batik Tradisional Dinas pendidikan Prov. Sumatera Barat Tahun 2024	1.824.750.000	1.824.750.000	CV. BINTANG PESSEL		0%	-	0,00	1.824.263.400,00	1.824.263.400,00	diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan melewati tahun anggaran
	Jumlah (B)							-	**3.087.366.350,00**	**3.087.366.350,00**	
C. Dinas SDABK											
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Malepang Kabupaten Pesisir Selatan	182.043.220	178.705.000	CV. FARIZ DUTA KONSTRUKSI	100	49,08	89.352.500	53.254.090,00	36.098.410	89.352.500	Sudah PHO Tgl. 6 Januari 2025
	Jumlah (C)							**53.254.090,00**	**36.098.410,00**	**89.352.500,00**	
	JUMLAH							**800.055.743,00**	**4.008.406.857,00**	**4.808.462.600,00**	

Data Sumber : Biro Administrasi Pembangunan

4. Utang Belanja Bagi Hasil pada Tahun 2024 sebesar Rp356.352.777.047,00 yang merupakan bagi hasil dari Provinsi ke Kabupaten dan Kota Tahun 2024 (Kekurangan Salur) yang telah ditetapkan dengan SK Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 971.1/008/PPD-Bapenda/2025 tanggal 5 Maret 2025 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2024.

   Rincian utang bagi hasil ini dapat dilihat pada Lampiran 50.

5.3.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	27.627.718.000,00	602.343.470,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
2.1.07	**Utang Jangka Pendek Lainnya**		
2.1.07.01	Utang Kelebihan Pembayaran PAD	563.000.000,00	602.343.470,00
2.1.07.02	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH)	27.064.718.000,00	0,00
	TOTAL	**27.627.718.000,00**	**602.343.470,00**

Utang Jangka Pendek lainnya tahun 2024 adalah merupakan hutang atas administrasi penyelesaian perkara sengketa tanah dengan H. Nurli sebesar Rp563.000.000,00 yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum dibayar, berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi pengosongan terhadap objek perkara No.107/Pdt.G/2004/PN.Pdg Jo DPB No.39/Pdt/PT.Pdg Jo Reg No.185 K/Pdt/2006 Jo Reg No.387/PK/Pdt/2008 dan Eksekusi No.03/PK/Eksekusi No.03/PK/Eks/2009/ PN.PDG. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyurati Pengadilan Negeri. Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Kelas IA Padang dengan surat Nomor 180/207.1/Huk-2015 tanggal 27 Januari 2015 perihal pembayaran ganti kerugian materil dan uang dwangsoon, terhadap pelaksanaan ganti kerugian sebagaimana tertera dalam amar putusan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan uang paksa (dwangsoon) sebesar Rp.163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) belum dilaksanakan sampai dengan saat ini, dan utang kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp39.343.470,00 berdasarkan dokumen Surat Bank Nagari Nomor SR/018/DJ/PD/12-2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Pernyataan Bunga BOS TA 2018, berupa sisa giro dana BOS SD/SMP Tahun 2018 yang belum di bayarkan karena terjadi kesalahan transfer pada tahun 2019 yang tertransfer ke Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan telah dikembalikan ke kasda Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021, telah dilakukan pembayaran dengan Belanja Tidak Terduga sesuai SP2D Nomor 13.00/04.0/000134/LS/ 5.02.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2024 tanggal 27 Agustus 2024.

Sedangkan Utang Kelebihan Pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp27.064.718.000,00 sesuai KMK Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024 dan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerrian Keuangan RI Nomor S-100/PK.2/2024 perihal Tindak Lanjut Pasca Penetapan PMK No. 89 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024 dimana Penetapan kurang bayar dan lebih bayar (KB/LB) DBH pada tahun 2024 dalam PMK tersebut agar dicatat sebagai pengakuan atas utang piutang antara pemerintah pusat dan daerah. Penyaluran KB/LB DBH akan memperhatikan kondisi APBN dan perekonomian sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan tentang penyaluran KB dan penyelesaian LB DBH.

5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
2.2.01	**Utang Jangka Panjang Lainnya**	**0,00**	**91.732.570.104,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban Jangka Panjang. posisi 31 Desember 2024 dan 2023, yang merupakan lawan akun Aset Yang dibatasi Penggunaannya-PT.Rajawali. Dana ini adalah sumbangan dari PT Rajawali yang diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan dana abadi dan didepositokan pada Bank Nagari Syariah yang bunganya digunakan untuk membiayai beasiswa pendidikan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan pada tahun 2024 pendapatan bunga deposito PT. Rajawali yang seharusnya sebesar Rp5.044.640.025,00 tersebut akan disisihkan sebesar Rp505.000.000,00 untuk dibentuk deposito baru sesuai Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bea Siswa Yang Bersumber Dari Hibah PT Rajawali sehingga diakui menjadi sebesar Rp4.539.640.025,00 digunakan untuk pembiayaan beasiswa pelajar pada Dinas Pendidikan. Pembentukan deposito baru sebesar Rp505.000.000,00 ini juga menambah utang jangka Panjang pada Tahun 2024.

Dapat juga kami informasikan bahwa sesuai dengan perjanjian PT. Rajawali dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 3 Oktober 2006, dana kompensasi/sumbangan PT. Rajawali sebesar 1 juta dolar tersebut ditampung dalam APBD Provinsi Sumatera Barat dan selanjutnya disisihkan untuk dijadikan dana awal bagi pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau. Sesuai ketentuan maka Yayasan Beasiswa Minangkabau tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 pada tanggal 28 Agustus 2009, sehingga baru bisa diproses pembentukan Yayasan tersebut.

Namun Yayasan Beasiswa Minangkabau sebagaimana dikemukakan di atas, sejak didirikan pada tahun 2009 belum dapat dioperasionalkan, karena terkendala dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai hibah yang terbit setelah ditetapkannya Peraturan Daerah dimaksud. Agar dana pendidikan yang bersumber dari hibah pihak ketiga, dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan program pemerintah daerah dibidang pendidikan dan sumber daya manusia, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau. Dan selanjutnya pengelolaan Dana Hibah PT. Rajawali tersebut sesuai perjanjian penggunaannya antara PT. Rajawali dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Beasiswa Yang Bersumber Dari Hibah PT. Rajawali.

Pada Tahun 2024 dan sumbangan dari PT Rajawali tersebut dilakukan reklasifikasi dari Utang Jangka Panjang Lainnya ke Ekuitas karena dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau.

5.3.3. Ekuitas

Akun	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
3.1.01	Ekuitas	11.796.950.964.552,20	11.698.383.180.031,40

Jumlah tersebut adalah saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023. Perubahan Ekuitas tahun 2024 dari mutasi tambah kurang dibandingkan dengan tahun 2023. Ekuitas dijelaskan pada penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.4.1 PENDAPATAN DAERAH-LO

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2024 (Rp)	TA. 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
7.	PENDAPATAN DAERAH-LO	6.555.449.374.755,36	6.455.678.341.331,62	99.771.033.423,74

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan-LO dalam Tahun 2024 dan 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, maka terdapat kenaikan sebesar Rp99.771.033.423,74. Pendapatan-LO ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah- LO, Pendapatan Transfer-LO, Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO.

5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2024 (Rp)	TA. 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
7.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	2.926.648.715.900,76	2.791.955.699.259,62	134.693.016.641,14

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Asli Daerah-LO dalam Tahun 2024 dan 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, maka terdapat kenaikan sebesar Rp134.693.016.641,14.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah-LO, Retribusi Daerah-LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LO dan Lain-lain PAD yang Sah-LO, yaitu:

5.4.1.1.1 PAJAK DAERAH-LO

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2024 (Rp)	TA. 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
7.1.01.	Pajak Daerah-LO	2.331.128.478.240,00	2.232.449.649.662,00	98.678.828.578,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Pajak Daerah-LO dalam Tahun 2024 dan 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, maka terdapat kenaikan sebesar Rp98.678.828.578,00.

Pendapatan Pajak Daerah-LO terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2024 Rp.	TA. 2023 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
7.1.1.	PENDAPATAN PAJAK DAERAH-LO	2.331.128.478.240,00	2.232.449.649.662,00	98.678.828.578,00
7.1.1.01.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	829.496.609.200,00	811.565.504.450,00	17.931.104.750,00
7.1.1.02.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	395.873.654.800,00	401.816.543.050,00	(5.942.888.250,00)
7.1.1.03.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	648.758.896.112,00	582.769.846.397,00	65.989.049.715,00
7.1.1.04.	Pajak Air Permukaan-LO	13.275.996.076,00	11.218.814.362,00	2.057.181.714,00
7.1.1.05.	Pajak Rokok-LO	443.723.322.052,00	425.078.941.403,00	18.644.380.649,00

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
PENDAPATAN PAJAK DAERAH	**2.338.112.925.264,00**	**2.331.128.478.240,00**	**6.984.447.024,00**
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	844.845.392.450,00	829.496.609.200,00	15.348.783.250,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	395.873.654.800,00	395.873.654.800,00	-
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	638.993.534.545,00	648.758.896.112,00	(9.765.361.567,00)
Pajak Air Permukaan	14.677.021.417,00	13.275.996.076,00	1.401.025.341,00
Pajak Rokok	443.723.322.052,00	443.723.322.052,00	-

Penjelasan Selisih :

1) Selisih Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LRA dibanding Pendapatan PKB-LO sebesar Rp15.348.783.250,00 merupakan penyesuaian terhadap pendapatan diterima dimuka yang mengurangi pendapatan-LO terhadap penerimaan PKB sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-697-2024 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi an Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Tahun 2024;

2) Selisih Pendapatan PBBKB-LRA dibanding Pendapatan PBBKB-LO sebesar Rp9.765.361.567,00 merupakan penyesuaian terhadap penerimaan piutang PBBKB Tahun lalu sebesar Rp49.854.748.495,00 dan pengakuan piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp59.620.110.062,00;

3) Selisih Pendapatan Pajak Air Permukaan - LRA dibanding Pendapatan Pajak Air Permukaan-LO sebesar Rp1.401.025.341,00 merupakan penyesuaian terhadap penerimaan piutang Pajak Air Permukaan tahun lalu sebesar Rp1.524.948.722,00 (saldo awal Rp1.453.336.822,00 ditambah koreksi piutang sebesar Rp71.611.900,00) dan pengakuan piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp270.275.170,00 (sisa piutang lama Rp134.973.670,00 ditambah koreksi sebesar Rp135.301.500,00)

Pendapatan Pajak Daerah tersebut dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Penyesuaian Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dilakukan oleh SKPD tersebut selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
Bapenda	51.255.393.687,00	-	15.349.163.399,00	59.620.110.062,00	(6.984.447.024,00)

Jika dihubungkan dengan saldo piutang pajak di neraca dengan pendapatan pajak, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Uraian	Piutang th. Lalu	Pendapatan LO	Pendapatan LRA	Jumlah	Piutang th. Ini	Selisih
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6	7=(6-5)
Pajak	51.514.670.887,00	2.331.128.478.240,00	2.338.112.925.264,00	44.530.223.863,00	59.890.385.232,00	15.360.161.369,00

Terdapat selisih sebesar Rp15.360.161.369,00 merupakan:
1) Koreksi Piutang Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp10.997.970,00; dan
2) Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp15.348.783.250,00 dan Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp380.149,00

5.4.1.1.2 RETRIBUSI DAERAH-LO

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2024 (Rp)	TA. 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
7.1.02.	Retribusi Daerah-LO	376.121.559.262,83	16.613.881.058,00	359.507.678.204,83

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Retribusi-LO dalam Tahun 2024 dan 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp359.507.678.204,83.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2024 Rp.	TA. 2023 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
7.1.02	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH-LO	376.121.559.262,83	16.613.881.058,00	359.507.678.204,83
7.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum-LO	368.071.271.651,83	5.530.605.197,00	362.540.666.454,83
7.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha-LO	7.765.327.211,00	10.877.848.361,00	(3.112.521.150,00)
7.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	284.960.400,00	205.427.500,00	79.532.900,00

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	382.306.933.091,49	376.121.559.262,83	6.185.373.828,66
Retribusi Jasa Umum	374.139.936.380,49	368.071.271.651,83	6.068.664.728,66
Retribusi Jasa Usaha	7.882.036.311,00	7.765.327.211,00	116.709.100,00
Retribusi Perizinan Tertentu	284.960.400,00	284.960.400,00	-

Selisih sebesar Rp6.185.373.828,66 pada tabel di atas terdiri dari penyesuaian pengurangan Pendapatan-LO sebesar Rp6.068.664.728,66 pada retribusi jasa umum dan penyesuaian pengurangan Pendapatan-LO sebesar Rp116.709.100,00 pada retribusi jasa usaha dengan uraian sebagai berikut:

a. Penyesuaian mengurangi pendapatan-LO sebesar Rp6.068.664.728,66 yaitu penyesuaian penerimaan Piutang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan

tahun lalu dan pengakuan piutang tahun ini pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah yang mengurangi pendapatan-LO, yaitu :

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
Dinas Kesehatan	1.353.373.554,00			1.081.516.000,00	(271.857.554,00)
RSAM Bkt	1.231.732.533,00	11.045.652.427,00	10.840.099.919,67	1.446.471.237,34	420.291.211,67
RSJ HB Saanin	3.825.459,00		143.839.345,00	30.121.664,00	(117.543.140,00)
RSUD M. Natsir	7.426.964.379,00	34.000.000,00	7.189.773.886,00	8.534.350.818,67	(6.048.387.446,33)
RSUD Pariaman	69.141.600,00	383.259.300,00	383.253.500,00	17.968.000,00	(51.167.800,00)
JUMLAH	**10.085.037.525,00**	**11.462.911.727,00**	**18.556.966.650,67**	**11.110.427.720,01**	**(6.068.664.728,66)**

b. Penyesuaian mengurangi pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO sebesar Rp116.709.100,00 terdiri dari:
   1) Penyesuaian penerimaan piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah tahun lalu berupa Retribusi Pemakaian Pemakaian Ruangan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp29.000.000,00 yang mengurangi pendapatan-LO;
   2) Penyesuaian Pengakuan piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah tahun lalu berupa Retribusi Pemakaian Pemakaian Ruangan pada Dinas Kesehatan sebesar sebesar Rp26.200.000,00 yang menambah pendapatan-LO;
   3) Penyesuaian penerimaan piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah tahun lalu berupa pemakaian Laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp126.729.100,00 yang mengurangi pendapatan-LO;
   4) Penyesuaian pengakuan piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah tahun ini berupa Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Dinas Pemudaa dan Olahraga sebesar Rp6.570.000,00 yang menambah pendapatan-LO;
   5) Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp3.750.000,00 yang mengurangi pendapatan-LO;
   6) Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka- Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga tahun lalu pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp10.000.000,00 yang menambah pendapatan-LO;

Penyesuaian Pendapatan-LO berdasarkan SKPD adalah sebagai berikut:

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
Dinas Kesehatan	29.000.000,00			26.200.000,00	(2.800.000,00)
Dinas Lingkungan Hidup	126.729.100,00				(126.729.100,00)
Dinas Pemuda dan Olahraga				6.570.000,00	6.570.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan			3.750.000,00	10.000.000,00	6.250.000,00
JUMLAH	**155.729.100,00**	**-**	**3.750.000,00**	**42.770.000,00**	**(116.709.100,00)**

Jika dihubungkan dengan saldo piutang retribusi di Neraca dengan pendapatan Retribusi-LO, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Uraian	Piutang th. Lalu	Pendapatan LO	Pendapatan LRA	Jumlah	Piutang th. Ini	Selisih
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6	7=(6-5)
Piutang Retribusi	1.620.058.378,00	372.119.953.005,83	378.305.326.834,49	(4.565.315.450,66)	11.583.451.751,00	16.148.767.201,66

Selisih sebesar Rp16.148.767.201,66 sesuai dengan jurnal penyesuaian Pendapatan Retribusi-LO pada SKPD sebagai berikut:

Uraian	Piutang th. Lalu	Pendapatan LO	Pendapatan LRA	Jumlah	Piutang th. Ini	Selisih
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6	7=(6-5)
Dinas Kesehatan	897.004.378,00	20.329.724.732,99	20.604.382.286,99	622.346.824,00	1.150.241.000,00	527.894.176,00
RSAM Bkt	-	142.165.622.173,17	141.745.330.961,50	420.291.211,67	7.447.223.503,00	7.026.932.291,33
RSJ HB Saanin	-	28.766.195.510,00	28.883.738.650,00	(117.543.140,00)	710.188.841,00	827.731.981,00
RSUD M. Natsir	-	96.644.747.443,67	102.693.134.890,00	(6.048.387.446,33)	1.654.935.507,00	7.703.322.953,33
RSUD Pariaman	-	81.260.726.792,00	81.311.894.592,00	(51.167.800,00)	17.968.000,00	69.135.800,00
Dispora	-	945.668.000,00	939.098.000,00	6.570.000,00	6.570.000,00	-
DKP	11.250.000,00	1.196.219.092,00	1.189.969.092,00	17.500.000,00	11.250.000,00	(6.250.000,00)
D. Perkebunan dan TPH	460.000,00	811.049.262,00	811.049.262,00	460.000,00	460.000,00	-
Dinas Lingkungan Hidup	711.344.000,00	-	126.729.100,00	584.614.900,00	584.614.900,00	-
JUMLAH	**1.620.058.378,00**	**372.119.953.005,83**	**378.305.326.834,49**	**(4.565.315.450,66)**	**11.583.451.751,00**	**16.148.767.201,66**

Terdapat selisih sebesar Rp16.148.767.201,66 dengan rincian sesuai tabel dibawah ini :

Uraian	Reklas Piutang dari Lain2 PAD ke Retribusi	JP Pendapatan diterima dimuka	Koreksi Tambah Piutang	Koreksi Kurang Piutang	Jumlah
1	2	3	4	5	6= (2+3+4+5)
Dinas Kesehatan	606.183.900,00	-	3.225.000,00	(81.514.724,00)	527.894.176,00
RSAM Bkt	6.780.807.590,33	265.860.000,00	140.028,00	(19.875.327,00)	7.026.932.291,33
RSJ HB Saanin	827.731.981,00	-	-	-	827.731.981,00
RSUD M. Natsir	7.703.322.953,00	0,33	-	-	7.703.322.953,33
RSUD Pariaman	69.153.200,00	-	-	(17.400,00)	69.135.800,00
Dispora	-	-	-	-	-
DKP	-	(6.250.000,00)	-	-	(6.250.000,00)
D. Perkebunan dan TPH	-	-	-	-	-
Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-
JUMLAH	**15.987.199.624,33**	**259.610.000,33**	**3.365.028,00**	**(101.407.451,00)**	**16.148.767.201,66**

Dengan keterangan sebagai berikut :

1) Pada Dinas Kesehatan terdapat selisih sebesar Rp527.894.176,00 yang terdiri dari :
   a. Reklas Piutang dari Lain2 PAD ke Retribusi sebesar Rp606.183.900,00;
   b. Adanya koreksi tambah piutang retribusi sebesar Rp3.225.000,00 dan;
   c. Adanya koreksi kurang piutang retribusi sebesar (Rp81.514.724,00).
2) Pada RSAM Bukittingi terdapat selisih sebesar Rp7.026.932.291,33 yang terdiri dari :
   a. Reklas Piutang dari Lain2 PAD ke Retribusi sebesar Rp6.780.807.590,33;
   b. Adanya penyesuaian pendapatan diterima dimuka sebesar Rp265.860.000,00;
   c. Adanya koreksi tambah piutang retribusi sebesar Rp140.028,00 dan;
   d. Adanya koreksi kurang piutang retribusi sebesar (Rp19.875.327,00).
3) Pada RSJ HB. Sa'anin Padang terdapat selisih sebesar Rp827.731.981,00 yang merupakan reklas Piutang dari Lain2 PAD ke Retribusi.
4) Pada RSUD M. Natsir Solok terdapat selisih sebesar Rp7.703.322.953,33 yang terdiri dari :
   a. Reklas Piutang dari Lain2 PAD ke Retribusi sebesar Rp7.703.322.953,00 dan;
   b. Adanya penyesuaian pendapatan diterima dimuka sebesar Rp0,33
5) Pada RSUD M. Yamin Pariaman terdapat selisih sebesar Rp69.135.800,00 yang terdiri dari :
   a. Reklas Piutang dari Lain2 PAD ke Retribusi sebesar Rp69.153.200,00 dan;
   b. Adanya koreksi kurang piutang retribusi sebesar (Rp17.400,00).
6) Dan pada Dinas Kelautan dan Perikanan terdapat selisih sebesar (Rp6.250.000,00) yang merupakan penyesuaian pendapatan diterima dimuka.

5.4.1.1.3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN-LO

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2024 (Rp)	TA. 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
7.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	127.297.967.456,00	122.018.602.181,00	5.279.365.275,00

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dalam Tahun 2024 dan 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp5.279.365.275,00.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan proyeksi penerimaan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD, yaitu:

a. PT Jamkrida sebesar Rp4.561.307.897,00 berdasarkan surat Nomor 375/B-02/DIR/II-2025 tanggal 21 Februari 2025 perihal estimasi dividen tahun buku

2024;

b. PT Bank Nagari sebesar Rp122.736.659.559,00 sesuai dengan surat Nomor SR/010/TRS/PD/02-2025 tanggal 21 Februari 2025 perihal konfirmasi estimasi dividen Tahun Buku 2024.

Adapun perbedaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara LRA dan LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	**122.018.602.181,00**	**127.297.967.456,00**	**(5.279.365.275,00)**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	122.018.602.181,00	127.297.967.456,00	(5.279.365.275,00)

Selisih sebesar Rp5.279.365.275,00 yang merupakan LRA dikurangi LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyesuaian menambah pendapatan-LO sebesar Rp127.297.967.456,00 merupakan piutang dividen PT Jamkrida sebesar Rp4.561.307.897,00 dan piutang PT Bank Nagari sebesar Rp122.736.659.559,00 yang merupakan bagian laba Tahun Buku 2024 yang diterima pemda yang akan dibayarkan Tahun 2025.

b. Penyesuaian mengurangi pendapatan-LO sebesar Rp122.018.602.181,00 terdiri dari:
   1) Penyesuaian dividen PT Bank Nagari Tahun Buku 2023 yang merupakan bagian laba yang diterima pemda sebesar Rp117.919.220.213,00 yang dicatat sebagai piutang Tahun lalu.
   2) Penyesuaian dividen PT Jamkrida Tahun Buku 2023 yang merupakan bagian laba yang diterima pemda sebesar Rp4.099.381.968,00 yang dicatat sebagai piutang Tahun lalu.

Jika dihubungkan dengan saldo Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan di Neraca dengan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan-LO, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Uraian	Piutang th. Lalu	Pendapatan LO	Pendapatan LRA	Jumlah	Piutang th. Ini	Selisih
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6	7=(6-5)
Piutang Bagi Hasil PKD	122.018.602.181,00	127.297.967.456,00	122.018.602.181,00	127.297.967.456,00	127.297.967.456,00	-

Tidak terdapat selisih pada tabel di atas.

5.4.1.1.4 LAIN LAIN PAD YANG SAH-LO

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2024 (Rp)	TA. 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
7.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah-LO	92.100.710.941,93	420.873.566.358,62	(328.772.855.416,69)

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO dalam Tahun 2024 dan 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, maka terdapat penurunan sebesar Rp328.772.855.416,69.

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2024 Rp.	TA. 2023 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
7.1.04.	**LAIN LAIN PAD YANG SAH-LO**	**92.100.710.941,93**	**420.873.566.358,62**	**(328.772.855.416,69)**
7.1.04.01.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	-	-
7.1.04.03.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	6.014.723.909,99	3.038.866.666,67	2.975.857.243,32
7.1.04.04.	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	2.295.121.000,00	2.063.307.200,00	231.813.800,00
7.1.04.05.	Jasa Giro-LO	8.490.270.476,08	11.951.998.104,69	(3.461.727.628,61)
7.1.04.07.	Pendapatan Bunga-LO	17.333.203.315,00	15.747.992.157,64	1.585.211.157,36
7.1.04.08.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah/Pendapatan dari Pengembalian	11.703.331.654,22	15.274.865.595,78	(3.571.533.941,56)
7.1.04.12.	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	14.460.403.950,00	10.496.346.100,00	3.964.057.850,00
7.1.04.16.	Pendapatan BLUD-LO	31.803.656.636,64	362.300.190.533,84	(330.496.533.897,20)

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA dengan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
LAIN LAIN PAD YANG SAH	**100.125.157.329,71**	**92.100.710.941,93**	**8.024.446.387,78**
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	585.058.880,00	-	585.058.880,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	13.915.100.000,00	6.014.723.909,99	7.900.376.090,01
Hasil Kerja Sama Daerah	1.850.191.000,00	2.295.121.000,00	(444.930.000,00)
Jasa Giro	8.490.270.476,08	8.490.270.476,08	-
Pendapatan Bunga	17.333.203.315,00	17.333.203.315,00	-
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah/Pendapatan dari Pengembalian	11.729.731.654,22	11.703.331.654,22	26.400.000,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	14.460.403.950,00	14.460.403.950,00	-
Pendapatan BLUD	31.761.198.054,41	31.803.656.636,64	(42.458.582,23)

Selisih sebesar Rp8.024.446.387,78 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyesuaian yang menambah pendapatan-LO yang terdiri dari:
   1) Penyesuaian Pengakuan Piutang Hasil Kerja Sama Daerah dari Jasa Pelayanan TPA Sampah Regional sebesar Rp502.600.000,00 dan penerimaan piutang tahun lalu sebesar Rp57.670.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup;
   2) Penyesuaian Pengakuan penerimaan Piutang Pendapatan BLUD tahun lalu sebesar Rp45.079.013,14 dan penyesuaian Pendapatan diterima dimuka tahun lalu sebesar Rp76.399.215,17 serta pengakuan piutang tahun ini sebesar Rp11.138.380,20 pada Dinas Pendidikan.

b. Penyesuaian mengurangi pendapatan-LO yang terdiri dari:
   1) Penyesuaian nilai penjualan aset yang telah dihapus/dijual yang direklasifikasi ke surplus dari kegiatan non operasional lainnya pada BPKAD sebesar Rp585.058.880,00;

2) Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum sebesar Rp7.792.389.978,90 dan penyesuaian piutang tahun lalu sebesar Rp107.986.111,11
3) Penerimaan Piutang Bagian Lancar TGR terhadap Pensiunan Pegawai Dinas Pendidikan sebesar Rp26.400.000,00;

Jika dihubungkan dengan saldo piutang Lain-lain PAD yang Sah di Neraca dengan Lain-lain PAD yang Sah-LO, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Uraian	Piutang th. Lalu	Pendapatan LO	Pendapatan LRA	Jumlah	Piutang th. Ini	Selisih
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6	7=(6-5)
Dinas Kesehatan	606.183.900,00			606.183.900,00	-	(606.183.900,00)
RSAM Bkt	6.780.807.590,33			6.780.807.590,33	-	(6.780.807.590,33)
RSJ HB Saanin	827.731.981,00			827.731.981,00	-	(827.731.981,00)
RSUD M. Natsir	7.703.322.953,00			7.703.322.953,00	-	(7.703.322.953,00)
RSUD Pariaman	69.153.200,00			69.153.200,00	-	(69.153.200,00)
DLH	2.042.658.660,00	1.785.660.000,00	1.340.730.000,00	2.487.588.660,00	2.487.588.660,00	-
BPKAD/PPKD	1.600.568.815,00	43.739.263.951,99	51.869.747.831,99	(6.529.915.065,00)	213.068.815,00	6.742.983.880,00
Bapenda	-	14.460.403.950,00	14.460.403.950,00	-	-	-
Dinas Pendidikan	45.079.013,14	31.803.656.636,64	31.761.198.054,41	87.537.595,37	11.138.380,20	(76.399.215,17)
JUMLAH	**19.675.506.112,47**	**91.788.984.538,63**	**99.432.079.836,40**	**12.032.410.814,70**	**2.711.795.855,20**	**(9.320.614.959,50)**

Terdapat selisih sebesar Rp9.320.614.959,50 dengan rincian sesuai tabel dibawah ini:

Uraian	Reklas Piutang/ Pendapatan-LO	JP Pendapatan diterima dimuka	Koreksi Kurang Piutang	JP Piutang	Jumlah
1	2	3	4	5	6= (2+3+4+5)
DinasPendidikan	-	(76.399.215,17)	-	-	(76.399.215,17)
Dinas Kesehatan	(606.183.900,00)	-	-	-	(606.183.900,00)
RSAM Bkt	(6.780.807.590,33)	-	-	-	(6.780.807.590,33)
RSJ HB Saanin	(827.731.981,00)	-	-	-	(827.731.981,00)
RSUD M. Natsir	(7.703.322.953,00)	-	-	-	(7.703.322.953,00)
RSUD Pariaman	(69.153.200,00)	-	-	-	(69.153.200,00)
Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-
BPKAD	585.058.880,00	7.411.038.888,89	(1.279.513.888,89)	26.400.000,00	6.742.983.880,00
Bapenda	-	-	-	-	-
JUMLAH	**(15.402.140.744,33)**	**7.334.639.673,72**	**(1.279.513.888,89)**	**26.400.000,00**	**(9.320.614.959,50)**

Selisih pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pada Dinas Pendidikan terdapat selisih sebesar Rp76.399.215,17 yang merupakan penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung;
b. Dinas Kesehatan selisih sebesar Rp606.183.900,00 merupakan penyesuaian koreksi kurang piutang BLUD di reklas ke piutang retribusi pada tahun 2024;
c. Pada RS Achmad Muchtar Bukittinggi terdapat selisih sebesar Rp6.780.807.590,33 yaitu berupa koreksi koreksi kurang piutang BLUD di reklas ke piutang retribusi pada tahun 2024;
d. Selisih pada RSJ HB. Sa'anin sebesar Rp827.731.981,00 merupakan koreksi

kurang piutang BLUD di reklas ke piutang retribusi pada tahun 2024;

e. Selisih pada RSUD M. Natsir Solok sebesar Rp7.703.322.953,00 berupa penyesuaian koreksi kurang piutang BLUD di reklas ke piutang retribusi pada tahun 2024;
f. Selisih pada RSUD Pariaman sebesar Rp69.153.200,00 yang merupakan koreksi kurang piutang BLUD di reklas ke piutang retribusi pada tahun 2024;
g. BPKAD terdapat selisih sebesar Rp6.742.983.880,00 yang terdiri dari penyesuian pendapatan diterima dimuka sebesar Rp7.411.038.888,89,00 (termasuk Addendum Perjanjian Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Koperasi Pegawai Negeri Unit Kantor Gubernur tentang Sewa Tanah dan Gedung Rohana Kudus Beserta Peralatan Mesin Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 selama 19 bulan sesuai dengan Adendum Perjanjia Nomor 030/54/PBMD/BPKAD/2023 dan Nomor 005/1/KPN-KKG/2023) dan penyesuaian piutang tgr sebesar Rp26.400.000,00 dan koreksi piutang sebesar (Rp1.279.513.888,89) serta reklasifikasi hasil penjualan BMD yang dipisahkan ke Surplus Defisit Kegitan Non Operasional sebesar Rp585.058.880,00.

Untuk Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah LO termasuk sisa saldo pada rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Cabang Dinas VIII pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan *Internal Account/ Escrow Account* pada Bank Nagari yang digunakan sebagai alat/ *tools* oleh untuk keperluan internal Bank Nagari dalam mempermudah proses transaksi pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta Tambahan Penghasilan ASN.

5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER-LO

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2024 (Rp)	TA. 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
7.2.	PENDAPATAN TRANSFER-LO	3.487.351.918.539,00	3.485.587.063.968,00	1.764.854.571,00

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Transfer-LO dalam Tahun 2024 dan 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, maka terdapat kenaikan sebesar Rp1.764.854.571,00.

Pendapatan Transfer - LO terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2024 Rp.	TA. 2023 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
7.2.01.	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LO**	**3.458.107.380.539,00**	**3.457.873.393.968,00**	**233.986.571,00**
7.2.01.01.	Dana Perimbangan-LO	3.444.858.096.539,00	3.449.252.368.968,00	(4.394.272.429,00)
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	*158.228.105.000,00*	*207.643.304.000,00*	*(49.415.199.000,00)*
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	*2.146.789.947.987,00*	*1.989.337.430.162,00*	*157.452.517.825,00*
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	*217.864.557.320,00*	*365.925.325.993,00*	*(148.060.768.673,00)*
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	*921.975.486.232,00*	*886.346.308.813,00*	*35.629.177.419,00*
7.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)-LO		8.621.025.000,00	(8.621.025.000,00)
7.2.01.06.	Insentif Fiskal-LO	13.249.284.000,00	-	13.249.284.000,00
7.2.02.	**PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO**	**29.244.538.000,00**	**27.713.670.000,00**	**1.530.868.000,00**
7.2.02.02.	Bantuan Keuangan	29.244.538.000,00	27.713.670.000,00	1.530.868.000,00
	Jumlah	**3.487.351.918.539,00**	**3.485.587.063.968,00**	**1.764.854.571,00**

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Transfer-LRA dengan Pendapatan Transfer-LO untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
PENDAPATAN TRANSFER	**3.525.560.271.539,00**	**3.487.351.918.539,00**	**38.208.353.000,00**
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	**3.496.315.733.539,00**	**3.458.107.380.539,00**	**38.208.353.000,00**
Dana Perimbangan	**3.483.066.449.539,00**	**3.444.858.096.539,00**	**38.208.353.000,00**
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	196.436.458.000,00	158.228.105.000,00	38.208.353.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	2.146.789.947.987,00	2.146.789.947.987,00	-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	217.864.557.320,00	217.864.557.320,00	-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	921.975.486.232,00	921.975.486.232,00	-
Insentif Fiskal	**13.249.284.000,00**	**13.249.284.000,00**	**-**
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**29.244.538.000,00**	**29.244.538.000,00**	**-**
Bantuan Keuangan	29.244.538.000,00	29.244.538.000,00	-

Selisih sebesar Rp38.208.353.000,00 berupa penyesuaian penerimaan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) tahun lalu.

Jika dihubungkan dengan saldo piutang transfer di Neraca pendapatan transfer-LO, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Uraian	Piutang th. Lalu	Pendapatan LO	Pendapatan LRA	Jumlah	Piutang th. Ini	Selisih
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6	7=(6-5)
Piutang Dana Transfer	-	3.458.107.380.539,00	3.496.315.733.539,00	(38.208.353.000,00)	6.441.442.000,00	44.649.795.000,00

Selisih sebesar Rp44.649.795.000,00 berupa penyesuaian penerimaan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) tahun lalu sebesar Rp38.208.353.000,00 dan pengakuan piutang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil tahun ini sebesar Rp6.441.442.000,00 sesuai KMK Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024 dan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Kementerrian Keuangan RI Nomor S-100/PK.2/2024 perihal Tindak Lanjut Pasca Penetapan PMK No. 89 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024 dimana Penetapan kurang bayar dan lebih bayar (KB/LB) DBH pada tahun 2024 dalam PMK tersebut agar dicatat sebagai pengakuan atas utang piutang antara pemerintah pusat dan daerah. Penyaluran KB/LB DBH akan memperhatikan kondisi APBN dan perekonomian sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan tentang penyaluran KB dan penyelesaian LB DBH.

5.4.1.3 LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2024 (Rp)	TA. 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
7.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	141.448.740.315,60	178.135.578.104,00	(36.686.837.788,40)

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO Tahun 2024 dan Tahun 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, maka terdapat penurunan sebesar Rp36.686.837.788,40.

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2024 Rp.	TA. 2023 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
7.3.01.	**PENDAPATAN HIBAH-LO**	141.448.740.315,60	178.135.578.104,00	(36.686.837.788,40)
7.3.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	95.246.092.838,74	163.892.754.104,00	(68.646.661.265,26)
7.3.01.02.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Lainnya dan Pihak Lain	31.907.853.476,86	-	31.907.853.476,86
7.3.01.05.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	14.294.794.000,00	14.242.824.000,00	51.970.000,00

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Hibah-LRA dengan Pendapatan Hibah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.294.794.000,00	141.448.740.315,60	(127.153.946.315,60)
PENDAPATAN HIBAH	14.294.794.000,00	141.448.740.315,60	(127.153.946.315,60)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	95.246.092.838,74	(95.246.092.838,74)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Lainnya dan Pihak Lain	-	31.907.853.476,86	(31.907.853.476,86)
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	14.294.794.000,00	14.294.794.000,00	-

Penjelasan selisih realisasi tersebut merupakan adanya hibah barang dari pihak lain yang diakui sebagai Pendapatan Hibah-LO oleh BPKAD/PPKD sesuai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Aset dan dicatat sesuai dengan nilai bukunya, sesuai dengan Pergub Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014, berupa hibah barang dari pemerintah/pihak lainnya:

1) Pendapatan Hibah dari pemerintah pusat-LO sebesar Rp95.246.092.838,74 terdiri dari berupa obat-obatan dan alat kesehatan dari Pemerintah Pusat-Kementerian Kesehatan yang menjadi persediaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp94.531.703.286,94 dan Rp714.389.551,80 berupa aset tetap perlatan dan mesin pada Dinas Pangan sebesar Rp50.906.250,00 dan Dinas Perkebunan TPH sebesar Rp663.483.301,80;
2) Hibah Barang dari Kab/Kota/pihak Lain berupa Aset Tetap/Aset Lainnya sebesar nilai buku Rp31.907.853.476,86.

   Rincian dapat dilihat pada Lampiran 47.

5.4.2 BEBAN DAERAH

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2024 (Rp)	TA. 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.	BEBAN DAERAH	6.416.330.436.191,24	6.149.856.490.235,09	266.473.945.956,15

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban dalam Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa *(Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Barang Jasa BOS, Beban Barang Jasa BLUD)*, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Tidak Terduga, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-Lain serta Beban Transfer.

Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp266.473.945.956,15 dengan rincian sebagai berikut:

5.4.2.1 BEBAN OPERASI

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2024 (Rp)	TA. 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.	BEBAN OPERASI	5.232.175.179.880,48	5.039.278.188.328,09	192.896.991.552,39

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Operasi dalam Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa *(Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Barang Jasa BOS, Beban Barang Jasa BLUD)*, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Tidak Terduga, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-Lain.
Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp192.896.991.552,39.

5.4.2.1.1 BEBAN PEGAWAI

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2024 (Rp)	TA. 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.1.	Beban Pegawai	2.515.997.454.980,00	2.204.814.649.540,00	311.182.805.440,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai dalam Tahun 2024 dan 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp311.182.805.440,00.

Beban Pegawai ini terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2024 Rp.	TA. 2023 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
8.1.01.	BEBAN PEGAWAI	2.515.997.454.980,00	2.204.814.649.540,00	311.182.805.440,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.456.612.041.951,00	1.278.502.000.258,00	178.110.041.693,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	476.026.974.635,00	395.468.383.875,00	80.558.590.760,00
8.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO	536.663.184.526,00	484.933.465.661,00	51.729.718.865,00
8.1.01.04.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	40.807.622.530,00	40.953.439.716,00	(145.817.186,00)
8.1.01.05.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.325.604.130,00	243.027.548,00	1.082.576.582,00
8.1.01.06.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.378.447.459,00	4.526.882.533,00	(148.435.074,00)
8.1.01.99.	Beban Pegawai BLUD	183.579.749,00	187.449.949,00	(3.870.200,00)

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
BELANJA PEGAWAI	2.490.554.904.931,00	2.515.997.454.980,00	(25.442.550.049,00)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.453.653.152.151,00	1.456.612.041.951,00	(2.958.889.800,00)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	446.780.453.124,00	476.026.974.635,00	(29.246.521.511,00)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO	543.426.045.788,00	536.663.184.526,00	6.762.861.262,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	40.807.622.530,00	40.807.622.530,00	-
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.325.604.130,00	1.325.604.130,00	-
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.378.447.459,00	4.378.447.459,00	-
Belanja Pegawai BLUD	183.579.749,00	183.579.749,00	-

Selisih di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyesuaian untuk mengakui Beban Gaji dan Tunjangan-LO Tahun 2024 sebesar Rp2.958.889.800,00 berupa pembayaran utang pegawai tahun lalu dan pengakuan utang pegawai tahun ini, berupa kenaikan gaji berkala dan Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai pada beberapa SKPD, yaitu :

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
DINAS PENDIDIKAN		25.906.702,00	1.940.478.116,00		(1.914.571.414,00)
DINAS KESEHATAN	-	-	66.638.283,00	-	(66.638.283,00)
RS. Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	-	-	91.720.130,00	-	(91.720.130,00)
RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	-	-	37.097.656,00	-	(37.097.656,00)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK	-	-	61.927.406,00	-	(61.927.406,00)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	-	-	46.181.575,00	-	(46.181.575,00)
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	-	-	37.316.591,00	-	(37.316.591,00)
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	-	-	15.811.379,00	-	(15.811.379,00)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	-	7.215.105,00	-	(7.215.105,00)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	10.902.665,00	-	(10.902.665,00)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	5.885.909,00	-	(5.885.909,00)
DINAS SOSIAL	-	-	22.753.177,00	-	(22.753.177,00)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	23.977.035,00	-	(23.977.035,00)
DINAS P. PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PP & KB	-	-	7.364.349,00	17.570.565,00	10.206.216,00
DINAS PANGAN	-	-	13.776.611,00	-	(13.776.611,00)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	11.495.700,00	11.488.575,00	-	7.125,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	3.741.540,00	9.412.427,00	-	(5.670.887,00)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	8.066.216,00	-	(8.066.216,00)
DINAS PERHUBUNGAN	-	-	10.270.217,00	-	(10.270.217,00)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	-	8.505.732,00	-	(8.505.732,00)
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH	-	2.120.000,00	8.598.205,00	-	(6.478.205,00)
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PTSP	-	-	14.377.868,00	-	(14.377.868,00)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	-	9.790.406,00	15.660.000,00	5.869.594,00
DINAS KEBUDAYAAN	-	-	9.277.496,00	-	(9.277.496,00)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	11.160.000,00	11.100.366,00	-	59.634,00
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	20.733.280,00	-	(20.733.280,00)
DINAS PARIWISATA	-	-	7.276.005,00	-	(7.276.005,00)
DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	-	-	43.287.551,00	-	(43.287.551,00)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-	20.834.057,00	-	(20.834.057,00)
DINAS KEHUTANAN	-	-	49.684.836,00	5.385.692,00	(44.299.144,00)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	8.412.697,00	-	(8.412.697,00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	14.388.387,00	-	(14.388.387,00)
SETDA-BIRO UMUM	-	10.980.933,00	58.526.559,00	-	(47.545.626,00)
SEKRETARIAT DPRD	-	-	12.155.973,00	-	(12.155.973,00)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	24.742.895,00	12.474.125,00	-	12.268.770,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	19.756.048,00	-	(19.756.048,00)
BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	20.575.249,00	-	(20.575.249,00)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	12.014.480,00	-	(12.014.480,00)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	10.373.368,00	-	(10.373.368,00)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	5.205.360,00	-	(5.205.360,00)
BADAN PENGHUBUNG	-	-	8.925.905,00	-	(8.925.905,00)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	-	2.562.511,00	270.149.853,00	-	(267.587.342,00)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	5.509.110,00	-	(5.509.110,00)
JUMLAH	-	**92.710.281,00**	**3.090.216.338,00**	**38.616.257,00**	**(2.958.889.800,00)**

b. Penyesuaian untuk mengakui beban Tambahan Penghasilan PNS-LO Tahun 2023 berupa pembayaran utang tahun lalu dan pengakuan utang belanja pegawai-Tambahan Penghasilan PNS dan PPPK tahun ini pada SKPD sebesar Rp29.246.521.511,00 yaitu:

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
DINAS PENDIDIKAN	-	1.325.530.643,00	6.272.267.129,00	-	(4.946.736.486,00)
DINAS KESEHATAN	-	-	1.739.248.534,00	7.647.099,00	(1.731.601.435,00)
RS. Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	-	-	2.271.137.479,00	-	(2.271.137.479,00)
RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	-	-	956.156.338,00	-	(956.156.338,00)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK	-	-	1.618.468.298,00	-	(1.618.468.298,00)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	-	-	981.590.625,00	-	(981.590.625,00)
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	-	-	995.139.889,00	-	(995.139.889,00)
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	-	-	431.465.747,00	-	(431.465.747,00)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	-	217.022.843,00	-	(217.022.843,00)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	329.949.278,00	-	(329.949.278,00)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	199.278.301,00	-	(199.278.301,00)
DINAS SOSIAL	-	-	654.438.563,00	-	(654.438.563,00)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	725.403.335,00	-	(725.403.335,00)
DINAS P. PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PP & KB	-	-	222.283.742,00	-	(222.283.742,00)
DINAS PANGAN	-	-	392.226.658,00	-	(392.226.658,00)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	325.526.280,00	-	(325.526.280,00)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	202.450.177,00	-	(202.450.177,00)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	158.550.772,00	-	(158.550.772,00)
DINAS PERHUBUNGAN	-	1.011.920,00	294.256.897,00	-	(293.244.977,00)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	-	253.301.415,00	-	(253.301.415,00)
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH	-	-	268.340.804,00	-	(268.340.804,00)
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PTSP	-	-	288.495.292,00	-	(288.495.292,00)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	-	292.243.854,00	-	(292.243.854,00)
DINAS KEBUDAYAAN	-	-	276.885.877,00	-	(276.885.877,00)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	339.562.979,00	-	(339.562.979,00)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	588.545.210,00	-	(588.545.210,00)
DINAS PARIWISATA	-	-	224.111.624,00	-	(224.111.624,00)
DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	-	-	1.184.224.475,00	-	(1.184.224.475,00)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-	585.027.893,00	-	(585.027.893,00)
DINAS KEHUTANAN	-	-	1.339.652.234,00	370.478.478,00	(969.173.756,00)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	244.237.189,00	-	(244.237.189,00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	423.369.261,00	-	(423.369.261,00)
SETDA-BIRO UMUM	-	-	1.980.694.305,00	47.281.056,00	(1.933.413.249,00)
SEKRETARIAT DPRD	-	-	333.609.264,00	-	(333.609.264,00)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	381.025.401,00	-	(381.025.401,00)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	615.060.336,00	-	(615.060.336,00)
BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	525.654.069,00	-	(525.654.069,00)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	368.645.415,00	-	(368.645.415,00)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	340.616.970,00	-	(340.616.970,00)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	165.449.869,00	-	(165.449.869,00)
BADAN PENGHUBUNG	-	-	247.386.213,00	-	(247.386.213,00)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	-	-	576.330.527,00	-	(576.330.527,00)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	169.139.346,00	-	(169.139.346,00)
JUMLAH	-	**1.326.542.563,00**	**30.998.470.707,00**	**425.406.633,00**	**(29.246.521.511,00)**

c. Penyesuaian untuk mengakui beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya-LO (TPG, TKG, Tamsil, Jasa Pelayanan Kesehatan) Tahun 2023 berupa pembayaran utang tahun lalu dan pengakuan utang belanja pegawai tahun ini pada SKPD sebesar Rp6.824.917.446,00, yaitu:

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
DINAS PENDIDIKAN	-	6.735.860.700,00	287.938.484,00	-	6.447.922.216,00
DINAS KESEHATAN	-	-	-	314.939.046,00	314.939.046,00
JUMLAH	-	**6.735.860.700,00**	**287.938.484,00**	**314.939.046,00**	**6.762.861.262,00**

Jika dihubungkan dengan saldo utang belanja pegawai di neraca dengan beban pegawai, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Uraian	Tahun Lalu	LRA	LO	Jumlah	Tahun Ini	Selisih
1	2	3	4	5=(2+4-3)	6	7=(6-5)
Utang Belanja Pegawai	10.033.370.562,00	2.490.554.904.931,00	2.515.997.454.980,00	35.475.920.611,00	34.335.621.211,00	(1.140.299.400,00)

Terdapat selisih sebesar Rp1.140.299.400,00 yang disebabkan karena adanya koreksi tambah dan kurang utang belanja pegawai dengan rincian sebagai berikut:

SKPD	Koreksi Tambah Utang Belanja	Koreksi Kurang Utang Belanja	Jumlah
1	2	3	4=(2-3)
DINAS P. PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PP & KB	-	814.435,00	(814.435,00)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	104.377,00	-	104.377,00
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	120.000,00	-	120.000,00
DINAS KEHUTANAN	-	63.891.970,00	(63.891.970,00)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		607.105,00	(607.105,00)
BADAN PENDAPATAN DAERAH		1.075.210.267,00	(1.075.210.267,00)
Jumlah	**224.377,00**	**1.140.523.777,00**	**(1.140.299.400,00)**

5.4.2.1.2 BEBAN BARANG DAN JASA

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2024 (Rp)	TA. 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.2.	Beban Barang dan Jasa	1.798.554.944.588,19	1.948.667.137.396,29	(150.112.192.808)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa dalam Tahun 2024 dan 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, maka terdapat penurunan sebesar Rp150.112.192.808.

Beban Barang dan Jasa ini sesuai akun belanja pada APBD terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2024 Rp.	TA. 2023 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
8.1.02.	**BEBAN BARANG DAN JASA**	**1.798.554.944.588,19**	**1.948.667.137.396,29**	**(150.112.192.808,10)**
8.1.02.01.	Beban Barang	631.917.871.572,32	560.076.533.537,47	71.841.338.034,85
8.1.02.02.	Beban Jasa	830.687.902.585,57	776.716.452.914,21	53.971.449.671,36
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	104.610.506.777,30	85.700.909.339,85	18.909.597.437,45
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	231.338.663.653,00	243.612.287.499,00	(12.273.623.846,00)
8.1.02.05.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-
8.1.02.88.	Beban Barang dan Jasa BOS	-	280.090.037.482,76	(280.090.037.482,76)
8.1.02.99.	Beban Barang dan Jasa BLUD	-	2.470.916.623,00	(2.470.916.623,00)

Untuk belanja barang dan jasa BLUD dikelompokkan dalam 4 objek yaitu beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas, yaitu:

SKPD	Barang BLUD	Jasa BLUD	Pemeliharaan BLUD	Perjalanan Dinas BLUD	Jumlah
DINAS PENDIDIKAN	16.051.697.521,10	10.112.890.549,00	1.067.341.399,00	1.335.358.512,00	28.567.287.981,10
DINAS KESEHATAN	3.877.443.234,00	11.146.468.182,00	1.663.928.858,00	124.699.693,00	16.812.539.967,00
RSUD. Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT	43.332.656.084,00	93.286.978.250,00	5.382.066.001,00	469.786.944,00	142.471.487.279,00
RS. JIWA Prof. HB SAANIN	6.956.066.290,00	20.232.185.812,00	637.774.948,00	292.830.783,00	28.118.857.833,00
RSUD M. NATSIR SOLOK	30.310.013.115,00	57.662.645.166,00	1.700.256.173,00	492.828.733,00	90.165.743.187,00
RSUD PARIAMAN	31.360.839.865,00	38.835.421.416,64	1.419.207.719,00	599.879.302,00	72.215.348.302,64
JUMLAH	**131.888.716.109,10**	**231.276.589.375,64**	**11.870.575.098,00**	**3.315.383.967,00**	**378.351.264.549,74**

5.4.2.1.2.1 BEBAN BARANG

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2024 (Rp)	TA. 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.2.01	**Beban Barang**	**631.917.871.572,32**	**560.076.533.537,47**	**71.841.338.034,85**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Persediaan/Barang dalam Tahun 2024 dan 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, maka terdapat kenaikan sebesar Rp71.841.338.034,85.

Beban Barang ini terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2024 Rp.	TA. 2023 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
	Beban Barang	**631.917.871.572,32**	**560.076.533.537,47**	**71.841.338.034,85**
8.1.02.01.	Beban Barang	341.370.583.238,55	448.847.163.224,48	(107.476.579.985,93)
	Beban Barang Pakai Habis	*341.031.025.888,55*	*447.957.987.774,48*	*(106.926.961.885,93)*
	Beban Barang Tak Habis Pakai	*176.053.850,00*	*889.175.450,00*	*(713.121.600,00)*
	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	*163.503.500,00*	-	*163.503.500,00*
8.1.02.88.	Beban Barang dan Jasa BOS (Barang)	150.692.663.505,00	-	150.692.663.505,00
8.1.02.99.	Beban Barang dan Jasa BLUD (Barang)	139.854.624.828,77	111.229.370.312,99	28.625.254.515,78

Untuk perbedaan jumlah Belanja Barang dengan Beban Barang adalah sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
Belanja Barang	**321.311.498.511,00**	**631.917.871.572,32**	**(310.606.373.061,32)**
Belanja Barang	321.311.498.511,00	341.370.583.238,55	(20.059.084.727,55)
- Belanja Barang Pakai Habis	*320.971.941.161,00*	*341.031.025.888,55*	*(20.059.084.727,55)*
- Belanja Barang Tak Habis Pakai	*176.053.850,00*	*176.053.850,00*	-
- Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	*163.503.500,00*	*163.503.500,00*	-
Belanja Barang dan Jasa BOS (Barang)	-	150.692.663.505,00	(150.692.663.505,00)
Belanja Barang dan Jasa BLUD (Barang)	-	139.854.624.828,77	(139.854.624.828,77)

Selisih Belanja Barang dengan Beban Barang sebesar Rp310.606.373.061,32 merupakan penyesuaian persediaan yang terpakai dan yang masih menjadi persediaan pada Tahun 2024, berdasarkan *stock opname* persediaan per 31 Desember 2024 pada SKPD termasuk reklasifikasi belanja barang jasa BLUD ke objek beban barang sebesar Rp139.854.624.828,77 dan reklasifikasi belanja barang jasa BOS ke objek beban barang sebesar Rp150.692.663.505,00 dengan uraian sebagai berikut:

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
DINAS PENDIDIKAN	-	266.247.580,00	183.896.048.774,10	2.902.292.480,00	(180.727.508.714,10)
DINAS KESEHATAN	1.064.136.727,51	119.171.461,00	5.839.881.498,71	561.506.690,00	(6.223.340.075,22)
RSAM BUKITTINGGI	1.240.431.326,00	7.974.400.004,00	57.126.521.547,00	1.752.423.417,00	(48.640.129.452,00)
RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	17.777.930,00	1.324.589.881,00	7.185.464.760,00	-	(5.878.652.809,00)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK	9.448.107.950,83	8.313.733.908,61	48.279.084.779,93	13.911.007.945,37	(35.502.450.876,78)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	1.747.706.477,57	8.747.932.252,00	36.819.561.086,42	90.256.638,00	(29.729.078.673,99)
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	5.791.903,00	11.801.525,00	531.730.542,00	631.900,00	(525.089.020,00)
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	46.300.510,00	189.113.948,32	320.848.057,60	59.638.738,00	(118.395.881,28)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	859.000,00	526.500,00	297.000,00	629.500,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.930.400,00	91.200,00	146.100,00	11.843.100,00	6.857.800,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.072.200,00	1.299.600,00	33.450.272,28	3.548.500,00	(29.674.372,28)
DINAS SOSIAL	19.272.000,00	248.325.641,00	291.685.479,00	132.370.650,00	69.738.812,00
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	6.714.600,00	5.128.800,00	-	1.585.800,00
DINAS P. PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PP & KB	50.350.900,00	15.454.105,00	17.288.078,00	36.194.450,00	(15.990.423,00)
DINAS PANGAN	3.554.899.842,00	10.145.300,00	11.921.090,00	128.052.500,00	(3.428.623.132,00)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	700.833.500,00	152.489.445,00	(548.344.055,00)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	27.125.500,00	973.800,00	706.400,00	912.900,00	(25.945.200,00)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.994.000,00	5.853.700,00	-	48.276.400,00	44.136.100,00
DINAS PERHUBUNGAN	-	18.846.600,00	19.030.690,00	5.478.450,00	5.294.360,00
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	60.100.600,00	9.954.800,00	16.797.100,00	5.635.386,00	(61.307.514,00)
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH	1.863.000,00	-	601.500,00	1.492.000,00	(972.500,00)
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10.006.650,00	753.100,00	2.247.300,00	6.885.500,00	(4.615.350,00)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	896.000,00	72.593.150,00	16.797.350,00	25.591.600,00	80.491.400,00
DINAS KEBUDAYAAN	379.300,00	3.524.779,00	84.219.500,00	201.987.616,00	120.913.595,00
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.690.650,00	17.089.800,00	23.257.700,00	680.000,00	(8.178.550,00)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	53.758.467,00	-	41.666.444,00	1.500.000,00	(93.924.911,00)
DINAS PARIWISATA	94.307.675,00	4.070.700,00	33.981.350,00	69.619.600,00	(54.598.725,00)
DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	546.363.742,00	15.477.100,00	4.084.408.650,00	4.352.607.700,00	(262.687.592,00)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	239.246.742,00	566.718.166,00	805.240.282,00	29.760.700,00	(448.008.158,00)
DINAS KEHUTANAN	19.937.200,00	67.835.890,00	55.379.292,00	-	(7.480.602,00)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	24.633.700,00	-	24.573.000,00	19.386.000,00	(29.820.700,00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	7.137.868,00	17.029.425,00	65.059.277,00	100.000,00	(55.067.720,00)
SEKRETARIAT DAERAH					
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTODA	8.931.900,00	4.528.000,00	3.084.500,00	9.755.200,00	2.266.800,00
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	-	21.759.000,00	23.719.000,00	-	(1.960.000,00)
BIRO HUKUM	770.000,00	4.572.500,00	4.383.700,00	700.000,00	118.800,00
BIRO PEREKONOMIAN	701.500,00	6.305.100,00	5.462.100,00	-	141.500,00
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.347.500,00	260.000,00	233.100,00	673.500,00	(4.647.100,00)
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	65.972.900,00	57.569.700,00	-	8.403.200,00
BIRO ORGANISASI	14.502.900,00	80.100,00	15.018.500,00	10.800.000,00	(18.641.300,00)
BIRO UMUM	-	95.822.100,00	78.745.550,00	-	17.076.550,00
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	4.750.600,00	-	-	2.498.000,00	(2.252.600,00)
SEKRETARIAT DPRD	16.716.500,00	445.418.893,33	587.969.446,00	-	(159.267.052,67)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.718.700,00	49.267.950,00	41.007.825,00	17.836.500,00	24.377.925,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	17.247.900,00	40.240.700,00	22.992.800,00
BADAN PENDAPATAN DAERAH	307.058.000,00	106.602.276,00	6.801.500,00	1.960.341.474,00	1.753.084.250,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	29.936.591,00	50.076.103,00	42.065.185,00	12.435.550,00	(9.490.123,00)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	110.161.308,00	4.190.756,00	58.880.756,00	16.319.337,00	(148.531.971,00)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	90.000,00	7.851.600,00	44.098.100,00	-	(36.336.500,00)
BADAN PENGHUBUNG	25.480.700,00	-	631.600,00	4.487.800,00	(21.624.500,00)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	48.108.750,00	10.468.450,00	7.450.600,00	79.803.800,00	34.712.900,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	17.753.000,00	105.700,00	197.400,00	41.285.700,00	23.441.000,00
JUMLAH	**18.891.247.209,91**	**28.903.882.444,26**	**347.328.653.162,04**	**26.709.644.866,37**	**(310.606.373.061,32)**

Jika dihubungkan dengan saldo Persediaan di Neraca dibandingkan dengan Beban Barang, terdapat selisih sebesar Rp306.189.181.610,72 yang merupakan selisih belanja tahun berjalan dengan mutasi kenaikan/penurunan persediaan tahun berjalan, dengan perhitungan sebagai berikut berikut:

Uraian	Tahun Lalu	LRA	LO	Jumlah	Tahun Ini	Selisih
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6	7=(6-5)
Persediaan	388.755.131.154,11	321.311.498.511,00	631.917.871.572,32	78.148.758.092,79	384.337.939.703,51	306.189.181.610,72

Untuk rincian selisih belanja tahun berjalan dengan mutasi kenaikan/penurunan persediaan tahun berjalan, sesuai dengan Jurnal Penyesuaian persediaan pada Beban Persediaan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

SKPD	Persediaan Tahun Lalu	Jurnal Penyesuaian		Jumlah setelah penyesuian	Jumlah di Neraca 2024	Selisih
		Debet (Rp)	Kredit (Rp)			
1	2	3	4	5=(2+4-3)	6	7=(6-5)
DINAS PENDIDIKAN	9.783.164.381,00	183.896.048.774,10	3.168.540.060,00	(170.944.344.333,10)	24.764.333.752,00	195.708.678.085,10
DINAS KESEHATAN	77.771.744.865,29	6.904.018.226,22	680.678.151,00	71.548.404.790,07	49.407.006.489,37	(22.141.398.300,70)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	6.912.406.680,00	58.366.952.873,00	9.726.823.421,00	(41.727.722.772,00)	6.995.315.571,00	48.723.038.343,00
RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	712.519.693,00	7.203.242.690,00	1.324.589.881,00	(5.166.133.116,00)	1.817.657.737,00	6.983.790.853,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK	7.045.801.785,52	57.727.192.730,76	22.224.741.853,98	(28.456.649.091,26)	9.982.671.036,66	38.439.320.127,92
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	5.598.976.589,22	38.567.267.563,99	8.838.188.890,00	(24.130.102.084,77)	4.173.217.434,03	28.303.319.518,80
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	58.354.579.002,59	537.522.445,00	12.433.425,00	57.829.489.982,59	72.029.957.615,59	14.200.467.633,00
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	4.916.747.096,76	367.148.567,60	248.752.686,32	4.798.351.215,48	4.898.388.645,48	100.037.430,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	204.926.962.035,85	526.500,00	1.156.000,00	204.927.591.535,85	195.014.121.703,45	(9.913.469.832,40)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.816.000,00	5.076.500,00	11.934.300,00	17.673.800,00	6.473.800,00	(11.200.000,00)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	268.215.072,28	34.522.472,28	4.848.100,00	238.540.700,00	247.013.200,00	8.472.500,00
DINAS SOSIAL	9.449.194,00	310.957.479,00	380.696.291,00	79.188.006,00	264.307.399,00	185.119.393,00
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	345.000,00	5.128.800,00	6.714.600,00	1.930.800,00	1.930.800,00	-
DINAS P. PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PP & KB	80.218.948,00	67.638.978,00	51.648.555,00	64.228.525,00	66.748.525,00	2.520.000,00
DINAS PANGAN	5.133.657.378,00	3.566.820.932,00	138.197.800,00	1.705.034.246,00	1.705.034.246,00	-
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	895.724.607,00	700.833.500,00	152.489.445,00	347.380.552,00	462.180.260,00	114.799.708,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	31.236.300,00	27.831.900,00	1.886.700,00	5.291.100,00	5.291.100,00	-
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	51.145.100,00	9.994.000,00	54.130.100,00	95.281.200,00	95.281.200,00	-
DINAS PERHUBUNGAN	16.380.000,00	19.030.690,00	24.325.050,00	21.674.360,00	21.674.360,00	-
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	68.821.675,00	76.897.700,00	15.590.186,00	7.514.161,00	61.924.161,00	54.410.000,00
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH	2.772.500,00	2.464.500,00	1.492.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	36.107.250,00	12.253.950,00	7.638.600,00	31.491.900,00	31.491.900,00	-
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	25.838.150,00	17.693.350,00	98.184.750,00	106.329.550,00	106.329.550,00	-
DINAS KEBUDAYAAN	2.661.000,00	84.598.800,00	205.512.395,00	123.574.595,00	206.824.595,00	83.250.000,00
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	20.450.100,00	25.948.350,00	17.769.800,00	12.271.550,00	12.271.550,00	-
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	189.197.267,00	95.424.911,00	1.500.000,00	95.272.356,00	99.772.356,00	4.500.000,00
DINAS PARIWISATA	306.850.050,00	128.289.025,00	73.690.300,00	252.251.325,00	252.251.325,00	-
DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	619.532.742,00	4.630.772.392,00	4.368.084.800,00	356.845.150,00	4.695.849.150,00	4.339.004.000,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.985.601.767,00	1.044.487.024,00	596.478.866,00	2.537.593.609,00	2.910.736.761,00	373.143.152,00
DINAS KEHUTANAN	228.091.455,00	75.316.492,00	67.835.890,00	220.610.853,00	220.610.853,00	-
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	49.174.000,00	49.206.700,00	19.386.000,00	19.353.300,00	49.337.300,00	29.984.000,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	49.596.066,00	72.197.145,00	17.129.425,00	(5.471.654,00)	27.058.346,00	32.530.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	-			-		
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTODA	18.375.100,00	12.016.400,00	14.283.200,00	20.641.900,00	20.641.900,00	-
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	5.460.000,00	23.719.000,00	21.759.000,00	3.500.000,00	5.400.000,00	1.900.000,00
BIRO HUKUM	8.774.000,00	5.153.700,00	5.272.500,00	8.892.800,00	8.892.800,00	-
BIRO PEREKONOMIAN	8.247.500,00	6.163.600,00	6.305.100,00	8.389.000,00	9.369.000,00	980.000,00
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	7.704.800,00	5.580.600,00	933.500,00	3.057.700,00	3.057.700,00	-
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	5.217.000,00	57.569.700,00	65.972.900,00	13.620.200,00	13.620.200,00	-
BIRO ORGANISASI	18.757.800,00	29.521.400,00	10.880.100,00	116.500,00	14.676.500,00	14.560.000,00
BIRO UMUM	10.965.100,00	78.745.550,00	95.822.100,00	28.041.650,00	28.041.650,00	-
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	4.750.600,00	4.750.600,00	2.498.000,00	2.498.000,00	2.498.000,00	-
SEKRETARIAT DPRD	174.843.760,00	604.685.946,00	445.418.893,33	15.576.707,33	378.661.707,33	363.085.000,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	59.372.850,00	42.726.525,00	67.104.450,00	83.750.775,00	84.350.775,00	600.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	40.090.600,00	17.247.900,00	40.240.700,00	63.083.400,00	63.083.400,00	-
BADAN PENDAPATAN DAERAH	868.424.344,60	313.859.500,00	2.066.943.750,00	2.621.508.594,60	2.621.508.594,60	-
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	245.607.709,00	72.001.776,00	62.511.653,00	236.117.586,00	236.117.586,00	-
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14.180.140,00	169.042.064,00	20.510.093,00	(134.351.831,00)	21.718.169,00	156.070.000,00
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	10.156.900,00	44.188.100,00	7.851.600,00	(26.179.600,00)	5.490.400,00	31.670.000,00
BADAN PENGHUBUNG	28.828.300,00	26.112.300,00	4.487.800,00	7.203.800,00	7.203.800,00	-
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	100.861.100,00	55.559.350,00	90.272.250,00	135.574.000,00	135.574.000,00	-
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19.729.800,00	17.950.400,00	41.391.400,00	43.170.800,00	43.170.800,00	-
JUMLAH	**388.755.131.154,11**	**366.219.900.371,95**	**55.613.527.310,63**	**78.148.758.092,79**	**384.337.939.703,51**	**306.189.181.610,72**

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

SKPD	Jumlah	Keterangan
DINAS PENDIDIKAN	(775.651.590,00)	Dikapitalisir jadi aset
	30.136.551.826,00	Reklas dari Belanja Modal
	334.732.420,00	Utang Belanja Barang
	166.013.045.429,10	Reklas dari Belanja Barang Jasa BLUD dan BOS
DINAS KESEHATAN	94.531.703.286,94	Hibah dari pusat
	3.877.443.234,00	Reklas dari Belanja Barang Jasa BLUD
	684.322.615,00	Utang Belanja Barang
	83.660.000,00	Reklas dari Belanja Modal
	(121.318.527.436,64)	Koreksi Stock Opname persediaan Hibah
RSUD ACHMAD MUCHTAR BKT	43.332.656.084,00	Reklas dari Belanja Barang Jasa BLUD
	234.728.252,00	Droping dari pihak lain
	5.155.654.007,00	Utang Belanja Barang
RSJ HB SAANIN	6.956.066.290,00	Reklas dari Belanja Barang Jasa BLUD
	27.724.563,00	Droping dari pihak lain
RSUD M. NATSIR SOLOK	30.310.013.115,00	Reklas dari Belanja Barang Jasa BLUD
	7.736.865.702,92	Utang Belanja Barang
	261.528.000,00	Reklas dari Belanja Modal
	72.249.406,00	Koreksi Persediaan
	58.663.904,00	Droping dari pihak lain
RSUD PARIAMAN	15.992.890,00	Reklas dari Belanja Modal
	31.360.839.865,00	Reklas dari Belanja Barang Jasa BLUD
	(3.918.313.632,00)	Utang Belanja Barang
	844.800.395,80	Droping dari pihak lain
DINAS BINA MARGA, CKTR	(20.780.589,00)	Dari belanja pemeliharaan
	(9.548.729.505,00)	Persediaan diserahkan ke pihak lain
	(45.000.000,00)	Reklas menjadi aset
	23.814.977.727,00	Reklas dari Belanja Modal
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	100.037.430,00	Reklas dari Belanja Modal
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KPP	106.117.681.807,00	Reklas dari Belanja Modal
	(116.031.151.639,40)	Persediaan diserahkan ke pihak lain
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	(11.200.000,00)	Dikapitalisir jadi aset
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	187.602.500,00	Hibah dari pusat
	(179.130.000,00)	Persediaan diserahkan ke pihak lain
DINAS SOSIAL	255.819.393,00	Reklas dari Belanja Modal
	(70.700.000,00)	Dikapitalisir jadi aset
DINAS P. PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PP & KB	2.520.000,00	Reklas dari Belanja Modal
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	114.799.708,00	Reklas dari selain belanja barang
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	7.660.000,00	Reklas dari Belanja Modal
	46.750.000,00	Utang Belanja Barang
DINAS KEBUDAYAAN	83.250.000,00	Utang Belanja Barang
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.500.000,00	Reklas dari Belanja Modal
DINAS PERKEBUNAN TPH	3.978.867.000,00	Utang Belanja Barang
	360.137.000,00	Reklas dari Belanja Modal
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	44.969.652,00	Reklas dari Belanja Modal
	328.173.500,00	Koreksi Persediaan
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	29.984.000,00	Reklas dari Belanja Modal
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	32.530.000,00	Reklas dari Belanja Modal
SETDA-BIRO PEREKONOMIAN	1.900.000,00	Reklas dari Belanja Modal
SETDA-BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	980.000,00	Reklas dari Belanja Modal
SETDA-BIRO ORGANISASI	14.560.000,00	Reklas dari Belanja Modal
SEKRETARIAT DPRD	363.085.000,00	Reklas dari Belanja Modal
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	600.000,00	Reklas dari Belanja Modal
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	156.070.000,00	Reklas dari Belanja Modal
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	31.670.000,00	Reklas dari Belanja Modal
JUMLAH	**306.189.181.610,72**	

5.4.2.1.2.2 BEBAN JASA

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2024 (Rp)	TA. 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.2.02	Beban Jasa	830.687.902.585,57	776.716.452.914,21	53.971.449.671,36

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Jasa dalam Tahun 2024 dan 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, maka terdapat kenaikan sebesar Rp53.971.449.671,36.

Beban Jasa ini terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2024 Rp.	TA. 2023 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
	Beban Jasa	**830.687.902.585,57**	**776.716.452.914,21**	**53.971.449.671,36**
8.1.02.02.	Beban Jasa	511.965.274.777,21	546.366.487.259,28	(34.401.212.482,07)
	- Beban Jasa Kantor	*322.348.017.942,42*	*326.693.981.600,00*	*(4.345.963.657,58)*
	- Beban Iuran Jaminan/Asuransi	*110.013.005.302,78*	*104.972.037.929,30*	*5.040.967.373,48*
	- Beban Sewa Peralatan dan Mesin	*13.278.699.193,67*	*21.216.215.765,33*	*(7.937.516.571,66)*
	- Beban Sewa Gedung dan Bangunan	*30.756.801.563,34*	*50.401.263.912,33*	*(19.644.462.348,99)*
	- Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	*208.350.000,00*	*154.050.000,00*	*54.300.000,00*
	- Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	*7.514.251.963,00*	*9.133.272.605,32*	*(1.619.020.642,32)*
	- Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	*13.709.871.812,00*	*7.774.627.026,00*	*5.935.244.786,00*
	- Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	-	-	-
	- Beban Beasiswa Pendidikan PNS	*42.000.000,00*	*31.500.000,00*	*10.500.000,00*
	- Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	*13.983.877.000,00*	*25.989.538.421,00*	*(12.005.661.421,00)*
	- Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	*110.400.000,00*	-	*110.400.000,00*
8.1.02.05.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.383.007.480,00	15.829.303.000,00	(8.446.295.520,00)
8.1.02.88.	Beban Barang dan Jasa BOS (Jasa)	88.790.645.529,00	-	88.790.645.529,00
8.1.02.99.	Beban Barang dan Jasa BLUD (Jasa)	222.548.974.799,36	214.520.662.654,93	8.028.312.144,43

Untuk perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa dengan Beban Jasa adalah sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
Belanja Jasa	**527.911.367.951,75**	**830.687.902.585,57**	**(302.776.534.633,82)**
Belanja Jasa	527.911.367.951,75	511.965.274.777,21	15.946.093.174,54
- Belanja Jasa Kantor	*322.517.754.025,42*	*322.348.017.942,42*	*169.736.083,00*
- Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	*111.363.525.149,00*	*110.013.005.302,78*	*1.350.519.846,22*
- Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	*11.604.232.527,00*	*13.278.699.193,67*	*(1.674.466.666,67)*
- Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	*30.735.905.855,00*	*30.756.801.563,34*	*(20.895.708,34)*
- Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	*208.350.000,00*	*208.350.000,00*	-
- Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	*23.633.451.583,33*	*7.514.251.963,00*	*16.119.199.620,33*
- Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	*13.709.871.812,00*	*13.709.871.812,00*	-
- Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	-	-	-
- Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	*38.000.000,00*	*42.000.000,00*	*(4.000.000,00)*
- Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	*13.989.877.000,00*	*13.983.877.000,00*	*6.000.000,00*
- Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	*110.400.000,00*	*110.400.000,00*	-
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	*7.383.007.480,00*	*(7.383.007.480,00)*
Belanja Barang dan Jasa BOS (Jasa)	-	*88.790.645.529,00*	*(88.790.645.529,00)*
Belanja Barang dan Jasa BLUD (Jasa)	-	222.548.974.799,36	(222.548.974.799,36)

Perbedaan Belanja Jasa dengan Beban Jasa sebesar Rp302.776.534.633,82 pada tabel di atas berupa penyesuaian Beban Jasa yang terdiri dari Jasa Kantor, Iuran Asuransi, Sewa, Jasa konsultansi, Kursus dan pelatihan, Jasa untuk diberikan kepada pihak lain, Jasa BOS dan Jasa BLUD Tahun 2024 pada SKPD berikut:

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
DINAS PENDIDIKAN	62.909.249,00	1.221.747.436,00	104.528.889.103,48	1.355.114.747,48	(102.014.936.169,00)
DINAS KESEHATAN	118.991.872,00	887.533.763,00	13.273.787.898,00	115.177.986,00	(12.390.068.021,00)
RSAM BUKITTINGGI	601.622,00	30.066.747.923,75	112.449.433.974,75	2.464.971.043,00	(79.918.316.630,00)
RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	-	1.415.549.158,00	21.337.665.323,00	19.229.337,00	(19.902.886.828,00)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK	174.804.385,42	4.837.465.219,00	61.454.813.786,30	454.500.795,00	(56.337.652.157,72)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	-	4.321.891.270,00	44.248.459.033,64	5.000.000,00	(39.921.567.763,64)
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	115.025.387,00	40.738.001,00	255.417.227,42	39.506.619,00	(290.197.994,42)
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	39.930.338,00	153.597.715,00	73.301.955,00	384.321.388,00	424.686.810,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	3.025.180,83	1.079.230.464,00	19.814.864,00	11.732.730.507,00	12.789.120.926,17
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	24.693.514,29	7.557.019,00	35.126.604,71	46.650.005,00	(5.613.095,00)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.310.842,00	16.872.946,00	30.479.335,00	-	(14.917.231,00)
DINAS SOSIAL	17.363.366,67	135.037.180,00	2.310.997.977,67	465.855.039,00	(1.727.469.125,34)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	959.550,00	39.110.891,00	35.911.674,00	-	2.239.667,00
DINAS P. PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PP & KB	23.733.722,00	52.446.047,00	207.580.575,00	169.307.050,00	(9.561.200,00)
DINAS PANGAN	53.154.690,00	50.076.539,00	322.302.682,00	244.666.000,00	(80.714.833,00)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	50.925.535,00	35.718.924,00	84.694.811,17	114.006.680,00	14.105.257,83
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	28.570.167,46	1.168.900,00	821.642.469,58	45.015.841,00	(804.027.896,04)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.985.711,00	15.974.912,00	21.044.455,00	21.530.759,00	(524.495,00)
DINAS PERHUBUNGAN	4.077.916,67	42.045.622,00	37.046.799,00	-	920.906,33
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	95.643.831,00	74.697.419,00	99.901.915,00	-	(120.848.327,00)
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH	-	69.097.962,00	120.209.763,00	564.276.711,00	513.164.910,00
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.530.362,50	19.249.046,00	54.237.941,00	-	(36.519.257,50)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	10.546.727,48	25.611.858,00	1.572.553.423,00	11.353.322,00	(1.546.134.970,48)
DINAS KEBUDAYAAN	29.219.846,00	49.238.370,00	685.805.337,33	-	(665.786.813,33)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	77.227.333,00	78.906.678,00	70.537.654,00	59.996.537,00	(8.861.772,00)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	55.656.725,50	292.701.025,00	196.055.093,00	466.585.078,33	507.574.284,83
DINAS PARIWISATA	25.241.645,00	75.078.301,00	347.324.405,00	5.005.376,00	(292.482.373,00)
DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	-	109.296.741,00	250.609.183,00	28.249.500,00	(113.062.942,00)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	57.132.950,00	147.831.283,00	442.729.149,00	173.074.390,00	(178.956.426,00)
DINAS KEHUTANAN	101.966.595,00	246.696.915,00	149.380.068,00	86.061.562,00	81.411.814,00
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	28.558.470,00	83.268.685,00	52.369.960,00	-	2.340.255,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	26.163.646,25	76.789.093,00	98.665.095,00	-	(48.039.648,25)
SEKRETARIAT DAERAH					
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTODA	-	-	190.000.000,00	11.590.817,00	(178.409.183,00)
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	15.065.018,34	5.234.026,00	20.031.410,33	31.187.952,00	1.325.549,33
BIRO HUKUM	5.123.177,00	-	4.184.004,17	-	(9.307.181,17)
BIRO PEREKONOMIAN	5.052.040,00	7.387.500,00	6.284.394,00	5.192.333,00	1.243.399,00
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.978.750,00	-	3.978.750,00	7.862.500,00	(95.000,00)
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	8.827.202,50	-	5.926.068,33	13.633.000,00	(1.120.270,83)
BIRO ORGANISASI	-	-	-	1.310.036,00	1.310.036,00
BIRO UMUM	-	690.907.564,00	534.372.185,00	1.014.322.049,00	1.170.857.428,00
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	3.792.325,00	11.668.920,00	7.779.280,00	-	97.315,00
SEKRETARIAT DPRD	179.954.073,33	641.157.456,00	454.009.786,00	-	7.193.596,67
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.065.017,50	62.426.338,00	49.103.582,00	41.613.086,00	46.870.824,50
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-	-
BADAN PENDAPATAN DAERAH	249.658.385,50	172.162.016,00	357.262.544,09	397.575.266,00	(37.183.647,59)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	19.363.846,00	64.255.642,00	68.954.125,00	33.842.963,00	9.780.634,00
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.191.710,00	79.829.832,00	144.828.701,00	-	(72.190.579,00)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	9.585.610,00	24.715.983,00	13.486.719,00	-	1.643.654,00
BADAN PENGHUBUNG	1.968.339.451,50	96.816.005,00	534.483.917,67	693.703.419,00	(1.712.303.945,17)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	24.191.706,00	19.787.304,00	34.646.782,00	48.390.214,00	9.339.030,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	54.016.799,00	23.616.880,00	47.594.925,00	77.994.844,00
JUMLAH	**3.754.139.493,74**	**47.699.338.690,75**	**368.141.738.663,64**	**21.420.004.832,81**	**(302.776.534.633,82)**

5.4.2.1.2.3 BEBAN PEMELIHARAAN

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2024 (Rp)	TA. 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.2.03	Beban Pemeliharaan	104.610.506.777,30	85.700.909.339,85	18.909.597.437,45

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pemeliharaan dalam Tahun 2024 dan 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, maka terdapat kenaikan sebesar Rp18.909.597.437,45.

Beban Pemeliharaan ini terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2024 Rp.	TA. 2023 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
	Beban Pemeliharaan	**104.610.506.777,30**	**85.700.909.339,85**	**18.909.597.437,45**
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	73.385.955.055,30	78.527.306.613,85	(5.141.351.558,55)
	Beban Pemeliharaan Tanah	-	*64.144.000,00*	*(64.144.000,00)*
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	*25.482.805.997,00*	*28.594.315.787,50*	*(3.111.509.790,50)*
	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	*13.021.431.037,30*	*8.974.700.788,00*	*4.046.730.249,30*
	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	*34.881.718.021,00*	*40.894.146.038,35*	*(6.012.428.017,35)*
8.1.02.88	Beban Barang dan Jasa BOS (Pemeliharaan)	16.350.080.098,00	-	16.350.080.098,00
8.1.02.99.	Beban Barang dan Jasa BLUD (Pemeliharaan)	14.874.471.624,00	7.173.602.726,00	7.700.868.898,00

Untuk perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa (Pemeliharaan) dengan Beban Pemeliharaan sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
Belanja Pemeliharaan	**81.258.413.720,36**	**104.610.506.777,30**	**(23.352.093.056,94)**
Belanja Pemeliharaan	81.258.413.720,36	73.385.955.055,30	7.872.458.665,06
Beban Pemeliharaan Tanah	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	*25.547.267.866,00*	*25.482.805.997,00*	*64.461.869,00*
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	*20.927.790.483,36*	*13.021.431.037,30*	*7.906.359.446,06*
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	*34.783.355.371,00*	*34.881.718.021,00*	*(98.362.650,00)*
Belanja Barang dan Jasa BOS (Pemeliharaan)	-	*16.350.080.098,00*	*(16.350.080.098,00)*
Belanja Barang dan Jasa BLUD (Pemeliharaan)	-	14.874.471.624,00	(14.874.471.624,00)

Penjelasan perbedaan sebesar Rp23.352.093.056,94 di atas adalah sebagai berikut:

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
DINAS PENDIDIKAN	-	8.522.750,00	17.417.421.497,00	-	(17.408.898.747,00)
DINAS KESEHATAN	-	122.119.158,00	1.686.408.578,00	56.382.006,00	(1.507.907.414,00)
RSAM BUKITTINGGI	-	523.653.496,00	7.167.232.959,00	-	(6.643.579.463,00)
RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	-	-	637.774.948,00	-	(637.774.948,00)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK	-	132.751.435,00	3.524.801.013,00	-	(3.392.049.578,00)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	-	96.376.986,00	1.871.582.953,00	149.387.145,00	(1.625.818.822,00)
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	-	9.585.652,00	30.366.241,00	-	(20.780.589,00)
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	-	-	98.362.650,00	460.622.829,00	362.260.179,00
DINAS SOSIAL	-	50.000.000,00	27.960.000,00	242.660.159,00	264.700.159,00
DINAS PANGAN	-	69.815.549,00	-	66.497.000,00	136.312.549,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	472.318.468,75	58.179.708,00	(414.138.760,75)
DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	48.000.000,00	48.000.000,00
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH	-	-	-	279.150.451,00	279.150.451,00
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	679.404.766,00	679.404.766,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	99.372.296,00	-	585.045.742,00	684.418.038,00
DINAS KEHUTANAN	-	83.613.910,00	-	713.015.252,00	796.629.162,00
BIRO UMUM	-	49.916.825,00	-	158.806.000,00	208.722.825,00
SEKRETARIAT DPRD	-	-	782.655.511,00	3.902.467.055,81	3.119.811.544,81
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	311.613.675,00	-	894.786.946,00	1.206.400.621,00
BADAN PENGHUBUNG	-	-	-	199.200.000,00	199.200.000,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	313.844.970,00	313.844.970,00
JUMLAH	**-**	**1.557.341.732,00**	**33.716.884.818,75**	**8.807.450.029,81**	**(23.352.093.056,94)**

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

SKPD	Jumlah	Keterangan
DINAS PENDIDIKAN	(8.522.750,00)	Utang belanja pemeliharan tahun lalu
	17.417.421.497,00	Reklas dari Belanja Barang Jasa BLUD dan BOS
DINAS KESEHATAN	1.507.907.414,00	Reklas dari Belanja Barang Jasa BLUD
RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT	6.643.579.463,00	Reklas dari Belanja Barang Jasa BLUD
RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	637.774.948,00	Reklas dari Belanja Barang Jasa BLUD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK	3.392.049.578,00	Reklas dari Belanja Barang Jasa BLUD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	1.625.818.822,00	Reklas dari Belanja Barang Jasa BLUD
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	20.780.589,00	Reklas ke persediaan
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	(460.622.829,00)	Dikapitalisir jadi aset
	98.362.650,00	Utang Belanja
DINAS SOSIAL	(50.000.000,00)	Dikapitalisir jadi aset
	27.960.000,00	Utang Belanja
	(242.660.159,00)	Dikapitalisir jadi aset
DINAS PANGAN	(136.312.549,00)	Dikapitalisir jadi aset
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	414.138.760,75	Utang Belanja
DINAS PERHUBUNGAN	(48.000.000,00)	Dikapitalisir jadi aset
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH	(279.150.451,00)	Dikapitalisir jadi aset
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(679.404.766,00)	Dikapitalisir jadi aset
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	(684.418.038,00)	Dikapitalisir jadi aset
DINAS KEHUTANAN	(796.629.162,00)	Dikapitalisir jadi aset
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	(1.206.400.621,00)	Dikapitalisir jadi aset
BADAN PENGHUBUNG	(199.200.000,00)	Dikapitalisir jadi aset
SEKRETARIAT DPRD	782.655.511,00	Utang Belanja
	(3.902.467.055,81)	Dikapitalisir jadi aset
SETDA-BIRO UMUM	(208.722.825,00)	Dikapitalisir jadi aset
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	(313.844.970,00)	Dikapitalisir jadi aset
JUMLAH	**23.352.093.056,94**	

5.4.2.1.2.4 BEBAN PERJALANAN DINAS

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2024 (Rp)	TA. 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.2.04	Beban Perjalanan Dinas	231.338.663.653,00	243.612.287.499,00	(12.273.623.846,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Perjalanan Dinas dalam Tahun 2024 dan 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, maka terdapat penurunan sebesar Rp12.273.623.846,00.

Beban Perjalanan Dinas ini terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2024 Rp.	TA. 2023 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
	Beban Perjalanan Dinas	**231.338.663.653,00**	**243.612.287.499,00**	**(12.273.623.846,00)**
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	208.992.804.660,00	241.022.849.600,00	(32.030.044.940,00)
8.1.02.88	Beban Barang dan Jasa BOS (Perjalanan Dinas)	19.048.825.876,00	-	19.048.825.876,00
8.1.02.99.	Beban Barang dan Jasa BLUD (Perjalanan Dinas)	3.297.033.117,00	2.589.437.899,00	707.595.218,00

Untuk perbedaan jumlah Belanja Perjalanan Dinas dengan Beban Perjalanan Dinas sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
Belanja Perjalanan Dinas	**209.229.543.077,00**	**231.338.663.653,00**	**(22.109.120.576,00)**
Belanja Perjalanan Dinas	209.229.543.077,00	208.992.804.660,00	236.738.417,00
Belanja Barang dan Jasa BOS (Perjalanan Dinas)	-	*19.048.825.876,00*	(19.048.825.876,00)
Belanja Barang dan Jasa BLUD (Perjalanan Dinas)	-	3.297.033.117,00	(3.297.033.117,00)

Penjelasan perbedaan belanja perjalanan dinas-LRA dan beban perjalanan dinas- LO pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Pembayaran utang belanja perjalanan dinas sebesar Rp236.738.417,00 pada Dinas Pendidikan;
- Pengakuan beban perjalanan dinas dari belanja barang dan jasa BOS pada Dinas Pendidikan sebesar Rp19.048.825.876,00.
- Pengakuan beban perjalanan dinas dari belanja barang dan jasa BLUD pada SKPD yang mempunyai layanan BLUD sebesar Rp3.297.033.117,00.

5.4.2.1.2.5 BEBAN UANG DAN/JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKT

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2024 (Rp)	TA. 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.2.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dalam Tahun 2024 dan 2023. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direklasifikasi ke Objek Beban Jasa.

Untuk perbedaan jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
1	2	3	4=(2-3)
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**11.704.898.750,00**	**-**	**11.704.898.750,00**
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.697.548.750,00	-	11.697.548.750,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.350.000,00	-	7.350.000,00

Untuk belanja uang dan/jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Tahun 2024 terdapat selisih sebesar Rp11.704.898.750,00 yang disebabkan karena reklasifikasi beban uang dan/jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat ke beban jasa.

5.4.2.1.2.6 BEBAN BARANG JASA BOS

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2024 (Rp)	TA. 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.2.88	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	280.090.037.482,76	(280.090.037.482,76)

Jumlah tersebut merupakan saldo Belanja Barang dan Jasa BOS dalam Tahun 2024 dan 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, maka terdapat penurunan sebesar Rp280.090.037.482,76.

Untuk perbedaan jumlah Belanja barang jasa BOS dengan Beban barang jasa BOS sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
Belanja Barang dan Jasa BOS	**274.150.899.411,00**	**-**	**274.150.899.411,00**
Belanja Barang dan Jasa BOS	274.150.899.411,00	-	274.150.899.411,00

Selisih Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp274.150.899.411,00 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
DINAS PENDIDIKAN	-			274.150.899.411,00	274.150.899.411,00

Pengurangan beban barang jasa BOS disebabkan karena:

1) Reklasifikasi beban barang jasa BOS ke beban barang sebesar Rp149.961.347.908,00.
2) Reklasifikasi beban barang jasa BOS ke beban jasa sebesar Rp10.112.890.549,00
3) Reklasifikasi beban barang jasa BOS ke beban pemeliharaan sebesar Rp16.350.080.098,00
4) Rekalsifikasi beban barang jasa BOS ke beban perjalanan dinas sebesar Rp19.048.825.876,00

5.4.2.1.2.7 BEBAN BARANG JASA BLUD

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2024 (Rp)	TA. 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.2.99	**Beban Barang dan Jasa BLUD**	**0,00**	**2.470.916.623,00**	**(2.470.916.623,00)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Dinas Pendidikan dalam Tahun 2024 dan 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, maka terdapat penurunan sebesar Rp2.470.916.623,00. Dapat diinformasikan bahwa beban barang dan jasa BLUD pada RSUD dan Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan telah direklasifikasi sesuai objek beban barang dan jasa (beban barang; beban jasa; beban pemeliharaan dan beban perjalanan dinas).

Untuk perbedaan jumlah Belanja barang jasa BLUD dengan Beban barang jasa BLUD sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
Belanja Barang dan Jasa BLUD	**378.351.264.549,74**	**-**	**378.351.264.549,74**
Belanja Barang dan Jasa BLUD	378.351.264.549,74	-	378.351.264.549,74

Selisih Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp396.611.102.110,64 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Akun	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
Dinas Pendidikan	-	-	-	28.567.287.981,10	28.567.287.981,10
Dinas Kesehatan	-	-	-	16.812.539.967,00	16.812.539.967,00
RSAM Bkt	-	-	-	142.471.487.279,00	142.471.487.279,00
RSJ HB Saanin	-	-	-	28.118.857.833,00	28.118.857.833,00
RSUD M. Natsir	-	-	-	90.165.743.187,00	90.165.743.187,00
RSUD Pariaman	-	-	-	72.215.348.302,64	72.215.348.302,64
JUMLAH	-	-	-	**378.351.264.549,74**	**378.351.264.549,74**

Pengurangan beban barang jasa BLUD disebabkan karena reklasifikasi ke beban barang jasa (beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinass) sesuai tabel dibawah ini:

SKPD	Barang BLUD	Jasa BLUD	Pemeliharaan BLUD	Perjalanan Dinas BLUD	Jumlah
DINAS PENDIDIKAN	16.051.697.521,10	10.112.890.549,00	1.067.341.399,00	1.335.358.512,00	28.567.287.981,10
DINAS KESEHATAN	3.877.443.234,00	11.146.468.182,00	1.663.928.858,00	124.699.693,00	16.812.539.967,00
RSUD. Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT	43.332.656.084,00	93.286.978.250,00	5.382.066.001,00	469.786.944,00	142.471.487.279,00
RS. JIWA Prof. HB SAANIN	6.956.066.290,00	20.232.185.812,00	637.774.948,00	292.830.783,00	28.118.857.833,00
RSUD M. NATSIR SOLOK	30.310.013.115,00	57.662.645.166,00	1.700.256.173,00	492.828.733,00	90.165.743.187,00
RSUD PARIAMAN	31.360.839.865,00	38.835.421.416,64	1.419.207.719,00	599.879.302,00	72.215.348.302,64
JUMLAH	**131.888.716.109,10**	**231.276.589.375,64**	**11.870.575.098,00**	**3.315.383.967,00**	**378.351.264.549,74**

Jika dihubungkan dengan saldo di Neraca dengan Beban Barang Jasa, maka akan mempengaruhi saldo Beban Dibayar Dimuka dan Utang Belanja Barang dan Jasa yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Beban dibayar dimuka

Jika dihubungkan dengan saldo Beban Dibayar Dimuka di Neraca dengan Beban Premi Asuransi dan Beban Sewa, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
1	2	3	4=(2-3)
Beban Dibayar Dimuka	**153.703.663.531,00**	**154.048.506.059,79**	**(344.842.528,79)**
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	111.363.525.149,00	110.013.005.302,78	1.350.519.846,22
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11.604.232.527,00	13.278.699.193,67	(1.674.466.666,67)
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	30.735.905.855,00	30.756.801.563,34	(20.895.708,34)

Perbedaan antara LRA dan LO tersebut di atas telah dijelaskan pada perbedaan Belanja Barang dan Jasa dan Beban Jasa.

Uraian	Saldo Awal	LRA	LO	Jumlah	Saldo Akhir	Selisih
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6	7=(6-5)
Beban dibayar dimuka	3.846.284.775,21	153.703.663.531,00	154.048.506.059,79	3.501.442.246,42	3.509.417.517,00	7.975.270,58

Pada Beban Dibayar Dimuka di Neraca keterkaitannya dengan Beban Premi Asuransi dan Beban Sewa, terdapat selisih sebesar Rp7.975.270,58 yang dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1) Koreksi Beban Dibayar Dimuka pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar (Rp18.798.679,00).
2) Penyesuaian Beban Jasa BLUD sebesar (Rp25.126.050,42) yang merupakan Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah - Beban Dibayar Dimuka pada rumah sakit.
3) Penyesuaian utang belanja asuransi Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan sebesar Rp51.900.000,00.

b. Utang Belanja Barang dan Jasa

Jika dihubungkan dengan saldo utang Belanja Barang dan Jasa di Neraca dengan Beban Barang dan Jasa, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Uraian	Saldo Awal	LRA	LO	Jumlah	Saldo Akhir	Selisih
1	2	3	4	5=(2+4-3)	6	7=(6-5)
Utang Barang Jasa	66.027.303.099,67	1.803.917.885.970,85	1.798.554.944.588,19	60.664.361.717,01	81.400.664.565,58	20.736.302.848,57

Pada Utang Belanja Barang dan Jasa di Neraca keterkaitannya dengan Beban Barang dan Jasa terdapat selisih sebesar Rp20.736.302.848,57 yaitu Penyesuaian terhadap utang Tahun 2024 dan 2023 pada SKPD sesuai Belanja Barang dan Jasa, yaitu :

SKPD	Utang Barang Jasa Tahun 2023	Jurnal Penyesuaian		Jumlah setelah penyesuian	Utang Barang Jasa Tahun 2024	Selisih
		Debet (Rp)	Kredit (Rp)			
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6	7=(6-5)
DINAS PENDIDIKAN	936.190.853,00	326.289.453.011,58	313.604.960.802,58	13.620.683.062,00	742.272.197,00	(12.878.410.865,00)
DINAS KESEHATAN	1.007.106.703,00	22.107.906.267,22	18.714.946.031,00	4.400.066.939,22	2.801.258.290,00	(1.598.808.649,22)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	30.972.677.785,00	178.464.913.372,75	185.269.293.162,75	24.168.297.995,00	33.337.762.697,00	9.169.464.702,00
RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	1.410.695.683,00	29.471.513.744,00	30.878.226.209,00	3.983.218,00	1.083.711.484,00	1.079.728.266,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK	16.392.222.928,97	123.374.440.648,48	117.815.202.489,98	21.951.461.087,47	23.529.731.304,83	1.578.270.217,36
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	13.214.817.469,70	85.299.468.002,63	85.652.117.593,64	12.862.167.878,69	10.789.828.509,00	(2.072.339.369,69)
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	2.157.500,00	938.331.300,42	132.263.697,00	808.225.103,42	126.962.043,00	(681.263.060,42)
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	60.974.206,00	578.743.510,60	1.247.294.618,32	(607.576.901,72)	171.664.605,00	779.241.506,72
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	23.366.544,83	12.813.116.971,00	(12.789.750.426,17)	-	12.789.750.426,17
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.557.019,00	64.896.619,00	66.141.324,00	6.312.314,00	11.573.517,00	5.261.203,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15.562.104,00	66.312.649,28	35.611.046,00	46.263.707,28	16.589.335,00	(29.674.372,28)
DINAS SOSIAL	37.500.322,00	2.667.278.823,34	3.466.870.919,00	(762.091.773,66)	122.775.162,00	884.866.935,66
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	35.788.528,00	42.000.024,00	45.825.491,00	31.963.061,00	33.312.869,00	1.349.808,00
DINAS P. PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PP & KB	21.444.067,00	298.953.275,00	433.178.152,00	(112.780.810,00)	18.974.352,00	131.755.162,00
DINAS PANGAN	50.076.539,00	3.942.278.304,00	767.097.888,00	3.225.256.955,00	46.666.319,00	(3.178.590.636,00)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	35.646.624,00	1.308.772.314,92	400.844.757,00	943.574.181,92	564.695.690,75	(378.878.491,17)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.168.900,00	878.044.537,04	854.861.441,00	24.351.996,04	2.398.900,00	(21.953.096,04)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12.666.512,00	48.024.166,00	91.635.771,00	(30.945.093,00)	12.895.991,00	43.841.084,00
DINAS PERHUBUNGAN	21.205.245,00	60.155.405,67	114.370.672,00	(33.010.021,33)	19.006.231,00	52.016.252,33
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	42.628.883,00	272.443.446,00	160.012.605,00	155.059.724,00	206.093.831,00	51.034.107,00
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH	47.879.212,00	122.674.263,00	914.017.124,00	(743.463.649,00)	102.022.263,00	845.485.912,00
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10.832.494,00	68.022.253,50	26.887.646,00	51.967.101,50	47.041.754,00	(4.925.347,50)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	19.759.233,00	1.600.793.500,48	1.677.786.930,00	(57.234.196,52)	21.715.498,00	78.949.694,52
DINAS KEBUDAYAAN	48.813.370,00	799.623.983,33	870.740.765,00	(22.303.411,67)	133.585.440,00	155.888.851,67
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	43.664.645,00	173.713.337,00	156.673.015,00	60.704.967,00	35.434.321,00	(25.270.646,00)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	20.021.235,00	347.136.729,50	1.533.340.869,33	(1.166.182.904,83)	17.471.243,00	1.183.654.147,83
DINAS PARIWISATA	23.162.871,00	500.855.075,00	450.273.977,00	73.743.969,00	21.160.627,00	(52.583.342,00)
DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	119.045.875,00	4.881.381.575,00	4.614.131.041,00	386.296.409,00	4.112.865.079,00	3.726.568.670,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	175.661.540,00	1.544.349.123,00	1.924.762.577,00	(204.751.914,00)	47.324.235,00	252.076.149,00
DINAS KEHUTANAN	21.200.408,00	326.663.155,00	1.221.223.529,00	(873.359.966,00)	21.090.675,00	894.450.641,00
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	25.506.745,00	130.135.130,00	102.654.685,00	52.987.190,00	23.811.490,00	(29.175.700,00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	41.295.365,00	197.025.886,25	132.918.518,00	105.402.733,25	40.813.522,00	(64.589.211,25)
SEKRETARIAT DAERAH	-			-		-
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTODA	-	202.016.400,00	215.874.017,00	(13.857.617,00)	-	13.857.617,00
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	46.186,00	58.815.428,67	58.180.978,00	680.636,67	4.513.936,00	3.833.299,33
BIRO HUKUM	84.872,00	14.460.881,17	5.272.500,00	9.273.253,17	153.558,00	(9.119.695,17)
BIRO PEREKONOMIAN	-	17.500.034,00	18.884.933,00	(1.384.899,00)	-	1.384.899,00
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	13.538.100,00	8.796.000,00	4.742.100,00	-	(4.742.100,00)
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	72.322.970,83	79.605.900,00	(7.282.929,17)	-	7.282.929,17
BIRO ORGANISASI	-	29.521.400,00	12.190.136,00	17.331.264,00	-	(17.331.264,00)
BIRO UMUM	331.234.855,00	613.117.735,00	2.009.774.538,00	(1.065.421.948,00)	336.819.685,00	1.402.241.633,00
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	16.322.205,00	14.166.920,00	2.155.285,00	-	(2.155.285,00)
SEKRETARIAT DPRD	178.872.573,00	2.021.305.316,33	4.989.043.405,14	(2.788.865.515,81)	1.023.370.785,00	3.812.236.300,81
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	26.172.321,00	99.895.124,50	171.143.874,00	(45.076.428,50)	22.767.462,00	67.843.890,50
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	17.247.900,00	40.240.700,00	(22.992.800,00)	-	22.992.800,00
BADAN PENDAPATAN DAERAH	172.320.468,00	920.780.429,59	2.636.681.032,00	(1.543.580.134,41)	176.273.018,00	1.719.853.152,41
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	22.335.197,00	160.319.747,00	174.200.258,00	8.454.686,00	20.617.520,00	12.162.834,00
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	59.989.459,00	321.062.475,00	1.317.588.546,00	(936.536.612,00)	120.779.204,00	1.057.315.816,00
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.544.398,00	67.260.429,00	32.567.583,00	37.237.244,00	1.983.986,00	(35.253.258,00)
BADAN PENGHUBUNG	332.027.755,00	2.528.935.669,17	994.207.224,00	1.866.756.200,17	1.417.617.251,00	(449.138.949,17)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	19.695.304,00	114.397.838,00	158.449.768,00	(24.356.626,00)	6.422.558,00	30.779.184,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.048.847,00	41.567.280,00	456.848.094,00	(408.231.967,00)	6.836.128,00	415.068.095,00
JUMLAH	**66.027.303.099,67**	**794.220.057.341,08**	**799.582.998.723,74**	**60.664.361.717,01**	**81.400.664.565,58**	**20.736.302.848,57**

Penjelasan selisih sebesar Rp20.736.302.848,57 pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

SKPD	Koreksi Utang	JP Beban Dibayar Dimuka	JP Persediaan	BJ Dikapitalasir	BM tdk dikapitasir	Belanja Lain selain Barjas/persediaan	Utang Selain Belanja Jasa Kantor	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS PENDIDIKAN	(35.638.682,00)	1.536.958.682,00	(180.727.508.714,10)	-		166.013.045.429,10	334.732.420,00	(12.878.410.865,00)
DINAS KESEHATAN	(1.839.226,00)	(207.850.447,00)	(6.223.340.075,22)	-		3.917.958.234,00	916.262.865,00	(1.598.808.649,22)
RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT	10.439.555.429,00	648.556,00	(48.640.129.452,00)	-	1.177.401.840,00	43.332.656.084,00	2.859.332.245,00	9.169.464.702,00
RSJ Prof. HB SAANIN		21.435.462,00	(5.878.652.809,00)	-	(19.120.677,00)	6.956.066.290,00	-	1.079.728.266,00
RSUD M.NATSIR SOLOK	(815.812.813,36)	1.416.489,58	(35.502.450.876,78)	-		30.310.013.115,00	7.585.104.302,92	1.578.270.217,36
RSUD PARIAMAN	221.951.821,30	-	(29.729.078.673,99)	-		31.360.839.865,00	(3.926.052.382,00)	(2.072.339.369,69)
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	10.000,00	(135.403.451,42)	(525.089.020,00)	-		9.585.652,00	-	(650.896.819,42)
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	(165.831,00)	1.719.998,00	(118.395.881,28)	896.083.221,00		(30.366.241,00)	-	748.875.265,72
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KP DAN PERTANAHAN		(3.025.180,83)	629.500,00	12.792.146.107,00			-	12.789.750.426,17
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		(1.596.597,00)	6.857.800,00	-			-	5.261.203,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		-	(29.674.372,28)	-			-	(29.674.372,28)
DINAS SOSIAL	876.481,00	1.426.997,66	69.738.812,00	883.524.645,00	(255.819.393,00)		185.119.393,00	884.866.935,66
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	(142.710,00)	(93.282,00)	1.585.800,00	-			-	1.349.808,00
DINAS P. PEREMPUAN DAN P.ANAK, PP & KB	71.100,00	6.927.735,00	(15.990.423,00)	140.746.750,00			-	131.755.162,00
DINAS PANGAN		71.153.947,00	(3.428.623.132,00)	178.878.549,00			-	(3.178.590.636,00)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	72.300,00	54.593.555,83	(548.344.055,00)	-		114.799.708,00	-	(378.878.491,17)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		3.992.103,96	(25.945.200,00)	-			-	(21.953.096,04)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	30.000,00	(325.016,00)	44.136.100,00	-			-	43.841.084,00
DINAS PERHUBUNGAN	(206.952,00)	(1.071.155,67)	5.294.360,00	48.000.000,00			-	52.016.252,33
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		1.891.621,00	(61.307.514,00)	63.700.000,00	(7.660.000,00)		54.410.000,00	51.034.107,00
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH		3.031.250,00	(972.500,00)	843.427.162,00			-	845.485.912,00
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PTSP	21.000,00	(330.997,50)	(4.615.350,00)	-			-	(4.925.347,50)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		(1.541.705,48)	80.491.400,00	-			-	78.949.694,52
DINAS KEBUDAYAAN	425.000,00	(48.699.743,33)	120.913.595,00	-			83.250.000,00	155.888.851,67
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	138.700,00	(17.230.796,00)	(8.178.550,00)	-			-	(25.270.646,00)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		1.663.398,50	(93.924.911,00)	1.257.116.961,33			18.798.679,00	1.183.654.147,83
DINAS PARIWISATA		2.015.383,00	(54.598.725,00)	-			-	(52.583.342,00)
DINAS PERKEBUNAN T.PANGAN DAN HORTIKULTURA	(74.375,00)	10.463.637,00	(262.687.592,00)	-	(360.137.000,00)		4.339.004.000,00	3.726.568.670,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.339.647,00	14.326.622,00	(448.008.158,00)	684.418.038,00			-	252.076.149,00
DINAS KEHUTANAN		2.322.798,00	(7.480.602,00)	899.608.445,00			-	894.450.641,00
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	645.000,00	-	(29.820.700,00)	-			-	(29.175.700,00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	932.510,00	(10.454.001,25)	(55.067.720,00)	-			-	(64.589.211,25)
SEKRETARIAT DAERAH		-	-	-			-	-
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTODA		11.590.817,00	2.266.800,00	-			-	13.857.617,00
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN		5.793.299,33	(1.960.000,00)	-			-	3.833.299,33
BIRO HUKUM	(33.686,00)	(9.204.809,17)	118.800,00	-			-	(9.119.695,17)
BIRO PEREKONOMIAN		1.243.399,00	141.500,00	-			-	1.384.899,00
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		(95.000,00)	(4.647.100,00)	-			-	(4.742.100,00)
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		(1.120.270,83)	8.403.200,00	-			-	7.282.929,17
BIRO ORGANISASI		1.310.036,00	(18.641.300,00)	-			-	(17.331.264,00)
BIRO UMUM	3.150.449,00	-	17.076.550,00	1.382.014.634,00			-	1.402.241.633,00
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA		97.315,00	(2.252.600,00)	-			-	(2.155.285,00)
SEKRETARIAT DPRD	302.400,00	51.037.167,67	(159.267.052,67)	3.119.811.544,81			800.352.241,00	3.812.236.300,81
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.139.190,00	42.326.775,50	24.377.925,00	-			-	67.843.890,50
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		-	22.992.800,00	-			-	22.992.800,00
BADAN PENDAPATAN DAERAH	(158.452,00)	(33.072.645,59)	1.753.084.250,00	-			-	1.719.853.152,41
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	342.100,00	9.133.157,00	(9.490.123,00)	12.177.700,00			-	12.162.834,00
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	258.235,00	(811.069,00)	(148.531.971,00)	1.206.400.621,00			-	1.057.315.816,00
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	(833.880,00)	1.917.122,00	(36.336.500,00)	-			-	(35.253.258,00)
BADAN PENGHUBUNG	1.293.838.250,00	(1.721.352.699,17)	(21.624.500,00)	-			-	(449.138.949,17)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	92.000,00	(4.025.716,00)	34.712.900,00	-			-	30.779.184,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	430.597,00	-	23.441.000,00	391.196.498,00			-	415.068.095,00
JUMLAH	**11.110.715.601,94**	**(336.867.258,21)**	**(310.606.373.061,32)**	**24.799.250.896,14**	**534.664.770,00**	**281.984.598.136,10**	**13.250.313.763,92**	**20.736.302.848,57**

Jika dikaitkan dengan prosedur analitis dengan selisih sebesar Rp25.490.361.557,38 dan dibandingkan dengan selisih pada tabel diatas sebesar Rp20.736.302.848,57 maka masih terdapat selisih sebesar Rp4.754.058.708,81 yang merupakan mutasi tambah kurang tahun lalu dan tahun tahun ini pada persediaan persediaan sebesar Rp4.417.191.450,60 dan beban dibayar dimuka sebesar Rp336.867.258,21 dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD	SELISIH AWAL	PERSEDIAAN			BEBAN DIBAYAR DIMUKA			SELISIH AKHIR
			SALDO TAHUN LALU	SALDO TAHUN INI	JUMLAH	SALDO TAHUN LALU	SALDO TAHUN INI	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7	8	9=(8-7)	10=(3-6-9)
1	DINAS PENDIDIKAN	(12.878.410.865,00)	9.783.164.381,00	24.764.333.752,00	14.981.169.371,00	95.291.003,00	1.632.249.685,00	1.536.958.682,00	(29.396.538.918,00)
2	DINAS KESEHATAN	(1.598.808.649,22)	77.771.744.865,29	49.407.006.489,37	(28.364.738.375,92)	207.850.447,00	-	(207.850.447,00)	26.973.780.173,70
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT	9.169.464.702,00	6.912.406.680,00	6.995.315.571,00	82.908.891,00	601.622,00	1.250.178,00	648.556,00	9.085.907.255,00
4	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	1.079.728.266,00	712.519.693,00	1.817.657.737,00	1.105.138.044,00	-	21.435.462,00	21.435.462,00	(46.845.240,00)
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK	1.578.270.217,36	7.045.801.785,52	9.982.671.036,66	2.936.869.251,14	21.042.385,42	22.458.875,00	1.416.489,58	(1.360.015.523,36)
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	(2.072.339.369,69)	5.598.976.589,22	4.173.217.434,03	(1.425.759.155,19)	-	-	-	(646.580.214,50)
7	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	(681.263.060,42)	58.354.579.002,59	72.029.957.615,59	13.675.378.613,00	192.442.116,42	57.038.665,00	(135.403.451,42)	(14.221.238.222,00)
8	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	779.241.506,72	4.916.747.096,76	4.898.388.645,48	(18.358.451,28)	79.793.183,00	81.513.181,00	1.719.998,00	795.879.960,00
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KWS. PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	12.789.750.426,17	204.926.962.035,85	195.014.121.703,45	(9.912.840.332,40)	3.025.180,83	-	(3.025.180,83)	22.705.615.939,40
10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.261.203,00	10.816.000,00	6.473.800,00	(4.342.200,00)	28.809.100,00	27.212.503,00	(1.596.597,00)	11.200.000,00
11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(29.674.372,28)	268.215.072,28	247.013.200,00	(21.201.872,28)	-	-	-	(8.472.500,00)
12	DINAS SOSIAL	884.866.935,66	9.449.194,00	264.307.399,00	254.858.205,00	25.347.908,34	26.774.906,00	1.426.997,66	628.581.733,00
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.349.808,00	345.000,00	1.930.800,00	1.585.800,00	959.550,00	866.268,00	(93.282,00)	(142.710,00)
14	DINAS P. PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PP & KB	131.755.162,00	80.218.948,00	66.748.525,00	(13.470.423,00)	29.760.382,00	36.688.117,00	6.927.735,00	138.297.850,00
15	DINAS PANGAN	(3.178.590.636,00)	5.133.657.378,00	1.705.034.246,00	(3.428.623.132,00)	78.413.970,00	149.567.917,00	71.153.947,00	178.878.549,00
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(378.878.491,17)	895.724.607,00	462.180.260,00	(433.544.347,00)	59.413.124,17	114.006.680,00	54.593.555,83	72.300,00
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	(21.963.096,04)	31.236.300,00	5.291.100,00	(25.945.200,00)	41.023.737,04	45.015.841,00	3.992.103,96	(0,00)
18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	43.841.084,00	51.145.100,00	95.281.200,00	44.136.100,00	22.675.375,00	22.350.359,00	(325.016,00)	30.000,00
19	DINAS PERHUBUNGAN	52.016.252,33	16.380.000,00	21.674.360,00	5.294.360,00	4.077.916,67	3.006.761,00	(1.071.155,67)	47.793.048,00
20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	51.034.107,00	68.821.675,00	61.924.161,00	(6.897.514,00)	-	1.891.621,00	1.891.621,00	56.040.000,00
21	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH	845.485.912,00	2.772.500,00	1.800.000,00	(972.500,00)	-	3.031.250,00	3.031.250,00	843.427.162,00
22	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PTSP	(4.925.347,50)	36.107.250,00	31.491.900,00	(4.615.350,00)	1.530.362,50	1.199.365,00	(330.997,50)	21.000,00
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	78.949.694,52	25.838.150,00	106.329.550,00	80.491.400,00	14.845.902,48	13.304.197,00	(1.541.705,48)	(0,00)
24	DINAS KEBUDAYAAN	155.888.851,67	2.661.000,00	206.824.595,00	204.163.595,00	48.699.743,33	-	(48.699.743,33)	425.000,00
25	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(25.270.646,00)	20.450.100,00	12.271.550,00	(8.178.550,00)	77.227.333,00	59.996.537,00	(17.230.796,00)	138.700,00
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.183.654.147,83	189.197.267,00	99.772.356,00	(89.424.911,00)	55.656.725,50	57.320.124,00	1.663.398,50	1.271.415.660,33
27	DINAS PARIWISATA	(52.583.342,00)	306.850.050,00	252.251.325,00	(54.598.725,00)	25.641.158,00	27.656.541,00	2.015.383,00	-
28	DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	3.726.568.670,00	619.532.742,00	4.695.849.150,00	4.076.316.408,00	-	10.463.637,00	10.463.637,00	(360.211.375,00)
29	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	252.076.149,00	2.985.601.767,00	2.910.736.761,00	(74.865.006,00)	83.684.467,00	98.011.089,00	14.326.622,00	312.614.533,00
30	DINAS KEHUTANAN	894.450.641,00	228.091.455,00	220.610.853,00	(7.480.602,00)	32.440.333,00	34.763.131,00	2.322.798,00	899.608.445,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	(29.175.700,00)	49.174.000,00	49.337.300,00	163.300,00	-	-	-	(29.339.000,00)
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	(64.589.211,25)	49.596.066,00	27.058.346,00	(22.537.720,00)	10.454.001,25	-	(10.454.001,25)	(31.597.490,00)
	SEKRETARIAT DAERAH	-	-		-	-		-	-
33	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTODA	13.857.617,00	18.375.100,00	20.641.900,00	2.266.800,00	-	11.590.817,00	11.590.817,00	-
34	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	3.833.299,33	5.460.000,00	5.400.000,00	(60.000,00)	23.660.296,67	29.453.596,00	5.793.299,33	(1.900.000,00)
35	BIRO HUKUM	(9.119.695,17)	8.774.000,00	8.892.800,00	118.800,00	9.204.809,17	-	(9.204.809,17)	(33.686,00)
36	BIRO PEREKONOMIAN	1.384.899,00	8.247.500,00	9.369.000,00	1.121.500,00	4.747.490,00	5.990.889,00	1.243.399,00	(980.000,00)
37	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	(4.742.100,00)	7.704.800,00	3.057.700,00	(4.647.100,00)	7.957.500,00	7.862.500,00	(95.000,00)	-
38	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	7.282.929,17	5.217.000,00	13.620.200,00	8.403.200,00	14.753.270,83	13.633.000,00	(1.120.270,83)	0,00
39	BIRO ORGANISASI	(17.331.264,00)	18.757.800,00	14.676.500,00	(4.081.300,00)	-	1.310.036,00	1.310.036,00	(14.560.000,00)
40	BIRO UMUM	1.402.241.633,00	10.965.100,00	28.041.650,00	17.076.550,00	-	-	-	1.385.165.083,00
41	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	(2.155.285,00)	4.750.600,00	2.498.000,00	(2.252.600,00)	3.792.325,00	3.889.640,00	97.315,00	-
42	SEKRETARIAT DPRD	3.812.236.300,81	174.843.760,00	378.661.707,33	203.817.947,33	141.455.533,33	192.492.701,00	51.037.167,67	3.557.381.185,81
43	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	67.843.890,50	59.372.850,00	84.350.775,00	24.977.925,00	8.065.017,50	50.391.793,00	42.326.775,50	539.190,00
44	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	22.992.800,00	40.090.600,00	63.083.400,00	22.992.800,00		-	-	-
45	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.719.853.152,41	868.424.344,60	2.621.508.594,60	1.753.084.250,00	430.647.911,59	397.575.266,00	(33.072.645,59)	(158.452,00)
46	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	12.162.834,00	245.607.709,00	236.117.586,00	(9.490.123,00)	29.412.354,00	38.545.511,00	9.133.157,00	12.519.800,00
47	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.057.315.816,00	14.180.140,00	21.718.169,00	7.538.029,00	7.191.710,00	6.380.641,00	(811.069,00)	1.050.588.856,00
48	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	(35.253.258,00)	10.156.900,00	5.490.400,00	(4.666.500,00)	-	1.917.122,00	1.917.122,00	(32.503.880,00)
49	BADAN PENGHUBUNG	(449.138.949,17)	28.828.300,00	7.203.800,00	(21.624.500,00)	1.876.306.118,17	154.953.419,00	(1.721.352.699,17)	1.293.838.250,00
50	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	30.779.184,00	100.861.100,00	135.574.000,00	34.712.900,00	48.383.412,00	44.357.696,00	(4.025.716,00)	92.000,00
51	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	415.068.095,00	19.729.800,00	43.170.800,00	23.441.000,00	-	-	-	391.627.095,00
	JUMLAH	**20.736.302.848,57**	**388.755.131.154,11**	**384.337.939.703,51**	**(4.417.191.450,60)**	**3.846.284.775,21**	**3.509.417.517,00**	**(336.867.258,21)**	**25.490.361.557,38**

5.4.2.1.3 BEBAN SUBSIDI

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2024 (Rp)	TA. 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.04.	Beban Subsidi	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Subsidi dalam Tahun 2024 dan 2023. Bila dibandingkan dengan tahun 2023, maka terdapat kenaikan sebesar Rp1.500.000.000,00.

Hal ini sesuai Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2023 tentang penugasan kepada PT Bank Nagari dalam penyaluran Subsidi Bunga/Marjin kepada usaha kecil yang dilaksanakan bersama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sesuai deangan perjanjian kerjasama antara Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat dengan Bank Nagari

Pada Tahun 2024, Beban Subsidi terealisasi 100% yang digunakan untuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga/Margin kepada Usaha Kecil, dengan jumlah usaha kecil yang dapat difasilitasi subsidi sebanyak 181 orang yang menyebar pada 19 Kab/Kota se-Sumatera Barat dengan total pinjaman yang diberikan sebesar Rp13.893.000.000,00.

5.4.2.1.4 BEBAN HIBAH

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2024 (Rp)	TA. 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.05.	Beban Hibah	317.914.266.876,00	260.213.402.169,00	57.700.864.707,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Hibah dalam Tahun 2024 dan 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, maka terdapat kenaikan sebesar Rp57.700.864.707,00.

Beban Hibah terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2024 Rp.	TA. 2023 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
8.1.05.	**BEBAN HIBAH**	317.914.266.876,00	260.213.402.169,00	57.700.864.707,00
8.1.05.01.	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	117.199.488.584,00	65.616.710.389,00	51.582.778.195,00
8.1.05.02.	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
8.1.05.05.	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	121.981.317.412,00	117.620.042.104,00	4.361.275.308,00
8.1.05.06.	Beban Hibah Hibah Dana BOS	75.729.741.680,00	74.126.510.476,00	1.603.231.204,00
8.1.05.07.	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.003.719.200,00	2.850.139.200,00	153.580.000,00

Adapun perbedaan jumlah Belanja Hibah dengan Beban Hibah dapat dilihat pada tabel berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
BELANJA HIBAH	**317.914.266.876,00**	**317.914.266.876,00**	**-**
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	117.199.488.584,00	117.199.488.584,00	-
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	121.981.317.412,00	121.981.317.412,00	-
Belanja Hibah Hibah Dana BOS	75.729.741.680,00	75.729.741.680,00	
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.003.719.200,00	3.003.719.200,00	-

Tidak ada perbedaan antara belanja hibah-LRA dengan beban hibah-LO sesuai dengan tabel diatas.

5.4.2.1.5 BEBAN BANTUAN SOSIAL

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2024 (Rp)	TA. 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.06.	Beban Bantuan Sosial	130.447.500,00	0,00	130.447.500,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bantuan Sosial dalam Tahun 2024 dan 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, maka terdapat kenaikan sebesar Rp130.447.500,00, karena pada Tahun 2023 pemerintah provinsi tidak mengganggarkan.

Pada Tahun 2024 Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar 100% dari anggaran yang ditergetkan sebesar Rp130.447.500,00. Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 dialokasikan untuk Individu atas kehilangan Hasil Tanaman terjadinya Bencana Longsor TPA Regional Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No.520-726-2024 tgl 16 Oktober 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura.

5.4.2.1.6 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2024 (Rp)	TA. 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.08.	Beban Penyisihan Piutang	6.585.362.941,09	3.044.465.981,17	3.540.896.959,92

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyisihan Piutang dalam Tahun 2024 dan 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, maka terdapat kenaikan sebesar Rp3.540.896.959,92.

Beban Penyisihan Piutang terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2024 Rp.	TA. 2023 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
8.1.8.	**BEBAN PENYISIHAN PIUTANG**	**6.585.362.941,09**	**3.044.465.981,17**	**3.540.896.959,92**
8.1.8.01.	Beban Penyisihan Piutang Pajak	432.725.542,81	256.540.426,59	176.185.116,22
8.1.8.02.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	5.033.651.399,10	566.371.939,00	4.467.279.460,10
8.1.8.03.	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	636.489.837,28	610.093.010,91	26.396.826,37
8.1.8.04.	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	450.288.951,90	1.611.184.604,67	(1.160.895.652,77)
8.1.8.05.	Beban Penyisihan Piutang Transfer	32.207.210,00	-	32.207.210,00
8.1.8.06.	Beban Penyisihan Piiutang Lainnya	-	276.000,00	(276.000,00)

Penjelasan masing-masing akun piutang tersebut diatas adalah sebagai berikut:

a. Piutang Pajak dengan rincian:

SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2024	Penyisihan Piutang 2024	Penyisihan Piutang 2023	Beban Penyisihan 2024
Bapenda				
PBB-KB	59.620.110.062,00	298.100.550,31	249.273.742,48	298.100.550,31
Pajak Air Permukaan	270.275.170,00	270.275.170,00	213.852.254,11	134.624.992,50
Jumlah	**59.890.385.232,00**	**568.375.720,31**	**463.125.996,59**	**432.725.542,81**

b. Piutang Retribusi dengan rincian:

SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2024	Penyisihan Piutang 2024	Penyisihan Piutang 2023	Beban Penyisihan 2024
Dinas Kesehatan	1.150.241.000,00	92.833.727,50	104.909.438,74	50.308.727,50
RSAM Bukittinggi	7.447.223.503,00	6.354.021.527,20	-	4.214.349.985,64
RSJ. HB. Sa'anin Padang	710.188.841,00	689.378.683,00	-	80.847.726,54
RSUD Solok	1.654.935.507,00	739.040.547,92	-	548.373.669,42
RSUD Pariaman	17.968.000,00	89.840,00	-	89.840,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	6.570.000,00	657.000,00	-	657.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	584.614.900,00	584.614.900,00	508.955.000,00	139.024.450,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	-
D. Perkebunan dan TPH	460.000,00	460.000,00	460.000,00	-
Jumlah	**11.583.451.751,00**	**8.472.346.225,62**	**625.574.438,74**	**5.033.651.399,10**

c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan rincian:

SKPD/BUMD	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2024	Penyisihan Piutang 2024	Penyisihan Piutang 2023	Beban Penyisihan 2024
PT GRAFIKA JAYA SUMBAR	-	-	-	-
PT BALAIRUNG CITRA SUMBAR	-	-	-	-
BANK NAGARI	122.736.659.559,00	613.683.297,80	589.596.101,07	613.683.297,80
PT.BANGUN ASKRIDA	-	-	-	-
PT. JAMKRIDA	4.561.307.897,00	22.806.539,49	20.496.909,84	22.806.539,49
JUMLAH	**127.297.967.456,00**	**636.489.837,28**	**610.093.010,91**	**636.489.837,28**

d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah dengan rincian:

SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2024	Penyisihan Piutang 2024	Penyisihan Piutang 2023	Beban Penyisihan 2024
Dinas Pendidikan	11.138.380,20	55.691,90	225.395,07	55.691,90
Dinas Kesehatan	-	-	50.210.387,00	-
RSAM Bukittinggi	-	-	2.657.274.241,12	-
RSJ. HB. Sa'anin Padang	-	-	689.671.960,96	-
RSUD Solok	-	-	371.544.449,62	-
RSUD Pariaman	-	-	345.766,00	-
Dinas Lingkungan Hidup	2.487.588.660,00	2.226.478.860,00	1.776.377.900,00	450.233.260,00
BPKAD	213.068.815,00	213.068.815,00	351.818.815,00	-
JUMLAH	**2.711.795.855,20**	**2.439.603.366,90**	**5.897.468.914,76**	**450.288.951,90**

e. Piutang Transfer dengan rincian :

Uraian	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2024	Penyisihan Piutang 2024	Penyisihan Piutang 2023	Beban Penyisihan 2024
Transfer	6.441.442.000,00	32.207.210,00	-	32.207.210,00
Jumlah	**6.441.442.000,00**	**32.207.210,00**	**-**	**32.207.210,00**

f. Piutang Bagian Lancar dengan rincian :

Uraian	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2024	Penyisihan Piutang 2024	Penyisihan Piutang 2023	Beban Penyisihan 2024
Bagian Lancar TGR	28.800.000,00	144.000,00	276.000,00	-
Jumlah	**28.800.000,00**	**144.000,00**	**276.000,00**	**-**

Beban Penyisihan Piutang untuk masing-masing jenis Piutang dihitung berdasarkan Pergub Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

5.4.2.1.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2024 (Rp)	TA. 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.07.	**Beban Penyusutan dan Amortisasi**	**591.492.702.995,20**	**622.538.533.241,63**	**(31.045.830.246,43)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam Tahun 2024 dan 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, maka terdapat penurunan sebesar Rp31.045.830.246,43.

Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2024 Rp.	TA. 2023 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
8.1.7.	**BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**	**591.492.702.995,20**	**622.538.533.241,63**	**(31.045.830.246,43)**
8.1.7.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	203.555.135.875,93	246.838.071.006,36	(43.282.935.130,43)
8.1.7.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	99.453.715.891,08	94.905.223.525,27	4.548.492.365,81
8.1.7.03.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	287.665.701.305,62	278.716.484.563,46	8.949.216.742,16
8.1.7.04.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	396.156.883,07	387.612.725,52	8.544.157,55
8.1.7.05.	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	1.011.121.517,30	(1.011.121.517,30)
8.1.7.06.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	363.085.674,50	680.019.903,72	(316.934.229,22)
8.1.7.08.	Beban Penyusutan Properti Investasi	58.907.365,00	-	58.907.365,00

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan:

a. Pergub Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap;

b. Pergub Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 Pergub Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dapat juga kami informasikan bahwa untuk Tahun 2024 beban penyusutan pada aplikasi BMD sudah dapat dihitung berdasarkan bulanan.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada lampiran penyusutan aset yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.4.2.1.8 BEBAN LAIN LAIN

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2024 (Rp)	TA. 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.09.	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Lain-lain dalam Tahun 2024 dan 2023.

5.4.2.1.9 BEBAN TIDAK TERDUGA

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2024 (Rp)	TA. 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.2.	Beban Tidak Terduga	5.182.916.341,30	0,00	5.182.916.341,30

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Tidak Terduga dalam Tahun 2024 dan 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, maka terdapat kenaikan sebesar Rp5.182.916.341,30.

Pada tahun 2024 untuk beban tidak terduga ini berasal dari belanja tidak terduga

yang sebelumnya dilakukan reklasifikasi ke beban luar biasa.

5.4.2.2 BEBAN TRANSFER

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2024 (Rp)	TA. 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.3.	Beban Transfer	1.178.972.339.969,46	1.110.578.301.907,00	68.394.038.062,46

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Transfer dalam Tahun 2024 dan 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, maka terdapat kenaikan sebesar Rp68.394.038.062,46.

Beban Transfer terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2024 Rp.	TA. 2023 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
9.4.	**BEBAN TRANSFER**	1.178.972.339.969,46	1.110.578.301.907,00	68.394.038.062,46
9.4.01.	**BEBAN BAGI HASIL**	1.137.456.024.500,00	1.077.505.625.075,00	59.950.399.425,00
9.4.01.01.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.137.456.024.500,00	1.077.505.625.075,00	59.950.399.425,00
9.4.02.	**BEBAN BANTUAN KEUANGAN**	41.516.315.469,46	33.072.676.832,00	8.443.638.637,46
9.4.02.03.	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	41.516.315.469,46	33.072.676.832,00	8.443.638.637,46

Adapun perbedaan jumlah transfer-LRA dengan Beban Transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
BELANJA TRANSFER	1.139.918.785.160,46	1.178.972.339.969,46	(39.053.554.809,00)
BELANJA BAGI HASIL	1.098.402.469.691,00	1.137.456.024.500,00	(39.053.554.809,00)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.098.402.469.691,00	1.137.456.024.500,00	(39.053.554.809,00)
BELANJA BANTUAN KEUANGAN	41.516.315.469,46	41.516.315.469,46	-
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kc	41.516.315.469,46	41.516.315.469,46	-

Selisih sebesar Rp39.053.554.809,00 merupakan penyesuaian Utang Tranfser Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 dan 2023 berikut:

No	Kabupaten/Kota	Jurnal Penyesuaian		Jumlah
		Debet	Kredit	
1	2	3	4	5=(3-4)
	BELANJA TRANSFER			
1	Bagi Hasil kepada Kb. Pesisir Selaian	33.124.642.460,00	28.729.702.466,00	4.394.939.994,00
2	Bagi Hasil kepada Kb. Solok	20.870.003.560,00	17.701.815.426,00	3.168.188.134,00
3	Bagi Hasil kepada Kb. Sijunjung	18.003.444.271,00	16.781.494.167,00	1.221.950.104,00
4	Bagi Hasil kepada Kb. Tanah Datar	22.205.588.418,00	18.235.284.694,00	3.970.303.724,00
5	Bagi Hasil kepada Kb. Padang Pariaman	29.919.077.575,00	23.515.300.510,00	6.403.777.065,00
6	Bagi Hasil kepada Kb. Agam	27.071.506.726,00	23.205.815.451,00	3.865.691.275,00
7	Bagi Hasil kepada Kb. Linm Puluh Kota	20.284.986.711,00	17.557.967.727,00	2.727.018.984,00
8	Bagi Hasil kepada Kb. Pasaman	16.293.471.728,00	14.919.621.771,00	1.373.849.957,00
9	Bagi Hasil kepada Kb. Kep. Mentawai	17.281.034.849,00	11.885.571.768,00	5.395.463.081,00
10	Bagi Hasil kepada Kb. Pasaman Barat	19.668.304.212,00	17.399.166.682,00	2.269.137.530,00
11	Bagi Hasil kepada Kb. Solok Selatan	18.728.021.560,00	16.107.026.723,00	2.620.994.837,00
12	Bagi Hasil kepada Kb. Dharmasraya	21.749.014.918,00	17.958.971.283,00	3.790.043.635,00
13	Bagi Hasil kepada Kt. Padang	27.785.355.178,00	40.245.049.089,00	(12.459.693.911,00)
14	Bagi Hasil kepada Kt. Solok	9.845.736.456,00	8.528.726.768,00	1.317.009.688,00
15	Bagi Hasil kepada Kt. Sawahlunto	10.990.681.468,00	9.591.803.933,00	1.398.877.535,00
16	Bagi Hasil kepada Kt. Padang Panjang	8.373.725.681,00	7.369.470.409,00	1.004.255.272,00
17	Bagi Hasil kepada Kt. Bukittinggi	10.478.026.512,00	8.824.214.888,00	1.653.811.624,00
18	Bagi Hasil kepada Kt. Payakumbuh	11.791.607.688,00	10.038.033.691,00	1.753.573.997,00
19	Bagi Hasil kepada Kt. Pariaman	11.888.547.076,00	8.704.184.792,00	3.184.362.284,00
	TOTAL	**356.352.777.047,00**	**317.299.222.238,00**	**39.053.554.809,00**

Jika dihubungkan dengan saldo utang transfer di neraca dengan beban transfer, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Uraian	Saldo Awal	LRA	LO	Jumlah	Saldo Akhir	Selisih
1	2	3	4	5=(2+4-3)	6	7=(6-5)
Utang Bagi Hasil	317.299.222.238,00	1.098.402.469.691,00	1.137.456.024.500,00	356.352.777.047,00	356.352.777.047,00	-

Rincian perbedaan antara LRA dan LO disajikan pada Lampiran 58.

5.4.2.3 SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL KEGIATAN OPERASIONAL

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2024 (Rp)	TA. 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
	SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL	**139.118.938.564,12**	**305.821.851.096,53**	**(166.702.912.532,41)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Surplus/Defisit Operasional Kegiatan Operasional dalam Tahun 2024 dan 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, maka terdapat penurunan sebesar Rp166.702.912.532,41 yang merupakan Pendapatan-LO dikurangi dengan Beban.

5.4.3 SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2024 (Rp)	TA. 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
	SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL	**(8.169.225.401,44)**	**(4.742.756.477,12)**	**(3.426.468.924,32)**

Jumlah tersebut merupakan Saldo Surplus/Defisit Operasional Kegiatan Non Operasional dalam Tahun 2024 dan 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, maka terdapat penurunan sebesar Rp3.426.468.924,32.

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional terdiri dari hasil penjualan aset pada Tahun 2024 baik yang telah dihapuskan sesuai dengan SK Gubernur pada Tahun 2024 dan yang belum terbit SK penghapusannya tetapi telah dijual sebesar Rp585.058.880,00 dikurangi nilai buku aset tersebut sebesar Rp6.264.956.958,94 sehingga terdapat defisit sebesar Rp5.679.898.078,94 dan penghapusan aset sebesar Rp2.489.327.322,50 yaitu:

DAFTAR PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN ASET TAHUN 2024

OPD/INSTANSI	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	HARGA PENJUALAN	SELISIH	JENIS BMD	KET
DINAS PENDIDIKAN	3.352.388.400,00	3.115.087.656,38	237.300.743,62	8.817.000,00	(228.483.744)	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS PENDIDIKAN	2.693.286.690,14	1.538.665.151,38	1.154.621.538,76	22.207.500,00	(1.132.414.039)	Gedung dan Bangunan	Penjualan
DINAS PENDIDIKAN	-	-	-	91.138.000,00	91.138.000	Sisa Bongkaran Bangunan	Penjualan
DINAS PENDIDIKAN	2.086.395.205,00	3.436.992,00	2.082.958.213,00	1.812.000,00	(2.081.146.213)	Aset Tetap Lainnya	Penjualan
DINAS KESEHATAN	1.415.518.016,81	1.415.518.016,81	-	4.450.000,00	4.450.000	Peralatan dan Mesin	Penjualan
RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	-	-	-	150.000,00	150.000	Peralatan dan Mesin	Penjualan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M NATSIR	4.697.525.293,36	4.697.525.293,36	-	14.380.000,00	14.380.000	Peralatan dan Mesin	Penjualan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	-	-	-	6.500.000,00	6.500.000	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS SOSIAL	-	-	-	350.000,00	350.000	Sisa Bongkaran Bangunan	Penjualan
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	457.777.494,34	457.759.014,34	18.480,00	4.762.000,00	4.743.520	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	164.625.500,00	164.625.500,00	-	710.000,00	710.000	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS KEBUDAYAAN	500.086.950,00	500.086.950,00	-	2.200.000,00	2.200.000	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.686.226.365,00	2.663.570.290,28	22.656.074,72	32.500.000,00	9.843.925	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.150.791.000,00	167.588.140,00	983.202.860,00	2.100.000,00	(981.102.860)	Gedung dan Bangunan	Penjualan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	550.000,00	550.000	Sisa Bongkaran Bangunan	Penjualan
DINAS PARIWISATA	1.037.437.586,00	1.028.437.586,00	9.000.000,00	5.300.000,00	(3.700.000)	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS PERKEBUNAN DAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA	131.528.684,00	131.528.684,00	-	746.000,00	746.000	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.035.189.500,00	1.034.683.500,16	505.999,84	17.391.000,00	16.885.000	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	998.650.001,60	-	998.650.001,60	109.129.000,00	(889.521.002)	Aset Tetap Lainnya	Penjualan
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	153.276.706,00	153.276.706,00	-	450.000,00	450.000	Peralatan dan Mesin	Penjualan
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	87.390.500,00	87.390.500,00	-	2.400.000,00	2.400.000	Peralatan dan Mesin	Penjualan
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	12.500.000,00	12.500.000	Sisa Bongkaran Bangunan	Penjualan
BIRO ORGANISASI	318.933.849,70	318.533.849,54	400.000,16	1.750.000,00	1.350.000	Peralatan dan Mesin	Penjualan
SEKRETARIAT DPRD	5.367.135.337,00	5.085.482.836,44	281.652.500,56	228.481.380,00	(53.171.121)	Peralatan dan Mesin	Penjualan
BADAN PENDAPATAN DAERAH	225.242.997,49	225.242.997,49	-	1.300.000,00	1.300.000	Peralatan dan Mesin	Penjualan
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	525.495.875,48	525.495.875,48	-	2.450.000,00	2.450.000	Peralatan dan Mesin	Penjualan
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	106.242.612,50	106.242.612,50	-	435.000,00	435.000	Peralatan dan Mesin	Penjualan
BADAN PENGHUBUNG	589.398.462,00	95.407.915,32	493.990.546,68	-	(493.990.547)	Gedung dan Bangunan	Tidak dilakukan penjualan
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	248.292.500,00	248.292.500,00	-	1.400.000,00	1.400.000	Peralatan dan Mesin	Penjualan
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	-	-	-	7.850.000,00	7.850.000	Sisa Bongkaran Bangunan	Penjualan
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	196.234.438,00	196.234.438,00	-	850.000,00	850.000	Peralatan dan Mesin	Penjualan
	30.225.069.964,42	**23.960.113.005,48**	**6.264.956.958,94**	**585.058.880,00**	**(5.679.898.078,94)**		

Rincian penghapusan aset sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

No	SKPD	ASET TETAP			KET
		NP	AKM	NB	
1	DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1.558.077.322,50	-	1.558.077.322,50	ke BNPB dan Kab. Tanah Datar
2	SEKRETARIAT DPRD	40.124.342,00	40.124.342,00	-	ke KPID dan PSI
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH/PPA	1.344.040.250,00	412.790.250,00	931.250.000,00	ke Kota Padang, pengadilan tinggi
4	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	6.495.000,00	6.495.000,00	-	Media Minangkabau Sumbar News
	JUMLAH	**2.948.736.914,50**	**459.409.592,00**	**2.489.327.322,50**	

5.4.4 POS LUAR BIASA

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2024 (Rp)	TA. 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
	POS LUAR BIASA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.5.1	**Pendapatan Luar Biasa-LO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.5.1	**Beban Luar Biasa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Pos Luar Biasa dalam Tahun 2024 dan 2023 yaitu pendapatan luar biasa dikurangi dengan beban luar biasa. Pos Luar Biasa tersebut pada tahun 2024 tidak ada realisasi.

5.4.5 SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2024 (Rp)	TA. 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
	SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL	**130.949.713.162,68**	**301.079.094.619,41**	**(170.129.381.456,73)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Surplus/Defisit Laporan Operasional dalam Tahun 2024 dan 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, maka terdapat penurunan sebesar Rp170.129.381.456,73.

Surplus/Defisit Laporan Operasional yaitu :

No	Uraian	Jumlah
1	Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	139.118.938.564,12
2	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	(8.169.225.401,44)
3	Pos Luar Biasa	0,00
	J U M L A H	**130.949.713.162,68**

5.5 PENJELASAN ATAS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Arus Kas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.5.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi. Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tanpa mengandalkan sumber dana dari luar.

5.5.1.1 ARUS MASUK KAS

Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 sebesar Rp6.481.833.624.525,20 dan Tahun 2023 sebesar Rp6.262.531.083.524,68 bila dibandingkan dengan Tahun 2023 terdapat kenaikan Arus Masuk Kas Tahun 2024 sebesar Rp219.302.541.000,52 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
I	**Arus Masuk Kas**		
1	Penerimaan Pajak Daerah	2.338.112.925.264,00	2.236.722.695.545,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	382.306.933.091,49	16.049.240.433,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	122.018.602.181,00	117.084.599.941,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Syah	99.540.098.449,71	413.570.911.966,68
5	Penerimaan Perimbangan- Dana Bagi Hasil	196.436.458.000,00	186.817.960.171,00
6	Penerimaan Perimbangan Dana Alokasi Umum	2.146.789.947.987,00	1.989.337.430.162,00
7	Penerimaan Perimbangan Dana Alokasi Khusus	1.139.840.043.552,00	1.252.271.634.806,00
8	Penerimaan Dana Penyesuaian/DID	13.249.284.000,00	8.621.025.000,00
9	Penerimaan Hibah	14.294.794.000,00	14.341.915.500,00
10	Penerimaan Lainnya	29.244.538.000,00	27.713.670.000,00
11	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	**6.481.833.624.525,20**	**6.262.531.083.524,68**

5.5.1.2 ARUS KELUAR KAS

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 sebesar Rp5.759.158.550.249,61 dan Tahun 2023 sebesar Rp5.361.015.660.569,35 bila dibandingkan dengan Tahun 2023 terdapat kenaikan Arus Keluar Kas

dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 sebesar Rp398.142.889.680,26 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
II	**Arus Keluar Kas**		
1	Pembayaran Pegawai	2.490.554.904.931,00	2.195.331.447.151,00
2	Pembayaran Barang	1.803.917.885.970,85	1.964.366.347.631,35
3	Pembayaran Subsidi	1.500.000.000,00	0,00
4	Pembayaran Hibah	317.914.266.876,00	260.213.402.169,00
5	Pembayaran Bantuan Sosial	130.447.500,00	0,00
6	Pembayaran Tak Terduga	5.222.259.811,30	0,00
7	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Ke Kab/Kota	1.098.402.469.691,00	908.031.786.786,00
8	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Kab/Kota	41.516.315.469,46	33.072.676.832,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	**5.759.158.550.249,61**	**5.361.015.660.569,35**

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi adalah sebagai berikut:

Arus Masuk Kas	Rp6.481.833.624.525,20
Arus Keluar Kas	(Rp5.759.158.550.249,61)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**Rp722.675.074.275,59**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2024 sebesar Rp722.675.074.275,59 merupakan selisih surplus antara Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas.

5.5.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi selama Tahun 2024 mengalami defisit sebesar **(Rp784.921.135.994,35)** yang merupakan selisih antara Arus Kas Masuk dikurangi Arus Kas Keluar, dengan uraian sebagai berikut:

5.5.2.1 ARUS MASUK KAS

Arus Masuk Kas merupakan penerimaan kas yang diharapkan diperoleh dari penjualan Aset Daerah yang mana pada Tahun 2024 berasal dari pendapatan atas penjualan Peralatan dan Mesin yang sudah tidak digunakan lagi untuk operasional pemerintah daerah.

Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 sebesar

Rp585.058.880,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.347.353.327,00 Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023, maka terdapat penurunan pada Tahun 2024 sebesar Rp762.294.447,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
I	**Arus Masuk Kas**		
1	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
2	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	1.347.353.327,00
3	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
4	Penjualan atas Aset Lainnya	585.058.880,00	0,00
5	Pengembalian Dana Bergulir	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	**585.058.880,00**	**1.347.353.327,00**

5.5.2.2 ARUS KELUAR KAS

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi pada Tahun 2024 sebesar Rp785.506.194.874,35 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.011.975.692.930,52 merupakan Arus Keluar Kas atas Aktivitas Investasi aset non keuangan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023, maka terdapat penurunan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi pada Tahun 2024 sebesar Rp226.469.498.056,17 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
I	**Arus Keluar Kas**		
1	PerolehanTanah	2.464.373.669,00	2.854.444.000,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	189.146.437.545,00	306.440.774.536,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	212.226.274.577,89	318.703.801.324,52
4	Perolehan Jalan. Irigasi dan Jaringan	317.619.554.844,46	323.497.539.237,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	44.031.478.988,00	40.479.133.833,00
6	Perolehan Aset Lainnya	18.075.250,00	
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	**785.506.194.874,35**	**1.011.975.692.930,52**

5.5.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00.

5.5.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan maupun pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris pada Tahun 2024 sebesar (Rp466.528.711,00) berupa Arus Masuk Kas sebesar Rp247.245.079.465,20 dan Arus Keluar Kas sebesar Rp247.711.608.176,20 dengan rincian sebagai berikut:

5.5.4.1 ARUS MASUK KAS

Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris pada Tahun 2024 sebesar Rp247.245.079.465,20 dan Tahun 2023 sebesar Rp270.838.031.924,00 bersumber dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp247.245.079.465,20 dan Tahun 2023 sebesar Rp270.838.031.924,00 maka Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp23.592.952.458,80. Rincian dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pajak	Jumlah (Rp)
1	PPH 21	114.474.449.341,02
2	PPH 22	6.958.892.116,56
3	PPH 23	3.604.283.676,92
4	PPH 4(2)	11.537.905.988,00
5	PPN	110.669.548.342,70
	JUMLAH	**247.245.079.465,20**

5.5.4.2 ARUS KELUAR KAS

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja serta pembiayaan pemerintah daerah berupa perhitungan pihak ketiga melalui kas daerah maupun Bendahara Pengeluaran. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris pada Tahun 2024 sebesar Rp247.711.608.176,20 dan Tahun 2023 sebesar Rp270.557.263.730,00 berasal dari pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan serta pajak pertambahan nilai sebesar Rp247.245.079.465,20 dan koreksi kurang SiLPA sebesar Rp466.528.711,00 berupa koreksi kas BOS Tahun lalu pada Dinas Pendidikan sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2023, maka terdapat penurunan sebesar Rp22.845.655.553,80. Seluruh penerimaan telah disetor pada Tahun 2024 sehingga pada akhir Tahun 2024 tidak ada penerimaan pajak yang terutang.

5.5.5 KENAIKAN/PENURUNAN KAS

	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	Kenaikan/Penurunan Kas	**(62.712.590.429,76)**	**(108.832.148.454,19)**

Kenaikan/ Penurunan Kas pada Tahun 2024 sebesar (Rp62.712.590.429,76) dan Tahun 2023 sebesar (Rp108.832.148.454,19) merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023, maka terdapat kenaikan Kas pada Tahun 2024 sebesar Rp46.119.558.024,43.

5.5.6 SALDO AWAL KAS

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
I	**Saldo Awal Kas**		
1	Kas di Kas Daerah	148.044.084.493,35	220.852.557.928,75
2	Kas BLUD	30.888.069.226,84	38.788.664.902,63
3	Kas BOS	1.510.360.705,00	2.179.476.928,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	4.100.000,00	528.993.120,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	930.000,00	0,00
6	Kas Lainnya	0,00	26.930.000.000,00
7	Koreksi Kas	0,00	0,00
Jumlah Saldo Awal		**180.447.544.425,19**	**289.279.692.879,38**

Jumlah Saldo Awal Kas Tahun 2024 sebesar Rp180.447.544.425,19 dan Tahun 2023 sebesar Rp289.279.692.879,38. Dibanding Tahun 2023 terdapat penurunan sebesar Rp108.832.148.454,19.

5.5.7 KAS PER 31 DESEMBER 2024/2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
I	**Saldo Kas Daerah**	**88.147.677.797,12**	**148.044.084.493,35**
1	Saldo Kas di Kas Daerah	88.147.677.797,12	148.044.084.493,35
2	Deposito	0,00	0,00
II	**Saldo Kas di Kas Bendahara**	**1.550.785.134,31**	**1.515.390.705,00**
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	323.138.845,31	4.100.000,00
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.600.000,00	930.000,00
5	Saldo Kas di Bendahara BOS/BOSP	1.222.046.289,00	1.510.360.705,00
III	**Saldo Kas BLUD**	**28.036.491.064,00**	**30.888.069.226,84**
1	RSAM Bukittinggi	11.552.737.052,51	24.807.541.142,01
2	RSJ Saanin	1.787.968.539,66	2.672.093.078,66
3	RSUD M. Natsir	4.741.919.520,50	493.250.694,50
4	RSUD Pariaman	5.030.961.338,03	2.134.799.013,67
5	Dinas Kesehatan	1.912.588.192,99	270.234.757,00
6	Dinas Pendidikan	3.010.316.420,31	510.150.541,00
IV	**Saldo Kas Lainnya**	**0,00**	**0,00**
1	RSUD M. Natsir Solok	0,00	0,00
2	Dinas Pendidikan	0,00	0,00
V	**Saldo Pajak yang belum disetor**	**0,00**	**0,00**
	Jumlah Kas Per 31 Desember 2024/2023	**117.734.953.995,43**	**180.447.544.425,19**

5.6. PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi dan Ekuitas Akhir. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 berasal dari Saldo Ekuitas Awal ditambah /dikurang dengan Surplus/Defisit-LO dan perubahan ekuitas lainnya.

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2024 di Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp 11.796.950.964.552,20 adalah nilai Ekuitas yang juga tersaji di Neraca per 31 Desember 2024.

Komponen perhitungan Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

NO	URAIAN	2024	2023
1	Ekuitas Awal	11.698.383.180.031,40	11.505.410.775.094,10
2	Surplus / Defisit – LO	130.949.713.162,68	301.079.094.619,41
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar	(32.381.928.641,89)	(108.106.689.682,09)
4	**Ekuitas Akhir**	**11.796.950.964.552,20**	**11.698.383.180.031,40**

Tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal pada Neraca awal per 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp11.698.383.180.031,40.

2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp130.949.713.162,68.

Perhitungan Defisit-LO adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	2024	2023
1	Pendapatan_LO	6.555.449.374.755,36	6.455.678.341.331,62
2	Beban	6.416.330.436.191,24	6.149.856.490.235,09
3	**Surplus/Defisit Kegiatan Operasional**	**139.118.938.564,12**	**305.821.851.096,53**
4	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	(8.169.225.401,44)	(4.742.756.477,12)
5	**Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa**	**130.949.713.162,68**	**301.079.094.619,41**
6	Pos Luar Biasa	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO		**130.949.713.162,68**	**301.079.094.619,41**

3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Penjelasan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar (Rp32.381.928.641,89) berasal dari Koreksi Tambah Ekuitas sejumlah Rp415.690.225.713,54 dan Koreksi Kurang Ekuitas sebesar (Rp448.072.154.355,43) dengan uraian dalam tabel berikut:

❖ KOREKSI TAMBAH EKUITAS

NO	URAIAN	2024	2023
1	Koreksi Aset Lancar	96.297.145.207,74	116.424.435.199,87
2	Koreksi Piutang dan Penyisihan Piutang	8.350.473.870,81	33.910.540.133,39
3	Koreksi Investasi Jangka Panjang	70.663.192.237,48	72.483.801.902,71
4	Koreksi Aset Tetap	54.077.941.240,26	137.689.589.172,30
5	Koreksi Aset Lainnya	91.719.680.247,47	19.603.789,29
6	Koreksi Kewajiban Jangka Pendek	2.344.222.805,78	533.154.835,44
7	Koreksi Kewajiban Jangka Panjang	92.237.570.104,00	0,00
Jumlah Koreksi Tambah Ekuitas		**415.690.225.713,54**	**361.061.125.033,00**

Penjelasan Koreksi Tambah sebagai berikut:

1. Koreksi Aset Lancar sebesar Rp96.297.145.207,74 berasal dari penyesuaian terhadap kas, persediaan, beban bayar dimuka, dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD	KOREKSI KAS	KOREKSI PERSEDIAAN	KOREKSI BEBAN DI BAYAR DIMUKA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	DINAS KESEHATAN		94.531.703.286,94		94.531.703.286,94
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT		234.728.252,00		234.728.252,00
3	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN		27.724.563,00		27.724.563,00
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK		142.412.710,00		142.412.710,00
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN		844.800.395,80		844.800.395,80
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		187.602.500,00		187.602.500,00
7	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		328.173.500,00		328.173.500,00
	JUMLAH	**-**	**96.297.145.207,74**	**-**	**96.297.145.207,74**

2. Koreksi Piutang dan Penyisihan Piutang sebesar Rp8.350.473.870,81 merupakan penyesuaian terhadap piutang dan beban penyisihan piutang tahun lalu dan Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD	KOREKSI PIUTANG	KOREKSI PENYISIHAN PIUTANG	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	DINAS PENDIDIKAN		225.395,07	225.395,07
2	DINAS KESEHATAN	3.225.000,00	112.594.826,00	115.819.826,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT	140.028,00	517.602.699,56	517.742.727,56
4	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN		81.141.004,50	81.141.004,50
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK		180.877.571,12	180.877.571,12
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN		345.766,00	345.766,00
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		63.496.850,00	63.496.850,00
8	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6.441.442.000,00	610.908.941,47	7.052.350.941,47
9	BADAN PENDAPATAN DAERAH	10.997.970,00	327.475.819,09	338.473.789,09
	JUMLAH	**6.455.804.998,00**	**1.894.668.872,81**	**8.350.473.870,81**

3. Koreksi Investasi Jangka Panjang sebesar Rp70.663.192.237,48 merupakan penyesuaian terhadap penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas laba perusahaan Tahun 2023 dan Tahun 2024 dan penyisihan dana bergulir, dengan rincian sebagai berikut :
   a. Koreksi terhadap pencatatan Penyertaan Modal BUMD sebesar Rp9.059.276.534,17 yang awalnya tercatat sesuai Laporan Keuangan Unaudit Tahun Buku 2023 pada PT. Bank Nagari dan PT. Bangun Askrida (laba tahun 2022);
   b. Pengakuan penyertaan modal BUMD sesuai Laporan Keuangan Unaudit Tahun buku 2024 sebesar Rp61.601.373.203,31 dan;
   c. Koreksi penyisihan dana bergulir sebesar Rp2.541.500,00.

4. Koreksi Aset Tetap sebesar Rp54.077.941.240,26 berasal dari koreksi nilai, mutasi antar SKPD, reklasifikasi, hibah dan penyesuaian nilai aset dan akumulasi penyusutan, dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD	KOREKSI ASET TETAP	KOREKSI AKM. PENYUSUTAN ASET TETAP	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	DINAS PENDIDIKAN	26.918.027.048,40		26.918.027.048,40
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK	3.556.283.500,00	1.599.997,20	3.557.883.497,20
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	190.111.873,19		190.111.873,19
4	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG		3.499.504,90	3.499.504,90
5	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI		2,44	2,44
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KWS. PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		0,01	0,01
7	DINAS PANGAN	50.906.250,00		50.906.250,00
8	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		2,20	2,20
9	DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1.808.926.349,76	6,32	1.808.926.356,08
10	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	7.770.000,00		7.770.000,00
11	DINAS KEHUTANAN		1,32	1,32
12	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	164.624.999,80		164.624.999,80
13	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	304.800.000,08		304.800.000,08
14	BIRO UMUM	18.400.000,00	0,40	18.400.000,40
15	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	20.298.931.704,16		20.298.931.704,16
16	BADAN PENDAPATAN DAERAH		0,08	0,08
17	BADAN PENGHUBUNG	754.060.000,00		754.060.000,00
	JUMLAH	**54.072.841.725,39**	**5.099.514,87**	**54.077.941.240,26**

5. Koreksi Aset Lainnya sebesar Rp91.719.680.247,47 berasal dari koreksi nilai reklasifikasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga ke properti investasi dengan bertambahnya nilai sesuai hasil Penilaian/appraisal oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & rekan Tahun 2023 dan;

6. Koreksi Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp2.344.222.805,78 adalah penyesuaian terhadap utang jangka pendek tahun lalu dan koreksi utang, dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD	KOREKSI PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	KOREKSI UTANG BELANJA	KOREKSI UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN		35.638.682,00		35.638.682,00
2	DINAS KESEHATAN		4.759.426,00		4.759.426,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT		270.621.984,00		270.621.984,00
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK		846.474.324,36		846.474.324,36
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN		44.395.726,42		44.395.726,42
6	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI		165.831,00		165.831,00
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		142.710,00		142.710,00
8	DINAS P. PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PP & KB		814.435,00		814.435,00
9	DINAS PERHUBUNGAN		206.952,00		206.952,00
10	DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		74.375,00		74.375,00
11	DINAS KEHUTANAN		63.891.970,00		63.891.970,00
12	BIRO HUKUM		33.686,00		33.686,00
13	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		607.105,00		607.105,00
14	BADAN PENDAPATAN DAERAH		1.075.368.719,00		1.075.368.719,00
15	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		859.380,00		859.380,00
16	BADAN PENGHUBUNG		167.500,00		167.500,00
	JUMLAH	**-**	**2.344.222.805,78**	**-**	**2.344.222.805,78**

7. Koreksi Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp92.237.570.104,00 merupakan reklasifikasi utang jangka panjang ke ekuitas karena dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau.

❖ KOREKSI KURANG EKUITAS

NO	URAIAN	2024	2023
1	Koreksi Aset Lancar	(342.082.569.257,98)	(322.708.127.213,79)
2	Koreksi Piutang dan Penyisihan Piutang	(1.239.647.270,45)	(79.979.588,00)
3	Koreksi Investasi Jangka Panjang	(0,00)	(1.287.000,00)
4	Koreksi Aset Tetap	(40.023.283.061,89)	(129.220.431.705,22)
5	Koreksi Aset Lainnya	(25.328.798.590,72)	(8.343.280.174,08)
6	Koreksi Kewajiban Jangka Pendek	(39.397.856.174,39)	(8.814.709.034,00)
Jumlah Koreksi Kurang Ekuitas		**(448.072.154.355,43)**	**(469.167.814.715,09)**

Penjelasan Koreksi Kurang sebagai berikut:

1. Koreksi Aset Lancar sebesar (Rp342.082.569.257,98) berasal dari penyesuaian terhadap Persediaan, Beban Bayar Dimuka, dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD	KOREKSI KAS	KOREKSI PERSEDIAAN	KOREKSI BEBAN DI BAYAR DIMUKA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN	(466.528.711,00)			(466.528.711,00)
2	DINAS KESEHATAN		(121.306.527.436,64)		(121.306.527.436,64)
3	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG		(9.548.729.505,00)		(9.548.729.505,00)
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KWS. PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		(116.031.151.639,40)		(116.031.151.639,40)
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		(179.130.000,00)		(179.130.000,00)
6	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			(18.798.679,00)	(18.798.679,00)
7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		(94.531.703.286,94)		(94.531.703.286,94)
	JUMLAH	**(466.528.711,00)**	**(341.597.241.867,98)**	**(18.798.679,00)**	**(342.082.569.257,98)**

2. Piutang dan Penyisihan Piutang sebesar (Rp1.239.647.270,45) merupakan penyesuaian terhadap piutang dan beban penyisihan piutang tahun lalu dan Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD	KOREKSI PIUTANG	KOREKSI PENYISIHAN PIUTANG	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	DINAS KESEHATAN	(78.306.724,00)		(78.306.724,00)
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT	(19.875.327,00)		(19.875.327,00)
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	(17.400,00)		(17.400,00)
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		(1.141.447.819,45)	(1.141.447.819,45)
	JUMLAH	**(98.199.451,00)**	**(1.141.447.819,45)**	**(1.239.647.270,45)**

3. Koreksi Aset Tetap sebesar (Rp40.023.283.061,89) merupakan koreksi nilai, mutasi antar SKPD, reklas, hibah dan penyesuaian nilai dan lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD	KOREKSI ASET TETAP	KOREKSI AKM. PENYUSUTAN ASET TETAP	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	DINAS KESEHATAN	(943.031.700,00)	(5,22)	(943.031.705,22)
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK	(183.583.500,00)		(183.583.500,00)
3	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	(304.800.000,08)	(16.999.003,69)	(321.799.003,77)
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KWS. PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	(3.123.500,00)		(3.123.500,00)
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(198.995.000,00)		(198.995.000,00)
6	SATPOL PP		(0,44)	(0,44)
7	DINAS SOSIAL		(0,92)	(0,92)
8	DINAS PANGAN	(164.625.000,00)	(1,27)	(164.625.001,27)
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		(0,76)	(0,76)
10	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		(4,50)	(4,50)
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		(0,01)	(0,01)
12	DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	(1.558.077.322,50)	(946.448.047,96)	(2.504.525.370,46)
13	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		(0,36)	(0,36)
14	BIRO UMUM		(0,08)	(0,08)
15	SEKRETARIAT DPRD		(0,76)	(0,76)
16	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(34.267.369.248,12)	(1.375.807.425,30)	(35.643.176.673,42)
17	BADAN PENDAPATAN DAERAH	(18.400.000,00)	(1.200.000,00)	(19.600.000,00)
18	BADAN PENGHUBUNG	(160.799,92)		(160.799,92)
19	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	(40.662.500,00)		(40.662.500,00)
	JUMLAH	**(37.682.828.570,62)**	**(2.340.454.491,27)**	**(40.023.283.061,89)**

4. Koreksi Aset Lainnya sebesar (Rp25.328.798.590,72) berasal dari penyesuaian terhadap koreksi nilai, mutasi antar SKPD, reklasifikasi dan penghapusan serta pengakuan akumulasi penyusutan properti investasi, dengan rincian sebagai berikut :

   a. Koreksi Aset Lainnya, yaitu :

No	SKPD	KOREKSI ASET RUSAK BERAT/USANG	KOREKSI ASET TIDAK BERWUJUD	KOREKSI AKM. PENYUSUTAN ASET RUSAK BERAT/USANG	KOREKSI AMORTISASI PENYUSUTAN ASET TIDAK BERWUJUD	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	(18.480,00)				(18.480,00)
2	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(983.060.266,88)				(983.060.266,88)
3	DINAS PARIWISATA	(9.000.000,00)				(9.000.000,00)
4	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	(999.156.001,44)				(999.156.001,44)
5	BIRO ORGANISASI	(400.000,16)				(400.000,16)
6	SEKRETARIAT DPRD	(281.652.500,56)				(281.652.500,56)
7	BADAN PENGHUBUNG	(493.990.546,68)				(493.990.546,68)
	JUMLAH	(2.767.277.795,72)	-	-	-	(2.767.277.795,72)

   b. Koreksi pengakuan akumulasi penyusutan property investasi sebesar (Rp22.561.520.795,00)

5. Koreksi Kewajiban Jangka Pendek sebesar (Rp39.397.856.174,39) adalah penyesuaian terhadap utang jangka pendek tahun lalu dan Tahun 2024 serta koreksi utang, dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	KOREKSI PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	KOREKSI UTANG BELANJA	KOREKSI UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	DINAS KESEHATAN		(13.020.200,00)		(13.020.200,00)
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT		(10.710.177.413,00)		(10.710.177.413,00)
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK		(30.661.511,00)		(30.661.511,00)
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN		(266.347.547,72)		(266.347.547,72)
5	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG		(10.000,00)		(10.000,00)
6	DINAS SOSIAL		(876.481,00)		(876.481,00)
7	DINAS P. PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PP & KB		(71.100,00)		(71.100,00)
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		(72.300,00)		(72.300,00)
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		(104.377,00)		(104.377,00)
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		(30.000,00)		(30.000,00)
11	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PTSP		(21.000,00)		(21.000,00)
12	DINAS KEBUDAYAAN		(425.000,00)		(425.000,00)
13	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		(258.700,00)		(258.700,00)
14	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		(1.339.647,00)		(1.339.647,00)
15	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		(645.000,00)		(645.000,00)
16	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		(932.510,00)		(932.510,00)
17	BIRO UMUM		(3.150.449,00)		(3.150.449,00)
18	SEKRETARIAT DPRD		(302.400,00)		(302.400,00)
19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		(1.139.190,00)		(1.139.190,00)
20	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(8.566.666,67)		(27.064.718.000,00)	(27.073.284.666,67)
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		(342.100,00)		(342.100,00)
22	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		(258.235,00)		(258.235,00)
23	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		(25.500,00)		(25.500,00)
24	BADAN PENGHUBUNG		(1.293.838.250,00)		(1.293.838.250,00)
25	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI		(92.000,00)		(92.000,00)
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		(430.597,00)		(430.597,00)
	JUMLAH	(8.566.666,67)	(12.324.571.507,72)	(27.064.718.000,00)	(39.397.856.174,39)

4. EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir Tahun 2024 adalah sebesar Rp11.796.950.964.552,20 angka ini sama dengan yang disajikan pada Neraca.

5.7. Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja serta Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sejak tahun 2016, terdapat akun-akun baru pada Neraca dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyisihan Piutang;
2. Beban Dibayar Dimuka;
3. Pendapatan Diterima Dimuka; dan
4. Utang Belanja.

Sedangkan pada Laporan Operasional:

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi; dan
2. Beban Penyisihan Piutang.

Selisih antara LRA dan LO telah dijelaskan pada Catatan atas Laporan Operasional. Rekapitulasi selisih antara LRA dan LO dapat dilihat pada Lampiran dalam Laporan Keuangan ini.

BAB VI.
INFORMASI NON KEUANGAN

PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA BARAT

BAB VI
INFORMASI NON KEUANGAN

INFORMASI PENTING TERKAIT PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024

A. KHUSUS

1. Organisasi Pemerintah Daerah

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama DPRD telah menindaklanjutinya dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2 dengan Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat: (2-100/2021).

Perangkat Daerah disusun sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Tipe A;
b. Sekretariat DPRD Tipe B;
c. Inspektorat Daerah Tipe A;
d. Dinas Daerah, terdiri dari:
    1) Dinas Pendidikan (A);
    2) Dinas Kesehatan (A);
    3) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (B);
    4) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi (B);
    5) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (B);
    6) Dinas Sosial (A);
    7) Satuan Polisi Pamong Praja (B);
    8) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (B);
    9) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (A);
    10) Dinas Pangan (A);
    11) Dinas Lingkungan Hidup (B);
    12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (A);
    13) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (B);
    14) Dinas Perhubungan (B);
    15) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (A);
    16) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (A);
    17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (B);
    18) Dinas Pemuda dan Olah Raga (A);
    19) Dinas Kebudayaan (B);
    20) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (A);
    21) Dinas Kelautan dan Perikanan (A);
    22) Dinas Pariwisata (A);
    23) Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (A);

24) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (B);
25) Dinas Kehutanan (A);
26) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (A);
27) Dinas Perindustrian & Perdagangan (A);

e. Badan Daerah, terdiri dari :
   1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (A);
   2) Badan Penelitian & Pengembangan (B);
   3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (B);
   4) Badan Pendapatan Daerah (B);
   5) Badan Kepegawaian Daerah (A);
   6) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (A);
   7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (B);
   8) Badan Penghubung;
   9) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

f. Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD Dinas;

g. Badan Daerah dapat dibentuk UPTD Badan;

h. Gubernur dibantu tiga staf ahli;

i. Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPT Dinas Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah formal dan non formal;

j. Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPT Dinas di Bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;

k. Rumah Sakit Daerah bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan.

2. Nama-nama UPTD pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat:

a.	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang;
	2) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Bukittinggi;
	3) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Pariaman;
	4) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Payakumbuh;
	5) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Solok;
	6) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Batusangkar;
	7) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang Panjang;
	8) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Painan;
	9) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lubuk Basung;
	10) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lubuk Sikaping;
	11) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sijunjung;
	12) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sawahlunto;

	13) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Simpang Ampek;
	14) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Pulau Punjung;
	15) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang Aro;
	16) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Arosuka;
	17) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sarilamak;
	18) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kota Pariaman;
	19) UPTD Sistem Informasi Pendapatan Daerah.
b.	**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**
	1) UPTD Penilaian Kompetensi
c.	**DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA**
	1) UPTD Balai Perlindungan Tanaman dan Hortrikultura;
	2) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
	3) Balai Benih Induk Tanaman Padi Palawija dan Hortikultura;
	4) Balai Mekanisme Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura dan Perkebunan;
	5) UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian;
	6) UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih Perlindungan Tanaman Perkebunan.
d.	**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**
	1) UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat (RSHSB);
	2) UPTD Ternak Ruminansia;
	3) UPTD Ternak Unggas;
	4) UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan;
	5) UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Tuah Sakato.
e.	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**
	1) UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I (Carocok);
	2) UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II (Air Bangis);
	3) UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III (Sikakap);
	4) UPTD Balai Laboratorium Pengujian dan Penetapan Mutu Hasil Perikanan;
	5) UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau "Teluk Buo";
	6) UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
e.	**DINAS KEHUTANAN**
	1) UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan;

	2) UPTD KPHL Pasaman Unit I;
	3) UPTD KPHL Pasaman Barat Unit II;
	4) UPTD KPHL Limapuluh Kota Unit III;
	5) UPTD KPHL Agam Raya Unit IV;
	6) UPTD KPHL Bukit Barisan Unit V;
	7) UPTD KPHL Sijunjung Unit VI;
	8) UPTD KPHL Solok Unit VII;
	9) UPTD KPHP Solok Selatan Unit VIII;
	10) UPTD KPHP Dharmasraya Unit IX;
	11) UPTD KPHP Pesisir Selatan Unit X;
	12) UPTD KPHP Pagai Sipora Unit XI; dan
	13) UPTD KPHP Siberut Unit XII
f.	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
	1) UPTD Logam;
	2) UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
	3) UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri.
g.	**DINAS KOPERASI DAN UMKM**
	1) UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi
h.	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
	1) Balai Latihan Kerja Payakumbuh;
	2) Balai Latihan Kerja Padang Panjang;
	3) Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
	4) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I;
	5) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II;
	6) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III.
i.	**DINAS KESEHATAN**
	1) UPTD Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan;
	2) UPTD Laboratorium Kesehatan;
	3) UPTD Balai Kesehatan Indra Masyarakat;
	4) RSAM BUKITTINGGI;
	5) RSUD M. NATSIR;
	6) RSUD PARIAMAN;

	7) RSJ HB SA'ANIN;
	8) RS PARU SUMBAR.
j.	**DINAS PENDIDIKAN**
	1) Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
	Satuan Pendidikan :
	a) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I;
	b) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II;
	c) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III;
	d) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV;
	e) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V;
	f) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI;
	g) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII;
	h) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII.
k.	**DINAS SOSIAL**
	1) UPTD Panti Sosial Asuh Anak Bina Remaja "Budi Utama" Lubuk Alung;
	2) UPTD Panti Sosial Asuh Anak " Tri Murni" Padang Panjang;
	3) UPTD Panti Sosial Tresna Werdha "Sabai Nan Aluih" Sicincin;
	4) UPTD Panti Sosial Bina Netra "Tuah Sakato" Padang;
	5) UPTD Panti Sosial Karya Wanita "Andam Dewi" Solok;
	6) UPTD Panti Sosial Bina Remaja "Harapan" Padang Panjang;
	7) UPTD Panti Sosial Tresna Werdha "Kasih Sayang Ibu" Batusangkar;
	8) UPTD Panti Sosial Bina Grahita "Harapan Ibu" Padang.
l.	**DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI**
	1) UPTD Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Wilayah Utara;
	2) UPTD Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Wilayah Selatan.
m.	**DINAS BINA MARCA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**
	1) UPTD Workshop dan Peralatan;
	2) UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
	3) UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung;
	4) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah-I;
	5) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah-II;
	6) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah-III;

	7) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah-IV;
	8) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah-V;
	9) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah-VI.
n.	**DINAS PERHUBUNGAN**
	1) UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I;
	2) UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II.
o.	**DISPORA**
	1) UPTD Kebakatan Olahraga
p.	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
	1) UPTD Persampahan;
	2) UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup.
q.	**DINAS PANGAN**
	1) UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;
	2) UPTD Distribusi, Pasokan dan Akses Pangan.
r.	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**
	1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
s.	**DINAS KEBUDAYAAN**
	1) UPTD Museum Adityawarman;
	2) UPTD Taman Budaya.

3 . Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang diterbitkan Tahun 2024 adalah:

NO.	NOMOR PERDA	JUDUL PERATURAN DAERAH
1.	1 TAHUN 2024	PERHUTANAN SOSIAL
2.	2 TAHUN 2024	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023
3.	3 TAHUN 2024	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
4.	4 TAHUN 2024	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 - 2045
5.	5 TAHUN 2024	PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH, PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PENGELOLAAN MUSEUM
6.	6 TAHUN 2024	PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	NOMOR PERDA	JUDUL PERATURAN DAERAH
7.	7 TAHUN 2024	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NOMOR PERGUB	JUDUL PERATURAN GUBERNUR
1	1 TAHUN 2024	RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA
2	2 TAHUN 2024	PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
3	3 TAHUN 2024	RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024 – 2026
4	4 TAHUN 2024	TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024
5	5 TAHUN 2024	PERUBAHAN ATAS PEATURAN GUBERNUR NO 41 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
6	6 TAHUN 2024	POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL UPTD PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN MEDIS
7	7 TAHUN 2024	RENCANA AKSI DAERAH PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS 2024 – 2026
8	8 TAHUN 2024	POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH MENANGAH KEJURUAN NEGERI
9	9 TAHUN 2024	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG ROAD MAP REFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022 – 2026
10	10 TAHUN 2024	PERUBAHAN KEDUA ATAS PEATURAN GUBERNUR NO 41 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
11	11 TAHUN 2024	TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
12	12 TAHUN 2024	PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM MENYALURKAN PINJAMAN DENGAN POLA SUBSIDI BUNGA/MARGIN/BAGI HASIL DAN SUBSIDI IMBAL JASA PENJAMIN KEPADA USAHA MIKRO YANG TERKENA DAMPAK AKIBAT COVID 19
13	13 TAHUN 2024	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
14	14 TAHUN 2024	PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
15	15 TAHUN 2024	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024
16	16 TAHUN 2024	KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
17	17 TAHUN 2024	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
18	18 TAHUN 2024	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
19	19 TAHUN 2024	PENJABARAN PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN 2023
20	20 TAHUN 2024	PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NOMOR PERGUB	JUDUL PERATURAN GUBERNUR
21	21 TAHUN 2023	PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
22	22 TAHUN 2024	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NO 20 TAHUAN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024
23	23 TAHUN 2024	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NO 44 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGHARGAAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLTIK
24	24 TAHUN 2024	PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN
25	25 TAHUN 2024	PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG EKONOMI KREATIF
26	26 TAHUN 2024	POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI KESEHATAN OLAH RAGA MASYARAKAT DAN PELATIHAN KESEHATAN
27	27 TAHUN 2024	PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENILAIAN KOMPETENSI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
28	28 TAHUN 2024	PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KEHUTANAN
29	29 TAHUN 2024	PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

4) Pelaksanaan Likuidasi PT ANDALAS TUAH SAKATO dan PT DINAMIKA SUMBAR JAYA.

a. Berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat No.32/SB/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap permasalahan BUMD Provinsi Sumatera Barat, diketahui bahwa Perseroan Terbatas (PT) Andalas Tuah Sakato dan PT Dinamika Sumbar Jaya secara ekonomi tidak berkembang karena tidak mendapatkan laba dari masing-masing bisnisnya, sehingga mengalami rugi setiap tahunnya, yang pada akhirnya direkomendasikan DPRD untuk dilakukan pembubaran.

b. Menyikapi Rekomendasi DPRD tersebut, telah dilaksanakan RUPS-LB PT Andalas Tuah Sakato dan RUPS-LB PT Dinamika Sumbar Jaya masing-masing pada tanggal 29 Juni 2016 dan sesuai dengan Keputusan RUPS-LB kedua perusahaan tersebut tanggal 29 Juni 2016 pemegang saham menyetujui dilakukan likuidasi terhadap PT ATS dan PT Dinamika dan sekaligus dibentuk Tim Likuidasi sesuai Akta Notaris masing-masing Akta Berita Acara RUPS-LB PT ATS Nomor 232 tanggal 29 Juni 2016 dan Akta Berita Acara RUPS-LB PT Dinamika Nomor 230 tanggal 29 Juni 2016, dan dikuatkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500-885.1-2016, tanggal 1 Agustus 2016 tentang Pembentukan Tim Likuidasi PT Andalas Tuah Sakato, dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500-884.1-2016, tanggal 1 Agustus 2016 tentang Pembentukan Tim Likuidasi PT Dinamika Sumbar Jaya, hal ini artinya perusahaan tidak beroperasional lagi.

c. Tim Likuidasi sudah melakukan konsultasi ke Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan keputusan rapat Tim Likuidasi PT ATS dan PT Dinamika pada tanggal 1 Agustus 2016 dan dari hasil konsultasi ke Kementerian Hukum dan HAM bahwa dokumen likuidasi yang disampaikan Notaris ke Kementerian Hukum dan HAM sudah betul, namun arahan kepada Tim Likuidasi untuk proses selanjutnya harus dicabut dahulu Perda Pendirian kedua perusahaan tersebut, setelah itu baru dapat dilakukan pembayaran kewajiban hutang perusahaan, pesangon karyawan dan lain-lainya melalui penjualan aset perusahaan. Rangkaian proses likuidasi tersebut juga sudah dibahas bersama BPKP Perwakilan Sumatera Barat pada tanggal 2 September 2016, dengan hasil bahwa proses likuidasi tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2014 dan peraturan perundangan yang berlaku.

d. Setelah Perda dicabut nantinya dan setelah proses likuidasi dilakukan, dimana proses penyelesaian kewajiban dilakukan, maka nantinya dilakukan RUPS dan hasil keputusan RUPS disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM oleh Notaris dan setelah diperiksa seluruh dokumen penyelesaian baru ditetapkan perusahaan bahwa telah dilikuidasi.

e. Proses sebelum penetapan likuidasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dinamakan perusahaan tersebut (PT ATS dan PT Dinamika) dalam proses likuidasi, dan yang dilakukan oleh Tim Likuidasi yaitu rapat-rapat untuk menginventarisasi kewajiban dan aset perusahaan.

f. Melalui Nota Kepala Biro Perekonomian No.500/439/Perek-Sarana/2016 tanggal 5 Agustus 2016, telah disampaikan kepada Biro Hukum Ranperda Pembubaran /Pencabutan Perda Pendirian Kedua Perusahaan tersebut, untuk diagendakan pada Prolegda supaya dibahas pada perubahan APBD Tahun 2016.

g. Setelah Perda dicabut nantinya dan setelah proses likuidasi dilakukan, dimana proses penyelesaian kewajiban dilakukan, maka nantinya dilakukan RUPS dan hasil keputusan RUPS disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM oleh Notaris dan setelah diperiksa seluruh dokumen penyelesaian baru ditetapkan bahwa perusahaan telah dilikuidasi.

h. Biro Hukum melalui Surat Gubernur No.188/2650/Huk-2016 tanggal 30 Agustus 2016 telah menyampaikan Ranperda tentang Pencabutan Perda No. 13 Tahun 2007 tentang Pendirian PT ATS dan Ranperda tentang Pencabutan Perda No. 15 Tahun 2007 tentang Pendirian PT Dinamika, namun ditolak DPRD karena tidak ada Laporan Audit terhadap kedua Perseroan tersebut per 29 Juni 2016.

i. Telah disampaikan Laporan Audit untuk periode Januari tahun 2016 sampai tanggal 29 Juni 2016 atas Laporan Keuangan PT Dinamika dan Laporan Audit atas Laporan Keuangan PT ATS oleh Ketua Tim Likuidasi. Selanjutnya melalui Nota Dinas Kepala Biro Perekonomian No. 500/IIIa/Perek-2017 tgl 10 Februari 2017, telah disampaikan Laporan Audit atas Laporan Keuangan kedua perseroan tersebut kepada Biro Hukum dan sekaligus minta kepada Biro Hukum utk meneruskannya ke DPRD.

j. Namun karena Laporan Auditor yang disampaikan Ketua Tim Likuidasi PT Dinamika dan PT ATS tidak lengkap (belum final) sehingga Biro Hukum belum dapat menyampaikannya ke DPRD, maka melalui melalui Surat Kepala Biro Perekonomian No. 500/163/Sarana/Perek-2017 tgl 7 Maret 2017 diminta kepada

Ketua Tim Likuidasi untuk segera menyampaikan Laporan Audit kedua perseroan tersebut.

k. Karena belum juga disampaikan Laporan Audit final kedua perseroan tersebut ke Pemprov, maka melalui Surat Sekdaprov Nomor 500/757/Sarana-Perek/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal Laporan Auditor Independen PT Dinamika dan PT ATS, diminta kembali agar Ketua Tim Likuidasi segera menyampaikan Laporan Audit kedua perseroan tersebut.

l. Gubernur Sumatera Barat menyurati Ketua Tim Likuidasi melalui surat No.500/523/Sarana-Perek/2017 tanggal 15 September 2017 meminta agar disampaikan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan per 29 Juni 2016 PT Dinamika dan PT ATS kepada Biro Perekonomian paling lambat tanggal 29 September 2017.

m. Pada tanggal 25 September 2017 Ketua Tim Likuidasi telah menyampaikan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan per 29 Juni 2016 PT Dinamika dan PT ATS kepada Biro Perekonomian untuk diteruskan ke Biro Hukum.

n. Pada tanggal 27 September 2017 Kepala Biro Perekonomian meneruskan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan per 29 Juni 2016 PT Dinamika dan PT ATS kepada Biro Hukum.

o. Biro Hukum melalui surat Gubernur No. 188/2448/Huk-2017 tanggal 29 September 2017 kembali menyampaikan Ranperda Pencabutan Perda No. 13 Tahun 2007 tentang Pendirian PT ATS dan Ranperda tentang Pencabutan Perda No. 15 Tahun 2007 tentang Pendirian PT Dinamika Sumbar Jaya beserta Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan per 29 Juni 2016 PT Dinamika dan PT ATS ke DPRD Provinsi Sumbar.

p. Pada tanggal 20 Maret 2018 diterbitkan Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang pencabutan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2007 tentang pendirian PT Dinamika Jaya Sumbar dan perda Nomor 5 Tahun 2018 tantang Pencabutan Perda Provinsi Sumbar Nomor 13 Tahun 2007 tentang penataan PT ATS.

q. Tanggal 25 Juni 2018 melalui surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 500/311.A/Sarana-Perek/2018 menyurati Ketua Tim Likuidasi PT Dinamika Sumbar Jaya dan PT Andalas Tuah Sakato perihal percepatan kerja tim likuidasi PT DSJ dan PT ATS.

r. Tim likuidasi sudah melaksanakan rapat beberapa kali dan terakhir rapat dilaksanakan pada tanggal 19 September 2018 dengan kesepakatan sebagai berikut:
   1) Biro Hukum dan Biro Aset selaku anggota tim likuidasi akan melaksanakan konsultasi ke KPKNL Sumatera Barat terkait pelelangan aset-aset PT ATS dan PT DSJ.
   2) Tim likuidasi akan menjadwalkan turun ke lapangan untuk melakukan inventarisasi terhadap aset-aset PT ATS dan PT DSJ (barang yang bisa dipakai, barang rusak tapi masih bisa dipakai dan barang rusak yang tidak bisa dipakai).
   3) Untuk aset-aset yang hilang akan dibuatkan berita acaranya.
   4) Terkait tim penilai aset dari lembaga independen yang sudah tersertifikasi diserahkan ke Biro Aset untuk menunjuk lembaganya dengan ketentuan ada perjanjian tertulis dan batas waktu pekerjaan penilaian aset.

s. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan beberapa kali konsultansi ke KPKNL berdasarkan hasil konsultasi diperoleh informasi bahwa Tim Likuidasi dalam melaksanakan proses lelang harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
   1) Melengkapi bukti kepemilikan aset atas nama PT Dinamika dan PT ATS;
   2) Melakukan apraisal terhadap nilai aset dengan kondisi saat ini;
   3) Surat Keputusan Gubernur / Pemilik Saham terkait dengan aset yang akan dilelang.

t. Menindaklanjuti hasil konsultasi dengan KPKNL Tim Likuidasi telah melakukan rapat dan terkendala dengan hal sebagai berikut:
   1) Aset tanah yang dimiliki oleh PT Dinamika dan PT ATS masih atas nama perseorangan sehingga harus dilakukan alih status kepemilikan.
   2) Untuk melakukan alih status kepemilikan dan appraisal dibutuhkan dana yang cukup besar dan anggaran tersebut tidak tersedia.

u. Melalui Surat Gubernur Nomor 500/ /Perek-Sarana/2020 tanggal Februari 2020 menyurati Dirjen Bina Keuangan daerah untuk meminta arahan terkait permasalahan likuidasi antara lain sebagai berikut:
   1) Dengan tidak adanya dana yang dimiliki oleh BUMD, apakah biaya-biaya yang diperlukan dalam proses likuidasi dapat dialokasikan dalam APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
   2) Dasar Hukum pengalihan kepemilikan aset tanah yang masih atas nama PD. Sari Petojo yang digabungkan ke PT ATS dan aset tanah atas nama perseorangan (Direktur PD Sari Petojo).
   3) Penyerahan tanah yang disewa PT Dinamika Jaya Sumbar kepada Pemerintah Kota Padang yang sedang dalam proses likuidasi.
   4) Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat 1 (satu) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha milik Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD. Mencermati aturan ini, apakah dimungkinkan jika Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan penugasan kepada BUMD lainnya untuk membantu penyelesaian permasalahan likuidasi

v. Melalui undangan Sekretaris Daerah Nomor 500/492/Perek-Sarana/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dilaksanakan rapat pada tanggal 1 September 2020 perihal solusi penyelesaian permasalahan aset PT ATS dan PT DJS dengan kesepakatan:
   1) Inventarisir tahapan yang sudah dilakukan oleh tim likuidasi dan sandingkan dengan ketentuan pasal 147 s.d 149 UU Nomor 40 tahun 2007.
   2) Informasikan kepada tim likuidasi untuk menyiapkan dokumen pendukung terkait hutang dan piutang.
   3) Penjadwalan kembali rapat Tim pembina BUMD dan persiapan pelaksanaan RUPS.

w. Melalui undangan Sekretaris Daerah Nomor 500/382/Perek-Sarana/2020 tanggal 7 Oktober 2020 dilaksanakan rapat tanggal 14 Oktober 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut:
   1) Ketiadaan biaya untuk proses balik nama sertifikat milik perusahaan yang dilikuidasi, maka disepakati seluruh aset perusahaan diserahkan ke Pemerintah

daerah dan seluruh hutang dan piutang perusahaan diakomodir dalam APBD sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

2) Diagendakan rapat selanjutnya dengan mengundang Tim likuidasi.

x. Melalui undangan Sekretaris Daerah Nomor 500/652/Perek-Sarana/2020 tanggal 6 November 2020 dilaksanakan rapat tanggal 9 November 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1) Perlu dilakukan kajian terkait proses penyerahan aset tanah dan bangunan (eks. PT ATS dan PT DJS) ke Pemerintah Daerah;
2) Perlu konsultasi dengan KPKNL, BPN dan Biro Aset sesuai kewenangannya masing-masing;
3) Perlu menyiapkan Nota Dinas ke Gubernur terkait alternatif-alternatif untuk disepakati dalam RUPS;

y. Undangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 500/772/Perek-Sarana/2020 tanggal 22 Desember 2020 dilaksanakan rapat tanggal 29 Desember 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1) Koordinasi dengan Biro Hukum apakah proses likuidasi yang kita lakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2) Melepas aset perusahaan harus melalui lelang karena perusahaan dalam proses likuidasi.
3) Perwakilan Tim Likuidasi dan Pemerintah Daerah kembali koordinasi ke KPKNL untuk menjelaskan bahwa PT ATS (Persero) artinya tidak perlu syarat yang dimintakan oleh KPKNL.
4) Selanjutnya agendakan kembali rapat Tim likuidasi dengan pemerintah daerah, untuk menyepakati beberapa hal untuk disampaikan ke Gubernur sekaligus menetapkan jadwal RUPS.

z. Undangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 500/265/Perek-BB/2021 tanggal 2 Juni 2021 dilaksanakan rapat tanggal 7 Juni 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1) Tim telah melakukan inventarisasi terhadap aset perusahaan yang dilikuidasi.
2) Dalam upaya percepatan penyelesaian kewajiban perusahaan yang telah dilikuidasi Tim Percepatan Sumbar Madani akan melakukan peninjauan terhadap aset dan dokumen PT ATS dan PT Dinamika.
3) Tim Percepatan Sumbar Madani juga akan mencarikan investor untuk menalangi biaya yang dibutuhkan dalam penyelesaian kewajiban perusahaan.

aa. Undangan Pj. Sekretaris Daerah Prov Sumatera Barat Nomor 500/444/Perek-BB/2021 tanggal 27 Juli 2021 dilaksanakan rapat tanggal 28 Juli 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1) Tim Percepatan Sumbar Madani telah menyampaikan hasil kajian disisi hukum terhadap aset kedua perusahaan.
2) Bahwa aset tidak bergerak dari kedua perusahaan tersebut yaitu tiga sertifikat Hak Guna Bangunan dan dua sertifikat Hak Milik.
3) Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2021 Tentang Hak Tentang Pengelolaan Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah Dalam Satu Naskah bahwa berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam

keputusan pemberian perpanjangan atau pembaruan haknya. Hapusnya HGB diatas tanah negara atau sesuai dengan amar putusan.

4) Berkenaan dengan peraturan di atas dan tidak diurusnya perpanjangan HGB oleh perusahaan, maka sertifikat HGB nomor 8 tahun 1991 Pemegang hak PD. Dinamika dan Sertifikat HGB nomor 64 tahun 1965 pemegang hak PD. Sari Petojo serta sertifikat HGB nomor 1 tahun 1981 Pemegang hak PD. Sari petojo atas PT ATS maka kembali jadi aset Negara, sehingga apabila tanah tersebut ingin dimanfaatkan kembali oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan Hak Pengelolaan atas Tanah Negara tersebut.

5) Aspek hukum terhadap aset yang tercatat atas nama pribadi, dua sertifikat hak milik (SHM No. 1396 dan SHM No. 1397) PT ATS harus dibalik nama.

6) Menyikapi kajian TPSM tersebut diatas, disarankan kepada Tim Likuidator untuk dapat menyusun jadwal untuk mengeksekusi pelaksanaan balik nama SHM tersebut.

bb. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 500/563.a/Perek-BB/2021 tanggal 22 September 2021, yang ditujukan kepada Ketua Tim Likuidator PT ATS dan PT Dinamika tentang penyelesaian asset BUMD yang telah dilikuidasi yang menegaskan kepada Tim Likuidator untuk menindak lanjuti hasil kajian dan inventarisasi asset BUMD.

cc. Rapat tanggal 15 Maret 2022, pemaparan hasil Kajian Aset BUMD yang dilikuidasi PT ATS dan PT Dinamika Sumbar Jaya,

Pada rapat tersebut terdapat beberapa rekomendasi Umum sebagai berikut:

1) Tim Likuidator PT Dinamika Sumbar Jaya (Dalam Likuidasi) dan PT Andalas Tuah Sakato (Dalam Likuidasi) segera melakukan pemberesan aset yang dapat dilikuidasi dengan mengacu ke aset yang sudah dikategorikan dengan cara mengajukan permohonan lelang.

2) Tim Likuidator PT Andalas Tuah Sakato (Dalam Likuidasi) agar :

   a) Segera menagih piutang kepada pihak-pihak lainnya berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki. Untuk piutang yang belum memiliki bukti Tim Likuidator menyiapkan surat pengakuan hutang yang ditandatangani oleh yang berutang.

   b) Memanggil pihak yang kalah untuk menyerahkan secara sukarela objek perkara atau meminta eksekusi melalui pengadilan berdasarkan putusan No. 117 jo Putusan No. 124/PDT/2018/PTPdg jo Putusan No. 1370K/Pdt/2019 yang sudah berkekuatan hukum tetap mengenai permasalahan Hotel Ranah Bundo;

   c) Pemerintah Kota Padang segera membantu proses penyerahan kembali lahan yang digunakan oleh PT Dinamika Sumbar Jaya (dalam proses likuidasi) ke Pemko Padang dengan cara secara bersama-sama membuat berita acara penyerahan.

Dari rapat tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1) Terhadap tanah masih Sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah habis masa berlakunya, maka status tanah tersebut kembali kepada Negara, maka akan ditindaklanjuti oleh SKPD teknis yang ada di Pemprov, untuk mengurus Hak Pengelolaannya ke BPN.

2) Tanah 2 Kapling a.n Djusmar Sulin, maka akan ditindaklanjuti oleh Tim Likuidator dan merumuskan langkah-langkah yang akan diambil dengan alternatif melakukan penjualan langsung dan hasil penjualannya disetor ke Perusahaan dengan memedomani appraisal.
3) Hotel Ranah Bundo yang sudah putusan Inkrah, dapat dilakukan secara sukarela atau dapat melalui eksekusi pengadilan. Untuk itu Tim likuidator agar melakukan Pendekatan atau melalui surat dan akan dibantu oleh Bapak Miko Kamal.
4) Aset tanah pada SPBU Kota Padang, agar Tim Likuidator dan didampingi oleh Biro Perekonomian melakukan kesepakatan dengan Kota Padang dengan menyerahkan aset SPBU dan kota padang yang akan membayar semua kewajiban pajaknya.
5) Aset Dinamika yang sudah habis, tetapi kewajiban masih ada berupa pesangon, dan pajak maka upaya tindak lanjutnya setelah adanya hasil penjualan tanah.
6) Penagihan piutang dilakukan oleh Tim Likuidator.
7) Terkait dengan tanah yang SHGB, akan ditindaklanjuti dengan pembicaraan khusus dengan SKPD terkait pada pertemuan selanjutnya.

dd. Undangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 20 Mei 2022 Nomor 500/233/ Perek-BB /2022, perihal undangan rapat tindak lanjut penyelesaian permasalah aset PT Andalas Tuah Sakato dan PT Dinamika Sumbar Jaya yang dilaksanakan tanggal 25 Mei 2022, dengan hasil sebagai berikut:

1) Terhadap tanah masih Sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah habis masa berlakunya, maka status tanah tersebut kembali kepada Negara, dan untuk selanjutnya Tim Likuidator telah mengajukan surat kepada Bapak Gubernur Sumbar c.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk proses perpanjangan SHGB sesuai surat tanggal 27 Mei 2022 Nomor 01/ATS-LKD/V-2022, dan surat Nomor 01/DSJ-LKD/V-2022 yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dihitung sebagai penyertaan Modal kepada PT ATS dan PT Dinamika Sumbar Jaya yakni :
   a. SHGB Nomor 1 tahun 1981, tercatat sebagai aset PD. Sari Petojo yang terletak di Batang Kabung, Pariaman HGB berakhir sejak 29 Januari 2008 dan tidak pernah balik nama ke PT ATS.
   b. SHGB Nomor 64 tahun 1965, tercatat sebagai aset PD. Sari Petojo yang terletak di Jln. M.Thamrin No. 81 dan HGB berakhir sejak 24 September 1980 dan tidak pernah balik nama ke PT ATS.
   c. SHGB Nomor 08 tahun 1991, tercatat sebagai aset PD. Dinamika Sumbar Jaya yang terletak di Jln. Nipah dan HGB berakhir sejak tahun 2004.

ee. Undangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 21 Juni 2022 Nomor 500/426/ Perek-BB /2022, perihal undangan rapat tindak lanjut penyelesaian permasalah aset PT Andalas Tuah Sakato dan PT Dinamika Sumbar Jaya yang dilaksanakan tanggal 24 Juni 2022, dengan hasil sebagai berikut :

1) Penyelesaian permasalahan terhadap aset PT Dinamika berupa pengelolaan SPBU akan ditindaklanjuti sebagai berikut:

a) Tim Likuidator akan menyurati Pemerintah Kota Padang untuk mengembalikan lahan/Tanah yang disewa oleh PT Dinamika untuk operasional SPBU.

b) Tim Likuidator akan menyurati Pemerintah Kota Padang untuk mengajukan permohonan keringanan terhadap beban pajak dan sewa yang terhutang selama ini .

c) Terhadap Aset yang berada diatas tanah ex. Pengelolaan SPBU, berupa mesin, pagar dll. akan dilakukan appraisal dan dilakukan pelelangan.

2) Tim Likuidator akan mengajukan proses eksekusi melalui Pengadilan terhadap Hotel Ranah Bundo sesuai putusan pengadilan Nomo 117 jo Putusan Nomor 124/PDT/2018/PTP dg jo Putusan Nomor 1370K/Pdt/2019 yang sudah berkekuatan hukum tetap.

3) Menindaklanjuti surat Nomor 01/ATS-LKD/V-2022 tanggal 27 Mei 2022 dan surat Nomor 01/DSJ-LKD/V-2022 tanggal 27 Mei 2022, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) akan mengajukan proses perpanjangan SHGB kepada Pemerintah Pusat melalui Kanwil BPN Sumbar untuk;

a) SHGB Nomor 1 tahun 1981, tercatat sebagai aset PD. Sari Petojo yang terletak di Batang Kabung, Pariaman HGB berakhir sejak 29 Januari 2008 dan tidak pernah balik nama ke PT ATS.

b) SHGB Nomor 64 tahun 1965, tercatat sebagai aset PD. Sari Petojo yang terletak di Jln. M.Thamrin No. 81 dan HGB berakhir sejak 24 September 1980 dan tidak pernah balik nama ke PT ATS.

c) SHGB Nomor 08 tahun 1991, tercatat sebagai aset PD. Dinamika Sumbar Jaya yang terletak di Jln. Nipah dan HGB berakhir sejak tahun 2004.

Dalam proses pengajuan perpanjangan SHGB, BPKAD akan berkoordinasi dengan Tim Likuidator terkait dengan data dan dokumen pendukung yang dibutuhkan.

4) Dalam upaya pemenuhan biaya proses likuidasi, Tim Likuidator akan menjual asset tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berada di batas kota Lubuk Buaya dengan terlebih dahulu melakukan beberapa hal sebagai berikut:

a) Berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Padang terkait dengan akses jalan menuju tanah tersebut.

b) Melakukan appraisal dan proses lelang mandiri.

c) Berkoordinasi dengan BPKAD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terkait pelaksanaan lelang.

5) Terkait dengan piutang, Tim Likuidator akan membuat daftar piutang dengan melampirkan dokumen pendukung serta berupaya melakukan penagihan.

6) Sehubungan dengan keberadaan anggota Tim Likuidator sudah ada yang pensiun, disepakati bahwa sesuai SK Gubernur mereka masih memiliki tanggung jawab terkait dengan penyelesaian permasalahan likuidasi dan masih dapat ditugaskan kembali.

7) Menindaklanjuti beberapa kesepakatan diatas, tim Likuidator akan segera melaksanakan rapat dan merumuskan langkah-langkah dan jadwal penyelesaiannya.

8) Tim Likuidator diminta untuk melaporkan secara berkala terhadap progres pelaksanaan kesepakatan.

ff. Tindak lanjut dari hasil rapat :

1) Tim Likuidator telah mengajukan surat permohonan ke Kota Padang terkait pengembalian Aset Kota Padang (Lahan ex. SPBU) dengan surat Nomor 06/DSJ-LKD/XI-2022 tanggal 18 November 2022 perihal Permohonan Penghapusan Tunggakan Retribusi Sewa Tanah dan PBB, dengan rincian :
   - Penghapusan tunggakan retribusi sewa tanah (pokok dan denda).
   - Penghapusan Tunggakan PBB (pokok dan denda).
   - Untuk tidak menerbitkan surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) tahun 2023.
2) Berkoordinasi ke Pengadilan Negeri Padang untuk proses eksekusi Hotel Ranah Bundo.

gg. Undangan PT Dinamika Sumbar Jaya Nomor 05/DSJ-LKD/XI-2022 tanggal 18 November 2022 perihal undangan rapat terkait teknis pengembalian aset tanah eks SPBU yang dipakai oleh PT Dinamika Sumbar Jaya dengan sistem sewa ke Kota Padang yang dilaksanakan tanggal 21 November 2022, dengan hasil sebagai berikut:

1) Tanah ex SPBU PT Dinamika Sumbar Jaya merupakan aset tanah milik Pemko Padang seluas 858 M2 yang tercatat di kartu Inventaris Barang (KIB) A BPKAD Kota Padang.
2) PT Dinamika sumbar Jaya sebelumnya memanfaatkan tanah tersebut dengan membayar retribusi sewa ke Kota Padang dan sampai saat ini tunggakan sewa sampai tahun 2022 sebesar Rp209.842.776,00 dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp8.031.924,00.
3) Mengingat Perusahaan telah dilikuidasi dan tidak mempunyai dana untuk pembayaran retribusi sewa dan tunggakan PBB (sesuai surat permohonan Tim Likuidasi untuk penghapusan tunggakan retribusi sewa), disarankan oleh BPKAD Kota Padang kepada tim likuidasi untuk segera menyurati Pemko Padang agar tidak lagi menerbitkan Surat Keputusan Retribusi Daerah untuk tahun 2023.
4) Terkait dengan tunggakan PBB, agar Tim Likuidasi berkoordinasi dengan Bapenda Kota Padang dengan mengajukan surat permohonan dan melengkapi persyaratannya antara lain: Perda Pencabutan Pendirian Perusahaan dan Laporan Keuangan Perusahaan tahun terakhir.

hh. Undangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 10 Januari 2023 Nomor 500/30/ Perek-BB /2023, perihal undangan rapat pembahasan Pemanfaatan Aset ex. Sari Petojo PT. Andalas Tuah Sakato (PT. ATS) dalam likuidasi berupa tanah dan bangunan Hotel Ranah Bundo di Jalan MH.Thamrin No 81 Padang dalam likuidasi oleh PT. Bank Nagari, pada tanggal 11 Januari 2023 dengan hasil sebagai berikut :

1) PT. Bank Nagari mengajukan minat untuk memanfaatkan lahan ex. Sari Petojo tersebut untuk membangun Kantor Pusat PT. Bank Nagari yang dirancang 8 lantai dan dilengkapi dengan sistim pengamanan tingkat tinggi.

2) Pemanfaatan lahan tersebut akan dihitung sebagai tambahan penyertaan Modal Pemprov ke PT. Bank Nagari sehingga diharapkan dapat berkembang dan asetnya tidak hilang.
3) Setelah mendengar berbagai pendapat dari peserta rapat dengan hasil sbb :
   a) Lahan ex. Sari Petojo di Jalan MH Thamrin No 81 Padang merupakan salah satu aset dari PT. Andalas Tuah Sakato dalam proses likuidasi yang dalam sertifikatnya tercatat sebagai Aset PD Sari Petojo dan belum pernah balik nama ke atas nama PT. ATS.
   b) Perusahaan yang dalam proses likuidasi, harus melakukan pemberesan harta kekayaan dan menyelesaikan hutang piutang dan terhadap aset barang agar dilakukan Upraisal terlebih dahulu dan disahkan dalam RUPS sebelum dialihkan kepada pihak lain.
   c) Untuk melakukan proses pemberesan harta kekayaan ini, membutuhkan pembiayaan yang tidak boleh dianggarkan pada APBD sedangkan Perusahaan sudah dilikuidasi dan juga tidak mempunyai anggaran biaya.
   d) Status lahan Ex. Sari Petojo ini, sudah ada putusan inkrah pengadilan dan tim likuidator agar dapat melakukan pendekatan dengan pihak yang kalah untuk menyerahkan secara sukarela objek perkara berdasarkan putusan No. 117 jo Putusan No. 124/PDT/2018/PT.Pdg jo Putusan No. 1370K/Pdt/2019 yang sudah berkekuatan hukum tetap.
   e) Apabila pihak yang kalah tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka tim likuidator dapat mengajukan eksekusi melalui pengadilan.
   f) Langkah yang akan dilakukan Tim Likuidator.
      - Tim Likuidator telah melakukan Pendekatan kepada keluarga rahmad shaleh untuk dapat menyerahkan lahan serta membayar dendanya sesuai hasil keputusan pengadilan, namun hal ini belum mendapatkan kesepakatan.
      - Selanjutnya Tim Likuidator dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan dengan membayar Biaya pendaftaran sebesar Rp8.500.000,-, dan Pengadilan akan memanggil kedua belah pihak untuk mediasi menyerahkan secara sukarela serta membayar denda 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, terhitung sejak adanya putusan Pengadilan.
      - Pengajuan Eksekusi melalui Pengacara ke Pengadilan dengan perkiraan biaya sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) serta menyesuaikan fakta di lapangan.
   g) Pihak bank Nagari (Bagian Hukum) akan melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap kondisi /keberadaan aset untuk dimanfaatkan oleh PT. Bank Nagari sesuai ketentuan yang berlaku.
   h) Kendala yang dihadapi :
      - Tim Likuidator tidak mempunyai biaya untuk melakukan proses eksekusi.
      - Tidak adanya Sumber Daya Manusia yang akan mempersiapkan dokumen pengajuan eksekusi ke Pengadilan serta pendampingan.

ii. Undangan Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Sumatera Barat Nomor 500/599/Perek-BB/2023 tanggal 31 Agustus 2023, telah dilaksanakan rapat pada tanggal 2 September 2023 dengan hasil rapat sebagai berikut :

1) Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Tim Likuidasi :
   a) Due Deligent yakni Uji tuntas terhadap aset Perusahaan (Legal Audit)
   b) Appraisal (Penilaian/taksiran terhadap nilai barang/ Aset)
2) Yang telah dan akan dilakukan oleh Tim Likuidasi :
   a) Pendekatan kepada keluarga rahmad shaleh untuk dapat menyerahkan lahan serta membayar dendanya sesuai hasil keputusan pengadilan, namun hal ini belum mendapatkan kesepakatan.
   b) Koordinasi dengan PT. Bank Nagari terkait minat PT Bank Nagari untuk memanfaatkan lahan ex. Sari Petojo (Aset PT. ATS) untuk membangun Kantor Pusat PT. Bank Nagari
   c) Menyurati Pemerintah Kota Padang, perihal pengembalian Aset Kota Padang yang disewa oleh PT. Dinamika (Tanah ex SPBU) di Simpang Padang Baru, namun hal ini masih belum tuntas.
3) Kesimpulan dan Saran Rapat ;
   a) Akan mengkoordinasikan kembali minat PT. Bank Nagari untuk pemanfaatan Lahan Ex. Sari Petojo (aset dari PT. Andalas Tuah Sakato) yang akan dihitung sebagai tambahan penyertaan Modal Pemprov ke PT. Bank Nagari sehingga diharapkan dapat berkembang dan asetnya tidak hilang.
   b) Dijadwalkan rapat internal Tim Likuidasi dalam rangka merumuskan dan melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan point a diatas.
   c) Sehubungan dengan kesepakatan rapat tersebut diatas, diusulkan untuk dilakukan rapat kembali yang dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 pukul 09.00 Wib secara during, jika bapak berkenan atau mohon arahan lebih lanjut terkait jadwal pelaksanaannya.

jj. Berdasarkan Undangan Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Sumatera Barat Nomor 500/632/Perek-BB/2023 tanggal 20 September 2023, telah dilaksanakan rapat pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, tentang Pembahasan peninjauan pemanfaatan Aset PT. Andalas Tuah Sakato oleh PT Bank Nagari, dengan kesimpulan rapat sebagai berikut:

1) Aset PT. Andalas Tuah Sakato (PT. ATS) dalam likuidasi berupa tanah dan bangunan Hotel Ranah Bundo (ex. Sari Petojo) di Jalan MH.Thamrin No 81 Padang, pada tanggal 11 Januari 2023 bahwa Pihak Bank Nagari meminta waktu kepada peserta rapat untuk melakukan pengkajian terlebih dahulu oleh Tim bagian Hukumnya.
2) Sampai saat ini pihak Bank Nagari belum selesai melakukan pengkajian dan berharap kepada Pihak Pemprov untuk dapat melengkapi dan mengirimkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan pengkajian tersebut.
3) Tim Likuidasi berharap kepada Pihak Bank Nagari sekiranya ada dokumen yang dibutuhkan, agar dapat menyurati pihak Pemprov.

4) Bank Nagari akan segera melaporkan kepada Pimpinannya dan menuntaskan kajian rencana pemanfaatan aset PT. ATS (Hotel Ranah Bundo)

kk. Rapat tanggal 27 Oktober 2023 berdasarkan Undangan Sekretaris Daerah Prov. Sumatera Barat Nomor 500/693/Perek-BB/2023 tanggal 24 Oktober 2023, dengan Agenda rapat yakni Pembahasan Tindakan terhadap penyalahgunaan Aset PT. Dinamika sumbar Jaya dalam proses Likuidasi (ex. Bengkel Mobil Dinamika) oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sesuai dengan surat yang disamapaikan Kolonel Purn Jamalus (Pengamat/Masyarakat) tanggal 8 September 2023 perihal keluhan masyarakat terkait Aset Eks. Lokasi Bengkel Dinamika yang telah disalahfungsikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai tempat maksiat, pungutan liar dan transaksi Narkoba dengan kesimpulan rapat sebagai berikut :

1) Ex. Bengkel Mobil Dinamika merupakan Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah diserahkan ke PT. Dinamika Sumbar Jaya dan sudah tidak tercatat lagi pada Daftar Aset Pemerintah Provinsi. Kondisi sekarang PT. Dinamika Sumbar Jaya sedang dalam proses Likuidasi Dan untuk penyelesaian asset ini dibentuk Tim Likuidasi.
2) Untuk mendapatkan Informasi yang akurat , Biro Perekonomian bersama OPD terkait dan Tim Likuidasi akan melakukan peninjauan terhadap lokasi Ex.Bengkel Dinamika dan Aset PT. ATS. Dijadwalkan akan melakukan kunjungan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023.
3) Mengingat pemilik Aset sebelumnya adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, untuk itu diminta Kerjasama dengan Satpol PP Prov. Sumbar untuk melakukan pengamanan dengan menunjuk personilnya untuk patroli di Kawasan tersebut.
4) Memberitahukan dan mengikutkan rencana kunjungan tersebut kepada Lurah dan Camat setempat.

ll. Undangan Sekretaris Daerah Nomor 500/704/Perek-BB/2023 Perihal Undangan mengenai Peninjauan lapangan terhadap asset PT. Dinamika dan PT. ATS dengan uraian sebagai berikut:

1) Kegiatan peninjauan lapangan telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Pukul 09.00 WIB – Selesai, yang dipandu oleh Kepala Biro Perekonomian.
2) Kegiatan ini diikuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat, BPKAD, Tim Likuidasi, Lurah dan Camat, Ketua RT dan RW setempat, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan beberapa warga setempat.
3) Hasil dari kunjungan lapangan ini, yaitu :
    a) Aset PT. Dinamika
        - Aset PT Dinamika terletak di daerah Berok Nipah, yang bergerak di bidang perbengkelan.
        - Saat ini, perbengkelan sudah tidak berjalan dan tempatnya sudah disalahgunakan oleh warga setempat yang tidak bertanggungjawab.
        - Beberapa solusi yang diajukan pada saat tinjauan lapangan yaitu mendirikan pos satpol pp di tempat tersebut dan usulan dari Camat

Padang Barat yang ingin memanfaatkan tempat tersebut untuk pemberdayaan UMKM (tempat kuliner), guna mengurangi penyalahgunaan tempat.

- Satpol PP akan mengkomunikasikan usulan tersebut kepada pimpinan serta akan bekerjasama dengan Satpol PP Kota Padang untuk pengamanan tempat.
- Pemerintahan provinsi mengajak warga bersama-sama untuk menjaga tempat agar tidak disalahgunakan.

b) Aset PT. ATS

- Aset PT. ATS yang dikunjungi yaitu terletak di daerah Ranah yang dahulunya merupakan tempat Pabrik Es, dan tanah di daerah Lubuk Buaya
- Saat ini, pabrik es tersebut sudah tidak beroperasi dan sudah ditutup.
- Dikarenakan daerah sekitarnya tidak terpakai, sehingga pedagang-pedangang kecil mendirikan warungnya di daerah PT. ATS.
- Dikhawatirkan, jika terlalu lama tidak ditindaklanjuti, pedagang tersebut akan membangun warung permanen di daerah PT. ATS.
- Oleh karena itu, solusi yang diajukan saat tinjauan lapangan yaitu jika ingin mendirikan warung di lingkungan PT. ATS maka harus mengajukan surat resmi kepada Pemerintahan Provinsi untuk perizinan mendirikan warung.
- Hal ini juga disetujui oleh warga setempat serta Babinsa dan Bhabinkantibmas sekitar.
- Sementara tanah yang terletak di Lubuk Buaya akan dilakukan kembali appraisal, karena masa berlaku appraisal sebelumnya sudah habis yaitu 5 tahun.

c) Kesimpulan

- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengadakan rapat kembali untuk pembahasan aset.
- Disarankan untuk melakukan RUPS-LB untuk pengembalian aset ke Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat

mm. Menindaklanjuti hasil kunjungan lapangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan :

1) Menyurati Kepala Satpol PP Provinsi Sumatera Barat dengan surat Gubernur Sumatera Barat Nomor ; 500 /794 /Perek-BB/2023 tanggal 04 November 2023 perihal Pengamanan Aset PT. Dinamika Sumbar Jaya.
2) Menyurati Ketua Tim Likuidasi PT. Dinamika Sumbar Jaya dan PT. ATS dengan surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 500 /806/Perek-BB/2023 tanggal 11 Desember 2023 perihal Persiapan Pelaksanaan RUPS PT. Andalas Tuah Sakato dan PT. Dinamika Sumbar Jaya.

nn. Undangan Sekretaris Daerah Nomor 500/8/KJFTSBUMDDBLUD/2024 tanggal 26 Maret 2024 Perihal Undangan rapat Tindak lanjut penyelesaian Aset PT. ATS dan PT. Dinamika serta persiapan RUPS dengan hasil keputusan rapat sebagai berikut:

1) Tim Likuidator agar mempersiapkan pelaksanaan RUPS

2) RUPS direncanakan pada tanggal 18/19 April 2024 dengan agenda
   a) Menginformasikan kondisi kekinian (tanah akan diserahkan kepada Pemprov)
   b) menyampaikan laporan keuangan terakhir.
   c) Penyerahan Aset PT. ATS dan PT. Dinamika kepada pemegang saham.
3) Akan menyurati Kota Padang, sebagai bentuk balasan surat dari Kota Padang terkait pengembalian Tanah dan penghapusan hutang sewa serta tunggakan pajak PT. Dinamika Sumbar Jaya.
4) BPKAD agar dapat mengkoordinasikan dengan BPN, terkait administrasi penyerahan aset kedua perusahaan tersebut (Berita Acara penyerahan Aset).

oo. Undangan Ketua Tim Likuidasi PT. Andalas Tuah Sakato (dalam Proses Likuidasi) Nomor 02/ATS-LKD/VI- 2024 tanggal 13 Juni 2024, dan Undangan Ketua Tim Likuidasi PT. Dinamika sumbar Jaya (dalam Proses Likuidasi) Nomor 02/DSJ-LKD/VI- 2024 tanggal 13 Juni 2024 Perihal Undangan RUPS dengan hasil keputusan rapat sebagai berikut:

1) Rapat dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024 dipimpin oleh Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan selaku Kuasa Gubernur dan didampingi kepala Biro Perekonomian serta dihadiri oleh Tim Likuidasi PT. ATS Tim Likuidasi PT. Dinamika Sumbar Jaya, Pemegang Saham dan Notaris Harti Virgo.
2) Pelaksanaan RUPS tidak dapat dilanjutkan, karena berdasarkan laporan dari Tim Likuidasi masih terdapat beberapa kendala terkait dengan permasalahan aset, hutang dan piutang Perusahaan sehingga dilanjutkan dengan pembahasan penyelesaian permasalahan likuidasi PT. Dinamika dan PT. ATS, dengan kesepakatan sebagai berikut :
3) Tindak lanjut permasalahan PT. ATS
   a) Aset tanah dan bangunan
      - Terhadap aset tanah perusahaan dengan sertifikat a.n Perusahaan Daerah Sumatera Barat – Unit “Sari Petojo” Desa Kampung Alang Lawas Hak Guna Bangunan No. 64, dengan Jatuh tempo pembayaran HGB tanggal 24 September 1980, dan aset tanah perusahaan dengan sertifikat a.n. Perusahaan Daerah Sumatera Barat – Unit “Sari Petojo” berkedudukan di Padang, Hak Guna Bangunan No. 1, pendaftaran 29 Januari 1988, berakhir tanggal 29 Januari 2008.
      - Karena perusahaan tidak mungkin lagi melakukan perpanjangan HGB, akibat terkendala biaya maka disepakati tanah tersebut diserahkan kepada pemerintah provinsi melalui berita acara serah terima sesuai ketentuan yang berlaku, untuk selanjutnya dikelola Pemerintah Provinsi. Sehingga aset dimaksud tidak terbengkalai dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang.

- Terhadap aset tanah perusahaan yang masih a.n Djusmar Sulin (Hak Milik No. 1396 dan Hak Milik No. 1397 yang sudah memiliki akta penyerahan dan pelepasan hak atas tanah dan kuasa no. 05 tanggal 6 maret 2009 untuk ke 2 (dua) sertifikat, disepakati untuk dilakukan penjualan, dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Bapak Alizar bersama dengan Bapak Miko Kamal.

b) Aset Kendaraan

PT. ATS memiliki kendaraan minibus Daihatsu Xenia tahun 2005 BA 1657 AB yang saat ini dimanfaatkan oleh PT. Grafika Jaya Sumbar. Terhadap aset dimaksud disepakati untuk segera dikomunikasikan dengan pihak pemakai dan disepakati alternatif penyelesaiannya.

c) Hutang

- Terhadap kewajiban kepada pihak ketiga disepakati bahwa hutang yang ada akan ditutupi dari hasil penjualan aset yang masih memiliki nilai ekonomis.
- Terhadap hutang kepada Komisaris, Direktur, dan karyawan disepakati bahwa tim likuidasi akan berkomunikasi dengan pihak terkait dan menyepakati alternatif solusi penyelesaian masalah.
- Terhadap hutang jasa pengacara perkara hotel ranah bundo akan dibicarakan lebih lanjut oleh tim likuidasi (Bapak Alizar).

d) Piutang

Terhadap piutang perusahaan yang tidak mungkin tertagih lagi disepakati agar Tim Likuidator untuk membuat “Surat Pernyataan Piutang Tidak Tertagih” .

4) Tindak lanjut permasalahan PT. Dinamika

a) Aset tanah dan bangunan

Terhadap aset tanah perusahaan dengan sertifikat a.n Perusahaan Daerah Tingkat I Sumatera Barat “Dinamika” berkedudukan di Padang. Hak Guna Bangunan No. 8 Pendaftaran tgl 6 Februari 1984 jatuh tempo pembayaran HGB tanggal 6 Februari 2004.

Karena perusahaan tidak mungkin lagi melakukan perpanjangan HGB, akibat terkendala biaya maka disepakati tanah tersebut diserahkan kepada pemerintah provinsi melalui berita acara serah terima sesuai ketentuan yang berlaku, untuk selanjutnya dikelola Pemerintah Provinsi. Sehingga

aset dimaksud tidak terbengkalai dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang.

b) Aset Kendaraan

PT. ATS memiliki kendaraan minibus Toyota Avanza tahun 2011 BA 1103 BZ. Kendaraan ini disepakati untuk selanjutnya dijual sesuai dengan ketentuan berlaku.

c) Hutang

- Terhadap kewajiban kepada pihak ke tiga disepakati bahwa hutang yang ada akan di tutupi dari hasil penjualan asset yang masih memiliki nilai ekonomis dan dibicarakan dengan pihak-pihak pemberi hutang untuk penyelesaian permasalahannya.
- Terhadap hutang kepada Komisaris, Direktur, dan karyawan disepakati bahwa tim likuidasi akan berkomunikasi dengan pihak terkait dan menyepakati alternative solusi penyelesaian masalah.

d) Piutang

Terhadap piutang perusahaan yang tidak mungkin tertagih lagi, disepakati agar Tim Likuidator untuk membuat "Surat Pernyataan Piutang Tidak Tertagih" .

5) Selanjutnya disepakati juga bahwa semua permasalahan tersebut dapat diselesaikan sampai dengan 31 Agustus 2024, untuk kemudian dilaporkan kepada RUPS.

pp. Sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan Rapat tersebut diatas Biro Perekonomian telah menyurati Tim Likuidasi PT ATS dan PT DSJ dengan surat Gubernur Nomor 500/732/VIII/Ro-Eko/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Likuidasi PT. DSJ dan PT. ATS dengan substansi sebagai berikut :

1) Penyerahan aset tanah PT. Dinamika dan PT. Andala Tuah Sakato (ATS) yang status HGB sudah tidak berlaku sejak tahun 1980, tahun 2008 dan tahun 2004 kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2) Melakukan penjualan terhadap aset tanah lainnya yang masih dimiliki Perusahaan serta aset kendaraan yang memiliki nilai ekonomis untuk memenuhi kewajiban Perusahaan.
3) Melakukan Pelunasan hutang perusahaan dan mengkomunikasikannya dengan pihak-pihak terkait untuk mengurangi beban hutang yang cukup besar.
4) Menyiapkan alternatif solusi dan menindaklanjutinya terkait dengan permasalahan piutang yang tidak tertagih.
5) Melaksanakan RUPS, dengan agenda penyerahan aset kepada pemegang saham.
6) Point 1 dan 5 dapat diselesaikan s.d tanggal 31 Agustus 2024.

Berdasarkan hal tersebut diminta Tim Likuidasi segera menyelesaikan Point 1 - 6 tersebut diatas dan menyampaikan laporan melalui RUPS dalam waktu yang

tidak terlalu lama (Minggu II bulan September paling lama), agar proses likuidasi terhadap PT. Dinamika dan PT. ATS dapat segera tuntas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5) Kronologis Penyelesaian permasalahan Investasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di PT ARP/PIP.

a. Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 5 Tahun 1995, Pemerintah Provinsi mendirikan dan melakukan penyertaan modal di PT ARP sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Dasar Kerjasama tanggal 5 Juli 1994 dan Perjanjian Dasar Kerjasama tanggal 20 Juli 1994 bersama 4 pengusaha, penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di PT ARP senilai Rp3 miliar dalam bentuk lahan seluas 108 ha yang selanjutnya disetorkan sebagai penyertaan modal PT ARP di PT PIP dengan komposisi kepemilikan saham PT ARP sebesar 45% dalam bentuk lahan seluas 108 ha yang dinilai sebesar Rp5,4 miliar dan pihak Johor Technopark sebagai mitra 55% berupa dana tunai sebesar Rp6,6 miliar.

b. Sesuai perjanjian di atas akta notaris Zamri, SH No. 183 tanggal 20 Juli 1994, tentang Pendirian PT ARP, modal dasar perusahaan adalah Rp10 miliar rupiah dengan modal disetor sebesar Rp6 miliar rupiah, penyertaan modal Pemprov adalah berupa lahan seluas 108 ha di Kawasan PIP/Duku Padang Pariaman yang dibebaskan melalui APBD Sumbar sebesar Rp1,6 miliar yang dinilai sebesar Rp3 miliar, 4 orang pengusaha (Irman Gusman Cs) sebagai mitra kerjasama dengan menyetorkan dana tunai sebesar Rp3 miliar.

c. Sampai pelaksanaan RUPS perseroan tanggal 8 September 1999 untuk pertanggungjawaban operasional perusahaan tahun 1994 s/d 1998 (dimana disepakati operasional perseroan dibekukan), pihak swasta/pengusaha belum memenuhi modal disetor Rp3 miliar, kecuali sebesar Rp600 juta yang tidak didukung oleh dokumen yang lengkap. Penyetoran modal disetor dari pihak swasta hanya diwujudkan dari hasil *capital gain* dan *goodwill* penyertaan modal PT ARP ke PT PIP sebagaimana yang dimuat dalam Risalah RUPS Tahun 1999 dengan kalkulasi sebagai berikut:

Tabel 6.1 Risalah RUPS Tahun 1999

Pemegang Saham	%	Nilai Saham
Pemprov Sumbar	50	Rp3 miliar berasal dari pembebasan lahan 108 ha senilai Rp1,6 miliar melalui APBD Provinsi Sumbar ditambah hibah *capital gain* dan *goodwill* dari swasta sebesar Rp1,4 miliar.
Swasta	50	Rp3 miliar berasal dari uang tunai senilai Rp0,6 miliar ditambah hibah *capital gain* dan *goodwill* sebesar Rp2,4 miliar.

Dari tabel di atas pihak swasta menjelaskan bahwa:

1) Pemprov Sumbar membebaskan lahan seluas 108 ha dengan biaya lebih kurang Rp1,6 miliar, dengan kemampuan *entrepreneurship* yang beresiko serta melalui proses negosiasi yang alot selama bertahun-tahun, akhirnya lahan tersebut

diterima sebagai saham PT ARP pada PT PIP senilai US$ 2,7 juta (setara dengan Rp5,4 miliar berdasarkan kurs US$ 1= Rp.2.000,00 di tahun 1994). Artinya usaha tersebut menghasilkan nilai tambah (*capital gain*) sebesar Rp3,8 miliar.

2) Selanjutnya pihak swasta menyebutkan, selisih nilai sebesar Rp3,8 miliar tersebut merupakan hak pihak swasta, namun pihak swasta hanya mengambil sebesar Rp2,4 miliar dan merelakan sisanya sebesar Rp1,4 miliar untuk dihibahkan kepada Pemprov Sumbar, sehingga nilai saham Pemprov Sumbar pada PT ARP berjumlah Rp3 miliar. Dengan demikian, dari proses pendirian PT ARP, Pemprov Sumbar sebagai pemodal telah diuntungkan sebesar Rp1,4 miliar.

3) Dengan demikian komposisi saham Pemerintah Provinsi dan swasta di PT ARP menjadi 50:50 atau Pemprov Rp3 miliar dan swasta Rp3 miliar.

d. Berawal dari hasil pemeriksaan BPK yang disebutkan tidak jelasnya Surat Saham Pemprov di PT ARP, maka untuk penyelesaian penyertaan modal Pemprov di PT ARP/PIP, dibentuk Tim Penyelesaian Penyertaan Modal Daerah pada PT ARP/Kawasan Industri Padang dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500-304-2010, yang keanggotaannya mencakup lintas instansi termasuk dari DPRD Sumatera Barat sebanyak dua orang yaitu Bapak Marlis dan Bapak Arkadius, untuk menyelesaikannya bersama pihak swasta;

e. Dalam rangka penyelesaian masalah dan pemberdayaan penyertaan modal Pemprov di PT ARP, pihak swasta dan PT PIP secara informal pernah menawarkan/membicarakan rencana perubahan skenario penyertaan modal Pemprov di Kawasan Industri Padang yang semula melalui PT ARP menjadi/ke penanaman modal langsung di PT PIP, sehingga Pemprov Sumbar dapat mengontrol penyertaan modal dan mengawasi manajemen PT PIP. Sesuai pembicaraan, perubahan skenario penyertaan modal adalah dengan cara Pemprov. mengambil alih/membeli saham PT ARP pada PT PIP sehingga komposisi saham antara Johor, Pemprov dan swasta di PIP menjadi 55%: 22,5%: 22,5%;

f. Pada pelaksanaan RUPS LB PT ARP tanggal 31 Maret 2011, Bpk Dedi Harun (Asisten Direktur ARP) menjelaskan bahwa prinsipnya Bpk Irman Gusman setuju untuk reposisi saham dengan mengeluarkan cadangan saham yang masih tersimpan sehingga saham Pemprov menjadi lebih besar, namun pihak swasta menolak untuk membatalkan komposisi saham hasil RUPS Tahun 1999 (tanpa menjelaskan komposisi akhir saham), sehingga agenda RUPS dibatasi dengan pengesahan pengunduran diri/habisnya periode kepengurusan pengurus perseroan yang lama (Irman Gusman dan lain-lain) serta pemilihan dan penetapan pengurus baru, masing-masing Dedy Haroen selaku direksi, Achmad Charisma Komut dan Ismail Gusman sebagai Komisaris;

g. Tercatat sebanyak 2 kali diadakan pertemuan susulan di ruang Ass II Setdaprov. Sumbar antara perwakilan Irman Gusman dengan Tim Pemprov (Syafrial S./Ass II, Zainuddin/Staf Ahli dan 2 orang anggota DPRD Sumbar) masing-masing tanggal 11 Oktober 2011 dan tanggal 25 Oktober 2011, yang mewacanakan pembagian komposisi saham antara Pemprov dengan swasta di PT PIP yakni 25 %: 20 %;

h. Tanggal 12 Mei 2012 diadakan RUPS LB dengan rencana pokok bahasan sebagai berikut:

1) Pemprov keluar dan menarik sahamnya di PT ARP dan investasi langsung di PT PIP dengan mengambil sebagian saham PT ARP di PT PIP;
2) Menghibahkan 30.000 lembar saham milik ahli waris Gusman Gaus dalam PT ARP kepada Pemerintah Provinsi Sumbar, sehingga dengan demikian komposisi kepemilikan saham antara Pemprov dengan swasta dari semula masing-masing 300.000 lembar (50% : 50%) menjadi 330.000 lembar: 270.000 lembar (55% : 45%) dan kemudian komposisi kepemilikan saham di PT PIP menjadi Johor tetap 55%, Pemprov dan swasta menjadi 25% : 20%.

i. Pada tanggal 14 s/d 17 Juli 2012 Pemprov. Sumbar yang diwakili oleh Bapak Drs. Syafrial S./Ass II, Zainuddin/Staf Ahli Gubernur bertemu grup Johor Technopark mitra PT ARP sebagai pemegang saham di PT PIP di Johor Malaysia untuk membicarakan hasil RUPS di atas, yang prinsipnya pihak Johor sepakat wacana masuknya Pemprov sebagai pemegang saham di PT PIP dengan komposisi antara Johor, Pemprov dan swasta yakni 55% : 25% : 20 %;
j. Setelah beberapa kali tertundanya pelaksanaan RUPS PT PIP karena tidak sempatnya pihak Johor Malaysia, maka pada tanggal 16 September 2013 baru terlaksana RUPS PT PIP dan disepakati masuknya saham Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan ditetapkannya komposisi saham antara Johor, Pemprov dan PT ARP di PIP menjadi 55% : 25% : 20% atau dengan nilai Rp7.236.900.000,00 : Rp3.289.500.000,00 : Rp2.631.600.000,00, dengan total nilai saham Rp13.158.000.000,00. **Kesepakatan ini akan berlaku setelah adanya pencabutan Perda No. 5 Tahun 1995 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga Sebagai Pendiri Dalam Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Andalas Rekasindo Pratama dan Perda tentang Penyertaan Modal pada PT PIP apabila telah disahkan;**
k. Proses perubahan skenario penyertaan modal dihentikan sementara waktu dengan **adanya hasil Paripurna Pansus PT ARP/PIP di DPRD tanggal 26 Agustus 2014 sesuai dengan Kep. DPRD No. 29/SB/2014 yang antara lain merekomendasikan agar dilakukan audit atas investasi Pemprov. dalam pembebasan dan pembangunan Kawasan Industri Padang di bawah kelola PT ARP/PIP yang berada di Duku Kabupaten Padang Pariaman;**
l. Pada tanggal 23 Desember 2014, diadakan rapat biasa (diluar RUPS) membahas rekomendasi DPRD dan disepakati perlu audit investigasi oleh lembaga independen (BPKP).
m. Kegagalan pelaksanaan RUPS saat itu sebenarnya lebih disebabkan oleh posisi perseroan yang dalam proses tindak lanjut Rekomendasi Pansus, sehingga setiap keputusan atau kebijakan yang diambil dalam RUPS akan menjadi sia- sia, karena dikhawatirkan tidak relevan dan tidak sinkron dengan butir-butir yang diamanatkan dalam rekomendasi Pansus, oleh karena itu semua pembicaraan terkait keuangan dan aset perseroan dihentikan sementara waktu;
n. Untuk menindaklanjuti Keputusan DPRD No. 29/SB/2014 tentang Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut, dan selanjutnya Gubernur Sumatera Barat dengan surat No. 500/29/Perek-Sarana/2015 tanggal 13 Januari 2015, meminta BPKP Kantor Perwakilan Sumbar melakukan audit terhadap investasi Pemprov.

pada PT ARP/PIP terutama dalam pembebasan lahan seluas 108 ha dan pembangunan Kawasan Industri;

o. Dalam menyelesaikan audit tersebut, BPKP mengalami kendala karena minimnya data/dokumen pendukung utamanya SPJ dan LKPD sebagai bukti realisasi dana APBD Sumbar TA 1994 s/d 1998 untuk pembebasan dan pembangunan kawasan industri;

p. Koordinasi dan rapat telah dilaksanakan selama tahun 2015 untuk mengupayakan data dan dokumen dimaksud, termasuk koordinasi ke BPN Kabupaten Padang Pariaman;

q. Dalam upaya pencarian dokumen SPJ APBD tahun 1994/1995 – 1998/1999, maka pada tanggal 7 Desember 2015 diadakan rapat di ruang Asisten II bersama Staf Ahli Ekkeu, Bappeda, Inspektorat, Ropem, Biro Aset, Ro Hukum, Direksi dan Komisaris ARP serta Direksi PIP, menindaklanjuti rapat dimaksud dibuat Tim pencari dokumen yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

   1) Tanggal 25 Februari 2016 dibentuk Tim Pencari Dokumen Investasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT ARP/PIP dengan *Keputusan Gubernur Sumbar No. 500-183-2016;*

   2) Terkait dengan penelusuran dokumen/arsip data pendukung penyertaan modal pada PT ARP, pada tanggal 4 Februari 2016 Bapak Sekda mengadakan rapat bersama Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan, Asisten II, Kabiro Perekonomian yang antara lain meminta Tim menelusuri dokumen yang sama dengan dikoordinir oleh Staf Ahli pada tanggal 9 s/d 12 Februari 2016;

   3) Selanjutnya pada tanggal 9 s/d 12 Februari 2016 telah dilakukan pencarian atas dokumen dimaksud di gudang arsip Padang Baru, namun Tim tidak menemukan hasil, karena arsip yang ada terhitung arsip tahun 2005 ke atas;

   4) Pada tanggal 26 April 2016 kembali dilakukan pencarian atas dokumen dimaksud di tempat yang sama yakni di gudang arsip Padang baru, namun Tim tidak menemukan hasil, karena arsip yang ada terhitung arsip tahun 2005 ke atas;

r. RUPS tanggal 29 Juni 2016, sesuai Akta Notaris Nomor 233 tanggal 29 Juni 2016 disepakati bahwa deviden yang telah dibagikan oleh PT Padang Industrial Park kepada perseroan sebesar Rp1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) pada bulan Oktober 2014 ditunda dulu pembagiannya karena belum ada kejelasan mengenai asal usul deviden tersebut sampai hasil audit BPKP keluar, sehingga deviden tersebut tidak dapat dipergunakan yang dalam istilah diperbankan diletakan pada rekening *Escrow Account*.

s. Sesuai Surat Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor S-24/D6/01/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang **hasil audit** BPKP Perwakilan Sumatera Barat terhadap PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park telah selesai dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat.

   Upaya penyelesaian yang telah dilakukan:

   1) Pada tanggal 22 September 2017 diadakan rapat penyelesaian permasalahan penyertaan modal Pemprov Sumbar pada PT ARP/PT PIP yang dihadiri Staf Ahli Bidang Hukum, Asisten Ekbang dan Kesra, Asisten Pemerintahan,

Inspektur Provinsi, Ka Bakeuda, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kepala Biro Perekonomian, rapat dipimpin oleh Gubernur Sumatera Barat, dengan hasil meminta BPKP Perwakilan Sumbar untuk menjelaskan hasil Audit Investigasi yang dilakukan, agar lebih mudah dipahami oleh SKPD terkait untuk langkah-langkah penyelesaiannya.

2) Pada tanggal 25 September 2017 telah diadakan rapat penyelesaian permasalahan penyertaan modal Pemprov Sumbar pada PTARP/PTPIP yang dihadiri Staf Ahli Bidang Hukum, Asisten Ekbang dan Kesra, Asisten Pemerintahan, Inspektur Provinsi, Ka Bakeuda, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kepala Biro Perekonomian, rapat dipimpin oleh Gubernur Sumatera Barat, dengan hasil sebagai berikut :
   a) bahwa sebagai tindak lanjut penyelesaian hasil audit investigasi BPKP Perwakilan Sumatera Barat peserta rapat sepakat untuk diserahkan penyelesaiannya melalui jalur hukum.
   b) Untuk, pelaksanaan penyelesaian melalui jalur hukum peserta rapat sepakat agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyerahkan dan memberikan kuasa kepada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pengurusan dan pengajuan ketingkat penyidikan.

t. Pada tanggal 1 November 2017 diundang Direktur PT ARP untuk dapat hadir pada rapat yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 November 2017 bertempat di Istana Gubernuran guna membahas tindaklanjut hasil rapat tanggal 25 September 2017 tentang hasil audit investigasi permasalahan aset Pemprov Sumbar pada PT ARP/PT PIP, namun berdasarkan surat tanggapan dari Direktur PT ARP (Bpk. Dedy Harun) Nomor 001/PTARP/R/XI/2017 tanggal 3 November 2017 yang dialamatkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dengan alasan yang bersangkutan belum mendapat/menerima hasil Audit Investigasi permasalahan aset Pemprov Sumbar pada PT ARP/PT PIP yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumbar.

u. Sesuai dengan hasil rapat tanggal 25 September 2017 sebagaimana disebutkan pada point 18.b diatas, maka pada tanggal 7 November 2017 Gubernur Sumatera Barat memberikan kuasa kepada BPKP Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjuti audit investigasi melalui jalur hukum (surat Kuasa terlampir).

v. Sesuai dengan Surat Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat kepada Gubernur Sumatera Barat Nomor S-2416/PW03/5/2017 tanggal 20 November 2017, perihal Hasil Ekspose Laporan Audit Investigasi atas Penyertaan Modal Pemprov Sumbar pada PTARP dan PTPIP kepada Kejaksaan Tinggi Sumbar, menyatakan bahwa :
   1) Laporan Hasil Audit Investigasi atas Penyertaan Modal Pemprov Sumbar pada PTARP dan PTPIP tidak dapat ditindaklanjuti ke jalur pidana khusus oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat karena telah daluarsa (Pasal 78 KUHP).
   2) Hasil Audit Investigasi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan jalur perdata dan tata usaha negara melalui koordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

w. Surat Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat Nomor S-2416/PW03/5/2017 tanggal 20 November 2017, tersebut pada point 21 diatas yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat, dan pada tanggal 5 Desember 2017 Gubernur mendisposisikan surat dimaksud kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjutinya.

x. Pada tanggal 11 Desember 2017 Direktur PT ARP (Bpk Dedy Harun) mengundang Gubernur Sumatera Barat untuk hadir pada rapat yang membahas rencana internal Pemegang Saham dan hasil audit BPKP, namun rapat ini tidak dapat dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili, karena undangan rapat tersebut diterima Biro Perekonomian dari Biro Umum pada jam 09.10 Wib tanggal 11 Desember 2017. Pada saat itu juga undangan tersebut langsung disampaikan kepada ajudan Gubernur.

y. Pada tanggal 18 Desember 2017 Direktur PT ARP (Bpk. Dedy Harun) memberikan satu map kepada Staf Biro Perekonomian yang berisikan berita acara hasil rapat tanggal 11 Desember 2017 dengan hasil/keputusan peserta rapat menyetujui rencana restrukturisasi komposisi pemegang saham perseroan dan meminta agar manajemen PT ARP mempersiapkan dan melaksanakan RUPS selambat-lambatnya 30 hari kedepan dan meminta manajemen PT PIP untuk melakukan audit terkait kinerja, keuangan dan penyertaan modal TPM Technopark SDN BHD serta mendapatkan hasil audit BPKP untuk diberikan kepada seluruh pemegang saham.

z. Pada tanggal 9 Januari 2018 pertemuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selaku pemegang saham dengan Direktur PT ARP terkait penyelesaian permasalahan aset Pemprov pada PT ARP/PT PIP yang direncanakan tanggal 16 Januari 2018;

aa. Pada tanggal 10 Januari 2018 pertemuan Pemprov Sumbar dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terkait penjelasannya terhadap tindak lanjut hasil audit investigasi permasalahan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT ARP/PTPIP dan BPKP menyarankan sebelum menempuh jalur perdata perlu dilakukan pendekatan mediasi oleh berbagai pihak untuk kesepakatan melalui mediasi oleh BPKP selaku lembaga pemerintah dengan pemprov, Pihak swasta dan pemegang saham PT ARP serta PT PIP/pihak Johor Technopark yang dibicarakan untuk disepakati pada rapat tanggal 16 Januari 2018 nantinya.

bb. Tanggal 26 Januari 2018 rapat dengan Gubernur Sumbar dan PT ARP/PTPIP serta BPKP terkait rencana mediasi penyelesaian permasalahan PT ARP/PTPIP dengan hasil sebagai berikut:

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama dengan pemegang saham dan manajemen PT ARP/PT PIP sepakat dimediasi sepenuhnya oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam upaya penyelesaian permasalahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi pada PT ARP/PT PIP dan ini disahkan dengan penandatangan kesepakatan dikedua belah pihak;

cc. Pada tanggal 31 Maret 2018 menyurati BPKP Provinsi Sumatera Barat melalui surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 530/152.A/Perek-Sarana/2018 bahwa PT ARP/PT PIP bersedia dimediasi oleh BPKP Provisi Sumatera Barat dalam upaya penyelesaian aset Pemprov ke PT ARP/PT PIP dengan menyerahkan kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemegang saham lainnya di PT ARP.

dd. Pada tanggal 11 April 2018 pertemuan pemprov Sumbar Asisten II (Bapak Syafruddin) dengan Tim BPKP Perwakilan Sumbar (Bapak Posma Cs) membicarakan/menyepakati besaran yang didapatkan oleh Pemprov Sumbar dalam proses mediasi yang dilakukan oleh BPKP dan disepakati Pemprov 60% dan 40% untuk Irman Gusman Cs dan PT PIP.

hh. Pada tanggal 23 April 2018 pertemuan Pemprov Sumbar dan Kanwil BPN Provinsi dan BPN Kab Padang Pariaman dengan undangan Sekretaris Daerah Nomor 500/196/Perek-Sarana/2018 tanggal 18 April 2018 terkait langkah langkah yang dilakukan oleh Pemprov dalam pengurusan HPL tanah 108 ha, namun pada kesempatan itu belum ada kesimpulan karna pihak BPN mempelajari terlebih dahulu LHAI BPKP Perwakilan Sumatera Barat, sehingga pada saat itu disepakati rapat diskor untuk sementara waktu sampai jadwal berikutnya ditetapkan.

ff. Tanggal 18 Mei 2018 sesuai undangan Sekretaris Daerah Nomor 500/228/Perek-Sarana/2018 yang dipimpin oleh Kepala Biro Perekonomian dengan peserta rapat Staf Ahli Bidang Hukum, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, BPN Padang Pariaman, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, BPKP Provinsi Sumatera Barat, Inspektorat Provinsi, Biro Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Biro Hukum serta Direksi PT PIP dengan kesimpulan bahwa pembuatan alas hak berupa HPL terhadap tanah Pemprov Sumbar seluas 108 Ha yang diserahkan kepada PT ARP/PTPIP. ditetapkan melalui RUPS-LB PT ARP.

jj. Pada tanggal 12 Juli 2018 manajemen PT ARP (Deddy Harun Cs) bertemu Biro perekonomian membicarakan kejelasan proses pembuatan alas hak atas tanah 108 ha.

kk. Pada tanggal 20 Juli 2018 diadakan RUPS-LB PT Andalas Rekasindo Pratama dengan undangan nomor 001/RUPS/ARP/DIR/VII-2018 tanggal 2 Juli 2018 di ruang rapat Biro Perekonomian *Escape Building* yang dihadiri oleh para pemegang saham dengan agenda :

1) RUPS tahunan :
   a) Laporan pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris PT ARP
   b) Laporan Keuangan PT ARP s/d Desember 2017
2) RUPS-LB :
   a) Membahas kesepakatan pembuatan alas hak berupa HPL terhadap tanah 108 Ha, yang diserahkan oleh pemprov Sumbar sebagai penyertaan saham pada PT ARP/PT PIP pada Tahun 1995.
   b) Penetapan Susunan Pengurus PT ARP

Namun dikarenakan masing-masing peserta rapat tidak membawa surat kuasa dari pemegang saham dan sampai saat ini peserta rapat tersebut tidak menyerahkan surat kuasa dari pemegang saham untuk mengikuti RUPS tersebut, maka RUPS tersebut tidak memenuhi kuorum dan dinyatakan batal oleh Notaris.

ii. Rentang waktu Akhir 2018 sampai Pertengahan Juni 2019 pihak kejaksaan masih memintai keterangan terkait PT AR/PTPIP termasuk mantan pejabat dan pensiunan dari Biro perekonomian;

jj. Pada tanggal 18 Juli 2019 Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat memintai dokumen asli terkait PT ARP/PT PIP;

kk. Tanggal 10 Juni 2020 komunikasi via WA Kasubag BUMD dengan pak Kurniawan (Kejati Sumbar) untuk memintai dokumen asli yang di pinjamkan ke pak kurniawan untuk kepentingan penyidikan dan dokumen tersebut masih diperlukan hingga sekarang.

ll. Pada tanggal tanggal 12 Juli 2021 diadakan rapat tindaklanjut analisa pengembangan dan evaluasi PT Padang Industri Park (PIP) dan PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) yang dihadiri oleh Irfan Jasri Direktur PT Padang Industri Park (PIP) dan Dedi Harun Asisten Direktur PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dalam rapat tersebut disarankan sebanyak lima antara lain :

1) Menyurati Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk minta informasi terkait sampai dimana proses penyelidikan kasus PT ARP dan PT PIP.
2) Mohon adanya Surat Pencabutan Penghentian Perkara (SP3) terhadap kasus perdata yang ada di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
3) Menyampaikan solusi kepada kedua belah pihak antara pemerintah daerah dengan PT ARP setelah itu baru kepada PT PIP.
4) Mendorong PT ARP untuk segera melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
5) Melakukan kajian terhadap pencabutan moratorium yang dikenakan terhadap PT PIP.

mm. Pada hari Senin tanggal 6 September 2021 pertemuan dengan dengan Pihak PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan Pihak PT Padang Industri Park (PIP), dengan tujuan menindaklanjuti langkah-langkah penyelesaian masalah PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan Pihak PT Padang Industri Park (PIP) dari pertemuan tersebut diambil kesepatan bahwa dalam penyelesaian ini diminta kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebagai Pendamping Penyelesaian Aset/lahan PT ARP dan PT PIP.

nn. Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor Print-964/L.3/Fd1/09/2021 tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (PT ARP) dan PT Padang Industrial Park (PT PIP).

oo. Pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 dilaksanakan penyerahan barang bukti sebanyak 47 (empat puluh tujuh) barang bukti antara Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang diwakili oleh Ilhamd Wahyudi, SH. MH yang menyerahkan dengan Pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Ridawati Kepala Sub Bagian Ekonomi Makro yang menerima.

pp. Pada tanggal 24 September 2021 dikirimkan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 500/435/Perek-BB-2021 tanggal 24 September 2021, perihal Permintaan Tenaga Pendampingan Hukum Penyelesaian Aset/lahan PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan Pihak PT Padang Industri Park (PIP).

qq. Pada tanggal 18 Oktober 2021 diadakan rapat Rapat Tindak lanjut dan Langkah-langkah Penyelesaian Aset PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan PT Padang Industrial Park (PIP) dan Persiapan pertemuan Gubernur Sumatera Barat dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan kesimpulan sebagai berikut :

1) Adanya pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam proses penyelesaian penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park, dengan tujuan yakni :
   a) mengumpulkan dan mengolah data/informasi terkait keberadaan PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park;
   b) melakukan konfirmasi tentang keberadaan data/informasi terkait keberadaan PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park.
   c) melakukan analisa dan kajian data/informasi dikaitkan dengan status hukum investasi yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
   d) memberikan rekomendasi, alternatif dan solusi kebijakan kepada Sekretaris Daerah agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara optimal.
2) Membentuk Tim Teknis dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Tim Pendamping Teknis dari kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
3) Diharapkan kedua Tim Teknis dimaksud dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada serta penyertaan modal PT ARP dan PT PIP dapat diselesaikan pada tahun 2021.

rr. Pada tanggal 19 Oktober 2021 diadakan rapat Rapat/pertemuan Gubernur Sumatera Barat dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terkait penyelesaian penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan PT Padang Industrial Park (PIP) kesimpulan sebagai berikut :
   1) Gubernur Sumatera Barat bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk menyelesaian permasalahan yang terjadi pada PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park.
   2) Gubernur Sumatera Barat menyurati Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk meminta tenaga Pendamping Hukum dalam penyelesaian masalah PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park.
   3) Dalam melaksanakan tugas dibentuk Tim Teknis dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Tim Pendamping Teknis dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
   4) Kedua Tim dimaksud dapat menyelesaikan permasalahan penyertaan modal pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park dengan segera.

ss. Pada tanggal 29 Oktober 2021 dikirimkan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 500/652.A/Perek-BB-2021 tanggal 29 Oktober 2021, perihal Permintaan Tenaga Pendampingan Penyelesaian Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan Pihak PT Padang Industri Park (PIP).

tt. Pada tanggal 22 November 2021 diterima Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor B-3071/L.3/Gp.2/11/2021 tanggal 09 November 2021, perihal Permintaan Tenaga Pendampingan Hukum Penyelesaian Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan Pihak PT Padang Industri Park (PIP).

uu. Pada tanggal 15 Desember 2021 Tim Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bersama Tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melakukan kunjungan lapangan (survey) secara bersama, guna merumuskan fakta serta kondisi terkini tentang keberadaan PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan PT Padang Industrial Park (PIP).

vv. Pada tanggal 21 Desember 2021 diadakan rapat Rapat Persiapan dan Pemantapan Tim Percepatan Penyelesaian Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan PT Padang Industrial Park (PIP) kesimpulan sebagai berikut :

1) Ada 2 (dua) opsi yang diajukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mengenai penyelesaian PT PIP yaitu :
   a) Pengembalian aset kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
   b) Kerjasama dengan PT PIP dalam pengelolaan lahan dan menutup/membubarkan PT ARP.
2) Sekiranya dalam proses negosiasi antara Pemerintah Provinsi dengan PT PIP tidak ada keputusan dalam proses penyelesaian asset ini, maka pihak Pemerintah Provinsi sebaiknya segera menindaklanjutinya melalui proses pengajuan penetapan oleh Pengadilan Negeri yaitu dengan menyiapkan dokumen-dokumen dan bahan-bahan pendukung yang akan didampingi oleh Tim dari Kejaksaan Tinggi.

   Tujuan untuk pengajuan penetapan di Pengadilan Negeri adalah agar Pemerintah Provinsi mempunyai kekuatan hukum apabila pihak PIP/JSEDC Techno Park (JTP), melakukan klaim melalui pengadilan arbitrase internasional serta apabila ada klaim dari pihak lain dikemudian hari.

   Mengenai pembiayaan untuk proses penetapan ke Pengadilan Negeri, disarankan oleh Tim Kejaksaan Tinggi untuk dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi pada APBD tahun 2022 dan rencananya jam 14.00 wib hari ini kami akan rapat Kembali dengan Tim Kejaksaan Tinggi di DPKAD untuk membahas hal tersebut.
3) Hasil pertemuan Bapak Gubernur Sumatera Barat yang didampingi oleh Sekretaris Daerah bersama Tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 tempat Istana Gubernuran, bahwa dengan kondisi sekarang ini sulit bagi Tim Kejaksaan dalam bekerja dengan leluasa dan gerak cepat karena disebabkan oleh kondisi birokrasi di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.
4) Tim Kejaksaan minta kepada Gubernur agar mengirimkan Surat Permintaan Bantuan Hukum dan Pendampingan Hukum kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat guna percepatan penyelesaian modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park, untuk memperkuat langkah-langkah yang akan dilakukan secara tepat dan cepat maka sangat diperlukan dokumen pendukung lainnya.
5) Langkah-langkah alternatif yang akan ditempuh adalah dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk penetapan pengadilan, sedangkan pihak pengadilan negeri memeriksa dokumen-dokumen yang ada pada PT ARP dan PT PIP.

ww. Pada tanggal 23 Desember 2021 diadakan rapat Rapat Lanjutan Persiapan pemantapan Tim Percepatan Penyelesaian Modal Pemerintah Provinsi Sumatera

Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan PT Padang Industrial Park (PIP) kesimpulan sebagai berikut :

6) Ada beberapa opsi yang diajukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terhadap penyelesaian PT PIP yaitu :
   a. Langkah-langkah alternatif yang akan ditempuh adalah dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk penetapan pengadilan, sedangkan pihak pengadilan negeri akan memeriksa dokumen-dokumen yang ada pada PT ARP dan PT PIP.
   b. Kembalinya aset (tanah 108 ha) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
   c. Menutup dan/atau membubarkan PT ARP dan PT PIP.
7) Pemerintah Provinsi sebaiknya segera menindaklanjuti melalui proses pengajuan penetapan oleh Pengadilan Negeri yaitu dengan menyiapkan dokumen-dokumen dan bahan-bahan pendukung yang akan didampingi oleh Tim dari Kejaksaan Tinggi.

   Tujuan untuk pengajuan penetapan/pemeriksaan di Pengadilan Negeri adalah agar Pemerintah Provinsi mempunyai kekuatan hukum dalam menghadapi pihak PIP/JSEDC Techno Park (JTP), apabila mereka melakukan klaim melalui pengadilan arbitrase internasional serta kalau ada klaim dari pihak lain dikemudian hari.
8) Pihak kejaksaan tidak menemukan dokumen AD-ART tahun 2008 PT PIP dan tidak melakukan RUPS, pada Januari 2011 Pemerintah Provinsi Sumbar diwakili oleh Asisten II, melakukan negosiasi terhadap komposisi saham yaitu 60% : 40% (1,9 Milyar) sebagai saham atau capital gain.
9) Mencermati saran dan masukan yang berkembang dari peserta rapat, dapat kami sampaikan bahwa alternatif solusi terbaik yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah dengan melakukan pembubaran PT ARP dan PT PIP.

   Hal ini memang tidak mudah karena membutuhkan persetujuan prinsip dari unsur legislatif daerah khsusnya pada proses perumusan peraturan daerah tentang pembubaran PT ARP dan PT PIP nantinya.

xx. Pada tanggal 27 Desember 2021 dikirimkan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 500/580/Perek-BB-2021 tanggal 27 Desember 2021, perihal Permintaan Bantuan Hukum dan Pendampingan Hukum terkait Penyelesaian Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan Pihak PT Padang Industri Park (PIP).

yy. Pada tanggal 25 Januari 2022 diadakan rapat Tidak lanjut Penyelesaian Penyertaan Modal Pemprov Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park Bersama Tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Penyampaian Paparan terkait tindaklanjut Penyelesaian Penyertaan Modal Pemprov. Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park dari persfektif hukum bisnis oleh Miko Kamal, SH, LLM, Ph. D.

zz. Pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 diadakan rapat Tidaklanjut Penyelesaian Penyertaan Modal Pemprov. Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park Bersama Tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Bersama ahli hukum bisnis oleh Miko Kamal, SH, LLM, Ph. D. yang diadakan oleh Biro Hukum.

aaa. Pada tanggal 22 Juni 2022 telah dilakukan pertemuan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Drs.Hansastri, MM, Wardarusmen, SE.MM, Ezeddin Zain SH. MH, Ria Wijayanty, ST, M.Si) bersama Tim Penyelesaian PT ARP/PIP dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat (Fahri, SH.MM, Bob Sulistian, SH, MM, Hendri Lubis, SH.MH, Rini Anita C, SH, MH) dengan pihak PT PIP dari Johor Malaysia (Irvan Jasri, Mhmd. Taufik Esa, Shafei Sulaiman, Ibrahim Abdhul Somad)

bbb. Dari Pertemuan antara Pihak PT PIP dengan Tim dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, ada beberapa informasi yang berkembang antara lain:
   a. Pada kesempatan ini pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa sesuai Rekomendasi BPK dan DPRD mempertanyakan tentang keberadaan PT ARP yang tidak memberikan hasil (deviden) ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
   b. Koordinator Kejaksaan Negeri (Fahri, SH.MH) berpendapat bahwa PT ARP dan PT PIP memiliki masalah hukum, yang mana PT ARP yang pemegang sahamnya terdiri dari Pemprov Sumbar dan empat orang dari individu, namun sampai saat ini saham dari empat individu tersebut tidak pernah memenuhi/menyetor sahamnya, sehingga secara hukum mereka tidak bisa bertindak untuk dan atas nama PT ARP.
   c. Disamping itu PT ARP dan PT PIP tidak sepenuhnya memedomani Amanah Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mana pada ketentuan Pasal 22 menegaskan tentang perusahaan penanam modal untuk memperoleh hak atas tanah. PT ARP dan PT PIP akan kehilangan hak atas tanah setelah beroperasional selama 50 tahun namun pada pendirian PT PIP masa berdirinya 75 Tahun, sehingga menyebabkan pendirian PT PIP cacat Hukum.
   d. Selanjutnya pihak Johor (Ibrahim) menjelaskan bahwa antara PT ARP dan PT PIP selalu melakukan RUPS setiap tahunnya, dan memberikan deviden kepada PT ARP. Namun dapat berdasarkan laporan keuangan perusahaan memang mengalami kerugian, akan tetapi di dalam kas terdapat dana 40 milyar yang dibagikan melalui RUPS dengan komposisi masing-masing PT ARP sebesar 45% dan PT PIP 55%.

ccc. Sehubungan dengan hal tersebut, dari pertemuan ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
   a. Pihak kejaksaan memberikan estimasi 2-3 bulan sebelum proses pengadilan agar dapat memberikan keputusan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah pemegang Saham Tunggal pada PT ARP.
   b. Diminta kepada pihak Johor dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk tidak melakukan kesepakatan atau kegiatan Kerjasama dengan Pihak Swasta atau PT Andalas Rekasindo Pratama (PT ARP).
   c. Memastikan kembali keabsahan keberadaan PT ARP, berupa ketaatan dalam penyampaian laporan hasil RUPS kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum KemenkumHAM dan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak penghasilan perusahaan secara berkala kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Padang.

ddd. Guna menindaklanjuti hasil pertemuan di Batam yang salah satunya memastikan keabsahan atau keberadaan PT ARP di Kemenkumham RI maka melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera barat Nomor 500/473/Perek-BB/2022 tanggal 6 Juli 2022 perihal Konfirmasi Eksistensi BUMD disurati Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.

eee. Namun sampai saat ini belum ada balasan dari kementerian Hukum dan HAM terkait Surat dimaksud

fff. Pada tanggal 13 Oktober 2022 telah dilakukan *Forum Group Disscussion* (FGD) terkait Finalisasi Hukum penyelesaian permasalaahan Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (PT ARP) dan PT PIP bertempat di Ruang rapat Jamdatun Kejaksaan Agung RI di Jakarta, yang dihadiri oleh Direktur Perdata Jamdatun, Kasubdit Penegakan hukum Direktorat Perdata, Tim Perdata Jamdatun, Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat, Tim Biro Ekonomi Setda Prov Sumbar dan Biro Hukum Setda Prov Sumbar, Kajati Sumbar danTim JPN Kejati Sumbar.

ggg. FGD dimaksud menghadirkan 4 Orang Narasumber yang berasal dari Tim JPN Kejati Sumbar dengan masing-masing judul paparan:

a. Mekanisme Pemeriksaan Perseroan di Pengadilan oleh Yusron. SH.MH (Tim JPN Kejati Sumbar).
b. Eksistensi Bidang Datun Dalam Pencegahan/Penyimpangan Kerugian Keuangan Negara oleh Khaidir SH. MH (Tim JPN Kejati Sumbar)
c. Peran Jaksa Pengacara Negara dan Pembubaran Perseroan oleh Fahri SH. MH (Tim JPN Kejati Sumbar)
d. Tindaklanjut penyelesaian Penyertaan Modal Pemprov Sumbar pada PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park oleh Bob Sulistian SH. MH (Tim JPN Kejatai Sumbar).

hhh. Dari informasi yang berkembang dalam rapat FGD dimaksud maka disimpulkan bahwa dalam rangka penyelesaian penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT ARP dan PT PIP, Tim JPN akan mengajukan pemeriksaan perseroan ke Pengadilan terhadap PT ARP dan selanjutnya mengajukan pembubaran PT ARP.

iii. Pada tanggal 28 Oktober 2022 pihak TPM Technopark SDn. BHD menyurati Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera barat melalui surat nomor (101) dlm.KEW/AM/2022 menanyakan sejauhmana perkembangan dari hasil pertemuan di Batam pada tanggal 22 Juni yang lalu.

jjj. Melalui surat Sekretaris Daerah Nomor 500/812/perek-BB/2022 tanggal 15 November 2022 perihal Informasi tentang PT ARP, dijelaskan kepada pihak Johor dimaksud bahwa Tim Batuan Hukum dari Kejaksaan Tinggi akan bertindak selaku wakil dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai pemegang saham pada PT ARP akan mengambil langkah menggugat PT ARP melalui jalur Pengadilan

kkk. Pada tanggal 16 November 2022 staf dari kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, masih meminta beberapa Dokumen untuk dipersiapkan lagi dalam proses yang akan diajukan dimaksud.

lll. Terkait dokumen dimaksud ada beberapa dokumen yang dibutuhkan dari PT PIP maka melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 500/832/Perek-BB/2022 tanggal 21 November 2022 perihal permintaan data dapat mengirimkan dokumen yang diminta.

mmm. Karena belum adanya jawaban terkait Surat Sekretaris Daerah Nomor 500/473/Perek-BB/2022 tanggal 6 Juli 2022 perihal Konfirmasi Eksistensi BUMD disurati Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta, maka pada tanggal 21 November 2022 pihak Kejaksaan menyurati juga Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat melalui surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor 2639/L.3/Gp.2/11/2022.

nnn. Sampai pada tangggal 5 Desember 2022 belum juga ada jawaban, maka pada tanggal 6 Desember 2022 pihak kejaksaan tinggi dan Biro Perekonomian melakukan koordinasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, maka dari hasil koordinasi pihak Kanwil mengatakan tidak ada data perusahaan dimaksud namun untuk penjelasan lebih lanjut sebaiknya dilakukan koordinasi ke Kantor pusat Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta.

ooo. Pada tanggal 7 Desember 2022 pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menyurati Direktur Perdata Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian

Hukum dan HAM melalui surat Nomor B-2754/L.3/Gp.2/2022 perihal Permintaan Data Perusahaan (*Company Profile*) PT Andalas Rekasindo Pratama (PT ARP).

ppp. Menindaklanjuti hasil koordinasi dimaksud maka pada tanggal 13 Desember 2022 diperintahkan Biro Perekonomian untuk melakukan koordinasi ke pusat, sesuai dengan koordinasi bersama Subkoordinator Dokumentasi dan Pengumumam Badan Hukum Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, bahwa terkait dengan Data Perusahaan PT Andalas Rekasindo Pratama, secara Aministrasi Data Perusahaan tercatat di Kementerian Hukum dan HAM RI namun untuk data: **maksud dan Tujuan perusahaan, besarnya Modal Dasar, modal ditempatkan serta modal disetor semua kosong**, sampai saat ini bagian Kearsipan KemekumHAM masih mencari arsip terkait data perusahaan dimaksud dan kita akan terus berkoordinasi dengan pihak Kemenkumham RI.

qqq. Pada tanggal 27 Desember 2022 Kementerian Hukum dan HAM membalas Surat Sekretaris Daerah Nomor 500/473/Perek-BB/2022 tanggal 6 Juli 2022 melalui surat KemenkumHAM Nomor AHU.2.UM.01.01-5159 Perihal Konfirmasi Eksistensi BUMD.

rrr. Menindaklanjuti Surat Direktur PT ARP tanggal 23 November 2022 Direktur PT ARP menyurati Gubernur Sumatera Barat melalui surat Nomor 023/UPM-PIP/ARP/DIR/XI-2022 Perihal Permohonan pencabutan Moratorium PT PIP, maka diadakan rapat pada tanggal 13 Januari 2023 dengan kesimpulan Rapat bahwa Moratorium belum bisa dicabut sampai permasalahan Penyertaan modal Pemprov sumbar selesai.

sss. Pada tanggal 16 Februari 2023 bersama Sekretaris daerah, AssI,II, dan III, kepala BPKAD, Inspekrtorat, kepala Biro Hukum Biro Perekonomian untuk penyamaan persepsi , dengan kesimpulan rapat mempertanyakan kembali apakah yang diminta pihak Kejaksaan orang atau lembagnyanya untuk melakukan pemeriksaan perusahaan, setelah dikoodinasikan oleh Buk Del ke pak Bot ternyata mereka minta Lembaga ditawarkan buk del BPKP, untuk keputusan Pak sekda yang akan menelpon kejati.

ttt. Pada tanggal 11 April 2023 pihak TPM Technopark SDn. BHD menyurati Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera barat melalui surat nomor Nomor (100) dlm.KEW/AM/2021 menanyakan sejauhmana perkembangan dari hasil pertemuan di Batam pada tanggal 22 Juni yang lalu.

uuu. Maka melalui surat Sekretaris Daerah Nomor 500/339/perek-BB/2022 tanggal 9 Mei 2023 perihal Informasi tentang PT ARP, dijelaskan kepada pihak Johor dimaksud bahwa pihak Pemprov Sumbar sedang menunggu persetujuan dari pihak Kejaksaan Tinggi terkait Lembaga yang sudah diusulkan untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Perusahaan.

vvv. Pada tanggal 16 Mei 2023 di Kantor BPKP Perwakilan Sumatera Barat diadakan ekspose oleh penyidik kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dengan materi ekspose TL penyelesaian penyertaan modal Pemerintah Prov. Sumbar pada PT ARP dan PIP. Dengan kesimpulan:

- Dari paparan/ekspose yang disampaikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, terlihat adanya penyimpangan pada kasus tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat akan berkonsultasi dengan BPKP Pusat.
- BPKP akan melakukan telaah terlebih dahulu atas kegiatan tersebut, sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 setelah data-data dan dokumen dialas diterima. Selama Proses penelaahan, BPKP akan meminta bukti tambahan yang dianggap perlu.

www. Pada tanggal 20 Juli 2023 pihak Johor Technopark kembali menyurati Bapak Gubernur melalui surat Nomor (101)dlm.KEW/AM/2021 perhal masih

menanyakan perkembangan terkini Isu Moratorium dan isu Pemegang Saham di Dalam PT ARP.

xxx. Guna menindaklanjuti surat dimaksud, pada tanggal 01 Agustus 2023 jam 8.30 wib di ruangan Istana Gubernuran dipimpin langsung oleh Bapak Sekretaris Daerah dengan peserta Rapat dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Inspektorat Prov. Sumbar, Sekretaris DPRD Prov. Sumbar, BPKAD Prov Sumbar, Biro Hukum Setda Prov Sumbar dan Biro Perekonomian Setda Prov. Sumbar, dengan kesimpulan rapat tim akan mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan terhadap PT. ARP ke Pengadilan Negeri Padang paling lambat minggu ke dua bulan Agustus 2023 dan masing-masing pihak terkait diminta untuk melakukan persiapan lebih lanjut untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan oleh pengadilan, maka disurati kembali TPM Tekhnopark melalui surat Gubernur Nomor 500/549/Perek-BB/2023 tanggal 11 Agustus 2023 perihal Perkembangan Terkini Isu moratorium dan Pemegang saham pada PT ARP.

yyy. Pada tanggal 26 September 2023 Pengarah Eksekutif TPM Technopark SDN BHD kembali menyurati Gubernur Sumatera Barat melalui surat (101) dlm.KEW/AM/2021 yang mana dalam surat dimaksud Pihak TPM Technopark SDN BHD menyampaikan keinginan mereka untuk mengundurkan diri jika tidak ada perkembangan prositif dari isu yang ada dan mengajukan permohonan agar moratorium PT. PIP di Tarik kembali.

zzz. Untuk menindaklanjuti surat dimaksud sesuai arahan Bapak Gubernur maka pada tanggal 2 Oktober 2023 diadakan rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah yang dihadiri oleh Asisten I Sekda Prov, Kepala BPKAD Prov. Sumbar, Inspektur Prov. Sumbar, Kepala Bappeda Prov. Sumbar, Kepala Biro Hukum Setda Prov Sumbar, Kepala Biro PBJ Setda Prov. Sumbar, Biro Perekonomian Prov Sumbar, dengan kesimpulan rapat Permintaan untuk pencabutan moratorium belum bisa dilakukan oleh Pemprov sehubungan belum selesainya permasalahan saham antara PT ARP dengan pihak Pemprov Sumbar, dan akan diadakan rapat dalam waktu dekat dengan Bapak Gubernur bersama pihak Kejaksaan Tinggi serta OPD terkait

aaaa. Guna menindaklanjuti maksud diatas maka pada tanggal 4 Oktober 2023 diadakan rapat yang bertempat di Ruang VVIP Bandara Internasional Minangkabau yang dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat (Mahyeldi), Kepala Kejati Sumbar (Asnawi), Asdatun Kejati (Khaidir), Kasi Perdata (Bob Sulistian), Hendri Lubis (Kasi TUN), Ivon Desuputra (JPN) Krisna Juita (JPN), Rini Anita Carolina (JPN), Sekretaris Daerah (Hansasatri), Asisten administrasi (Andri Yulika), Kepala Biro Hukum (Ezeddin Zain), Kepala BPKAD (Rosail AP), Kepala Bappenda (Medi Iswandi), Kepala Biro Perekonomian (Ria Wiyanty) M. Rezha Fahlevie (Kabag Bantuan Hukum), dengan kesimpulan rapat akan diadakan pertemuan antara pihak Pemprov Sumbar dengan Pihak Johor Technopark dan ARP yang diadakan oleh Pihak kejata, dan Pendaftaran terhadap pemeriksaan perusahaan ARP ke Pengadilan tetap dilanjutkan.

bbbb. Pada tanggal 16 Oktober 2023 sebagai tindaklanjut dari rapat pada tanggal 4 oktober 2023 maka diadakan perteuan dengan pihak johor dan pihak swasta di hotel Santika Padang yang dihadiri oleh Bapak Gubernur dan Kepala Kejaksaan Tinggi Padang (Daftar hadir terlampir) maka ada beberapa jalan keluar yang dapat ditempuh yaitu:

- Membuka blokiran/moratorium DPRD
- Terhadap aset tanah yang tinggal di HPL kan dan dicatat pada aset pemprov.

- Pendaftaran yang di pengadilan tetap berjalan, jika diselesaikan di luar pengadilan dilaksanakan RUPS-LB dengan misi menyelamatkan aset-aset yang ada
- Komisaris utama pada PT PIP bapak YV Tri Saputra menyarankan kepada pemprov Sumbar untuk ambil ahli masalah ini selesaikan dengan pemegang saham lain karena pemprov sumbar merupakan pemegang saham pengendali pada PT ARP, (sepanjang Perda belum dicabut maka pemprov masih sebagai pemegang saham pengendali).

Dari pembahasan dan diskusi maka disimpulkan sebagai berikut:

- Karena kekosongan kepengurusan perusahaan maka Pemprov sebagai pemegang saham pengendali agar dapat mengundang pemegang saham pihak swasta untuk melakukan RUPS-LB PT ARB dengan agenda
  - Tetapkan persentase (%) pemegang saham.
  - Pembahasan Neraca perusahaan selama ini.
  - Membicarakan terkait struktur perusahaan.
- Segera HPL lahan Pemprov
- Diharapkan pemprov bisa duduk bersama dengan DPRD
- Pemeriksaan perseroan oleh tenaga ahli dilanjutnya guna mengetahui kondisi PT ARP sekarang.
- Pihak TPM Technopark SDN. BHD (PT PIP) untuk bersabar, karena proses penyelesaian masalah aset Pemprov di ARP sedang berjalan, kalau sudah ada kejelasan aset Pemprov di ARP maka moratorium bisa cabut.

cccc. Sebelum pihak pemprov melaksanakan RUPS maka dilakukan pertemuan dengan OPD terkait guna persiapan pelaksanaan RUPS PT ARP dimkasud, maka diadakan pertemuan pada tanggal 2 November 2023 yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur Prov. Sumbar, Kepala Bapeda, BPKAD, Biro Hukum dan Biro Perekonomian dengan kesimpulan rapat dilakukan pertemuan lanjutan dengan menghadirkan TIM dari JPN Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, BPN Kota Padang Pariaman dan OPD terkait, serta dilakukan analisis lebih lanjut terhadap beberapa alternatif kebijakan yang akan diambil.

dddd. Sebagai tindaklanjut rapat tanggal 2 November 2023 maka pada tanggal 28 November 2023 dilakukan pertemuan lanjutan yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Biro hukum, BPKAD, BPN Padang Pariaman dan JPN Kejaksaan dengan kesimpulan rapat;

- Untuk kelengkapan pengurusan HPL diminta kepada BPKAD Provinsi Sumatera Barat (buk Ema) untuk berkoordinasi secara intens dengan pihak BPN kab. Padang Pariaman.
- RUPS PT ARP di tunda sampai adanya penetapan keputusan pengadilan

eeee. Pada tanggal 29 Januari 2024 keluar penetapan pengadilan Nomor 413/Pdt.P/2023/PN Pdg antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat lawan PT ARP.

ffff. Menindaklanjuti penetapan putusan pengadilan dimaksud pada tanggal 12 februari 2024 dilakukan pertemuan dengan PD terkait Provinsi, Kejaksaan dan BPKP dengan kesimpulan rapat sebagai berikut;

- tim kejaksaan akan melakukan ekspose dengan BPKP
- Tim kejaksaan akan mernyampaikan tim pemeriksa dari BPKP ke pengadilan
- BPKP akan berkoordinasi dengan BPKP pusat untuk mendapatkan arahan lebih lanjut
- Biaya pelaksanaan pemeriksaan telak dialokasikan pada DPA Biro Perekonomian tahun 2024

gggg. Menindaklanjuti hasil rapat tanggal 12 Februari 2024, BPKP telah menyurati Kepala kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat melalui surat Nomo PE.04.02/S-719/PW03/5/2024 tanggal 2 Mei 2024 perihal Audit dengan tujuan tertentu lainnya Bidang Investasi (ATTLBI) atas Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT ARP tahun 1994-2023.

hhhh. Pebugasan ini akan dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 02 Mei 2024 s.d tanggal 10 September 2024.dengan biaya pada Biro Perekonomian .

iiii. Menindaklanjuti keputusan Pengadilan Negeri Padang kelas I Nomor 413/Pdt./2023/PN Padang Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat lawan PT Andalas rekasindo Pratama (PT ARP), telah dilakukan pemeriksaan terhadap PT ARP oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dari tanggal 2 Mei 2024 s.d 10 September 2024 maka pada tanggal 13 September dilakukan pertemuan dengan Tim untuk Hasil Audit sudah disampaikan langsung ke pangadilan oleh tim dari BPKP dan pemaparan yang dilakukan saat ini hanya berupa penyampaian informasi dan tidak dilanjutkan dengan diskusi

6) **Kronologis Tindak lanjut Penyelesaian Tukar Guling/Ruislag Tanah Kompleks GOR H.Agus Salim Padang Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dengan BNI-46 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:**

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
1.	Tahun 1983	a. Pemprov Sumbar meminjam Tanah BNI untuk keperluan kegiatan MTQ ke XIII b. Surat Nomor 590/5125/Pem.83 tanggal 07 Oktober 1983 Pemprov Sumbar telah menyampaikan permintaan untuk dapat memanfaatkan Tanah BNI di Rimbo Kaluang untuk pengembangan Gedung Olah Raga (GOR H. Agus Salim Padang)	
2.	Tahun 1984	BNI telah mendapat izin Prinsip untuk proses Ruislag	a. Surat No.DIR/065 tanggal 08 Februari 1984 tentang persetujuan ruislag dari direksi BNI b. Surat No.S-918/MK.011/1984 tanggal 29 Agustus 1984 persetujuan ruislag dari menteri Keuangan dan pembentukan tim penaksir Harga.
3.	Tahun 1991	Dibentuk Tim Penaksir Harga terdiri dari : 1.BNI 2.Depkeu 3.Pemprov Sumbar 4.BPN Pemprov Sumbar 5.BPN Kota Padang	Tim penaksir melakukan penaksiran harga dan hasilnya dituang dalam Berita acara tanggal 20 Juli 1991 dengan penjelasan sbb : a. Total Tanah BNI dl Rimbo Kaluang seluas 33.804 M² (SHM 72.73.85 dan 380) namun yang diperhitungkan dalam ruislag hanya seluas 25.075 M², Sisanya seluas 8.729 M² tidak diperhitungkan karena merupakan Fasilitas Umum/fasum/Jalan b. Tanah BNI Rimbo Kaluang 25.075 M² (50.000/m² = Rp.1.253.750.000,-) equivalen dengan tiga persil tanah pengganti Pemprov Sumbar di Air Pacah dan Dadok Tunggul Hitam seluas 62.670 M² (20.000/m² = 1.253.750.000) setelah persetujuan tukar menukar tahun 1999 diterbitkan sertifikatnya an BNI c.Persyaratan yang harus dipenuhi Pemprov Sumbar adalah - Ijin Mendagri dan DPRD TK I - Status Tanah bersertifikat (SHGB/SHM)
4.	Tahun 1999	-Telah diterbitkan sertifikat atas 3 persil tanah pengganti oleh BPN yang biayanya ditanggung	1. Sertifikat HM no.761/Kel Dadok Tunggul Hitam atas nama BNI luas 15.210 M²

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
		oleh Pemprov. -Sertifikat telah diserahkan ke BNI - Sertifikat tanah Milik BNI (GOR H.Agus Salim) masih atas nama BNI dan belum diserahkan kepada Pemprov.	2. Sertifikat HM no.762/Kel Dadok Tunggul Hitam atas nama BNI luas 18.735 M² 3. Sertifikat HM no.1304/Kel Air Pacah tertulis atas nama BNI luas 28.725 M² Proses serah terima tidak bisa dilaksanakan karena persil tanah SHM no 761/Kel Dadok Tunggul Hitam atas nama BNI luas 15.210 M² digugat oleh masyarakat (Mahidin CS) sehingga pihak BNI secara fisik dilapangan tidak dapat menguasai, maka 1 persil tanah pengganti itu ditolak oleh BNI
5.	10 Januari 2001	Surat BNI no W02/7.2/0051 tanggal 10 Januari 2001 perihal Masalah tanah pengganti milik BNI	1. Proses Ruislag belum dapat dilaksanakan karena salah satu persil tanah pengganti statusnya dalam sengketa (SHM No 761/Kel Dadok Tunggul Hitam) 2. Untuk mempercepat proses penyelesaiannya agar dapat diganti dengan tanah lain yang nilainya sama
6.	20 April 2001	Nota Dinas Sekretaris Daerah kepada Gubernur Sumbar	Sehubungan dengan sengketa tanah SHM 761/luas 15.210 M² maka diusulkan tanah pengganti dari tanah pengembalian 30% E.Verp 1794 Kel. Air Pacah yaitu : 1 . Peta bidang 740/1999 luas 10.895 M² 3. Gambar Situasi (GS) 1257/1995 luas 5.025 M²
7.	28 April 2001	Surat Sekda nomor 147/IV/Perl-2001 tanggal 28 April 2001 perihal tanah pengganti tanah BNI	Sehubungan dengan sengketa tanah SHM 761/luas 15.210 M² disetujui tanah pengganti dari tanah pengembalian 30% E.Verp 1794 Kel. Air Pacah yaitu : 1.Peta bidang 740/1999 luas 10.895 M² 2.Gambar Situasi (GS) 1257/1995 luas 5.025 M²
8.	23 May 2001	Surat BNI no W02/7.2/1364 kepada Gubernur Sumbar tanggal 23 May 2001 perihal tanah pengganti milik BNI	1. BNI menyetujui tanah pengganti yang diusulkan Pemprov 2. Biaya pengurusan menjadi beban Pemprov. 3. BNI menerima penggantian dari Pemprov setelah hak kepemilikan sertifikatnya an BNI
9.	Tahun 2005	Proses Sertifikat 2 persil tanah pengganti	
10.	04 Januari 2008	Surat keputusan Badan Pertanahan Kanwil Sumbar nomor 1-520.2-23.2008	Pemberian Hak milik atas nama BNI yang terletak di Air Pacah dengan luas 4.316 M²
11.	29 Oktober 2008	Rapat terkait pembahasan proses tukar guling tanah BNI yg terletak di GOR H. Agus Salim dihadiri oleh: 1.Pemprov Sumbar 2.BPK RI 3.BNI	1. 3 (tiga) persil tanah pengganti tanah BNI telah terbit sertifikatnya dan telah dikuasai oleh BNI. 2. 4 persil sertifikat tanah di Rimbo Kaluang belum diserahkan ke Pemprov. karena menurut BNI SHM 761/1999 bermasalah dan disarankan untuk penggantian Tanah 3. SHM no 761/1999 Luas 15.210 M² diganti dengan 2 persil tanah seluas 10.800.M² dan 4.316M² dalam proses penerbitan sertifikat di BPN
12.	8 Januari 2009	Surat BNI No W02/4.4/009/R tanggal 08 Januari 2009 perihal penyelesaian tukar guling tanah BNI dengan Pemprov. Sumbar	
13.	5 Februari 2009	Nota Dinas Sekda ke Gubernur tanggal 5 Februari 2009 perihal tukar guling tanah antara Pemprov dengan BNI	**Solusi permasalahan:** 1. Sertifikat dengan luas 4.316 M² telah diterbitkan tahun 2008 oleh BPN Kota Padang, namun untuk persil tanah dengan luas 10.800 M² pengurusannya ke BPN Pusat di Jakarta s/d tahun anggaran 2008 tidak dapat terealisasi karena masih ada persyaratan yang belum dilengkapi oleh BNI selaku pemohon kepemilikan tanah. 2. Terkait evaluasi dan pembahasan aturan baru oleh BPN Pusat, dimana BUMN yang telah menjual saham kepada masyarakat tidak dibenarkan lagi mendapatkan sertifikat hak milik, jika peraturan itu keluar dipastikan BNI merubah usulan Hak Pakai atau luas tanah 10.800 M² dipecah menjadi 2 (dua) buah sertifikat sehingga pembuatan sertifikat cukup BPN Kota Padang.

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
			3. Diminta kepada Pihak BNI untuk menyerahkan sertifikat asli GOR H. Agus Salim yang masih dipegang BNI dg pertimbangan Pemprov telah menyerahkan 3 Sertifikat Asli pada BNI
14.	1 september 2009	Rapat terkait pembahasan tukar guling tanah BNI dihadiri oleh : 1. Kanwil BPN Sumbar 2. Biro Hukum 3. Satpol PP 4. DPKD 5. Kepala BPN Kota Padang 6. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Padang 7. Kepala Bagian pertanahan Kota Padang 8. BNI	Kesimpulan : - Melakukan tunjuk batas kelapangan bersama instansi terkait. - Setelah dilakukan pengukuran atas persil tanah 10.865 M² yang akan disertifikatkan SHGB an BNI ternyata bermasalah karena lokasi tersebut juga telah terbit SHM 762 an. BNI sehingga terjadi overlap/berhimpitan dan pihak Pemprov harus mengupayakan lagi tanah lainnya yang setara dengan itu.
15.	05 Agustus 2010	Surat Plt. Sekda Provinsi Sumbar Nomor: 005/419/VII/ASET/DPKD-2010 Tanggal 05 Agustus 2010 perihal: Undangan acara pembahasan penyelesaian Tukar Guling Tanah BNI 46 Dengan Pemprov. Sumbar dan Tanah Eks. Verponding 1794	
16.	12 Agustus 2010	Notulen Rapat tanggal 12 Agustus 2010 materi: Pembahasan Penyelesaian Tanah Tukar Guling BNI-46 dengan Pemprov. Sumbar dan Penyelesaian Tanah eks. Verponding 1794, tempat: Ruang rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar	
17.	31 Agustus 2010	Surat Plt. Sekretaris Derah Provinsi Sumbar Nomor : 5943/1619/DPKD-Aset-2010 tanggal 31 Agustus 2010 perihal: Permohonan Penerbitan Sertifikat Pengganti SHM No.761/1999,762/1999 dan 1304/1999	
18.	20 Sept 2010	Surat Kepala Kantor Pertahanan Kota Padang Nomor: 682/13-77.300IX/2010 tanggal 24 September 2010 Perihal: Permohonan Penertiban Sertifikat Pengganti SHM No.761/1999,762/1999 dan 1304/1999	
19.	08 Oktober 2010	Surat Plt. Sekda Provinsi Sumbar Nomor :005/1779/DPKD-Aset-2010 tanggal 8 Oktober 2010 Perihal: Undangan Rapat Pembahasan Sertifikat Pengganti SHM 761/1999,762/1999 dan 1304/1999	
20.	11 Oktober 2010	Notulen Rapat Pembahasan Sertifikat Pengganti SHM 761/1999,SHM 762/1999 dan SHM 1304/1999 tanggal 11 Oktober 2010, tempat: Ruang Rapat Sekda Provinsi Sumbar	
21.	18 Oktober 2010	Surat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumbar Nomor: 930/1836/DPKD-Aset-2010 tanggal 18 Oktober 2010 Perihal: Mohon Konfirmasi Sertifikat	
22.	10 November 2010	Surat Kepala Kantor Pertahanan Kota Padang Nomor: 757/6.13/XI-2010 tanggal 10 November 2010 Perihal: Mohon Konfirmasi Sertifikat	1. Sertifikat HM no.761/Kel Dadok Tunggul Hitam tertulis atas nama BNI berkedudukan di Jakarta (ada pencatatan di buku tanah PTUN No.14/PTUN-PDG/2002 2. Sertifikat HM no.762/Kel Dadok Tunggul Hitam tertulis atas nama BNI berkedudukan di Jakarta 3. Sertifikat HM No.1304 Kel Air Pacah tertulis atas nama BNI berkedudukan di Jakarta

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
23.	22 November 2010	Surat Plt. Walikota Padang Nomor: 1203/Dispora.XI/2010 tanggal 22 November 2010 Perihal: Memperbaharui SK Pengelolaan GOR H. Agus Salim Padang	
24.	09 Desember 2010	Surat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumbar Nomor :030/2166/DPKD-Aset-2010 tanggal 9 Desember 2010 Perihal: Mohon Konfirmasi Sertifikat GOR H.Agus Salim Padang	Permintaan kejelasan keberadaan tanah BNI yang ada di GOR.H.Agus Salim 1. SHM no. 72 seluas 7.400 M² 2. SHM no. 73 seluas 11.303 M² 3. SHM no. 85 seluas 7.015 M² 4. SHM no. 380 seluas 8.086 M²
25.	29 Desember 2010	Kesepakatan Bersama antara Pemprov. Sumbar dengan Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi tentang Penyelesaian Persetifikatan Tanah Milik Pemprov. Sumbar, Nomor:120-13/GSB-2010, Nomor: 030/2346/DPKD-Aset/2010, Nomor: 1859/020.1-300/XII/2010	
26.	31 Desember 2010	Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumbar dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sumbar tentang Penyelesaian Pensertifikatan Tanah Milik Pemprov. Sumbar, Nomor: 030/2346/DPKD-Aset/2010, Nomor: 1859/020.1-300/XII/2010	
27.	24 Januari 2011	Notulen Rapat tanggal 24 Januari 2011 materi: Pembahasan Penyelesaian Tanah Tukar Guling BNI-46 dengan Pemprov. Sumbar, tempat: Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar	Kesimpulan : 1. Prinsip tukar guling dilanjutkan dengan tahapan pemprov akan membantu pihak BNI dlam pengamanan memagar tanah SHM 762/1999 dan SHM 1304/1999. 2. Pemprov segera memproses tanah pengganti sertifikat SHM 761/1999 yang bermasalah dengan sebagian tanah LIK yang berlokasi di Ulugadut yang statusnya masih PHL pada Menteri Perindustrian di Jakarta 3. Pemprov Sumbar mencatat tanah BNI yg berlokasi di Dadok Tunggul Hitam dan Air Pacah serta Bangunan yang ada di Gor H. Agus Salim di neraca Pemprov Sumbar 4. Pemeliharaan Gedung di Gor H. Agus Salim yang dikelola oleh Kota Padang dicatat sebagai penambahan aset Pemprov. 5. Dibentuk TIM satgas yang dikoordinir oleh kepala Bidang Aset dan pihak BNI utk percepatan penyelesaian Permasalahan tukar guling. 6. Menindaklanjuti MOU dengan BPN dengan dibuatkan KKS .
28.	04 Maret 2011	Laporan Hasil Kunjungan Kerja Pansus Asset terhadap Tindaklanjut LHP BPK-RI Tahun 2009 ke BNI-46 Jakarta tanggal 04 Maret 2011	
29.	04 Maret 2011	Notulen Pertemuan BNI dengan Anggota DPRD Sumbar membahas Tanah air Pacah tanggal 04 Maret 2011 tempat: Hotel Grand Cempaka Jakarta	
30.	24 Maret 2011	Notulen Rapat Rutin BNI dan Instasi Terkait Lainnya dalam Penyelesaian Ruilslag Tanah BNI Dan Pemda tanggal 24 Maret 2011 tempat: Ruang Rapat BNI KanWil PDG Lt.3 Jl. Dobi No.1 Padang	
31.	04 Mei 2011	Surat PT BNI 46 Kantor Wilayah Padang Nomor: WDP/4.4/1832 tanggal 04 Mei 2011 Perihal: Tukar Guling Tanah BNI dan Tanah Pemda Sumbar.	

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
32.	30 Juni 2011	Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 030-305-2011 tanggal 30 Juni 2011 Tentang Pembentukan Satgas (Satuan Tugas) Penyelesaian Masalah Tukar Guling Tanah Milik BNI 46 dengan Tanah Milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011	
33.	09 Agustus 2011	Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 030-305-2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Pembentukan TIM Fasilitas Penyelesaian Sertifikat dan Balik Nama Aset berupa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	
34.	26 September 2011	Surat Sekda ProvinsiSumbar Nomor: 030/1600/DPK-Aset-2011 tanggal 26 September 2011 Perihal: Undangan Rapat Percepatan Penyelesaian Tukar Guling Tanah antara Pemprov. Sumbar dengan BNI 46	
35.	23 Desember 2011	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 030/2254/DPKD-Aset/2011 tanggal 23 Desember 2011, Perihal Pengamanan Fisik ke Lapangan Tanah SHM 2962 (Eks.SHM 1304)	Pada dasarnya DPRD memberikan persetujuan prinsip tukar menukar untuk 5 (Lima) objek asset milik Pemerintah Kabupaten Solok
36.	28 September 2011	Notulen Rapat tanggal 28 September 2011 Materi: Satuan Tugas Penyelesaian Tukar Guling Tanah BNI 1946 tempat: Ruang Rapat Istana Gubernur jalan Sudirman	
37.	28 Desember 2011	Berita acara tanggal 28 Desember 2011: TIM Satuan Tugas Tukang Guling Tanah antara Pemprov.Sumbar dengan BNI 46 tidak melakukan pengukuran Tanah karena dihalangi oleh sekelompok masyarakat yang mengatas namakan pemilik tanah ulayat Air Pacah	
38.	29 Desember 2011	Dilakukan penunjukan patok batas dilapangan dengan pengawalan Satpol PP	Setelah melakukan dialog dengan Perwakilan masyarakat adat yang mengklaim tanah adat dimaksud tetap melarang pengukuran akhirnya pengukuran terlaksaan dengan ketentuan : a. Pemprov akan mengundang pemangku adat terkait menjelaskan batas tanah eks.Verponding 1794 dengan tanah adat pada 4 Januari 2012 b. Pemprov akan membuat kesepakatan tanpa merugikan pihak manapun c. Pemagaran dapat dilanjutkan setelah ada kesepakatan antara kaum Lehar Cs dan ahli waris Maboet dengan Pemprov.
39.	30 Desember 2011	PT BANK NEGARA INDONESIA Kantor Wilayah 02 Padang melakukan pemegaran Tana hEks. SHM 1304 sesuai Proyek : Pembuatan Pagar Keliling Tanah SHM No.2962 (Eks. SHM 1304) oleh : CV. SERUMPUN BATUANG, SPK: WDP/7.1/5070 Tanggal 13 Desember 2011, SPP: WDP/7.1/5301 tanggal 30 Desember 2012	
40.	9 Januari 2012	Rapat dengan SKPD terkait dengan pihak kaum Lehar Cs dan Ahli Waris Ma'Boet	Kesimpulan : 1. Sertifikat SHM N0 2962 Eks SHM 1304/1999 dengan luas 28.725 M² terletak dikelurahan Air Pacah tetap dikuasai BNI dan dilanjutkan dengan pemagaran 2. Proses pengukuran tunjuk batas antara tanah Eks Verponding 1794 dengan tanah ulayat kaum Lehar Cs tidak dapat dilakukan karena belum adanya kesepakatan. 3. Pemprov akan membahas secara internal dg SKPD terkait untuk mencari solusi tanpa merugikan pihak manapun.

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
41.	3 Juli 2012	Surat Mamak Kepala Waris (LEHAR) tanggal 3 juli 2012, perihal : Penyelesaian Tanah Milik Adat Kaum Ma'Boet Suku Sikumbang Ponia No: 90/1931 dan Eksekusi No: 35/1982	
42.	17 April 2012	Surat PTBNI Kantor Wilayah Padang Nomor:WDP/7.4/664/R tanggal 17 April 2012 tentang Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.PDG an. Miswan (surat ke 2)	
43.	23 April 2012	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 120/100/Pewm-2012 tanggal 23 April 2012, Perihal Undangan Persamaan persepsi dan solusi terhadap gugatan Perdata Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.PDG an. Miswan cs	
44.	25 April 2012	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 120/101/Pem-2012 tanggal 25 April 2012, Perihal Undangan Tentang tindak lanjut pembahasan teknis koordinasi penanganan Perdata no. 22/Pdt.G/2012/PN. PDG an. Miswan cs	
45.	03 September 2012	Surat Sekda ProvinsiSumbar Nomor: 005/218/VIII/BPAD-I/2012 tanggal 03 September 2012 Tentang Usulan Penyelesaian Permasalahan Tukar Guling Tanah Milik BNI-46	
46.	2 April 2014	Nota Dinas Asisten Administrasi Umum melalui Sekda kepada Gubernur Sumatera Barat Perihal Hasil Tunjuk Batas Tanah Eks BNI Komplek Gor H. Agus Salim Padang	1. Didapati bahwa 4 persil tanah BNI di komplek GOR H.Agus Salim hanya sebagian dari keseluruhan areal GOR H.Agus Salim yang dekat dengan Jalan Rasuna Said. 2. Setelah dilakukan observasi langsung didapati bahwa dalam lokasi 4 persil tanah tersebut sudah berdiri beberapa bangunan permanen yaitu 1 unit Rumah dan deretan ruko pada sisi kolam renang teratai, bangunan rumah makan disamping kantor UPTD Dishub dan 4 unit rumah pada sisi utara disamping sport centre. 3. Setelah dikonfirmasi dengan pihak BNI jawaban kurang memuaskan pihak BNI yang menyatakan proses ruislag telah selesai dan permasalahan yang ada diselesaikan masing2 sebagaimana dulu BNI menyelesaikan permasalahan di Aie Pacah. 4. Mengadakan pertemuan terbatas dengan pihak BNI dan BPN Kota Padang untuk melakukan Klarifikasi terkait keberadaan/Kepemilikan/Status hunian bangunan2 tersebut .
47.	30 Juni 2014	SK Gubernur nomor 030-504-2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang pembentukan Tim Kerja Penggunaan dan Pemanfaatan GOR. H. Agus Salim milik Pemprov tahun 2014	Tugas : Memberi pertimbangan kepada Gubernur terkait penyelesaian masalah aset GOR H. Agus Salim dengan langkah awal pembagian tugasnya : a. Identifikasi Objek aset dan Pengelolaan Aset. b. Identifikasi kepemilikan dan penguasaan aset saat ini.
48.	17 Juli 2014	Laporan Hasil klarifikasi dan konsultasi membahasa tukar guling GOR H Agus Salim	1. Pihak BNI tetap komit menyelesaikan masalah tukar guling 2. Usulan pemprov terkait kekurangan ±1 (satu) hektar tanah ke BNI disetujui untuk evaluasi ulang nilai tanah masing-masing sehingga penyerahan dari pemprov tidak perlu ditambah lagi, jika tidak memungkinkan secara regulasi BNI bersedia menerima tanah dilokasi lain 3. Tim BNI akan menghitung ulang nilai tanah Pemprov yang telah diserahkan ke BNI 4. Pihak BNI bersedia memfasilitasi hal-hal terkait dengan kondisi dan situasi tanah kawasan GOR sampai kewenangannya.

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
49.	September 2014	Nota Dinas dari Kepala Biro Pengelolaan Aset Daerah untuk Kepala Biro Pemerintah perihal tindak lanjut hasil rapat pembahasan Tim Kerja Penggunaan dan Pemanfaatan aset GOR. H. Agus Salim Padang	Hasil dari beberapa kali Rapat Tim Kerja : 1. Tanah Kawasan GOR H. Agus Salim berjumlah seluas ±94.824 M² yang tercatat pada neraca seluas ±37.591 M² dan sisanya seluas ±57.591 M² dinyatakan BPN Kota Padang sebagai tanah Eks. Verponding nomor 4410,772,863,1248,1683, 1646 belum ada alas hak atas nama pihak lain 2. Dispora sebagai SKPD pengguna segera mengajukan permohonan penegasan hak sertifikat terhadap tanah kawasan GOR yang berada diluar objek tukar guling dengan BNI yaitu seluas ±57.591 M² kepada BPN Kota Padang sesuai ketentuan berlaku. 3. Terkait rencana tanah pengganti milik BNI yang akan diserahkan kepada Pemprov Sumbar seluas ±37.591 M² telah berdiri beberapa bangunan tanpa izin pihak berwenang (serabi Enhay, RM Mama, RM Ikan Karang) segera SKPD terkait melakukan koordinasi dan survey lapangan dengan pemilik bangunan tersebut dan hasilnya akan dibahas pada rapat selanjutnya. 4. Mengingat tukar guling secara administrasi belum pernah direalisasikan maka aset tanah komplek GOR Agus Salim milik BNI secara defacto belum bisa dikatakan sebagai aset Pemprov.
50.	16 Maret 2017	Rapat pembahasan *Ruislag* tanah BNI dg tanah Pemprov Sumbar	Saran BPK RI berdasarkan penjelasan BNI dan Pemprov Sumbar : 1. Secara *defacto ruislag* telah berjalan walaupun belum ada akta *ruislag* 2. Apabila *ruislag* akan dilanjutkan maka BNI dan Pemprov harus memenuhi perijinan ulang karena perijinan terdahulu sudah tidak relevan dengan ketentuan saat ini. 3. Acuan pelaksanaan *ruislag* adalah nilai objek *ruislag*, sehingga apabila *ruislag* akan dilanjutkan harus melakukan transaksi kembali atas objek ruislag berdasarkan nilai yg berlaku saat pelaksanaan *ruislag,* dengan demikian kesepakatan awal sesuai tim penaksi tahun 1991 tidak berlaku / tidak relevan lagi. 4. Apabila berdasarkan taksasi ditemukan selisih harga maka sebagai opsi penyelesaian dapat dilakukan : a. Nilai objek *ruislag* Pemprov lebih tinggi maka BNI melakukan opsi penyelesaian sesuai Permen BUMN NO.02/MBU/2010 tentang tatacara penghapus bukuan dan pemindahtanganan aktiva tetap BUMN b. Nilai Objek *ruislag* Pemprov lebih tinggi nilainya maka dapat melakukan opsi penyelesaian sesua Permendagri no 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah. 5. BNI dan Pemprov agar menginventarisir permasalahan aset (objek ruislag) yang terjadi di lapangan saat ini sebagai masukan atas rumusan opsi penyelesaian yang akan ditempuh dan selanjutnya menyusun timeline terkait tindak lanjut. 6. BPK bersedia menjadi advisor penyelesaian ruislag tanah BNI – Pemprov **Kesimpulan :** 1. BNI dan Pemprov Sumbar sepakat menindaklanjuti proses ruislag 2. BNI dan Pemprov masing2 membentuk Tim penyelesaian Ruislag 3. BNI dan Pemprov akan menginventraisir permasalahan aset (objek ruislag) yg terjadi di lapangan dan menyusun timeline penyelesaian.

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
51.	15 Mei 2017	SK Gubernur nomor 030-535-2017 Tentang Pembentukan Tim Kerja Penyelesaian Masalah Tukar Guling Tanah BNI di kawasan GOR H. Agus Salim	
52.	24 Mei 2017	Rapat Progres Tim Kerja Penyelesaian Masalah tukar guling tanah BNI di Kawasan GOR H.Agus Salim	**Point penting :** 1. Perlu dilakukan apraisal ulang terhadap kedua pemilikan karena apraisal tahun 1991 sudah tidak dapat diyakini lagi validasi nilainya. Pada saat ini BNI telah memproses apraisal kedua objek Ruislag namun Pemprov harus melakukan apraisal sendiri tetapi jika apraisal dilakukan oleh pihak ketiga ikuti saja. 2. Perlu juga dicek apakah tanah GOR tidak tumpang tindih dengan tanah pemilik lain.
53.	5 Oktober 2017	Rapat dalam rangka persiapan Fact Finding Ke Lokasi /Objek Tukar Guling antara tim kerja BNI 46 dengan Tim Kerja Pemprov Sumbar	**Kesepakatan :** Turun ke lapangan untuk cek fisik kebenaran lokasi tanah BNI yg dikuasai oleh masyarakat dan didampingi oleh BNP kota padang , Satpol PP dan unsur terkait dengan melakukan unjuk lokasi tanah : 1. GOR H.Agus Salim 2. Dadok Kel.Air Pacah.
54.	23 Juli 2019	Surat Gubernur nomor 030/502/BAP2BMD-III-2019 tanggal 23 Juli 2019 Perihal Tindak lanjut penyelesaian permasalahan Ruislag Tanah antara Pemprov Sumbar dengan BNI	Isi : 1. Secara defacto dan de jure BNI telah memiliki kekuatan hukum menguasai atas 3 sertifikat tanah namun secara administrasi belum dapat dipertanggungjawabkan. 2. Pemprov secara defacto belum menguasai tanah pengganti yang diberikan BNI di kawasan GOR dan secara de jure pihak BNI belum menyerahkan sertifikat kepada Pemprov. 3. Ruislag saat ini tidak dapat dilakukan dengan alasan : a. Sesuai pasal 394 ayat 1 dan 4 permendagri no 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah Bahwa BAST paling lama dilakukan 2 tahun setelah penandatanganan perjanjian tukar menukar. b. Pasal 395 menyatakan bahwa Gubernur /Bupati/Walikota berwenang membatalkan perjanjian tukar menukar secara sepihak. 4. Pihak BNI dan Pemprov kiranya sepakat untuk saling hibah antara tanah di kawasan GOR dengan tanah di Dadok tunggul hitam dan Air Pacah.
55	20 Januari 2022	Pertemuan/Rapat antara Pemprov Sumbar dg BNI 46 di Jakarta (BNI 46), yang di Fasilitasi oleh Bpk. Andre Rosiade, Anggota komisi 3 DPR-RI yg membidangi BUMN	**Pertemuan tsb menghasilkan kesepakatan, yaitu :** 1. Akan dibentuk Tim kecil sebagai tindak lanjut dari Pihak Pemprov dan BNI yang nantinya akan membahas terkait teknis pelaksanaan Tukar Guling 2. Pihak BNI akan meminta Pendapat Hukum ke Kejaksaan Agung, dengan alasan secara aturan tukar guling belum tereksekusi 3. Untuk kesepakatan awal Tukar menukar tidak berlaku lagi, hal ini sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2016. 4. Dalam waktu dekat, akan dilakukan rapat sesegera mungkin dengan Tim
56	15 Februari 2022	Rapat dengan Pihak BNI dan Instansi Terkait melalui Zoom Meeting, dengan peserta : - Pihak BNI Pusat dan BNI Wilayah 2 - Pemprov Sumbar - SKPD terkait	Hasil Rapat adalah : 1. Peserta Rapat setuju untuk meminta LO ke Kejaksaan Agung, sebelum LO diminta terlebih dahulu perlu dilakukan inventarisasi terhadap objek yang clear and clean 2. BNI akan menyampaikan sertifikat an, BNI baik yang di GOR maupun yang berada di Dadok Tunggul Hitam dan Air Pacah

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
			3. Membentuk Tim Kecil untuk inventarisasi dan melakukan pengamanan terhadap 2 objek 4. Ruislagh belum terjadi, karena adanya persyaratan yang belum terjadi 5. Butuh data dan informasi terkait dengan perubahan atas 1 sertifikat (SHM) an, BNI
57.	24 Februari 2022	Melakukan Verifikasi terhadap Naskah yang akan disampaikan kepada Kejaksaan Agung yang dikonsep oleh BNI dan sekaligus masukan-masukan yang perlu disampaikan didalam Konsep Naskah tersebut dengan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumbar dan Kepala Bidang Pengelolaan BMD	- Terbitnya Konsep Naskah yang sudah diverifikasi secara bersama antara Pemprov dengan BNI.
58.	11 Maret 2022	Rapat Penyamaan Persepsi terhadap LO (Legal Opini) untuk dikirim ke Kejaksaan Agung bersama dengan Pihak BNI, BPKAD diruang Rapat BPKAD Provinsi Sumatera Barat secara Zoom Meeting	Isi : Membahas penyamaan persepsi terkait dengan tata naskah permohonan LO untuk disampaikan kepada Kejaksaan Agung
59.	4 Juli 2022	Melakukan kembali rapat terkait adanya penyamaan tentang Tata Naskah surat yg akan disampaikan kepada Kejaksaan Agung.	Kesimpulan : Tata Naskah sudah disepakati bersama dan dapat disampaikan ke Kejaksaan Agung dan selanjutnya dapat ditandatangani kedua belah Pihak antara Gubernur Sumbar dan Direksi BNI.
60.	3 Agustus 2022	Rapat kembali dengan Jamdatun, BNI dan Pemprov Sumbar di Hotel Mahakam Jakarta yang difasilitasi oleh Pihak BNI,	Setelah dilakukan pemaparan oleh Pihak provinsi dan Pihak BNI, maka didapat suatu kesimpulan: • Sesuai arahan dari Jamdatun, bahwa untuk saat ini dapat dilakukan inventarisir kembali terhadap asset tanah yang dikuasai oleh Masyarakat atau Pihak Lain. • Lengkapi dokumen pendukung. • Akan dilakukan kembali Pendampingan oleh Tim Jamdatun
61.	24 Februari 2023	Adanya surat dari Kejaksaan Agung RI terkait penyampaian Pendapat Hukum (Legal Opini) mengenai Tukar Menukar Tanah antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.	Akan dilakukan rapat/pembahasan tingkat Pimpinan dan Instansi terkait
62.	24 November 2023	Rapat Tim penyelesaian permasalahan Aset pemprov terkait pendapat Hasil LO dari Kejagung	Kesimpulan rapat : 1. Membuat Akta Otentik untuk merumuskan kesepakatan antara Pemprov dan BNI Bahwa Ruislagh tetap dilanjutkan. 2. Merumuskan Tahapan-Tahapan penyelesaian dan membuat matrik Penyelesaian sampai tanah clear and clean. 3. Membentuk Tim Khusus untuk penyelesaian yaitu: • Tim Permasalahan Tukar Guling • Tim Permasalahan Tanah/Lahan harus clear and clean 4. Melanjutkan rapat dengan menghadirkan Pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero).

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
63.	30 Januari 2024	Rapat Penyelesaian Rusilagh Tindak Lanjut LO Jamdatun antara Pemprov dg PT. BNI di Jl Dobi kantor Bank BNI	**Kesimpulan Rapat :** 1. Sepakat untuk melakukan Penyelesaian Porses Ruislagh antara BNI dan Pemprov Sumbar yang dituangkan dalam Akta Otentik/kesepakatan bersama 2. Sepakat untuk membentuk Tim bersama dengan 2 Satgas, yaitu Satgas Administrasi Ruislagh dan Satgas Permasalahan lahan yang dibuat dalam bentuk SK Bersama (Jabatan) 3. Timeline Lengkap Kerja Tim Penyelesaian Ruislag - Senin/12 Februari 2024: melakukan koordinasi dengan Kepala Kanwil BPN (PIC: Pemprov & BNI) - Selasa/13 Februari 2024: Diskusi Penyusunan MOU dan SK Panitia Penyelesaian Rusilag (Lokasi BNI Lantai 2). ***Susunan Panitia Bersama Penyelesaian Ruislag:*** PEMPROV: - Sekretaris Daerah - Asisten Adminsitarsi Umum - Inspektur - Kepala BPKAD - Kepala Dinas Perkimtan - Kepala Biro Hukum - Kepala Biro Pemerintahan - Ka Satpol PP BNI : - Pemimpin Wilayah - Area Head - Departemen head Supprting Business BPN : - Kepala Kanwil BPN - Kepala Kantor BPN Kota Padang ***Satgas Adm*** PEMPROV - Menyusul BNI - Tim Logistuik & Property - Tim Regional General Services ***Satgas Permasalahan Lahan*** PEMPROV - Menyusul BNI - Tim legals
64.	13 Februari 2024	Rapat Tindak lanjut dari Rapat tgl 30 Januari 2024 di Kantor PT.BNI Jl. Dobi. (Membahas Pembentukan SK. Bersama dg 2 Tim Satgas dan Membahas Pembentukan MOU)	**Kesimpulan Rapat :** 1. Mengundang BPN Kota Padang dan Kanwil untuk melakukan diskusi penyelesaian Ruislagh BNI dan Pemprov pada hari kamis 22 Februari 2024 lokasi di BNI W02 2. Sepakat Menyusun Draft MOU, PKS dan SK. Bersama dengan langkah kerja berdasarkan Permendagri dan Permen BUMN **Tahapan-tahapan kerja:** 1. Bentuk MOU sepakat untuk diselesaikan antara kedua belah pihak untuk saling melanjutkan dan Membuat tahapan2/Matrik langkah2 (Kedua belah pihak) sesuai dengan ketentuan masing2

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
			yg ada di Permendagri (BMD) dan tuangkan dalam matrik Proses Ruislagh dengan time line 7 hari s.d hari Selasa tgl 20 Februari 2024 (Share di WA). 2. Membentuk Tim bersama untuk menyamai langkah kerja, pandangan agar sama melangkah yang berpedoman kepada Permendagri 19 Tahun 2016 dan 3. Ketentuan dari PT. BNI dan tetap mulainya dari nol. 4. Membuat Tim Peneliti untuk meneliti nilai2 aset

7) Penetapan Rekening Kas Daerah dan Rekening Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu SKPD Tahun 2024.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 903-522-2024 Tanggal 19 Juli 2024 tentang Penetapan Nomor Rekening Kas Pemerintah Daerah dan Rekening Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Bank Nagari dan Bank Lainnya di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 maka seluruh rekening yang ditetapkan tersebut dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil pada akhir tahun anggaran, dan sisanya disetorkan ke Kas Umum Daerah. Untuk Rekening Penerimaan Nomor 71000106009372 adalah menampung seluruh penerimaan daerah dan untuk Rekening 7517054530 adalah Rekening Penerimaan Pajak Daerah Pemprov Sumbar dan setiap harinya harus ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah dan bersaldo nol. Berikut lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 903-522-2024 tentang Penetapan Rekening Kas Daerah dan Rekening Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu SKPD tahun 2024 yakni sebagai berikut.

Tabel 6.2 Daftar Rekening pada SK Gubernur

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKENING KORAN	NO. REKENING
1	2	2	3
I	**Rekening Kas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat**		
1	Rekening Kas Umum Pemerintah Provinsi	PT BPD Sumbar	71000106009291
2	Penerimaan Pemerintah Provinsi	PT BPD Sumbar	71000106009372
3	Pengeluaran Pemerintah Provinsi	PT BPD Sumbar	71000106009346
4	Rekening Penerimaan Pajak Daerah Pemprov. Sumbar	PT BNI (Persero) Tbk	7517054530
II	**Rekening Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan dan Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Penerimaan Pembantu SKPD**		
1	DINAS PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar	71000106009254
		- BPP Sekretariat	71000106009162

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKENING KORAN	NO. REKENING
		- BPP Bid. PSMA	71000106009221
		- BPP Bid. PSMK	71000106009232
		- BPP Bid. PSLB	71000106009195
		- BPP Bid. PGTK	71000106009206
		- BPP UPTD Baltekkomdik Prov Sumbar	71000106009534
		- BPP Cabdin Wilayah I	72010106001080
		- BPP Kantor Cabdin Wilayah II Pariaman	71000106100361
		- BPP Cabdin Pendidikan Wil III ProvinsiSumbar	71020106001785
		- BPP Cabdin Pendidikan Wilayah IV	72000106000873
		- BPP Cabdin Wilayah V	71020106001796
		- BPP Cabdin Wilayah VI	71000106104206
		- BPP Cabdin Pendidikan Wilayah VII Pesisir Selatan	71000106104210
		- BPP Cabdin Pendidikan Wilayah VIII	71000106100221
2	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar (Bend. Pengeluaran)	71000106000165
		- BPP Sekretariat	71000106009103
		- BPP Bid. Pelayanan Kesehatan	71000106009066
		- BPP Bid. P2P	71000106009114
		- BPP UPTD BKIM	71000106009280
		- BPP Penerimaan BLUD UPTD BKIM	71000106104221
		- BPP Pengeluaran BLUD UPTD BKIM	71000106104232
		- BPP UPTD Balai Labkes Padang	71000106009313
		- BPP Penerimaan BLUD Labkes	71000106000493
		- BPP Pengeluaran BLUD Labkes	71000106100000
		- BPP UPTD BKOM PELKES	71000106009490
		- BPP Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru	71000106104243
		- Pengeluaran BLUD Rs Paru	71000106000946

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKENING KORAN	NO. REKENING
		- Penerimaan BLUD Rs Paru	71000106104254
3	DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Dinas Bina Marga Cipta Karya Dan Tata Ruang (Bend. Pengeluaran)	71000106100265
		- BPP Sekretariat	71000106100280
		- BPP Bid. Bina Marga	71000106100302
		- BPP Bid. Cipta Karya	71000106100313
		- BPP Bid. Tata Ruang	71000106100324
		- BPP Bid. P2BG	71000106100335
		- BPP UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	71000106100346
		- BPP UPTD Workshop dan Peralatan	71000106100350
		- BPP UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	72010106001091
		- BPP UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	72030106000384
		- BPP UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	72000106000884
		- BPP UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV	71020106001800
		- BPP UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V	71020106001811
		- BPP UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI	71000106104265
4.	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	Dinas SDA BK Provinsi Sumbar (Bend. Pengeluaran)	71000106100276
		- BPP Bid. PJPA	71000106008904
		- BPP Bid. PJSA	71000106008941
		- BPP Sekretariat	71000106008860
		- BPP UPTD Balai SDA Dan BK Wilayah Utara	72010106001102
		- BPP UPTD Balai SDA Dan BK Wilayah Selatan	71020106001822
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Bend. Pengeluaran)	71000106100405
		- BPP Bidang Kawasan Permukiman	71000106100453
6.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Satpol PP Provinsi Sumbar	71000106100486

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKENING KORAN	NO. REKENING
7	DINAS SOSIAL	Dinas Sosial Prop. Sumbar (Bend. Pengeluaran)	71000106009335
		- BPP Sekretariat	71000106008963
		- BPP Bid. Perlindungan dan Jaminan Sosial	71000106008996
		- BPP Bid. Rehabilitasi Sosial	71000106100383
		- BPP Bid. Pemberdayaan Sosial	71000106100431
		- BPP Panti Sos Binaremaja	71000106104276
		- BPP Panti Sosial Bina Grahita Harapan	71000106000316
		- BPP PSTW Sabai Nan Aluih	71000106104280
		- BPP PSTW KSI BSK	72030106000395
		- BPP Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato	71000106000250
		- BPP PSAA Tri Murni	72010106001113
		- BPP UPTD PSKW Andam Dewi	71020106001833
		- BPP Panti Sos Bina Remaja Harapan	72010106001124
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Dinas Nakertrans (Bend. Pengeluaran)	71000106000541
		- Bend Penerimaan Dinas Nakertrans	71000106009722
		- BPP UPTD BLK Padang Panjang	72010106001135
		- BPP UPTD BLK Payakumbuh	72000106000895
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	DP3AP2KB (Bend. Pengeluaran)	71000106100490
		- BPP DP3AP2KB	71000106008506
		- BPP UPTD PPA	71000106008510
10	DINAS PANGAN	Dinas Pangan (Bend. Pengeluaran)	71000106008521
		- BPP Sekretariat	71000106008532
		- BPP UPTD DPAP	71000106008580
		- BPP UPTD BPSMP	71000106008591
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup (Bend. Pengeluaran)	71000106000434
		- BPP UPTD Persampahan	71000106000515

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKENING KORAN	NO. REKENING
		- BPP UPTD Laboratorium Lingkungan	71000106000526
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Bend Peng Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	71000106000530
		- Bend. Penerimaan	71000106100291
		- BPP DPMD Sumbar	71000106009781
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Bend. Pengeluaran)	71000106100114
14	DINAS PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan Prov Sumbar (Bend. Pengeluaran)	71000106100125
		- BPP (UPTD Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I dan Wilayah II)	71000106100140
		- Bendahara Dishub Provinsi Sumbar	71000106009744
15	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Dinas Komunikasi Dan Informatika (Bend. Pengeluaran)	71000106100162
		- BPP Sekretariat	71000106100173
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Dinas Koperasi UKM (Bend. Pengeluaran)	71000106000272
		- BPP Sekretariat	71000106000283
		- BPP UPTD Balai Diklat Koperasi	71000106104291
		- UPTD BPLK Prov. Sumbar	71000106001112
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DPM Dan PTSP Provinsi Sumatera Barat (Bend. Pengeluaran)	71000106000375
18	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Dinas Pemuda Dan Olahraga (Bend. Pengeluaran)	71000106009383
		- BPP Bidang Olahraga	71000106100033
		- BPP Bidang Sekretariat dan Pemuda	71000106100011
		- BPP UPTD KBOR	71000106104302
19	DINAS KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan (Bend. Pengeluaran)	71000106000331
		- BPP UPTD Taman Budaya Sumatera Barat	71000106009265
		- BPP UPTD Museum Adityawarman	71000106009556
		- Bendahara UPTD Museum Adityawarman	71000106009836
		- BPP Dinas Kebudayaan Prov. Sumbar	71000106001075
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan (Bend. Pengeluaran)	71000106008661
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan Dan Perikanan (Bend. Pengeluaran)	71000106009022
		- BPP Sekretariat	71000106009151

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKENING KORAN	NO. REKENING
		- BPP Bid. Perikanan Tangkap	71000106009125
		- BPP Bid. Perikanan Budidaya	71000106009173
		- BPP Bid. PDSKP	71000106009184
		- BPP UPTD KPSDKP Pariaman	71000106009431
		- BPP UPTD BPBALP Teluk Buo	71000106009416
		- BPP UPTD PPMHP	71000106009405
		- BPP Penerimaan UPTD PPMHP	71000106009803
		- BPP UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I	71000106009523
		- BPP UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II	71000106000364
		- BPP UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III	71000106009394
		- Bendahara Penerimaan UPTD BPBALP	71000106009755
		- Bendahara Penerimaan UPTD KPSDKP	71000106009766
		- Bendahara Penerimaan UPTD PPW I	71000106009770
		- Bendahara Penerimaan UPTD PPW II	71000106009792
22	DINAS PARIWISATA	Dinas Pariwisata (Bend. Pengeluaran)	71000106000342
		- BPP Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar	71000106000353
23	DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumbar	71000106000386
		- BPP Bidang Perkebunan Tanhungar	71000106009501
		- UPTD BP2MB PTP Sumbar	71000106000445
		- UPTD BBI Sumbar	71000106104313
		- UPTD Balai Pengawasan Dan Sertifikat Benih	72010106001146
		- UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian Sumbar	71000106000460
		- UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura	71000106009361
		- BPP UPTD BMSPP	71000106000471
24	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Disnak Dan Keswan (Bend. Pengeluaran)	71000106100420
		- Bidang Produksi dan Keswan DPKH Provinsi Sumbar	71000106009044
		- Bidang Keswan dan Kesmavet DPKH Sumbar	71000106009862
		- UPTD PMPP	71000106000261
		- UPTD RSHSB	71000106009420

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKENING KORAN	NO. REKENING
		- UPTD Ternak Unggas	71000106104324
		- Bendahara UPTD BPTSD Tuah Sakato	72000106000906
		- UPTD Ternak Ruminansia	71000106104335
		- Bendahara Penerimaan Dinas dan Keswa	71000106000666
		- Bendahara Penerimaan UPTD RSH	71000106000703
		- Bendahara Penerimaan UPTD PMPP	71000106000670
		- Bendahara Penerimaan UPTD Ruminansia	71000106000725
		- Bendahara Penerimaan UPTD Unggas	71000106000681
		- Bendahara Penerimaan UPTD BPTSD Tuah Sakato	72000101000100
25	DINAS KEHUTANAN	Dinas Kehutanan (Bend. Pengeluaran)	71000106008602
		- BPP Dinas Kehutanan	71000106009884
		- BPP UPTD BSPTH	71000106008672
		- BPP UPTD KPHL Pasaman Raya	72010106001150
		- BPP UPTD KPHL Lima Puluh Kota	72000106000910
		- BPP UPTD Agam Raya	71000106104346
		- BPP Pada UPTD KPHL Bukit Barisan	71000106008683
		- BPP UPTD KPHL Sijunjung	71020106001844
		- BPP UPTD KPHL Solok	71020106001855
		- BPP UPTD KPHL Hulu Batang Hari	71020106001866
		- BPP UPTD KPHP Dharmasraya	71020106001870
		- BPP UPTD KPHP Pesisir Selatan	71000106104350
		- BPP UPTD KPHP Mentawai	71000106009696
26	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (Bend. Pengeluaran)	71000106008694
		- BPP Sekretariat	71000106008705
27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Disperindag Prov SB (Bend. Pengeluaran)	71000106008720
		- BPP Dinas	71000106008742
		- UPTD Logam	71000106008775
		- UPTD PPMA	71000106008786
		- UPTD Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang	71000106008790
		- Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD BPSMB	71000106009814
		- Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD Logam	71000106009825
		- Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD PPMA	71000106001042

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKENING KORAN	NO. REKENING
28	SEKRETARIAT DPRD	Set. DPRD Prop Sumbar (Bend. Pengeluaran)	71000106008801
		- BPP Bagian FPP	71000106001090
		- BPP Umum dan Keuangan	71000106001086
		- BPP Persidangan dan Per UU an	71000106001053
29	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	Pemegang Kas Ktr Inspektorat	71000106100372
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pemegang Kas Bappeda Prop Sumbar (Bend. Pengeluaran)	71000106100254
		- BPP Sekretariat	71000106008871
		- BPP Bid. P2EPD	71000106100464
		- BPP Bid. PPM	71000106008926
		- BPP Bid. EKO SDA	71000106008974
		- BPP Bid. Infraswil	71000106008985
31	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Balitbang (Bend. Pengeluaran)	71000106008812
		- BPP Sekretariat	71000106008823
		- BPP Bid. Ekbang	71000106008834
		- BPP Bid. Inotek	71000106008845
		- BPP Bid. Sospem	71000106008856
32	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Prov Sumbar (Bend. Pengeluaran)	71000106100243
		- BPP Sekretariat	71000106009081
		- BPP BMD	71000106009070
		- BPP Bid. APKD	71000101015843
33	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Bapenda Prov Sumbar (Bend. Pengeluaran)	71000106100151
		- BPP Sekretariat	71000106009011
		- BPP Bid. Retribusi Dan PLL	71000106008930
		- BPP Bid. Pajak	71000106100232
		- BPP UPTD P3 Padang	71000106100394
		- BPP UPTD P3 Kab. Pd. Pariaman	71000106104361
		- BPP UPTD P3 Pd. Panjang	72010106001161
		- BPP UPTD P3 Bukittinggi	72010106001172
		- BPP UPTD P3 Kota Payakumbuh	72000106000921
		- BPP UPTD P3 Lb. Basung	71000106104372
		- BPP UPTD P3 Lb. Sikaping	72010106001183

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKENING KORAN	NO. REKENING
		- BPP UPTD P3 Painan	71000106104383
		- BPP UPTD P3 Solok	71020106001881
		- BPP UPTD P3 Sijunjung	71020106001892
		- BPP UPTD P3 Sawahlunto	71020106001903
		- BPP UPTD P3 Batusangkar	72030106000406
		- BPP UPTD P3 Dharmasraya	71020106001914
		- BPP UPTD P3 Solok Selatan	71020106001925
		- BPP UPTD P3 Pasbar	71000106104394
		- BPP UPTD P3 Kab. 50 Kota	72000106000932
		- BPP UPTD P3 Kab. Solok	71020106001931
		- BPP UPTD P3 Kota Pariaman	71000106104405
		- BPP UPTD SIKD Bakeuda Sumbar	7100.0106009512
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian Daerah Prop (Bend. Pengeluaran)	71000106009055
		- BPP Sekretariat	71000106009092
35	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Pengembangan SDM Prov Sumbar (Bend. Pengeluaran)	71000106008952
		- BPP Sekretariat	71000106008882
		- Bend. Penerimaan	71000106009545
36	BADAN PENGHUBUNG	Badan Penghubung (Bend. Penghubung)	71000106009593
37	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesbangpol Prov Sumbar (Bend. Pengeluaran)	71000106009136
		BPP Badan Kesbangpol Sumbar	71000106000891
38	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bend. Pengeluaran)	71000106009302
		- BPP BPBD Sumbar	71000106009442
39	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	71000106000224
40	BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	Bend Peng Biro Hukum Setda Prov Sumbar	71000106000202
41	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH	BPP Adm Pimpinan	71000106000213
42	BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH	Biro Perekonomian Setda Provinsi	71000106000180

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKENING KORAN	NO. REKENING
43	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH	BPP Biro Kesejahteraan Rakyat	71000106000191
44	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH	Biro Administrasi Pembangunan	71000106000246
45	BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Organisasi	71000106000176
46	BIRO UMUM/ SEKRETARIAT DAERAH	Setda (Bend. Pengeluaran Setda Prop Sumbar)	71000106000117
		- BPP Biro Umum	71000106000154
47	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH	BPP Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	71000106000235
48	RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	RSAM Bukittinggi (Bend. Pengeluaran APBD)	72010106001194
		- Bendahara Pengeluaran BLUD RSAM	72010106001205
		- Bend Peng Pembantu APBD RSAM	72010106000033
		‘- Penerimaan RSAM Bukittinggi	72010106000070
49	RSUD PARIAMAN	Bendahara Peng RSUD Pariaman	71000106104416
		- Bend Peng BLUD RSUD Pariaman	71000106104420
		- Bend Penerimaan BLUD RSUD Pariaman	71000106104431
50	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	RSJ Prof HB Saanin (Bend. Pengeluaran APBD)	71000106104442
		- RSJ Prof HB Saanin (Bend. Pengeluaran BLUD)	71000106104453
		- BLUD RSJP Prof HB Saanin Pdg	71000106104475
51	RSUD MOHAMMAD NATSIR	RSUD M Natsir (Bend. Pengeluaran APBD)	71020106001942
		- Bend BLUD RSUD Mohammad Natsir	71020106001964
		- Bend Pen BLUD RSUD M Natsir	71020106001953
		- Bend Peng Pemb RSUD M Natsir Solok	71020106001975

Disamping Rekening-rekening diatas, diterbitkan juga Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-805-2023 Tentang Penetapan Nomor dan Nama Rekening Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Negeri dan Swasta Se Sumatera Barat Pada PT Bank Nagari Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
I	**KAB. AGAM**		
1	SMA MUHAMMADIYAH TIKU	10304891 SMA MUHAMMADIYAH TIKU	71000106100501
2	SMA TAHFIZHUL QUR AN SYECH AHMAD CHATIB	69899900 SMA THFZHL QR N SYCH	72010106000111
3	SMK PLUS BERBASIS PESANTREN BINA NUSANTARA MANDIRI TANJUNG MUTIARA	69968154 SMK PLUS BNM BERBASIS PESANTREN BNM TANJUNG MUTIARA	71040103000123
4	SLB AMANAH BUNDA	69756289 SLB AMANAH BUNDA	71000106009615
5	SLB AMPEK NAGARI	10300288 SLB AMPEK NAGARI	71000106100512
6	SLB BASO	69756288 SLB BASO	71000106100523
7	SLB ETNIK KREATIF NUSANTARA	69945383 SLB ETNIK KREATIF NUSANTARA	72010106000122
8	SLB KITA SAMA	69984994 SLB KITA SAMA	72010106000133
9	SLB MUFTIA RAHMA	69915332 SLB MUFTIA RAHMA	71000106100534
10	SMA IT ABI CENTER	70011627 SMA IT ABI CENTER	72010106000144
11	SMA MUHAMMADIYAH LUBUK BASUNG	10304889 SMA MUHAMMADIYAH LUBUK BASUNG	71000106100545
12	SMA MUHAMMADIYAH SALAREH AIA	10308631 SMA MUHAMMADIYAH SALAREH AIA	71000106100556
13	SMA SWASTA BANUHAMPU	10300289 SMA SWASTA BANUHAMPU	72010106000155
14	SMK PLUS PERBANKAN BOUGENVILLE	10304895 SMK PLUS PERBANKAN BOUGENVILLE	71000106100560
15	SMK TEKNOLOGI BUNDO KANDUANG	10304896 SMK TEKNOLOGI BUNDO KANDUANG	71000106100571
16	SMA NEGERI 1 BANUHAMPU	10300296 SMAN 1 BANUHAMPU	72010106000166
17	SMA NEGERI 1 LUBUK BASUNG	10300292 SMAN 1 LUBUK BASUNG	71000106100582
18	SMA NEGERI 1 TANJUNG RAYA	10300286 SMAN NEGERI 1 TANJUNG RAYA	71000106100593
19	SLBN 1 AMPEK ANGKEK	10309211 SLBN 1 AMPEK ANGKEK	72010106000170
20	SLBN 1 LUBUK BASUNG	10300459 SLBN 1 LUBUK BASUNG	71000106100604
21	SMA NEGERI 1 AMPEK ANGKEK	10300299 SMA NEGERI 1 AMPEK ANGKEK	72010106000181
22	SMA NEGERI 1 AMPEK NAGARI	10300295 SMA NEGERI 1 AMPEK NAGARI	71000106100615
23	SMA NEGERI 1 BASO	10300297 SMA NEGERI 1 BASO	72010106000192
24	SMA NEGERI 1 CANDUNG	10304886 SMA NEGERI 1 CANDUNG	72010106000203
25	SMA NEGERI 1 IV KOTO	10300298 SMA NEGERI 1 IV KOTO	72010106000211
26	SMA NEGERI 1 KAMANG MAGEK	10300300 SMA NEGERI 1 KAMANG MAGEK	72010106000222
27	SMA NEGERI 1 MATUR	10300301 SMA NEGERI 1 MATUR	72010106000233
28	SMA NEGERI 1 PALEMBAYAN	10300302 SMA NEGERI 1 PALEMBAYAN	72010106000244
29	SMA NEGERI 1 PALUPUH	10300293 SMA NEGERI 1 PALUPUH	72010106000255

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
30	SMA NEGERI 1 SUNGAI PUAR	10300304 SMA NEGERI 1 SUNGAI PUAR	72010106000266
31	SMA NEGERI 1 TANJUNG MUTIARA	10300287 SMA NEGERI 1 TANJUNG MUTIARA	71000106100626
32	SMA NEGERI 1 TILATANG KAMANG	10300269 SMA NEGERI 1 TILATANG KAMANG	72010106000270
33	SMA NEGERI 2 IV KOTO	10300270 SMA NEGERI 2 IV KOTO	72010106000281
34	SMA NEGERI 2 LUBUK BASUNG	10300294 SMA NEGERI 2 LUBUK BASUNG	71000106100630
35	SMA NEGERI 2 PALEMBAYAN	69964939 SMA NEGERI 2 PALEMBAYAN	71000106100641
36	SMA NEGERI 2 TILATANG KAMANG	10300271 SMA NEGERI 2 TILATANG KAMANG	72010106000292
37	SMA NEGERI 3 LUBUK BASUNG	10300290 SMA NEGERI 3 LUBUK BASUNG	71000106100652
38	SMA NEGERI AGAM CENDEKIA	10304887 SMA NEGERI AGAM CENDEKIA	71000106100663
39	SMK NEGERI 1 AMPEK ANGKEK	10300274 SMK NEGERI 1 AMPEK ANGKEK	72010106000303
40	SMK NEGERI 1 AMPEK NAGARI	10310498 SMK NEGERI 1 AMPEK NAGARI	71000106100674
41	SMK NEGERI 1 BASO	10310706 SMK NEGERI 1 BASO	72010106000314
42	SMK NEGERI 1 LUBUK BASUNG	10300272 SMK NEGERI 1 LUBUK BASUNG	71000106100685
43	SMK NEGERI 1 MATUR	10308298 SMK NEGERI 1 MATUR	72010106000325
44	SMK NEGERI 1 PALEMBAYAN	10304892 SMK NEGERI 1 PALEMBAYAN	72010106000336
45	SMK NEGERI 1 TANJUNG MUTIARA	69849081 SMK NEGERI 1 TANJUNG MUTIARA	71000106100696
46	SMK NEGERI 1 TANJUNG RAYA	10300273 SMK NEGERI 1 TANJUNG MUTIARA	71000106100700
47	SMK NEGERI 1 TILATANG KAMANG	10308138 SMK NEGERI 1 TILATANG	72010106000340
48	SMK NEGERI 2 LUBUK BASUNG	10304893 SMK NEGERI 2 LUBUK BASUNG	71000106100711
49	SLB NURUL DAULAH	70038470 SLB NURUL DAULAH	72010108000331
50	SMKS AL IZHAR BOARDING SCHOOL	70036063 SMKS AL IZHAR BOARDING SCHOOL	72010106000103
51	SLB PARYMINIK KREATIF	70033433 SLB PARYMINIK KREATIF	71000106000644
52	SLB MUTIARA MADANI	70038506 SLB MUTIARA MADANI	71000106000660
53	SLB MUTIARA AGAM MANDIRI	70040115 SLB MUTIARA AGAM MANDIRI	72010103000275
54	SMA PK NURUL IHSAN PANAMPUANG	70027176 SMA PK NURUL IHSAN PANAMPUANG	72010103000231
II	**KAB. DHARMASRAYA**		
55	SLB Athallah Sungai Rumbai	10310181 SLB ATHALLAH SUNGAI RUMBAI	71020106000142
56	SLB KOTO AGUNG	69888456 SLB KOTO AGUNG	71020106000153
57	SMKS START UP DARA JINGGA	69986342 SMK START UP DARA JIN	71020106000164
58	SMAN 1 Koto Salak	69774852 SMAN I KOTO SALAK	71020106000175
59	SMAN 1 TIUMANG	69954291 SMAN1 TIUMANG	71020106000186

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
60	SLBN 1 PULAU PUNJUNG	10308107 SLBN 1 PULAU PUNJUNG	71020106000190
61	SMAN 1 ASAM JUJUHAN	69953273 SMAN 1 ASAM JUJUHAN	71020106000201
62	SMAN 1 IX Koto	69774851 SMAN 1 IX KOTO	71020106000212
63	SMAN 1 KOTO BARU	10303218 SMAN 1 KOTO BARU	71020106000223
64	SMAN 1 KOTO BESAR	10308311 SMAN 1 KOTO BESAR	71020106000234
65	SMAN 1 PULAU PUNJUNG	10303217 SMAN 1 PULAU PUNJUNG	71020106000245
66	SMAN 1 SIKABAU	69986156 SMAN 1 SIKABAU	71020106000251
67	SMAN 1 SITIUNG	10303219 SMAN 1 SITIUNG	71020106000262
68	SMAN 1 SUNGAI RUMBAI	10303216 SMAN 1 SUNGAI RUMBAI	71020106000273
69	SMAN 1 TIMPEH	10304873 SMAN 1 TIMPEH	71020106000284
70	SMAN 2 KOTO BARU	10304875 SMAN 2 KOTO BARU	71020106000295
71	SMAN 2 PULAU PUNJUNG	10304874 SMAN 2 PULAU PUNJUNG	71020106000306
72	SMAN 2 SITIUNG	69986157 SMAN 2 SITIUNG	71020106000310
73	SMAN 2 SUNGAI RUMBAI	69953275 SMAN 2 SUNGAI RUMBAI	71020106000321
74	SMA N UNGGUL DHARMASRAYA	69853525 SMA N UNGGUL DHARMASRAYA	71050101000034
75	SMKN 1 KOTO BARU	10303215 SMKN 1 KOTO BARU	71020106000332
76	SMKN 1 KOTO BESAR	69946934 SMKN 1 KOTO BESAR	71020106000343
77	SMKN 1 PADANG LAWEH	69986158 SMKN 1 PADANG LAWEH	71020106000354
78	SMKN 1 PULAU PUNJUNG	10303214 SMKN 1 PULAU PUNJUNG	71020106000365
79	SMKN 1 SITIUNG	69853536 SMKN 1 SITIUNG	71020106000376
80	SMKN 1 SUNGAI RUMBAI	10304876 SMKN 1 SUNGAI RUMBAI	71020106000380
81	SMKN 1 TIMPEH	69853537 SMKN 1 TIMPEH	71020106000391
82	SMKN 2 PULAU PUNJUNG	10308286 SMKN 2 PULAU PUNJUNG	71020106000402
83	SLB Athallah Sungai Rumbai	10310181 SLB ATHALLAH SUNGAI RUMBAI	71020106000142
III	**KAB. KEPULAUAN MENTAWAI**		
84	SLB BINA LAGGAI MENTAWAI	69961503 SLB BINA LAGGAI MENTAWAI	71000106100722
85	SLB MUTIARA BANGSA PRATAMA MENTAWAI	69959484 SLB MUTIARA BANGSA PRATAMA MENTAWAI	71000106100733
86	SMA LENTERA MENTAWAI	69888565 SMA LENTERA MENTAWAI	71000106100744
87	SMAS PLUS SETIA	10309885 SMAS PLUS SETIA	71000106100755
88	SMAN 1 SIPORA	10302979 SMA NEGERI 1 SIPORA	71000106100766
89	SMK NEGERI 1 KEPULAUN MENTAWAI	69851452 SMK NEGERI 1 KEPULAUAN MENTAWAI	71000106100770

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
90	SMAN 1 PAGAI UTARA SELATAN	10302981 SMAN 1 PAGAI UTARA SELATAN	71000106100781
91	SMAN 1 SIBERUT SELATAN	10302978 SMAN 1 SIBERUT SELATAN	71000106100792
92	SMAN 1 SIBERUT TENGAH	10310733SMAN 1 SIBERUT TENGAH	71000106100803
93	SMAN 1 SIBERUT UTARA	10302982 SMAN 1 SIBERUT UTARA	71000106100814
94	SMAN 2 SIPORA	10302980 SMAN 2 SIPORA	71000106100825
95	SMA NEGERI 1 PAGAI SELATAN	69903167 SMA NEGERI 1 PAGAI SELATAN	71000106100836
96	SMA NEGERI 1 PAGAI UTARA	69903388 SMA NEGERI 1 PAGAI UTARA	71000106100840
97	SMA NEGERI 1 SIBERUT BARAT	69917690 SMA NEGERI 1 SIBERUT	71000106100851
98	SMA NEGERI 1 SIBERUT BARAT DAYA	69809505 SMA NEGERI 1 SIBERUT	71000106100862
99	SMA NEGERI 2 SIKAKAP	69809506 SMA NEGERI 2 SIKAKAP	71000106100873
100	SMK NEGERI 2 KEPULAUAN MENTAWAI	69900920 SMK NEGERI 2 KEPULAUAN MENTAWAI	71000106100884
101	SMK NEGERI 3 KEPULAUAN MENTAWAI	69953380 SMK NEGERI 3 KEPULAUAN MENTAWAI	71000106100895
IV	**KAB. LIMA PULUH KOTO**		
102	SMK KESEHATAN NEGERI AKABILURU	70032804 SMK KESEHATAN NEGERI AKABILURU	72000106000060
103	SLB MUTIARA ANNAFII	70042530 SLB MUTIARA ANNAFII	72000106000071
104	SMK KESEHATAN EXCELLENT	70036605 SMK KESEHATAN EXCELLENT	72000201022492
105	SMA AL FURQON ISLAMIC BOARDING SCHOOL	70031790 SMA AIBS	7200020102522-2
106	SMA QURAN AL ZAMRIYAH ISLAMIC BOARDING SCHOOL	70029476 SMA QURAN AL ZAMRIYAH IBS	72000108000144
107	SMK IT CAHAYA PERADABAN	70015461 SMK IT C PERADABAN	72000108020256
108	SLB AL-AZRA IYAH	10310718 SLB AL AZRAIYAH	72000106000141
109	SLB AL HIDAYAH	10301189 SLB AL HIDAYAH	72000106000152
110	SLB BUDI KARYA DANGUNG-DANGUNG	69863195 SLB BUDI KARYA DANGUNG DANGUNG	72000106000163
111	SLB SYEH MUHAMMAD SA AD	10310725 SLB SYEKH MUHAMMAD SA AD	72000106000174
112	SMKS USWATUN HASANAH	10304434 SMK USWATUN HASANAH	72000106000185
113	SLB AIR RANDAH	10301176 SLB AIR RANDAH	72000106000196
114	SLB AL MUNAWAROH	70001423 SLB AL MUNAWAROH	72000106000200
115	SLB CITRA BANGSA	10304436 SLB CITRA BANGSA	72000106000211
116	SLB DARMA BAKTI INSANI	70001471 SLB DARMA BAKTI INSANI	72000106000222
117	SLB Pelita Kapur	69984651 SLB PELITA KAPUR	72000106000233
118	SLB SEHATI	69991911 SLB SEHATI	72000106000244
119	SLB ULURAN KASIH	10305494 SLB ULURAN KASIH	72000106000255

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
120	SLB YP PEDULI ANAK NAGARI	69900070 SLB YP PEDULI ANAK NAGARI	72000106000261
121	SMA Cahaya Islam	69972821 SMA CAHAYA ISLAM	72000106000272
122	SMAN 1 Kec. Mungka	69946102 SMAN 1 KEC MUNGKA	72000106000283
123	SMAN 1 KEC. PAYAKUMBUH	10304429 SMAN 1 KC. PYKMBH	72000106000294
124	SMAN 2 KEC. BUKIK BARISAN	69946176 SMAN 2 KEC BUKIK BARISAN	72000106000305
125	SMAN 2 KEC. PANGKALAN KOTO BARU	10304429 SMAN 1 KEC PAYAKUMBUH	72000106000316
126	SMA NEGERI 1 KECAMATAN GUNUANG OMEH	69786301 SMAN NEGERI 1 KECAMATAN GUNUNG OMEH	72000106000320
127	SLBN 1 HARAU	10301305 SLBN 1 HARAU	72000106000331
128	SMAN 1 AKABILURU	10301188 SMAN 1 AKABILURU	72000106000342
129	SMAN 1 BUKIK BARISAN	69786302 SMAN 1 BUKIK BARISAN	72000106000353
130	SMAN 1 GUGUAK	10301187 SMAN 1 GUGUAK	72000106000364
131	SMAN 1 HARAU	10301186 SMAN 1 HARAU	72000106000375
132	SMAN 1 KAPUR IX	10301185 SMA N 1 KECAMATAN KAPUR IX	72000106000386
133	SMAN 1 KEC PANGKALAN KOTO BARU	10301183 SMA N 1 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	72000106000390
134	SMAN 1 LAREH SAGO HALABAN	10301184 SMAN 1 LAREH SAGO HALABAN	72000106000401
135	SMAN 1 SITUJUAH LIMO NAGARI	10301182 SMAN 1 SITUJUAH LIMO NAGARI	72000106000412
136	SMAN 1 SULIKI	10301181 SMAN 1 SULIKI	72000106000423
137	SMAN 2 HARAU	69786300 SMAN 2 HARAU	72000106000434
138	SMA Negeri 2 Kec. Kapur IX	69960622 SMA NEGERI 2 KEC. KAPUR IX	72000106000445
139	SMKN 1 GUGUK	10304432 SMKN 1 GUGUK	72000106000456
140	SMKN 1 KECAMATAN LUAK	10304430 SMKN 1 KECAMATAN LUAK	72000106000460
141	SMKN 1 PANGKALAN	10304433 SMKN 1 PANGKALAN	72000106000471
142	SMKN 1 SULIKI	10304431 SMKN 1 SULIKI	72000106000482
143	SMKN 2 KEC GUGUAK	10310872 SMKN 2 KEC GUGUAK	72000106000493
144	SMKN PP PADANG MENGATAS	10310831 SMKN PP PADANG MENGATAS	72000106000501
V	**KAB. PADANG PARIAMAN**		
145	SLB MUTIARA QALBU	70027795 SLB MUTIARA QALBU	71000106009711
146	SLB MUTIARA ILMU TERPILIH	70013493 SLB Mutiara Ilmu Terpilih	71000106009626
147	SLB BERKAH BERSAMA	70015023 SLB BERKAH BERSAMA	71000106009733
148	SMA PRAJA NUSANTARA SUMBAR	70031127 SMA PRAJA NUSANTARA SUMATERA BARAT	71000106009851
149	SLB DWINATA	70033918 SLB DWINATA	71000108002014

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
150	SLB ARRAHMAN	60724588 SLB AR RAHMAN	71000106100906
151	SLB NUR RACHMAN	10307808 SLB NUR RACHMAN	71000106100910
152	SMAS YAPPHI BATANG ANAI	10308464 SMA YAPPHI PASAR USANG	71000106100921
153	SMAS YDB LUBUK ALUNG	10308151 SMA YDB LUBUK ALUNG	71000106100932
154	SMKS DHARMA BAKTI LUBUK ALUNG	10305576 SMK DHARMA BAKTI	71000106100943
155	SMKS INDONESIA RAYA	10307298 SMK INDONESIA RAYA	71000106100954
156	SMKS KESEHATAN MANDIRI LUBUK ALUNG	60724587 SMK KESEHATAN MANDIRI	71000106100965
157	SMKS SOSIAL / PARIWISATA LUBUK ALUNG	10305597 SMK SOSIAL LUBUK ALUNG	71000106100976
158	SMKS YPP LUBUK ALUNG	10305579 SMK YPP LUBUK ALUNG	71000106100980
159	SLB AMAL BHAKTI SICINCIN	10301767 SLB AMAL BHAKTI SICINCIN	71000106100991
160	SLB ARAFAH	69987361 SLB ARAFAH	71000106101002
161	SLB MUTIARA BUDI	10301766 SLB MUTIARA BUDI	71000106101013
162	SLB Nurul Hasanah Pakandangan	69961042 SLB NURUL HASANAH PAKANDANGAN	71000106101024
163	SLB PERMATA BUNDA	10301778 SLB PERMATA BUNDA	71000106101035
164	SLB YPAC NAN SABARIS	10301780 SLB YPAC NAN SABARIS	71000106101046
165	SMAS INS KAYU TANAM	10308098 SMAS INS KAYU TANAM	71000106101050
166	SMK MARITIM NUSANTARA	69900809 SMK MARITIM NUSANTARA	71000106101061
167	SMKS NASIONAL KAYUTANAM	10305577 SMKS NASIONAL KAYUTANAM	71000106101072
168	SMKS PENERBANGAN NUSANTARA KETAPING	10308465 SMKS PENERBANGAN NUSANTARA KETAPING	71000106101083
169	SMKS YPM ZAIN PAUH KAMBAR	10305578 SMKS YPM ZAIN PAUH KAMBAR	71000106101094
170	SMAN 1 2X11 ENAM KAYU TANAM	10305560 SMAN 1 2X11 KAYU TANAM	71000106101105
171	SMAN 1 BATANG GASAN	69829357 SMAN 1 BATANG GASAN	71000106101116
172	SMAN 1 ENAM LINGKUNG	10305561 SMAN 1 ENAM LINGKUNG	71000106101120
173	SMAN 1 IV KOTO A MALINTANG	10305562 SMAN 1 IV KOTO AUR MALINTANG	71000106101131
174	SMA N 1 PATAMUAN	69946914 SMAN 1 PATAMUAN	71000106101142
175	SMAN 2 Batang Anai	69826561 SMAN 2 BATANG ANAI	71000106101153
176	SMAN 2 Lubuk Alung	69823281 SMAN 2 LUBUK ALUNG	71000106101164
177	SMAN 1 2X11 ENAM LINGKUNG	10305549 SMAN 1 2X11 ENAM LINGKUNG	71000106101175
178	SMAN 1 BATANG ANAI	10301791 SMAN 1 BATANG ANAI	71000106101186
179	SMAN 1 LUBUK ALUNG	10301790 SMAN 1 LUBUK ALUNG	71000106101190
180	SMAN 1 NAN SABARIS	10305547 SMAN 1 NAN SABARIS	71000106101201

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
181	SMAN 1 PADANG SAGO	10305563 SMAN 1 PADANG SAGO	71000106101212
182	SMAN 1 SUNGAI GERINGGING	10305564 SMAN 1 SUNGAI GERINGGING	71000106101223
183	SMAN 1 SUNGAI LIMAU	10305565 SMAN 1 SUNGAI LIMAU	71000106101234
184	SMAN 1 ULAKAN TAPAKIS	10305548 SMAN 1 ULAKAN TAPAKIS	71000106101245
185	SMAN 1 VII KOTO SUNGAI SARIK	10305569 SMAN 1 VII KOTO SUNGAI SARIK	71000106101256
186	SMAN 1 V KOTO KAMPUNG DALAM	10305566 SMAN 1 V KOTO KAMPUNG DALAM	71000106101260
187	SMAN 1 V KOTO TIMUR	10305568 SMAN 1 V KOTO TIMUR	71000106101271
188	SMAN 2 SUNGAI LIMAU	10305570 SMAN 2 SUNGAI LIMAU	71000106101282
189	SMAN 2 VII KOTO SUNGAI SARIK	69822703 SMAN 2 VII KOTO SUNGAI SARIK	71000106101293
190	SMKN 1 ENAM LINGKUNG	10308128 SMKN 1 ENAM LINGKUNG	71000106101304
191	SMKN 1 IV KOTO AUR MALINTANG	69829358 SMKN 1 IV KOTO AUR MALINTANG	71000106101315
192	SMKN 1 SINTUK TOBOH GADANG	10305575 SMKN 1 SINTUK TOBOH GADANG	71000106101326
193	SMKN 1 SUNGAI LIMAU	10310791 SMKN 1 SUNGAI LIMAU	71000106101330
194	SUPM NEGERI PARIAMAN	10310815 SUPM NEGERI PARIAMAN	71000106101341
VI	**KAB. PASAMAN**		
195	SLB YAPPAT LUBUK SIKAPING	10300855 SLB YAPPAT LUBUK SIKAPING	72010106001561
196	SLB HUSNI MURNI	69902714 SLB HUSNI MURNI	72010106001572
197	SLB INDAH PERMATA BUNDA	69987463 SLB INDAH PERMATA BUNDA	72010106001583
198	SMAS PGRI RAO SELATAN	10300834 SMAS PGRI RAO SELATAN	72010106001594
199	SMAS YAPPAS PASAMAN	10300833 SMAS YAPPAS PASAMAN	72010106001605
200	SMKS HARAPAN BANGSA PANTI	10300824 SMKS HARAPAN BANGSA PANTI	72010106001616
201	SMKS KOSGORO LUBUK SIKAPING	10300820 SMKS KOSGORO LUBUK SIKAPING	72010106001620
202	SLBN 1 LUBUK SIKAPING	69786957 SLBN 1 LUBUK SIKAPING	72010106000811
203	SLBN 1 PANTI	10300856 SLBN 1 PANTI	72010106000822
204	SMAN 1 BONJOL	10300832 SMAN 1 BONJOL	72010106000833
205	SMAN 1 DUA KOTO	10300831 SMAN 1 DUA KOTO	72010106000844
206	SMAN 1 LUBUK SIKAPING	10300830 SMAN 1 LUBUK SIKAPING	72010106000855
207	SMAN 1 MAPAT TUNGGUL	69757492 SMAN 1 MAPAT TUNGGUL	72010106000866
208	SMAN 1 PADANG GELUGUR	10304194 SMAN 1 PADANG GELUGUR	72010106000870
209	SMAN 1 PANTI	10300829 SMAN 1 PANTI	72010106000881
210	SMAN 1 RAO	10300828 SMAN 1 RAO	72010106000892

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
211	SMAN 1 RAO UTARA	69774643 SMAN 1 RAO UTARA	72010106000903
212	SMAN 1 TIGO NAGARI	10300827 SMAN 1 TIGO NAGARI	72010106000914
213	SMAN 2 LUBUK SIKAPING	10310590 SMAN 2 LUBUK SIKAPING	72010106000925
214	SMA NEGERI 3 SUMATERA BARAT	69964938 SMA NEGERI 3 SUMATERA BARAT	72010106000936
215	SMAN MAPAT TUNGGUL SELATAN	69774642 SMAN MAPAT TUNGGUL SELATAN	72010106000940
216	SMKN 1 BONJOL	10300826 SMKN 1 BONJOL	72010106000951
217	SMKN 1 DUA KOTO	69896555 SMKN 1 DUA KOTO	72010106000962
218	SMKN 1 LUBUK SIKAPING	10300825 SMKN 1 LUBUK SIKAPING	72010106000973
219	SMKN 1 PADANG GALUGUR	10304195 SMKN 1 PADANG GALUGUR	72010106000984
220	SMKN 1 RAO SELATAN	10307598 SMKN 1 RAO SELATAN	72010106000995
221	SMKN 1 SIMPANG ALAHAN MATI	69754554 SMKN 1 SIMPANG ALAHAN MATI	72010106001006
VII	**KAB. PASAMAN BARAT**		
222	SMA S AL - ISTIQOMAH	10306088 SMA S AL ISTIQOMAH	71000106101352
223	SMA S ASSYFA KAPA	69829539 SMA ASSYFA	71000106101363
224	SMA S CITRA INSANI	69955317 SMA CITRA INSANI	71000106101374
225	SMA S ISLAM CENDEKIA	69949639 SMA ISLAM CENDEKIA	71000106009630
226	SMK S ARABI DARUL YAMANI SASAK	69775449 SMK ARABI DARUL YAMANI	71000106009674
227	SMK S SUBULUS SALAM	69894540 SMK S SUBULUS SALAM	71000106101385
228	SLB BAITUL FATTAAHU KINALI	69954076 SLB BAITUL FATTAAHU KINALI	71000106101396
229	SLB Bismillah	70011270 SLB BISMILLAH	71000106101400
230	SLB UMMI CHAIRA	10306691 SLB UMMI CHAIRA	71000106101411
231	SMA CENDEKIA PASBAR	69985145 SMA CENDEKIA PASBAR	71000106101422
232	SMA S IT DARUL HIKMAH	69892905 SMA S IT DARUL HIKMAH	71000106101433
233	SMA S MUHAMMADIYAH AIR BANGIS	10306089 SMA MUHAMMADIYAH AIR BANGIS	71000106101444
234	SMA S MUHAMMADIYAH UJUNG GADING	10306090 SMA S MUHAMMADIYAH UJUNG GADING	71000106101455
235	SMA S PLUS PEMBANGUNAN KINALI	10306091 SMA S PLUS PEMBANGUNAN KINALI	71000106101466
236	SMA S TARUNA AL-MUNIR	69899770 SMA S TARUNA AL-MUNIR	71000106101470
237	SMA S TUNAS BANGSA MALIGI	69815342 SMA S TUNAS BANGSA MALIGI	71000106101481
238	SMK AL FATIH	69991778 SMK AL FATIH	71000106101492
239	SMK IT Al Hidayah	70011269 SMK IT AL HIDAYAH	71000106101503
240	SMK S CERSA PASAMAN	10306092 SMK S CERSA PASAMAN	71000106101514

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
241	SMK S DARUL FALAH	10306093 SMK S DARUL FALAH	71000106101525
242	SMK S DARUL ULUM MUARA KIAWAI	10306094 SMK S DARUL ULUM MUARA KIAWAI	71000106101536
243	SMK S IT AGUS SUSANTO	69774717 SMK S IT AGUS SUSANTO	71000106101540
244	SMK S NURUL FALAH	10308134 SMK S NURUL FALAH	71000106101551
245	SMK S TI ZAMIGA	69954653 SMK S TI ZAMIGA	71000106101562
246	SMA N 1 KINALI	10303087 SMAN 1 KINALI	71000106101573
247	SMA N 1 LEMBAH MELINTANG	10303089 SMA N 1 LMBH MLNTNG	71000106101584
248	SMA N 1 SUNGAI BEREMAS	10303091 SMAN 1 SUNGAI BEREMAS	71000106101595
249	SMA N 2 KINALI	69948099 SMAN 2 KINALI	71000106101601
250	SMK N 1 KINALI	10308183 SMKN 1 KINALI	71000106101612
251	SMK N 1 RANAH BATAHAN	10310878 SMKN 1 RANAH BATAHAN	71000106101623
252	SLBN 1 SUNGAI AUR	10310045 SLBN 1 SUNGAI AUR	71000106101634
253	SMA N 1 GUNUNG TULEH	10303086 SMA N 1 GUNUNG TULEH	71000106101645
254	SMA N 1 KOTO BALINGKA	10303088 SMA N 1 KOTO BALINGKA	71000106101656
255	SMA N 1 LUHAK NAN DUO	10306085 SMA N 1 LUHAK NAN DUO	71000106101660
256	SMA N 1 PASAMAN	10303090 SMA N 1 PASAMAN	71000106101671
257	SMA N 1 RANAH BATAHAN	10306086 SMA N 1 RANAH BATAHAN	71000106101682
258	SMA N 1 SUNGAI AUR	10307806 SMA N 1 SUNGAI AUR	71000106101693
259	SMA N 1 TALAMAU	10303106 SMA N 1 TALAMAU	71000106101704
260	SMA N 2 PASAMAN	69764539 SMA N 2 PASAMAN	71000106101715
261	SMAN 2 RANAH BATAHAN	69987232 SMAN 2 RANAH BATAHAN	71000106101726
262	SMK N 1 GUNUNG TULEH	69905465 SMK N 1 GUNUNG TULEH	71000106101730
263	SMKN 1 KOTO BALINGKA	69968546 SMKN 1 KOTO BALINGKA	71000106101741
264	SMK N 1 LEMBAH MELINTANG	10306096 SMK N 1 LEMBAH MELINTANG	71000106101752
265	SMKN 1 PASAMAN	10310877 SMKN 1 PASAMAN	71000106101763
266	SMK N 1 SASAK RANAH PASISIE	10306135 SMK N 1 SASAK RANAH PASISIE	71000106101774
267	SMK N 1 SUNGAI AUR	69820624 SMK N 1 SUNGAI AUR	71000106101785
268	SMK N 1 TALAMAU	10306097 SMK N 1 TALAMAU	71000106101796
269	SLB HUSNI MURNI JAMBAK	70027308 SLB HUSNI MURNI JAMBAK	71000108002025
270	SLB AUTISMA MITRA AFIZA NUSANTARA	70039183 SLB AUTISMA MITRA AFIZA NUSANTARA	71000106000622
271	SLB MIFTAHUL KHOIR	70012610 SLB MIFTAHUL KHOIR	71000106009582

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
VIII	**KAB. PESISIR SELATAN**		
272	SMKS PLUS BUDI DARMA LUMPO	10301926 SMKS PLUS BUDI DARMA LUMPO	71000106000692
273	SLB HAZIRAH RANAH PESISIR	70014420 SLB HAZIRAH RANAH PESISIR	71000220385290
274	SLB AL-MIRZA	10310902 SLB AL MIRZA	71000106101800
275	SLB BALQIS NUR ADIBA	70006543SLB BALQIS NUR ADIBA	71000106101811
276	SLB YAPEM TARUSAN	10308024 SLB YAPEM TARUSAN	71000106101822
277	SLB YMIK BAYANG	1038257 SLB YMIK BAYANG	71000106101833
278	SMKS PGRI PAINAN	10301943 SMK PGRI PAINAN	71000106101844
279	SLB BINAR TARUSAN	10308078 SLB BINAR TARUSAN	71000106101855
280	SLB CAHAYA BUNDA	10308264 SLB CAHAYA BUNDA	71000106101866
281	SLB DIO FASTABIQUL KHAIRAT	69962523 SLB DIO FASTABIQUL KHAIRAT	71000106101870
282	SLB KASIH IBU BAYANG	10308431 SLB KASIH IBU BAYANG	71000106101881
283	SLB YPPC PAINAN	10308178 SLB YPPC PAINAN	71000106101892
284	SMKS ADI KARYA RANAH PESISIR	10310698 SMKS ADI KARYA RANAH PESISIR	71000106101903
285	SMKS AL ANHAR BAYANG	10301944 SMKS AL ANHAR BAYANG	71000106101914
286	SMKS E ADI KARYA LINGGO SARI BAGANTI	10301940 SMKS E ADI KARYA LINGGO SARI BAGANTI	71000106101925
287	SMKS MADRASAH ARABIYAH BAYANG	10310803 SMKS MADRASAH ARABIYAH BAYANG	71000106101936
288	SMKS MAKMUR LENGGAYANG	10301941 SMKS MAKMUR LENGGAYANG	71000106009560
289	SMKS TEKNOLOGI LENGAYANG	10301946 SMKS TEKNOLOGI LENGAYANG	71000106101940
290	SLBN 1 LINGGO SARI BAGANTI	10310573 SLBN 1 LINGGO SARI BAGANTI	71000106101951
291	SMAN 1 AIR PURA	10308265 SMAN 1 AIRPURA	71000106101962
292	SMKN 1 LINGGO SARI BAGANTI	10310796 SMKN 1 LINGGO SARI BAGANTI	71000106101973
293	SMKN 1 RANAH AMPEK HULU TAPAN	10309786 SMKN 1 RANAH AMPEK HULU	71000106101984
294	SLBN 1 LENGAYANG	10308259 SLBN 1 LENGAYANG	71000106101995
295	SLBN 1 PAINAN	10301850 SLBN 1 PAINAN	71000106102006
296	SLBN 1 RANAH PESISIR	10308223 SLBN 1 RANAH PESISIR	71000106102010
297	SMAN 1 BASA AMPEK BALAI	10302022 SMAN 1 BASA AMPEK BALAI	71000106102021
298	SMAN 1 BATANG KAPAS	10302021 SMAN 1 BATANG KAPAS	71000106102032
299	SMAN 1 BAYANG	10302009 SMAN 1 BAYANG	71000106102043
300	SMAN 1 KOTO XI TARUSAN	10308163 SMAN 1 KOTO XI TARUSAN	71000106102054
301	SMAN 1 LENGAYANG	10302010 SMAN 1 LENGAYANG	71000106102065

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
302	SMAN 1 LINGGO SARI BAGANTI	10302011 SMAN 1 LINGGO SARI BAGANTI	71000106102076
303	SMAN 1 LUNANG	10302013 SMAN 1 LUNANG	71000106102080
304	SMAN 1 NAGARI IV BAYANG UTARA	10302034 SMAN 1 NAGARI IV BAYANG UTARA	71000106102091
305	SMAN 1 PAINAN	10302014 SMAN 1 PAINAN	71000106102102
306	SMAN 1 PANCUNG SOAL	10302015 SMAN 1 PANCUNG SOAL	71000106102113
307	SMAN 1 RANAH PESISIR	10302016 SMAN 1 RANAH PESISIR	71000106102124
308	SMAN 1 SILAUT	10308231 SMAN 1 SILAUT	71000106102135
309	SMAN 1 SUTERA	10302017 SMAN 1 SUTERA	71000106102146
310	SMAN 2 BASA AMPEK BALAI	69987102 SMAN 2 BASA AMPEK BALAI	71000106102150
311	SMAN 2 BATANG KAPAS	10302018 SMAN 2 BATANG KAPAS	71000106102161
312	SMAN 2 BAYANG	10308089 SMAN 2 BAYANG	71000106102172
313	SMAN 2 KOTO XI TARUSAN	10307604 SMAN 2 KOTO XI TARUSAN	71000106102183
314	SMAN 2 LENGAYANG	10302019 SMAN 2 LENGAYANG	71000106102194
315	SMAN 2 Linggo Sari Baganti	69987076 SMAN 2 LINGGO SARI BAGANTI	71000106102205
316	SMAN 2 PAINAN	10302020 SMAN 2 PAINAN	71000106102216
317	SMAN 2 RANAH PESISIR	10308260 SMAN 2 RANAH PESISIR	71000106102220
318	SMAN 2 SUTERA	10310901 SMAN 2 SUTERA	71000106102231
319	SMAN 3 LENGAYANG	10307602 SMAN 3 LENGAYANG	71000106102242
320	SMAN 3 PAINAN	10310795 SMAN 3 PAINAN	71000106102253
321	SMKN 1 KOTO XI TARUSAN	10308179 SMKN 1 KOTO XI TARUSAN	71000106102264
322	SMKN 1 PAINAN	10301942 SMKN 1 PAINAN	71000106102275
323	SMKN 1 PANCUNG SOAL	69773545 SMKN 1 PANCUNG SOAL	71000106102286
324	SMKN 1 RANAH PESISIR	10301948 SMKN 1 RANAH PESISIR	71000106102290
325	SMKN 1 SILAUT	69987098 SMKN 1 SILAUT	71000106102301
326	SMKN 1 SUTERA	10308258 SMKN 1 SUTERA	71000106102312
327	SMKN 2 PAINAN	10301949 SMKN 2 PAINAN	71000106102323
IX	**KAB. SIJUNJUNG**		
328	SMKS ELEKTRO SIJUNJUNG	10305581 SMKS LKTR SJNJNG	71020106000413
329	SMKS KARYA MULIA MUARO	10305582 SMKS KY MULIA MUARO	71020106000424
330	SLB AISYIYAH SIJUNJUNG	69880557 SLB AISYIYAH SIJUNJUNG	71020106000435
331	SLB TUNAS MULIA	10310891 SLB TUNAS MULIA	71020106000446

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
332	SMAS ORYZA	10310809 SMAS ORYZA	71020106000450
333	SMK Excelent YSI	69919523 SMK EXCELENT YSI	71020106000461
334	SMAN 4 SIJUNJUNG	10302806 SMA NEGERI 4 SIJUNJUNG	71020106000472
335	SLBN 1 KAMANG BARU	10311324 SLBN 1 KAMANG BARU	71020106000483
336	SLBN 1 MUARO SIJUNJUNG	10302887 SLBN 1 MUARO SIJUNJUNG	71020106000491
337	SMAN 10 SIJUNJUNG	10307884 SMAN 10 SIJUNJUNG	71020106000502
338	SMAN 11 SIJUNJUNG	10308127 SMAN 11 SIJUNJUNG	71020106000513
339	SMAN 12 SIJUNJUNG	10308287 SMAN 12 SIJUNJUNG	71020106000524
340	SMAN 13 SIJUNJUNG	69946653 SMAN 13 SIJUNJUNG	71020106000535
341	SMAN 1 SIJUNJUNG	10302823 SMAN 1 SIJUNJUNG	71020106000546
342	SMAN 2 SIJUNJUNG	10302822 SMAN 2 SIJUNJUNG	71020106000550
343	SMAN 3 SIJUNJUNG	10302821 SMAN 3 SIJUNJUNG	71020106000561
344	SMAN 5 SIJUNJUNG	10302805 SMAN 5 SIJUNJUNG	71020106000572
345	SMAN 6 SIJUNJUNG	10302804 SMAN 6 SIJUNJUNG	71020106000583
346	SMAN 7 SIJUNJUNG	10302788 SMAN 7 SIJUNJUNG	71020106000594
347	SMAN 8 SIJUNJUNG	10302787 SMAN 8 SIJUNJUNG	71020106000605
348	SMAN 9 SIJUNJUNG	10307989 SMAN 9 SIJUNJUNG	71020106000616
349	SMKN 1 SIJUNJUNG	10302785 SMKN 1 SIJUNJUNG	71020106000620
350	SMKN 2 SIJUNJUNG	10302786 SMKN 2 SIJUNJUNG	71020106000631
351	SMKN 3 SIJUNJUNG	10305639 SMKN 3 SIJUNJUNG	71020106000642
352	SMKN 4 SIJUNJUNG	10306287 SMKN 4 SIJUNJUNG	71020106000653
353	SMKN 5 SIJUNJUNG	10308315 SMKN 5 SIJUNJUNG	71020106000664
354	SMKN 6 SIJUNJUNG	10308316 SMKN 6 SIJUNJUNG	71020106000675
355	SMKN 7 SIJUNJUNG	69773528 SMKN 7 SIJUNJUNG	71020106000686
356	SMKN 8 Sijunjung	69991477 SMKN 8 SIJUNJUNG	71020106000690
357	SLB ALISHA	70033421 SLB ALISHA	71020201018491
358	SMA ISLAM AS-SALAM	70026893 SMA ISLAM AS SALAM	71020101000472
X	**KAB. SOLOK**		
359	SLB BERKAH ARSY	70015821 SLB BERKAH ARSY	71020106000056
360	SLB NAZRA HILIRAN GUMANTI	70014607BOS SLB NAZRA HILIRAN GUMANTI	710206000034
361	SMAS M NATSIR	10301589 SMA S PP DR M NATSIR	71020106000701

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
362	SMAS PLUS NAGARI TALANG	69822704 SMAS PLUS TALANG	71020106000712
363	SMKS PARIWISATA LEMBAH GUMANTI	10301519 SMKS PRWST LMBH GMNT	71020106000723
364	SLB AMAL BHAKTI WARGA	69980328 SLB AMAL BHAKTI WARGA	71020106000734
365	SLB ANGGUN MANDIRI	69760751 SLB ANGGUN MANDIRI	71020106000745
366	SLB BERKAH ANISA	69892365 SLB BERKAH ANISA	71020106000756
367	SLB BUNDA ZIKRILLAH	69786955 SLB BUNDA ZIKRILLAH	71020106000760
368	SLB DANAU KEMBAR	69987362 SLB DANAU KEMBAR	71020106000771
369	SLB FISABILILLAH	10308722 SLB FISABILILLAH	71020106000782
370	SLBS BUNDA	69760752 SLBS BUNDA	71020106000793
371	SMA RABBANI ISLAMIC SCHOOL	69948149 SMA RABBANI ISLAMIC SCHOOL	71020106000804
372	SMK PLUS PESANTREN YASNU DILAM	69949079 SMK PLUS PESANTREN YASNU DILAM	71020106000815
373	SMKS BUDI MULIA	10301548 SMKS BUDI MULIA	71020106000826
374	SMKS PROTONIKA YP ABW SALAYO	10301506 SMKS PROTONIKA YP ABW SALAYO	71020106000830
375	SLBN 1 ALAHAN PANJANG	69948138 SLBN 1 ALAHAN PANJANG	71000106102334
376	SLBN 1 KUBUNG	10304199 SLBN 1 KUBUNG	71020106000841
377	SMAN 1 BUKIT SUNDI	10301590 SMAN 1 BUKIT SUNDI	71020106000852
378	SMAN 1 DANAU KEMBAR	10301591 SMAN 1 DANAU KEMBAR	71020106000863
379	SMAN 1 GUNUNG TALANG	10301592 SMAN 1 GUNUNG TALANG	71020106000874
380	SMAN 1 HILIRAN GUMANTI	10301583 SMAN 1 HILIRAN GUMANTI	71020106000885
381	SMAN 1 IX KT SUNGAI LASI	10301582 SMAN 1 IX KT SUNGAI LASI	71020106000896
382	SMAN 1 JUNJUNG SIRIH	10301581 SMAN 1 JUNJUNG SIRIH	71020106000900
383	SMAN 1 KUBUNG	10301573 SMAN 1 KUBUNG	71020106000911
384	SMAN 1 LEMBAH GUMANTI	10301574 SMAN 1 LEMBAH GUMANTI	71020106000922
385	SMAN 1 LEMBANG JAYA	10301575 SMAN 1 LEMBANG JAYA	71020106000933
386	SMAN 1 PANTAI CERMIN	10301576 SMAN 1 PANTAI CERMIN	71020106000944
387	SMAN 1 PAYUNG SEKAKI	10308150 SMAN 1 PAYUNG SEKAKI	71020106000955
388	SMAN 1 TIGO LURAH	10310738 SMAN 1 TIGO LURAH	71020106000966
389	SMAN 1 X KOTO DIATAS	10301577 SMAN 1 X KOTO DIATAS	71020106000971
390	SMAN 1 X KT SINGKARAK	10301578 SMAN 1 X KT SINGKARAK	71020106000982
391	SMAN 2 GUNUNG TALANG	10301579 SMAN 2 GUNUNG TALANG	71020106000993
392	SMAN 2 HILIRAN GUMANTI	10310636 SMAN 2 HILIRAN GUMANTI	71020106001004

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
393	SMAN 2 LEMBANG JAYA	10308439 SMAN 2 LEMBANG JAYA	71020106001015
394	SMA N 2 SUMATERA BARAT	69862591 SMA N 2 SUMATERA BARAT	71020101000063
395	SMAN 2 X KT SINGKARAK	10301580 SMAN 2 X KT SINGKARAK	71020106001026
396	SMKN 1 BUKIT SUNDI	10310889 SMKN 1 BUKIT SUNDI	71020106001030
397	SMKN 1 GUNUNG TALANG	10301518 SMKN 1 GUNUNG TALANG	71020106001041
398	SMKN 1 HILIRAN GUMANTI	10307922 SMKN 1 HILIRAN GUMANTI	71020106001052
399	SMKN 1 LEMBAH GUMANTI	10308093 SMKN 1 LEMBAH GUMANTI	71020106001063
400	SMKN 1 PANTAI CERMIN	10310811 SMKN 1 PANTAI CERMIN	71020106001074
401	SMKN 1 SINGKARAK	10307970 SMKN 1 SINGKARAK	71020106001085
402	SMKN 1 X KOTO DIATAS	10308095 SMKN 1 X KOTO DIATAS	71020106001096
403	SMKN 2 GUNUNG TALANG	10308154 SMKN 2 GUNUNG TALANG	71020106001100
404	SMKN 2 LEMBAH GUMANTI	10310804 SMKN 2 LEMBAH GUMANTI	71020106001111
XI	**KAB. SOLOK SELATAN**		
405	SLB FAN REDHA	69931735 SLB FAN REDHA	71020106001413
406	SMKS YTKA SOLOK SELATAN	10308852 SMKS YTKA SOLOK SELATAN	71020106001424
407	SLBN 1 SANGIR	10310469 SLBN 1 SANGIR	71020106001435
408	SLBN 1 SUNGAI PAGU	10306838 SLBN 1 SUNGAI PAGU	71020106001446
409	SMAN 08 SOLOK SELATAN	10310873 SMAN 08 SOLOK SELATAN	71020106001450
410	SMAN 11 SOLOK SELATAN	69946860 SMAN 11 SOLOK SELATAN	71020106001461
411	SMAN 1 SOLOK SELATAN	10303367 SMAN 1 SOLOK SELATAN	71020106001472
412	SMAN 2 SOLOK SELATAN	10303366 SMAN 2 SOLOK SELATAN	71020106001483
413	SMAN 3 SOLOK SELATAN	10306748 SMAN 3 SOLOK SELATAN	71020106001494
414	SMAN 4 SOLOK SELATAN	10303377 SMAN 4 SOLOK SELATAN	71020106001505
415	SMAN 5 SOLOK SELATAN	10303364 SMAN 5 SOLOK SELATAN	71020106001516
416	SMAN 6 SOLOK SELATAN	10303376 SMAN 6 SOLOK SELATAN	71020106001520
417	SMAN 7 SOLOK SELATAN	10307562 SMAN 7 SOLOK SELATAN	71020106001531
418	SMAN 9 SOLOK SELATAN	69786567 SMAN 9 SOLOK SELATAN	71020106001542
419	SMA NEGERI 10 SOLOK SELATAN	69946645 SMA NEGERI 10 SOLOK SELATAN	71020106001553
420	SMKN 1 SOLOK SELATAN	10306966 SMKN 1 SOLOK SELATAN	71020106001564
421	SMKN 2 SOLOK SELATAN	10306967 SMKN 2 SOLOK SELATAN	71020106001575
422	SMKN 3 SOLOK SELATAN	10306968 SMKN 3 SOLOK SELATAN	71020106001586

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
423	SMKN 4 SOLOK SELATAN	10306969 SMKN 4 SOLOK SELATAN	71020106001590
424	SMKN 5 SOLOK SELATAN	10308133 SMKN 5 SOLOK SELATAN	71020106001601
XII	**KAB. TANAH DATAR**		
425	SLB AUTISCARE	10310499 AUTISCARE SNEC YCEC	72030106000111
426	SLB WARAQIL JANNAH	69759043 SLB WARAQQIL JANNAH	72010106000351
427	SMAS EXCELLENT NURUL IKHLAS	10310900 SMAS EXCELLENT NURUL IKKHLAS	72010106000362
428	SLB AISYIYAH CABANG SIMABUR	69984506 SLB AISYIYAH CABANG SIMABUR	72030106000122
429	SLB KEMALA BHAYANGKARI	10308284 SLB KML BHYNGKR	72030106000031
430	SLB MUTIARA KASIH	10308855 SLB MUTIARA KASIH	72030106000133
431	SMAS AL HIRA	10310619 SMAS AL HIRA	72010106000373
432	SMAS MUHAMMADIYAH BATU SANGKAR	10302474 SMAS MHMMDYH BT SNGKR	72030106000144
433	SMAS NURUL IKHLAS	10307801 SMAS NURUL IKHLAS	72010106000384
434	SMKS MUHAMMADIYAH BATUSANGKAR	10302405 SMKS MUHAMMADIYAH BATUSANGKAR	72030106000155
435	SMKS PAGARUYUNG BATUSANGKAR	10307988 SMK PAGARUYUNG BATUSANGKAR	72030106000166
436	SMKS PROGRESIF BATUSANGKAR	10307802 SMKS PROGRESIF BATUSANGKAR	72030106000170
437	SLBN 1 LIMA KAUM	10310471 SLBN 1 LIMA KAUM	72030106000181
438	SLBN 1 PAGARUYUNG	10302503 SLBN 1 PAGARUYUNG	72030106000192
439	SMAN 1 BATIPUH	10302475 SMAN 1 BATIPUH	72010106000395
440	SMAN 1 BATU SANGKAR	10302476 SMAN 1 BATU SANGKAR	72030106000203
441	SMAN 1 LINTAU BUO	10302477 SMAN 1 LINTAU BUO	72030106000211
442	SMAN 1 PADANG GANTING	10302492 SMAN 1 PADANG GANTING	72030106000222
443	SMAN 1 PARIANGAN	10302436 SMAN 1 PARIANGAN	72030106000233
444	SMAN 1 RAMBATAN	10302382 SMAN 1 RAMBATAN	72030106000244
445	SMAN 1 SALIMPAUNG	10302397 SMAN 1 SALIMPAUNG	72030106000255
446	SMAN 1 SUNGAI TARAB	10302398 SMAN 1 SUNGAI TARAB	72030106000266
447	SMAN 1 SUNGAYANG	10302399 SMAN 1 SUNGAYANG	72030106000270
448	SMAN 1 X KOTO	10302400 SMAN 1 X KOTO	72010106000406
449	SMAN 2 BATU SANGKAR	10302401 SMAN 2 BATU SANGKAR	72030106000281
450	SMAN 2 LINTAU BUO	10302404 SMAN 2 LINTAU BUO	72030106000292
451	SMAN 2 RAMBATAN	10302402 SMAN 2 RAMBATAN	72010106000411
452	SMAN 2 SUNGAI TARAB	10302403 SMAN 2 SUNGAI TARAB	72030106000303

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
453	SMAN 3 BATU SANGKAR	10307799 SMAN 3 BATU SANGKAR	72030106000314
454	SMKN 1 BATIPUH	10302406 SMKN 1 BATIPUH	72010106000422
455	SMKN 1 BATUSANGKAR	10302407 SMKN 1 BATUSANGKAR	72030106000325
456	SMKN 1 LINTAU BUO	10302396 SMKN 1 LINTAU BUO	72030106000336
457	SMKN 1 TANJUNG BARU	10308142 SMKN 1 TANJUNG BARU	72030106000340
458	SMKN 2 BATUSANGKAR	10302395 SMKN 2 BATUSANGKAR	72030106000351
459	SLB AZ ZAHRA	70037590 SLB AZ ZAHRA	72030108000480
460	SLB KASIEH MANDE	70029575 SLB KASIEH MANDE	72030108000491
461	SMK MEDIATAMA BATUSANGKAR	70012466 SMK Mediatama Batusangkar	72030108000502
462	SLB PKLK RAMBATAN	70033654 SLB PKLK RAMBATAN	72030108000513
463	SMK NURUL IKHLAS	70028223SMKNURULIKHLAS	7201100600008-1
464	SMA IT QURRATA A`YUN	700033866 BOS SMA IT QURRATA AYUN	72030220156952
XIII	**KOTA BUKITTINGGI**		
465	SLB AUTISMA PERMATA BUNDA	10307566 SLB AUTISMA PERMATA BUNDA	72010106000433
466	SMAS KARYA BHAKTI BUKITTINGGI	10307980 SMAS KARYA BHAKTI BUKITTINGGI	72010106000444
467	SLB AL AZHAR	10307565 SLB AL AZHAR	72010106000455
468	SLB Al Ikhlas	10310638 SLB AL IKHLAS	72010106000466
469	SLB AUTISMA YPPA BUKITTINGGI	10307944 SLB AUTISMA YPPA BUKITTINGGI	72010106000470
470	SLB KARAKTER MANDIRI	10308272 SLB KARAKTER MANDIRI	72010106000481
471	SLB RESTU IBU	69888478 SLB RESTU IBU	72010106000492
472	SMA ISLAM AL ISHLAH	69978819 SMA ISLAM AL ISHLAH	72010106000503
473	SMAS PEMBANGUNAN	10307955 SMAS PEMBANGUNAN	72010106000514
474	SMAS PSM	10307530 SMAS PSM	72010106000525
475	SMAS TARUNA BANGSA	10307531 SMAS TARUNA BANGSA	72010106000536
476	SMAS XAVERIUS	10310797 SMAS XAVERIUS	72010106000540
477	SMK KESEHATAN PRIMA NUSANTARA	69974969 SMK KESEHATAN PRIMA N	72010106000551
478	SMKS ELEKTRONIKA INDONESIA BUKITTINGGI	10307538 SMKS ELEKTRONIKA INDONESIA BUKITTINGGI	72010106000562
479	SMKS FARMASI IMAM BONJOL	10310806 SMKS FARMASI IMAM BONJOL	72010106000573
480	SMKS GAJAH TONGGA BUKITTINGGI	10307539 SMKS GAJAH TONGGA BUKITTINGGI	72010106000584
481	SMKS PARAMITHA BUKITTINGGI	10307984 SMKS PARAMITHA BUKITTINGGI	72010106000595
482	SMKS PEMBANGUNAN BUKITTINGGI	10307985 SMKS PEMBANGUNAN BUKITTINGGI	72010106000606

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
483	SMKS PEMBINA BANGSA BUKITTINGGI	10307542 SMKS PEMBINA BANGSA BUKITTINGGI	72010106000610
484	SMKS TEKNOLOGI MUHAMMADIYAH	10307983 SMKS TEKNOLOGI MUHAMMADIYAH	72010106000621
485	SMKS TERPADU GEMA NUSANTARA BUKITTINGGI	10307543 SMKS TERPADU GEMA NUSANTARA BUKITTINGGI	72010106000632
486	SLBN 1 BUKITTINGGI	10303425 SLB N 1 BUKITTINGGI	72010106000643
487	SMAN 4 BUKIT TINGGI	10307526 SMAN 4 BUKITTINGGI	72010106000654
488	SMAN 1 BUKITTINGGI	10307523 SMAN 1 BUKITTINGGI	72010106000665
489	SMAN 2 BUKITTINGGI	10307524 SMAN 2 BUKITTINGGI	72010106000676
490	SMAN 3 BUKITTINGGI	10307525 SMAN 3 BUKITTINGGI	72010106000680
491	SMAN 5 BUKITTINGGI	10307527 SMAN 5 BUKITTINGGI	72010106000691
492	SMKN 1 BUKITTINGGI	10307532 SMKN 1 BUKITTINGGI	72010106000702
493	SMKN 2 BUKITTINGGI	10307533 SMKN 2 BUKITTINGGI	72010106000713
XIV	**KOTA PADANG**		
494	SLB AL HIDAYAH	10303569 SLB AL HIDAYAH	71000106102345
495	SLB AL - ISHLAAH PADANG	10303570 SLB AL ISHLAAH PADANG	71000106102356
496	SLB BINA BANGSA TN.SIRAH	10303575 SLB BINA BANGSA TN SIRAH	71000106102360
497	SLB MGF LUBUK BUAYA PADANG	10303568 SLB MGF LUBUK BUAYA	71000106102371
498	SLBS LUMIN ALISA	69764537 SLB LUMIN ALISA	71000106102382
499	SLBS PK-PLK TIJI	69762802 PK PLK TIJI	71000108001056
500	SMAS BUNDA PADANG	10303545 SMA BUNDA PADANG	71000106102393
501	SMAS DIAN ANDALAS	10304831 SMA DIAN ANDALAS	71000106102404
502	SMAS DM TRIGUNA	10304832 SMAS DM TRIGUNA	71000106102415
503	SMKS CITRA UTAMA PADANG	10304836 SMKS CTR TM PDNG	71000106102426
504	SMKS KARTIKA I 1 PADANG	10304842 SMKS KRTK 1 PDNG	71000106102430
505	SMKS KARTIKA I 2 PADANG	10304843 SMKS KRTK 2 PDNG	71000106102441
506	SMKS PELAYARAN PADANG	10304855 SMK PELAYARAN PADANG	71000106102452
507	SLB AL MUJADILLAH	10304760 SLB AL MUJADILLAH	71000106102463
508	SLB AMANAH KOTO TANGAH	10303977 SLB AMANAH KOTO TANGAH	71000106102474
509	SLB ASLAM KIDS	70012532 SLB ASLAM KIDS	71000106102485
510	SLB AUTIS BIMA PADANG	10303547 SLB AUTIS BIMA PADANG	71000106102496
511	SLB AUTIS BUAH HATI IBU	10308850 SLB AUTIS BUAH HATI IBU	71000106102500
512	SLB AUTIS HARAPAN BUNDA	10304762 SLB AUTIS HARAPAN BUNDA	71000106102511

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
513	SLB AUTISMA MUTIARA BANGSA	69734440 SLB AUTISMA MUTIARA BANGSA	71000106102522
514	SLB AUTISMA MUTIARA BANGSA PRATAMA	69902665 SLB AUTISMA MUTIARA BANGSA PRATAMA	71000106102533
515	SLB AUTISMA YPPA	10307638 SLB AUTISMA YPPA	71000106102544
516	SLB AUTIS YAYASAN MITRA ANANDA	10310324 SLB AUTIS YAYASAN MITRA ANANDA	71000106102555
517	SLB BAKTI	10307639 SLB BAKTI	71000106102566
518	SLB BUNDO KANDUANG	69734154 SLB BUNDO KANDUANG	71000106102570
519	SLB ETNIK KREATIF	70007006 SLB ETNIK KREATIF	71000106102581
520	SLB FAN REDHA	10303573 SLB FAN REDHA	71000106102592
521	SLB GEMA INSANI	10304767 SLB GEMA INSANI	71000106102603
522	SLB HIKMAH MIFTAHUL JANNAH	69734441 SLB HIKMAH MIFTAHUL JANNAH	71000106102614
523	SLB HIKMAH REFORMASI	10303562 SLB HIKMAH REFORMASI	71000106102625
524	SLB KARYA PADANG	10303561 SLB KARYA PADANG	71000106102636
525	SLB KASIH UMMI	10308281 SLB KASIH UMMI	71000106102640
526	SLB KHANSA	69960216 SLB KHANSA	71000106102651
527	SLB LIMAS PADANG	10304754 SLB LIMAS PADANG	71000106102662
528	SLB MUHAMMADIYAH NANGGALO	10307646 SLB MUHAMMADIYAH NANGGALO	71000106102673
529	SLB MUHAMMADIYAH PAUH IX PADANG	10303546 SLB MUHAMMADIYAH PAUH IX PADANG	71000106102684
530	SLB PERWARI	10303550 SLB PERWARI	71000106102695
531	SLB SALSABILLA INDAH	69764538 SLB SALSABILLA INDAH	71000106102706
532	SLB SAMUDERA BIRU	69734442 SLB SAMUDERA BIRU	71000106102710
533	SLB TIMAR JAYA LUBUK KILANGAN PADANG	10303560 SLB TIMAR JAYA LUBUK KILANGAN PADANG	71000106102721
534	SLB WACANA ASIH	10304776 SLB WACANA ASIH	71000106102732
535	SLB WORK SHOP	10303553 SLB WORK SHOP	71000106102743
536	SLB YPAC SUMATERA BARAT	10303554 SLB YPAC SUMATERA BARAT	71000106102754
537	SLB YPPLB	10303556 SLB YPPLB	71000106102765
538	SMA DAR EL IMAN ISLAMIC BOARDING SCHOOL	69984419 SMA DAR EL IMAN ISLAM	71000106102776
539	SMA DEK	69883646 SMA DEK	71000106102780
540	SMA PEMBANGUNAN LABORATORIUM UNP	10303465 SMA PEMBANGUNAN LABORATORIUM UNP	71000106102791
541	SMA PUTI BUNGSU	69989801SMA PUTI BUNGSU	71000106102802
542	SMAS ABDULLAH AHMAD	10303468 SMAS ABDULLAH AHMAD	71000106009571
543	SMAS ADABIAH 2 PADANG	10310898 SMAS ADABIAH 2 PADANG	71000106102813

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
544	SMAS ADABIAH PADANG	10303557 SMAS ADABIAH PADANG	71000106102824
545	SMAS BAITURRAHMAH	10303558 SMAS BAITURRAHMAH	71000106102835
546	SMAS BUKIT BARISAN	10303559 SMAS BUKIT BARISAN	71000106102846
547	SMAS DON BOSCO	10303467 SMAS DON BOSCO	71000106102850
548	SMAS EKA SAKTI	10303469 SMAS EKA SAKTI	71000106102861
549	SMAS HUDAYA	69754608 SMA HUDAYA PADANG	71000106102872
550	SMAS ISLAM LIGA DAKWAH SUMATERA BARAT	10303471 SMAS ISLAM LIGA DAKWAH SUMATERA BARAT	71000106102883
551	SMAS KALAM KUDUS	10303474 SMAS KALAM KUDUS	71000106102894
552	SMAS KARTIKA I-5	10303472 SMAS KARTIKA 1 5	71000106102905
553	SMAS KATHOLIK XAVERIUS	10303473 SMAS KATHOLIK XAVERIUS	71000106102916
554	SMAS MEDIA UTAMA	10303475 SMAS MEDIA UTAMA	71000106102920
555	SMAS MUHAMMADIYAH 1	10303476 SMAS MUHAMMADIYAH 1	71000106102931
556	SMAS MUHAMMADIYAH 2	10303477 SMAS MUHAMMADIYAH 2 PADANG	71000106102942
557	SMAS MUHAMMADIYAH 3	10303478 SMAS MUHAMMADIYAH 3	71000106102953
558	SMAS MURNI	10303479 SMAS MURNI	71000106102964
559	SMAS PERTI PPMTI PADANG	10303464 SMAS PERTI PPMTI PADANG	71000106102975
560	SMAS PERTIWI 1	10303445 SMAS PERTIWI I	71000106102986
561	SMAS PERTIWI 2	10303443 SMAS PERTIWI 2 PADANG	71000106102990
562	SMAS PGRI 2	10303441 SMAS PGRI 2	71000106103001
563	SMAS PGRI 3	10303440 SMAS PGRI 3	71000106103012
564	SMAS PGRI 4	10303439 SMAS PGRI 4	71000106103023
565	SMAS PGRI 6	10303446 SMAS PGRI 6	71000106103034
566	SMAS PMT PROF DR HAMKA	10305595 SMAS PMT PROF DR HAMKA	71000106103045
567	SMAS SABBIHISMA	10304180 SMAS SABBIHISMA	71000106103056
568	SMAS SEMEN PADANG	10303447 SMAS SEMEN PADANG	71000106103060
569	SMAS SIMA	10303448 SMAS SIMA	71000106103071
570	SMAS TAMAN SISWA PADANG UTARA	10303449 SMA TAMAN SISWA PADANG UTARA	71000106103082
571	SMA SURYA BAKTI	69899566 SMA SURYA BAKTI	71000106103093
572	SMAS YAPI	10303460 SMAS YAPI	71000106103104
573	SMA YULIN PRATAMA	69970543 SMA YULIN PRATAMA	71000106103115
574	SMK AN NUR	69882393 SMK AN NUR	71000106103126

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
575	SMK IT PARIWISATA BAITURRAHMAH	69981292 SMK IT PARIWISATA BAITURRAHMAH	71000106103130
576	SMK KESEHATAN	69900200 SMK KESEHATAN DHARMABAKTI NUSANTARA	71000106103141
577	SMK KESEHATAN GEMA NUSANTARA SUMATERA BARAT	69993155 SMK KESEHATAN GEMA NUSANTARA SUMBAR	71000106103152
578	SMK PARIWISATA AISYIYAH SUMATERA BARAT	69971059 SMK PARIWISATA AISYIYAH SUMBAR	71000106103163
579	SMKS ADZKIA PADANG	10304181 SMKS ADZKIA PADANG	71000106103174
580	SMKS DEK BUSINESS SCHOOL	10304837 SMKS DEK BUSINESS SCHOOL	71000106103185
581	SMKS DHUAFA PADANG	10304838 SMKS DHUAFA PADANG	71000106103196
582	SMKS LABOR PADANG	10304183 SMKS LABOR PADANG	71000106009652
583	SMKS MEDIA UTAMA PADANG	10304184 SMKS MEDIA UTAMA PADANG	71000106103200
584	SMKS MUHAMMADIYAH 1 PADANG	10304845 SMKS MUHAMMADIYAH 1 PADANG	71000106103211
585	SMKS NASIONAL PADANG	10304846 SMKS NASIONAL PADANG	71000106103222
586	SMKS NUSATAMA PADANG	10304854 SMKS NUSATAMA PADANG	71000106103233
587	SMKS PENERBANGAN ANGKASA NASIONAL	10304856 SMKS PENERBANGAN ANGKASA NASIONAL	71000106103244
588	SMKS PERBANKAN PADANG	10304857 SMKS PERBANKAN PADANG	71000106103255
589	SMKS PRATAMA PADANG	10304840 SMKS PRATAMA PADANG	71000106103266
590	SMKS PROFESIONAL PADANG	10308769 SMKS PROFESIONAL PADANG	71000106103270
591	SMKS SEMEN PADANG	10304860 SMKS SEMEN PADANG	71000106103281
592	SMKS TAMAN SISWA PADANG	10304185 SMKS TAMAN SISWA PADANG	71000106103292
593	SMKS TARUNA 1 PADANG	10304862 SMKS TARUNA 1 PADANG	71000106103303
594	SMKS TARUNA 2 PADANG	10304186 SMKS TARUNA 2 PADANG	71000106103314
595	SMKS TD KOSGORO 1 PADANG	10304182 SMKS TD KOSGORO 1 PADANG	71000106103325
596	SMKS TD KOSGORO 2 PADANG	10304834 SMKS TD KSGR 2 PDNG	71000106103336
597	SMKS TEKNOLOGI PLUS PADANG	10304187 SMK TEKNOLOGI PLUS PADANG	71000106103340
598	SMKS TRI ABDI PEMBANGUNAN PADANG	10304864 SMKS TRI ABDI PEMBANGUNAN PADANG	71000106103351
599	SLBN 1 PADANG	10307647 SLBN 1 PADANG	71000106103362
600	SLBN 2 PADANG	10303548 SLBN 2 PADANG	71000106103373
601	SMAN 10 PADANG	10303462 SMAN 10 PADANG	71000106103384
602	SMAN 11 PADANG	10303463 SMAN 11 PADANG	71000106103395
603	SMAN 12 PADANG	10303480 SMAN 12 PADANG	71000106103406
604	SMAN 13 PADANG	10303481 SMAN 13 PADANG	71000106103410
605	SMAN 14 PADANG	10303482 SMAN 14 PADANG	71000106103421

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
606	SMAN 15 PADANG	10304833 SMAN 15 PADANG	71000106103432
607	SMAN 16 PADANG	10308323 SMAN 16 PADANG	71000106103443
608	SMAN 1 PADANG	10303461 SMAN 1 PADANG	71000106103454
609	SMAN 2 PADANG	10303499 SMAN 2 PADANG	71000106103465
610	SMAN 3 PADANG	10303500 SMAN 3 PADANG	71000106103476
611	SMAN 4 PADANG	10303501SMAN 4 PADANG	71000106103480
612	SMAN 5 PADANG	10303502 SMAN 5 PADANG	71000106103491
613	SMAN 6 PADANG	10303503 SMA 6 PADANG	71000106103502
614	SMAN 7 PADANG	10303504 SMAN 7 PADANG	71000106103513
615	SMAN 8 PADANG	10303505 SMAN 8 PADANG	71000106103524
616	SMAN 9 PADANG	10303506 SMAN 9 PADANG	71000106103535
617	SMA NEGERI 4 SUMATERA BARAT (KEBERBAKATAN OLAHRAGA)	69948163 SMA NEGERI 4 SUMATERA BARAT (KEBERBAKATAN OLAHRAGA)	71000106103546
618	SMKN 10 PADANG	10307617 SMKN 10 PADANG	71000106103550
619	SMKN 1 PADANG	10304847 SMKN 1 PADANG	71000106103561
620	SMKN 1 SUMATERA BARAT	10310780 SMKN 1 SUMATERA BARAT	71000106103572
621	SMKN 2 PADANG	10304848 SMKN 2 PADANG	71000106103583
622	SMKN 3 PADANG	10304849 SMKN 3 PADANG	71000106103594
623	SMKN 4 PADANG	10304850 SMKN 4 PADANG	71000106103605
624	SMKN 5 PADANG	10304851 SMKN 5 PADANG	71000106103616
625	SMKN 6 PADANG	10303507 SMKN 6 PADANG	71000106103620
626	SMKN 7 PADANG	10304188 SMKN 7 PADANG	71000106103631
627	SMKN 8 PADANG	10304852 SMKN 8 PADANG	71000106103642
628	SMKN 9 PADANG	10304853 SMKN 9 PADANG	71000106103653
629	SMK PP NEGERI PADANG	69734159 SMK PP NEGERI PADANG	71000106103664
630	SMK SMAK PADANG	10307616 SMK SMAK PADANG	71000106103675
631	SMK SMTI PADANG	10308148 SMK SMTI PADANG	71000106103686
632	SMA IT SEKOLAH ALAM AR ROYYAN	70026318 SMA IT SEKOLAH ALAM AR ROYYAN	71000106000821
633	SMK PEMBANGUNAN TEKNOLOGI ROBOTIK UNP	70031755 SMK PEMBANGUNAN UNP	71000106000762
634	SMAS PGRI 1	10303442 SMAS PGRI 1 PADANG	71000101000124
XV	**KOTA PADANG PANJANG**		
635	SMAS USWATUN HASANAH	10303612 SMA USWATUN HASANAH	72010106000724

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
636	SMKS CENDANA PADANGPANJANG	10303609 SMKS CENDANA PADANG PANJANG	72010106000735
637	SLB ASIH PUTRA	60728567 SLB ASIH PUTRA	72010106000746
638	SLB AUTIS BIMA	10310734 SLB AUTIS BIMA	72010106000750
639	SLB CAHYA KEMALA	69788571 SLB CAHYA KEMALA	72010106000761
640	SLB INSAN MANDIRI	10310880 SLB INSAN MANDIRI	72010106000772
641	SLB MUTIARA BUNDA	10310736 SLB MUTIARA BUNDA	72010106000783
642	SMAS MUHAMMADIYAH P PANJANG	10303615 SMAS MUHAMMADIYAH P PANJANG	72010106000794
643	SMKS KARYA PADANG PANJANG	10303608 SMKS KARYA PADANG PANJANG	72010106000805
644	SMAN 1 PADANG PANJANG	10303611 SMAN 1 PADANG PANJANG	72010106001491
645	SLBN 1 PADANG PANJANG	10303644 SLBN 1 PADANG PANJANG	72010106001502
646	SMAN 1 SUMATERA BARAT	10310903 SMAN 1 SUMATERA BARAT	72010106001513
647	SMAN 2 PADANG PANJANG	10303610 SMAN 2 PADANG PANJANG	72010106001524
648	SMAN 3 PADANG PANJANG	10304698 SMAN 3 PADANG PANJANG	72010106001535
649	SMKN 1 PADANG PANJANG	10303607 SMKN 1 PADANG PANJANG	72010106001546
650	SMKN 2 PADANG PANJANG	10303606 SMKN 2 PADANG PANJANG	72010106001550
XVI	**KOTA PARIAMAN**		
651	SMAS MANUNGGAL BHAKTI	10307418 SMAS MANUNGGAL BAKTI	71000106103690
652	SMKS PLUS BNM PARIAMAN	10307438 SMK PLUS BNM PARIAMAN	71040103000134
653	SLB AUTIS BIMA PARIAMAN	10310879 SLB AUTIS BIMA PARIAMAN	71000106103701
654	SLB SABILUNA	10307435 SLB SABILUNA	71000106103712
655	SMA TAHFIDZUL QURAN ISLAM TERPADU SAHABAT CENDIKIA	69991334 SMA TAHFIDZUL QURAN ISLAM TERPADU SAHABAT CENDIKIA	71000106103723
656	SMKS Global Pariaman	69899616 SMKS GLOBAL PARIAMAN	71000106103734
657	SMKS KARYA PARIAMAN	10307436 SMKS KARYA PARIAMAN	71000106103745
658	SLBN 1 PARIAMAN	10310695 SLBN 1 PARIAMAN	71000106103756
659	SLBN 2 PARIAMAN	10307423 SLBN 2 PARIAMAN	71000106103760
660	SMAN 1 PARIAMAN	10307309 SMAN 1 PARIAMAN	71000106103771
661	SMAN 2 PARIAMAN	10307310 SMAN 2 PARIAMAN	71000106103782
662	SMAN 3 PARIAMAN	10307311 SMAN 3 PARIAMAN	71000106103793
663	SMAN 4 PARIAMAN	10307312 SMAN 4 PARIAMAN	71000106103801
664	SMAN 5 PARIAMAN	10308546 SMAN 5 PARIAMAN	71000106103812
665	SMAN 6 PARIAMAN	10311405 SMAN 6 PARIAMAN	71000106103823

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
666	SMKN 1 PARIAMAN	10307420 SMKN 1 PARIAMAN	71000106103834
667	SMKN 2 PARIAMAN	10307421 SMKN 2 PARIAMAN	71000106103845
668	SMKN 3 PARIAMAN	10307439 SMKN 3 PARIAMAN	71000106103856
669	SMKN 4 PARIAMAN	10308547 SMKN 4 PARIAMAN	71000106103860
XVII	**KOTA PAYAKUMBUH**		
670	SLB AUTISMA PERMATA BUNDA	10308194 SLB AUTISMA PERMATA BUNDA	72000106000512
671	SMA IT AL-FATH	69959262 SMA IT AL FATH	72000106000523
672	SMA IT INSAN CENDEKIA	69831956 SMA IT INSAN CENDIKIA	72000106000534
673	SMKS TAMAN SISWA PAYAKUMBUH	10303902 SMK TAMANSISWA PAYAKUMBUH	72000106000545
674	SLB A PAYAKUMBUH	69867923 SLB A PAYAKUMBUH	72000106000556
675	SLB AUTIS JALINAN HATI	10310746 SLB AUTIS JALINAN HATI	72000106000560
676	SLB B Payakumbuh	10303867 SLB B PAYAKUMBUH	72000106000571
677	SLB C PAYAKUMBUH	10303868 SLB C PAYAKUMBUH	72000106000582
678	SLB Insan Mulia	69895380 SLB INSAN MULIA	72000106000593
679	SLB LUAK NAN BUNGSU	10303865 SLB LUAK NAN BUNGSU	72000106000604
680	SLB PEDULI ANAK BANGSA	60724953 SLB PEDULI ANAK BANGSA	72000106000615
681	SLB Serasi	69893226 SLB SERASI	72000106000626
682	SMAS ISLAM BOARDING SCHOOL R JANNAH	10308340 SMAS ISLAM BOARDING SCHOOL R JANNAH	72000106000630
683	SMAS MUCHTAR ISLAMIC	60724954 SMAS MUCHTAR ISLAMIC	72000106000641
684	SMAS NUSANTARA PAYAKUMBUH	10303885 SMAS NUSANTARA PAYAKUMBUH	72000106000652
685	SMAS PGRI PAYAKUMBUH	10303886 SMAS PGRI PAYAKUMBUH	72000106000663
686	SMKS 1 KOSGORO PAYAKUMBUH	10303908 SMKS 1 KOSGORO PAYAKUMBUH	72000106000674
687	SMKS 2 KOSGORO PAYAKUMBUH	10303909 SMKS 2 KOSGORO PAYAKUMBUH	72000106000685
688	SMKS MITRA PAYAKUMBUH	10303911 SMKS MITRA PAYAKUMBUH	72000106000696
689	SMKS WIRA BHAKTI PAYAKUMBUH	10303901 SMKS WIRA BHAKTI PAYAKUMBUH	72000106000700
690	SLBN 1 PAYAKUMBUH	10307795 SLBN 1 PAYAKUMBUH	72000106000711
691	SMAN 1 PAYAKUMBUH	10303904 SMAN 1 PAYAKUMBUH	72000106000722
692	SMAN 2 PAYAKUMBUH	10303905 SMAN 2 PAYAKUMBUH	72000106000733
693	SMAN 3 PAYAKUMBUH	10303906 SMAN 3 PAYAKUMBUH	72000106000744
694	SMAN 4 PAYAKUMBUH	10310597 SMAN 4 PAYAKUMBUH	72000106000755
695	SMAN 5 PAYAKUMBUH	60724950 SMAN 5 PAYAKUMBUH	72000106000766

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
696	SMKN 1 PAYAKUMBUH	10303912 SMKN 1 PAYAKUMBUH	72000106000770
697	SMKN 2 PAYAKUMBUH	10303913 SMKN 2 PAYAKUMBUH	72000106000781
698	SMKN 3 PAYAKUMBUH	10303914 SMKN 3 PAYAKUMBUH	72000106000792
699	SMKN 4 PAYAKUMBUH	69947085 SMKN 4 PAYAKUMBUH	72000106000803
700	SLB JENDELA HATI INSANI PAYAKUMBUH	70041896 SLB JHI PAYAKUMBUH	72000108000155
XVIII	**KOTA SAWAHLUNTO**		
701	SLB AL KAUSAR	69971258 SLB ALKAUSAR	71020106001122
702	SMKS MUHAMMADIYAH SAWAHLUNTO	10303683 SMKS MUHAMMADIYAH	71020106001133
703	SLB RUMAH TIA	69963607 SLB RUMAH TIA	71020106001144
704	SLB TUNAS HARAPAN	10305590 SLB TUNAS HARAPAN	71020106001155
705	SLB YKB TALAWI	10310572 SLB YKB TALAWI	71020106001166
706	SMAS SDI SILUNGKANG	10303690 SMAS SDI SILUNGKANG	71020106001170
707	SLBN 1 SAWAHLUNTO	10303703 SLBN 1 SAWAHLUNTO	71020106001181
708	SLBN 2 SAWAHLUNTO	10308152 SLBN 2 SAWAHLUNTO	71020106001192
709	SMAN 1 SAWAHLUNTO	10303691 SMAN 1 SAWAHLUNTO	71020106001203
710	SMAN 2 SAWAHLUNTO	10303692 SMAN 2 SAWAHLUNTO	71020106001214
711	SMAN 3 SAWAHLUNTO	69815459 SMAN 3 SAWAHLUNTO	71020106001225
712	SMKN 1 SAWAHLUNTO	10303684 SMKN 1 SAWAHLUNTO	71020106001236
713	SMKN 2 SAWAHLUNTO	10303674 SMKN 2 SAWAHLUNTO	71020106001240
XIX	**KOTA SOLOK**		
714	SMA ISLAM AL MUMTAZ	69876148 SMA ISLAM ALMUMTAZ	71020106001251
715	SLB AUTIS BIMA	10310703 SLB AUTIS BIMA	71020106001262
716	SLB AUTISME YPPA SOLOK	10307810 SLB AUTISME YPPA SOLOK	71020106001273
717	SLBS LENTERA BUNDA	69759149 SLBS LENTERA BUNDA	71020106001284
718	SMAS MUHAMMADIYAH SOLOK	10303794 SMAS MUHAMMADIYAH SOLOK	71020106001295
719	SMK KESEHATAN RAHMATUL AISY	70007715 SMK KESEHATAN RAHMATUL AISY	71020106001306
720	SMKS KOSGORO 1 SOLOK	10303767 SMKS KOSGORO 1 SOLOK	71020106001310
721	SMKS MUHAMMADIYAH SOLOK	10303772 SMKS MUHAMMADIYAH SOLOK	71020106001321
722	SLBN 1 SOLOK	10303751 SLBN 1 SOLOK	71020106001332
723	SMAN 1 SOLOK	10303781 SMAN 1 SOLOK	71020106001343
724	SMAN 2 SOLOK	10303780 SMAN 2 SOLOK	71020106001354

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
725	SMAN 3 SOLOK	10303779 SMAN 3 SOLOK	71020106001365
726	SMAN 4 SOLOK	10303766 SMAN 4 SOLOK	71020106001376
727	SMKN 1 SOLOK	10303768 SMKN 1 SOLOK	71020106001380
728	SMKN 2 SOLOK	10303770 SMKN 2 SOLOK	71020106001391
729	SMKN 3 KOTA SOLOK	10310768 SMKN 3 KOTA SOLOK	71020106001402
730	SMA PLUS GOLDEN MADANI	70011942 SMA PLUS GOLDEN MADANI	71020106000045

8) **Tindak Lanjut Permasalahan Rumah Dinas**

a. Permasalahan Rumah Dinas Disnakertrans

Rumah dinas Disnakertrans yang beralamat di Jl. Bawal No. 2B Ulak Karang Padang yang dihuni pensiunan an. Ir. Bujang Bisman dan di Jl. Mandala No. 58 Tunggul Hitam Padang yang dihuni pensiunan an. M. Muslim telah diberikan surat peringatan dan ultimatum terakhir keempat kali sesuai Surat Kepala Dinas Disnakertrans Nomor : 800/1412/Set/2020 tanggal 7 Oktober 2020 dan Nomor : 800/1413/Set/2020 tanggal 7 Oktober 2020 terhadap kedua pensiunan tersebut, jika tetap tidak mengindahkan akan dilakukan pengosongan paksa.

Untuk Tahun 2022, kedua rumah dinas tersebut sudah dikembalikan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

b. Permasalahan Rumah Dinas Pertanian

Sehubungan dengan terdapatnya 39 (Tiga Puluh Sembilan) unit rumah dinas milik Dinas Pertanian di Lanbouw Kota Bukittinggi dihuni oleh yang tidak berhak dan penghuninya bermohon untuk dapat melaksanakan proses sewa beli, dapat disampaikan sebagai berikut:

1) Terkait proses Administrasi awal sewa beli untuk sewa beli rumah dinas tersebut memang telah terlaksana, namun demikian proses tersebut tidak ditindaklanjuti dengan sewa beli kepada pegawai sesuai ketentuan berlaku karena belum diajukan permohonan penjualan ke Menteri Keuangan (selaku Pengelola Barang Milik Negara), dan usulan sewa beli tersebut belum ada persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan, oleh karena itu persetujuan yang dimaksudkan dalam surat permohonan tersebut belum sah.
2) Tanah aset eks Departemen Pertanian yang berlokasi di komplek Pertanian Bukittinggi, diserahkan kepada Provinsi Sumatera Barat sejak berlakunya otonomi daerah, mekanisme pengelolaan aset telah diserahkan dari Kementerian kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan telah tercatat sebagai Barang Milik Daerah, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Atas pertimbangan sangat terbatasnya asset pemerintah terutama tanah, dan tingginya kebutuhan terhadap lahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga permohonan untuk pembelian rumah dinas dimaksud tidak dapat dipenuhi.
4) Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Pasal 9 ayat 2 (dua) menyebutkan Rumah Dinas sebagai aset barang milik daerah dapat dipergunakan oleh PNS Daerah (aktif) untuk mendukung tugas dan fungsinya dalam membantu penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Terkait hal tersebut penghunian rumah dinas yang ditempati oleh ke 39 (tiga puluh Sembilan) penghuni saat ini adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Untuk permasalahan diatas akan dikoordinasikan kembali dan ditindaklanjuti sesuai aturan berlaku.

c. Permasalahan Rumah Dinas Linggarjati No. 1 A Tabing Padang

1) Pada Dinas Koperasi UMKM terdapat satu unit rumah dinas yang masih dihuni oleh Pensiunan ASN atas nama Drs. Tasril Tasar yang berlokasi di Jl. Linggarjati No. 1 A Tabing Padang. Sehubungan surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sumatera Barat tanggal 5 November 2017 terkait Pengosongan Rumah Dinas di Linggarjati no 1 A Tabing Padang oleh Drs. Tasril Tasar, dapat disampaikan sebagai berikut:
   a) Drs. Tasril Tasar telah menghuni rumah dinas milik Dinas Koperasi UMKM yang beralamat di Jl. Linggarjati No. 1 A Tabing Padang sejak tahun 2000, sesuai instruksi Kanwil Departemen Koperasi dan PKM Sumatera Barat pada saat itu. Pihak bersangkutan telah pensiun sejak tahun 2015 namun keberatan untuk menyerahkan rumah dinas tersebut dikarenakan adanya perjanjian terdahulu bahwa jika yang bersangkutan karena kedinasan harus keluar dari rumah tersebut, pemerintah akan membantu biaya pengosongan serta mengganti semua biaya perawatan yang dikeluarkan selama menghuni rumah dinas tersebut.
   b) Pemprov Sumatera Barat melalui Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Biro AP2BMD telah menyurati Drs. Tasril Tasar beberapa kali terkait perintah pengosongan rumah dinas sebagai berikut :
      (1) Surat nomor: 030/833/Sekrt-Diskop/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016
      (2) Surat nomor: 216/097/IX/BAP2BMD-2017 tanggal September 2017
      (3) Surat nomor: 030/678-Sekrt-Diskop/XI/2017 tanggal 1 November 2017
      (4) Surat nomor : 030/507/BAP2BMD-I/VI-2019 tanggal 26 Juli 2019
      (5) Keempat surat diatas dibalas oleh yang bersangkutan dengan persyaratan yang sama, yaitu penggantian biaya pemeliharaan rumah dinas yang telah dikeluarkan selam 14 tahun beliau menempati rumah dinas tersebut.
   c) Terkait permasalahan rumah dinas Linggarjati yang di tempati Drs. Tasril Tasar telah dilaksanakan rapat tanggal 20 November 2017 sesuai Surat Sekretaris daerah nomor 030/832/Sekt-Diskop/XI/2017 tanggal 17 November 2017 bertempat di ruang rapat Asisten Administrasi Umum. Rapat dipimpin Drs. H. Nasir Ahmad, M.Si, yang dihadiri Kepala Dinas Koperasi UMKM, Inspektorat, Biro Hukum, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Bakeuda, Biro AP2BMD dan Satpol PP Provinsi Sumatera Barat. Pada rapat ini disepakati sebagai berikut:

(1) Dinas Koperasi melakukan pengamanan terhadap rumah dinas pada SKPD tersebut membuat surat kepada penghuni rumah dinas untuk pengosongan rumah dinas yang dihuni pihak yang tidak berhak rumah dinas hanya bisa ditempati oleh ASN aktif pada SKPD pengguna sebagai penunjang tupoksi.

(2) Penggantian atas biaya perbaikan rumah selama Drs. Tasril Tasar menempati rumah dinas tidak dapat dilakukan karena tidak ada regulasi yang memungkinkan untuk dilakukan penggantian, dan sudah menjadi kewajiban penghuni untuk melakukan pemeliharaan rumah sesuai dengan perjanjian yang ada pada lampiran SIP yang diterbitkan.

(3) Biro AP2BMD melakukan pengurusan penerbitan SIP tahun 2019 (Surat Izin Penghunian) untuk rumah dinas Linggarjati diterbitkan atas nama Ir. Prita Wardani DH, MTP, sekretaris Dinas Koperasi UMKM pada saat itu.

d) Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Pasal 9 ayat 2 (dua) menyebutkan Rumah Dinas sebagai aset barang milik daerah dapat digunakan oleh PNS Daerah untuk mendukung tugas dan fungsinya dalam membantu penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kemudian pada pasal 11 ayat 2 (dua) menyebutkan penyerahan penghunian Rumah Dinas setelah calon penghuni Rumah Dinas memperoleh Surat Izin Penghunian yang diterbitkan oleh Pengelola Barang. Penghuni Rumah Dinas harus memenuhi persyaratan penghunian berdasarkan jenis golongan rumah dinas dan memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) serta memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi.

B. UMUM

DASAR HUKUM

Secara administrasi Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Selanjutnya pada tahun 2022 Undang-Undang tersebut telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.

DOMISILI

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51 Kota Padang.

VISI

Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2021-2026, mempunyai visi, yaitu :

*"**T**erwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan"*

MISI

Berdasarkan VISI tersebut diatas, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 7 MISI, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adaiak Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

LETAK DAN LUAS WILAYAH

Wilayah Provinsi Sumatera Barat terletak antara 0^0 54' Lintang Utara (LU) sampai dengan 3^0 30' Lintang Selatan (LS) dan antara 98^0 36' sampai 101^0 53' Bujur Timur (BT).

Provinsi Sumatera Barat, secara administratif berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara
- Sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu
- Sebelah Barat dengan Samudera Hindia
- Sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi

Provinsi Sumatera Barat mempunyai luas wilayah daratan $\pm$ 42.297,30 Km^2 dan luas lautan seluas $\pm$ 52.882,42 Km^2 dengan panjang pantai wilayah daratan $\pm$ 375 Km dan ditambah dengan panjang garis pantai Kepulauan Mentawai $\pm$ 1.003 Km, sehingga total garis pantai keseluruhannnya $\pm$ 1.378 Km. Perairan laut mempunyai 185 pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Data dari BPS Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota, dengan jumlah penduduk untuk tahun 2024 ini sebanyak 5.836.200 jiwa (sumbar dalam angka)

Dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas yaitu $\pm$ 6,01 ribu Km^2, sedangkan Kota Padang Panjang memiliki luas daerah yang terkecil yaitu $\pm$ 23 $Km^{2.}$

Tabel 6.3 Nama Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota
1.	Kabupaten Padang Pariaman
2.	Kabupaten Pesisir Selatan
3.	Kabupaten Agam
4.	Kabupaten Pasaman
5.	Kabupaten Solok
6.	Kabupaten Limapuluh Kota

No	Kabupaten/Kota
7.	Kabupaten Tanah Datar
8.	Kabupaten Sijunjung
9.	Kabupaten Dhamasraya
10	Kabupaten Solok Selatan
11.	Kabupaten Pasaman Barat
12.	Kabupaten Kepulauan Mentawai
13.	Kota Padang
14.	Kota Bukittinggi
15.	Kota Padang Panjang
16.	Kota Payakumbuh
17.	Kota Sawahlunto
18.	Kota Solok
19.	Kota Pariaman

TOPOGRAFI

Ketinggian permukaan wilayah di Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi mulai dari dataran rendah di pantai dengan ketinggian 0 m dpl hingga dataran tinggi (pergunungan) dengan ketinggian >3.000 m dpl. Luas areal yang mempunyai ketinggian 0 sampai 100 m dpl meliputi 1.286.793 ha (30,41%), daerah dengan ketinggian 100 sampai 500 m dpl mencapai 643.552 ha (15,21%) , antara 500 sampai 1.000 m dpl seluas 1.357.045 ha (32,07%), antara 1.000 sampai 1.500 m dpl terdapat seluas 767.117 ha (18,13%), daerah dengan ketinggian 1.500-2.000 m dpl seluas 113.116,6 ha (2,26%) dan sisanya daerah dengan ketinggian diatas 2.500 m dpl.

Untuk dataran rendah (<500m dpl) tercatat 45 %, dataran menengah (500-1.000m dpl) sebesar 32% dan sisanya 23% berupa dataran tinggi. Dataran tinggi berupa jajaran bukit dan gunung adalah rantai dari Pegunungan Bukit Barisan yang terbentang dari Utara hingga Selatan Pulau Sumatera. Lahan yang ada pada kawasan berbukit dan bergunung dengan kelerengan diatas 40% tercatat $\pm$ 1.017.000 ha. Wilayah yang lebih datar dijumpai di bagian Timur Sumatera Barat.

GEOLOGI

Struktur yang berkembang di Provinsi Sumatera Barat adalah struktur perlipatan *(antiklinorium)* dan struktur sesar dengan arah umum Barat Laut – Tenggara, yang mengikuti regional Pulau Sumatera. Struktur yang terdapat berupa *Great Sumatera Fault* di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera dan *Mentawai Fault* di Kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempengan besar dan *micro plate.* Selain geologi dasar laut, di daratan terdapat patahan semangka yang membujur dari Kab. Solok Selatan sampai Kab. Pasaman. Kondisi ini menjadikan Provinsi Sumatera Barat memiliki kerawanan bencana gempa bumi yang cukup tinggi.

HIDROLOGI

Provinsi Sumatera Barat memiliki sumber daya air yang cukup besar. Jumlah sungai yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat mencapai 606 yang sebagian besar bermuara ke Samudera Hindia di Pantai Barat Sumatera dan sebagian lagi ke arah Pantai Timur Pulau Sumatera.

Wilayah Sumatera Barat yang dialiri sungai ini dapat dibagi atas sembilan Satuan Wilayah Sungai (SWS) yaitu SWS Akuaman, Pulau Siberut, Natal-Batahan, Kampar, Batang Hari, Silaut, Rokan, Indragiri dan Masang. Sumber air sungai di Provinsi Sumatera Barat berasal dari pegunungan dan danau (Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Maninjau dan Danau Singkarak). Danau Singkarak terletak di Kabupaten Solok dan Tanah Datar yang mempunyai luas 13.011 Km2, Danau Maninjau di Kabupaten Agam dengan luas 9.950 Km2, sedangkan Danau Diatas (3.150 Km2), Danau Dibawah (1.400 Km^2) dan Danau Talang (1.02 Km^2) terdapat di Kabupaten Solok dan Solok Selatan.

KLIMATOLOGI

Kondisi iklim Sumatera Barat secara umum dapat digambarkan dari curah hujan dan suhu wilayahnya. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.980 sampai 5.000 mm/tahun dengan kecenderungan daerah bagian Barat lebih basah bila dibandingkan dengan bagian Timur. Keadaan yang lebih basah dibagian Barat ini berkaitan dengan dibawanya uap air oleh tiupan angin laut yang membentur bukit dan pegunungan sehingga hujan lebih banyak dan sering turun di belahan Barat Bukit Barisan. Tingginya curah hujan tersebut menyediakan air cukup banyak di bagian Barat provinsi ini, sehingga sangat menunjang untuk budidaya pertanian antara lain untuk tanaman pangan dan hortikultura.

Karakteristik iklim Provinsi Sumatera Barat termasuk iklim topika basah. Adapun klasifikasi iklim berdasarkan sistem *Schmidt-Fergusson* daerah ini dapat dibagi menjadi tiga tipe iklim yaitu tipe A, B dan C. Daerah sepanjang pantai barat tergolong kepada tipe A dengan luas wilayah cakupannya mencapai 2.672.000 ha. Adapun daerah lereng timur Bukit Barisan yang merupakan daerah bayangan hujan menerima curah hujan lebih kecil tergolong tipe B dengan luas 265.700 ha dan tipe C dengan luas wilayah cakupan 100.800 ha terdapat di lereng Timur Gunung Merapi yaitu sekitar Danau Singkarak di kabapaten Tanah Datar dan selatan Gunung Talang meliputi di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Suhu rata-rata di Sumatera Barat antara 18^0-34^0 C dengan suhu rata-rata lebih kurang $25,5^0$ C. Perbedaan antara temperatur siang dan malam antara 5^0-7^0 C. Suhu terendah biasanya terjadi antara bulan Oktober sampai bulan Desember dan suhu tertinggi terjadi antara bulan Juli dan Agustus. Pada umummya daerah dataran tinggi mempunyai suhu 4^0-6^0 C lebih rendah bila dibandingkan dengan daerah pesisir barat. Lebih rendahnya suhu di daerah pegunungan menjadikan kawasan ini sebagai sentra hortikultura dan dapat dikembangkan sebagai daerah agrowisata potensial terutama di pegunungan yang terdapat di wilayah Agam, Tanah Datar, Bukittinggi dan Padang Panjang serta pada kawasan Kayu Aro sampai Pantai Cermin Kabupaten Solok. Kelembaban udara antara 79% - 87% dengan kecepatan angin antara 1,25 – 7,72 knot. Daerah dengan kelembaban yang tinggi terjadi di daerah pesisir dan Kepulauan Mentawai.

PEMERINTAHAN

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 sebanyak 18.474 orang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6.4 Daftar PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

GOLONGAN/RUANG	ESELON				NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	1	-	-	-	3	-	4
Golongan IV/d	-	25	-	-	23	1	49
Golongan IV/c	-	26	9	-	164	5	204
Golongan IV/b	-	3	150	9	2.000	27	2.189
Golongan IV/a	-	-	119	185	2.551	134	2.989
JUMLAH GOLONGAN IV	**1**	**54**	**278**	**194**	**4.741**	**167**	**5.435**
Golongan III/d	-	-	32	459	2.759	589	3.839
Golongan III/c	-	-	-	121	1.765	316	2.202
Golongan III/b	-	-	-	14	1.011	788	1.813
Golongan III/a	-	-	-	-	440	1.284	1.724
P3K	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH GOLONGAN III	**-**	**-**	**32**	**594**	**5.975**	**2.977**	**9.578**
Golongan II/d	-	-	-	-	206	466	672
Golongan II/c	-	-	-	-	172	449	621
Golongan II/b	-	-	-	-	3	97	100
Golongan II/a	-	-	-	-	-	46	46
P3K	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH GOLONGAN II	**-**	**-**	**-**	**-**	**381**	**1.058**	**1.439**
Golongan I/d	-	-	-	-	-	32	32
Golongan I/c	-	-	-	-	-	16	16
Golongan I/b	-	-	-	-	-	1	1
Golongan I/a	-	-	-	-	-	1	1
JUMLAH GOLONGAN I	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50**	**50**
TOTAL	**1**	**54**	**310**	**788**	**11097**	**4252**	**16.502**

DPRD

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, susunan pemerintah daerah otonomi meliputi DPRD sebagai lembaga legeslatif dan pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang DPRD sebagai lembaga legeslatif dibentuk unsur pimpinan, komisi-komisi, panitia dan fraksi.

DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2024 – 2029 ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3415 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029 memiliki anggota sebanyak 65 orang. Adapun struktur kedudukan DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.5 Nama-Nama Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian
1	Fraksi Partai PKS
2	Fraksi Partai Gerindra
3	Fraksi Partai Golkar
4	Fraksi Partai Nasdem
5	Fraksi Partai Demokrat
6	Fraksi Partai PAN
7	Fraksi Partai PPP
8	Fraksi Partai PKB & PDIP

Tabel 6.6 Nama-Nama Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Jml Kursi
1	Partai PKS	10 orang
2	Partai Gerindra	10 orang
3	Partai Golkar	9 orang
4	Partai Nasdem	9 orang
5	Partai Demokrat	8 orang
6.	Partai PAN	8 orang
7.	Partai PPP	5 orang
8.	Partai PDIP	3 orang
9.	Partai PKB	3 orang

Tabel 6.7 Nama-Nama Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat 2019-2024

No	Nama	Jabatan	Partai
1	Drs. H. Muhidi, MM	Ketua	Partai PKS
2	Evi Yandri Rajo Budiman	Wakil Ketua	Partai Gerindra
3	Muhammad Iqra Chissa Putra, S.S.T, MM	Wakil Ketua	Partai Golkar
4	Nanda Satria, S. IP	Wakil Ketua	Partai Nasdem

Tabel 6.8 Nama-Nama Ketua Komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat 2019-2024

No	Uraian	Nama Ketua	Fraksi
1	Komisi I Bidang Pemerintahan	Sawal Dt. Putiah, SH	Fraksi PPP
2	Komisi II Bidang Ekonomi	Khairuddin Simanjuntak	Fraksi Golkar
3	Komisi III Bidang Keuangan	H. Indra Dt Rajo Lelo, SH, MM	Fraksi PAN
4	Komisi IV Bidang Pembangunan	Doni Harsiva Yandra, S.IP., M.E.	Fraksi Demokrat
5	Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat	Lazuardi Erman, S.H.	Fraksi Golkar

BUMD DAN LAINNYA

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki 4 BUMD dan 3 Perusahaan dalam bentuk penyertaan modal yaitu:

Catatan: *Dua BUMD saat ini dalam proses likuidasi sebagaimana kami uraikan dalam penjelasan pada huruf A diatas.*

Tabel 6.10 Daftar BUMD Milik Pemprov Sumbar

No	Nama BUMD	Alamat/No Telp/ E-Mail	Tahun Pendirian	% Kepemilikan Pemprov	Bidang Usaha	Nomor Perda Pendirian	Modal Dasar	Jumlah Personalia		Ket
								Komisaris	Direksi	
1	PT Bank Nagari	Jln. Pemuda No 21 Padang Telp 0751 (31577-31578-31581-31582 E-Mail : www.banknagari.co.id	2006	32,70	Perbankan	Perda No 3 Tahun 2006	5 Triliun	'1. Andri Yulika.(Komisaris Utama) 2. Manar Fuadi (Komisaris Independen) 3. Edrizanov (Komisaris Independen)	1. Gusti Candra (Dirut), 2. Roni Edrian ((Dir. Keuangan) 3. Zilfa Efrizon (Dir. Operasional), 4. Sukardi I (Dir. Kepatuhan) 5. Direktur Kredit dan Syariah (sedang Proses)	BUMD Pemrov dan Pemkab/ Kota Se Sumbar
2	PT Asuransi Bangun Askrida	Pusat Niaga Cempaka Mas M 1/36 Jl. Letjen. Suprapto,Jakarta 10640 (Kacab Padang Jln Pemuda) 0751- 34177	1989	16,41	Asuransi	Akta Notaris Raharti Sudjardjati, SH No 9 tahun 1989	200 Milyar	Komisaris Utama (sedang Proses OJK) Komisaris Independen:: 1. Didik Supriyanto 2. Prakoso Wudiwibowo 3. Hadi Susanto Komisaris : Heri Yanson	1. Direktur Utama (Sedang proses) 2. Hendro Friediyanto (Direktur Kepatuhan), 3. Abdul Mulki (Direktur Teknik), 4. Bunyamin (Direktur Pemasaran),	Penyertaan Modal

No	Nama BUMD	Alamat/No Telp/ E-Mail	Tahun Pendirian	% Kepemilikan Pemprov	Bidang Usaha	Nomor Perda Pendirian	Modal Dasar	Jumlah Personalia		Ket
								Komisaris	Direksi	
									5. Wawan Mulyawan (Direktur Operasional)	
3	PT Grafika Jaya Sumbar	Jln. Kis Mangun Sarkoro Telp 0751- 21172,23263 Fax 0751- 27141 E-Mail : grafika_sumbar@yahoo. com	2008	95.66	Percetakan, suplier dan leveransir peralatan Kantor dan perdagangan umum	Perda No 14 Tahun 2007	30 Milyar	- Hilma	Abrizaldi	BUMD
4	PT Dinamika Sumbar Jaya	Jln. Kampung Sebelah No 25 Padang Telp 0751-27493,32104 Fax 0751-34181	2007	96.56	Perdagangan umum, Jasa Pengangkutan Darat, SPBU, Perindustrian dan perbengkelan	Perda No 15 Tahun 2007	12 milyar	Alizar Munir	Dasril	BUMD (sedang proses likuidasi)
5	PT Andalas Tuah Sakato	Jl. Thamrin No 81 Padang Telp 0751- 27678,27698	2007	98.60	Perdagangan Umum,Usaha Pertanian	Perda No 13 Tahun 2007	10 Milyar	Alisar Munir	Dasril	BUMD (sedang proses likuidasi)
6	PT Pembangunan Sumbar	Jln. Pemuda No 45 Padang Telp 0751- 26111-25829 Fax: 0751- 22423	1972	35.52	Real Estate dan Jasa konstruksi	Akta Notaris No 9 tahun 1972	100 juta	Endrizal SE.M.Si	Dr. Zulherman, ST, M.Sc	Penyertaan Modal

No	Nama BUMD	Alamat/No Telp/ E-Mail	Tahun Pendirian	% Kepemilikan Pemprov	Bidang Usaha	Nomor Perda Pendirian	Modal Dasar	Jumlah Personalia		Ket
								Komisaris	Direksi	
7	PT Andalas Rekasindo Pratama	Jln. Kartini No 2 Padang Telp (0751) 26204	1995	50.00	Pembangunan dan pengusahaan Kawasan Industri	Perda No 5 Tahun 1995				Penyertaan Modal
8	PT Balairung Citrajaya Sumbar	Jln. Matraman raya No 19 (Kantor penghubung Sumbar) Jakarta Fax 021-85917216	2011	79,72	Perhotelan, restorant dan usaha jasa wisata	Perda Nomor 6 Tahun 2009 yang dirubah dengan Perda No 14 tahun 2011	308.078.000.000	Ria Wijayanty, ST, M.Si	Okto Frida Wisnu Pamungkas	BUMD
9	PT Jamkrida Sumbar	Jln. Khatib Sulaiman No 25 Padang Telp: 0751- 444102	2012	99.87	Penjaminan Kredit	Perda No 12 tahun 2012 Jo Perda 13 Tahun 2015	100 milyar	1. Ahmad Zakri (Komut) 2. Munandar Kasim (Komisaris Independen)	'1. Ibnu Fadhli (Dirut) 2. Jhen Hen Ryco (Direktur Umum Pemasaran dan Syariah)	BUMD
10	PTSijunjung Sumbar Energy	Jalan Mangunsarkoro	2019	51	SDA Migas	Perda no.5 tahun 2019	3.240.000.000	Herry Martinus	Fairuz Fakhrurozi	BUMD

BAB VII.
PENUTUP

PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA BARAT

BAB VII
PENUTUP

Gubernur selaku pemegang kuasa pengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam pemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yang dipimpinnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan APBD dengan menyusun Laporan Keuangan dan paling lambat tanggal 31 Maret 2025, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 sudah harus disampaikan kepada BPK-RI. Sebelum disampaikan kepada BPK RI, maka LKPD Tahun 2024 tersebut juga harus direviu oleh Inspektorat Provinsi.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyiapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 yaitu:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024;
b. Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2024;
c. Neraca per 31 Desember 2024;
d. Laporan Operasional (LO) Tahun 2024;
e. Laporan Arus Kas (LAK) Tahun 2024;
f. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024;
g. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

LAMPIRAN
LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2024

PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA BARAT

INDEKS DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	*NO*	*URAIAN*
LAMPIRAN	1	Daftar Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) dan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran.
LAMPIRAN	2	Daftar Anggaran dan Realisasi Pendapatan Per Rincian Objek Pendapatan dan SKPD nya Tahun 2024
LAMPIRAN	3	Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun
LAMPIRAN	4	Daftar Sub Kegiatan SKPD yg Realisasi Keuangannya Dibawah 50% dan Penjelasannya Tahun 2024
LAMPIRAN	5	Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per SKPD Tahun 2024
LAMPIRAN	6	Ringkasan LRA-Pendapatan Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Tahun 2024
LAMPIRAN	7	Daftar Rekapitulasi Anggaran, Realisasi dan Sisa Dana DAK Fisik dan Non Fisik Tahun 2024
LAMPIRAN	8	Daftar Rekapitulasi Anggaran, Realisasi dan Sisa Dana DAU SG Tahun 2024
LAMPIRAN	9	Rekapitulasi Belanja per SKPD Tahun Anggaran 2024
LAMPIRAN	10	Rekapitulasi Belanja Operasi Per SKPD Tahun Anggaran 2024
LAMPIRAN	11	Rekapitulasi Belanja Pegawai Per SKPD Tahun Anggaran 2024
LAMPIRAN	12	Rekapitulasi Belanja Barang dan Jasa Per SKPD Tahun Anggaran 2024
LAMPIRAN	13	Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2024
LAMPIRAN	14	Rekapitulasi Penerbitan dan Pencairan SP2D per SKPD Tahun Anggaran 2024
LAMPIRAN	15	Rekapitulasi Setoran Pengembalian Belanja per SKPD Tahun 2024
LAMPIRAN	16	Rekapitulasi Belanja Modal Per SKPD Tahun Anggaran 2024
LAMPIRAN	17	Rekapitulasi Data Dana BOS Tahun 2023 SMA/SMK/SLB Negeri Se Sumatera Barat , Sisa Saldo Dana BOS 2021 per 31
LAMPIRAN	18	Rekapitulasi Belanja BOS Reguler Tahun 2024
LAMPIRAN	19	Rekapitulasi Realisasi BOS Kinerja Tahun 2024
LAMPIRAN	20	Rekapitulasi Hasil Rekonsiliasi Dana BOS Tahun 2024 SMA/SMK/SLB Negeri Se Sumatera Barat per 31 Desember 2024
LAMPIRAN	21	Realisasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024
LAMPIRAN	22	BLUD-Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang berakhir sd 31 Desember Tahun
LAMPIRAN	23	Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Sub Rincian Objek Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024
LAMPIRAN	24	Daftar Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024 dan 2023
LAMPIRAN	25	Daftar Penghapusan dan Penjualan Aset Tahun 2024
LAMPIRAN	26	Daftar Piutang dan Penyisihannya per 31 Desember 2024
LAMPIRAN	27	Piutang/Tagihan Kerugian Daerah Yang Diproses Melalui Sidang TPKD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan telah
LAMPIRAN	28	Daftar Beban Bayar di Muka SKPD per 31 Desember 2024
LAMPIRAN	29	Daftar Persediaan per 31 Desember 2024
LAMPIRAN	30	Daftar Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)
LAMPIRAN	31	Daftar Investasi Permanen per 31 Desember 2024 (Un-Audited)
LAMPIRAN	32	Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sd 31 Desember 2024
LAMPIRAN	33	Daftar Barang Jasa Yg Dikapitalisir ke Aset Tetap Tahun 2024
LAMPIRAN	34	Daftar Realisasi BM, BM Tdk dikapitalisir, BM Dikapitalisir Tahun 2024
LAMPIRAN	35	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap dan Aset Lainnya
LAMPIRAN	36	Daftar Mutasi Aset tetap dan Aset lainnya
LAMPIRAN	37	Daftar Aktiva Tetap per 31 Desember 2024 - Tanah
LAMPIRAN	38	Daftar Aktiva Tetap per 31 Desember 2024 - Peralatan dan Mesin
LAMPIRAN	39	Daftar Aktiva Tetap per 31 Desember 2024 - Gedung dan Bangunan
LAMPIRAN	40	Daftar Aktiva Tetap per 31 Desember 2024 - Jalan Irigasi Jaringan
LAMPIRAN	41	Daftar Aktiva Tetap per 31 Desember 2024 - Aset Tetap Lainnya
LAMPIRAN	42	Daftar Aktiva Tetap per 31 Desember 2024 - KDP
LAMPIRAN	43	Daftar Aktiva Tetap per 31 Desember 2024 - Aset Tidak Berwujud
LAMPIRAN	44	Daftar Aktiva Tetap per 31 Desember 2024 -Aset Tidak Bermanfaat
LAMPIRAN	45	Daftar Aktiva Tetap per 31 Desember 2024 - Aset Dimanfaatkan Pihak Lain
LAMPIRAN	46	Daftar Aktiva Tetap per 31 Desember 2024 - Aset Dalam Penelusuran
LAMPIRAN	47	Daftar Hibah Masuk Tahun 2024
LAMPIRAN	48	Daftar Tanah Pada OPD di Lingkungan Pemprov. Sumbar Yang Belum Bersertifikat
LAMPIRAN	49	Daftar Rumah Dinas Beserta Surat Izin Penghunian (SIP)
LAMPIRAN	50	Penetapan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun
LAMPIRAN	51	Rekapitulasi Kendaraan Bermotor Yang Belum Mendaftar Ulang Jatuh Tempo Tahun 2020 sd 2024
LAMPIRAN	52	Perhitungan Pokok dan Bagi Hasil Deposito PT. Rajawali Tahun 2024 Nisbah Bagi Hasil
LAMPIRAN	53	Rekap BMD Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dipinjampakaikan TA 2024
LAMPIRAN	54	Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Pemotongan Pajak atas SP2D yg dicairkan melalui Kas Daerah Tahun 2024
LAMPIRAN	55	Daftar Utang Pihak ketiga
LAMPIRAN	56	Daftar Hutang Belanja Tahun per 31 Desember 2024
LAMPIRAN	57	Daftar Pendapatan Diterima Di Muka Tahun 2024
LAMPIRAN	58	Perbedaan LRA dan LO 2024
LAMPIRAN	59	Rekapitulasi Aset Tetap Properti Investasi

Lampiran 1

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DAFTAR UANG YANG HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN (UYHD) DAN SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

PER 31 DESEMBER 2024

No	NAMA SKPD	SP2D UP	SPJ UP	SISA UYHD		KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN				Disetor tahun 2025
					Disetor Tahun 2024	UYHD	CP	LAIN-LAIN PAD YG SAH	TOTAL	
1	2	3	4	5			6			7
1	DINAS PENDIDIKAN	5.406.211.000,00	5.308.748.167,00	97.462.833,00	97.462.833,00		139.052.352,00	183.616.493,31	322.668.845,31	-
2	DINAS KESEHATAN	1.097.764.000,00	1.097.580.934	183.066,00	183.066,00				-	
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT	Nihil							-	
4	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	Nihil							-	
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M NATSIR	Nihil							-	
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	Nihil							-	
7	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	5.834.863.000,00	4.697.625.317,00	1.137.237.683,00	1.136.767.683,00	470.000,00			470.000,00	470.000,00
8	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	3.753.020.000,00	3.752.861.101	158.899,00	158.899,00				-	
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	650.071.000,00	489.965.672	160.105.328,00	160.105.328,00				-	
10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	665.246.000,00	525.306.712	139.939.288,00	139.939.288,00				-	
11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	476.165.000,00	198.760.903	277.404.097,00	277.404.097,00				-	
12	DINAS SOSIAL	2.767.955.000,00	2.133.578.859	634.376.141,00	634.376.141,00				-	
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	592.902.000,00	585.084.169	7.817.831,00	7.817.831,00				-	
14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.088.458.000,00	1.002.955.836	85.502.164,00	85.502.164,00				-	
15	DINAS PANGAN	1.110.127.000,00	1.109.357.571	769.429,00	769.429,00				-	
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.552.633.000,00	1.545.188.122	7.444.878,00	7.444.878,00				-	
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	343.997.000,00	245.392.795	98.604.205,00	98.604.205,00				-	
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	887.762.000,00	465.499.112	422.262.888,00	422.262.888,00				-	
19	DINAS PERHUBUNGAN	456.837.000,00	322.462.968	134.374.032,00	134.374.032,00				-	
20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	1.272.081.000,00	1.272.061.586	19.414,00	19.414,00				-	
21	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	736.475.000,00	520.360.397	216.114.603,00	216.114.603,00				-	
22	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	936.886.000,00	936.600.085	285.915,00	285.915,00				-	
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.053.481.000,00	1.053.464.572	16.428,00	16.428,00				-	
24	DINAS KEBUDAYAAN	1.856.132.000,00	1.855.510.202	621.798,00	621.798,00				-	
25	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	341.548.000,00	242.147.733	99.400.267,00	99.400.267,00				-	
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.162.218.000,00	1.350.756.876	811.461.124,00	811.461.124,00				-	
27	DINAS PARIWISATA	1.720.567.000,00	1.554.492.607	166.074.393,00	166.074.393,00				-	
28	DINAS PERKEBUNAN DAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA	7.027.908.000,00	5.489.511.016	1.538.396.984,00	1.538.396.984,00				-	
29	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.974.948.000,00	1.664.308.878	310.639.122,00	310.639.122,00				-	
30	DINAS KEHUTANAN	2.729.925.000,00	2.680.129.178	49.795.822,00	49.795.822,00				-	
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	331.994.000,00	267.539.421	64.454.579,00	64.454.579,00				-	

Lampiran 1

No	NAMA SKPD	SP2D UP	SPJ UP	SISA UYHD		KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN				Disetor tahun 2025
					Disetor Tahun 2024	UYHD	CP	LAIN-LAIN PAD YG SAH	TOTAL	
1	2	3	4	5			6			7
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.018.106.000,00	586.821.488	431.284.512,00	431.284.512,00				-	
33	SEKRETARIAT DAERAH			-					-	
	BIRO UMUM	3.710.139.000,00	2.982.357.320	727.781.680,00	727.781.680,00				-	
	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	2.051.130.000,00	2.023.196.216	27.933.784,00	27.933.784,00				-	
	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	351.960.000,00	324.277.960	27.682.040,00	27.682.040,00				-	
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	287.750.000,00	287.582.665	167.335,00	167.335,00				-	
	BIRO PEREKONOMIAN	297.608.000,00	283.901.015	13.706.985,00	13.706.985,00				-	
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	724.098.000,00	724.053.998	44.002,00	44.002,00				-	
	BIRO HUKUM	240.000.000,00	239.900.996	99.004,00	99.004,00				-	
	BIRO ORGANISASI	342.942.000,00	189.811.743	153.130.257,00	153.130.257,00				-	
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	360.304.000,00	247.554.039	112.749.961,00	112.749.961,00				-	
34	SEKRETARIAT DPRD	18.137.258.000,00	15.485.401.283	2.651.856.717,00	2.651.856.717,00				-	
35	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	785.454.000,00	503.732.043	281.721.957,00	281.721.957,00				-	-
36	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	941.068.000,00	463.621.815	477.446.185,00	477.446.185,00				-	
37	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2.436.578.000,00	2.436.402.607	175.393,00	175.393,00				-	
38	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	428.305.000,00	350.599.103	77.705.897,00	77.705.897,00				-	
39	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	624.796.000,00	472.870.533	151.925.467,00	151.925.467,00				-	
40	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	563.655.000,00	478.027.956	85.627.044,00	85.627.044,00				-	
41	BADAN PENGHUBUNG	533.978.000,00	481.290.967	52.687.033,00	52.687.033,00				-	
42	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	860.548.000,00	605.846.949	254.701.051,00	254.701.051,00				-	
43	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.135.462.000,00	1.130.858.083	4.603.917,00	4.603.917,00				-	
J U M L A H		**84.659.313.000,00**	**72.665.359.568,00**	**11.993.953.432,00**	**11.993.483.432,00**	**470.000,00**	**139.052.352,00**	**183.616.493,31**	**323.138.845,31**	**470.000,00**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Daftar Anggaran dan Realisasi Pendapatan Per Rincian Objek Pendapatan dan SKPD nya Tahun 2024

KODE REK	URAIAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%	KETERANGAN
4.	**PENDAPATAN DAERAH**		**6.857.294.152.520,00**	**6.482.418.683.405,20**	**94,53**	**(374.875.469.114,80)**	**(5,47)**	
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		**3.342.769.899.590,00**	**2.942.563.617.866,20**	**88,03**	**(400.206.281.723,80)**	**(11,97)**	
4.1.01.	**Pajak Daerah**		**2.693.451.041.456,00**	**2.338.112.925.264,00**	**86,81**	**(355.338.116.192,00)**	**(13,19)**	
4.1.01.01.	**Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**		**867.217.461.437,00**	**844.845.392.450,00**	**97,42**	**(22.372.068.987,00)**	**(2,58)**	
4.1.01.01.01.	**PKB-Mobil Penumpang-Sedan**		**15.255.110.900,00**	**16.983.869.850,00**	**111,33**	**1.728.758.950,00**	**11,33**	
4.1.01.01.01.0001.	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	BAPENDA	15.029.488.900,00	16.765.836.650,00	111,55	1.736.347.750,00	11,55	
4.1.01.01.01.0002.	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	BAPENDA	833.300,00	1.583.650,00	190,05	750.350,00	90,05	
4.1.01.01.01.0004.	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	BAPENDA	224.788.700,00	216.449.550,00	96,29	(8.339.150,00)	(3,71)	
4.1.01.01.02.	**PKB-Mobil Penumpang-Jeep**		**77.776.178.750,00**	**77.665.572.450,00**	**99,86**	**(110.606.300,00)**	**(0,14)**	
4.1.01.01.02.0001.	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	BAPENDA	77.397.599.950,00	77.157.544.550,00	99,69	(240.055.400,00)	(0,31)	
4.1.01.01.02.0004.	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	BAPENDA	378.578.800,00	508.027.900,00	134,19	129.449.100,00	34,19	
4.1.01.01.03.	**PKB-Mobil Penumpang-Minibus**		**448.999.090.000,00**	**426.776.415.550,00**	**95,05**	**(22.222.674.450,00)**	**(4,95)**	
4.1.01.01.03.0001.	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	BAPENDA	446.161.051.900,00	423.595.374.100,00	94,94	(22.565.677.800,00)	(5,06)	
4.1.01.01.03.0002.	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	BAPENDA	353.177.400,00	362.447.400,00	102,62	9.270.000,00	2,62	
4.1.01.01.03.0004.	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	BAPENDA	2.484.860.700,00	2.818.594.050,00	113,43	333.733.350,00	13,43	
4.1.01.01.04.	**PKB-Mobil Bus-Microbus**		**3.803.409.100,00**	**4.016.590.550,00**	**105,61**	**213.181.450,00**	**5,61**	
4.1.01.01.04.0001.	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	BAPENDA	2.860.005.100,00	2.907.297.900,00	101,65	47.292.800,00	1,65	
4.1.01.01.04.0002.	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	BAPENDA	677.712.100,00	710.447.250,00	104,83	32.735.150,00	4,83	
4.1.01.01.04.0004.	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	BAPENDA	265.691.900,00	398.845.400,00	150,12	133.153.500,00	50,12	
4.1.01.01.05.	**PKB-Mobil Bus-Bus**		**825.134.300,00**	**655.901.800,00**	**79,49**	**(169.232.500,00)**	**(20,51)**	
4.1.01.01.05.0001.	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	BAPENDA	5.089.000,00	19.676.300,00	386,64	14.587.300,00	286,64	
4.1.01.01.05.0002.	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	BAPENDA	817.816.300,00	634.586.500,00	77,60	(183.229.800,00)	(22,40)	
4.1.01.01.05.0004.	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	BAPENDA	2.229.000,00	1.639.000,00	73,53	(590.000,00)	(26,47)	
4.1.01.01.06.	**PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up**		**68.179.535.850,00**	**66.599.508.700,00**	**97,68**	**(1.580.027.150,00)**	**(2,32)**	
4.1.01.01.06.0001.	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	BAPENDA	67.463.035.500,00	65.656.632.000,00	97,32	(1.806.403.500,00)	(2,68)	
4.1.01.01.06.0002.	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	BAPENDA	75.378.250,00	78.342.200,00	103,93	2.963.950,00	3,93	
4.1.01.01.06.0004.	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	BAPENDA	641.122.100,00	864.534.500,00	134,85	223.412.400,00	34,85	
4.1.01.01.07.	**PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck**		**47.336.301.900,00**	**45.629.780.600,00**	**96,39**	**(1.706.521.300,00)**	**(3,61)**	
4.1.01.01.07.0001.	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	BAPENDA	31.040.113.000,00	29.658.985.300,00	95,55	(1.381.127.700,00)	(4,45)	
4.1.01.01.07.0002.	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	BAPENDA	16.083.709.800,00	15.539.231.300,00	96,61	(544.478.500,00)	(3,39)	

KODE REK	URAIAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%	KETERANGAN
4.1.01.01.07.0004.	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	BAPENDA	212.479.100,00	431.564.000,00	203,11	219.084.900,00	103,11	
4.1.01.01.08.	**PKB-Mobil Barang/Beban-Truck**		**33.241.962.900,00**	**33.381.752.200,00**	**100,42**	**139.789.300,00**	**0,42**	
4.1.01.01.08.0001.	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	BAPENDA	7.379.624.000,00	7.637.387.400,00	**103,49**	257.763.400,00	3,49	
4.1.01.01.08.0002.	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	BAPENDA	25.840.270.500,00	25.706.033.950,00	**99,48**	(134.236.550,00)	(0,52)	
4.1.01.01.08.0004.	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	BAPENDA	22.068.400,00	38.330.850,00	173,69	16.262.450,00	73,69	
4.1.01.01.09.	**PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van**		**3.192.057.650,00**	**3.142.902.800,00**	**98,46**	**(49.154.850,00)**	**(1,54)**	
4.1.01.01.09.0001.	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	BAPENDA	3.182.445.100,00	3.124.176.350,00	98,17	(58.268.750,00)	(1,83)	
4.1.01.01.09.0002.	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	BAPENDA	5.061.900,00	4.369.100,00	86,31	(692.800,00)	(13,69)	
4.1.01.01.09.0002.	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	BAPENDA	4.550.650,00	14.357.350,00	315,50	9.806.700,00	215,50	
4.1.01.01.10.	**PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua**		**168.483.451.800,00**	**169.863.208.700,00**	**100,82**	**1.379.756.900,00**	**0,82**	
4.1.01.01.10.0001.	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	BAPENDA	167.780.998.100,00	168.809.786.350,00	100,61	1.028.788.250,00	0,61	
4.1.01.01.10.0002.	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum	BAPENDA	1.663.950,00	1.755.150,00	105,48	91.200,00	5,48	
4.1.01.01.10.0004.	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	BAPENDA	700.789.750,00	1.051.667.200,00	150,07	350.877.450,00	50,07	
4.1.01.01.11.	**PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga**		**123.836.700,00**	**129.509.800,00**	**104,58**	**5.673.100,00**	**4,58**	
4.1.01.01.11.0001.	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	BAPENDA	64.879.500,00	70.692.950,00	108,96	5.813.450,00	8,96	
4.1.01.01.11.0002.	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum	BAPENDA	591.400,00	248.400,00	42,00	(343.000,00)	(58,00)	
4.1.01.01.11.0004.	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	BAPENDA	58.365.800,00	58.568.450,00	100,35	202.650,00	0,35	
4.1.01.01.14.	**PKB-Mobil Roda Tiga**		**1.391.587,00**	**379.450,00**	**27,27**	**(1.012.137,00)**	**(72,73)**	
4.1.01.01.14.0001.	PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi	BAPENDA	893.987,00	379.450,00	42,44	(514.537,00)	(57,56)	
4.1.01.01.14.0002.	PKB-Mobil Roda Tiga-Umum	BAPENDA	140.500,00	-	-	(140.500,00)	(100,00)	
4.1.01.01.14.0004.	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah	BAPENDA	357.100,00	-	-	(357.100,00)	(100,00)	
4.1.01.02.	**Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**		**399.134.592.491,00**	**395.873.654.800,00**	**99,18**	**(3.260.937.691,00)**	**(0,82)**	
4.1.01.02.01.	**BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan**		**1.478.217.200,00**	**1.276.617.000,00**	**86,36**	**(201.600.200,00)**	**(13,64)**	
4.1.01.02.01.0001.	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	BAPENDA	1.478.217.200,00	1.276.617.000,00	86,36	(201.600.200,00)	(13,64)	
4.1.01.02.02.	**BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep**		**30.759.742.500,00**	**30.480.826.700,00**	**99,09**	**(278.915.800,00)**	**(0,91)**	
4.1.01.02.02.0001.	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	BAPENDA	30.759.742.500,00	30.480.826.700,00	99,09	(278.915.800,00)	(0,91)	
4.1.01.02.03.	**BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus**		**159.670.973.200,00**	**152.472.265.550,00**	**95,49**	**(7.198.707.650,00)**	**(4,51)**	
4.1.01.02.03.0001.	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	BAPENDA	159.670.973.200,00	152.472.265.550,00	95,49	(7.198.707.650,00)	(4,51)	
4.1.01.02.04.	**BBNKB-Mobil Bus-Microbus**		**3.021.692.600,00**	**3.911.017.500,00**	**129,43**	**889.324.900,00**	**29,43**	
4.1.01.02.04.0001.	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	BAPENDA	3.021.692.600,00	3.911.017.500,00	129,43	889.324.900,00	29,43	
4.1.01.02.05.	**BBNKB-Mobil Bus-Bus**		**1.349.854.050,00**	**1.374.536.000,00**	**101,83**	**24.681.950,00**	**1,83**	
4.1.01.02.05.0001.	BBNKB-Mobil Bus-Bus	BAPENDA	1.349.854.050,00	1.374.536.000,00	101,83	24.681.950,00	1,83	

KODE REK	URAIAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%	KETERANGAN
4.1.01.02.06.	**BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up**		**24.197.701.350,00**	**24.357.489.600,00**	**100,66**	**159.788.250,00**	**0,66**	
4.1.01.02.06.0001.	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	BAPENDA	24.197.701.350,00	24.357.489.600,00	100,66	159.788.250,00	0,66	
4.1.01.02.07.	**BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck**		**7.973.010.000,00**	**7.716.691.300,00**	**96,79**	**(256.318.700,00)**	**(3,21)**	
4.1.01.02.07.0001.	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	BAPENDA	7.973.010.000,00	7.716.691.300,00	96,79	(256.318.700,00)	(3,21)	
4.1.01.02.08.	**BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck**		**7.788.855.400,00**	**11.586.279.200,00**	**148,75**	**3.797.423.800,00**	**48,75**	
4.1.01.02.08.0001.	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	BAPENDA	7.788.855.400,00	11.586.279.200,00	148,75	3.797.423.800,00	48,75	
4.1.01.02.09.	**BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van**		**1.680.760.791,00**	**1.921.557.000,00**	**114,33**	**240.796.209,00**	**14,33**	
4.1.01.02.09.0001.	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	BAPENDA	1.680.760.791,00	1.921.557.000,00	114,33	240.796.209,00	14,33	
4.1.01.02.10.	**BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua**		**160.416.896.100,00**	**160.121.081.950,00**	**99,82**	**(295.814.150,00)**	**(0,18)**	
4.1.01.02.10.0001.	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	BAPENDA	160.416.896.100,00	160.121.081.950,00	99,82	(295.814.150,00)	(0,18)	
4.1.01.02.11.	**BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga**		**796.889.300,00**	**655.293.000,00**	**82,23**	**(141.596.300,00)**	**(17,77)**	
4.1.01.02.11.0001.	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	BAPENDA	796.889.300,00	655.293.000,00	82,23	(141.596.300,00)	(17,77)	
4.1.01.03.	**Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)**		**893.928.065.344,00**	**638.993.534.545,00**	**71,48**	**(254.934.530.799,00)**	**(28,52)**	
4.1.01.03.02.	**PBBKB-Bahan Bakar Solar**		**1.565.328.940,00**	**795.371.124,00**	**50,81**	**(769.957.816,00)**	**(49,19)**	
4.1.01.03.02.0001.	PBBKB Bahan Bakar Solar	BAPENDA	1.565.328.940,00	795.371.124,00	50,81	(769.957.816,00)	(49,19)	
4.1.01.03.04.	**PBBKB-Bahan Bakar Lainnya**		**892.362.736.404,00**	**638.198.163.421,00**	**71,52**	**(254.164.572.983,00)**	**(28,48)**	
4.1.01.03.04.0001.	PBBKB Bahan Bakar Lainnya	BAPENDA	892.362.736.404,00	638.198.163.421,00	71,52	(254.164.572.983,00)	(28,48)	
4.1.01.04.	**Pajak Air Permukaan**		**20.001.992.700,00**	**14.677.021.417,00**	**73,38**	**(5.324.971.283,00)**	**(26,62)**	
4.1.01.04.01.	**Pajak Air Permukaan**		**20.001.992.700,00**	**14.677.021.417,00**	**73,38**	**(5.324.971.283,00)**	**(26,62)**	
4.1.01.04.01.0001.	Pajak Air Permukaan	BAPENDA	20.001.992.700,00	14.677.021.417,00	73,38	(5.324.971.283,00)	(26,62)	
4.1.01.05.	**Pajak Rokok**		**513.168.929.484,00**	**443.723.322.052,00**	**86,47**	**(69.445.607.432,00)**	**(13,53)**	
4.1.01.05.01.	**Pajak Rokok**		**513.168.929.484,00**	**443.723.322.052,00**	**86,47**	**(69.445.607.432,00)**	**(13,53)**	
4.1.01.05.01.0001.	Pajak Rokok	BAPENDA	513.168.929.484,00	443.723.322.052,00	86,47	(69.445.607.432,00)	(13,53)	
4.1.02.	**Retribusi Daerah**		**414.280.722.633,00**	**382.306.933.091,49**	**92,28**	**(31.973.789.541,51)**	**(7,72)**	
4.1.02.01.	**Retribusi Jasa Umum**		**372.952.717.795,00**	**374.139.936.380,49**	**100,32**	**1.187.218.585,49**	**0,32**	
4.1.02.01.01.	**Retribusi Pelayanan Kesehatan**		**372.652.264.505,00**	**374.139.936.380,49**	**100,40**	**1.487.671.875,49**	**0,40**	
4.1.02.01.01.0004.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan	DINKES	4.456.734.704,00	5.196.463.122,00	116,60	739.728.418,00	16,60	
4.1.02.01.01.0005.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	DINKES	7.416.652.215,00	7.977.002.000,99	107,56	560.349.785,99	7,56	
		RS. HB. SAANIN	27.500.000.000,00	28.883.738.650,00	105,03	1.383.738.650,00	5,03	
		RS. ACHMAD MOCHTAR	145.000.000.000,00	141.745.330.961,50	97,76	(3.254.669.038,50)	(2,24)	
		RS. M. NATSIR	100.000.000.000,00	102.693.134.890,00	102,69	2.693.134.890,00	2,69	
		RSUD PARIAMAN	82.000.000.000,00	81.311.894.592,00	99,16	(688.105.408,00)	(0,84)	
4.1.02.01.01.0006.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	DINKES	6.278.877.586,00	6.332.372.164,00	100,85	53.494.578,00	0,85	
4.1.02.01.02.	**Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan**		**300.453.290,00**	**-**	**-**	**(300.453.290,00)**	**(100,00)**	
4.1.02.01.02.0001.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	DLH	300.453.290,00	-	-	(300.453.290,00)	(100,00)	

KODE REK	URAIAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%	KETERANGAN
4.1.02.02.	**Retribusi Jasa Usaha**		**40.757.696.254,00**	**7.882.036.311,00**	**19,34**	**(32.875.659.943,00)**	**(80,66)**	
4.1.02.02.01.	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**		**34.895.222.314,00**	**4.776.818.527,00**	**13,69**	**(30.118.403.787,00)**	**(86,31)**	
4.1.02.02.01.0001.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan		291.433.320,00	207.598.070,00	71,23	(83.835.250,00)	(28,77)	
		DISDIK	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-	-	
		DISHUT	106.429.500,00	113.557.500,00	106,70	7.128.000,00	6,70	
		DISBUNTANHOR	30.000.000,00	34.647.162,00	115,49	4.647.162,00	15,49	
		DESDM	8.316.000,00	8.316.000,00	100,00	-	-	
		DISPAR	20.196.000,00	20.196.000,00	100,00	-	-	
		DKP	10.000.000,00	9.356.408,00	93,56	(643.592,00)	(6,44)	
		DISPMD	111.491.820,00	16.525.000,00	14,82	(94.966.820,00)	(85,18)	
4.1.02.02.01.0002.	Retribusi Penyewaan Tanah		3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	**-**	**-**	
		DISBUD	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-	-	
4.1.02.02.01.0003.	Retribusi Penyewaan Bangunan		1.789.117.285,00	2.222.110.457,00	124,20	432.993.172,00	24,20	
		DISKOPUKM	332.135.945,00	224.400.000,00	67,56	(107.735.945,00)	(32,44)	
		DISPORA	225.000.000,00	939.098.000,00	417,38	714.098.000,00	317,38	
		DISNAKKESWAN	546.098.685,00	709.738.930,00	129,97	163.640.245,00	29,97	
		BPSDM	63.707.356,00	9.500.000,00	14,91	(54.207.356,00)	(85,09)	
		DISBUD	25.000.000,00	34.000.000,00	136,00	9.000.000,00	36,00	
		DISPERINDAG	28.261.313,00	33.058.527,00	116,97	4.797.214,00	16,97	
		DISBUNTANHOR	568.913.986,00	272.315.000,00	47,87	(296.598.986,00)	(52,13)	
4.1.02.02.01.0004.	Retribusi Pemakaian Laboratorium		25.617.017.771,00	206.838.400,00	0,81	(25.410.179.371,00)	(99,19)	
		DLH	24.495.631.280,00	126.729.100,00	0,52	(24.368.902.180,00)	(99,48)	
		DPANGAN	406.226.491,00	-	-	(406.226.491,00)	(100,00)	
		DISBUNTANHOR	710.000.000,00	75.159.300,00	10,59	(634.840.700,00)	(89,41)	
		DISPERINDAG	5.160.000,00	4.950.000,00	95,93	(210.000,00)	(4,07)	
4.1.02.02.01.0005.	Retribusi Pemakaian Ruangan		2.194.653.938,00	1.686.466.600,00	76,84	(508.187.338,00)	(23,16)	
		DINKES,	1.117.499.063,00	1.098.545.000,00	98,30	(18.954.063,00)	(1,70)	
		SETDA	580.533.371,00	377.100.000,00	64,96	(203.433.371,00)	(35,04)	
		DISNAKERTRANS	241.790.003,00	80.551.600,00	33,31	(161.238.403,00)	(66,69)	
		BADAN PENGHUBUNG	216.391.601,00	51.370.000,00	23,74	(165.021.601,00)	(76,26)	
		BPSDM	36.939.900,00	78.900.000,00	213,59	41.960.100,00	113,59	
		DISBUD	1.500.000,00	-	-	(1.500.000,00)	(100,00)	
4.1.02.02.01.0006.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor		5.000.000.000,00	450.805.000,00	9,02	(4.549.195.000,00)	(90,98)	
		BMCKTR	5.000.000.000,00	450.805.000,00	9,02	(4.549.195.000,00)	(90,98)	
4.1.02.02.04.	**Retribusi Terminal**		**472.186.963,00**	**286.614.000,00**	60,70	**(185.572.963,00)**		
4.1.02.02.04.0001.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	DISHUB	297.186.963,00	176.127.500,00	59,26	(121.059.463,00)	(40,74)	
4.1.02.02.04.0002.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	DISHUB	50.000.000,00	52.000.000,00	104,00	2.000.000,00	4,00	
4.1.02.02.04.0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	DISHUB	125.000.000,00	58.486.500,00	46,79	(66.513.500,00)	(53,21)	
4.1.02.02.08.	**Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan**		**2.537.291.394,00**	**932.707.684,00**	**36,76**	**(1.604.583.710,00)**	**(63,24)**	
4.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	DKP	2.537.291.394,00	932.707.684,00	36,76	(1.604.583.710,00)	(63,24)	
4.1.02.02.09.	**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**		**620.383.781,00**	**381.768.000,00**	**61,54**	**(238.615.781,00)**	**(38,46)**	

KODE REK	URAIAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%	KETERANGAN
4.1.02.02.09.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	DISBUD	452.600.355,00	318.448.000,00	70,36	(134.152.355,00)	(29,64)	
		DKP	167.783.426,00	63.320.000,00	37,74	(104.463.426,00)	(62,26)	
4.1.02.02.11.	**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**		**2.232.611.802,00**	**1.504.128.100,00**	**67,37**	**(728.483.702,00)**	**(32,63)**	
4.1.02.02.11.0001.	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	DISBUNTANHOR	800.359.951,00	428.927.800,00	53,59	(371.432.151,00)	(46,41)	
4.1.02.02.11.0002.	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	DISNAKKESWAN	772.685.000,00	890.615.300,00	115,26	117.930.300,00	15,26	
4.1.02.02.11.0003.	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	DKP	659.566.851,00	184.585.000,00	27,99	(474.981.851,00)	(72,01)	
4.1.02.03.	**Retribusi Perizinan Tertentu**		**570.308.584,00**	**284.960.400,00**	**49,97**	**(285.348.184,00)**	**(50,03)**	
4.1.02.03.08.	**Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)**		**570.308.584,00**	**284.960.400,00**	**49,97**	**(285.348.184,00)**	**(50,03)**	
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	DISNAKERTRANS	570.308.584,00	284.960.400,00	49,97	(285.348.184,00)	(50,03)	
4.1.03.	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**		**129.624.977.090,00**	**122.018.602.181,00**	**94,13**	**(7.606.374.909,00)**	**(5,87)**	
4.1.03.02.	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD**		**129.624.977.090,00**	**122.018.602.181,00**	**94,13**	**(7.606.374.909,00)**	**(5,87)**	
4.1.03.02.02.	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)**		**129.624.977.090,00**	**122.018.602.181,00**	**94,13**	**(7.606.374.909,00)**	**(5,87)**	
4.1.03.02.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	BPKAD	129.604.977.090,00	122.018.602.181,00	94,15	(7.586.374.909,00)	(5,85)	
4.1.03.02.02.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	BPKAD	20.000.000,00	-	-	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.1.04.	**Lain-lain PAD yang Sah**		**105.413.158.411,00**	**100.125.157.329,71**	**94,98**	**(5.288.001.081,29)**	**(5,02)**	
4.1.04.01.	**Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**		**581.300.000,00**	**585.058.880,00**	**100,65**	**3.758.880,00**	**0,65**	
4.1.04.01.02.	**Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin**		**581.300.000,00**	**585.058.880,00**	**100,65**	**3.758.880,00**	**0,65**	
4.1.04.01.02.0062.	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	BPKAD	581.300.000,00	585.058.880,00	100,65	3.758.880,00	0,65	
4.1.04.03.	**Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**		**19.427.050.874,00**	**13.915.100.000,00**	**71,63**	**(5.511.950.874,00)**	**(28,37)**	
4.1.04.03.01.	**Hasil Sewa BMD**		**19.427.050.874,00**	**13.915.100.000,00**	**71,63**	**(5.511.950.874,00)**	**(28,37)**	
4.1.04.03.01.0001.	Hasil Sewa BMD	BPKAD	19.427.050.874,00	13.915.100.000,00	71,63	(5.511.950.874,00)	(28,37)	
4.1.04.04.	**Hasil Kerja Sama Daerah**		**1.976.420.000,00**	**1.850.191.000,00**	**93,61**	**(126.229.000,00)**	**(6,39)**	
4.1.04.04.01.	**Hasil Kerja Sama Daerah**		**1.976.420.000,00**	**1.850.191.000,00**	**93,61**	**(126.229.000,00)**	**(6,39)**	
4.1.04.04.01.0001.	Hasil Kerja Sama Daerah	DLH	1.611.134.000,00	1.340.730.000,00	83,22	(270.404.000,00)	(16,78)	
		BPSDM	365.286.000,00	509.461.000,00	139,47	144.175.000,00	39,47	

KODE REK	URAIAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%	KETERANGAN
4.1.04.05.	**Jasa Giro**		**7.500.000.000,00**	**8.490.270.476,08**	**113,20**	**990.270.476,08**	**13,20**	
4.1.04.05.01.	**Jasa Giro pada Kas Daerah**		**7.500.000.000,00**	**8.490.270.476,08**	**113,20**	**990.270.476,08**	**13,20**	
4.1.04.05.01.0001.	Jasa Giro pada Kas Daerah	BPKAD	7.500.000.000,00	8.490.270.476,08	113,20	990.270.476,08	13,20	
4.1.04.07.	**Pendapatan Bunga**		**13.020.000.000,00**	**17.333.203.315,00**	**133,13**	**4.313.203.315,00**	**33,13**	
4.1.04.07.01.	**Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah**		**13.020.000.000,00**	**17.333.203.315,00**	**133,13**	**4.313.203.315,00**	**33,13**	
4.1.04.07.01.0001.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	BPKAD	13.020.000.000,00	17.333.203.315,00	133,13	4.313.203.315,00	33,13	
4.1.04.08,	**Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**		**6.813.000.000,00**	**11.729.731.654,22**	**172,17**	**4.916.731.654,22**	**72,17**	
4.1.04.08.02.	**Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain**		**6.813.000.000,00**	**11.729.731.654,22**	**172,17**	**4.916.731.654,22**	**72,17**	
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	BPKAD	6.813.000.000,00	11.729.731.654,22	172,17	4.916.731.654,22	72,17	
4.1.04.12.	**Pendapatan Denda Pajak Daerah**		**19.738.030.000,00**	**14.460.403.950,00**	**73,26**	**(5.277.626.050,00)**	**(26,74)**	
4.1.04.12.01.	**Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**		**19.173.900.600,00**	**14.043.344.450,00**	**73,24**	**(5.130.556.150,00)**	**(26,76)**	
4.1.04.12.01.0015.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	BAPENDA	390.471.600,00	286.597.050,00	73,40	(103.874.550,00)	(26,60)	
4.1.04.12.01.0016.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	BAPENDA	26.100,00	14.150,00	54,21	(11.950,00)	(45,79)	
4.1.04.12.01.0018.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	BAPENDA	3.301.250,00	2.811.500,00	85,16	(489.750,00)	(14,84)	
4.1.04.12.01.0019.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	BAPENDA	1.634.949.450,00	1.173.809.750,00	71,79	(461.139.700,00)	(28,21)	
4.1.04.12.01.0022.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	BAPENDA	15.632.600,00	63.115.750,00	403,74	47.483.150,00	303,74	
4.1.04.12.01.0023.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	BAPENDA	8.372.980.400,00	6.025.043.700,00	71,96	(2.347.936.700,00)	(28,04)	
4.1.04.12.01.0024.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	BAPENDA	11.618.250,00	7.760.950,00	66,80	(3.857.300,00)	(33,20)	
4.1.04.12.01.0026.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	BAPENDA	67.923.800,00	52.245.150,00	76,92	(15.678.650,00)	(23,08)	
4.1.04.12.01.0027.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	BAPENDA	53.878.750,00	43.818.200,00	81,33	(10.060.550,00)	(18,67)	
4.1.04.12.01.0028.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	BAPENDA	19.166.550,00	14.574.100,00	76,04	(4.592.450,00)	(23,96)	
4.1.04.12.01.0030.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	BAPENDA	10.685.050,00	8.155.650,00	76,33	(2.529.400,00)	(23,67)	
4.1.04.12.01.0032.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	BAPENDA	8.438.750,00	4.871.300,00	57,73	(3.567.450,00)	(42,27)	
4.1.04.12.01.0034.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	BAPENDA	42.100,00	-	-	(42.100,00)	(100,00)	
4.1.04.12.01.0035.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	BAPENDA	2.126.904.400,00	1.542.365.350,00	72,52	(584.539.050,00)	(27,48)	
4.1.04.12.01.0036.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	BAPENDA	1.447.250,00	1.084.400,00	74,93	(362.850,00)	(25,07)	

KODE REK	URAIAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%	KETERANGAN
4.1.04.12.01.0038.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	BAPENDA	18.616.850,00	17.554.450,00	94,29	(1.062.400,00)	(5,71)	
4.1.04.12.01.0039.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	BAPENDA	838.211.000,00	610.159.200,00	72,79	(228.051.800,00)	(27,21)	
4.1.04.12.01.0040.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	BAPENDA	511.881.600,00	363.631.750,00	71,04	(148.249.850,00)	(28,96)	
4.1.04.12.01.0042.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	BAPENDA	7.080.600,00	8.624.900,00	121,81	1.544.300,00	21,81	
4.1.04.12.01.0043.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	BAPENDA	251.449.100,00	184.985.650,00	73,57	(66.463.450,00)	(26,43)	
4.1.04.12.01.0044.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	BAPENDA	473.357.200,00	330.049.800,00	69,73	(143.307.400,00)	(30,27)	
4.1.04.12.01.0046.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	BAPENDA	673.800,00	828.900,00	123,02	155.100,00	23,02	
4.1.04.12.01.0047.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	BAPENDA	57.294.600,00	45.251.200,00	78,98	(12.043.400,00)	(21,02)	
4.1.04.12.01.0050.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	BAPENDA	71.550,00	78.500,00	109,71	6.950,00	9,71	
4.1.04.12.01.0051.	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	BAPENDA	4.273.666.850,00	3.234.819.600,00	75,69	(1.038.847.250,00)	(24,31)	
4.1.04.12.01.0054.	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	BAPENDA	22.348.250,00	19.738.250,00	88,32	(2.610.000,00)	(11,68)	
4.1.04.12.01.0055.	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	BAPENDA	764.300,00	518.300,00	67,81	(246.000,00)	(32,19)	
4.1.04.12.01.0056.	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum	BAPENDA	60.000,00	-	-	(60.000,00)	(100,00)	
4.1.04.12.01.0058.	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	BAPENDA	918.600,00	836.950,00	91,11	(81.650,00)	(8,89)	
4.1.04.12.01.0070.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah	BAPENDA	40.000,00	-	-	(40.000,00)	(100,00)	
4.1.04.12.02.	**Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**		**564.129.400,00**	**417.059.500,00**	**73,93**	**(147.069.900,00)**	**(26,07)**	
4.1.04.12.02.0001.	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	BAPENDA	21.027.100,00	15.941.600,00	75,81	(5.085.500,00)	(24,19)	
4.1.04.12.02.0002.	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	BAPENDA	48.706.850,00	34.230.950,00	70,28	(14.475.900,00)	(29,72)	
4.1.04.12.02.0003.	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	BAPENDA	326.607.200,00	232.823.500,00	71,29	(93.783.700,00)	(28,71)	
4.1.04.12.02.0004.	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus	BAPENDA	11.374.400,00	10.047.900,00	88,34	(1.326.500,00)	(11,66)	
4.1.04.12.02.0005.	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus	BAPENDA	236.000,00	-	-	(236.000,00)	(100,00)	
4.1.04.12.02.0006.	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	BAPENDA	38.273.750,00	35.988.750,00	94,03	(2.285.000,00)	(5,97)	

KODE REK	URAIAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%	KETERANGAN
4.1.04.12.02.0007.	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	BAPENDA	23.546.900,00	17.910.250,00	76,06	(5.636.650,00)	(23,94)	
4.1.04.12.02.0008.	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	BAPENDA	34.375.900,00	30.757.000,00	89,47	(3.618.900,00)	(10,53)	
4.1.04.12.02.0009.	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	BAPENDA	2.081.900,00	1.362.400,00	65,44	(719.500,00)	(34,56)	
4.1.04.12.02.0010.	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	BAPENDA	54.405.300,00	37.575.950,00	69,07	(16.829.350,00)	(30,93)	
4.1.04.12.02.0011.	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	BAPENDA	3.494.100,00	421.200,00	12,05	(3.072.900,00)	(87,95)	
4.1.04.16.	**Pendapatan BLUD**		**36.357.357.537,00**	**31.761.198.054,41**	**87,36**	**(4.596.159.482,59)**	**(12,64)**	
4.1.04.16.02.	**Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan**		**36.357.357.537,00**	**31.761.198.054,41**	**87,36**	**(4.596.159.482,59)**	**(12,64)**	
4.1.04.16.02.0001.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	DISDIK	36.357.357.537,00	31.761.198.054,41	87,36	(4.596.159.482,59)	(12,64)	
4.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**		**3.497.500.252.930,00**	**3.525.560.271.539,00**	**100,80**	**28.060.018.609,00**	**0,80**	
4.2.01.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**		**3.466.843.452.930,00**	**3.496.315.733.539,00**	**100,85**	**29.472.280.609,00**	**0,85**	
4.2.01.01.	**Dana Perimbangan**		**3.453.594.168.930,00**	**3.483.066.449.539,00**	**100,85**	**29.472.280.609,00**	**0,85**	
4.2.01.01.01.	**Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)**		**196.062.191.930,00**	**196.436.458.000,00**	**100,19**	**374.266.070,00**	**0,19**	
4.2.01.01.01.0001.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	BPKAD	18.161.506.000,00	18.161.506.000,00	100,00	-	-	
4.2.01.01.01.0002.	DBH PPh Pasal 21	BPKAD	22.442.263.000,00	106.454.381.000,00	474,35	84.012.118.000,00	374,35	
4.2.01.01.01.0003.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	BPKAD	88.730.942.000,00	4.718.824.000,00	5,32	(84.012.118.000,00)	(94,68)	
4.2.01.01.01.0004.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	BPKAD	682.139.930,00	582.336.000,00	85,37	(99.803.930,00)	(14,63)	
4.2.01.01.01.0007.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	BPKAD	6.038.647.000,00	6.038.647.000,00	100,00	-	-	
4.2.01.01.01.0008.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	BPKAD	10.336.727.000,00	162.476.000,00	1,57	(10.174.251.000,00)	(98,43)	
4.2.01.01.01.0009.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	BPKAD	9.720.918.000,00	19.895.169.000,00	204,66	10.174.251.000,00	104,66	
4.2.01.01.01.0010.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	BPKAD	29.311.897.000,00	29.311.897.000,00	100,00	-	-	
4.2.01.01.01.0012.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	BPKAD	10.637.152.000,00	11.111.222.000,00	104,46	474.070.000,00	4,46	
4.2.01.01.02.	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)**		**2.062.837.785.000,00**	**2.146.789.947.987,00**	**104,07**	**83.952.162.987,00**	**4,07**	
4.2.01.01.02.0001.	DAU	BPKAD	1.712.076.756.000,00	1.797.505.162.000,00	104,99	85.428.406.000,00	4,99	
4.2.01.01.02.0004.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	BPKAD	37.958.832.000,00	36.482.588.987,00	96,11	(1.476.243.013,00)	(3,89)	
4.2.01.01.02.0005.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	BPKAD	238.094.588.000,00	238.094.588.000,00	100,00	-	-	
4.2.01.01.02.0006.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	BPKAD	38.286.764.000,00	38.286.764.000,00	100,00	-	-	
4.2.01.01.02.0007.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	BPKAD	36.420.845.000,00	36.420.845.000,00	100,00	-	-	

KODE REK	URAIAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%	KETERANGAN
4.2.01.01.03.	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**		**253.614.707.000,00**	**217.864.557.320,00**	**85,90**	**(35.750.149.680,00)**	**(14,10)**	
4.2.01.01.03.0004.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	BPKAD	47.947.455.000,00	46.301.382.190,00	96,57	(1.646.072.810,00)	(3,43)	
4.2.01.01.03.0005.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	BPKAD	22.186.699.000,00	21.154.123.878,00	95,35	(1.032.575.122,00)	(4,65)	
4.2.01.01.03.0010.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMK	BPKAD	98.431.152.000,00	68.930.425.979,00	70,03	(29.500.726.021,00)	(29,97)	
4.2.01.01.03.0013.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	BPKAD	7.500.000.000,00	7.073.890.400,00	94,32	(426.109.600,00)	(5,68)	
4.2.01.01.03.0032.	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	BPKAD	5.278.901.000,00	3.695.230.700,00	70,00	(1.583.670.300,00)	(30,00)	
4.2.01.01.03.0035.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	BPKAD	44.154.458.000,00	43.552.950.817,00	98,64	(601.507.183,00)	(1,36)	
4.2.01.01.03.0043.	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	BPKAD	16.436.043.000,00	15.651.462.520,00	95,23	(784.580.480,00)	(4,77)	
4.2.01.01.03.0058.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	BPKAD	11.679.999.000,00	11.505.090.836,00	98,50	(174.908.164,00)	(1,50)	
4.2.01.01.04.	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**		**941.079.485.000,00**	**921.975.486.232,00**	**97,97**	**(19.103.998.768,00)**	**(2,03)**	
4.2.01.01.04.0001.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	BPKAD	417.109.620.000,00	414.278.707.711,00	99,32	(2.830.912.289,00)	(0,68)	
4.2.01.01.04.0003.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	BPKAD	8.543.750.000,00	8.241.250.000,00	96,46	(302.500.000,00)	(3,54)	
4.2.01.01.04.0004.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	BPKAD	489.226.856.000,00	474.423.233.850,00	96,97	(14.803.622.150,00)	(3,03)	
4.2.01.01.04.0005.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	BPKAD	4.859.852.000,00	4.859.852.000,00	100,00	-	-	
4.2.01.01.04.0006.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	BPKAD	3.026.016.000,00	3.312.510.000,00	109,47	286.494.000,00	9,47	
4.2.01.01.04.0009.	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	BPKAD	2.000.000.000,00	1.984.225.868,00	99,21	(15.774.132,00)	(0,79)	
4.2.01.01.04.0010.	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	BPKAD	2.000.000.000,00	1.894.804.865,00	94,74	(105.195.135,00)	(5,26)	
4.2.01.01.04.0011.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	BPKAD	6.991.591.000,00	5.776.249.709,00	82,62	(1.215.341.291,00)	(17,38)	
4.2.01.01.04.0016.	DAK Non Fisik-PK2UKM	BPKAD	5.246.077.000,00	5.214.735.390,00	99,40	(31.341.610,00)	(0,60)	
4.2.01.01.04.0020.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	BPKAD	1.669.723.000,00	1.646.183.638,00	98,59	(23.539.362,00)	(1,41)	
4.2.01.01.04.0022.	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	BPKAD	406.000.000,00	343.733.201,00	84,66	(62.266.799,00)	(15,34)	
4.2.01.06	**Insentif Fiskal**		**13.249.284.000,00**	**13.249.284.000,00**	**100,00**	**-**	**-**	
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal		13.249.284.000,00	13.249.284.000,00	100,00	-	-	
4.2.01.06.01.0001.	Insentif Fiskal	BPKADP	13.249.284.000,00	13.249.284.000,00	100,00	-	-	
4.2.02.	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**BPKAD**	**30.656.800.000,00**	**29.244.538.000,00**	95,39	(1.412.262.000,00)	(4,61)	
4.2.02.02.	**Bantuan Keuangan**	**BPKAD**	**30.656.800.000,00**	**29.244.538.000,00**	95,39	(1.412.262.000,00)	(4,61)	
4.2.02.02.02.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	BPKAD	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	-	-	
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	BPKAD	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	-	-	
4.2.02.02.04.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	29.156.800.000,00	27.744.538.000,00	95,16	(1.412.262.000,00)	(4,84)	
4.2.02.02.04.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	29.156.800.000,00	27.744.538.000,00	95,16	(1.412.262.000,00)	(4,84)	

KODE REK	URAIAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%	KETERANGAN
4.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**		**17.024.000.000,00**	**14.294.794.000,00**	**83,97**	**(2.729.206.000,00)**	**(16,03)**	
4.3.01.	**Pendapatan Hibah**		**17.024.000.000,00**	**14.294.794.000,00**	**83,97**	**(2.729.206.000,00)**	**(16,03)**	
4.3.01.05.	**Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis**		**17.024.000.000,00**	**14.294.794.000,00**	**83,97**	**(2.729.206.000,00)**	**(16,03)**	
4.3.01.05.01.	**Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis**		**17.024.000.000,00**	**14.294.794.000,00**	**83,97**	**(2.729.206.000,00)**	**(16,03)**	
4.3.01.05.01.0001.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	BPKAD	17.024.000.000,00	14.294.794.000,00	83,97	(2.729.206.000,00)	(16,03)	

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM
KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.296.656.355.157,00	3.190.528.440.633,74	771.143.415.229,00	687.204.934.211,46	-	-	-	-
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.190.837.411.628,00	2.133.084.893.265,10	332.190.025.459,00	277.296.042.939,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000		DINAS PENDIDIKAN	2.063.492.455.383,00	2.026.413.837.327,10	319.708.812.712,00	268.690.086.927,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.646.707.629.665,00	1.608.494.529.193,00	7.947.467.180,00	7.344.101.862,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.630.351.000,00	1.301.401.472,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	701.919.400,00	663.443.200,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	50.000.200,00	39.645.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	292.106.400,00	247.613.750,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	212.898.100,00	115.982.400,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	373.426.900,00	234.717.122,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.628.841.496.485,00	1.594.001.788.790,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.625.078.939.717,00	1.590.344.112.278,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.111.783.868,00	2.109.244.312,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	134.725.000,00	89.392.200,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	203.000.000,00	150.386.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.313.047.900,00	1.308.654.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.953.722.700,00	3.744.055.579,00	1.700.000.000,00	1.687.250.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.443.742.000,00	3.338.657.550,00	1.700.000.000,00	1.687.250.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	403.405.700,00	340.392.929,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	106.575.000,00	65.005.100,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.638.353.750,00	1.625.708.839,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2.094.868.950,00	268.185.300,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	67.500.000,00	60.694.999,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.475.984.800,00	1.296.828.540,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.239.400.019,00	4.710.178.381,00	1.486.673.740,00	1.434.420.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41.625.500,00	41.357.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.954.300,00	21.661.060,00	1.240.246.240,00	1.188.550.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.090.000,00	-	246.427.500,00	245.870.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.560.207.100,00	3.262.243.900,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	234.466.700,00	227.695.700,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	76.018.400,00	75.624.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.272.038.019,00	1.081.596.721,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	270.054.800,00	109.313.355,00	3.520.814.640,00	3.031.947.200,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.121.000,00	109.313.355,00	3.073.879.000,00	2.692.000.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	2.014.500,00	-	140.749.300,00	140.700.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.882.800,00	-	250.469.200,00	144.347.200,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.500,00	-	55.717.140,00	54.900.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.348.660.790,00	2.252.082.527,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	56.049.300,00	55.534.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	844.620.000,00	776.081.687,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.447.991.490,00	1.420.466.840,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	785.590.121,00	750.000.250,00	1.239.978.800,00	1.190.484.662,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	344.592.500,00	318.168.950,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	181.052.981,00	177.338.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	259.944.640,00	254.493.300,00	1.239.978.800,00	1.190.484.662,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	413.763.700.518,00	406.528.390.640,00	311.761.345.532,00	261.345.985.065,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	220.406.504.265,00	216.859.478.198,00	149.381.185.046,00	136.600.240.338,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	-	-	6.000.000.000,00	5.673.108.180,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	3.152.590.000,00	3.059.589.189,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	2.520.192.000,00	2.340.251.271,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	-	-	803.949.000,00	750.107.999,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	-	-	3.215.400.000,00	2.295.904.689,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0013	Pembangunan Asrama Sekolah	-	-	200.000.000,00	194.423.677,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	15.160.709.440,00	12.799.329.006,00	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0016	Pembangunan Kantin Sekolah	-	-	200.170.000,00	74.385.800,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	-	15.656.133.000,00	14.945.320.377,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	2.405.867.000,00	2.320.998.510,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	-	-	121.000.000,00	114.906.973,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	-	-	323.376.000,00	317.647.200,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	-	-	720.918.000,00	682.995.560,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0025	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	-	-	357.013.000,00	315.449.400,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0026	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	-	-	947.007.000,00	911.915.810,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	417.602.000,00	392.809.630,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	-	-	1.005.419.000,00	983.245.780,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah	-	-	9.034.000.000,00	6.511.319.817,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	7.544.000.000,00	7.307.803.900,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	-	-	8.383.837.057,00	7.136.583.243,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	5.760.000.000,00	4.481.642.515,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	10.520.000.000,00	10.028.399.667,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	190.070.025.044,00	188.652.410.697,00	51.094.331.993,00	50.937.322.815,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	250.000.000,00	218.525.754,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.065.775.000,00	1.002.581.444,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	-	-	120.000.000,00	115.690.300,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	1.437.786.000,00	1.301.284.182,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	-	-	400.000.000,00	224.663.913,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	-	-	17.150.602.985,00	14.254.699.504,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	-	-	8.553.281.571,00	7.946.287.513,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	5.196.704.221,00	5.168.114.221,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	148.771.547.183,00	145.645.594.934,00	135.538.046.496,00	99.874.143.454,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	-	-	6.844.534.139,00	1.371.329.450,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	35.530.200,00	35.530.200,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	-	-	14.012.439.000,00	11.848.766.470,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	-	-	11.668.514.000,00	8.065.848.558,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	1.564.966.000,00	1.128.377.521,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	-	-	831.497.000,00	528.377.256,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	5.256.274.575,00	3.964.732.432,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0012	Pembangunan Kantin Sekolah	-	-	13.306.400,00	10.139.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	2.295.593.500,00	2.125.636.281,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	-	-	1.766.910.000,00	1.703.990.351,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	-	-	1.598.533.471,00	1.531.826.400,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	5.750.000.000,00	5.107.060.600,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	61.068.180,00	9.063.514,00	59.742.109.810,00	39.161.050.964,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3.195.867.100,00	2.909.688.316,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	250.000.000,00	237.145.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	121.224.531.783,00	120.266.157.817,00	21.073.938.001,00	20.577.215.327,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	250.000.000,00	218.043.436,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10.810.000.000,00	9.942.037.288,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	382.876.400,00	348.293.200,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	-	-	1.643.312.000,00	1.247.418.067,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0066	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula	-	-	200.000.000,00	189.712.249,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	-	-	6.094.866.000,00	5.696.269.434,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	7.230.080.120,00	6.956.398.963,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.02.0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	-	-	512.846.000,00	339.630.294,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	44.585.649.070,00	44.023.317.508,00	26.842.113.990,00	24.871.601.273,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	-	-	2.600.000.000,00	1.808.892.650,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	312.100.000,00	257.105.400,00	1.647.887.314,00	1.586.056.500,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	912.736.850,00	865.936.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	-	-	527.040.297,00	505.529.300,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	365.242.298,00	151.810.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah	-	-	1.750.648.348,00	1.627.285.600,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	-	-	558.322.698,00	530.268.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	-	-	230.072.797,00	223.721.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0031	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	-	-	204.685.580,00	198.251.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah	-	-	1.698.542.950,00	1.642.291.070,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	400.000.000,00	384.395.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	63.749.000,00	45.313.439,00	2.945.848.000,00	2.727.525.570,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	533.950.696,00	504.410.092,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	300.000.000,00	295.678.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	41.279.139.374,00	40.962.072.577,00	911.403.805,00	946.564.183,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	250.000.000,00	169.181.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.000.000.000,00	963.452.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0067	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	192.412.280,00	189.027.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	2.347.830.505,00	2.285.091.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	-	-	4.134.305.065,00	3.937.884.800,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	446.710.000,00	441.710.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	-	-	555.239.691,00	544.703.500,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	-	-	2.677.629.765,00	2.585.155.800,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	2.582.265.747,00	2.515.608.300,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.1.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2.621.125.200,00	2.445.971.155,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	2.621.125.200,00	2.445.971.155,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	304.391.950,00	294.691.950,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2.316.733.250,00	2.151.279.205,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	200.000.000,00	113.955.900,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100.000.000,00	54.300.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.000.000,00	20.425.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.1.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.000.000,00	33.875.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100.000.000,00	59.655.900,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.1.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.000.000,00	23.840.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.05.1.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.000.000,00	35.815.900,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	100.000.000,00	90.828.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100.000.000,00	90.828.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.06.1.01.0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	50.000.000,00	44.201.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.06.1.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	50.000.000,00	46.627.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001		UPTD BALTEKOMDIK	1.147.622.020,00	1.112.079.590,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.147.622.020,00	1.112.079.590,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.500.000,00	13.410.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13.500.000,00	13.410.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	782.095.651,00	760.354.321,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	101.891.800,00	101.188.200,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.790.900,00	11.808.800,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	665.412.951,00	647.357.321,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	334.175.369,00	320.509.019,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.200.000,00	112.166.150,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	221.975.369,00	208.342.869,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.851.000,00	17.806.250,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.851.000,00	17.806.250,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)	16.925.600.503,00	16.112.105.317,00	3.808.217.422,00	3.586.354.069,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.837.516.600,00	4.666.639.641,10	8.000.000,00	7.800.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.527.171.836,00	2.468.543.026,00	8.000.000,00	7.800.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.932.350,00	4.863.600,00	8.000.000,00	7.800.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.285.950.200,00	2.245.795.940,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.773.900,00	14.721.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221.515.386,00	203.162.486,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.258.034.764,00	2.147.778.185,10	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.390.000,00	6.390.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.773.500,00	15.209.980,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.227.871.264,00	2.126.178.205,10	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.310.000,00	26.318.430,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.950.000,00	14.958.430,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.360.000,00	11.360.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	12.088.083.903,00	11.445.465.675,90	3.800.217.422,00	3.578.554.069,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	7.570.817.703,00	7.089.848.387,80	2.952.137.086,00	2.754.222.560,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	7.570.817.703,00	7.089.848.387,80	2.952.137.086,00	2.754.222.560,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	4.074.533.860,00	3.917.239.015,10	782.611.076,00	762.827.300,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	4.074.533.860,00	3.917.239.015,10	782.611.076,00	762.827.300,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	442.732.340,00	438.378.273,00	65.469.260,00	61.504.209,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	442.732.340,00	438.378.273,00	65.469.260,00	61.504.209,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)	11.474.350.267,00	9.875.019.877,00	811.411.630,00	806.351.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	588.777.657,00	552.019.805,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.000.000,00	20.944.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21.000.000,00	20.944.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	353.688.200,00	334.129.262,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.812.300,00	22.781.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.757.400,00	121.515.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.520.000,00	21.518.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.598.500,00	168.315.262,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.039.457,00	173.859.743,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.358.050,00	17.855.525,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.681.407,00	117.004.218,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.050.000,00	23.086.800,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.950.000,00	15.986.800,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.100.000,00	7.100.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	10.885.572.610,00	9.323.000.072,00	811.411.630,00	806.351.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	7.467.011.672,00	6.559.816.409,00	251.238.390,00	249.240.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	7.467.011.672,00	6.559.816.409,00	251.238.390,00	249.240.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	3.082.286.038,00	2.459.215.363,00	560.173.240,00	557.111.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	3.082.286.038,00	2.459.215.363,00	560.173.240,00	557.111.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	336.274.900,00	303.968.300,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	336.274.900,00	303.968.300,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)	7.273.858.014,00	6.744.453.736,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.577.308.014,00	3.417.933.736,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.500.000,00	16.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16.500.000,00	16.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.856.583.185,00	1.704.460.450,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.579.600,00	2.578.500,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.647.389.285,00	1.515.932.650,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.996.300,00	12.476.300,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.618.000,00	173.473.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.680.174.829,00	1.673.774.678,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.700.000,00	7.540.450,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.629.474.829,00	1.629.234.228,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.050.000,00	23.198.608,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.950.000,00	16.098.608,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.100.000,00	7.100.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3.696.550.000,00	3.326.520.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.815.710.000,00	1.772.520.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1.815.710.000,00	1.772.520.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.596.790.000,00	1.290.240.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	1.596.790.000,00	1.290.240.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	284.050.000,00	263.760.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	284.050.000,00	263.760.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)	8.072.891.110,00	7.923.978.860,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.745.281.110,00	5.619.748.860,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.250.000,00	23.250.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	23.250.000,00	23.250.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.072.745.800,00	3.952.336.223,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.132.500,00	3.132.500,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.847.422.500,00	3.751.698.500,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.820.900,00	7.338.750,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209.369.900,00	190.166.473,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.627.309.410,00	1.623.161.564,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.760.000,00	25.612.154,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.592.549.410,00	1.592.549.410,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.975.900,00	21.001.073,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.950.000,00	16.011.073,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.025.900,00	4.990.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2.327.610.000,00	2.304.230.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.839.920.000,00	1.817.030.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1.839.920.000,00	1.817.030.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	143.390.000,00	143.390.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	143.390.000,00	143.390.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	344.300.000,00	343.810.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	344.300.000,00	343.810.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)	12.338.141.980,00	10.176.302.198,00	1.504.381.755,00	1.452.339.450,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.024.588.671,00	1.886.988.930,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.750.000,00	15.750.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15.750.000,00	15.750.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.546.977.850,00	1.443.712.700,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.200.350,00	3.191.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.210.789.500,00	1.121.958.200,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.765.000,00	5.850.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	326.223.000,00	312.713.500,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	439.800.821,00	406.417.880,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.835.000,00	17.718.450,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	375.965.821,00	351.699.430,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.060.000,00	21.108.350,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.950.000,00	16.118.350,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.110.000,00	4.990.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	10.313.553.309,00	8.289.313.268,00	1.504.381.755,00	1.452.339.450,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	6.259.668.774,00	4.804.905.249,00	653.165.580,00	628.069.950,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	6.259.668.774,00	4.804.905.249,00	653.165.580,00	628.069.950,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	3.507.808.845,00	2.987.192.619,00	819.046.015,00	792.139.500,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	3.507.808.845,00	2.987.192.619,00	819.046.015,00	792.139.500,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	546.075.690,00	497.215.400,00	32.170.160,00	32.130.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	546.075.690,00	497.215.400,00	32.170.160,00	32.130.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0007		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)	16.949.197.765,00	15.209.135.798,00	1.986.048.550,00	1.958.054.209,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0007	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.328.042.252,00	2.713.186.930,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0007	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0007	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0007	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.429.928.079,00	1.848.030.325,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0007	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.259.500,00	27.232.500,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0007	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.103.834.826,00	1.545.917.500,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0007	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.247.000,00	6.967.500,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0007	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	291.586.753,00	267.912.825,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0007	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	850.104.173,00	825.213.611,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0007	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.020.000,00	7.020.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0007	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.215.062,00	12.549.500,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0007	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0007	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	788.869.111,00	770.644.111,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0007	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.510.000,00	17.442.994,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0007	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.950.000,00	16.022.994,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0007	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.560.000,00	1.420.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0007	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	13.621.155.513,00	12.495.948.868,00	1.986.048.550,00	1.958.054.209,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0007	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	8.556.958.764,00	7.706.936.188,00	1.024.361.190,00	1.010.963.829,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0007	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	8.556.958.764,00	7.706.936.188,00	1.024.361.190,00	1.010.963.829,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0007	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	4.757.517.749,00	4.493.233.680,00	935.927.360,00	921.390.380,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0007	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	4.757.517.749,00	4.493.233.680,00	935.927.360,00	921.390.380,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0007	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	306.679.000,00	295.779.000,00	25.760.000,00	25.700.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0007	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	306.679.000,00	295.779.000,00	25.760.000,00	25.700.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0008		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)	13.433.937.794,00	12.922.715.056,00	12.988.000,00	12.988.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0008	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.892.988.886,00	1.873.995.056,00	12.988.000,00	12.988.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0008	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.750.000,00	12.750.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0008	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12.750.000,00	12.750.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0008	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.437.499.390,00	1.422.849.900,00	12.988.000,00	12.988.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0008	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.162.500,00	3.162.500,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0008	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.137.271.340,00	1.122.649.400,00	12.988.000,00	12.988.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0008	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.329.000,00	19.329.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0008	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	277.736.550,00	277.709.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0008	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	418.650.196,00	415.177.506,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0008	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.030.000,00	1.030.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0008	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.660.000,00	14.187.310,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0008	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	399.960.196,00	399.960.196,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0008	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.089.300,00	23.217.650,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0008	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.950.000,00	16.078.350,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0008	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.139.300,00	7.139.300,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0008	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	11.540.948.908,00	11.048.720.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0008	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	7.633.148.908,00	7.269.650.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0008	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	7.633.148.908,00	7.269.650.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0008	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	3.509.870.000,00	3.381.140.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0008	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	3.509.870.000,00	3.381.140.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0008	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	397.930.000,00	397.930.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0008	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	397.930.000,00	397.930.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0009		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)	7.122.616.714,00	6.768.139.964,00	97.397.390,00	96.125.090,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0009	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	621.933.730,00	552.269.964,00	97.397.390,00	96.125.090,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0009	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.050.000,00	7.050.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0009	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	7.050.000,00	7.050.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0009	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	365.440.154,00	298.711.754,00	97.397.390,00	96.125.090,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0009	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.993.500,00	2.983.500,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0009	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.659.500,00	49.502.100,00	97.397.390,00	96.125.090,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0009	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.605.000,00	9.605.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0009	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	303.182.154,00	236.621.154,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0009	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.383.576,00	242.448.210,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0009	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0009	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.505.200,00	41.569.834,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0009	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0009	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	161.878.376,00	161.878.376,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0009	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.060.000,00	4.060.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0009	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.060.000,00	4.060.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0009	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	6.500.682.984,00	6.215.870.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0009	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	4.682.021.646,00	4.628.280.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0009	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	4.682.021.646,00	4.628.280.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0009	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.818.661.338,00	1.587.590.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0009	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	1.818.661.338,00	1.587.590.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0016		SMKN 1 PARIAMAN	125.000.000,00	12.147.925,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0016	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	125.000.000,00	12.147.925,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0016	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	125.000.000,00	12.147.925,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0016	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	125.000.000,00	12.147.925,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0017		SMKN 2 PARIAMAN	233.250.000,00	238.445.422,10	19.000.000,00	3.900.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0017	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	233.250.000,00	238.445.422,10	19.000.000,00	3.900.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0017	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	233.250.000,00	238.445.422,10	19.000.000,00	3.900.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0017	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	233.250.000,00	238.445.422,10	19.000.000,00	3.900.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0018		SMKN 3 PARIAMAN	200.000.000,00	105.780.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0018	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	200.000.000,00	105.780.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0018	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	200.000.000,00	105.780.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0018	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	200.000.000,00	105.780.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0035		SMKN 1 BUKITTINGGI	1.858.676.000,00	2.003.606.139,00	550.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0035	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.858.676.000,00	2.003.606.139,00	550.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0035	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.858.676.000,00	2.003.606.139,00	550.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0035	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.858.676.000,00	2.003.606.139,00	550.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0036		SMKN 2 BUKITTINGGI	1.597.033.979,00	835.915.928,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0036	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.597.033.979,00	835.915.928,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0036	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.597.033.979,00	835.915.928,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0036	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.597.033.979,00	835.915.928,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0056		SMKN 1 PADANG	2.435.221.045,00	1.339.008.198,00	60.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0056	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.435.221.045,00	1.339.008.198,00	60.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0056	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.435.221.045,00	1.339.008.198,00	60.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0056	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.435.221.045,00	1.339.008.198,00	60.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0057		SMKN 2 PADANG	750.670.501,00	678.628.028,00	57.500.000,00	71.830.464,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0057	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	750.670.501,00	678.628.028,00	57.500.000,00	71.830.464,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0057	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	750.670.501,00	678.628.028,00	57.500.000,00	71.830.464,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0057	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	750.670.501,00	678.628.028,00	57.500.000,00	71.830.464,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0059		SMKN 4 PADANG	930.896.365,00	688.128.084,00	23.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0059	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	930.896.365,00	688.128.084,00	23.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0059	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	930.896.365,00	688.128.084,00	23.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0059	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	930.896.365,00	688.128.084,00	23.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0061		SMKN 6 PADANG	1.099.281.410,00	940.817.545,00	159.928.000,00	123.032.730,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0061	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.099.281.410,00	940.817.545,00	159.928.000,00	123.032.730,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0061	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.099.281.410,00	940.817.545,00	159.928.000,00	123.032.730,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0061	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.099.281.410,00	940.817.545,00	159.928.000,00	123.032.730,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0063		SMKN 8 PADANG	1.537.500.000,00	839.348.400,00	260.700.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0063	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.537.500.000,00	839.348.400,00	260.700.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0063	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.537.500.000,00	839.348.400,00	260.700.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0063	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.537.500.000,00	839.348.400,00	260.700.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0064		SMKN 9 PADANG	2.281.228.049,00	1.294.703.722,00	160.000.000,00	1.970.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0064	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.281.228.049,00	1.294.703.722,00	160.000.000,00	1.970.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0064	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.281.228.049,00	1.294.703.722,00	160.000.000,00	1.970.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0064	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.281.228.049,00	1.294.703.722,00	160.000.000,00	1.970.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0066		SMK PP NEGERI PADANG	238.680.000,00	580.885.469,00	150.000.000,00	8.087.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0066	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	238.680.000,00	580.885.469,00	150.000.000,00	8.087.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0066	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	238.680.000,00	580.885.469,00	150.000.000,00	8.087.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0066	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	238.680.000,00	580.885.469,00	150.000.000,00	8.087.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0081		SMKN 1 PAYAKUMBUH	2.482.260.000,00	2.957.350.391,00	240.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0081	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.482.260.000,00	2.957.350.391,00	240.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0081	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.482.260.000,00	2.957.350.391,00	240.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0081	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.482.260.000,00	2.957.350.391,00	240.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0082		SMKN 2 PAYAKUMBUH	3.019.910.000,00	3.518.557.151,00	800.690.000,00	95.295.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0082	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.019.910.000,00	3.518.557.151,00	800.690.000,00	95.295.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0082	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.019.910.000,00	3.518.557.151,00	800.690.000,00	95.295.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0082	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.019.910.000,00	3.518.557.151,00	800.690.000,00	95.295.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0090		SMKN 2 SAWAHLUNTO	190.805.000,00	-	150.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0090	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	190.805.000,00	-	150.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0090	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	190.805.000,00	-	150.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0090	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	190.805.000,00	-	150.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0114		SMKN 1 AMPEK ANGKEK	1.424.203.978,00	1.548.462.150,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0114	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.424.203.978,00	1.548.462.150,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0114	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.424.203.978,00	1.548.462.150,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0114	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.424.203.978,00	1.548.462.150,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0123		SMKN 2 LUBUK BASUNG	2.342.230.000,00	2.036.098.168,00	454.890.000,00	297.249.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0123	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.342.230.000,00	2.036.098.168,00	454.890.000,00	297.249.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0123	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.342.230.000,00	2.036.098.168,00	454.890.000,00	297.249.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0123	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.342.230.000,00	2.036.098.168,00	454.890.000,00	297.249.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0142		SMKN 1 KOTO BARU	2.013.786.000,00	1.727.015.740,00	65.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0142	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.013.786.000,00	1.727.015.740,00	65.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0142	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.013.786.000,00	1.727.015.740,00	65.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0142	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.013.786.000,00	1.727.015.740,00	65.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0147		SMKN 1 SUNGAI RUMBAI	1.123.500.000,00	886.343.200,00	103.860.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0147	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.123.500.000,00	886.343.200,00	103.860.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0147	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.123.500.000,00	886.343.200,00	103.860.000,00	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0147	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.123.500.000,00	886.343.200,00	103.860.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0167		SMKN 1 GUGUK	1.930.970.000,00	1.929.011.406,00	32.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0167	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.930.970.000,00	1.929.011.406,00	32.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0167	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.930.970.000,00	1.929.011.406,00	32.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0167	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.930.970.000,00	1.929.011.406,00	32.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0170		SMKN 1 SULIKI	60.300.000,00	208.814.000,00	139.700.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0170	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	60.300.000,00	208.814.000,00	139.700.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0170	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	60.300.000,00	208.814.000,00	139.700.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0170	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	60.300.000,00	208.814.000,00	139.700.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0196		SMKN 1 SINTUK TOBOH GADANG	1.257.496.000,00	962.872.464,00	38.900.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0196	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.257.496.000,00	962.872.464,00	38.900.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0196	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.257.496.000,00	962.872.464,00	38.900.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0196	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.257.496.000,00	962.872.464,00	38.900.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0220		SMKN 1 LEMBAH GUMANTI	770.477.855,00	529.757.140,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0220	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	770.477.855,00	529.757.140,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0220	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	770.477.855,00	529.757.140,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0220	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	770.477.855,00	529.757.140,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0296		SMKN 1 LUBUK SIKAPING	62.000.000,00	413.201.101,00	33.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0296	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	62.000.000,00	413.201.101,00	33.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0296	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	62.000.000,00	413.201.101,00	33.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0296	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	62.000.000,00	413.201.101,00	33.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0324		SMKN 1 PASAMAN	689.500.000,00	1.228.873.100,00	252.500.000,00	33.600.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0324	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	689.500.000,00	1.228.873.100,00	252.500.000,00	33.600.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0324	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	689.500.000,00	1.228.873.100,00	252.500.000,00	33.600.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0324	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	689.500.000,00	1.228.873.100,00	252.500.000,00	33.600.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0339		SMKN 1 SIJUNJUNG	681.873.896,00	764.457.200,00	481.800.000,00	49.780.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0339	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	681.873.896,00	764.457.200,00	481.800.000,00	49.780.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0339	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	681.873.896,00	764.457.200,00	481.800.000,00	49.780.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0339	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	681.873.896,00	764.457.200,00	481.800.000,00	49.780.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0376		SMKN 1 PAINAN	1.165.290.000,00	277.909.910,00	13.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0376	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.165.290.000,00	277.909.910,00	13.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0376	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.165.290.000,00	277.909.910,00	13.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0376	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.165.290.000,00	277.909.910,00	13.000.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0379		SMKN 1 RANAH PESISIR	104.700.000,00	21.150.000,00	15.300.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0379	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	104.700.000,00	21.150.000,00	15.300.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0379	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	104.700.000,00	21.150.000,00	15.300.000,00	-	-	-	-	-
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0379	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	104.700.000,00	21.150.000,00	15.300.000,00	-	-	-	-	-
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	206.803.917.348,00	195.253.896.634,00	3.817.473.155,00	3.220.525.184,00	-	-	-	-
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	206.803.917.348,00	195.253.896.634,00	3.817.473.155,00	3.220.525.184,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		DINAS KESEHATAN	185.215.526.006,00	174.430.712.261,00	24.200.000,00	23.825.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	66.678.297.454,00	61.367.000.485,00	24.200.000,00	23.825.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.661.914,00	86.421.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	82.891.421,00	75.592.700,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.770.493,00	10.828.300,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	62.653.318.640,00	57.700.196.276,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	61.920.557.840,00	57.020.398.626,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	685.680.200,00	651.674.550,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	47.080.600,00	28.123.100,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	159.530.000,00	39.001.200,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	89.530.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	70.000.000,00	33.001.200,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	157.500.000,00	151.178.160,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	157.500.000,00	151.178.160,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	672.844.300,00	608.883.684,00	20.200.000,00	19.825.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.023.600,00	29.874.100,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	20.200.000,00	19.825.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	148.996.700,00	118.032.200,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.000.000,00	29.758.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	451.824.000,00	431.218.884,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.500.248.355,00	2.378.949.229,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.000.000,00	20.990.250,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	849.999.759,00	792.129.028,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.629.248.596,00	1.565.829.951,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	439.194.245,00	402.370.936,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	303.000.000,00	288.888.936,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.150.000,00	49.350.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.640.347,00	14.247.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.403.898,00	49.885.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	116.298.376.052,00	112.410.904.516,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	5.707.206.900,00	5.535.789.812,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	20.000.000,00	18.291.300,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	129.506.448,00	24.566.114,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	5.557.700.452,00	5.492.932.398,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	110.476.169.152,00	106.851.539.404,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	180.000.000,00	132.501.731,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	118.500.000,00	68.857.800,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	916.962.000,00	722.513.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	50.000.000,00	37.496.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	496.811.682,00	220.372.121,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10.000.000,00	2.745.300,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	150.000.000,00	49.525.450,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	35.000.000,00	16.665.900,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	182.972.450,00	56.031.600,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	250.000.000,00	152.509.650,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	147.000.000,00	137.840.056,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	104.703.870.020,00	102.676.926.110,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	332.195.600,00	47.367.158,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	2.827.857.400,00	2.485.299.428,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	60.000.000,00	34.928.200,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	15.000.000,00	9.958.900,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	15.000.000,00	5.350.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	15.000.000,00	5.350.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	100.000.000,00	18.225.300,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	50.000.000,00	12.766.700,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	50.000.000,00	5.458.600,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	436.272.500,00	110.568.070,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	84.444.000,00	36.620.970,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	84.444.000,00	36.620.970,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	351.828.500,00	73.947.100,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	227.402.300,00	53.219.900,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	124.426.200,00	20.727.200,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	80.000.000,00	32.795.590,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	40.000.000,00	19.511.640,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	40.000.000,00	19.511.640,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	40.000.000,00	13.283.950,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	40.000.000,00	13.283.950,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.722.580.000,00	509.443.600,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.372.580.000,00	430.857.100,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.372.580.000,00	430.857.100,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	300.000.000,00	73.674.400,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	300.000.000,00	73.674.400,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	50.000.000,00	4.912.100,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	50.000.000,00	4.912.100,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	5.617.836.582,00	5.614.293.995,00	751.080.000,00	372.370.945,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.615.536.582,00	5.614.293.995,00	750.000.000,00	372.370.945,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	5.614.536.582,00	5.614.293.995,00	750.000.000,00	372.370.945,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.614.536.582,00	5.614.293.995,00	750.000.000,00	372.370.945,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.300.000,00	-	1.080.000,00	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.300.000,00	-	1.080.000,00	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	-	-	1.080.000,00	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	1.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		UPTD BKOM & Pelkes	1.273.337.608,00	1.184.291.269,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.273.337.608,00	1.184.291.269,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.516.000,00	27.453.400,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.516.000,00	27.453.400,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.215.621.608,00	1.133.705.649,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	405.032.064,00	395.771.484,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	810.589.544,00	737.934.165,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.200.000,00	23.132.220,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.200.000,00	23.132.220,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat	4.505.868.119,00	4.498.846.959,00	815.115.760,00	762.548.840,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.465.069.115,00	4.458.204.877,00	181.181.350,00	148.927.840,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.940.000,00	3.808.900,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.940.000,00	3.808.900,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	4.460.129.115,00	4.454.395.977,00	181.181.350,00	148.927.840,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.460.129.115,00	4.454.395.977,00	181.181.350,00	148.927.840,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	40.799.004,00	40.642.082,00	633.934.410,00	613.621.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	40.799.004,00	40.642.082,00	633.934.410,00	613.621.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	542.190,00	542.000,00	633.934.410,00	613.621.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	40.256.814,00	40.100.082,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat	10.191.349.033,00	9.525.752.150,00	2.227.077.395,00	2.061.780.399,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.652.107.755,00	7.505.385.974,00	550.000.000,00	529.645.099,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.700.000,00	44.865.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.700.000,00	44.865.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	680.455.540,00	678.061.457,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.985.500,00	53.975.227,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	624.470.040,00	624.086.230,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.300.000,00	38.609.522,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.300.000,00	38.609.522,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	6.866.652.215,00	6.743.849.995,00	550.000.000,00	529.645.099,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6.866.652.215,00	6.743.849.995,00	550.000.000,00	529.645.099,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.539.241.278,00	2.020.366.176,00	1.677.077.395,00	1.532.135.300,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	958.387.938,00	689.531.111,00	1.677.077.395,00	1.532.135.300,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	-	-	1.677.077.395,00	1.532.135.300,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	958.387.938,00	689.531.111,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.580.853.340,00	1.330.835.065,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.580.853.340,00	1.330.835.065,00	-	-	-	-	-	-
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	243.139.820.482,00	228.140.740.611,00	34.245.634.716,00	29.465.927.562,00	-	-	-	-
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	243.139.820.482,00	228.140.740.611,00	34.245.634.716,00	29.465.927.562,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	243.139.820.482,00	228.140.740.611,00	34.245.634.716,00	29.465.927.562,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	243.139.820.482,00	228.140.740.611,00	16.800.000.000,00	12.528.647.772,00	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90.132.279.340,00	85.669.253.332,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	90.132.279.340,00	85.669.253.332,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	153.007.541.142,00	142.471.487.279,00	16.800.000.000,00	12.528.647.772,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	153.007.541.142,00	142.471.487.279,00	16.800.000.000,00	12.528.647.772,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	17.445.634.716,00	16.937.279.790,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	17.445.634.716,00	16.937.279.790,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	-	-	14.416.318.390,00	14.152.116.022,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	-	-	3.029.316.326,00	2.785.163.768,00	-	-	-	-
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	65.671.863.363,00	63.449.938.645,00	3.190.602.000,00	2.965.544.486,00	-	-	-	-
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	65.671.863.363,00	63.449.938.645,00	3.190.602.000,00	2.965.544.486,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000		RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	65.671.863.363,00	63.449.938.645,00	3.190.602.000,00	2.965.544.486,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	65.671.863.363,00	63.449.938.645,00	1.535.943.000,00	1.465.425.607,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.035.713.284,00	35.147.501.063,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37.035.713.284,00	35.147.501.063,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	28.636.150.079,00	28.302.437.582,00	1.535.943.000,00	1.465.425.607,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	28.636.150.079,00	28.302.437.582,00	1.535.943.000,00	1.465.425.607,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.654.659.000,00	1.500.118.879,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.654.659.000,00	1.500.118.879,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.03.0000	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	-	-	1.654.659.000,00	1.500.118.879,00	-	-	-	-
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	152.213.492.141,00	148.255.654.703,00	14.062.770.493,00	12.528.285.303,00	-	-	-	-
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	152.213.492.141,00	148.255.654.703,00	14.062.770.493,00	12.528.285.303,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.04.0000		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	152.213.492.141,00	148.255.654.703,00	14.062.770.493,00	12.528.285.303,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.04.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	152.213.294.925,00	148.255.654.703,00	9.669.482.000,00	8.278.722.877,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.04.0000	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	61.389.526.230,00	58.089.911.516,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.04.0000	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	61.389.526.230,00	58.089.911.516,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.04.0000	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	90.823.768.695,00	90.165.743.187,00	9.669.482.000,00	8.278.722.877,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.04.0000	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	90.823.768.695,00	90.165.743.187,00	9.669.482.000,00	8.278.722.877,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.04.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	197.216,00	-	4.393.288.493,00	4.249.562.426,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.04.0000	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	197.216,00	-	4.393.288.493,00	4.249.562.426,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.04.0000	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	1,00	-	3.066.088.493,00	2.997.139.840,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.04.0000	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	197.215,00	-	1.327.200.000,00	1.252.422.586,00	-	-	-	-
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	118.379.982.881,00	115.098.628.420,64	12.608.782.435,00	8.246.131.422,00	-	-	-	-
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	118.379.982.881,00	115.098.628.420,64	12.608.782.435,00	8.246.131.422,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.05.0000		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	118.379.982.881,00	115.098.628.420,64	12.608.782.435,00	8.246.131.422,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.05.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	118.379.982.881,00	115.098.628.420,64	10.500.000.000,00	6.200.383.965,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.05.0000	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.745.183.867,00	42.883.280.118,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.05.0000	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44.745.183.867,00	42.883.280.118,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.05.0000	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	73.634.799.014,00	72.215.348.302,64	10.500.000.000,00	6.200.383.965,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.05.0000	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	73.634.799.014,00	72.215.348.302,64	10.500.000.000,00	6.200.383.965,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.05.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	2.108.782.435,00	2.045.747.457,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.05.0000	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	2.108.782.435,00	2.045.747.457,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.05.0000	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	-	-	1.608.783.146,00	1.551.201.527,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.05.0000	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	-	-	499.999.289,00	494.545.930,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.0.00.0.00.01	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	58.721.218.752,00	55.729.301.657,00	203.594.519.220,00	196.005.250.742,46	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51.206.862.411,00	48.933.270.653,00	3.752.619.852,00	3.675.783.556,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	430.899.500,00	403.170.345,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	174.300.000,00	169.987.334,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	61.599.500,00	57.033.390,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	195.000.000,00	176.149.621,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.321.726.497,00	35.829.642.464,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35.499.745.710,00	34.022.088.054,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.757.280.787,00	1.744.344.900,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	64.700.000,00	63.209.510,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	250.000.000,00	211.398.930,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	250.000.000,00	211.398.930,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	328.456.000,00	310.721.499,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	230.000.000,00	229.789.500,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	98.456.000,00	80.931.999,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.198.897.840,00	2.153.220.089,00	9.623.922,00	9.623.922,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55.000.000,00	54.930.600,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	190.000.000,00	189.846.601,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	130.000.000,00	129.823.363,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	45.000.000,00	32.884.000,00	9.623.922,00	9.623.922,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.633.064.000,00	1.600.210.950,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	39.833.840,00	39.662.575,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	106.000.000,00	105.862.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82.071.226,00	63.207.780,00	2.949.275.930,00	2.874.557.634,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.111.226,00	59.787.780,00	1.814.950.130,00	1.809.200.456,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	21.960.000,00	3.420.000,00	1.134.325.800,00	1.065.357.178,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.684.547.855,00	7.131.178.669,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000,00	10.813.650,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.469.424.585,00	1.936.119.078,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.202.123.270,00	5.184.245.941,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.910.263.493,00	2.830.730.877,00	793.720.000,00	791.602.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.049.830.000,00	995.852.453,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	609.868.493,00	599.662.458,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.250.565.000,00	1.235.215.966,00	793.720.000,00	791.602.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	987.856.500,00	931.992.462,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	987.856.500,00	931.992.462,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.1.01.0013	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	59.796.500,00	56.083.659,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	339.918.000,00	314.651.707,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	393.920.000,00	378.401.938,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.1.01.0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	194.222.000,00	182.855.158,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	572.791.700,00	571.933.991,00	5.030.504.161,00	3.405.050.798,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	572.791.700,00	571.933.991,00	5.030.504.161,00	3.405.050.798,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.1.01.0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA	55.740.000,00	55.587.600,00	5.030.504.161,00	3.405.050.798,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	517.051.700,00	516.346.391,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	612.655.148,00	599.176.777,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	612.655.148,00	599.176.777,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.1.01.0010	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	306.612.148,00	298.032.873,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	306.043.000,00	301.143.904,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-	489.957.560,00	489.934.210,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	-	-	489.957.560,00	489.934.210,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.1.01.0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	-	-	489.957.560,00	489.934.210,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.996.064.731,00	1.656.424.154,00	21.474.260.460,00	20.433.546.700,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.996.064.731,00	1.656.424.154,00	21.474.260.460,00	20.433.546.700,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	131.229.500,00	104.196.130,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.1.01.0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	42.710.000,00	36.457.850,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-	-	4.477.360.383,00	3.446.972.333,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.822.125.231,00	1.515.770.174,00	16.996.900.077,00	16.986.574.367,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	198.146.291,00	182.544.652,00	1.982.179.200,00	661.557.403,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	198.146.291,00	182.544.652,00	1.982.179.200,00	661.557.403,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	-	-	337.179.200,00	217.958.500,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.515.000.000,00	314.189.700,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	-	-	130.000.000,00	129.409.203,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.1.01.0011	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	198.146.291,00	182.544.652,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.684.056.750,00	1.498.554.574,00	170.864.997.987,00	167.339.378.075,46	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.684.056.750,00	1.498.554.574,00	170.864.997.987,00	167.339.378.075,46	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	723.372.000,00	696.178.020,00	5.940.000,00	5.934.060,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	-	-	61.260.386.384,00	59.119.100.581,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	272.300.000,00	144.764.050,00	54.245.220.100,00	53.950.529.297,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan	-	-	1.553.224.562,00	1.503.686.592,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0035	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	-	-	1.400.000.000,00	1.353.117.500,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0036	Penggantian Jembatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	-	-	17.794.573.000,00	16.966.212.011,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	88.384.750,00	83.360.000,00	2.743.971.628,00	2.706.502.417,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan	-	-	31.861.682.313,00	31.734.295.617,46	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	600.000.000,00	574.252.504,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.462.785.221,00	1.355.404.394,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	130.069.700,00	123.236.648,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	130.069.700,00	123.236.648,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	618.369.521,00	578.235.827,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.1.02.0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	181.760.000,00	167.428.232,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	100.304.300,00	93.510.585,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	176.807.000,00	164.398.419,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.1.02.0012	Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	159.498.221,00	152.898.591,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	236.396.000,00	225.730.453,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	152.076.000,00	147.301.813,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	84.320.000,00	78.428.640,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	477.950.000,00	428.201.466,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.1.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	91.820.000,00	79.670.372,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.1.04.0005	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	138.560.000,00	126.394.377,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.1.04.0008	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	142.280.000,00	126.553.632,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.1.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	105.290.000,00	95.583.085,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0001	1.03.0.00.0.00.01	UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung	336.617.700,00	325.874.241,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	153.591.900,00	149.027.441,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	153.591.900,00	149.027.441,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	153.591.900,00	149.027.441,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	183.025.800,00	176.846.800,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	183.025.800,00	176.846.800,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.1.01.0012	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	183.025.800,00	176.846.800,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0002	1.03.0.00.0.00.01	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	783.565.000,00	779.357.998,00	417.792.000,00	417.397.250,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	783.565.000,00	779.357.998,00	417.792.000,00	417.397.250,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	783.565.000,00	779.357.998,00	417.792.000,00	417.397.250,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	783.565.000,00	779.357.998,00	417.792.000,00	417.397.250,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0003	1.03.0.00.0.00.01	UPTD Workshop dan Peralatan	2.781.460.650,00	2.775.748.506,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.282.507.000,00	1.281.867.315,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	213.441.671,00	213.425.271,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	213.441.671,00	213.425.271,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.069.065.329,00	1.068.442.044,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.069.065.329,00	1.068.442.044,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.498.953.650,00	1.493.881.191,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.498.953.650,00	1.493.881.191,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	577.010.000,00	574.579.138,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	921.943.650,00	919.302.053,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0004	1.03.0.00.0.00.01	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	7.043.989.392,00	7.016.313.406,00	555.308.280,00	554.791.280,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	444.228.553,00	419.629.693,00	355.308.280,00	355.124.280,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.800.000,00	111.270.600,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.600.000,00	15.533.400,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.200.000,00	95.737.200,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	325.308.280,00	325.308.280,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	68.220.000,00	68.220.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	109.200.000,00	109.200.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	147.888.280,00	147.888.280,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	221.098.553,00	200.694.693,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.408.000,00	10.814.296,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	208.690.553,00	189.880.397,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.330.000,00	107.664.400,00	30.000.000,00	29.816.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.330.000,00	107.664.400,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	30.000.000,00	29.816.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	6.599.760.839,00	6.596.683.713,00	200.000.000,00	199.667.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	6.599.760.839,00	6.596.683.713,00	200.000.000,00	199.667.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	320.600.000,00	319.968.425,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	6.279.160.839,00	6.276.715.288,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	-	-	200.000.000,00	199.667.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0005	1.03.0.00.0.00.01	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	6.786.402.000,00	6.748.059.730,00	2.032.457.552,00	1.092.357.671,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	558.032.131,00	528.867.788,00	435.270.052,00	419.246.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.803.075,00	112.904.600,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.225.300,00	25.114.600,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.577.775,00	87.790.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	245.137.252,00	229.448.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	71.200.000,00	68.220.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	60.791.200,00	58.328.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	113.146.052,00	102.900.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277.755.056,00	271.489.408,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.990.000,00	17.957.999,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	258.765.056,00	253.531.409,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.474.000,00	144.473.780,00	190.132.800,00	189.798.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.050.000,00	78.458.780,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	72.424.000,00	66.015.000,00	190.132.800,00	189.798.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	6.228.369.869,00	6.219.191.942,00	1.597.187.500,00	673.111.671,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	6.228.369.869,00	6.219.191.942,00	1.597.187.500,00	673.111.671,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	199.888.861,00	196.570.730,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	66.731.008,00	66.678.331,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.961.750.000,00	5.955.942.881,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	-	-	1.597.187.500,00	673.111.671,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0006	1.03.0.00.0.00.01	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	5.258.521.752,00	5.251.332.667,00	579.904.300,00	574.851.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	397.417.213,00	391.026.321,00	179.904.300,00	176.275.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.773.951,00	123.519.950,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.260.500,00	13.238.200,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.513.451,00	110.281.750,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	139.904.300,00	137.150.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	35.600.000,00	34.600.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	52.553.800,00	51.350.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	51.750.500,00	51.200.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.169.262,00	199.561.246,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000,00	14.585.544,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	185.169.262,00	184.975.702,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.474.000,00	67.945.125,00	40.000.000,00	39.125.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.474.000,00	67.945.125,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	40.000.000,00	39.125.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	4.861.104.539,00	4.860.306.346,00	400.000.000,00	398.576.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	4.861.104.539,00	4.860.306.346,00	400.000.000,00	398.576.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	49.941.890,00	49.903.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	68.692.444,00	68.305.420,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.742.470.205,00	4.742.097.926,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	-	-	400.000.000,00	398.576.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0007	1.03.0.00.0.00.01	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV	6.068.736.552,00	6.030.000.107,00	276.645.500,00	274.086.850,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	489.327.622,00	469.951.852,00	137.989.500,00	136.334.850,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.100.702,00	136.194.948,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	14.824.020,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.100.702,00	121.370.928,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	137.989.500,00	136.334.850,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	102.330.000,00	102.330.000,00	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	35.659.500,00	34.004.850,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236.920.320,00	218.610.613,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.520.000,00	5.217.660,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	231.400.320,00	213.392.953,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.306.600,00	115.146.291,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.206.600,00	108.161.291,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.100.000,00	6.985.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	5.579.408.930,00	5.560.048.255,00	138.656.000,00	137.752.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	5.579.408.930,00	5.560.048.255,00	138.656.000,00	137.752.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	160.800.000,00	160.015.396,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.418.608.930,00	5.400.032.859,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	-	-	138.656.000,00	137.752.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0008	1.03.0.00.0.00.01	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V	5.005.380.352,00	5.000.361.467,00	1.012.125.700,00	703.702.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	539.394.318,00	537.050.321,00	249.625.700,00	129.935.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	116.564.546,00	116.343.625,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.000.000,00	12.958.350,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.564.546,00	103.385.275,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	133.625.700,00	129.935.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	67.819.000,00	65.283.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	31.430.000,00	30.775.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	34.376.700,00	33.877.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.179.222,00	205.405.862,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.000.000,00	20.430.160,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	185.179.222,00	184.975.702,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.650.550,00	215.300.834,00	116.000.000,00	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	181.650.550,00	181.632.434,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.000.000,00	33.668.400,00	116.000.000,00	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	4.465.986.034,00	4.463.311.146,00	762.500.000,00	573.767.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	4.465.986.034,00	4.463.311.146,00	762.500.000,00	573.767.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	93.072.049,00	92.994.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	68.696.428,00	68.305.420,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.281.717.557,00	4.279.621.976,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	22.500.000,00	22.389.750,00	762.500.000,00	573.767.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0009	1.03.0.00.0.00.01	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI	6.362.172.262,00	6.353.951.258,00	132.333.790,00	132.190.790,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	392.856.790,00	390.564.013,00	132.333.790,00	132.190.790,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.620.000,00	83.733.100,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	14.987.300,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.620.000,00	68.745.800,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	102.333.790,00	102.333.790,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	34.110.000,00	34.110.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	30.500.000,00	30.500.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	37.723.790,00	37.723.790,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.106.790,00	201.728.963,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.963.030,00	12.662.431,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.143.760,00	189.066.532,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.130.000,00	105.101.950,00	30.000.000,00	29.857.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.130.000,00	105.101.950,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	30.000.000,00	29.857.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	5.969.315.472,00	5.963.387.245,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	5.969.315.472,00	5.963.387.245,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	317.035.350,00	316.775.090,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	137.737.604,00	137.604.773,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.514.542.518,00	5.509.007.382,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.0.00.0.00.02	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	28.737.381.221,00	26.569.721.147,00	59.141.967.576,00	51.864.935.064,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.225.081.931,00	21.615.672.436,00	201.609.040,00	188.168.545,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	663.325.000,00	604.163.795,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	237.000.000,00	223.117.697,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	426.325.000,00	381.046.098,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.450.792.784,00	15.296.182.205,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.873.092.784,00	14.739.226.655,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	577.700.000,00	556.955.550,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	236.099.500,00	203.453.605,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	153.600.000,00	142.980.740,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	82.499.500,00	60.472.865,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	181.500.000,00	172.368.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	97.500.000,00	92.256.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	84.000.000,00	80.112.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.094.295.946,00	1.957.885.039,00	186.609.040,00	174.100.405,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.606.300,00	17.604.400,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	178.109.040,00	166.235.500,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	8.500.000,00	7.864.905,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	220.685.100,00	166.309.731,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.000.000,00	31.491.275,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	76.030.000,00	32.035.400,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.056.000,00	22.460.500,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.504.918.546,00	1.503.165.983,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000,00	10.850.800,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	175.000.000,00	173.966.950,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	15.000.000,00	14.068.140,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	15.000.000,00	14.068.140,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.301.445.701,00	2.160.852.482,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	53.000.000,00	46.382.830,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	568.864.931,00	519.337.841,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.679.580.770,00	1.595.131.811,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.297.623.000,00	1.220.767.310,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	488.000.000,00	467.492.044,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	614.623.000,00	605.119.745,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	195.000.000,00	148.155.521,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.914.694.965,00	3.448.653.305,00	58.905.108.536,00	51.641.866.519,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.272.047.015,00	2.848.598.830,00	33.839.668.027,00	29.793.814.801,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	285.315.700,00	273.128.600,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	117.572.700,00	114.550.920,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	461.305.170,00	322.459.450,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	-	-	968.204.350,00	962.732.090,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	1.897.957.605,00	1.654.508.158,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	-	-	32.542.604.514,00	28.605.021.749,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.01.0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	-	-	228.859.163,00	226.060.962,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	125.000.000,00	114.233.661,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	384.895.840,00	369.718.041,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	642.647.950,00	600.054.475,00	25.065.440.509,00	21.848.051.718,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	-	-	20.390.658.170,00	18.611.255.963,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	-	-	4.674.782.339,00	3.236.795.755,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	484.717.950,00	457.953.300,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	157.930.000,00	142.101.175,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.597.604.325,00	1.505.395.406,00	35.250.000,00	34.900.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	847.057.600,00	824.018.820,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.11.1.01.0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	106.014.300,00	96.926.220,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	557.260.700,00	549.107.400,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.11.1.01.0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	156.069.800,00	153.930.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.11.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	27.712.800,00	24.055.200,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	64.067.725,00	62.402.120,00	35.250.000,00	34.900.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	36.470.750,00	35.787.300,00	17.625.000,00	17.450.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	27.596.975,00	26.614.820,00	17.625.000,00	17.450.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	686.479.000,00	618.974.466,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	169.686.500,00	166.840.200,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.11.1.03.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	144.192.500,00	137.780.450,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	372.600.000,00	314.353.816,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0001	1.03.0.00.0.00.02	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA	16.557.818.521,00	16.476.185.068,00	618.919.398,00	614.443.213,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.097.507.873,00	1.075.118.575,00	409.214.223,00	407.550.380,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	173.430.038,00	171.095.626,00	82.516.490,00	80.935.950,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.579.480,00	5.578.660,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.861.000,00	9.845.000,00	82.516.490,00	80.935.950,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.000.375,00	29.720.500,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	4.998.900,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.989.183,00	120.952.566,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	37.000.000,00	37.000.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	37.000.000,00	37.000.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	799.994.338,00	788.561.960,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.801.000,00	65.870.694,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.485.000,00	16.418.515,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	711.708.338,00	705.272.751,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.083.497,00	115.460.989,00	289.697.733,00	289.614.430,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.715.000,00	62.971.889,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	42.468.497,00	41.089.100,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	289.697.733,00	289.614.430,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	15.460.310.648,00	15.401.066.493,00	209.705.175,00	206.892.833,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.895.399.720,00	3.854.587.372,00	9.705.175,00	8.250.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.01.0088	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	124.469.885,00	123.985.250,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.01.0101	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	2.594.205.125,00	2.568.176.622,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	948.462.860,00	934.909.450,00	9.705.175,00	8.250.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	64.984.950,00	64.912.950,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	163.276.900,00	162.603.100,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	11.564.910.928,00	11.546.479.121,00	200.000.000,00	198.642.833,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	6.827.635.344,00	6.820.915.271,00	200.000.000,00	198.642.833,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	2.385.346.860,00	2.385.239.364,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	2.351.928.724,00	2.340.324.486,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0002	1.03.0.00.0.00.02	UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN	10.965.127.782,00	10.374.119.940,00	1.097.902.408,00	1.055.564.690,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	995.881.595,00	957.783.579,00	20.305.408,00	20.121.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.646.500,00	119.745.500,00	13.600.000,00	13.521.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.599.280,00	7.564.900,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	13.600.000,00	13.521.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.129.800,00	16.014.700,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.835.000,00	4.816.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.082.420,00	91.349.900,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	6.705.408,00	6.600.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	6.705.408,00	6.600.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	685.150.895,00	652.811.200,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.515.000,00	96.021.232,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.328.500,00	12.319.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	574.807.395,00	542.970.968,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.084.200,00	185.226.879,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.998.000,00	100.664.679,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	19.560.200,00	19.415.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	9.975.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.176.000,00	39.887.200,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.350.000,00	15.285.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	9.969.246.187,00	9.416.336.361,00	1.077.597.000,00	1.035.443.690,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.040.960.267,00	1.753.684.470,00	218.117.000,00	199.170.519,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	44.500.000,00	28.007.100,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.01.0088	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	85.743.500,00	47.746.100,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.01.0101	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	745.075.000,00	584.845.730,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	782.632.466,00	766.708.500,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	230.310.801,00	219.326.940,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	152.698.500,00	107.050.100,00	218.117.000,00	199.170.519,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.928.285.920,00	7.662.651.891,00	859.480.000,00	836.273.171,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	4.584.867.748,00	4.458.697.499,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1.487.220.317,00	1.417.974.048,00	859.480.000,00	836.273.171,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.02.0000	1.03.02.1.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	1.856.197.855,00	1.785.980.344,00	-	-	-	-	-	-
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	26.208.631.529,00	25.195.529.030,00	94.534.952.801,00	93.334.222.500,00	-	-	-	-
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	26.208.631.529,00	25.195.529.030,00	94.534.952.801,00	93.334.222.500,00	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	26.208.631.529,00	25.195.529.030,00	94.534.952.801,00	93.334.222.500,00	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.766.289.465,00	9.217.249.769,00	276.665.485,00	264.619.800,00	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.001.900,00	120.486.700,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.020.000,00	35.808.900,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.107.000,00	6.342.500,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.874.900,00	78.335.300,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.656.867.503,00	7.252.689.166,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.038.800.003,00	6.640.111.666,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	618.067.500,00	612.577.500,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	141.459.000,00	133.469.101,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	36.400.000,00	36.327.250,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	105.059.000,00	97.141.851,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81.871.000,00	69.201.805,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	41.250.000,00	41.195.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.621.000,00	28.006.805,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	955.183.900,00	866.128.053,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.782.200,00	9.758.710,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.024.600,00	114.344.070,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	89.326.800,00	86.495.660,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13.585.000,00	13.385.900,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	722.465.300,00	637.197.463,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	4.946.250,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.200.000,00	3.700.000,00	77.165.485,00	65.856.000,00	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.200.000,00	3.700.000,00	77.165.485,00	65.856.000,00	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	479.536.162,00	466.471.944,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	314.500,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	476.536.162,00	466.157.444,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	307.170.000,00	305.103.000,00	199.500.000,00	198.763.800,00	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	268.020.000,00	266.236.250,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.150.000,00	38.866.750,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	199.500.000,00	198.763.800,00	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	386.827.750,00	346.756.375,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	303.947.750,00	277.233.397,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	303.947.750,00	277.233.397,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	82.880.000,00	69.522.978,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	82.880.000,00	69.522.978,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.192.863.900,00	1.017.651.969,00	972.101.600,00	935.527.200,00	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	186.188.600,00	153.209.600,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	186.188.600,00	153.209.600,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.006.675.300,00	864.442.369,00	972.101.600,00	935.527.200,00	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	665.200.000,00	641.325.679,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.1.02.0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	341.475.300,00	223.116.690,00	972.101.600,00	935.527.200,00	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	14.862.650.414,00	14.613.870.917,00	93.286.185.716,00	92.134.075.500,00	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	14.862.650.414,00	14.613.870.917,00	93.286.185.716,00	92.134.075.500,00	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	6.705.111.450,00	6.551.905.364,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	8.057.538.964,00	7.975.117.703,00	93.286.185.716,00	92.134.075.500,00	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	100.000.000,00	86.847.850,00	-	-	-	-	-	-
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	206.818.900,00	186.909.930,00	3.269.400,00	3.123.500,00	-	-	-	-
2.1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	206.818.900,00	186.909.930,00	3.269.400,00	3.123.500,00	-	-	-	-
2.1	1.04.2.10.0.00.01.0000		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	206.818.900,00	186.909.930,00	3.269.400,00	3.123.500,00	-	-	-	-
2.1	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	46.530.850,00	44.871.300,00	-	-	-	-	-	-
2.1	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	46.530.850,00	44.871.300,00	-	-	-	-	-	-
2.1	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.03.1.01.0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	46.530.850,00	44.871.300,00	-	-	-	-	-	-
2.1	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	80.288.050,00	69.973.380,00	-	-	-	-	-	-
2.1	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	80.288.050,00	69.973.380,00	-	-	-	-	-	-
2.1	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.04.1.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	45.023.150,00	38.145.880,00	-	-	-	-	-	-
2.1	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.04.1.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	35.264.900,00	31.827.500,00	-	-	-	-	-	-
2.1	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	40.000.000,00	36.538.250,00	3.269.400,00	3.123.500,00	-	-	-	-
2.1	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.05.1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	40.000.000,00	36.538.250,00	3.269.400,00	3.123.500,00	-	-	-	-
2.1	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.05.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	40.000.000,00	36.538.250,00	3.269.400,00	3.123.500,00	-	-	-	-
2.1	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	40.000.000,00	35.527.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	40.000.000,00	35.527.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.06.1.01.0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	35.527.000,00	-	-	-	-	-	-
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17.911.474.743,00	17.284.898.972,00	124.453.380,00	118.650.000,00	-	-	-	-
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	17.911.474.743,00	17.284.898.972,00	124.453.380,00	118.650.000,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	17.911.474.743,00	17.284.898.972,00	124.453.380,00	118.650.000,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.650.382.829,00	12.100.344.400,00	117.703.380,00	112.650.000,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	225.758.176,00	223.703.117,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.488.176,00	73.668.817,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	61.270.000,00	60.263.800,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.000.000,00	89.770.500,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.151.038.300,00	9.633.288.575,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.975.700.000,00	9.457.991.275,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	155.555.900,00	155.555.900,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	19.782.400,00	19.741.400,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	65.059.400,00	64.461.405,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	47.130.000,00	46.650.005,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7.956.500,00	7.890.500,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.972.900,00	9.920.900,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	229.744.000,00	225.990.325,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	190.740.000,00	189.644.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	39.004.000,00	36.346.325,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	934.103.947,00	933.814.115,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.170.100,00	3.170.100,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.604.700,00	37.451.500,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.794.000,00	23.794.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	869.535.147,00	869.398.515,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	117.703.380,00	112.650.000,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	35.764.700,00	33.950.000,00	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	81.938.680,00	78.700.000,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	791.929.006,00	784.964.613,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.069.479,00	102.821.335,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	684.859.527,00	678.143.278,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	252.750.000,00	234.122.250,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	223.500.000,00	204.872.250,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.850.000,00	16.850.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.400.000,00	12.400.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.187.591.914,00	5.111.815.007,00	6.750.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4.900.785.339,00	4.832.299.107,00	6.750.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	73.600.000,00	72.685.720,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	11.436.750,00	11.200.000,00	6.750.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1.696.705.707,00	1.665.474.376,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	73.700.000,00	73.301.841,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	2.850.342.882,00	2.826.923.460,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	195.000.000,00	182.713.710,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	180.351.175,00	177.179.475,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	48.854.475,00	48.811.475,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	88.706.500,00	85.715.600,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	42.790.200,00	42.652.400,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	106.455.400,00	102.336.425,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	68.426.950,00	64.450.100,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.1.03.0004	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	38.028.450,00	37.886.325,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	73.500.000,00	72.739.565,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	73.500.000,00	72.739.565,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	73.500.000,00	72.739.565,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.0.00.0.00.01	DINAS SOSIAL	82.068.261.790,00	78.264.976.049,00	230.503.490,00	220.131.085,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.112.644.615,00	23.698.808.801,00	230.503.490,00	220.131.085,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	276.036.100,00	243.351.280,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	114.605.500,00	98.997.900,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.284.700,00	57.053.400,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.145.900,00	87.299.980,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.126.303.141,00	20.910.114.618,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.619.792.641,00	20.404.493.148,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	322.708.600,00	321.868.600,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	183.801.900,00	183.752.870,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	124.048.100,00	80.739.600,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	47.343.000,00	15.584.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	42.790.000,00	36.140.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.915.100,00	29.015.600,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	174.556.081,00	169.567.866,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	51.750.000,00	51.612.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	122.806.081,00	117.955.866,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	765.448.121,00	717.888.823,00	29.310.600,00	28.430.000,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.758.000,00	20.758.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.360.000,00	9.095.915,00	8.000.000,00	7.945.000,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	21.310.600,00	20.485.000,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	195.414.500,00	179.859.900,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.594.100,00	16.301.100,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	515.321.521,00	491.873.908,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	58.856.720,00	58.650.000,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	19.080.000,00	19.050.000,00	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	39.776.720,00	39.600.000,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.403.987.572,00	1.351.773.434,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.210.000,00	2.565.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	244.854.000,00	227.394.381,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.500.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.137.423.572,00	1.119.814.053,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.265.500,00	225.373.180,00	142.336.170,00	133.051.085,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	166.090.000,00	161.237.020,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.550.000,00	37.600.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.528.000,00	13.382.160,00	102.628.500,00	98.108.085,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.097.500,00	13.154.000,00	39.707.670,00	34.943.000,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	11.533.306.058,00	10.788.079.279,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	414.583.843,00	401.599.700,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	414.583.843,00	401.599.700,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	11.118.722.215,00	10.386.479.579,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	2.568.511.000,00	2.326.697.980,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	8.550.211.215,00	8.059.781.599,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	43.974.133.944,00	42.481.719.017,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	6.625.938.500,00	6.291.856.475,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	2.994.564.000,00	2.737.480.275,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	19.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	2.024.317.000,00	2.024.317.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	826.070.000,00	826.070.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	596.702.000,00	596.702.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	164.335.500,00	107.287.200,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	35.844.742.444,00	34.730.195.042,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	28.331.936.250,00	27.390.667.467,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	419.957.000,00	417.464.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	1.647.143.900,00	1.645.413.900,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	270.215.000,00	269.991.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	4.158.112.000,00	4.124.912.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	1.017.378.294,00	881.746.675,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	711.504.300,00	676.005.900,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	408.661.600,00	400.661.600,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	50.000.000,00	49.620.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu	45.633.000,00	45.633.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	8.814.000,00	8.814.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.03.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	198.395.700,00	171.277.300,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	791.948.700,00	783.661.600,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	151.618.600,00	151.106.600,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang	121.480.000,00	121.480.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	461.834.000,00	461.834.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	57.016.100,00	49.241.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	554.855.000,00	522.170.910,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	62.812.800,00	59.064.500,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI	62.812.800,00	59.064.500,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	492.042.200,00	463.106.410,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	100.000.000,00	89.729.520,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	392.042.200,00	373.376.890,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	602.823.000,00	510.073.710,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	602.823.000,00	510.073.710,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	258.626.500,00	182.661.810,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang	121.661.425,00	120.695.900,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	74.010.450,00	68.833.500,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	88.133.025,00	81.130.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	60.391.600,00	56.752.500,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	290.499.173,00	264.124.332,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	290.499.173,00	264.124.332,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	290.499.173,00	264.124.332,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0001	1.06.0.00.0.00.01	Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung	5.006.636.666,00	4.994.726.729,00	17.806.600,00	17.806.600,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	814.069.691,00	809.518.088,00	17.806.600,00	17.806.600,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60.720.000,00	60.720.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.720.000,00	60.720.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.167.600,00	3.287.600,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4.167.600,00	3.287.600,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.103.715,00	188.872.400,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.487.200,00	12.486.300,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	890.000,00	890.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.710.400,00	6.710.400,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.859.437,00	125.708.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.978.000,00	8.977.700,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.738.678,00	32.660.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.750.000,00	2.750.000,00	17.806.600,00	17.806.600,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.750.000,00	2.750.000,00	17.806.600,00	17.806.600,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	520.588.376,00	517.882.038,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.820.000,00	83.661.966,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	436.268.376,00	433.720.072,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.740.000,00	36.006.050,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.800.000,00	26.066.050,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.940.000,00	9.940.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.192.566.975,00	4.185.208.641,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	4.192.566.975,00	4.185.208.641,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	1.817.550.000,00	1.816.896.116,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	357.832.725,00	356.689.275,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	115.404.000,00	115.404.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	10.675.600,00	10.675.600,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1.028.263.150,00	1.025.021.650,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	151.296.500,00	151.296.500,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	660.645.000,00	658.325.500,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	22.100.000,00	22.100.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	28.800.000,00	28.800.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0002	1.06.0.00.0.00.01	Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang	3.454.966.490,00	3.412.052.875,00	242.202.480,00	241.335.080,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	922.051.957,00	888.982.588,00	242.202.480,00	241.335.080,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60.720.000,00	60.720.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.720.000,00	60.720.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.260.000,00	2.550.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3.260.000,00	2.550.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	227.784.657,00	220.371.175,00	186.388.600,00	185.521.200,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.052.500,00	17.052.500,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.337.500,00	5.337.500,00	73.214.100,00	73.179.200,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	113.174.500,00	112.342.000,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	155.294.275,00	150.565.175,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.840.382,00	16.876.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.260.000,00	30.540.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	55.813.880,00	55.813.880,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	36.450.000,00	36.450.000,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	19.363.880,00	19.363.880,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	581.329.300,00	558.180.613,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.867.000,00	85.462.230,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	475.462.300,00	472.718.383,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.958.000,00	38.160.800,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.250.000,00	14.452.800,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.870.000,00	7.870.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.838.000,00	15.838.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.532.914.533,00	2.523.070.287,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	2.532.914.533,00	2.523.070.287,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	1.067.500.000,00	1.066.959.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	279.090.000,00	277.365.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	62.320.000,00	62.320.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	8.866.000,00	8.865.300,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	728.798.533,00	723.666.336,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	25.145.000,00	24.394.651,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	347.195.000,00	345.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0003	1.06.0.00.0.00.01	Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang	3.240.690.770,00	3.190.415.496,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	832.235.906,00	785.090.614,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60.720.000,00	60.720.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.720.000,00	60.720.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.520.000,00	1.520.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1.520.000,00	1.520.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.750.000,00	6.750.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6.750.000,00	6.750.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.858.539,00	136.119.780,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.546.600,00	8.546.600,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.981.780,00	9.981.780,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.744.706,00	87.015.900,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.680.000,00	8.681.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.905.453,00	21.894.500,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	596.877.367,00	552.741.984,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	157.657.200,00	116.015.129,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	439.220.167,00	436.726.855,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.510.000,00	27.238.850,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.750.000,00	18.478.850,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.760.000,00	8.760.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.408.454.864,00	2.405.324.882,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	2.408.454.864,00	2.405.324.882,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	1.281.000.000,00	1.280.853.390,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	331.808.900,00	328.902.400,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	90.446.600,00	90.380.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	4.193.350,00	4.193.350,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	249.586.300,00	249.586.300,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	403.813.000,00	403.812.942,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	36.566.714,00	36.561.500,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	11.040.000,00	11.035.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0004	1.06.0.00.0.00.01	Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin	4.002.711.171,00	3.948.125.881,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.485.861.015,00	1.433.917.151,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60.720.000,00	60.720.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.720.000,00	60.720.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.560.000,00	4.560.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4.560.000,00	4.560.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	244.209.380,00	244.209.380,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.088.000,00	30.088.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.411.180,00	2.411.180,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.495.000,00	27.495.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	141.991.200,00	141.991.200,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.864.000,00	5.864.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.360.000,00	36.360.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.076.871.635,00	1.026.765.071,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.193.192,00	14.193.192,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	425.224.000,00	375.117.436,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	637.454.443,00	637.454.443,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.500.000,00	97.662.700,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.950.000,00	40.112.700,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.550.000,00	7.550.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.516.850.156,00	2.514.208.730,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	2.516.850.156,00	2.514.208.730,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	1.409.100.000,00	1.407.994.530,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	348.907.656,00	347.671.700,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	177.269.500,00	177.269.500,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	123.613.000,00	123.613.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	440.460.000,00	440.160.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	17.500.000,00	17.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0005	1.06.0.00.0.00.01	Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar	2.272.670.312,00	2.223.842.082,00	265.469.900,00	262.799.400,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	879.675.730,00	847.754.755,00	263.773.650,00	261.199.400,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60.720.000,00	60.720.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.720.000,00	60.720.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.500.000,00	17.479.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.200.000,00	2.200.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	15.300.000,00	15.279.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	195.806.192,00	195.581.470,00	22.216.750,00	21.190.000,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.640.000,00	14.640.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.952.495,00	34.816.620,00	17.216.750,00	16.190.000,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	111.624.430,00	111.575.800,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.642.000,00	6.626.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.947.267,00	27.923.050,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.650.000,00	1.650.000,00	34.781.700,00	34.760.000,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	2.292.700,00	2.290.000,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	32.489.000,00	32.470.000,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	531.806.393,00	501.490.035,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.150.000,00	49.104.970,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	464.656.393,00	452.385.065,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.193.145,00	61.834.250,00	198.775.200,00	197.249.400,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.418.145,00	45.080.050,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.300.000,00	4.300.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.475.000,00	12.454.200,00	198.775.200,00	197.249.400,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.392.994.582,00	1.376.087.327,00	1.696.250,00	1.600.000,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.392.994.582,00	1.376.087.327,00	1.696.250,00	1.600.000,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	896.700.000,00	896.661.327,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	183.543.820,00	182.370.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	42.500.000,00	42.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu	1.950.000,00	1.800.000,00	1.696.250,00	1.600.000,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	16.062.710,00	16.053.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	155.535.000,00	155.040.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	44.290.000,00	44.250.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	28.413.052,00	28.413.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	24.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0006	1.06.0.00.0.00.01	Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang	3.012.433.571,00	2.948.676.717,00	62.483.500,00	54.121.781,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	887.759.659,00	847.363.923,00	62.483.500,00	54.121.781,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60.720.000,00	60.720.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.720.000,00	60.720.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.474.000,00	2.754.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3.474.000,00	2.754.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.250.000,00	8.250.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.250.000,00	8.250.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	174.016.438,00	165.413.415,00	62.483.500,00	54.121.781,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.503.800,00	10.503.800,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	39.275.000,00	38.592.656,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	900.000,00	850.000,00	23.208.500,00	15.529.125,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	147.549.938,00	139.253.665,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.702.000,00	4.702.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.360.700,00	10.103.950,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	581.583.721,00	553.883.898,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.785.710,00	1.784.250,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.767.375,00	62.017.420,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	493.030.636,00	490.082.228,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.715.500,00	56.342.610,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.235.500,00	31.309.710,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.480.000,00	25.032.900,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.124.673.912,00	2.101.312.794,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	2.124.673.912,00	2.101.312.794,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	1.281.000.000,00	1.279.030.200,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	146.100.640,00	138.001.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	85.893.000,00	84.638.600,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	14.782.780,00	13.636.580,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	582.147.492,00	571.476.564,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10.098.125,00	9.885.700,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	4.651.875,00	4.644.150,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0007	1.06.0.00.0.00.01	Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang	2.269.169.538,00	2.238.629.836,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	799.761.591,00	777.717.776,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52.560.000,00	52.560.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.560.000,00	52.560.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.919.500,00	107.345.500,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.543.000,00	8.540.500,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.986.300,00	2.980.300,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.246.700,00	70.778.700,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.620.000,00	5.620.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.523.500,00	19.426.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	550.000,00	550.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar	550.000,00	550.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	581.082.091,00	565.874.526,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.033.500,00	60.887.845,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	509.848.591,00	503.786.681,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.150.000,00	37.887.750,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.750.000,00	27.487.750,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.400.000,00	10.400.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.469.407.947,00	1.460.912.060,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	1.469.407.947,00	1.460.912.060,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	640.500.000,00	639.473.700,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	159.980.250,00	158.350.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	48.699.900,00	48.687.700,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	11.550.000,00	11.550.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	3.178.700,00	3.174.850,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	574.799.097,00	569.431.610,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	30.700.000,00	30.244.200,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0008	1.06.0.00.0.00.01	Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok	2.984.296.334,00	2.891.590.395,00	5.117.405.019,00	4.976.719.919,00	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.457.611.034,00	1.373.070.565,00	4.925.732.619,00	4.786.266.119,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	69.000.000,00	69.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.000.000,00	69.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.090.000,00	9.084.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	9.090.000,00	9.084.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.750.000,00	15.750.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15.750.000,00	15.750.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.229.142,00	293.347.833,00	92.763.000,00	92.763.000,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	46.215.000,00	46.215.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	62.763.000,00	62.763.000,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42.729.005,00	42.728.550,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.795.800,00	71.795.800,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.962.000,00	20.962.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.500.000,00	1.415.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.027.337,00	110.231.483,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	314.777.136,00	259.614.189,00	4.832.969.619,00	4.693.503.119,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	36.686.600,00	35.899.500,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	115.078.500,00	113.719.500,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	63.595.000,00	63.595.000,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	296.541.436,00	241.378.489,00	4.617.609.519,00	4.480.289.119,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.235.700,00	18.235.700,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	565.880.906,00	558.911.563,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.880.000,00	5.879.910,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.478.000,00	51.662.095,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.200.000,00	900.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	502.322.906,00	500.469.558,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.883.850,00	167.362.980,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.143.850,00	38.887.980,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.540.000,00	29.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.200.000,00	98.975.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.526.685.300,00	1.518.519.830,00	191.672.400,00	190.453.800,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.526.685.300,00	1.518.519.830,00	191.672.400,00	190.453.800,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	640.500.000,00	639.393.850,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang	227.468.900,00	225.441.900,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	135.547.000,00	131.070.230,00	191.672.400,00	190.453.800,00	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	24.726.050,00	24.725.750,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	150.464.000,00	150.463.750,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	153.100.000,00	153.100.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	194.879.350,00	194.324.350,00	-	-	-	-	-	-
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	32.143.454.377,00	30.365.982.945,00	118.003.800,00	114.267.700,00	-	-	-	-
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	32.143.454.377,00	30.365.982.945,00	118.003.800,00	114.267.700,00	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	27.227.054.877,00	25.609.584.945,00	118.003.800,00	114.267.700,00	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.907.803.127,00	25.328.741.945,00	118.003.800,00	114.267.700,00	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.898.675,00	54.655.100,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.971.600,00	32.957.550,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.259.675,00	12.221.950,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.667.400,00	9.475.600,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.902.578.790,00	22.347.014.321,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.568.442.090,00	22.021.567.621,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	320.160.000,00	311.550.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13.976.700,00	13.896.700,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	62.830.000,00	62.332.610,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.200.000,00	5.197.610,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	48.000.000,00	47.645.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.630.000,00	9.490.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	431.049.790,00	430.077.777,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.539.600,00	29.539.600,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.205.800,00	21.205.800,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.341.700,00	30.341.700,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.575.200,00	17.575.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	314.927.490,00	313.955.677,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	17.460.000,00	17.460.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	118.003.800,00	114.267.700,00	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	118.003.800,00	114.267.700,00	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.144.941.154,00	2.126.848.487,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	438.797.100,00	427.606.431,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.705.144.054,00	1.698.242.056,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.004.718,00	306.313.650,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	253.320.718,00	249.779.650,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.440.000,00	40.290.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.244.000,00	16.244.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	8.998.900,00	8.693.900,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	8.998.900,00	8.693.900,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	8.998.900,00	8.693.900,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	168.038.250,00	160.225.050,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	67.258.800,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	75.000.000,00	67.258.800,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	51.453.250,00	51.381.250,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	51.453.250,00	51.381.250,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	41.585.000,00	41.585.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	41.585.000,00	41.585.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	61.000.000,00	58.195.300,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	35.000.000,00	32.543.400,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	35.000.000,00	32.543.400,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	26.000.000,00	25.651.900,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	26.000.000,00	25.651.900,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	81.214.600,00	53.728.750,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	81.214.600,00	53.728.750,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	41.214.600,00	38.563.750,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	40.000.000,00	15.165.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0001		UPTD BLK Padang Panjang	2.307.406.100,00	2.205.020.950,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0001	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	52.416.100,00	52.160.700,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0001	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.416.100,00	2.410.700,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0001	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.416.100,00	2.410.700,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0001	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000,00	49.750.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0001	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	49.750.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0001	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.254.990.000,00	2.152.860.250,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0001	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.254.990.000,00	2.152.860.250,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0001	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.254.990.000,00	2.152.860.250,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0002		UPTD BLK Payakumbuh	2.208.800.000,00	2.157.636.700,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0002	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.800.000,00	3.450.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0002	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.800.000,00	3.450.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0002	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.300.000,00	950.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0002	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0002	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.205.000.000,00	2.154.186.700,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0002	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.205.000.000,00	2.154.186.700,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0002	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.205.000.000,00	2.154.186.700,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0003		UPTD KESELAMATAN dan KESEHATAN KERJA	219.373.950,00	219.167.400,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0003	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.572.000,00	28.572.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0003	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.572.000,00	18.572.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0003	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0003	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.961.000,00	5.961.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0003	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.953.000,00	4.953.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0003	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.058.000,00	5.058.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0003	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0003	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0003	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	190.801.950,00	190.595.400,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0003	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	190.801.950,00	190.595.400,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0003	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	190.801.950,00	190.595.400,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0004		UPTD Pengawasan Wilayah 1	90.630.850,00	87.530.350,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0004	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	42.178.600,00	41.936.750,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0004	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.178.600,00	41.936.750,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0004	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.360.000,00	4.360.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0004	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.140.800,00	11.140.800,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0004	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.045.300,00	18.803.700,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0004	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.632.500,00	7.632.250,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0004	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	48.452.250,00	45.593.600,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0004	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	48.452.250,00	45.593.600,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0004	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	28.772.500,00	28.239.800,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0004	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	19.679.750,00	17.353.800,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0005		UPTD Pengawasan Wilayah 2	45.317.900,00	44.197.800,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0005	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.148.200,00	13.963.100,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0005	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.148.200,00	13.963.100,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0005	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	725.000,00	725.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0005	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.020.500,00	3.990.400,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0005	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.767.700,00	5.767.700,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0005	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.635.000,00	3.480.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0005	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	31.169.700,00	30.234.700,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0005	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	31.169.700,00	30.234.700,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0005	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	16.055.050,00	15.668.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0005	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	15.114.650,00	14.566.700,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0006		UPTD Pengawasan Wilayah 3	44.870.700,00	42.844.800,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0006	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.734.200,00	15.305.900,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0006	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.734.200,00	15.305.900,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0006	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.450.000,00	1.450.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0006	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.638.400,00	4.623.300,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0006	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.282.800,00	7.249.600,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0006	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.363.000,00	1.983.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0006	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	28.136.500,00	27.538.900,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0006	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	28.136.500,00	27.538.900,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0006	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	14.598.550,00	14.299.500,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0006	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	13.537.950,00	13.239.400,00	-	-	-	-	-	-
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	67.000.000,00	66.592.720,00	-	-	-	-	-	-
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	67.000.000,00	66.592.720,00	-	-	-	-	-	-
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	67.000.000,00	66.592.720,00	-	-	-	-	-	-
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	67.000.000,00	66.592.720,00	-	-	-	-	-	-
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	67.000.000,00	66.592.720,00	-	-	-	-	-	-
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03.1.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi	67.000.000,00	66.592.720,00	-	-	-	-	-	-
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19.622.432.303,00	18.240.852.456,00	702.935.220,00	440.956.000,00	-	-	-	-
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.948.618.203,00	16.651.266.349,00	702.935.220,00	440.956.000,00	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	17.346.669.703,00	16.214.848.981,00	658.367.040,00	400.716.000,00	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.260.267.073,00	10.665.193.092,00	658.367.040,00	400.716.000,00	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	376.800.000,00	365.757.330,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	139.000.000,00	134.207.250,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	132.500.000,00	128.891.080,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.300.000,00	102.659.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.737.430.196,00	7.331.390.187,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.378.484.196,00	6.984.251.187,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	320.528.600,00	308.728.600,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	38.417.400,00	38.410.400,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	67.606.700,00	65.237.880,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	64.300.000,00	61.931.180,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.306.700,00	3.306.700,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	192.176.000,00	182.144.600,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	82.500.000,00	81.400.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	109.676.000,00	100.744.600,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.135.928.287,00	1.087.007.821,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.711.800,00	42.419.800,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.504.100,00	16.769.600,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	137.273.000,00	116.310.100,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.100.000,00	36.100.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.870.000,00	15.720.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	886.469.387,00	859.688.321,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	459.367.040,00	400.716.000,00	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	136.180.400,00	120.392.000,00	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	323.186.640,00	280.324.000,00	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.362.775.890,00	1.293.043.279,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	499.500,00	499.500,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	328.740.688,00	284.547.739,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.033.535.702,00	1.007.996.040,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.550.000,00	340.611.995,00	199.000.000,00	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.600.000,00	110.120.745,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	107.830.000,00	89.744.500,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	156.120.000,00	140.746.750,00	199.000.000,00	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.515.705.615,00	1.331.757.249,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	298.000.000,00	270.495.546,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	53.000.000,00	48.154.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	245.000.000,00	222.341.546,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	562.705.615,00	534.775.623,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	50.000.000,00	44.605.200,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	512.705.615,00	490.170.423,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	655.000.000,00	526.486.080,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.1.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	25.000.000,00	18.595.885,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	630.000.000,00	507.890.195,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	314.514.850,00	238.027.290,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	47.344.850,00	39.391.290,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	47.344.850,00	39.391.290,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	267.170.000,00	198.636.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.1.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.1.03.0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	242.170.000,00	198.636.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	576.563.385,00	556.543.050,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	576.563.385,00	556.543.050,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.04.1.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	531.637.000,00	511.820.065,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.04.1.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	44.926.385,00	44.722.985,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	107.326.780,00	103.265.795,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	107.326.780,00	103.265.795,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	66.653.000,00	64.738.500,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	40.673.780,00	38.527.295,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.099.134.500,00	1.087.081.893,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	941.595.100,00	934.425.143,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	347.250.500,00	343.377.200,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	594.344.600,00	591.047.943,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	157.539.400,00	152.656.750,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	77.490.400,00	74.887.750,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	72.449.000,00	70.769.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	7.600.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.473.157.500,00	2.232.980.612,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.460.305.000,00	1.372.326.111,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1.370.305.000,00	1.290.483.811,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.1.01.0003	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	90.000.000,00	81.842.300,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.012.852.500,00	860.654.501,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	49.600.000,00	38.509.226,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.1.03.0004	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	170.130.000,00	143.909.100,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	595.000.000,00	533.837.275,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	198.122.500,00	144.398.900,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001		UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	601.948.500,00	436.417.368,00	44.568.180,00	40.240.000,00	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	40.342.280,00	38.799.756,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.342.280,00	38.799.756,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.492.325,00	13.223.400,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.849.955,00	25.576.356,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	210.000.000,00	137.712.118,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	210.000.000,00	137.712.118,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	47.951.360,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	140.000.000,00	89.760.758,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	351.606.220,00	259.905.494,00	44.568.180,00	40.240.000,00	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	351.606.220,00	259.905.494,00	44.568.180,00	40.240.000,00	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	105.431.820,00	76.634.400,00	44.568.180,00	40.240.000,00	-	-	-	-
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	2.08.07.1.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	246.174.400,00	183.271.094,00	-	-	-	-	-	-
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.673.814.100,00	1.589.586.107,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.673.814.100,00	1.589.586.107,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	219.870.700,00	199.071.648,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	219.870.700,00	199.071.648,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.1.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	162.004.000,00	142.782.767,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.1.01.0017	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	57.866.700,00	56.288.881,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	189.512.600,00	172.800.780,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	189.512.600,00	172.800.780,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.1.01.0011	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	52.165.000,00	38.637.800,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	137.347.600,00	134.162.980,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.264.430.800,00	1.217.713.679,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	917.584.800,00	872.676.679,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.1.01.0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	854.652.500,00	810.435.528,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	62.932.300,00	62.241.151,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	346.846.000,00	345.037.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.1.02.0006	Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	72.675.000,00	72.305.100,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.1.02.0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	274.171.000,00	272.731.900,00	-	-	-	-	-	-
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	29.473.054.815,00	26.808.748.559,00	220.798.800,00	53.710.000,00	-	-	-	-
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	29.473.054.815,00	26.808.748.559,00	220.798.800,00	53.710.000,00	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000		DINAS PANGAN	27.390.297.707,00	24.835.270.279,00	48.891.680,00	47.500.000,00	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.107.665.509,00	16.125.534.579,00	48.891.680,00	47.500.000,00	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	247.650.656,00	173.047.600,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.524.900,00	56.427.500,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.825.100,00	22.250.500,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.300.656,00	94.369.600,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.029.984.612,00	12.541.839.719,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.649.564.912,00	12.195.487.919,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300.419.700,00	294.010.350,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	80.000.000,00	52.341.450,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	211.200.000,00	202.100.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	211.200.000,00	202.100.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	299.986.000,00	268.093.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	67.500.000,00	66.600.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	217.650.000,00	201.493.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14.836.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	787.700.380,00	612.281.400,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.978.800,00	29.978.800,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.539.015,00	28.443.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.446.500,00	50.648.500,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.200.000,00	13.969.500,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.280.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.725.000,00	4.575.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	637.531.065,00	484.666.600,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.908.100,00	40.005.000,00	48.891.680,00	47.500.000,00	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	48.891.680,00	47.500.000,00	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.908.100,00	40.005.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.919.871.806,00	1.801.064.320,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.832.645,00	27.694.500,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	351.054.361,00	264.195.788,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.540.984.800,00	1.509.174.032,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	564.363.955,00	487.103.540,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	332.235.235,00	293.818.690,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.280.000,00	34.975.850,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	172.848.720,00	158.309.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	6.983.576.898,00	6.484.414.200,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	4.819.629.260,00	4.662.300.900,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3.316.266.450,00	3.225.023.600,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	86.834.000,00	84.556.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	661.259.800,00	628.487.800,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0010	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	39.743.200,00	37.719.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	598.173.210,00	571.996.400,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	88.604.000,00	88.178.700,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	28.748.600,00	26.339.400,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	1.727.817.638,00	1.432.771.200,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.1.02.0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	214.812.016,00	164.504.300,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.1.02.0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1.380.000.000,00	1.149.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	133.005.622,00	118.466.900,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	436.130.000,00	389.342.100,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	176.730.000,00	164.407.300,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	189.400.000,00	157.882.300,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	70.000.000,00	67.052.500,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.673.555.300,00	1.626.055.750,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	43.684.800,00	41.006.500,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	43.684.800,00	41.006.500,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	1.629.870.500,00	1.585.049.250,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.418.760.400,00	1.400.664.850,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	162.577.100,00	140.568.200,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	48.533.000,00	43.816.200,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	625.500.000,00	599.265.750,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	625.500.000,00	599.265.750,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	399.000.000,00	379.772.450,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	111.000.000,00	107.528.800,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	115.500.000,00	111.964.500,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0001		UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN	598.361.108,00	510.894.708,00	168.776.560,00	3.080.000,00	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0001	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	256.338.000,00	216.305.028,00	168.776.560,00	3.080.000,00	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0001	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.000.000,00	32.276.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0001	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	14.371.500,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0001	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	4.130.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0001	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	9.874.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0001	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.000.000,00	2.820.500,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0001	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000,00	1.080.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0001	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.130.560,00	3.080.000,00	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0001	2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	3.130.560,00	3.080.000,00	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0001	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.894.000,00	126.739.278,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0001	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	2.966.750,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0001	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.894.000,00	123.772.528,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0001	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.444.000,00	57.289.750,00	165.646.000,00	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0001	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.090.000,00	34.123.750,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0001	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.354.000,00	23.166.000,00	165.646.000,00	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0001	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	342.023.108,00	294.589.680,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0001	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	342.023.108,00	294.589.680,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0001	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	110.644.000,00	109.600.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0001	2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	65.060.000,00	60.265.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0001	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	84.812.000,00	80.294.600,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0001	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	81.507.108,00	44.430.080,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0002		UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN	1.484.396.000,00	1.462.583.572,00	3.130.560,00	3.130.000,00	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0002	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	411.497.000,00	394.708.862,00	3.130.560,00	3.130.000,00	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0002	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.368.000,00	37.454.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0002	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	14.995.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0002	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	4.997.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0002	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0002	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.768.000,00	3.157.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0002	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	720.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0002	2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.880.000,00	3.705.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0002	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.130.560,00	3.130.000,00	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0002	2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	3.130.560,00	3.130.000,00	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0002	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.997.000,00	221.351.413,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0002	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.997.000,00	9.855.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0002	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	225.000.000,00	211.496.413,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0002	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.132.000,00	135.903.449,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0002	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.132.000,00	56.088.100,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0002	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000,00	79.815.349,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0002	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.072.899.000,00	1.067.874.710,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0002	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.072.899.000,00	1.067.874.710,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0002	2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	673.999.000,00	670.705.500,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0002	2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	398.900.000,00	397.169.210,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.0.00.0.00.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	18.849.891.890,00	16.358.287.674,00	791.315.736,00	482.341.040,00	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.793.459.574,00	13.625.929.519,00	791.315.736,00	482.341.040,00	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.825.500,00	58.798.700,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.176.000,00	55.233.700,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.649.500,00	3.565.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.425.486.093,00	10.106.580.475,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.010.166.093,00	9.699.906.475,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	390.320.000,00	387.010.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	25.000.000,00	19.664.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	156.000.000,00	146.055.524,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	141.000.000,00	134.195.574,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000,00	11.859.950,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	255.714.000,00	179.502.952,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	111.604.000,00	54.604.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	144.110.000,00	124.898.952,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	903.078.637,00	855.357.590,00	165.629.056,00	144.639.040,00	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	3.660.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.140.244,00	740.000,00	165.629.056,00	144.639.040,00	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.243.874,00	78.877.600,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.900.000,00	30.638.750,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.120.000,00	7.065.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.860.000,00	613.500,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	755.814.519,00	733.762.740,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	368.254.680,00	325.270.000,00	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	368.254.680,00	325.270.000,00	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.105.695.044,00	1.873.893.614,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.948.500,00	6.559.900,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	285.000.000,00	150.888.075,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.809.746.544,00	1.716.445.639,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	879.660.300,00	405.740.664,00	257.432.000,00	12.432.000,00	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	304.270.100,00	266.629.300,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.190.200,00	40.413.364,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	299.200.000,00	98.698.000,00	10.304.000,00	7.770.000,00	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	225.000.000,00	-	12.512.000,00	4.662.000,00	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	234.616.000,00	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	467.521.100,00	406.645.930,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	36.495.000,00	22.859.400,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	36.495.000,00	22.859.400,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	431.026.100,00	383.786.530,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	394.531.100,00	348.291.530,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	36.495.000,00	35.495.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	599.769.500,00	504.658.279,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	542.470.500,00	489.815.279,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	59.202.000,00	58.424.600,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	376.627.000,00	328.182.179,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.1.01.0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	106.641.500,00	103.208.500,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	57.299.000,00	14.843.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.1.03.0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	57.299.000,00	14.843.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	76.079.640,00	71.005.850,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	76.079.640,00	71.005.850,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.1.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	43.794.000,00	39.164.850,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.1.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	32.285.640,00	31.841.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	21.897.000,00	20.915.600,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	21.897.000,00	20.915.600,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	21.897.000,00	20.915.600,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	293.572.500,00	276.084.358,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	293.572.500,00	276.084.358,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	145.490.500,00	142.329.658,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	148.082.000,00	133.754.700,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	76.546.500,00	67.136.040,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	25.828.971,00	23.074.540,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	25.828.971,00	23.074.540,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	50.717.529,00	44.061.500,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	50.717.529,00	44.061.500,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.054.827.978,00	967.153.238,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	1.054.827.978,00	967.153.238,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	770.747.500,00	719.220.050,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.1.01.0003	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	177.842.978,00	146.781.188,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.1.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	54.742.500,00	50.131.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	51.495.000,00	51.021.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	156.617.344,00	146.388.560,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	156.617.344,00	146.388.560,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	156.617.344,00	146.388.560,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	277.899.754,00	242.480.100,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	277.899.754,00	242.480.100,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	84.801.754,00	68.146.600,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	193.098.000,00	174.333.500,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	31.701.000,00	29.890.200,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	31.701.000,00	29.890.200,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	31.701.000,00	29.890.200,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0001	2.11.0.00.0.00.01	UPTD Persampahan	4.616.701.427,00	4.120.996.401,00	1.851.769.280,00	1.835.996.169,00	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.616.701.427,00	4.120.996.401,00	1.851.769.280,00	1.835.996.169,00	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	4.616.701.427,00	4.120.996.401,00	1.851.769.280,00	1.835.996.169,00	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.1.01.0002	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	2.725.346.085,00	2.346.295.072,00	1.851.769.280,00	1.835.996.169,00	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	1.866.622.707,00	1.750.575.304,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	24.732.635,00	24.126.025,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0002	2.11.0.00.0.00.01	UPTD Laboratorium Lingkungan	834.466.922,00	810.036.557,00	135.074.000,00	132.812.000,00	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	834.466.922,00	810.036.557,00	135.074.000,00	132.812.000,00	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	834.466.922,00	810.036.557,00	135.074.000,00	132.812.000,00	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	834.466.922,00	810.036.557,00	135.074.000,00	132.812.000,00	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0003	2.11.0.00.0.00.01	UPTD Pengelolaan Limbah B3 Medis	2.277.189.799,00	1.210.439.052,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	198.400.000,00	20.146.500,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.400.000,00	20.146.500,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.400.000,00	20.146.500,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.078.789.799,00	1.190.292.552,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.078.789.799,00	1.190.292.552,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	2.078.789.799,00	1.190.292.552,00	-	-	-	-	-	-
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15.808.358.593,00	14.655.267.517,00	8.438.000,00	8.435.000,00	-	-	-	-
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.808.358.593,00	14.655.267.517,00	8.438.000,00	8.435.000,00	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.808.358.593,00	14.655.267.517,00	8.438.000,00	8.435.000,00	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.296.327.343,00	9.277.405.337,00	8.438.000,00	8.435.000,00	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170.000.000,00	166.012.600,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110.000.000,00	109.335.300,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.000.000,00	56.677.300,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.578.302.740,00	6.640.518.273,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.238.577.740,00	6.354.726.273,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	279.725.000,00	235.975.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	60.000.000,00	49.817.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	85.516.000,00	74.533.230,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	73.100.000,00	68.707.980,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.916.000,00	4.397.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.500.000,00	1.428.250,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64.500.000,00	59.173.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	37.500.000,00	36.505.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27.000.000,00	22.668.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	752.464.603,00	733.222.024,00	8.438.000,00	8.435.000,00	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000,00	34.972.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	8.438.000,00	8.435.000,00	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92.000.000,00	82.282.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59.980.000,00	52.512.800,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	21.840.000,00	21.650.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	543.644.603,00	541.805.224,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.294.084.000,00	1.255.113.246,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	233.844.000,00	202.993.059,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.056.740.000,00	1.048.620.187,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	351.460.000,00	348.832.964,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.000.000,00	25.333.223,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	155.100.000,00	154.393.147,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.360.000,00	69.952.500,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	99.154.094,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	1.286.267.369,00	1.263.588.748,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1.286.267.369,00	1.263.588.748,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	89.572.241,00	87.489.982,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1.075.509.328,00	1.061.466.900,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	121.185.800,00	114.631.866,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.358.178.577,00	1.283.961.268,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.358.178.577,00	1.283.961.268,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	70.659.202,00	60.178.873,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	587.146.375,00	570.879.464,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	515.000.000,00	469.393.481,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	185.373.000,00	183.509.450,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.867.585.304,00	2.830.312.164,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.867.585.304,00	2.830.312.164,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	32.988.635,00	32.964.635,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	200.000.000,00	199.763.934,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	720.000.000,00	719.797.268,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	281.894.350,00	278.012.978,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	397.328.850,00	393.827.135,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.1.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	33.596.095,00	33.289.550,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.201.777.374,00	1.172.656.664,00	-	-	-	-	-	-
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.955.627.714,00	7.603.310.143,82	34.144.710,00	19.396.250,00	-	-	-	-
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.955.627.714,00	7.603.310.143,82	34.144.710,00	19.396.250,00	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.955.627.714,00	7.603.310.143,82	34.144.710,00	19.396.250,00	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.947.358.865,00	6.624.921.096,82	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	352.554.975,00	342.829.300,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	149.598.200,00	146.939.800,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	141.466.875,00	136.040.500,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.489.900,00	59.849.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.715.129.876,00	4.436.772.765,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.534.305.476,00	4.263.802.465,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	134.742.000,00	134.742.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	46.082.400,00	38.228.300,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	76.449.876,00	74.900.688,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	38.300.000,00	37.043.788,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	38.149.876,00	37.856.900,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	93.354.800,00	92.552.052,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	48.000.000,00	47.616.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.354.800,00	44.936.052,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	494.445.200,00	486.690.426,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	24.967.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	134.645.200,00	129.730.497,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	29.999.400,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.360.000,00	15.360.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	289.440.000,00	286.633.529,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	957.068.328,00	941.201.536,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	244.858.266,00	232.687.994,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	702.210.062,00	698.513.542,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258.355.810,00	249.974.329,82	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.000.000,00	90.313.724,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.850.000,00	35.400.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	96.490.262,00	94.742.385,82	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.015.548,00	29.518.220,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	277.281.329,00	266.621.200,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	20.000.000,00	19.910.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.1.01.0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	20.000.000,00	19.910.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	137.802.329,00	127.285.200,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	67.802.329,00	57.792.300,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	30.000.000,00	29.535.400,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	40.000.000,00	39.957.500,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	119.479.000,00	119.426.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk	100.000.000,00	99.964.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	19.479.000,00	19.462.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	277.281.329,00	271.584.382,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	50.000.000,00	49.481.100,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	10.000.000,00	9.846.100,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.1.01.0003	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	20.000.000,00	19.696.200,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	20.000.000,00	19.938.800,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	115.000.000,00	112.149.753,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	40.000.000,00	37.869.375,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	25.000.000,00	24.793.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	20.000.000,00	19.640.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	25.000.000,00	24.865.578,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.1.02.0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	5.000.000,00	4.981.800,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	112.281.329,00	109.953.529,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	62.281.329,00	62.067.429,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	50.000.000,00	47.886.100,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	340.408.251,00	327.391.165,00	34.144.710,00	19.396.250,00	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	300.408.251,00	287.653.165,00	34.144.710,00	19.396.250,00	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	225.298.351,00	214.821.300,00	34.144.710,00	19.396.250,00	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12.375.900,00	12.356.800,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.1.02.0004	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	32.734.000,00	32.483.065,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	30.000.000,00	27.992.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	40.000.000,00	39.738.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	40.000.000,00	39.738.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	113.297.940,00	112.792.300,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	113.297.940,00	112.792.300,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	50.000.000,00	49.595.500,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	63.297.940,00	63.196.800,00	-	-	-	-	-	-
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18.471.824.078,00	17.601.941.094,80	19.310.100,00	19.018.000,00	-	-	-	-
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	18.471.824.078,00	17.601.941.094,80	19.310.100,00	19.018.000,00	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERHUBUNGAN	18.250.621.007,00	17.410.443.459,80	19.310.100,00	19.018.000,00	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.481.526.538,00	13.677.705.838,80	19.310.100,00	19.018.000,00	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	238.568.249,00	230.287.452,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.143.000,00	76.900.200,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	107.855.250,00	101.867.216,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.569.999,00	51.520.036,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.407.848.264,00	9.709.054.573,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.189.358.513,00	9.496.171.322,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	167.304.500,00	165.477.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	51.185.251,00	47.406.251,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.986.406,00	93.704.104,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	69.840.406,00	64.371.278,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	31.146.000,00	29.332.826,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	102.643.250,00	97.037.762,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	102.643.250,00	97.037.762,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	958.927.259,00	957.512.895,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.550.000,00	35.517.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.838.700,00	29.933.270,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	224.210.200,00	223.972.500,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.954.000,00	24.954.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.150.000,00	15.001.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	628.224.359,00	628.135.125,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	19.310.100,00	19.018.000,00	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	19.310.100,00	19.018.000,00	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.415.131.259,00	2.345.752.253,80	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.000.000,00	13.744.501,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	284.098.500,00	243.731.217,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.117.032.759,00	2.088.276.535,80	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.421.851,00	244.356.799,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.169.851,00	130.278.299,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.400.000,00	31.493.500,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	82.852.000,00	82.585.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.976.566.300,00	2.944.983.840,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	171.459.000,00	170.723.396,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	171.459.000,00	170.723.396,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	2.574.756.300,00	2.547.310.701,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	916.983.100,00	911.284.895,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.657.773.200,00	1.636.025.806,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	70.741.800,00	70.363.038,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	70.741.800,00	70.363.038,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	109.609.200,00	109.463.829,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.07.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	109.609.200,00	109.463.829,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	46.558.800,00	43.683.676,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	46.558.800,00	43.683.676,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.441.200,00	3.439.200,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3.441.200,00	3.439.200,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	724.728.969,00	721.626.031,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	46.745.550,00	46.590.984,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	46.745.550,00	46.590.984,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	655.593.719,00	652.682.247,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	645.419.119,00	643.049.813,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	10.174.600,00	9.632.434,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	22.389.700,00	22.352.800,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.1.10.0008	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	22.389.700,00	22.352.800,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	67.799.200,00	66.127.750,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.05.1.06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	67.799.200,00	66.127.750,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.05.1.06.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	35.718.050,00	34.931.600,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.05.1.06.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	32.081.150,00	31.196.150,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001		Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I	88.510.000,00	80.825.063,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.873.000,00	27.714.557,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	31.873.000,00	27.714.557,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	31.873.000,00	27.714.557,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	56.637.000,00	53.110.506,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	56.637.000,00	53.110.506,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.02.1.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	43.004.000,00	39.532.790,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.02.1.03.0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	11.943.000,00	11.887.716,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1.690.000,00	1.690.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002		Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II	132.693.071,00	110.672.572,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.239.000,00	6.078.399,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	6.239.000,00	6.078.399,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	6.239.000,00	6.078.399,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	126.454.071,00	104.594.173,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	126.454.071,00	104.594.173,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.02.1.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	82.693.871,00	66.324.174,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.02.1.03.0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	17.320.300,00	15.541.699,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	26.439.900,00	22.728.300,00	-	-	-	-	-	-
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	33.655.717.814,00	30.224.202.615,00	2.854.041.194,00	1.037.459.196,00	-	-	-	-
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	32.952.730.420,00	29.606.964.650,00	2.854.041.194,00	1.037.459.196,00	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	32.952.730.420,00	29.606.964.650,00	2.854.041.194,00	1.037.459.196,00	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.945.346.571,00	12.510.188.402,00	571.076.835,00	43.780.000,00	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	234.166.900,00	147.751.010,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	132.404.000,00	96.405.210,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.641.200,00	6.531.500,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.121.700,00	44.814.300,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.720.578.150,00	8.273.168.821,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.367.941.550,00	7.949.337.021,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	338.698.600,00	311.753.500,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13.938.000,00	12.078.300,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	205.390.485,00	137.899.388,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	182.557.735,00	123.344.219,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.832.750,00	14.555.169,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	171.476.000,00	136.575.714,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	106.500.000,00	102.810.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	64.976.000,00	33.765.714,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.247.529.797,00	2.167.192.097,00	60.602.835,00	27.200.000,00	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.597.000,00	16.747.000,00	3.085.945,00	2.000.000,00	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	57.516.890,00	25.200.000,00	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.549.000,00	25.311.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.479.800,00	15.610.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	22.860.000,00	22.860.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.155.043.997,00	2.086.664.097,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	380.220.000,00	8.920.000,00	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	83.745.400,00	8.920.000,00	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	296.474.600,00	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.791.145.411,00	1.369.499.137,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	4.950.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	993.001.500,00	635.091.143,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	793.143.911,00	729.457.994,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	575.059.828,00	278.102.235,00	130.254.000,00	7.660.000,00	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	266.559.828,00	178.464.135,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	101.260.000,00	76.498.100,00	7.820.000,00	7.660.000,00	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.050.000,00	23.140.000,00	122.434.000,00	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	87.190.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	8.405.779.360,00	7.814.408.689,00	1.850.672.720,00	980.000.000,00	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	8.405.779.360,00	7.814.408.689,00	1.850.672.720,00	980.000.000,00	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	14.994.400,00	3.765.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.1.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	183.988.200,00	151.503.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.1.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	14.900.000,00	1.155.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.1.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	739.215.300,00	664.262.720,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.001.849.902,00	4.914.833.381,00	1.850.672.720,00	980.000.000,00	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.1.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	171.000.000,00	156.160.409,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.1.01.0007	Layanan Hubungan Media	87.558.200,00	62.127.200,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.1.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	38.299.000,00	36.984.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.1.01.0009	Manajemen Komunikasi Krisis	10.820.500,00	1.925.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.1.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	25.757.000,00	24.420.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.1.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	2.065.896.858,00	1.750.432.979,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.1.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	51.500.000,00	46.840.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	9.601.604.489,00	9.282.367.559,00	432.291.639,00	13.679.196,00	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	8.357.665.735,00	8.304.438.905,00	365.547.832,00	13.679.196,00	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.1.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	46.977.500,00	43.991.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.1.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	8.310.688.235,00	8.260.447.905,00	365.547.832,00	13.679.196,00	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	1.243.938.754,00	977.928.654,00	66.743.807,00	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.1.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	82.459.400,00	68.871.037,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.1.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	42.007.730,00	41.756.010,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.1.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	346.621.593,00	170.589.250,00	66.743.807,00	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.1.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	729.570.731,00	661.912.796,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.1.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	43.279.300,00	34.799.561,00	-	-	-	-	-	-
2.2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	373.198.700,00	321.675.355,00	-	-	-	-	-	-
2.2	2.16.2.20.2.21.01.0000		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	373.198.700,00	321.675.355,00	-	-	-	-	-	-
2.2	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	373.198.700,00	321.675.355,00	-	-	-	-	-	-
2.2	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	373.198.700,00	321.675.355,00	-	-	-	-	-	-
2.2	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	93.200.000,00	88.570.335,00	-	-	-	-	-	-
2.2	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.1.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	22.047.000,00	22.047.000,00	-	-	-	-	-	-
2.2	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	177.661.700,00	152.068.905,00	-	-	-	-	-	-
2.2	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.1.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	80.290.000,00	58.989.115,00	-	-	-	-	-	-
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	329.788.694,00	295.562.610,00	-	-	-	-	-	-
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	329.788.694,00	295.562.610,00	-	-	-	-	-	-
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	329.788.694,00	295.562.610,00	-	-	-	-	-	-
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	322.738.694,00	289.121.410,00	-	-	-	-	-	-
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	50.500.000,00	48.777.815,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	71.938.694,00	64.486.711,00	-	-	-	-	-	-
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	114.750.000,00	113.030.884,00	-	-	-	-	-	-
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	85.550.000,00	62.826.000,00	-	-	-	-	-	-
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	7.050.000,00	6.441.200,00	-	-	-	-	-	-
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	7.050.000,00	6.441.200,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.0.00.0.00.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	19.749.412.011,00	18.161.093.646,00	326.575.418,00	314.423.000,00	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.130.732.669,00	12.386.514.550,00	326.575.418,00	314.423.000,00	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.951.000,00	131.349.641,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.426.350,00	52.244.063,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	77.022.650,00	70.754.778,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.502.000,00	8.350.800,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.005.693.859,00	8.392.864.698,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.713.416.759,00	8.105.443.198,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	286.858.300,00	282.013.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.418.800,00	5.408.500,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	42.100.000,00	36.375.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	42.100.000,00	36.375.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	532.737.898,00	491.392.596,00	95.082.000,00	92.550.000,00	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.065.700,00	17.025.600,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.700.000,00	1.700.000,00	95.082.000,00	92.550.000,00	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.311.900,00	104.503.100,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.084.110,00	10.084.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	394.576.188,00	358.079.896,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.550.000,00	550.000,00	231.493.418,00	221.873.000,00	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	550.000,00	550.000,00	231.493.418,00	221.873.000,00	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.319.629.792,00	2.301.405.527,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.332.383,00	903.500,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	481.091.127,00	479.161.615,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.836.206.282,00	1.821.340.412,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.077.070.120,00	1.032.577.088,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.440.120,00	86.716.813,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.130.000,00	49.040.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	905.500.000,00	896.820.275,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	13.313.000,00	12.507.500,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	13.313.000,00	12.507.500,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	13.313.000,00	12.507.500,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	100.000.000,00	97.252.090,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.000,00	97.252.090,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	100.000.000,00	97.252.090,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.682.044.446,00	2.624.151.042,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.682.044.446,00	2.624.151.042,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	282.044.446,00	275.351.348,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.400.000.000,00	2.348.799.694,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.070.963.000,00	996.269.830,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	1.070.963.000,00	996.269.830,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	1.070.963.000,00	996.269.830,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.752.358.896,00	2.044.398.634,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	2.752.358.896,00	2.044.398.634,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	2.752.358.896,00	2.044.398.634,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0001	2.17.0.00.0.00.01	UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi	6.308.170.658,00	6.045.084.985,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	52.669.000,00	52.668.700,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.549.000,00	37.548.700,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.966.000,00	9.966.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.583.000,00	27.582.700,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.120.000,00	15.120.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.120.000,00	15.120.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	861.284.551,00	841.479.315,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	861.284.551,00	841.479.315,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	861.284.551,00	841.479.315,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	5.160.608.707,00	4.926.410.170,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	5.160.608.707,00	4.926.410.170,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	5.160.608.707,00	4.926.410.170,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	233.608.400,00	224.526.800,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	233.608.400,00	224.526.800,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	233.608.400,00	224.526.800,00	-	-	-	-	-	-
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15.387.400.764,00	13.749.598.499,00	113.246.290,00	111.094.980,00	-	-	-	-
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	15.387.400.764,00	13.749.598.499,00	113.246.290,00	111.094.980,00	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	15.387.400.764,00	13.749.598.499,00	113.246.290,00	111.094.980,00	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.967.175.350,00	10.383.150.543,00	113.246.290,00	111.094.980,00	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	153.119.408,00	147.130.900,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	109.387.750,00	104.607.500,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.731.658,00	42.523.400,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.012.782.324,00	7.570.615.986,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.773.775.441,00	7.338.021.786,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	216.157.200,00	212.310.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	22.849.683,00	20.284.200,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.400.000,00	14.392.374,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	14.400.000,00	14.392.374,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	124.281.786,00	108.623.197,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	67.500.000,00	65.736.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	56.781.786,00	42.887.197,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.293.024.608,00	1.227.487.784,00	10.347.110,00	10.337.700,00	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.981.400,00	17.680.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	10.347.110,00	10.337.700,00	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.252.000,00	81.113.200,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.170.000,00	30.317.080,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	17.080.000,00	17.010.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	958.533.240,00	922.629.200,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	171.007.968,00	158.738.304,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	102.899.180,00	100.757.280,00	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	31.153.380,00	29.011.480,00	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	71.745.800,00	71.745.800,00	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.014.407.000,00	966.348.688,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.370.900,00	140.908.119,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	868.036.100,00	825.440.569,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	355.160.224,00	348.551.614,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	257.740.000,00	253.232.614,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	11.000.000,00	9.900.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.810.224,00	21.965.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.610.000,00	63.454.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	588.991.507,00	572.576.071,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	19.227.225,00	19.124.375,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	19.227.225,00	19.124.375,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	569.764.282,00	553.451.696,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	79.149.398,00	78.926.846,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.1.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	3.849.200,00	3.849.200,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.1.02.0004	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	134.398.000,00	134.358.400,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	352.367.684,00	336.317.250,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	229.436.531,00	226.982.950,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	229.436.531,00	226.982.950,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	182.947.404,00	182.030.650,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	46.489.127,00	44.952.300,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.129.881.914,00	1.116.361.500,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.129.881.914,00	1.116.361.500,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	192.066.626,00	190.908.850,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	692.058.488,00	681.664.740,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	245.756.800,00	243.787.910,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.434.967.900,00	1.413.638.435,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.434.967.900,00	1.413.638.435,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	527.942.400,00	511.416.535,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	215.563.200,00	215.192.700,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	691.462.300,00	687.029.200,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	36.947.562,00	36.889.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	36.947.562,00	36.889.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	36.947.562,00	36.889.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.0.00.0.00.01	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	62.134.910.174,00	60.457.502.430,00	35.432.000,00	35.432.000,00	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.901.463.524,00	13.791.651.818,00	35.432.000,00	35.432.000,00	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	255.973.657,00	246.004.339,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99.084.900,00	98.313.214,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.624.100,00	12.277.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	143.264.657,00	135.414.125,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.671.215.571,00	9.934.200.364,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.149.262.314,00	9.421.962.314,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	329.930.000,00	329.670.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	192.023.257,00	182.568.050,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	196.796.096,00	175.315.323,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	78.237.643,00	65.198.293,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	35.101.503,00	30.869.100,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	83.456.950,00	79.247.930,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	61.709.100,00	40.181.300,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	11.510.700,00	7.320.700,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	31.083.200,00	29.582.100,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	19.115.200,00	3.278.500,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	156.378.000,00	104.536.678,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	156.378.000,00	104.536.678,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.263.071.743,00	1.144.249.957,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	69.428.400,00	69.412.200,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.150.900,00	91.518.100,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	62.368.000,00	62.367.900,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18.625.000,00	12.780.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.651.000,00	21.495.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	978.742.643,00	877.687.957,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.105.800,00	8.988.800,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	35.432.000,00	35.432.000,00	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	35.432.000,00	35.432.000,00	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.936.470.357,00	1.789.639.045,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.449.500,00	28.444.850,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	203.316.000,00	166.765.829,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.704.704.857,00	1.594.428.366,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	359.849.000,00	357.524.812,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.690.000,00	52.632.912,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	192.409.000,00	191.155.300,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.750.000,00	97.736.600,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.878.446.650,00	1.837.858.747,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	1.678.446.650,00	1.644.753.747,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	1.193.331.400,00	1.177.129.197,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyeleng garaan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	6.668.600,00	3.300.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	78.446.650,00	74.089.550,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	400.000.000,00	390.235.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	200.000.000,00	193.105.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	200.000.000,00	193.105.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	43.280.000.000,00	42.752.991.865,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	200.000.000,00	183.359.600,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	200.000.000,00	183.359.600,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	5.925.000.000,00	5.627.491.865,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	150.000.000,00	132.951.692,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	5.775.000.000,00	5.494.540.173,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	1.000.000.000,00	941.818.600,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1.000.000.000,00	941.818.600,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	36.155.000.000,00	36.000.321.800,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	2.425.000.000,00	2.317.156.800,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	33.730.000.000,00	33.683.165.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.075.000.000,00	2.075.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2.075.000.000,00	2.075.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	2.075.000.000,00	2.075.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0001	2.19.0.00.0.00.01	UPTD KBOR	5.001.269.902,00	4.763.502.947,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	735.893.626,00	684.672.208,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.821.400,00	46.821.400,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.598.000,00	16.598.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.246.400,00	14.246.400,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.397.000,00	10.397.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.580.000,00	5.580.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	666.112.226,00	614.890.808,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000,00	89.692.787,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	538.112.226,00	520.198.021,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.960.000,00	22.960.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.960.000,00	22.960.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4.265.376.276,00	4.078.830.739,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	4.950.000,00	4.950.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	4.950.000,00	4.950.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	649.927.000,00	617.099.039,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	649.927.000,00	617.099.039,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	3.610.499.276,00	3.456.781.700,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	651.400.000,00	613.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	2.959.099.276,00	2.842.981.700,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.0.00.0.00.01	DINAS KEBUDAYAAN	25.485.531.989,03	23.849.023.281,00	10.226.200,00	9.925.000,00	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.280.053.734,03	12.623.695.760,00	10.226.200,00	9.925.000,00	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.050.000,00	54.654.800,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.550.000,00	47.154.900,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000,00	7.499.900,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.632.026.194,00	8.997.282.508,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.247.976.194,00	8.619.159.509,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	347.049.900,00	343.466.700,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	37.000.100,00	34.656.299,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.500.000,00	18.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.500.000,00	18.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	563.440.796,03	559.880.917,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.747.500,00	14.731.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.008.390,00	69.344.939,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	4.894.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.440.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	469.244.906,03	466.910.978,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	10.226.200,00	9.925.000,00	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	10.226.200,00	9.925.000,00	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.824.006.744,00	2.811.966.335,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000,00	29.250.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	459.379.999,00	456.145.690,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.334.626.745,00	2.326.570.645,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.030.000,00	181.111.200,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.000.000,00	119.403.700,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.030.000,00	61.707.500,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	7.972.465.000,00	7.209.010.076,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.991.965.000,00	4.457.745.892,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	4.390.860.000,00	3.887.958.392,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	601.105.000,00	569.787.500,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.980.500.000,00	2.751.264.184,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	261.728.400,00	186.854.225,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	2.718.771.600,00	2.564.409.959,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	3.356.499.999,00	3.304.713.626,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.356.499.999,00	3.304.713.626,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	655.500.000,00	648.982.288,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	650.500.000,00	641.143.341,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	2.050.499.999,00	2.014.587.997,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	601.000.000,00	462.093.780,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	601.000.000,00	462.093.780,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.04.1.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	600.500.000,00	461.593.780,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	275.513.256,00	249.510.039,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	75.513.256,00	66.036.500,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	75.513.256,00	66.036.500,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	200.000.000,00	183.473.539,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	200.000.000,00	183.473.539,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0001	2.22.0.00.0.00.01	UPTD Museum Adityawarman	2.533.395.000,00	2.478.921.350,00	89.115.000,00	89.090.000,00	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	146.002.917,00	122.407.289,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	83.823.917,00	68.489.320,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.340.000,00	8.200.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.995.498,00	12.929.550,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	670.000,00	670.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.240.000,00	2.700.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.578.419,00	43.989.770,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.069.000,00	49.067.969,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.069.000,00	47.067.969,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.110.000,00	4.850.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.110.000,00	4.850.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.387.392.083,00	2.356.514.061,00	89.115.000,00	89.090.000,00	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	2.387.392.083,00	2.356.514.061,00	89.115.000,00	89.090.000,00	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	600.000.000,00	589.067.530,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	81.507.083,00	78.657.610,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1.305.885.000,00	1.291.840.047,00	89.115.000,00	89.090.000,00	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	400.000.000,00	396.948.874,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002	2.22.0.00.0.00.01	UPTD Taman Budaya	5.813.113.000,00	5.601.300.819,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	65.500.000,00	64.412.460,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	47.970.000,00	46.912.460,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	14.999.400,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.970.000,00	4.960.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000,00	18.953.060,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.030.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.030.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	5.747.613.000,00	5.536.888.359,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	5.747.613.000,00	5.536.888.359,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	2.000.000.000,00	1.960.888.577,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	3.054.500.000,00	2.909.123.972,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	693.113.000,00	666.875.810,00	-	-	-	-	-	-
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15.177.872.178,00	14.507.641.269,00	123.086.600,00	122.142.500,00	-	-	-	-
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	685.409.550,00	673.710.429,00	105.256.600,00	105.042.500,00	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	685.409.550,00	673.710.429,00	105.256.600,00	105.042.500,00	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	409.166.150,00	405.726.618,00	81.500.000,00	81.492.500,00	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	339.071.000,00	336.140.713,00	81.500.000,00	81.492.500,00	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	60.000.000,00	59.776.800,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	8.000.000,00	8.000.000,00	22.000.000,00	21.998.000,00	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	25.000.000,00	24.937.830,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	36.300.000,00	35.879.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	25.500.000,00	25.488.000,00	59.500.000,00	59.494.500,00	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.1.01.0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	15.000.000,00	14.805.300,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.1.01.0012	Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	40.000.000,00	39.878.150,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.1.01.0013	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	79.965.000,00	79.247.403,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.1.01.0014	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	11.200.000,00	10.862.330,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	38.106.000,00	37.265.900,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	70.095.150,00	69.585.905,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	19.895.150,00	19.712.205,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	36.500.000,00	36.293.700,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	13.700.000,00	13.580.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	276.243.400,00	267.983.811,00	23.756.600,00	23.550.000,00	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	20.000.000,00	19.853.200,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	20.000.000,00	19.853.200,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	40.000.000,00	39.198.496,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	20.000.000,00	19.485.296,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	20.000.000,00	19.713.200,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	216.243.400,00	208.932.115,00	23.756.600,00	23.550.000,00	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03.1.03.0001	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	25.000.000,00	24.418.900,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03.1.03.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	191.243.400,00	184.513.215,00	23.756.600,00	23.550.000,00	-	-	-	-
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	14.492.462.628,00	13.833.930.840,00	17.830.000,00	17.100.000,00	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	14.492.462.628,00	13.833.930.840,00	17.830.000,00	17.100.000,00	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.115.446.678,00	13.462.991.606,00	17.830.000,00	17.100.000,00	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	160.000.000,00	158.775.800,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000,00	39.648.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000,00	24.878.800,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.000.000,00	94.249.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.890.551.085,00	10.314.294.828,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.663.411.085,00	10.087.453.528,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	170.140.000,00	170.140.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	57.000.000,00	56.701.300,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	97.200.000,00	90.450.768,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	72.200.000,00	65.450.768,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	66.100.000,00	66.099.800,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	56.100.000,00	56.100.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	9.999.800,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	503.575.950,00	502.653.010,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.300.000,00	17.300.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.215.000,00	41.213.500,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.754.600,00	58.609.600,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.176.000,00	33.176.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18.480.000,00	17.790.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	324.650.350,00	324.563.910,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.170.000,00	2.170.000,00	17.830.000,00	17.100.000,00	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.170.000,00	2.170.000,00	17.830.000,00	17.100.000,00	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.966.878.050,00	1.903.538.969,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	14.997.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	532.728.660,00	506.608.532,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.419.149.390,00	1.381.933.437,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	428.971.593,00	425.008.431,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	182.071.593,00	180.441.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.100.000,00	63.833.500,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	182.800.000,00	180.733.931,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	310.815.950,00	307.159.986,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	91.528.000,00	90.645.801,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.1.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	35.528.000,00	34.840.851,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis	22.000.000,00	21.884.350,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.1.01.0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	12.000.000,00	11.937.500,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	22.000.000,00	21.983.100,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	155.607.950,00	153.268.470,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.1.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	28.000.000,00	27.543.870,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.1.02.0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	25.000.000,00	24.625.400,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.1.02.0004	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	30.000.000,00	28.665.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis	72.607.950,00	72.434.200,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	63.680.000,00	63.245.715,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	13.680.000,00	13.376.891,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	50.000.000,00	49.868.824,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	66.200.000,00	63.779.248,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	25.000.000,00	24.762.100,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.03.1.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	25.000.000,00	24.762.100,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.03.1.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	21.200.000,00	20.425.211,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.03.1.02.0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	21.200.000,00	20.425.211,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	20.000.000,00	18.591.937,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	20.000.000,00	18.591.937,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.0.00.0.00.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	46.714.445.929,00	44.167.389.841,00	510.037.907,00	480.842.748,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	27.487.557.559,00	25.718.476.838,00	510.037.907,00	480.842.748,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	289.848.800,00	286.019.609,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.848.800,00	76.883.100,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	211.000.000,00	209.136.509,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.898.189.901,00	19.326.036.613,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.215.556.701,00	18.644.537.713,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	634.230.000,00	633.490.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	48.403.200,00	48.008.900,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	418.022.206,00	396.061.285,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	191.466.456,00	171.167.699,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	176.555.750,00	175.205.846,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000,00	49.687.740,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	238.050.000,00	238.050.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	212.050.000,00	212.050.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.684.043.959,00	1.669.878.744,00	91.065.200,00	90.930.200,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.733.000,00	17.733.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	875.000,00	350.000,00	74.540.000,00	74.420.000,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	16.525.200,00	16.510.200,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	186.068.830,00	185.460.730,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.724.272,00	24.695.500,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	24.120.000,00	21.350.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.419.522.857,00	1.417.289.514,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	182.719.000,00	155.050.000,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	179.219.000,00	151.550.000,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.590.624.400,00	3.489.902.084,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	402.127.500,00	392.211.294,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.183.496.900,00	3.092.690.790,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368.778.293,00	312.528.503,00	236.253.707,00	234.862.548,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	276.172.293,00	247.834.860,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.706.000,00	37.606.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	900.000,00	772.643,00	236.253.707,00	234.862.548,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	26.315.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	970.825.750,00	939.352.845,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	218.849.450,00	195.731.063,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	37.828.700,00	19.943.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	181.020.750,00	175.788.063,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	751.976.300,00	743.621.782,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	720.000.000,00	712.337.482,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	31.976.300,00	31.284.300,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	9.584.842.055,00	9.376.632.015,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	8.230.335.105,00	8.089.195.790,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	32.191.700,00	28.942.600,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	8.198.143.405,00	8.060.253.190,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.110.232.500,00	1.049.386.300,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.02.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.110.232.500,00	1.049.386.300,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	244.274.450,00	238.049.925,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.03.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	64.950.250,00	62.540.632,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.03.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	179.324.200,00	175.509.293,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.926.198.402,00	3.664.275.155,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	37.120.000,00	36.950.739,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.1.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	37.120.000,00	36.950.739,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	499.783.350,00	470.914.275,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	257.865.000,00	240.519.125,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.1.05.0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	148.329.200,00	141.139.650,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	93.589.150,00	89.255.500,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	3.389.295.052,00	3.156.410.141,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.1.06.0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.389.295.052,00	3.156.410.141,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.903.604.363,00	1.771.271.513,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1.750.295.363,00	1.619.988.988,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	43.362.200,00	42.826.369,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1.500.882.863,00	1.385.195.859,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	206.050.300,00	191.966.760,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	153.309.000,00	151.282.525,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.1.02.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	153.309.000,00	151.282.525,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.841.417.800,00	2.697.381.475,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	342.783.113,00	315.321.175,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	342.783.113,00	315.321.175,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	596.895.187,00	572.203.150,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	176.815.250,00	171.761.100,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	420.079.937,00	400.442.050,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.901.739.500,00	1.809.857.150,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.901.739.500,00	1.809.857.150,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	3.25.0.00.0.00.01	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP)	832.425.519,00	793.645.492,00	68.850.000,00	42.513.000,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	124.240.000,00	107.717.156,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.000.000,00	69.238.106,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.000.000,00	69.238.106,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.240.000,00	35.479.050,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.000.000,00	11.649.050,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.180.000,00	7.180.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.060.000,00	16.650.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	708.185.519,00	685.928.336,00	68.850.000,00	42.513.000,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	708.185.519,00	685.928.336,00	68.850.000,00	42.513.000,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	234.832.000,00	234.551.406,00	68.850.000,00	42.513.000,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	473.353.519,00	451.376.930,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002	3.25.0.00.0.00.01	Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP)	1.265.936.720,00	1.249.781.925,00	395.300.000,00	390.916.852,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	298.772.710,00	297.083.496,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.995.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.995.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268.772.710,00	268.771.720,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	268.772.710,00	268.771.720,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000,00	23.316.776,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000,00	23.316.776,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	967.164.010,00	952.698.429,00	395.300.000,00	390.916.852,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	967.164.010,00	952.698.429,00	395.300.000,00	390.916.852,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	272.298.500,00	264.145.729,00	198.000.000,00	195.619.252,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	414.247.910,00	408.077.600,00	197.300.000,00	195.297.600,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	280.617.600,00	280.475.100,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0003	3.25.0.00.0.00.01	UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP)	1.644.906.900,00	1.633.778.439,33	2.387.000.000,00	2.264.749.929,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	201.180.000,00	199.149.948,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.500.000,00	162.460.808,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162.500.000,00	162.460.808,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.680.000,00	26.689.140,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.430.000,00	11.619.140,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.150.000,00	9.070.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.100.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.026.786.150,00	1.021.884.441,33	2.387.000.000,00	2.264.749.929,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1.026.786.150,00	1.021.884.441,33	2.387.000.000,00	2.264.749.929,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	1.026.786.150,00	1.021.884.441,33	2.387.000.000,00	2.264.749.929,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	128.463.050,00	125.722.100,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	128.463.050,00	125.722.100,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.1.06.0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	128.463.050,00	125.722.100,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	288.477.700,00	287.021.950,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	288.477.700,00	287.021.950,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	288.477.700,00	287.021.950,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.0.00.0.00.01	UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) I	1.458.473.778,00	1.331.074.675,00	3.166.118.658,00	1.732.417.204,84	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	319.027.565,00	262.243.828,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.027.565,00	244.669.446,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	299.027.565,00	244.669.446,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00	17.574.382,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000,00	17.574.382,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.139.446.213,00	1.068.830.847,00	3.166.118.658,00	1.732.417.204,84	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	555.213.013,00	493.198.478,00	3.166.118.658,00	1.732.417.204,84	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	555.213.013,00	493.198.478,00	3.166.118.658,00	1.732.417.204,84	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	584.233.200,00	575.632.369,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	584.233.200,00	575.632.369,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0005	3.25.0.00.0.00.01	UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) II	2.492.364.900,00	2.445.928.454,00	46.413.000,00	43.780.000,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	734.100.000,00	698.930.473,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	700.000.000,00	666.023.873,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	700.000.000,00	666.023.873,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.100.000,00	32.906.600,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.100.000,00	32.906.600,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.758.264.900,00	1.746.997.981,00	46.413.000,00	43.780.000,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	504.270.650,00	493.389.582,00	46.413.000,00	43.780.000,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	504.270.650,00	493.389.582,00	46.413.000,00	43.780.000,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	1.253.994.250,00	1.253.608.399,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	1.253.994.250,00	1.253.608.399,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0006	3.25.0.00.0.00.01	UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) III	730.668.600,00	670.947.657,00	65.865.700,00	64.382.000,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	174.651.400,00	156.671.457,00	21.617.000,00	21.617.000,00	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.428.900,00	28.644.200,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.059.400,00	5.830.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.369.500,00	22.814.200,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	21.617.000,00	21.617.000,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	21.617.000,00	21.617.000,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.522.500,00	100.927.257,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.522.500,00	100.927.257,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.700.000,00	27.100.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.700.000,00	27.100.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	556.017.200,00	514.276.200,00	44.248.700,00	42.765.000,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	31.760.000,00	31.755.700,00	44.248.700,00	42.765.000,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	31.760.000,00	31.755.700,00	44.248.700,00	42.765.000,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	524.257.200,00	482.520.500,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	524.257.200,00	482.520.500,00	-	-	-	-	-	-
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29.802.102.671,00	27.305.596.163,00	530.400.000,00	375.872.437,00	-	-	-	-
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	29.802.102.671,00	27.305.596.163,00	530.400.000,00	375.872.437,00	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		DINAS PARIWISATA	29.802.102.671,00	27.305.596.163,00	530.400.000,00	375.872.437,00	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.821.752.645,00	10.914.495.856,00	530.400.000,00	375.872.437,00	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	184.749.750,00	182.314.416,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	82.704.450,00	81.520.914,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.121.300,00	23.738.352,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.924.000,00	77.055.150,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.295.829.233,00	7.492.856.200,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.029.934.233,00	7.229.827.200,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	246.768.900,00	244.248.900,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	19.126.100,00	18.780.100,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	72.200.000,00	69.645.174,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	72.200.000,00	69.645.174,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	42.750.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.000.000,00	42.750.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.506.063.242,00	1.485.354.223,00	30.400.000,00	30.397.000,00	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.000.000,00	74.996.800,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.427.500,00	70.335.250,00	30.400.000,00	30.397.000,00	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	401.049.440,00	384.695.734,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.204.000,00	43.204.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14.640.000,00	14.635.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	899.492.302,00	895.250.939,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.250.000,00	2.236.500,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.800.000,00	4.400.000,00	500.000.000,00	345.475.437,00	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.800.000,00	4.400.000,00	500.000.000,00	345.475.437,00	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.238.883.357,00	1.176.032.791,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	321.574.000,00	284.146.209,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	917.309.357,00	891.886.582,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	469.227.063,00	461.143.052,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	299.490.000,00	291.782.796,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000,00	149.699.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.737.063,00	19.661.256,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.662.981.160,00	2.839.766.540,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	158.730.000,00	153.394.200,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	158.730.000,00	153.394.200,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3.290.251.160,00	2.479.052.789,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1.202.440.800,00	636.287.105,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	282.175.200,00	277.937.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	600.000.000,00	554.467.762,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.03.0011	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	715.246.000,00	565.294.076,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.03.0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	490.389.160,00	445.066.846,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	214.000.000,00	207.319.551,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.04.0007	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE)	143.500.000,00	138.322.821,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	70.500.000,00	68.996.730,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	6.361.441.866,00	5.894.269.816,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	6.361.441.866,00	5.894.269.816,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2.712.234.866,00	2.432.449.005,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	929.011.000,00	893.702.970,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2.720.196.000,00	2.568.117.841,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	2.519.417.800,00	2.462.008.709,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	2.038.370.800,00	1.996.993.209,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	1.451.000.000,00	1.419.466.651,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	587.370.800,00	577.526.558,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	481.047.000,00	465.015.500,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	82.317.000,00	82.063.250,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	190.000.000,00	178.926.150,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	208.730.000,00	204.026.100,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	5.436.509.200,00	5.195.055.242,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	5.286.509.200,00	5.052.143.846,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	325.000.000,00	292.391.572,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	2.510.459.200,00	2.419.364.435,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	2.400.000.000,00	2.317.568.839,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	51.050.000,00	22.819.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	150.000.000,00	142.911.396,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	150.000.000,00	142.911.396,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.0.00.0.00.02	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	60.058.646.767,00	57.722.382.219,00	1.153.241.500,00	982.117.606,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	27.640.052.944,00	25.911.035.219,00	936.746.500,00	874.117.606,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144.977.808,00	134.965.400,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.967.908,00	59.745.050,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.583.300,00	13.522.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.426.600,00	61.697.850,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.597.563.547,00	18.317.118.111,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.814.971.547,00	17.582.933.116,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	635.680.000,00	591.040.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	146.912.000,00	143.144.995,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	336.055.200,00	315.570.186,00	4.000.000,00	1.950.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	197.530.000,00	182.824.861,00	4.000.000,00	1.950.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	120.025.000,00	116.342.225,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.500.200,00	16.403.100,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	504.352.000,00	490.138.764,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	208.680.000,00	208.680.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	295.672.000,00	281.458.764,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.148.106.550,00	1.130.257.747,00	190.000.000,00	137.077.954,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.940.000,00	28.669.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	190.000.000,00	137.077.954,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	202.600.750,00	196.187.854,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	65.000.000,00	64.468.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	30.140.000,00	27.530.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	811.426.000,00	804.620.393,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.999.800,00	8.782.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	742.746.500,00	735.089.652,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	52.220.000,00	48.919.652,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	519.376.500,00	515.020.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	171.150.000,00	171.150.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.803.929.839,00	4.582.248.513,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.310.000.000,00	1.148.147.902,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.493.929.839,00	3.434.100.611,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.105.068.000,00	940.736.498,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	474.250.000,00	438.723.377,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	240.970.000,00	133.185.250,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	365.098.000,00	358.487.871,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.750.000,00	10.340.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	27.738.900.024,00	27.576.798.825,00	152.100.000,00	108.000.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.1.04.0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	969.714.504,00	877.999.435,00	152.100.000,00	108.000.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	556.905.165,00	488.245.900,00	152.100.000,00	108.000.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	412.809.339,00	389.753.535,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	26.769.185.520,00	26.698.799.390,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	26.769.185.520,00	26.698.799.390,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	589.337.828,00	501.734.636,00	64.395.000,00	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	74.650.000,00	65.119.736,00	64.395.000,00	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	14.650.000,00	12.301.200,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03.1.01.0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	60.000.000,00	52.818.536,00	64.395.000,00	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03.1.02	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	514.687.828,00	436.614.900,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03.1.02.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	469.435.128,00	398.072.750,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03.1.02.0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	45.252.700,00	38.542.150,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.127.291.571,00	3.012.424.609,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.663.005.979,00	1.612.786.714,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	316.212.000,00	304.354.928,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.106.793.979,00	1.089.395.950,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.04.1.01.0008	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	240.000.000,00	219.035.836,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	172.860.000,00	165.175.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	172.860.000,00	165.175.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	908.746.392,00	860.665.482,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	908.746.392,00	860.665.482,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	382.679.200,00	373.797.413,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.04.1.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	182.679.200,00	175.635.153,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	200.000.000,00	198.162.260,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	65.000.000,00	61.986.950,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000,00	61.986.950,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	65.000.000,00	61.986.950,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.06.1.02	Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.06.1.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	898.064.400,00	658.401.980,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	790.564.400,00	557.652.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	790.564.400,00	557.652.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	107.500.000,00	100.749.480,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	50.000.000,00	49.280.380,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	57.500.000,00	51.469.100,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0001	3.27.0.00.0.00.02	UPTD Ternak Unggas	3.334.171.649,00	3.276.884.429,00	36.832.400,00	35.805.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	116.832.400,00	115.127.900,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.212.400,00	81.072.900,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.032.400,00	69.552.900,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.180.000,00	11.520.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.620.000,00	34.055.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.620.000,00	34.055.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.117.346.099,00	3.062.318.089,00	36.832.400,00	35.805.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.385.092.645,00	2.338.883.363,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.385.092.645,00	2.338.883.363,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	732.253.454,00	723.434.726,00	36.832.400,00	35.805.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	732.253.454,00	723.434.726,00	36.832.400,00	35.805.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	99.993.150,00	99.438.440,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	99.993.150,00	99.438.440,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	99.993.150,00	99.438.440,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0002	3.27.0.00.0.00.02	UPTD Ternak Ruminansia	2.001.440.000,00	1.920.101.658,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	122.132.400,00	97.586.150,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.173.900,00	15.133.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.023.900,00	13.783.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.150.000,00	1.350.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.958.500,00	82.453.150,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.958.500,00	82.453.150,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.759.407.600,00	1.708.588.008,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.308.669.050,00	1.278.738.628,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.308.669.050,00	1.278.738.628,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	450.738.550,00	429.849.380,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	450.738.550,00	429.849.380,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	119.900.000,00	113.927.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	119.900.000,00	113.927.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	119.900.000,00	113.927.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0003	3.27.0.00.0.00.02	UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Tuah Sakato (BPTSDTS)	2.879.599.240,00	2.832.014.495,00	201.085.760,00	188.810.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	281.923.880,00	275.130.200,00	6.261.120,00	6.260.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.738.880,00	198.074.200,00	6.261.120,00	6.260.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	143.738.880,00	139.752.000,00	6.261.120,00	6.260.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59.000.000,00	58.322.200,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.185.000,00	77.056.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.185.000,00	77.056.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.252.675.360,00	2.215.947.885,00	194.824.640,00	182.550.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.252.675.360,00	2.215.947.885,00	194.824.640,00	182.550.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	2.252.675.360,00	2.215.947.885,00	194.824.640,00	182.550.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	345.000.000,00	340.936.410,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	345.000.000,00	340.936.410,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	345.000.000,00	340.936.410,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0004	3.27.0.00.0.00.02	UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat	1.664.632.454,00	1.624.237.714,00	6.309.000,00	6.165.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	157.665.708,00	140.962.202,00	6.309.000,00	6.165.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.515.056,00	86.521.250,00	6.309.000,00	6.165.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.590.056,00	48.710.250,00	6.309.000,00	6.165.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.925.000,00	37.811.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.150.652,00	54.440.952,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.150.652,00	54.440.952,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	236.674.000,00	234.002.543,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	236.674.000,00	234.002.543,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	236.674.000,00	234.002.543,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.270.292.746,00	1.249.272.969,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	702.697.647,00	689.672.030,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	702.697.647,00	689.672.030,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	567.595.099,00	559.600.939,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	567.595.099,00	559.600.939,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0005	3.27.0.00.0.00.02	UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan (PMPP)	713.332.959,00	689.183.697,00	433.342.116,00	391.363.800,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51.432.995,00	49.947.350,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.492.995,00	18.906.100,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.187.995,00	15.700.100,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.305.000,00	3.206.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.940.000,00	31.041.250,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.940.000,00	31.041.250,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	143.508.000,00	141.291.269,00	177.114.000,00	150.000.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	143.508.000,00	141.291.269,00	177.114.000,00	150.000.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	143.508.000,00	141.291.269,00	177.114.000,00	150.000.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	111.041.564,00	107.770.500,00	155.512.516,00	155.390.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	111.041.564,00	107.770.500,00	155.512.516,00	155.390.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	111.041.564,00	107.770.500,00	155.512.516,00	155.390.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	407.350.400,00	390.174.578,00	100.715.600,00	85.973.800,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	407.350.400,00	390.174.578,00	100.715.600,00	85.973.800,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	407.350.400,00	390.174.578,00	100.715.600,00	85.973.800,00	-	-	-	-
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	152.991.008.986,00	130.127.311.336,00	486.497.250,00	479.464.639,00	-	-	-	-
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	152.991.008.986,00	130.127.311.336,00	486.497.250,00	479.464.639,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	80.529.531.671,00	74.104.351.380,00	419.995.450,00	417.253.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	48.254.061.821,00	45.550.104.502,00	59.895.450,00	59.100.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	687.580.866,00	679.073.450,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	324.999.866,00	320.193.300,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	362.581.000,00	358.880.150,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.988.525.192,00	40.428.213.478,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.570.525.192,00	40.013.491.728,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	266.850.000,00	265.100.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	151.150.000,00	149.621.750,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	240.020.000,00	226.887.781,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	138.400.000,00	128.664.581,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	101.620.000,00	98.223.200,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	144.646.500,00	142.484.100,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	144.646.500,00	142.484.100,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.500.000,00	69.560.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70.500.000,00	69.560.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.113.978.900,00	1.109.800.333,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.340.900,00	21.306.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.136.000,00	115.070.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	84.150.000,00	84.147.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	893.352.000,00	889.276.833,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	35.961.000,00	35.300.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	35.961.000,00	35.300.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.388.679.673,00	2.275.143.547,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.150.000,00	15.150.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	624.902.000,00	575.360.813,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.250.000,00	64.240.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.684.377.673,00	1.620.392.734,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	620.130.690,00	618.941.813,00	23.934.450,00	23.800.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	368.845.210,00	368.030.813,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.285.000,00	37.245.000,00	23.934.450,00	23.800.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	214.000.480,00	213.666.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	30.147.025.650,00	27.483.627.948,00	360.100.000,00	358.153.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	4.725.966.000,00	4.218.407.100,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.1.01.0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	218.550.000,00	202.424.350,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.1.01.0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	4.507.416.000,00	4.015.982.750,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	25.421.059.650,00	23.265.220.848,00	360.100.000,00	358.153.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	25.421.059.650,00	23.265.220.848,00	360.100.000,00	358.153.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.852.354.200,00	907.159.980,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	1.852.354.200,00	907.159.980,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	162.532.100,00	158.676.100,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	521.854.200,00	511.855.650,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	1.167.967.900,00	236.628.230,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	276.090.000,00	163.458.950,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	276.090.000,00	163.458.950,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.06.1.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	176.090.000,00	81.309.100,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	100.000.000,00	82.149.850,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001		UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	2.070.857.757,00	1.956.557.310,00	46.234.800,00	45.973.100,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.308.826.012,00	1.195.815.150,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	47.100.000,00	47.100.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47.100.000,00	47.100.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.041.980,00	21.011.930,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.400.000,00	10.382.680,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.641.980,00	10.629.250,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.500.000,00	20.670.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.500.000,00	20.670.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	73.229.500,00	70.066.100,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.785.000,00	3.260.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.444.500,00	62.906.200,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.000.000,00	3.899.900,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.078.229.532,00	971.500.720,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	3.994.400,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	215.521.800,00	181.233.712,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.880.000,00	4.514.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	853.827.732,00	781.758.608,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.725.000,00	65.466.400,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.000.000,00	39.770.900,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.725.000,00	25.695.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	762.031.745,00	760.742.160,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	762.031.745,00	760.742.160,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	762.031.745,00	760.742.160,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-	46.234.800,00	45.973.100,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-	46.234.800,00	45.973.100,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	-	-	46.234.800,00	45.973.100,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0002		UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1.062.727.489,00	1.030.615.056,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0002	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	778.452.489,00	746.549.961,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0002	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80.000.000,00	74.445.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0002	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80.000.000,00	74.445.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0002	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.400.000,00	15.207.810,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0002	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.400.000,00	10.395.310,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0002	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	4.812.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0002	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.250.000,00	28.875.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0002	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	29.250.000,00	28.875.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0002	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.882.900,00	40.873.700,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0002	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.996.800,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0002	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.882.900,00	25.876.900,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0002	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0002	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	577.919.589,00	553.060.201,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0002	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.750.000,00	6.742.497,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0002	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.400.000,00	89.787.675,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0002	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	9.993.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0002	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	468.769.589,00	446.537.029,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0002	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.000.000,00	34.088.250,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0002	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000,00	34.088.250,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0002	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	284.275.000,00	284.065.095,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0002	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	284.275.000,00	284.065.095,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0002	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	284.275.000,00	284.065.095,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0003		UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN	1.711.329.874,00	1.636.662.482,00	9.000.000,00	8.800.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0003	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	849.778.490,00	819.000.296,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0003	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	57.000.000,00	57.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0003	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	57.000.000,00	57.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0003	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.400.000,00	21.574.465,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0003	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	14.400.000,00	11.733.565,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0003	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	9.840.900,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0003	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.500.000,00	13.330.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0003	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13.500.000,00	13.330.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0003	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.503.000,00	52.755.700,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0003	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.978.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0003	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.028.000,00	36.303.200,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0003	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.475.000,00	11.474.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0003	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	629.715.490,00	619.927.131,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0003	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	5.996.750,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0003	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.175.000,00	67.272.881,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0003	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.390.000,00	20.925.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0003	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	531.150.490,00	525.732.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0003	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.660.000,00	54.413.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0003	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.900.000,00	36.373.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0003	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.760.000,00	18.040.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0003	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	338.500.000,00	298.243.146,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0003	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	338.500.000,00	298.243.146,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0003	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	338.500.000,00	298.243.146,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0003	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	32.167.150,00	32.005.000,00	8.000.000,00	7.800.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0003	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	32.167.150,00	32.005.000,00	8.000.000,00	7.800.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0003	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	32.167.150,00	32.005.000,00	8.000.000,00	7.800.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0003	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	390.884.234,00	390.562.300,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0003	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	390.884.234,00	390.562.300,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0003	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	315.884.234,00	315.573.600,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0003	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	75.000.000,00	74.988.700,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0003	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	100.000.000,00	96.851.740,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0003	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	100.000.000,00	96.851.740,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0003	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	100.000.000,00	96.851.740,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0004		UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	2.436.974.917,00	2.396.278.105,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0004	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.106.771.550,00	1.071.115.540,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0004	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	66.832.500,00	66.787.400,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0004	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	66.832.500,00	66.787.400,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0004	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	41.160.000,00	41.124.770,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0004	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.600.000,00	15.569.870,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0004	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	25.560.000,00	25.554.900,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0004	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72.750.000,00	63.950.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0004	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	72.750.000,00	63.950.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0004	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.000.000,00	39.937.400,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0004	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.992.700,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0004	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	24.944.700,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0004	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0004	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	831.929.050,00	811.915.620,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0004	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	5.939.100,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0004	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	217.445.000,00	209.050.096,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0004	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	9.930.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0004	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	598.484.050,00	586.996.424,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0004	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.100.000,00	47.400.350,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0004	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.100.000,00	47.400.350,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0004	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	100.000.000,00	99.771.855,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0004	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	100.000.000,00	99.771.855,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0004	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	100.000.000,00	99.771.855,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0004	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	880.203.367,00	877.900.829,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0004	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	880.203.367,00	877.900.829,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0004	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	582.756.155,00	581.954.438,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0004	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	205.447.500,00	203.976.855,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0004	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	91.999.712,00	91.969.536,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0004	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	350.000.000,00	347.489.881,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0004	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	150.000.000,00	147.495.300,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0004	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	150.000.000,00	147.495.300,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0004	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	200.000.000,00	199.994.581,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0004	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	200.000.000,00	199.994.581,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0005		UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN	61.724.933.795,00	45.803.356.374,00	11.267.000,00	7.438.539,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0005	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.092.033.020,00	1.058.289.570,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0005	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	148.290.000,00	148.290.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0005	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.290.000,00	148.290.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0005	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.400.000,00	14.529.485,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0005	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.400.000,00	10.349.485,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0005	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	4.180.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0005	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.000.000,00	23.680.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0005	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24.000.000,00	23.680.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0005	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.799.000,00	27.691.100,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0005	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.996.100,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0005	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.799.000,00	17.795.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0005	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	4.900.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0005	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	841.544.020,00	811.527.576,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0005	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0005	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.695.000,00	82.926.959,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0005	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	9.950.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0005	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	727.849.020,00	712.650.617,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0005	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.000.000,00	32.571.409,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0005	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000,00	32.571.409,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0005	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	11.049.570.200,00	10.299.615.675,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0005	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	11.049.570.200,00	10.299.615.675,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0005	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	11.049.570.200,00	10.299.615.675,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0005	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	49.583.330.575,00	34.445.451.129,00	11.267.000,00	7.438.539,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0005	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	49.583.330.575,00	34.445.451.129,00	11.267.000,00	7.438.539,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0005	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	49.420.897.375,00	34.306.064.950,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0005	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	78.350.200,00	77.876.493,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0005	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	84.083.000,00	61.509.686,00	11.267.000,00	7.438.539,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0006		UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	3.454.653.483,00	3.199.490.629,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0006	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.084.933.483,00	1.885.246.929,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0006	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	66.360.000,00	66.360.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0006	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	66.360.000,00	66.360.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0006	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27.300.000,00	26.606.989,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0006	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.400.000,00	10.094.389,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0006	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	16.900.000,00	16.512.600,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0006	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.500.000,00	28.100.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0006	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28.500.000,00	28.100.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0006	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.796.750,00	50.532.100,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0006	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0006	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.796.750,00	35.532.100,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0006	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0006	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.868.826.733,00	1.673.636.090,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0006	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	1.897.950,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0006	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	657.972.000,00	490.042.438,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0006	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.360.000,00	23.275.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0006	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.181.494.733,00	1.158.420.702,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0006	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.150.000,00	40.011.750,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0006	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.900.000,00	37.761.750,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0006	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0006	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.369.720.000,00	1.314.243.700,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0006	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	397.720.000,00	362.489.650,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0006	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	282.040.000,00	266.673.300,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0006	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	115.680.000,00	95.816.350,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0006	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	972.000.000,00	951.754.050,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0006	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	972.000.000,00	951.754.050,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.0.00.0.00.01	DINAS KEHUTANAN	60.032.104.695,00	55.542.757.488,00	309.644.700,00	254.500.000,00	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	52.378.561.130,00	49.652.050.120,00	108.547.800,00	103.450.000,00	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	340.745.100,00	321.799.850,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	118.417.900,00	118.411.900,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	222.327.200,00	203.387.950,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	47.901.943.194,00	45.454.615.650,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.734.613.994,00	44.346.474.579,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.002.329.200,00	960.595.096,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	165.000.000,00	147.545.975,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	406.557.784,00	401.318.321,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	266.928.784,00	262.272.221,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	99.629.000,00	99.626.300,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	40.000.000,00	39.419.800,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	310.807.000,00	303.586.880,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	156.000.000,00	154.960.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	154.807.000,00	148.626.880,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	674.779.566,00	590.791.752,00	80.077.800,00	76.150.000,00	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	19.996.800,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	80.077.800,00	76.150.000,00	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130.000.000,00	123.839.750,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.000.000,00	53.247.500,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	38.880.000,00	38.880.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	415.899.566,00	354.827.702,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83.460.000,00	64.684.000,00	28.470.000,00	27.300.000,00	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.460.000,00	64.684.000,00	28.470.000,00	27.300.000,00	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.577.877.906,00	1.449.768.696,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	19.947.700,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	305.409.068,00	280.815.423,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.252.468.838,00	1.149.005.573,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.082.390.580,00	1.065.484.971,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	545.280.000,00	545.190.043,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.660.000,00	35.446.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	489.450.580,00	484.848.928,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.617.153.415,00	2.289.750.739,00	184.132.000,00	134.400.000,00	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	150.868.000,00	120.071.500,00	184.132.000,00	134.400.000,00	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	150.868.000,00	120.071.500,00	184.132.000,00	134.400.000,00	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	724.102.000,00	177.086.379,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	724.102.000,00	177.086.379,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	103.474.950,00	84.070.875,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	10.000.000,00	9.999.850,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	42.432.950,00	40.410.900,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	21.042.000,00	15.925.125,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	30.000.000,00	17.735.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	546.270.965,00	448.395.076,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	95.000.000,00	67.402.250,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	301.270.965,00	252.428.613,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	150.000.000,00	128.564.213,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2.011.540.000,00	1.381.604.559,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	775.600.000,00	508.127.540,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	285.940.000,00	190.720.250,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	950.000.000,00	682.756.769,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	45.735.000,00	43.396.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	17.440.000,00	15.101.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.06.0004	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	28.295.000,00	28.295.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	35.162.500,00	35.126.350,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	35.162.500,00	35.126.350,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	313.355.050,00	157.220.980,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	313.355.050,00	157.220.980,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	150.000.000,00	67.265.050,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	163.355.050,00	89.955.930,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.263.035.100,00	3.035.179.444,00	16.964.900,00	16.650.000,00	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.263.035.100,00	3.035.179.444,00	16.964.900,00	16.650.000,00	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	583.035.100,00	541.710.769,00	16.964.900,00	16.650.000,00	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	100.000.000,00	91.486.810,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	2.580.000.000,00	2.401.981.865,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	460.000.000,00	408.556.205,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	460.000.000,00	408.556.205,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.06.1.01.0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	300.000.000,00	263.005.805,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	80.000.000,00	71.991.100,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	80.000.000,00	73.559.300,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0001	3.28.0.00.0.00.01	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	2.455.250.707,00	2.196.833.138,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	148.503.928,00	125.545.613,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.480.000,00	33.480.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.480.000,00	3.480.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.023.928,00	92.065.613,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.434.000,00	54.042.408,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.589.928,00	38.023.205,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2.306.746.779,00	2.071.287.525,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	2.143.332.404,00	1.923.493.075,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	2.143.332.404,00	1.923.493.075,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	163.414.375,00	147.794.450,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	32.625.850,00	31.773.800,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih	34.258.750,00	32.049.750,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.09.0003	Sertifikasi Mutu Benih	33.013.875,00	26.249.350,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit	28.928.200,00	24.442.900,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	34.587.700,00	33.278.650,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0002	3.28.0.00.0.00.01	UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)	2.781.563.186,00	2.720.881.524,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	442.161.998,00	424.300.275,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.731.050,00	33.655.800,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.731.050,00	33.655.800,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.435.350,00	35.365.150,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	36.435.350,00	35.365.150,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.706.510,00	12.256.232,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	14.706.510,00	12.256.232,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.740.000,00	38.740.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	38.740.000,00	38.740.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.480.000,00	53.345.600,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	19.985.600,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.480.000,00	3.360.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.069.088,00	162.052.269,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.680.000,00	25.357.646,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144.389.088,00	136.694.623,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.000.000,00	88.885.224,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.000.000,00	88.885.224,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1.254.552.413,00	1.239.494.399,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	60.000.000,00	59.813.375,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	60.000.000,00	59.813.375,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	30.796.813,00	30.221.313,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	14.759.463,00	14.591.863,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	16.037.350,00	15.629.450,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	801.015.600,00	790.269.250,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	801.015.600,00	790.269.250,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	323.640.000,00	320.428.136,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	233.640.000,00	232.362.649,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	20.000.000,00	19.610.250,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	70.000.000,00	68.455.237,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	39.100.000,00	38.762.325,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	39.100.000,00	38.762.325,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.084.848.775,00	1.057.086.850,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.084.848.775,00	1.057.086.850,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	40.000.000,00	39.965.800,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.044.848.775,00	1.017.121.050,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0003	3.28.0.00.0.00.01	UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)	2.109.156.154,00	2.074.109.762,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	349.978.906,00	346.908.907,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.657.150,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	9.657.150,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.400.000,00	9.400.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	9.400.000,00	9.400.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.970.000,00	54.970.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	54.970.000,00	54.970.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.480.000,00	33.480.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.480.000,00	3.480.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.128.906,00	185.060.213,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.546.000,00	33.234.762,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	153.582.906,00	151.825.451,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.000.000,00	44.341.544,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000,00	44.341.544,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1.165.153.120,00	1.139.040.650,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	25.000.000,00	21.586.700,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	25.000.000,00	21.586.700,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	25.000.000,00	23.642.350,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	10.000.000,00	9.725.700,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	15.000.000,00	13.916.650,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	842.273.120,00	825.468.650,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	842.273.120,00	825.468.650,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	235.580.000,00	232.623.500,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	150.580.000,00	148.276.700,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	15.000.000,00	14.876.800,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	70.000.000,00	69.470.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	37.300.000,00	35.719.450,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	37.300.000,00	35.719.450,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	594.024.128,00	588.160.205,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	594.024.128,00	588.160.205,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	40.000.000,00	38.415.800,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	554.024.128,00	549.744.405,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0004	3.28.0.00.0.00.01	UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)	2.532.799.300,00	2.137.795.435,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	276.593.000,00	267.730.990,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.999.800,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	9.999.800,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.895.800,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	9.895.800,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.290.000,00	31.290.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31.290.000,00	31.290.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.480.000,00	32.824.800,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	9.750.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	9.594.800,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.480.000,00	3.480.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.823.000,00	173.720.590,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.823.000,00	33.208.378,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	143.000.000,00	140.512.212,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1.152.264.300,00	1.062.538.845,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	25.000.000,00	24.946.150,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	25.000.000,00	24.946.150,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	25.000.000,00	23.905.950,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	10.000.000,00	8.924.600,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	15.000.000,00	14.981.350,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	835.664.300,00	774.865.945,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	835.664.300,00	774.865.945,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	226.600.000,00	199.270.600,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	161.600.000,00	152.550.300,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	15.000.000,00	14.306.200,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	50.000.000,00	32.414.100,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	40.000.000,00	39.550.200,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	40.000.000,00	39.550.200,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.103.942.000,00	807.525.600,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.103.942.000,00	807.525.600,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	600.000.000,00	305.611.200,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	503.942.000,00	501.914.400,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0005	3.28.0.00.0.00.01	UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)	2.988.977.190,00	2.930.153.467,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	587.142.400,00	575.873.956,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000,00	19.533.900,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000,00	19.533.900,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95.360.000,00	95.360.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	95.360.000,00	95.360.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.480.000,00	33.480.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.480.000,00	3.480.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	383.302.400,00	372.500.056,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.893.000,00	79.250.449,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	295.409.400,00	293.249.607,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1.693.548.765,00	1.654.665.400,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	35.634.500,00	35.490.500,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	35.634.500,00	35.490.500,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	10.571.500,00	10.468.100,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	10.000.000,00	9.896.600,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	571.500,00	571.500,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1.253.864.100,00	1.219.125.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	1.253.864.100,00	1.219.125.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	357.720.000,00	353.823.300,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	257.720.000,00	256.661.250,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	20.000.000,00	19.797.225,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	80.000.000,00	77.364.825,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	35.758.665,00	35.758.500,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	35.758.665,00	35.758.500,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	708.286.025,00	699.614.111,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	708.286.025,00	699.614.111,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	40.000.000,00	39.893.550,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	668.286.025,00	659.720.561,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0006	3.28.0.00.0.00.01	UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)	1.897.791.639,00	1.848.375.656,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	338.872.906,00	328.492.649,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.991.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.991.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.981.200,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	9.981.200,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.666.240,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	9.666.240,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.740.000,00	38.740.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	38.740.000,00	38.740.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.480.000,00	33.385.700,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.995.900,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	9.909.800,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.480.000,00	3.480.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191.652.906,00	181.821.259,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.820.000,00	39.173.937,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	146.832.906,00	142.647.322,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.000.000,00	44.907.250,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000,00	44.907.250,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	940.555.425,00	917.651.978,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	25.000.000,00	24.139.200,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	25.000.000,00	24.139.200,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	22.118.275,00	19.258.450,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	10.000.000,00	8.267.150,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	12.118.275,00	10.991.300,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	639.844.600,00	627.486.244,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	639.844.600,00	627.486.244,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	215.580.000,00	208.762.984,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	150.580.000,00	147.122.200,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	15.000.000,00	14.907.284,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	50.000.000,00	46.733.500,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	38.012.550,00	38.005.100,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	38.012.550,00	38.005.100,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	618.363.308,00	602.231.029,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	618.363.308,00	602.231.029,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	40.000.000,00	39.795.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	578.363.308,00	562.436.029,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0007	3.28.0.00.0.00.01	UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)	2.227.803.838,00	2.157.723.048,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	333.695.128,00	325.607.448,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.997.750,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.997.750,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.974.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	9.974.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.720.000,00	41.720.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	41.720.000,00	41.720.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.440.000,00	31.230.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.790.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.535.128,00	178.314.549,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.200.000,00	29.128.308,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.335.128,00	149.186.241,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.000.000,00	44.371.149,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000,00	44.371.149,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	948.524.895,00	925.395.200,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	25.000.000,00	24.844.650,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	25.000.000,00	24.844.650,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	25.000.000,00	24.992.300,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	10.000.000,00	9.994.700,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	15.000.000,00	14.997.600,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	636.022.720,00	615.567.950,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	636.022.720,00	615.567.950,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	226.600.000,00	224.674.400,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	161.600.000,00	159.688.050,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	15.000.000,00	14.996.050,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	50.000.000,00	49.990.300,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	35.902.175,00	35.315.900,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	35.902.175,00	35.315.900,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	945.583.815,00	906.720.400,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	945.583.815,00	906.720.400,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	40.000.000,00	39.994.900,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	905.583.815,00	866.725.500,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0008	3.28.0.00.0.00.01	UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)	2.009.452.376,00	1.967.453.938,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	331.504.663,00	328.656.927,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	24.148.664,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	24.148.664,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.000.000,00	24.995.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	25.000.000,00	24.995.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.871.276,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	9.871.276,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.840.000,00	23.840.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	23.840.000,00	23.840.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.480.000,00	33.460.700,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	9.980.700,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.480.000,00	3.480.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.184.663,00	191.530.287,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.148.100,00	17.743.615,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175.036.563,00	173.786.672,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.000.000,00	20.811.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.000.000,00	20.811.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1.041.552.700,00	1.009.740.296,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	25.000.000,00	24.860.300,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	25.000.000,00	24.860.300,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	20.690.000,00	20.568.400,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	5.690.000,00	5.606.200,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	15.000.000,00	14.962.200,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	776.757.700,00	746.927.178,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	776.757.700,00	746.927.178,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	182.520.000,00	180.953.518,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	117.520.000,00	116.286.218,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	15.000.000,00	14.990.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	50.000.000,00	49.677.300,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	36.585.000,00	36.430.900,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	36.585.000,00	36.430.900,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	636.395.013,00	629.056.715,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	636.395.013,00	629.056.715,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	40.000.000,00	39.751.900,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	596.395.013,00	589.304.815,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0009	3.28.0.00.0.00.01	UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)	1.031.549.365,00	1.015.922.498,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	335.676.525,00	328.166.629,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	24.350.400,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	24.350.400,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.000.000,00	24.999.800,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	25.000.000,00	24.999.800,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.767.965,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	9.767.965,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.290.000,00	31.290.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31.290.000,00	31.290.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.480.000,00	33.480.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.480.000,00	3.480.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.906.525,00	159.278.464,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.164.000,00	30.511.062,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.742.525,00	128.767.402,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	323.228.200,00	318.498.229,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	25.000.000,00	24.851.030,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	25.000.000,00	24.851.030,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	25.000.000,00	24.898.525,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	10.000.000,00	9.921.525,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	15.000.000,00	14.977.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	235.580.000,00	231.417.474,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	150.580.000,00	147.779.961,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	15.000.000,00	13.698.950,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	70.000.000,00	69.938.563,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	37.648.200,00	37.331.200,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	37.648.200,00	37.331.200,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	372.644.640,00	369.257.640,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	372.644.640,00	369.257.640,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	40.000.000,00	38.734.400,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	332.644.640,00	330.523.240,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0010	3.28.0.00.0.00.01	UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)	2.215.220.013,00	2.166.027.156,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	353.060.906,00	338.700.921,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.443.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.443.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.240.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	9.240.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.980.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	9.980.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.290.000,00	31.290.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31.290.000,00	31.290.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.480.000,00	33.480.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.480.000,00	3.480.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	213.290.906,00	200.534.011,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.028.000,00	29.092.376,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	178.262.906,00	171.441.635,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.000.000,00	44.733.910,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000,00	44.733.910,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	985.112.150,00	956.737.950,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	25.000.000,00	24.993.100,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	25.000.000,00	24.993.100,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	20.269.050,00	19.722.100,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	10.000.000,00	9.458.400,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	10.269.050,00	10.263.700,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	659.263.100,00	635.333.500,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	659.263.100,00	635.333.500,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	240.580.000,00	236.975.650,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	150.580.000,00	147.578.100,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	20.000.000,00	19.699.600,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	70.000.000,00	69.697.950,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	40.000.000,00	39.713.600,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	40.000.000,00	39.713.600,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	877.046.957,00	870.588.285,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	877.046.957,00	870.588.285,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	40.000.000,00	39.997.800,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	837.046.957,00	830.590.485,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0011	3.28.0.00.0.00.01	UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)	1.363.632.105,00	1.347.610.146,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	521.849.748,00	510.676.092,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000,00	59.831.547,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000,00	59.831.547,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60.000.000,00	59.910.618,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	60.000.000,00	59.910.618,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.500.000,00	40.320.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40.500.000,00	40.320.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.640.000,00	52.640.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.640.000,00	2.640.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.709.748,00	150.546.237,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.644.000,00	18.650.400,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	136.065.748,00	131.895.837,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.000.000,00	147.427.690,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	147.427.690,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	304.457.357,00	302.959.224,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	60.000.000,00	59.593.813,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	60.000.000,00	59.593.813,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	34.457.357,00	34.134.714,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	18.588.007,00	18.400.014,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	15.869.350,00	15.734.700,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	170.000.000,00	169.471.997,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	100.000.000,00	99.705.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	20.000.000,00	19.991.997,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	50.000.000,00	49.775.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	40.000.000,00	39.758.700,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	40.000.000,00	39.758.700,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	537.325.000,00	533.974.830,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	537.325.000,00	533.974.830,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	40.000.000,00	39.953.000,00	-	-	-	-	-	-
3.28	3.28.0.00.0.00.01.0000	3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	497.325.000,00	494.021.830,00	-	-	-	-	-	-
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	16.624.726.715,00	15.667.297.982,00	206.604.930,00	200.419.200,00	-	-	-	-
3.29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	16.624.726.715,00	15.667.297.982,00	206.604.930,00	200.419.200,00	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	16.624.726.715,00	15.667.297.982,00	206.604.930,00	200.419.200,00	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.713.875.645,00	11.080.452.402,00	206.604.930,00	200.419.200,00	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	236.980.358,00	228.681.444,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.358.600,00	36.057.900,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	83.198.000,00	78.964.194,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116.423.758,00	113.659.350,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.628.512.194,00	8.178.295.702,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.409.966.994,00	7.960.011.452,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	218.545.200,00	218.284.250,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	150.872.000,00	141.453.550,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	61.400.000,00	57.116.940,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	89.472.000,00	84.336.610,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97.496.000,00	94.396.761,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	45.750.000,00	45.445.000,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	51.746.000,00	48.951.761,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	703.502.700,00	701.035.289,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	29.999.900,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	29.966.400,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.550.000,00	36.547.500,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	606.952.700,00	604.521.489,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	176.604.930,00	170.435.200,00	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	176.604.930,00	170.435.200,00	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.655.705.483,00	1.511.573.274,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	9.975.200,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	387.490.590,00	351.108.274,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.258.214.893,00	1.150.489.800,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.806.910,00	225.016.382,00	30.000.000,00	29.984.000,00	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000,00	140.800.582,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	30.000.000,00	29.984.000,00	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.806.910,00	54.215.800,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	102.312.000,00	98.163.500,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	54.273.000,00	52.743.000,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	54.273.000,00	52.743.000,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	48.039.000,00	45.420.500,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	48.039.000,00	45.420.500,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	180.000.000,00	177.126.200,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	26.785.000,00	26.046.100,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.03.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	26.785.000,00	26.046.100,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	153.215.000,00	151.080.100,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	48.873.000,00	47.326.400,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	53.270.000,00	53.139.200,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.03.1.03.0005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	51.072.000,00	50.614.500,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	2.865.875.550,00	2.576.485.130,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	2.865.875.550,00	2.576.485.130,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	2.865.875.550,00	2.576.485.130,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	1.762.663.520,00	1.735.070.750,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	75.000.000,00	74.012.900,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	75.000.000,00	74.012.900,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1.687.663.520,00	1.661.057.850,00	-	-	-	-	-	-
3.29	3.29.0.00.0.00.01.0000	3.29.06.1.06.0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1.687.663.520,00	1.661.057.850,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.3.31.0.00.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	30.949.538.831,00	28.835.755.613,00	443.685.932,00	393.045.110,00	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.251.491.095,00	17.855.265.341,00	442.685.932,00	392.045.110,00	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144.607.000,00	140.594.400,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.107.000,00	74.417.800,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.307.000,00	14.181.500,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.193.000,00	51.995.100,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.664.887.642,00	12.947.261.270,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.252.383.042,00	12.544.162.170,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	391.309.000,00	381.939.250,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	21.195.600,00	21.159.850,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.800.000,00	1.648.256,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.800.000,00	1.648.256,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	251.384.290,00	214.645.691,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	69.750.000,00	69.052.500,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	181.634.290,00	145.593.191,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.741.815.660,00	2.196.029.763,00	301.962.800,00	263.460.450,00	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.546.461,00	20.361.600,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	47.409.800,00	47.133.100,00	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.269.200,00	9.094.200,00	254.553.000,00	216.327.350,00	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	174.214.800,00	159.923.700,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.705.560,00	49.705.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.350.000,00	5.100.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.478.889.639,00	1.950.014.163,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.840.000,00	1.831.100,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	140.723.132,00	128.584.660,00	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	140.723.132,00	128.584.660,00	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.028.666.503,00	2.000.770.667,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.700.000,00	9.700.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	311.280.000,00	298.777.957,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.704.686.503,00	1.692.292.710,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	418.330.000,00	354.315.294,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	320.990.000,00	258.920.247,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.340.000,00	95.395.047,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	33.114.300,00	33.114.300,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	31.614.300,00	31.614.300,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	31.614.300,00	31.614.300,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	746.265.080,00	620.513.926,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	746.265.080,00	620.513.926,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	746.265.080,00	620.513.926,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.600.000.000,00	1.549.296.586,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1.450.000.000,00	1.411.510.686,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	1.450.000.000,00	1.411.510.686,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	137.785.900,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	150.000.000,00	137.785.900,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	2.045.939.900,00	1.995.008.046,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	1.200.729.900,00	1.187.854.200,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	1.200.729.900,00	1.187.854.200,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	845.210.000,00	807.153.846,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	845.210.000,00	807.153.846,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	7.127.397.656,00	6.651.863.229,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	7.127.397.656,00	6.651.863.229,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7.127.397.656,00	6.651.863.229,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	97.658.800,00	86.442.185,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	97.658.800,00	86.442.185,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	97.658.800,00	86.442.185,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	47.672.000,00	44.252.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	47.672.000,00	44.252.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	47.672.000,00	44.252.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0001	3.30.3.31.0.00.01	UPTD LOGAM	363.319.900,00	331.607.997,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	126.019.900,00	111.271.097,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.434.900,00	28.434.900,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.448.200,00	9.448.200,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.366.700,00	7.366.700,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.620.000,00	1.620.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.680.000,00	66.931.197,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.680.000,00	64.931.197,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.905.000,00	15.905.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.905.000,00	15.905.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	237.300.000,00	220.336.900,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	237.300.000,00	220.336.900,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	237.300.000,00	220.336.900,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0002	3.30.3.31.0.00.01	UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI	338.350.494,00	331.504.779,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	78.720.700,00	74.765.985,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.890.700,00	13.780.700,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.942.400,00	1.942.400,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.458.300,00	6.458.300,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.700.000,00	3.700.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.790.000,00	1.680.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.500.000,00	47.655.285,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.200.000,00	47.355.285,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.330.000,00	13.330.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.330.000,00	13.330.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	259.629.794,00	256.738.794,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	259.629.794,00	256.738.794,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	259.629.794,00	256.738.794,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0003	3.30.3.31.0.00.01	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)	382.941.300,00	368.633.771,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	163.156.340,00	153.584.317,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.878.750,00	14.878.750,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.778.750,00	9.778.750,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.800.000,00	129.228.067,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.100.000,00	127.528.067,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.477.590,00	9.477.500,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.477.590,00	9.477.500,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	219.784.960,00	215.049.454,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	219.784.960,00	215.049.454,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	103.715.520,00	100.105.270,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	89.146.950,00	88.523.684,00	-	-	-	-	-	-
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk	26.922.490,00	26.420.500,00	-	-	-	-	-	-
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	25.984.096.277,00	23.803.646.192,00	2.464.642.120,00	2.409.649.606,92	-	-	-	-
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	25.984.096.277,00	23.803.646.192,00	2.464.642.120,00	2.409.649.606,92	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	25.984.096.277,00	23.803.646.192,00	2.464.642.120,00	2.409.649.606,92	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.342.468.215,00	19.628.863.162,00	2.464.642.120,00	2.409.649.606,92	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.622.900,00	24.940.050,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.491.200,00	17.590.800,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.560.600,00	3.253.750,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.571.100,00	4.095.500,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.013.994.258,00	15.534.254.629,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.809.062.458,00	15.331.657.879,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	201.256.300,00	200.433.250,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3.675.500,00	2.163.500,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	58.069.000,00	51.684.464,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	52.400.000,00	48.390.214,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2.683.400,00	1.979.500,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.985.600,00	1.314.750,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.355.800.500,00	1.329.298.792,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	133.275.000,00	132.715.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.222.525.500,00	1.196.583.792,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.378.496.460,00	1.324.631.096,00	140.489.800,00	98.518.125,00	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.161.800,00	8.160.800,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	420.000,00	330.000,00	15.789.600,00	14.050.000,00	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.030,00	29.500.000,00	123.464.200,00	83.268.125,00	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	155.092.400,00	142.109.753,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	67.603.000,00	44.338.450,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	17.948.000,00	17.720.000,00	1.236.000,00	1.200.000,00	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.098.178.230,00	1.081.394.593,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.093.000,00	1.077.500,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	514.551.500,00	512.153.000,00	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	195.746.500,00	193.993.000,00	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	264.300.000,00	264.300.000,00	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	54.505.000,00	53.860.000,00	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.259.092.097,00	1.159.682.521,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.240.000,00	4.169.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	306.905.543,00	234.717.305,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	947.946.554,00	920.796.216,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.393.000,00	204.371.610,00	1.809.600.820,00	1.798.978.481,92	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.168.600,00	153.357.860,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.730.000,00	21.319.500,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.686.400,00	9.986.250,00	1.809.600.820,00	1.798.978.481,92	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.808.000,00	19.708.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.641.472.962,00	3.412.083.382,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.298.154.362,00	3.111.486.632,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2.017.379.162,00	1.905.934.034,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	653.309.200,00	649.182.300,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	28.069.100,00	27.616.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	86.168.200,00	85.971.250,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	223.163.500,00	199.934.824,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	123.511.900,00	119.093.719,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	166.553.300,00	123.754.505,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	343.318.600,00	300.596.750,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	11.527.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	331.791.600,00	299.096.750,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.000.155.100,00	762.699.648,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	180.779.800,00	133.198.590,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	17.375.400,00	10.427.150,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	163.404.400,00	122.771.440,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	819.375.300,00	629.501.058,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	282.348.700,00	248.956.408,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	97.174.000,00	65.575.700,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	309.661.100,00	236.992.350,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	130.191.500,00	77.976.600,00	-	-	-	-	-	-
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	19.968.174.842,00	18.853.900.909,00	86.779.200,00	77.796.000,00	-	-	-	-
5.01			PERENCANAAN	19.968.174.842,00	18.853.900.909,00	86.779.200,00	77.796.000,00	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	19.968.174.842,00	18.853.900.909,00	86.779.200,00	77.796.000,00	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.093.598.359,00	16.414.221.502,00	86.779.200,00	77.796.000,00	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.241.500,00	46.223.050,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.239.100,00	29.173.850,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.121.000,00	7.753.600,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.881.400,00	9.295.600,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.745.521.727,00	11.235.139.422,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.481.779.227,00	10.971.596.922,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	222.924.000,00	222.724.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	40.818.500,00	40.818.500,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	114.454.990,00	110.221.443,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	105.574.490,00	103.207.943,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2.275.000,00	2.275.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.605.500,00	4.738.500,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	115.500.000,00	114.730.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	115.500.000,00	114.730.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.027.373.397,00	2.901.186.701,00	3.899.200,00	3.396.000,00	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.892.500,00	33.888.600,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	67.778.840,00	67.719.203,00	3.899.200,00	3.396.000,00	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	106.315.300,00	102.486.487,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.240.000,00	24.155.900,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.571.646.757,00	2.453.936.511,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	223.500.000,00	219.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	555.000,00	555.000,00	82.880.000,00	74.400.000,00	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	555.000,00	555.000,00	82.880.000,00	74.400.000,00	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.514.596.745,00	1.498.099.460,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	323.788.500,00	314.880.455,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.190.808.245,00	1.183.219.005,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	528.355.000,00	508.066.426,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	357.400.000,00	346.384.247,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.250.000,00	42.730.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	93.455.000,00	91.879.229,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.250.000,00	27.072.950,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.403.991.200,00	1.089.761.087,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.044.603.300,00	847.664.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	50.596.500,00	50.581.250,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	255.901.100,00	255.781.100,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	738.105.700,00	541.301.650,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	145.587.900,00	98.571.137,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	57.408.500,00	46.535.500,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	88.179.400,00	52.035.637,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	213.800.000,00	143.525.950,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	81.376.500,00	12.381.500,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	132.423.500,00	131.144.450,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.470.585.283,00	1.349.918.320,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	624.579.100,00	583.414.470,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	95.818.200,00	87.213.700,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	38.183.800,00	37.362.300,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	67.996.300,00	67.125.600,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	21.723.100,00	21.693.100,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	91.233.100,00	81.974.100,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	31.277.700,00	31.275.200,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	85.670.400,00	77.399.970,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	192.676.500,00	179.370.500,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	503.304.433,00	448.445.050,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60.419.250,00	60.350.200,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	31.572.900,00	31.567.200,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	117.581.900,00	110.832.050,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	61.315.300,00	37.263.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	38.470.000,00	38.426.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	28.720.000,00	28.716.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	110.087.483,00	103.846.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	55.137.600,00	37.444.600,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	342.701.750,00	318.058.800,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	59.174.000,00	58.390.100,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	36.357.300,00	36.103.800,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	42.577.800,00	40.165.950,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	28.047.300,00	26.477.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22.428.900,00	22.421.900,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	34.378.350,00	33.735.450,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5.01.0.00.0.00.01.0000	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	119.738.100,00	100.764.600,00	-	-	-	-	-	-
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	25.801.652.177,00	21.200.996.376,00	1.006.385.500,00	971.339.800,00	10.487.887.909,00	5.222.259.811,30	1.297.184.937.389,00	1.139.918.785.160,46
5.02			KEUANGAN	25.801.652.177,00	21.200.996.376,00	1.006.385.500,00	971.339.800,00	10.487.887.909,00	5.222.259.811,30	1.297.184.937.389,00	1.139.918.785.160,46
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	25.801.652.177,00	21.200.996.376,00	1.006.385.500,00	971.339.800,00	10.487.887.909,00	5.222.259.811,30	1.297.184.937.389,00	1.139.918.785.160,46
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.503.027.657,00	17.634.438.825,00	986.385.500,00	951.339.800,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	209.064.300,00	71.732.242,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	145.513.600,00	44.128.342,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.283.900,00	15.442.600,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.266.800,00	12.161.300,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.731.434.865,00	14.569.802.084,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.200.631.065,00	14.165.817.584,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	422.094.200,00	373.218.600,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	108.709.600,00	30.765.900,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	39.013.300,00	10.639.700,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	18.350.700,00	3.671.200,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.662.600,00	6.968.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	403.214.800,00	310.266.800,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	127.784.000,00	125.904.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	275.430.800,00	184.362.800,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.238.497.539,00	1.954.048.695,00	31.826.800,00	18.379.800,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.842.000,00	18.945.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.207.050,00	19.229.550,00	31.826.800,00	18.379.800,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.273.500,00	41.429.900,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.999.800,00	30.443.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	16.380.000,00	16.200.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	51.250.000,00	50.885.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.021.545.189,00	1.776.915.745,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.233.500,00	1.911.500,00	954.558.700,00	932.960.000,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.233.500,00	1.911.500,00	954.558.700,00	932.960.000,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	668.599.353,00	565.949.145,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.000.000,00	17.292.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	647.599.353,00	548.657.145,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.970.000,00	150.088.659,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	181.000.000,00	127.163.659,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.970.000,00	22.925.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.331.436.319,00	2.835.934.557,00	-	-	10.487.887.909,00	5.222.259.811,30	1.297.184.937.389,00	1.139.918.785.160,46
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.829.521.233,00	1.975.016.709,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	241.526.800,00	211.508.960,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	254.905.500,00	228.569.292,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	11.552.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	1.905.600,00	-	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	167.835.900,00	147.844.600,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	80.534.100,00	66.670.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.476.126.153,00	982.932.114,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	285.565.500,00	215.957.590,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	309.569.680,00	121.533.653,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	432.258.672,00	266.273.788,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	70.754.900,00	44.809.094,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	59.754.900,00	29.527.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	46.485.950,00	33.903.700,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	106.983.988,00	67.550.044,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	68.319.034,00	36.478.600,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	79.959.900,00	54.004.850,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	684.780.714,00	328.905.808,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	81.145.449,00	48.221.957,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	190.110.846,00	120.208.752,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	84.963.800,00	80.556.900,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	109.448.500,00	20.832.900,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	219.112.119,00	59.085.299,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	384.875.700,00	265.738.252,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	76.954.800,00	51.548.100,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	123.966.100,00	92.086.457,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	140.639.300,00	113.048.195,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	43.025.500,00	9.055.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.1.04.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	290.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	10.487.887.909,00	5.222.259.811,30	1.297.184.937.389,00	1.139.918.785.160,46
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	47.646.100.000,00	41.516.315.469,46
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	-	-	-	10.487.887.909,00	5.222.259.811,30	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	-	-	-	-	-	-	1.249.538.837.389,00	1.098.402.469.691,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	967.188.201,00	730.622.994,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	967.188.201,00	730.622.994,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	177.950.900,00	161.441.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	25.820.600,00	19.080.600,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.544.000,00	1.530.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	81.280.000,00	47.512.950,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	47.409.117,00	40.005.100,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	135.595.100,00	82.983.747,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	50.656.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.638.500,00	3.976.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	295.039.000,00	252.121.453,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	44.474.900,00	35.255.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	55.733.500,00	48.372.600,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	46.046.584,00	38.343.544,00	-	-	-	-	-	-
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	97.076.181.056,00	86.848.558.614,00	2.213.939.630,00	2.090.433.045,00	-	-	-	-
5.02			KEUANGAN	97.076.181.056,00	86.848.558.614,00	2.213.939.630,00	2.090.433.045,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000		BADAN PENDAPATAN DAERAH	72.152.435.991,00	64.028.121.011,00	2.158.647.920,00	2.037.493.045,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	66.523.284.990,00	58.806.641.140,00	2.158.647.920,00	2.037.493.045,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	487.915.000,00	399.817.642,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	218.956.500,00	194.028.329,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	83.731.500,00	74.760.100,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	185.227.000,00	131.029.213,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60.674.431.870,00	53.457.838.183,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	59.878.896.547,00	52.731.003.094,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	780.257.823,00	716.319.589,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	15.277.500,00	10.515.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	371.749.750,00	331.228.069,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	180.000.000,00	164.086.969,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	161.749.750,00	152.391.100,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.000.000,00	14.750.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	168.984.000,00	91.780.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	105.000.000,00	90.280.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	63.984.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.063.189.178,00	1.867.026.974,00	147.019.000,00	139.605.000,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.192.000,00	30.114.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	147.019.000,00	139.605.000,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	349.811.156,00	306.033.856,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	48.650.000,00	48.650.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.160.000,00	18.720.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.614.376.022,00	1.463.509.118,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.011.628.920,00	1.897.888.045,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	219.008.000,00	170.180.400,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	1.518.202.920,00	1.456.950.000,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	166.068.000,00	163.407.645,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	108.350.000,00	107.350.000,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.264.019.692,00	2.190.585.135,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.997.500,00	11.860.800,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.174.796.000,00	1.127.096.890,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.076.226.192,00	1.051.627.445,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	492.995.500,00	468.365.137,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	199.500.000,00	198.813.252,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.790.000,00	63.119.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	184.705.500,00	182.095.950,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.000.000,00	24.336.935,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.629.151.001,00	5.221.479.871,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.629.151.001,00	5.221.479.871,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	493.069.400,00	392.688.954,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	104.865.750,00	94.320.368,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	682.000.000,00	608.476.850,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3.672.681.150,00	3.610.410.650,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	81.787.000,00	52.379.776,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	51.134.500,00	40.523.950,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	69.357.250,00	13.067.800,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	301.062.351,00	250.427.623,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	173.193.600,00	159.183.900,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG	4.627.276.579,00	3.976.691.272,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.348.027.109,00	2.196.415.562,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.073.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.933.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.140.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74.520.000,00	74.520.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	74.520.000,00	74.520.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	362.438.200,00	356.706.150,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.626.600,00	8.626.300,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.180.000,00	99.495.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	216.722.400,00	216.564.200,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.099.200,00	11.099.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.640.000,00	2.640.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.090.000,00	14.233.650,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.080.000,00	4.048.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.439.907.909,00	1.304.339.162,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	839.292.000,00	734.767.778,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.615.909,00	569.571.384,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	444.088.000,00	436.250.250,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.000.000,00	57.720.100,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87.400.000,00	85.920.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.008.000,00	249.977.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.680.000,00	42.632.650,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.279.249.470,00	1.780.275.710,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.279.249.470,00	1.780.275.710,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	213.000.000,00	136.450.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	969.300.000,00	646.947.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	792.140.470,00	720.553.410,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0001	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	304.809.000,00	276.324.800,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0002		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN	1.133.830.107,00	1.034.648.957,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0002	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	735.549.363,00	697.526.547,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0002	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.165.900,00	4.123.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0002	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.935.900,00	2.223.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0002	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.230.000,00	1.900.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0002	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	68.100.000,00	67.645.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0002	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	68.100.000,00	67.645.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0002	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0002	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0002	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.528.618,00	167.144.250,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0002	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.310.000,00	2.310.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0002	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.611.100,00	45.088.100,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0002	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.237.000,00	15.236.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0002	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.648.000,00	3.300.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0002	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.662.518,00	62.213.150,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0002	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	39.060.000,00	38.997.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0002	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.078.345,00	378.223.597,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0002	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.076.000,00	177.379.572,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0002	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202.002.345,00	200.844.025,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0002	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.176.500,00	69.890.200,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0002	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.000.000,00	27.465.800,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0002	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.732.500,00	11.600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0002	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.520.000,00	28.288.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0002	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.924.000,00	2.536.400,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0002	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	398.280.744,00	337.122.410,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0002	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	398.280.744,00	337.122.410,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0002	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	44.400.000,00	37.634.700,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0002	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	184.704.744,00	143.352.210,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0002	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	108.108.000,00	101.738.200,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0002	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	61.068.000,00	54.397.300,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0003		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG	952.375.466,00	926.440.268,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0003	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	714.673.222,00	702.764.043,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0003	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.928.000,00	4.808.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0003	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.107.000,00	1.017.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0003	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.821.000,00	3.791.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0003	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72.940.000,00	72.690.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0003	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72.940.000,00	72.690.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0003	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0003	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0003	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.116.552,00	135.598.550,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0003	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.620.000,00	4.564.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0003	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.884.500,00	2.848.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0003	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.977.600,00	42.278.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0003	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	14.907.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0003	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.574.452,00	50.004.050,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0003	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	21.060.000,00	20.997.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0003	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	382.276.170,00	379.036.143,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0003	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.896.000,00	102.277.621,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0003	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	278.380.170,00	276.758.522,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0003	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.912.500,00	97.131.350,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0003	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.700.000,00	46.303.400,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0003	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.360.000,00	10.140.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0003	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.800.000,00	29.778.700,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0003	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.052.500,00	10.909.250,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0003	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	237.702.244,00	223.676.225,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0003	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	237.702.244,00	223.676.225,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0003	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	16.630.000,00	16.400.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0003	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	46.939.750,00	38.629.925,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0003	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	136.535.000,00	132.136.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0003	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	37.597.494,00	36.509.800,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0004		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI	1.319.875.003,00	1.185.837.042,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0004	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	867.071.597,00	843.511.191,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0004	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.118.800,00	3.049.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0004	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.118.800,00	3.049.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0004	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87.840.000,00	87.840.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0004	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	87.840.000,00	87.840.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0004	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0004	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0004	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	173.398.553,00	168.723.100,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0004	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.834.800,00	1.829.600,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0004	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.635.400,00	44.546.100,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0004	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.795.000,00	23.794.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0004	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.880.000,00	2.880.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0004	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.653.353,00	54.262.150,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0004	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	45.600.000,00	41.411.250,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0004	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	469.880.544,00	455.563.291,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0004	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	188.457.261,00	175.761.656,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0004	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	281.423.283,00	279.801.635,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0004	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.833.700,00	110.335.800,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0004	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.400.000,00	18.967.900,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0004	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.040.000,00	16.030.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0004	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.703.700,00	66.697.900,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0004	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.690.000,00	8.640.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0004	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	452.803.406,00	342.325.851,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0004	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	452.803.406,00	342.325.851,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0004	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9.675.000,00	9.674.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0004	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	219.680.452,00	136.704.001,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0004	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	195.647.954,00	168.936.750,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0004	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	27.800.000,00	27.010.600,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0005		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH	1.563.958.276,00	1.461.355.258,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0005	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.138.538.276,00	1.109.539.538,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0005	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.640.000,00	8.640.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0005	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.120.000,00	1.120.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0005	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.520.000,00	7.520.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0005	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85.430.000,00	85.310.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0005	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	85.430.000,00	85.310.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0005	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0005	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0005	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.817.768,00	189.365.348,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0005	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.877.400,00	2.877.400,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0005	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.570.368,00	57.564.700,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0005	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.874.000,00	23.873.900,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0005	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0005	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.996.000,00	82.862.098,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0005	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	21.060.000,00	20.747.250,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0005	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	673.034.008,00	646.318.210,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0005	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	302.124.000,00	281.632.906,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0005	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	370.910.008,00	364.685.304,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0005	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.616.500,00	167.905.980,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0005	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.500.000,00	40.025.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0005	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.080.000,00	17.050.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0005	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.984.000,00	99.795.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0005	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.052.500,00	11.035.980,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0005	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	425.420.000,00	351.815.720,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0005	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	425.420.000,00	351.815.720,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0005	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	19.050.000,00	18.917.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0005	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	250.520.000,00	194.518.950,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0005	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	76.200.000,00	63.676.520,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0005	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	79.650.000,00	74.702.750,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0006		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK	1.148.967.389,00	1.049.049.315,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0006	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	840.841.639,00	820.444.096,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0006	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.392.520,00	6.842.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0006	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.652.520,00	2.142.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0006	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.740.000,00	4.700.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0006	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	92.750.000,00	86.770.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0006	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	92.750.000,00	86.770.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0006	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0006	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0006	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	183.945.836,00	183.495.836,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0006	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.424.800,00	2.424.800,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0006	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.908.936,00	45.890.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0006	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.000.100,00	14.000.100,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0006	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.880.000,00	2.880.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0006	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.652.000,00	78.304.936,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0006	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	40.080.000,00	39.996.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0006	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	440.578.783,00	429.302.285,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0006	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	159.155.500,00	155.798.298,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0006	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	281.423.283,00	273.503.987,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0006	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.174.500,00	99.033.975,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0006	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.510.000,00	31.464.600,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0006	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.660.000,00	16.660.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0006	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.968.000,00	39.873.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0006	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.036.500,00	11.036.375,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0006	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	308.125.750,00	228.605.219,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0006	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	308.125.750,00	228.605.219,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0006	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	27.401.250,00	27.390.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0006	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	126.284.500,00	59.959.727,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0006	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	113.200.000,00	101.558.455,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0006	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	41.240.000,00	39.697.037,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0007		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG	1.009.884.745,00	890.171.476,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0007	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	674.613.745,00	647.902.536,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0007	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.120.000,00	2.960.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0007	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.120.000,00	2.960.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0007	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70.550.000,00	67.280.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0007	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70.550.000,00	67.280.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0007	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0007	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0007	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.584.900,00	137.788.540,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0007	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.797.000,00	2.788.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0007	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.358.400,00	48.148.250,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0007	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0007	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.060.000,00	3.060.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0007	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.309.500,00	47.750.290,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0007	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	21.060.000,00	21.042.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0007	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	348.346.345,00	334.264.946,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0007	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147.544.000,00	134.620.921,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0007	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.802.345,00	199.644.025,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0007	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.512.500,00	95.109.050,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0007	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.850.000,00	43.925.350,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0007	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.810.000,00	16.810.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0007	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.800.000,00	29.800.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0007	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.052.500,00	4.573.700,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0007	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	335.271.000,00	242.268.940,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0007	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	335.271.000,00	242.268.940,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0007	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	13.630.000,00	13.060.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0007	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	116.744.550,00	58.503.221,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0007	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	136.702.500,00	131.873.652,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0007	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	68.193.950,00	38.832.067,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0008		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING	1.106.235.216,00	1.043.651.620,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0008	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	841.407.016,00	818.819.770,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0008	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.987.200,00	9.352.200,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0008	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.253.600,00	1.748.600,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0008	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.733.600,00	7.603.600,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0008	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	89.180.000,00	89.160.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0008	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	89.180.000,00	89.160.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0008	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0008	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0008	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.098.263,00	223.131.400,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0008	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.106.000,00	2.106.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0008	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.455.800,00	44.399.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0008	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.348.200,00	17.347.500,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0008	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.240.000,00	3.240.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0008	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.868.263,00	134.042.400,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0008	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	22.080.000,00	21.996.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0008	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400.668.153,00	383.485.870,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0008	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.376.000,00	139.713.040,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0008	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	254.292.153,00	243.772.830,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0008	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.473.400,00	101.690.300,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0008	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.650.000,00	46.867.900,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0008	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.970.000,00	13.970.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0008	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.800.000,00	29.800.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0008	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.053.400,00	11.052.400,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0008	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	264.828.200,00	224.831.850,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0008	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	264.828.200,00	224.831.850,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0008	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6.750.000,00	6.750.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0008	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	87.384.500,00	52.403.400,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0008	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	93.314.100,00	90.867.600,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0008	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	77.379.600,00	74.810.850,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0009		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK	1.302.937.983,00	1.215.149.494,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0009	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	804.787.983,00	791.277.894,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0009	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.570.000,00	2.270.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0009	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.570.000,00	2.270.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0009	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	97.920.000,00	97.585.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0009	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97.920.000,00	97.585.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0009	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0009	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0009	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	146.340.700,00	141.853.050,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0009	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.813.000,00	2.735.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0009	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.252.400,00	15.774.800,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0009	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.715.300,00	3.512.250,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0009	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.620.000,00	1.485.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0009	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.860.000,00	96.349.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0009	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	22.080.000,00	21.996.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0009	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	459.317.283,00	452.568.844,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0009	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	173.394.000,00	171.022.430,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0009	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	285.923.283,00	281.546.414,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0009	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.140.000,00	86.501.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0009	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.850.000,00	46.221.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0009	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.460.000,00	9.450.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0009	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.840.000,00	19.840.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0009	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.990.000,00	10.989.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0009	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	498.150.000,00	423.871.600,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0009	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	498.150.000,00	423.871.600,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0009	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6.840.000,00	6.430.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0009	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	193.600.000,00	134.029.430,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0009	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	252.320.000,00	244.544.920,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0009	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	45.390.000,00	38.867.250,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0010		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR	1.141.630.509,00	1.034.718.141,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0010	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	791.568.862,00	777.434.446,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0010	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.970.000,00	8.870.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0010	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.560.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0010	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.410.000,00	7.370.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0010	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72.270.000,00	72.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0010	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72.270.000,00	72.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0010	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0010	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0010	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.825.825,00	184.947.593,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0010	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.946.100,00	2.942.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0010	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.610.925,00	58.542.600,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0010	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.339.800,00	18.339.700,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0010	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.739.000,00	1.725.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0010	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.090.000,00	80.595.793,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0010	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	23.100.000,00	22.802.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0010	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	375.591.537,00	365.925.803,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0010	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.572.000,00	122.128.212,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0010	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	248.019.537,00	243.797.591,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0010	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.411.500,00	134.941.050,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0010	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.199.500,00	48.877.300,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0010	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.410.000,00	15.315.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0010	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	54.512.000,00	54.499.600,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0010	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.290.000,00	16.249.150,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0010	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	350.061.647,00	257.283.695,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0010	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	350.061.647,00	257.283.695,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0010	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6.750.000,00	6.732.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0010	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	209.922.193,00	122.868.030,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0010	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	93.883.454,00	90.696.170,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0010	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	39.506.000,00	36.987.495,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0011		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN	1.318.568.954,00	1.170.340.988,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0011	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	748.556.496,00	725.549.078,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0011	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.827.400,00	3.537.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0011	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.146.400,00	1.617.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0011	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.681.000,00	1.920.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0011	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	76.424.998,00	73.519.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0011	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76.424.998,00	73.519.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0011	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0011	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0011	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.072.815,00	99.120.240,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0011	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.472.000,00	2.395.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0011	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.311.000,00	30.874.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0011	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.400.000,00	8.364.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0011	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000,00	2.880.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0011	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.209.815,00	32.943.740,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0011	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	22.080.000,00	21.663.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0011	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	458.781.283,00	448.476.688,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0011	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.358.000,00	171.374.045,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0011	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	281.423.283,00	277.102.643,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0011	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.950.000,00	87.396.150,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0011	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.550.000,00	47.186.150,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0011	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.400.000,00	5.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0011	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0011	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	9.960.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0011	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	570.012.458,00	444.791.910,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0011	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	570.012.458,00	444.791.910,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0011	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	13.005.000,00	13.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0011	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	261.270.448,00	160.250.400,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0011	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	211.089.960,00	202.020.100,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0011	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	84.647.050,00	69.521.410,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0012		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA	1.244.599.498,00	1.123.743.167,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0012	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	833.387.863,00	800.916.477,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0012	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.860.000,00	1.712.200,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0012	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.860.000,00	1.712.200,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0012	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70.520.000,00	70.020.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0012	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70.520.000,00	70.020.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0012	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0012	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0012	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	166.297.950,00	162.830.861,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0012	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.848.800,00	2.848.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0012	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.272.400,00	36.714.700,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0012	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.513.500,00	13.476.600,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0012	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.583.250,00	52.128.561,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0012	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	58.080.000,00	57.663.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0012	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	428.956.153,00	411.729.431,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0012	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.564.000,00	174.218.219,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0012	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	250.392.153,00	237.511.212,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0012	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.753.760,00	142.623.985,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0012	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.800.000,00	40.840.985,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0012	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.050.000,00	14.815.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0012	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.400.000,00	78.753.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0012	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.503.760,00	8.215.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0012	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	411.211.635,00	322.826.690,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0012	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	411.211.635,00	322.826.690,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0012	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	51.630.000,00	44.278.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0012	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	167.910.411,00	106.321.164,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0012	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	111.723.724,00	108.362.704,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0012	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	79.947.500,00	63.864.822,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0013		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK	1.146.364.564,00	1.069.637.943,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0013	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	783.441.103,00	745.239.543,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0013	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0013	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0013	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0013	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	77.220.000,00	77.220.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0013	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	77.220.000,00	77.220.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0013	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0013	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0013	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.918.200,00	159.048.600,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0013	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.280.000,00	4.218.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0013	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.565.700,00	48.258.400,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0013	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.324.500,00	14.324.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0013	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.640.000,00	2.640.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0013	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.048.000,00	68.610.700,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0013	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	21.060.000,00	20.997.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0013	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410.718.153,00	384.998.193,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0013	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.026.000,00	141.011.382,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0013	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	250.692.153,00	243.986.811,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0013	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.084.750,00	108.472.750,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0013	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.200.000,00	46.735.750,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0013	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.580.000,00	10.885.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0013	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.800.000,00	35.774.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0013	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.504.750,00	15.078.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0013	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	362.923.461,00	324.398.400,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0013	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	362.923.461,00	324.398.400,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0013	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	15.660.000,00	13.220.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0013	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	117.386.161,00	89.596.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0013	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	202.087.300,00	194.632.400,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0013	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	27.790.000,00	26.950.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0014		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO	797.591.576,00	780.519.098,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0014	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	596.307.976,00	581.688.498,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0014	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.772.000,00	2.745.200,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0014	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.772.000,00	2.745.200,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0014	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74.125.600,00	74.035.600,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0014	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	74.125.600,00	74.035.600,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0014	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.300.000,00	15.300.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0014	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15.300.000,00	15.300.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0014	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	163.415.200,00	161.254.400,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0014	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	46.503.200,00	46.170.200,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0014	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.671.200,00	29.671.200,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0014	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.752.000,00	13.752.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0014	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.648.000,00	3.600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0014	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.780.800,00	47.064.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0014	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	21.060.000,00	20.997.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0014	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.002.676,00	286.574.198,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0014	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.760.800,00	129.258.978,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0014	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	158.241.876,00	157.315.220,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0014	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.692.500,00	41.779.100,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0014	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.000.000,00	20.132.600,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0014	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.630.000,00	10.620.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0014	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.062.500,00	11.026.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0014	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	201.283.600,00	198.830.600,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0014	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	201.283.600,00	198.830.600,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0014	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0014	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	58.749.500,00	58.380.800,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0014	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	83.834.100,00	82.061.200,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0014	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	49.700.000,00	49.388.600,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0015		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG	1.000.473.928,00	905.972.757,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0015	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	708.560.678,00	673.531.207,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0015	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.484.000,00	13.347.200,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0015	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.539.000,00	4.539.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0015	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.945.000,00	8.808.200,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0015	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72.450.000,00	72.405.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0015	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72.450.000,00	72.405.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0015	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0015	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0015	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.825.333,00	173.573.150,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0015	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.850.000,00	2.850.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0015	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.403.300,00	55.849.300,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0015	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.897.700,00	17.467.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0015	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.640.000,00	2.640.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0015	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.934.333,00	73.830.850,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0015	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	23.100.000,00	20.936.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0015	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342.231.345,00	320.410.057,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0015	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.829.000,00	126.913.512,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0015	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	201.402.345,00	193.496.545,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0015	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.070.000,00	89.295.800,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0015	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.650.000,00	42.347.150,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0015	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.970.000,00	13.330.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0015	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.450.000,00	22.200.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0015	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000,00	11.418.650,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0015	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	291.913.250,00	232.441.550,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0015	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	291.913.250,00	232.441.550,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0015	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	30.385.000,00	29.938.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0015	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	134.623.250,00	85.635.650,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0015	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	83.650.000,00	77.858.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0015	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	43.255.000,00	39.009.400,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0016		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG	1.166.442.652,00	1.115.661.350,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0016	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	868.753.352,00	853.261.800,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0016	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.536.000,00	4.741.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0016	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.876.000,00	1.226.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0016	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.660.000,00	3.515.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0016	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	106.180.000,00	106.100.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0016	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	106.180.000,00	106.100.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0016	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0016	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0016	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.623.100,00	149.854.450,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0016	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.682.000,00	2.682.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0016	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.206.900,00	40.206.900,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0016	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.038.200,00	14.038.200,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0016	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.060.000,00	1.620.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0016	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.556.000,00	69.245.350,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0016	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	22.080.000,00	22.062.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0016	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	480.451.752,00	476.757.350,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0016	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	154.368.000,00	152.526.910,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0016	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	326.083.752,00	324.230.440,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0016	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.962.500,00	106.809.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0016	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.150.000,00	49.005.950,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0016	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.960.000,00	16.960.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0016	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.800.000,00	29.800.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0016	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.052.500,00	11.043.050,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0016	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	297.689.300,00	262.399.550,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0016	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	297.689.300,00	262.399.550,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0016	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	11.600.000,00	11.600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0016	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	95.335.000,00	61.226.750,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0016	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	141.512.300,00	140.543.550,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0016	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	49.242.000,00	49.029.250,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0017		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO	1.003.820.864,00	967.412.325,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0017	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	777.758.114,00	751.322.725,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0017	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.920.000,00	11.575.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0017	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.920.000,00	3.770.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0017	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000,00	7.805.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0017	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88.180.000,00	88.165.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0017	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	88.180.000,00	88.165.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0017	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0017	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0017	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	183.594.800,00	177.756.800,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0017	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.886.000,00	1.879.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0017	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.814.100,00	52.769.900,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0017	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0017	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.814.700,00	86.111.900,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0017	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	22.080.000,00	21.996.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0017	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	375.590.814,00	357.446.875,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0017	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.428.000,00	117.272.701,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0017	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	245.162.814,00	240.174.174,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0017	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.972.500,00	108.879.050,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0017	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.250.000,00	44.205.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0017	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.870.000,00	23.870.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0017	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.800.000,00	29.800.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0017	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.052.500,00	11.003.550,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0017	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	226.062.750,00	216.089.600,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0017	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	226.062.750,00	216.089.600,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0017	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8.850.000,00	8.850.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0017	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	54.311.400,00	54.307.800,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0017	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	90.847.350,00	87.481.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0017	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	72.054.000,00	65.450.300,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0018		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN	994.292.506,00	948.190.451,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0018	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	669.050.206,00	640.680.341,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0018	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.199.800,00	2.199.800,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0018	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.199.800,00	2.199.800,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0018	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70.920.000,00	70.620.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0018	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70.920.000,00	70.620.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0018	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0018	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0018	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	159.946.328,00	159.485.155,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0018	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.421.000,00	2.421.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0018	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.630.000,00	57.421.600,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0018	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.471.000,00	11.471.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0018	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.960.000,00	1.960.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0018	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.404.328,00	65.214.555,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0018	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	21.060.000,00	20.997.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0018	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	350.708.328,00	325.700.136,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0018	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.894.000,00	171.382.900,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0018	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.814.328,00	154.317.236,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0018	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.775.750,00	72.175.250,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0018	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.250.000,00	43.812.050,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0018	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.480.000,00	17.340.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0018	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.045.750,00	11.023.200,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0018	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	325.242.300,00	307.510.110,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0018	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	325.242.300,00	307.510.110,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0018	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	24.259.000,00	24.204.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0018	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	123.280.000,00	115.240.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0018	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	155.103.300,00	150.241.485,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0018	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	22.600.000,00	17.824.625,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0019		UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH	944.619.250,00	921.246.681,00	55.291.710,00	52.940.000,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0019	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	625.908.350,00	614.818.007,00	55.291.710,00	52.940.000,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0019	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.400.000,00	44.400.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0019	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.400.000,00	44.400.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0019	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	581.508.350,00	570.418.007,00	55.291.710,00	52.940.000,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0019	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	581.508.350,00	570.418.007,00	55.291.710,00	52.940.000,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0019	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	318.710.900,00	306.428.674,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0019	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	318.710.900,00	306.428.674,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0019	5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	188.857.600,00	187.847.074,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0019	5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	129.853.300,00	118.581.600,00	-	-	-	-	-	-
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	18.104.027.110,00	16.402.797.171,00	128.756.160,00	121.393.118,13	-	-	-	-
5.03			KEPEGAWAIAN	18.104.027.110,00	16.402.797.171,00	128.756.160,00	121.393.118,13	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	18.104.027.110,00	16.402.797.171,00	128.756.160,00	121.393.118,13	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.307.653.460,00	13.253.542.476,00	128.756.160,00	121.393.118,13	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	204.018.100,00	202.904.100,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.777.500,00	67.053.900,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	136.240.600,00	135.850.200,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.298.761.152,00	10.371.708.344,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.071.561.352,00	10.144.508.594,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	227.199.800,00	227.199.750,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	188.063.000,00	178.868.050,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	131.260.000,00	129.685.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	56.803.000,00	49.183.050,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.225.250.093,00	1.181.737.700,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.080.000,00	20.968.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	159.632.150,00	144.242.700,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	172.449.500,00	150.380.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.608.000,00	1.589.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	870.480.443,00	864.558.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.000.000,00	6.885.000,00	30.130.160,00	27.200.000,00	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	30.130.160,00	27.200.000,00	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.000.000,00	6.885.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.129.593.315,00	1.072.035.078,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.323.600,00	6.920.600,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	261.000.000,00	213.123.068,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	861.269.715,00	851.991.410,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	252.967.800,00	239.404.204,00	93.626.000,00	89.193.118,13	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.255.800,00	99.041.210,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.610.000,00	74.965.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.102.000,00	65.397.994,00	93.626.000,00	89.193.118,13	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.796.373.650,00	3.149.254.695,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	2.341.366.050,00	1.789.759.845,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	17.175.700,00	12.909.900,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	181.293.050,00	154.431.600,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	52.283.050,00	42.821.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	2.000.000.000,00	1.490.701.745,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	49.239.800,00	48.399.350,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	41.374.450,00	40.496.250,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	724.902.400,00	685.750.950,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	57.591.800,00	57.204.300,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	204.526.800,00	196.308.550,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	462.783.800,00	432.238.100,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	430.694.550,00	417.176.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	45.290.700,00	38.345.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	115.679.300,00	114.878.550,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	126.974.250,00	125.626.950,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.1.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	20.127.550,00	17.649.050,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.1.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	20.242.150,00	19.980.250,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.1.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	43.902.450,00	43.335.200,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	38.061.550,00	37.094.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	20.416.600,00	20.267.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	299.410.650,00	256.567.900,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	44.968.600,00	44.781.750,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	105.394.750,00	98.694.500,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	18.161.500,00	17.919.050,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	113.875.000,00	78.951.400,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	13.510.800,00	12.781.200,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02.1.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN	3.500.000,00	3.440.000,00	-	-	-	-	-	-
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	21.157.820.393,00	19.939.974.986,00	1.854.915.170,00	1.808.990.000,00	-	-	-	-
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	21.157.820.393,00	19.939.974.986,00	1.854.915.170,00	1.808.990.000,00	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	21.157.820.393,00	19.939.974.986,00	1.854.915.170,00	1.808.990.000,00	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.930.659.955,00	15.861.355.442,00	1.854.915.170,00	1.808.990.000,00	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.659.600,00	40.513.400,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.312.300,00	30.451.200,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.347.300,00	10.062.200,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.739.982.118,00	10.738.506.941,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.511.718.318,00	10.510.867.691,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	216.319.800,00	216.203.750,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	11.944.000,00	11.435.500,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.800.000,00	26.818.375,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	28.800.000,00	26.818.375,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	181.240.050,00	174.364.900,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	54.750.000,00	54.385.000,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	126.490.050,00	119.979.900,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	896.151.151,00	885.737.623,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000,00	37.645.370,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	44.685.260,00	44.630.000,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	133.143.125,00	131.811.800,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.800.200,00	38.305.250,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.760.000,00	5.360.000,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	632.762.566,00	627.985.203,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.134.000,00	4.134.000,00	1.854.915.170,00	1.808.990.000,00	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	53.331.200,00	53.285.000,00	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.134.000,00	4.134.000,00	1.070.054.720,00	1.036.200.000,00	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	731.529.250,00	719.505.000,00	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.117.312.813,00	2.078.545.538,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	11.980.750,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	411.159.000,00	402.102.018,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.694.153.813,00	1.664.462.770,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.919.380.223,00	1.912.734.665,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.850.000,00	98.990.730,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	19.500.000,00	18.600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.800.030.223,00	1.795.143.935,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.227.160.438,00	4.078.619.544,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	583.000.000,00	566.441.391,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	568.000.000,00	551.519.091,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.02.1.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	15.000.000,00	14.922.300,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3.644.160.438,00	3.512.178.153,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	87.000.000,00	86.705.000,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	521.000.000,00	491.451.672,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	44.283.010,00	43.837.320,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.968.315.728,00	2.866.866.361,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	23.561.700,00	23.317.800,00	-	-	-	-	-	-
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	11.459.302.484,00	10.042.920.998,00	205.539.050,00	78.550.000,00	-	-	-	-
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	11.459.302.484,00	10.042.920.998,00	205.539.050,00	78.550.000,00	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	11.459.302.484,00	10.042.920.998,00	205.539.050,00	78.550.000,00	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.191.927.484,00	7.374.048.352,00	205.539.050,00	78.550.000,00	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	282.608.256,00	260.004.684,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	163.795.256,00	144.408.325,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	118.813.000,00	115.596.359,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.013.325.397,00	5.282.884.915,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.795.412.517,00	5.072.950.515,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	184.752.880,00	181.630.000,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	33.160.000,00	28.304.400,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	47.700.000,00	44.482.165,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25.000.000,00	23.005.465,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7.310.000,00	7.215.900,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.390.000,00	14.260.800,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	127.153.455,00	113.968.179,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	52.150.000,00	52.150.000,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.003.455,00	61.818.179,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	730.413.314,00	705.436.951,00	132.669.800,00	7.000.000,00	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	2.992.000,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	132.669.800,00	7.000.000,00	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.165.000,00	49.892.000,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.679.950,00	16.179.000,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.320.000,00	3.240.000,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650.248.364,00	633.133.951,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	72.869.250,00	71.550.000,00	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	52.409.250,00	51.510.000,00	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	20.460.000,00	20.040.000,00	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	786.827.062,00	766.256.241,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	11.938.000,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.512.000,00	25.573.215,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.570.000,00	2.465.000,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	736.745.062,00	726.280.026,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.900.000,00	201.015.217,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164.400.000,00	162.198.620,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.200.000,00	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.300.000,00	26.816.597,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.267.375.000,00	2.668.872.646,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.054.500.000,00	822.231.925,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	665.000.000,00	493.535.450,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	345.000.000,00	293.748.478,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	44.500.000,00	34.947.997,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	569.500.000,00	430.936.691,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	150.000.000,00	93.281.250,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	119.500.000,00	98.444.700,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	150.000.000,00	135.172.941,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	150.000.000,00	104.037.800,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	945.000.000,00	758.549.225,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	165.000.000,00	120.631.940,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	270.000.000,00	258.019.145,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	170.000.000,00	143.740.700,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	160.000.000,00	124.233.340,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	180.000.000,00	111.924.100,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	698.375.000,00	657.154.805,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	425.000.000,00	397.038.505,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	183.375.000,00	175.950.500,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.01.0000	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	90.000.000,00	84.165.800,00	-	-	-	-	-	-
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	19.444.905.524,00	16.712.896.331,00	260.222.086,00	189.832.500,00	-	-	-	-
5.07			PENGELOLAAN PENGHUBUNG	19.444.905.524,00	16.712.896.331,00	260.222.086,00	189.832.500,00	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000		BADAN PENGHUBUNG	19.444.905.524,00	16.712.896.331,00	260.222.086,00	189.832.500,00	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.948.012.935,00	12.030.047.242,00	260.222.086,00	189.832.500,00	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.990.000,00	54.976.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.128.000,00	32.689.600,00	-	-	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.061.000,00	9.230.200,00	-	-	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.801.000,00	13.056.200,00	-	-	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.915.557.707,00	6.622.377.233,00	-	-	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.681.131.707,00	6.387.961.233,00	-	-	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	222.420.000,00	222.420.000,00	-	-	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12.006.000,00	11.996.000,00	-	-	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	117.281.000,00	75.623.451,00	-	-	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	108.200.000,00	68.064.551,00	-	-	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2.995.000,00	2.533.400,00	-	-	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.086.000,00	5.025.500,00	-	-	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	101.250.000,00	100.980.000,00	-	-	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	101.250.000,00	100.980.000,00	-	-	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.048.383.168,00	977.358.460,00	102.155.000,00	73.000.000,00	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.503.300,00	20.343.000,00	-	-	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.420.000,00	-	102.155.000,00	73.000.000,00	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	177.774.960,00	164.478.381,00	-	-	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.502.000,00	24.870.200,00	-	-	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.140.000,00	54.694.624,00	-	-	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	755.042.908,00	712.972.255,00	-	-	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	158.067.086,00	116.832.500,00	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	67.086,00	-	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	41.000.000,00	-	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	117.000.000,00	116.832.500,00	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.388.143.848,00	3.000.106.701,00	-	-	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.100.000,00	21.868.600,00	-	-	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	380.163.000,00	353.796.366,00	-	-	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.983.880.848,00	2.624.441.735,00	-	-	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.319.407.212,00	1.198.625.397,00	-	-	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	331.904.312,00	320.670.840,00	-	-	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.720.000,00	43.674.750,00	-	-	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	906.136.500,00	796.950.307,00	-	-	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.646.400,00	37.329.500,00	-	-	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	6.496.892.589,00	4.682.849.089,00	-	-	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	6.496.892.589,00	4.682.849.089,00	-	-	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	3.144.156.367,00	1.490.406.175,00	-	-	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	527.433.151,00	489.886.743,00	-	-	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	442.953.778,00	430.984.827,00	-	-	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	240.780.600,00	221.735.497,00	-	-	-	-	-	-
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2.141.568.693,00	2.049.835.847,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009		BIRO HUKUM	2.082.300.100,00	1.664.333.095,00	117.699.900,00	95.355.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.178.031.900,00	973.354.267,00	117.699.900,00	95.355.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.673.800,00	44.577.401,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000,00	24.867.121,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	14.768.980,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.673.800,00	4.941.300,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	89.000.000,00	88.452.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	84.000.000,00	84.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	4.452.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.200.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	13.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.134.000,00	38.550.920,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	65.134.000,00	38.550.920,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	866.115.700,00	754.692.076,00	63.301.500,00	51.075.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.492.500,00	1.116.600,00	33.530.000,00	22.700.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	48.203.900,00	45.370.000,00	29.771.500,00	28.375.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	26.190.100,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	25.924.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	21.416.400,00	20.340.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	735.002.900,00	635.751.376,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.918.400,00	-	54.398.400,00	44.280.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.918.400,00	-	54.398.400,00	44.280.000,00	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.800.000,00	3.962.250,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	3.962.250,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.190.000,00	41.119.620,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.490.000,00	36.069.704,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.700.000,00	5.049.916,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	904.268.200,00	690.978.828,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	511.865.200,00	401.866.949,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	194.700.000,00	128.909.218,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	20.083.200,00	14.016.600,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	91.642.000,00	65.005.495,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	205.440.000,00	193.935.636,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	392.403.000,00	289.111.879,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	277.025.000,00	181.480.079,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	115.378.000,00	107.631.800,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007		BIRO PEREKONOMIAN	1.843.271.345,00	1.698.888.954,00	101.950.760,00	95.130.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	870.073.195,00	837.507.504,00	101.950.760,00	95.130.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.537.300,00	16.494.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.609.800,00	13.597.200,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.760.500,00	1.730.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.167.000,00	1.166.800,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	93.862.500,00	92.572.950,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	88.800.000,00	87.600.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.062.500,00	4.972.950,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.700.000,00	15.046.833,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	13.200.000,00	12.579.833,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.500.000,00	2.467.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.960.394,00	15.735.600,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26.960.394,00	15.735.600,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	659.236.101,00	642.668.916,00	51.959.200,00	49.080.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	1.155.000,00	980.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	50.804.200,00	48.100.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.187.000,00	12.824.500,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.240.000,00	13.240.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	510.000,00	510.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	632.299.101,00	616.094.416,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	49.991.560,00	46.050.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	49.991.560,00	46.050.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.076.900,00	1.841.408,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.342.500,00	1.107.850,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	734.400,00	733.558,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.700.000,00	53.147.797,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.090.000,00	41.717.797,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.610.000,00	11.430.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	973.198.150,00	861.381.450,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	352.619.721,00	303.143.878,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	127.185.312,00	93.662.967,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	225.434.409,00	209.480.911,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	170.199.238,00	151.486.403,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	84.925.938,00	82.780.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	35.577.600,00	24.450.700,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	49.695.700,00	44.255.703,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	450.379.191,00	406.751.169,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	130.847.800,00	113.133.548,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	61.456.418,00	51.399.640,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	33.935.131,00	26.562.390,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	103.857.492,00	99.324.091,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	120.282.350,00	116.331.500,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010		BIRO ORGANISASI	2.415.720.086,00	2.308.221.017,00	434.279.914,00	401.821.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.303.143.613,00	1.284.150.204,00	434.279.914,00	401.821.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.124.500,00	6.124.200,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.279.500,00	4.279.200,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.017.000,00	1.017.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	828.000,00	828.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	93.360.000,00	92.760.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	93.360.000,00	92.760.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.143.000,00	9.003.216,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8.000.000,00	7.860.216,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.143.000,00	1.143.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.500.000,00	1.600.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.500.000,00	1.600.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.018.761.052,00	1.005.834.026,00	195.004.300,00	168.971.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	76.044.300,00	63.211.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.950.000,00	59.570.000,00	118.960.000,00	105.760.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.797.300,00	49.768.400,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.270.000,00	33.270.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	875.743.752,00	863.225.626,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	239.275.614,00	232.850.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	86.258.334,00	85.450.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	153.017.280,00	147.400.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.455.061,00	81.552.612,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	84.455.061,00	81.552.612,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.800.000,00	87.276.150,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.100.000,00	69.657.150,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.700.000,00	17.619.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.112.576.473,00	1.024.070.813,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	415.279.039,00	349.371.146,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	121.985.700,00	109.059.541,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	152.856.139,00	133.252.055,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	140.437.200,00	107.059.550,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	697.297.434,00	674.699.667,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	155.265.500,00	148.760.651,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	176.217.500,00	171.068.590,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	87.916.800,00	84.173.612,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	83.483.251,00	79.704.453,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	194.414.383,00	190.992.361,00	-	-	-	-	-	-
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	206.531.779.622,00	186.870.932.722,00	25.107.854.819,00	23.869.707.485,00	-	-	-	-
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	206.531.779.622,00	186.870.932.722,00	25.107.854.819,00	23.869.707.485,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001		BIRO UMUM	117.048.313.256,00	110.257.084.789,00	23.527.735.040,00	22.422.226.850,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	117.048.313.256,00	110.257.084.789,00	23.527.735.040,00	22.422.226.850,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	158.478.100,00	151.395.550,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.476.300,00	70.835.300,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.922.800,00	46.185.350,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.079.000,00	34.374.900,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58.888.757.104,00	54.678.118.318,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58.226.493.604,00	54.035.792.976,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	564.839.500,00	558.774.300,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	97.424.000,00	83.551.042,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	549.473.318,00	537.383.964,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	444.747.149,00	439.851.811,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	104.726.169,00	97.532.153,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	32.364.561,00	30.309.775,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	32.364.561,00	30.309.775,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	489.412.587,00	457.400.400,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	437.500.000,00	405.641.800,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	51.912.587,00	51.758.600,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.172.404.555,00	6.048.777.570,00	208.694.840,00	192.336.096,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	94.133.800,00	94.133.800,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	627.066.900,00	614.577.150,00	58.730.000,00	58.730.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	973.973.430,00	959.606.500,00	92.906.840,00	92.906.840,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	703.337.000,00	689.125.400,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	179.109.500,00	173.429.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	50.058.000,00	33.699.256,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.564.702.593,00	3.496.032.320,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.081.332,00	21.873.400,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	206.087.560,00	199.587.450,00	14.969.362.011,00	14.127.780.173,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	18.200.400,00	17.002.800,00	2.312.318.036,00	2.148.171.500,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	187.887.160,00	182.584.650,00	12.657.043.975,00	11.979.608.673,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.871.459.008,00	18.623.416.584,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	56.269.500,00	50.256.200,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.442.027.960,00	3.916.954.288,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.450.687.000,00	1.386.323.470,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.922.474.548,00	13.269.882.626,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.630.021.566,00	7.022.847.010,00	7.061.065.675,00	6.887.606.581,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	230.982.000,00	190.765.793,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.827.566.141,00	1.661.209.492,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	39.375.000,00	29.500.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	203.191.799,00	165.890.705,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.889.776.626,00	4.617.927.340,00	7.061.065.675,00	6.887.606.581,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	439.130.000,00	357.553.680,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.724.431.705,00	4.637.822.029,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	252.244.496,00	245.637.970,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	343.739.750,00	343.736.600,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	80.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.048.447.459,00	4.048.447.459,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	18.325.423.192,00	17.870.026.139,00	1.288.612.514,00	1.214.504.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	8.457.216.940,00	8.214.109.192,00	539.822.554,00	513.615.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	6.877.628.970,00	6.711.158.880,00	623.928.070,00	576.991.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	2.990.577.282,00	2.944.758.067,00	124.861.890,00	123.898.000,00	-	-	-	-
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	185.280.123.116,00	161.407.037.764,16	33.989.489.729,00	33.324.232.247,00	-	-	-	-
4.02			SEKRETARIAT DPRD	185.280.123.116,00	161.407.037.764,16	33.989.489.729,00	33.324.232.247,00	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		SEKRETARIAT DPRD	185.280.123.116,00	161.407.037.764,16	33.989.489.729,00	33.324.232.247,00	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	93.474.088.418,00	89.769.916.399,16	33.989.489.729,00	33.324.232.247,00	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	696.337.900,00	665.383.850,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	311.120.000,00	305.171.850,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	263.070.000,00	253.015.600,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.147.900,00	107.196.400,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.295.705.335,00	12.396.462.361,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.712.077.135,00	10.854.294.161,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.238.685.300,00	1.208.993.500,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	344.942.900,00	333.174.700,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.065.592.587,00	1.054.214.786,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	467.733.492,00	464.632.911,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	552.829.500,00	544.552.280,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	45.029.595,00	45.029.595,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	333.808.000,00	298.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	298.000.000,00	298.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.808.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.133.080.247,00	8.284.618.282,00	2.387.413.246,00	2.359.714.100,00	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	152.859.280,00	150.691.600,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	325.604.825,00	312.830.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	206.031.580,00	172.967.000,00	2.337.413.246,00	2.329.797.100,00	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.618.899.512,00	1.335.305.156,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.217.768.750,00	987.693.149,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	718.825.000,00	690.890.000,00	50.000.000,00	29.917.000,00	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.698.520.000,00	1.501.152.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.383.656.000,00	2.382.647.277,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	107.234.300,00	104.593.100,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	703.681.000,00	645.849.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	62.046.000,00	56.820.656,00	18.998.389.403,00	18.926.445.330,00	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	660.900.000,00	660.900.000,00	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	837.056.903,00	834.898.780,00	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	995.218.600,00	995.000.000,00	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	85.200.000,00	66.384.700,00	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.046.000,00	56.820.656,00	8.960.393.900,00	8.943.415.000,00	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	7.459.620.000,00	7.425.846.850,00	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.980.532.343,00	13.577.307.493,62	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	140.430.700,00	139.245.400,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.858.485.200,00	2.618.744.203,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.079.810.458,00	2.005.958.111,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.901.805.985,00	8.813.359.779,62	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.028.849.169,00	9.812.815.998,54	12.603.687.080,00	12.038.072.817,00	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	152.571.000,00	142.616.524,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	977.843.100,00	938.147.076,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	333.000.000,00	314.585.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.390.000,00	76.027.950,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.501.346.959,00	3.388.884.932,73	12.603.687.080,00	12.038.072.817,00	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.792.942.110,00	4.267.376.980,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.161.756.000,00	685.177.535,81	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	43.150.554.441,00	42.988.774.530,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	41.263.890.441,00	41.137.622.530,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.831.764.000,00	1.796.360.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	54.900.000,00	54.792.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	727.582.396,00	635.518.442,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	95.160.000,00	94.950.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	143.400.000,00	143.376.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	489.022.396,00	397.192.442,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	91.806.034.698,00	71.637.121.365,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	23.370.562.700,00	15.239.721.807,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.206.849.000,00	653.406.382,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	6.627.657.200,00	3.903.289.192,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	339.778.000,00	276.625.674,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	421.049.000,00	204.261.300,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	14.775.229.500,00	10.202.139.259,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.575.335.700,00	3.444.617.638,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	880.075.400,00	835.649.969,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	92.017.500,00	75.446.300,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	1.549.117.900,00	669.129.262,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD	1.197.898.800,00	1.101.824.478,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	6.958.300,00	3.847.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	849.267.800,00	758.720.629,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	10.021.473.900,00	7.242.225.176,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.764.827.600,00	1.275.625.500,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.911.829.600,00	1.406.953.500,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.994.321.700,00	1.362.821.500,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.992.757.900,00	1.427.635.200,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1.645.392.600,00	1.261.768.700,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	151.919.400,00	29.764.400,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	63.262.300,00	4.562.300,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	497.162.800,00	473.094.076,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	15.637.019.158,00	13.991.957.446,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.04.0001	Orientasi DPRD	1.534.625.798,00	997.898.180,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	2.910.320.400,00	2.657.388.044,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.045.475.960,00	2.034.293.063,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	501.657.800,00	448.577.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	439.885.000,00	190.461.210,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	8.205.054.200,00	7.663.339.949,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	11.014.689.350,00	9.664.292.240,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	2.900.700,00	2.900.700,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	8.561.200,00	7.627.200,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	11.003.227.450,00	9.653.764.340,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	378.101.400,00	357.430.843,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	236.864.600,00	231.697.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	141.236.800,00	125.733.843,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	26.808.852.490,00	21.696.876.215,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	18.578.908.746,00	14.577.730.510,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	263.670.400,00	248.881.450,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.790.757.344,00	1.434.548.951,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4.201.436.000,00	3.481.566.747,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.1.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1.974.080.000,00	1.954.148.557,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.641.933.606,00	2.384.461.591,00	145.264.045,00	124.200.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.271.558.256,00	1.224.451.931,00	145.264.045,00	124.200.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108.342.000,00	87.914.300,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.949.800,00	66.204.300,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.490.000,00	5.234.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.902.200,00	16.476.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.359.000,00	98.352.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	93.360.000,00	93.360.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6.999.000,00	4.992.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.710.000,00	19.589.600,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	18.400.000,00	16.359.600,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.310.000,00	3.230.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.800.000,00	100.797.800,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.800.000,00	100.797.800,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	770.136.318,00	750.995.730,00	145.264.045,00	124.200.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.200.000,00	660.000,00	145.264.045,00	124.200.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.950.400,00	12.360.500,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.651.340,00	66.440.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.060.000,00	18.060.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	660.274.578,00	653.475.230,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.020.938,00	82.557.586,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.120.938,00	78.657.586,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.190.000,00	84.244.915,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.100.000,00	69.154.915,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.090.000,00	15.090.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.370.375.350,00	1.160.009.660,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	835.393.950,00	708.234.092,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	240.601.400,00	188.131.953,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	217.035.300,00	196.397.614,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	377.757.250,00	323.704.525,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	534.981.400,00	451.775.568,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	54.661.200,00	40.493.500,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	287.991.450,00	267.739.499,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0011	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	192.328.750,00	143.542.569,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	23.288.004.670,00	21.276.951.726,00	211.995.330,00	202.625.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.288.004.670,00	21.276.951.726,00	211.995.330,00	202.625.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	168.307.661,00	160.575.200,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	145.678.161,00	137.945.700,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.591.700,00	12.591.700,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.037.800,00	10.037.800,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	162.662.200,00	158.812.200,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	137.874.200,00	137.874.200,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	24.788.000,00	20.938.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	42.945.300,00	42.723.092,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	36.400.000,00	36.375.792,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6.545.300,00	6.347.300,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	469.445.744,00	438.946.172,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	192.846.500,00	182.516.663,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	276.599.244,00	256.429.509,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.654.918.670,00	3.500.098.636,00	25.386.600,00	25.050.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	11.575.600,00	11.500.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	11.811.000,00	11.650.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.030.868,00	120.650.950,00	2.000.000,00	1.900.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.410.200,00	42.260.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	319.078.080,00	305.208.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.172.399.522,00	3.031.979.686,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	186.608.730,00	177.575.000,00	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	35.742.300,00	32.800.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	150.866.430,00	144.775.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.488.209.674,00	1.443.056.665,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.737.500,00	18.110.250,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.779.000,00	54.590.582,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.410.693.174,00	1.370.355.833,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	358.150.000,00	353.107.750,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	325.510.000,00	321.947.750,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.640.000,00	31.160.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	5.221.301.800,00	4.654.049.642,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan	825.776.528,00	782.670.932,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	3.145.800.000,00	2.940.384.910,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	1.249.725.272,00	930.993.800,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	11.722.063.621,00	10.525.582.369,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1.870.041.000,00	1.781.729.500,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8.932.898.650,00	7.885.491.107,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	919.123.971,00	858.361.762,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	51.512.126.956,00	42.218.834.825,00	232.148.960,00	205.250.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.452.102.530,00	3.018.877.108,00	232.148.960,00	205.250.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.846.600,00	41.624.300,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.891.000,00	6.800.900,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.456.000,00	1.495.800,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.499.600,00	33.327.600,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	201.919.300,00	174.641.600,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	195.340.000,00	168.985.600,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6.579.300,00	5.656.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.100.000,00	12.954.300,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8.000.000,00	7.862.500,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3.600.000,00	3.592.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.500.000,00	1.499.800,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.176.100,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.176.100,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.007.080.530,00	2.677.003.758,00	5.000.000,00	4.800.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	5.000.000,00	4.800.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.873.000,00	49.358.900,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.470.000,00	13.611.600,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.914.737.530,00	2.614.033.258,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	227.148.960,00	200.450.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	227.148.960,00	200.450.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.100.000,00	5.800.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.100.000,00	5.800.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.880.000,00	105.353.150,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.300.000,00	93.968.150,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.580.000,00	11.385.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	48.060.024.426,00	39.199.957.717,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	45.470.742.366,00	36.955.505.733,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	2.252.000.000,00	2.024.958.142,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	43.218.742.366,00	34.930.547.591,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	2.044.322.225,00	1.776.908.013,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1.803.243.800,00	1.614.797.128,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	157.588.000,00	112.920.285,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	83.490.425,00	49.190.600,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	544.959.835,00	467.543.971,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	350.231.760,00	308.286.185,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	107.595.275,00	89.695.686,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	87.132.800,00	69.562.100,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.461.161.475,00	2.934.182.420,00	147.161.600,00	146.950.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.613.302.375,00	1.520.423.323,00	147.161.600,00	146.950.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.064.600,00	57.850.500,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.986.000,00	37.203.700,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.479.600,00	12.251.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.599.000,00	8.395.800,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	136.279.000,00	128.322.500,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	113.340.000,00	109.660.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	22.939.000,00	18.662.500,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.714.000,00	22.427.980,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	14.020.000,00	13.908.980,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2.949.000,00	1.470.500,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.745.000,00	7.048.500,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	135.505.418,00	127.566.900,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	135.505.418,00	127.566.900,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.035.771.675,00	999.861.868,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.482.700,00	111.562.900,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	54.832.000,00	40.490.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.560.000,00	7.440.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	848.896.975,00	840.368.968,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	147.161.600,00	146.950.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	147.161.600,00	146.950.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.417.682,00	90.628.467,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.363.000,00	5.213.900,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.054.682,00	78.414.567,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.550.000,00	93.765.108,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.000.000,00	24.751.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.970.000,00	45.552.108,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.580.000,00	14.462.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.847.859.100,00	1.413.759.097,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	684.091.500,00	465.804.783,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	179.522.700,00	152.160.433,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	402.702.700,00	244.526.250,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	101.866.100,00	69.118.100,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	666.716.050,00	605.199.664,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	142.505.750,00	108.163.460,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	191.399.800,00	191.071.400,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	332.810.500,00	305.964.804,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	497.051.550,00	342.754.650,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	273.494.050,00	225.732.250,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	100.872.700,00	58.059.200,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	122.684.800,00	58.963.200,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.238.948.128,00	2.127.974.305,00	189.619.270,00	176.149.635,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	974.852.811,00	918.276.350,00	156.628.000,00	147.510.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.172.000,00	57.197.702,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.240.000,00	35.243.886,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.586.000,00	3.966.550,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.346.000,00	17.987.266,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	136.171.500,00	125.729.529,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	122.357.500,00	114.066.229,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13.814.000,00	11.663.300,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	31.883.000,00	21.425.310,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16.500.000,00	15.558.560,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.383.000,00	1.866.750,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	450.820.857,00	449.139.452,00	70.826.200,00	68.100.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	49.826.200,00	47.800.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	21.000.000,00	20.300.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.822.600,00	31.822.600,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.446.400,00	12.446.400,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.020.000,00	3.020.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	402.927.357,00	401.245.952,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	604.500,00	604.500,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	85.801.800,00	79.410.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	24.769.200,00	24.660.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	61.032.600,00	54.750.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.502.902,00	128.849.457,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.264.000,00	2.248.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.150.000,00	9.150.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.088.902,00	117.451.457,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.302.552,00	125.934.900,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.402.552,00	112.034.900,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.900.000,00	12.900.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.264.095.317,00	1.209.697.955,00	32.991.270,00	28.639.635,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	423.553.561,00	410.776.246,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	76.289.300,00	64.461.390,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	246.119.622,00	245.198.248,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	101.144.639,00	101.116.608,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	488.968.871,00	476.854.134,00	32.991.270,00	28.639.635,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	298.632.639,00	297.988.340,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	135.387.206,00	124.719.420,00	27.191.520,00	23.023.167,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	54.949.026,00	54.146.374,00	5.799.750,00	5.616.468,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	351.572.885,00	322.067.575,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	97.361.521,00	92.088.170,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	104.990.000,00	102.557.341,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	149.221.364,00	127.422.064,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	143.592.270.116,00	142.107.464.098,00	204.285.291,00	202.550.000,00	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.992.294.132,00	11.467.261.415,00	204.285.291,00	202.550.000,00	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.995.900,00	139.247.604,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	87.145.300,00	86.830.650,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.780.800,00	13.595.650,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.069.800,00	38.821.304,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.076.933.413,00	5.683.065.966,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.733.897.513,00	5.344.005.966,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	321.108.500,00	317.295.500,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	21.927.400,00	21.764.500,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	48.269.575,00	47.665.453,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	34.000.000,00	33.561.503,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7.769.775,00	7.656.700,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.499.800,00	6.447.250,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	218.676.000,00	216.424.950,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	83.250.000,00	82.804.150,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	135.426.000,00	133.620.800,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.272.328.410,00	4.179.053.919,00	71.987.773,00	71.650.000,00	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.248.000,00	9.248.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	7.200.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.357.500,00	17.150.000,00	64.787.773,00	64.650.000,00	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.732.875,00	42.875.300,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.440.000,00	32.223.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19.860.000,00	19.860.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.600.000,00	4.783.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.037.660.635,00	3.977.750.119,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.429.400,00	10.164.500,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	65.000.000,00	65.000.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.350.000,00	45.000.000,00	132.297.518,00	130.900.000,00	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	47.350.000,00	45.000.000,00	15.304.000,00	14.000.000,00	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	116.993.518,00	116.900.000,00	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	619.491.934,00	602.355.422,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	4.967.200,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.150.000,00	90.595.090,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	511.341.934,00	506.793.132,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	559.248.900,00	554.448.101,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	139.300.000,00	137.675.503,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.580.000,00	25.576.100,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	394.368.900,00	391.196.498,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.649.703.900,00	2.500.249.936,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.649.703.900,00	2.500.249.936,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.037.668.900,00	994.427.975,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	283.855.000,00	264.499.005,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	1.328.180.000,00	1.241.322.956,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	123.963.810.584,00	123.817.838.199,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	123.963.810.584,00	123.817.838.199,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	123.607.441.584,00	123.526.197.747,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	235.635.100,00	176.878.161,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	120.733.900,00	114.762.291,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	220.084.000,00	184.706.238,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	220.084.000,00	184.706.238,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	140.084.000,00	115.415.338,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	80.000.000,00	69.290.900,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2.742.006.500,00	2.643.903.183,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2.742.006.500,00	2.643.903.183,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2.359.853.000,00	2.292.906.450,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	327.459.500,00	303.598.810,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	54.694.000,00	47.397.923,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.024.371.000,00	1.493.505.127,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.024.371.000,00	1.493.505.127,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	591.036.300,00	225.147.553,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	284.986.500,00	270.976.432,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	231.468.200,00	223.888.471,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	916.880.000,00	773.492.671,00	-	-	-	-	-	-
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11.769.532.464,00	11.220.897.101,00	972.974.077,00	967.120.400,00	-	-	-	-
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11.769.532.464,00	11.220.897.101,00	972.974.077,00	967.120.400,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11.769.532.464,00	11.220.897.101,00	972.974.077,00	967.120.400,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.697.179.301,00	8.245.977.471,00	265.327.240,00	263.320.400,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.217.400,00	88.057.854,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73.372.000,00	69.113.054,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.926.000,00	9.814.600,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.919.400,00	9.130.200,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.156.359.608,00	5.775.738.855,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.976.099.608,00	5.597.128.755,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	175.260.000,00	173.610.300,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	4.999.800,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	35.018.160,00	32.252.580,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7.348.160,00	5.499.780,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1.500.000,00	1.491.600,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.170.000,00	25.261.200,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.832.000,00	58.422.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	58.422.000,00	58.422.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.410.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	511.853.448,00	498.764.423,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.612.800,00	12.407.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.027.118,00	37.698.700,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.783.200,00	16.783.100,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.860.000,00	4.160.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	427.277.230,00	416.424.223,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.993.100,00	4.991.400,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	51.401.840,00	50.400.000,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	51.401.840,00	50.400.000,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.225.168.147,00	1.181.551.702,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	226.558.500,00	200.760.579,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	995.609.647,00	977.791.123,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	615.730.538,00	611.190.057,00	213.925.400,00	212.920.400,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	398.822.938,00	396.172.057,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.909.600,00	49.613.000,00	13.925.400,00	13.925.400,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	159.998.000,00	158.405.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	200.000.000,00	198.995.000,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.072.353.163,00	2.974.919.630,00	707.646.837,00	703.800.000,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.792.353.163,00	2.706.458.427,00	707.646.837,00	703.800.000,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	400.000.000,00	379.853.787,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.100.000.000,00	1.090.889.969,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1.100.000.000,00	1.048.612.971,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	25.000.000,00	24.443.700,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	167.353.163,00	162.658.000,00	707.646.837,00	703.800.000,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	150.000.000,00	145.228.967,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	150.000.000,00	145.228.967,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	130.000.000,00	123.232.236,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	130.000.000,00	123.232.236,00	-	-	-	-	-	-
			Jumlah	4.853.518.637.062,00	4.614.017.505.277,85	856.550.234.585,00	765.506.194.874,35	10.487.887.909,00	5.222.259.811,30	1.297.184.937.389,00	1.139.918.785.160,46

Lampiran 4

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DAFTAR SUB KEGIATAN SKPD YANG REALISASI KEUANGANNYA DIBAWAH 50 % DAN PENJELASANNYA TAHUN 2024

No.	Kode Kegiatan	Nama Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Sisa Anggaran	%	PENJELASAN HAMBATAN / KENDALA
			Rp.	Rp.		Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		**DINAS PENDIDIKAN**						
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2.094.868.950,00	268.185.300,00	12,80	1.826.683.650,00	87,20	Belanja Pakaian Batik Tradisional dilanjutkan di 2025 (addendum Waktu) (Diberikan kesempatan 36 hari kalender dengan dikenakan denda 1‰ dari nilai kontrak)
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	100,00	kegiatan terlaksana 100% tetapi belum dibayarkan karena tidak adanya ketersediaan anggaran
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						
	1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	6.844.534.139,00	1.371.329.450,00	20,04	5.473.204.689,00	79,96	Untuk USB SMKN 11 Padang tidak terlaksana karena secara teknis belum memadai untuk dilakukan
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	365.242.298,00	151.810.000,00	41,56	213.432.298,00	58,44	satu Kegiatan PAD tidak terlaksana karena masuk di Anggaran Perubahan
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						
	1.01.03.1.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	100,00	efisiensi anggaran
	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN						
	1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						
	1.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.000.000,00	20.425.000,00	40,85	29.575.000,00	59,15	Efisiensi anggaran
	1.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						
	1.01.05.1.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.000.000,00	23.840.000,00	47,68	26.160.000,00	52,32	Efisiensi anggaran
		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)						
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	2.000.000,00	40,00	3.000.000,00	60,00	Pelaksanaan sesuai kebutuhan
		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)						
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.560.000,00	1.420.000,00	16,59	7.140.000,00	83,41	Pelaksanaan sesuai kebutuhan
		SMKN 1 PARIAMAN						
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	125.000.000,00	12.147.925,00	9,72	112.852.075,00	90,28	Belum maksimalnya penjualan pada TeFa masing-masing, Belum maksimalnya promosi hasil karya siswa kepada masyarakat, Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap karya yang diproduksi siswa dan Terlalu tingginya Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2024, sehingga realisasi Belanja tidak tercapai
		SMKN 8 PADANG						
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						

No.	Kode Kegiatan	Nama Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Sisa Anggaran	%	PENJELASAN HAMBATAN / KENDALA
			Rp.	Rp.		Rp.		
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.798.200.000,00	242.058.880,00	13,46	1.556.141.120,00	86,54	Belum maksimalnya penjualan pada TeFa masing-masing, Belum maksimalnya promosi hasil karya siswa kepada masyarakat, Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap karya yang diproduksi siswa dan Terlalu tingginya Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2024, sehingga realisasi Belanja tidak tercapai
		SMKN 9 PADANG						
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.441.228.049,00	584.082.924,00	23,93	1.857.145.125,00	76,07	Belum maksimalnya penjualan pada TeFa masing-masing, Belum maksimalnya promosi hasil karya siswa kepada masyarakat, Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap karya yang diproduksi siswa dan Terlalu tingginya Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2024, sehingga realisasi Belanja tidak tercapai
		SMKN 1 PAYAKUMBUH						
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.722.260.000,00	256.534.795,00	9,42	2.465.725.205,00	90,58	Belum maksimalnya penjualan pada TeFa masing-masing, Belum maksimalnya promosi hasil karya siswa kepada masyarakat, Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap karya yang diproduksi siswa dan Terlalu tingginya Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2024, sehingga realisasi Belanja tidak tercapai
		SMKN 2 PAYAKUMBUH						
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.820.600.000,00	210.100.000,00	5,50	3.610.500.000,00	94,50	Belum maksimalnya penjualan pada TeFa masing-masing, Belum maksimalnya promosi hasil karya siswa kepada masyarakat, Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap karya yang diproduksi siswa dan Terlalu tingginya Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2024, sehingga realisasi Belanja tidak tercapai
		SMKN 2 SAWAHLUNTO						
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	340.805.000,00	-	-	340.805.000,00	100,00	Belum maksimalnya penjualan pada TeFa masing-masing, Belum maksimalnya promosi hasil karya siswa kepada masyarakat, Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap karya yang diproduksi siswa dan Terlalu tingginya Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2024, sehingga realisasi Belanja tidak tercapai
		SMKN 1 SULIKI						
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	200.000.000,00	69.300.000,00	34,65	130.700.000,00	65,35	Belum maksimalnya penjualan pada TeFa masing-masing, Belum maksimalnya promosi hasil karya siswa kepada masyarakat, Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap karya yang diproduksi siswa dan Terlalu tingginya Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2024, sehingga realisasi Belanja tidak tercapai
		SMKN 1 SINTUK TOBOH GADANG						
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.296.396.000,00	40.029.114,00	3,09	1.256.366.886,00	96,91	Belum maksimalnya penjualan pada TeFa masing-masing, Belum maksimalnya promosi hasil karya siswa kepada masyarakat, Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap karya yang diproduksi siswa dan Terlalu tingginya Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2024, sehingga realisasi Belanja tidak tercapai
		SMKN 1 PAINAN						
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						

No.	Kode Kegiatan	Nama Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Sisa Anggaran	%	PENJELASAN HAMBATAN / KENDALA
			Rp.	Rp.		Rp.		
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.178.290.000,00	212.366.400,00	18,02	965.923.600,00	81,98	Belum maksimalnya penjualan pada TeFa masing-masing, Belum maksimalnya promosi hasil karya siswa kepada masyarakat, Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap karya yang diproduksi siswa dan Terlalu tingginya Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2024, sehingga realisasi Belanja tidak tercapai
		SMKN 1 RANAH PESISIR						
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	120.000.000,00	21.150.000,00	17,63	98.850.000,00	82,38	Belum maksimalnya penjualan pada TeFa masing-masing, Belum maksimalnya promosi hasil karya siswa kepada masyarakat, Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap karya yang diproduksi siswa dan Terlalu tingginya Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2024, sehingga realisasi Belanja tidak tercapai
2		**DINAS KESEHATAN**						
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	15.000.000,00	5.350.000,00	35,67	9.650.000,00	64,33	Sisa anggaran merupakan efisiensi belanja dikarenakan ketersediaan anggaran (UP) yang terbatas.
	1.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	93.530.000,00	10.000.000,00	10,69	83.530.000,00	89,31	Tidak terealisasinya Belanja Asuransi Barang Milik Daerah dengan nilai Rp 77.423.442,00 yang telah diajukan ke BPKAD dikarenakan Anggaran Kas Pemda yang tidak ada sehingga SPM dikembalikan ke Dinas Kesehatan Prov.Sumbar. Belanja Asuransi Barang Milik Daerah ini akan diungkap pada Laporan Keuangan TA.2024 sebagai Hutang Belanja
	1.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	70.000.000,00	33.001.200,00	47,14	36.998.800,00	52,86	Sisa Anggaran disebabkan karena (1). Pembayaran honor pejabat pengadaan yang dialokasikan untuk 2 (dua) orang namun hanya dapat dibayarkan untuk 1 (satu) orang, karena I (satu) orang Pejabat Pengadaan berasal dari Biro PBJ yang merupakan Fungsional, (2). Belanja makan minum rapat tidak terlaksana dikarenakan tidak dibolehkan belanja makan minum kalau hanya untuk rapat di lingkungan internal (yang tidak melibatkan OPD lain), sesuai dengan Peratutan Gubernur tentang Standar Harga Satuan (SHS), dan (3). Perjalanan dinas ke beberapa Kab/Kota dalam rangka penelusuran aset yang tidak dapat terlaksana semua, hali ini karena belum lengkap data untuk aset- aset yang akan ditelusuri.
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	129.506.448,00	24.566.114,00	18,97	104.940.334,00	81,03	Sisa anggaran disebabkan karena adanya efisiensi anggaran, sehingga obat di distribusikan pada saat Kab/ Kota menjemput obat program dan vaksin ke Provinsi.
	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	40.000.000,00	13.283.950,00	33,21	26.716.050,00	66,79	Sisa anggaran disebabkan karena adanya arahan untuk efisiensi anggaran.
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	84.444.000,00	36.620.970,00	43,37	47.823.030,00	56,63	Sisa anggaran disebabkan karena (1). Evaluasi program SDMK/ Bimwil ke Kab/Kota berupa perjadin dan BBM sudah dilaksanakan dan masih ada bersisa karena ada arahan efisiensi anggaran, (2) Kegiatan FGD koordinasi persiapan AHS merupakan kegiatan perubahan di akhir tahun, tidak terlaksana karena ada arahan efisiensi anggaran.
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	227.402.300,00	53.219.900,00	23,40	174.182.400,00	76,60	Sisa anggaran disebabkan karena (1). Kegiatan Uji Kompetensi sudah dilaksanakan namun belanja makan minum tidak dapat dibayarkan karena anggaran deficit anggaran, (2). Pemberian hadiah paket umroh untuk 2 (dua) orang Nakesdan hanya terealisasi untuk 1 (satu) orang Nakesdan dikarenakan 1 (satu) Nakesdan mengundurkan diri untuk melaksanakan umroh, dan (3). Penilaian Nakesdan TA.2024 tingkat Provinsi tidak dilaksanakan karena sistim penilaian langsung oleh Kemenkes. Dilakukan perubahan anggaran menjadi FGD dan rapat koordinasi program SDMK, namun tidak terlaksana karena waktu terbatas dan adanya arahan efisiensi anggaran.
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	124.426.200,00	20.727.200,00	16,66	103.699.000,00	83,34	Sisa anggaran disebabkan karena (1). Advokasi penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat tidak terlaksana karena anggaran perubahan dan arahan efisiensi anggaran, (2). Bimbingan teknis penyelengaraan laboratorium kesehatan masyarakat hanya terlaksana pada 2 Kabupaten, karena anggaran perubahan dan arahan efisiensi anggaran, dan (3). kegiatan evaluasi penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat dapat terlaksana dan sisa belanja merupakan sisa dari kegiatan.
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	40.000.000,00	19.511.640,00	48,78	20.488.360,00	51,22	Sisa anggaran disebabkan karena adanya efisiensi anggaran sehingga kegiatan tidak terlaksana.
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	182.972.450,00	56.031.600,00	30,62	126.940.850,00	69,38	Sisa anggaran disebabkan karena pelaksanaan supervisi pada 4 Kab/ Kota dilakukan pendampingan dengan anggaran APBN
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	332.195.600,00	47.367.158,00	14,26	284.828.442,00	85,74	Sisa anggaran disebabkan karena Untuk kegiatan PE Dugaan KLB/ verifikasi signal dilakukan di saat ada laporan kejadian dugaan KLB Kab/Kota yang belum ditangani sesuai SOP sehingga belanja perjadin dan BBM bersisa.
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	35.000.000,00	16.665.900,00	47,62	18.334.100,00	52,38	Pelaksanaan monev dilaksanakan bersamaan dengan program lainnya, sehingga tidak selalu dibebankan pada anggaran pelayanan kesehatan tradisional.
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	50.000.000,00	12.766.700,00	25,53	37.233.300,00	74,47	Sisa anggaran disebabkan karena kegiatan FGD dilaksanakan melalui zoom meeting

No.	Kode Kegiatan	Nama Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Sisa Anggaran	%	PENJELASAN HAMBATAN / KENDALA
			Rp.	Rp.		Rp.		
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	50.000.000,00	5.458.600,00	10,92	44.541.400,00	89,08	Sisa anggaran disebabkan karena kegiatan yang dilaksanakan berupa perjalan dinas dengan melibatkan Tim Mutu yang telah di SK kan, sehingga pelaksanaan kegiatan ini harus menyesuaikan dengan jadwal dari Tim Mutu.
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	496.811.682,00	220.372.121,00	44,36	276.439.561,00	55,64	(1). terjadinya bencana alam pada lokasi lokus kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai dengan jadwalnya, (2). terjadinya efisiensi angaran sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana, (3). kegiatan yang sudah terlaksana namun tidak dapat dibayarkan dikarenakan anggaran Pemda dalam kondisi deficit, dan (4). terkendala dalam penyesuaian jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan di Kab/ Kota.
	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10.000.000,00	2.745.300,00	27,45	7.254.700,00	72,55	(1). terjadinya bencana alam pada lokasi lokus kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai dengan jadwalnya dan (2). terjadinya efisiensi angaran sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana.
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	150.000.000,00	49.525.450,00	33,02	100.474.550,00	66,98	1). Kegiatan yang sudah terlaksana namun tidak dapat dibayarkan dikarenakan anggaran Pemda dalam kondisi defisit dan (2). Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan aliran kas dan pelaksanaan dilaksanakan pada Triwulan IV
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.372.580.000,00	430.857.100,00	31,39	941.722.900,00	68,61	Sisa anggaran disebabkan karena (1). Efisiensi kegiatan, keterbatasan waktu pelaksanaa keiatan karena terdapat anggaran kegiatan yang masuk di anggaran perubahan. Kegiatan menyesuaikan dengan jadwal dengan Kab/Kota dan lintas sector terkait sehingga pelaksanaan tidak tepat waktu, dan (2) Adanya bencana alam di lokasi kegiatan.
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	300.000.000,00	73.674.400,00	24,56	226.325.600,00	75,44	Sisa anggaran disebabkan karena efisiensi kegiatan, keterbatasan waktu pelaksanaa keiatan karena terdapat anggaran kegiatan yang masuk di anggaran perubahan.
	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	50.000.000,00	4.912.100,00	9,82	45.087.900,00	90,18	Sisa anggaran disebabkan karena adanya efisiensi anggaran APBD sehingga beberapa kegaiatan tidak dapat terlaksana.
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - **UPTD Labkes**	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	100,00	Sisa anggaran disebabkan karena anggaran yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan kegiatan.
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan - **UPTD Labkes**	1.080.000,00	-	-	1.080.000,00	100,00	Sisa anggaran disebabkan karena anggaran yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan kegiatan.
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan - **UPTD Labkes**	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	100,00	Sisa anggaran disebabkan karena anggaran yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan kegiatan.
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan - **UPTD Labkes**	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	100,00	Sisa anggaran disebabkan karena anggaran yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan kegiatan.
3		**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**						
	1.03.09.1.01.0009	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.515.000.000,00	314.189.700,00	20,74	1.200.810.300,00	79,26	1.Seleksi ulang pengadaan penyedia oleh Pokja akibat adanya kesalahan dokumen pengadaan 2. Keterlambatan penyedia memenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimana tertera di dalam kontrak 3. Kegagalan penyedia dalam menyelesaikan pekerjaan pada masa pemberian kesempatan dalam tahun anggaran 4. Tunda bayar Rp 33.921.600,00 (uang muka sudah dipotong) + sisa bayar (45%) akibat keterlambatan lewat TA 2024 sebesar Rp 305.294.400,00 5. Sisa 20% (Rp 135.686.400,00) dari nilai kontrak adalah biaya pengawasan berkala yang dibayarkan saat pekerjaan konstruksi selesai.
	1.03.10.1.01.0038	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II - Payakumbuh)	1.597.187.500,00	673.111.671,00	42,14	924.075.829,00	57,86	Kemampuan keuangan daerah sehingga terjadi tunda bayar sebanyak 8 Paket pekerjaan (16 SPM/SP2D)
	1.03.01.1.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V - Sijunjung)	150.000.000,00	33.668.400,00	22,45	116.331.600,00	77,55	Paket Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD Wilayah V telah selesai dilaksanakan dengan progres fisik 100%, namun realisasi keuangan nya masih 22,45% karena tunda bayar akibat kondisi kas daerah
4		**DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI**						
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	76.030.000,00	32.035.400,00	42,14	43.994.600,00	57,86	Realisasi sebesar 42,14% berupa efisiensi anggaran sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan
	1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	100,00	Pembayaran Termyn I - 100% Pekerjaan Pembangunan Water Treatment Sumur Bor MTI Kapau Kabupaten Agam sebesar Rp. 86.441.250,- tidak terbayarkan dan menjadi utang belanja modal
5		**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**						
	1.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	314.500,00	10,48	2.685.500,00	89,52	Efisiensi anggaran sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan
6		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**						
	5.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.410.000,00	-	-	1.410.000,00	100,00	Realisasi sesuai dengan undangan atau surat perintah mengikuti pendidikan dan pelatihan.
7		**DINAS SOSIAL**						

No.	Kode Kegiatan	Nama Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Sisa Anggaran	%	PENJELASAN HAMBATAN / KENDALA
			Rp.	Rp.		Rp.		
	1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	47.343.000,00	15.584.000,00	32,92	31.759.000,00	67,08	Pembayaran Biaya Notaris terhadap pembuatan balik nama Sertifikat Tanah Dinas Sosial
	1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.500.000,00	2.000.000,00	10,81	16.500.000,00	89,19	Tidak adanya publikasi dan Dialog Interaktif pada Dinas Sosial
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	19.950.000,00	-	-	19.950.000,00	100,00	Tidak tersalurnya bantuan di karenakan anak dalam panti yang akan disalurkan tidak ada
	1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	164.335.500,00	107.287.200,00	65,29	57.048.300,00	34,71	Sisa perjalanan dinas dan sewa yang tidak jadi dilaksanakan
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	24.000.000,00	9.000.000,00	37,50	15.000.000,00	62,50	Tidak ada klien yang meninggal dunia di dalam panti
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.108.500,00	16.379.125,00	67,94	7.729.375,00	32,06	Pembelian UPS tidak jadi dilaksanakan karena tidak sesuai spesifikasi
8		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						
	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan / Rehabillitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	355.120.000,00	140.746.750,00	39,63	214.373.250,00	60,37	SPM Nomor 13.00/03.0/000078/LS/2.08.2.14.0.00.01.0000/PPR2/12/2024 belum dicairkan dan menjadi hutang belanja
9		**DINAS PANGAN**						
	2.09.01.1.05.0011	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	14.836.000,00	-	-	14.836.000,00	100,00	Sehubungan dengan adanya kebijakan efisiensi Anggaran TA 2024, maka beberapa kegiatan tidak di realisasikan belanjanya
	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.280.000,00	-	-	8.280.000,00	100,00	Sehubungan dengan adanya kebijakan efisiensi Anggaran TA 2024, maka beberapa kegiatan tidak di realisasikan belanjanya.
	2.09.01.1.06.0008	Fasilitas kunjungan tamu	13.725.000,00	4.575.000,00	33,33	9.150.000,00	66,67	Sehubungan dengan adanya kebijakan efisiensi Anggaran TA 2024, maka beberapa kegiatan tidak di realisasikan belanjanya.
	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (UPTD BPSMP)	3.000.000,00	1.080.000,00	36,00	1.920.000,00	64,00	Sehubungan dengan adanya kebijakan efisiensi Anggaran TA 2024, maka beberapa kegiatan tidak di realisasikan belanjanya.
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (UPTD BPSMP)	190.000.000,00	23.166.000,00	12,19	166.834.000,00	87,81	kegiatan ini secara fisik terlaksana 100 % namun tidak bisa dicairkan karena keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah.
10		**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**						
	PENDAPATAN							
	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium (Insenerator)	24.495.631.280,00	126.729.100,00	0,52	24.368.902.180,00	99,48	Operasional limbah B3 medis belum berjalan, saat ini dalam tahap proses kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan.
	BELANJA							
	2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	111.604.000,00	54604000	48,93	57.000.000,00	51,07	Secara Fisik kegiatan ini telah terlaksana, namun gagal bayar, sehingga pembayaran tertunda pada Tahun 2025
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.860.000,00	613.500,00	12,62	4.246.500,00	87,38	Sehubungan dengan adanya kebijakan efisiensi Anggaran TA 2024, maka beberapa kegiatan tidak di realisasikan belanjanya
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	309.504.000,00	106.468.000,00	34,40	203.036.000,00	65,60	Secara Fisik kegiatan ini telah terlaksana, namun gagal bayar, sehingga pembayaran tertunda pada Tahun 2025
	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	234.616.000,00	-	0,00	234.616.000,00	100,00	Secara Fisik kegiatan ini telah terlaksana, namun gagal bayar, sehingga pembayaran tertunda pada Tahun 2025
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.400.000,00	20.146.500,00	10,15	178.253.500,00	89,85	Secara Fisik kegiatan ini telah terlaksana, namun gagal bayar, sehingga pembayaran tertunda pada Tahun 2025
	2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	237.512.000,00	4.662.000,00	1,96	232.850.000,00	98,04	Secara Fisik kegiatan ini telah terlaksana, namun gagal bayar, sehingga pembayaran tertunda pada Tahun 2025
11		**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						
	2.13.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.916.000,00	4.397.000,00	40,28	6.519.000,00	59,72	Realisasi sesuai kebutuhan, untuk realisasi kegiatan tersebut dibutuhkan undangan pelaksanaan kegiatan dari SKPD terkait.

No.	Kode Kegiatan	Nama Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Sisa Anggaran	%	PENJELASAN HAMBATAN / KENDALA
			Rp.	Rp.		Rp.		
12		**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**						
	2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.641.200,00	6.531.500,00	20,01	26.109.700,00	79,99	Efisiensi penggunaan anggaran Tahun 2024
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	57.516.890,00	25.200.000,00	43,81	32.316.890,00	56,19	Efisiensi penggunaan anggaran Tahun 2024
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	380.220.000,00	8.920.000,00	2,35	371.300.000,00	97,65	Efisiensi penggunaan anggaran Tahun 2024
	2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	83.745.400,00	8.920.000,00	10,65	74.825.400,00	89,35	Pengadaan mebel tersebut telah diserah terimakan pada bulan Desember 2024 namun belum dibayarkan dikarenakan ketidak tersediaan kas daerah, sehingga mejadi hutang di Tahun 2025
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	705.313.828,00	285.762.235,00	40,52	419.551.593,00	59,48	Efisiensi penggunaan anggaran Tahun 2024
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	242.484.000,00	23.140.000,00	9,54	219.344.000,00	90,46	Pemeliharaan tersebut berupa pembuatan interior Gedung pada bulan Desember 2024 namun belum dibayarkan dikarenakan ketidak tersediaan kas daerah, sehingga mejadi hutang di Tahun 2025
	2.16.02.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	14.994.400,00	3.765.000,00	25,11	11.229.400,00	74,89	Efisiensi penggunaan anggaran Tahun 2024
	2.16.02.1.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	14.900.000,00	1.155.000,00	7,75	13.745.000,00	92,25	Efisiensi penggunaan anggaran Tahun 2024
	2.16.02.1.01.0009	Manajemen Komunikasi Krisis	10.820.500,00	1.925.000,00	17,79	8.895.500,00	82,21	Efisiensi penggunaan anggaran Tahun 2024
	2.16.03.1.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	413.365.400,00	170.589.250,00	41,27	242.776.150,00	58,73	Efisiensi penggunaan anggaran Tahun 2024
13		**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**						
	2.17.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	100,00	Penyelesaian pekerjaan oleh penyedia diakhir tahun anggaran sementara kas pada bendahara tidak tersedia
14		**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT**						
	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	6.668.600,00	3.300.000,00	49,49	3.368.600,00	50,51	Efisiensi Belanja makan minum rapat
	2.19.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	19.115.200,00	3.278.500,00	17,15	15.836.700,00	82,85	Efisien belanja jasa lembur
15		**DINAS KEBUDAYAAN**						
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD - Mesuem Adityawarman]	13.110.000,00	4.850.000,00	36,99	8.260.000,00	63,01	Penyesuaian anggaran akhir tahun
16		**DINAS PARIWISATA**						
	3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	51.050.000,00	22.819.000,00	44,69	28.231.000,00	55,31	Adanya efisiensi anggaran pada belanja makan minum rapat.
17		**DINAS PERKEBUNAN DAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA**						
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD - (BPPP) BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	6.000.000,00	1.897.950,00	31,63	4.102.050,00	68,37	Efisiensi anggaran sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan
	3.27.03.01.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	1.167.967.900,00	236.628.230,00	20,26	931.339.670,00	79,74	adanya regulasi yang belum keluar sehingga tidak mendukung pelaksanaan DBH Sawit
	3.27.06.1.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	176.090.000,00	81.309.100,00	46,17	94.780.900,00	53,83	tidak adanya pengajuan dari kabupaten kota
18		**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT**						
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.750.000,00	10.340.000,00	41,78	14.410.000,00	58,22	Efesiensi dan efektivitas anggaran dan karena termasuk kebutuhan rutin dan tidak adanya sarana dan prasarana yang rusak

No.	Kode Kegiatan	Nama Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Sisa Anggaran	%	PENJELASAN HAMBATAN / KENDALA
			Rp.	Rp.		Rp.		
	3.27.03.1.01	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	124.395.000,00	52.818.536,00	42,46	71.576.464,00	57,54	Pembayaran 20% perencanaan Pabrik Pakan Ternak sebesar Rp. 64.395.000 KPA dan PPTK Tidak membayarkan Karena Pihak CV. Arce Belum melengkapi Dokumen yang diisyaratkan secara Keuangan Yaitu : 1.Pada saat pengajuan Pengajuan Pembayaran tgl 21 Maret 2024 Pabrik Pakan ternak belum Sepenuhnya PHO ke pihak PU. 2.LHP BPK tanggal 28 Mei 2024 Poin 22 dari temuan BPK hal 150 menginstruksikan CV A melengkapi Perencanaan terkait standar keselamatan bangunan. 3.Pada Saat itu pihak CV A bersikukuh Dokumen Keselamatan minta untuk anggran tahun berikutnya , Namun hasil diskusi dengan KPA Dana tersebut kita tidak lakukan Pemotongan Mengingat siapa tau diakhir Anggaran CV tersebut melengkapi dokumen yg diisyaratkan. 4.Pada tanggal 6 Desember 2024 CV Arce Melengkapi Dokumen terkait namun tanggal dan tahun dokumen sebelum tanggal temuan BPK. 5.Tanggal 27 Desember PT. Arce mengirimkan Surat Permohonan Pengajuan Pembayaran, namun batas waktu pembayaran tidak terakomodir. Disamping itu tanggal dokumen belum dilengkapi. 6.Perencanaan 2025 sudah dianggarkan (Namun Menunggu Review Inspektorat / BPKAD)
19		**DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**						
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	724.102.000,00	177.086.379,00	24,46	547.015.621,00	75,54	Penyebab realisasi keuangan dibawah 50% disebabkan terutama karena adanya penambahan anggaran disaat perubahan anggaran untuk kegiatan Fasilitasi perubahan fungsi kawasan hutan menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) sebesar Rp.529.102.000. Kegiatan yang dialokasikan pada anggaran APBD Perubahan 2024 ini tidak bisa dilaksanakan karena sampai dengan awal Desember 2024 penetapan Tim Terpadu Perubahan Fungsi Kawasan Hutan menjadi Tahura dari Menteri Kehutanan yang merupakan prasyarat pelaksanaan kegiatan ini belum terbit, disamping itu karena perubahan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pergantian pimpinan berpengaruh terhadap kecepatan respon proses usulan perubahan fungsi Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Suaka Margasatwa menjadi Taman Hutan Raya, akibatnya kegiatan tidak bisa dilaksanakan
	3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	150.000.000,00	67.265.050,00	44,84	82.734.950,00	55,16	Sisa dana sebesar Rp82.734.950 terdiri dari sisa Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp3.916.450,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp.1.365.000,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Rp6.655.000,00, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp9.000.000,00, Belanja Sewa Hotel Rp20.000.000, Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp37.534.800,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp4.263.700,00. Penyebab realisasi keuangan dibawah 50% disebabkan karena kegiatan yang rencananya dilaksanakan di hotel dalam rangka rapat pembentukan kesepakatan para pihak dalam pengelolaan ekosistem esensial tidak jadi dilaksanakan karena efisiensi belanja TA 2024 sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Barat No. 030/237.a/BPKAD- PAP/2024 tanggal 04 April 2024 perihal Efisiensi dan Penghematan Belanja TA 2024.
20		**BIRO UMUM**						
	4.01.01.1.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00	100,00	Tidak ada terlaksana karena untuk Kepala Daerah telah mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan di saat pendaftaran Pilkada sedangkan Wakil Kepala Daerah disebabkan kepadatan aktivitas pada saat merangkap tugas sebagai Plt. Kepala Daerah.
20		**BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**						
	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2.949.000,00	1.470.500,00	49,86	1.478.500,00	50,14	Pada Sub Kegiatan ini dianggarkan belanja alat tulis kantor, sampai kondisi akhir tahun ketersediaan alat tulis kantor masih ada, sehingga untuk efesien maka tidak direalisasikan lagi.
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	122.684.800,00	58.963.200,00	48,06	63.721.600,00	51,94	1. pelaksanaan sebagian rapat rapat dialihkan dari tatap muka menjadi online (zoom meeting) 2. lambatnya proses pergantian penetapan KPA sehingga menyebabkan terlambatnya pencairan SPJ
21		**BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA**						
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.383.000,00	1.866.750,00	16,40	9.516.250,00	83,60	Efisiensi belanja perjalanan dinas
22		**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**						
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.891.000,00	6.800.900,00	42,80	9.090.100,00	57,20	Efisiensi anggaran sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan

No.	Kode Kegiatan	Nama Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Sisa Anggaran	%	PENJELASAN HAMBATAN / KENDALA
			Rp.	Rp.		Rp.		
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhstisar Realisasi Kinerja SKPD	4.456.000,00	1.495.800,00	33,57	2.960.200,00	66,43	Penghematan Anggaran Pada APBD Tahun 2024
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	14.176.100,00	1.500.000,00	10,58	12.676.100,00	89,42	ASN Biro Kesejahteraan Rakyat Tidak Mengikuti Pelatihan Pegawai Pada Tahun 2024
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan	35.470.000,00	13.611.600,00	38,37	21.858.400,00	61,63	Efisiensi anggaran sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan
23		**BIRO HUKUM**						
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	13.200.000,00	-	-	13.200.000,00	100,00	Alokasi anggaran disesuaikan dengan jatuh tempo pembayaran premi asuransi kendaraan dinas pada bulan Desember 2024, namun ketersediaan uang persediaan (UP) tidak cukup untuk merealisasikan kegiatan ini, sehingga perpanjangan polis asuransi ditunda
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	800.000,00	-	-	800.000,00	100,00	Tagihan tahun 2023 dan tagihan tahun 2024 tidak dapat dibayarkan, karena jumlah tagihan tidak dapat ditampilkan melalui sistem, sehingga pembayaran tagihannya ditunda
24		**SEKRETARIAT DPRD**						
	4.02.01.1.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	35.808.000,00	-	-	35.808.000,00	100,00	Tidak terlaksana karena Orientasi ASN di Sekretariat DPRD tertumpu pada Pelayanan Urusan Kedewanan. Jumlah ASN yang terbatas juga berdampak kepada supporting kegiatan Kedewanan seperti Reses dan Sosialisasi Perda bahkan diikutsertakan dari Tenaga Non ASN. Ditambah jenis Diklat yang dibutuhkan sesuai tugas fungsi ASN di Sekretariat DPRD sering tidak relevan dengan ketersediaan Diklat yang ada, baik di pemprov maupun di kementerian.
	4.02.02.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	421.049.000,00	204.261.300,00	48,51	216.787.700,00	51,49	- Penulisan Naska Akademik untuk Ranperda teranggarkan 7 Naskah Akademik sedangkan terlaksana baru 3 Naska Akademik. '- Kegiatan Bimtek 1 kali kegiatan tidak terlaksana.
	4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	1.549.117.900,00	669.129.262,00	43,19	879.988.638,00	56,81	Efisiensi dari belanja perjalanan dinas banggar karena jumlah banggar yang mengikuti kegiatan studi banding ke Bandung hanya hanya 10 orang dan banggar yang mengikuti kegiatan konsultasi ke jakarta hanya 24 orang dari jumlah 35 orang banggar.
	4.02.02.1.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	151.919.400,00	29.764.400,00	19,59	122.155.000,00	80,41	efisiensi dari rekening belanja pendukung kegiatan.
	4.02.02.1.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	63.262.300,00	4.562.300,00	7,21	58.700.000,00	92,79	efisiensi dari rekening belanja pendukung kegiatan.
	4.02.02.1.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	439.885.000,00	190.461.210,00	43,30	249.423.790,00	56,70	Terdapatnya sebagian Besar Anggota Badan Musyawarah yang tidak mengikuti kegiatan konsultasi penyusunan Renja DPRD ke Jakarta.
25		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dDaerah di Provinsi	81.376.500,00	12.381.500,00	15,22	68.995.000,00	84,78	Efisiensi belanja makan minum dan rasionalisasi anggaran karena proyeksi defisit APBD 2024 di akhir tahun
26		**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**						
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	145.513.600,00	44.128.342,00	30,33	101.385.258,00	69,67	kegiatan ini secara fisik terlaksana 100 % namun dalam rangka efisiensi anggaran kita melakukan penghematan belanja lembur, belanja atk dan makan minum
	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.283.900,00	15.442.600,00	49,36	15.841.300,00	50,64	kegiatan ini secara fisik terlaksana 100 % namun dalam rangka efisiensi anggaran kita melakukan penghematan belanja lembur, belanja atk dan makan minum
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.266.800,00	12.161.300,00	37,69	20.105.500,00	62,31	kegiatan ini secara fisik terlaksana 100 % namun dalam rangka efisiensi anggaran kita melakukan penghematan belanja lembur, belanja atk dan makan minum
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	108.709.600,00	30.765.900,00	28,30	77.943.700,00	71,70	kegiatan ini secara fisik terlaksana 100 % namun dalam rangka efisiensi anggaran kita melakukan penghematan belanja lembur, belanja atk dan makan minum
	5.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	18.350.700,00	3.671.200,00	20,01	14.679.500,00	79,99	kegiatan ini secara fisik terlaksana 100 % namun dalam rangka efisiensi anggaran kita melakukan penghematan belanja lembur, belanja atk dan makan minum
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.662.600,00	6.968.500,00	33,73	13.694.100,00	66,27	kegiatan ini secara fisik terlaksana 100 % namun dalam rangka efisiensi anggaran kita melakukan penghematan belanja lembur, belanja atk dan makan minum
	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	11.552.000,00	-	-	11.552.000,00	100,00	Verifikasi RKA dilakukan secara daring
	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	1.905.600,00	-	-	1.905.600,00	100,00	Verifikasi RKA dilakukan secara daring
	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	309.569.680,00	121.533.653,00	39,26	188.036.027,00	60,74	Realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan tidak optimal karena adanya kebijakan efisiensi pelaksanaan APBD 2024 sehingga beberapa belanja yang sifatnya penunjang tidak direalisasikan tanpa mengurangi pencapaian realisasi fisik kegiatan dan untuk regulasi penyusunan Standar Harga Satuan tidak lagi di subid Anggaran belanja cetak buku Standar Harga Satuan tidak direalisasi
	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	59.754.900,00	29.527.500,00	49,41	30.227.400,00	50,59	Realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan tidak optimal karena adanya kebijakan efisiensi pelaksanaan APBD 2025 sehingga beberapa belanja yang sifatnya penunjang tidak direalisasikan tanpa mengurangi pencapaian realissi fisik kegiatan

No.	Kode Kegiatan	Nama Subkegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Sisa Anggaran	%	PENJELASAN HAMBATAN / KENDALA
			Rp.	Rp.		Rp.		
	5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	109.448.500,00	20.832.900,00	19,03	88.615.600,00	80,97	Sehubungan dengan adanya kebijakan efisiensi Anggaran TA 2024, maka beberapa kegiatan tidak di realisasikan belanjanya, tanpa mengurangi realisasi fisiknya.
	5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	219.112.119,00	59.085.299,00	26,97	160.026.820,00	73,03	Sehubungan dengan adanya kebijakan efisiensi Anggaran TA 2024, maka beberapa kegiatan tidak di realisasikan belanjanya, tanpa mengurangi realisasi fisiknya.
	5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	43.025.500,00	9.055.500,00	21,05	33.970.000,00	78,95	Untuk Efesiensi anggaran, kegiatan dimaksimalkan untuk 1 kali Rapat tim saja..
	5.02.02.1.04.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	290.000,00	-	-	290.000,00	100,00	Tidak dilaksanakan
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10.487.887.909,00	5.222.259.811,30	49,79	5.265.628.097,70	50,21	Anggaran di pakai jika adanya keadaan darurat
	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	50.656.000,00	-	-	50.656.000,00	100,00	Sesuai rencana, kegiatan akan dilaksanakan pada Perubahan APBD 2024 dikarenakan terdapat kesalahan standar biaya dlm penganggaran APBD murni. Namun pada perubahan juga tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan adanya himbauan efisiensi belanja.
27		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**						
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.000.000,00	14.750.000,00	49,17	15.250.000,00	50,83	Sisa anggaran berasal dari efisiensi belanja lembur
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	63.984.000,00	1.500.000,00	2,34	62.484.000,00	97,66	Efisiensi belanja, karena pelatihan dilaksanakan berdasarkan undangan yang diterima dan perintah dari atasan untuk mengikutinya
	5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	69.357.250,00	13.067.800,00	18,84	56.289.450,00	81,16	Efesiensi belanja, terutama efisiensi belanja bahan cetak
28		**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						
	5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.669.800,00	7.000.000,00	5,28	125.669.800,00	94,72	Peralatan yang sesuai dengan spesifikasi di dalam DPA tidak tersedia, sehingga Pejabat Pengadaan tidak bersedia untuk Proses Pengadaan selanjutnya
	5.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.570.000,00	2.465.000,00	37,52	4.105.000,00	62,48	Direalisasikan sesuai kebutuhan
29		**BADAN PENGHUBUNG**						
	5.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.086,00	-	-	67.086,00	100,00	Kegiatan ini direncanakan untuk pengadaan Kendaraan Listrik untuk keperluan Anjungan Sumbar di Taman Mini, namun sampai dengan Perubahan Anggaran 2024 tidak mendapatkan alokasi persetujuan Anggaran.
	5.07.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.000.000,00	-	-	41.000.000,00	100,00	Kegiatan ini ditujukan untuk perencanaan pembangunan Asrama Mahasiswa Semarang namun sampai dengan Perubahan Anggaran 2024 tidak mendapatkan alokasi persetujuan Anggaran.
	5.07.02 1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	3.144.156.367,00	1.490.406.175,00	47,40	1.653.750.192,00	52,60	Sisa Anggaran merupakan Hutang Sewa Kantor Tahun 2023 (1.293.800.000,-) Dalam pencairannya tidak dapat dicairkan sampai akhir tahun karena kurangnya syarat pencairan yaitu Reviu Inspektorat.
30		**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI**						
	6.01.01.1.03.06	Penatausahaan BMD pada SKPD	2.985.600,00	1.314.750,00	44,04	1.670.850,00	55,96	Efisiensi belanja ATK
	6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	11.527.000,00	1.500.000,00	13,01	10.027.000,00	86,99	Efisiensi Belanja Terhadap Pelaksanaan Penanganan Keruda yang semula direncanakan di luar Kota
31		**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						
	8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.600.000,00	4.783.000,00	30,66	10.817.000,00	69,34	Penghematan/Efisiensi
	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasanantar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	591.036.300,00	225.147.553,00	38,09	365.888.747,00	61,91	Sisa anggaran tersebut berupa Belanja Hibah untuk Korem 032/WBR terkait pengadaan Videotron karena pihak Korem tidak siap melaksanakan kegiatan tersebut dikarenakan keterbatasan waktu

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

RINGKASAN ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2024

No	S K P D	PENDAPATAN			
		ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
1	DINAS PENDIDIKAN	36.362.357.537,00	31.766.198.054,41	87,36	(4.596.159.482,59)
2	DINAS KESEHATAN	19.269.763.568,00	20.604.382.286,99	106,93	1.334.618.718,99
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI	145.000.000.000,00	141.745.330.961,50	97,76	(3.254.669.038,50)
4	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	27.500.000.000,00	28.883.738.650,00	105,03	1.383.738.650,00
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	100.000.000.000,00	102.693.134.890,00	102,69	2.693.134.890,00
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	82.000.000.000,00	81.311.894.592,00	99,16	(688.105.408,00)
7	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	5.000.000.000,00	450.805.000,00	9,02	(4.549.195.000,00)
8	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	-	-	-	-
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	-	-	-
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-
11	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-
12	DINAS SOSIAL	-	-	-	-
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	812.098.587,00	365.512.000,00	45,01	(446.586.587,00)
14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-
15	DINAS PANGAN	406.226.491,00	-	-	(406.226.491,00)
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	26.407.218.570,00	1.467.459.100,00	5,56	(24.939.759.470,00)
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	111.491.820,00	16.525.000,00	14,82	(94.966.820,00)
19	DINAS PERHUBUNGAN	472.186.963,00	286.614.000,00	60,70	(185.572.963,00)
20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	-	-	-
21	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	332.135.945,00	224.400.000,00	67,56	(107.735.945,00)
22	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	225.000.000,00	939.098.000,00	417,38	714.098.000,00
24	DINAS KEBUDAYAAN	482.100.355,00	355.448.000,00	73,73	(126.652.355,00)
25	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.374.641.671,00	1.189.969.092,00	35,26	(2.184.672.579,00)
27	DINAS PARIWISATA	20.196.000,00	20.196.000,00	100,00	-
28	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.318.783.685,00	1.600.354.230,00	121,35	281.570.545,00
29	DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	2.109.273.937,00	811.049.262,00	38,45	(1.298.224.675,00)
30	DINAS KEHUTANAN	106.429.500,00	113.557.500,00	106,70	7.128.000,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	8.316.000,00	8.316.000,00	100,00	-
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	33.421.313,00	38.008.527,00	113,73	4.587.214,00
33	SEKRETARIAT DAERAH	580.533.371,00	377.100.000,00	64,96	(203.433.371,00)
34	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-
35	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-
36	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.691.490.580.894,00	3.713.927.032.045,30	100,61	22.436.451.151,30
37	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2.713.189.071.456,00	2.352.573.329.214,00	86,71	(360.615.742.242,00)
38	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	-
39	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	465.933.256,00	597.861.000,00	128,31	131.927.744,00
40	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	-
41	BADAN PENGHUBUNG	216.391.601,00	51.370.000,00	23,74	(165.021.601,00)
42	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	-	-	-	-
43	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-
		-	-		-
	JUMLAH	**6.857.294.152.520,00**	**6.482.418.683.405,20**	**94,53**	**374.875.469.114,80**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
RINGKASAN LRA- PENDAPATAN DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/Kurang
1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**415.132.121.105,00**	**407.455.484.434,90**	**98,15**	**(7.676.636.670,10)**
1.01.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**36.362.357.537,00**	**31.766.198.054,41**	**87,36**	**(4.596.159.482,59)**
1.01.0.00.0.00.01.	DINAS PENDIDIKAN	36.362.357.537,00	31.766.198.054,41	87,36	(4.596.159.482,59)
1.02.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**373.769.763.568,00**	**375.238.481.380,49**	**100,39**	**1.468.717.812,49**
1.02.0.00.0.00.01.	DINAS KESEHATAN	19.269.763.568,00	20.604.382.286,99	106,93	1.334.618.718,99
1.02.0.00.0.00.02.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI	145.000.000.000,00	141.745.330.961,50	97,76	(3.254.669.038,50)
1.02.0.00.0.00.03.	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	27.500.000.000,00	28.883.738.650,00	105,03	1.383.738.650,00
1.02.0.00.0.00.04.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	100.000.000.000,00	102.693.134.890,00	102,69	2.693.134.890,00
1.02.0.00.0.00.05.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	82.000.000.000,00	81.311.894.592,00	99,16	(688.105.408,00)
1.03.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**5.000.000.000,00**	**450.805.000,00**	9,02	**(4.549.195.000,00)**
1.03.0.00.0.00.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-
1.03.0.00.0.00.03.	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	5.000.000.000,00	450.805.000,00	9,02	(4.549.195.000,00)
2.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**29.248.458.731,00**	**3.655.056.100,00**	**12,50**	**(25.593.402.631,00)**
2.07.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**812.098.587,00**	**365.512.000,00**	**45,01**	**(446.586.587,00)**
2.07.3.32.0.00.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	812.098.587,00	365.512.000,00	45,01	(446.586.587,00)
2.09.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**406.226.491,00**	**-**	**-**	**(406.226.491,00)**
2.09.0.00.0.00.01	DINAS PANGAN	406.226.491,00	-	-	(406.226.491,00)
2.11.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**26.407.218.570,00**	**1.467.459.100,00**	**5,56**	**(24.939.759.470,00)**
2.11.0.00.0.00.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	26.407.218.570,00	1.467.459.100,00	5,56	(24.939.759.470,00)
2.13.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**111.491.820,00**	**16.525.000,00**	**14,82**	**(94.966.820,00)**
2.13.0.00.0.00.01.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	111.491.820,00	16.525.000,00	14,82	(94.966.820,00)
2.15.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**472.186.963,00**	**286.614.000,00**	**60,70**	**(185.572.963,00)**
2.15.0.00.0.00.01.	DINAS PERHUBUNGAN	472.186.963,00	286.614.000,00	60,70	(185.572.963,00)
2.17.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**332.135.945,00**	**224.400.000,00**	**67,56**	**(107.735.945,00)**
2.17.0.00.0.00.01.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	332.135.945,00	224.400.000,00	67,56	(107.735.945,00)
2.18.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**		**-**
2.18.0.00.0.00.01.	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				-
2.19.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**225.000.000,00**	**939.098.000,00**	**417,38**	**714.098.000,00**
2.19.0.00.0.00.01.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	225.000.000,00	939.098.000,00	417,38	714.098.000,00
2.22.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**482.100.355,00**	**355.448.000,00**	**73,73**	**(126.652.355,00)**
2.22.0.00.0.00.01.	DINAS KEBUDAYAAN	482.100.355,00	355.448.000,00	73,73	(126.652.355,00)
2.23.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**-**	**-**		**-**
2.23.2.24.0.00.01.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				-
3.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**6.971.062.106,00**	**3.781.450.611,00**	**54,24**	**(3.189.611.495,00)**
3.25.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**3.374.641.671,00**	**1.189.969.092,00**	**35,26**	**(2.184.672.579,00)**
3.25.0.00.0.00.01.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.374.641.671,00	1.189.969.092,00	35,26	(2.184.672.579,00)
3.26.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**20.196.000,00**	**20.196.000,00**	**100,00**	**-**
3.26.0.00.0.00.01.	DINAS PARIWISATA	20.196.000,00	20.196.000,00	100,00	-
3.27.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**3.428.057.622,00**	**2.411.403.492,00**	**70,34**	**(1.016.654.130,00)**
3.27.0.00.0.00.01.	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	2.109.273.937,00	811.049.262,00	-	(1.298.224.675,00)
3.27.0.00.0.00.02.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.318.783.685,00	1.600.354.230,00	121,35	281.570.545,00
3.28.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**	**106.429.500,00**	**113.557.500,00**	**106,70**	**7.128.000,00**
3.28.0.00.0.00.01.	DINAS KEHUTANAN	106.429.500,00	113.557.500,00	106,70	7.128.000,00
3.29.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**8.316.000,00**	**8.316.000,00**	**100,00**	**-**
3.29.0.00.0.00.01.	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	8.316.000,00	8.316.000,00	100,00	-
3.30.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**33.421.313,00**	**38.008.527,00**	**113,73**	**4.587.214,00**
3.30.3.31.0.00.01.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	33.421.313,00	38.008.527,00	113,73	4.587.214,00
4.	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**580.533.371,00**	**377.100.000,00**	**64,96**	**(203.433.371,00)**
4.01.	**SEKRETARIAT DAERAH**	**580.533.371,00**	**377.100.000,00**	**64,96**	**(203.433.371,00)**
4.01.5.02.0.00.01.	SEKRETARIAT DAERAH	580.533.371,00	377.100.000,00	64,96	(203.433.371,00)
5.	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**6.405.361.977.207,00**	**6.067.149.592.259,30**	**94,72**	**(338.212.384.947,70)**
5.02.	**KEUANGAN**	**6.404.679.652.350,00**	**6.066.500.361.259,30**	**94,72**	**(338.179.291.090,70)**
5.02.0.00.0.00.03.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.713.189.071.456,00	2.352.756.945.707,31	86,72	(360.432.125.748,69)
5.02.0.00.0.00.04.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	3.691.490.580.894,00	3.713.743.415.551,99	100,60	22.252.834.657,99
5.04.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**465.933.256,00**	**597.861.000,00**	**128,31**	**131.927.744,00**
5.04.0.00.0.00.01.	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	465.933.256,00	597.861.000,00	128,31	131.927.744,00
5.07.	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**	**216.391.601,00**	**51.370.000,00**	**23,74**	**(165.021.601,00)**
5.07.0.00.0.00.01.	BADAN PENGHUBUNG	216.391.601,00	51.370.000,00	23,74	(165.021.601,00)
	JUMLAH	**6.857.294.152.520,00**	**6.482.418.683.405,20**	**94,53**	**(374.875.469.114,80)**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Daftar Rekapitulasi Anggaran, Realisasi dan Sisa Dana DAK Fisik Tahun 2024

NO	Jenis Dana	Bidang	Sub Bidang	SKPD	NILAI RK	NILAI KONTRAK	REALISASI SP2D BUN	REALISASI SP2D BUD	Persentasi realisasi (dari dana masuk)	Nilai realisasi SP2D BUD yang belum terserap (sisa di RKUD)
							Jumlah	Jumlah		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	**631212,DAK Fisik Penugasan**	**C02,Pendidikan**	**C02004,SMA**	**DINAS PENDIDIKAN**	**47.947.456.000,00**	**46.301.382.190,00**	**46.301.382.190,00**	**45.891.837.917,00**		**409.544.273,00**
					47.568.006.000,00	45.929.763.625,00	45.929.763.625,00	45.520.219.352,00	99,11	409.544.273,00
					379.450.000,00	371.618.565,00	371.618.565,00	371.618.565,00	100,00	-
2	**631212,DAK Fisik Penugasan**	**C02,Pendidikan**	**C02005,SMK**	**DINAS PENDIDIKAN**	**98.431.152.000,00**	**90.625.624.929,00**	**68.930.425.979,00**	**68.930.425.979,00**		**-**
					98.331.152.000,00	90.527.005.350,00	68.831.806.400,00	68.831.806.400,00	100,00	-
					100.000.000,00	98.619.579,00	98.619.579,00	98.619.579,00	100,00	-
3	**631212,DAK Fisik Penugasan**	**C02,Pendidikan**	**C02006,SLB**	**DINAS PENDIDIKAN**	**22.186.699.000,00**	**21.154.123.878,00**	**21.154.123.878,00**	**21.005.202.940,00**		**148.920.938,00**
					19.246.699.000,00	18.438.463.308,00	18.438.463.308,00	**18.289.542.370,00**	**99,19**	148.920.938,00
					2.940.000.000,00	2.715.660.570,00	2.715.660.570,00	**2.715.660.570,00**	**100,00**	-
4	**631212,DAK Fisik Penugasan**	**D02,Kesehatan dan KB**	**D02001,Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting**		**11.679.998.000,00**	**11.505.090.836,00**	**11.505.090.836,00**	**11.505.090.836,00**		-
				RSAM BUKITTINGGI	10.219.998.000,00	10.064.023.982,00	10.064.023.982,00	10.064.023.982,00	100,00	-
				RSUD M NATSIR	1.460.000.000,00	1.441.066.854,00	1.441.066.854,00	1.441.066.854,00	100,00	-
5	**631212,DAK Fisik Penugasan**	**D02,Kesehatan dan KB**	**D02004,Penguatan Sistem Kesehatan**		**7.363.490.106,00**	**7.073.890.400,00**	**7.073.890.400,00**	**7.073.890.400,00**	100,00	-
				10742-RS Umum Daerah Mohammad Natsir	1.482.911.647,00	1.439.600.000,00	1.439.600.000,00	1.439.600.000,00	-	-
				10749-RS Umum Daerah Pariaman	1.485.606.199,00	1.444.509.000,00	1.444.509.000,00	1.444.509.000,00	100,00	-
				10729-RS Paru Sumatera Barat	1.500.000.000,00	1.416.031.650,00	1.416.031.650,00	1.416.031.650,00	100,00	-
				10746-RS Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar	1.500.000.000,00	1.393.399.750,00	1.393.399.750,00	1.393.399.750,00	100,00	-
				10740-RS Jiwa Prof. Dr. Hasan Basri Saanin	1.394.972.260,00	1.380.350.000,00	1.380.350.000,00	1.380.350.000,00	100,00	-
6	**631212,DAK Fisik Penugasan**	**F04,Jalan**	**F04001,Jalan**		**10.143.426.000,00**	**10.140.169.700,00**	**10.140.169.700,00**	**10.140.169.700,00**	**100,00**	**-**
7	**631212,DAK Fisik Penugasan**	**F04,Jalan**	**F04003,Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas**		**7.821.659.000,00**	**7.815.504.617,00**	**7.815.504.617,00**	**7.815.504.617,00**	**100,00**	**-**
8	**631212,DAK Fisik Penugasan**	**F04,Jalan**	**F04006,Jalan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi**		**13.724.800.000,00**	**13.724.718.620,00**	**13.724.718.620,00**	**13.724.718.620,00**	**100,00**	**-**
9	**631212,DAK Fisik Penugasan**	**F04,Jalan**	**F04007,Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)**		**12.464.573.000,00**	**11.872.557.880,00**	**11.872.557.880,00**	**11.872.557.880,00**	**100,00**	**-**
10	**631212,DAK Fisik Penugasan**	**G02,Irigasi**	**G02007,Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)**		**16.436.043.000,00**	**15.651.462.520,00**	**15.651.462.520,00**	**15.646.803.720,00**	**99,97**	**4.658.800,00**
11	**631212,DAK Fisik Penugasan**	**G04,Kelautan dan Perikanan**	**G04003,Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)**		**5.278.901.000,00**	**3.682.658.814,00**	**3.695.230.700,00**	**3.682.354.614,00**	**99,65**	**12.876.086,00**
TOTAL					**253.478.197.106,00**	**239.547.184.384,00**	**217.864.557.320,00**	**217.288.557.223,00**		**576.000.097,00**

Lampiran 7

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Daftar Rekapitulasi Anggaran, Realisasi dan Sisa Dana DAK Non Fisik Tahun 2024

NO.	Jenis DAK Non Fisik	SKPD	Alokasi	Sisa TA Sebelumnya	Realisasi SP2D BUN	Pengembalian	Saldo	Realisasi SP2D BUD	Sisa Di RKUD Saat ini	Keterangan
1	DAK Non Fisik-TPG PNSD	Dinas Pendidikan	489.226.856.000,00	21.442.119.750,00	474.423.233.850,00	58.061.513,00	495.923.415.113,00	485.507.757.500,00	10.415.657.613,00	sudah lapor
2	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	Dinas Pendidikan	4.859.852.000,00	1.040.921.222,00	4.859.852.000,00	5.819.122,00	5.906.592.344,00	2.717.750.000,00	3.188.842.344,00	sudah lapor
3	DAK Non Fisik-TKG PNSD	Dinas Pendidikan	3.026.016.000,00	35.129.600,00	3.312.510.000,00		3.347.639.600,00	3.304.347.300,00	43.292.300,00	sudah lapor
4	DAK Non Fisik-BOP Museum	Dinas Kebudayaan	2.000.000.000,00	15.774.132,00	1.984.225.868,00		2.000.000.000,00	1.978.611.980	21.388.020,00	sudah lapor
5	DAK Non Fisik-BOP Taman Budaya	Dinas Kebudayaan	2.000.000.000,00	105.195.135,00	1.894.804.865,00		2.000.000.000,00	1.960.888.577,00	39.111.423,00	sudah lapor
6	DAK Non Fisik-BOK Provinsi	Dinas Kesehatan	6.991.591.000,00	1.215.341.291,00	5.776.249.709,00		6.991.591.000,00	6.239.258.250,00	752.332.750,00	sudah lapor
7	DAK Non Fisik-PK2UKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	5.246.077.000,00	31.341.610,00	5.214.735.390,00		5.246.077.000,00	5.067.227.965	178.849.035,00	sudah lapor
8	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.669.723.000,00	23.539.362,00	1.646.183.638,00		1.669.723.000,00	1.644.760.701	24.962.299,00	sudah lapor
9	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	406.000.000,00	62.266.799,00	343.733.201,00		406.000.000,00	306.406.452	99.593.548,00	sudah lapor
T O T A L			**515.426.115.000,00**	**23.971.628.901,00**	**499.455.528.521,00**	**63.880.635,00**	**523.491.038.057,00**	**508.727.008.725,00**	**14.764.029.332,00**	

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Daftar Rekapitulasi Anggaran, Realisasi dan Sisa Dana DAU SG Tahun 2024

ALOKASI DAN REALISASI TA 2024

NO.	BIDANG	ALOKASI	PENYALURAN DARI RKUN	REALISASI SP2D BUD	SISA	KETERANGAN
1.	PENDIDIKAN	238.094.588.000,00	238.094.588.000,00	224.167.838.466,00	13.926.749.534,00	
2.	KESEHATAN	38.286.764.000,00	38.286.764.000,00	34.705.352.918,00	3.581.411.082,00	
3.	PEKERJAAN UMUM	36.420.845.000,00	36.420.845.000,00	35.372.847.517,00	1.047.997.483,00	
4.	PPPK	*37.958.832.000,00*	*36.482.588.987,00*	*36.458.530.937,00*	24.058.050,00	
	JUMLAH	350.761.029.000,00	349.284.785.987,00	330.704.569.838,00	18.580.216.149,00	

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
REKAPITULASI BELANJA PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2024

No	SKPD	BELANJA			
		ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
1	DINAS PENDIDIKAN	2.523.027.437.087,00	2.410.380.936.204,10	95,54	112.646.500.882,90
2	DINAS KESEHATAN	210.621.390.503,00	198.474.421.818,00	94,23	12.146.968.685,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR	277.385.455.198,00	257.606.668.173,00	92,87	19.778.787.025,00
4	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	68.862.465.363,00	66.415.483.131,00	96,45	2.446.982.232,00
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	166.276.262.634,00	160.783.940.006,00	96,70	5.492.322.628,00
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	130.988.765.316,00	123.344.759.842,64	94,16	7.644.005.473,36
7	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	307.749.150.754,00	295.764.928.620,46	96,11	11.984.222.133,54
8	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	117.119.116.906,00	106.954.969.122,00	91,32	10.164.147.784,00
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN	120.953.672.630,00	118.719.784.960,00	98,15	2.233.887.670,00
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	12.742.506.541,00	12.188.017.501,00	95,65	554.489.040,00
11	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	18.035.928.123,00	17.403.548.972,00	96,49	632.379.151,00
12	DINAS SOSIAL	114.247.707.631,00	109.885.949.925,00	96,18	4.361.757.706,00
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	32.328.458.177,00	30.546.843.365,00	94,49	1.781.614.812,00
14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	20.325.367.523,00	18.681.808.456,00	91,91	1.643.559.067,00
15	DINAS PANGAN	29.693.853.615,00	26.862.458.559,00	90,46	2.831.395.056,00
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	29.356.409.054,00	24.950.908.893,00	84,99	4.405.500.161,00
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.989.772.424,00	7.622.706.393,82	95,41	367.066.030,18
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.816.796.593,00	14.663.702.517,00	92,71	1.153.094.076,00
19	DINAS PERHUBUNGAN	18.491.134.178,00	17.620.959.094,80	95,29	870.175.083,20
20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	36.509.759.008,00	31.261.661.811,00	85,63	5.248.097.197,00
21	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	26.384.158.087,00	24.520.601.631,00	92,94	1.863.556.456,00
22	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN	15.500.647.054,00	13.860.693.479,00	89,42	1.639.953.575,00
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	67.171.612.076,00	65.256.437.377,00	97,15	1.915.174.699,00
24	DINAS KEBUDAYAAN	33.931.381.189,03	32.028.260.450,00	94,39	1.903.120.739,03
25	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	15.300.958.778,00	14.629.783.769,00	95,61	671.175.009,00
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	61.778.807.611,00	57.312.148.217,17	92,77	4.466.659.393,83
27	DINAS PARIWISATA	30.332.502.671,00	27.681.468.600,00	91,26	2.651.034.071,00
28	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	72.482.633.845,00	69.669.065.618,00	96,12	2.813.568.227,00
29	DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	153.477.506.236,00	130.606.775.975,00	85,10	22.870.730.261,00
30	DINAS KEHUTANAN	83.954.945.268,00	78.360.143.256,00	93,34	5.594.802.012,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	16.831.331.645,00	15.867.717.182,00	94,27	963.614.463,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	32.477.836.457,00	30.260.547.270,00	93,17	2.217.289.187,00
33	SEKRETARIAT DAERAH	231.639.634.441,00	210.740.640.207,00	90,98	20.898.994.234,00
34	SEKRETARIAT DPRD	219.269.612.845,00	194.731.270.011,16	88,81	24.538.342.833,84
35	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.054.954.042,00	18.931.696.909,00	94,40	1.123.257.133,00
36	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.334.480.862.975,16	1.167.313.381.147,76	87,47	167.167.481.827,40
37	BADAN PENDAPATAN DAERAH	99.290.120.686,00	88.938.991.659,00	89,57	10.351.129.027,00
38	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	18.232.783.270,00	16.524.190.289,13	90,63	1.708.592.980,87
39	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	23.012.735.563,00	21.748.964.986,00	94,51	1.263.770.577,00
40	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	11.664.841.534,00	10.121.470.998,00	86,77	1.543.370.536,00
41	BADAN PENGHUBUNG	19.705.127.610,00	16.902.728.831,00	85,78	2.802.398.779,00
42	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	28.448.738.397,00	26.213.295.798,92	92,14	2.235.442.598,08
43	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	143.796.555.407,00	142.310.014.098,00	98,97	1.486.541.309,00
	JUMLAH	**7.017.741.696.945,19**	**6.524.664.745.123,96**	**92,97**	**493.076.951.821,23**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
REKAPITULASI BELANJA OPERASI PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2024

No	S K P D	BELANJA OPERASI			
		ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
1	DINAS PENDIDIKAN	2.190.837.411.628,00	2.133.084.893.265,10	97,36	57.752.518.362,90
2	DINAS KESEHATAN	206.803.917.348,00	195.253.896.634,00	94,41	11.550.020.714,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI	243.139.820.482,00	228.140.740.611,00	93,83	14.999.079.871,00
4	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	65.671.863.363,00	63.449.938.645,00	96,62	2.221.924.718,00
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	152.213.492.141,00	148.255.654.703,00	97,40	3.957.837.438,00
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	118.379.982.881,00	115.098.628.420,64	97,23	3.281.354.460,36
7	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	99.148.064.412,00	96.010.301.037,00	96,84	3.137.763.375,00
8	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	56.260.327.524,00	53.420.026.155,00	94,95	2.840.301.369,00
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	26.415.450.429,00	25.382.438.960,00	96,09	1.033.011.469,00
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11.769.532.464,00	11.220.897.101,00	95,34	548.635.363,00
11	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	17.911.474.743,00	17.284.898.972,00	96,50	626.575.771,00
12	DINAS SOSIAL	108.311.836.642,00	104.113.036.060,00	96,12	4.198.800.582,00
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	32.210.454.377,00	30.432.575.665,00	94,48	1.777.878.712,00
14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	19.622.432.303,00	18.240.852.456,00	92,96	1.381.579.847,00
15	DINAS PANGAN	29.473.054.815,00	26.808.748.559,00	90,96	2.664.306.256,00
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	26.578.250.038,00	22.499.759.684,00	84,65	4.078.490.354,00
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.955.627.714,00	7.603.310.143,82	95,57	352.317.570,18
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.808.358.593,00	14.655.267.517,00	92,71	1.153.091.076,00
19	DINAS PERHUBUNGAN	18.471.824.078,00	17.601.941.094,80	95,29	869.882.983,20
20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	33.655.717.814,00	30.224.202.615,00	89,80	3.431.515.199,00
21	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	26.057.582.669,00	24.206.178.631,00	92,89	1.851.404.038,00
22	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU	15.387.400.764,00	13.749.598.499,00	89,36	1.637.802.265,00
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	67.136.180.076,00	65.221.005.377,00	97,15	1.915.174.699,00
24	DINAS KEBUDAYAAN	33.832.039.989,03	31.929.245.450,00	94,38	1.902.794.539,03
25	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	15.177.872.178,00	14.507.641.269,00	95,58	670.230.909,00
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	55.139.222.346,00	52.292.546.483,33	94,84	2.846.675.862,67
27	DINAS PARIWISATA	29.802.102.671,00	27.305.596.163,00	91,62	2.496.506.508,00
28	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	70.651.823.069,00	68.064.804.212,00	96,34	2.587.018.857,00
29	DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	152.991.008.986,00	130.127.311.336,00	85,06	22.863.697.650,00
30	DINAS KEHUTANAN	83.645.300.568,00	78.105.643.256,00	93,38	5.539.657.312,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	16.624.726.715,00	15.667.297.982,00	94,24	957.428.733,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	32.034.150.525,00	29.867.502.160,00	93,24	2.166.648.365,00
33	SEKRETARIAT DAERAH	206.531.779.622,00	186.870.932.722,00	90,48	19.660.846.900,00
34	SEKRETARIAT DPRD	185.280.123.116,00	161.407.037.764,16	87,12	23.873.085.351,84
35	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	19.968.174.842,00	18.853.900.909,00	94,42	1.114.273.933,00
36	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	25.801.652.177,16	21.200.996.376,00	82,17	4.600.655.801,16
37	BADAN PENDAPATAN DAERAH	97.076.181.056,00	86.848.558.614,00	89,46	10.227.622.442,00
38	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	18.104.027.110,00	16.402.797.171,00	90,60	1.701.229.939,00
39	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	21.157.820.393,00	19.939.974.986,00	94,24	1.217.845.407,00
40	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	11.459.302.484,00	10.042.920.998,00	87,64	1.416.381.486,00
41	BADAN PENGHUBUNG	19.444.905.524,00	16.712.896.331,00	85,95	2.732.009.193,00
42	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	25.984.096.277,00	23.803.646.192,00	91,61	2.180.450.085,00
43	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	143.592.270.116,00	142.107.464.098,00	98,97	1.484.806.018,00
	JUMLAH	**4.853.518.637.062,19**	**4.614.017.505.277,85**	**95,07**	**239.501.131.784,34**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2024

No	S K P D	BELANJA PEGAWAI									
		ANGGARAN		REALISASI		TOTAL			LEBIH/KURANG		
		APBD	BLUD	APBD	BLUD	ANGGARAN	REALISASI	%	APBD	BLUD	TOTAL
1	DINAS PENDIDIKAN	1.626.736.829.717,00		1.592.002.002.278,00		1.626.736.829.717,00	1.592.002.002.278,00	97,86	34.734.827.439,00	-	34.734.827.439,00
2	DINAS KESEHATAN	62.912.828.723,00		57.937.487.672,00		62.912.828.723,00	57.937.487.672,00	92,09	4.975.341.051,00	-	4.975.341.051,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI	90.132.279.340,00		85.669.253.332,00		90.132.279.340,00	85.669.253.332,00	95,05	4.463.026.008,00	-	4.463.026.008,00
4	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	37.035.713.284,00	184.676.544,00	35.147.501.063,00	183.579.749,00	37.220.389.828,00	35.331.080.812,00	94,92	1.888.212.221,00	1.096.795,00	1.889.309.016,00
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	61.389.526.230,00		58.089.911.516,00		61.389.526.230,00	58.089.911.516,00	94,63	3.299.614.714,00	-	3.299.614.714,00
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	44.745.183.867,00		42.883.280.118,00		44.745.183.867,00	42.883.280.118,00	95,84	1.861.903.749,00	-	1.861.903.749,00
7	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	37.253.606.497,00		35.763.158.054,00		37.253.606.497,00	35.763.158.054,00	96,00	1.490.448.443,00	-	1.490.448.443,00
8	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	16.445.157.784,00		15.290.566.655,00		16.445.157.784,00	15.290.566.655,00	92,98	1.154.591.129,00	-	1.154.591.129,00
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	7.646.300.003,00		7.242.121.666,00		7.646.300.003,00	7.242.121.666,00	94,71	404.178.337,00	-	404.178.337,00
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.128.499.608,00		5.749.528.755,00		6.128.499.608,00	5.749.528.755,00	93,82	378.970.853,00	-	378.970.853,00
11	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.129.300.000,00		9.611.591.275,00		10.129.300.000,00	9.611.591.275,00	94,89	517.708.725,00	-	517.708.725,00
12	DINAS SOSIAL	22.422.232.641,00		21.206.093.148,00		22.422.232.641,00	21.206.093.148,00	94,58	1.216.139.493,00	-	1.216.139.493,00
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	23.888.602.090,00		22.333.117.621,00		23.888.602.090,00	22.333.117.621,00	93,49	1.555.484.469,00	-	1.555.484.469,00
14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.651.844.196,00		7.257.611.187,00		7.651.844.196,00	7.257.611.187,00	94,85	394.233.009,00	-	394.233.009,00
15	DINAS PANGAN	13.931.844.912,00		12.468.027.919,00		13.931.844.912,00	12.468.027.919,00	89,49	1.463.816.993,00	-	1.463.816.993,00
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11.400.325.741,00		10.086.916.475,00		11.400.325.741,00	10.086.916.475,00	88,48	1.313.409.266,00	-	1.313.409.266,00
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.668.585.476,00		4.398.082.465,00		4.668.585.476,00	4.398.082.465,00	94,21	270.503.011,00	-	270.503.011,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.484.057.740,00		6.561.476.273,00		7.484.057.740,00	6.561.476.273,00	87,67	922.581.467,00	-	922.581.467,00
19	DINAS PERHUBUNGAN	10.346.498.513,00		9.653.311.322,00		10.346.498.513,00	9.653.311.322,00	93,30	693.187.191,00	-	693.187.191,00
20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	9.612.381.550,00		8.193.717.021,00		9.612.381.550,00	8.193.717.021,00	85,24	1.418.664.529,00	-	1.418.664.529,00
21	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	8.984.456.759,00		8.373.243.198,00		8.984.456.759,00	8.373.243.198,00	93,20	611.213.561,00	-	611.213.561,00
22	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU	8.989.302.641,00		7.549.701.786,00		8.989.302.641,00	7.549.701.786,00	83,99	1.439.600.855,00	-	1.439.600.855,00
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	10.479.192.314,00		9.751.632.314,00		10.479.192.314,00	9.751.632.314,00	93,06	727.560.000,00	-	727.560.000,00
24	DINAS KEBUDAYAAN	9.591.176.194,00		8.959.084.009,00		9.591.176.194,00	8.959.084.009,00	93,41	632.092.185,00	-	632.092.185,00
25	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	10.827.931.085,00		10.251.973.528,00		10.827.931.085,00	10.251.973.528,00	94,68	575.957.557,00	-	575.957.557,00
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	20.839.916.701,00		19.268.157.713,00		20.839.916.701,00	19.268.157.713,00	92,46	1.571.758.988,00	-	1.571.758.988,00
27	DINAS PARIWISATA	8.275.934.233,00		7.473.307.200,00		8.275.934.233,00	7.473.307.200,00	90,30	802.627.033,00	-	802.627.033,00
28	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	19.446.651.547,00		18.173.373.116,00		19.446.651.547,00	18.173.373.116,00	93,45	1.273.278.431,00	-	1.273.278.431,00
29	DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	43.256.625.192,00		40.692.441.728,00		43.256.625.192,00	40.692.441.728,00	94,07	2.564.183.464,00	-	2.564.183.464,00
30	DINAS KEHUTANAN	47.644.013.994,00		45.212.064.579,00		47.644.013.994,00	45.212.064.579,00	94,90	2.431.949.415,00	-	2.431.949.415,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	8.617.952.194,00		8.165.451.452,00		8.617.952.194,00	8.165.451.452,00	94,75	452.500.742,00	-	452.500.742,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	13.596.113.042,00		12.887.632.170,00		13.596.113.042,00	12.887.632.170,00	94,79	708.480.872,00	-	708.480.872,00
33	SEKRETARIAT DAERAH	63.683.925.559,00		59.469.088.405,00		63.683.925.559,00	59.469.088.405,00	93,38	4.214.837.154,00	-	4.214.837.154,00
34	SEKRETARIAT DPRD	53.688.167.576,00		52.678.828.691,00		53.688.167.576,00	52.678.828.691,00	98,12	1.009.338.885,00	-	1.009.338.885,00
35	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.695.459.227,00		11.185.076.922,00		11.695.459.227,00	11.185.076.922,00	95,64	510.382.305,00	-	510.382.305,00
36	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	16.571.011.065,16		14.524.327.584,00		16.571.011.065,16	14.524.327.584,00	87,65	2.046.683.481,16	-	2.046.683.481,16
37	BADAN PENDAPATAN DAERAH	61.247.616.547,00		54.094.183.094,00		61.247.616.547,00	54.094.183.094,00	88,32	7.153.433.453,00	-	7.153.433.453,00
38	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	11.288.041.352,00		10.360.988.594,00		11.288.041.352,00	10.360.988.594,00	91,79	927.052.758,00	-	927.052.758,00
39	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11.726.038.318,00		10.725.187.691,00		11.726.038.318,00	10.725.187.691,00	91,46	1.000.850.627,00	-	1.000.850.627,00
40	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.978.652.517,00		5.254.580.515,00		5.978.652.517,00	5.254.580.515,00	87,89	724.072.002,00	-	724.072.002,00
41	BADAN PENGHUBUNG	6.898.931.707,00		6.605.761.233,00		6.898.931.707,00	6.605.761.233,00	95,75	293.170.474,00	-	293.170.474,00
42	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	17.002.412.458,00		15.525.007.879,00		17.002.412.458,00	15.525.007.879,00	91,31	1.477.404.579,00	-	1.477.404.579,00
43	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.038.217.513,00		5.645.475.966,00		6.038.217.513,00	5.645.475.966,00	93,50	392.741.547,00	-	392.741.547,00
	JUMLAH	**2.588.329.337.647,16**	**184.676.544,00**	**2.490.371.325.182,00**	**183.579.749,00**	**2.588.514.014.191,16**	**2.490.554.904.931,00**	**96,22**	**97.958.012.465,16**	**1.096.795,00**	**97.959.109.260,16**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
REKAPITULASI BELANJA BARANG DAN JASA PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2024

No	SKPD	BELANJA BARANG DAN JASA												
		ANGGARAN			REALISASI			TOTAL			LEBIH/KURANG			
		APBD	BOS	BLUD	APBD	BOS	BLUD	ANGGARAN	REALISASI	%	APBD	BOS	BLUD	TOTAL
1	DINAS PENDIDIKAN	178.920.145.632,00	276.407.346.201,00	32.606.740.078,00	162.634.961.915,00	274.150.899.411,00	28.567.287.981,10	487.934.231.911,00	465.353.149.307,10	95,37	16.285.183.717,00	2.256.446.790,00	4.039.452.096,90	22.581.082.603,90
2	DINAS KESEHATAN	124.634.120.713,00		16.941.317.912,00	118.213.668.995,00		16.812.539.967,00	141.575.438.625,00	135.026.208.962,00	95,37	6.420.451.718,00	-	128.777.945,00	6.549.229.663,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI			153.007.541.142,00			142.471.487.279,00	153.007.541.142,00	142.471.487.279,00	93,11	-	-	10.536.053.863,00	10.536.053.863,00
4	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN			28.451.473.535,00			28.118.857.833,00	28.451.473.535,00	28.118.857.833,00	98,83	-	-	332.615.702,00	332.615.702,00
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	197.216,00		90.823.768.695,00			90.165.743.187,00	90.823.965.911,00	90.165.743.187,00	99,28	197.216,00	-	658.025.508,00	658.222.724,00
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN			73.634.799.014,00			72.215.348.302,64	73.634.799.014,00	72.215.348.302,64	98,07	-	-	1.419.450.711,36	1.419.450.711,36
7	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	61.894.457.915,00			60.247.142.983,00			61.894.457.915,00	60.247.142.983,00	97,34	1.647.314.932,00	-	-	1.647.314.932,00
8	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	39.815.169.740,00			38.129.459.500,00			39.815.169.740,00	38.129.459.500,00	95,77	1.685.710.240,00	-	-	1.685.710.240,00
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	18.769.150.426,00			18.140.317.294,00			18.769.150.426,00	18.140.317.294,00	96,65	628.833.132,00	-	-	628.833.132,00
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.641.032.856,00			5.471.368.346,00			5.641.032.856,00	5.471.368.346,00	96,99	169.664.510,00	-	-	169.664.510,00
11	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.782.174.743,00			7.673.307.697,00			7.782.174.743,00	7.673.307.697,00	98,60	108.867.046,00	-	-	108.867.046,00
12	DINAS SOSIAL	44.317.298.551,00			42.410.079.462,00			44.317.298.551,00	42.410.079.462,00	95,70	1.907.219.089,00	-	-	1.907.219.089,00
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8.321.852.287,00			8.099.458.044,00			8.321.852.287,00	8.099.458.044,00	97,33	222.394.243,00	-	-	222.394.243,00
14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.970.588.107,00			10.983.241.269,00			11.970.588.107,00	10.983.241.269,00	91,75	987.346.838,00	-	-	987.346.838,00
15	DINAS PANGAN	12.941.501.903,00			11.741.012.640,00			12.941.501.903,00	11.741.012.640,00	90,72	1.200.489.263,00	-	-	1.200.489.263,00
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	15.177.924.297,00			12.412.843.209,00			15.177.924.297,00	12.412.843.209,00	81,78	2.765.081.088,00	-	-	2.765.081.088,00
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.287.042.238,00			3.205.227.678,82			3.287.042.238,00	3.205.227.678,82	97,51	81.814.559,18	-	-	81.814.559,18
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.324.300.853,00			8.093.791.244,00			8.324.300.853,00	8.093.791.244,00	97,23	230.509.609,00	-	-	230.509.609,00
19	DINAS PERHUBUNGAN	8.125.325.565,00			7.948.629.772,80			8.125.325.565,00	7.948.629.772,80	97,83	176.695.792,20	-	-	176.695.792,20
20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	20.043.336.264,00			18.050.380.963,00			20.043.336.264,00	18.050.380.963,00	90,06	1.992.955.301,00	-	-	1.992.955.301,00
21	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	14.993.043.575,00			13.765.820.933,00			14.993.043.575,00	13.765.820.933,00	91,81	1.227.222.642,00	-	-	1.227.222.642,00
22	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.398.098.123,00			6.199.896.713,00			6.398.098.123,00	6.199.896.713,00	96,90	198.201.410,00	-	-	198.201.410,00
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	19.451.987.762,00			18.311.208.063,00			19.451.987.762,00	18.311.208.063,00	94,14	1.140.779.699,00	-	-	1.140.779.699,00
24	DINAS KEBUDAYAAN	24.240.863.795,03			22.970.161.441,00			24.240.863.795,03	22.970.161.441,00	94,76	1.270.702.354,03	-	-	1.270.702.354,03
25	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4.349.941.093,00			4.255.667.741,00			4.349.941.093,00	4.255.667.741,00	97,83	94.273.352,00	-	-	94.273.352,00
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	34.299.305.645,00			33.024.388.770,33			34.299.305.645,00	33.024.388.770,33	96,28	1.274.916.874,67	-	-	1.274.916.874,67
27	DINAS PARIWISATA	21.526.168.438,00			19.832.288.963,00			21.526.168.438,00	19.832.288.963,00	92,13	1.693.879.475,00	-	-	1.693.879.475,00
28	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	51.205.171.522,00			49.891.431.096,00			51.205.171.522,00	49.891.431.096,00	97,43	1.313.740.426,00	-	-	1.313.740.426,00
29	DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	109.603.936.294,00			89.304.422.108,00			109.603.936.294,00	89.304.422.108,00	81,48	20.299.514.186,00	-	-	20.299.514.186,00
30	DINAS KEHUTANAN	36.001.286.574,00			32.893.578.677,00			36.001.286.574,00	32.893.578.677,00	91,37	3.107.707.897,00	-	-	3.107.707.897,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	8.006.774.521,00			7.501.846.530,00			8.006.774.521,00	7.501.846.530,00	93,69	504.927.991,00	-	-	504.927.991,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	17.088.037.483,00			15.666.909.904,00			17.088.037.483,00	15.666.909.904,00	91,68	1.421.127.579,00	-	-	1.421.127.579,00
33	SEKRETARIAT DAERAH	102.987.354.063,00			95.316.344.317,00			102.987.354.063,00	95.316.344.317,00	92,55	7.671.009.746,00	-	-	7.671.009.746,00
34	SEKRETARIAT DPRD	131.591.955.540,00			108.728.209.073,16			131.591.955.540,00	108.728.209.073,16	82,63	22.863.746.466,84	-	-	22.863.746.466,84
35	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.272.715.615,00			7.668.823.987,00			8.272.715.615,00	7.668.823.987,00	92,70	603.891.628,00	-	-	603.891.628,00
36	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	9.230.641.112,00			6.676.668.792,00			9.230.641.112,00	6.676.668.792,00	72,33	2.553.972.320,00	-	-	2.553.972.320,00
37	BADAN PENDAPATAN DAERAH	35.828.564.509,00			32.754.375.520,00			35.828.564.509,00	32.754.375.520,00	91,42	3.074.188.989,00	-	-	3.074.188.989,00
38	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	4.815.985.758,00			4.551.106.832,00			4.815.985.758,00	4.551.106.832,00	94,50	264.878.926,00	-	-	264.878.926,00

39	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.431.782.075,00			9.214.787.295,00			9.431.782.075,00	9.214.787.295,00	97,70	216.994.780,00	-	-	216.994.780,00
40	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.480.649.967,00			4.788.340.483,00			5.480.649.967,00	4.788.340.483,00	87,37	692.309.484,00	-	-	692.309.484,00
41	BADAN PENGHUBUNG	12.545.973.817,00			10.107.135.098,00			12.545.973.817,00	10.107.135.098,00	80,56	2.438.838.719,00	-	-	2.438.838.719,00
42	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	8.981.683.819,00			8.278.638.313,00			8.981.683.819,00	8.278.638.313,00	92,17	703.045.506,00	-	-	703.045.506,00
43	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	17.000.844.819,00			16.258.780.348,00			17.000.844.819,00	16.258.780.348,00	95,64	742.064.471,00	-	-	742.064.471,00
	JUMLAH	**1.263.298.385.225,03**	**276.407.346.201,00**	**395.465.640.376,00**	**1.151.415.722.010,11**	**274.150.899.411,00**	**378.351.264.549,74**	**1.935.171.371.802,03**	**1.803.917.885.970,85**	**93,22**	**111.882.663.214,92**	**2.256.446.790,00**	**17.114.375.826,26**	**131.253.485.831,18**

PROVINSI SUMATERA BARAT

RINGKASAN REALISASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2024

Kode			Urusan Pemerintahan	Jumlah			Bertambah/Berkurang	
				Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Rp.	%
1			2	3	4	5	6	7
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**4.067.799.770.386,00**	**3.877.733.374.845,20**	**95,33**	**190.066.395.540,80**	**4,67**
1.01			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**2.523.027.437.087,00**	**2.410.380.936.204,10**	**95,54**	**112.646.500.882,90**	**4,46**
1.01	**1.01.0.00.0.00.01**		**DINAS PENDIDIKAN**	**2.523.027.437.087,00**	**2.410.380.936.204,10**	**95,54**	**112.646.500.882,90**	**4,46**
1.01	1.01.0.00.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	2.523.027.437.087,00	2.410.380.936.204,10	95,54	112.646.500.882,90	4,46
1.01	1.01.0.00.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	2.190.837.411.628,00	2.133.084.893.265,10	97,36	57.752.518.362,90	2,64
1.01	1.01.0.00.0.00.01	5.1.01	Belanja Pegawai	1.626.736.829.717,00	1.592.002.002.278,00	97,86	34.734.827.439,00	2,14
1.01	1.01.0.00.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487.934.231.911,00	465.353.149.307,10	95,37	22.581.082.603,90	4,63
1.01	1.01.0.00.0.00.01	5.1.05	Belanja Hibah	76.166.350.000,00	75.729.741.680,00	99,43	436.608.320,00	0,57
1.01	1.01.0.00.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	332.190.025.459,00	277.296.042.939,00	83,48	54.893.982.520,00	16,52
1.01	1.01.0.00.0.00.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.412.225.761,00	99.082.839.320,00	78,38	27.329.386.441,00	21,62
1.01	1.01.0.00.0.00.01	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	162.502.995.731,00	134.578.157.309,00	82,82	27.924.838.422,00	17,18
1.01	1.01.0.00.0.00.01	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	43.274.803.967,00	43.635.046.310,00	100,83	(360.242.343,00)	(0,83)
1.02			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**854.134.339.014,00**	**806.625.272.970,64**	**94,44**	**47.509.066.043,36**	**5,56**
1.02	**1.02.0.00.0.00.01**		**DINAS KESEHATAN**	**210.621.390.503,00**	**198.474.421.818,00**	**94,23**	**12.146.968.685,00**	**5,77**
1.02	1.02.0.00.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	210.621.390.503,00	198.474.421.818,00	94,23	12.146.968.685,00	5,77
1.02	1.02.0.00.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	206.803.917.348,00	195.253.896.634,00	94,41	11.550.020.714,00	5,59
1.02	1.02.0.00.0.00.01	5.1.01	Belanja Pegawai	62.912.828.723,00	57.937.487.672,00	92,09	4.975.341.051,00	7,91
1.02	1.02.0.00.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.575.438.625,00	135.026.208.962,00	95,37	6.549.229.663,00	4,63
1.02	1.02.0.00.0.00.01	5.1.05	Belanja Hibah	2.315.650.000,00	2.290.200.000,00	98,90	25.450.000,00	1,10
1.02	1.02.0.00.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	3.817.473.155,00	3.220.525.184,00	84,36	596.947.971,00	15,64
1.02	1.02.0.00.0.00.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.657.473.155,00	3.220.525.184,00	88,05	436.947.971,00	11,95
1.02	1.02.0.00.0.00.01	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	160.000.000,00	-	-	160.000.000,00	100,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.02**		**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**	**277.385.455.198,00**	**257.606.668.173,00**	**92,87**	**19.778.787.025,00**	**7,13**
1.02	1.02.0.00.0.00.02	5	BELANJA DAERAH	277.385.455.198,00	257.606.668.173,00	92,87	19.778.787.025,00	7,13
1.02	1.02.0.00.0.00.02	5.1	BELANJA OPERASI	243.139.820.482,00	228.140.740.611,00	93,83	14.999.079.871,00	6,17
1.02	1.02.0.00.0.00.02	5.1.01	Belanja Pegawai	90.132.279.340,00	85.669.253.332,00	95,05	4.463.026.008,00	4,95
1.02	1.02.0.00.0.00.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.007.541.142,00	142.471.487.279,00	93,11	10.536.053.863,00	6,89
1.02	1.02.0.00.0.00.02	5.2	BELANJA MODAL	34.245.634.716,00	29.465.927.562,00	86,04	4.779.707.154,00	13,96
1.02	1.02.0.00.0.00.02	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.716.318.390,00	24.308.369.104,00	94,53	1.407.949.286,00	5,47
1.02	1.02.0.00.0.00.02	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.529.316.326,00	5.157.558.458,00	60,47	3.371.757.868,00	39,53
1.02	**1.02.0.00.0.00.03**		**RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN**	**68.862.465.363,00**	**66.415.483.131,00**	**96,45**	**2.446.982.232,00**	**3,55**
1.02	1.02.0.00.0.00.03	5	BELANJA DAERAH	68.862.465.363,00	66.415.483.131,00	96,45	2.446.982.232,00	3,55
1.02	1.02.0.00.0.00.03	5.1	BELANJA OPERASI	65.671.863.363,00	63.449.938.645,00	96,62	2.221.924.718,00	3,38
1.02	1.02.0.00.0.00.03	5.1.01	Belanja Pegawai	37.220.389.828,00	35.331.080.812,00	94,92	1.889.309.016,00	5,08
1.02	1.02.0.00.0.00.03	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.451.473.535,00	28.118.857.833,00	98,83	332.615.702,00	1,17

Kode			Urusan Pemerintahan	Jumlah			Bertambah/Berkurang	
				Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Rp.	%
1			2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.03	5.2	BELANJA MODAL	3.190.602.000,00	2.965.544.486,00	92,95	225.057.514,00	7,05
1.02	1.02.0.00.0.00.03	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.986.234.000,00	1.808.604.879,00	91,06	177.629.121,00	8,94
1.02	1.02.0.00.0.00.03	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	415.000.000,00	387.473.437,00	93,37	27.526.563,00	6,63
1.02	1.02.0.00.0.00.03	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	789.368.000,00	769.466.170,00	97,48	19.901.830,00	2,52
1.02	**1.02.0.00.0.00.04**		**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**	**166.276.262.634,00**	**160.783.940.006,00**	**96,70**	**5.492.322.628,00**	**3,30**
1.02	1.02.0.00.0.00.04	5	BELANJA DAERAH	166.276.262.634,00	160.783.940.006,00	96,70	5.492.322.628,00	3,30
1.02	1.02.0.00.0.00.04	5.1	BELANJA OPERASI	152.213.492.141,00	148.255.654.703,00	97,40	3.957.837.438,00	2,60
1.02	1.02.0.00.0.00.04	5.1.01	Belanja Pegawai	61.389.526.230,00	58.089.911.516,00	94,63	3.299.614.714,00	5,37
1.02	1.02.0.00.0.00.04	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.823.965.911,00	90.165.743.187,00	99,28	658.222.724,00	0,72
1.02	1.02.0.00.0.00.04	5.2	BELANJA MODAL	14.062.770.493,00	12.528.285.303,00	89,09	1.534.485.190,00	10,91
1.02	1.02.0.00.0.00.04	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.435.570.493,00	6.993.981.717,00	94,06	441.588.776,00	5,94
1.02	1.02.0.00.0.00.04	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.627.200.000,00	5.534.303.586,00	83,51	1.092.896.414,00	16,49
1.02	**1.02.0.00.0.00.05**		**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN**	**130.988.765.316,00**	**123.344.759.842,64**	**94,16**	**7.644.005.473,36**	**5,84**
1.02	1.02.0.00.0.00.05	5	BELANJA DAERAH	130.988.765.316,00	123.344.759.842,64	94,16	7.644.005.473,36	5,84
1.02	1.02.0.00.0.00.05	5.1	BELANJA OPERASI	118.379.982.881,00	115.098.628.420,64	97,23	3.281.354.460,36	2,77
1.02	1.02.0.00.0.00.05	5.1.01	Belanja Pegawai	44.745.183.867,00	42.883.280.118,00	95,84	1.861.903.749,00	4,16
1.02	1.02.0.00.0.00.05	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.634.799.014,00	72.215.348.302,64	98,07	1.419.450.711,36	1,93
1.02	1.02.0.00.0.00.05	5.2	BELANJA MODAL	12.608.782.435,00	8.246.131.422,00	65,40	4.362.651.013,00	34,60
1.02	1.02.0.00.0.00.05	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.108.783.146,00	6.010.876.102,00	84,56	1.097.907.044,00	15,44
1.02	1.02.0.00.0.00.05	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.499.999.289,00	2.235.255.320,00	40,64	3.264.743.969,00	59,36
1.03			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**424.868.267.660,00**	**402.719.897.742,46**	**94,79**	**22.148.369.917,54**	**5,21**
1.03	**1.03.0.00.0.00.01**		**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**	**307.749.150.754,00**	**295.764.928.620,46**	**96,11**	**11.984.222.133,54**	**3,89**
1.03	1.03.0.00.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	307.749.150.754,00	295.764.928.620,46	96,11	11.984.222.133,54	3,89
1.03	1.03.0.00.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	99.148.064.412,00	96.010.301.037,00	96,84	3.137.763.375,00	3,16
1.03	1.03.0.00.0.00.01	5.1.01	Belanja Pegawai	37.253.606.497,00	35.763.158.054,00	96,00	1.490.448.443,00	4,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.894.457.915,00	60.247.142.983,00	97,34	1.647.314.932,00	2,66
1.03	1.03.0.00.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	208.601.086.342,00	199.754.627.583,46	95,76	8.846.458.758,54	4,24
1.03	1.03.0.00.0.00.01	5.2.01	Belanja Modal Tanah	758.222.220,00	758.054.000,00	99,98	168.220,00	0,02
1.03	1.03.0.00.0.00.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.461.522.462,00	3.288.532.376,00	95,00	172.990.086,00	5,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.645.876.460,00	22.165.802.103,00	89,94	2.480.074.357,00	10,06
1.03	1.03.0.00.0.00.01	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	179.717.741.278,00	173.524.539.932,46	96,55	6.193.201.345,54	3,45
1.03	1.03.0.00.0.00.01	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.623.922,00	9.623.922,00	100,00	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	8.100.000,00	8.075.250,00	99,69	24.750,00	0,31
1.03	**1.03.0.00.0.00.02**		**DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI**	**117.119.116.906,00**	**106.954.969.122,00**	**91,32**	**10.164.147.784,00**	**8,68**
1.03	1.03.0.00.0.00.02	5	BELANJA DAERAH	117.119.116.906,00	106.954.969.122,00	91,32	10.164.147.784,00	8,68
1.03	1.03.0.00.0.00.02	5.1	BELANJA OPERASI	56.260.327.524,00	53.420.026.155,00	94,95	2.840.301.369,00	5,05
1.03	1.03.0.00.0.00.02	5.1.01	Belanja Pegawai	16.445.157.784,00	15.290.566.655,00	92,98	1.154.591.129,00	7,02
1.03	1.03.0.00.0.00.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.815.169.740,00	38.129.459.500,00	95,77	1.685.710.240,00	4,23
1.03	1.03.0.00.0.00.02	5.2	BELANJA MODAL	60.858.789.382,00	53.534.942.967,00	87,97	7.323.846.415,00	12,03
1.03	1.03.0.00.0.00.02	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	386.386.113,00	369.375.495,00	95,60	17.010.618,00	4,40
1.03	1.03.0.00.0.00.02	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	289.697.733,00	289.614.430,00	99,97	83.303,00	0,03
1.03	1.03.0.00.0.00.02	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.182.705.536,00	52.875.953.042,00	87,86	7.306.752.494,00	12,14
1.03	1.03.0.00.0.00.02	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
1.04			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**120.743.584.330,00**	**118.529.751.530,00**	**98,17**	**2.213.832.800,00**	**1,83**
1.04	**1.04.2.10.0.00.01**		**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**	**120.743.584.330,00**	**118.529.751.530,00**	**98,17**	**2.213.832.800,00**	**1,83**
1.04	1.04.2.10.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	120.743.584.330,00	118.529.751.530,00	98,17	2.213.832.800,00	1,83
1.04	1.04.2.10.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	26.208.631.529,00	25.195.529.030,00	96,13	1.013.102.499,00	3,87
1.04	1.04.2.10.0.00.01	5.1.01	Belanja Pegawai	7.646.300.003,00	7.242.121.666,00	94,71	404.178.337,00	5,29
1.04	1.04.2.10.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.562.331.526,00	17.953.407.364,00	96,72	608.924.162,00	3,28

Kode			Urusan Pemerintahan	Jumlah			Bertambah/Berkurang	
				Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Rp.	%
1			2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.2.10.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	94.534.952.801,00	93.334.222.500,00	98,73	1.200.730.301,00	1,27
1.04	1.04.2.10.0.00.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.165.485,00	65.856.000,00	85,34	11.309.485,00	14,66
1.04	1.04.2.10.0.00.01	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.833.991.600,00	2.818.770.800,00	99,46	15.220.800,00	0,54
1.04	1.04.2.10.0.00.01	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	91.623.795.716,00	90.449.595.700,00	98,72	1.174.200.016,00	1,28
1.05			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**30.778.434.664,00**	**29.591.566.473,00**	**96,14**	**1.186.868.191,00**	**3,86**
1.05	**1.05.0.00.0.00.01**		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	**18.035.928.123,00**	**17.403.548.972,00**	**96,49**	**632.379.151,00**	**3,51**
1.05	1.05.0.00.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	18.035.928.123,00	17.403.548.972,00	96,49	632.379.151,00	3,51
1.05	1.05.0.00.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	17.911.474.743,00	17.284.898.972,00	96,50	626.575.771,00	3,50
1.05	1.05.0.00.0.00.01	5.1.01	Belanja Pegawai	10.129.300.000,00	9.611.591.275,00	94,89	517.708.725,00	5,11
1.05	1.05.0.00.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.782.174.743,00	7.673.307.697,00	98,60	108.867.046,00	1,40
1.05	1.05.0.00.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	124.453.380,00	118.650.000,00	95,34	5.803.380,00	4,66
1.05	1.05.0.00.0.00.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.453.380,00	118.650.000,00	95,34	5.803.380,00	4,66
1.05	**1.05.0.00.0.00.02**		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	**12.742.506.541,00**	**12.188.017.501,00**	**95,65**	**554.489.040,00**	**4,35**
1.05	1.05.0.00.0.00.02	5	BELANJA DAERAH	12.742.506.541,00	12.188.017.501,00	95,65	554.489.040,00	4,35
1.05	1.05.0.00.0.00.02	5.1	BELANJA OPERASI	11.769.532.464,00	11.220.897.101,00	95,34	548.635.363,00	4,66
1.05	1.05.0.00.0.00.02	5.1.01	Belanja Pegawai	6.128.499.608,00	5.749.528.755,00	93,82	378.970.853,00	6,18
1.05	1.05.0.00.0.00.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.641.032.856,00	5.471.368.346,00	96,99	169.664.510,00	3,01
1.05	1.05.0.00.0.00.02	5.2	BELANJA MODAL	972.974.077,00	967.120.400,00	99,40	5.853.677,00	0,60
1.05	1.05.0.00.0.00.02	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	772.974.077,00	768.125.400,00	99,37	4.848.677,00	0,63
1.05	1.05.0.00.0.00.02	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	198.995.000,00	99,50	1.005.000,00	0,50
1.06			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**114.247.707.631,00**	**109.885.949.925,00**	**96,18**	**4.361.757.706,00**	**3,82**
1.06	**1.06.0.00.0.00.01**		**DINAS SOSIAL**	**114.247.707.631,00**	**109.885.949.925,00**	**96,18**	**4.361.757.706,00**	**3,82**
1.06	1.06.0.00.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	114.247.707.631,00	109.885.949.925,00	96,18	4.361.757.706,00	3,82
1.06	1.06.0.00.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	108.311.836.642,00	104.113.036.060,00	96,12	4.198.800.582,00	3,88
1.06	1.06.0.00.0.00.01	5.1.01	Belanja Pegawai	22.422.232.641,00	21.206.093.148,00	94,58	1.216.139.493,00	5,42
1.06	1.06.0.00.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.317.298.551,00	42.410.079.462,00	95,70	1.907.219.089,00	4,30
1.06	1.06.0.00.0.00.01	5.1.05	Belanja Hibah	41.572.305.450,00	40.496.863.450,00	97,41	1.075.442.000,00	2,59
1.06	1.06.0.00.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	5.935.870.989,00	5.772.913.865,00	97,25	162.957.124,00	2,75
1.06	1.06.0.00.0.00.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	850.477.700,00	836.825.164,00	98,39	13.652.536,00	1,61
1.06	1.06.0.00.0.00.01	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.085.393.289,00	4.936.088.701,00	97,06	149.304.588,00	2,94
1.06	1.06.0.00.0.00.01	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	-	-
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**348.943.396.056,03**	**322.630.266.505,62**	**92,46**	**26.313.129.550,41**	**7,54**
2.07			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**32.261.458.177,00**	**30.480.250.645,00**	**94,48**	**1.781.207.532,00**	**5,52**
2.07	**2.07.3.32.0.00.01**		**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**	**32.261.458.177,00**	**30.480.250.645,00**	**94,48**	**1.781.207.532,00**	**5,52**
2.07	2.07.3.32.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	32.261.458.177,00	30.480.250.645,00	94,48	1.781.207.532,00	5,52
2.07	2.07.3.32.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	32.143.454.377,00	30.365.982.945,00	94,47	1.777.471.432,00	5,53
2.07	2.07.3.32.0.00.01	5.1.01	Belanja Pegawai	23.888.602.090,00	22.333.117.621,00	93,49	1.555.484.469,00	6,51
2.07	2.07.3.32.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.254.852.287,00	8.032.865.324,00	97,31	221.986.963,00	2,69
2.07	2.07.3.32.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	118.003.800,00	114.267.700,00	96,83	3.736.100,00	3,17
2.07	2.07.3.32.0.00.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.003.800,00	114.267.700,00	96,83	3.736.100,00	3,17
2.08			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**18.651.553.423,00**	**17.092.222.349,00**	**91,64**	**1.559.331.074,00**	**8,36**
2.08	**2.08.2.14.0.00.01**		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**18.651.553.423,00**	**17.092.222.349,00**	**91,64**	**1.559.331.074,00**	**8,36**
2.08	2.08.2.14.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	18.651.553.423,00	17.092.222.349,00	91,64	1.559.331.074,00	8,36
2.08	2.08.2.14.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	17.948.618.203,00	16.651.266.349,00	92,77	1.297.351.854,00	7,23
2.08	2.08.2.14.0.00.01	5.1.01	Belanja Pegawai	7.651.844.196,00	7.257.611.187,00	94,85	394.233.009,00	5,15
2.08	2.08.2.14.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.296.774.007,00	9.393.655.162,00	91,23	903.118.845,00	8,77
2.08	2.08.2.14.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	702.935.220,00	440.956.000,00	62,73	261.979.220,00	37,27

Kode			Urusan Pemerintahan	Jumlah			Bertambah/Berkurang	
				Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Rp.	%
1			2	3	4	5	6	7
2.08	2.08.2.14.0.00.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	503.935.220,00	440.956.000,00	87,50	62.979.220,00	12,50
2.08	2.08.2.14.0.00.01	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.000.000,00	-	-	199.000.000,00	100,00
2.09			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**29.693.853.615,00**	**26.862.458.559,00**	**90,46**	**2.831.395.056,00**	**9,54**
2.09	**2.09.0.00.0.00.01**		**DINAS PANGAN**	**29.693.853.615,00**	**26.862.458.559,00**	**90,46**	**2.831.395.056,00**	**9,54**
2.09	2.09.0.00.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	29.693.853.615,00	26.862.458.559,00	90,46	2.831.395.056,00	9,54
2.09	2.09.0.00.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	29.473.054.815,00	26.808.748.559,00	90,96	2.664.306.256,00	9,04
2.09	2.09.0.00.0.00.01	5.1.01	Belanja Pegawai	13.931.844.912,00	12.468.027.919,00	89,49	1.463.816.993,00	10,51
2.09	2.09.0.00.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.941.501.903,00	11.741.012.640,00	90,72	1.200.489.263,00	9,28
2.09	2.09.0.00.0.00.01	5.1.05	Belanja Hibah	2.599.708.000,00	2.599.708.000,00	100,00	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	220.798.800,00	53.710.000,00	24,33	167.088.800,00	75,67
2.09	2.09.0.00.0.00.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.152.800,00	53.710.000,00	97,38	1.442.800,00	2,62
2.09	2.09.0.00.0.00.01	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	165.646.000,00	-	-	165.646.000,00	100,00
2.10			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**210.088.300,00**	**190.033.430,00**	**90,45**	**20.054.870,00**	**9,55**
2.10	**1.04.2.10.0.00.01**		**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**	**210.088.300,00**	**190.033.430,00**	**90,45**	**20.054.870,00**	**9,55**
2.10	1.04.2.10.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	210.088.300,00	190.033.430,00	90,45	20.054.870,00	9,55
2.10	1.04.2.10.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	206.818.900,00	186.909.930,00	90,37	19.908.970,00	9,63
2.10	1.04.2.10.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.818.900,00	186.909.930,00	90,37	19.908.970,00	9,63
2.10	1.04.2.10.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	3.269.400,00	3.123.500,00	95,54	145.900,00	4,46
2.10	1.04.2.10.0.00.01	5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.269.400,00	3.123.500,00	95,54	145.900,00	4,46
2.11			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**29.356.409.054,00**	**24.950.908.893,00**	**84,99**	**4.405.500.161,00**	**15,01**
2.11	**2.11.0.00.0.00.01**		**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	**29.356.409.054,00**	**24.950.908.893,00**	**84,99**	**4.405.500.161,00**	**15,01**
2.11	2.11.0.00.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	29.356.409.054,00	24.950.908.893,00	84,99	4.405.500.161,00	15,01
2.11	2.11.0.00.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	26.578.250.038,00	22.499.759.684,00	84,65	4.078.490.354,00	15,35
2.11	2.11.0.00.0.00.01	5.1.01	Belanja Pegawai	11.400.325.741,00	10.086.916.475,00	88,48	1.313.409.266,00	11,52
2.11	2.11.0.00.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.177.924.297,00	12.412.843.209,00	81,78	2.765.081.088,00	18,22
2.11	2.11.0.00.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	2.778.159.016,00	2.451.149.209,00	88,23	327.009.807,00	11,77
2.11	2.11.0.00.0.00.01	5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.716.626.000,00	1.703.196.169,00	99,22	13.429.831,00	0,78
2.11	2.11.0.00.0.00.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	804.101.016,00	735.521.040,00	91,47	68.579.976,00	8,53
2.11	2.11.0.00.0.00.01	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	257.432.000,00	12.432.000,00	4,83	245.000.000,00	95,17
2.11	2.11.0.00.0.00.01	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	-	-
2.12			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**7.989.772.424,00**	**7.622.706.393,82**	**95,41**	**367.066.030,18**	**4,59**
2.12	**2.12.0.00.0.00.01**		**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**7.989.772.424,00**	**7.622.706.393,82**	**95,41**	**367.066.030,18**	**4,59**
2.12	2.12.0.00.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	7.989.772.424,00	7.622.706.393,82	95,41	367.066.030,18	4,59
2.12	2.12.0.00.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	7.955.627.714,00	7.603.310.143,82	95,57	352.317.570,18	4,43
2.12	2.12.0.00.0.00.01	5.1.01	Belanja Pegawai	4.668.585.476,00	4.398.082.465,00	94,21	270.503.011,00	5,79
2.12	2.12.0.00.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.287.042.238,00	3.205.227.678,82	97,51	81.814.559,18	2,49
2.12	2.12.0.00.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	34.144.710,00	19.396.250,00	56,81	14.748.460,00	43,19
2.12	2.12.0.00.0.00.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.144.710,00	19.396.250,00	56,81	14.748.460,00	43,19
2.13			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**15.816.796.593,00**	**14.663.702.517,00**	**92,71**	**1.153.094.076,00**	**7,29**
2.13	**2.13.0.00.0.00.01**		**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**15.816.796.593,00**	**14.663.702.517,00**	**92,71**	**1.153.094.076,00**	**7,29**
2.13	2.13.0.00.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	15.816.796.593,00	14.663.702.517,00	92,71	1.153.094.076,00	7,29
2.13	2.13.0.00.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	15.808.358.593,00	14.655.267.517,00	92,71	1.153.091.076,00	7,29
2.13	2.13.0.00.0.00.01	5.1.01	Belanja Pegawai	7.484.057.740,00	6.561.476.273,00	87,67	922.581.467,00	12,33
2.13	2.13.0.00.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.324.300.853,00	8.093.791.244,00	97,23	230.509.609,00	2,77
2.13	2.13.0.00.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	8.438.000,00	8.435.000,00	99,96	3.000,00	0,04
2.13	2.13.0.00.0.00.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.438.000,00	8.435.000,00	99,96	3.000,00	0,04
2.14			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**1.673.814.100,00**	**1.589.586.107,00**	**94,97**	**84.227.993,00**	**5,03**

Kode			Urusan Pemerintahan	Jumlah			Bertambah/Berkurang	
				Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Rp.	%
1			2	3	4	5	6	7
2.14	**2.08.2.14.0.00.01**		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**1.673.814.100,00**	**1.589.586.107,00**	**94,97**	**84.227.993,00**	**5,03**
2.14	2.08.2.14.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	1.673.814.100,00	1.589.586.107,00	94,97	84.227.993,00	5,03
2.14	2.08.2.14.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	1.673.814.100,00	1.589.586.107,00	94,97	84.227.993,00	5,03
2.14	2.08.2.14.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.673.814.100,00	1.589.586.107,00	94,97	84.227.993,00	5,03
2.15			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**18.491.134.178,00**	**17.620.959.094,80**	**95,29**	**870.175.083,20**	**4,71**
2.15	**2.15.0.00.0.00.01**		**DINAS PERHUBUNGAN**	**18.491.134.178,00**	**17.620.959.094,80**	**95,29**	**870.175.083,20**	**4,71**
2.15	2.15.0.00.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	18.491.134.178,00	17.620.959.094,80	95,29	870.175.083,20	4,71
2.15	2.15.0.00.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	18.471.824.078,00	17.601.941.094,80	95,29	869.882.983,20	4,71
2.15	2.15.0.00.0.00.01	5.1.01	Belanja Pegawai	10.346.498.513,00	9.653.311.322,00	93,30	693.187.191,00	6,70
2.15	2.15.0.00.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.125.325.565,00	7.948.629.772,80	97,83	176.695.792,20	2,17
2.15	2.15.0.00.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	19.310.100,00	19.018.000,00	98,49	292.100,00	1,51
2.15	2.15.0.00.0.00.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.310.100,00	19.018.000,00	98,49	292.100,00	1,51
2.16			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**35.806.771.614,00**	**30.644.423.846,00**	**85,58**	**5.162.347.768,00**	**14,42**
2.16	**2.16.2.20.2.21.01**		**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**	**35.806.771.614,00**	**30.644.423.846,00**	**85,58**	**5.162.347.768,00**	**14,42**
2.16	2.16.2.20.2.21.01	5	BELANJA DAERAH	35.806.771.614,00	30.644.423.846,00	85,58	5.162.347.768,00	14,42
2.16	2.16.2.20.2.21.01	5.1	BELANJA OPERASI	32.952.730.420,00	29.606.964.650,00	89,85	3.345.765.770,00	10,15
2.16	2.16.2.20.2.21.01	5.1.01	Belanja Pegawai	9.612.381.550,00	8.193.717.021,00	85,24	1.418.664.529,00	14,76
2.16	2.16.2.20.2.21.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.340.348.870,00	17.433.142.998,00	90,14	1.907.205.872,00	9,86
2.16	2.16.2.20.2.21.01	5.1.05	Belanja Hibah	4.000.000.000,00	3.980.104.631,00	99,50	19.895.369,00	0,50
2.16	2.16.2.20.2.21.01	5.2	BELANJA MODAL	2.854.041.194,00	1.037.459.196,00	36,35	1.816.581.998,00	63,65
2.16	2.16.2.20.2.21.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.705.027.194,00	1.037.459.196,00	38,35	1.667.567.998,00	61,65
2.16	2.16.2.20.2.21.01	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	149.014.000,00	-	-	149.014.000,00	100,00
2.17			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**26.384.158.087,00**	**24.520.601.631,00**	**92,94**	**1.863.556.456,00**	**7,06**
2.17	**2.17.0.00.0.00.01**		**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**	**26.384.158.087,00**	**24.520.601.631,00**	**92,94**	**1.863.556.456,00**	**7,06**
2.17	2.17.0.00.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	26.384.158.087,00	24.520.601.631,00	92,94	1.863.556.456,00	7,06
2.17	2.17.0.00.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	26.057.582.669,00	24.206.178.631,00	92,89	1.851.404.038,00	7,11
2.17	2.17.0.00.0.00.01	5.1.01	Belanja Pegawai	8.984.456.759,00	8.373.243.198,00	93,20	611.213.561,00	6,80
2.17	2.17.0.00.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.993.043.575,00	13.765.820.933,00	91,81	1.227.222.642,00	8,19
2.17	2.17.0.00.0.00.01	5.1.04	Belanja Subsidi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	-	-
2.17	2.17.0.00.0.00.01	5.1.05	Belanja Hibah	580.082.335,00	567.114.500,00	97,76	12.967.835,00	2,24
2.17	2.17.0.00.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	326.575.418,00	314.423.000,00	96,28	12.152.418,00	3,72
2.17	2.17.0.00.0.00.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	326.575.418,00	314.423.000,00	96,28	12.152.418,00	3,72
2.18			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**15.500.647.054,00**	**13.860.693.479,00**	**89,42**	**1.639.953.575,00**	**10,58**
2.18	**2.18.0.00.0.00.01**		**DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	**15.500.647.054,00**	**13.860.693.479,00**	**89,42**	**1.639.953.575,00**	**10,58**
2.18	2.18.0.00.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	15.500.647.054,00	13.860.693.479,00	89,42	1.639.953.575,00	10,58
2.18	2.18.0.00.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	15.387.400.764,00	13.749.598.499,00	89,36	1.637.802.265,00	10,64
2.18	2.18.0.00.0.00.01	5.1.01	Belanja Pegawai	8.989.302.641,00	7.549.701.786,00	83,99	1.439.600.855,00	16,01
2.18	2.18.0.00.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.398.098.123,00	6.199.896.713,00	96,90	198.201.410,00	3,10
2.18	2.18.0.00.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	113.246.290,00	111.094.980,00	98,10	2.151.310,00	1,90
2.18	2.18.0.00.0.00.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.246.290,00	111.094.980,00	98,10	2.151.310,00	1,90
2.19			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**67.171.612.076,00**	**65.256.437.377,00**	**97,15**	**1.915.174.699,00**	**2,85**
2.19	**2.19.0.00.0.00.01**		**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**	**67.171.612.076,00**	**65.256.437.377,00**	**97,15**	**1.915.174.699,00**	**2,85**
2.19	2.19.0.00.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	67.171.612.076,00	65.256.437.377,00	97,15	1.915.174.699,00	2,85
2.19	2.19.0.00.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	67.136.180.076,00	65.221.005.377,00	97,15	1.915.174.699,00	2,85
2.19	2.19.0.00.0.00.01	5.1.01	Belanja Pegawai	10.479.192.314,00	9.751.632.314,00	93,06	727.560.000,00	6,94
2.19	2.19.0.00.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.451.987.762,00	18.311.208.063,00	94,14	1.140.779.699,00	5,86
2.19	2.19.0.00.0.00.01	5.1.05	Belanja Hibah	37.205.000.000,00	37.158.165.000,00	99,87	46.835.000,00	0,13
2.19	2.19.0.00.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	35.432.000,00	35.432.000,00	100,00	-	-
2.19	2.19.0.00.0.00.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.432.000,00	35.432.000,00	100,00	-	-
2.20			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**373.198.700,00**	**321.675.355,00**	**86,19**	**51.523.345,00**	**13,81**

Kode			Urusan Pemerintahan	Jumlah			Bertambah/Berkurang	
				Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Rp.	%
1			2	3	4	5	6	7
2.20	**2.16.2.20.2.21.01**		**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**	**373.198.700,00**	**321.675.355,00**	**86,19**	**51.523.345,00**	**13,81**
2.20	2.16.2.20.2.21.01	5	BELANJA DAERAH	373.198.700,00	321.675.355,00	86,19	51.523.345,00	13,81
2.20	2.16.2.20.2.21.01	5.1	BELANJA OPERASI	373.198.700,00	321.675.355,00	86,19	51.523.345,00	13,81
2.20	2.16.2.20.2.21.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	373.198.700,00	321.675.355,00	86,19	51.523.345,00	13,81
2.21			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**329.788.694,00**	**295.562.610,00**	**89,62**	**34.226.084,00**	**10,38**
2.21	**2.16.2.20.2.21.01**		**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**	**329.788.694,00**	**295.562.610,00**	**89,62**	**34.226.084,00**	**10,38**
2.21	2.16.2.20.2.21.01	5	BELANJA DAERAH	329.788.694,00	295.562.610,00	89,62	34.226.084,00	10,38
2.21	2.16.2.20.2.21.01	5.1	BELANJA OPERASI	329.788.694,00	295.562.610,00	89,62	34.226.084,00	10,38
2.21	2.16.2.20.2.21.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	329.788.694,00	295.562.610,00	89,62	34.226.084,00	10,38
2.22			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**33.931.381.189,03**	**32.028.260.450,00**	**94,39**	**1.903.120.739,03**	**5,61**
2.22	**2.22.0.00.0.00.01**		**DINAS KEBUDAYAAN**	**33.931.381.189,03**	**32.028.260.450,00**	**94,39**	**1.903.120.739,03**	**5,61**
2.22	2.22.0.00.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	33.931.381.189,03	32.028.260.450,00	94,39	1.903.120.739,03	5,61
2.22	2.22.0.00.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	33.832.039.989,03	31.929.245.450,00	94,38	1.902.794.539,03	5,62
2.22	2.22.0.00.0.00.01	5.1.01	Belanja Pegawai	9.591.176.194,00	8.959.084.009,00	93,41	632.092.185,00	6,59
2.22	2.22.0.00.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.240.863.795,03	22.970.161.441,00	94,76	1.270.702.354,03	5,24
2.22	2.22.0.00.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	99.341.200,00	99.015.000,00	99,67	326.200,00	0,33
2.22	2.22.0.00.0.00.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.341.200,00	15.015.000,00	97,87	326.200,00	2,13
2.22	2.22.0.00.0.00.01	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
2.22	2.22.0.00.0.00.01	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	84.000.000,00	84.000.000,00	100,00	-	-
2.23			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**790.666.150,00**	**778.752.929,00**	**98,49**	**11.913.221,00**	**1,51**
2.23	**2.23.2.24.0.00.01**		**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**	**790.666.150,00**	**778.752.929,00**	**98,49**	**11.913.221,00**	**1,51**
2.23	2.23.2.24.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	790.666.150,00	778.752.929,00	98,49	11.913.221,00	1,51
2.23	2.23.2.24.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	685.409.550,00	673.710.429,00	98,29	11.699.121,00	1,71
2.23	2.23.2.24.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	685.409.550,00	673.710.429,00	98,29	11.699.121,00	1,71
2.23	2.23.2.24.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	105.256.600,00	105.042.500,00	99,80	214.100,00	0,20
2.23	2.23.2.24.0.00.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.756.600,00	23.550.000,00	99,13	206.600,00	0,87
2.23	2.23.2.24.0.00.01	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	81.500.000,00	81.492.500,00	99,99	7.500,00	0,01
2.24			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**14.510.292.628,00**	**13.851.030.840,00**	**95,46**	**659.261.788,00**	**4,54**
2.24	**2.23.2.24.0.00.01**		**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**	**14.510.292.628,00**	**13.851.030.840,00**	**95,46**	**659.261.788,00**	**4,54**
2.24	2.23.2.24.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	14.510.292.628,00	13.851.030.840,00	95,46	659.261.788,00	4,54
2.24	2.23.2.24.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	14.492.462.628,00	13.833.930.840,00	95,46	658.531.788,00	4,54
2.24	2.23.2.24.0.00.01	5.1.01	Belanja Pegawai	10.827.931.085,00	10.251.973.528,00	94,68	575.957.557,00	5,32
2.24	2.23.2.24.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.664.531.543,00	3.581.957.312,00	97,75	82.574.231,00	2,25
2.24	2.23.2.24.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	17.830.000,00	17.100.000,00	95,91	730.000,00	4,09
2.24	2.23.2.24.0.00.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.830.000,00	17.100.000,00	95,91	730.000,00	4,09
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**451.402.563.733,00**	**409.824.458.838,17**	**90,79**	**41.578.104.894,83**	**9,21**
3.25			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**61.778.807.611,00**	**57.312.148.217,17**	**92,77**	**4.466.659.393,83**	**7,23**
3.25	**3.25.0.00.0.00.01**		**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**61.778.807.611,00**	**57.312.148.217,17**	**92,77**	**4.466.659.393,83**	**7,23**
3.25	3.25.0.00.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	61.778.807.611,00	57.312.148.217,17	92,77	4.466.659.393,83	7,23
3.25	3.25.0.00.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	55.139.222.346,00	52.292.546.483,33	94,84	2.846.675.862,67	5,16
3.25	3.25.0.00.0.00.01	5.1.01	Belanja Pegawai	20.839.916.701,00	19.268.157.713,00	92,46	1.571.758.988,00	7,54
3.25	3.25.0.00.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.299.305.645,00	33.024.388.770,33	96,28	1.274.916.874,67	3,72
3.25	3.25.0.00.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	6.639.585.265,00	5.019.601.733,84	75,60	1.619.983.531,16	24,40
3.25	3.25.0.00.0.00.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	664.212.900,00	603.943.800,00	90,93	60.269.100,00	9,07
3.25	3.25.0.00.0.00.01	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.975.372.365,00	4.415.657.933,84	73,90	1.559.714.431,16	26,10
3.25	3.25.0.00.0.00.01	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-
3.26			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**30.332.502.671,00**	**27.681.468.600,00**	**91,26**	**2.651.034.071,00**	**8,74**
3.26	**3.26.0.00.0.00.01**		**DINAS PARIWISATA**	**30.332.502.671,00**	**27.681.468.600,00**	**91,26**	**2.651.034.071,00**	**8,74**
3.26	3.26.0.00.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	30.332.502.671,00	27.681.468.600,00	91,26	2.651.034.071,00	8,74
3.26	3.26.0.00.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	29.802.102.671,00	27.305.596.163,00	91,62	2.496.506.508,00	8,38
3.26	3.26.0.00.0.00.01	5.1.01	Belanja Pegawai	8.275.934.233,00	7.473.307.200,00	90,30	802.627.033,00	9,70

Kode			Urusan Pemerintahan	Jumlah			Bertambah/Berkurang	
				Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Rp.	%
1			2	3	4	5	6	7
3.26	3.26.0.00.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.526.168.438,00	19.832.288.963,00	92,13	1.693.879.475,00	7,87
3.26	3.26.0.00.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	530.400.000,00	375.872.437,00	70,87	154.527.563,00	29,13
3.26	3.26.0.00.0.00.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.400.000,00	30.397.000,00	99,99	3.000,00	0,01
3.26	3.26.0.00.0.00.01	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	500.000.000,00	345.475.437,00	69,10	154.524.563,00	30,90
3.27			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**225.960.140.081,00**	**200.275.841.593,00**	**88,63**	**25.684.298.488,00**	**11,37**
3.27	**3.27.0.00.0.00.01**		**DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA**	**153.477.506.236,00**	**130.606.775.975,00**	**85,10**	**22.870.730.261,00**	**14,90**
3.27	3.27.0.00.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	153.477.506.236,00	130.606.775.975,00	85,10	22.870.730.261,00	14,90
3.27	3.27.0.00.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	152.991.008.986,00	130.127.311.336,00	85,06	22.863.697.650,00	14,94
3.27	3.27.0.00.0.00.01	5.1.01	Belanja Pegawai	43.256.625.192,00	40.692.441.728,00	94,07	2.564.183.464,00	5,93
3.27	3.27.0.00.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.603.936.294,00	89.304.422.108,00	81,48	20.299.514.186,00	18,52
3.27	3.27.0.00.0.00.01	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	130.447.500,00	130.447.500,00	100,00	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	486.497.250,00	479.464.639,00	98,55	7.032.611,00	1,45
3.27	3.27.0.00.0.00.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.162.450,00	75.338.539,00	93,98	4.823.911,00	6,02
3.27	3.27.0.00.0.00.01	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	406.334.800,00	404.126.100,00	99,46	2.208.700,00	0,54
3.27	**3.27.0.00.0.00.02**		**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**	**72.482.633.845,00**	**69.669.065.618,00**	**96,12**	**2.813.568.227,00**	**3,88**
3.27	3.27.0.00.0.00.02	5	BELANJA DAERAH	72.482.633.845,00	69.669.065.618,00	96,12	2.813.568.227,00	3,88
3.27	3.27.0.00.0.00.02	5.1	BELANJA OPERASI	70.651.823.069,00	68.064.804.212,00	96,34	2.587.018.857,00	3,66
3.27	3.27.0.00.0.00.02	5.1.01	Belanja Pegawai	19.446.651.547,00	18.173.373.116,00	93,45	1.273.278.431,00	6,55
3.27	3.27.0.00.0.00.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.205.171.522,00	49.891.431.096,00	97,43	1.313.740.426,00	2,57
3.27	3.27.0.00.0.00.02	5.2	BELANJA MODAL	1.830.810.776,00	1.604.261.406,00	87,63	226.549.370,00	12,37
3.27	3.27.0.00.0.00.02	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.466.505.776,00	1.316.671.406,00	89,78	149.834.370,00	10,22
3.27	3.27.0.00.0.00.02	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	204.805.000,00	140.290.000,00	68,50	64.515.000,00	31,50
3.27	3.27.0.00.0.00.02	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	159.500.000,00	147.300.000,00	92,35	12.200.000,00	7,65
3.28			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**	**83.954.945.268,00**	**78.360.143.256,00**	**93,34**	**5.594.802.012,00**	**6,66**
3.28	**3.28.0.00.0.00.01**		**DINAS KEHUTANAN**	**83.954.945.268,00**	**78.360.143.256,00**	**93,34**	**5.594.802.012,00**	**6,66**
3.28	3.28.0.00.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	83.954.945.268,00	78.360.143.256,00	93,34	5.594.802.012,00	6,66
3.28	3.28.0.00.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	83.645.300.568,00	78.105.643.256,00	93,38	5.539.657.312,00	6,62
3.28	3.28.0.00.0.00.01	5.1.01	Belanja Pegawai	47.644.013.994,00	45.212.064.579,00	94,90	2.431.949.415,00	5,10
3.28	3.28.0.00.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.001.286.574,00	32.893.578.677,00	91,37	3.107.707.897,00	8,63
3.28	3.28.0.00.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	309.644.700,00	254.500.000,00	82,19	55.144.700,00	17,81
3.28	3.28.0.00.0.00.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	309.644.700,00	254.500.000,00	82,19	55.144.700,00	17,81
3.28	3.28.0.00.0.00.01	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
3.29			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**16.831.331.645,00**	**15.867.717.182,00**	**94,27**	**963.614.463,00**	**5,73**
3.29	**3.29.0.00.0.00.01**		**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**16.831.331.645,00**	**15.867.717.182,00**	**94,27**	**963.614.463,00**	**5,73**
3.29	3.29.0.00.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	16.831.331.645,00	15.867.717.182,00	94,27	963.614.463,00	5,73
3.29	3.29.0.00.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	16.624.726.715,00	15.667.297.982,00	94,24	957.428.733,00	5,76
3.29	3.29.0.00.0.00.01	5.1.01	Belanja Pegawai	8.617.952.194,00	8.165.451.452,00	94,75	452.500.742,00	5,25
3.29	3.29.0.00.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.006.774.521,00	7.501.846.530,00	93,69	504.927.991,00	6,31
3.29	3.29.0.00.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	206.604.930,00	200.419.200,00	97,01	6.185.730,00	2,99
3.29	3.29.0.00.0.00.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	176.604.930,00	170.435.200,00	96,51	6.169.730,00	3,49
3.29	3.29.0.00.0.00.01	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	29.984.000,00	99,95	16.000,00	0,05
3.30			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**24.502.437.607,00**	**22.813.877.080,00**	**93,11**	**(1.688.560.527,00)**	**(6,89)**
3.30	**3.30.3.31.0.00.01**		**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	**24.502.437.607,00**	**22.813.877.080,00**	**93,11**	**(1.688.560.527,00)**	**(6,89)**
3.30	3.30.3.31.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	24.502.437.607,00	22.813.877.080,00	93,11	(1.688.560.527,00)	(6,89)
3.30	3.30.3.31.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	24.059.751.675,00	22.421.831.970,00	93,19	(1.637.919.705,00)	(6,81)
3.30	3.30.3.31.0.00.01	5.1.01	Belanja Pegawai	13.596.113.042,00	12.887.632.170,00	94,79	(708.480.872,00)	(5,21)
3.30	3.30.3.31.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.113.638.633,00	8.221.239.714,00	90,21	(892.398.919,00)	(9,79)
3.30	3.30.3.31.0.00.01	5.1.05	Belanja Hibah	1.350.000.000,00	1.312.960.086,00	97,26	(37.039.914,00)	(2,74)
3.30	3.30.3.31.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	442.685.932,00	392.045.110,00	88,56	(50.640.822,00)	(11,44)
3.30	3.30.3.31.0.00.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	442.685.932,00	392.045.110,00	88,56	(50.640.822,00)	(11,44)
3.31			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**7.975.398.850,00**	**7.446.670.190,00**	**93,37**	**(528.728.660,00)**	**(6,63)**

Kode			Urusan Pemerintahan	Jumlah			Bertambah/Berkurang	
				Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Rp.	%
1			2	3	4	5	6	7
3.31	**3.31.3.31.0.00.01**		**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	**7.975.398.850,00**	**7.446.670.190,00**	**93,37**	**(528.728.660,00)**	**(6,63)**
3.31	**3.31.3.31.0.00.01**	**5**	**BELANJA DAERAH**	**7.975.398.850,00**	**7.446.670.190,00**	**93,37**	**(528.728.660,00)**	**(6,63)**
3.31	**3.31.3.31.0.00.01**	**5.1**	**BELANJA OPERASI**	**7.974.398.850,00**	**7.445.670.190,00**	**93,37**	**(528.728.660,00)**	**(6,63)**
3.31	**3.31.3.31.0.00.01**	**5.1.02**	**Belanja Barang dan Jasa**	**7.974.398.850,00**	**7.445.670.190,00**	**93,37**	**(528.728.660,00)**	**(6,63)**
3.31	**3.31.3.31.0.00.01**	**5.2**	**BELANJA MODAL**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**	**-**	**-**
3.31	**3.31.3.31.0.00.01**	**5.2.03**	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**	**-**	**-**
3.32			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**	**67.000.000,00**	**66.592.720,00**	**99,39**	**407.280,00**	**0,61**
3.32	**2.07.3.32.0.00.01**		**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**	**67.000.000,00**	**66.592.720,00**	**99,39**	**407.280,00**	**0,61**
3.32	2.07.3.32.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	67.000.000,00	66.592.720,00	99,39	407.280,00	0,61
3.32	2.07.3.32.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	67.000.000,00	66.592.720,00	99,39	407.280,00	0,61
3.32	2.07.3.32.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.000.000,00	66.592.720,00	99,39	407.280,00	0,61
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSANPEMERINTAHAN**	**450.909.247.286,00**	**405.471.910.218,16**	**89,92**	**45.437.337.067,84**	**10,08**
4.01			**SEKRETARIAT DAERAH**	**231.639.634.441,00**	**210.740.640.207,00**	**90,98**	**20.898.994.234,00**	**9,02**
4.01	**4.01.0.00.0.00.01**		**SEKRETARIAT DAERAH**	**231.639.634.441,00**	**210.740.640.207,00**	**90,98**	**20.898.994.234,00**	**9,02**
4.01	4.01.0.00.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	231.639.634.441,00	210.740.640.207,00	90,98	20.898.994.234,00	9,02
4.01	4.01.0.00.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	206.531.779.622,00	186.870.932.722,00	805,24	19.660.846.900,00	94,76
4.01	4.01.0.00.0.00.01	5.1.01	Belanja Pegawai	63.683.925.559,00	59.469.088.405,00	881,86	4.214.837.154,00	18,14
4.01	4.01.0.00.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.987.354.063,00	95.316.344.317,00	808,85	7.671.009.746,00	91,15
4.01	4.01.0.00.0.00.01	5.1.05	Belanja Hibah	39.860.500.000,00	32.085.500.000,00	80,49	7.775.000.000,00	19,51
4.01	4.01.0.00.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	25.107.854.819,00	23.869.707.485,00	824,40	1.238.147.334,00	75,60
4.01	4.01.0.00.0.00.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.987.531.144,00	16.939.201.648,00	823,51	1.048.329.496,00	76,48
4.01	4.01.0.00.0.00.01	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.061.065.675,00	6.887.606.581,00	97,54	173.459.094,00	2,46
4.01	4.01.0.00.0.00.01	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	59.258.000,00	42.899.256,00	72,39	16.358.744,00	27,61
4.02			**SEKRETARIAT DPRD**	**219.269.612.845,00**	**194.731.270.011,16**	**88,81**	**24.538.342.833,84**	**11,19**
4.02	**4.02.0.00.0.00.01**		**SEKRETARIAT DPRD**	**219.269.612.845,00**	**194.731.270.011,16**	**88,81**	**24.538.342.833,84**	**11,19**
4.02	4.02.0.00.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	219.269.612.845,00	194.731.270.011,16	88,81	24.538.342.833,84	11,19
4.02	4.02.0.00.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	185.280.123.116,00	161.407.037.764,16	87,12	23.873.085.351,84	12,88
4.02	4.02.0.00.0.00.01	5.1.01	Belanja Pegawai	53.688.167.576,00	52.678.828.691,00	98,12	1.009.338.885,00	1,88
4.02	4.02.0.00.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.591.955.540,00	108.728.209.073,16	82,63	22.863.746.466,84	17,37
4.02	4.02.0.00.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	33.989.489.729,00	33.324.232.247,00	98,04	665.257.482,00	1,96
4.02	4.02.0.00.0.00.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.790.982.649,00	13.764.010.880,00	99,80	26.971.769,00	0,20
4.02	4.02.0.00.0.00.01	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.148.507.080,00	19.530.304.367,00	96,93	618.202.713,00	3,07
4.02	4.02.0.00.0.00.01	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	29.917.000,00	59,83	20.083.000,00	40,17
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**1.526.441.425.680,16**	**1.340.481.424.819,89**	**87,82**	**185.960.000.860,11**	**12,18**
5.01			**PERENCANAAN**	**20.054.954.042,00**	**18.931.696.909,00**	**94,40**	**1.123.257.133,00**	**5,60**
5.01	**5.01.0.00.0.00.01**		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**20.054.954.042,00**	**18.931.696.909,00**	**94,40**	**1.123.257.133,00**	**5,60**
5.01	5.01.0.00.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	20.054.954.042,00	18.931.696.909,00	94,40	1.123.257.133,00	5,60
5.01	5.01.0.00.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	19.968.174.842,00	18.853.900.909,00	94,42	1.114.273.933,00	5,58
5.01	5.01.0.00.0.00.01	5.1.01	Belanja Pegawai	11.695.459.227,00	11.185.076.922,00	95,64	510.382.305,00	4,36
5.01	5.01.0.00.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.272.715.615,00	7.668.823.987,00	92,70	603.891.628,00	7,30
5.01	5.01.0.00.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	86.779.200,00	77.796.000,00	89,65	8.983.200,00	10,35
5.01	5.01.0.00.0.00.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.779.200,00	77.796.000,00	89,65	8.983.200,00	10,35
5.02			**KEUANGAN**	**1.433.770.983.661,16**	**1.256.252.372.806,76**	**87,62**	**177.518.610.854,24**	**12,38**
5.02	**5.02.0.00.0.00.01**		**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	**1.334.480.862.975,16**	**1.167.313.381.147,76**	**87,47**	**167.167.481.827,24**	**12,53**
5.02	5.02.0.00.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	1.334.480.862.975,00	1.167.313.381.147,76	87,47	167.167.481.827,24	12,53
5.02	5.02.0.00.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	25.801.652.177,16	21.200.996.376,00	82,17	4.600.655.801,00	17,83
5.02	5.02.0.00.0.00.01	5.1.01	Belanja Pegawai	16.571.011.065,16	14.524.327.584,00	87,65	2.046.683.481,00	12,35
5.02	5.02.0.00.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.230.641.112,00	6.676.668.792,00	72,33	2.553.972.320,00	27,67
5.02	5.02.0.00.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	1.006.385.500,00	971.339.800,00	96,52	35.045.700,00	3,48
5.02	5.02.0.00.0.00.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.006.385.500,00	971.339.800,00	96,52	35.045.700,00	3,48
5.02	5.02.0.00.0.00.01	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.487.887.909,00	5.222.259.811,30	49,79	5.265.628.097,70	50,21

Kode			Urusan Pemerintahan	Jumlah			Bertambah/Berkurang	
				Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Rp.	%
1			2	3	4	5	6	7
5.02	5.02.0.00.0.00.01	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.487.887.909,00	5.222.259.811,30	49,79	5.265.628.097,70	50,21
5.02	5.02.0.00.0.00.01	5.4	BELANJA TRANSFER	1.297.184.937.389,00	1.139.918.785.160,46	87,88	157.266.152.228,54	12,12
5.02	5.02.0.00.0.00.01	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.249.538.837.389,00	1.098.402.469.691,00	87,90	151.136.367.698,00	12,10
5.02	5.02.0.00.0.00.01	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	47.646.100.000,00	41.516.315.469,46	87,13	6.129.784.530,54	12,87
5.02	**5.02.0.00.0.00.02**		**BADAN PENDAPATAN DAERAH**	**99.290.120.686,00**	**88.938.991.659,00**	**89,57**	**10.351.129.027,00**	**10,43**
5.02	5.02.0.00.0.00.02	5	BELANJA DAERAH	99.290.120.686,00	88.938.991.659,00	89,57	10.351.129.027,00	10,43
5.02	5.02.0.00.0.00.02	5.1	BELANJA OPERASI	97.076.181.056,00	86.848.558.614,00	89,46	10.227.622.442,00	10,54
5.02	5.02.0.00.0.00.02	5.1.01	Belanja Pegawai	61.247.616.547,00	54.094.183.094,00	88,32	7.153.433.453,00	11,68
5.02	5.02.0.00.0.00.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.828.564.509,00	32.754.375.520,00	91,42	3.074.188.989,00	8,58
5.02	5.02.0.00.0.00.02	5.2	BELANJA MODAL	2.213.939.630,00	2.090.433.045,00	94,42	123.506.585,00	5,58
5.02	5.02.0.00.0.00.02	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.047.871.630,00	1.927.025.400,00	94,10	120.846.230,00	5,90
5.02	5.02.0.00.0.00.02	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	166.068.000,00	163.407.645,00	98,40	2.660.355,00	1,60
5.03			**KEPEGAWAIAN**	**18.232.783.270,00**	**16.524.190.289,13**	**90,63**	**1.708.592.980,87**	**9,37**
5.03	**5.03.0.00.0.00.01**		**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	**18.232.783.270,00**	**16.524.190.289,13**	**90,63**	**1.708.592.980,87**	**9,37**
5.03	5.03.0.00.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	18.232.783.270,00	16.524.190.289,13	90,63	1.708.592.980,87	9,37
5.03	5.03.0.00.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	18.104.027.110,00	16.402.797.171,00	90,60	1.701.229.939,00	9,40
5.03	5.03.0.00.0.00.01	5.1.01	Belanja Pegawai	11.288.041.352,00	10.360.988.594,00	91,79	927.052.758,00	8,21
5.03	5.03.0.00.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.815.985.758,00	4.551.106.832,00	94,50	264.878.926,00	5,50
5.03	5.03.0.00.0.00.01	5.1.05	Belanja Hibah	2.000.000.000,00	1.490.701.745,00	74,54	509.298.255,00	25,46
5.03	5.03.0.00.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	128.756.160,00	121.393.118,13	94,28	7.363.041,87	5,72
5.03	5.03.0.00.0.00.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.130.160,00	32.200.000,00	91,66	2.930.160,00	8,34
5.03	5.03.0.00.0.00.01	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.626.000,00	89.193.118,13	95,27	4.432.881,87	4,73
5.04			**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**23.012.735.563,00**	**21.748.964.986,00**	**94,51**	**1.263.770.577,00**	**5,49**
5.04	**5.04.0.00.0.00.01**		**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**23.012.735.563,00**	**21.748.964.986,00**	**94,51**	**1.263.770.577,00**	**5,49**
5.04	5.04.0.00.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	23.012.735.563,00	21.748.964.986,00	94,51	1.263.770.577,00	5,49
5.04	5.04.0.00.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	21.157.820.393,00	19.939.974.986,00	94,24	1.217.845.407,00	5,76
5.04	5.04.0.00.0.00.01	5.1.01	Belanja Pegawai	11.726.038.318,00	10.725.187.691,00	91,46	1.000.850.627,00	8,54
5.04	5.04.0.00.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.431.782.075,00	9.214.787.295,00	97,70	216.994.780,00	2,30
5.04	5.04.0.00.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	1.854.915.170,00	1.808.990.000,00	97,52	45.925.170,00	2,48
5.04	5.04.0.00.0.00.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.844.915.170,00	1.798.990.000,00	97,51	45.925.170,00	2,49
5.04	5.04.0.00.0.00.01	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-	-
5.05			**PENELITIAN DANPENGEMBANGAN**	**11.664.841.534,00**	**10.121.470.998,00**	**86,77**	**1.543.370.536,00**	**13,23**
5.05	**5.05.0.00.0.00.01**		**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**11.664.841.534,00**	**10.121.470.998,00**	**86,77**	**1.543.370.536,00**	**13,23**
5.05	5.05.0.00.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	11.664.841.534,00	10.121.470.998,00	86,77	1.543.370.536,00	13,23
5.05	5.05.0.00.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	11.459.302.484,00	10.042.920.998,00	87,64	1.416.381.486,00	12,36
5.05	5.05.0.00.0.00.01	5.1.01	Belanja Pegawai	5.978.652.517,00	5.254.580.515,00	87,89	724.072.002,00	12,11
5.05	5.05.0.00.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.480.649.967,00	4.788.340.483,00	87,37	692.309.484,00	12,63
5.05	5.05.0.00.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	205.539.050,00	78.550.000,00	38,22	126.989.050,00	61,78
5.05	5.05.0.00.0.00.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	205.539.050,00	78.550.000,00	38,22	126.989.050,00	61,78
5.07			**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**	**19.705.127.610,00**	**16.902.728.831,00**	**85,78**	**2.802.398.779,00**	**14,22**
5.07	**5.07.0.00.0.00.01**		**BADAN PENGHUBUNG**	**19.705.127.610,00**	**16.902.728.831,00**	**85,78**	**2.802.398.779,00**	**14,22**
5.07	5.07.0.00.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	19.705.127.610,00	16.902.728.831,00	85,78	2.802.398.779,00	14,22
5.07	5.07.0.00.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	19.444.905.524,00	16.712.896.331,00	85,95	2.732.009.193,00	14,05
5.07	5.07.0.00.0.00.01	5.1.01	Belanja Pegawai	6.898.931.707,00	6.605.761.233,00	95,75	293.170.474,00	4,25
5.07	5.07.0.00.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.545.973.817,00	10.107.135.098,00	80,56	2.438.838.719,00	19,44
5.07	5.07.0.00.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	260.222.086,00	189.832.500,00	72,95	70.389.586,00	27,05
5.07	5.07.0.00.0.00.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.222.086,00	73.000.000,00	71,41	29.222.086,00	28,59
5.07	5.07.0.00.0.00.01	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	158.000.000,00	116.832.500,00	73,94	41.167.500,00	26,06
6			**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**28.448.738.397,00**	**26.213.295.798,92**	**92,14**	**2.235.442.598,08**	**7,86**
6.01			**INSPEKTORAT DAERAH**	**28.448.738.397,00**	**26.213.295.798,92**	**92,14**	**2.235.442.598,08**	**7,86**
6.01	**6.01.0.00.0.00.01**		**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI**	**28.448.738.397,00**	**26.213.295.798,92**	**92,14**	**2.235.442.598,08**	**7,86**

Kode			Urusan Pemerintahan	Jumlah			Bertambah/Berkurang	
				Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Rp.	%
1			2	3	4	5	6	7
6.01	6.01.0.00.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	28.448.738.397,00	26.213.295.798,92	92,14	2.235.442.598,08	7,86
6.01	6.01.0.00.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	25.984.096.277,00	23.803.646.192,00	91,61	2.180.450.085,00	8,39
6.01	6.01.0.00.0.00.01	5.1.01	Belanja Pegawai	17.002.412.458,00	15.525.007.879,00	91,31	1.477.404.579,00	8,69
6.01	6.01.0.00.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.981.683.819,00	8.278.638.313,00	92,17	703.045.506,00	7,83
6.01	6.01.0.00.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	2.464.642.120,00	2.409.649.606,92	97,77	54.992.513,08	2,23
6.01	6.01.0.00.0.00.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	653.805.300,00	609.471.125,00	93,22	44.334.175,00	6,78
6.01	6.01.0.00.0.00.01	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.809.600.820,00	1.798.978.481,92	99,41	10.622.338,08	0,59
6.01	6.01.0.00.0.00.01	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.236.000,00	1.200.000,00	97,09	36.000,00	2,91
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**143.796.555.407,00**	**142.310.014.098,00**	**98,97**	**1.486.541.309,00**	**1,03**
8.01			**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**143.796.555.407,00**	**142.310.014.098,00**	**98,97**	**1.486.541.309,00**	**1,03**
8.01	**8.01.0.00.0.00.01**		**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**143.796.555.407,00**	**142.310.014.098,00**	**98,97**	**1.486.541.309,00**	**1,03**
8.01	8.01.0.00.0.00.01	5	BELANJA DAERAH	143.796.555.407,00	142.310.014.098,00	98,97	1.486.541.309,00	1,03
8.01	8.01.0.00.0.00.01	5.1	BELANJA OPERASI	143.592.270.116,00	142.107.464.098,00	98,97	1.484.806.018,00	1,03
8.01	8.01.0.00.0.00.01	5.1.01	Belanja Pegawai	6.038.217.513,00	5.645.475.966,00	93,50	392.741.547,00	6,50
8.01	8.01.0.00.0.00.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.844.819,00	16.258.780.348,00	95,64	742.064.471,00	4,36
8.01	8.01.0.00.0.00.01	5.1.05	Belanja Hibah	120.553.207.784,00	120.203.207.784,00	99,71	350.000.000,00	0,29
8.01	8.01.0.00.0.00.01	5.2	BELANJA MODAL	204.285.291,00	202.550.000,00	99,15	1.735.291,00	0,85
8.01	8.01.0.00.0.00.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	204.285.291,00	202.550.000,00	99,15	1.735.291,00	0,85
			JUMLAH BELANJA	**7.017.741.696.945,19**	**6.524.664.745.123,96**	**92,97**	**493.076.951.821,23**	**7,03**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
REKAPITULASI PENERBITAN DAN PENCAIRAN SP2D PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA SKPD	SP2D UP	SP2D GU	SP2D TU	SP2D LS - BELANJA OPERASI LAINNYA	SP2D LS - MODAL	SP2D LS - BELANJA GAJI	SP2D LS - PEMBIAYAAN	JUMLAH SP2D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DINAS PENDIDIKAN	5.406.211.000,00	52.121.421.354,00		118.453.565.919,00	192.595.119.295,00	1.590.806.676.967,00		1.959.382.994.535,00
2	DINAS KESEHATAN	1.097.764.000,00	6.227.474.587,00	254.779.700,00	114.093.900.670,00	1.945.722.650,00	57.020.398.626,00		180.640.040.233,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT				-	16.937.279.790,00	85.674.032.132,00		102.611.311.922,00
4	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN				-	1.500.118.879,00	35.151.372.248,00		36.651.491.127,00
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M NATSIR				-	4.249.562.426,00	58.099.621.279,00		62.349.183.705,00
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN				-	2.045.747.457,00	42.883.280.218,00		44.929.027.675,00
7	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	5.834.863.000,00	54.398.462.541,00		8.381.597.767,00	194.402.271.217,00	34.022.088.054,00		297.039.282.579,00
8	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	3.753.020.000,00	32.732.428.932,00		4.907.202.791,00	50.833.360.470,00	14.740.005.635,00		106.966.017.828,00
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	650.071.000,00	5.403.712.140,00		12.921.461.107,00	93.268.366.500,00	6.640.111.666,00		118.883.722.413,00
10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	665.246.000,00	6.131.496.535,00		1.219.054.450,00	69.700.000,00	9.457.991.275,00		17.543.488.260,00
11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	476.165.000,00	3.947.729.852,00		1.573.102.991,00	871.295.000,00	5.597.128.755,00		12.465.421.598,00
12	DINAS SOSIAL	2.767.955.000,00	24.901.066.315,00		57.391.757.095,00	5.195.932.884,00	20.404.493.148,00		110.661.204.442,00
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	592.902.000,00	6.369.330.733,00		1.570.860.842,00	-	22.021.567.621,00		30.554.661.196,00
14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.088.458.000,00	9.214.335.683,00		1.151.165.750,00	350.800.000,00	6.984.251.187,00		18.789.010.620,00
15	DINAS PANGAN	1.110.127.000,00	6.960.223.255,00		6.619.814.814,00	-	12.195.487.919,00		26.885.652.988,00
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.552.633.000,00	8.280.205.244,00		3.283.612.883,00	2.141.996.169,00	9.700.285.675,00		24.958.732.971,00
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	343.997.000,00	2.371.511.671,00		741.999.462,82	-	4.263.802.465,00		7.721.310.598,82
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	887.762.000,00	7.754.188.718,00		89.288.414,00	-	6.354.726.273,00		15.085.965.405,00
19	DINAS PERHUBUNGAN	456.837.000,00	4.185.963.400,80		3.616.361.404,00	-	9.496.171.322,00		17.755.333.126,80
20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	1.272.081.000,00	8.962.454.791,00		12.169.882.850,00	980.000.000,00	7.949.337.021,00		31.333.755.662,00
21	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	736.475.000,00	5.337.166.429,00		602.244.867,00	62.900.000,00	7.338.021.786,00		14.076.808.082,00
22	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	936.886.000,00	9.584.546.711,00		5.692.261.637,00	201.750.000,00	8.105.443.198,00		24.520.887.546,00
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.053.481.000,00	11.262.824.147,00		43.565.021.344,00	-	9.421.962.314,00		65.303.288.805,00
24	DINAS KEBUDAYAAN	1.856.132.000,00	12.773.960.497,00	2.509.674.426,00	6.478.224.957,00	-	8.619.159.509,00		32.237.151.389,00
25	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	341.548.000,00	2.556.138.097,00		1.744.044.411,00	-	10.087.453.528,00		14.729.184.036,00
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.162.218.000,00	15.756.568.601,00		16.888.273.901,33	4.693.509.804,84	18.646.077.713,00		58.146.648.020,17
27	DINAS PARIWISATA	1.720.567.000,00	10.150.107.274,00		8.401.566.082,00	345.475.437,00	7.229.827.200,00		27.847.542.993,00
28	DINAS PERKEBUNAN DAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA	7.027.908.000,00	18.776.389.504,00		65.983.312.727,00	358.153.000,00	40.020.322.494,00		132.166.085.725,00
29	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.974.948.000,00	13.877.582.568,00		35.339.114.056,00	1.208.119.000,00	17.584.362.839,00		69.984.126.463,00
30	DINAS KEHUTANAN	2.729.925.000,00	20.163.906.258,00		11.032.067.941,00	177.100.000,00	44.347.214.579,00		78.450.213.778,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	331.994.000,00	3.063.536.863,00		4.576.629.446,00	-	7.960.766.318,00		15.932.926.627,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.018.106.000,00	9.961.011.830,00		6.932.357.036,00	273.234.660,00	12.544.162.170,00		30.728.871.696,00
33	SEKRETARIAT DAERAH	8.365.931.000,00	69.377.430.543,00	1.372.000.000,00	57.367.743.607,00	21.308.992.379,00	54.084.652.401,00		211.876.749.930,00
34	SEKRETARIAT DPRD	18.137.258.000,00	77.320.529.230,00		17.117.337.902,16	32.872.944.305,00	52.023.927.289,00		197.471.996.726,16
35	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	785.454.000,00	5.986.356.999,00		1.395.610.945,00	74.400.000,00	10.971.596.922,00		19.213.418.866,00
36	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	941.068.000,00	5.533.221.335,00	6.609.978.819,30	1.141.124.804.072,46	843.000.000,00	14.165.817.584,00	20.000.000.000,00	1.189.217.889.810,76
37	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2.436.578.000,00	26.416.325.651,00		5.473.007.563,00	1.883.179.400,00	52.805.509.451,00		89.014.600.065,00
38	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	428.305.000,00	3.381.999.247,00		3.034.988.482,00	121.393.118,13	10.144.508.594,00		17.111.194.441,13
39	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	624.796.000,00	5.955.492.418,00		3.132.519.344,00	1.677.215.000,00	10.521.920.144,00		21.911.942.906,00
40	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	563.655.000,00	4.038.099.482,00		532.393.045,00	-	5.072.950.515,00		10.207.098.042,00
41	BADAN PENGHUBUNG	533.978.000,00	4.853.110.275,00		4.990.533.856,00	189.832.500,00	6.387.961.233,00		16.955.415.864,00
42	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	860.548.000,00	7.252.486.683,00		828.722.806,00	2.195.181.481,92	15.331.657.879,00		26.468.596.849,92
43	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.135.462.000,00	11.752.383.213,00		123.927.466.836,00	155.300.000,00	5.344.005.966,00		142.314.618.015,00
	TOTAL	**84.659.313.000,00**	**595.093.179.606,80**	**10.746.432.945,30**	**1.914.344.876.073,77**	**636.028.952.822,89**	**2.468.222.111.112,00**	**20.000.000.000,00**	**5.729.094.865.560,76**

Lampiran 15

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

REKAPITULASI SETORAN PENGEMBALIAN BELANJA PER SKPD

TAHUN 2024

NO	NAMA SKPD U R A I A N	BLJ OPERASI PEGAWAI	BLJ OPERASI BRG JASA	BLJ HIBAH	BLJ TDK TERDUGA	BL MODAL					UP/TU JUMLAH	JUMLAH
						TANAH	P & M	GDG DAN BANGUNAN	JLN, IRIGASI & JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA		
1	DINAS PENDIDIKAN	462.564.689,00	32.806.400,00	-			12.000.000,00				97.462.833,00	604.833.922,00
2	DINAS KESEHATAN			24.800.000,00							4.302.266,00	29.102.266,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT	4.778.800,00										4.778.800,00
4	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	3.871.185,00										3.871.185,00
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M NATSIR	9.709.763,00										9.709.763,00
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	100,00										100,00
7	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG								137.116.275,54		1.136.767.683,00	1.273.883.958,54
8	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	778.980,00	380.000,00						9.730.827,00		158.899,00	11.048.706,00
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		3.832.125,00								160.105.328,00	163.937.453,00
10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										139.939.288,00	139.939.288,00
11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH										277.404.097,00	277.404.097,00
12	DINAS SOSIAL		25.514.496,00	96.000.000,00			19.363.880,00				634.376.141,00	775.254.517,00
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI										7.817.831,00	7.817.831,00
14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		21.700.000,00								85.502.164,00	107.202.164,00
15	DINAS PANGAN		22.425.000,00								769.429,00	23.194.429,00
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	379.200,00									7.444.878,00	7.824.078,00
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										98.604.205,00	98.604.205,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										422.262.888,00	422.262.888,00
19	DINAS PERHUBUNGAN										134.374.032,00	134.374.032,00
20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		52.179.068,00	19.895.369,00							19.414,00	72.093.851,00
21	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										216.114.603,00	216.114.603,00
22	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH										285.915,00	285.915,00
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			46.835.000,00							16.428,00	46.851.428,00
24	DINAS KEBUDAYAAN		159.871.630,00								49.019.309,00	208.890.939,00
25	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN										99.400.267,00	99.400.267,00
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.540.000,00	21.498.679,00								811.461.124,00	834.499.803,00
27	DINAS PARIWISATA										166.074.393,00	166.074.393,00
28	DINAS PERKEBUNAN DAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA	6.830.766,00	14.082.000,00								1.538.396.984,00	1.559.309.750,00
29	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.429.723,00	2.992.000,00								310.639.122,00	315.060.845,00
30	DINAS KEHUTANAN	740.000,00	39.534.700,00								49.795.822,00	90.070.522,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	754.866,00									64.454.579,00	65.209.445,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			37.039.914,00							431.284.512,00	468.324.426,00
	SEKRETARIAT DAERAH											-
33	*BIRO UMUM*	48.859.425,00	630.000,00								727.781.680,00	777.271.105,00
34	*BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN*		2.250.000,00								27.933.784,00	30.183.784,00
35	*BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH*										27.682.040,00	27.682.040,00
36	*BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA*		11.011.400,00								167.335,00	11.178.735,00
37	*BIRO PEREKONOMIAN*										13.706.985,00	13.706.985,00
38	*BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT*		5.000.000,00	5.000.000,00							107.852,00	10.107.852,00
39	*BIRO HUKUM*										99.004,00	99.004,00
40	*BIRO ORGANISASI*										153.130.257,00	153.130.257,00
41	*BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN*										112.749.961,00	112.749.961,00
42	SEKRETARIAT DPRD	35.988.598,00	52.881.400,00								2.651.856.717,00	2.740.726.715,00
43	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										281.721.957,00	281.721.957,00
44	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				1.227.062.478,00						677.446.185,00	1.904.508.663,00
45	BADAN PENDAPATAN DAERAH	74.506.357,00	926.656,00								175.393,00	75.608.406,00
46	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			509.298.255,00							77.705.897,00	587.004.152,00
47	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11.052.453,00									151.925.467,00	162.977.920,00
48	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										85.627.044,00	85.627.044,00
49	BADAN PENGHUBUNG										52.687.033,00	52.687.033,00
50	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI		600.000,00								254.701.051,00	255.301.051,00
51	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										4.603.917,00	4.603.917,00
	TOTAL	**663.784.905,00**	**470.115.554,00**	**738.868.538,00**	**1.227.062.478,00**	**-**	**31.363.880,00**	**-**	**146.847.102,54**	**-**	**12.246.063.993,00**	**15.524.106.450,54**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
REKAPITULASI BELANJA MODAL PER SKPD TAHUN 2024

No	SKPD	BELANJA MODAL												
		ANGGARAN			REALISASI			TOTAL			LEBIH/KURANG			
		APBD	BOS	BLUD	APBD	BOS	BLUD	ANGGARAN	REALISASI	%	APBD	BOS	BLUD	TOTAL
1	DINAS PENDIDIKAN	254.849.583.660,00	73.079.673.799,00	4.260.768.000,00	204.141.196.420,00	72.461.102.325,00	693.744.194,00	332.190.025.459,00	277.296.042.939,00	83,48	50.708.387.240,00	618.571.474,00	3.567.023.806,00	54.893.982.520,00
2	DINAS KESEHATAN	2.336.291.805,00		1.481.181.350,00	2.169.581.300,00		1.050.943.884,00	3.817.473.155,00	3.220.525.184,00	84,36	166.710.505,00	-	430.237.466,00	596.947.971,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT	17.445.634.716,00		16.800.000.000,00	16.937.279.790,00		12.528.647.772,00	34.245.634.716,00	29.465.927.562,00	86,04	508.354.926,00	-	4.271.352.228,00	4.779.707.154,00
4	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	1.654.659.000,00		1.535.943.000,00	1.500.118.879,00		1.465.425.607,00	3.190.602.000,00	2.965.544.486,00	92,95	154.540.121,00	-	70.517.393,00	225.057.514,00
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M NATSIR	4.393.288.493,00		9.669.482.000,00	4.249.562.426,00		8.278.722.877,00	14.062.770.493,00	12.528.285.303,00	89,09	143.726.067,00	-	1.390.759.123,00	1.534.485.190,00
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	2.108.782.435,00		10.500.000.000,00	2.045.747.457,00		6.200.383.965,00	12.608.782.435,00	8.246.131.422,00	65,40	63.034.978,00	-	4.299.616.035,00	4.362.651.013,00
7	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	208.601.086.342,00			199.754.627.583,46			208.601.086.342,00	199.754.627.583,46	95,76	8.846.458.758,54	-	-	8.846.458.758,54
8	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA	60.858.789.382,00			53.534.942.967,00			60.858.789.382,00	53.534.942.967,00	87,97	7.323.846.415,00	-	-	7.323.846.415,00
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	94.538.222.201,00			93.337.346.000,00			94.538.222.201,00	93.337.346.000,00	98,73	1.200.876.201,00	-	-	1.200.876.201,00
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	972.974.077,00			967.120.400,00			972.974.077,00	967.120.400,00	99,40	5.853.677,00	-	-	5.853.677,00
11	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	124.453.380,00			118.650.000,00			124.453.380,00	118.650.000,00	95,34	5.803.380,00	-	-	5.803.380,00
12	DINAS SOSIAL	5.935.870.989,00			5.772.913.865,00			5.935.870.989,00	5.772.913.865,00	97,25	162.957.124,00	-	-	162.957.124,00
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	118.003.800,00			114.267.700,00			118.003.800,00	114.267.700,00	96,83	3.736.100,00	-	-	3.736.100,00
14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	702.935.220,00			440.956.000,00			702.935.220,00	440.956.000,00	62,73	261.979.220,00	-	-	261.979.220,00
15	DINAS PANGAN	220.798.800,00			53.710.000,00			220.798.800,00	53.710.000,00	24,33	167.088.800,00	-	-	167.088.800,00
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.778.159.016,00			2.451.149.209,00			2.778.159.016,00	2.451.149.209,00	88,23	327.009.807,00	-	-	327.009.807,00
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN	34.144.710,00			19.396.250,00			34.144.710,00	19.396.250,00	56,81	14.748.460,00	-	-	14.748.460,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN	8.438.000,00			8.435.000,00			8.438.000,00	8.435.000,00	99,96	3.000,00	-	-	3.000,00
19	DINAS PERHUBUNGAN	19.310.100,00			19.018.000,00			19.310.100,00	19.018.000,00	98,49	292.100,00	-	-	292.100,00
20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN	2.854.041.194,00			1.037.459.196,00			2.854.041.194,00	1.037.459.196,00	36,35	1.816.581.998,00	-	-	1.816.581.998,00
21	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	326.575.418,00			314.423.000,00			326.575.418,00	314.423.000,00	96,28	12.152.418,00	-	-	12.152.418,00
22	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	113.246.290,00			111.094.980,00			113.246.290,00	111.094.980,00	98,10	2.151.310,00	-	-	2.151.310,00
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	35.432.000,00			35.432.000,00			35.432.000,00	35.432.000,00	100,00	-	-	-	-
24	DINAS KEBUDAYAAN	99.341.200,00			99.015.000,00			99.341.200,00	99.015.000,00	99,67	326.200,00	-	-	326.200,00
25	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	123.086.600,00			122.142.500,00			123.086.600,00	122.142.500,00	99,23	944.100,00	-	-	944.100,00
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.639.585.265,00			5.019.601.733,84			6.639.585.265,00	5.019.601.733,84	75,60	1.619.983.531,16	-	-	1.619.983.531,16
27	DINAS PARIWISATA	530.400.000,00			375.872.437,00			530.400.000,00	375.872.437,00	70,87	154.527.563,00	-	-	154.527.563,00
28	DINAS PERKEBUNAN DAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA	486.497.250,00			479.464.639,00			486.497.250,00	479.464.639,00	98,55	7.032.611,00	-	-	7.032.611,00
29	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN	1.830.810.776,00			1.604.261.406,00			1.830.810.776,00	1.604.261.406,00	87,63	226.549.370,00	-	-	226.549.370,00
30	DINAS KEHUTANAN	309.644.700,00			254.500.000,00			309.644.700,00	254.500.000,00	82,19	55.144.700,00	-	-	55.144.700,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA	206.604.930,00			200.419.200,00			206.604.930,00	200.419.200,00	97,01	6.185.730,00	-	-	6.185.730,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN	443.685.932,00			393.045.110,00			443.685.932,00	393.045.110,00	88,59	50.640.822,00	-	-	50.640.822,00
	SEKRETARIAT DAERAH							-	-		-	-	-	-
33	BIRO UMUM	23.527.735.040,00			22.422.226.850,00			23.527.735.040,00	22.422.226.850,00	95,30	1.105.508.190,00	-	-	1.105.508.190,00
34	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	211.995.330,00			202.625.000,00			211.995.330,00	202.625.000,00	95,58	9.370.330,00	-	-	9.370.330,00
35	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI	147.161.600,00			146.950.000,00			147.161.600,00	146.950.000,00	99,86	211.600,00	-	-	211.600,00
36	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	189.619.270,00			176.149.635,00			189.619.270,00	176.149.635,00	92,90	13.469.635,00	-	-	13.469.635,00
37	BIRO PEREKONOMIAN	101.950.760,00			95.130.000,00			101.950.760,00	95.130.000,00	93,31	6.820.760,00	-	-	6.820.760,00
38	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	232.148.960,00			205.250.000,00			232.148.960,00	205.250.000,00	88,41	26.898.960,00	-	-	26.898.960,00
39	BIRO HUKUM	117.699.900,00			95.355.000,00			117.699.900,00	95.355.000,00	81,02	22.344.900,00	-	-	22.344.900,00
40	BIRO ORGANISASI	434.279.914,00			401.821.000,00			434.279.914,00	401.821.000,00	92,53	32.458.914,00	-	-	32.458.914,00
41	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	145.264.045,00			124.200.000,00			145.264.045,00	124.200.000,00	85,50	21.064.045,00	-	-	21.064.045,00
42	SEKRETARIAT DPRD	33.989.489.729,00			33.324.232.247,00			33.989.489.729,00	33.324.232.247,00	98,04	665.257.482,00	-	-	665.257.482,00
43	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	86.779.200,00			77.796.000,00			86.779.200,00	77.796.000,00	89,65	8.983.200,00	-	-	8.983.200,00
44	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN	1.006.385.500,00			971.339.800,00			1.006.385.500,00	971.339.800,00	96,52	35.045.700,00	-	-	35.045.700,00
45	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2.213.939.630,00			2.090.433.045,00			2.213.939.630,00	2.090.433.045,00	94,42	123.506.585,00	-	-	123.506.585,00
46	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	128.756.160,00			121.393.118,13			128.756.160,00	121.393.118,13	94,28	7.363.041,87	-	-	7.363.041,87
47	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	1.854.915.170,00			1.808.990.000,00			1.854.915.170,00	1.808.990.000,00	97,52	45.925.170,00	-	-	45.925.170,00
48	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	205.539.050,00			78.550.000,00			205.539.050,00	78.550.000,00	38,22	126.989.050,00	-	-	126.989.050,00
49	BADAN PENGHUBUNG	260.222.086,00			189.832.500,00			260.222.086,00	189.832.500,00	72,95	70.389.586,00	-	-	70.389.586,00
50	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	2.464.642.120,00			2.409.649.606,92			2.464.642.120,00	2.409.649.606,92	97,77	54.992.513,08	-	-	54.992.513,08
51	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	204.285.291,00			202.550.000,00			204.285.291,00	202.550.000,00	99,15	1.735.291,00	-	-	1.735.291,00
	TOTAL	**739.223.186.436,00**	**73.079.673.799,00**	**44.247.374.350,00**	**662.827.224.250,35**	**72.461.102.325,00**	**30.217.868.299,00**	**856.550.234.585,00**	**765.506.194.874,35**	**89,37**	**76.395.962.185,65**	**618.571.474,00**	**14.029.506.051,00**	**91.044.039.710,65**

REKAPITULASI DATA DANA BOS TAHUN ANGGARAN 2024
SMA/SMK/SLB NEGERI SE SUMATERA BARAT
SISA SALDO BOS 2021
Per 31 Desember 2024

NO	KODE	NAMA SEKOLAH	Jenjang	KAB/KOTA	SISA SALDO BOS 2021 (31 Desember 2022) AUDITED	KOREKSI SISA SALDO BOS REGULER 2021										SISA SALDO BOS 2021 Setelah Koreksi	Realisasi Silpa 2021			SISA SALDO BOS 2021
						Koreksi Tambah					Koreksi Kurang									
						Kas di bank	Kas di tunai	Pengembalian Temuan/ Lainnya	Kurang Salur	Lainnya	Jasa Giro/bunga bank	Adm bank	Pembulatan	Lebih Salur	Lainnya		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17 = 5+6+7+8+9+10-11-12-13-14-15*	*18*	*19*	*20*	*21 = (17-18-19-20)*
1	10300287	SMAN 1 TANJUNG MUTIARA	SMA	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	10300292	SMAN 1 LUBUK BASUNG	SMA	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	10300294	SMAN 2 LUBUK BASUNG	SMA	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	10300290	SMAN 3 LUBUK BASUNG	SMA	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	10300286	SMAN 1 TANJUNG RAYA	SMA	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	10304887	SMAN AGAM CENDEKIA	SMA	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	10300301	SMAN 1 MATUR	SMA	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	10300298	SMAN 1 IV KOTO	SMA	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	10300270	SMAN 2 IV KOTO	SMA	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	10300297	SMAN 1 BASO	SMA	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	10300269	SMAN 1 TILATANG KAMANG	SMA	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	10300271	SMAN 2 TILATANG KAMANG	SMA	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	10300302	SMAN 1 PALEMBAYAN	SMA	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	69964939	SMAN 2 PALEMBAYAN	SMA	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	10300293	SMAN 1 PALUPUH	SMA	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	10300304	SMAN 1 SUNGAI PUAR	SMA	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	10304886	SMAN 1 CANDUNG	SMA	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	10300300	SMAN 1 KAMANG MAGEK	SMA	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	10300296	SMAN 1 BANUHAMPU	SMA	Agam	96,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,00	-	-	-	**96**
20	10300299	SMAN 1 AMPEK ANGKEK	SMA	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	10300295	SMAN 1 AMPEK NAGARI	SMA	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	10300832	SMAN 1 BONJOL	SMA	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	69964938	SMAN 3 SUMATERA BARAT	SMA	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	10300830	SMAN 1 LUBUK SIKAPING	SMA	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	10310590	SMAN 2 LUBUK SIKAPING	SMA	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	10300831	SMAN 1 DUA KOTO	SMA	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	10300829	SMAN 1 PANTI	SMA	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	10300827	SMAN 1 TIGO NAGARI	SMA	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	10300828	SMAN 1 RAO	SMA	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	69757492	SMAN 1 MAPAT TUNGGUL	SMA	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	69774642	SMAN MAPAT TUNGGUL SELATAN	SMA	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	10304194	SMAN 1 PADANG GELUGUR	SMA	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	69774643	SMAN 1 RAO UTARA	SMA	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	10304429	SMAN 1 KEC. PAYAKUMBUH	SMA	lima puluh kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	10301186	SMAN 1 HARAU	SMA	lima puluh kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	69786300	SMAN 2 HARAU	SMA	lima puluh kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	10301187	SMAN 1 GUGUAK	SMA	lima puluh kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	10301181	SMAN 1 SULIKI	SMA	lima puluh kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	69786301	SMAN 1 KECAMATAN GUNUANG OMEH	SMA	lima puluh kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	69960622	SMAN 2 Kec. Kapur IX	SMA	lima puluh kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	10301185	SMAN 1 KAPUR IX	SMA	lima puluh kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	10301183	SMAN 1 KEC PANGKALAN KOTO BARU	SMA	lima puluh kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	69888818	SMAN 2 KEC. PANGKALAN KOTO BARU	SMA	lima puluh kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	69786302	SMAN 1 BUKIK BARISAN	SMA	lima puluh kota	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	**2**
45	69946176	SMAN 2 KEC. BUKIK BARISAN	SMA	lima puluh kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	69946102	SMAN 1 Kec. Mungka	SMA	lima puluh kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	10301188	SMAN 1 AKABILURU	SMA	lima puluh kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	10301182	SMAN 1 SITUJUAH LIMO NAGARI	SMA	lima puluh kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	KODE	NAMA SEKOLAH	Jenjang	KAB/KOTA	SISA SALDO BOS 2021 (31 Desember 2022) AUDITED	KOREKSI SISA SALDO BOS REGULER 2021										SISA SALDO BOS 2021 Setelah Koreksi	Realisasi Silpa 2021			SISA SALDO BOS 2021
						Koreksi Tambah					Koreksi Kurang									
						Kas di bank	Kas di tunai	Pengembalian Temuan/ Lainnya	Kurang Salur	Lainnya	Jasa Giro/bunga bank	Adm bank	Pembulatan	Lebih Salur	Lainnya		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17 = 5+6+7+8+9+10-11-12-13-14-15*	*18*	*19*	*20*	*21 = (17-18-19-20)*
49	10301184	SMAN 1 LAREH SAGO HALABAN	SMA	lima puluh kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	10301576	SMAN 1 PANTAI CERMIN	SMA	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	10301574	SMAN 1 LEMBAH GUMANTI	SMA	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	10308150	SMAN 1 PAYUNG SEKAKI	SMA	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	10301575	SMAN 1 LEMBANG JAYA	SMA	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	10308439	SMAN 2 LEMBANG JAYA	SMA	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	69862591	SMAN 2 SUMATERA BARAT	SMA	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	10301592	SMAN 1 GUNUNG TALANG	SMA	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	10301579	SMAN 2 GUNUNG TALANG	SMA	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	10301590	SMAN 1 BUKIT SUNDI	SMA	Solok	12.392,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.392,00	-	-	-	**12.392**
59	10301573	SMAN 1 KUBUNG	SMA	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	10301582	SMAN 1 IX KT SUNGAI LASI	SMA	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	10301577	SMAN 1 X KOTO DIATAS	SMA	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	10301578	SMAN 1 X KT SINGKARAK	SMA	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	10301580	SMAN 2 X KT SINGKARAK	SMA	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	10301581	SMAN 1 JUNJUNG SIRIH	SMA	Solok	129.586,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.586,00	**129.586**	-	-	-
65	10301583	SMAN 1 HILIRAN GUMANTI	SMA	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	10310636	SMAN 2 HILIRAN GUMANTI	SMA	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	10310738	SMAN 1 TIGO LURAH	SMA	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	10301591	SMAN 1 DANAU KEMBAR	SMA	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	10301791	SMAN 1 BATANG ANAI	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	69826561	SMAN 2 Batang Anai	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	10301790	SMAN 1 LUBUK ALUNG	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	69823281	SMAN 2 Lubuk Alung	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	10305548	SMAN 1 ULAKAN TAPAKIS	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	10305547	SMAN 1 NAN SABARIS	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	10305549	SMAN 1 2X11 ENAM LINGKUNG	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	10305569	SMAN 1 VII KOTO SUNGAI SARIK	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	69822703	SMAN 2 VII KOTO SUNGAI SARIK	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	10305566	SMAN 1 V KOTO KAMPUNG DALAM	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	10305565	SMAN 1 SUNGAI LIMAU	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	10305570	SMAN 2 SUNGAI LIMAU	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	10305564	SMAN 1 SUNGAI GERINGGING	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	10305562	SMAN 1 IV KOTO A MALINTANG	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	69829357	SMAN 1 BATANG GASAN	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	10305568	SMAN 1 V KOTO TIMUR	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	69946914	SMAN 1 PATAMUAN	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	10305563	SMAN 1 PADANG SAGO	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	10305560	SMAN 1 2X11 ENAM KAYU TANAM	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	10305561	SMAN 1 ENAM LINGKUNG	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	10302013	SMAN 1 LUNANG	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	10302022	SMAN 1 BASA AMPEK BALAI	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	69987102	SMAN 2 BASA AMPEK BALAI	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	10302015	SMAN 1 PANCUNG SOAL	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	10302011	SMAN 1 LINGGO SARI BAGANTI	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	69987076	SMAN 2 Linggo Sari Baganti	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	10302016	SMAN 1 RANAH PESISIR	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	10308260	SMAN 2 RANAH PESISIR	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	10302010	SMAN 1 LENGAYANG	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	10302019	SMAN 2 LENGAYANG	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	10307602	SMAN 3 LENGAYANG	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	10302017	SMAN 1 SUTERA	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	10310901	SMAN 2 SUTERA	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	10302021	SMAN 1 BATANG KAPAS	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	10302018	SMAN 2 BATANG KAPAS	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	KODE	NAMA SEKOLAH	Jenjang	KAB/KOTA	SISA SALDO BOS 2021 (31 Desember 2022) AUDITED	KOREKSI SISA SALDO BOS REGULER 2021										SISA SALDO BOS 2021 Setelah Koreksi	Realisasi Silpa 2021			SISA SALDO BOS 2021
						Koreksi Tambah					Koreksi Kurang									
						Kas di bank	Kas di tunai	Pengembalian Temuan/ Lainnya	Kurang Salur	Lainnya	Jasa Giro/bunga bank	Adm bank	Pembulatan	Lebih Salur	Lainnya		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17 = 5+6+7+8+9+10-11-12-13-14-15*	*18*	*19*	*20*	*21 = (17-18-19-20)*
104	10302014	SMAN 1 PAINAN	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	10302020	SMAN 2 PAINAN	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	10310795	SMAN 3 PAINAN	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	10302009	SMAN 1 BAYANG	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	10308089	SMAN 2 BAYANG	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	10308163	SMAN 1 KOTO XI TARUSAN	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	10307604	SMAN 2 KOTO XI TARUSAN	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	10302034	SMAN 1 NAGARI IV BAYANG UTARA	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	10308231	SMAN 1 SILAUT	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	10308265	SMAN 1 AIR PURA	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	10302400	SMAN 1 X KOTO	SMA	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	10302475	SMAN 1 BATIPUH	SMA	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	10302436	SMAN 1 PARIANGAN	SMA	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	10302382	SMAN 1 RAMBATAN	SMA	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	10302402	SMAN 2 RAMBATAN	SMA	Tanah Datar	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	**2.000**
119	10302476	SMAN 1 BATU SANGKAR	SMA	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	10307799	SMAN 3 BATU SANGKAR	SMA	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	10302401	SMAN 2 BATU SANGKAR	SMA	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	10302492	SMAN 1 PADANG GANTING	SMA	Tanah Datar	48.949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.949,00	-	-	-	**48.949**
123	10302404	SMAN 2 LINTAU BUO	SMA	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	10302399	SMAN 1 SUNGAYANG	SMA	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	10302398	SMAN 1 SUNGAI TARAB	SMA	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	10302403	SMAN 2 SUNGAI TARAB	SMA	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	10302397	SMAN 1 SALIMPAUNG	SMA	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	10302477	SMAN 1 LINTAU BUO	SMA	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	10307884	SMAN 10 SIJUNJUNG	SMA	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	10308127	SMAN 11 SIJUNJUNG	SMA	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	69946653	SMAN 13 SIJUNJUNG	SMA	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	10302804	SMAN 6 SIJUNJUNG	SMA	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	10302821	SMAN 3 SIJUNJUNG	SMA	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	10302823	SMAN 1 SIJUNJUNG	SMA	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	10302822	SMAN 2 SIJUNJUNG	SMA	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	10307989	SMAN 9 SIJUNJUNG	SMA	Sijunjung	332.953,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332.953,00	-	-	-	**332.953**
137	10302806	SMAN 4 SIJUNJUNG	SMA	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	10302788	SMAN 7 SIJUNJUNG	SMA	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	10302805	SMAN 5 SIJUNJUNG	SMA	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	10302787	SMAN 8 SIJUNJUNG	SMA	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	10308287	SMAN 12 SIJUNJUNG	SMA	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	69903388	SMAN 1 PAGAI UTARA	SMA	Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	10302979	SMAN 1 SIPORA	SMA	Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	10302978	SMAN 1 SIBERUT SELATAN	SMA	Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	10302982	SMAN 1 SIBERUT UTARA	SMA	Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	69917690	SMAN 1 SIBERUT BARAT	SMA	Kepulauan Mentawai	41.083.141,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.083.141,00	-	-	-	**41.083.141**
147	69809505	SMAN 1 SIBERUT BARAT DAYA	SMA	Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	10310733	SMAN 1 SIBERUT TENGAH	SMA	Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	10302980	SMAN 2 SIPORA	SMA	Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	KODE	NAMA SEKOLAH	Jenjang	KAB/KOTA	SISA SALDO BOS 2021 (31 Desember 2022) AUDITED	KOREKSI SISA SALDO BOS REGULER 2021										SISA SALDO BOS 2021 Setelah Koreksi	Realisasi Silpa 2021			SISA SALDO BOS 2021
						Koreksi Tambah					Koreksi Kurang									
						Kas di bank	Kas di tunai	Pengembalian Temuan/ Lainnya	Kurang Salur	Lainnya	Jasa Giro/bunga bank	Adm bank	Pembulatan	Lebih Salur	Lainnya		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17 = 5+6+7+8+9+10-11-12-13-14-15*	*18*	*19*	*20*	*21 = (17-18-19-20)*
150	69809506	SMAN 2 SIKAKAP	SMA	Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	10302981	SMAN 1 PAGAI UTARA SELATAN	SMA	Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	69903167	SMAN 1 PAGAI SELATAN	SMA	Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	69946645	SMAN 10 SOLOK SELATAN	SMA	Solok Selatan	224,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224,00	-	-	-	**224**
154	10306748	SMAN 3 SOLOK SELATAN	SMA	Solok Selatan	52.934,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.934,00	**52.934**	-	-	-
155	10303376	SMAN 6 SOLOK SELATAN	SMA	Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	10303367	SMAN 1 SOLOK SELATAN	SMA	Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	10303377	SMAN 4 SOLOK SELATAN	SMA	Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	10303364	SMAN 5 SOLOK SELATAN	SMA	Solok Selatan	15.722,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.722,00	-	-	-	**15.722**
159	10303366	SMAN 2 SOLOK SELATAN	SMA	Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	10310873	SMAN 08 SOLOK SELATAN	SMA	Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	10307562	SMAN 7 SOLOK SELATAN	SMA	Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	69786567	SMAN 9 SOLOK SELATAN	SMA	Solok Selatan	77.761,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.761,00	-	-	-	**77.761**
163	69946860	SMAN 11 SOLOK SELATAN	SMA	Solok Selatan	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	**5.000**	-	-	-
164	10303216	SMAN 1 SUNGAI RUMBAI	SMA	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	69953275	SMAN 2 SUNGAI RUMBAI	SMA	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	69853525	SMAN UNGGUL DHARMASRAYA	SMA	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	10303218	SMAN 1 KOTO BARU	SMA	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	10304875	SMAN 2 KOTO BARU	SMA	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	10303219	SMAN 1 SITIUNG	SMA	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	69986157	SMAN 2 SITIUNG	SMA	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	10303217	SMAN 1 PULAU PUNJUNG	SMA	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	69986156	SMAN 1 SIKABAU	SMA	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	10304874	SMAN 2 PULAU PUNJUNG	SMA	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	69774851	SMAN 1 IX Koto	SMA	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	10304873	SMAN 1 TIMPEH	SMA	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	69774852	SMAN 1 Koto Salak	SMA	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	69954291	SMAN 1 TIUMANG	SMA	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	69953273	SMAN 1 ASAM JUJUHAN	SMA	Dharmasraya	23.540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.540,00	-	-	-	**23.540**
179	10308311	SMAN 1 KOTO BESAR	SMA	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	10303091	SMAN 1 SUNGAI BEREMAS	SMA	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	10306086	SMAN 1 RANAH BATAHAN	SMA	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	69987232	SMAN 2 RANAH BATAHAN	SMA	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	10303089	SMAN 1 LEMBAH MELINTANG	SMA	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	10303086	SMAN 1 GUNUNG TULEH	SMA	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	10303090	SMAN 1 PASAMAN	SMA	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	69764539	SMAN 2 PASAMAN	SMA	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	10303087	SMAN 1 KINALI	SMA	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	69948099	SMAN 2 KINALI	SMA	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	10303106	SMAN 1 TALAMAU	SMA	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	10303088	SMAN 1 KOTO BALINGKA	SMA	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	10306085	SMAN 1 LUHAK NAN DUO	SMA	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	10307806	SMAN 1 SUNGAI AUR	SMA	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	10307523	SMAN 1 BUKITTINGGI	SMA	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	10307525	SMAN 3 BUKITTINGGI	SMA	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	10307526	SMAN 4 BUKIT TINGGI	SMA	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	10307527	SMAN 5 BUKITTINGGI	SMA	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	10307524	SMAN 2 BUKITTINGGI	SMA	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	10303463	SMAN 11 PADANG	SMA	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	10303482	SMAN 14 PADANG	SMA	Kota Padang	90.895,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.895,00	**90.895**	-	-	-
200	10303501	SMAN 4 PADANG	SMA	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	10303503	SMAN 6 PADANG	SMA	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	KODE	NAMA SEKOLAH	Jenjang	KAB/KOTA	SISA SALDO BOS 2021 (31 Desember 2022) AUDITED	KOREKSI SISA SALDO BOS REGULER 2021										SISA SALDO BOS 2021 Setelah Koreksi	Realisasi Silpa 2021			SISA SALDO BOS 2021
						Koreksi Tambah					Koreksi Kurang									
						Kas di bank	Kas di tunai	Pengembalian Temuan/ Lainnya	Kurang Salur	Lainnya	Jasa Giro/bunga bank	Adm bank	Pembulatan	Lebih Salur	Lainnya		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17 = 5+6+7+8+9+10-11-12-13-14-15*	*18*	*19*	*20*	*21 = (17-18-19-20)*
202	10303462	SMAN 10 PADANG	SMA	Kota Padang	117,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,00	**117**	-	-	-
203	10303499	SMAN 2 PADANG	SMA	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	10303461	SMAN 1 PADANG	SMA	Kota Padang	970.256,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970.256,00	**970.256**	-	-	-
205	10303500	SMAN 3 PADANG	SMA	Kota Padang	584.197,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584.197,00	-	-	-	**584.197**
206	10303480	SMAN 12 PADANG	SMA	Kota Padang	323.597,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323.597,00	**323.597**	-	-	-
207	69948163	SMAN 4 SUMATERA BARAT (KEBERBAKATAN OLAHRAGA)	SMA	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	10308323	SMAN 16 PADANG	SMA	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	10303502	SMAN 5 PADANG	SMA	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	10304833	SMAN 15 PADANG	SMA	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	10303506	SMAN 9 PADANG	SMA	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	10303481	SMAN 13 PADANG	SMA	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	10303504	SMAN 7 PADANG	SMA	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	10303505	SMAN 8 PADANG	SMA	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	10304698	SMAN 3 PADANG PANJANG	SMA	Kota Padang Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	10303611	SMAN 1 PADANG PANJANG	SMA	Kota Padang Panjang	52.001,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.001,00	-	-	-	**52.001**
217	10310903	SMAN 1 SUMATERA BARAT	SMA	Kota Padang Panjang	921.948,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	921.948,00	-	-	-	**921.948**
218	10303610	SMAN 2 PADANG PANJANG	SMA	Kota Padang Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219	10303691	SMAN 1 SAWAHLUNTO	SMA	Kota Sawah Lunto	84,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,00	-	-	-	**84**
220	69815459	SMAN 3 SAWAHLUNTO	SMA	Kota Sawah Lunto	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,00	-	-	-	**72**
221	10303692	SMAN 2 SAWAHLUNTO	SMA	Kota Sawah Lunto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	10303781	SMAN 1 SOLOK	SMA	Kota Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	10303780	SMAN 2 SOLOK	SMA	Kota Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	10303779	SMAN 3 SOLOK	SMA	Kota Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	10303766	SMAN 4 SOLOK	SMA	Kota Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	10310597	SMAN 4 PAYAKUMBUH	SMA	Kota Payakumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	10303904	SMAN 1 PAYAKUMBUH	SMA	Kota Payakumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228	10303905	SMAN 2 PAYAKUMBUH	SMA	Kota Payakumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	10303906	SMAN 3 PAYAKUMBUH	SMA	Kota Payakumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	60724950	SMAN 5 PAYAKUMBUH	SMA	Kota Payakumbuh	78.622,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.622,00	-	-	-	**78.622**
231	10307311	SMAN 3 PARIAMAN	SMA	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	10307309	SMAN 1 PARIAMAN	SMA	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	10307310	SMAN 2 PARIAMAN	SMA	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234	10307312	SMAN 4 PARIAMAN	SMA	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235	10311405	SMAN 6 PARIAMAN	SMA	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	10308546	SMAN 5 PARIAMAN	SMA	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	69849081	SMKN 1 TANJUNG MUTIARA	SMK	**Agam**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	10300272	SMKN 1 LUBUK BASUNG	SMK	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	10304893	SMKN 2 LUBUK BASUNG	SMK	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	10300273	SMKN 1 TANJUNG RAYA	SMK	Agam	4.172.803,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.172.803,00	**3.228.400**	-	-	**944.403**
4	10308298	SMKN 1 MATUR	SMK	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	10310706	SMKN 1 BASO	SMK	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	10308138	SMKN 1 TILATANG KAMANG	SMK	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	10304892	SMKN 1 PALEMBAYAN	SMK	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	10300274	SMKN 1 AMPEK ANGKEK	SMK	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	10310498	SMKN 1 AMPEK NAGARI	SMK	Agam	91,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,00	-	-	-	**91**
10	10300826	SMKN 1 BONJOL	SMK	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	10300825	SMKN 1 LUBUK SIKAPING	SMK	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	69896555	SMKN 1 DUA KOTO	SMK	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	69754554	SMKN 1 SIMPANG ALAHAN MATI	SMK	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	10304195	SMKN 1 PADANG GALUGUR	SMK	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	KODE	NAMA SEKOLAH	Jenjang	KAB/KOTA	SISA SALDO BOS 2021 (31 Desember 2022) AUDITED	KOREKSI SISA SALDO BOS REGULER 2021										SISA SALDO BOS 2021 Setelah Koreksi	Realisasi Silpa 2021			SISA SALDO BOS 2021
						Koreksi Tambah					Koreksi Kurang									
						Kas di bank	Kas di tunai	Pengembalian Temuan/ Lainnya	Kurang Salur	Lainnya	Jasa Giro/bunga bank	Adm bank	Pembulatan	Lebih Salur	Lainnya		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17 = 5+6+7+8+9+10-11-12-13-14-15*	*18*	*19*	*20*	*21 = (17-18-19-20)*
15	10307598	SMKN 1 RAO SELATAN	SMK	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	10304430	SMKN 1 KECAMATAN LUAK	SMK	lima puluh kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	10310831	SMKN PP PADANG MENGATAS	SMK	lima puluh kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	10304432	SMKN 1 GUGUK	SMK	lima puluh kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	10310872	SMKN 2 KEC GUGUAK	SMK	lima puluh kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	10304431	SMKN 1 SULIKI	SMK	lima puluh kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	10304433	SMKN 1 PANGKALAN	SMK	lima puluh kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	10310811	SMKN 1 PANTAI CERMIN	SMK	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	10308093	SMKN 1 LEMBAH GUMANTI	SMK	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	10310804	SMKN 2 LEMBAH GUMANTI	SMK	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	10301518	SMKN 1 GUNUNG TALANG	SMK	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	10308154	SMKN 2 GUNUNG TALANG	SMK	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	10310889	SMKN 1 BUKIT SUNDI	SMK	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	10308095	SMKN 1 X KOTO DIATAS	SMK	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	10307970	SMKN 1 SINGKARAK	SMK	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10307922	SMKN 1 HILIRAN GUMANTI	SMK	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	10310791	SMKN 1 SUNGAI LIMAU	SMK	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	69829358	SMKN 1 IV KOTO AUR MALINTANG	SMK	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10305575	SMKN 1 SINTUK TOBOH GADANG	SMK	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	10308128	SMKN 1 ENAM LINGKUNG	SMK	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	69773545	SMKN 1 PANCUNG SOAL	SMK	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10310796	SMKN 1 LINGGO SARI BAGANTI	SMK	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	10301948	SMKN 1 RANAH PESISIR	SMK	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	10308258	SMKN 1 SUTERA	SMK	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	10301942	SMKN 1 PAINAN	SMK	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	10301949	SMKN 2 PAINAN	SMK	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	10308179	SMKN 1 KOTO XI TARUSAN	SMK	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	69987098	SMKN 1 SILAUT	SMK	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	10309786	SMKN 1 RANAH AMPEK HULU TAPAN	SMK	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	10302406	SMKN 1 BATIPUH	SMK	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	10302395	SMKN 2 BATUSANGKAR	SMK	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	10302407	SMKN 1 BATUSANGKAR	SMK	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	10302396	SMKN 1 LINTAU BUO	SMK	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	10308142	SMKN 1 TANJUNG BARU	SMK	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	10306287	SMKN 4 SIJUNJUNG	SMK	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	10308316	SMKN 6 SIJUNJUNG	SMK	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	69773528	SMKN 7 SIJUNJUNG	SMK	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	10302786	SMKN 2 SIJUNJUNG	SMK	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	10305639	SMKN 3 SIJUNJUNG	SMK	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	10308315	SMKN 5 SIJUNJUNG	SMK	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	10302785	SMKN 1 SIJUNJUNG	SMK	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	69991477	SMKN 8 Sijunjung	SMK	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	69851452	SMKN 1 KEPULAUN MENTAWAI	SMK	Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	69900920	SMKN 2 KEPULAUAN MENTAWAI	SMK	Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	69953380	SMKN 3 KEPULAUAN MENTAWAI	SMK	Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	10306968	SMKN 3 SOLOK SELATAN	SMK	Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	10306966	SMKN 1 SOLOK SELATAN	SMK	Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	10308133	SMKN 5 SOLOK SELATAN	SMK	Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	10306969	SMKN 4 SOLOK SELATAN	SMK	Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	10306967	SMKN 2 SOLOK SELATAN	SMK	Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	10304876	SMKN 1 SUNGAI RUMBAI	SMK	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	10303215	SMKN 1 KOTO BARU	SMK	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	KODE	NAMA SEKOLAH	Jenjang	KAB/KOTA	SISA SALDO BOS 2021 (31 Desember 2022) AUDITED	KOREKSI SISA SALDO BOS REGULER 2021										SISA SALDO BOS 2021 Setelah Koreksi	Realisasi Silpa 2021			SISA SALDO BOS 2021
						Koreksi Tambah					Koreksi Kurang									
						Kas di bank	Kas di tunai	Pengembalian Temuan/ Lainnya	Kurang Salur	Lainnya	Jasa Giro/bunga bank	Adm bank	Pembulatan	Lebih Salur	Lainnya		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17 = 5+6+7+8+9+10-11-12-13-14-15*	*18*	*19*	*20*	*21 = (17-18-19-20)*
67	69853536	SMKN 1 SITIUNG	SMK	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	10303214	SMKN 1 PULAU PUNJUNG	SMK	Dharmasraya	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	**2**
69	10308286	SMKN 2 PULAU PUNJUNG	SMK	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	69853537	SMKN 1 TIMPEH	SMK	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	69986158	SMKN 1 PADANG LAWEH	SMK	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	69946934	SMKN 1 KOTO BESAR	SMK	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	10310878	SMKN 1 RANAH BATAHAN	SMK	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	10306096	SMKN 1 LEMBAH MELINTANG	SMK	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	69905465	SMKN 1 GUNUNG TULEH	SMK	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	10310877	SMKN 1 PASAMAN	SMK	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	10308183	SMKN 1 KINALI	SMK	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	10306097	SMKN 1 TALAMAU	SMK	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	69968546	SMKN 1 KOTO BALINGKA	SMK	Pasaman Barat	836,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836,00	**836**	-	-	-
80	10306135	SMKN 1 SASAK RANAH PASISIE	SMK	Pasaman Barat	58.238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.238,00	**58.238**	-	-	-
81	69820624	SMKN 1 SUNGAI AUR	SMK	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	10307532	SMKN 1 BUKITTINGGI	SMK	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	10307533	SMKN 2 BUKITTINGGI	SMK	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	10304850	SMKN 4 PADANG	SMK	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	10304188	SMKN 7 PADANG	SMK	Kota Padang	7.216.165,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.216.165,00	-	-	-	**7.216.165**
86	10304852	SMKN 8 PADANG	SMK	Kota Padang	296,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296,00	**296**	-	-	-
87	10304848	SMKN 2 PADANG	SMK	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	10303507	SMKN 6 PADANG	SMK	Kota Padang	642,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642,00	-	-	-	**642**
89	10304849	SMKN 3 PADANG	SMK	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	10304853	SMKN 9 PADANG	SMK	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	10304851	SMKN 5 PADANG	SMK	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	10304847	SMKN 1 PADANG	SMK	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	10310780	SMKN 1 SUMATERA BARAT	SMK	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	69734159	SMK PP NEGERI PADANG	SMK	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	10307617	SMKN 10 PADANG	SMK	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	10303607	SMKN 1 PADANG PANJANG	SMK	Kota Padang Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	10303606	SMKN 2 PADANG PANJANG	SMK	Kota Padang Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	10303674	SMKN 2 SAWAHLUNTO	SMK	Kota Sawah Lunto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	10303684	SMKN 1 SAWAHLUNTO	SMK	Kota Sawah Lunto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	10303768	SMKN 1 SOLOK	SMK	Kota Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	10303770	SMKN 2 SOLOK	SMK	Kota Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	10310768	SMKN 3 KOTA SOLOK	SMK	Kota Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	10303912	SMKN 1 PAYAKUMBUH	SMK	Kota Payakumbuh	203,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203,00	**203**	-	-	-
104	10303913	SMKN 2 PAYAKUMBUH	SMK	Kota Payakumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	10303914	SMKN 3 PAYAKUMBUH	SMK	Kota Payakumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	69947085	SMKN 4 PAYAKUMBUH	SMK	Kota Payakumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	10307421	SMKN 2 PARIAMAN	SMK	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	10308547	SMKN 4 PARIAMAN	SMK	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	10307439	SMKN 3 PARIAMAN	SMK	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	10307420	SMKN 1 PARIAMAN	SMK	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	70032804	SMK Kesehatan Negeri Akabiluru	SMK	Lima Puluh Koto	-															
1	10300459	SLBN 1 LUBUK BASUNG	SLB	Agam	684.254,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	684.254,00	**650.000**	-	-	**34.254**
2	10309211	SLBN 1 AMPEK ANGKEK	SLB	**Agam**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	69786957	SLBN 1 LUBUK SIKAPING	SLB	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	10300856	SLBN 1 PANTI	SLB	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	10301305	SLBN 1 HARAU	SLB	lima puluh kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	69948138	SLBN 1 ALAHAN PANJANG	SLB	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	10304199	SLBN 1 KUBUNG	SLB	Solok	33.002,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.002,00	-	-	-	**33.002**
5	10310573	SLBN 1 LINGGO SARI BAGANTI	SLB	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	KODE	NAMA SEKOLAH	Jenjang	KAB/KOTA	SISA SALDO BOS 2021 (31 Desember 2022) AUDITED	KOREKSI SISA SALDO BOS REGULER 2021										SISA SALDO BOS 2021 Setelah Koreksi	Realisasi Silpa 2021			SISA SALDO BOS 2021
						Koreksi Tambah					Koreksi Kurang									
						Kas di bank	Kas di tunai	Pengembalian Temuan/ Lainnya	Kurang Salur	Lainnya	Jasa Giro/bunga bank	Adm bank	Pembulatan	Lebih Salur	Lainnya		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17 = 5+6+7+8+9+10-11-12-13-14-15*	*18*	*19*	*20*	*21 = (17-18-19-20)*
5	10308223	SLBN 1 RANAH PESISIR	SLB	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	10308259	SLBN 1 LENGAYANG	SLB	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	10301850	SLBN 1 PAINAN	SLB	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	10310471	SLBN 1 LIMA KAUM	SLB	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	10302503	SLBN 1 PAGARUYUNG	SLB	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	10311324	SLBN 1 KAMANG BARU	SLB	Sijunjung	248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248,00	-	-	-	248
8	10302887	SLBN 1 MUARO SIJUNJUNG	SLB	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	10310469	SLBN 1 SANGIR	SLB	Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	10306838	SLBN 1 SUNGAI PAGU	SLB	Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	10308107	SLBN 1 PULAU PUNJUNG	SLB	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	10310045	SLBN 1 SUNGAI AUR	SLB	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	10303425	SLBN 1 BUKITTINGGI	SLB	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	10307647	SLBN 1 PADANG	SLB	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	10303548	SLBN 2 PADANG	SLB	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	10303644	SLBN 1 PADANG PANJANG	SLB	Kota Padang Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	10303703	SLBN 1 SAWAHLUNTO	SLB	Kota Sawah Lunto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	10308152	SLBN 2 SAWAHLUNTO	SLB	Kota Sawah Lunto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	10303751	SLBN 1 SOLOK	SLB	Kota Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	10307795	SLBN 1 PAYAKUMBUH	SLB	Kota Payakumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	10310695	SLBN 1 PARIAMAN	SLB	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	10307423	SLBN 2 PARIAMAN	SLB	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL				**56.972.869,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**56.972.869,00**	**5.510.358,00**	**-**	**-**	**51.462.511,00**

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT
REKAPITULASI BELANJA BOS REGULER TAHUN 2024

No	NPSN	Nama Unit	STATUS	JENJANG	Kab / Kota	Silpa 2023	Salur		Total Salur Reguler 2024	REALISASI BOS REGULER 2024			Total belanja BOS Reguler 2024	Total SILPA BOS REGULER 2024 PER 31 DESEMBER 2024
							Tahap I	Tahap II		BELANJA BRG JASA	B.MODAL			
											PERALATAN & MESIN	ASET TETAP LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	11	12	13	14=11+12+13	15=7+10+14
1	10300287	SMAN 1 TANJUNG MUTIARA	NEGERI	SMA	Agam	-	746.250.000,00	746.250.000,00	1.492.500.000,00	1.306.523.000,00	25.321.000,00	160.656.000,00	1.492.500.000,00	-
2	10300292	SMAN 1 LUBUK BASUNG	NEGERI	SMA	Agam	-	751.500.000,00	751.500.000,00	1.503.000.000,00	1.278.859.400,00	22.500.000,00	201.640.600,00	1.503.000.000,00	-
3	10300294	SMAN 2 LUBUK BASUNG	NEGERI	SMA	Agam	-	832.500.000,00	832.500.000,00	1.665.000.000,00	1.208.148.000,00	18.290.000,00	438.562.000,00	1.665.000.000,00	-
4	10300290	SMAN 3 LUBUK BASUNG	NEGERI	SMA	Agam	40.700,00	237.750.000,00	237.709.300,00	475.459.300,00	396.563.378,00	14.196.622,00	64.740.000,00	475.500.000,00	-
5	10300286	SMAN 1 TANJUNG RAYA	NEGERI	SMA	Agam	-	437.250.000,00	437.250.000,00	874.500.000,00	760.292.000,00	35.000.000,00	79.208.000,00	874.500.000,00	-
6	10304887	SMAN AGAM CENDEKIA	NEGERI	SMA	Agam	-	237.750.000,00	237.750.000,00	475.500.000,00	362.268.000,00	17.420.000,00	95.812.000,00	475.500.000,00	-
7	10300301	SMAN 1 MATUR	NEGERI	SMA	Agam	1.195.208,00	316.500.000,00	315.304.792,00	631.804.792,00	469.206.800,00	47.000.000,00	116.793.200,00	633.000.000,00	-
8	10300298	SMAN 1 IV KOTO	NEGERI	SMA	Agam	-	297.750.000,00	297.750.000,00	595.500.000,00	398.462.400,00	49.755.000,00	147.282.600,00	595.500.000,00	-
9	10300270	SMAN 2 IV KOTO	NEGERI	SMA	Agam	-	39.750.000,00	39.750.000,00	79.500.000,00	57.553.000,00	20.025.000,00	1.922.000,00	79.500.000,00	-
10	10300297	SMAN 1 BASO	NEGERI	SMA	Agam	-	504.750.000,00	504.750.000,00	1.009.500.000,00	712.725.400,00	64.529.000,00	232.245.600,00	1.009.500.000,00	-
11	10300269	SMAN 1 TILATANG KAMANG	NEGERI	SMA	Agam	3.055.950,00	510.750.000,00	507.694.050,00	1.018.444.050,00	697.434.000,00	134.830.000,00	187.860.000,00	1.020.124.000,00	1.376.000,00
12	10300271	SMAN 2 TILATANG KAMANG	NEGERI	SMA	Agam	-	195.750.000,00	195.750.000,00	391.500.000,00	250.504.875,00	41.484.925,00	99.510.200,00	391.500.000,00	-
13	10300302	SMAN 1 PALEMBAYAN	NEGERI	SMA	Agam	-	144.000.000,00	144.000.000,00	288.000.000,00	232.040.000,00	40.960.000,00	15.000.000,00	288.000.000,00	-
14	69964939	SMAN 2 PALEMBAYAN	NEGERI	SMA	Agam	-	170.250.000,00	170.250.000,00	340.500.000,00	271.415.000,00	26.700.000,00	42.385.000,00	340.500.000,00	-
15	10300293	SMAN 1 PALUPUH	NEGERI	SMA	Agam	-	190.500.000,00	190.500.000,00	381.000.000,00	244.692.000,00	46.500.000,00	89.808.000,00	381.000.000,00	-
16	10300304	SMAN 1 SUNGAI PUAR	NEGERI	SMA	Agam	-	240.750.000,00	240.750.000,00	481.500.000,00	285.146.500,00	21.435.500,00	174.918.000,00	481.500.000,00	-
17	10304886	SMAN 1 CANDUNG	NEGERI	SMA	Agam	-	153.000.000,00	153.000.000,00	306.000.000,00	271.394.000,00	7.385.000,00	27.221.000,00	306.000.000,00	-
18	10300300	SMAN 1 KAMANG MAGEK	NEGERI	SMA	Agam	-	205.500.000,00	205.500.000,00	411.000.000,00	305.170.600,00	26.597.000,00	79.232.400,00	411.000.000,00	-
19	10300296	SMAN 1 BANUHAMPU	NEGERI	SMA	Agam	10.000,00	600.750.000,00	600.740.000,00	1.201.490.000,00	887.228.600,00	74.940.000,00	238.707.500,00	1.200.876.100,00	623.900,00
20	10300299	SMAN 1 AMPEK ANGKEK	NEGERI	SMA	Agam	-	746.250.000,00	746.250.000,00	1.492.500.000,00	926.312.000,00	221.700.000,00	344.488.000,00	1.492.500.000,00	-
21	10300295	SMAN 1 AMPEK NAGARI	NEGERI	SMA	Agam	-	411.000.000,00	411.000.000,00	822.000.000,00	612.250.600,00	50.130.000,00	159.619.400,00	822.000.000,00	-
22	10300832	SMAN 1 BONJOL	NEGERI	SMA	Pasaman	-	675.000.000,00	675.000.000,00	1.350.000.000,00	977.710.600,00	58.275.000,00	314.014.400,00	1.350.000.000,00	-
23	69964938	SMAN 3 SUMATERA BARAT	NEGERI	SMA	Pasaman	-	209.250.000,00	209.250.000,00	418.500.000,00	335.598.755,00	40.489.000,00	33.032.800,00	409.120.555,00	9.379.445,00
24	10300830	SMAN 1 LUBUK SIKAPING	NEGERI	SMA	Pasaman	844.812,00	772.500.000,00	771.655.188,00	1.544.155.188,00	1.176.205.473,00	33.874.000,00	331.965.200,00	1.542.044.673,00	2.955.327,00
25	10310590	SMAN 2 LUBUK SIKAPING	NEGERI	SMA	Pasaman	18.722,00	519.750.000,00	519.731.278,00	1.039.481.278,00	712.699.729,00	109.953.000,00	176.471.800,00	999.124.529,00	40.375.471,00
26	10300831	SMAN 1 DUA KOTO	NEGERI	SMA	Pasaman	10.728,00	489.000.000,00	488.989.272,00	977.989.272,00	673.177.391,00	93.631.750,00	209.506.000,00	976.315.141,00	1.684.859,00
27	10300829	SMAN 1 PANTI	NEGERI	SMA	Pasaman	1.055.557,00	519.000.000,00	517.944.443,00	1.036.944.443,00	703.097.145,00	95.349.900,00	239.530.600,00	1.037.977.645,00	22.355,00
28	10300827	SMAN 1 TIGO NAGARI	NEGERI	SMA	Pasaman	1,00	553.500.000,00	553.499.999,00	1.106.999.999,00	778.354.016,00	99.696.000,00	214.541.200,00	1.092.591.216,00	14.408.784,00
29	10300828	SMAN 1 RAO	NEGERI	SMA	Pasaman	3.082,00	771.750.000,00	771.746.918,00	1.543.496.918,00	1.241.453.650,00	90.700.350,00	211.346.000,00	1.543.500.000,00	-
30	69757492	SMAN 1 MAPAT TUNGGUL	NEGERI	SMA	Pasaman	-	105.750.000,00	105.750.000,00	211.500.000,00	161.886.429,00	12.600.000,00	36.874.500,00	211.360.929,00	139.071,00
31	69774642	SMAN MAPAT TUNGGUL SELATAN	NEGERI	SMA	Pasaman	63.996,00	101.250.000,00	101.186.004,00	202.436.004,00	139.606.000,00	30.250.000,00	32.574.000,00	202.430.000,00	70.000,00
32	10304194	SMAN 1 PADANG GELUGUR	NEGERI	SMA	Pasaman	-	768.000.000,00	768.000.000,00	1.536.000.000,00	1.234.856.100,00	45.532.000,00	255.611.900,00	1.536.000.000,00	-
33	69774643	SMAN 1 RAO UTARA	NEGERI	SMA	Pasaman	-	162.000.000,00	162.000.000,00	324.000.000,00	255.396.500,00	30.500.000,00	38.103.500,00	324.000.000,00	-
34	10304429	SMAN 1 KEC. PAYAKUMBUH	NEGERI	SMA	lima puluh kota	645.357,00	609.825.000,00	609.179.643,00	1.219.004.643,00	1.084.691.856,00	19.137.000,00	110.775.000,00	1.214.603.856,00	5.046.144,00
35	10301186	SMAN 1 HARAU	NEGERI	SMA	lima puluh kota	-	974.855.000,00	974.855.000,00	1.949.710.000,00	1.521.341.650,00	83.861.350,00	344.507.000,00	1.949.710.000,00	-

No	NPSN	Nama Unit	STATUS	JENJANG	Kab / Kota	Silpa 2023	Salur		Total Salur Reguler 2024	REALISASI BOS REGULER 2024			Total belanja BOS Reguler 2024	Total SILPA BOS REGULER 2024 PER 31 DESEMBER 2024
							Tahap I	Tahap II		BELANJA BRG JASA	B.MODAL			
											PERALATAN & MESIN	ASET TETAP LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	11	12	13	14=11+12+13	15=7+10+14
36	69786300	SMAN 2 HARAU	NEGERI	SMA	lima puluh kota	75.500,00	204.140.000,00	204.064.500,00	408.204.500,00	286.157.600,00	42.000.000,00	80.122.400,00	408.280.000,00	-
37	10301187	SMAN 1 GUGUAK	NEGERI	SMA	lima puluh kota	-	753.415.000,00	753.415.000,00	1.506.830.000,00	1.164.757.055,00	78.044.245,00	264.028.700,00	1.506.830.000,00	-
38	10301181	SMAN 1 SULIKI	NEGERI	SMA	lima puluh kota	-	789.745.000,00	789.745.000,00	1.579.490.000,00	1.248.266.000,00	114.877.000,00	216.347.000,00	1.579.490.000,00	-
39	69786301	SMAN 1 KECAMATAN GUNUANG OMEH	NEGERI	SMA	lima puluh kota	13.000,00	153.105.000,00	153.092.000,00	306.197.000,00	247.599.000,00	7.064.500,00	51.546.500,00	306.210.000,00	-
40	69960622	SMAN 2 Kec. Kapur IX	NEGERI	SMA	lima puluh kota	-	206.735.000,00	206.735.000,00	413.470.000,00	358.543.503,00	15.500.000,00	39.337.000,00	413.380.503,00	89.497,00
41	10301185	SMAN 1 KAPUR IX	NEGERI	SMA	lima puluh kota	60.075,00	512.080.000,00	512.019.925,00	1.024.099.925,00	761.649.000,00	44.950.000,00	217.561.000,00	1.024.160.000,00	-
42	10301183	SMAN 1 KEC PANGKALAN KOTO BARU	NEGERI	SMA	lima puluh kota	205.053,00	389.250.000,00	389.044.947,00	778.294.947,00	605.913.750,00	73.150.000,00	99.416.000,00	778.479.750,00	20.250,00
43	69888818	SMAN 2 KEC. PANGKALAN KOTO BARU	NEGERI	SMA	lima puluh kota	-	99.475.000,00	99.475.000,00	198.950.000,00	131.244.000,00	30.900.000,00	36.806.000,00	198.950.000,00	-
44	69786302	SMAN 1 BUKIK BARISAN	NEGERI	SMA	lima puluh kota	-	52.765.000,00	52.765.000,00	105.530.000,00	101.591.000,00	-	3.939.000,00	105.530.000,00	-
45	69946176	SMAN 2 KEC. BUKIK BARISAN	NEGERI	SMA	lima puluh kota	-	127.155.000,00	127.155.000,00	254.310.000,00	143.745.000,00	42.275.000,00	68.290.000,00	254.310.000,00	-
46	69946102	SMAN 1 Kec. Mungka	NEGERI	SMA	lima puluh kota	-	118.505.000,00	118.505.000,00	237.010.000,00	189.803.000,00	8.940.000,00	38.266.100,00	237.009.100,00	900,00
47	10301188	SMAN 1 AKABILURU	NEGERI	SMA	lima puluh kota	-	367.625.000,00	367.625.000,00	735.250.000,00	549.486.600,00	90.040.400,00	95.723.000,00	735.250.000,00	-
48	10301182	SMAN 1 SITUJUAH LIMO NAGARI	NEGERI	SMA	lima puluh kota	-	493.915.000,00	493.915.000,00	987.830.000,00	788.229.000,00	48.546.000,00	151.055.000,00	987.830.000,00	-
49	10301184	SMAN 1 LAREH SAGO HALABAN	NEGERI	SMA	lima puluh kota	-	819.155.000,00	819.155.000,00	1.638.310.000,00	1.143.879.700,00	96.242.000,00	398.188.300,00	1.638.310.000,00	-
50	10301576	SMAN 1 PANTAI CERMIN	NEGERI	SMA	Solok	430.595,00	515.160.000,00	514.729.405,00	1.029.889.405,00	821.688.378,00	39.400.000,00	166.513.900,00	1.027.602.278,00	2.717.722,00
51	10301574	SMAN 1 LEMBAH GUMANTI	NEGERI	SMA	Solok	8.345.617,00	532.650.000,00	502.998.383,00	1.035.648.383,00	910.023.400,00	27.322.900,00	105.074.200,00	1.042.420.500,00	1.573.500,00
52	10308150	SMAN 1 PAYUNG SEKAKI	NEGERI	SMA	Solok	-	177.285.000,00	177.285.000,00	354.570.000,00	289.851.942,00	29.800.000,00	32.752.000,00	352.403.942,00	2.166.058,00
53	10301575	SMAN 1 LEMBANG JAYA	NEGERI	SMA	Solok	13.063,00	183.645.000,00	183.631.937,00	367.276.937,00	287.809.644,00	49.946.670,00	29.250.500,00	367.006.814,00	283.186,00
54	10308439	SMAN 2 LEMBANG JAYA	NEGERI	SMA	Solok	5.320.350,00	184.440.000,00	179.119.650,00	363.559.650,00	308.780.940,00	21.350.000,00	34.865.000,00	364.995.940,00	3.884.060,00
55	69862591	SMAN 2 SUMATERA BARAT	NEGERI	SMA	Solok	103.785,00	334.695.000,00	334.591.215,00	669.286.215,00	526.011.000,00	34.911.000,00	106.908.000,00	667.830.000,00	1.560.000,00
56	10301592	SMAN 1 GUNUNG TALANG	NEGERI	SMA	Solok	968.099,00	1.000.905.000,00	999.936.901,00	2.000.841.901,00	1.595.832.990,00	142.375.000,00	248.318.400,00	1.986.526.390,00	15.283.610,00
57	10301579	SMAN 2 GUNUNG TALANG	NEGERI	SMA	Solok	29.720,00	349.800.000,00	349.770.280,00	699.570.280,00	565.076.400,00	33.382.000,00	100.821.600,00	699.280.000,00	320.000,00
58	10301590	SMAN 1 BUKIT SUNDI	NEGERI	SMA	Solok	912.907,00	383.985.000,00	383.072.093,00	767.057.093,00	665.713.337,00	73.280.000,00	-	738.993.337,00	28.976.663,00
59	10301573	SMAN 1 KUBUNG	NEGERI	SMA	Solok	-	803.745.000,00	803.745.000,00	1.607.490.000,00	1.212.337.306,00	204.190.494,00	190.962.200,00	1.607.490.000,00	-
60	10301582	SMAN 1 IX KT SUNGAI LASI	NEGERI	SMA	Solok	-	193.980.000,00	193.980.000,00	387.960.000,00	311.825.800,00	20.000.000,00	54.404.100,00	386.229.900,00	1.730.100,00
61	10301577	SMAN 1 X KOTO DIATAS	NEGERI	SMA	Solok	1.330.795,00	176.490.000,00	175.159.205,00	351.649.205,00	272.627.550,00	30.791.600,00	35.969.400,00	339.388.550,00	13.591.450,00
62	10301578	SMAN 1 X KT SINGKARAK	NEGERI	SMA	Solok	13.000,00	487.335.000,00	487.322.000,00	974.657.000,00	759.902.219,00	84.797.110,00	119.177.100,00	963.876.429,00	10.793.571,00
63	10301580	SMAN 2 X KT SINGKARAK	NEGERI	SMA	Solok	-	34.980.000,00	34.980.000,00	69.960.000,00	49.211.237,00	20.000.000,00	-	69.211.237,00	748.763,00
64	10301581	SMAN 1 JUNJUNG SIRIH	NEGERI	SMA	Solok	30.968.449,00	398.295.000,00	367.326.551,00	765.621.551,00	662.078.232,00	68.087.200,00	39.643.100,00	769.808.532,00	26.781.468,00
65	10301583	SMAN 1 HILIRAN GUMANTI	NEGERI	SMA	Solok	960.311,00	182.850.000,00	181.889.689,00	364.739.689,00	307.393.400,00	22.550.000,00	35.756.600,00	365.700.000,00	-
66	10310636	SMAN 2 HILIRAN GUMANTI	NEGERI	SMA	Solok	244.112,00	72.345.000,00	72.100.888,00	144.445.888,00	100.940.812,00	30.518.200,00	13.080.000,00	144.539.012,00	150.988,00
67	10310738	SMAN 1 TIGO LURAH	NEGERI	SMA	Solok	-	64.395.000,00	64.395.000,00	128.790.000,00	95.274.200,00	27.000.000,00	6.515.800,00	128.790.000,00	-
68	10301591	SMAN 1 DANAU KEMBAR	NEGERI	SMA	Solok	1.746.221,00	115.275.000,00	113.528.779,00	228.803.779,00	182.007.646,00	21.000.000,00	26.350.000,00	229.357.646,00	1.192.354,00
69	10301791	SMAN 1 BATANG ANAI	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	-	744.750.000,00	744.750.000,00	1.489.500.000,00	1.049.876.993,00	145.721.507,00	293.901.500,00	1.489.500.000,00	-
70	69826561	SMAN 2 Batang Anai	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	-	530.250.000,00	530.250.000,00	1.060.500.000,00	712.500.400,00	167.643.000,00	180.356.600,00	1.060.500.000,00	-
71	10301790	SMAN 1 LUBUK ALUNG	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	-	740.250.000,00	740.250.000,00	1.480.500.000,00	1.094.292.450,00	145.746.150,00	240.461.400,00	1.480.500.000,00	-
72	69823281	SMAN 2 Lubuk Alung	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	-	186.750.000,00	186.750.000,00	373.500.000,00	267.272.000,00	27.040.000,00	79.188.000,00	373.500.000,00	-

No	NPSN	Nama Unit	STATUS	JENJANG	Kab / Kota	Silpa 2023	Salur		Total Salur Reguler 2024	REALISASI BOS REGULER 2024			Total belanja BOS Reguler 2024	Total SILPA BOS REGULER 2024 PER 31 DESEMBER 2024
							Tahap I	Tahap II		BELANJA BRG JASA	B.MODAL			
											PERALATAN & MESIN	ASET TETAP LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	11	12	13	14=11+12+13	15=7+10+14
73	10305548	SMAN 1 ULAKAN TAPAKIS	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	-	441.000.000,00	441.000.000,00	882.000.000,00	649.806.400,00	119.069.000,00	113.124.600,00	882.000.000,00	-
74	10305547	SMAN 1 NAN SABARIS	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	-	688.500.000,00	688.500.000,00	1.377.000.000,00	963.689.600,00	127.487.000,00	285.823.400,00	1.377.000.000,00	-
75	10305549	SMAN 1 2X11 ENAM LINGKUNG	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	-	537.750.000,00	537.750.000,00	1.075.500.000,00	865.231.000,00	46.574.000,00	163.695.000,00	1.075.500.000,00	-
76	10305569	SMAN 1 VII KOTO SUNGAI SARIK	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	5.440,00	479.250.000,00	479.244.560,00	958.494.560,00	670.168.200,00	56.722.000,00	231.599.800,00	958.490.000,00	10.000,00
77	69822703	SMAN 2 VII KOTO SUNGAI SARIK	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	1.169.077,00	144.000.000,00	142.830.923,00	286.830.923,00	222.649.600,00	17.000.000,00	48.240.000,00	287.889.600,00	110.400,00
78	10305566	SMAN 1 V KOTO KAMPUNG DALAM	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	-	572.250.000,00	572.250.000,00	1.144.500.000,00	865.579.000,00	3.411.000,00	275.510.000,00	1.144.500.000,00	-
79	10305565	SMAN 1 SUNGAI LIMAU	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	-	486.750.000,00	486.750.000,00	973.500.000,00	652.479.862,00	91.559.108,00	229.376.030,00	973.415.000,00	85.000,00
80	10305570	SMAN 2 SUNGAI LIMAU	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	2.000,00	491.250.000,00	491.248.000,00	982.498.000,00	682.377.000,00	29.424.000,00	270.579.000,00	982.380.000,00	120.000,00
81	10305564	SMAN 1 SUNGAI GERINGGING	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	-	750.750.000,00	750.750.000,00	1.501.500.000,00	1.007.965.000,00	106.770.000,00	386.765.000,00	1.501.500.000,00	-
82	10305562	SMAN 1 IV KOTO A MALINTANG	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	-	153.750.000,00	153.750.000,00	307.500.000,00	240.850.000,00	20.000.000,00	46.650.000,00	307.500.000,00	-
83	69829357	SMAN 1 BATANG GASAN	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	-	123.750.000,00	123.750.000,00	247.500.000,00	175.761.000,00	10.689.000,00	61.050.000,00	247.500.000,00	-
84	10305568	SMAN 1 V KOTO TIMUR	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	205.759,00	267.750.000,00	267.544.241,00	535.294.241,00	420.596.085,00	9.382.215,00	105.521.700,00	535.500.000,00	-
85	69946914	SMAN 1 PATAMUAN	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	-	132.750.000,00	132.750.000,00	265.500.000,00	192.000.901,00	12.245.930,00	61.253.169,00	265.500.000,00	-
86	10305563	SMAN 1 PADANG SAGO	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	1.663.113,00	346.500.000,00	344.836.887,00	691.336.887,00	443.540.700,00	47.405.000,00	202.054.300,00	693.000.000,00	-
87	10305560	SMAN 1 2X11 ENAM KAYU TANAM	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	-	321.750.000,00	321.750.000,00	643.500.000,00	363.784.876,00	73.255.124,00	206.460.000,00	643.500.000,00	-
88	10305561	SMAN 1 ENAM LINGKUNG	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	-	680.250.000,00	680.250.000,00	1.360.500.000,00	748.446.700,00	231.025.870,00	381.027.430,00	1.360.500.000,00	-
89	10302013	SMAN 1 LUNANG	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	428.250.000,00	428.250.000,00	856.500.000,00	712.996.816,00	49.765.284,00	93.737.900,00	856.500.000,00	-
90	10302022	SMAN 1 BASA AMPEK BALAI	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	768.000.000,00	768.000.000,00	1.536.000.000,00	1.119.673.000,00	83.489.000,00	332.838.000,00	1.536.000.000,00	-
91	69987102	SMAN 2 BASA AMPEK BALAI	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	104.250.000,00	104.250.000,00	208.500.000,00	170.677.000,00	3.700.000,00	34.123.000,00	208.500.000,00	-
92	10302015	SMAN 1 PANCUNG SOAL	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	45.968,00	740.250.000,00	740.204.032,00	1.480.454.032,00	1.237.822.000,00	66.762.000,00	175.916.000,00	1.480.500.000,00	-
93	10302011	SMAN 1 LINGGO SARI BAGANTI	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	25.044,00	760.500.000,00	760.487.478,00	1.520.987.478,00	1.220.272.670,00	74.043.793,00	226.663.000,00	1.520.979.463,00	33.059,00
94	69987076	SMAN 2 Linggo Sari Baganti	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	78.000.000,00	78.000.000,00	156.000.000,00	150.980.000,00	-	5.020.000,00	156.000.000,00	-
95	10302016	SMAN 1 RANAH PESISIR	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	702.000.000,00	702.000.000,00	1.404.000.000,00	1.128.609.000,00	49.280.000,00	226.111.000,00	1.404.000.000,00	-
96	10308260	SMAN 2 RANAH PESISIR	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	260.000,00	155.250.000,00	154.990.000,00	310.240.000,00	247.721.000,00	3.000.000,00	59.779.000,00	310.500.000,00	-
97	10302010	SMAN 1 LENGAYANG	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	600.750.000,00	600.750.000,00	1.201.500.000,00	964.473.250,00	26.556.750,00	210.470.000,00	1.201.500.000,00	-
98	10302019	SMAN 2 LENGAYANG	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	1.500.000,00	417.000.000,00	415.500.000,00	832.500.000,00	594.512.000,00	94.970.000,00	144.518.000,00	834.000.000,00	-
99	10307602	SMAN 3 LENGAYANG	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	408.000.000,00	408.000.000,00	816.000.000,00	562.916.900,00	68.300.000,00	184.783.100,00	816.000.000,00	-
100	10302017	SMAN 1 SUTERA	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	859.500.000,00	859.500.000,00	1.719.000.000,00	1.329.290.000,00	41.716.000,00	347.994.000,00	1.719.000.000,00	-
101	10310901	SMAN 2 SUTERA	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	263.250.000,00	263.250.000,00	526.500.000,00	406.279.500,00	34.635.000,00	83.489.000,00	524.403.500,00	2.096.500,00
102	10302021	SMAN 1 BATANG KAPAS	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	744.750.000,00	744.750.000,00	1.489.500.000,00	1.206.384.200,00	127.174.500,00	155.941.300,00	1.489.500.000,00	-
103	10302018	SMAN 2 BATANG KAPAS	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	317.250.000,00	317.250.000,00	634.500.000,00	402.576.200,00	111.210.000,00	120.713.800,00	634.500.000,00	-
104	10302014	SMAN 1 PAINAN	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	590.250.000,00	590.250.000,00	1.180.500.000,00	788.359.911,00	107.882.089,00	284.258.000,00	1.180.500.000,00	-

No	NPSN	Nama Unit	STATUS	JENJANG	Kab / Kota	Silpa 2023	Salur		Total Salur Reguler 2024	REALISASI BOS REGULER 2024			Total belanja BOS Reguler 2024	Total SILPA BOS REGULER 2024 PER 31 DESEMBER 2024
							Tahap I	Tahap II		BELANJA BRG JASA	B.MODAL			
											PERALATAN & MESIN	ASET TETAP LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	11	12	13	14=11+12+13	15=7+10+14
105	10302020	SMAN 2 PAINAN	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	942.750.000,00	942.750.000,00	1.885.500.000,00	1.298.673.600,00	146.894.800,00	439.931.600,00	1.885.500.000,00	-
106	10310795	SMAN 3 PAINAN	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	246.750.000,00	246.750.000,00	493.500.000,00	268.290.000,00	21.678.000,00	203.532.000,00	493.500.000,00	-
107	10302009	SMAN 1 BAYANG	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	433.500.000,00	433.500.000,00	867.000.000,00	636.672.000,00	64.000.000,00	166.328.000,00	867.000.000,00	-
108	10308089	SMAN 2 BAYANG	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	648.000.000,00	648.000.000,00	1.296.000.000,00	981.850.412,00	48.596.488,00	265.553.100,00	1.296.000.000,00	-
109	10308163	SMAN 1 KOTO XI TARUSAN	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	768.000.000,00	768.000.000,00	1.536.000.000,00	1.112.856.495,00	118.515.505,00	304.628.000,00	1.536.000.000,00	-
110	10307604	SMAN 2 KOTO XI TARUSAN	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	1.900.000,00	546.000.000,00	544.100.000,00	1.090.100.000,00	826.379.500,00	92.940.500,00	170.780.000,00	1.090.100.000,00	1.900.000,00
111	10302034	SMAN 1 NAGARI IV BAYANG UTARA	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	132.000.000,00	132.000.000,00	264.000.000,00	200.772.200,00	20.819.900,00	42.407.900,00	264.000.000,00	-
112	10308231	SMAN 1 SILAUT	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	257.250.000,00	257.250.000,00	514.500.000,00	446.188.000,00	20.712.000,00	47.600.000,00	514.500.000,00	-
113	10308265	SMAN 1 AIR PURA	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	491,00	407.250.000,00	407.249.509,00	814.499.509,00	665.507.200,00	7.326.000,00	141.666.800,00	814.500.000,00	-
114	10302400	SMAN 1 X KOTO	NEGERI	SMA	Tanah Datar	20.368.390,00	385.500.000,00	365.131.610,00	750.631.610,00	519.542.425,00	96.000.000,00	155.392.000,00	770.934.425,00	65.575,00
115	10302475	SMAN 1 BATIPUH	NEGERI	SMA	Tanah Datar	17.305.778,00	634.500.000,00	617.194.222,00	1.251.694.222,00	1.095.212.001,00	45.467.500,00	127.620.400,00	1.268.299.901,00	700.099,00
116	10302436	SMAN 1 PARIANGAN	NEGERI	SMA	Tanah Datar	-	441.000.000,00	441.000.000,00	882.000.000,00	726.624.350,00	24.500.000,00	130.755.600,00	881.879.950,00	120.050,00
117	10302382	SMAN 1 RAMBATAN	NEGERI	SMA	Tanah Datar	-	545.250.000,00	545.250.000,00	1.090.500.000,00	805.114.200,00	100.300.000,00	185.085.800,00	1.090.500.000,00	-
118	10302402	SMAN 2 RAMBATAN	NEGERI	SMA	Tanah Datar	68.000,00	153.750.000,00	153.682.000,00	307.432.000,00	274.510.999,00	10.350.001,00	21.166.000,00	306.027.000,00	1.473.000,00
119	10302476	SMAN 1 BATU SANGKAR	NEGERI	SMA	Tanah Datar	295.462,00	785.250.000,00	784.954.538,00	1.570.204.538,00	968.344.063,00	81.100.000,00	520.920.400,00	1.570.364.463,00	135.537,00
120	10307799	SMAN 3 BATU SANGKAR	NEGERI	SMA	Tanah Datar	-	337.500.000,00	337.500.000,00	675.000.000,00	544.490.700,00	20.950.000,00	100.799.300,00	666.240.000,00	8.760.000,00
121	10302401	SMAN 2 BATU SANGKAR	NEGERI	SMA	Tanah Datar	13.100.223,00	555.000.000,00	541.899.777,00	1.096.899.777,00	863.732.000,00	72.020.000,00	173.898.000,00	1.109.650.000,00	350.000,00
122	10302492	SMAN 1 PADANG GANTING	NEGERI	SMA	Tanah Datar	20.271,00	318.750.000,00	318.729.729,00	637.479.729,00	476.309.416,00	43.165.000,00	117.923.200,00	637.397.616,00	102.384,00
123	10302404	SMAN 2 LINTAU BUO	NEGERI	SMA	Tanah Datar	-	412.500.000,00	412.500.000,00	825.000.000,00	666.945.000,00	21.676.000,00	136.304.000,00	824.925.000,00	75.000,00
124	10302399	SMAN 1 SUNGAYANG	NEGERI	SMA	Tanah Datar	475.000,00	505.500.000,00	505.025.000,00	1.010.525.000,00	664.873.000,00	167.724.000,00	178.403.000,00	1.011.000.000,00	-
125	10302398	SMAN 1 SUNGAI TARAB	NEGERI	SMA	Tanah Datar	210,00	591.000.000,00	590.999.790,00	1.181.999.790,00	863.053.000,00	84.050.000,00	234.897.000,00	1.182.000.000,00	-
126	10302403	SMAN 2 SUNGAI TARAB	NEGERI	SMA	Tanah Datar	-	154.500.000,00	154.500.000,00	309.000.000,00	226.912.000,00	52.050.000,00	30.038.000,00	309.000.000,00	-
127	10302397	SMAN 1 SALIMPAUNG	NEGERI	SMA	Tanah Datar	-	390.750.000,00	390.750.000,00	781.500.000,00	534.716.438,00	106.256.250,00	140.527.200,00	781.499.888,00	112,00
128	10302477	SMAN 1 LINTAU BUO	NEGERI	SMA	Tanah Datar	-	714.750.000,00	714.750.000,00	1.429.500.000,00	1.079.489.600,00	63.843.000,00	286.167.400,00	1.429.500.000,00	-
129	10307884	SMAN 10 SIJUNJUNG	NEGERI	SMA	Sijunjung	2.075.279,00	406.245.000,00	404.169.721,00	810.414.721,00	464.971.576,00	144.809.150,00	156.583.600,00	766.364.326,00	46.125.674,00
130	10308127	SMAN 11 SIJUNJUNG	NEGERI	SMA	Sijunjung	46.083,00	130.380.000,00	130.333.917,00	260.713.917,00	213.156.672,00	7.992.000,00	39.427.000,00	260.575.672,00	184.328,00
131	69946653	SMAN 13 SIJUNJUNG	NEGERI	SMA	Sijunjung	240.000,00	101.760.000,00	101.520.000,00	203.280.000,00	128.942.000,00	15.100.000,00	59.478.000,00	203.520.000,00	-
132	10302804	SMAN 6 SIJUNJUNG	NEGERI	SMA	Sijunjung	-	246.450.000,00	246.450.000,00	492.900.000,00	444.446.500,00	3.850.000,00	44.603.500,00	492.900.000,00	-
133	10302821	SMAN 3 SIJUNJUNG	NEGERI	SMA	Sijunjung	-	227.370.000,00	227.370.000,00	454.740.000,00	375.899.000,00	22.585.000,00	56.256.000,00	454.740.000,00	-
134	10302823	SMAN 1 SIJUNJUNG	NEGERI	SMA	Sijunjung	26.536.945,00	638.385.000,00	611.848.055,00	1.250.233.055,00	853.209.830,00	169.327.200,00	228.929.800,00	1.251.466.830,00	25.303.170,00
135	10302822	SMAN 2 SIJUNJUNG	NEGERI	SMA	Sijunjung	5.142.664,00	595.455.000,00	590.312.336,00	1.185.767.336,00	766.373.000,00	247.215.000,00	177.196.000,00	1.190.784.000,00	126.000,00
136	10307989	SMAN 9 SIJUNJUNG	NEGERI	SMA	Sijunjung	3.711.964,00	434.865.000,00	431.153.036,00	866.018.036,00	684.514.000,00	41.728.000,00	127.123.000,00	853.365.000,00	16.365.000,00
137	10302806	SMAN 4 SIJUNJUNG	NEGERI	SMA	Sijunjung	337,00	187.620.000,00	187.619.663,00	375.239.663,00	267.898.985,00	72.970.700,00	22.818.000,00	363.687.685,00	11.552.315,00
138	10302788	SMAN 7 SIJUNJUNG	NEGERI	SMA	Sijunjung	59.319.378,00	439.635.000,00	380.315.622,00	819.950.622,00	583.212.035,00	140.823.850,00	145.302.100,00	869.337.985,00	9.932.015,00
139	10302805	SMAN 5 SIJUNJUNG	NEGERI	SMA	Sijunjung	1.849.676,00	364.110.000,00	362.260.324,00	726.370.324,00	636.375.363,00	52.850.000,00	25.616.000,00	714.841.363,00	13.378.637,00
140	10302787	SMAN 8 SIJUNJUNG	NEGERI	SMA	Sijunjung	-	120.840.000,00	120.840.000,00	241.680.000,00	180.835.750,00	25.394.250,00	35.000.000,00	241.230.000,00	450.000,00
141	10308287	SMAN 12 SIJUNJUNG	NEGERI	SMA	Sijunjung	1.118.546,00	295.740.000,00	294.621.454,00	590.361.454,00	407.214.600,00	78.803.100,00	101.074.500,00	587.092.200,00	4.387.800,00
142	69903388	SMAN 1 PAGAI UTARA	NEGERI	SMA	Kepulauan Mentawai	-	201.960.000,00	201.960.000,00	403.920.000,00	341.823.000,00	9.322.000,00	52.775.000,00	403.920.000,00	-
143	10302979	SMAN 1 SIPORA	NEGERI	SMA	Kepulauan Mentawai	-	421.260.000,00	421.260.000,00	842.520.000,00	580.935.000,00	71.585.000,00	190.000.000,00	842.520.000,00	-
144	10302978	SMAN 1 SIBERUT SELATAN	NEGERI	SMA	Kepulauan Mentawai	-	775.200.000,00	775.200.000,00	1.550.400.000,00	1.033.305.000,00	137.450.000,00	379.645.000,00	1.550.400.000,00	-

No	NPSN	Nama Unit	STATUS	JENJANG	Kab / Kota	Silpa 2023	Salur		Total Salur Reguler 2024	REALISASI BOS REGULER 2024			Total belanja BOS Reguler 2024	Total SILPA BOS REGULER 2024 PER 31 DESEMBER 2024
							Tahap I	Tahap II		BELANJA BRG JASA	B.MODAL			
											PERALATAN & MESIN	ASET TETAP LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	11	12	13	14=11+12+13	15=7+10+14
145	10302982	SMAN 1 SIBERUT UTARA	NEGERI	SMA	Kepulauan Mentawai	-	465.120.000,00	465.120.000,00	930.240.000,00	532.488.000,00	124.635.000,00	273.117.000,00	930.240.000,00	-
146	69917690	SMAN 1 SIBERUT BARAT	NEGERI	SMA	Kepulauan Mentawai	-	174.420.000,00	174.420.000,00	348.840.000,00	247.640.000,00	55.700.000,00	45.500.000,00	348.840.000,00	-
147	69809505	SMAN 1 SIBERUT BARAT DAYA	NEGERI	SMA	Kepulauan Mentawai	-	159.120.000,00	159.120.000,00	318.240.000,00	199.060.000,00	26.800.000,00	92.380.000,00	318.240.000,00	-
148	10310733	SMAN 1 SIBERUT TENGAH	NEGERI	SMA	Kepulauan Mentawai	1.715.500,00	205.020.000,00	203.304.500,00	408.324.500,00	314.192.000,00	60.570.000,00	35.278.000,00	410.040.000,00	-
149	10302980	SMAN 2 SIPORA	NEGERI	SMA	Kepulauan Mentawai	-	635.460.000,00	635.460.000,00	1.270.920.000,00	1.066.653.000,00	19.835.000,00	184.432.000,00	1.270.920.000,00	-
150	69809506	SMAN 2 SIKAKAP	NEGERI	SMA	Kepulauan Mentawai	-	183.600.000,00	183.600.000,00	367.200.000,00	316.331.700,00	29.758.300,00	21.110.000,00	367.200.000,00	-
151	10302981	SMAN 1 PAGAI UTARA SELATAN	NEGERI	SMA	Kepulauan Mentawai	-	622.200.000,00	622.200.000,00	1.244.400.000,00	896.904.700,00	140.633.300,00	206.862.000,00	1.244.400.000,00	-
152	69903167	SMAN 1 PAGAI SELATAN	NEGERI	SMA	Kepulauan Mentawai	-	220.320.000,00	220.320.000,00	440.640.000,00	338.933.000,00	36.500.000,00	65.207.000,00	440.640.000,00	-
153	69946645	SMAN 10 SOLOK SELATAN	NEGERI	SMA	Solok Selatan	199,00	35.775.000,00	35.774.801,00	71.549.801,00	68.856.500,00	-	2.693.500,00	71.550.000,00	-
154	10306748	SMAN 3 SOLOK SELATAN	NEGERI	SMA	Solok Selatan	11.264.118,00	724.245.000,00	712.980.882,00	1.437.225.882,00	1.327.793.697,00	61.450.000,00	55.453.800,00	1.444.697.497,00	3.792.503,00
155	10303376	SMAN 6 SOLOK SELATAN	NEGERI	SMA	Solok Selatan	10.430.231,00	530.265.000,00	519.834.769,00	1.050.099.769,00	822.891.508,00	81.134.892,00	156.503.600,00	1.060.530.000,00	-
156	10303367	SMAN 1 SOLOK SELATAN	NEGERI	SMA	Solok Selatan	1.142.973,00	705.960.000,00	704.817.027,00	1.410.777.027,00	1.175.110.320,00	97.982.500,00	138.810.000,00	1.411.902.820,00	17.180,00
157	10303377	SMAN 4 SOLOK SELATAN	NEGERI	SMA	Solok Selatan	245,00	241.680.000,00	241.679.755,00	483.359.755,00	447.628.706,00	-	35.730.800,00	483.359.506,00	494,00
158	10303364	SMAN 5 SOLOK SELATAN	NEGERI	SMA	Solok Selatan	652,00	510.390.000,00	510.389.348,00	1.020.779.348,00	863.450.938,00	59.276.350,00	98.052.300,00	1.020.779.588,00	412,00
159	10303366	SMAN 2 SOLOK SELATAN	NEGERI	SMA	Solok Selatan	-	313.230.000,00	313.230.000,00	626.460.000,00	526.352.000,00	50.823.000,00	49.285.000,00	626.460.000,00	-
160	10310873	SMAN 08 SOLOK SELATAN	NEGERI	SMA	Solok Selatan	-	47.700.000,00	47.700.000,00	95.400.000,00	84.445.000,00	-	10.955.000,00	95.400.000,00	-
161	10307562	SMAN 7 SOLOK SELATAN	NEGERI	SMA	Solok Selatan	-	232.935.000,00	232.935.000,00	465.870.000,00	380.777.002,00	53.749.998,00	31.343.000,00	465.870.000,00	-
162	69786567	SMAN 9 SOLOK SELATAN	NEGERI	SMA	Solok Selatan	501.000,00	33.390.000,00	32.889.000,00	66.279.000,00	63.802.862,00	1.500.000,00	1.477.138,00	66.780.000,00	-
163	69946860	SMAN 11 SOLOK SELATAN	NEGERI	SMA	Solok Selatan	-	88.245.000,00	88.245.000,00	176.490.000,00	123.783.500,00	34.092.000,00	18.614.500,00	176.490.000,00	-
164	10303216	SMAN 1 SUNGAI RUMBAI	NEGERI	SMA	Dharmasraya	-	447.000.000,00	447.000.000,00	894.000.000,00	598.532.000,00	188.421.000,00	107.047.000,00	894.000.000,00	-
165	69953275	SMAN 2 SUNGAI RUMBAI	NEGERI	SMA	Dharmasraya	-	63.000.000,00	63.000.000,00	126.000.000,00	95.507.400,00	20.399.000,00	10.093.600,00	126.000.000,00	-
166	69853525	SMAN UNGGUL DHARMASRAYA	NEGERI	SMA	Dharmasraya	-	177.000.000,00	177.000.000,00	354.000.000,00	223.394.002,00	72.974.998,00	57.631.000,00	354.000.000,00	-
167	10303218	SMAN 1 KOTO BARU	NEGERI	SMA	Dharmasraya	415.880,00	501.750.000,00	501.334.120,00	1.003.084.120,00	838.448.000,00	21.600.000,00	143.432.000,00	1.003.480.000,00	20.000,00
168	10304875	SMAN 2 KOTO BARU	NEGERI	SMA	Dharmasraya	-	275.250.000,00	275.250.000,00	550.500.000,00	363.689.000,00	34.892.000,00	151.919.000,00	550.500.000,00	-
169	10303219	SMAN 1 SITIUNG	NEGERI	SMA	Dharmasraya	-	688.500.000,00	688.500.000,00	1.377.000.000,00	1.083.745.150,00	75.589.000,00	217.665.850,00	1.377.000.000,00	-
170	69986157	SMAN 2 SITIUNG	NEGERI	SMA	Dharmasraya	-	25.500.000,00	25.500.000,00	51.000.000,00	44.795.200,00	-	6.204.800,00	51.000.000,00	-
171	10303217	SMAN 1 PULAU PUNJUNG	NEGERI	SMA	Dharmasraya	-	534.750.000,00	534.750.000,00	1.069.500.000,00	867.575.000,00	101.305.000,00	100.620.000,00	1.069.500.000,00	-
172	69986156	SMAN 1 SIKABAU	NEGERI	SMA	Dharmasraya	-	82.500.000,00	82.500.000,00	165.000.000,00	106.663.000,00	23.280.000,00	35.057.000,00	165.000.000,00	-
173	10304874	SMAN 2 PULAU PUNJUNG	NEGERI	SMA	Dharmasraya	-	501.000.000,00	501.000.000,00	1.002.000.000,00	740.102.900,00	85.840.100,00	176.057.000,00	1.002.000.000,00	-
174	69774851	SMAN 1 IX Koto	NEGERI	SMA	Dharmasraya	-	122.250.000,00	122.250.000,00	244.500.000,00	176.095.800,00	33.915.200,00	34.489.000,00	244.500.000,00	-
175	10304873	SMAN 1 TIMPEH	NEGERI	SMA	Dharmasraya	-	244.500.000,00	244.500.000,00	489.000.000,00	327.406.000,00	88.196.000,00	73.398.000,00	489.000.000,00	-
176	69774852	SMAN 1 Koto Salak	NEGERI	SMA	Dharmasraya	-	287.250.000,00	287.250.000,00	574.500.000,00	448.783.100,00	37.395.650,00	88.321.250,00	574.500.000,00	-
177	69954291	SMAN 1 TIUMANG	NEGERI	SMA	Dharmasraya	-	122.250.000,00	122.250.000,00	244.500.000,00	183.523.900,00	29.770.000,00	31.206.100,00	244.500.000,00	-
178	69953273	SMAN 1 ASAM JUJUHAN	NEGERI	SMA	Dharmasraya	-	32.250.000,00	32.250.000,00	64.500.000,00	46.230.000,00	-	18.270.000,00	64.500.000,00	-
179	10308311	SMAN 1 KOTO BESAR	NEGERI	SMA	Dharmasraya	-	63.000.000,00	63.000.000,00	126.000.000,00	105.303.000,00	15.899.000,00	4.798.000,00	126.000.000,00	-
180	10303091	SMAN 1 SUNGAI BEREMAS	NEGERI	SMA	Pasaman Barat	-	191.250.000,00	191.250.000,00	382.500.000,00	300.720.000,00	7.750.000,00	74.030.000,00	382.500.000,00	-
181	10306086	SMAN 1 RANAH BATAHAN	NEGERI	SMA	Pasaman Barat	-	379.500.000,00	379.500.000,00	759.000.000,00	597.365.000,00	10.500.000,00	151.135.000,00	759.000.000,00	-

No	NPSN	Nama Unit	STATUS	JENJANG	Kab / Kota	Silpa 2023	Salur		Total Salur Reguler 2024	REALISASI BOS REGULER 2024			Total belanja BOS Reguler 2024	Total SILPA BOS REGULER 2024 PER 31 DESEMBER 2024
							Tahap I	Tahap II		BELANJA BRG JASA	B.MODAL			
											PERALATAN & MESIN	ASET TETAP LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	11	12	13	14=11+12+13	15=7+10+14
182	69987232	SMAN 2 RANAH BATAHAN	NEGERI	SMA	Pasaman Barat	-	276.000.000,00	276.000.000,00	552.000.000,00	432.213.000,00	29.017.000,00	90.770.000,00	552.000.000,00	-
183	10303089	SMAN 1 LEMBAH MELINTANG	NEGERI	SMA	Pasaman Barat	282.988,00	798.750.000,00	798.467.012,00	1.597.217.012,00	1.184.294.580,00	129.000.000,00	283.131.000,00	1.596.425.580,00	1.074.420,00
184	10303086	SMAN 1 GUNUNG TULEH	NEGERI	SMA	Pasaman Barat	-	387.750.000,00	387.750.000,00	775.500.000,00	562.128.570,00	57.544.630,00	153.828.300,00	773.501.500,00	1.998.500,00
185	10303090	SMAN 1 PASAMAN	NEGERI	SMA	Pasaman Barat	-	750.750.000,00	750.750.000,00	1.501.500.000,00	1.099.066.300,00	204.375.000,00	198.058.700,00	1.501.500.000,00	-
186	69764539	SMAN 2 PASAMAN	NEGERI	SMA	Pasaman Barat	-	522.000.000,00	522.000.000,00	1.044.000.000,00	836.708.000,00	66.532.000,00	140.760.000,00	1.044.000.000,00	-
187	10303087	SMAN 1 KINALI	NEGERI	SMA	Pasaman Barat	-	697.500.000,00	697.500.000,00	1.395.000.000,00	968.484.700,00	191.350.000,00	235.165.300,00	1.395.000.000,00	-
188	69948099	SMAN 2 KINALI	NEGERI	SMA	Pasaman Barat	-	228.750.000,00	228.750.000,00	457.500.000,00	341.462.200,00	41.240.000,00	74.797.800,00	457.500.000,00	-
189	10303106	SMAN 1 TALAMAU	NEGERI	SMA	Pasaman Barat	-	363.000.000,00	363.000.000,00	726.000.000,00	639.990.000,00	32.250.000,00	53.760.000,00	726.000.000,00	-
190	10303088	SMAN 1 KOTO BALINGKA	NEGERI	SMA	Pasaman Barat	-	419.250.000,00	419.250.000,00	838.500.000,00	630.455.000,00	56.900.000,00	151.145.000,00	838.500.000,00	-
191	10306085	SMAN 1 LUHAK NAN DUO	NEGERI	SMA	Pasaman Barat	844.800,00	680.250.000,00	679.405.200,00	1.359.655.200,00	1.099.836.500,00	52.270.000,00	208.393.500,00	1.360.500.000,00	-
192	10307806	SMAN 1 SUNGAI AUR	NEGERI	SMA	Pasaman Barat	6.358.000,00	361.500.000,00	355.142.000,00	716.642.000,00	501.378.250,00	70.830.000,00	149.169.000,00	721.377.250,00	1.622.750,00
193	10307523	SMAN 1 BUKITTINGGI	NEGERI	SMA	Kota Bukittinggi	-	861.080.000,00	861.080.000,00	1.722.160.000,00	1.447.979.570,00	140.981.500,00	131.512.900,00	1.720.473.970,00	1.686.030,00
194	10307525	SMAN 3 BUKITTINGGI	NEGERI	SMA	Kota Bukittinggi	-	773.680.000,00	773.680.000,00	1.547.360.000,00	1.204.738.900,00	46.146.000,00	296.475.100,00	1.547.360.000,00	-
195	10307526	SMAN 4 BUKIT TINGGI	NEGERI	SMA	Kota Bukittinggi	-	698.440.000,00	698.440.000,00	1.396.880.000,00	1.115.795.700,00	6.800.000,00	274.284.300,00	1.396.880.000,00	-
196	10307527	SMAN 5 BUKITTINGGI	NEGERI	SMA	Kota Bukittinggi	-	791.920.000,00	791.920.000,00	1.583.840.000,00	1.148.071.436,00	119.325.000,00	297.014.000,00	1.564.410.436,00	19.429.564,00
197	10307524	SMAN 2 BUKITTINGGI	NEGERI	SMA	Kota Bukittinggi	-	784.320.000,00	784.320.000,00	1.568.640.000,00	1.181.652.499,00	104.343.501,00	282.644.000,00	1.568.640.000,00	-
198	10303463	SMAN 11 PADANG	NEGERI	SMA	Kota Padang	2.595,00	787.500.000,00	787.497.405,00	1.574.997.405,00	1.315.869.705,00	109.122.000,00	150.008.200,00	1.574.999.905,00	95,00
199	10303482	SMAN 14 PADANG	NEGERI	SMA	Kota Padang	26.955.579,00	794.250.000,00	767.294.421,00	1.561.544.421,00	1.121.940.006,00	220.330.000,00	214.693.400,00	1.556.963.406,00	31.536.594,00
200	10303501	SMAN 4 PADANG	NEGERI	SMA	Kota Padang	110,00	768.000.000,00	767.999.890,00	1.535.999.890,00	1.185.839.590,00	118.235.105,00	231.925.100,00	1.535.999.795,00	205,00
201	10303503	SMAN 6 PADANG	NEGERI	SMA	Kota Padang	9.338.612,00	735.750.000,00	726.411.388,00	1.462.161.388,00	1.147.977.398,00	146.009.002,00	177.513.600,00	1.471.500.000,00	-
202	10303462	SMAN 10 PADANG	NEGERI	SMA	Kota Padang	-	828.750.000,00	828.750.000,00	1.657.500.000,00	1.386.282.500,00	98.400.000,00	172.817.500,00	1.657.500.000,00	-
203	10303499	SMAN 2 PADANG	NEGERI	SMA	Kota Padang	293.020,00	813.000.000,00	812.706.980,00	1.625.706.980,00	1.307.081.575,00	204.459.100,00	112.539.200,00	1.624.079.875,00	1.920.125,00
204	10303461	SMAN 1 PADANG	NEGERI	SMA	Kota Padang	44.950.918,00	922.500.000,00	877.549.082,00	1.800.049.082,00	1.593.376.773,00	60.995.082,00	167.779.200,00	1.822.151.055,00	22.848.945,00
205	10303500	SMAN 3 PADANG	NEGERI	SMA	Kota Padang	581,00	822.000.000,00	821.999.419,00	1.643.999.419,00	1.397.410.620,00	120.338.000,00	123.499.200,00	1.641.247.820,00	2.752.180,00
206	10303480	SMAN 12 PADANG	NEGERI	SMA	Kota Padang	403.875,00	804.000.000,00	803.596.125,00	1.607.596.125,00	1.233.996.799,00	178.607.501,00	195.366.700,00	1.607.971.000,00	29.000,00
207	69948163	SMAN 4 SUMATERA BARAT (KEBERBAKATAN OLAHRAGA)	NEGERI	SMA	Kota Padang	-	234.750.000,00	234.750.000,00	469.500.000,00	354.455.988,00	21.000.000,00	94.044.012,00	469.500.000,00	-
208	10308323	SMAN 16 PADANG	NEGERI	SMA	Kota Padang	-	838.500.000,00	838.500.000,00	1.677.000.000,00	1.249.211.915,00	183.354.985,00	244.433.100,00	1.677.000.000,00	-
209	10303502	SMAN 5 PADANG	NEGERI	SMA	Kota Padang	-	869.250.000,00	869.250.000,00	1.738.500.000,00	1.429.315.942,00	54.150.000,00	255.034.000,00	1.738.499.942,00	58,00
210	10304833	SMAN 15 PADANG	NEGERI	SMA	Kota Padang	-	743.250.000,00	743.250.000,00	1.486.500.000,00	1.254.099.881,00	112.266.525,00	120.133.594,00	1.486.500.000,00	-
211	10303506	SMAN 9 PADANG	NEGERI	SMA	Kota Padang	913.109,00	882.750.000,00	881.836.891,00	1.764.586.891,00	1.387.340.502,00	230.616.998,00	147.542.500,00	1.765.500.000,00	-
212	10303481	SMAN 13 PADANG	NEGERI	SMA	Kota Padang	-	935.250.000,00	935.250.000,00	1.870.500.000,00	1.438.666.194,00	211.514.906,00	220.318.900,00	1.870.500.000,00	-
213	10303504	SMAN 7 PADANG	NEGERI	SMA	Kota Padang	141.319,00	758.250.000,00	758.108.681,00	1.516.358.681,00	1.192.118.390,00	151.380.010,00	173.001.600,00	1.516.500.000,00	-
214	10303505	SMAN 8 PADANG	NEGERI	SMA	Kota Padang	-	719.250.000,00	719.250.000,00	1.438.500.000,00	1.192.521.651,00	145.821.349,00	100.157.000,00	1.438.500.000,00	-
215	10304698	SMAN 3 PADANG PANJANG	NEGERI	SMA	Kota Padang Panjang	-	638.250.000,00	638.250.000,00	1.276.500.000,00	1.038.024.050,00	157.969.750,00	80.506.200,00	1.276.500.000,00	-
216	10303611	SMAN 1 PADANG PANJANG	NEGERI	SMA	Kota Padang Panjang	1.768.782,00	694.500.000,00	692.731.218,00	1.387.231.218,00	1.142.107.136,00	145.273.000,00	98.980.200,00	1.386.360.336,00	2.639.664,00
217	10310903	SMAN 1 SUMATERA BARAT	NEGERI	SMA	Kota Padang Panjang	579.999,00	296.250.000,00	295.670.001,00	591.920.001,00	510.774.200,00	42.386.000,00	39.203.800,00	592.364.000,00	136.000,00
218	10303610	SMAN 2 PADANG PANJANG	NEGERI	SMA	Kota Padang Panjang	-	661.500.000,00	661.500.000,00	1.323.000.000,00	1.036.229.300,00	126.349.500,00	156.784.200,00	1.319.363.000,00	3.637.000,00
219	10303691	SMAN 1 SAWAHLUNTO	NEGERI	SMA	Kota Sawah Lunto	53.387.366,00	540.580.000,00	487.192.634,00	1.027.772.634,00	877.320.279,00	97.613.000,00	90.283.200,00	1.065.216.479,00	15.943.521,00

No	NPSN	Nama Unit	STATUS	JENJANG	Kab / Kota	Silpa 2023	Salur		Total Salur Reguler 2024	REALISASI BOS REGULER 2024			Total belanja BOS Reguler 2024	Total SILPA BOS REGULER 2024 PER 31 DESEMBER 2024
							Tahap I	Tahap II		BELANJA BRG JASA	B.MODAL			
											PERALATAN & MESIN	ASET TETAP LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	11	12	13	14=11+12+13	15=7+10+14
220	69815459	SMAN 3 SAWAHLUNTO	NEGERI	SMA	Kota Sawah Lunto	-	89.090.000,00	89.090.000,00	178.180.000,00	157.180.000,00	16.000.000,00	5.000.000,00	178.180.000,00	-
221	10303692	SMAN 2 SAWAHLUNTO	NEGERI	SMA	Kota Sawah Lunto	1.761.193,00	391.090.000,00	389.328.807,00	780.418.807,00	628.286.100,00	69.623.700,00	73.118.000,00	771.027.800,00	11.152.200,00
222	10303781	SMAN 1 SOLOK	NEGERI	SMA	Kota Solok	-	951.000.000,00	951.000.000,00	1.902.000.000,00	1.686.403.050,00	31.094.350,00	183.116.200,00	1.900.613.600,00	1.386.400,00
223	10303780	SMAN 2 SOLOK	NEGERI	SMA	Kota Solok	-	791.250.000,00	791.250.000,00	1.582.500.000,00	1.360.670.643,00	93.930.900,00	127.789.200,00	1.582.390.743,00	109.257,00
224	10303779	SMAN 3 SOLOK	NEGERI	SMA	Kota Solok	-	818.250.000,00	818.250.000,00	1.636.500.000,00	1.412.446.641,00	91.399.998,00	108.195.931,00	1.612.042.570,00	24.457.430,00
225	10303766	SMAN 4 SOLOK	NEGERI	SMA	Kota Solok	6.093.098,00	342.750.000,00	336.656.902,00	679.406.902,00	473.532.947,00	65.716.000,00	139.145.300,00	678.394.247,00	7.105.753,00
226	10310597	SMAN 4 PAYAKUMBUH	NEGERI	SMA	Kota Payakumbuh	3.572,00	741.750.000,00	741.746.428,00	1.483.496.428,00	1.182.967.340,00	136.532.500,00	163.994.900,00	1.483.494.740,00	5.260,00
227	10303904	SMAN 1 PAYAKUMBUH	NEGERI	SMA	Kota Payakumbuh	4.477.373,00	960.000.000,00	955.522.627,00	1.915.522.627,00	1.461.476.953,00	116.875.000,00	337.936.000,00	1.916.287.953,00	3.712.047,00
228	10303905	SMAN 2 PAYAKUMBUH	NEGERI	SMA	Kota Payakumbuh	-	930.750.000,00	930.750.000,00	1.861.500.000,00	1.348.423.700,00	157.963.500,00	355.112.800,00	1.861.500.000,00	-
229	10303906	SMAN 3 PAYAKUMBUH	NEGERI	SMA	Kota Payakumbuh	500.031,00	828.000.000,00	827.499.969,00	1.655.499.969,00	1.167.520.208,00	342.400.500,00	146.073.800,00	1.655.994.508,00	5.492,00
230	60724950	SMAN 5 PAYAKUMBUH	NEGERI	SMA	Kota Payakumbuh	832,00	311.250.000,00	311.249.168,00	622.499.168,00	478.017.200,00	42.200.000,00	102.282.800,00	622.500.000,00	-
231	10307311	SMAN 3 PARIAMAN	NEGERI	SMA	Kota Pariaman	-	687.000.000,00	687.000.000,00	1.374.000.000,00	884.489.320,00	129.822.560,00	359.688.120,00	1.374.000.000,00	-
232	10307309	SMAN 1 PARIAMAN	NEGERI	SMA	Kota Pariaman	-	684.750.000,00	684.750.000,00	1.369.500.000,00	946.278.200,00	132.500.000,00	279.403.800,00	1.358.182.000,00	11.318.000,00
233	10307310	SMAN 2 PARIAMAN	NEGERI	SMA	Kota Pariaman	-	673.500.000,00	673.500.000,00	1.347.000.000,00	916.307.699,00	159.077.501,00	271.614.800,00	1.347.000.000,00	-
234	10307312	SMAN 4 PARIAMAN	NEGERI	SMA	Kota Pariaman	300.000,00	496.500.000,00	496.200.000,00	992.700.000,00	663.653.280,00	123.419.620,00	205.927.100,00	993.000.000,00	-
235	10311405	SMAN 6 PARIAMAN	NEGERI	SMA	Kota Pariaman	-	182.250.000,00	182.250.000,00	364.500.000,00	292.459.300,00	35.338.700,00	36.702.000,00	364.500.000,00	-
236	10308546	SMAN 5 PARIAMAN	NEGERI	SMA	Kota Pariaman	-	379.500.000,00	379.500.000,00	759.000.000,00	569.081.000,00	44.900.000,00	145.019.000,00	759.000.000,00	-
237	69849081	SMKN 1 TANJUNG MUTIARA	NEGERI	SMK	Agam	12.323,00	96.000.000,00	95.987.677,00	191.987.677,00	159.237.500,00	32.745.000,00	-	191.982.500,00	17.500,00
238	10300272	SMKN 1 LUBUK BASUNG	NEGERI	SMK	Agam	1.893,00	754.400.000,00	754.398.107,00	1.508.798.107,00	1.279.550.217,00	165.716.000,00	55.380.500,00	1.500.646.717,00	8.153.283,00
239	10304893	SMKN 2 LUBUK BASUNG	NEGERI	SMK	Agam	-	1.060.000.000,00	1.060.000.000,00	2.120.000.000,00	1.858.831.051,00	158.668.949,00	102.500.000,00	2.120.000.000,00	-
240	10300273	SMKN 1 TANJUNG RAYA	NEGERI	SMK	Agam	-	637.600.000,00	637.600.000,00	1.275.200.000,00	927.954.756,00	103.415.500,00	234.482.000,00	1.265.852.256,00	9.347.744,00
241	10308298	SMKN 1 MATUR	NEGERI	SMK	Agam	478.500,00	224.800.000,00	224.321.500,00	449.121.500,00	406.095.560,00	38.687.940,00	4.816.500,00	449.600.000,00	-
242	10310706	SMKN 1 BASO	NEGERI	SMK	Agam	-	363.200.000,00	363.200.000,00	726.400.000,00	670.724.296,00	15.000.000,00	40.580.000,00	726.304.296,00	95.704,00
243	10308138	SMKN 1 TILATANG KAMANG	NEGERI	SMK	Agam	-	360.000.000,00	360.000.000,00	720.000.000,00	612.653.267,00	36.255.333,00	66.047.900,00	714.956.500,00	5.043.500,00
244	10304892	SMKN 1 PALEMBAYAN	NEGERI	SMK	Agam	95,00	216.000.000,00	215.999.905,00	431.999.905,00	353.444.500,00	30.120.000,00	48.435.500,00	432.000.000,00	-
245	10300274	SMKN 1 AMPEK ANGKEK	NEGERI	SMK	Agam	2.148.706,00	735.200.000,00	733.051.294,00	1.468.251.294,00	1.274.634.586,00	115.276.000,00	65.738.000,00	1.455.648.586,00	14.751.414,00
246	10310498	SMKN 1 AMPEK NAGARI	NEGERI	SMK	Agam	391.464,00	259.200.000,00	258.808.536,00	518.008.536,00	425.734.533,00	73.107.329,00	19.441.000,00	518.282.862,00	117.138,00
247	10300826	SMKN 1 BONJOL	NEGERI	SMK	Pasaman	-	558.400.000,00	547.232.000,00	1.105.632.000,00	941.484.600,00	48.637.500,00	115.477.900,00	1.105.600.000,00	32.000,00
248	10300825	SMKN 1 LUBUK SIKAPING	NEGERI	SMK	Pasaman	-	1.136.800.000,00	1.136.800.000,00	2.273.600.000,00	1.885.421.786,00	200.107.814,00	188.070.400,00	2.273.600.000,00	-
249	69896555	SMKN 1 DUA KOTO	NEGERI	SMK	Pasaman	-	244.000.000,00	244.000.000,00	488.000.000,00	416.321.020,00	43.588.480,00	28.090.500,00	488.000.000,00	-
250	69754554	SMKN 1 SIMPANG ALAHAN MATI	NEGERI	SMK	Pasaman	6.486.390,00	123.200.000,00	116.713.610,00	239.913.610,00	228.844.031,00	-	17.552.200,00	246.396.231,00	3.769,00
251	10304195	SMKN 1 PADANG GALUGUR	NEGERI	SMK	Pasaman	-	340.800.000,00	340.800.000,00	681.600.000,00	505.930.000,00	55.680.000,00	119.990.000,00	681.600.000,00	-
252	10307598	SMKN 1 RAO SELATAN	NEGERI	SMK	Pasaman	-	710.400.000,00	710.400.000,00	1.420.800.000,00	1.120.042.671,00	110.682.779,00	189.714.550,00	1.420.440.000,00	360.000,00
253	10304430	SMKN 1 KECAMATAN LUAK	NEGERI	SMK	lima puluh kota	38.000,00	731.910.000,00	731.872.000,00	1.463.782.000,00	1.128.294.363,00	202.175.000,00	50.495.400,00	1.380.964.763,00	82.855.237,00
254	10310831	SMKN PP PADANG MENGATAS	NEGERI	SMK	lima puluh kota	-	637.050.000,00	637.050.000,00	1.274.100.000,00	1.148.657.000,00	81.593.000,00	43.850.000,00	1.274.100.000,00	-
255	10304432	SMKN 1 GUGUK	NEGERI	SMK	lima puluh kota	-	1.134.600.000,00	1.089.216.000,00	2.223.816.000,00	1.622.713.835,00	512.768.165,00	88.334.000,00	2.223.816.000,00	-

No	NPSN	Nama Unit	STATUS	JENJANG	Kab / Kota	Silpa 2023	Salur		Total Salur Reguler 2024	REALISASI BOS REGULER 2024			Total belanja BOS Reguler 2024	Total SILPA BOS REGULER 2024 PER 31 DESEMBER 2024
							Tahap I	Tahap II		BELANJA BRG JASA	B.MODAL			
											PERALATAN & MESIN	ASET TETAP LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	11	12	13	14=11+12+13	15=7+10+14
256	10310872	SMKN 2 KEC GUGUAK	NEGERI	SMK	lima puluh kota	16.081.662,00	673.320.000,00	657.238.338,00	1.330.558.338,00	1.043.589.230,00	123.180.600,00	175.782.500,00	1.342.552.330,00	4.087.670,00
257	10304431	SMKN 1 SULIKI	NEGERI	SMK	lima puluh kota	-	186.000.000,00	186.000.000,00	372.000.000,00	336.349.000,00	29.275.000,00	6.376.000,00	372.000.000,00	-
258	10304433	SMKN 1 PANGKALAN	NEGERI	SMK	lima puluh kota	-	448.260.000,00	448.260.000,00	896.520.000,00	741.011.000,00	120.009.000,00	35.500.000,00	896.520.000,00	-
259	10310811	SMKN 1 PANTAI CERMIN	NEGERI	SMK	Solok	5.513.660,00	167.310.000,00	161.796.340,00	329.106.340,00	248.289.806,00	48.911.845,00	37.072.370,00	334.274.021,00	345.979,00
260	10308093	SMKN 1 LEMBAH GUMANTI	NEGERI	SMK	Solok	-	648.115.000,00	648.115.000,00	1.296.230.000,00	1.097.688.500,00	109.100.000,00	89.441.500,00	1.296.230.000,00	-
261	10310804	SMKN 2 LEMBAH GUMANTI	NEGERI	SMK	Solok	-	22.815.000,00	22.815.000,00	45.630.000,00	38.910.076,00	-	-	38.910.076,00	6.719.924,00
262	10301518	SMKN 1 GUNUNG TALANG	NEGERI	SMK	Solok	350.764,00	735.150.000,00	734.799.236,00	1.469.949.236,00	1.329.435.500,00	43.000.000,00	97.864.500,00	1.470.300.000,00	-
263	10308154	SMKN 2 GUNUNG TALANG	NEGERI	SMK	Solok	-	245.050.000,00	245.050.000,00	490.100.000,00	476.800.000,00	13.300.000,00	-	490.100.000,00	-
264	10310889	SMKN 1 BUKIT SUNDI	NEGERI	SMK	Solok	-	326.170.000,00	326.170.000,00	652.340.000,00	507.542.200,00	84.678.000,00	60.119.800,00	652.340.000,00	-
265	10308095	SMKN 1 X KOTO DIATAS	NEGERI	SMK	Solok	172.136,00	74.360.000,00	74.187.864,00	148.547.864,00	148.202.635,00	-	-	148.202.635,00	517.365,00
266	10307970	SMKN 1 SINGKARAK	NEGERI	SMK	Solok	-	63.375.000,00	63.375.000,00	126.750.000,00	99.667.500,00	18.000.000,00	9.082.500,00	126.750.000,00	-
267	10307922	SMKN 1 HILIRAN GUMANTI	NEGERI	SMK	Solok	-	128.440.000,00	128.440.000,00	256.880.000,00	237.898.905,00	18.981.095,00	-	256.880.000,00	-
268	10310791	SMKN 1 SUNGAI LIMAU	NEGERI	SMK	Padang Pariaman	-	89.600.000,00	89.600.000,00	179.200.000,00	137.050.000,00	35.900.000,00	6.250.000,00	179.200.000,00	-
269	69829358	SMKN 1 IV KOTO AUR MALINTANG	NEGERI	SMK	Padang Pariaman	-	129.600.000,00	129.600.000,00	259.200.000,00	227.194.000,00	7.880.000,00	24.126.000,00	259.200.000,00	-
270	10305575	SMKN 1 SINTUK TOBOH GADANG	NEGERI	SMK	Padang Pariaman	-	988.800.000,00	988.800.000,00	1.977.600.000,00	1.563.019.550,00	215.413.450,00	199.167.000,00	1.977.600.000,00	-
271	10308128	SMKN 1 ENAM LINGKUNG	NEGERI	SMK	Padang Pariaman	-	568.000.000,00	568.000.000,00	1.136.000.000,00	852.996.000,00	120.989.000,00	162.015.000,00	1.136.000.000,00	-
272	69773545	SMKN 1 PANCUNG SOAL	NEGERI	SMK	Pesisir Selatan	-	256.000.000,00	245.760.000,00	501.760.000,00	355.510.000,00	70.953.000,00	75.297.000,00	501.760.000,00	-
273	10310796	SMKN 1 LINGGO SARI BAGANTI	NEGERI	SMK	Pesisir Selatan	-	344.800.000,00	344.800.000,00	689.600.000,00	559.022.100,00	63.965.000,00	66.612.900,00	689.600.000,00	-
274	10301948	SMKN 1 RANAH PESISIR	NEGERI	SMK	Pesisir Selatan	-	489.600.000,00	489.600.000,00	979.200.000,00	750.390.400,00	123.796.600,00	105.013.000,00	979.200.000,00	-
275	10308258	SMKN 1 SUTERA	NEGERI	SMK	Pesisir Selatan	-	556.000.000,00	556.000.000,00	1.112.000.000,00	780.047.999,00	202.895.001,00	129.057.000,00	1.112.000.000,00	-
276	10301942	SMKN 1 PAINAN	NEGERI	SMK	Pesisir Selatan	-	819.200.000,00	819.200.000,00	1.638.400.000,00	1.366.415.650,00	35.494.400,00	236.020.000,00	1.637.930.050,00	469.950,00
277	10301949	SMKN 2 PAINAN	NEGERI	SMK	Pesisir Selatan	714,00	368.800.000,00	368.799.286,00	737.599.286,00	615.310.519,00	62.287.500,00	59.953.200,00	737.551.219,00	48.781,00
278	10308179	SMKN 1 KOTO XI TARUSAN	NEGERI	SMK	Pesisir Selatan	-	430.400.000,00	430.400.000,00	860.800.000,00	620.278.499,00	162.450.001,00	78.071.500,00	860.800.000,00	-
279	69987098	SMKN 1 SILAUT	NEGERI	SMK	Pesisir Selatan	-	66.400.000,00	66.400.000,00	132.800.000,00	122.436.000,00	-	10.364.000,00	132.800.000,00	-
280	10309786	SMKN 1 RANAH AMPEK HULU TAPAN	NEGERI	SMK	Pesisir Selatan	-	272.000.000,00	272.000.000,00	544.000.000,00	462.702.000,00	23.500.000,00	57.798.000,00	544.000.000,00	-
281	10302406	SMKN 1 BATIPUH	NEGERI	SMK	Tanah Datar	10.290.666,00	741.600.000,00	731.309.334,00	1.472.909.334,00	1.049.569.400,00	219.013.000,00	214.157.600,00	1.482.740.000,00	460.000,00
282	10302395	SMKN 2 BATUSANGKAR	NEGERI	SMK	Tanah Datar	-	342.400.000,00	342.400.000,00	684.800.000,00	542.130.540,00	49.572.460,00	93.097.000,00	684.800.000,00	-
283	10302407	SMKN 1 BATUSANGKAR	NEGERI	SMK	Tanah Datar	-	665.600.000,00	665.600.000,00	1.331.200.000,00	1.071.266.400,00	104.141.600,00	155.792.000,00	1.331.200.000,00	-
284	10302396	SMKN 1 LINTAU BUO	NEGERI	SMK	Tanah Datar	-	739.200.000,00	739.200.000,00	1.478.400.000,00	1.171.756.194,00	179.189.806,00	127.454.000,00	1.478.400.000,00	-
285	10308142	SMKN 1 TANJUNG BARU	NEGERI	SMK	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286	10306287	SMKN 4 SIJUNJUNG	NEGERI	SMK	Sijunjung	-	413.205.000,00	413.205.000,00	826.410.000,00	586.786.166,00	190.259.134,00	49.364.700,00	826.410.000,00	-
287	10308316	SMKN 6 SIJUNJUNG	NEGERI	SMK	Sijunjung	200.195,00	66.755.000,00	66.554.805,00	133.309.805,00	110.820.500,00	14.758.500,00	7.731.000,00	133.310.000,00	200.000,00
288	69773528	SMKN 7 SIJUNJUNG	NEGERI	SMK	Sijunjung	3.123.377,00	223.080.000,00	219.956.623,00	443.036.623,00	370.738.953,00	14.589.245,00	57.874.400,00	443.202.598,00	2.957.402,00
289	10302786	SMKN 2 SIJUNJUNG	NEGERI	SMK	Sijunjung	6.550.128,00	668.395.000,00	661.844.872,00	1.330.239.872,00	1.165.404.303,00	62.700.000,00	102.435.000,00	1.330.539.303,00	6.250.697,00
290	10305639	SMKN 3 SIJUNJUNG	NEGERI	SMK	Sijunjung	316.055,00	469.820.000,00	469.503.945,00	939.323.945,00	646.114.658,00	112.659.000,00	171.781.100,00	930.554.758,00	9.085.242,00
291	10308315	SMKN 5 SIJUNJUNG	NEGERI	SMK	Sijunjung	54.377.790,00	350.675.000,00	296.297.210,00	646.972.210,00	574.780.093,00	102.914.191,00	8.800.000,00	686.494.284,00	14.855.716,00
292	10302785	SMKN 1 SIJUNJUNG	NEGERI	SMK	Sijunjung	8.015.164,00	991.185.000,00	983.169.836,00	1.974.354.836,00	1.493.100.600,00	337.027.900,00	152.241.500,00	1.982.370.000,00	-
293	69991477	SMKN 8 Sijunjung	NEGERI	SMK	Sijunjung	-	78.585.000,00	78.585.000,00	157.170.000,00	133.908.000,00	20.385.000,00	2.877.000,00	157.170.000,00	-

No	NPSN	Nama Unit	STATUS	JENJANG	Kab / Kota	Silpa 2023	Salur		Total Salur Reguler 2024	REALISASI BOS REGULER 2024			Total belanja BOS Reguler 2024	Total SILPA BOS REGULER 2024 PER 31 DESEMBER 2024
							Tahap I	Tahap II		BELANJA BRG JASA	B.MODAL			
											PERALATAN & MESIN	ASET TETAP LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	11	12	13	14=11+12+13	15=7+10+14
294	69851452	SMKN 1 KEPULAUN MENTAWAI	NEGERI	SMK	Kepulauan Mentawai	-	93.310.000,00	93.310.000,00	186.620.000,00	158.457.060,00	16.365.940,00	11.797.000,00	186.620.000,00	-
295	69900920	SMKN 2 KEPULAUAN MENTAWAI	NEGERI	SMK	Kepulauan Mentawai	-	148.645.000,00	148.645.000,00	297.290.000,00	272.290.000,00	-	25.000.000,00	297.290.000,00	-
296	69953380	SMKN 3 KEPULAUAN MENTAWAI	NEGERI	SMK	Kepulauan Mentawai	-	190.960.000,00	190.960.000,00	381.920.000,00	346.425.000,00	20.400.000,00	15.095.000,00	381.920.000,00	-
297	10306968	SMKN 3 SOLOK SELATAN	NEGERI	SMK	Solok Selatan	-	119.145.000,00	119.145.000,00	238.290.000,00	214.728.350,00	8.300.000,00	8.378.500,00	231.406.850,00	6.883.150,00
298	10306966	SMKN 1 SOLOK SELATAN	NEGERI	SMK	Solok Selatan	-	742.755.000,00	742.755.000,00	1.485.510.000,00	1.275.646.250,00	118.131.750,00	91.532.000,00	1.485.310.000,00	200.000,00
299	10308133	SMKN 5 SOLOK SELATAN	NEGERI	SMK	Solok Selatan	-	245.895.000,00	245.895.000,00	491.790.000,00	441.945.247,00	49.056.753,00	-	491.002.000,00	788.000,00
300	10306969	SMKN 4 SOLOK SELATAN	NEGERI	SMK	Solok Selatan	-	141.115.000,00	141.115.000,00	282.230.000,00	243.995.000,00	27.500.000,00	10.735.000,00	282.230.000,00	-
301	10306967	SMKN 2 SOLOK SELATAN	NEGERI	SMK	Solok Selatan	3.263.364,00	70.980.000,00	67.716.636,00	138.696.636,00	133.628.840,00	-	1.282.000,00	134.910.840,00	7.049.160,00
302	10304876	SMKN 1 SUNGAI RUMBAI	NEGERI	SMK	Dharmasraya	-	669.600.000,00	669.600.000,00	1.339.200.000,00	1.048.979.236,00	242.579.764,00	46.981.000,00	1.338.540.000,00	660.000,00
303	10303215	SMKN 1 KOTO BARU	NEGERI	SMK	Dharmasraya	-	764.000.000,00	764.000.000,00	1.528.000.000,00	1.370.000.000,00	58.000.000,00	100.000.000,00	1.528.000.000,00	-
304	69853536	SMKN 1 SITIUNG	NEGERI	SMK	Dharmasraya	-	120.800.000,00	120.800.000,00	241.600.000,00	234.603.000,00	-	6.997.000,00	241.600.000,00	-
305	10303214	SMKN 1 PULAU PUNJUNG	NEGERI	SMK	Dharmasraya	-	461.600.000,00	461.600.000,00	923.200.000,00	691.199.744,00	116.583.256,00	115.417.000,00	923.200.000,00	-
306	10308286	SMKN 2 PULAU PUNJUNG	NEGERI	SMK	Dharmasraya	-	202.400.000,00	202.400.000,00	404.800.000,00	312.668.000,00	19.482.000,00	72.650.000,00	404.800.000,00	-
307	69853537	SMKN 1 TIMPEH	NEGERI	SMK	Dharmasraya	-	123.200.000,00	123.200.000,00	246.400.000,00	213.201.180,00	8.786.820,00	24.412.000,00	246.400.000,00	-
308	69986158	SMKN 1 PADANG LAWEH	NEGERI	SMK	Dharmasraya	780.000,00	88.800.000,00	88.020.000,00	176.820.000,00	134.857.150,00	3.411.000,00	39.100.000,00	177.368.150,00	231.850,00
309	69946934	SMKN 1 KOTO BESAR	NEGERI	SMK	Dharmasraya	-	218.400.000,00	218.400.000,00	436.800.000,00	281.828.205,00	104.684.995,00	49.636.800,00	436.150.000,00	650.000,00
310	10310878	SMKN 1 RANAH BATAHAN	NEGERI	SMK	Pasaman Barat	377.337,00	263.200.000,00	262.822.663,00	526.022.663,00	457.514.163,00	32.344.350,00	33.107.500,00	522.966.013,00	3.433.987,00
311	10306096	SMKN 1 LEMBAH MELINTANG	NEGERI	SMK	Pasaman Barat	-	808.800.000,00	808.800.000,00	1.617.600.000,00	1.407.184.112,00	146.660.888,00	63.755.000,00	1.617.600.000,00	-
312	69905465	SMKN 1 GUNUNG TULEH	NEGERI	SMK	Pasaman Barat	58.177,00	309.600.000,00	309.541.823,00	619.141.823,00	553.310.750,00	24.025.000,00	41.809.000,00	619.144.750,00	55.250,00
313	10310877	SMKN 1 PASAMAN	NEGERI	SMK	Pasaman Barat	6.000,00	705.600.000,00	705.594.000,00	1.411.194.000,00	1.114.674.250,00	174.745.750,00	121.780.000,00	1.411.200.000,00	-
314	10308183	SMKN 1 KINALI	NEGERI	SMK	Pasaman Barat	115.261,00	944.000.000,00	943.884.739,00	1.887.884.739,00	1.717.135.038,00	92.925.250,00	77.938.500,00	1.887.998.788,00	1.212,00
315	10306097	SMKN 1 TALAMAU	NEGERI	SMK	Pasaman Barat	-	328.000.000,00	327.400.000,00	655.400.000,00	591.290.074,00	11.600.750,00	42.570.000,00	645.460.824,00	9.939.176,00
316	69968546	SMKN 1 KOTO BALINGKA	NEGERI	SMK	Pasaman Barat	2,00	208.000.000,00	207.999.998,00	415.999.998,00	353.992.000,00	36.344.000,00	25.664.000,00	416.000.000,00	-
317	10306135	SMKN 1 SASAK RANAH PASISIE	NEGERI	SMK	Pasaman Barat	221.429,00	205.600.000,00	205.378.571,00	410.978.571,00	380.017.000,00	9.434.000,00	21.749.000,00	411.200.000,00	-
318	69820624	SMKN 1 SUNGAI AUR	NEGERI	SMK	Pasaman Barat	-	181.600.000,00	181.600.000,00	363.200.000,00	351.265.000,00	11.213.000,00	722.000,00	363.200.000,00	-
319	10307532	SMKN 1 BUKITTINGGI	NEGERI	SMK	Kota Bukittinggi	-	1.647.540.000,00	1.647.540.000,00	3.295.080.000,00	2.887.940.270,00	235.139.730,00	172.000.000,00	3.295.080.000,00	-
320	10307533	SMKN 2 BUKITTINGGI	NEGERI	SMK	Kota Bukittinggi	-	1.296.810.000,00	1.296.810.000,00	2.593.620.000,00	2.234.658.210,00	157.445.600,00	201.516.190,00	2.593.620.000,00	-
321	10304850	SMKN 4 PADANG	NEGERI	SMK	Kota Padang	18.293,00	704.000.000,00	703.981.707,00	1.407.981.707,00	1.008.446.682,00	326.199.771,00	73.266.500,00	1.407.912.953,00	87.047,00
322	10304188	SMKN 7 PADANG	NEGERI	SMK	Kota Padang	3.521.898,00	440.800.000,00	437.278.102,00	878.078.102,00	684.305.355,00	147.595.445,00	49.699.200,00	881.600.000,00	-
323	10304852	SMKN 8 PADANG	NEGERI	SMK	Kota Padang	9.709.500,00	856.000.000,00	846.290.500,00	1.702.290.500,00	1.429.146.681,00	175.614.000,00	105.887.000,00	1.710.647.681,00	1.352.319,00
324	10304848	SMKN 2 PADANG	NEGERI	SMK	Kota Padang	22.952.101,00	1.191.200.000,00	1.168.247.899,00	2.359.447.899,00	2.045.664.425,00	227.027.003,00	105.871.000,00	2.378.562.428,00	3.837.572,00
325	10303507	SMKN 6 PADANG	NEGERI	SMK	Kota Padang	13.497,00	1.150.400.000,00	1.150.386.503,00	2.300.786.503,00	2.124.762.292,00	27.232.500,00	148.558.000,00	2.300.552.792,00	247.208,00
326	10304849	SMKN 3 PADANG	NEGERI	SMK	Kota Padang	35,00	1.047.200.000,00	1.047.199.965,00	2.094.399.965,00	1.498.979.755,00	325.624.000,00	269.796.000,00	2.094.399.755,00	245,00
327	10304853	SMKN 9 PADANG	NEGERI	SMK	Kota Padang	1.544.892,00	1.017.600.000,00	1.016.055.108,00	2.033.655.108,00	1.729.785.967,00	159.771.595,00	144.983.000,00	2.034.540.562,00	659.438,00
328	10304851	SMKN 5 PADANG	NEGERI	SMK	Kota Padang	-	1.005.600.000,00	1.005.600.000,00	2.011.200.000,00	1.584.483.134,00	267.941.099,00	151.048.000,00	2.003.472.233,00	7.727.767,00
329	10304847	SMKN 1 PADANG	NEGERI	SMK	Kota Padang	-	1.104.800.000,00	1.104.800.000,00	2.209.600.000,00	1.680.357.840,00	364.936.660,00	164.305.500,00	2.209.600.000,00	-
330	10310780	SMKN 1 SUMATERA BARAT	NEGERI	SMK	Kota Padang	12.515.881,00	1.103.200.000,00	1.090.684.119,00	2.193.884.119,00	1.874.368.118,00	180.526.410,00	132.654.000,00	2.187.548.528,00	18.851.472,00
331	69734159	SMK PP NEGERI PADANG	NEGERI	SMK	Kota Padang	-	379.200.000,00	379.200.000,00	758.400.000,00	625.189.653,00	43.682.000,00	86.560.001,00	755.431.654,00	2.968.346,00
332	10307617	SMKN 10 PADANG	NEGERI	SMK	Kota Padang	-	404.000.000,00	404.000.000,00	808.000.000,00	579.521.000,00	113.568.000,00	114.911.000,00	808.000.000,00	-

No	NPSN	Nama Unit	STATUS	JENJANG	Kab / Kota	Silpa 2023	Salur		Total Salur Reguler 2024	REALISASI BOS REGULER 2024			Total belanja BOS Reguler 2024	Total SILPA BOS REGULER 2024 PER 31 DESEMBER 2024
							Tahap I	Tahap II		BELANJA BRG JASA	B.MODAL			
											PERALATAN & MESIN	ASET TETAP LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	11	12	13	14=11+12+13	15=7+10+14
333	10303607	SMKN 1 PADANG PANJANG	NEGERI	SMK	Kota Padang Panjang	-	776.800.000,00	776.800.000,00	1.553.600.000,00	1.050.702.534,00	159.467.071,00	343.430.395,00	1.553.600.000,00	-
334	10303606	SMKN 2 PADANG PANJANG	NEGERI	SMK	Kota Padang Panjang	-	568.000.000,00	568.000.000,00	1.136.000.000,00	945.970.901,00	127.309.999,00	62.719.100,00	1.136.000.000,00	-
335	10303674	SMKN 2 SAWAHLUNTO	NEGERI	SMK	Kota Sawah Lunto	-	606.970.000,00	606.970.000,00	1.213.940.000,00	954.085.000,00	193.652.000,00	64.578.000,00	1.212.315.000,00	1.625.000,00
336	10303684	SMKN 1 SAWAHLUNTO	NEGERI	SMK	Kota Sawah Lunto	-	416.990.000,00	416.990.000,00	833.980.000,00	634.096.820,00	68.109.000,00	131.774.180,00	833.980.000,00	-
337	10303768	SMKN 1 SOLOK	NEGERI	SMK	Kota Solok	35.734.158,00	1.230.400.000,00	1.194.665.842,00	2.425.065.842,00	2.074.161.560,00	142.046.700,00	214.837.000,00	2.431.045.260,00	29.754.740,00
338	10303770	SMKN 2 SOLOK	NEGERI	SMK	Kota Solok	63.000,00	1.059.200.000,00	1.059.137.000,00	2.118.337.000,00	1.858.353.952,00	134.200.000,00	125.796.000,00	2.118.349.952,00	50.048,00
339	10310768	SMKN 3 KOTA SOLOK	NEGERI	SMK	Kota Solok	12.080.606,00	395.200.000,00	383.119.394,00	778.319.394,00	671.410.000,00	60.274.000,00	52.918.000,00	784.602.000,00	5.798.000,00
340	10303912	SMKN 1 PAYAKUMBUH	NEGERI	SMK	Kota Payakumbuh	10.251.087,00	1.127.200.000,00	1.116.948.913,00	2.244.148.913,00	1.775.077.350,00	341.687.500,00	137.635.000,00	2.254.399.850,00	150,00
341	10303913	SMKN 2 PAYAKUMBUH	NEGERI	SMK	Kota Payakumbuh	34,00	1.565.600.000,00	1.565.599.966,00	3.131.199.966,00	2.921.743.796,00	135.275.000,00	74.130.000,00	3.131.148.796,00	51.204,00
342	10303914	SMKN 3 PAYAKUMBUH	NEGERI	SMK	Kota Payakumbuh	399.858,00	1.304.800.000,00	1.304.400.142,00	2.609.200.142,00	2.223.458.077,00	209.265.525,00	176.837.000,00	2.609.560.602,00	39.398,00
343	69947085	SMKN 4 PAYAKUMBUH	NEGERI	SMK	Kota Payakumbuh	134.294,00	518.400.000,00	518.265.706,00	1.036.665.706,00	1.022.409.940,00	11.150.000,00	3.075.000,00	1.036.634.940,00	165.060,00
344	10307421	SMKN 2 PARIAMAN	NEGERI	SMK	Kota Pariaman	5.086.296,00	927.200.000,00	922.113.704,00	1.849.313.704,00	1.519.775.610,00	157.032.300,00	173.974.700,00	1.850.782.610,00	3.617.390,00
345	10308547	SMKN 4 PARIAMAN	NEGERI	SMK	Kota Pariaman	-	354.400.000,00	354.400.000,00	708.800.000,00	636.873.200,00	54.501.000,00	17.425.800,00	708.800.000,00	-
346	10307439	SMKN 3 PARIAMAN	NEGERI	SMK	Kota Pariaman	-	949.600.000,00	949.600.000,00	1.899.200.000,00	1.535.399.500,00	125.031.500,00	235.310.000,00	1.895.741.000,00	3.459.000,00
347	10307420	SMKN 1 PARIAMAN	NEGERI	SMK	Kota Pariaman	265.000,00	971.200.000,00	970.935.000,00	1.942.135.000,00	1.702.838.490,00	131.796.000,00	99.742.500,00	1.934.376.990,00	8.023.010,00
348	70032804	SMK Kesehatan Negeri Akabiluru	SMK	Lima Puluh Koto		-	47.430.000,00	47.430.000,00	94.860.000,00	57.501.250,00	33.458.750,00	3.900.000,00	94.860.000,00	-
349	10300459	SLBN 1 LUBUK BASUNG	NEGERI	SLB	Agam	3.393.446,00	162.750.000,00	159.356.554,00	322.106.554,00	304.656.236,00	20.624.000,00	-	325.280.236,00	219.764,00
350	10309211	SLBN 1 AMPEK ANGKEK	NEGERI	SLB	Agam	-	127.750.000,00	127.750.000,00	255.500.000,00	199.956.650,00	53.596.350,00	1.947.000,00	255.500.000,00	-
351	69786957	SLBN 1 LUBUK SIKAPING	NEGERI	SLB	Pasaman	-	154.000.000,00	154.000.000,00	308.000.000,00	274.576.250,00	33.300.000,00	-	307.876.250,00	123.750,00
352	10300856	SLBN 1 PANTI	NEGERI	SLB	Pasaman	960.000,00	143.500.000,00	142.540.000,00	286.040.000,00	259.712.000,00	26.328.000,00	-	286.040.000,00	960.000,00
353	10301305	SLBN 1 HARAU	NEGERI	SLB	lima puluh kota	5.352.744,00	119.100.000,00	113.747.256,00	232.847.256,00	193.766.844,00	41.362.300,00	-	235.129.144,00	3.070.856,00
354	69948138	SLBN 1 ALAHAN PANJANG	NEGERI	SLB	Solok	-	110.700.000,00	110.700.000,00	221.400.000,00	182.912.060,00	26.780.940,00	11.527.000,00	221.220.000,00	180.000,00
355	10304199	SLBN 1 KUBUNG	NEGERI	SLB	Solok	-	118.080.000,00	118.080.000,00	236.160.000,00	190.413.306,00	28.600.000,00	-	219.013.306,00	17.146.694,00
356	10310573	SLBN 1 LINGGO SARI BAGANTI	NEGERI	SLB	Pesisir Selatan	-	133.000.000,00	133.000.000,00	266.000.000,00	256.297.490,00	9.702.510,00	-	266.000.000,00	-
357	10308223	SLBN 1 RANAH PESISIR	NEGERI	SLB	Pesisir Selatan	-	106.750.000,00	106.750.000,00	213.500.000,00	155.900.000,00	36.343.000,00	21.257.000,00	213.500.000,00	-
358	10308259	SLBN 1 LENGAYANG	NEGERI	SLB	Pesisir Selatan	-	145.250.000,00	145.250.000,00	290.500.000,00	283.425.000,00	7.075.000,00	-	290.500.000,00	-
359	10301850	SLBN 1 PAINAN	NEGERI	SLB	Pesisir Selatan	1.116.953,00	141.750.000,00	140.633.047,00	282.383.047,00	255.519.300,00	27.980.700,00	-	283.500.000,00	-
360	10310471	SLBN 1 LIMA KAUM	NEGERI	SLB	Tanah Datar	-	218.750.000,00	218.750.000,00	437.500.000,00	431.500.000,00	6.000.000,00	-	437.500.000,00	-
361	10302503	SLBN 1 PAGARUYUNG	NEGERI	SLB	Tanah Datar	-	129.500.000,00	129.500.000,00	259.000.000,00	239.650.000,00	19.350.000,00	-	259.000.000,00	-
362	10311324	SLBN 1 KAMANG BARU	NEGERI	SLB	Sijunjung	801.000,00	112.545.000,00	111.744.000,00	224.289.000,00	204.489.900,00	19.500.000,00	1.100.000,00	225.089.900,00	100,00
363	10302887	SLBN 1 MUARO SIJUNJUNG	NEGERI	SLB	Sijunjung	6.134.369,00	129.150.000,00	123.015.631,00	252.165.631,00	249.829.743,00	5.000.000,00	2.845.000,00	257.674.743,00	625.257,00
364	10310469	SLBN 1 SANGIR	NEGERI	SLB	Solok Selatan	-	110.700.000,00	110.700.000,00	221.400.000,00	206.400.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	221.400.000,00	-
365	10306838	SLBN 1 SUNGAI PAGU	NEGERI	SLB	Solok Selatan	-	132.840.000,00	132.840.000,00	265.680.000,00	235.192.700,00	26.264.800,00	1.012.500,00	262.470.000,00	3.210.000,00
366	10308107	SLBN 1 PULAU PUNJUNG	NEGERI	SLB	Dharmasraya	-	124.250.000,00	124.250.000,00	248.500.000,00	227.692.918,00	10.554.082,00	10.253.000,00	248.500.000,00	-
367	10310045	SLBN 1 SUNGAI AUR	NEGERI	SLB	Pasaman Barat	-	105.000.000,00	105.000.000,00	210.000.000,00	184.260.000,00	24.250.000,00	1.490.000,00	210.000.000,00	-

No	NPSN	Nama Unit	STATUS	JENJANG	Kab / Kota	Silpa 2023	Salur		Total Salur Reguler 2024	REALISASI BOS REGULER 2024			Total belanja BOS Reguler 2024	Total SILPA BOS REGULER 2024 PER 31 DESEMBER 2024
							Tahap I	Tahap II		BELANJA BRG JASA	B.MODAL			
											PERALATAN & MESIN	ASET TETAP LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	11	12	13	14=11+12+13	15=7+10+14
368	10303425	SLBN 1 BUKITTINGGI	NEGERI	SLB	Kota Bukittinggi	-	205.900.000,00	205.900.000,00	411.800.000,00	394.640.000,00	10.300.000,00	6.860.000,00	411.800.000,00	-
369	10307647	SLBN 1 PADANG	NEGERI	SLB	Kota Padang	10.487.509,00	176.750.000,00	166.262.491,00	343.012.491,00	311.364.660,00	17.600.000,00	-	328.964.660,00	24.535.340,00
370	10303548	SLBN 2 PADANG	NEGERI	SLB	Kota Padang	3.359.864,00	246.750.000,00	243.390.136,00	490.140.136,00	363.190.000,00	129.305.000,00	-	492.495.000,00	1.005.000,00
371	10303644	SLBN 1 PADANG PANJANG	NEGERI	SLB	Kota Padang Panjang	-	105.000.000,00	105.000.000,00	210.000.000,00	168.116.100,00	41.883.900,00	-	210.000.000,00	-
372	10303703	SLBN 1 SAWAHLUNTO	NEGERI	SLB	Kota Sawah Lunto	-	105.600.000,00	105.600.000,00	211.200.000,00	180.574.000,00	30.626.000,00	-	211.200.000,00	-
373	10308152	SLBN 2 SAWAHLUNTO	NEGERI	SLB	Kota Sawah Lunto	17.322.376,00	105.600.000,00	88.277.624,00	193.877.624,00	162.942.107,00	48.195.000,00	-	211.137.107,00	62.893,00
374	10303751	SLBN 1 SOLOK	NEGERI	SLB	Kota Solok	102,00	119.000.000,00	118.999.898,00	237.999.898,00	194.193.897,00	40.985.950,00	1.800.000,00	236.979.847,00	1.020.153,00
375	10307795	SLBN 1 PAYAKUMBUH	NEGERI	SLB	Kota Payakumbuh	1.111.947,00	147.000.000,00	145.888.053,00	292.888.053,00	263.002.456,00	24.400.000,00	4.800.000,00	292.202.456,00	1.797.544,00
376	10310695	SLBN 1 PARIAMAN	NEGERI	SLB	Kota Pariaman	1.889.386,00	173.250.000,00	171.360.614,00	344.610.614,00	298.699.999,00	47.800.001,00	-	346.500.000,00	-
377	10307423	SLBN 2 PARIAMAN	NEGERI	SLB	Kota Pariaman	2.062.700,00	105.000.000,00	102.937.300,00	207.937.300,00	158.768.330,00	48.321.150,00	-	207.089.480,00	2.910.520,00
						689.618.491,00	**170.452.385.000,00**	**169.674.081.031,00**	**340.126.466.031,00**	**268.083.126.082,00**	**28.791.791.015,00**	**43.097.093.110,00**	**339.972.010.207,00**	**844.074.315,00**

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT
REKAPITULASI REALISASI BOS KINERJA TAHUN 2024

No	NPSN	Nama Unit	STATUS	JENJANG	Kab / Kota	Salur Kinerja		Salur Kinerja	REALISASI BELANJA BOS KINERJA 2024				Total SILPA BOS KINERJA 2024 PER 31 DESEMBER 2024
						Silpa Kinerja 2023	Salur Kinerja		BELANJA BRG JASA	MODAL		TOTAL REALISASI BOS KINERJA 2024	
										PERALATAN & MESIN	ASET TETAP LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10+11+12+13	12=9-13
1	10300287	SMAN 1 TANJUNG MUTIARA	NEGERI	SMA	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-
2	10300292	SMAN 1 LUBUK BASUNG	NEGERI	SMA	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-
3	10300294	SMAN 2 LUBUK BASUNG	NEGERI	SMA	Agam	-	35.000.000,00	35.000.000,00	25.078.000,00	-	9.922.000,00	35.000.000,00	-
4	10300290	SMAN 3 LUBUK BASUNG	NEGERI	SMA	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-
5	10300286	SMAN 1 TANJUNG RAYA	NEGERI	SMA	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-
6	10304887	SMAN AGAM CENDEKIA	NEGERI	SMA	Agam	-	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00	-
7	10300301	SMAN 1 MATUR	NEGERI	SMA	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-
8	10300298	SMAN 1 IV KOTO	NEGERI	SMA	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-
9	10300270	SMAN 2 IV KOTO	NEGERI	SMA	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-
10	10300297	SMAN 1 BASO	NEGERI	SMA	Agam	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
11	10300269	SMAN 1 TILATANG KAMANG	NEGERI	SMA	Agam	150.640	45.000.000,00	45.150.640,00	45.150.640,00	-	-	45.150.640,00	-
12	10300271	SMAN 2 TILATANG KAMANG	NEGERI	SMA	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-
13	10300302	SMAN 1 PALEMBAYAN	NEGERI	SMA	Agam	-	45.000.000,00	45.000.000,00	26.810.000,00	6.500.000,00	11.690.000,00	45.000.000,00	-
14	69964939	SMAN 2 PALEMBAYAN	NEGERI	SMA	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-
15	10300293	SMAN 1 PALUPUH	NEGERI	SMA	Agam	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
16	10300304	SMAN 1 SUNGAI PUAR	NEGERI	SMA	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-
17	10304886	SMAN 1 CANDUNG	NEGERI	SMA	Agam	10.746.896	45.000.000,00	55.746.896,00	43.370.396,00	6.121.000,00	6.255.500,00	55.746.896,00	-
18	10300300	SMAN 1 KAMANG MAGEK	NEGERI	SMA	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-
19	10300296	SMAN 1 BANUHAMPU	NEGERI	SMA	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-
20	10300299	SMAN 1 AMPEK ANGKEK	NEGERI	SMA	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-
21	10300295	SMAN 1 AMPEK NAGARI	NEGERI	SMA	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-
22	10300832	SMAN 1 BONJOL	NEGERI	SMA	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-
23	69964938	SMAN 3 SUMATERA BARAT	NEGERI	SMA	Pasaman	-	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00	-
24	10300830	SMAN 1 LUBUK SIKAPING	NEGERI	SMA	Pasaman	-	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00	-
25	10310590	SMAN 2 LUBUK SIKAPING	NEGERI	SMA	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-
26	10300831	SMAN 1 DUA KOTO	NEGERI	SMA	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-
27	10300829	SMAN 1 PANTI	NEGERI	SMA	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-
28	10300827	SMAN 1 TIGO NAGARI	NEGERI	SMA	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-
29	10300828	SMAN 1 RAO	NEGERI	SMA	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-
30	69757492	SMAN 1 MAPAT TUNGGUL	NEGERI	SMA	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-
31	69774642	SMAN MAPAT TUNGGUL SELATAN	NEGERI	SMA	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-
32	10304194	SMAN 1 PADANG GELUGUR	NEGERI	SMA	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-

No	NPSN	Nama Unit	STATUS	JENJANG	Kab / Kota	Salur Kinerja		Salur Kinerja	REALISASI BELANJA BOS KINERJA 2024				Total SILPA BOS KINERJA 2024 PER 31 DESEMBER 2024
						Silpa Kinerja 2023	Salur Kinerja		BELANJA BRG JASA	MODAL		TOTAL REALISASI BOS KINERJA 2024	
										PERALATAN & MESIN	ASET TETAP LAINNYA		
33	69774643	SMAN 1 RAO UTARA	NEGERI	SMA	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-
34	10304429	SMAN 1 KEC. PAYAKUMBUH	NEGERI	SMA	lima puluh kota	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
35	10301186	SMAN 1 HARAU	NEGERI	SMA	lima puluh kota	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
36	69786300	SMAN 2 HARAU	NEGERI	SMA	lima puluh kota	10.345.000	45.000.000,00	55.345.000,00	50.110.000,00	-	-	50.110.000,00	5.235.000,00
37	10301187	SMAN 1 GUGUAK	NEGERI	SMA	lima puluh kota	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
38	10301181	SMAN 1 SULIKI	NEGERI	SMA	lima puluh kota	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
39	69786301	SMAN 1 KECAMATAN GUNUANG OMEH	NEGERI	SMA	lima puluh kota	-	-	-	-	-	-	-	-
40	69960622	SMAN 2 Kec. Kapur IX	NEGERI	SMA	lima puluh kota	-	-	-	-	-	-	-	-
41	10301185	SMAN 1 KAPUR IX	NEGERI	SMA	lima puluh kota	-	-	-	-	-	-	-	-
42	10301183	SMAN 1 KEC PANGKALAN KOTO BARU	NEGERI	SMA	lima puluh kota	3.000	-	3.000,00	3.000,00	-	-	3.000,00	-
43	69888818	SMAN 2 KEC. PANGKALAN KOTO BARU	NEGERI	SMA	lima puluh kota	-	-	-	-	-	-	-	-
44	69786302	SMAN 1 BUKIK BARISAN	NEGERI	SMA	lima puluh kota	-	-	-	-	-	-	-	-
45	69946176	SMAN 2 KEC. BUKIK BARISAN	NEGERI	SMA	lima puluh kota	-	-	-	-	-	-	-	-
46	69946102	SMAN 1 Kec. Mungka	NEGERI	SMA	lima puluh kota	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
47	10301188	SMAN 1 AKABILURU	NEGERI	SMA	lima puluh kota	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
48	10301182	SMAN 1 SITUJUAH LIMO NAGARI	NEGERI	SMA	lima puluh kota	-	45.000.000,00	45.000.000,00	36.765.000,00	-	8.235.000,00	45.000.000,00	-
49	10301184	SMAN 1 LAREH SAGO HALABAN	NEGERI	SMA	lima puluh kota	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
50	10301576	SMAN 1 PANTAI CERMIN	NEGERI	SMA	Solok	472.856	-	472.856,00	-	-	-	-	472.856,00
51	10301574	SMAN 1 LEMBAH GUMANTI	NEGERI	SMA	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-
52	10308150	SMAN 1 PAYUNG SEKAKI	NEGERI	SMA	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-
53	10301575	SMAN 1 LEMBANG JAYA	NEGERI	SMA	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-
54	10308439	SMAN 2 LEMBANG JAYA	NEGERI	SMA	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-
55	69862591	SMAN 2 SUMATERA BARAT	NEGERI	SMA	Solok	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
56	10301592	SMAN 1 GUNUNG TALANG	NEGERI	SMA	Solok	11.566.743	90.000.000,00	101.566.743,00	86.749.643,00	-	7.600.000,00	94.349.643,00	7.217.100,00
57	10301579	SMAN 2 GUNUNG TALANG	NEGERI	SMA	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-
58	10301590	SMAN 1 BUKIT SUNDI	NEGERI	SMA	Solok	11.870.885	90.000.000,00	101.870.885,00	21.797.000,00	5.200.000,00	48.409.200,00	75.406.200,00	26.464.685,00
59	10301573	SMAN 1 KUBUNG	NEGERI	SMA	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-
60	10301582	SMAN 1 IX KT SUNGAI LASI	NEGERI	SMA	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-
61	10301577	SMAN 1 X KOTO DIATAS	NEGERI	SMA	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-
62	10301578	SMAN 1 X KT SINGKARAK	NEGERI	SMA	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-
63	10301580	SMAN 2 X KT SINGKARAK	NEGERI	SMA	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-
64	10301581	SMAN 1 JUNJUNG SIRIH	NEGERI	SMA	Solok	4.887.870	-	4.887.870,00	4.887.870,00	-	-	4.887.870,00	-
65	10301583	SMAN 1 HILIRAN GUMANTI	NEGERI	SMA	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-
66	10310636	SMAN 2 HILIRAN GUMANTI	NEGERI	SMA	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-
67	10310738	SMAN 1 TIGO LURAH	NEGERI	SMA	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-
68	10301591	SMAN 1 DANAU KEMBAR	NEGERI	SMA	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-
69	10301791	SMAN 1 BATANG ANAI	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-
70	69826561	SMAN 2 Batang Anai	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-

No	NPSN	Nama Unit	STATUS	JENJANG	Kab / Kota	Salur Kinerja		Salur Kinerja	REALISASI BELANJA BOS KINERJA 2024				Total SILPA BOS KINERJA 2024 PER 31 DESEMBER 2024
						Silpa Kinerja 2023	Salur Kinerja		BELANJA BRG JASA	MODAL		TOTAL REALISASI BOS KINERJA 2024	
										PERALATAN & MESIN	ASET TETAP LAINNYA		
71	10301790	SMAN 1 LUBUK ALUNG	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-
72	69823281	SMAN 2 Lubuk Alung	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-
73	10305548	SMAN 1 ULAKAN TAPAKIS	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-
74	10305547	SMAN 1 NAN SABARIS	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-
75	10305549	SMAN 1 2X11 ENAM LINGKUNG	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
76	10305569	SMAN 1 VII KOTO SUNGAI SARIK	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-
77	69822703	SMAN 2 VII KOTO SUNGAI SARIK	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
78	10305566	SMAN 1 V KOTO KAMPUNG DALAM	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-
79	10305565	SMAN 1 SUNGAI LIMAU	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-
80	10305570	SMAN 2 SUNGAI LIMAU	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
81	10305564	SMAN 1 SUNGAI GERINGGING	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-
82	10305562	SMAN 1 IV KOTO A MALINTANG	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-
83	69829357	SMAN 1 BATANG GASAN	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-
84	10305568	SMAN 1 V KOTO TIMUR	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-
85	69946914	SMAN 1 PATAMUAN	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-
86	10305563	SMAN 1 PADANG SAGO	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-
87	10305560	SMAN 1 2X11 ENAM KAYU TANAM	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-
88	10305561	SMAN 1 ENAM LINGKUNG	NEGERI	SMA	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-
89	10302013	SMAN 1 LUNANG	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
90	10302022	SMAN 1 BASA AMPEK BALAI	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
91	69987102	SMAN 2 BASA AMPEK BALAI	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
92	10302015	SMAN 1 PANCUNG SOAL	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	45.000.000,00	45.000.000,00	34.900.000,00	-	10.100.000,00	45.000.000,00	-
93	10302011	SMAN 1 LINGGO SARI BAGANTI	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
94	69987076	SMAN 2 Linggo Sari Baganti	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
95	10302016	SMAN 1 RANAH PESISIR	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
96	10308260	SMAN 2 RANAH PESISIR	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
97	10302010	SMAN 1 LENGAYANG	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
98	10302019	SMAN 2 LENGAYANG	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
99	10307602	SMAN 3 LENGAYANG	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
100	10302017	SMAN 1 SUTERA	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
101	10310901	SMAN 2 SUTERA	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
102	10302021	SMAN 1 BATANG KAPAS	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
103	10302018	SMAN 2 BATANG KAPAS	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
104	10302014	SMAN 1 PAINAN	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00	-
105	10302020	SMAN 2 PAINAN	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00	-
106	10310795	SMAN 3 PAINAN	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
107	10302009	SMAN 1 BAYANG	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	45.000.000,00	45.000.000,00	9.264.300,00	-	35.735.700,00	45.000.000,00	-
108	10308089	SMAN 2 BAYANG	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
109	10308163	SMAN 1 KOTO XI TARUSAN	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
110	10307604	SMAN 2 KOTO XI TARUSAN	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-

No	NPSN	Nama Unit	STATUS	JENJANG	Kab / Kota	Salur Kinerja		Salur Kinerja	REALISASI BELANJA BOS KINERJA 2024				Total SILPA BOS KINERJA 2024 PER 31 DESEMBER 2024
						Silpa Kinerja 2023	Salur Kinerja		BELANJA BRG JASA	MODAL		TOTAL REALISASI BOS KINERJA 2024	
										PERALATAN & MESIN	ASET TETAP LAINNYA		
111	10302034	SMAN 1 NAGARI IV BAYANG UTARA	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
112	10308231	SMAN 1 SILAUT	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
113	10308265	SMAN 1 AIR PURA	NEGERI	SMA	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
114	10302400	SMAN 1 X KOTO	NEGERI	SMA	Tanah Datar	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
115	10302475	SMAN 1 BATIPUH	NEGERI	SMA	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-
116	10302436	SMAN 1 PARIANGAN	NEGERI	SMA	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-
117	10302382	SMAN 1 RAMBATAN	NEGERI	SMA	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-
118	10302402	SMAN 2 RAMBATAN	NEGERI	SMA	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-
119	10302476	SMAN 1 BATU SANGKAR	NEGERI	SMA	Tanah Datar	2.285.000	45.000.000,00	47.285.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	2.285.000,00
120	10307799	SMAN 3 BATU SANGKAR	NEGERI	SMA	Tanah Datar	6.319.493	90.000.000,00	96.319.493,00	46.146.000,00	-	-	46.146.000,00	50.173.493,00
121	10302401	SMAN 2 BATU SANGKAR	NEGERI	SMA	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-
122	10302492	SMAN 1 PADANG GANTING	NEGERI	SMA	Tanah Datar	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
123	10302404	SMAN 2 LINTAU BUO	NEGERI	SMA	Tanah Datar	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
124	10302399	SMAN 1 SUNGAYANG	NEGERI	SMA	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-
125	10302398	SMAN 1 SUNGAI TARAB	NEGERI	SMA	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-
126	10302403	SMAN 2 SUNGAI TARAB	NEGERI	SMA	Tanah Datar	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
127	10302397	SMAN 1 SALIMPAUNG	NEGERI	SMA	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-
128	10302477	SMAN 1 LINTAU BUO	NEGERI	SMA	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-
129	10307884	SMAN 10 SIJUNJUNG	NEGERI	SMA	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-
130	10308127	SMAN 11 SIJUNJUNG	NEGERI	SMA	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-
131	69946653	SMAN 13 SIJUNJUNG	NEGERI	SMA	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-
132	10302804	SMAN 6 SIJUNJUNG	NEGERI	SMA	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-
133	10302821	SMAN 3 SIJUNJUNG	NEGERI	SMA	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-
134	10302823	SMAN 1 SIJUNJUNG	NEGERI	SMA	Sijunjung	2.000.000	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-
135	10302822	SMAN 2 SIJUNJUNG	NEGERI	SMA	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-
136	10307989	SMAN 9 SIJUNJUNG	NEGERI	SMA	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-
137	10302806	SMAN 4 SIJUNJUNG	NEGERI	SMA	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-
138	10302788	SMAN 7 SIJUNJUNG	NEGERI	SMA	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-
139	10302805	SMAN 5 SIJUNJUNG	NEGERI	SMA	Sijunjung	16.987.187	90.000.000,00	106.987.187,00	61.313.224,00	-	31.764.600,00	93.077.824,00	13.909.363,00
140	10302787	SMAN 8 SIJUNJUNG	NEGERI	SMA	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-
141	10308287	SMAN 12 SIJUNJUNG	NEGERI	SMA	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-
142	69903388	SMAN 1 PAGAI UTARA	NEGERI	SMA	Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	-	-	-	-
143	10302979	SMAN 1 SIPORA	NEGERI	SMA	Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	-	-	-	-
144	10302978	SMAN 1 SIBERUT SELATAN	NEGERI	SMA	Kepulauan Mentawai	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
145	10302982	SMAN 1 SIBERUT UTARA	NEGERI	SMA	Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	-	-	-	-
146	69917690	SMAN 1 SIBERUT BARAT	NEGERI	SMA	Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	-	-	-	-
147	69809505	SMAN 1 SIBERUT BARAT DAYA	NEGERI	SMA	Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	-	-	-	-
148	10310733	SMAN 1 SIBERUT TENGAH	NEGERI	SMA	Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	-	-	-	-
149	10302980	SMAN 2 SIPORA	NEGERI	SMA	Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	-	-	-	-
150	69809506	SMAN 2 SIKAKAP	NEGERI	SMA	Kepulauan Mentawai	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-

No	NPSN	Nama Unit	STATUS	JENJANG	Kab / Kota	Salur Kinerja		Salur Kinerja	REALISASI BELANJA BOS KINERJA 2024				Total SILPA BOS KINERJA 2024 PER 31 DESEMBER 2024
						Silpa Kinerja 2023	Salur Kinerja		BELANJA BRG JASA	MODAL		TOTAL REALISASI BOS KINERJA 2024	
										PERALATAN & MESIN	ASET TETAP LAINNYA		
151	10302981	SMAN 1 PAGAI UTARA SELATAN	NEGERI	SMA	Kepulauan Mentawai	-	90.000.000,00	90.000.000,00	79.460.000,00	-	10.540.000,00	90.000.000,00	-
152	69903167	SMAN 1 PAGAI SELATAN	NEGERI	SMA	Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	-	-	-	-
153	69946645	SMAN 10 SOLOK SELATAN	NEGERI	SMA	Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
154	10306748	SMAN 3 SOLOK SELATAN	NEGERI	SMA	Solok Selatan	143.391	45.000.000,00	45.143.391,00	45.143.391,00	-	-	45.143.391,00	-
155	10303376	SMAN 6 SOLOK SELATAN	NEGERI	SMA	Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
156	10303367	SMAN 1 SOLOK SELATAN	NEGERI	SMA	Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
157	10303377	SMAN 4 SOLOK SELATAN	NEGERI	SMA	Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
158	10303364	SMAN 5 SOLOK SELATAN	NEGERI	SMA	Solok Selatan	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
159	10303366	SMAN 2 SOLOK SELATAN	NEGERI	SMA	Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
160	10310873	SMAN 08 SOLOK SELATAN	NEGERI	SMA	Solok Selatan	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
161	10307562	SMAN 7 SOLOK SELATAN	NEGERI	SMA	Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
162	69786567	SMAN 9 SOLOK SELATAN	NEGERI	SMA	Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
163	69946860	SMAN 11 SOLOK SELATAN	NEGERI	SMA	Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
164	10303216	SMAN 1 SUNGAI RUMBAI	NEGERI	SMA	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-
165	69953275	SMAN 2 SUNGAI RUMBAI	NEGERI	SMA	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-
166	69853525	SMAN UNGGUL DHARMASRAYA	NEGERI	SMA	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-
167	10303218	SMAN 1 KOTO BARU	NEGERI	SMA	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-
168	10304875	SMAN 2 KOTO BARU	NEGERI	SMA	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-
169	10303219	SMAN 1 SITIUNG	NEGERI	SMA	Dharmasraya	-	90.000.000,00	90.000.000,00	62.552.000,00	-	27.448.000,00	90.000.000,00	-
170	69986157	SMAN 2 SITIUNG	NEGERI	SMA	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-
171	10303217	SMAN 1 PULAU PUNJUNG	NEGERI	SMA	Dharmasraya	-	45.000.000,00	45.000.000,00	24.580.500,00	-	20.419.500,00	45.000.000,00	-
172	69986156	SMAN 1 SIKABAU	NEGERI	SMA	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-
173	10304874	SMAN 2 PULAU PUNJUNG	NEGERI	SMA	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-
174	69774851	SMAN 1 IX Koto	NEGERI	SMA	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-
175	10304873	SMAN 1 TIMPEH	NEGERI	SMA	Dharmasraya	-	45.000.000,00	45.000.000,00	21.462.000,00	-	23.538.000,00	45.000.000,00	-
176	69774852	SMAN 1 Koto Salak	NEGERI	SMA	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-
177	69954291	SMAN 1 TIUMANG	NEGERI	SMA	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-
178	69953273	SMAN 1 ASAM JUJUHAN	NEGERI	SMA	Dharmasraya	16.260.000	45.000.000,00	61.260.000,00	44.450.000,00	-	-	44.450.000,00	16.810.000,00
179	10308311	SMAN 1 KOTO BESAR	NEGERI	SMA	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-
180	10303091	SMAN 1 SUNGAI BEREMAS	NEGERI	SMA	Pasaman Barat	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
181	10306086	SMAN 1 RANAH BATAHAN	NEGERI	SMA	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
182	69987232	SMAN 2 RANAH BATAHAN	NEGERI	SMA	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
183	10303089	SMAN 1 LEMBAH MELINTANG	NEGERI	SMA	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
184	10303086	SMAN 1 GUNUNG TULEH	NEGERI	SMA	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
185	10303090	SMAN 1 PASAMAN	NEGERI	SMA	Pasaman Barat	9.736.000	45.000.000,00	54.736.000,00	54.736.000,00	-	-	54.736.000,00	-
186	69764539	SMAN 2 PASAMAN	NEGERI	SMA	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
187	10303087	SMAN 1 KINALI	NEGERI	SMA	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
188	69948099	SMAN 2 KINALI	NEGERI	SMA	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
189	10303106	SMAN 1 TALAMAU	NEGERI	SMA	Pasaman Barat	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
190	10303088	SMAN 1 KOTO BALINGKA	NEGERI	SMA	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-

No	NPSN	Nama Unit	STATUS	JENJANG	Kab / Kota	Salur Kinerja		Salur Kinerja	REALISASI BELANJA BOS KINERJA 2024				Total SILPA BOS KINERJA 2024 PER 31 DESEMBER 2024
						Silpa Kinerja 2023	Salur Kinerja		BELANJA BRG JASA	MODAL		TOTAL REALISASI BOS KINERJA 2024	
										PERALATAN & MESIN	ASET TETAP LAINNYA		
191	10306085	SMAN 1 LUHAK NAN DUO	NEGERI	SMA	Pasaman Barat	-	45.000.000,00	45.000.000,00	28.082.000,00	-	-	28.082.000,00	16.918.000,00
192	10307806	SMAN 1 SUNGAI AUR	NEGERI	SMA	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
193	10307523	SMAN 1 BUKITTINGGI	NEGERI	SMA	Kota Bukittinggi	-	160.000.000,00	160.000.000,00	150.000.000,00	-	10.000.000,00	160.000.000,00	-
194	10307525	SMAN 3 BUKITTINGGI	NEGERI	SMA	Kota Bukittinggi	-	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00	-
195	10307526	SMAN 4 BUKIT TINGGI	NEGERI	SMA	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-	-	-	-
196	10307527	SMAN 5 BUKITTINGGI	NEGERI	SMA	Kota Bukittinggi	-	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	90.000.000,00	-
197	10307524	SMAN 2 BUKITTINGGI	NEGERI	SMA	Kota Bukittinggi	1.410.000	-	1.410.000,00	1.410.000,00	-	-	1.410.000,00	-
198	10303463	SMAN 11 PADANG	NEGERI	SMA	Kota Padang	28.659.800	45.000.000,00	73.659.800,00	28.659.800,00	-	40.722.000,00	69.381.800,00	4.278.000,00
199	10303482	SMAN 14 PADANG	NEGERI	SMA	Kota Padang	2.945.000	-	2.945.000,00	-	-	-	-	2.945.000,00
200	10303501	SMAN 4 PADANG	NEGERI	SMA	Kota Padang	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
201	10303503	SMAN 6 PADANG	NEGERI	SMA	Kota Padang	-	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00	-
202	10303462	SMAN 10 PADANG	NEGERI	SMA	Kota Padang	13.562.972	45.000.000,00	58.562.972,00	20.570.172,00	-	37.992.800,00	58.562.972,00	-
203	10303499	SMAN 2 PADANG	NEGERI	SMA	Kota Padang	6.215.572	45.000.000,00	51.215.572,00	29.190.572,00	-	-	29.190.572,00	22.025.000,00
204	10303461	SMAN 1 PADANG	NEGERI	SMA	Kota Padang	7.794.000	155.000.000,00	162.794.000,00	139.545.000,00	-	-	139.545.000,00	23.249.000,00
205	10303500	SMAN 3 PADANG	NEGERI	SMA	Kota Padang	4.296.087	45.000.000,00	49.296.087,00	49.296.087,00	-	-	49.296.087,00	-
206	10303480	SMAN 12 PADANG	NEGERI	SMA	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-
207	69948163	SMAN 4 SUMATERA BARAT (KEBERBAKATAN OLAHRAGA)	NEGERI	SMA	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-
208	10308323	SMAN 16 PADANG	NEGERI	SMA	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-
209	10303502	SMAN 5 PADANG	NEGERI	SMA	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-
210	10304833	SMAN 15 PADANG	NEGERI	SMA	Kota Padang	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
211	10303506	SMAN 9 PADANG	NEGERI	SMA	Kota Padang	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
212	10303481	SMAN 13 PADANG	NEGERI	SMA	Kota Padang	-	45.000.000,00	45.000.000,00	10.821.000,00	-	34.179.000,00	45.000.000,00	-
213	10303504	SMAN 7 PADANG	NEGERI	SMA	Kota Padang	145.441	45.000.000,00	45.145.441,00	45.145.441,00	-	-	45.145.441,00	-
214	10303505	SMAN 8 PADANG	NEGERI	SMA	Kota Padang	-	45.000.000,00	45.000.000,00	2.602.600,00	-	42.397.400,00	45.000.000,00	-
215	10304698	SMAN 3 PADANG PANJANG	NEGERI	SMA	Kota Padang Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-
216	10303611	SMAN 1 PADANG PANJANG	NEGERI	SMA	Kota Padang Panjang	-	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00	-
217	10310903	SMAN 1 SUMATERA BARAT	NEGERI	SMA	Kota Padang Panjang	10.295.150	160.000.000,00	170.295.150,00	170.295.150,00	-	-	170.295.150,00	-
218	10303610	SMAN 2 PADANG PANJANG	NEGERI	SMA	Kota Padang Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-
219	10303691	SMAN 1 SAWAHLUNTO	NEGERI	SMA	Kota Sawah Lunto	21.219.550	-	21.219.550,00	-	-	-	-	21.219.550,00
220	69815459	SMAN 3 SAWAHLUNTO	NEGERI	SMA	Kota Sawah Lunto	-	45.000.000,00	45.000.000,00	23.839.400,00	-	21.160.600,00	45.000.000,00	-
221	10303692	SMAN 2 SAWAHLUNTO	NEGERI	SMA	Kota Sawah Lunto	28.503.522	90.000.000,00	118.503.522,00	62.962.900,00	-	49.667.100,00	112.630.000,00	5.873.522,00
222	10303781	SMAN 1 SOLOK	NEGERI	SMA	Kota Solok	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
223	10303780	SMAN 2 SOLOK	NEGERI	SMA	Kota Solok	-	-	-	-	-	-	-	-
224	10303779	SMAN 3 SOLOK	NEGERI	SMA	Kota Solok	-	-	-	-	-	-	-	-
225	10303766	SMAN 4 SOLOK	NEGERI	SMA	Kota Solok	-	-	-	-	-	-	-	-
226	10310597	SMAN 4 PAYAKUMBUH	NEGERI	SMA	Kota Payakumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-
227	10303904	SMAN 1 PAYAKUMBUH	NEGERI	SMA	Kota Payakumbuh	-	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00	-
228	10303905	SMAN 2 PAYAKUMBUH	NEGERI	SMA	Kota Payakumbuh	-	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	70.000.000,00	-
229	10303906	SMAN 3 PAYAKUMBUH	NEGERI	SMA	Kota Payakumbuh	-	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	-	-	160.000.000,00	-

No	NPSN	Nama Unit	STATUS	JENJANG	Kab / Kota	Salur Kinerja		Salur Kinerja	REALISASI BELANJA BOS KINERJA 2024				Total SILPA BOS KINERJA 2024 PER 31 DESEMBER 2024
						Silpa Kinerja 2023	Salur Kinerja		BELANJA BRG JASA	MODAL		TOTAL REALISASI BOS KINERJA 2024	
										PERALATAN & MESIN	ASET TETAP LAINNYA		
230	60724950	SMAN 5 PAYAKUMBUH	NEGERI	SMA	Kota Payakumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-
231	10307311	SMAN 3 PARIAMAN	NEGERI	SMA	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-
232	10307309	SMAN 1 PARIAMAN	NEGERI	SMA	Kota Pariaman	-	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00	-
233	10307310	SMAN 2 PARIAMAN	NEGERI	SMA	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-
234	10307312	SMAN 4 PARIAMAN	NEGERI	SMA	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-
235	10311405	SMAN 6 PARIAMAN	NEGERI	SMA	Kota Pariaman	-	90.000.000,00	90.000.000,00	39.877.200,00	20.049.000,00	30.073.800,00	90.000.000,00	-
236	10308546	SMAN 5 PARIAMAN	NEGERI	SMA	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-
237	69849081	SMKN 1 TANJUNG MUTIARA	NEGERI	SMK	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-
238	10300272	SMKN 1 LUBUK BASUNG	NEGERI	SMK	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-
239	10304893	SMKN 2 LUBUK BASUNG	NEGERI	SMK	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-
240	10300273	SMKN 1 TANJUNG RAYA	NEGERI	SMK	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-
241	10308298	SMKN 1 MATUR	NEGERI	SMK	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-
242	10310706	SMKN 1 BASO	NEGERI	SMK	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-
243	10308138	SMKN 1 TILATANG KAMANG	NEGERI	SMK	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-
244	10304892	SMKN 1 PALEMBAYAN	NEGERI	SMK	Agam	13.300	-	13.300,00	13.300,00	-	-	13.300,00	-
245	10300274	SMKN 1 AMPEK ANGKEK	NEGERI	SMK	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-
246	10310498	SMKN 1 AMPEK NAGARI	NEGERI	SMK	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-
247	10300826	SMKN 1 BONJOL	NEGERI	SMK	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-
248	10300825	SMKN 1 LUBUK SIKAPING	NEGERI	SMK	Pasaman	-	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00	-
249	69896555	SMKN 1 DUA KOTO	NEGERI	SMK	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-
250	69754554	SMKN 1 SIMPANG ALAHAN MATI	NEGERI	SMK	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-
251	10304195	SMKN 1 PADANG GALUGUR	NEGERI	SMK	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-
252	10307598	SMKN 1 RAO SELATAN	NEGERI	SMK	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-
253	10304430	SMKN 1 KECAMATAN LUAK	NEGERI	SMK	lima puluh kota	-	-	-	-	-	-	-	-
254	10310831	SMKN PP PADANG MENGATAS	NEGERI	SMK	lima puluh kota	-	-	-	-	-	-	-	-
255	10304432	SMKN 1 GUGUK	NEGERI	SMK	lima puluh kota	-	-	-	-	-	-	-	-
256	10310872	SMKN 2 KEC GUGUAK	NEGERI	SMK	lima puluh kota	-	-	-	-	-	-	-	-
257	10304431	SMKN 1 SULIKI	NEGERI	SMK	lima puluh kota	-	-	-	-	-	-	-	-
258	10304433	SMKN 1 PANGKALAN	NEGERI	SMK	lima puluh kota	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
259	10310811	SMKN 1 PANTAI CERMIN	NEGERI	SMK	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-
260	10308093	SMKN 1 LEMBAH GUMANTI	NEGERI	SMK	Solok	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
261	10310804	SMKN 2 LEMBAH GUMANTI	NEGERI	SMK	Solok	2.000	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
262	10301518	SMKN 1 GUNUNG TALANG	NEGERI	SMK	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-
263	10308154	SMKN 2 GUNUNG TALANG	NEGERI	SMK	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-
264	10310889	SMKN 1 BUKIT SUNDI	NEGERI	SMK	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-
265	10308095	SMKN 1 X KOTO DIATAS	NEGERI	SMK	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-
266	10307970	SMKN 1 SINGKARAK	NEGERI	SMK	Solok	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
267	10307922	SMKN 1 HILIRAN GUMANTI	NEGERI	SMK	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-
268	10310791	SMKN 1 SUNGAI LIMAU	NEGERI	SMK	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-
269	69829358	SMKN 1 IV KOTO AUR MALINTANG	NEGERI	SMK	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-

No	NPSN	Nama Unit	STATUS	JENJANG	Kab / Kota	Salur Kinerja		Salur Kinerja	REALISASI BELANJA BOS KINERJA 2024				Total SILPA BOS KINERJA 2024 PER 31 DESEMBER 2024
						Silpa Kinerja 2023	Salur Kinerja		BELANJA BRG JASA	MODAL		TOTAL REALISASI BOS KINERJA 2024	
										PERALATAN & MESIN	ASET TETAP LAINNYA		
270	10305575	SMKN 1 SINTUK TOBOH GADANG	NEGERI	SMK	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-
271	10308128	SMKN 1 ENAM LINGKUNG	NEGERI	SMK	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-
272	69773545	SMKN 1 PANCUNG SOAL	NEGERI	SMK	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
273	10310796	SMKN 1 LINGGO SARI BAGANTI	NEGERI	SMK	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
274	10301948	SMKN 1 RANAH PESISIR	NEGERI	SMK	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
275	10308258	SMKN 1 SUTERA	NEGERI	SMK	Pesisir Selatan	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
276	10301942	SMKN 1 PAINAN	NEGERI	SMK	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
277	10301949	SMKN 2 PAINAN	NEGERI	SMK	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
278	10308179	SMKN 1 KOTO XI TARUSAN	NEGERI	SMK	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
279	69987098	SMKN 1 SILAUT	NEGERI	SMK	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
280	10309786	SMKN 1 RANAH AMPEK HULU TAPAN	NEGERI	SMK	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
281	10302406	SMKN 1 BATIPUH	NEGERI	SMK	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-
282	10302395	SMKN 2 BATUSANGKAR	NEGERI	SMK	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-
283	10302407	SMKN 1 BATUSANGKAR	NEGERI	SMK	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-
284	10302396	SMKN 1 LINTAU BUO	NEGERI	SMK	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-
285	10308142	SMKN 1 TANJUNG BARU	NEGERI	SMK	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-
286	10306287	SMKN 4 SIJUNJUNG	NEGERI	SMK	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-
287	10308316	SMKN 6 SIJUNJUNG	NEGERI	SMK	Sijunjung	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
288	69773528	SMKN 7 SIJUNJUNG	NEGERI	SMK	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-
289	10302786	SMKN 2 SIJUNJUNG	NEGERI	SMK	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-
290	10305639	SMKN 3 SIJUNJUNG	NEGERI	SMK	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-
291	10308315	SMKN 5 SIJUNJUNG	NEGERI	SMK	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-
292	10302785	SMKN 1 SIJUNJUNG	NEGERI	SMK	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-
293	69991477	SMKN 8 Sijunjung	NEGERI	SMK	Sijunjung	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
294	69851452	SMKN 1 KEPULAUN MENTAWAI	NEGERI	SMK	Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	-	-	-	-
295	69900920	SMKN 2 KEPULAUAN MENTAWAI	NEGERI	SMK	Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	-	-	-	-
296	69953380	SMKN 3 KEPULAUAN MENTAWAI	NEGERI	SMK	Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	-	-	-	-
297	10306968	SMKN 3 SOLOK SELATAN	NEGERI	SMK	Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
298	10306966	SMKN 1 SOLOK SELATAN	NEGERI	SMK	Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
299	10308133	SMKN 5 SOLOK SELATAN	NEGERI	SMK	Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
300	10306969	SMKN 4 SOLOK SELATAN	NEGERI	SMK	Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
301	10306967	SMKN 2 SOLOK SELATAN	NEGERI	SMK	Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
302	10304876	SMKN 1 SUNGAI RUMBAI	NEGERI	SMK	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-
303	10303215	SMKN 1 KOTO BARU	NEGERI	SMK	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-
304	69853536	SMKN 1 SITIUNG	NEGERI	SMK	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-
305	10303214	SMKN 1 PULAU PUNJUNG	NEGERI	SMK	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-
306	10308286	SMKN 2 PULAU PUNJUNG	NEGERI	SMK	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-
307	69853537	SMKN 1 TIMPEH	NEGERI	SMK	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-
308	69986158	SMKN 1 PADANG LAWEH	NEGERI	SMK	Dharmasraya	-	45.000.000,00	45.000.000,00	44.955.000,00	-	-	44.955.000,00	45.000,00

No	NPSN	Nama Unit	STATUS	JENJANG	Kab / Kota	Salur Kinerja		Salur Kinerja	REALISASI BELANJA BOS KINERJA 2024				Total SILPA BOS KINERJA 2024 PER 31 DESEMBER 2024
						Silpa Kinerja 2023	Salur Kinerja		BELANJA BRG JASA	MODAL		TOTAL REALISASI BOS KINERJA 2024	
										PERALATAN & MESIN	ASET TETAP LAINNYA		
309	69946934	SMKN 1 KOTO BESAR	NEGERI	SMK	Dharmasraya	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
310	10310878	SMKN 1 RANAH BATAHAN	NEGERI	SMK	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
311	10306096	SMKN 1 LEMBAH MELINTANG	NEGERI	SMK	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
312	69905465	SMKN 1 GUNUNG TULEH	NEGERI	SMK	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
313	10310877	SMKN 1 PASAMAN	NEGERI	SMK	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
314	10308183	SMKN 1 KINALI	NEGERI	SMK	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
315	10306097	SMKN 1 TALAMAU	NEGERI	SMK	Pasaman Barat	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
316	69968546	SMKN 1 KOTO BALINGKA	NEGERI	SMK	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
317	10306135	SMKN 1 SASAK RANAH PASISIE	NEGERI	SMK	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
318	69820624	SMKN 1 SUNGAI AUR	NEGERI	SMK	Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
319	10307532	SMKN 1 BUKITTINGGI	NEGERI	SMK	Kota Bukittinggi	-	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00	-
320	10307533	SMKN 2 BUKITTINGGI	NEGERI	SMK	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-	-	-	-
321	10304850	SMKN 4 PADANG	NEGERI	SMK	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-
322	10304188	SMKN 7 PADANG	NEGERI	SMK	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-
323	10304852	SMKN 8 PADANG	NEGERI	SMK	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-
324	10304848	SMKN 2 PADANG	NEGERI	SMK	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-
325	10303507	SMKN 6 PADANG	NEGERI	SMK	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-
326	10304849	SMKN 3 PADANG	NEGERI	SMK	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-
327	10304853	SMKN 9 PADANG	NEGERI	SMK	Kota Padang	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	-
328	10304851	SMKN 5 PADANG	NEGERI	SMK	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-
329	10304847	SMKN 1 PADANG	NEGERI	SMK	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-
330	10310780	SMKN 1 SUMATERA BARAT	NEGERI	SMK	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-
331	69734159	SMK PP NEGERI PADANG	NEGERI	SMK	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-
332	10307617	SMKN 10 PADANG	NEGERI	SMK	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-
333	10303607	SMKN 1 PADANG PANJANG	NEGERI	SMK	Kota Padang Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-
334	10303606	SMKN 2 PADANG PANJANG	NEGERI	SMK	Kota Padang Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-
335	10303674	SMKN 2 SAWAHLUNTO	NEGERI	SMK	Kota Sawah Lunto	-	-	-	-	-	-	-	-
336	10303684	SMKN 1 SAWAHLUNTO	NEGERI	SMK	Kota Sawah Lunto	-	-	-	-	-	-	-	-
337	10303768	SMKN 1 SOLOK	NEGERI	SMK	Kota Solok	-	-	-	-	-	-	-	-
338	10303770	SMKN 2 SOLOK	NEGERI	SMK	Kota Solok	-	-	-	-	-	-	-	-
339	10310768	SMKN 3 KOTA SOLOK	NEGERI	SMK	Kota Solok	-	-	-	-	-	-	-	-
340	10303912	SMKN 1 PAYAKUMBUH	NEGERI	SMK	Kota Payakumbuh	-	70.000.000,00	70.000.000,00	58.146.000,00	-	11.854.000,00	70.000.000,00	-
341	10303913	SMKN 2 PAYAKUMBUH	NEGERI	SMK	Kota Payakumbuh	-	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00	-
342	10303914	SMKN 3 PAYAKUMBUH	NEGERI	SMK	Kota Payakumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-
343	69947085	SMKN 4 PAYAKUMBUH	NEGERI	SMK	Kota Payakumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-
344	10307421	SMKN 2 PARIAMAN	NEGERI	SMK	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-
345	10308547	SMKN 4 PARIAMAN	NEGERI	SMK	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-
346	10307439	SMKN 3 PARIAMAN	NEGERI	SMK	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-
347	10307420	SMKN 1 PARIAMAN	NEGERI	SMK	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-
348	70032804	SMK Kesehatan Negeri Akabiluru	NEGERI	SMK	Lima Puluh Koto	-	-		-	-	-		

No	NPSN	Nama Unit	STATUS	JENJANG	Kab / Kota	Salur Kinerja		Salur Kinerja	REALISASI BELANJA BOS KINERJA 2024				Total SILPA BOS KINERJA 2024 PER 31 DESEMBER 2024
						Silpa Kinerja 2023	Salur Kinerja		BELANJA BRG JASA	MODAL		TOTAL REALISASI BOS KINERJA 2024	
										PERALATAN & MESIN	ASET TETAP LAINNYA		
349	10300459	SLBN 1 LUBUK BASUNG	NEGERI	SLB	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-
350	10309211	SLBN 1 AMPEK ANGKEK	NEGERI	SLB	Agam	-	-	-	-	-	-	-	-
351	69786957	SLBN 1 LUBUK SIKAPING	NEGERI	SLB	Pasaman	-	35.000.000,00	35.000.000,00	29.500.000,00	-	-	29.500.000,00	5.500.000,00
352	10300856	SLBN 1 PANTI	NEGERI	SLB	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-
353	10301305	SLBN 1 HARAU	NEGERI	SLB	lima puluh kota	6.798.196	36.250.000,00	43.048.196,00	16.962.196,00	-	-	16.962.196,00	26.086.000,00
354	69948138	SLBN 1 ALAHAN PANJANG	NEGERI	SLB	Solok	-	-	-	-	-	-	-	-
355	10304199	SLBN 1 KUBUNG	NEGERI	SLB	Solok	-	35.000.000,00	35.000.000,00	32.869.000,00	-	-	32.869.000,00	2.131.000,00
356	10310573	SLBN 1 LINGGO SARI BAGANTI	NEGERI	SLB	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
357	10308223	SLBN 1 RANAH PESISIR	NEGERI	SLB	Pesisir Selatan	-	140.000.000,00	140.000.000,00	87.506.510,00	-	-	87.506.510,00	52.493.490,00
358	10308259	SLBN 1 LENGAYANG	NEGERI	SLB	Pesisir Selatan	-	36.250.000,00	36.250.000,00	31.606.000,00	-	4.644.000,00	36.250.000,00	-
359	10301850	SLBN 1 PAINAN	NEGERI	SLB	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
360	10310471	SLBN 1 LIMA KAUM	NEGERI	SLB	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-
361	10302503	SLBN 1 PAGARUYUNG	NEGERI	SLB	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-
362	10311324	SLBN 1 KAMANG BARU	NEGERI	SLB	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-
363	10302887	SLBN 1 MUARO SIJUNJUNG	NEGERI	SLB	Sijunjung	-	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00	-
364	10310469	SLBN 1 SANGIR	NEGERI	SLB	Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
365	10306838	SLBN 1 SUNGAI PAGU	NEGERI	SLB	Solok Selatan	-	36.250.000,00	36.250.000,00	36.250.000,00	-	-	36.250.000,00	-
366	10308107	SLBN 1 PULAU PUNJUNG	NEGERI	SLB	Dharmasraya	-	36.250.000,00	36.250.000,00	36.250.000,00	-	-	36.250.000,00	-
367	10310045	SLBN 1 SUNGAI AUR	NEGERI	SLB	Pasaman Barat	-	36.250.000,00	36.250.000,00	36.250.000,00	-	-	36.250.000,00	-
368	10303425	SLBN 1 BUKITTINGGI	NEGERI	SLB	Kota Bukittinggi	-	72.500.000,00	72.500.000,00	72.500.000,00	-	-	72.500.000,00	-
369	10307647	SLBN 1 PADANG	NEGERI	SLB	Kota Padang	-	36.250.000,00	36.250.000,00	29.376.200,00	-	-	29.376.200,00	6.873.800,00
370	10303548	SLBN 2 PADANG	NEGERI	SLB	Kota Padang	35.912.646	35.000.000,00	70.912.646,00	70.912.646,00	-	-	70.912.646,00	-
371	10303644	SLBN 1 PADANG PANJANG	NEGERI	SLB	Kota Padang Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-
372	10303703	SLBN 1 SAWAHLUNTO	NEGERI	SLB	Kota Sawah Lunto	11.965.206	36.250.000,00	48.215.206,00	33.915.206,00	-	-	33.915.206,00	14.300.000,00
373	10308152	SLBN 2 SAWAHLUNTO	NEGERI	SLB	Kota Sawah Lunto	-	-	-	-	-	-	-	-
374	10303751	SLBN 1 SOLOK	NEGERI	SLB	Kota Solok	-	-	-	-	-	-	-	-
375	10307795	SLBN 1 PAYAKUMBUH	NEGERI	SLB	Kota Payakumbuh	2.604	35.000.000,00	35.002.604,00	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00	2.604,00
376	10310695	SLBN 1 PARIAMAN	NEGERI	SLB	Kota Pariaman	4.937.277	36.250.000,00	41.187.277,00	41.187.277,00	-	-	41.187.277,00	-
377	10307423	SLBN 2 PARIAMAN	NEGERI	SLB	Kota Pariaman	8.787.350	36.250.000,00	45.037.350,00	45.037.350,00	-	-	45.037.350,00	-
						297.240.634,00	**5.648.750.000,00**	**5.945.990.634,00**	**5.047.262.971,00**	**37.870.000,00**	**534.348.200,00**	**5.619.481.171,00**	**326.509.463,00**

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Rekapitulasi Realisasi Hasil Rekonsiliasi Dana BOS TAHUN 2024

NO.	URAIAN	NILAI (Rp)
A.	**Sisa Saldo 2021**	**51.462.511,00**
1	SMA	43.233.704
2	SMK	8.161.303
3	SLB	67.504
B.	**Reguler 2024**	**844.074.315,00**
1	SMA	502.224.230,00
2	SMK	284.982.214,00
3	SLB	56.867.871,00
C.	**Kinerja 2024**	**326.509.463,00**
1	SMA	219.075.569,00
2	SMK	47.000,00
3	SLB	107.386.894,00
TOTAL		**1.222.046.289,00**

PROVINSI SUMATERA BARAT
Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi Di DPRD
Provinsi Sumatera Barat Hasil Pemilu Tahun 2024

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	JUMLAH KURSI	NILAI PER SUARA	JUMLAH BULAN	JUMLAH BANTUAN
1	*2*	*3*	*4*	*4*	*4*	*5*
1	PARTAI GERINDRA	904.164	24	1.200,00	12	552.460.400,00
2	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	843.098	24	1.200,00	12	493.049.600,00
3	PARTAI DEMOKRAT	637.772	22	1.200,00	12	397.735.200,00
4	PARTAI AMANAT NASIONAL	659.007	22	1.200,00	12	402.081.600,00
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	645.028	23	1.200,00	12	364.084.800,00
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	363.731	19	1.200,00	12	209.095.200,00
7	PARTAI NASDEM	477.411	23	1.200,00	12	249.216.000,00
8	PDI PERJUANGAN	318.188	17	1.200,00	12	179.884.400,00
9	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	285.783	17	1.200,00	12	156.112.000,00
		5.134.182				3.003.719.200,00

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Konversi)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

No	Uraian	RSAM Bkt	RSJ. HB. Sa'anin	RSUD Solok	RSUD Pariaman	Dinkes	SMK - Disdik	Jumlah
		Realisasi BLUD	Realisasi BLUD	Realisasi BLUD	Realisasi BLUD	Realisasi BLUD	Realisasi BLUD	Realisasi BLUD
A	**PENDAPATAN**							
I	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**							
1	Pendapatan Pajak Daerah							
2	Pendapatan Retribusi Daerah	141.745.330.961,50	28.883.738.650,00	102.693.134.890,00	81.311.894.592,00	19.505.837.286,99		374.139.936.380,49
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan							
4	Pendapatan BLUD	-	-	-	-	-	31.761.198.054,41	31.761.198.054,41
	JUMLAH PENDAPATAN	**141.745.330.961,50**	**28.883.738.650,00**	**102.693.134.890,00**	**81.311.894.592,00**	**19.505.837.286,99**	**31.761.198.054,41**	**405.901.134.434,90**
B	**BELANJA**							
I	**BELANJA OPERASI**							
1	Belanja Pegawai	-	183.579.749,00	-	-	-	-	183.579.749,00
2	Belanja Barang	142.471.487.279,00	28.118.857.833,00	90.165.743.187,00	72.215.348.302,64	16.812.539.967,00	28.567.287.981,10	378.351.264.549,74
	Jumlah Belanja Operasi	**142.471.487.279,00**	**28.302.437.582,00**	**90.165.743.187,00**	**72.215.348.302,64**	**16.812.539.967,00**	**28.567.287.981,10**	**378.534.844.298,74**
II	**BELANJA MODAL**							
1	Belanja Tanah							-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	10.156.253.082,00	308.486.000,00	3.996.841.877,00	4.459.674.575,00	1.050.943.884,00	313.550.194,00	20.285.749.612,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	2.372.394.690,00	387.473.437,00	4.281.881.000,00	1.740.709.390,00		380.194.000,00	9.162.652.517,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	769.466.170,00	-		-	-	769.466.170,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya							-
	Jumlah Belanja Modal	**12.528.647.772,00**	**1.465.425.607,00**	**8.278.722.877,00**	**6.200.383.965,00**	**1.050.943.884,00**	**693.744.194,00**	**30.217.868.299,00**
	JUMLAH BELANJA	**155.000.135.051,00**	**29.767.863.189,00**	**98.444.466.064,00**	**78.415.732.267,64**	**17.863.483.851,00**	**29.261.032.175,10**	**408.752.712.597,74**
C	**SURPLUS / (DEFISIT)**	**(13.254.804.089,50)**	**(884.124.539,00)**	**4.248.668.826,00**	**2.896.162.324,36**	**1.642.353.435,99**	**2.500.165.879,31**	**(2.851.578.162,84)**
	Kas BLUD th.lalu	**24.807.541.142,01**	**2.672.093.078,66**	**493.250.694,50**	**2.134.799.013,67**	**270.234.757,00**	**510.150.541,00**	**30.888.069.226,84**
	SILPA 2024	**(13.254.804.089,50)**	**(884.124.539,00)**	**4.248.668.826,00**	**2.896.162.324,36**	**1.642.353.435,99**	**2.500.165.879,31**	**(2.851.578.162,84)**
	Kas BLUD 2024	**11.552.737.052,51**	**1.787.968.539,66**	**4.741.919.520,50**	**5.030.961.338,03**	**1.912.588.192,99**	**3.010.316.420,31**	**28.036.491.064,00**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - DINAS PENDIDIKAN (SMK)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Konversi)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

No	Uraian	Gabungan			APBD DAN BOS			BLUD		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
A	**PENDAPATAN**									
I	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**									
1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-							
2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00			
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-							
4	Lain-lain PAD	36.357.357.537,00	31.761.198.054,41	87,36		-		36.357.357.537,00	31.761.198.054,41	87,36
	JUMLAH PENDAPATAN	**36.362.357.537,00**	**31.766.198.054,41**	**87,36**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100,00**	**36.357.357.537,00**	**31.761.198.054,41**	**87,36**
B	**BELANJA**									
I	**BELANJA OPERASI**									
1	Belanja Pegawai	1.626.736.829.717,00	1.592.260.716.750,00	97,88	1.626.736.829.717,00	1.592.260.716.750,00	97,88			
2	Belanja Barang	487.934.231.911,00	464.843.702.128,10	95,27	455.327.491.833,00	436.276.414.147,00	95,82	32.606.740.078,00	28.567.287.981,10	87,61
3	Belanja Hibah	76.166.350.000,00	75.824.601.680,00	99,55	76.166.350.000,00	75.824.601.680,00	99,55			
	Jumlah Belanja Operasi	**2.190.837.411.628,00**	**2.132.929.020.558,10**	**97,36**	**2.158.230.671.550,00**	**2.104.361.732.577,00**	**97,50**	**32.606.740.078,00**	**28.567.287.981,10**	**87,61**
II	**BELANJA MODAL**									
1	Belanja Tanah	-	-							
2	Belanja Peralatan dan Mesin	126.412.225.761,00	106.404.458.634,00	84,17	123.703.455.761,00	106.090.908.440,00	85,76	2.708.770.000,00	313.550.194,00	11,58
3	Belanja Gedung dan Bangunan	162.502.995.731,00	134.567.124.579,00	82,81	160.975.997.731,00	134.186.930.579,00	83,36	1.526.998.000,00	380.194.000,00	24,90
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-							
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	43.274.803.967,00	38.442.996.858,00		43.249.803.967,00	38.442.996.858,00	88,89	25.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Modal	**332.190.025.459,00**	**279.414.580.071,00**	**84,11**	**327.929.257.459,00**	**278.720.835.877,00**	**84,99**	**4.260.768.000,00**	**693.744.194,00**	**16,28**
	JUMLAH BELANJA	**2.523.027.437.087,00**	**2.412.343.600.629,10**	**95,61**	**2.486.159.929.009,00**	**2.383.082.568.454,00**	**95,85**	**36.867.508.078,00**	**29.261.032.175,10**	**79,37**
C	**SURPLUS / (DEFISIT)**	**(2.486.665.079.550,00)**	**(2.380.577.402.574,69)**	**95,73**	**(2.486.154.929.009,00)**	**(2.383.077.568.454,00)**	**95,85**	**(510.150.541,00)**	**2.500.165.879,31**	

Kas BLUD th.lalu	510.150.541,00
SILPA 2024	2.500.165.879,31
Kas BLUD 2024	**3.010.316.420,31**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - DINAS KESEHATAN (BKIM, LABKES)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Konversi)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

No	Uraian	Gabungan			APBD			BLUD		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
A	**PENDAPATAN**									
I	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**									
1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-							
2	Pendapatan Retribusi Daerah	19.269.763.568,00	20.604.382.286,99	106,93	1.117.499.063,00	1.098.545.000,00	98,30	18.152.264.505,00	19.505.837.286,99	107,46
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-							
4	Lain-lain PAD	-	-	#DIV/0!		-				
	JUMLAH PENDAPATAN	**19.269.763.568,00**	**20.604.382.286,99**	**106,93**	**1.117.499.063,00**	**1.098.545.000,00**	**98,30**	**18.152.264.505,00**	**19.505.837.286,99**	**107,46**
B	**BELANJA**									
I	**BELANJA OPERASI**									
1	Belanja Pegawai	62.912.828.723,00	57.937.487.672,00	92,09	62.912.828.723,00	57.937.487.672,00	92,09			
2	Belanja Barang	141.575.438.625,00	135.026.208.962,00	95,37	124.634.120.713,00	118.213.668.995,00	94,85	16.941.317.912,00	16.812.539.967,00	99,24
3	Belanja Hibah	2.315.650.000,00	2.290.200.000,00	98,90	2.315.650.000,00	2.290.200.000,00	98,90			
	Jumlah Belanja Operasi	**206.803.917.348,00**	**195.253.896.634,00**	**94,41**	**189.862.599.436,00**	**178.441.356.667,00**	**93,98**	**16.941.317.912,00**	**16.812.539.967,00**	**99,24**
II	**BELANJA MODAL**									
1	Belanja Tanah	-	-							
2	Belanja Peralatan dan Mesin	3.657.473.155,00	3.220.525.184,00	88,05	2.336.291.805,00	2.169.581.300,00	92,86	1.321.181.350,00	1.050.943.884,00	79,55
3	Belanja Gedung dan Bangunan	160.000.000,00	-	0,00			#DIV/0!	160.000.000,00	-	-
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-							
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-							
	Jumlah Belanja Modal	**3.817.473.155,00**	**3.220.525.184,00**	**84,36**	**2.336.291.805,00**	**2.169.581.300,00**	**92,86**	**1.481.181.350,00**	**1.050.943.884,00**	**70,95**
	JUMLAH BELANJA	**210.621.390.503,00**	**198.474.421.818,00**	**94,23**	**192.198.891.241,00**	**180.610.937.967,00**	**93,97**	**18.422.499.262,00**	**17.863.483.851,00**	**96,97**
C	**SURPLUS / (DEFISIT)**	**(191.351.626.935,00)**	**(177.870.039.531,01)**	**92,95**	**(191.081.392.178,00)**	**(179.512.392.967,00)**	**93,95**	**(270.234.757,00)**	**1.642.353.435,99**	

Kas BLUD th.lalu	270.234.757,00
SILPA 2024	1.642.353.435,99
Kas BLUD 2024	**1.912.588.192,99**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - RUMAH SAKIT ACHMAD MUCHTAR BUKITTINGGI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Konversi)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

No	Uraian	Gabungan			APBD			BLUD		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
A	**PENDAPATAN**									
I	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**									
1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-							
2	Pendapatan Retribusi Daerah	145.000.000.000,00	141.745.330.961,50	97,76				145.000.000.000,00	141.745.330.961,50	
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-							
4	Lain-lain PAD	-	-			-				
	JUMLAH PENDAPATAN	**145.000.000.000,00**	**141.745.330.961,50**	**97,76**	**-**	**-**		**145.000.000.000,00**	**141.745.330.961,50**	**97,76**
B	**BELANJA**									
I	**BELANJA OPERASI**									
1	Belanja Pegawai	90.132.279.340,00	85.669.253.332,00	95,05	90.132.279.340,00	85.669.253.332,00	95,05			
2	Belanja Barang	153.007.541.142,00	142.471.487.279,00	93,11	-	-	-	153.007.541.142,00	142.471.487.279,00	93,11
	Jumlah Belanja Operasi	**243.139.820.482,00**	**228.140.740.611,00**	**93,83**	**90.132.279.340,00**	**85.669.253.332,00**	**95,05**	**153.007.541.142,00**	**142.471.487.279,00**	**93,11**
II	**BELANJA MODAL**									
1	Belanja Tanah	-	-		-	-		-	-	
2	Belanja Peralatan dan Mesin	25.716.318.390,00	24.308.369.104,00	94,53	14.416.318.390,00	14.152.116.022,00	98,17	11.300.000.000,00	10.156.253.082,00	89,88
3	Belanja Gedung dan Bangunan	8.529.316.326,00	5.157.558.458,00	60,47	3.029.316.326,00	2.785.163.768,00	91,94	5.500.000.000,00	2.372.394.690,00	43,13
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-		-	-		-	-	
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-		-	-				
	Jumlah Belanja Modal	**34.245.634.716,00**	**29.465.927.562,00**	**86,04**	**17.445.634.716,00**	**16.937.279.790,00**	**97,09**	**16.800.000.000,00**	**12.528.647.772,00**	**74,58**
	JUMLAH BELANJA	**277.385.455.198,00**	**257.606.668.173,00**	**92,87**	**107.577.914.056,00**	**102.606.533.122,00**	**95,38**	**169.807.541.142,00**	**155.000.135.051,00**	**91,28**
C	**SURPLUS / (DEFISIT)**	**(132.385.455.198,00)**	**(115.861.337.211,50)**	**87,52**	**(107.577.914.056,00)**	**(102.606.533.122,00)**	**95,38**	**(24.807.541.142,00)**	**(13.254.804.089,50)**	
	PEMBIAYAAN	**-**	**-**					**-**	**-**	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**-**	**-**					**-**	**-**	
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-						-	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**-**	**-**					**-**	**-**	
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-						-	
	SILPA								**(13.254.804.089,50)**	

Kas BLUD th.lalu	24.807.541.142,01
SILPA 2024	(13.254.804.089,50)
Kas BLUD 2024	**11.552.737.052,51**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Konversi)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

No	Uraian	Gabungan			APBD			BLUD		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
A	**PENDAPATAN**									
I	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**									
1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-							
2	Pendapatan Retribusi Daerah	27.500.000.000,00	28.883.738.650,00	105,03				27.500.000.000,00	28.883.738.650,00	105,03
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-				-	-	-
4	Lain-lain PAD	-	-	-		-		-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	**27.500.000.000,00**	**28.883.738.650,00**	**105,03**	-	-		**27.500.000.000,00**	**28.883.738.650,00**	**105,03**
B	**BELANJA**									
I	**BELANJA OPERASI**									
1	Belanja Pegawai	37.220.389.828,00	35.331.080.812,00	94,92	37.035.713.284,00	35.147.501.063,00	94,90	184.676.544,00	183.579.749,00	99,41
2	Belanja Barang	28.451.473.535,00	28.118.857.833,00	98,83			0,00	28.451.473.535,00	28.118.857.833,00	98,83
	Jumlah Belanja Operasi	**65.671.863.363,00**	**63.449.938.645,00**	**96,62**	**37.035.713.284,00**	**35.147.501.063,00**	**94,90**	**28.636.150.079,00**	**28.302.437.582,00**	**98,83**
II	**BELANJA MODAL**									
1	Belanja Tanah	-	-							
2	Belanja Peralatan dan Mesin	1.986.234.000,00	1.808.604.879,00	91,06	1.654.659.000,00	1.500.118.879,00	90,66	331.575.000,00	308.486.000,00	93,04
3	Belanja Gedung dan Bangunan	415.000.000,00	387.473.437,00	93,37			-	415.000.000,00	387.473.437,00	93,37
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	789.368.000,00	769.466.170,00	97,48				789.368.000,00	769.466.170,00	97,48
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-							
	Jumlah Belanja Modal	**3.190.602.000,00**	**2.965.544.486,00**	**92,95**	**1.654.659.000,00**	**1.500.118.879,00**	**90,66**	**1.535.943.000,00**	**1.465.425.607,00**	**95,41**
	JUMLAH BELANJA	**68.862.465.363,00**	**66.415.483.131,00**	**96,45**	**38.690.372.284,00**	**36.647.619.942,00**	**94,72**	**30.172.093.079,00**	**29.767.863.189,00**	**98,66**
C	**SURPLUS / (DEFISIT)**	**(41.362.465.363,00)**	**(37.531.744.481,00)**	**90,74**	**(38.690.372.284,00)**	**(36.647.619.942,00)**	**94,72**	**(2.672.093.079,00)**	**(884.124.539,00)**	
	PEMBIAYAAN	-	-					-	-	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	-					-	-	
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-							
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-					-	-	
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-							
	SILPA								**(884.124.539,00)**	

Kas BLUD th.lalu	2.672.093.078,66
SILPA 2024	(884.124.539,00)
Kas BLUD 2024	**1.787.968.539,66**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Konversi)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

No	Uraian	Gabungan			APBD			BLUD		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
A	**PENDAPATAN**									
I	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**									
1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-							
2	Pendapatan Retribusi Daerah	100.000.000.000,00	102.693.134.890,00					100.000.000.000,00	102.693.134.890,00	102,69
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-							
4	Lain-lain PAD	-	-			-				
	JUMLAH PENDAPATAN	**100.000.000.000,00**	**102.693.134.890,00**	**102,69**	**-**	**-**		**100.000.000.000,00**	**102.693.134.890,00**	**102,69**
B	**BELANJA**									
I	**BELANJA OPERASI**									
1	Belanja Pegawai	61.389.526.230,00	58.089.911.516,00	94,63	61.389.526.230,00	58.089.911.516,00	94,63			-
2	Belanja Barang	90.823.965.911,00	90.165.743.187,00	99,28	197.216,00	-	0,00	90.823.768.695,00	90.165.743.187,00	99,28
	Jumlah Belanja Operasi	**152.213.492.141,00**	**148.255.654.703,00**	**97,40**	**61.389.723.446,00**	**58.089.911.516,00**	**94,62**	**90.823.768.695,00**	**90.165.743.187,00**	**99,28**
II	**BELANJA MODAL**									
1	Belanja Tanah	-	-							
2	Belanja Peralatan dan Mesin	7.435.570.493,00	6.993.981.717,00	94,06	3.066.088.493,00	2.997.139.840,00	97,75	4.369.482.000,00	3.996.841.877,00	91,47
3	Belanja Gedung dan Bangunan	6.627.200.000,00	5.534.303.586,00	83,51	1.327.200.000,00	1.252.422.586,00		5.300.000.000,00	4.281.881.000,00	80,79
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-						-	0,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-							
	Jumlah Belanja Modal	**14.062.770.493,00**	**12.528.285.303,00**	**89,09**	**4.393.288.493,00**	**4.249.562.426,00**	**96,73**	**9.669.482.000,00**	**8.278.722.877,00**	**85,62**
	JUMLAH BELANJA	**166.276.262.634,00**	**160.783.940.006,00**	**96,70**	**65.783.011.939,00**	**62.339.473.942,00**	**94,77**	**100.493.250.695,00**	**98.444.466.064,00**	**97,96**
C	**SURPLUS / (DEFISIT)**	**(66.276.262.634,00)**	**(58.090.805.116,00)**	**87,65**	**(65.783.011.939,00)**	**(62.339.473.942,00)**	**94,77**	**(493.250.695,00)**	**4.248.668.826,00**	
	PEMBIAYAAN	**-**	**-**					-	-	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**-**	**-**					-	-	
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-						-	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**-**	**-**					-	-	
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-						-	
	SILPA								**4.248.668.826,00**	

Kas BLUD th.lalu	493.250.694,50
SILPA 2024	4.248.668.826,00
Kas BLUD 2024	**4.741.919.520,50**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Konversi)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

No	Uraian	Gabungan			APBD			BLUD		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
A	**PENDAPATAN**									
I	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**									
1	Pendapatan Pajak Daerah	82.000.000.000,00	81.311.894.592,00					82.000.000.000,00	81.311.894.592,00	99,16
2	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-							
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-							
4	Lain-lain PAD	-	-	#DIV/0!		-				-
	JUMLAH PENDAPATAN	**82.000.000.000,00**	**81.311.894.592,00**	**99,16**	-	-		**82.000.000.000,00**	**81.311.894.592,00**	**99,16**
B	**BELANJA**									
I	**BELANJA OPERASI**									
1	Belanja Pegawai	44.745.183.867,00	42.883.280.118,00	95,84	44.745.183.867,00	42.883.280.118,00	95,84			
2	Belanja Barang	73.634.799.014,00	72.215.348.302,64	98,07				73.634.799.014,00	72.215.348.302,64	98,07
	Jumlah Belanja Operasi	**118.379.982.881,00**	**115.098.628.420,64**	**97,23**	**44.745.183.867,00**	**42.883.280.118,00**	**95,84**	**73.634.799.014,00**	**72.215.348.302,64**	**98,07**
II	**BELANJA MODAL**									
1	Belanja Tanah	-	-							
2	Belanja Peralatan dan Mesin	7.108.783.146,00	6.010.876.102,00	84,56	1.608.783.146,00	1.551.201.527,00	96,42	5.500.000.000,00	4.459.674.575,00	81,08
3	Belanja Gedung dan Bangunan	5.499.999.289,00	2.235.255.320,00	40,64	499.999.289,00	494.545.930,00	98,91	5.000.000.000,00	1.740.709.390,00	34,81
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-							
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	#DIV/0!						
	Jumlah Belanja Modal	**12.608.782.435,00**	**8.246.131.422,00**	**65,40**	**2.108.782.435,00**	**2.045.747.457,00**		**10.500.000.000,00**	**6.200.383.965,00**	**59,05**
	JUMLAH BELANJA	**130.988.765.316,00**	**123.344.759.842,64**	**94,16**	**46.853.966.302,00**	**44.929.027.575,00**	**95,89**	**84.134.799.014,00**	**78.415.732.267,64**	**93,20**
C	**SURPLUS / (DEFISIT)**	**(48.988.765.316,00)**	**(42.032.865.250,64)**	**85,80**	**(46.853.966.302,00)**	**(44.929.027.575,00)**	**95,89**	**(2.134.799.014,00)**	**2.896.162.324,36**	
	PEMBIAYAAN	-	-					-	-	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	-					-	-	
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-							
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-					-	-	
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-							
	SILPA								**2.896.162.324,36**	

Kas BLUD th.lalu	2.134.799.013,67
SILPA 2024	2.896.162.324,36
Kas BLUD 2024	**5.030.961.338,03**

PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN SUBRINCIAN OBJEK PENDAPATAN DAN BELANJA

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**6.857.294.152.520,00**	**6.482.418.683.405,20**	**94,53**	**6.263.878.436.851,68**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**3.342.769.899.590,00**	**2.942.563.617.866,20**	**88,03**	**2.784.774.801.212,68**
4.1.01	Pajak Daerah	2.693.451.041.456,00	2.338.112.925.264,00	86,81	2.236.722.695.545,00
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	867.217.461.437,00	844.845.392.450,00	97,42	811.565.504.450,00
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	15.255.110.900,00	16.983.869.850,00	111,33	18.439.236.600,00
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	15.029.488.900,00	16.765.836.650,00	111,55	18.241.022.900,00
4.1.01.01.01.0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	833.300,00	1.583.650,00	190,05	3.755.150,00
4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	224.788.700,00	216.449.550,00	96,29	194.458.550,00
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	77.776.178.750,00	77.665.572.450,00	99,86	70.663.844.400,00
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	77.397.599.950,00	77.157.544.550,00	99,69	70.155.540.500,00
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	378.578.800,00	508.027.900,00	134,19	508.303.900,00
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	448.999.090.000,00	426.776.415.550,00	95,05	401.227.567.175,00
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	446.161.051.900,00	423.595.374.100,00	94,94	397.777.641.025,00
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	353.177.400,00	362.447.400,00	102,62	449.628.900,00
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	2.484.860.700,00	2.818.594.050,00	113,43	3.000.297.250,00
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	3.803.409.100,00	4.016.590.550,00	105,61	3.552.404.900,00
4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	2.860.005.100,00	2.907.297.900,00	101,65	2.447.806.350,00
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	677.712.100,00	710.447.250,00	104,83	687.964.050,00
4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	265.691.900,00	398.845.400,00	150,12	416.634.500,00
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	825.134.300,00	655.901.800,00	79,49	500.002.450,00
4.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	5.089.000,00	19.676.300,00	386,64	14.574.450,00
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	817.816.300,00	634.586.500,00	77,60	483.558.000,00
4.1.01.01.05.0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	2.229.000,00	1.639.000,00	73,53	1.870.000,00
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	68.179.535.850,00	66.599.508.700,00	97,68	68.250.140.600,00
4.1.01.01.06.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	67.463.035.500,00	65.656.632.000,00	97,32	67.030.638.900,00
4.1.01.01.06.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	75.378.250,00	78.342.200,00	103,93	51.885.050,00
4.1.01.01.06.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	641.122.100,00	864.534.500,00	134,85	1.167.616.650,00
4.1.01.01.07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	47.336.301.900,00	45.629.780.600,00	96,39	50.554.942.350,00
4.1.01.01.07.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	31.040.113.000,00	29.658.985.300,00	95,55	32.766.659.450,00
4.1.01.01.07.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	16.083.709.800,00	15.539.231.300,00	96,61	16.922.921.650,00
4.1.01.01.07.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	212.479.100,00	431.564.000,00	203,11	865.361.250,00
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	33.241.962.900,00	33.381.752.200,00	100,42	33.342.969.400,00
4.1.01.01.08.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	7.379.624.000,00	7.637.387.400,00	103,49	8.328.572.500,00
4.1.01.01.08.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	25.840.270.500,00	25.706.033.950,00	99,48	24.965.336.650,00
4.1.01.01.08.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	22.068.400,00	38.330.850,00	173,69	49.060.250,00
4.1.01.01.09	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	3.192.057.650,00	3.142.902.800,00	98,46	2.828.447.550,00
4.1.01.01.09.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	3.182.445.100,00	3.124.176.350,00	98,17	2.813.339.500,00
4.1.01.01.09.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	5.061.900,00	4.369.100,00	86,31	2.701.700,00
4.1.01.01.09.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	4.550.650,00	14.357.350,00	315,50	12.406.350,00
4.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	168.483.451.800,00	169.863.208.700,00	100,82	162.080.874.075,00
4.1.01.01.10.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	167.780.998.100,00	168.809.786.350,00	100,61	161.003.862.525,00
4.1.01.01.10.0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum	1.663.950,00	1.755.150,00	105,48	1.181.600,00
4.1.01.01.10.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	700.789.750,00	1.051.667.200,00	150,07	1.075.829.950,00
4.1.01.01.11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	123.836.700,00	129.509.800,00	104,58	124.656.950,00
4.1.01.01.11.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	64.879.500,00	70.692.950,00	108,96	65.888.150,00
4.1.01.01.11.0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum	591.400,00	248.400,00	42,00	496.800,00
4.1.01.01.11.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	58.365.800,00	58.568.450,00	100,35	58.272.000,00
4.1.01.01.14	PKB-Mobil Roda Tiga	1.391.587,00	379.450,00	27,27	418.000,00
4.1.01.01.14.0001	PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi	893.987,00	379.450,00	42,44	0,00
4.1.01.01.14.0002	PKB-Mobil Roda Tiga-Umum	140.500,00	0,00	0,00	118.000,00
4.1.01.01.14.0004	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah	357.100,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	399.134.592.491,00	395.873.654.800,00	99,18	401.816.543.050,00
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	1.478.217.200,00	1.276.617.000,00	86,36	2.292.838.650,00
4.1.01.02.01.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	1.478.217.200,00	1.276.617.000,00	86,36	2.292.838.650,00
4.1.01.02.02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	30.759.742.500,00	30.480.826.700,00	99,09	28.362.355.800,00
4.1.01.02.02.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	30.759.742.500,00	30.480.826.700,00	99,09	28.362.355.800,00
4.1.01.02.03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	159.670.973.200,00	152.472.265.550,00	95,49	156.146.269.650,00
4.1.01.02.03.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	159.670.973.200,00	152.472.265.550,00	95,49	156.146.269.650,00
4.1.01.02.04	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	3.021.692.600,00	3.911.017.500,00	129,43	2.552.718.700,00
4.1.01.02.04.0001	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	3.021.692.600,00	3.911.017.500,00	129,43	2.552.718.700,00
4.1.01.02.05	BBNKB-Mobil Bus-Bus	1.349.854.050,00	1.374.536.000,00	101,83	430.029.000,00
4.1.01.02.05.0001	BBNKB-Mobil Bus-Bus	1.349.854.050,00	1.374.536.000,00	101,83	430.029.000,00
4.1.01.02.06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	24.197.701.350,00	24.357.489.600,00	100,66	31.146.872.850,00
4.1.01.02.06.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	24.197.701.350,00	24.357.489.600,00	100,66	31.146.872.850,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1.01.02.07	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	7.973.010.000,00	7.716.691.300,00	96,79	11.664.214.450,00
4.1.01.02.07.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	7.973.010.000,00	7.716.691.300,00	96,79	11.664.214.450,00
4.1.01.02.08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	7.788.855.400,00	11.586.279.200,00	148,75	11.635.166.250,00
4.1.01.02.08.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	7.788.855.400,00	11.586.279.200,00	148,75	11.635.166.250,00
4.1.01.02.09	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	1.680.760.791,00	1.921.557.000,00	114,33	1.233.785.000,00
4.1.01.02.09.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	1.680.760.791,00	1.921.557.000,00	114,33	1.233.785.000,00
4.1.01.02.10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	160.416.896.100,00	160.121.081.950,00	99,82	155.691.977.250,00
4.1.01.02.10.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	160.416.896.100,00	160.121.081.950,00	99,82	155.691.977.250,00
4.1.01.02.11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	796.889.300,00	655.293.000,00	82,23	660.315.450,00
4.1.01.02.11.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	796.889.300,00	655.293.000,00	82,23	660.315.450,00
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	893.928.065.344,00	638.993.534.545,00	71,48	587.376.804.979,00
4.1.01.03.02	PBBKB-Bahan Bakar Solar	1.565.328.940,00	795.371.124,00	50,81	976.058.345,00
4.1.01.03.02.0001	PBBKB Bahan Bakar Solar	1.565.328.940,00	795.371.124,00	50,81	976.058.345,00
4.1.01.03.04	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	892.362.736.404,00	638.198.163.421,00	71,52	586.400.746.634,00
4.1.01.03.04.0001	PBBKB Bahan Bakar Lainnya	892.362.736.404,00	638.198.163.421,00	71,52	586.400.746.634,00
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	20.001.992.700,00	14.677.021.417,00	73,38	10.884.901.663,00
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan	20.001.992.700,00	14.677.021.417,00	73,38	10.884.901.663,00
4.1.01.04.01.0001	Pajak Air Permukaan	20.001.992.700,00	14.677.021.417,00	73,38	10.884.901.663,00
4.1.01.05	Pajak Rokok	513.168.929.484,00	443.723.322.052,00	86,47	425.078.941.403,00
4.1.01.05.01	Pajak Rokok	513.168.929.484,00	443.723.322.052,00	86,47	425.078.941.403,00
4.1.01.05.01.0001	Pajak Rokok	513.168.929.484,00	443.723.322.052,00	86,47	425.078.941.403,00
4.1.02	Retribusi Daerah	414.280.722.633,00	382.306.933.091,49	92,28	16.049.240.433,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	372.952.717.795,00	374.139.936.380,49	100,32	4.921.368.272,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	372.652.264.505,00	374.139.936.380,49	100,40	4.921.368.272,00
4.1.02.01.01.0004	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan	4.456.734.704,00	5.196.463.122,00	116,60	0,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	361.916.652.215,00	362.611.101.094,49	100,19	4.921.368.272,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang	6.278.877.586,00	6.332.372.164,00	100,85	0,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	300.453.290,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	300.453.290,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	40.757.696.254,00	7.882.036.311,00	19,34	10.922.444.661,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	34.895.222.314,00	4.776.818.527,00	13,69	7.852.638.721,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	291.433.320,00	207.598.070,00	71,23	1.742.109.106,00
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	5.000.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	1.789.117.285,00	2.222.110.457,00	124,20	562.142.640,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	25.617.017.771,00	206.838.400,00	0,81	3.386.347.450,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	2.194.653.938,00	1.686.466.600,00	76,84	1.819.174.525,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	5.000.000.000,00	450.805.000,00	9,02	337.865.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	472.186.963,00	286.614.000,00	60,70	287.579.000,00
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang (	297.186.963,00	176.127.500,00	59,26	192.847.000,00
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	50.000.000,00	52.000.000,00	104,00	0,00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	125.000.000,00	58.486.500,00	46,79	94.732.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.537.291.394,00	932.707.684,00	36,76	1.098.370.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.537.291.394,00	932.707.684,00	36,76	1.098.370.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	620.383.781,00	381.768.000,00	61,54	296.851.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	620.383.781,00	381.768.000,00	61,54	296.851.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.232.611.802,00	1.504.128.100,00	67,37	1.387.005.940,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tana	800.359.951,00	428.927.800,00	53,59	479.589.390,00
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	772.685.000,00	890.615.300,00	115,26	519.948.550,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	659.566.851,00	184.585.000,00	27,99	387.468.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	570.308.584,00	284.960.400,00	49,97	205.427.500,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	29.902.500,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	29.902.500,00
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	175.525.000,00
4.1.02.03.04.0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	0,00	0,00	0,00	175.525.000,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	570.308.584,00	284.960.400,00	49,97	0,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	570.308.584,00	284.960.400,00	49,97	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	129.624.977.090,00	122.018.602.181,00	94,13	117.084.599.941,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyer	129.624.977.090,00	122.018.602.181,00	94,13	117.084.599.941,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyer	129.604.977.090,00	122.018.602.181,00	94,15	0,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyer	129.604.977.090,00	122.018.602.181,00	94,15	0,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyer	20.000.000,00	0,00	0,00	117.084.599.941,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyer	20.000.000,00	0,00	0,00	117.084.599.941,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	105.413.158.411,00	100.125.157.329,71	94,98	414.918.265.293,68
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	581.300.000,00	585.058.880,00	100,65	1.347.353.327,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	581.300.000,00	585.058.880,00	100,65	0,00
4.1.04.01.02.0062	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Da	581.300.000,00	585.058.880,00	100,65	0,00
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.347.353.327,00
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	1.347.353.327,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	19.427.050.874,00	13.915.100.000,00	71,63	2.859.450.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	19.427.050.874,00	13.915.100.000,00	71,63	2.859.450.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	19.427.050.874,00	13.915.100.000,00	71,63	2.859.450.000,00
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	1.976.420.000,00	1.850.191.000,00	93,61	1.937.782.800,00
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	1.976.420.000,00	1.850.191.000,00	93,61	1.937.782.800,00
4.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	1.976.420.000,00	1.850.191.000,00	93,61	1.937.782.800,00
4.1.04.05	Jasa Giro	7.500.000.000,00	8.490.270.476,08	113,20	11.951.998.104,69
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	7.500.000.000,00	8.490.270.476,08	113,20	11.951.998.104,69
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	7.500.000.000,00	8.490.270.476,08	113,20	11.951.998.104,69
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	13.020.000.000,00	17.333.203.315,00	133,13	15.752.208.066,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	13.020.000.000,00	17.333.203.315,00	133,13	15.752.208.066,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	13.020.000.000,00	17.333.203.315,00	133,13	15.752.208.066,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	6.813.000.000,00	11.729.731.654,22	172,17	18.972.813.595,78
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara a	6.813.000.000,00	11.729.731.654,22	172,17	18.972.813.595,78
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara a	6.813.000.000,00	11.729.731.654,22	172,17	18.972.813.595,78
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	19.738.030.000,00	14.460.403.950,00	73,26	10.496.346.100,00
4.1.04.12.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	19.173.900.600,00	14.043.344.450,00	73,24	9.939.078.000,00
4.1.04.12.01.0001	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan	0,00	0,00	0,00	239.067.250,00
4.1.04.12.01.0002	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep	0,00	0,00	0,00	685.271.450,00
4.1.04.12.01.0003	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus	0,00	0,00	0,00	4.151.662.400,00
4.1.04.12.01.0004	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus	0,00	0,00	0,00	48.152.750,00
4.1.04.12.01.0005	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus	0,00	0,00	0,00	3.374.700,00
4.1.04.12.01.0006	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	0,00	0,00	0,00	1.063.791.100,00
4.1.04.12.01.0007	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	0,00	0,00	0,00	696.858.750,00
4.1.04.12.01.0008	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	0,00	0,00	0,00	417.959.550,00
4.1.04.12.01.0009	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	0,00	0,00	0,00	32.384.000,00
4.1.04.12.01.0010	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	0,00	0,00	0,00	2.599.076.450,00
4.1.04.12.01.0011	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	0,00	0,00	0,00	1.443.600,00
4.1.04.12.01.0014	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga	0,00	0,00	0,00	36.000,00
4.1.04.12.01.0015	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	390.471.600,00	286.597.050,00	73,40	0,00
4.1.04.12.01.0016	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	26.100,00	14.150,00	54,21	0,00
4.1.04.12.01.0018	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	3.301.250,00	2.811.500,00	85,16	0,00
4.1.04.12.01.0019	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	1.634.949.450,00	1.173.809.750,00	71,79	0,00
4.1.04.12.01.0022	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	15.632.600,00	63.115.750,00	403,74	0,00
4.1.04.12.01.0023	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	8.372.980.400,00	6.025.043.700,00	71,96	0,00
4.1.04.12.01.0024	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	11.618.250,00	7.760.950,00	66,80	0,00
4.1.04.12.01.0026	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	67.923.800,00	52.245.150,00	76,92	0,00
4.1.04.12.01.0027	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	53.878.750,00	43.818.200,00	81,33	0,00
4.1.04.12.01.0028	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	19.166.550,00	14.574.100,00	76,04	0,00
4.1.04.12.01.0030	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	10.685.050,00	8.155.650,00	76,33	0,00
4.1.04.12.01.0032	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	8.438.750,00	4.871.300,00	57,73	0,00
4.1.04.12.01.0034	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	42.100,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0035	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	2.126.904.400,00	1.542.365.350,00	72,52	0,00
4.1.04.12.01.0036	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	1.447.250,00	1.084.400,00	74,93	0,00
4.1.04.12.01.0038	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	18.616.850,00	17.554.450,00	94,29	0,00
4.1.04.12.01.0039	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	838.211.000,00	610.159.200,00	72,79	0,00
4.1.04.12.01.0040	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	511.881.600,00	363.631.750,00	71,04	0,00
4.1.04.12.01.0042	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	7.080.600,00	8.624.900,00	121,81	0,00
4.1.04.12.01.0043	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	251.449.100,00	184.985.650,00	73,57	0,00
4.1.04.12.01.0044	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	473.357.200,00	330.049.800,00	69,73	0,00
4.1.04.12.01.0046	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	673.800,00	828.900,00	123,02	0,00
4.1.04.12.01.0047	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	57.294.600,00	45.251.200,00	78,98	0,00
4.1.04.12.01.0050	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	71.550,00	78.500,00	109,71	0,00
4.1.04.12.01.0051	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	4.273.666.850,00	3.234.819.600,00	75,69	0,00
4.1.04.12.01.0054	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah D	22.348.250,00	19.738.250,00	88,32	0,00
4.1.04.12.01.0055	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	764.300,00	518.300,00	67,81	0,00
4.1.04.12.01.0056	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0058	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah D	918.600,00	836.950,00	91,11	0,00
4.1.04.12.01.0070	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	564.129.400,00	417.059.500,00	73,93	557.228.100,00
4.1.04.12.02.0001	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	21.027.100,00	15.941.600,00	75,81	21.351.600,00
4.1.04.12.02.0002	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	48.706.850,00	34.230.950,00	70,28	63.268.700,00
4.1.04.12.02.0003	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	326.607.200,00	232.823.500,00	71,29	271.491.800,00
4.1.04.12.02.0004	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus	11.374.400,00	10.047.900,00	88,34	13.509.650,00
4.1.04.12.02.0005	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus	236.000,00	0,00	0,00	163.900,00
4.1.04.12.02.0006	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	38.273.750,00	35.988.750,00	94,03	52.272.350,00
4.1.04.12.02.0007	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	23.546.900,00	17.910.250,00	76,06	48.589.900,00
4.1.04.12.02.0008	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	34.375.900,00	30.757.000,00	89,47	30.279.600,00
4.1.04.12.02.0009	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	2.081.900,00	1.362.400,00	65,44	1.426.900,00
4.1.04.12.02.0010	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	54.405.300,00	37.575.950,00	69,07	51.740.750,00
4.1.04.12.02.0011	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	3.494.100,00	421.200,00	12,05	3.132.950,00
4.1.04.12.04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1.04.12.04.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	36.357.357.537,00	31.761.198.054,41	87,36	351.600.313.300,21
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	0,00		0,00	351.600.313.300,21
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	0,00		0,00	351.600.313.300,21
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	36.357.357.537,00	31.761.198.054,41	87,36	0,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	36.357.357.537,00	31.761.198.054,41	87,36	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**3.342.769.899.590,00**	**2.932.851.823.548,13**	**87,74**	**2.784.774.801.212,68**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.497.500.252.930,00**	**3.525.560.271.539,00**	**100,80**	**3.464.761.720.139,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.466.843.452.930,00	3.496.315.733.539,00	100,85	3.437.048.050.139,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	3.453.594.168.930,00	3.483.066.449.539,00	100,85	3.428.427.025.139,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	196.062.191.930,00	196.436.458.000,00	100,19	186.817.960.171,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	18.161.506.000,00	18.161.506.000,00	100,00	16.484.542.454,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	22.442.263.000,00	106.454.381.000,00	474,35	0,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	88.730.942.000,00	4.718.824.000,00	5,32	104.906.677.289,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	682.139.930,00	582.336.000,00	85,37	702.106.525,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	6.038.647.000,00	6.038.647.000,00	100,00	6.065.091.298,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	10.336.727.000,00	162.476.000,00	1,57	46.021.014.795,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalt	9.720.918.000,00	19.895.169.000,00	204,66	907.118.714,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH	29.311.897.000,00	29.311.897.000,00	100,00	1.791.727.841,00
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Huta	0,00	0,00	0,00	97.425,00
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	10.637.152.000,00	11.111.222.000,00	104,46	9.939.583.830,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	2.062.837.785.000,00	2.146.789.947.987,00	104,07	1.989.337.430.162,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	1.712.076.756.000,00	1.797.505.162.000,00	104,99	1.989.337.430.162,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pe	37.958.832.000,00	36.482.588.987,00	96,11	0,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	238.094.588.000,00	238.094.588.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	38.286.764.000,00	38.286.764.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	36.420.845.000,00	36.420.845.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	253.614.707.000,00	217.864.557.320,00	85,90	365.925.325.993,00
4.2.01.01.03.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	47.947.455.000,00	46.301.382.190,00	96,57	42.601.990.800,00
4.2.01.01.03.0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	22.186.699.000,00	21.154.123.878,00	95,35	6.130.512.998,00
4.2.01.01.03.0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	98.431.152.000,00	68.930.425.979,00	70,03	94.256.186.248,00
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	7.500.000.000,00	7.073.890.400,00	94,32	0,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan F	0,00	0,00	0,00	11.847.887.268,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	5.278.901.000,00	3.695.230.700,00	70,00	9.170.407.420,00
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0,00	0,00	0,00	7.438.058.875,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	44.154.458.000,00	43.552.950.817,00	98,64	45.582.993.184,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	16.436.043.000,00	15.651.462.520,00	95,23	17.380.001.200,00
4.2.01.01.03.0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penuruna	11.679.999.000,00	11.505.090.836,00	98,50	0,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	131.517.288.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	941.079.485.000,00	921.975.486.232,00	97,97	886.346.308.813,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	417.109.620.000,00	414.278.707.711,00	99,32	410.650.078.399,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	8.543.750.000,00	8.241.250.000,00	96,46	10.355.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	489.226.856.000,00	474.423.233.850,00	96,97	447.521.828.020,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	4.859.852.000,00	4.859.852.000,00	100,00	3.756.808.687,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	3.026.016.000,00	3.312.510.000,00	109,47	2.551.508.000,00
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	2.000.000.000,00	1.984.225.868,00	99,21	2.000.000.000,00
4.2.01.01.04.0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.000.000.000,00	1.894.804.865,00	94,74	1.973.421.167,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6.991.591.000,00	5.776.249.709,00	82,62	3.437.352.107,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	5.246.077.000,00	5.214.735.390,00	99,40	2.879.903.830,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	1.669.723.000,00	1.646.183.638,00	98,59	947.626.703,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	343.733.201,00	84,66	272.781.900,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**3.453.594.168.930,00**	**3.483.066.449.539,00**	**100,85**	**3.428.427.025.139,00**
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	8.621.025.000,00
4.2.01.02.01	DID	0,00	0,00	0,00	8.621.025.000,00
4.2.01.02.01.0001	DID	0,00	0,00	0,00	8.621.025.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	13.249.284.000,00	13.249.284.000,00	100,00	0,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	13.249.284.000,00	13.249.284.000,00	100,00	0,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	13.249.284.000,00	13.249.284.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**13.249.284.000,00**	**13.249.284.000,00**	**100,00**	**8.621.025.000,00**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.656.800.000,00	29.244.538.000,00	95,39	27.713.670.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	30.656.800.000,00	29.244.538.000,00	95,39	27.713.670.000,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	0,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	0,00
4.2.02.02.04	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	29.156.800.000,00	27.744.538.000,00	95,16	27.713.670.000,00
4.2.02.02.04.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	29.156.800.000,00	27.744.538.000,00	95,16	27.713.670.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**30.656.800.000,00**	**29.244.538.000,00**	**95,39**	**27.713.670.000,00**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	**3.497.500.252.930,00**	**3.525.560.271.539,00**	**100,80**	**3.464.761.720.139,00**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**17.024.000.000,00**	**14.294.794.000,00**	**83,97**	**14.341.915.500,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	17.024.000.000,00	14.294.794.000,00	83,97	14.341.915.500,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	99.091.500,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	99.091.500,00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	99.091.500,00
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	17.024.000.000,00	14.294.794.000,00	83,97	14.242.824.000,00
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	17.024.000.000,00	14.294.794.000,00	83,97	14.242.824.000,00
4.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	17.024.000.000,00	14.294.794.000,00	83,97	14.242.824.000,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**17.024.000.000,00**	**14.294.794.000,00**	**83,97**	**14.341.915.500,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**6.857.294.152.520,00**	**6.482.418.683.405,20**	**94,53**	**6.263.878.436.851,68**
5	**BELANJA DAERAH**	**7.017.741.696.945,19**	**6.524.664.745.123,96**	**92,97**	**6.352.991.353.501,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**4.853.518.637.062,19**	**4.614.017.505.277,85**	**95,07**	**4.419.911.196.952,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	2.588.514.014.191,16	2.490.554.904.931,00	96,22	2.195.331.447.151,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.468.930.028.509,16	1.453.653.152.151,00	98,96	1.278.422.254.523,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.097.042.012.621,00	1.090.885.783.017,00	99,44	979.623.056.753,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	924.880.626.925,00	920.294.467.775,00	99,50	903.925.319.390,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	172.161.385.696,00	170.591.315.242,00	99,09	75.697.737.363,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	104.658.307.270,00	103.466.011.724,00	98,86	93.400.055.361,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	88.672.610.194,00	87.926.792.474,00	99,16	86.554.076.993,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	15.985.697.076,00	15.539.219.250,00	97,21	6.845.978.368,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	11.674.839.013,00	11.206.900.000,00	95,99	13.708.877.900,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	11.674.839.013,00	11.206.900.000,00	95,99	13.708.877.900,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	87.979.969.304,00	86.860.666.995,00	98,73	71.236.914.490,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	70.549.166.751,00	69.713.493.445,00	98,82	66.297.241.020,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	17.430.802.553,00	17.147.173.550,00	98,37	4.939.673.470,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	9.441.050.073,00	9.078.515.000,00	96,16	11.623.560.250,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	9.436.722.029,00	9.078.515.000,00	96,20	11.594.780.250,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.328.044,00	0,00	0,00	28.780.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	57.316.091.776,00	56.624.290.645,00	98,79	54.357.818.621,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	46.453.025.363,00	45.959.143.673,00	98,94	49.270.241.472,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.863.066.413,00	10.665.146.972,00	98,18	5.087.577.149,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.060.874.243,00	11.506.594.747,00	95,40	4.419.069.210,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.422.943.476,00	10.924.524.456,00	95,64	4.419.069.210,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	637.930.767,00	582.070.291,00	91,24	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	23.249.241,16	13.160.766,00	56,61	13.788.144,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.762.164,16	11.563.118,00	61,63	12.464.154,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.487.077,00	1.597.648,00	35,61	1.323.990,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	78.527.135.390,00	75.009.374.513,00	95,52	41.946.346.054,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	66.711.812.017,00	64.088.837.984,00	96,07	38.443.579.667,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	11.815.323.373,00	10.920.536.529,00	92,43	3.502.766.387,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.394.316.632,00	2.248.633.721,00	93,92	2.023.195.337,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.006.778.619,00	1.887.961.641,00	94,08	1.853.902.830,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	387.538.013,00	360.672.080,00	93,07	169.292.507,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.987.814.389,00	6.753.221.023,00	96,64	6.069.572.403,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.861.083.881,00	5.670.610.109,00	96,75	5.561.983.426,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.126.730.508,00	1.082.610.914,00	96,08	507.588.977,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	824.368.557,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	710.112.422,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	114.256.135,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	496.155.650.820,00	446.780.453.124,00	90,05	392.632.787.075,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	413.136.243.075,00	375.713.451.834,00	90,94	328.592.453.405,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	363.888.001.577,00	332.591.816.466,00	91,40	320.476.505.284,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	49.248.241.498,00	43.121.635.368,00	87,56	8.115.948.121,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	10.910.830.119,00	9.785.314.957,00	89,68	1.799.030.430,00
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	8.592.919.759,00	7.676.144.334,00	89,33	1.323.003.564,00
5.1.01.02.02.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	2.317.910.360,00	2.109.170.623,00	90,99	476.026.866,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	71.507.482.825,00	60.754.500.635,00	84,96	61.800.362.732,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	70.241.904.892,00	59.895.712.346,00	85,27	61.782.677.787,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	1.265.577.933,00	858.788.289,00	67,86	17.684.945,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	601.094.801,00	527.185.698,00	87,70	440.940.508,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	601.094.801,00	527.185.698,00	87,70	440.940.508,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	576.239.121.042,00	543.426.045.788,00	94,31	478.365.057.312,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	36.997.066.519,00	30.813.431.167,00	83,29	25.973.901.239,00
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	24.902.973.423,00	20.801.489.678,00	83,53	16.548.846.853,00
5.1.01.03.01.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermo	11.527.810.158,00	9.746.170.529,00	84,54	9.268.118.439,00
5.1.01.03.01.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	566.282.938,00	265.770.960,00	46,93	156.935.947,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	747.131.233,00	66.485.433,00	8,90	80.465.528,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian	594.202.700,00	7.263.755,00	1,22	38.353.028,00
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	8.770.690,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan K	76.118.742,00	30.447.498,00	40,00	30.750.000,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rek	18.611.513,00	3.775.128,00	20,28	675.000,00
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan P	36.871.256,00	24.999.052,00	67,80	10.687.500,00
5.1.01.03.02.0032	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Peng	12.556.332,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	441.815.878.972,00	422.433.741.348,00	95,61	415.957.850.950,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	441.815.878.972,00	422.433.741.348,00	95,61	415.957.850.950,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.463.445.200,00	2.458.596.900,00	99,80	2.259.192.900,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	2.463.445.200,00	2.458.596.900,00	99,80	2.259.192.900,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.869.000.000,00	1.760.250.000,00	94,18	2.061.364.335,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.869.000.000,00	1.760.250.000,00	94,18	2.061.364.335,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	343.470.883,00	314.939.046,00	91,69	1.822.278.160,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	343.470.883,00	314.939.046,00	91,69	1.822.278.160,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	18.520.557.835,00	18.199.996.500,00	98,27	13.998.633.500,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	18.480.077.835,00	18.191.836.500,00	98,44	13.857.739.500,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	40.480.000,00	8.160.000,00	20,16	140.894.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	65.700.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	65.700.000,00
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	69.024.376.800,00	62.967.854.994,00	91,23	14.836.799.200,00
5.1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	69.024.376.800,00	62.967.854.994,00	91,23	14.836.799.200,00
5.1.01.03.10	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	884.193.600,00	845.750.400,00	95,65	284.784.000,00
5.1.01.03.10.0001	Belanja TKG PPPK	884.193.600,00	845.750.400,00	95,65	284.784.000,00
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	3.574.000.000,00	3.565.000.000,00	99,75	1.024.087.500,00
5.1.01.03.11.0001	Belanja Tamsil Guru PPPK	3.574.000.000,00	3.565.000.000,00	99,75	1.024.087.500,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	40.903.890.441,00	40.807.622.530,00	99,76	40.953.439.716,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	2.057.400.000,00	2.057.400.000,00	100,00	2.059.800.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	2.057.400.000,00	2.057.400.000,00	100,00	2.059.800.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	171.180.000,00	171.180.000,00	100,00	163.656.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	171.180.000,00	171.180.000,00	100,00	163.656.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	141.363.840,00	141.363.840,00	100,00	143.826.120,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	141.363.840,00	141.363.840,00	100,00	143.826.120,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	176.250.000,00	176.250.000,00	100,00	176.490.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	176.250.000,00	176.250.000,00	100,00	176.490.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.983.230.000,00	2.983.230.000,00	100,00	2.986.710.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.983.230.000,00	2.983.230.000,00	100,00	2.986.710.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	228.723.000,00	207.408.000,00	90,68	248.994.000,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	228.723.000,00	207.408.000,00	90,68	248.994.000,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	35.121.250,00	22.837.500,00	65,02	27.405.000,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	35.121.250,00	22.837.500,00	65,02	27.405.000,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	11.670.000.000,00	11.670.000.000,00	100,00	11.670.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	11.670.000.000,00	11.670.000.000,00	100,00	11.670.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.935.000.000,00	1.920.000.000,00	99,22	2.910.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.935.000.000,00	1.920.000.000,00	99,22	2.910.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.082.456.359,00	1.073.434.285,00	99,17	1.075.089.207,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.082.456.359,00	1.073.434.285,00	99,17	1.075.089.207,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	9.527.765.992,00	9.527.765.992,00	100,00	9.515.719.389,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	167.401.432,00	167.401.432,00	100,00	166.761.149,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.224.240,00	4.224.240,00	100,00	4.235.760,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	12.672.720,00	12.672.720,00	100,00	12.707.280,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	9.343.467.600,00	9.343.467.600,00	100,00	9.332.015.200,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	10.073.700.000,00	10.035.052.913,00	99,62	9.964.500.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	10.073.700.000,00	10.035.052.913,00	99,62	9.964.500.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	821.700.000,00	821.700.000,00	100,00	11.250.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	821.700.000,00	821.700.000,00	100,00	11.250.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.692.199.376,00	1.325.604.130,00	78,34	243.027.548,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	78.173.336,00	75.600.000,00	96,71	75.600.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	78.173.336,00	75.600.000,00	96,71	75.600.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	11.000.000,00	10.584.000,00	96,22	10.584.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	11.000.000,00	10.584.000,00	96,22	10.584.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	137.000.000,00	136.080.000,00	99,33	136.080.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	137.000.000,00	136.080.000,00	99,33	136.080.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.690.400,00	8.111.040,00	93,33	8.166.720,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.690.400,00	8.111.040,00	93,33	8.166.720,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	7.420.750,00	7.019.330,00	94,59	4.408.908,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	7.420.750,00	7.019.330,00	94,59	4.408.908,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00	1.040,00	92,86	1.040,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00	1.040,00	92,86	1.040,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	9.208.190,00	7.620.480,00	82,76	7.564.800,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	9.208.190,00	7.620.480,00	82,76	7.564.800,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	187.675,00	155.520,00	82,87	155.520,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	187.675,00	155.520,00	82,87	155.520,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	563.025,00	466.560,00	82,87	466.560,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	563.025,00	466.560,00	82,87	466.560,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.439.954.880,00	1.079.966.160,00	75,00	0,00
5.1.01.05.10.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	969.550.420,00	694.790.280,00	71,66	0,00
5.1.01.05.10.0002	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraa	446.227.617,00	367.845.744,00	82,43	0,00
5.1.01.05.10.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	24.176.843,00	17.330.136,00	71,68	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.408.447.459,00	4.378.447.459,00	99,32	4.526.882.533,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	330.000.000,00	91,67	360.000.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	330.000.000,00	91,67	360.000.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	4.048.447.459,00	4.048.447.459,00	100,00	4.166.882.533,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	4.048.447.459,00	4.048.447.459,00	100,00	4.166.882.533,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	184.676.544,00	183.579.749,00	99,41	187.998.444,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	184.676.544,00	183.579.749,00	99,41	187.998.444,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	184.676.544,00	183.579.749,00	99,41	187.998.444,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.935.171.371.802,03	1.803.917.885.970,85	93,22	1.964.366.347.632,00
5.1.02.01	Belanja Barang	360.617.780.983,70	321.311.498.511,00	89,10	433.387.614.014,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	360.269.371.453,70	320.971.941.161,00	89,09	432.498.438.564,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.533.877.988,00	2.527.028.394,00	99,73	2.670.596.349,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.832.849.067,00	1.749.745.797,00	95,47	2.347.729.876,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	28.563.016.435,51	23.562.073.725,00	82,49	25.366.525.115,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	203.684.840,00	199.385.336,00	97,89	369.290.443,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	957.908.705,00	893.142.200,00	93,24	1.530.604.919,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	286.980.500,00	252.998.250,00	88,16	233.322.520,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	638.369.000,00	562.064.000,00	88,05	444.731.500,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	125.544.542,00	120.103.500,00	95,67	96.863.831,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.092.842.324,00	3.960.595.520,00	96,77	6.240.573.699,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	76.944.388,00	48.772.568,00	63,39	0,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.523.808,00	1.523.700,00	99,99	40.800.500,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	38.587.238,00	37.484.770,00	97,14	5.240.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	21.313.160,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	34.994.600,00	28.913.919,00	82,62	12.523.149,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	22.177.800,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.567.210.875,00	5.222.877.832,00	93,81	5.986.163.543,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.329.620.900,00	4.065.381.474,00	93,90	4.539.904.645,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22.551.946.287,00	19.512.994.496,00	86,52	21.383.388.025,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	746.893.200,00	727.949.500,00	97,46	696.320.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.869.150.866,00	5.439.817.545,00	92,68	5.854.173.527,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	463.676.244,00	433.552.099,00	93,50	1.442.000.546,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.201.859.685,00	2.140.680.813,00	97,22	2.296.355.082,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	666.571.165,00	646.387.429,00	96,97	1.751.533.049,00
5.1.02.01.01.0033	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	176.934.000,00	175.060.000,00	98,94	104.295.600,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.928.246.100,00	1.884.046.175,00	97,71	1.585.228.150,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.612.453.000,00	2.440.935.999,00	93,43	3.244.347.040,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor La	15.543.230.846,00	14.936.842.926,00	96,10	29.953.170.764,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	7.248.726.935,00	6.948.669.764,00	95,86	3.680.781.063,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	85.135.240,00	84.551.600,00	99,31	71.489.655,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahka	152.613.584.314,19	133.603.946.950,00	87,54	209.933.056.617,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahka	142.574.040,00	142.021.000,00	99,61	923.668.682,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tuju	28.358.000,00	28.354.710,00	99,99	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.378.746.405,00	2.167.345.105,00	91,11	1.992.450.849,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	3.747.919.642,00	3.688.713.000,00	98,42	3.212.415.180,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	50.388.940,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.008.728.150,00	16.482.279.938,00	82,38	19.834.062.326,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	18.471.834.000,00	17.190.612.889,00	93,06	18.979.208.800,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	14.437.671.974,00	13.390.322.000,00	92,75	13.863.103.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	179.690.000,00	159.827.295,00	88,95	473.861.995,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	9.033.850.000,00	9.027.262.113,00	99,93	9.073.737.205,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16.952.029.500,00	15.714.487.900,00	92,70	26.711.757.500,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	350.910.000,00	350.910.000,00	100,00	443.595.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	1.814.880.000,00	1.796.360.000,00	98,98	908.515.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	4.503.240.000,00	4.406.811.560,00	97,86	78.608.580,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.609.675.000,00	1.583.371.570,00	98,37	1.186.905.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	149.000.000,00	142.225.000,00	95,45	0,00
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00	58.500.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	308.719.050,00	300.784.000,00	97,43	4.497.000,00
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	84.329.800,00	84.130.300,00	99,76	33.705.540,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	24.990.000,00	24.990.000,00	100,00	27.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	245.785.000,00	245.565.000,00	99,91	183.350.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.774.245.000,00	870.500.000,00	31,38	1.070.248.100,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	570.905.000,00	548.666.500,00	96,10	906.731.500,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	411.950.000,00	394.425.000,00	95,75	332.476.000,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	18.550.000,00	18.200.000,00	98,11	247.330.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	177.242.530,00	176.053.850,00	99,33	889.175.450,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	148.005.600,00	147.747.600,00	99,83	873.723.000,00
5.1.02.01.02.0009	Belanja Pipa-Pipa Baja	1.386.680,00	750.000,00	54,09	0,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	1.418.750,00	1.418.750,00	100,00	15.452.450,00
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	26.431.500,00	26.137.500,00	98,89	0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	171.167.000,00	163.503.500,00	95,52	0,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat K	171.167.000,00	163.503.500,00	95,52	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	563.388.919.251,33	527.911.367.951,75	93,70	566.716.490.449,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	344.818.008.247,61	322.517.754.025,42	93,53	326.938.702.759,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Pa	15.687.203.600,00	12.865.472.000,00	82,01	23.142.027.500,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	944.630.000,00	755.830.000,00	80,01	1.390.130.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	152.200.000,00	108.200.000,00	71,09	172.400.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.875.252.118,00	2.818.047.227,00	98,01	4.664.470.644,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	550.900.000,00	395.300.000,00	71,76	480.400.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Info	150.030.000,00	142.930.000,00	95,27	190.860.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	34.400.000,00	27.600.000,00	80,23	0,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	4.192.541.234,00	4.064.950.000,00	96,96	1.156.115.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.027.200.000,00	647.700.000,00	63,05	949.700.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	68.576.981.065,00	63.682.305.000,00	92,86	65.680.859.600,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.099.650.000,00	946.065.056,00	86,03	1.705.171.225,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1.636.558.688,00	1.556.084.999,00	95,08	1.317.724.308,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.154.179.080,00	1.150.451.006,00	99,68	796.132.326,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.012.243.496,00	1.003.259.111,00	99,11	839.605.858,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	844.160.000,00	837.070.000,00	99,16	948.550.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	17.027.354.074,61	16.935.985.883,00	99,46	15.234.659.439,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	6.699.272.450,00	6.630.390.647,00	98,97	5.816.665.400,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.550.550.000,00	1.424.300.000,00	91,86	713.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.083.493.840,00	2.980.510.961,00	96,66	3.857.866.086,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	548.975.050,00	514.198.350,00	93,67	576.299.400,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.284.947.619,00	1.244.709.151,80	96,87	1.718.899.634,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.168.753.490,00	8.052.770.700,00	87,83	9.495.742.865,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	38.710.185.307,74	38.009.919.902,72	98,19	35.591.167.285,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	38.125.692.253,63	37.400.172.701,32	98,10	35.525.260.815,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	542.543.608,00	530.700.570,00	97,82	239.431.421,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	20.636.528.631,63	20.075.144.409,58	97,28	17.021.433.049,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	8.815.636.564,00	8.227.302.997,00	93,33	6.342.134.050,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.195.791.830,00	1.164.510.815,00	97,38	963.167.425,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	50.000.000,00	48.888.840,00	97,78	4.300.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	945.250.000,00	889.250.000,00	94,08	1.879.700.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	46.500.000,00	46.500.000,00	100,00	48.500.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	3.696.500.000,00	3.531.951.800,00	95,55	4.351.254.900,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	297.875.261,00	296.911.900,00	99,68	307.401.580,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	184.300.000,00	116.400.000,00	63,16	25.500.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	19.963.891.880,00	19.157.810.437,00	95,96	19.702.296.336,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	3.814.767.800,00	3.223.717.716,00	84,51	2.197.366.270,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rı	691.095.000,00	669.331.682,00	96,85	506.154.030,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	65.950.000,00	64.284.500,00	97,47	15.989.500,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.868.803.100,00	1.792.061.377,00	95,89	1.437.480.497,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	49.110.850,00	48.928.752,00	99,63	59.111.663,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	150.305.200,00	43.344.800,00	28,84	5.993.520,00
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	176.357.000,00	111.995.000,00	63,50	140.965.900,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	10.279.554.500,00	9.450.376.575,00	91,93	10.590.079.051,00
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	539.720.181,00	538.693.259,00	99,81	516.682.400,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	715.538.219,00	608.190.201,00	85,00	764.217.121,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.703.596.652,00	2.168.122.805,00	80,19	1.998.794.943,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	26.521.788.609,00	23.369.615.498,00	88,11	23.161.251.462,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.731.861.080,00	1.620.643.300,00	93,58	1.776.163.800,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.787.452.317,00	13.327.276.611,00	96,66	14.228.181.452,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	2.361.230.000,00	1.652.186.378,00	69,97	134.239.261,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	266.343.100,00	238.568.622,00	89,57	491.958.394,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	339.650.000,00	308.645.000,00	90,87	525.546.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.460.698.499,00	1.036.505.635,00	70,96	1.088.229.228,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	4.641.585.000,00	3.906.877.850,00	84,17	4.226.191.621,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	140.430.000,00	58.794.000,00	41,87	214.780.500,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	114.097.463.920,72	111.363.525.149,00	97,60	105.261.791.333,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	42.720.000.000,00	41.515.479.500,00	97,18	42.530.470.000,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	61.899.054.000,00	61.105.409.600,00	98,72	55.914.790.100,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	10.752.000,00	7.338.800,00	68,26	6.818.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.048.706.984,00	890.448.786,00	84,91	975.919.407,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	548.441.855,00	533.552.282,00	97,29	806.414.036,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.144.895.857,72	1.028.096.895,00	89,80	939.908.390,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	6.725.613.224,00	6.283.199.286,00	93,42	4.087.471.400,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	14.445.149.046,00	11.604.232.527,00	80,33	22.890.682.432,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5.1.02.02.04.0011	Belanja Sewa Mesin Proses	605.000.000,00	571.500.000,00	94,46	81.500.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.010.055.050,00	4.119.340.356,00	82,22	8.169.746.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	107.145.400,00	73.450.000,00	68,55	117.180.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	267.140.000,00	207.210.000,00	77,57	249.406.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	2.973.280.000,00	2.147.292.500,00	72,22	4.568.813.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	157.380.000,00	118.800.000,00	75,49	289.792.280,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	131.000.000,00	128.500.000,00	98,09	586.579.254,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	1.020.980.000,00	988.300.000,00	96,80	1.266.525.804,00
5.1.02.02.04.0148	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	127.500.000,00
5.1.02.02.04.0195	Belanja Sewa Sumber Tenaga	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	22.500.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	3.813.790.646,00	3.047.037.150,00	79,90	5.947.298.694,00
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	276.877.950,00	128.302.521,00	46,34	175.790.400,00
5.1.02.02.04.0425	Belanja Sewa Peralatan Bantu	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	460.691.000,00
5.1.02.02.04.0463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	0,00	0,00	0,00	819.360.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	34.696.149.561,00	30.735.905.855,00	88,59	50.402.630.319,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.877.500.400,00	1.397.500.000,00	48,57	197.000.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	569.175.000,00	512.850.000,00	90,10	277.330.050,00
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	16.600.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.333.776.500,00	977.735.000,00	73,31	1.893.086.000,00
5.1.02.02.05.0012	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	286.000.000,00	284.548.500,00	99,49	336.962.000,00
5.1.02.02.05.0018	Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	0,00	0,00	159.840.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	222.000.000,00	201.000.000,00	90,54	153.000.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	194.800.000,00	93.703.500,00	48,10	815.694.870,00
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	370.165.600,00	368.742.000,00	99,62	279.315.640,00
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	462.150.000,00	420.850.000,00	91,06	323.450.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	83.100.000,00	52.900.000,00	63,66	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	27.771.057.061,00	25.973.061.855,00	93,53	44.654.129.759,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	526.425.000,00	453.015.000,00	86,05	1.296.222.000,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.06.0012	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Provinsi	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	235.600.000,00	208.350.000,00	88,43	154.050.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	202.000.000,00	181.900.000,00	90,05	116.000.000,00
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	33.600.000,00	26.450.000,00	78,72	38.050.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	24.829.944.229,00	23.633.451.583,33	95,18	27.014.531.342,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan I	15.000.000,00	14.875.087,00	99,17	132.599.891,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	225.000.000,00	176.906.817,00	78,63	234.671.295,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untul	2.668.128.309,00	2.443.145.988,23	91,57	2.601.909.364,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untul	2.835.776.940,00	2.764.818.511,00	97,50	5.021.893.726,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untul	6.547.815.690,00	6.365.453.527,00	97,21	5.546.916.264,00
5.1.02.02.08.0010	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untul	100.000.000,00	98.196.150,00	98,20	0,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan W	777.098.125,00	733.355.900,00	94,37	711.818.100,00
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pema	0,00	0,00	0,00	85.970.887,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan K	1.656.805.357,00	1.534.868.326,10	92,64	2.212.363.855,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan K	6.685.700.020,00	6.231.065.597,00	93,20	6.672.150.721,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan K	1.375.238.338,00	1.364.094.450,00	99,19	1.346.528.589,00
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	19.750.000,00
5.1.02.02.08.0026	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	500.000.000,00	490.000.000,00	98,00	0,00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	117.107.450,00	106.460.000,00	90,91	168.240.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	771.274.000,00	760.211.230,00	98,57	1.810.291.650,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi I	95.000.000,00	90.000.000,00	94,74	40.000.000,00
5.1.02.02.08.0040	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	460.000.000,00	460.000.000,00	100,00	409.427.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	15.038.070.969,00	13.709.871.812,00	91,17	8.039.063.843,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan P	235.000.000,00	234.893.045,00	99,95	234.742.516,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	539.728.969,00	537.626.835,00	99,61	0,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.128.835.000,00	1.053.415.152,00	93,32	900.422.450,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	11.398.354.200,00	10.656.988.180,00	93,50	4.862.830.951,00
5.1.02.02.09.0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencana	1.180.152.800,00	679.407.000,00	57,57	599.344.000,00
5.1.02.02.09.0021	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Studi Kela	556.000.000,00	547.541.600,00	98,48	1.441.723.926,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00	31.500.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00	31.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan	15.033.433.278,00	13.989.877.000,00	93,06	25.983.538.421,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.823.103.500,00	2.595.827.000,00	91,95	3.405.412.416,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	12.199.829.778,00	11.383.550.000,00	93,31	22.578.126.005,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	153.600.000,00	110.400.000,00	71,88	0,00
5.1.02.02.13.0001	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendara	144.000.000,00	108.000.000,00	75,00	0,00
5.1.02.02.13.0004	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaa	9.600.000,00	2.400.000,00	25,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	85.933.605.813,00	81.258.413.720,36	94,56	91.416.243.048,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	87.190.000,00	0,00	0,00	64.144.000,00
5.1.02.03.01.0018	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir	87.190.000,00	0,00	0,00	64.144.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.715.377.081,00	25.547.267.866,00	92,18	28.762.577.219,00
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	244.786.000,00	217.486.850,00	88,85	156.423.829,00
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	61.334.000,00	61.309.074,00	99,96	61.324.843,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	1.311.830.398,00	1.199.257.352,00	91,42	884.882.310,00
5.1.02.03.02.0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	19.134.000,00	19.117.470,00	99,91	25.797.748,00
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	479.517.000,00	479.405.645,00	99,98	289.391.128,00
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	15.000.000,00	0,00	0,00	14.853.749,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	631.007.021,00	624.454.162,00	98,96	597.773.476,00
5.1.02.03.02.0020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	43.845.000,00	43.512.000,00	99,24	0,00
5.1.02.03.02.0021	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor	38.710.000,00	38.698.730,00	99,97	23.777.310,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	6.000.000,00	2.900.000,00	48,33	0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	14.023.130.023,00	13.397.669.192,00	95,54	13.317.874.639,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	325.600.000,00	261.715.006,00	80,38	286.874.936,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angk	20.240.000,00	19.002.500,00	93,89	220.308.985,00
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angk	200.000.000,00	167.564.150,00	83,78	0,00
5.1.02.03.02.0061	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perka	11.845.000,00	11.845.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0067	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perka	46.364.950,00	16.350.000,00	35,26	44.122.500,00
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat B	43.525.000,00	21.412.500,00	49,20	14.664.720,00
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	23.505.342,00	20.442.492,00	86,97	108.275.877,00
5.1.02.03.02.0090	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	39.349.130,00
5.1.02.03.02.0095	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya	30.000.000,00	26.495.000,00	88,32	0,00
5.1.02.03.02.0107	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertan	11.770.700,00	6.518.500,00	55,38	18.225.430,00
5.1.02.03.02.0111	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	26.853.050,00	26.675.000,00	99,34	0,00
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	400.000,00	0,00	0,00	900.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor I	1.979.748.110,00	1.601.041.354,00	80,87	3.034.417.241,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Ala	750.000,00	750.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Ala	2.364.730.000,00	2.184.131.944,00	92,36	2.809.976.917,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Ala	500.000,00	500.000,00	100,00	27.145.000,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Ala	210.000.000,00	201.000.000,00	95,71	0,00
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Ra	205.000.000,00	179.650.000,00	87,63	91.844.414,00
5.1.02.03.02.0128	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Ra	0,00	0,00	0,00	5.950.000,00
5.1.02.03.02.0130	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Ra	213.679.600,00	210.019.250,00	98,29	47.601.000,00
5.1.02.03.02.0131	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Ra	47.500.000,00	40.000.000,00	84,21	32.800.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Pera	84.000.000,00	76.199.977,00	90,71	7.985.000,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Pera	7.800.625,00	7.700.000,00	98,71	0,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat	120.000.000,00	116.599.950,00	97,17	426.701.400,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Ke	4.894.560,00	4.894.560,00	100,00	3.885.000,00
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Ke	0,00	0,00	0,00	86.307.980,00
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-A	7.117.000,00	4.276.600,00	60,09	6.541.000,00
5.1.02.03.02.0243	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratori	105.443.000,00	104.156.380,00	98,78	71.484.000,00
5.1.02.03.02.0244	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratori	1.866.142.682,00	1.862.221.166,00	99,79	3.373.021.654,00
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratori	31.930.000,00	28.812.200,00	90,24	27.806.500,00
5.1.02.03.02.0293	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratori	86.921.400,00	86.574.900,00	99,60	84.421.000,00
5.1.02.03.02.0367	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibra	36.842.000,00	33.437.250,00	90,76	50.491.550,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.243.837.220,00	1.087.782.050,00	87,45	1.141.979.440,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	241.238.000,00	230.226.650,00	95,44	218.085.700,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lain	707.905.400,00	611.211.200,00	86,34	694.796.100,00
5.1.02.03.02.0431	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Pro	535.000.000,00	214.251.812,00	40,05	414.515.713,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	22.955.239.782,00	20.927.790.483,36	91,17	21.695.375.790,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Ban	22.636.118.282,00	20.612.723.123,36	91,06	21.695.375.790,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Tan	319.121.500,00	315.067.360,00	98,73	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.175.798.950,00	34.783.355.371,00	98,88	40.894.146.039,00
5.1.02.03.04.0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	27.710.742.226,00	27.708.103.043,00	99,99	30.803.348.378,00
5.1.02.03.04.0012	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Pro	1.268.207.305,00	1.262.748.341,00	99,57	1.352.713.747,00
5.1.02.03.04.0024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irig	91.475.500,00	88.792.000,00	97,07	377.949.200,00
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa	1.076.962.462,00	1.069.637.792,00	99,32	2.538.338.976,00
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan P	4.724.549.007,00	4.359.612.995,00	92,28	5.450.702.704,00
5.1.02.03.04.0055	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan	174.362.450,00	169.369.950,00	97,14	290.657.044,00
5.1.02.03.04.0100	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangk	0,00	0,00	0,00	49.006.500,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.03.04.0124	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	129.500.000,00	125.091.250,00	96,60	31.429.490,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	239.980.724.177,00	209.229.543.077,00	87,19	240.783.824.900,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	231.598.801.824,00	201.609.214.191,00	87,05	237.658.242.400,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	220.960.506.824,00	191.938.147.247,00	86,87	212.977.107.400,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	7.065.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	54.150.000,00	34.875.000,00	64,40	1.400.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.905.345.000,00	2.764.091.944,00	95,14	4.504.750.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.678.800.000,00	6.872.100.000,00	89,49	20.167.920.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	8.381.922.353,00	7.620.328.886,00	90,91	3.125.582.500,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasaâ€"Luar Negeri	8.381.922.353,00	7.620.328.886,00	90,91	3.125.582.500,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/M	13.377.355.000,00	11.704.898.750,00	87,50	15.829.303.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.370.005.000,00	11.697.548.750,00	87,49	15.826.603.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	5.330.710.000,00	5.027.654.500,00	94,31	7.163.155.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	453.200.000,00	238.347.000,00	52,59	1.374.450.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	5.445.000.000,00	4.297.515.000,00	78,93	4.750.350.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	2.141.095.000,00	2.134.032.250,00	99,67	2.538.648.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.350.000,00	7.350.000,00	100,00	2.700.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	7.350.000,00	7.350.000,00	100,00	2.700.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	276.407.346.201,00	274.150.899.411,00	99,18	279.832.836.184,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	276.407.346.201,00	274.150.899.411,00	99,18	279.832.836.184,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	276.407.346.201,00	274.150.899.411,00	99,18	279.832.836.184,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	395.465.640.376,00	378.351.264.549,74	95,67	336.400.036.037,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	395.465.640.376,00	378.351.264.549,74	95,67	336.400.036.037,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	395.465.640.376,00	378.351.264.549,74	95,67	336.400.036.037,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	0,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	0,00
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	0,00
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	328.202.803.569,00	317.914.266.876,00	96,87	260.213.402.169,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	117.549.488.584,00	117.199.488.584,00	99,70	65.616.710.389,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	117.549.488.584,00	117.199.488.584,00	99,70	65.616.710.389,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	117.549.488.584,00	117.199.488.584,00	99,70	65.616.710.389,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Ber	131.483.245.785,00	121.981.317.412,00	92,77	117.620.042.104,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dar	86.731.150.000,00	78.317.631.462,00	90,30	73.264.179.938,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukare	86.731.150.000,00	78.317.631.462,00	90,30	73.264.179.938,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang	44.172.013.450,00	43.096.571.450,00	97,57	43.805.862.166,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial	44.172.013.450,00	43.096.571.450,00	97,57	43.805.862.166,00
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	580.082.335,00	567.114.500,00	97,76	0,00
5.1.05.05.04.0002	Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	580.082.335,00	567.114.500,00	97,76	0,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indo	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Huku	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	76.166.350.000,00	75.729.741.680,00	99,43	74.126.510.476,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	42.843.100.000,00	42.470.083.434,00	99,13	44.038.310.476,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	42.843.100.000,00	42.470.083.434,00	99,13	44.038.310.476,00
5.1.05.06.04	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	33.323.250.000,00	33.259.658.246,00	99,81	30.088.200.000,00
5.1.05.06.04.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	33.323.250.000,00	33.259.658.246,00	99,81	30.088.200.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.003.719.200,00	3.003.719.200,00	100,00	2.850.139.200,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.003.719.200,00	3.003.719.200,00	100,00	2.850.139.200,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.003.719.200,00	3.003.719.200,00	100,00	2.850.139.200,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	130.447.500,00	130.447.500,00	100,00	0,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	130.447.500,00	130.447.500,00	100,00	0,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	130.447.500,00	130.447.500,00	100,00	0,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	130.447.500,00	130.447.500,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**4.853.518.637.062,19**	**4.614.017.505.277,85**	**95,07**	**4.419.911.196.952,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**856.550.234.585,00**	**765.506.194.874,35**	**89,37**	**991.975.692.931,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.478.117.620,00	2.464.373.669,00	99,45	2.854.444.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	2.478.117.620,00	2.464.373.669,00	99,45	2.854.444.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	1.716.626.000,00	1.703.196.169,00	99,22	0,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.716.626.000,00	1.703.196.169,00	99,22	0,00
5.2.01.01.02	Belanja Modal Tanah Non Persil	3.269.400,00	3.123.500,00	95,54	0,00
5.2.01.01.02.0009	Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya	3.269.400,00	3.123.500,00	95,54	0,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	758.222.220,00	758.054.000,00	99,98	2.854.444.000,00
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	758.222.220,00	758.054.000,00	99,98	2.854.444.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	223.905.542.378,00	189.146.437.545,00	84,48	306.440.774.536,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	3.914.089.400,00	3.868.715.500,00	98,84	543.008.450,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	83.309.500,00	74.185.500,00	89,05	41.000.000,00
5.2.02.01.01.0007	Belanja Modal Compacting Equipment	31.157.500,00	31.135.500,00	99,93	0,00
5.2.02.01.01.0008	Belanja Modal Aggregate and Concrete Equipment	52.152.000,00	43.050.000,00	82,55	0,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	3.830.779.900,00	3.794.530.000,00	99,05	502.008.450,00
5.2.02.01.03.0003	Belanja Modal Compressor	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	768.350.000,00	767.350.000,00	99,87	107.259.300,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	3.062.429.900,00	3.027.180.000,00	98,85	278.049.150,00
5.2.02.01.03.0013	Belanja Modal Peralatan Selam	0,00	0,00	0,00	85.600.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00	28.700.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.264.768.326,00	3.872.792.500,00	90,81	11.415.802.104,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.229.443.686,00	3.837.542.500,00	90,73	6.142.592.400,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	799.600.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	3.734.846.086,00	3.352.900.000,00	89,77	3.689.104.100,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	640.500.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	411.498.000,00	404.963.000,00	98,41	409.102.100,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	83.099.600,00	79.679.500,00	95,88	157.786.200,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	446.500.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	35.324.640,00	35.250.000,00	99,79	39.542.350,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	16.564.350,00
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	35.324.640,00	35.250.000,00	99,79	22.978.000,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	0,00	0,00	0,00	5.233.667.354,00
5.2.02.02.03.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	2.558.036.000,00
5.2.02.02.03.0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.675.631.354,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	27.944.000,00	26.959.000,00	96,48	1.192.242.943,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	11.300.000,00	10.750.000,00	95,13	1.100.132.643,00
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	0,00	0,00	0,00	14.139.000,00
5.2.02.03.01.0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	0,00	0,00	0,00	6.788.897,00
5.2.02.03.01.0009	Belanja Modal Perkakas Pabrik Es	0,00	0,00	0,00	1.019.074.905,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	11.300.000,00	10.750.000,00	95,13	60.129.841,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	15.444.000,00	15.225.000,00	98,58	77.927.800,00
5.2.02.03.02.0001	Belanja Modal Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	0,00	0,00	0,00	47.152.800,00
5.2.02.03.02.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	15.444.000,00	15.225.000,00	98,58	22.150.000,00
5.2.02.03.02.0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.175.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	1.200.000,00	984.000,00	82,00	14.182.500,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	1.200.000,00	984.000,00	82,00	6.782.500,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.486.540.000,00	1.378.796.139,00	92,75	2.074.262.692,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.486.540.000,00	1.378.796.139,00	92,75	2.074.262.692,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1.232.139.000,00	1.172.700.000,00	95,18	386.533.000,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
5.2.02.04.01.0003	Belanja Modal Alat Panen	0,00	0,00	0,00	498.312.200,00
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	76.001.000,00	72.388.539,00	95,25	783.473.742,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	26.300.000,00	25.707.600,00	97,75	386.000.000,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	152.100.000,00	108.000.000,00	71,01	0,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.443.750,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	44.754.622.523,00	37.510.264.777,00	83,81	37.382.405.287,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	11.314.133.626,00	9.410.643.504,00	83,18	8.015.023.929,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	736.187.856,00	680.775.000,00	92,47	1.640.086.500,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	10.577.945.770,00	8.729.868.504,00	82,53	6.374.937.429,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	33.172.049.299,00	27.858.377.233,00	83,98	28.967.649.355,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	22.747.519.407,00	17.683.179.884,00	77,74	19.591.893.405,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	43.340.000,00	42.059.000,00	97,04	135.730.500,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	7.912.280.576,00	7.758.542.200,00	98,06	3.565.980.300,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	51.122.000,00	48.456.328,00	94,79	61.128.650,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.417.787.316,00	2.326.139.821,00	96,21	5.612.916.500,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	268.439.598,00	241.244.040,00	89,87	399.732.003,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	37.924.800,00	36.680.000,00	96,72	107.669.303,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	16.650.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	61.015.000,00	56.205.000,00	92,12	100.507.300,00
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	27.512.400,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	152.849.798,00	148.359.040,00	97,06	164.043.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	20.338.760.810,00	18.734.351.272,00	92,11	16.422.256.676,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	19.380.390.363,00	17.846.415.437,00	92,08	15.552.383.990,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	163.821.155,00	156.282.750,00	95,40	457.715.500,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.380.902.153,00	553.473.789,00	40,08	9.598.043.950,00
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0,00	0,00	0,00	17.400.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	17.835.667.055,00	17.136.658.898,00	96,08	5.479.224.540,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	938.370.447,00	869.235.835,00	92,63	796.547.686,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	138.291.510,00	76.618.435,00	55,40	207.917.186,00
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	13.375.000,00	12.800.000,00	95,70	344.900.000,00
5.2.02.06.02.0008	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	32.492.600,00	31.525.400,00	97,02	3.512.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	754.211.337,00	748.292.000,00	99,22	240.218.500,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	20.000.000,00	18.700.000,00	93,50	73.325.000,00
5.2.02.06.03.0003	Belanja Modal Peralatan Pemancar VHF/FM	20.000.000,00	18.700.000,00	93,50	0,00
5.2.02.06.03.0008	Belanja Modal Peralatan Antena VHF/FM	0,00	0,00	0,00	73.325.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	22.751.925.861,00	22.057.221.318,00	96,95	114.782.051.044,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	21.418.469.316,00	20.789.089.028,00	97,06	110.513.472.044,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	4.312.543.474,00	4.117.384.442,00	95,47	457.307.773,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	750.236.001,00	710.383.000,00	94,69	0,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	0,00	980.000.000,00
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	441.848.999,00	429.309.000,00	97,16	0,00
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	325.300.000,00	323.655.000,00	99,49	2.756.500.000,00
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	11.679.998.000,00	11.505.090.836,00	98,50	0,00
5.2.02.07.01.0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	422.960.599,00	389.666.750,00	92,13	0,00
5.2.02.07.01.0013	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	1.006.216.200,00	979.000.000,00	97,30	0,00
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	0,00	0,00	0,00	4.390.000.000,00
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	0,00	0,00	0,00	7.432.371,00
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	379.560.000,00	378.900.000,00	99,83	0,00
5.2.02.07.01.0028	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	974.100.000,00	974.100.000,00	100,00	0,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.125.706.043,00	981.600.000,00	87,20	101.922.231.900,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.333.456.545,00	1.268.132.290,00	95,10	4.268.579.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.333.456.545,00	1.268.132.290,00	95,10	4.268.579.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	19.514.670.039,00	13.595.496.537,00	69,67	4.655.091.171,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.321.376.163,00	1.234.240.246,00	93,41	1.329.896.871,00
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	766.848.800,00	728.122.000,00	94,95	521.146.600,00
5.2.02.08.01.0007	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	12.000.000,00	9.401.700,00	78,35	0,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00	20.859.000,00
5.2.02.08.01.0014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	253.389.063,00	248.015.250,00	97,88	0,00
5.2.02.08.01.0041	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00	0,00	94.794.000,00
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	0,00	0,00	0,00	32.412.000,00
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	289.138.300,00	248.701.296,00	86,01	660.685.271,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	18.003.214.701,00	12.200.881.291,00	67,77	1.157.659.000,00
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	279.450.000,00	273.000.000,00	97,69	0,00
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	94.281.500,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	17.629.483.201,00	11.927.881.291,00	67,66	1.157.659.000,00
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	9.705.175,00	8.250.000,00	85,01	0,00
5.2.02.08.05.0004	Belanja Modal Meteorological Equipment	9.705.175,00	8.250.000,00	85,01	0,00
5.2.02.08.06	Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory La	0,00	0,00	0,00	49.299.540,00
5.2.02.08.06.0003	Belanja Modal Peralatan Hidrologi	0,00	0,00	0,00	49.299.540,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	180.374.000,00	152.125.000,00	84,34	2.118.235.760,00
5.2.02.08.07.0004	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	111.524.000,00	109.612.000,00	98,29	2.118.235.760,00
5.2.02.08.07.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	68.850.000,00	42.513.000,00	61,75	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	20.065.389.050,00	18.169.023.441,00	90,55	18.065.408.070,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	11.393.732.526,00	10.499.471.957,00	92,15	14.386.972.990,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	24.080.000,00	24.080.000,00	100,00	245.856.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	9.887.241.238,00	9.063.756.957,00	91,67	11.951.624.450,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.482.411.288,00	1.411.635.000,00	95,23	2.189.492.540,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.671.656.524,00	7.669.551.484,00	88,44	3.678.435.080,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.495.268.210,00	7.050.198.697,00	94,06	2.326.174.580,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	804.785.894,00	333.973.637,00	41,50	347.659.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	371.602.420,00	285.379.150,00	76,80	1.004.601.500,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	713.125.360,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	0,00	713.125.360,00
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	0,00	0,00	0,00	363.747.310,00
5.2.02.15.03.0003	Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air	0,00	0,00	0,00	349.378.050,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	31.302.291.187,00	20.699.906.434,00	66,13	31.102.090.750,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	31.302.291.187,00	20.699.906.434,00	66,13	31.102.090.750,00
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	31.302.291.187,00	20.699.906.434,00	66,13	31.102.090.750,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	120.000.000,00	117.500.000,00	97,92	378.941.025,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	120.000.000,00	117.500.000,00	97,92	378.941.025,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	120.000.000,00	117.500.000,00	97,92	378.941.025,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	17.145.556.996,00	16.583.232.791,00	96,72	27.590.840.810,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	17.145.556.996,00	16.583.232.791,00	96,72	27.590.840.810,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	17.145.556.996,00	16.583.232.791,00	96,72	27.590.840.810,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	12.687.975.836,00	12.246.428.224,00	96,52	0,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	12.687.975.836,00	12.246.428.224,00	96,52	0,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	12.624.779.036,00	12.208.558.224,00	96,70	0,00
5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	63.196.800,00	37.870.000,00	59,92	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	25.531.008.350,00	20.285.749.612,00	79,46	40.123.248.154,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	25.531.008.350,00	20.285.749.612,00	79,46	40.123.248.154,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	25.531.008.350,00	20.285.749.612,00	79,46	40.123.248.154,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	254.114.942.168,00	212.226.274.577,89	83,52	318.703.801.325,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	236.212.944.168,00	203.063.622.060,89	85,97	308.697.266.812,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	236.212.944.168,00	203.063.622.060,89	85,97	308.697.266.812,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	211.563.321.863,00	180.226.766.295,89	85,19	194.452.689.884,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	3.029.316.326,00	2.785.163.768,00	91,94	51.537.731.595,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	518.589.289,00	513.116.830,00	98,94	8.209.144.864,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	199.775.200,00	198.249.400,00	99,24	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	43.212.000,00	43.186.400,00	99,94	86.360.000,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	233.470.954,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	166.934.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.03.01.01.0027	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0,00	0,00	0,00	593.749.600,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.129.102.670,00	976.820.000,00	86,51	426.773.091,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	5.105.651.486,00	4.009.827.879,00	78,54	17.532.852.181,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	140.410.000,00	140.290.000,00	99,91	0,00
5.2.03.01.01.0034	Belanja Modal Bangunan Gedung Pabrik	14.175.631.334,00	14.170.201.488,00	99,96	35.426.755.643,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	0,00	0,00	0,00	193.739.000,00
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	103.300.000,00
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	0,00	0,00	0,00	103.300.000,00
5.2.03.03.01.0003	Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	103.300.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	98.448.704,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	98.448.704,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	0,00	0,00	0,00	98.448.704,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	17.901.998.000,00	9.162.652.517,00	51,18	9.804.785.809,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	17.901.998.000,00	9.162.652.517,00	51,18	9.804.785.809,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	17.901.998.000,00	9.162.652.517,00	51,18	9.804.785.809,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	332.313.610.530,00	317.619.554.844,46	95,58	323.497.539.237,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	247.617.673.769,00	241.973.552.124,46	97,72	238.836.347.895,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	246.064.449.207,00	240.469.865.532,46	97,73	221.941.608.396,00
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	172.644.054.995,00	168.125.868.332,46	97,38	134.646.493.528,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	73.420.394.212,00	72.343.997.200,00	98,53	87.295.114.868,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.553.224.562,00	1.503.686.592,00	96,81	16.894.739.499,00
5.2.04.01.02.0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	1.553.224.562,00	1.503.686.592,00	96,81	16.894.739.499,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	78.876.064.600,00	71.471.485.752,00	90,61	84.241.932.352,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	26.124.920.509,00	22.882.967.722,00	87,59	33.288.205.688,00
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	5.534.262.339,00	4.073.068.926,00	73,60	2.970.191.300,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	20.590.658.170,00	18.809.898.796,00	91,35	30.318.014.388,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Benc	34.218.883.424,00	30.256.858.568,00	88,42	27.649.099.979,00
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	33.728.925.864,00	29.766.924.358,00	88,25	26.840.639.410,00
5.2.04.02.04.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	489.957.560,00	489.934.210,00	100,00	808.460.569,00
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	18.532.260.667,00	18.331.659.462,00	98,92	22.014.324.211,00
5.2.04.02.05.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	228.859.163,00	226.060.962,00	98,78	7.845.181.418,00
5.2.04.02.05.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	18.203.401.504,00	18.105.598.500,00	99,46	14.169.142.793,00
5.2.04.02.05.0008	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	919.275.007,00
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	919.275.007,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	371.027.467,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	371.027.467,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	5.030.504.161,00	3.405.050.798,00	67,69	205.741.381,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	62.919.240,00
5.2.04.03.01.0001	Belanja Modal Instalasi Air Permukaan	0,00	0,00	0,00	62.919.240,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	5.030.504.161,00	3.405.050.798,00	67,69	142.822.141,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	5.030.504.161,00	3.405.050.798,00	67,69	142.822.141,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	789.368.000,00	769.466.170,00	97,48	209.717.609,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	789.368.000,00	769.466.170,00	97,48	209.717.609,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	789.368.000,00	769.466.170,00	97,48	209.717.609,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	43.719.921.889,00	44.031.478.988,00	100,71	40.479.133.833,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	192.417.922,00	155.932.678,00	81,04	169.789.890,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	192.417.922,00	155.932.678,00	81,04	140.239.890,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	71.612.922,00	63.173.573,00	88,22	29.110.768,00
5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku Filsafat	0,00	0,00	0,00	15.113.800,00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	29.700.000,00	29.390.550,00	98,96	9.082.400,00
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	40.125.000,00	22.679.000,00	56,52	6.031.700,00
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	24.200.000,00	23.843.600,00	98,53	8.373.600,00
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	26.780.000,00	16.845.955,00	62,90	55.950.622,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	6.939.000,00
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	0,00	0,00	0,00	9.638.000,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00	29.550.000,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	0,00	0,00	0,00	29.550.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	96.863.000,00	96.805.000,00	99,94	136.736.500,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	96.863.000,00	96.805.000,00	99,94	136.736.500,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	12.863.000,00	12.805.000,00	99,55	136.736.500,00
5.2.05.02.01.0002	Belanja Modal Lukisan	84.000.000,00	84.000.000,00	100,00	0,00
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	159.500.000,00	147.300.000,00	92,35	21.000.000,00
5.2.05.03.02	Belanja Modal Ternak	159.500.000,00	147.300.000,00	92,35	21.000.000,00
5.2.05.03.02.0001	Belanja Modal Ternak Potong	159.500.000,00	147.300.000,00	92,35	21.000.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	33.400.996.497,00	34.316.220.024,00	102,74	40.151.607.443,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	33.400.996.497,00	34.316.220.024,00	102,74	40.151.607.443,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	33.400.996.497,00	34.316.220.024,00	102,74	40.151.607.443,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	9.845.144.470,00	9.315.221.286,00	94,62	0,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	9.845.144.470,00	9.315.221.286,00	94,62	0,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	9.350.764.770,00	9.315.221.286,00	99,62	0,00
5.2.05.89.01.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	494.379.700,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	18.100.000,00	18.075.250,00	99,86	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	18.100.000,00	18.075.250,00	99,86	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	18.100.000,00	18.075.250,00	99,86	0,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	18.100.000,00	18.075.250,00	99,86	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**856.550.234.585,00**	**765.506.194.874,35**	**89,37**	**991.975.692.931,00**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**10.487.887.909,00**	**5.222.259.811,30**	**49,79**	**0,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.487.887.909,00	5.222.259.811,30	49,79	0,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.487.887.909,00	5.222.259.811,30	49,79	0,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.487.887.909,00	5.222.259.811,30	49,79	0,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	10.487.887.909,00	5.222.259.811,30	49,79	0,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	**10.487.887.909,00**	**5.222.259.811,30**	**49,79**	**0,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**1.297.184.937.389,00**	**1.139.918.785.160,46**	**87,88**	**941.104.463.618,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.249.538.837.389,00	1.098.402.469.691,00	87,90	908.031.786.786,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan D	1.249.538.837.389,00	1.098.402.469.691,00	87,90	908.031.786.786,00
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	1.249.538.837.389,00	1.098.402.469.691,00	87,90	636.972.486.935,00
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	1.249.538.837.389,00	1.098.402.469.691,00	87,90	636.972.486.935,00
5.4.01.01.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	0,00	0,00	0,00	271.059.299.851,00
5.4.01.01.02.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	0,00	0,00	0,00	271.059.299.851,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	47.646.100.000,00	41.516.315.469,46	87,13	33.072.676.832,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	47.646.100.000,00	41.516.315.469,46	87,13	33.072.676.832,00
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	47.646.100.000,00	41.516.315.469,46	87,13	33.072.676.832,00
5.4.02.03.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	47.646.100.000,00	41.516.315.469,46	87,13	33.072.676.832,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**1.297.184.937.389,00**	**1.139.918.785.160,46**	**87,88**	**941.104.463.618,00**
	JUMLAH BELANJA	**7.017.741.696.945,19**	**6.524.664.745.123,96**	**92,97**	**6.352.991.353.501,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(160.447.544.425,19)**	**(42.246.061.718,76)**	**26,33**	**(89.112.916.649,32)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**160.447.544.425,19**	**159.981.015.714,19**	**99,71**	**269.560.461.073,38**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**180.447.544.425,19**	**179.981.015.714,19**	**99,74**	**289.560.461.073,38**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	180.447.544.425,19	179.981.015.714,19	99,74	289.560.461.073,38
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pe	180.447.544.425,19	179.981.015.714,19	99,74	289.560.461.073,38
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	180.447.544.425,19	179.981.015.714,19	99,74	289.560.461.073,38
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	180.447.544.425,19	179.981.015.714,19	99,74	289.560.461.073,38
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**180.447.544.425,19**	**179.981.015.714,19**	**99,74**	**289.560.461.073,38**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**20.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**	**100,00**	**20.000.000.000,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**20.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**	**100,00**	**20.000.000.000,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**160.447.544.425,19**	**159.981.015.714,19**	**99,71**	**269.560.461.073,38**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**117.734.953.995,43**	**0,00**	**180.447.544.424,06**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
RINCIAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

Nomor Urut	URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2023
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**(374.875.469.114,80)**	**(212.456.553.355,32)**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**(400.206.281.723,80)**	**(249.779.263.994,32)**
4.1.01.	HASIL PAJAK DAERAH	(355.338.116.192,00)	(226.711.869.049,00)
4.1.02.	RETRIBUSI DAERAH	(31.973.789.541,51)	(6.642.269.223,00)
4.1.03.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	(7.606.374.909,00)	(192.513.614,00)
4.1.04.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	(5.288.001.081,29)	(16.232.612.108,32)
4.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**28.060.018.609,00**	**38.168.912.639,00**
4.2.01.	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	29.472.280.609,00	38.387.462.639,00
4.2.02.	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	(1.412.262.000,00)	(218.550.000,00)
4.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**(2.729.206.000,00)**	**(846.202.000,00)**
4.3.01.	PENDAPATAN HIBAH	(2.729.206.000,00)	(846.202.000,00)
5.	**BELANJA**	**493.076.951.821,23**	**392.623.329.586,13**
5.1.	**BELANJA OPERASI**	**239.501.131.784,34**	**309.916.572.358,65**
5.1.01.	BELANJA PEGAWAI	97.959.109.260,16	150.557.828.411,00
5.1.02.	BELANJA BARANG DAN JASA	131.253.485.831,18	147.802.782.511,65
5.1.04.	BELANJA SUBSIDI	-	6.500.000.000,00
5.1.05.	BELANJA HIBAH	10.288.536.693,00	5.055.961.436,00
5.1.06.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	-	-
5.2.	**BELANJA MODAL**	**91.044.039.710,65**	**73.505.551.576,48**
5.2.01.	BELANJA MODAL TANAH	13.743.951,00	2.929.330,00
5.2.02.	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	34.759.104.833,00	29.195.449.916,00
5.2.03.	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	41.888.667.590,11	36.107.528.704,48
5.2.04.	BELANJA MODAL JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN	14.694.055.685,54	8.978.717.550,00
5.2.05.	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	(311.557.099,00)	(779.073.924,00)
5.2.06.	BELANJA MODAL ASET LAINNYA	24.750,00	
5.3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.265.628.097,70**	**5.314.904.651,00**
5.3.1.	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.265.628.097,70	5.314.904.651,00
5.4.	**BELANJA TRANSFER**	**157.266.152.228,54**	**3.886.301.000,00**
5.4.01.	BELANJA BAGI HASIL	151.136.367.698,00	-
5.4.02.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	6.129.784.530,54	3.886.301.000,00
6.	**PELAMPAUAN/PENGHEMATAN PEMBIAYAAN**	**(466.528.711,00)**	**280.768.194,38**
6.1.01.	KOREKSI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	(466.528.711,00)	280.768.194,38
6.1.02.	PENYERTAAN MODAL		-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**117.734.953.995,43**	**180.447.544.425,19**

	Terdiri dari:	
	SiLPA	**117.734.953.995,43**
1.	**KAS DAERAH**	**88.147.677.797,12**
2.	**KAS BLUD**	**28.036.491.064,00**
a.	RSAM BKT	11.552.737.052,51
b.	RSJ HB SAANIN	1.787.968.539,66
c.	RSUD M NATSIR SOLOK	4.741.919.520,50
d.	RSUD PARIAMAN	5.030.961.338,03
e.	DINAS KESEHATAN	1.912.588.192,99
f.	DINAS PENDIDIKAN	3.010.316.420,31
3.	**KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN**	**5.600.000,00**
a.	DINAS KESEHATAN	5.600.000,00
4.	**KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN**	**323.138.845,31**
a.	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	470.000,00
b.	DINAS PENDIDIKAN	322.668.845,31
5.	**KAS BOS**	**1.222.046.289,00**

DAFTAR PENJUALAN ASET TETAP YANG TELAH DIHAPUSKAN

No	Nomor SK	Tanggal SK	Perihal	OPD	Jenis Barang	Nilai Limit Penjualan	Jumlah Setoran	Tanggal Setoran	Link
	Tahun 2023								
1	030-103-2024	30 Januari 2024	Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Dinas Perhubungan	Peralatan dan Mesin	3.022.000	3.200.000	28 Desember 2023	SK PENJUALAN 030-103-2024.pdf
	Tahun 2024								
				Dinas Kebudayaan	Peralatan dan Mesin	2.147.000	2.200.000	24-Apr-24	SK PENJUALAN 030-103-2024.pdf
				Badan Pendapatan Daerah	Peralatan dan Mesin	980.000	1.300.000	17-Apr-24	SK PENJUALAN 030-103-2024.pdf
2	030-681-2023	4 Oktober 2023	Penjualan dan Penetapan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin dan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Peralatan dan Mesin	16.541.000	16.541.000	16 Januari 2024	SK PENJUALAN 10 OPD REVISI.pdf
				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Peralatan dan Mesin	2.348.000	2.400.000	16 Desember 2024	SK PENJUALAN 10 OPD REVISI.pdf
3	030-192-2024	28 Februari 2024	Penjualan dan Penetapan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	SMA Negeri 1 Palembayan	Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya	1.391.000	1.391.000	10 Maret 2024	SK PENJUALAN 030-192-2024.pdf
				SMA Negeri 1 IV Koto	Peralatan dan Mesin	93.000	93.000	1 Maret 2024	SK PENJUALAN 030-192-2024.pdf
				SMA Negeri 4 Solok	Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya	1.539.000	1.600.000	4 Mei 2024	SK PENJUALAN 030-192-2024.pdf
				SMA Negeri 1 Kubung	Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya	3.463.000	3.465.000	6 Mei 2024	SK PENJUALAN 030-192-2024.pdf
				SMA Negeri 1 Batang Anai	Peralatan dan Mesin	289.000	300.000	3 Juli 2024	SK PENJUALAN 030-192-2024.pdf
				SMK Negeri 1 Sungai Rumbai	Peralatan dan Mesin	448.000	450.000	13 Maret 2024	SK PENJUALAN 030-192-2024.pdf
4	030-308-2024	22 April 2024	Penjualan dan Penetapan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	RSUD M Natsir	Peralatan dan Mesin	4.151.000	4.630.000	8 Agustus 2024	SK PENJUALAN 2024 M NATSIR (1).pdf
				BKD	Peralatan dan Mesin	2.418.000	2.450.000	13 Juni 2024	SK PENJUALAN 2024 BKD (1).pdf
				Dinas Pariwisata	Peralatan dan Mesin	5.035.000	5.300.000	4 Juni 2024	PARIWISATA (1).pdf
				Kesbangpol	Peralatan dan Mesin	733.000	850.000	28 Mei 2024	(1).pdf
				Sekretariat DPRD	Peralatan dan Mesin	12.582.000	12.600.000	30 Mei 2024	SK PENJUALAN 2024 308.pdf

No	Nomor SK	Tanggal SK	Perihal	OPD	Jenis Barang	Nilai Limit Penjualan	Jumlah Setoran	Tanggal Setoran	Link
				Dispora	Peralatan dan Mesin	692.000	710.000	8 Mei 2024	SK PENJUALAN 2024 DISPORA (1).pdf
				Biro Organisasi	Peralatan dan Mesin	1.606.000	1.750.000	6 Juni 2024	ORGANISASI (1).pdf
				Dinas PTPH	Peralatan dan Mesin	746.000	746.000	20-Apr-24	SK PENJUALAN 2024 PTPH (1).pdf
				BPSDM	Peralatan dan Mesin	399.000	435.000	3 Juni 2024	SK PENJUALAN 2024 BPSDM (1).pdf
5	030-479-2024	3 Juli 2024	Penjualan dan Penetapan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Peralatan dan Mesin	4.762.000	4.762.000	31 Juli 2024	SK PENJUALAN 030-479-2024.pdf
				Dinas Kesehatan	Peralatan dan Mesin	4.353.000	4.450.000	8 Juli 2024	SK PENJUALAN 030-479-2024.pdf
				Dinas Kelautan dan Perikanan	Peralatan dan Mesin	11.770.000	32.500.000	08 Agustus 2024	SK PENJUALAN 030-479-2024.pdf
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Peralatan dan Mesin	712.000	850.000	24 juli 2024	SK PENJUALAN 030-479-2024.pdf
				Inspektorat	Peralatan dan Mesin	987.000	1.400.000	30 Juli 2024	SK PENJUALAN 030-479-2024.pdf
6	030-533-2024	24 Juli 2024	Penjualan dan Penetapan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Ternaka Sapi pada Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Aset Tetap Lainnya (Sapi)	109.507.000	109.129.000	03-Sep-24	SK PENJUALAN 533.pdf
7	030-585-2024	13 Agustus 2024	Penjualan dan Penetapan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	SMKN 1 Lubuk Basung	Peralatan dan Mesin	118.000	200.000	01 Oktober 2024	SK Penjualan 3 SEKOLAH NO 585.pdf
				SLBN 2 Pariaman	Peralatan dan Mesin	223.000,00	250.000	09-Sep-24	SK Penjualan 3 SEKOLAH NO 585.pdf
				SMAN 1 Basa Ampek Balai (Tapan)	Aset Tetap Lainnya (Buku)	245.000	300.000	4 Oktober 2024	SK Penjualan 3 SEKOLAH NO 585.pdf
8	030-794-2024	11 November 2024	Penjualan dan Penetapan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Scrap Peralatan dan Mesin Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	SLBN 1 Lengayang	Peralatan dan Mesin	912.000,00	912.000	11 Desember 2024	SK 3 SEKOLAH LENGAYANG, TARUSAN, GUNUNG TALANG.pdf

No	Nomor SK	Tanggal SK	Perihal	OPD	Jenis Barang	Nilai Limit Penjualan	Jumlah Setoran	Tanggal Setoran	Link
				SMKN 2 Gunung Talang	Peralatan dan Mesin	487.000	487.000	27 Desember 2024	SK 3 SEKOLAH LENGAYANG, TARUSAN, GUNUNG TALANG.pdf
9	030-814-2024	22 November 2024	Penjualan dan Penetapan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Scrap Peralatan dan Mesin dan Scrap Aset Tetap Lainnya Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	SMAN 1 Payakumbuh	Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya	383.000	383.000	24 Desember 2024	SK PENJUALAN SMAN 1 PAYAKUMBUH,LEMBAH GUMANTI.pdf
				SMAN 1 Payakumbuh	Aset Tetap Lainnya	600.000	600.000	24 Desember 2024	SK PENJUALAN SMAN 1 PAYAKUMBUH,LEMBAH GUMANTI.pdf
				SMAN 1 Lembah Gumanti	Peralatan dan Mesin	139.000	200.000	17 Desember 2024	SK PENJUALAN SMAN 1 PAYAKUMBUH,LEMBAH GUMANTI.pdf
10	030-859-2024	17 Desember 2024	Penjualan dan Penetapan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Scrap Peralatan dan Mesin pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	RSJ. HB Saanin	Peralatan dan Mesin	140.000	150.000	30 Desember 2024	SK PENJUALAN 4 OPD 859.pdf
				Biro Administrasi Pimpinan	Peralatan dan Mesin	416.000	450.000	27 Desember 2024	SK PENJUALAN 4 OPD 859.pdf
				RSUD M Natsir	Peralatan dan Mesin	9.720.000	9.750.000	24 Desember 2024	SK PENJUALAN 4 OPD 859.pdf
				RSUD Pariaman	Peralatan dan Mesin	5.328.000	6.500.000	27 Desember 2024	SK PENJUALAN 4 OPD 859.pdf
11	030- 882 -2024	23 Desember 2024	Penjualan dan Penetapan Nilai Limit Penjualan Barang Persediaan Berupa Ternak Sapi Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024	Disnak Keswan	Aset Tetap Lainnya	65.840.000	0	-	SK PENJUALAN 882.pdf

No	Nomor SK	Tanggal SK	Perihal	OPD	Jenis Barang	Nilai Limit Penjualan	Jumlah Setoran	Tanggal Setoran	Link
12	030- 932 -2024	30 Desember 2024	Penjualan dan Penetapan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Scrap Peralatan dan Mesin pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Dinas Lingkungan Hidup	Peralatan dan Mesin	1.346.000	1.400.000	14 Januari 2024	SK PENJUALAN 932.pdf
				DPMPTSP	Peralatan dan Mesin	1.855.000	1.950.000	8 Januari 2024	SK PENJUALAN 932.pdf
				Dispora	Peralatan dan Mesin	4.683.000	4.700.000	24 Januari 2024	SK PENJUALAN 932.pdf
				DP3P2KB	Peralatan dan Mesin	1.508.000	1.700.000	22 Januari 2024	SK PENJUALAN 932.pdf
				Dinas Kehutanan	Peralatan dan Mesin	8.489.000	9.500.000	9 Januari 2024	SK PENJUALAN 932.pdf
13	030-423-2024	6 Juni 2024	Penjualan BMD Berupa hasil Sisa Bongkaran Bangunan Rumah SMAN 1 Sungai Rumbai Pada Dinas Pendidikan Prov Sumatera Barat Tahun 2024	SMAN 1 Sungai Rumbai	*Bongkaran Bangunan Rumah Dinas*	2.700.000	3.000.000	13 Mei 2024	SK PENJUALAN 423.pdf
14	030-639-2024	4 September 2024	Penjualan BMD Berupa hasil Sisa Bongkaran Bangunan Rumah SMAN 1 Lembah Melintang Pada Dinas Pendidikan Prov Sumatera Barat Tahun 2024	SMAN 1 Lembah Melintang	*Bongkaran Bangunan Rumah Dinas*	409.000	500.000	9 Sept 2024	SK PENJUALAN SMAN 1 LEMBAH MELINTANG 639 BARU .pdf
15	030-580-2024	12 Agustus 2024	Penjualan BMD Berupa Sisa Bongkaran Bangunan SMKN 1 Padang Panjang Pada Dinas Pendidikan Prov Sumatera Barat Tahun 2024	SMKN 1 Padang Panjang	*Bongkaran Gedung Sekolah*	1.533.000	1.700.000	24 Juli 2024	SK PENJUALAN SMKN 1 PADANG PANJANG 580 BARU.pdf
16	030-426-2024	10 Juni 2024	Penjualan BMD Berupa Sisa Bongkaran Gedung dan Bangunan SMAN 1 Basa Ampek Balai Pada Dinas Pendidikan Prov Sumatera Barat Tahun 2024	SMAN 1 Basa Ampek Balai	*Bongkaran Bangunan Lumbung*	6.972.000	6.972.000	18 Okt 2024	SK PENJUALAN 426.pdf
17	030-478-2024	3 Juli 2024	Penjualan BMD Berupa Sisa Bongkaran Gedung dan Bangunan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sumatera Barat Tahun 2024	DKP	*Bongkaran Bangunan*	2.063.000	2.100.000	12-Nov-24	SK PENJUALAN DKP 478.pdf
18	030-855-2024	31 Desember 2024	Penetapan Nilai Taksiran Penjualan dan Pelepasan Hak Barang Milik Pemerintah Prov Sumatera Barat Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024	DPRD	*Peralatan Mesin*	215.881.380	215.881.380	31 Des 2024	SK PENJUALAN 855.pdf
				Total Penjualan BMD		**292.124.000**	**485.087.380,00**		

LAMPIRAN 26

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHANNYA
PER 31 DESEMBER 2024

No	Uraian	SALDO AWAL (AUDITED 2023)	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024	Umur Piutang				Jumlah Penyisihan Piutang Per 31 Des 2024	Jml Penyisihan Piutang per 31 Des 2023 (Audited)	Beban Penyisihan Tahun 2024
						< 1 TH	1-2 TH	> 2 sd 5 TH	>5 TH			
						0,50%	10%	50%	100%			
I	**PIUTANG PAJAK**	**51.514.670.887,00**	**59.755.411.562,00**	**51.379.697.217,00**	**59.890.385.232,00**	**59.620.110.062,00**	**-**	**-**	**270.275.170,00**	**568.375.720,31**	**463.125.996,59**	**432.725.542,81**
1	**PBB-KB**	**49.854.748.495,00**	**59.620.110.062,00**	**49.854.748.495,00**	**59.620.110.062,00**	**59.620.110.062,00**	**-**	**-**	**-**	**298.100.550,31**	**249.273.742,48**	**298.100.550,31**
2	**PAJAK AIR PERMUKAAN**	**1.659.922.392,00**	**135.301.500,00**	**1.524.948.722,00**	**270.275.170,00**	**-**	**-**	**-**	**270.275.170,00**	**270.275.170,00**	**213.852.254,11**	**134.624.992,50**
No	**Uraian**	**SALDO AWAL (AUDITED 2023)**	**PENAMBAHAN**	**PENGURANGAN**	**SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024**	**< 1 BLN**	**1-3 BLN**	**3-12 BLN**	**>12 BLN**	**Jumlah Penyisihan Piutang Per 31 Des 2024**	**Jml Penyisihan Piutang per 31 Des 2023 (Audited)**	**Beban Penyisihan Tahun 2024**
						0,50%	**10%**	**50%**	**100%**			
II	**PIUTANG RETRIBUSI**	**1.620.058.378,00**	**38.490.199.099,33**	**28.526.805.726,33**	**11.583.451.751,00**	**1.075.248.104,00**	**1.088.165.451,00**	**2.123.769.512,00**	**7.296.268.684,00**	**8.472.346.225,62**	**625.574.438,74**	**5.033.651.399,10**
1	Dinas Kesehatan	897.004.378,00	1.717.124.900,00	1.463.888.278,00	1.150.241.000,00	644.935.500,00	460.765.500,00	2.015.000,00	42.525.000,00	92.833.727,50	104.909.438,74	50.308.727,50
2	RSAM Bukittinggi	-	19.219.262.949,33	11.772.039.446,33	7.447.223.503,00	257.285.000,00	282.158.792,00	1.166.520.976,00	5.741.258.735,00	6.354.021.527,20	-	4.214.349.985,64
3	RSJ. HB. Sa'anin Padang	-	857.853.645,00	147.664.804,00	710.188.841,00	11.614.800,00	-	18.506.864,00	680.067.177,00	689.378.683,00	-	80.847.726,54
4	RSUD Solok	-	16.219.007.105,00	14.564.071.598,00	1.654.935.507,00	143.444.804,00	338.671.159,00	936.726.672,00	236.092.872,00	739.040.547,92	-	548.373.669,42
5	RSUD Pariaman	-	470.380.500,00	452.412.500,00	17.968.000,00	17.968.000,00				89.840,00	-	89.840,00
6	Dispora	-	6.570.000,00		6.570.000,00		6.570.000,00			657.000,00	-	657.000,00
7	DKP	11.250.000,00	-	-	11.250.000,00				11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	-
8	D. Perkebunan dan TPH	460.000,00	-	-	460.000,00				460.000,00	460.000,00	460.000,00	-
9	Dinas Lingkungan Hidup	711.344.000,00	-	126.729.100,00	584.614.900,00	-	-		584.614.900,00	584.614.900,00	508.955.000,00	139.024.450,00
No	**Uraian**	**SALDO AWAL (AUDITED 2023)**	**PENAMBAHAN**	**PENGURANGAN**	**SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024**	**LANCAR**	**KURANG LANCAR**	**DIRAGUKAN**	**MACET**	**Jumlah Penyisihan Piutang Per 31 Des 2024**	**Jml Penyisihan Piutang per 31 Des 2023 (Audited)**	**Beban Penyisihan Tahun 2024**
						0,50%	**10%**	**50%**	**100%**			
III	**PIUTANG LAIN-LAIN PAD YG SAH**	**19.675.506.112,47**	**513.738.380,20**	**17.477.448.637,47**	**2.711.795.855,20**	**18.678.380,20**	**-**	**507.215.000,00**	**2.185.902.475,00**	**2.439.603.366,90**	**5.897.468.914,76**	**450.233.260,00**
1	RSAM Bukittinggi	6.780.807.590,33		6.780.807.590,33	-					-	2.657.274.241,12	-
2	RSJ. HB. Sa'anin Padang	827.731.981,00		827.731.981,00	-					-	689.671.960,96	-
3	RSUD Solok	7.703.322.953,00		7.703.322.953,00	-					-	371.544.449,62	-
4	RSUD Pariaman	69.153.200,00		69.153.200,00	-					-	345.766,00	-
5	Dinas Kesehatan	606.183.900,00		606.183.900,00	-					-	50.210.387,00	-
6	Dinas Pendidikan	45.079.013,14	11.138.380,20	45.079.013,14	11.138.380,20	11.138.380,20				55.691,90	225.395,07	
7	Dinas Lingkungan Hidup	2.042.658.660,00	502.600.000,00	57.670.000,00	2.487.588.660,00	7.540.000,00		507.215.000,00	1.972.833.660,00	2.226.478.860,00	1.776.377.900,00	450.233.260,00
8	PPKD/BPKAD	1.600.568.815,00		1.387.500.000,00	213.068.815,00				213.068.815,00	213.068.815,00	351.818.815,00	
No	**Uraian**	**SALDO AWAL (AUDITED 2023)**	**PENAMBAHAN**	**PENGURANGAN**	**SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024**	**LANCAR**	**KURANG LANCAR**	**DIRAGUKAN**	**MACET**	**Jumlah Penyisihan Piutang Per 31 Des 2024**	**Jml Penyisihan Piutang per 31 Des 2023 (Audited)**	**Beban Penyisihan Tahun 2024**
						0,50%	**10%**	**50%**	**100%**			
IV	**PIUTANG PKD YG DIPISAHKAN**	**122.018.602.181,00**	**127.297.967.456,00**	**122.018.602.181,00**	**127.297.967.456,00**	**127.297.967.456,00**	**-**	**-**	**-**	**636.489.837,28**	**610.093.010,91**	**636.489.837,28**
1	PT GRAFIKA JAYA SUMBAR	-		-	-					-	-	-
2	PT BALAIRUNG CITRA SUMBAR	-		-	-					-	-	-
3	BANK NAGARI	117.919.220.213,00	122.736.659.559,00	117.919.220.213,00	122.736.659.559,00	122.736.659.559,00				613.683.297,80	589.596.101,07	613.683.297,80
4	PT.BANGUN ASKRIDA	-		-	-					-	-	-
5	PT. JAMKRIDA	4.099.381.968,00	4.561.307.897,00	4.099.381.968,00	4.561.307.897,00	4.561.307.897,00				22.806.539,49	20.496.909,84	22.806.539,48
V	**PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	**-**	**6.441.442.000,00**	**-**	**6.441.442.000,00**	**6.441.442.000,00**	**-**	**-**	**-**	**32.207.210,00**	**-**	**32.207.210,00**
	Piutang Transfer	-	6.441.442.000,00	-	6.441.442.000,00	6.441.442.000,00		-		32.207.210,00	-	32.207.210,00
	SUB TOTAL 1	**194.828.837.558,47**	**232.498.758.497,53**	**219.402.553.761,80**	**207.925.042.294,20**	**194.453.446.002,20**	**1.088.165.451,00**	**2.630.984.512,00**	**9.752.446.329,00**	**12.149.022.360,11**	**7.596.262.360,99**	**6.585.307.249,19**
VI	**BAGIAN LANCAR TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN**	**-**			**-**	**-**				**-**	**-**	**-**
VII	**BAGIAN LANCAR TGR**	**55.200.000,00**		**26.400.000,00**	**28.800.000,00**	**28.800.000,00**				**144.000,00**	**276.000,00**	
	SUB TOTAL II	**55.200.000,00**	**-**	**26.400.000,00**	**28.800.000,00**	**28.800.000,00**	**-**	**-**	**-**	**144.000,00**	**276.000,00**	**-**
	JUMLAH	**194.884.037.558,47**	**232.498.758.497,53**	**219.428.953.761,80**	**207.953.842.294,20**	**194.482.246.002,20**	**1.088.165.451,00**	**2.630.984.512,00**	**9.752.446.329,00**	**12.149.166.360,11**	**7.596.538.360,99**	**6.585.307.249,19**

PIUTANG / TAGIHAN KERUGIAN DAERAH YG DIPROSES MELALUI SIDANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (TPKD) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 DAN TELAH DIBUATKAN SKTJM/SK PEMBEBANAN SEMENTARA

NO	Uraian	Pejabat yg Bertanggung jawab		Saldo Per 31 Des 2023	Mutasi Kurang 2024	Saldo Per 31 Des 2024	Bagian Lancar	Aset Lainnya	Ket
1	2	3		4	5	6	7	8	9
A	**KASUS DI KPKNL**							-	
	Sisa UUDP Th 2005	1	Drs Zulkifli Yasin	351.798.311		351.798.311	-	351.798.311	Penyerahan 6 kasus ke KPKNL dengan Surat Kepala DPKD No 903/2284/DPKD-Akt-2010 tgl 28 Des 2010 .
B	**DINAS PENDIDIKAN**	2	Hamida	31.800.000	9.600.000	22.200.000	22.200.000		Kepts. Gubernur No.903-1197-2016 tgl 1 Nov 2016 tentang Pembebanan Penggantian Keruda Sementara kepada Sdr.Dra.Hj.Hamida.M.Si.
		3	Amsir	18.000.000	12.000.000	6.000.000	6.000.000		Kepts. Gubernur No.903-1406-2016 tgl 27 Des 2016 tentang Pembebanan Penggantian Keruda Sementara kepada Sdr.Drs.Amsir
		4	Wirmizal	5.400.000	4.800.000	600.000	600.000		Kepts. Gubernur No.903-1198-2016 tgl 1 Nov 2016 tentang Pembebanan Penggantian Keruda Sementara kepada Sdr.Drs. Wirmizal
C	**DINAS PU**	5	Yusafni	48.939.322.300		48.939.322.300	-	48.939.322.300	SKTJM Nomor 07/TPKD/SKTJM/XII/2016 TGL 5 Des 2016 dan SKTJM Nomor 08/TPKD/SKTJM/XII/2016 TGL 5 Des 2016
D	**BIRO BINA MENTAL DAN KESRA**	1	Yelnazi Rinto	629.240.490	-	629.240.490	-	629.240.490	
E	**BIRO BINA MENTAL DAN KESRA**		Yelnazi Rinto	56.258.668	-	56.258.668	-	56.258.668	
	JUMLAH		**JUMLAH**	**50.031.819.773,00**	**26.400.005,00**	**50.005.419.775,00**	**28.800.007,00**	**49.976.619.769,00**	

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DAFTAR BEBAN DIBAYAR DIMUKA SKPD
PER 31 DESEMBER 2024

NO	NAMA SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DES 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	DINAS PENDIDIKAN	95.291.003,00	2.716.993.656,00	1.180.034.974,00	1.632.249.685,00
2	DINAS KESEHATAN	207.850.447,00	-	207.850.447,00	-
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI	601.622,00	5.000.713,00	4.352.157,00	1.250.178,00
4	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	-	34.138.705,00	12.703.243,00	21.435.462,00
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	21.042.385,42	53.901.300,00	52.484.810,42	22.458.875,00
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	-	-	-	-
7	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	192.442.116,42	92.177.535,00	227.580.986,42	57.038.665,00
8	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	79.793.183,00	142.980.740,00	141.260.742,00	81.513.181,00
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	3.025.180,83	36.327.250,00	39.352.430,83	-
10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	28.809.100,00	46.650.005,00	48.246.602,00	27.212.503,00
11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	5.499.780,00	5.499.780,00	-
12	DINAS SOSIAL	25.347.908,34	54.229.773,00	52.802.775,34	26.774.906,00
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	959.550,00	5.197.610,00	5.290.892,00	866.268,00
14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	29.760.382,00	59.491.180,00	52.563.445,00	36.688.117,00
15	DINAS PANGAN	78.413.970,00	202.100.000,00	130.946.053,00	149.567.917,00
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	59.413.124,17	154.235.574,00	99.642.018,17	114.006.680,00
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	22.675.375,00	36.750.610,00	37.075.626,00	22.350.359,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	41.023.737,04	66.207.980,00	62.215.876,04	45.015.841,00
19	DINAS PERHUBUNGAN	4.077.916,67	36.081.135,00	37.152.290,67	3.006.761,00
20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		60.353.830,00	58.462.209,00	1.891.621,00
21	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.530.362,50	14.392.374,00	14.723.371,50	1.199.365,00
22	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	36.375.000,00	33.343.750,00	3.031.250,00
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	14.845.902,48	24.833.483,00	26.375.188,48	13.304.197,00
24	DINAS KEBUDAYAAN	48.699.743,33		48.699.743,33	-
25	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	77.227.333,00	65.450.768,00	82.681.564,00	59.996.537,00
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	55.656.725,50	171.167.699,00	169.504.300,50	57.320.124,00
27	DINAS PARIWISATA	25.641.158,00	67.109.174,00	65.093.791,00	27.656.541,00
28	DINAS PERKEBUNAN DAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA		194.766.980,00	184.303.343,00	10.463.637,00
29	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	83.684.467,00	181.864.063,00	167.537.441,00	98.011.089,00
30	DINAS KEHUTANAN	32.440.333,00	208.578.786,00	206.255.988,00	34.763.131,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		57.116.940,00	57.116.940,00	-
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10.454.001,25	34.561.218,00	45.015.219,25	-
33	*BIRO UMUM*		395.105.000,00	395.105.000,00	-
34	*BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH*		13.908.980,00	2.318.163,00	11.590.817,00
35	*BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT*	7.957.500,00	7.862.500,00	7.957.500,00	7.862.500,00
36	*BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA*	3.792.325,00	15.558.560,00	15.461.245,00	3.889.640,00
37	*BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN*	14.753.270,83	16.359.600,00	17.479.870,83	13.633.000,00
38	*BIRO PEREKONOMIAN*	4.747.490,00	12.579.833,00	11.336.434,00	5.990.889,00
39	*BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN*	23.660.296,67	36.375.792,00	30.582.492,67	29.453.596,00
40	*BIRO HUKUM*	9.204.809,17	-	9.204.809,17	-
41	*BIRO ORGANISASI*		7.860.216,00	6.550.180,00	1.310.036,00
42	SEKRETARIAT DPRD	141.455.533,33	461.982.483,00	410.945.315,33	192.492.701,00
43	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.065.017,50	102.607.943,00	60.281.167,50	50.391.793,00
44	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-
45	BADAN PENDAPATAN DAERAH	430.647.911,59	448.635.469,00	481.708.114,59	397.575.266,00
46	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	29.412.354,00	73.897.582,00	64.764.425,00	38.545.511,00
47	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.191.710,00	26.818.375,00	27.629.444,00	6.380.641,00
48	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		23.005.465,00	21.088.343,00	1.917.122,00
49	BADAN PENGHUBUNG	1.876.306.118,17	1.381.105.128,00	3.102.457.827,17	154.953.419,00
50	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	48.383.412,00	48.390.214,00	52.415.930,00	44.357.696,00
51	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		33.561.503,00	33.561.503,00	-
	JUMLAH	**3.846.284.775,21**	**7.970.148.504,00**	**8.307.015.762,21**	**3.509.417.517,00**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DAFTAR PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2024

NO	NAMA SKPD	BARANG PAKAI HABIS						BARANG TAK HABIS PAKAI	BARANG BEKAS DIPAKAI	TOTAL
		BAHAN	SUKU CADANG	ALAT/BAHAN UNTUK KEG. KANTOR	OBAT-OBATAN	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	NATURA/PAKAN			
1	DINAS PENDIDIKAN			3.339.268.270,00		21.425.065.482,00				24.764.333.752,00
2	DINAS KESEHATAN	14.569.911.281,87		66.404.837,00	34.770.690.370,50					49.407.006.489,37
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	29.181.786,00	2.227.500,00	321.074.240,00	6.642.832.045,00					6.995.315.571,00
4	RSJ Prof. HB. SAANIN	107.584.336,00		182.257.046,00	1.527.816.355,00					1.817.657.737,00
5	RSUD M NATSIR	1.375.975.697,96	34.041.000,00	669.998.285,00	7.902.656.053,70					9.982.671.036,66
6	RSUD PARIAMAN	54.829.877,70		93.857.558,00	4.024.529.998,33					4.173.217.434,03
7	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	4.195.956.270,55	6.667.453,00	28.366.400,00		67.798.967.492,04				72.029.957.615,59
8	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	161.563.806,48		122.910.844,00		4.613.913.995,00				4.898.388.645,48
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			3.166.000,00		195.010.955.703,45				195.014.121.703,45
10	SATPOL PP			6.473.800,00						6.473.800,00
11	DINAS SOSIAL	10.060.550,00		176.704.250,00	3.416.099,00	29.775.000,00	44.351.500,00			264.307.399,00
12	DISNAKERTRANS	1.523.500		407.300,00						1.930.800,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	28.954.000,00		37.794.525,00						66.748.525,00
14	DINAS PANGAN	299.909.650,00		45.268.100,00		1.359.856.496,00				1.705.034.246,00
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	348.823.949,00	100.943.111,00	12.413.200,00						462.180.260,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			5.291.100,00						5.291.100,00
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	35.832.000,00		59.449.200,00						95.281.200,00
18	DINAS PERHUBUNGAN			21.674.360,00						21.674.360,00
19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	18.304.500,00		43.619.661,00						61.924.161,00
20	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			1.800.000,00						1.800.000,00
21	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU	7.306.600,00		24.185.300,00						31.491.900,00
22	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	82.987.700,00		23.341.850,00						106.329.550,00
23	DINAS KEBUDAYAAN			206.824.595,00						206.824.595,00
24	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	6.748.250,00		5.523.300,00						12.271.550,00
25	DINAS KELAUTAN PERIKANAN	53.897.000,00		2.986.956,00			42.888.400,00			99.772.356,00

NO	NAMA SKPD	BARANG PAKAI HABIS						BARANG TAK HABIS PAKAI	BARANG BEKAS DIPAKAI	TOTAL
		BAHAN	SUKU CADANG	ALAT/BAHAN UNTUK KEG. KANTOR	OBAT-OBATAN	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	NATURA/PAKAN			
26	DINAS PARIWISATA	94.584.800,00		157.666.525,00						252.251.325,00
27	DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA	243.761.400,00		25.820.750,00		4.426.267.000,00				4.695.849.150,00
28	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.271.578.854,00		385.423.143,00	98.529.239,00		155.205.525,00			2.910.736.761,00
29	DINAS KEHUTANAN	28.487.953,00		192.122.900,00						220.610.853,00
30	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	30.492.200,00		18.845.100,00						49.337.300,00
31	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.096.255,00		23.962.091,00						27.058.346,00
32	INSPEKTORAT PROVINSI	85.324.250,00		50.249.750,00						135.574.000,00
33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	17.836.500,00		66.514.275,00						84.350.775,00
34	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	15.559.500,00		47.523.900,00						63.083.400,00
35	BADAN PENDAPATAN DAERAH			2.621.508.594,60						2.621.508.594,60
36	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	50.344.000,00		185.773.586,00						236.117.586,00
37	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.010.000		14.108.019,00	340.150,00			4.260.000,00		21.718.169,00
38	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			5.490.400,00						5.490.400,00
39	BADAN PENGHUBUNG			7.203.800,00						7.203.800,00
40	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			20.641.900,00						20.641.900,00
41	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN			5.400.000,00						5.400.000,00
42	BIRO HUKUM	700.000		8.192.800,00						8.892.800,00
43	BIRO PEREKONOMIAN			9.369.000,00						9.369.000,00
44	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT			3.057.700,00						3.057.700,00
45	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			13.620.200,00						13.620.200,00
46	BIRO ORGANISASI	11.745.000,00		2.931.500,00						14.676.500,00
47	BIRO UMUM	624.000,00		27.417.650,00						28.041.650,00
48	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			2.498.000,00						2.498.000,00
49	SEKRETARIAT DPRD	312.558.920,00		66.102.787,33						378.661.707,33
50	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	41.081.500,00		2.089.300,00						43.170.800,00
51	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	237.012.500,00		10.000.700,00						247.013.200,00
	TOTAL	24.837.148.387,56	143.879.064,00	9.474.595.347,93	54.970.810.310,53	294.664.801.168,49	242.445.425,00	4.260.000,00	-	384.337.939.703,51

REKAPITULASI INVESTASI NON PERMANEN - DANA BERGULIR
PROVINSI SUMATERA BARAT
PER 31 DESEMBER 2024

NO	DINAS	PLAFON	SALDO PER 31 DES 2023		TRANSAKSI TAHUN 2024	SALDO PER 31 DES 2024		UMUR DANA BERGULIR					
			BAKI DEBET	LINK AGE		BAKI DEBET	LINK AGE	≤ 1 TH	2 TH	3 TH	4 TH	5 TH	≥ 5 TH
1	Dinas Perindustrian & Perdagangan	1.137.500.000	784.495.843	353.004.157	2.541.500	781.954.343	355.545.657						781.954.343
2	Dinas Koperasi dan UKM	2.000.000.000	955.957.000	1.044.043.000	-	955.957.000	1.044.043.000						955.957.000
3	Biro Perekonomian	1.000.000.000	669.142.330	330.857.670	-	669.142.330	330.857.670						669.142.330
4	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura (ex Dinas Perkebunan)	235.000.000	221.413.000	13.587.000	-	221.413.000	13.587.000						221.413.000
5	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura (Ex D Pertanian)	1.265.047.000	1.099.863.573	165.183.427	-	1.099.863.573	165.183.427						1.099.863.573
6	Dinas Peternakan	3.251.672.188	2.254.581.625	997.090.563		2.254.581.625	997.090.563						2.254.581.625
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	190.990.000	156.759.601	34.230.399	-	156.759.601	34.230.399						156.759.601
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.501.670.000	1.306.963.033	194.706.967	-	1.306.963.033	194.706.967						1.306.963.033
								-					-
	JUMLAH	**10.581.879.188**	**7.449.176.005**	**3.132.703.183**	**2.541.500**	**7.446.634.505**	**3.135.244.683**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.446.634.505**
	PENGGULIRAN		**TUNGGAKAN**	**PENGEMBALIAN**		**TUNGGAKAN**	**PENGEMBALIAN**						
	Program Linkage - Bank Nagari	**6.146.000.000**	**-**	**6.146.000.000**	**-**	**-**	**6.146.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	2008	826.000.000	-	826.000.000		-	826.000.000						-
	2010	980.000.000	-	980.000.000		-	980.000.000						-
	2011	980.000.000	-	980.000.000		-	980.000.000						-
	2014	1.890.000.000	-	1.890.000.000		-	1.890.000.000					-	-
	2015	210.000.000	-	210.000.000		-	210.000.000						-
	2016	840.000.000	-	840.000.000		-	840.000.000					-	-
	2018	420.000.000	-	420.000.000		-	420.000.000			-	-		-
	TOTAL		**7.449.176.005**	**9.278.703.183**	**2.541.500**	**7.446.634.505**	**9.281.244.683**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.446.634.505**

REKAPITULASI INVESTASI NON PERMANEN - DANA BERGULIR
PROVINSI SUMATERA BARAT
PER 31 DESEMBER 2024

NO	DINAS	DANA BERGULIR DIRAGUKAN DITAGIH					NRV
		≤ 1 TH	1-3 TH	≥3-5 TH	≥ 5 TH	Jumlah	
		0,5%	10%	50%	100%		
1	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-			781.954.343	781.954.343	355.545.657
2	Dinas Koperasi dan UKM	-		-	955.957.000	955.957.000	1.044.043.000
3	Biro Perekonomian	-			669.142.330	669.142.330	330.857.670
4	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura (ex Dinas Perkebunan)	-			221.413.000	221.413.000	13.587.000
5	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura (Ex D Pertanian)	-			1.099.863.573	1.099.863.573	165.183.427
6	Dinas Peternakan	-		-	2.254.581.625	2.254.581.625	997.090.563
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-			156.759.601	156.759.601	34.230.399
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	-			1.306.963.033	1.306.963.033	194.706.967
		-					
	JUMLAH	**-**	**-**	**-**	**7.446.634.505**	**7.446.634.505**	**3.135.244.683**
	PENGGULIRAN						
	Program Linkage - Bank Nagari	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	2008				-	-	
	2010				-	-	
	2011				-	-	
	2014		-		-	-	
	2015		-	-	-	-	
	2016	-	-	-		-	
	2018	-	-	-	-	-	
	TOTAL	**-**	**-**	**-**	**7.446.634.505**	**7.446.634.505**	**3.135.244.683**

LAMPIRAN 31

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DAFTAR INVESTASI PERMANEN

PER 31 DES 2024 (AUDITED)

	URAIAN	PT BANK NAGARI	PT BANGUN ASKRIDA	PT PEMBANGUNAN SUMBAR	PT ATS	PT GRAFIKA JAYA SUMBAR	PT DINAMIKA SUMBAR JAYA	PT ARP	PT BALAIRUNG	PT JAMKRIDA SUMBAR	PT SIJUNJUNG SUMBAR ENERGI	JUMLAH
1.a	Penyertaan Modal per 31 Des 2023 (Audited)	1.347.858.665.801,93	48.820.000.000,00	113.650.729,83	1.606.759.288,45	9.176.471.718,24	5.025.265.932,79	2.700.750.447,45	101.846.248.487,62	104.957.120.516,79	413.100.000,00	1.622.518.032.923,10
1.b	Koreksi Bagian Laba berdasarkan Laporan Audited BUMD Th 2024)											-
1.c	Koreksi Penyertaan Modal th 2023	9.180.810.859,28								(121.534.325,11)		9.059.276.534,17
1.d	Saldo Awal Penyertaan Modal 1 Jan 2024 (setelah koreksi)	1.357.039.476.661,21	48.820.000.000,00	113.650.729,83	1.606.759.288,45	9.176.471.718,24	5.025.265.932,79	2.700.750.447,45	101.846.248.487,62	104.835.586.191,68	413.100.000,00	1.631.577.309.457,27
2.a	Deviden	117.919.220.213,00								4.099.381.968,00		122.018.602.181,00
2.b	Piutang Dividen											-
3	Tambahan Penyertaan Modal	20.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000.000,00
												-
4	Modal Saham	1.904.573.000.000,00	318.950.000.000,00	776.850.000,00	3.760.724.381,00	14.640.000.000,00	7.860.707.751,00	6.000.000.000,00	164.025.990.000,00	89.404.804.000,00	810.000.000,00	2.510.802.076.132,00
5	Jumlah Modal Disetor per 31 Des 2024	621.224.000.000,00	48.820.000.000,00	275.950.000,00	3.708.000.000,00	14.005.000.000,00	7.590.000.000,00	3.000.000.000,00	130.767.000.000,00	89.304.804.000,00	413.100.000,00	919.107.854.000,00
	Jumlah Modal Disetor per 31 Des 2023	601.224.000.000,00	48.820.000.000,00	275.950.000,00	3.708.000.000,00	14.005.000.000,00	7.590.000.000,00	3.000.000.000,00	130.767.000.000,00	89.304.804.000,00	413.100.000,00	879.107.854.000,00
6	Laba Bersih	540.467.000.000,00				(68.030.017,31)			(1.191.001.858,00)	8.357.113.786,00		547.565.081.910,69
7	% Saham Pemprov (5/4)	32,62	15,31	35,52	98,60	95,66	96,56	50,00	79,72	99,89	51,00	
8	Laba x % Saham (6x7)	176.286.795.837,18		-	-	(65.079.261,78)	-	-	(949.506.477,39)	8.347.766.286,30	-	183.619.976.384,31
9	Penyertaan Modal per 31 Des 2024 (1+3-2+8)	1.435.407.052.285,39	48.820.000.000,00	113.650.729,83	1.606.759.288,45	9.111.392.456,46	5.025.265.932,79	2.700.750.447,45	100.896.742.010,23	109.083.970.509,98	413.100.000,00	1.713.178.683.660,58

Keterangan

1 PT.Bank Nagari (unaudit 2024), PT. Askrida (unaudit 2024), PT.Grafika (unaudit 2024), PT.Jamkrida unaudit 2024) dan PT.Balairung laporan keuangan (unaudit 2024)

2 PT.ATS dan PT.Dinamika tidak menyampaikan laporan karena dalam proses likuidasi

3 PT. Pembangunan Sumbar, PT. ARP dan PT. Sijunjung Sumbar Jaya belum menyampaikan laporan keuangan tahun 2024

REALISASI PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
s/d 31 DESEMBER 2024

PT. ASKRIDA

NO. Urut	Nomor Saham	Tahun	Lembar Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	594	1996	1	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	595	,,	1	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**20.000.000,00**	
3	596	,,	1	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**30.000.000,00**	
4	597	,,	1	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**40.000.000,00**	
5	598	,,	1	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**50.000.000,00**	
6	599	,,	1	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**60.000.000,00**	
7	600	,,	1	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**70.000.000,00**	
8	957	1997	1	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**80.000.000,00**	
9	1415	2001	1	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**90.000.000,00**	
10	1583 - 1633	2003	50	10.000.000,00	**500.000.000,00**	**590.000.000,00**	
11	2549 - 2648	2004	100	10.000.000,00	**1.000.000.000,00**	**1.590.000.000,00**	
12	2649 - 2748	2005	100	10.000.000,00	**1.000.000.000,00**	**2.590.000.000,00**	
13	3482 - 4111	2005	630	10.000.000,00	**6.300.000.000,00**	**8.890.000.000,00**	
14	5381 - 5580	2006	200	10.000.000,00	**2.000.000.000,00**	**10.890.000.000,00**	
15	5753 - 6902	2006	1150	10.000.000,00	**11.500.000.000,00**	**22.390.000.000,00**	
16	10689 - 10988	2008	300	10.000.000,00	**3.000.000.000,00**	**25.390.000.000,00**	
17	13095 - 14604	2009	700	10.000.000,00	**7.000.000.000,00**	**32.390.000.000,00**	
18	25081 - 26380	2017	1300	10.000.000,00	**13.000.000.000,00**	**45.390.000.000,00**	
19		2018	343	10.000.000,00	**3.430.000.000**	**48.820.000.000,00**	**Rp 48.820.000.000,00**
				PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH			
1	000001 - 130669	2007	130669	1.000.000,00	**130.669.000.000,00**	**130.669.000.000,00**	
2	335553 - 348403	2009	12851	1.000.000,00	**12.851.000.000,00**	**143.520.000.000,00**	
3	368553 - 383552	2010	15000	1.000.000,00	**15.000.000.000,00**	**158.520.000.000,00**	
4	427242 - 431525	2011	4284	1.000.000,00	**4.284.000.000,00**	**162.804.000.000,00**	
5	442476 - 467475	2012	25000	1.000.000,00	**25.000.000.000,00**	**187.804.000.000,00**	
6	492570 - 507569	2012	15000	1.000.000,00	**15.000.000.000,00**	**202.804.000.000,00**	
7	531572 - 556571	2013	25000	1.000.000,00	**25.000.000.000,00**	**227.804.000.000,00**	
8	620416 - 652415	2013	32000	1.000.000,00	**32.000.000.000,00**	**259.804.000.000,00**	
9	710084 - 720083	2014	10000	1.000.000,00	**10.000.000.000,00**	**269.804.000.000,00**	
10	798860 - 852779	2014	53920	1.000.000,00	**53.920.000.000,00**	**323.724.000.000,00**	
11	1057194 - 1102193	2015	45000	1.000.000,00	**45.000.000.000,00**	**368.724.000.000,00**	
12	1187329 - 1232328	2016	45000	1.000.000,00	**45.000.000.000,00**	**413.724.000.000,00**	
13	1255913 - 1278412	2016	22500	1.000.000,00	**22.500.000.000,00**	**436.224.000.000,00**	
14	1405729 - 1420728	2017	15000	1.000.000,00	**15.000.000.000,00**	**451.224.000.000,00**	
15	1465103 - 1500102	2017	35000	1.000.000,00	**35.000.000.000,00**	**486.224.000.000,00**	
16	1547986 - 1562985	2018	15000	1.000.000,00	**15.000.000.000,00**	**501.224.000.000,00**	
17	1586486 - 1611485	2018	25000	1.000.000,00	**25.000.000.000,00**	**526.224.000.000,00**	
18	1632786 - 1647785	2019	15000	1.000.000,00	**15.000.000.000,00**	**541.224.000.000,00**	
38	1701348 - 1706347	2020	5000	1.000.000,00	**5.000.000.000,00**	**546.224.000.000,00**	
39	1716848 - 1731847	2021	15000	1.000.000,00	**15.000.000.000,00**	**561.224.000.000,00**	
40	1777139 - 1797138	2022	20000	1.000.000,00	**20.000.000.000,00**	**581.224.000.000,00**	
41	1825139-1845138	2023	20000	1.000.000,00	**20.000.000.000,00**	**601.224.000.000,00**	
42	**1867868-1887867**	**2024**	**20000**	**1.000.000,00**	**20.000.000.000,00**	**621.224.000.000,00**	**Rp 621.224.000.000,00**
				PT. GRAFIKA JAYA SUMBAR			
1	0001 - 8526	2010	8526	1.000.000,00	**8.526.000.000,00**	**8.526.000.000,00**	
2	8602 - 9480	2011	879	1.000.000,00	**879.000.000,00**	**9.405.000.000,00**	
3	10041 - 11041	2012	1000	1.000.000,00	**1.000.000.000,00**	**10.405.000.000,00**	
4	11042 - 12041	2013	1000	1.000.000,00	**1.000.000.000,00**	**11.405.000.000,00**	
5	12042 - 14642	2015	2600	1.000.000,00	**2.600.000.000,00**	**14.005.000.000,00**	**Rp 14.005.000.000,00**
				PT. DINAMIKA SUMBAR JAYA			
1	0001 - 4990	2010	4990	1.000.000,00	**4.990.000.000,00**	**4.990.000.000,00**	
2	5041 - 5640	2010	600	1.000.000,00	**600.000.000,00**	**5.590.000.000,00**	
3	5641 - 6640	2011	1000	1.000.000,00	**1.000.000.000,00**	**6.590.000.000,00**	
4	2203 - 12202	2013	1000	1.000.000,00	**1.000.000.000,00**	**7.590.000.000,00**	**Rp 7.590.000.000,00**
				PT. ANDALAS TUAH SAKATO			
1	0001 - 2208	2010	2208	1.000.000,00	**2.208.000.000,00**	**2.208.000.000,00**	
2	2261 - 2760	2012	500	1.000.000,00	**500.000.000,00**	**2.708.000.000,00**	
3	2761 -3760	2013	1000	1.000.000,00	**1.000.000.000,00**	**3.708.000.000,00**	**Rp 3.708.000.000,00**
				PT. PEMBANGUNAN SUMBAR			
1	0001 - 1075	2010	1075	100.000,00	**107.500.000,00**	**107.500.000,00**	
2	0001 - 6738	2010	6738	25.000,00	**168.450.000,00**	**275.950.000,00**	**Rp 275.950.000,00**
				PT. ANDALAS REKASINDO PRATAMA			
1	000.001 - 300.000	2011	300000	10.000,00	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	
						3.000.000.000,00	**Rp 3.000.000.000,00**
				PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR			
1	00-001 - 46-207	2012	76527	1.000.000,00	**76.527.000.000,00**	**76.527.000.000,00**	
	59-484 - 89-484	2012		-	**-**	**76.527.000.000,00**	
2	00-000-001 - 30-802-500	2012	51017000	1.000,00	**51.017.000.000,00**	**127.544.000.000,00**	
	39-660-996 - 59-875-495	2012		-	**-**	**127.544.000.000,00**	
3	94-408 - 96-340	2012	1933	1.000.000,00	**1.933.000.000,00**	**129.477.000.000,00**	
	62-946-314 - 64-236-313	2012	1290000	1.000,00	**1.290.000.000,00**	**130.767.000.000,00**	**Rp 130.767.000.000,00**
				JAMKRIDA SUMBAR			
1	00001 - 25000	2013	25000	1.000.000,00	**25.000.000.000,00**	**25.000.000.000,00**	

NO. Urut	Nomor Saham	Tahun	Lembar Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	Total	Ket.
2	25011 - 26011	2013	1000	1.000.000,00	**1.000.000.000,00**	**26.000.000.000,00**	
3	26011 - 31010	2015	5000	1.000.000,00	**5.000.000.000,00**	**31.000.000.000,00**	
4	31011 - 36010	2016	5000	1.000.000,00	**5.000.000.000,00**	**36.000.000.000,00**	
5	36011 - 38510	2016	5000	1.000.000,00	**2.500.000.000,00**	**38.500.000.000,00**	
6	38511 - 43510	2017	5000	1.000.000,00	**5.000.000.000,00**	**43.500.000.000,00**	
7	43511 - 48510	2017	5000	1.000.000,00	**5.000.000.000,00**	**48.500.000.000,00**	
8	48511 - 53510	2018	5000	1.000.000,00	**5.000.000.000,00**	**53.500.000.000,00**	
9	53511 - 58510	2018	5000	1.000.000,00	**5.000.000.000,00**	**58.500.000.000,00**	
10	58601 - 63600	2019	5000	1.000.000,00	**5.000.000.000,00**	**63.500.000.000,00**	
11	63601 - 78600	2020	15000	1.000.000,00	**15.000.000.000,00**	**78.500.000.000,00**	**Rp 78.500.000.000,00**
SIJUNJUNG SUMBAR ENERGI							
1		2019	1	413.100.000,00	**413.100.000,00**	**413.100.000,00**	**Rp 413.100.000,00**
					TOTAL		**Rp 908.303.050.000,00**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DAFTAR BARANG JASA YANG DIKAPITALISIR KE ASET TETAP TAHUN 2024

KODE LOKASI	UNIT BIDANG	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	TOTAL ASET TETAP	ASET TIDAK BERWUJUD
S101011	DINAS PENDIDIKAN	-	627.088.730,00	24.420.000,00		124.142.860,00	-	775.651.590,00	-
S101021	DINAS KESEHATAN	-	2.664.000,00	178.501.164,00			-	181.165.164,00	-
S101022	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	-		58.481.918,00			-	58.481.918,00	-
S101023	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	-					-	-	-
S101026	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR	-	13.500.000,00				-	13.500.000,00	-
S101027	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	-					-	-	-
S101033	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	-					-	-	-
S101034	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	-		896.083.221,00	435.460.392,00		-	1.331.543.613,00	-
S101041	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-		73.550.000,00			-	73.550.000,00	-
S101052	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	11.200.000,00				-	11.200.000,00	-
S101061	DINAS SOSIAL	-	70.700.000,00	784.864.645,00		115.725.159,00	-	971.289.804,00	-
S102011	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-					-	-	-
S102022	DP3AP2KB	-		44.482.000,00			-	44.482.000,00	-
S102031	DINAS PANGAN	-		178.878.549,00			-	178.878.549,00	-
S102051	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-					-	-	-
S102071	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-					-	-	-
S102082	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-					-	-	-
S102091	DINAS PERHUBUNGAN	-		48.000.000,00			-	48.000.000,00	-
S102102	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-					-	-	-
S102111	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECI DAN MENENGAH	-		843.427.162,00			-	843.427.162,00	-
S102121	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-					-	-	-
S102131	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-					-	-	-
S102161	DINAS KEBUDAYAAN	-					-	-	-
S102181	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-					-	-	-
S200011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-		901.600.033,33			-	901.600.033,33	-
S200021	DINAS PARIWISATA	-					-	-	-
S200032	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-		684.418.038,00			-	684.418.038,00	-
S200033	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	-					-	-	-
S200041	DINAS KEHUTANAN	-		899.608.445,00			-	899.608.445,00	-
S200051	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-					-	-	-
S200071	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-					-	-	-
S300011	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	-					-	-	-
S300021	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-					-	-	-
S300032	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-					-	-	-
S300033	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-					-	-	-
S300041	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-		5.502.500,00			-	5.502.500,00	-
S300051	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		1.206.400.621,00			-	1.206.400.621,00	-
S300061	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-					-	-	-
S300071	BADAN PENGHUBUNG	-					-	-	-
S400010	SEKRETARIAT DAERAH	-					-	-	-
S400013	BIRO HUKUM	-					-	-	-
S400014	BIRO PEREKONOMIAN	-					-	-	-
S400017	BIRO ORGANISASI	-					-	-	-
S400018	BIRO UMUM	-	102.396.150,00	1.279.618.484,00			-	1.382.014.634,00	-
S400021	SEKRETARIAT DPRD	-	26.440.000,00	3.093.371.544,81			-	3.119.811.544,81	-
S400110	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-					-	-	-
S400111	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	-					-	-	-
S400112	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-					-	-	-
S400113	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	-					-	-	-

KODE LOKASI	UNIT BIDANG	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	TOTAL ASET TETAP	ASET TIDAK BERWUJUD
S400114	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	-					-	-	-
S500011	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-		361.439.895,00			-	361.439.895,00	-
S500012	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-					-	-	-
	TOTAL	**-**	**853.988.880,00**	**11.562.648.220,14**	**435.460.392,00**	**239.868.019,00**	**-**	**13.091.965.511,14**	**-**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DAFTAR REALISASI BM, BM TIDAK DIKAPITALISIR, BM DIKAPITALISIR
TAHUN 2024

KODE LOKASI	SKPD/UNIT KERJA	TOTAL ASET TETAP		
		REALISASI BM	BM TDK DIKAPITALISIR	BM DIKAPITALISIR
1	2	3	4	5 = 3 - 4
S101011	DINAS PENDIDIKAN	277.296.042.939,00	8.711.486.344,00	268.584.556.595,00
S101021	DINAS KESEHATAN	3.220.525.184,00	83.660.000,00	3.136.865.184,00
S101022	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	29.465.927.562,00	8.877.000,00	29.457.050.562,00
S101023	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	2.965.544.486,00	19.120.677,00	2.946.423.809,00
S101026	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR	12.528.285.303,00	396.305.000,00	12.131.980.303,00
S101027	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	8.246.131.422,00	23.731.640,00	8.222.399.782,00
S101033	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	199.746.552.333,46	523.648.942,00	199.222.903.391,46
S101034	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	53.534.942.967,00	100.037.430,00	53.434.905.537,00
S101041	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	93.337.346.000,00	3.123.500,00	93.334.222.500,00
S101052	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	118.650.000,00	-	118.650.000,00
S101061	DINAS SOSIAL	5.772.913.865,00	204.969.393,00	5.567.944.472,00
S102011	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	114.267.700,00	-	114.267.700,00
S102022	DP3AP2KB	440.956.000,00	-	440.956.000,00
S102031	DINAS PANGAN	53.710.000,00	-	53.710.000,00
S102051	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.451.149.209,00	-	2.451.149.209,00
S102071	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.435.000,00	-	8.435.000,00
S102082	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	19.396.250,00	-	19.396.250,00
S102091	DINAS PERHUBUNGAN	19.018.000,00	-	19.018.000,00
S102102	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	1.037.459.196,00	-	1.037.459.196,00
S102111	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECI DAN MENENGAH	314.423.000,00	-	314.423.000,00
S102121	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	111.094.980,00	-	111.094.980,00
S102131	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	35.432.000,00	-	35.432.000,00
S102161	DINAS KEBUDAYAAN	99.015.000,00	-	99.015.000,00
S102181	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	122.142.500,00	-	122.142.500,00
S200011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.019.601.733,84	-	5.019.601.733,84
S200021	DINAS PARIWISATA	375.872.437,00	-	375.872.437,00
S200032	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.604.261.406,00	-	1.604.261.406,00
S200033	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	479.464.639,00	358.153.000,00	121.311.639,00
S200041	DINAS KEHUTANAN	254.500.000,00	-	254.500.000,00
S200051	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	200.419.200,00	29.984.000,00	170.435.200,00
S200071	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	393.045.110,00	1.000.000,00	392.045.110,00
S300011	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	2.409.649.606,92	39.812.500,00	2.369.837.106,92
S300021	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	77.796.000,00	-	77.796.000,00
S300032	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	971.339.800,00	-	971.339.800,00
S300033	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2.090.433.045,00	-	2.090.433.045,00
S300041	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	121.393.118,13	-	121.393.118,13
S300051	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.798.990.000,00	-	1.798.990.000,00
S300061	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	78.550.000,00	-	78.550.000,00
S300071	BADAN PENGHUBUNG	189.832.500,00	-	189.832.500,00
S400010	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-
S400013	BIRO HUKUM	95.355.000,00	-	95.355.000,00
S400014	BIRO PEREKONOMIAN	95.130.000,00	980.000,00	94.150.000,00
S400017	BIRO ORGANISASI	401.821.000,00	-	401.821.000,00
S400018	BIRO UMUM	22.422.226.850,00	-	22.422.226.850,00
S400021	SEKRETARIAT DPRD	33.324.232.247,00	-	33.324.232.247,00
S400110	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	124.200.000,00	-	124.200.000,00
S400111	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	202.625.000,00	1.900.000,00	200.725.000,00
S400112	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	205.250.000,00	-	205.250.000,00
S400113	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	146.950.000,00	-	146.950.000,00
S400114	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	176.149.635,00	-	176.149.635,00
S500011	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	202.550.000,00	-	202.550.000,00
S500012	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	967.120.400,00	-	967.120.400,00
	TOTAL	**765.488.119.624,35**	**10.506.789.426,00**	**754.981.330.198,35**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
REKAPITULASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA PROVINSI SUMATERA BARAT
PER 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

No	SKPD/Unit Kerja	Tanah	Peralatan dan Mesin	AKM PENYUSUTAN	Gedung dan Bangunan	AKM PENYUSUTAN	Jalan, Irigasi dan Jaringan	AKM PENYUSUTAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KODE LOKASI	UNIT BIDANG	KIB A NP	KIB B NP	KIB B AKM	KIB C NP	KIB C AKM	KIB D NP	KIB D AKM
S101011	DINAS PENDIDIKAN	554.261.942.444,34	1.222.576.882.683,22	963.554.673.349,61	2.544.259.679.771,14	636.602.205.129,18	-	-
S101021	DINAS KESEHATAN	80.413.600.190,00	107.336.838.959,11	91.849.096.362,80	100.313.957.645,46	18.625.781.229,76	-	-
S101022	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	44.577.906.000,00	379.804.350.502,59	276.180.131.128,18	167.879.718.143,99	49.558.888.609,26	-	-
S101023	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	20.501.807.000,00	34.512.293.936,36	30.821.443.904,04	72.150.463.633,00	21.679.142.024,27	-	-
S101026	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR	3.976.702.319,68	233.413.118.173,04	207.240.916.156,69	121.032.743.063,97	29.421.742.668,06	-	-
S101027	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	12.218.767.700,00	146.452.698.835,00	135.987.678.991,95	60.286.607.516,43	13.817.587.585,18	-	-
S101033	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	467.261.856.488,06	95.867.658.391,51	84.132.850.147,43	150.044.247.562,00	28.410.071.305,48	4.954.139.044.541,93	4.337.550.260.586,92
S101034	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	31.572.095.068,00	27.672.019.682,99	22.789.440.333,24	15.552.153.075,31	5.355.500.567,71	2.049.716.269.286,52	1.095.067.525.110,41
S101041	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2.291.371.200,00	5.004.515.663,00	4.699.423.018,60	6.976.988.000,00	2.790.795.199,46	-	-
S101052	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	5.185.335.495,00	4.946.878.459,27	-	-	-	-
S101061	DINAS SOSIAL	21.690.396.000,00	21.922.790.638,90	17.560.351.850,09	59.362.591.210,33	24.150.977.869,36	-	-
S102011	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	48.718.958.773,33	31.010.654.948,71	30.775.639.605,23	13.664.020.371,49	5.104.359.565,86	-	-
S102022	DP3AP2KB	9.429.200.000,00	4.720.829.200,00	3.946.804.204,56	20.796.545.159,19	3.392.055.215,47	-	-
S102031	DINAS PANGAN	16.800.000.000,00	22.232.593.633,99	17.263.475.131,10	41.757.764.267,34	7.027.031.192,57	-	-
S102051	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8.390.603.169,00	41.964.584.320,00	39.757.725.245,24	11.023.663.932,00	2.220.270.880,56	27.283.356.200,00	27.283.356.200,00
S102071	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.656.192.000,00	5.130.009.521,00	4.946.813.704,60	3.202.497.583,00	1.719.917.147,28	-	-
S102082	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.426.192.000,00	6.474.480.544,00	5.871.675.062,10	1.557.500.200,00	564.398.038,94	-	-
S102091	DINAS PERHUBUNGAN	22.556.380.465,20	10.404.406.547,99	9.494.111.591,79	9.898.450.562,27	4.910.611.070,96	-	-
S102102	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.109.190.000,00	33.033.658.604,87	25.123.846.554,25	5.112.732.749,00	1.123.161.653,27	-	-
S102111	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECI DAN MENENGAH	14.663.138.000,00	10.788.322.305,00	9.282.841.859,54	23.245.093.442,00	4.668.564.389,13	-	-
S102121	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	5.283.384.073,99	4.944.611.359,19	-	-	-	-
S102131	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	75.777.418.600,00	8.411.094.942,96	7.910.400.289,85	51.424.728.547,40	17.041.458.801,22	-	-
S102161	DINAS KEBUDAYAAN	69.681.500.000,00	16.295.174.271,00	13.704.366.077,06	79.778.447.640,85	13.491.238.793,69	-	-
S102181	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	5.829.812.000,00	15.417.887.029,62	14.902.732.604,26	26.926.092.737,23	6.970.720.640,96	-	-
S200011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	31.713.981.004,62	56.432.953.619,72	45.625.290.881,87	140.019.971.476,58	40.881.579.021,14	15.293.735.314,89	4.570.155.630,40
S200021	DINAS PARIWISATA	6.817.970.000,00	9.521.832.062,01	8.538.778.684,47	7.649.925.593,00	2.541.707.272,10	-	-
S200032	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	20.875.278.000,00	34.341.959.075,00	29.973.368.012,47	68.544.922.819,00	25.657.895.719,64	-	-
S200033	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	52.664.036.877,50	49.764.747.556,44	43.036.329.499,11	117.058.604.743,99	24.681.360.395,76	831.735.300,00	831.735.300,00
S200041	DINAS KEHUTANAN	34.561.986.216,00	48.550.102.425,41	46.001.820.812,59	24.915.845.723,00	7.232.472.550,25	-	-
S200051	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.936.580.596,00	9.565.034.627,16	8.888.507.126,99	19.014.751.846,36	3.268.434.764,55	72.072.000.693,00	17.713.385.931,42
S200071	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	30.982.193.714,72	21.316.190.963,00	19.636.789.153,25	28.944.620.672,24	10.260.153.971,66	-	-
S300011	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	1.097.970.000,00	6.423.413.722,00	5.548.713.993,74	5.878.442.249,92	1.597.972.748,84	-	-
S300021	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.600.590.000,00	18.603.903.065,00	17.389.317.558,52	22.386.421.945,00	5.797.101.077,32	-	-
S300032	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	6.963.835.375,23	5.567.721.244,60	-	-	-	-
S300033	BADAN PENDAPATAN DAERAH	35.891.625.775,90	41.639.728.268,02	37.380.941.199,79	70.241.711.895,00	15.563.522.298,62	-	-
S300041	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	3.036.000.000,00	8.945.590.410,98	8.233.295.197,78	4.067.529.868,13	1.734.689.040,47	-	-
S300051	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	22.267.700.000,00	13.509.316.242,18	11.427.674.667,70	27.061.231.718,30	6.090.319.605,94	-	-
S300061	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	3.500.280.992,00	3.165.751.827,79	-	-	-	-
S300071	BADAN PENGHUBUNG	3.591.239.000,00	11.080.506.517,53	10.104.569.853,63	21.025.743.237,00	6.604.709.588,96	-	-
S400010	SEKRETARIAT DAERAH	48.731.005.972,97	8.264.348.742,00	8.264.348.742,00	29.046.804.952,00	9.713.533.171,22	9.365.486.300,00	1.873.097.260,08
S400013	BIRO HUKUM	-	1.950.284.284,00	1.619.303.233,88	-	-	-	-
S400014	BIRO PEREKONOMIAN	-	1.773.911.227,97	1.497.570.886,84	-	-	-	-
S400017	BIRO ORGANISASI	-	2.472.307.267,09	1.853.132.859,85	-	-	-	-
S400018	BIRO UMUM	370.972.587.000,00	87.632.432.516,05	62.514.371.425,22	249.737.632.801,01	60.213.284.643,37	-	-
S400021	SEKRETARIAT DPRD	27.630.920.000,00	78.083.771.660,00	55.650.744.897,15	166.933.135.538,81	39.128.546.400,55	-	-
S400110	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	2.914.413.706,00	2.702.599.365,68	-	-	-	-
S400111	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	-	6.670.325.167,00	5.467.386.439,98	-	-	-	-
S400112	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	95.003.478.000,00	4.516.858.436,33	4.096.230.935,93	283.601.958.256,00	39.704.274.156,12	-	-
S400113	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	10.000.000,00	2.541.901.964,00	2.023.865.212,67	1.417.625.721,00	397.407.717,00	-	-
S400114	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	3.993.823.050,00	3.442.622.146,07	-	-	-	-
S500011	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.067.800.000,00	3.561.200.020,00	3.233.066.140,16	805.652.909,00	163.864.690,12	-	-
S500012	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	65.072.838.165,92	61.271.316.246,00	1.418.294.980,00	318.737.656,92	-	-

	TOTAL	**2.317.257.971.575,32**	**3.100.523.394.031,89**	**2.541.843.355.236,40**	**4.876.017.515.758,74**	**1.200.198.046.068,18**	**7.128.701.627.636,34**	**5.484.889.516.019,23**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
REKAPITULASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA PROVINSI SUMATERA BAR
PER 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

No	SKPD/Unit Kerja	Aset Tetap Lainnya	AKM PENYUSUTAN	Konstruksi Dalam Pengerjaan	JUMLAH Aset Tetap	JUMLAH AKM PENYUSUTAN	Aset Tidak Berwujud	AKM AMORTISASI
1	2	10	11	12	13=3+4+6+8+10+12	14=5+7+9+11	15	16
KODE LOKASI	UNIT BIDANG	KIB E NP	KIB E AKM	KIB F NP	TOTAL AT NP	TOTAL AT AKM	ATB NP	ATB AKM
S101011	DINAS PENDIDIKAN	429.369.359.926,65	151.620.117,40	19.125.899.932,89	4.769.593.764.758,24	1.600.308.498.596,19	2.371.101.063,50	2.362.914.848,18
S101021	DINAS KESEHATAN	157.310.850,00	-	121.942.005,00	288.343.649.649,57	110.474.877.592,56	818.252.000,00	818.252.000,00
S101022	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	142.495.090,00	1.300.000,00	149.092.458.462,00	741.496.928.198,58	325.740.319.737,44	1.418.713.802,00	1.418.713.802,00
S101023	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	53.142.050,00	-	131.721.000,00	127.349.427.619,36	52.500.585.928,31	623.215.000,00	623.215.000,00
S101026	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR	78.532.400,00	-	70.749.137.630,54	429.250.233.587,23	236.662.658.824,75	1.336.175.252,00	1.336.175.252,00
S101027	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	110.352.550,00	-	8.284.385.133,00	227.352.811.734,43	149.805.266.577,13	1.514.676.122,00	1.507.941.428,00
S101033	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	26.644.023.607,28	12.041.733.730,44	729.213.226.134,45	6.423.170.056.725,23	4.462.134.915.770,27	13.101.702.844,50	12.814.865.156,82
S101034	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	6.730.080,00	-	21.170.323.935,27	2.145.689.591.128,09	1.123.212.466.011,36	45.100.000,00	45.100.000,00
S101041	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	198.763.800,00	-	-	14.471.638.663,00	7.490.218.218,06	535.093.500,00	535.093.500,00
S101052	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	5.185.335.495,00	4.946.878.459,27	-	-
S101061	DINAS SOSIAL	719.767.559,00	357.562.400,00	66.124.245,00	103.761.669.653,23	42.068.892.119,45	-	-
S102011	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	14.950.000,00	93.408.584.093,53	35.879.999.171,09	-	-
S102022	DP3AP2KB	-	-	96.264.750,00	35.042.839.109,19	7.338.859.420,03	-	-
S102031	DINAS PANGAN	10.180.250,00	-	-	80.800.538.151,33	24.290.506.323,67	24.800.000,00	24.800.000,00
S102051	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	224.490.000,00	-	-	88.886.697.621,00	69.261.352.325,80	282.458.000,00	282.458.000,00
S102071	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17.600.000,00	17.600.000,00	-	10.006.299.104,00	6.684.330.851,88	48.000.000,00	48.000.000,00
S102082	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	12.458.172.744,00	6.436.073.101,04	-	-
S102091	DINAS PERHUBUNGAN	318.900.500,00	314.000.500,00	-	43.178.138.075,46	14.718.723.162,75	1.008.242.200,00	1.008.242.200,00
S102102	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	212.850.808,00	-	234.128.450,00	40.702.560.611,87	26.247.008.207,52	534.135.000,00	534.135.000,00
S102111	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECI DAN MENENGAH	11.835.000,00	-	-	48.708.388.747,00	13.951.406.248,67	-	-
S102121	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	171.091.500,00	-	443.400.980,00	5.897.876.553,99	4.944.611.359,19	479.402.800,00	479.402.800,00
S102131	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	8.000.000,00	-	-	135.621.242.090,36	24.951.859.091,07	-	-
S102161	DINAS KEBUDAYAAN	828.764.500,00	41.900.000,00	-	166.583.886.411,85	27.237.504.870,75	-	-
S102181	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	5.438.642.780,00	15.000.000,00	-	53.612.434.546,85	21.888.453.245,22	2.448.496.231,00	2.399.093.946,00
S200011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	64.262.000,00	64.262.000,00	642.072.881,52	244.166.976.297,33	91.141.287.533,41	67.000.000,00	67.000.000,00
S200021	DINAS PARIWISATA	98.350.200,00	72.589.200,00	735.362.437,00	24.823.440.292,01	11.153.075.156,57	329.495.500,00	329.495.500,00
S200032	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.868.231.000,00	-	455.214.095,00	127.085.604.989,00	55.631.263.732,11	-	-
S200033	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	257.253.000,00	70.180.000,00	295.431.200,00	220.871.808.677,93	68.619.605.194,87	290.000.000,00	290.000.000,00
S200041	DINAS KEHUTANAN	107.696.000,00	-	85.347.130,00	108.220.977.494,41	53.234.293.362,84	6.000.000,00	6.000.000,00
S200051	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	66.777.500,00	13.162.200,12	159.417.900,00	103.814.563.162,52	29.883.490.023,08	-	-
S200071	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	647.215.000,00	40.000.000,00	-	81.890.220.349,96	29.936.943.124,91	-	-
S300011	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	37.024.654,00	-	-	13.436.850.625,92	7.146.686.742,58	123.200.000,00	123.200.000,00
S300021	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	44.926.370,00	-	-	46.635.841.380,00	23.186.418.635,84	1.749.083.432,00	1.749.083.432,00
S300032	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	116.798.496,00	-	-	7.080.633.871,23	5.567.721.244,60	1.296.295.000,00	1.296.295.000,00
S300033	BADAN PENDAPATAN DAERAH	6.750.200,00	-	77.016.720,00	147.856.832.858,92	52.944.463.498,41	2.111.108.800,00	2.111.108.800,00
S300041	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	71.261.825,00	40.520.000,00	-	16.120.382.104,11	10.008.504.238,25	334.841.000,00	334.841.000,00
S300051	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	99.894.800,00	-	-	62.938.142.760,48	17.517.994.273,64	49.900.000,00	41.900.000,00
S300061	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	342.794.882,82	-	243.336.000,00	4.086.411.874,82	3.165.751.827,79	69.850.000,00	69.850.000,00
S300071	BADAN PENGHUBUNG	671.692.800,00	40.959.000,00	235.630.800,00	36.604.812.354,53	16.750.238.442,59	102.100.000,00	102.100.000,00
S400010	SEKRETARIAT DAERAH	94.170.680,00	-	-	95.501.816.646,97	19.850.979.173,30	-	-
S400013	BIRO HUKUM	27.259.600,00	-	-	1.977.543.884,00	1.619.303.233,88	49.850.000,00	49.850.000,00
S400014	BIRO PEREKONOMIAN	-	-	-	1.773.911.227,97	1.497.570.886,84	-	-
S400017	BIRO ORGANISASI	1.910.000,00	-	-	2.474.217.267,09	1.853.132.859,85	139.850.000,00	139.850.000,00
S400018	BIRO UMUM	1.840.535.866,00	668.014.986,59	296.496.000,00	710.479.684.183,06	123.395.671.055,18	-	-
S400021	SEKRETARIAT DPRD	602.460.100,00	445.226.600,00	-	273.250.287.298,81	95.224.517.897,70	21.000.000,00	21.000.000,00
S400110	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	-	-	2.914.413.706,00	2.702.599.365,68	49.700.000,00	49.700.000,00
S400111	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	-	-	-	6.670.325.167,00	5.467.386.439,98	-	-
S400112	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	383.122.294.692,33	43.800.505.092,05	-	-
S400113	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	525.000,00	-	-	3.970.052.685,00	2.421.272.929,67	-	-
S400114	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	-	-	3.993.823.050,00	3.442.622.146,07	-	-
S500011	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	17.120.453,00	17.120.453,00	-	8.451.773.382,00	3.414.051.283,28	-	-
S500012	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	25.505.000,00	-	6.223.636.000,00	72.740.274.145,92	61.590.053.902,92	70.727.818,00	70.727.818,00

	TOTAL	**472.833.248.677,75**	**14.412.751.187,55**	**1.008.192.923.821,67**	**18.903.526.681.501,70**	**9.241.343.668.511,36**	**33.449.565.365,00**	**33.090.404.483,00**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
REKAPITULASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA PROVINSI SUMATERA BAR
PER 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

No	SKPD/Unit Kerja	Aset Tdk Bermanfaat	AKM PENYUSUTAN	Aset Dimanfaatkan Pihak Lain	AKM. PENYUSUTAN	Aset Dalam Penelusuran	AKM PENYUSUTAN
1	2	17	18	19	20	21	22
KODE LOKASI	UNIT BIDANG	ATM NP	ATM AKM	ADPL NP	ADPL AKM	ADP NP	ADP AKM
S101011	DINAS PENDIDIKAN	41.728.023.759,12	32.241.161.701,18	-	-	-	-
S101021	DINAS KESEHATAN	291.571.022,00	291.571.022,00	-	-	-	-
S101022	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	-	-	-	-	-	-
S101023	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	46.127.000,00	46.127.000,00	-	-	-	-
S101026	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR	4.692.794.989,00	4.692.794.989,00	-	-	-	-
S101027	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	3.225.524.800,00	3.225.524.800,00	-	-	-	-
S101033	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	35.103.890.317,78	4.429.747.282,32	-	-	-	-
S101034	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	30.602.650,00	22.951.987,20	-	-	-	-
S101041	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	-	-	-	-	-
S101052	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-	-
S101061	DINAS SOSIAL	1.497.251.623,91	1.481.771.623,91	-	-	-	-
S102011	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	348.587.000,00	348.587.000,00	-	-	-	-
S102022	DP3AP2KB	467.787.500,00	466.207.499,68	-	-	-	-
S102031	DINAS PANGAN	-	-	-	-	-	-
S102051	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	228.794.100,00	228.794.100,00	-	-	-	-
S102071	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	117.900.000,00	117.900.000,00	-	-	-	-
S102082	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	177.799.000,00	177.799.000,00	-	-	-	-
S102091	DINAS PERHUBUNGAN	16.700.000,00	16.700.000,00	-	-	-	-
S102102	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	450.152.370,00	450.152.370,00	-	-	-	-
S102111	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECI DAN MENENGAH	58.216.500,00	58.216.500,00	-	-	-	-
S102121	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	306.939.923,00	306.939.923,00	-	-	-	-
S102131	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	481.543.245,00	478.702.964,92	-	-	-	-
S102161	DINAS KEBUDAYAAN	1.427.390.138,00	1.382.860.138,00	-	-	-	-
S102181	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	182.900.000,00	182.900.000,00	-	-	-	-
S200011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	15.344.354.644,20	7.151.422.948,78	-	-	-	-
S200021	DINAS PARIWISATA	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	-	-
S200032	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.230.547.856,00	1.230.547.856,00	-	-	-	-
S200033	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	2.247.953.014,37	2.247.953.014,37	-	-	-	-
S200041	DINAS KEHUTANAN	3.621.475.661,43	3.576.936.115,83	-	-	-	-
S200051	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	838.286.377,03	838.286.377,03	-	-	-	-
S200071	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	35.900.000,00	29.437.999,56	-	-	-	-
S300011	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	704.357.500,00	704.357.500,00	-	-	-	-
S300021	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	548.481.000,00	548.481.000,00	-	-	-	-
S300032	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	642.719.317,00	642.719.317,00	-	-	-	-
S300033	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.376.803.367,52	1.376.803.367,52	-	-	-	-
S300041	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	11.700.000,00	11.700.000,00	-	-	-	-
S300051	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	262.500.000,00	262.500.000,00	-	-	-	-
S300061	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	-	-	-
S300071	BADAN PENGHUBUNG	371.465.972,00	371.465.972,00	-	-	-	-
S400010	SEKRETARIAT DAERAH	198.900.000,01	198.900.000,01	-	-	-	-
S400013	BIRO HUKUM	205.778.230,00	205.778.230,00	-	-	-	-
S400014	BIRO PEREKONOMIAN	130.335.208,99	130.335.208,99	-	-	-	-
S400017	BIRO ORGANISASI	-	-	-	-	-	-
S400018	BIRO UMUM	331.489.607,00	81.649.017,00	-	-	-	-
S400021	SEKRETARIAT DPRD	2.128.599.540,00	1.546.500.000,00	-	-	-	-
S400110	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	-	-	-	-	-
S400111	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	153.276.706,00	153.276.706,00	-	-	-	-
S400112	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	-	-	-
S400113	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	260.448.000,00	260.448.000,00	-	-	-	-
S400114	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	902.962.490,00	902.962.490,00	-	-	-	-
S500011	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-	-	-
S500012	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.250.657.881,73	5.221.754.282,05	-	-	-	-

	TOTAL	**127.829.488.311,09**	**78.491.625.303,35**	-	-	-	-

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

	Uraian	Tanah	Peralatan dan Mesin	AKM PENYUSUTAN	Gedung dan Bangunan	AKM PENYUSUTAN
1	2	3	4	5	6	7
	Saldo Audited 2023	2.309.015.698.531,82	2.905.254.397.064,63	2.322.700.129.644,24	4.627.403.775.024,23	1.100.759.868.734,32
Mutasi Tambah						
	Belanja Modal tahun 2024	2.464.373.669,00	189.146.437.545,00		212.226.274.577,89	
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2024		853.988.880,00		11.562.648.220,14	
	Koreksi Nilai	7.948.955.195,00	18.951.654.329,00	2.650.140.441,43	15.712.896.971,48	4.966.126,83
	Hibah	122.400.002,00	26.767.036.877,00	21.630.636.383,47	20.631.703.400,00	213.151.792,33
	Mutasi antar SKPD	198.995.000,00	8.492.911.824,00	8.005.086.824,20		
	Reklas	198.995.000,00	4.178.440.295,00	2.584.763.404,00	37.455.342.596,00	
	Beban Penyusutan			203.555.135.875,93		99.453.715.891,08
	Total Mutasi Tambah	10.933.718.866,00	248.390.469.750,00	238.425.762.929,03	297.588.865.765,51	99.671.833.810,24
Mutasi Kurang						
	Barang Modal yang tidak dikapitalisir	3.123.500,00	8.881.201.184,00		989.628.750,00	
	Koreksi Nilai		2.131.572.330,00	5,61	3.002.143.489,00	6.700,08
	Penghapusan	2.489.327.322,50	2.031.129.092,00	1.088.097.392,00		
	Mutasi antar SKPD	198.995.000,00	8.492.911.824,00	8.005.086.824,20		
	Reklas		31.584.658.352,74	10.189.353.115,06	44.983.352.792,00	233.649.776,30
	Total Mutasi Kurang	2.691.445.822,50	53.121.472.782,74	19.282.537.336,87	48.975.125.031,00	233.656.476,38
	Total Mutasi	8.242.273.043,50	195.268.996.967,26	219.143.225.592,16	248.613.740.734,51	99.438.177.333,86
	Saldo per 31 Des 2024	2.317.257.971.575,32	3.100.523.394.031,89	2.541.843.355.236,40	4.876.017.515.758,74	1.200.198.046.068,18

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

	Uraian	Jalan, Irigasi dan Jaringan	AKM PENYUSUTAN	Aset Tetap Lainnya	AKM PENYUSUTAN	Konstuksi dalam Pengerjaan
1	2	8	9	10	11	12
	Saldo Audited 2023	6.886.411.506.934,38	5.195.510.308.392,07	429.240.113.127,75	14.016.594.304,88	1.030.070.802.347,65
Mutasi Tambah						
	Belanja Modal tahun 2024	317.619.554.844,46		44.031.478.988,00		
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2024	435.460.392,00		239.868.019,00		
	Koreksi Nilai	7.502.587.466,00				
	Hibah	9.365.486.300,00	1.717.005.821,74	10.800.000,00		
	Mutasi antar SKPD					
	Reklas	59.214.646.922,50		362.174.389,00		9.110.838.650,00
	Beban Penyusutan		287.665.701.305,62		396.156.883,07	
	Total Mutasi Tambah	394.137.735.924,96	289.382.707.127,36	44.644.321.396,00	396.156.883,07	9.110.838.650,00
Mutasi Kurang						
	Barang Modal yang tidak dikapitalisir	523.648.942,00		109.187.050,00		
	Koreksi Nilai	34.995.000,00	3.499.500,20		0,40	25.000.000,00
	Penghapusan					
	Mutasi antar SKPD					
	Reklas	151.288.971.281,00		941.998.796,00		30.963.717.175,98
	Total Mutasi Kurang	151.847.615.223,00	3.499.500,20	1.051.185.846,00	0,40	30.988.717.175,98
	Total Mutasi	242.290.120.701,96	289.379.207.627,16	43.593.135.550,00	396.156.882,67	(21.877.878.525,98)
	Saldo per 31 Des 2024	7.128.701.627.636,34	5.484.889.516.019,23	472.833.248.677,75	14.412.751.187,55	1.008.192.923.821,67

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

	Uraian	Jumlah Aset Tetap	JUMLAH AKM PENYUSUTAN	Aset Tidak Berwujud	AKM AMORTISASI	Aset Tdk Bermanfaat
1	2	13=3+4+6+8+10+12	14=5+7+9+11	15	16	17
	Saldo Audited 2023	18.187.396.293.030,50	8.632.986.901.075,51	33.468.540.115,00	32.771.818.808,50	141.166.494.691,61
Mutasi Tambah						
	Belanja Modal tahun 2024	765.488.119.624,35	-	18.075.250,00		
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2024	13.091.965.511,14	-			
	Koreksi Nilai	50.116.093.961,48	2.655.106.568,26			0,01
	Hibah	56.897.426.579,00	23.560.793.997,54			
	Mutasi antar SKPD	8.691.906.824,00	8.005.086.824,20	109.615.000,00	109.615.000,00	
	Reklas	110.520.437.852,50	2.584.763.404,00	7.450.000,00		6.995.489.936,74
	Beban Penyusutan	-	591.070.709.955,70		363.085.674,50	
	Total Mutasi Tambah	1.004.805.950.352,47	627.876.460.749,70	135.140.250,00	472.700.674,50	6.995.489.936,75
Mutasi Kurang						
	Barang Modal yang tidak dikapitalisir	10.506.789.426,00	-			
	Koreksi Nilai	5.193.710.819,00	3.506.206,29			
	Penghapusan	4.520.456.414,50	1.088.097.392,00			17.747.732.913,27
	Mutasi antar SKPD	8.691.906.824,00	8.005.086.824,20	109.615.000,00	109.615.000,00	
	Reklas	259.762.698.397,72	10.423.002.891,36	44.500.000,00	44.500.000,00	2.584.763.404,00
			-			
	Total Mutasi Kurang	288.675.561.881,22	19.519.693.313,85	154.115.000,00	154.115.000,00	20.332.496.317,27
	Total Mutasi	716.130.388.471,25	608.356.767.435,85	(18.974.750,00)	318.585.674,50	(13.337.006.380,52)
	Saldo per 31 Des 2024	18.903.526.681.501,70	9.241.343.668.511,36	33.449.565.365,00	33.090.404.483,00	127.829.488.311,09

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

	Uraian	AKM PENYUSUTAN	Aset Dimanfaatkan Pihak Lain	AKM. PENYUSUTAN	Aset Dalam Penelusuran	AKM PENYUSUTAN
1	2	18	19	20	21	22
	Saldo Audited 2023	90.295.529.029,13	-	-	-	-
Mutasi Tambah						
	Belanja Modal tahun 2024					
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2024					
	Koreksi Nilai	0,01				
	Hibah					
	Mutasi antar SKPD					
	Reklas	5.761.314.796,64				
	Beban Penyusutan					
	Total Mutasi Tambah	5.761.314.796,65	-	-	-	-
Mutasi Kurang						
	Barang Modal yang tidak dikapitalisir					
	Koreksi Nilai	0,88				
	Penghapusan	14.980.455.117,55				
	Mutasi antar SKPD	-				
	Reklas	2.584.763.404,00				
	Total Mutasi Kurang	17.565.218.522,43	-	-	-	-
	Total Mutasi	(11.803.903.725,78)	-	-	-	-
	Saldo per 31 Des 2024	78.491.625.303,35	-	-	-	-

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA TANAH PROVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2024

Lampiran 37

No	ID Sotk	ID User	Nama OPD	Saldo Awal Nilai perolehan	Saldo Awal penyusutan	Mutasi Tambah					
						Penerimaan dari Cara Perolehan				Penerimaan Internal Pengguna	Penerimaan Internal Pengguna
						Modal	Jasa Dikapitalisir	Hibah	Hibah/Akm Penyusutan	Barang	Barang / Akm Penyusutan
1	3	U1010110000200000	DINAS PENDIDIKAN	548.638.994.445,34				122.400.001,00			
2	408	U1010210000000000	DINAS KESEHATAN	80.413.600.190,00							
3	434	U1010220000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	44.577.906.000,00							
4	447	U1010230000000000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	20.501.807.000,00							
5	457	U1010260000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR	3.976.702.319,68							
6	487	U1010270000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	12.218.767.700,00							
7	545	U1010330000000000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	466.503.802.488,06		758.054.000,00					
8	562	U1010340000000000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	31.572.095.068,00							
9	605	U1010410000000000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2.291.371.200,00		3.123.500,00					
10	642	U1010520000000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-							
11	659	U1010610000000000	DINAS SOSIAL	21.690.396.000,00							
12	691	U1020110000000000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	48.718.958.773,33							
13	735	U1020220000000000	DP3AP2KB	9.429.200.000,00							
14	758	U1020310000000000	DINAS PANGAN	16.800.000.000,00							
15	776	U1020510000000000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.687.407.000,00		1.703.196.169,00					
16	794	U1020710000000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.656.192.000,00							
17	840	U1020820000000000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.426.192.000,00							
18	861	U1020910000000000	DINAS PERHUBUNGAN	22.556.380.465,20							
19	911	U1021020000000000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.109.190.000,00							
20	932	U1021110000000000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECI DAN MENENGAH	14.663.138.000,00							
21	955	U1021210000000000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-							
22	981	U1021310000000000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	75.777.418.600,00							
23	1000	U1021610000000000	DINAS KEBUDAYAAN	69.681.500.000,00							
24	1020	U1021810000000000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	5.829.812.000,00							
25	1043	U2000110000000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	31.713.981.004,62							
26	1070	U2000210000000000	DINAS PARIWISATA	6.817.970.000,00							
27	1106	U2000320000000000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	20.875.278.000,00							
28	1125	U2000330000000000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	54.023.119.200,00						198.995.000,00	
29	1169	U2000410000000000	DINAS KEHUTANAN	34.561.986.216,00							
30	1196	U2000510000000000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.936.580.596,00							
31	1214	U2000710000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	30.982.193.714,72							
32	1238	U3000110000000000	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	1.097.970.000,00							
33	1252	U3000210000000000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.600.590.000,00							
34	1302	U3000320000000000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-							
35	1409	U3000330000000000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	35.891.625.775,90							
36	1516	U3000410000000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	3.036.000.000,00							
37	1539	U3000510000000000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	22.267.700.000,00							
38	1562	U3000610000000000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-							
39	1576	U3000710000000000	BADAN PENGHUBUNG	2.837.179.000,00				1,00			
40	1582	U4000100000000000	SEKRETARIAT DAERAH	47.967.908.774,97							
41	1621	U4000130000000000	BIRO HUKUM	-							
42	1635	U4000140000000000	BIRO PEREKONOMIAN	-							
43	1677	U4000170000000000	BIRO ORGANISASI	-							
44	1691	U4000180000000000	BIRO UMUM	370.972.587.000,00							
45	1719	U4000210000000000	SEKRETARIAT DPRD	27.630.920.000,00							
46	1732	U4001100000000000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-							
47	1746	U4001110000000000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	-							
48	1757	U4001120000000000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	95.003.478.000,00							
49	1771	U4001130000000000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	10.000.000,00							
50	1785	U4001140000000000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	-							
51	1799	U5000110000000000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.067.800.000,00							
52	1818	U5000120000000000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-							
Total				**2.309.015.698.531,82**		**2.464.373.669,00**	**-**	**122.400.002,00**		**198.995.000,00**	

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA TANAH PROVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2024

Lampiran 37

No	ID Sotk	ID User	Nama OPD	Koreksi	Koreksi / Akm penyusutan	Reklasifikasi	Reklasifikasi/ Akm Penyusutan	Beban Penyusutan	Total Mutasi Tambah Nilai Perolehan	Total Mutasi Tambah Akm Penyusutan	Penerimaan dari Cara Perolehan
1	3	U1010110000200000	DINAS PENDIDIKAN	5.500.547.998,00					5.622.947.999,00	-	
2	408	U1010210000000000	DINAS KESEHATAN						-	-	
3	434	U1010220000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI						-	-	
4	447	U1010230000000000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN						-	-	
5	457	U1010260000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR						-	-	
6	487	U1010270000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN						-	-	
7	545	U1010330000000000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG						758.054.000,00	-	
8	562	U1010340000000000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI						-	-	
9	605	U1010410000000000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN						3.123.500,00	-	3.123.500,00
10	642	U1010520000000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						-	-	
11	659	U1010610000000000	DINAS SOSIAL						-	-	
12	691	U1020110000000000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						-	-	
13	735	U1020220000000000	DP3AP2KB						-	-	
14	758	U1020310000000000	DINAS PANGAN						-	-	
15	776	U1020510000000000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP						1.703.196.169,00	-	
16	794	U1020710000000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						-	-	
17	840	U1020820000000000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						-	-	
18	861	U1020910000000000	DINAS PERHUBUNGAN						-	-	
19	911	U1021020000000000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK						-	-	
20	932	U1021110000000000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECI DAN MENENGAH						-	-	
21	955	U1021210000000000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						-	-	
22	981	U1021310000000000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA						-	-	
23	1000	U1021610000000000	DINAS KEBUDAYAAN						-	-	
24	1020	U1021810000000000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN						-	-	
25	1043	U2000110000000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						-	-	
26	1070	U2000210000000000	DINAS PARIWISATA						-	-	
27	1106	U2000320000000000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN						-	-	
28	1125	U2000330000000000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA						198.995.000,00	-	
29	1169	U2000410000000000	DINAS KEHUTANAN						-	-	
30	1196	U2000510000000000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						-	-	
31	1214	U2000710000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						-	-	
32	1238	U3000110000000000	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI						-	-	
33	1252	U3000210000000000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						-	-	
34	1302	U3000320000000000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						-	-	
35	1409	U3000330000000000	BADAN PENDAPATAN DAERAH						-	-	
36	1516	U3000410000000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						-	-	
37	1539	U3000510000000000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						-	-	
38	1562	U3000610000000000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						-	-	
39	1576	U3000710000000000	BADAN PENGHUBUNG	754.059.999,00					754.060.000,00	-	
40	1582	U4000100000000000	SEKRETARIAT DAERAH	1.694.347.198,00					1.694.347.198,00	-	
41	1621	U4000130000000000	BIRO HUKUM						-	-	
42	1635	U4000140000000000	BIRO PEREKONOMIAN						-	-	
43	1677	U4000170000000000	BIRO ORGANISASI						-	-	
44	1691	U4000180000000000	BIRO UMUM						-	-	
45	1719	U4000210000000000	SEKRETARIAT DPRD						-	-	
46	1732	U4001100000000000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						-	-	
47	1746	U4001110000000000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN						-	-	
48	1757	U4001120000000000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT						-	-	
49	1771	U4001130000000000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						-	-	
50	1785	U4001140000000000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA						-	-	
51	1799	U5000110000000000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						-	-	
52	1818	U5000120000000000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			198.995.000,00			198.995.000,00	-	
Total				**7.948.955.195,00**		**198.995.000,00**	**-**	**-**	**10.933.718.866,00**	**-**	**3.123.500,00**

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA TANAH PROVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2024

Lampiran 37

No	ID Sotk	ID User	Nama OPD	Mutasi Kurang								Total Mutasi Kurang Nilai Perolehan
				Pengeluaran Internal Pengguna Barang	Pengeluaran Internal Pengguna Barang / Akm	Koreksi	Koreksi/ Akm Penyusutan	Reklasifikasi	Reklasifikasi /Akm Penyusutan	Penghapusan	Penghapusan / Akm Penyusutan	
1	3	U1010110000200000	DINAS PENDIDIKAN									-
2	408	U1010210000000000	DINAS KESEHATAN									-
3	434	U1010220000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI									-
4	447	U1010230000000000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN									-
5	457	U1010260000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR									-
6	487	U1010270000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN									-
7	545	U1010330000000000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG									-
8	562	U1010340000000000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI									-
9	605	U1010410000000000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN									3.123.500,00
10	642	U1010520000000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									-
11	659	U1010610000000000	DINAS SOSIAL									-
12	691	U1020110000000000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI									-
13	735	U1020220000000000	DP3AP2KB									-
14	758	U1020310000000000	DINAS PANGAN									-
15	776	U1020510000000000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP									-
16	794	U1020710000000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									-
17	840	U1020820000000000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									-
18	861	U1020910000000000	DINAS PERHUBUNGAN									-
19	911	U1021020000000000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK									-
20	932	U1021110000000000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECI DAN MENENGAH									-
21	955	U1021210000000000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									-
22	981	U1021310000000000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA									-
23	1000	U1021610000000000	DINAS KEBUDAYAAN									-
24	1020	U1021810000000000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN									-
25	1043	U2000110000000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN									-
26	1070	U2000210000000000	DINAS PARIWISATA									-
27	1106	U2000320000000000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN									-
28	1125	U2000330000000000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA							1.558.077.322,50		1.558.077.322,50
29	1169	U2000410000000000	DINAS KEHUTANAN									-
30	1196	U2000510000000000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									-
31	1214	U2000710000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN									-
32	1238	U3000110000000000	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI									-
33	1252	U3000210000000000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									-
34	1302	U3000320000000000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									-
35	1409	U3000330000000000	BADAN PENDAPATAN DAERAH									-
36	1516	U3000410000000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									-
37	1539	U3000510000000000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									-
38	1562	U3000610000000000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									-
39	1576	U3000710000000000	BADAN PENGHUBUNG									-
40	1582	U4000100000000000	SEKRETARIAT DAERAH							931.250.000,00		931.250.000,00
41	1621	U4000130000000000	BIRO HUKUM									-
42	1635	U4000140000000000	BIRO PEREKONOMIAN									-
43	1677	U4000170000000000	BIRO ORGANISASI									-
44	1691	U4000180000000000	BIRO UMUM									-
45	1719	U4000210000000000	SEKRETARIAT DPRD									-
46	1732	U4001100000000000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									-
47	1746	U4001110000000000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN									-
48	1757	U4001120000000000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT									-
49	1771	U4001130000000000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH									-
50	1785	U4001140000000000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA									-
51	1799	U5000110000000000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									-
52	1818	U5000120000000000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	198.995.000,00								198.995.000,00
Total				**198.995.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.489.327.322,50**	**-**	**2.691.445.822,50**

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA TANAH PROVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2024

Lampiran 37

No	ID Sotk	ID User	Nama OPD	Total Mutasi Kurang Akm Penyusutan	Total Mutasi Nilai Perolehan	Total Mutasi Akm Penyusutan	Saldo Akhir Nilai Perolehan	Saldo Akhir Akm Penyusutan
1	3	U10101100002000000	DINAS PENDIDIKAN	-	5.622.947.999,00	-	554.261.942.444,34	-
2	408	U10102100000000000	DINAS KESEHATAN	-	-	-	80.413.600.190,00	-
3	434	U10102200000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	-	-	-	44.577.906.000,00	-
4	447	U10102300000000000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	-	-	-	20.501.807.000,00	-
5	457	U10102600000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR	-	-	-	3.976.702.319,68	-
6	487	U10102700000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	-	-	-	12.218.767.700,00	-
7	545	U10103300000000000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	-	758.054.000,00	-	467.261.856.488,06	-
8	562	U10103400000000000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	-	-	-	31.572.095.068,00	-
9	605	U10104100000000000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	-	-	2.291.371.200,00	-
10	642	U10105200000000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-
11	659	U10106100000000000	DINAS SOSIAL	-	-	-	21.690.396.000,00	-
12	691	U10201100000000000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	48.718.958.773,33	-
13	735	U10202200000000000	DP3AP2KB	-	-	-	9.429.200.000,00	-
14	758	U10203100000000000	DINAS PANGAN	-	-	-	16.800.000.000,00	-
15	776	U10205100000000000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	1.703.196.169,00	-	8.390.603.169,00	-
16	794	U10207100000000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	1.656.192.000,00	-
17	840	U10208200000000000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	4.426.192.000,00	-
18	861	U10209100000000000	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	22.556.380.465,20	-
19	911	U10210200000000000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	-	-	2.109.190.000,00	-
20	932	U10211100000000000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECI DAN MENENGAH	-	-	-	14.663.138.000,00	-
21	955	U10212100000000000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-	-
22	981	U10213100000000000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	-	-	75.777.418.600,00	-
23	1000	U10216100000000000	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	69.681.500.000,00	-
24	1020	U10218100000000000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	5.829.812.000,00	-
25	1043	U20001100000000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	31.713.981.004,62	-
26	1070	U20002100000000000	DINAS PARIWISATA	-	-	-	6.817.970.000,00	-
27	1106	U20003200000000000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-	-	20.875.278.000,00	-
28	1125	U20003300000000000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	-	(1.359.082.322,50)	-	52.664.036.877,50	-
29	1169	U20004100000000000	DINAS KEHUTANAN	-	-	-	34.561.986.216,00	-
30	1196	U20005100000000000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	2.936.580.596,00	-
31	1214	U20007100000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	30.982.193.714,72	-
32	1238	U30001100000000000	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	-	-	-	1.097.970.000,00	-
33	1252	U30002100000000000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	5.600.590.000,00	-
34	1302	U30003200000000000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-	-
35	1409	U30003300000000000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	35.891.625.775,90	-
36	1516	U30004100000000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	3.036.000.000,00	-
37	1539	U30005100000000000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	22.267.700.000,00	-
38	1562	U30006100000000000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	-	-
39	1576	U30007100000000000	BADAN PENGHUBUNG	-	754.060.000,00	-	3.591.239.000,00	-
40	1582	U40001000000000000	SEKRETARIAT DAERAH	-	763.097.198,00	-	48.731.005.972,97	-
41	1621	U40001300000000000	BIRO HUKUM	-	-	-	-	-
42	1635	U40001400000000000	BIRO PEREKONOMIAN	-	-	-	-	-
43	1677	U40001700000000000	BIRO ORGANISASI	-	-	-	-	-
44	1691	U40001800000000000	BIRO UMUM	-	-	-	370.972.587.000,00	-
45	1719	U40002100000000000	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	27.630.920.000,00	-
46	1732	U40011000000000000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	-	-	-	-
47	1746	U40011100000000000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	-	-	-	-	-
48	1757	U40011200000000000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	95.003.478.000,00	-
49	1771	U40011300000000000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	-	-	-	10.000.000,00	-
50	1785	U40011400000000000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	-	-	-	-
51	1799	U50001100000000000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	4.067.800.000,00	-
52	1818	U50001200000000000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-
Total				**-**	**8.242.273.043,50**	**-**	**2.317.257.971.575,32**	**-**

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYAPERALATAN DAN MESINPROVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2024

Lampiran 38

No	ID Sotk	ID User	Nama OPD	Saldo Awal Nilai perolehan	Saldo Awal penyusutan	Mutasi Tambah					
						Penerimaan dari Cara Perolehan				Penerimaan Internal Pengguna Barang	Penerimaan Internal Pengguna Barang / Akm Penyusutan
						Modal	Jasa Dikapitalisir	Hibah	Hibah/Akm Penyusutan		
1	3	U10101100002000000	DINAS PENDIDIKAN	1.118.454.048.903,22	880.748.222.191,45	99.093.872.050,00	627.088.730,00	4.124.622.688,00	258.895.246,27	5.717.641.824,00	5.717.641.824,00
2	408	U1010210000000000	DINAS KESEHATAN	105.964.248.095,11	84.266.453.151,77	3.220.525.184,00	2.664.000,00				
3	434	U1010220000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	356.778.857.658,59	236.582.992.747,95	24.308.369.104,00					
4	447	U1010230000000000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	32.703.689.057,36	29.485.343.686,96	1.808.604.879,00					
5	457	U1010260000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR	232.089.431.003,04	194.265.118.609,62	6.993.981.717,00	13.500.000,00	556.283.500,00			
6	487	U1010270000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	141.431.688.138,00	130.515.969.008,28	6.010.876.102,00					
7	545	U1010330000000000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	92.880.531.015,51	79.852.262.355,30	3.288.532.376,00					
8	562	U1010340000000000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	27.302.644.187,99	20.843.212.187,19	369.375.495,00					
9	605	U1010410000000000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	4.938.659.663,00	4.504.007.267,12	65.856.000,00					
10	642	U1010520000000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.055.485.495,00	4.765.652.117,16	118.650.000,00	11.200.000,00				
11	659	U1010610000000000	DINAS SOSIAL	22.549.563.301,81	17.608.527.395,81	836.825.164,00	70.700.000,00				
12	691	U1020110000000000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	17.234.540.859,71	16.895.168.593,15	114.267.700,00		13.673.639.489,00	13.673.639.489,00		
13	735	U1020220000000000	DP3AP2KB	4.705.680.700,00	3.992.204.353,28	440.956.000,00					
14	758	U1020310000000000	DINAS PANGAN	22.387.133.633,99	14.975.296.557,36	53.710.000,00		230.750.000,00	179.843.750,00		
15	776	U1020510000000000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	41.429.457.380,00	38.345.891.286,16	735.521.040,00					
16	794	U1020710000000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.121.574.521,00	4.828.754.493,88	8.435.000,00					
17	840	U1020820000000000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.455.084.294,00	5.262.694.251,08	19.396.250,00					
18	861	U1020910000000000	DINAS PERHUBUNGAN	10.973.583.986,98	9.867.875.332,26	19.018.000,00					
19	911	U1021020000000000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	32.136.811.778,87	21.868.678.191,39	1.037.459.196,00					
20	932	U1021110000000000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECI DAN MENENGAH	10.473.899.305,00	8.736.882.690,72	314.423.000,00					
21	955	U1021210000000000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.339.382.952,99	5.019.026.585,51	111.094.980,00					
22	981	U1021310000000000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	8.847.350.187,96	8.064.199.357,92	35.432.000,00					
23	1000	U1021610000000000	DINAS KEBUDAYAAN	16.255.045.271,00	12.218.743.821,64	15.015.000,00				25.114.000,00	25.114.000,00
24	1020	U1021810000000000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	15.377.237.029,62	14.485.980.548,18	40.650.000,00					
25	1043	U2000110000000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	58.583.509.819,72	45.615.907.499,43	603.943.800,00					
26	1070	U2000210000000000	DINAS PARIWISATA	9.491.435.062,01	7.892.146.999,13	30.397.000,00					
27	1106	U2000320000000000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	31.704.622.321,00	26.754.360.202,08	1.316.671.406,00		1.365.635.000,00	1.365.635.000,00		
28	1125	U2000330000000000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	45.536.816.290,44	36.024.684.841,32	75.338.539,00		2.674.433.200,00	2.010.949.898,20		
29	1169	U2000410000000000	DINAS KEHUTANAN	48.295.602.425,41	43.878.949.706,49	254.500.000,00					
30	1196	U2000510000000000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	9.394.599.427,16	8.518.293.936,93	170.435.200,00					
31	1214	U2000710000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	20.955.675.853,00	19.045.081.321,76	392.045.110,00					
32	1238	U3000110000000000	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	6.485.457.597,00	5.657.643.500,28	609.471.125,00					
33	1252	U3000210000000000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	18.726.692.065,00	16.973.273.150,68	77.796.000,00					
34	1302	U3000320000000000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.992.495.575,23	4.948.813.168,67	971.339.800,00					
35	1409	U3000330000000000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	40.092.435.905,86	35.518.518.931,38	1.927.025.400,00					
36	1516	U3000410000000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	8.913.390.410,98	7.858.142.880,34	32.200.000,00					
37	1539	U3000510000000000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11.866.396.242,18	10.983.114.897,62	1.798.990.000,00					
38	1562	U3000610000000000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.453.400.992,00	2.931.860.599,00	78.550.000,00					
39	1576	U3000710000000000	BADAN PENGHUBUNG	10.692.721.517,53	9.270.724.653,36	73.000.000,00				635.765.000,00	635.765.000,00
40	1582	U4000100000000000	SEKRETARIAT DAERAH	5.050.315.992,00	5.050.315.992,00	-		4.141.673.000,00	4.141.673.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
41	1621	U4000130000000000	BIRO HUKUM	1.854.929.284,00	1.434.418.716,92	95.355.000,00					
42	1635	U4000140000000000	BIRO PEREKONOMIAN	1.537.011.227,97	1.226.282.978,37	95.130.000,00				142.750.000,00	142.750.000,00
43	1677	U4000170000000000	BIRO ORGANISASI	2.085.046.267,09	1.656.684.757,21	401.821.000,00					
44	1691	U4000180000000000	BIRO UMUM	72.709.545.353,05	57.276.038.233,80	15.491.721.013,00	102.396.150,00			760.200.000,00	741.800.000,08
45	1719	U4000210000000000	SEKRETARIAT DPRD	70.276.530.122,00	49.104.623.760,28	13.764.010.880,00	26.440.000,00				
46	1732	U4001100000000000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.790.213.706,00	2.585.471.282,24	124.200.000,00					
47	1746	U4001110000000000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	6.063.200.167,00	4.844.746.534,96	202.625.000,00				406.400.000,00	101.599.999,92
48	1757	U4001120000000000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.827.917.436,33	3.644.144.936,09	205.250.000,00				483.691.000,00	319.066.000,20
49	1771	U4001130000000000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.394.951.964,00	1.826.112.274,16	146.950.000,00					
50	1785	U4001140000000000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	3.325.056.835,00	2.616.872.816,20	176.149.635,00					
51	1799	U5000110000000000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.063.300.020,00	2.742.894.658,88	202.550.000,00				295.350.000,00	295.350.000,00
52	1818	U5000120000000000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	63.205.498.765,92	58.820.849.633,52	768.125.400,00					
Total				**2.905.254.397.064,63**	**2.322.700.129.644,24**	**189.146.437.545,00**	**853.988.880,00**	**26.767.036.877,00**	**21.630.636.383,47**	**8.492.911.824,00**	**8.005.086.824,20**

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYAPERALATAN DAN MESINPROVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2024

Lampiran 38

No	ID Sotk	ID User	Nama OPD	Koreksi	Koreksi / Akm penyusutan	Reklasifikasi	Reklasifikasi/ Akm Penyusutan	Beban Penyusutan	Total Mutasi Tambah Nilai Perolehan	Total Mutasi Tambah Akm Penyusutan	Penerimaan dari Cara Perolehan
1	3	U10101100002000000	DINAS PENDIDIKAN	15.417.929.285,00		1.583.873.094,00		77.227.225.725,53	126.565.027.671,00	5.976.537.070,27	8.570.039.294,00
2	408	U10102100000000000	DINAS KESEHATAN	31.221.180,00	5,20			8.211.331.005,83	3.254.410.364,00	5,20	83.660.000,00
3	434	U10102200000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	1.887.000,00				39.597.138.380,23	24.310.256.104,00	-	8.877.000,00
4	447	U10102300000000000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN					1.336.100.217,08	1.808.604.879,00	-	
5	457	U10102600000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR	132.065.252,00				17.788.592.533,27	7.695.830.469,00	-	159.662.000,00
6	487	U10102700000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	173.879.085,00				5.471.709.983,67	6.184.755.187,00	-	16.270.390,00
7	545	U10103300000000000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	104.995.000,00	16.999.000,00			4.365.188.793,06	3.393.527.376,00	16.999.000,00	
8	562	U10103400000000000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI					1.946.228.148,49	369.375.495,00	-	
9	605	U10104100000000000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN					195.415.751,48	65.856.000,00	-	
10	642	U10105200000000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		0,88			181.226.341,23	129.850.000,00	0,88	
11	659	U10106100000000000	DINAS SOSIAL		0,92	9.803.797,00		1.429.596.077,27	917.328.961,00	0,92	
12	691	U10201100000000000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					218.624.623,08	13.787.907.189,00	13.673.639.489,00	
13	735	U10202200000000000	DP3AP2KB					376.307.350,96	440.956.000,00	-	
14	758	U10203100000000000	DINAS PANGAN		2,75			2.382.709.821,19	284.460.000,00	179.843.752,75	
15	776	U10205100000000000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	28.400.000,00				1.640.628.059,08	763.921.040,00	-	
16	794	U10207100000000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					118.059.210,72	8.435.000,00	-	
17	840	U10208200000000000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		0,76			608.980.810,26	19.396.250,00	0,76	
18	861	U10209100000000000	DINAS PERHUBUNGAN					429.259.605,37	19.018.000,00	-	
19	911	U10210200000000000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	317.200.000,00	4,50			3.705.320.728,36	1.354.659.196,00	4,50	
20	932	U10211100000000000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECI DAN MENENGAH			228.000.000,00	228.000.000,00	545.959.168,82	542.423.000,00	228.000.000,00	
21	955	U10212100000000000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					193.851.715,03	111.094.980,00	-	
22	981	U10213100000000000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA					315.047.896,85	35.432.000,00	-	
23	1000	U10216100000000000	DINAS KEBUDAYAAN					1.460.508.255,42	40.129.000,00	25.114.000,00	
24	1020	U10218100000000000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					416.752.056,08	40.650.000,00	-	
25	1043	U20001100000000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			1.864.146.824,00	1.864.146.824,00	2.759.383.384,64	2.468.090.624,00	1.864.146.824,00	
26	1070	U20002100000000000	DINAS PARIWISATA					646.631.685,34	30.397.000,00	-	
27	1106	U20003200000000000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN					1.853.372.810,39	2.682.306.406,00	1.365.635.000,00	
28	1125	U20003300000000000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA					3.602.460.120,31	2.749.771.739,00	2.010.949.898,20	
29	1169	U20004100000000000	DINAS KEHUTANAN					2.122.871.107,42	254.500.000,00	-	
30	1196	U20005100000000000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					370.213.190,06	170.435.200,00	-	
31	1214	U20007100000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					591.707.831,49	392.045.110,00	-	
32	1238	U30001100000000000	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI					521.922.993,46	609.471.125,00	-	39.812.500,00
33	1252	U30002100000000000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					616.029.407,84	77.796.000,00	-	
34	1302	U30003200000000000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					618.908.075,93	971.339.800,00	-	
35	1409	U30003300000000000	BADAN PENDAPATAN DAERAH		1.200.000,00			2.222.555.306,33	1.927.025.400,00	1.200.000,00	
36	1516	U30004100000000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH					375.152.317,44	32.200.000,00	-	
37	1539	U30005100000000000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					444.559.770,08	1.798.990.000,00	-	
38	1562	U30006100000000000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					233.891.228,79	78.550.000,00	-	
39	1576	U30007100000000000	BADAN PENGHUBUNG	156.920.000,00	156.920.000,00			519.060.200,27	865.685.000,00	792.685.000,00	
40	1582	U40001000000000000	SEKRETARIAT DAERAH	1.487.943.527,00	1.375.807.425,30			22.427.220,30	5.655.616.527,00	5.543.480.425,30	
41	1621	U40001300000000000	BIRO HUKUM					184.884.516,96	95.355.000,00	-	
42	1635	U40001400000000000	BIRO PEREKONOMIAN					128.537.908,47	237.880.000,00	142.750.000,00	980.000,00
43	1677	U40001700000000000	BIRO ORGANISASI					196.448.102,64	401.821.000,00	-	
44	1691	U40001800000000000	BIRO UMUM					5.927.963.191,34	16.354.317.163,00	741.800.000,08	
45	1719	U40002100000000000	SEKRETARIAT DPRD		0,76			6.586.245.478,11	13.790.450.880,00	0,76	
46	1732	U40011000000000000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					117.128.083,44	124.200.000,00	-	
47	1746	U40011100000000000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN		0,36			521.039.904,74	609.025.000,00	101.600.000,28	1.900.000,00
48	1757	U40011200000000000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT					133.019.999,64	688.941.000,00	319.066.000,20	
49	1771	U40011300000000000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					197.752.938,51	146.950.000,00	-	
50	1785	U40011400000000000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			492.616.580,00	492.616.580,00	333.132.749,87	668.766.215,00	492.616.580,00	
51	1799	U50001100000000000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					194.821.481,28	497.900.000,00	295.350.000,00	
52	1818	U50001200000000000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.099.214.000,00	1.099.214.000,00			1.351.252.612,48	1.867.339.400,00	1.099.214.000,00	
Total				**18.951.654.329,00**	**2.650.140.441,43**	**4.178.440.295,00**	**2.584.763.404,00**	**203.555.135.875,93**	**248.390.469.750,00**	**34.870.627.053,10**	**8.881.201.184,00**

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYAPERALATAN DAN MESINPROVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2024

Lampiran 38

No	ID Sotk	ID User	Nama OPD	Mutasi Kurang								Total Mutasi Kurang Nilai Perolehan
				Pengeluaran Internal Pengguna Barang	Pengeluaran Internal Pengguna Barang / Akm Penyusutan	Koreksi	Koreksi/ Akm Penyusutan	Reklasifikasi	Reklasifikasi /Akm Penyusutan	Penghapusan	Penghapusan / Akm Penyusutan	
1	3	U1010110000200000	DINAS PENDIDIKAN			57.800.000,00	0,84	13.814.354.597,00	713.312.626,00			22.442.193.891,00
2	408	U1010210000000000	DINAS KESEHATAN			16.500.000,00		209.940.000,00		1.571.719.500,00	628.687.800,00	1.881.819.500,00
3	434	U1010220000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI			107.361.420,00	-	1.168.524.840,00				1.284.763.260,00
4	447	U1010230000000000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN									-
5	457	U1010260000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR	118.400.000,00	118.400.000,00	802.436.810,00		5.291.644.489,00	4.694.394.986,20			6.372.143.299,00
6	487	U1010270000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN			1.147.474.100,00						1.163.744.490,00
7	545	U1010330000000000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	406.400.000,00	101.599.999,92		1,01					406.400.000,00
8	562	U1010340000000000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI				2,44					-
9	605	U1010410000000000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN									-
10	642	U1010520000000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									-
11	659	U1010610000000000	DINAS SOSIAL					1.544.101.623,91	1.477.771.623,91			1.544.101.623,91
12	691	U1020110000000000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					11.793.100,00	11.793.100,00			11.793.100,00
13	735	U1020220000000000	DP3AP2KB					425.807.500,00	421.707.499,68			425.807.500,00
14	758	U1020310000000000	DINAS PANGAN	439.000.000,00	274.375.000,20		-					439.000.000,00
15	776	U1020510000000000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					228.794.100,00	228.794.100,00			228.794.100,00
16	794	U1020710000000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									-
17	840	U1020820000000000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									-
18	861	U1020910000000000	DINAS PERHUBUNGAN					588.195.438,99	588.195.438,99			588.195.438,99
19	911	U1021020000000000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK					457.812.370,00	450.152.370,00			457.812.370,00
20	932	U1021110000000000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECI DAN MENENGAH	228.000.000,00	228.000.000,00							228.000.000,00
21	955	U1021210000000000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					167.093.859,00	167.093.859,00			167.093.859,00
22	981	U1021310000000000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA					471.687.245,00	468.846.964,92			471.687.245,00
23	1000	U1021610000000000	DINAS KEBUDAYAAN									-
24	1020	U1021810000000000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN									-
25	1043	U2000110000000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.614.146.824,00	4.614.146.824,00			4.500.000,00	2,20			4.618.646.824,00
26	1070	U2000210000000000	DINAS PARIWISATA									-
27	1106	U2000320000000000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN					44.969.652,00				44.969.652,00
28	1125	U2000330000000000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA					9.784.000,00	6,32			9.784.000,00
29	1169	U2000410000000000	DINAS KEHUTANAN				1,32					-
30	1196	U2000510000000000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									-
31	1214	U2000710000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					31.530.000,00				31.530.000,00
32	1238	U3000110000000000	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI					625.207.500,00	624.357.500,00	6.495.000,00	6.495.000,00	671.515.000,00
33	1252	U3000210000000000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	199.985.000,00	199.985.000,00			600.000,00				200.585.000,00
34	1302	U3000320000000000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									-
35	1409	U3000330000000000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	36.800.000,00	18.400.000,08			342.933.037,84	342.933.037,84			379.733.037,84
36	1516	U3000410000000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									-
37	1539	U3000510000000000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					156.070.000,00				156.070.000,00
38	1562	U3000610000000000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					31.670.000,00				31.670.000,00
39	1576	U3000710000000000	BADAN PENGHUBUNG	477.900.000,00	477.900.000,00							477.900.000,00
40	1582	U4000100000000000	SEKRETARIAT DAERAH	540.850.000,00	540.850.000,00					412.790.250,00	412.790.250,00	953.640.250,00
41	1621	U4000130000000000	BIRO HUKUM									-
42	1635	U4000140000000000	BIRO PEREKONOMIAN									980.000,00
43	1677	U4000170000000000	BIRO ORGANISASI					14.560.000,00				14.560.000,00
44	1691	U4000180000000000	BIRO UMUM	1.431.430.000,00	1.431.430.000,00							1.431.430.000,00
45	1719	U4000210000000000	SEKRETARIAT DPRD					5.943.085.000,00		40.124.342,00	40.124.342,00	5.983.209.342,00
46	1732	U4001100000000000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									-
47	1746	U4001110000000000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN									1.900.000,00
48	1757	U4001120000000000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT									-
49	1771	U4001130000000000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH									-
50	1785	U4001140000000000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA									-
51	1799	U5000110000000000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									-
52	1818	U5000120000000000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									-
Total				**8.492.911.824,00**	**8.005.086.824,20**	**2.131.572.330,00**	**5,61**	**31.584.658.352,74**	**10.189.353.115,06**	**2.031.129.092,00**	**1.088.097.392,00**	**53.121.472.782,74**

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYAPERALATAN DAN MESINPROVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2024

No	ID Sotk	ID User	Nama OPD	Total Mutasi Kurang Akm Penyusutan	Total Mutasi Nilai Perolehan	Total Mutasi Akm Penyusutan	Saldo Akhir Nilai Perolehan	Saldo Akhir Akm Penyusutan
1	3	U1010110000200000	DINAS PENDIDIKAN	713.312.626,84	104.122.833.780,00	5.263.224.443,43	1.222.576.882.683,22	963.238.672.360,41
2	408	U1010210000000000	DINAS KESEHATAN	628.687.800,00	1.372.590.864,00	(628.687.794,80)	107.336.838.959,11	91.849.096.362,80
3	434	U1010220000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	-	23.025.492.844,00	-	379.804.350.502,59	276.180.131.128,18
4	447	U1010230000000000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	-	1.808.604.879,00	-	34.512.293.936,36	30.821.443.904,04
5	457	U1010260000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR	4.812.794.986,20	1.323.687.170,00	(4.812.794.986,20)	233.413.118.173,04	207.240.916.156,69
6	487	U1010270000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	-	5.021.010.697,00	-	146.452.698.835,00	135.987.678.991,95
7	545	U1010330000000000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	101.600.000,93	2.987.127.376,00	(84.601.000,93)	95.867.658.391,51	84.132.850.147,43
8	562	U1010340000000000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	2,44	369.375.495,00	(2,44)	27.672.019.682,99	22.789.440.333,24
9	605	U1010410000000000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	65.856.000,00	-	5.004.515.663,00	4.699.423.018,60
10	642	U1010520000000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	129.850.000,00	0,88	5.185.335.495,00	4.946.878.459,27
11	659	U1010610000000000	DINAS SOSIAL	1.477.771.623,91	(626.772.662,91)	(1.477.771.622,99)	21.922.790.638,90	17.560.351.850,09
12	691	U1020110000000000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	11.793.100,00	13.776.114.089,00	13.661.846.389,00	31.010.654.948,71	30.775.639.605,23
13	735	U1020220000000000	DP3AP2KB	421.707.499,68	15.148.500,00	(421.707.499,68)	4.720.829.200,00	3.946.804.204,56
14	758	U1020310000000000	DINAS PANGAN	274.375.000,20	(154.540.000,00)	(94.531.247,45)	22.232.593.633,99	17.263.475.131,10
15	776	U1020510000000000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	228.794.100,00	535.126.940,00	(228.794.100,00)	41.964.584.320,00	39.757.725.245,24
16	794	U1020710000000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	8.435.000,00	-	5.130.009.521,00	4.946.813.704,60
17	840	U1020820000000000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	19.396.250,00	0,76	6.474.480.544,00	5.871.675.062,10
18	861	U1020910000000000	DINAS PERHUBUNGAN	588.195.438,99	(569.177.438,99)	(588.195.438,99)	10.404.406.547,99	9.708.939.498,64
19	911	U1021020000000000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	450.152.370,00	896.846.826,00	(450.152.365,50)	33.033.658.604,87	25.123.846.554,25
20	932	U1021110000000000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECI DAN MENENGAH	228.000.000,00	314.423.000,00	-	10.788.322.305,00	9.282.841.859,54
21	955	U1021210000000000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	167.093.859,00	(55.998.879,00)	(167.093.859,00)	5.283.384.073,99	5.045.784.441,54
22	981	U1021310000000000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	468.846.964,92	(436.255.245,00)	(468.846.964,92)	8.411.094.942,96	7.910.400.289,85
23	1000	U1021610000000000	DINAS KEBUDAYAAN	-	40.129.000,00	25.114.000,00	16.295.174.271,00	13.704.366.077,06
24	1020	U1021810000000000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	40.650.000,00	-	15.417.887.029,62	14.902.732.604,26
25	1043	U2000110000000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.614.146.826,20	(2.150.556.200,00)	(2.750.000.002,20)	56.432.953.619,72	45.625.290.881,87
26	1070	U2000210000000000	DINAS PARIWISATA	-	30.397.000,00	-	9.521.832.062,01	8.538.778.684,47
27	1106	U2000320000000000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	2.637.336.754,00	1.365.635.000,00	34.341.959.075,00	29.973.368.012,47
28	1125	U2000330000000000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	6,32	2.739.987.739,00	2.010.949.891,88	48.276.804.029,44	41.638.094.853,51
29	1169	U2000410000000000	DINAS KEHUTANAN	1,32	254.500.000,00	(1,32)	48.550.102.425,41	46.001.820.812,59
30	1196	U2000510000000000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	170.435.200,00	-	9.565.034.627,16	8.888.507.126,99
31	1214	U2000710000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	360.515.110,00	-	21.316.190.963,00	19.636.789.153,25
32	1238	U3000110000000000	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	630.852.500,00	(62.043.875,00)	(630.852.500,00)	6.423.413.722,00	5.548.713.993,74
33	1252	U3000210000000000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	199.985.000,00	(122.789.000,00)	(199.985.000,00)	18.603.903.065,00	17.389.317.558,52
34	1302	U3000320000000000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	971.339.800,00	-	6.963.835.375,23	5.567.721.244,60
35	1409	U3000330000000000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	361.333.037,92	1.547.292.362,16	(360.133.037,92)	41.639.728.268,02	37.380.941.199,79
36	1516	U3000410000000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	32.200.000,00	-	8.945.590.410,98	8.233.295.197,78
37	1539	U3000510000000000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	1.642.920.000,00	-	13.509.316.242,18	11.427.674.667,70
38	1562	U3000610000000000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	46.880.000,00	-	3.500.280.992,00	3.165.751.827,79
39	1576	U3000710000000000	BADAN PENGHUBUNG	477.900.000,00	387.785.000,00	314.785.000,00	11.080.506.517,53	10.104.569.853,63
40	1582	U4000100000000000	SEKRETARIAT DAERAH	953.640.250,00	4.701.976.277,00	4.589.840.175,30	9.752.292.269,00	9.662.583.387,60
41	1621	U4000130000000000	BIRO HUKUM	-	95.355.000,00	-	1.950.284.284,00	1.619.303.233,88
42	1635	U4000140000000000	BIRO PEREKONOMIAN	-	236.900.000,00	142.750.000,00	1.773.911.227,97	1.497.570.886,84
43	1677	U4000170000000000	BIRO ORGANISASI	-	387.261.000,00	-	2.472.307.267,09	1.853.132.859,85
44	1691	U4000180000000000	BIRO UMUM	1.431.430.000,00	14.922.887.163,00	(689.629.999,92)	87.632.432.516,05	62.514.371.425,22
45	1719	U4000210000000000	SEKRETARIAT DPRD	40.124.342,00	7.807.241.538,00	(40.124.341,24)	78.083.771.660,00	55.650.744.897,15
46	1732	U4001100000000000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	124.200.000,00	-	2.914.413.706,00	2.702.599.365,68
47	1746	U4001110000000000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	-	607.125.000,00	101.600.000,28	6.670.325.167,00	5.467.386.439,98
48	1757	U4001120000000000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	688.941.000,00	319.066.000,20	4.516.858.436,33	4.096.230.935,93
49	1771	U4001130000000000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	-	146.950.000,00	-	2.541.901.964,00	2.023.865.212,67
50	1785	U4001140000000000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	668.766.215,00	492.616.580,00	3.993.823.050,00	3.442.622.146,07
51	1799	U5000110000000000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	497.900.000,00	295.350.000,00	3.561.200.020,00	3.233.066.140,16
52	1818	U5000120000000000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	1.867.339.400,00	1.099.214.000,00	65.072.838.165,92	61.271.316.246,00
Total				**19.282.537.336,87**	**195.268.996.967,26**	**15.588.089.716,23**	**3.100.523.394.031,89**	**2.541.843.355.236,40**

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYAGEDUNG DAN BANGUNANPROVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2024

Lampiran 39

No	ID Sotk	ID User	Nama OPD	Saldo Awal Nilai perolehan	Saldo Awal penyusutan	Mutasi Tambah					
						Penerimaan dari Cara Perolehan				Penerimaan Internal Pengguna Barang	Penerimaan Internal Pengguna Barang / Akm Penyusutan
						Modal	Jasa Dikapitalisir	Hibah	Hibah/Akm Penyusutan		
1	3	U1010110000200000	DINAS PENDIDIKAN	2.391.132.539.096,66	589.777.729.898,31	134.567.124.579,00	24.420.000,00	17.631.703.400,00	213.151.792,33		
2	408	U1010210000000000	DINAS KESEHATAN	75.200.915.878,46	13.621.284.688,33		178.501.164,00				
3	434	U1010220000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	166.757.783.535,99	45.906.825.027,54	5.157.558.458,00	58.481.918,00				
4	447	U1010230000000000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	70.984.727.759,00	20.155.015.364,47	387.473.437,00					
5	457	U1010260000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR	113.580.903.477,97	26.849.343.229,88	5.534.303.586,00		3.000.000.000,00			
6	487	U1010270000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	57.533.189.586,43	12.488.749.756,66	2.235.255.320,00					
7	545	U1010330000000000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	148.848.580.562,00	25.390.849.852,58	22.165.802.103,00					
8	562	U1010340000000000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	14.901.953.246,31	5.026.958.969,81	289.614.430,00	896.083.221,00				
9	605	U1010410000000000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	6.976.988.000,00	2.651.255.439,38	2.818.770.800,00	73.550.000,00				
10	642	U1010520000000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-							
11	659	U1010610000000000	DINAS SOSIAL	53.884.009.078,33	23.006.928.187,57	4.936.088.701,00	784.864.645,00				
12	691	U1020110000000000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	13.664.020.371,49	4.826.357.015,10						
13	735	U1020220000000000	DP3AP2KB	20.554.096.842,19	2.949.133.928,06		44.482.000,00				
14	758	U1020310000000000	DINAS PANGAN	41.413.504.718,34	6.153.935.603,92		178.878.549,00				
15	776	U1020510000000000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10.788.651.132,00	2.007.267.397,76	12.432.000,00					
16	794	U1020710000000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.202.497.583,00	1.651.442.886,12						
17	840	U1020820000000000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.557.500.200,00	522.950.976,74						
18	861	U1020910000000000	DINAS PERHUBUNGAN	9.850.450.562,27	4.745.133.718,20		48.000.000,00				
19	911	U1021020000000000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	5.049.032.749,00	995.096.424,90						
20	932	U1021110000000000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECI DAN MENENGAH	22.401.666.280,00	4.211.630.391,30		843.427.162,00				
21	955	U1021210000000000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-							
22	981	U1021310000000000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	51.424.728.547,40	15.564.877.311,46						
23	1000	U1021610000000000	DINAS KEBUDAYAAN	79.778.447.640,85	11.834.067.302,68						
24	1020	U1021810000000000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	26.926.092.737,23	6.422.215.236,68						
25	1043	U2000110000000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	134.151.514.855,41	37.887.309.700,76	4.415.657.933,84	901.600.033,33				
26	1070	U2000210000000000	DINAS PARIWISATA	7.649.925.593,00	2.379.039.954,74	345.475.437,00					
27	1106	U2000320000000000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	67.712.444.781,00	24.161.805.466,87	140.290.000,00	684.418.038,00				
28	1125	U2000330000000000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	117.004.831.643,99	22.180.958.137,01	404.126.100,00					
29	1169	U2000410000000000	DINAS KEHUTANAN	24.016.237.278,00	6.696.559.471,02		899.608.445,00				
30	1196	U2000510000000000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	19.014.751.846,36	2.852.564.024,67	29.984.000,00					
31	1214	U2000710000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	28.944.620.672,24	9.646.496.195,90	1.000.000,00					
32	1238	U3000110000000000	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	4.079.463.768,00	1.507.951.180,69	1.798.978.481,92					
33	1252	U3000210000000000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	22.386.421.945,00	5.318.580.932,20						
34	1302	U3000320000000000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-							
35	1409	U3000330000000000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	70.078.304.250,00	14.146.203.346,58	163.407.645,00					
36	1516	U3000410000000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	3.966.159.050,00	1.634.737.289,99	89.193.118,13	5.502.500,00				
37	1539	U3000510000000000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	25.790.040.497,30	5.574.287.960,72		1.206.400.621,00				
38	1562	U3000610000000000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-							
39	1576	U3000710000000000	BADAN PENGHUBUNG	21.025.910.737,00	6.164.609.176,40	116.832.500,00					
40	1582	U4000100000000000	SEKRETARIAT DAERAH	29.046.804.952,00	9.158.198.636,66						
41	1621	U4000130000000000	BIRO HUKUM	-							
42	1635	U4000140000000000	BIRO PEREKONOMIAN	-							
43	1677	U4000170000000000	BIRO ORGANISASI	-							
44	1691	U4000180000000000	BIRO UMUM	241.570.407.736,01	55.238.211.429,98	6.887.606.581,00	1.279.618.484,00				
45	1719	U4000210000000000	SEKRETARIAT DPRD	137.701.320.466,00	34.608.681.870,17	19.530.304.367,00	3.093.371.544,81				
46	1732	U4001100000000000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-							
47	1746	U4001110000000000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	-							
48	1757	U4001120000000000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	283.601.958.256,00	34.032.234.990,96						
49	1771	U4001130000000000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.417.625.721,00	369.055.202,52						
50	1785	U4001140000000000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	-							
51	1799	U5000110000000000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	414.456.411,00	153.465.901,76		361.439.895,00				
52	1818	U5000120000000000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.418.294.980,00	289.869.257,28	198.995.000,00					
Total				**4.627.403.775.024,23**	**1.100.759.868.734,32**	**212.226.274.577,89**	**11.562.648.220,14**	**20.631.703.400,00**	**213.151.792,33**	**-**	**-**

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYAGEDUNG DAN BANGUNANPROVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2024

Lampiran 39

No	ID Sotk	ID User	Nama OPD	Koreksi	Koreksi / Akm penyusutan	Reklasifikasi	Reklasifikasi/ Akm Penyusutan	Beban Penyusutan	Total Mutasi Tambah Nilai Perolehan	Total Mutasi Tambah Akm Penyusutan	Penerimaan dari Cara Perolehan
1	3	U1010110000200000	DINAS PENDIDIKAN	12.981.968.636,48	0,02	121.066.776,00		46.844.973.214,83	165.326.283.391,48	213.151.792,35	32.260.000,00
2	408	U1010210000000000	DINAS KESEHATAN			24.934.540.603,00		5.004.496.541,43	25.113.041.767,00	-	
3	434	U1010220000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI					3.652.063.581,72	5.216.040.376,00	-	
4	447	U1010230000000000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN			804.362.350,00		1.524.126.659,80	1.191.835.787,00	-	19.120.677,00
5	457	U1010260000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR			396.281.000,00		2.572.399.438,18	8.930.584.586,00	-	236.643.000,00
6	487	U1010270000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	621.020.400,00	4.966.126,81	232.877.400,00		1.323.871.701,71	3.089.153.120,00	4.966.126,81	7.461.250,00
7	545	U1010330000000000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	276.862.378,00				3.019.221.452,90	22.442.664.481,00	-	
8	562	U1010340000000000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI					328.541.597,90	1.185.697.651,00	-	100.037.430,00
9	605	U1010410000000000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN					139.539.760,08	2.892.320.800,00	-	
10	642	U1010520000000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						-	-	
11	659	U1010610000000000	DINAS SOSIAL	154.251.380,00				1.144.049.681,79	5.875.204.726,00	-	204.969.393,00
12	691	U1020110000000000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					278.002.550,76	-	-	
13	735	U1020220000000000	DP3AP2KB	197.966.317,00				442.921.287,41	242.448.317,00	-	
14	758	U1020310000000000	DINAS PANGAN	165.381.000,00				873.095.588,65	344.259.549,00	-	
15	776	U1020510000000000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	222.580.800,00		3.885.000,00		213.003.482,80	238.897.800,00	-	
16	794	U1020710000000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					68.474.261,16	-	-	
17	840	U1020820000000000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					41.447.062,20	-	-	
18	861	U1020910000000000	DINAS PERHUBUNGAN					165.477.352,76	48.000.000,00	-	
19	911	U1021020000000000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	63.700.000,00				128.065.228,37	63.700.000,00	-	
20	932	U1021110000000000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECI DAN MENENGAH					456.933.997,83	843.427.162,00	-	
21	955	U1021210000000000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						-	-	
22	981	U1021310000000000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA					1.476.581.489,76	-	-	
23	1000	U1021610000000000	DINAS KEBUDAYAAN					1.657.171.491,01	-	-	
24	1020	U1021810000000000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					548.505.404,28	-	-	
25	1043	U2000110000000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			551.198.654,00		2.994.269.320,38	5.868.456.621,17	-	
26	1070	U2000210000000000	DINAS PARIWISATA					162.667.317,36	345.475.437,00	-	
27	1106	U2000320000000000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	71.813.819,00				1.496.090.252,77	896.521.857,00	-	
28	1125	U2000330000000000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA			7.800.000,00		2.500.402.258,75	411.926.100,00	-	358.153.000,00
29	1169	U2000410000000000	DINAS KEHUTANAN					535.913.079,23	899.608.445,00	-	
30	1196	U2000510000000000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					415.870.739,88	29.984.000,00	-	29.984.000,00
31	1214	U2000710000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					613.657.775,76	1.000.000,00	-	1.000.000,00
32	1238	U3000110000000000	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI					90.021.568,15	1.798.978.481,92	-	
33	1252	U3000210000000000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					478.520.145,12	-	-	
34	1302	U3000320000000000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						-	-	
35	1409	U3000330000000000	BADAN PENDAPATAN DAERAH					1.417.318.952,04	163.407.645,00	-	
36	1516	U3000410000000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			6.675.200,00		99.951.750,48	101.370.818,13	-	
37	1539	U3000510000000000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			64.790.600,00		516.031.645,22	1.271.191.221,00	-	
38	1562	U3000610000000000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						-	-	
39	1576	U3000710000000000	BADAN PENGHUBUNG					440.107.112,64	116.832.500,00	-	
40	1582	U4000100000000000	SEKRETARIAT DAERAH					555.334.534,56	-	-	
41	1621	U4000130000000000	BIRO HUKUM						-	-	
42	1635	U4000140000000000	BIRO PEREKONOMIAN						-	-	
43	1677	U4000170000000000	BIRO ORGANISASI						-	-	
44	1691	U4000180000000000	BIRO UMUM			158.969.760,00		4.975.073.213,39	8.326.194.825,00	-	
45	1719	U4000210000000000	SEKRETARIAT DPRD	957.352.241,00		10.143.138.650,00		4.519.864.530,38	33.724.166.802,81	-	
46	1732	U4001100000000000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						-	-	
47	1746	U4001110000000000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN						-	-	
48	1757	U4001120000000000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT					5.672.039.165,16	-	-	
49	1771	U4001130000000000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					28.352.514,48	-	-	
50	1785	U4001140000000000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA						-	-	
51	1799	U5000110000000000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			29.756.603,00		10.398.788,36	391.196.498,00	-	
52	1818	U5000120000000000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					28.868.399,64	198.995.000,00	-	
Total				**15.712.896.971,48**	**4.966.126,83**	**37.455.342.596,00**	**-**	**99.453.715.891,08**	**297.588.865.765,51**	**218.117.919,16**	**989.628.750,00**

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYAGEDUNG DAN BANGUNANPROVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2024

Lampiran 39

No	ID Sotk	ID User	Nama OPD	Mutasi Kurang								Total Mutasi Kurang Nilai Perolehan
				Pengeluaran Internal Pengguna Barang	Pengeluaran Internal Pengguna Barang / Akm Penyusutan	Koreksi	Koreksi/ Akm Penyusutan	Reklasifikasi	Reklasifikasi /Akm Penyusutan	Penghapusan	Penghapusan / Akm Penyusutan	
1	3	U1010110000200000	DINAS PENDIDIKAN			627.039.181,00		11.539.843.536,00	233.649.776,30			12.199.142.717,00
2	408	U1010210000000000	DINAS KESEHATAN									-
3	434	U1010220000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI			920.605.768,00	-	3.173.500.000,00				4.094.105.768,00
4	447	U1010230000000000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN					6.979.236,00				26.099.913,00
5	457	U1010260000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR			1.242.102.000,00						1.478.745.000,00
6	487	U1010270000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN			95.396.540,00		232.877.400,00				335.735.190,00
7	545	U1010330000000000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG					21.246.997.481,00				21.246.997.481,00
8	562	U1010340000000000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI					435.460.392,00				535.497.822,00
9	605	U1010410000000000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN					2.892.320.800,00				2.892.320.800,00
10	642	U1010520000000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									-
11	659	U1010610000000000	DINAS SOSIAL					191.653.201,00				396.622.594,00
12	691	U1020110000000000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI									-
13	735	U1020220000000000	DP3AP2KB									-
14	758	U1020310000000000	DINAS PANGAN									-
15	776	U1020510000000000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					3.885.000,00				3.885.000,00
16	794	U1020710000000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									-
17	840	U1020820000000000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									-
18	861	U1020910000000000	DINAS PERHUBUNGAN									-
19	911	U1021020000000000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK									-
20	932	U1021110000000000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECI DAN MENENGAH									-
21	955	U1021210000000000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									-
22	981	U1021310000000000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA									-
23	1000	U1021610000000000	DINAS KEBUDAYAAN									-
24	1020	U1021810000000000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN									-
25	1043	U2000110000000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN									-
26	1070	U2000210000000000	DINAS PARIWISATA					345.475.437,00				345.475.437,00
27	1106	U2000320000000000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN					64.043.819,00				64.043.819,00
28	1125	U2000330000000000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA									358.153.000,00
29	1169	U2000410000000000	DINAS KEHUTANAN									-
30	1196	U2000510000000000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									29.984.000,00
31	1214	U2000710000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN									1.000.000,00
32	1238	U3000110000000000	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI									-
33	1252	U3000210000000000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									-
34	1302	U3000320000000000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									-
35	1409	U3000330000000000	BADAN PENDAPATAN DAERAH									-
36	1516	U3000410000000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									-
37	1539	U3000510000000000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									-
38	1562	U3000610000000000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									-
39	1576	U3000710000000000	BADAN PENGHUBUNG			117.000.000,00	6.700,08					117.000.000,00
40	1582	U4000100000000000	SEKRETARIAT DAERAH									-
41	1621	U4000130000000000	BIRO HUKUM									-
42	1635	U4000140000000000	BIRO PEREKONOMIAN									-
43	1677	U4000170000000000	BIRO ORGANISASI									-
44	1691	U4000180000000000	BIRO UMUM					158.969.760,00				158.969.760,00
45	1719	U4000210000000000	SEKRETARIAT DPRD					4.492.351.730,00				4.492.351.730,00
46	1732	U4001100000000000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									-
47	1746	U4001110000000000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN									-
48	1757	U4001120000000000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT									-
49	1771	U4001130000000000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH									-
50	1785	U4001140000000000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA									-
51	1799	U5000110000000000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									-
52	1818	U5000120000000000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					198.995.000,00				198.995.000,00
Total				**-**	**-**	**3.002.143.489,00**	**6.700,08**	**44.983.352.792,00**	**233.649.776,30**	**-**	**-**	**48.975.125.031,00**

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYAGEDUNG DAN BANGUNANPROVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2024

Lampiran 39

No	ID Sotk	ID User	Nama OPD	Total Mutasi Kurang Akm Penyusutan	Total Mutasi Nilai Perolehan	Total Mutasi Akm Penyusutan	Saldo Akhir Nilai Perolehan	Saldo Akhir Akm Penyusutan
1	3	U1010110000200000	DINAS PENDIDIKAN	233.649.776,30	153.127.140.674,48	(20.497.983,95)	2.544.259.679.771,14	636.602.205.129,19
2	408	U1010210000000000	DINAS KESEHATAN	-	25.113.041.767,00	-	100.313.957.645,46	18.625.781.229,76
3	434	U1010220000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	-	1.121.934.608,00	-	167.879.718.143,99	49.558.888.609,26
4	447	U1010230000000000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	-	1.165.735.874,00	-	72.150.463.633,00	21.679.142.024,27
5	457	U1010260000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR	-	7.451.839.586,00	-	121.032.743.063,97	29.421.742.668,06
6	487	U1010270000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	-	2.753.417.930,00	4.966.126,81	60.286.607.516,43	13.817.587.585,18
7	545	U1010330000000000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	-	1.195.667.000,00	-	150.044.247.562,00	28.410.071.305,48
8	562	U1010340000000000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	-	650.199.829,00	-	15.552.153.075,31	5.355.500.567,71
9	605	U1010410000000000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	-	-	6.976.988.000,00	2.790.795.199,46
10	642	U1010520000000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-
11	659	U1010610000000000	DINAS SOSIAL	-	5.478.582.132,00	-	59.362.591.210,33	24.150.977.869,36
12	691	U1020110000000000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	13.664.020.371,49	5.104.359.565,86
13	735	U1020220000000000	DP3AP2KB	-	242.448.317,00	-	20.796.545.159,19	3.392.055.215,47
14	758	U1020310000000000	DINAS PANGAN	-	344.259.549,00	-	41.757.764.267,34	7.027.031.192,57
15	776	U1020510000000000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	235.012.800,00	-	11.023.663.932,00	2.220.270.880,56
16	794	U1020710000000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	3.202.497.583,00	1.719.917.147,28
17	840	U1020820000000000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	1.557.500.200,00	564.398.038,94
18	861	U1020910000000000	DINAS PERHUBUNGAN	-	48.000.000,00	-	9.898.450.562,27	4.910.611.070,96
19	911	U1021020000000000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	63.700.000,00	-	5.112.732.749,00	1.123.161.653,27
20	932	U1021110000000000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECI DAN MENENGAH	-	843.427.162,00	-	23.245.093.442,00	4.668.564.389,13
21	955	U1021210000000000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-	-
22	981	U1021310000000000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	-	-	51.424.728.547,40	17.041.458.801,22
23	1000	U1021610000000000	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	79.778.447.640,85	13.491.238.793,69
24	1020	U1021810000000000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	26.926.092.737,23	6.970.720.640,96
25	1043	U2000110000000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	5.868.456.621,17	-	140.019.971.476,58	40.881.579.021,14
26	1070	U2000210000000000	DINAS PARIWISATA	-	-	-	7.649.925.593,00	2.541.707.272,10
27	1106	U2000320000000000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	832.478.038,00	-	68.544.922.819,00	25.657.895.719,64
28	1125	U2000330000000000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	-	53.773.100,00	-	117.058.604.743,99	24.681.360.395,76
29	1169	U2000410000000000	DINAS KEHUTANAN	-	899.608.445,00	-	24.915.845.723,00	7.232.472.550,25
30	1196	U2000510000000000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	19.014.751.846,36	3.268.434.764,55
31	1214	U2000710000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	28.944.620.672,24	10.260.153.971,66
32	1238	U3000110000000000	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	-	1.798.978.481,92	-	5.878.442.249,92	1.597.972.748,84
33	1252	U3000210000000000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	22.386.421.945,00	5.797.101.077,32
34	1302	U3000320000000000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-	-
35	1409	U3000330000000000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	163.407.645,00	-	70.241.711.895,00	15.563.522.298,62
36	1516	U3000410000000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	101.370.818,13	-	4.067.529.868,13	1.734.689.040,47
37	1539	U3000510000000000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	1.271.191.221,00	-	27.061.231.718,30	6.090.319.605,94
38	1562	U3000610000000000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	-	-
39	1576	U3000710000000000	BADAN PENGHUBUNG	6.700,08	(167.500,00)	(6.700,08)	21.025.743.237,00	6.604.709.588,96
40	1582	U4000100000000000	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	29.046.804.952,00	9.713.533.171,22
41	1621	U4000130000000000	BIRO HUKUM	-	-	-	-	-
42	1635	U4000140000000000	BIRO PEREKONOMIAN	-	-	-	-	-
43	1677	U4000170000000000	BIRO ORGANISASI	-	-	-	-	-
44	1691	U4000180000000000	BIRO UMUM	-	8.167.225.065,00	-	249.737.632.801,01	60.213.284.643,37
45	1719	U4000210000000000	SEKRETARIAT DPRD	-	29.231.815.072,81	-	166.933.135.538,81	39.128.546.400,55
46	1732	U4001100000000000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	-	-	-	-
47	1746	U4001110000000000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	-	-	-	-	-
48	1757	U4001120000000000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	283.601.958.256,00	39.704.274.156,12
49	1771	U4001130000000000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	-	-	-	1.417.625.721,00	397.407.717,00
50	1785	U4001140000000000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	-	-	-	-
51	1799	U5000110000000000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	391.196.498,00	-	805.652.909,00	163.864.690,12
52	1818	U5000120000000000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	1.418.294.980,00	318.737.656,92
Total				**233.656.476,38**	**248.613.740.734,51**	**(15.538.557,22)**	**4.876.017.515.758,74**	**1.200.198.046.068,18**

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYAJALAN IRIGASI DAN JARINGANPROVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2024

Lampiran 40

No	ID Sotk	ID User	Nama OPD	Saldo Awal Nilai perolehan	Saldo Awal penyusutan	Mutasi Tambah					
						Penerimaan dari Cara Perolehan				Penerimaan Internal Pengguna Barang	Penerimaan Internal Pengguna Barang / Akm Penyusutan
						Modal	Jasa Dikapitalisir	Hibah	Hibah/Akm Penyusutan		
1	3	U1010110000200000	DINAS PENDIDIKAN	-	-						
2	408	U1010210000000000	DINAS KESEHATAN	-	-						
3	434	U1010220000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	-	-						
4	447	U1010230000000000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	-	-	769.466.170,00					
5	457	U1010260000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR	-	-						
6	487	U1010270000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	-	-						
7	545	U1010330000000000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	4.785.034.471.103,47	4.134.870.503.159,66	173.524.539.932,46					
8	562	U1010340000000000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	1.985.896.208.323,02	1.012.415.826.426,05	52.875.953.042,00	435.460.392,00				
9	605	U1010410000000000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	-	90.449.595.700,00					
10	642	U1010520000000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-						
11	659	U1010610000000000	DINAS SOSIAL	-	-						
12	691	U1020110000000000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-						
13	735	U1020220000000000	DP3AP2KB	-	-						
14	758	U1020310000000000	DINAS PANGAN	-	-						
15	776	U1020510000000000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	27.283.356.200,00	27.283.356.200,00						
16	794	U1020710000000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-						
17	840	U1020820000000000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-						
18	861	U1020910000000000	DINAS PERHUBUNGAN	-	-						
19	911	U1021020000000000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	-						
20	932	U1021110000000000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECI DAN MENENGAH	-	-						
21	955	U1021210000000000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-						
22	981	U1021310000000000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	-						
23	1000	U1021610000000000	DINAS KEBUDAYAAN	-	-						
24	1020	U1021810000000000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-						
25	1043	U2000110000000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	15.293.735.314,89	4.196.663.011,80						
26	1070	U2000210000000000	DINAS PARIWISATA	-	-						
27	1106	U2000320000000000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-						
28	1125	U2000330000000000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	831.735.300,00	831.735.300,00						
29	1169	U2000410000000000	DINAS KEHUTANAN	-	-						
30	1196	U2000510000000000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	72.072.000.693,00	15.912.224.294,56						
31	1214	U2000710000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-						
32	1238	U3000110000000000	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	-	-						
33	1252	U3000210000000000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-						
34	1302	U3000320000000000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-						
35	1409	U3000330000000000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-						
36	1516	U3000410000000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-						
37	1539	U3000510000000000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-						
38	1562	U3000610000000000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-						
39	1576	U3000710000000000	BADAN PENGHUBUNG	-	-						
40	1582	U4000100000000000	SEKRETARIAT DAERAH	-	-			9.365.486.300,00	1.717.005.821,74		
41	1621	U4000130000000000	BIRO HUKUM	-	-						
42	1635	U4000140000000000	BIRO PEREKONOMIAN	-	-						
43	1677	U4000170000000000	BIRO ORGANISASI	-	-						
44	1691	U4000180000000000	BIRO UMUM	-	-						
45	1719	U4000210000000000	SEKRETARIAT DPRD	-	-						
46	1732	U4001100000000000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	-						
47	1746	U4001110000000000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	-	-						
48	1757	U4001120000000000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-						
49	1771	U4001130000000000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	-	-						
50	1785	U4001140000000000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	-						
51	1799	U5000110000000000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-						
52	1818	U5000120000000000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-						
Total				6.886.411.506.934,38	5.195.510.308.392,07	317.619.554.844,46	435.460.392,00	9.365.486.300,00	1.717.005.821,74	-	-

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYAJALAN IRIGASI DAN JARINGANPROVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2024

Lampiran 40

No	ID Sotk	ID User	Nama OPD	Koreksi	Koreksi / Akm penyusutan	Reklasifikasi	Reklasifikasi/ Akm Penyusutan	Beban Penyusutan	Total Mutasi Tambah Nilai Perolehan	Total Mutasi Tambah Akm Penyusutan	Penerimaan dari Cara Perolehan
1	3	U10101100002000000	DINAS PENDIDIKAN						-	-	
2	408	U10102100000000000	DINAS KESEHATAN						-	-	
3	434	U10102200000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI						-	-	
4	447	U10102300000000000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN						769.466.170,00	-	
5	457	U10102600000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR						-	-	
6	487	U10102700000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN						-	-	
7	545	U10103300000000000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	2.311.928.825,00		41.534.325.976,00		202.683.256.927,46	217.370.794.733,46	-	523.648.942,00
8	562	U10103400000000000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	4.934.725.641,00		17.680.320.946,50		82.651.698.684,36	75.926.460.021,50	-	
9	605	U10104100000000000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	255.933.000,00					90.705.528.700,00	-	
10	642	U10105200000000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						-	-	
11	659	U10106100000000000	DINAS SOSIAL						-	-	
12	691	U10201100000000000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						-	-	
13	735	U10202200000000000	DP3AP2KB						-	-	
14	758	U10203100000000000	DINAS PANGAN						-	-	
15	776	U10205100000000000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP						-	-	
16	794	U10207100000000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						-	-	
17	840	U10208200000000000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						-	-	
18	861	U10209100000000000	DINAS PERHUBUNGAN						-	-	
19	911	U10210200000000000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK						-	-	
20	932	U10211100000000000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECI DAN MENENGAH						-	-	
21	955	U10212100000000000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						-	-	
22	981	U10213100000000000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA						-	-	
23	1000	U10216100000000000	DINAS KEBUDAYAAN						-	-	
24	1020	U10218100000000000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN						-	-	
25	1043	U20001100000000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					373.492.618,60	-	-	
26	1070	U20002100000000000	DINAS PARIWISATA						-	-	
27	1106	U20003200000000000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN						-	-	
28	1125	U20003300000000000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA						-	-	
29	1169	U20004100000000000	DINAS KEHUTANAN						-	-	
30	1196	U20005100000000000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					1.801.161.636,86	-	-	
31	1214	U20007100000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						-	-	
32	1238	U30001100000000000	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI						-	-	
33	1252	U30002100000000000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						-	-	
34	1302	U30003200000000000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						-	-	
35	1409	U30003300000000000	BADAN PENDAPATAN DAERAH						-	-	
36	1516	U30004100000000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						-	-	
37	1539	U30005100000000000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						-	-	
38	1562	U30006100000000000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						-	-	
39	1576	U30007100000000000	BADAN PENGHUBUNG						-	-	
40	1582	U40001000000000000	SEKRETARIAT DAERAH					156.091.438,34	9.365.486.300,00	1.717.005.821,74	
41	1621	U40001300000000000	BIRO HUKUM						-	-	
42	1635	U40001400000000000	BIRO PEREKONOMIAN						-	-	
43	1677	U40001700000000000	BIRO ORGANISASI						-	-	
44	1691	U40001800000000000	BIRO UMUM						-	-	
45	1719	U40002100000000000	SEKRETARIAT DPRD						-	-	
46	1732	U40011000000000000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						-	-	
47	1746	U40011100000000000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN						-	-	
48	1757	U40011200000000000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT						-	-	
49	1771	U40011300000000000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						-	-	
50	1785	U40011400000000000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA						-	-	
51	1799	U50001100000000000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						-	-	
52	1818	U50001200000000000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						-	-	
Total				7.502.587.466,00	-	59.214.646.922,50	-	287.665.701.305,62	394.137.735.924,96	1.717.005.821,74	523.648.942,00

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYAJALAN IRIGASI DAN JARINGANPROVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2024

Lampiran 40

No	ID Sotk	ID User	Nama OPD	Mutasi Kurang								Total Mutasi Kurang Nilai Perolehan
				Pengeluaran Internal Pengguna Barang	Pengeluaran Internal Pengguna Barang / Akm Penyusutan	Koreksi	Koreksi/ Akm Penyusutan	Reklasifikasi	Reklasifikasi /Akm Penyusutan	Penghapusan	Penghapusan / Akm Penyusutan	
1	3	U1010110000200000	DINAS PENDIDIKAN									-
2	408	U1010210000000000	DINAS KESEHATAN									-
3	434	U1010220000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI				-					-
4	447	U1010230000000000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN					769.466.170,00				769.466.170,00
5	457	U1010260000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR									-
6	487	U1010270000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN									-
7	545	U1010330000000000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG			34.995.000,00	3.499.500,20	47.707.577.353,00				48.266.221.295,00
8	562	U1010340000000000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI					12.106.399.058,00				12.106.399.058,00
9	605	U1010410000000000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN					90.705.528.700,00				90.705.528.700,00
10	642	U1010520000000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									-
11	659	U1010610000000000	DINAS SOSIAL									-
12	691	U1020110000000000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI									-
13	735	U1020220000000000	DP3AP2KB									-
14	758	U1020310000000000	DINAS PANGAN									-
15	776	U1020510000000000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP									-
16	794	U1020710000000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									-
17	840	U1020820000000000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									-
18	861	U1020910000000000	DINAS PERHUBUNGAN									-
19	911	U1021020000000000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK									-
20	932	U1021110000000000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECI DAN MENENGAH									-
21	955	U1021210000000000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									-
22	981	U1021310000000000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA									-
23	1000	U1021610000000000	DINAS KEBUDAYAAN									-
24	1020	U1021810000000000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN									-
25	1043	U2000110000000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN									-
26	1070	U2000210000000000	DINAS PARIWISATA									-
27	1106	U2000320000000000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN									-
28	1125	U2000330000000000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA									-
29	1169	U2000410000000000	DINAS KEHUTANAN									-
30	1196	U2000510000000000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									-
31	1214	U2000710000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN									-
32	1238	U3000110000000000	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI									-
33	1252	U3000210000000000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									-
34	1302	U3000320000000000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									-
35	1409	U3000330000000000	BADAN PENDAPATAN DAERAH									-
36	1516	U3000410000000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									-
37	1539	U3000510000000000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									-
38	1562	U3000610000000000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									-
39	1576	U3000710000000000	BADAN PENGHUBUNG									-
40	1582	U4000100000000000	SEKRETARIAT DAERAH									-
41	1621	U4000130000000000	BIRO HUKUM									-
42	1635	U4000140000000000	BIRO PEREKONOMIAN									-
43	1677	U4000170000000000	BIRO ORGANISASI									-
44	1691	U4000180000000000	BIRO UMUM									-
45	1719	U4000210000000000	SEKRETARIAT DPRD									-
46	1732	U4001100000000000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									-
47	1746	U4001110000000000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN									-
48	1757	U4001120000000000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT									-
49	1771	U4001130000000000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH									-
50	1785	U4001140000000000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA									-
51	1799	U5000110000000000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									-
52	1818	U5000120000000000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									-
Total				-	-	34.995.000,00	3.499.500,20	151.288.971.281,00	-	-	-	151.847.615.223,00

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYAJALAN IRIGASI DAN JARINGANPROVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2024

Lampiran 40

No	ID Sotk	ID User	Nama OPD	Total Mutasi Kurang Akm Penyusutan	Total Mutasi Nilai Perolehan	Total Mutasi Akm Penyusutan	Saldo Akhir Nilai Perolehan	Saldo Akhir Akm Penyusutan
1	3	U10101100002000000	DINAS PENDIDIKAN	-	-	-	-	-
2	408	U10102100000000000	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-
3	434	U10102200000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	-	-	-	-	-
4	447	U10102300000000000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	-	-	-	-	-
5	457	U10102600000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR	-	-	-	-	-
6	487	U10102700000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	-	-	-	-	-
7	545	U10103300000000000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	3.499.500,20	169.104.573.438,46	(3.499.500,20)	4.954.139.044.541,93	4.337.550.260.586,92
8	562	U10103400000000000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	-	63.820.060.963,50	-	2.049.716.269.286,52	1.095.067.525.110,41
9	605	U10104100000000000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	-	-	-	-
10	642	U10105200000000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-
11	659	U10106100000000000	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	-
12	691	U10201100000000000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-	-
13	735	U10202200000000000	DP3AP2KB	-	-	-	-	-
14	758	U10203100000000000	DINAS PANGAN	-	-	-	-	-
15	776	U10205100000000000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	27.283.356.200,00	27.283.356.200,00
16	794	U10207100000000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-	-
17	840	U10208200000000000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-
18	861	U10209100000000000	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-
19	911	U10210200000000000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	-	-	-	-
20	932	U10211100000000000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECI DAN MENENGAH	-	-	-	-	-
21	955	U10212100000000000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-	-
22	981	U10213100000000000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	-	-	-	-
23	1000	U10216100000000000	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-
24	1020	U10218100000000000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	-
25	1043	U20001100000000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	15.293.735.314,89	4.570.155.630,40
26	1070	U20002100000000000	DINAS PARIWISATA	-	-	-	-	-
27	1106	U20003200000000000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-	-	-	-
28	1125	U20003300000000000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	-	-	-	831.735.300,00	831.735.300,00
29	1169	U20004100000000000	DINAS KEHUTANAN	-	-	-	-	-
30	1196	U20005100000000000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	72.072.000.693,00	17.713.385.931,42
31	1214	U20007100000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	-	-
32	1238	U30001100000000000	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	-	-	-	-	-
33	1252	U30002100000000000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	-
34	1302	U30003200000000000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-	-
35	1409	U30003300000000000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	-
36	1516	U30004100000000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	-	-
37	1539	U30005100000000000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-	-
38	1562	U30006100000000000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	-	-
39	1576	U30007100000000000	BADAN PENGHUBUNG	-	-	-	-	-
40	1582	U40001000000000000	SEKRETARIAT DAERAH	-	9.365.486.300,00	1.717.005.821,74	9.365.486.300,00	1.873.097.260,08
41	1621	U40001300000000000	BIRO HUKUM	-	-	-	-	-
42	1635	U40001400000000000	BIRO PEREKONOMIAN	-	-	-	-	-
43	1677	U40001700000000000	BIRO ORGANISASI	-	-	-	-	-
44	1691	U40001800000000000	BIRO UMUM	-	-	-	-	-
45	1719	U40002100000000000	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	-
46	1732	U40011000000000000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	-	-	-	-
47	1746	U40011100000000000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	-	-	-	-	-
48	1757	U40011200000000000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	-	-
49	1771	U40011300000000000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	-	-	-	-	-
50	1785	U40011400000000000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	-	-	-	-
51	1799	U50001100000000000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-	-
52	1818	U50001200000000000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-
Total				3.499.500,20	242.290.120.701,96	1.713.506.321,54	7.128.701.627.636,34	5.484.889.516.019,23

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYAASET TETAP LAINNYAPROVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2024

Lampiran 41

No	ID Sotk	ID User	Nama OPD	Saldo Awal Nilai perolehan	Saldo Awal penyusutan	Mutasi Tambah					
						Penerimaan dari Cara Perolehan				Penerimaan Internal Pengguna Barang	Penerimaan Internal Pengguna Barang / Akm Penyusutan
						Modal	Jasa Dikapitalisir	Hibah	Hibah/Akm Penyusutan		
1	3	U10101100002000000	DINAS PENDIDIKAN	386.397.146.013,65	102.173.791,04	43.635.046.310,00	124.142.860,00	10.800.000,00			
2	408	U10102100000000000	DINAS KESEHATAN	157.310.850,00	-						
3	434	U10102200000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	142.495.090,00	1.300.000,00						
4	447	U10102300000000000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	53.142.050,00	-						
5	457	U10102600000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR	78.532.400,00	-						
6	487	U10102700000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	110.352.550,00	-						
7	545	U10103300000000000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	26.634.399.685,28	11.815.900.480,44	9.623.922,00					
8	562	U10103400000000000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	6.730.080,00	-						
9	605	U10104100000000000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	-						
10	642	U10105200000000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-						
11	659	U10106100000000000	DINAS SOSIAL	604.042.400,00	357.562.400,00		115.725.159,00				
12	691	U10201100000000000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-						
13	735	U10202200000000000	DP3AP2KB	-	-						
14	758	U10203100000000000	DINAS PANGAN	10.180.250,00	-						
15	776	U10205100000000000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	224.490.000,00	-						
16	794	U10207100000000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17.600.000,00	17.600.000,00						
17	840	U10208200000000000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-						
18	861	U10209100000000000	DINAS PERHUBUNGAN	318.900.500,00	314.000.500,00						
19	911	U10210200000000000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	212.850.808,00	-						
20	932	U10211100000000000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECI DAN MENENGAH	11.835.000,00	-						
21	955	U10212100000000000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	171.091.500,00	-						
22	981	U10213100000000000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	8.000.000,00	-						
23	1000	U10216100000000000	DINAS KEBUDAYAAN	744.764.500,00	41.900.000,00	84.000.000,00					
24	1020	U10218100000000000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	5.357.150.280,00	15.000.000,00	81.492.500,00					
25	1043	U20001100000000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	64.262.000,00	64.262.000,00						
26	1070	U20002100000000000	DINAS PARIWISATA	98.350.200,00	72.589.200,00						
27	1106	U20003200000000000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.810.931.000,00	-	147.300.000,00					
28	1125	U20003300000000000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	257.253.000,00	70.180.000,00						
29	1169	U20004100000000000	DINAS KEHUTANAN	107.696.000,00	-						
30	1196	U20005100000000000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	66.777.500,00	8.774.800,08						
31	1214	U20007100000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	647.215.000,00	40.000.000,00						
32	1238	U30001100000000000	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	35.824.654,00	-	1.200.000,00					
33	1252	U30002100000000000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	44.926.370,00	-						
34	1302	U30003200000000000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	116.798.496,00	-						
35	1409	U30003300000000000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	6.750.200,00	-						
36	1516	U30004100000000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	71.261.825,00	40.520.000,00						
37	1539	U30005100000000000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	99.894.800,00	-						
38	1562	U30006100000000000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	342.794.882,82	-						
39	1576	U30007100000000000	BADAN PENGHUBUNG	671.692.800,00	27.306.000,00						
40	1582	U40001000000000000	SEKRETARIAT DAERAH	94.170.680,00	-						
41	1621	U40001300000000000	BIRO HUKUM	27.259.600,00	-						
42	1635	U40001400000000000	BIRO PEREKONOMIAN	-	-						
43	1677	U40001700000000000	BIRO ORGANISASI	1.910.000,00	-						
44	1691	U40001800000000000	BIRO UMUM	1.797.636.610,00	634.320.280,32	42.899.256,00					
45	1719	U40002100000000000	SEKRETARIAT DPRD	572.543.100,00	376.084.400,00	29.917.000,00					
46	1732	U40011000000000000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	-						
47	1746	U40011100000000000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	-	-						
48	1757	U40011200000000000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-						
49	1771	U40011300000000000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	525.000,00	-						
50	1785	U40011400000000000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	-						
51	1799	U50001100000000000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	17.120.453,00	17.120.453,00						
52	1818	U50001200000000000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	25.505.000,00	-						
Total				**429.240.113.127,75**	**14.016.594.304,88**	**44.031.478.988,00**	**239.868.019,00**	**10.800.000,00**	**-**	**-**	**-**

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYAASET TETAP LAINNYAPROVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2024

Lampiran 41

No	ID Sotk	ID User	Nama OPD	Koreksi	Koreksi / Akm penyusutan	Reklasifikasi	Reklasifikasi/ Akm Penyusutan	Beban Penyusutan	Total Mutasi Tambah Nilai Perolehan	Total Mutasi Tambah Akm Penyusutan	Penerimaan dari Cara Perolehan
1	3	U10101100002000000	DINAS PENDIDIKAN			163.410.589,00		49.446.326,36	43.933.399.759,00	-	109.187.050,00
2	408	U1010210000000000	DINAS KESEHATAN						-	-	
3	434	U1010220000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI						-	-	
4	447	U1010230000000000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN						-	-	
5	457	U1010260000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR						-	-	
6	487	U1010270000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN						-	-	
7	545	U1010330000000000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG					225.833.250,00	9.623.922,00	-	
8	562	U1010340000000000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI						-	-	
9	605	U1010410000000000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			198.763.800,00			198.763.800,00	-	
10	642	U1010520000000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						-	-	
11	659	U1010610000000000	DINAS SOSIAL						115.725.159,00	-	
12	691	U1020110000000000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						-	-	
13	735	U1020220000000000	DP3AP2KB						-	-	
14	758	U1020310000000000	DINAS PANGAN						-	-	
15	776	U1020510000000000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP						-	-	
16	794	U1020710000000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						-	-	
17	840	U1020820000000000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						-	-	
18	861	U1020910000000000	DINAS PERHUBUNGAN						-	-	
19	911	U1021020000000000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK						-	-	
20	932	U1021110000000000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECI DAN MENENGAH						-	-	
21	955	U1021210000000000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						-	-	
22	981	U1021310000000000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA						-	-	
23	1000	U1021610000000000	DINAS KEBUDAYAAN						84.000.000,00	-	
24	1020	U1021810000000000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN						81.492.500,00	-	
25	1043	U2000110000000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						-	-	
26	1070	U2000210000000000	DINAS PARIWISATA						-	-	
27	1106	U2000320000000000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN						147.300.000,00	-	
28	1125	U2000330000000000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA						-	-	
29	1169	U2000410000000000	DINAS KEHUTANAN						-	-	
30	1196	U2000510000000000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					4.387.400,04	-	-	
31	1214	U2000710000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						-	-	
32	1238	U3000110000000000	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI						1.200.000,00	-	
33	1252	U3000210000000000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						-	-	
34	1302	U3000320000000000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						-	-	
35	1409	U3000330000000000	BADAN PENDAPATAN DAERAH						-	-	
36	1516	U3000410000000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						-	-	
37	1539	U3000510000000000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						-	-	
38	1562	U3000610000000000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						-	-	
39	1576	U3000710000000000	BADAN PENGHUBUNG					13.653.000,00	-	-	
40	1582	U4000100000000000	SEKRETARIAT DAERAH						-	-	
41	1621	U4000130000000000	BIRO HUKUM						-	-	
42	1635	U4000140000000000	BIRO PEREKONOMIAN						-	-	
43	1677	U4000170000000000	BIRO ORGANISASI						-	-	
44	1691	U4000180000000000	BIRO UMUM					33.694.706,67	42.899.256,00	-	
45	1719	U4000210000000000	SEKRETARIAT DPRD					69.142.200,00	29.917.000,00	-	
46	1732	U4001100000000000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						-	-	
47	1746	U4001110000000000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN						-	-	
48	1757	U4001120000000000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT						-	-	
49	1771	U4001130000000000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						-	-	
50	1785	U4001140000000000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA						-	-	
51	1799	U5000110000000000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						-	-	
52	1818	U5000120000000000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						-	-	
Total				**-**	**-**	**362.174.389,00**	**-**	**396.156.883,07**	**44.644.321.396,00**	**-**	**109.187.050,00**

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYAASET TETAP LAINNYAPROVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2024

Lampiran 41

No	ID Sotk	ID User	Nama OPD	Mutasi Kurang								Total Mutasi Kurang Nilai Perolehan
				Pengeluaran Internal Pengguna Barang	Pengeluaran Internal Pengguna Barang / Akm Penyusutan	Koreksi	Koreksi/ Akm Penyusutan	Reklasifikasi	Reklasifikasi /Akm Penyusutan	Penghapusan	Penghapusan / Akm Penyusutan	
1	3	U1010110000200000	DINAS PENDIDIKAN					851.998.796,00				961.185.846,00
2	408	U1010210000000000	DINAS KESEHATAN									-
3	434	U1010220000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI				-					-
4	447	U1010230000000000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN									-
5	457	U1010260000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR									-
6	487	U1010270000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN									-
7	545	U1010330000000000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG									-
8	562	U1010340000000000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI									-
9	605	U1010410000000000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN									-
10	642	U1010520000000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									-
11	659	U1010610000000000	DINAS SOSIAL									-
12	691	U1020110000000000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI									-
13	735	U1020220000000000	DP3AP2KB									-
14	758	U1020310000000000	DINAS PANGAN									-
15	776	U1020510000000000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP									-
16	794	U1020710000000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									-
17	840	U1020820000000000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									-
18	861	U1020910000000000	DINAS PERHUBUNGAN									-
19	911	U1021020000000000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK									-
20	932	U1021110000000000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECI DAN MENENGAH									-
21	955	U1021210000000000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									-
22	981	U1021310000000000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA									-
23	1000	U1021610000000000	DINAS KEBUDAYAAN									-
24	1020	U1021810000000000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN									-
25	1043	U2000110000000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN									-
26	1070	U2000210000000000	DINAS PARIWISATA									-
27	1106	U2000320000000000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN					90.000.000,00				90.000.000,00
28	1125	U2000330000000000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA									-
29	1169	U2000410000000000	DINAS KEHUTANAN									-
30	1196	U2000510000000000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									-
31	1214	U2000710000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN									-
32	1238	U3000110000000000	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI									-
33	1252	U3000210000000000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									-
34	1302	U3000320000000000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									-
35	1409	U3000330000000000	BADAN PENDAPATAN DAERAH									-
36	1516	U3000410000000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									-
37	1539	U3000510000000000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									-
38	1562	U3000610000000000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									-
39	1576	U3000710000000000	BADAN PENGHUBUNG									-
40	1582	U4000100000000000	SEKRETARIAT DAERAH									-
41	1621	U4000130000000000	BIRO HUKUM									-
42	1635	U4000140000000000	BIRO PEREKONOMIAN									-
43	1677	U4000170000000000	BIRO ORGANISASI									-
44	1691	U4000180000000000	BIRO UMUM				0,40					-
45	1719	U4000210000000000	SEKRETARIAT DPRD									-
46	1732	U4001100000000000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									-
47	1746	U4001110000000000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN									-
48	1757	U4001120000000000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT									-
49	1771	U4001130000000000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH									-
50	1785	U4001140000000000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA									-
51	1799	U5000110000000000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									-
52	1818	U5000120000000000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									-
Total				**-**	**-**	**-**	**0,40**	**941.998.796,00**	**-**	**-**	**-**	**1.051.185.846,00**

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYAASET TETAP LAINNYAPROVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2024

Lampiran 41

No	ID Sotk	ID User	Nama OPD	Total Mutasi Kurang Akm Penyusutan	Total Mutasi Nilai Perolehan	Total Mutasi Akm Penyusutan	Saldo Akhir Nilai Perolehan	Saldo Akhir Akm Penyusutan
1	3	U10101100002000000	DINAS PENDIDIKAN	-	42.972.213.913,00	-	429.369.359.926,65	151.620.117,40
2	408	U10102100000000000	DINAS KESEHATAN	-	-	-	157.310.850,00	-
3	434	U10102200000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	-	-	-	142.495.090,00	1.300.000,00
4	447	U10102300000000000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	-	-	-	53.142.050,00	-
5	457	U10102600000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR	-	-	-	78.532.400,00	-
6	487	U10102700000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	-	-	-	110.352.550,00	-
7	545	U10103300000000000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	-	9.623.922,00	-	26.644.023.607,28	12.041.733.730,44
8	562	U10103400000000000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	-	-	-	6.730.080,00	-
9	605	U10104100000000000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	198.763.800,00	-	198.763.800,00	-
10	642	U10105200000000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-
11	659	U10106100000000000	DINAS SOSIAL	-	115.725.159,00	-	719.767.559,00	357.562.400,00
12	691	U10201100000000000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-	-
13	735	U10202200000000000	DP3AP2KB	-	-	-	-	-
14	758	U10203100000000000	DINAS PANGAN	-	-	-	10.180.250,00	-
15	776	U10205100000000000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	224.490.000,00	-
16	794	U10207100000000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	17.600.000,00	17.600.000,00
17	840	U10208200000000000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-
18	861	U10209100000000000	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	318.900.500,00	314.000.500,00
19	911	U10210200000000000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	-	-	212.850.808,00	-
20	932	U10211100000000000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECI DAN MENENGAH	-	-	-	11.835.000,00	-
21	955	U10212100000000000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	171.091.500,00	-
22	981	U10213100000000000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	-	-	8.000.000,00	-
23	1000	U10216100000000000	DINAS KEBUDAYAAN	-	84.000.000,00	-	828.764.500,00	41.900.000,00
24	1020	U10218100000000000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	81.492.500,00	-	5.438.642.780,00	15.000.000,00
25	1043	U20001100000000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	64.262.000,00	64.262.000,00
26	1070	U20002100000000000	DINAS PARIWISATA	-	-	-	98.350.200,00	72.589.200,00
27	1106	U20003200000000000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	57.300.000,00	-	2.868.231.000,00	-
28	1125	U20003300000000000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	-	-	-	257.253.000,00	70.180.000,00
29	1169	U20004100000000000	DINAS KEHUTANAN	-	-	-	107.696.000,00	-
30	1196	U20005100000000000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	66.777.500,00	13.162.200,12
31	1214	U20007100000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	647.215.000,00	40.000.000,00
32	1238	U30001100000000000	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	-	1.200.000,00	-	37.024.654,00	-
33	1252	U30002100000000000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	44.926.370,00	-
34	1302	U30003200000000000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	116.798.496,00	-
35	1409	U30003300000000000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	6.750.200,00	-
36	1516	U30004100000000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	71.261.825,00	40.520.000,00
37	1539	U30005100000000000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	99.894.800,00	-
38	1562	U30006100000000000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	342.794.882,82	-
39	1576	U30007100000000000	BADAN PENGHUBUNG	-	-	-	671.692.800,00	40.959.000,00
40	1582	U40001000000000000	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	94.170.680,00	-
41	1621	U40001300000000000	BIRO HUKUM	-	-	-	27.259.600,00	-
42	1635	U40001400000000000	BIRO PEREKONOMIAN	-	-	-	-	-
43	1677	U40001700000000000	BIRO ORGANISASI	-	-	-	1.910.000,00	-
44	1691	U40001800000000000	BIRO UMUM	0,40	42.899.256,00	(0,40)	1.840.535.866,00	668.014.986,59
45	1719	U40002100000000000	SEKRETARIAT DPRD	-	29.917.000,00	-	602.460.100,00	445.226.600,00
46	1732	U40011000000000000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	-	-	-	-
47	1746	U40011100000000000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	-	-	-	-	-
48	1757	U40011200000000000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	-	-
49	1771	U40011300000000000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	-	-	-	525.000,00	-
50	1785	U40011400000000000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	-	-	-	-
51	1799	U50001100000000000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	17.120.453,00	17.120.453,00
52	1818	U50001200000000000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	25.505.000,00	-
Total				**0,40**	**43.593.135.550,00**	**(0,40)**	**472.833.248.677,75**	**14.412.751.187,55**

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYAKONSTRUKSI DALAM PENGERJAANRPOVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2024

Lampiran 42

No	ID Sotk	ID User	Nama OPD	Saldo Awal	Mutasi Tambah							Total Mutasi Tambah
					Penerimaan dari Cara Perolehan				Penerimaan Internal Pengguna Barang	Koreksi	Reklasifikasi	
					Modal	Modal Bos	Jasa Dikapitalisir	Hibah				
1	3	U1010110000200000	DINAS PENDIDIKAN	17.889.389.606,89	-	0	0	0	0	0	1.236.510.326,00	1.236.510.326,00
2	408	U1010210000000000	DINAS KESEHATAN	24.750.144.522,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	434	U1010220000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	145.918.958.462,00	0	0	0	0	0	0	3.173.500.000,00	3.173.500.000,00
4	447	U1010230000000000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	159.637.944,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	457	U1010260000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR	70.749.137.630,54	0	0	0	0	0	0	0	0
6	487	U1010270000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	8.284.385.133,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	545	U1010330000000000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	725.109.306.061,45	0	0	0	0	0	0	4.128.920.073,00	4.128.920.073,00
8	562	U1010340000000000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	26.744.245.823,77	0	0	0	0	0	0		-
9	605	U1010410000000000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	642	U1010520000000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	659	U1010610000000000	DINAS SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	66.124.245,00	66.124.245,00
12	691	U1020110000000000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	14.950.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	735	U1020220000000000	DP3AP2KB	0	0	0	0	0	0	0	96.264.750,00	96.264.750,00
14	758	U1020310000000000	DINAS PANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	776	U1020510000000000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	794	U1020710000000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	840	U1020820000000000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	861	U1020910000000000	DINAS PERHUBUNGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	911	U1021020000000000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	234.128.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	932	U1021110000000000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECI DAN MENENGAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	955	U1021210000000000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	443.400.980,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	981	U1021310000000000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	1000	U1021610000000000	DINAS KEBUDAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1020	U1021810000000000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	1043	U2000110000000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.240.171.188,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	1070	U2000210000000000	DINAS PARIWISATA	389.887.000,00	0	0	0	0	0	0	345.475.437,00	345.475.437,00
27	1106	U2000320000000000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	391.170.276,00	0	0	0	0	0	0	64.043.819,00	64.043.819,00
28	1125	U2000330000000000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	295.431.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	1169	U2000410000000000	DINAS KEHUTANAN	85.347.130,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1196	U2000510000000000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	159.417.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	1214	U2000710000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	1238	U3000110000000000	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	1252	U3000210000000000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	1302	U3000320000000000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	1409	U3000330000000000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	77.016.720,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	1516	U3000410000000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	1539	U3000510000000000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	64.790.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
38	1562	U3000610000000000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	243.336.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1576	U3000710000000000	BADAN PENGHUBUNG	235.630.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1582	U4000100000000000	SEKRETARIAT DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	1621	U4000130000000000	BIRO HUKUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	1635	U4000140000000000	BIRO PEREKONOMIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	1677	U4000170000000000	BIRO ORGANISASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	1691	U4000180000000000	BIRO UMUM	296.496.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
45	1719	U4000210000000000	SEKRETARIAT DPRD	70.786.920,00	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1732	U4001100000000000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1746	U4001110000000000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1757	U4001120000000000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1771	U4001130000000000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1785	U4001140000000000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	1799	U5000110000000000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	1818	U5000120000000000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.223.636.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Total				1.030.070.802.347,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.110.838.650,00	9.110.838.650,00

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYAKONSTRUKSI DALAM PENGERJAANRPOVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2024

Lampiran 42

No	ID Sotk	ID User	Nama OPD	Mutasi Kurang					Total Mutasi Kurang	Saldo Akhir
				Penerimaan dari Cara Perolehan	Pengeluaran Internal Pengguna Barang	Koreksi	Reklasifikasi	Penghapusan		
1	3	U1010110000200000	DINAS PENDIDIKAN	0	0	0	0	0	0	19.125.899.932,89
2	408	U1010210000000000	DINAS KESEHATAN	0	0	0	24.628.202.517,00	0	24.628.202.517,00	121.942.005,00
3	434	U1010220000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	0	0	0	0	0	0	149.092.458.462,00
4	447	U1010230000000000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	0	0	0	27.916.944,00	0	27.916.944,00	131.721.000,00
5	457	U1010260000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR	0	0	0	0	0	0	70.749.137.630,54
6	487	U1010270000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	0	0	0	0	0	0	8.284.385.133,00
7	545	U1010330000000000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	0	0	25.000.000,00		0	25.000.000,00	729.213.226.134,45
8	562	U1010340000000000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	0	0	0	5.573.921.888,50	0	5.573.921.888,50	21.170.323.935,27
9	605	U1010410000000000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0	0	0	0	0	0	0,00
10	642	U1010520000000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	0	0	0	0	0	0,00
11	659	U1010610000000000	DINAS SOSIAL	0	0	0	0	0	0	66.124.245,00
12	691	U1020110000000000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0	0	0	0	0	0	14.950.000,00
13	735	U1020220000000000	DP3AP2KB	0	0	0	0	0	0	96.264.750,00
14	758	U1020310000000000	DINAS PANGAN	0	0	0	0	0	0	0,00
15	776	U1020510000000000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0,00
16	794	U1020710000000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	0	0	0	0	0,00
17	840	U1020820000000000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	0	0	0	0	0	0,00
18	861	U1020910000000000	DINAS PERHUBUNGAN	0	0	0	0	0	0	0,00
19	911	U1021020000000000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	0	0	0	0	0	0	234.128.450,00
20	932	U1021110000000000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECI DAN MENENGAH	0	0	0	0	0	0	0,00
21	955	U1021210000000000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	0	0	0	0	443.400.980,00
22	981	U1021310000000000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	0	0	0	0	0	0	0,00
23	1000	U1021610000000000	DINAS KEBUDAYAAN	0	0	0	0	0	0	0,00
24	1020	U1021810000000000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0	0	0	0	0	0	0,00
25	1043	U2000110000000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	0	0	598.098.306,48	0	598.098.306,48	642.072.881,52
26	1070	U2000210000000000	DINAS PARIWISATA	0	0	0	0	0	0	735.362.437,00
27	1106	U2000320000000000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0	0	0		0	0	455.214.095,00
28	1125	U2000330000000000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	0	0	0	0	0	0	295.431.200,00
29	1169	U2000410000000000	DINAS KEHUTANAN	0	0	0	0	0	0	85.347.130,00
30	1196	U2000510000000000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0	0	0	0	0	0	159.417.900,00
31	1214	U2000710000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	0	0	0	0	0	0,00
32	1238	U3000110000000000	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	0	0	0	0	0	0	0,00
33	1252	U3000210000000000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	0	0	0	0	0	0,00
34	1302	U3000320000000000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	0	0	0	0	0	0,00
35	1409	U3000330000000000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0	0	0	0	0	0	77.016.720,00
36	1516	U3000410000000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0	0	0	0	0	0	0,00
37	1539	U3000510000000000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	0	0	64.790.600,00	0	64.790.600,00	0,00
38	1562	U3000610000000000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	0	0	0	0	0	243.336.000,00
39	1576	U3000710000000000	BADAN PENGHUBUNG	0	0	0	0	0	0	235.630.800,00
40	1582	U4000100000000000	SEKRETARIAT DAERAH	0	0	0	0	0	0	0,00
41	1621	U4000130000000000	BIRO HUKUM	0	0	0	0	0	0	0,00
42	1635	U4000140000000000	BIRO PEREKONOMIAN	0	0	0	0	0	0	0,00
43	1677	U4000170000000000	BIRO ORGANISASI	0	0	0	0	0	0	0,00
44	1691	U4000180000000000	BIRO UMUM	0	0	0	0	0	0	296.496.000,00
45	1719	U4000210000000000	SEKRETARIAT DPRD	0	0	0	70.786.920,00	0	70.786.920,00	0,00
46	1732	U4001100000000000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	0	0	0	0	0	0	0,00
47	1746	U4001110000000000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	0	0	0	0	0	0	0,00
48	1757	U4001120000000000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	0	0	0	0	0	0	0,00
49	1771	U4001130000000000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	0	0	0	0	0	0	0,00
50	1785	U4001140000000000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	0,00
51	1799	U5000110000000000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	0	0	0	0	0,00
52	1818	U5000120000000000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	0	0	0	0	6.223.636.000,00
Total				0,00	0,00	25.000.000,00	30.963.717.175,98	0,00	30.988.717.175,98	1.008.192.923.821,67

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA ASET TIDAK BERWUJUD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

Lampiran 43

No	ID Sotk	ID User	Nama OPD	Saldo Awal Nilai perolehan	Saldo Awal penyusutan	Mutasi Tambah					
						Penerimaan dari Cara Perolehan				Penerimaan Internal Pengguna Barang	Penerimaan Internal Pengguna Barang / Akm Penyusutan
						Modal	Jasa Dikapitalisir	Hibah	Hibah/Akm Penyusutan		
1	3	U10101100002000000	DINAS PENDIDIKAN	2.363.651.063,50	2.360.688.633,18						
2	408	U1010210000000000	DINAS KESEHATAN	818.252.000,00	815.252.000,00						
3	434	U1010220000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	1.418.713.802,00	1.418.713.802,00						
4	447	U1010230000000000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	623.215.000,00	623.215.000,00						
5	457	U1010260000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR	1.336.175.252,00	1.336.175.252,00						
6	487	U1010270000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	1.514.676.122,00	1.501.206.734,00						
7	545	U1010330000000000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	13.093.627.594,50	12.532.872.619,32	8.075.250,00					
8	562	U1010340000000000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	45.100.000,00	45.100.000,00						
9	605	U1010410000000000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	535.093.500,00	535.093.500,00						
10	642	U1010520000000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-						
0	659	U1010610000000000	DINAS SOSIAL	-	-						
12	691	U1020110000000000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-						
13	735	U1020220000000000	DP3AP2KB	44.500.000,00	44.500.000,00						
14	758	U1020310000000000	DINAS PANGAN	24.800.000,00	24.800.000,00						
15	776	U1020510000000000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	282.458.000,00	282.458.000,00						
16	794	U1020710000000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	48.000.000,00	48.000.000,00						
17	840	U1020820000000000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-						
18	861	U1020910000000000	DINAS PERHUBUNGAN	1.008.242.200,00	1.008.242.200,00						
19	911	U1021020000000000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	424.520.000,00	424.520.000,00					109.615.000,00	109.615.000,00
20	932	U1021110000000000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECI DAN MENENGAH	-	-						
21	955	U1021210000000000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	479.402.800,00	479.402.800,00						
22	981	U1021310000000000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	-						
23	1000	U1021610000000000	DINAS KEBUDAYAAN	-	-						
24	1020	U1021810000000000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.448.496.231,00	2.332.321.718,00						
25	1043	U2000110000000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	67.000.000,00	67.000.000,00						
26	1070	U2000210000000000	DINAS PARIWISATA	329.495.500,00	329.135.500,00						
27	1106	U2000320000000000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-						
28	1125	U2000330000000000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	290.000.000,00	290.000.000,00						
29	1169	U2000410000000000	DINAS KEHUTANAN	6.000.000,00	6.000.000,00						
30	1196	U2000510000000000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-						
31	1214	U2000710000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-						
32	1238	U3000110000000000	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	232.815.000,00	232.815.000,00						
33	1252	U3000210000000000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.749.083.432,00	1.749.083.432,00						
34	1302	U3000320000000000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.296.295.000,00	1.296.295.000,00						
35	1409	U3000330000000000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2.111.108.800,00	2.111.108.800,00						
36	1516	U3000410000000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	334.841.000,00	334.841.000,00						
37	1539	U3000510000000000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	39.900.000,00	39.900.000,00	10.000.000,00					
38	1562	U3000610000000000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	69.850.000,00	69.850.000,00						
39	1576	U3000710000000000	BADAN PENGHUBUNG	102.100.000,00	102.100.000,00						
40	1582	U4000100000000000	SEKRETARIAT DAERAH	-	-						
41	1621	U4000130000000000	BIRO HUKUM	49.850.000,00	49.850.000,00						
42	1635	U4000140000000000	BIRO PEREKONOMIAN	-	-						
43	1677	U4000170000000000	BIRO ORGANISASI	139.850.000,00	139.850.000,00						
44	1691	U4000180000000000	BIRO UMUM	-	-						
45	1719	U4000210000000000	SEKRETARIAT DPRD	21.000.000,00	21.000.000,00						
46	1732	U4001100000000000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	49.700.000,00	49.700.000,00						
47	1746	U4001110000000000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	-	-						
48	1757	U4001120000000000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-						
49	1771	U4001130000000000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	-	-						
50	1785	U4001140000000000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	-						
51	1799	U5000110000000000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-						
52	1818	U5000120000000000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	70.727.818,00	70.727.818,00						
Total				33.468.540.115,00	32.771.818.808,50	18.075.250,00	-	-	-	109.615.000,00	109.615.000,00

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA ASET TIDAK BERWUJUD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

Lampiran 43

No	ID Sotk	ID User	Nama OPD	Koreksi	Koreksi / Akm penyusutan	Reklasifikasi	Reklasifikasi/ Akm Penyusutan	Beban Amortisasi	Total Mutasi Tambah Nilai Perolehan	Total Mutasi Tambah Akm Penyusutan	Penerimaan dari Cara Perolehan
1	3	U0101011000020000	DINAS PENDIDIKAN			7.450.000,00		2.226.215,00	7.450.000,00	-	
2	408	U0101021000000000	DINAS KESEHATAN					3.000.000,00	-	-	
3	434	U0101022000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI						-	-	
4	447	U0101023000000000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN						-	-	
5	457	U0101026000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR						-	-	
6	487	U0101027000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN					6.734.694,00	-	-	
7	545	U0101033000000000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG					281.992.537,50	8.075.250,00	-	
8	562	U0101034000000000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI						-	-	
9	605	U0101041000000000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN						-	-	
10	642	U0101052000000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						-	-	
0	659	U0101061000000000	DINAS SOSIAL						-	-	
12	691	U0102011000000000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						-	-	
13	735	U0102022000000000	DP3AP2KB						-	-	
14	758	U0102031000000000	DINAS PANGAN						-	-	
15	776	U0102051000000000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP						-	-	
16	794	U0102071000000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						-	-	
17	840	U0102082000000000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						-	-	
18	861	U0102091000000000	DINAS PERHUBUNGAN						-	-	
19	911	U0102102000000000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK						109.615.000,00	109.615.000,00	
20	932	U0102111000000000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECI DAN MENENGAH						-	-	
21	955	U0102121000000000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						-	-	
22	981	U0102131000000000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA						-	-	
23	1000	U0102161000000000	DINAS KEBUDAYAAN						-	-	
24	1020	U0102181000000000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					66.772.228,00	-	-	
25	1043	U2000110000000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						-	-	
26	1070	U2000210000000000	DINAS PARIWISATA					360.000,00	-	-	
27	1106	U2000320000000000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN						-	-	
28	1125	U2000330000000000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA						-	-	
29	1169	U2000410000000000	DINAS KEHUTANAN						-	-	
30	1196	U2000510000000000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						-	-	
31	1214	U2000710000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						-	-	
32	1238	U3000110000000000	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI						-	-	
33	1252	U3000210000000000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						-	-	
34	1302	U3000320000000000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						-	-	
35	1409	U3000330000000000	BADAN PENDAPATAN DAERAH						-	-	
36	1516	U3000410000000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						-	-	
37	1539	U3000510000000000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					2.000.000,00	10.000.000,00	-	
38	1562	U3000610000000000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						-	-	
39	1576	U3000710000000000	BADAN PENGHUBUNG						-	-	
40	1582	U4000100000000000	SEKRETARIAT DAERAH						-	-	
41	1621	U4000130000000000	BIRO HUKUM						-	-	
42	1635	U4000140000000000	BIRO PEREKONOMIAN						-	-	
43	1677	U4000170000000000	BIRO ORGANISASI						-	-	
44	1691	U4000180000000000	BIRO UMUM						-	-	
45	1719	U4000210000000000	SEKRETARIAT DPRD						-	-	
46	1732	U4001100000000000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						-	-	
47	1746	U4001110000000000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN						-	-	
48	1757	U4001120000000000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT						-	-	
49	1771	U4001130000000000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						-	-	
50	1785	U4001140000000000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA						-	-	
51	1799	U5000110000000000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						-	-	
52	1818	U5000120000000000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						-	-	
Total				-	-	7.450.000,00	-	363.085.674,50	135.140.250,00	109.615.000,00	-

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA ASET TIDAK BERWUJUD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

Lampiran 43

No	ID Sotk	ID User	Nama OPD	Mutasi Kurang								
				Pengeluaran Internal Pengguna Barang	Pengeluaran Internal Pengguna Barang / Akm Penyusutan	Koreksi	Koreksi/ Akm Penyusutan	Reklasifikasi	Reklasifikasi /Akm Penyusutan	Penghapusan	Penghapusan / Akm Penyusutan	Total Mutasi Kurang Nilai Perolehan
1	3	U1010110000200000	DINAS PENDIDIKAN									-
2	408	U1010210000000000	DINAS KESEHATAN									-
3	434	U1010220000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI									-
4	447	U1010230000000000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN									-
5	457	U1010260000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR									-
6	487	U1010270000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN									-
7	545	U1010330000000000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG									-
8	562	U1010340000000000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI									-
9	605	U1010410000000000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN									-
10	642	U1010520000000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									-
0	659	U1010610000000000	DINAS SOSIAL									-
12	691	U1020110000000000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI									-
13	735	U1020220000000000	DP3AP2KB					44.500.000,00	44.500.000,00			44.500.000,00
14	758	U1020310000000000	DINAS PANGAN									-
15	776	U1020510000000000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP									-
16	794	U1020710000000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									-
17	840	U1020820000000000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									-
18	861	U1020910000000000	DINAS PERHUBUNGAN									-
19	911	U1021020000000000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK									-
20	932	U1021110000000000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECI DAN MENENGAH									-
21	955	U1021210000000000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									-
22	981	U1021310000000000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA									-
23	1000	U1021610000000000	DINAS KEBUDAYAAN									-
24	1020	U1021810000000000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN									-
25	1043	U2000110000000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN									-
26	1070	U2000210000000000	DINAS PARIWISATA									-
27	1106	U2000320000000000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN									-
28	1125	U2000330000000000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA									-
29	1169	U2000410000000000	DINAS KEHUTANAN									-
30	1196	U2000510000000000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									-
31	1214	U2000710000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN									-
32	1238	U3000110000000000	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	109.615.000,00	109.615.000,00							109.615.000,00
33	1252	U3000210000000000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									-
34	1302	U3000320000000000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									-
35	1409	U3000330000000000	BADAN PENDAPATAN DAERAH									-
36	1516	U3000410000000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									-
37	1539	U3000510000000000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									-
38	1562	U3000610000000000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									-
39	1576	U3000710000000000	BADAN PENGHUBUNG									-
40	1582	U4000100000000000	SEKRETARIAT DAERAH									-
41	1621	U4000130000000000	BIRO HUKUM									-
42	1635	U4000140000000000	BIRO PEREKONOMIAN									-
43	1677	U4000170000000000	BIRO ORGANISASI									-
44	1691	U4000180000000000	BIRO UMUM									-
45	1719	U4000210000000000	SEKRETARIAT DPRD									-
46	1732	U4001100000000000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									-
47	1746	U4001110000000000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN									-
48	1757	U4001120000000000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT									-
49	1771	U4001130000000000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH									-
50	1785	U4001140000000000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA									-
51	1799	U5000110000000000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									-
52	1818	U5000120000000000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									-
Total				109.615.000,00	109.615.000,00	-	-	44.500.000,00	44.500.000,00	-	-	154.115.000,00

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA ASET TIDAK BERWUJUD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

Lampiran 43

No	ID Sotk	ID User	Nama OPD	Total Mutasi Kurang Akm Penyusutan	Total Mutasi Nilai Perolehan	Total Mutasi Akm Penyusutan	Saldo Akhir Nilai Perolehan	Saldo Akhir Akm Penyusutan
1	3	U10101100002000000	DINAS PENDIDIKAN	-	7.450.000,00	-	2.371.101.063,50	2.362.914.848,18
2	408	U10102100000000000	DINAS KESEHATAN	-	-	-	818.252.000,00	818.252.000,00
3	434	U10102200000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	-	-	-	1.418.713.802,00	1.418.713.802,00
4	447	U10102300000000000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	-	-	-	623.215.000,00	623.215.000,00
5	457	U10102600000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR	-	-	-	1.336.175.252,00	1.336.175.252,00
6	487	U10102700000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	-	-	-	1.514.676.122,00	1.507.941.428,00
7	545	U10103300000000000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	-	8.075.250,00	-	13.101.702.844,50	12.814.865.156,82
8	562	U10103400000000000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	-	-	-	45.100.000,00	45.100.000,00
9	605	U10104100000000000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	-	-	535.093.500,00	535.093.500,00
10	642	U10105200000000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-
0	659	U10106100000000000	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	-
12	691	U10201100000000000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-	-
13	735	U10202200000000000	DP3AP2KB	44.500.000,00	(44.500.000,00)	(44.500.000,00)	-	-
14	758	U10203100000000000	DINAS PANGAN	-	-	-	24.800.000,00	24.800.000,00
15	776	U10205100000000000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	282.458.000,00	282.458.000,00
16	794	U10207100000000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	48.000.000,00	48.000.000,00
17	840	U10208200000000000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-
18	861	U10209100000000000	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	1.008.242.200,00	1.008.242.200,00
19	911	U10210200000000000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	109.615.000,00	109.615.000,00	534.135.000,00	534.135.000,00
20	932	U10211100000000000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECI DAN MENENGAH	-	-	-	-	-
21	955	U10212100000000000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	479.402.800,00	479.402.800,00
22	981	U10213100000000000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	-	-	-	-
23	1000	U10216100000000000	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-
24	1020	U10218100000000000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	2.448.496.231,00	2.399.093.946,00
25	1043	U20001100000000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	67.000.000,00	67.000.000,00
26	1070	U20002100000000000	DINAS PARIWISATA	-	-	-	329.495.500,00	329.495.500,00
27	1106	U20003200000000000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-	-	-	-
28	1125	U20003300000000000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	-	-	-	290.000.000,00	290.000.000,00
29	1169	U20004100000000000	DINAS KEHUTANAN	-	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00
30	1196	U20005100000000000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	-	-
31	1214	U20007100000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	-	-
32	1238	U30001100000000000	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	109.615.000,00	(109.615.000,00)	(109.615.000,00)	123.200.000,00	123.200.000,00
33	1252	U30002100000000000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	1.749.083.432,00	1.749.083.432,00
34	1302	U30003200000000000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	1.296.295.000,00	1.296.295.000,00
35	1409	U30003300000000000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	2.111.108.800,00	2.111.108.800,00
36	1516	U30004100000000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	334.841.000,00	334.841.000,00
37	1539	U30005100000000000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	10.000.000,00	-	49.900.000,00	41.900.000,00
38	1562	U30006100000000000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	69.850.000,00	69.850.000,00
39	1576	U30007100000000000	BADAN PENGHUBUNG	-	-	-	102.100.000,00	102.100.000,00
40	1582	U40001000000000000	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	-
41	1621	U40001300000000000	BIRO HUKUM	-	-	-	49.850.000,00	49.850.000,00
42	1635	U40001400000000000	BIRO PEREKONOMIAN	-	-	-	-	-
43	1677	U40001700000000000	BIRO ORGANISASI	-	-	-	139.850.000,00	139.850.000,00
44	1691	U40001800000000000	BIRO UMUM	-	-	-	-	-
45	1719	U40002100000000000	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	21.000.000,00	21.000.000,00
46	1732	U40011000000000000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	-	-	49.700.000,00	49.700.000,00
47	1746	U40011100000000000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	-	-	-	-	-
48	1757	U40011200000000000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	-	-
49	1771	U40011300000000000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	-	-	-	-	-
50	1785	U40011400000000000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	-	-	-	-
51	1799	U50001100000000000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-	-
52	1818	U50001200000000000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	70.727.818,00	70.727.818,00
Total				154.115.000,00	(18.974.750,00)	(44.500.000,00)	33.449.565.365,00	33.090.404.483,00

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYAASET TIDAK BERMANFAATPROVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2024

Lampiran 44

No	ID Sotk	ID User	Nama OPD	Saldo Awal Nilai perolehan	Saldo Awal penyusutan	Mutasi Tambah					
						Penerimaan dari Cara Perolehan				Penerimaan Internal Pengguna Barang	Penerimaan Internal Pengguna Barang / Akm Penyusutan
						Modal	Jasa Dikapitalisir	Hibah	Hibah/Akm Penyusutan		
1	3	U1010110000200000	DINAS PENDIDIKAN	40.059.203.097,11	31.294.199.299,75						
2	408	U1010210000000000	DINAS KESEHATAN	1.707.089.038,81	1.707.089.038,81						
3	434	U1010220000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	-	-						
4	447	U1010230000000000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	46.127.000,00	46.127.000,00						
5	457	U1010260000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR	4.697.525.293,36	4.697.525.293,36						
6	487	U1010270000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	3.225.524.800,00	3.225.524.800,00						
7	545	U1010330000000000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	35.103.890.317,78	4.429.747.282,32						
8	562	U1010340000000000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	30.602.650,00	22.951.987,20						
9	605	U1010410000000000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	-						
10	642	U1010520000000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-						
11	659	U1010610000000000	DINAS SOSIAL	4.000.000,00	4.000.000,00						
12	691	U1020110000000000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	806.364.494,34	806.346.014,34						
13	735	U1020220000000000	DP3AP2KB	-	-						
14	758	U1020310000000000	DINAS PANGAN	-	-						
15	776	U1020510000000000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-						
16	794	U1020710000000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	117.900.000,00	117.900.000,00						
17	840	U1020820000000000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	177.799.000,00	177.799.000,00						
18	861	U1020910000000000	DINAS PERHUBUNGAN	16.700.000,00	16.700.000,00						
19	911	U1021020000000000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	-						
20	932	U1021110000000000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	286.216.500,00	286.216.500,00						
21	955	U1021210000000000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	139.846.064,00	139.846.064,00						
22	981	U1021310000000000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	174.481.500,00	174.481.500,00						
23	1000	U1021610000000000	DINAS KEBUDAYAAN	1.927.477.088,00	1.882.947.088,00						
24	1020	U1021810000000000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	182.900.000,00	182.900.000,00						
25	1043	U2000110000000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	20.643.102.233,20	11.869.526.870,90						
26	1070	U2000210000000000	DINAS PARIWISATA	1.187.437.586,00	1.178.437.586,00						
27	1106	U2000320000000000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	3.174.387.357,60	2.265.231.356,16						
28	1125	U2000330000000000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	2.379.481.698,37	2.379.481.698,37						
29	1169	U2000410000000000	DINAS KEHUTANAN	3.621.475.661,43	3.576.936.115,83						
30	1196	U2000510000000000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	838.286.377,03	838.286.377,03						
31	1214	U2000710000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	35.900.000,00	29.437.999,56						
32	1238	U3000110000000000	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	328.292.500,00	328.292.500,00						
33	1252	U3000210000000000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	548.481.000,00	548.481.000,00						
34	1302	U3000320000000000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	642.719.317,00	642.719.317,00						
35	1409	U3000330000000000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.259.113.327,17	1.259.113.327,17						
36	1516	U3000410000000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	537.195.875,48	537.195.875,48						
37	1539	U3000510000000000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	368.742.612,50	368.742.612,50						
38	1562	U3000610000000000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-						
39	1576	U3000710000000000	BADAN PENGHUBUNG	960.864.434,00	466.873.887,32						
40	1582	U4000100000000000	SEKRETARIAT DAERAH	198.900.000,01	198.900.000,01						
41	1621	U4000130000000000	BIRO HUKUM	205.778.230,00	205.778.230,00						
42	1635	U4000140000000000	BIRO PEREKONOMIAN	130.335.208,99	130.335.208,99						
43	1677	U4000170000000000	BIRO ORGANISASI	318.933.849,70	318.533.849,54						
44	1691	U4000180000000000	BIRO UMUM	331.489.607,00	81.649.017,00						
45	1719	U4000210000000000	SEKRETARIAT DPRD	7.495.734.877,00	6.631.982.836,44						
46	1732	U4001100000000000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	-						
47	1746	U4001110000000000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	153.276.706,00	153.276.706,00						
48	1757	U4001120000000000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-						
49	1771	U4001130000000000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	260.448.000,00	260.448.000,00						
50	1785	U4001140000000000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.395.579.070,00	1.395.579.070,00						
51	1799	U5000110000000000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	196.234.438,00	196.234.438,00						
52	1818	U5000120000000000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.250.657.881,73	5.221.754.282,05						
Total				141.166.494.691,61	90.295.529.029,13	-	-	-	-	-	-

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYAASET TIDAK BERMANFAATPROVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2024

Lampiran 44

No	ID Sotk	ID User	Nama OPD	Koreksi	Koreksi / Akm penyusutan	Reklasifikasi	Reklasifikasi/ Akm Penyusutan	Beban Penyusutan	Total Mutasi Tambah Nilai Perolehan	Total Mutasi Tambah Akm Penyusutan	Penerimaan dari Cara Perolehan
1	3	U10101100002000000	DINAS PENDIDIKAN	0,01	0,01	1.668.820.662,00	946.962.402,30		1.668.820.662,01	946.962.402,31	
2	408	U1010210000000000	DINAS KESEHATAN						-	-	
3	434	U1010220000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI						-	-	
4	447	U1010230000000000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN						-	-	
5	457	U1010260000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR						-	-	
6	487	U1010270000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN						-	-	
7	545	U1010330000000000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG						-	-	
8	562	U1010340000000000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI						-	-	
9	605	U1010410000000000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN						-	-	
10	642	U1010520000000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						-	-	
11	659	U1010610000000000	DINAS SOSIAL			1.493.251.623,91	1.477.771.623,91		1.493.251.623,91	1.477.771.623,91	
12	691	U1020110000000000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						-	-	
13	735	U1020220000000000	DP3AP2KB			467.787.500,00	466.207.499,68		467.787.500,00	466.207.499,68	
14	758	U1020310000000000	DINAS PANGAN						-	-	
15	776	U1020510000000000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			228.794.100,00	228.794.100,00		228.794.100,00	228.794.100,00	
16	794	U1020710000000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						-	-	
17	840	U1020820000000000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						-	-	
18	861	U1020910000000000	DINAS PERHUBUNGAN			588.195.438,99	588.195.438,99		588.195.438,99	588.195.438,99	
19	911	U1021020000000000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK			450.152.370,00	450.152.370,00		450.152.370,00	450.152.370,00	
20	932	U1021110000000000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH						-	-	
21	955	U1021210000000000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			167.093.859,00	167.093.859,00		167.093.859,00	167.093.859,00	
22	981	U1021310000000000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			471.687.245,00	468.846.964,92		471.687.245,00	468.846.964,92	
23	1000	U1021610000000000	DINAS KEBUDAYAAN						-	-	
24	1020	U1021810000000000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN						-	-	
25	1043	U2000110000000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			402.416.600,00			402.416.600,00	-	
26	1070	U2000210000000000	DINAS PARIWISATA						-	-	
27	1106	U2000320000000000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			90.000.000,00			90.000.000,00	-	
28	1125	U2000330000000000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA						-	-	
29	1169	U2000410000000000	DINAS KEHUTANAN						-	-	
30	1196	U2000510000000000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						-	-	
31	1214	U2000710000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						-	-	
32	1238	U3000110000000000	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI			624.357.500,00	624.357.500,00		624.357.500,00	624.357.500,00	
33	1252	U3000210000000000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						-	-	
34	1302	U3000320000000000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						-	-	
35	1409	U3000330000000000	BADAN PENDAPATAN DAERAH			342.933.037,84	342.933.037,84		342.933.037,84	342.933.037,84	
36	1516	U3000410000000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						-	-	
37	1539	U3000510000000000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						-	-	
38	1562	U3000610000000000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						-	-	
39	1576	U3000710000000000	BADAN PENGHUBUNG						-	-	
40	1582	U4000100000000000	SEKRETARIAT DAERAH						-	-	
41	1621	U4000130000000000	BIRO HUKUM						-	-	
42	1635	U4000140000000000	BIRO PEREKONOMIAN						-	-	
43	1677	U4000170000000000	BIRO ORGANISASI						-	-	
44	1691	U4000180000000000	BIRO UMUM						-	-	
45	1719	U4000210000000000	SEKRETARIAT DPRD						-	-	
46	1732	U4001100000000000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						-	-	
47	1746	U4001110000000000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN						-	-	
48	1757	U4001120000000000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT						-	-	
49	1771	U4001130000000000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						-	-	
50	1785	U4001140000000000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA						-	-	
51	1799	U5000110000000000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						-	-	
52	1818	U5000120000000000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						-	-	
Total				0,01	0,01	6.995.489.936,74	5.761.314.796,64	-	6.995.489.936,75	5.761.314.796,65	-

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYAASET TIDAK BERMANFAATPROVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2024

Lampiran 44

No	ID Sotk	ID User	Nama OPD	Mutasi Kurang								Total Mutasi Kurang Nilai Perolehan
				Pengeluaran Internal Pengguna Barang	Pengeluaran Internal Pengguna Barang / Akm Penyusutan	Koreksi	Koreksi/ Akm Penyusutan	Reklasifikasi	Reklasifikasi /Akm Penyusutan	Penghapusan	Penghapusan / Akm Penyusutan	
1	3	U1010110000200000	DINAS PENDIDIKAN				0,88					-
2	408	U1010210000000000	DINAS KESEHATAN							1.415.518.016,81	1.415.518.016,81	1.415.518.016,81
3	434	U1010220000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI									-
4	447	U1010230000000000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN									-
5	457	U1010260000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR							4.730.304,36	4.730.304,36	4.730.304,36
6	487	U1010270000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN									-
7	545	U1010330000000000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG									-
8	562	U1010340000000000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI									-
9	605	U1010410000000000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN									-
10	642	U1010520000000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									-
11	659	U1010610000000000	DINAS SOSIAL									-
12	691	U1020110000000000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							457.777.494,34	457.759.014,34	457.777.494,34
13	735	U1020220000000000	DP3AP2KB									-
14	758	U1020310000000000	DINAS PANGAN									-
15	776	U1020510000000000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP									-
16	794	U1020710000000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									-
17	840	U1020820000000000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									-
18	861	U1020910000000000	DINAS PERHUBUNGAN							588.195.438,99	588.195.438,99	588.195.438,99
19	911	U1021020000000000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK									-
20	932	U1021110000000000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH					228.000.000,00	228.000.000,00			228.000.000,00
21	955	U1021210000000000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									-
22	981	U1021310000000000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA							164.625.500,00	164.625.500,00	164.625.500,00
23	1000	U1021610000000000	DINAS KEBUDAYAAN							500.086.950,00	500.086.950,00	500.086.950,00
24	1020	U1021810000000000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN									-
25	1043	U2000110000000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					1.864.146.824,00	1.864.146.824,00	3.837.017.365,00	2.853.957.098	5.701.164.189,00
26	1070	U2000210000000000	DINAS PARIWISATA							1.037.437.586,00	1.028.437.586,00	1.037.437.586,00
27	1106	U2000320000000000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN							2.033.839.501,60	1.034.683.500,16	2.033.839.501,60
28	1125	U2000330000000000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA							131.528.684,00	131.528.684,00	131.528.684,00
29	1169	U2000410000000000	DINAS KEHUTANAN									-
30	1196	U2000510000000000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									-
31	1214	U2000710000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN									-
32	1238	U3000110000000000	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI							248.292.500,00	248.292.500,00	248.292.500,00
33	1252	U3000210000000000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									-
34	1302	U3000320000000000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									-
35	1409	U3000330000000000	BADAN PENDAPATAN DAERAH							225.242.997,49	225.242.997,49	225.242.997,49
36	1516	U3000410000000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH							525.495.875,48	525.495.875,48	525.495.875,48
37	1539	U3000510000000000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							106.242.612,50	106.242.612,50	106.242.612,50
38	1562	U3000610000000000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									-
39	1576	U3000710000000000	BADAN PENGHUBUNG							589.398.462,00	95.407.915,32	589.398.462,00
40	1582	U4000100000000000	SEKRETARIAT DAERAH									-
41	1621	U4000130000000000	BIRO HUKUM									-
42	1635	U4000140000000000	BIRO PEREKONOMIAN									-
43	1677	U4000170000000000	BIRO ORGANISASI							318.933.849,70	318.533.849,54	318.933.849,70
44	1691	U4000180000000000	BIRO UMUM									-
45	1719	U4000210000000000	SEKRETARIAT DPRD							5.367.135.337,00	5.085.482.836,44	5.367.135.337,00
46	1732	U4001100000000000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									-
47	1746	U4001110000000000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN									-
48	1757	U4001120000000000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT									-
49	1771	U4001130000000000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH									-
50	1785	U4001140000000000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA					492.616.580,00	492.616.580,00			492.616.580,00
51	1799	U5000110000000000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							196.234.438,00	196.234.438,00	196.234.438,00
52	1818	U5000120000000000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									-
Total				-	-	-	0,88	2.584.763.404,00	2.584.763.404,00	17.747.732.913,27	14.980.455.117,55	20.332.496.317,27

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYAASET TIDAK BERMANFAATPROVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2024

Lampiran 44

No	ID Sotk	ID User	Nama OPD	Total Mutasi Kurang Akm Penyusutan	Total Mutasi Nilai Perolehan	Total Mutasi Akm Penyusutan	Saldo Akhir Nilai Perolehan	Saldo Akhir Akm Penyusutan
1	3	U10101100002000000	DINAS PENDIDIKAN	0,88	1.668.820.662,01	946.962.401,43	41.728.023.759,12	32.241.161.701,18
2	408	U10102100000000000	DINAS KESEHATAN	1.415.518.016,81	(1.415.518.016,81)	(1.415.518.016,81)	291.571.022,00	291.571.022,00
3	434	U10102200000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	-	-	-	-	-
4	447	U10102300000000000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	-	-	-	46.127.000,00	46.127.000,00
5	457	U10102600000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR	4.730.304,36	(4.730.304,36)	(4.730.304,36)	4.692.794.989,00	4.692.794.989,00
6	487	U10102700000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	-	-	-	3.225.524.800,00	3.225.524.800,00
7	545	U10103300000000000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	-	-	-	35.103.890.317,78	4.429.747.282,32
8	562	U10103400000000000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	-	-	-	30.602.650,00	22.951.987,20
9	605	U10104100000000000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	-	-	-	-
10	642	U10105200000000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-
11	659	U10106100000000000	DINAS SOSIAL	-	1.493.251.623,91	1.477.771.623,91	1.497.251.623,91	1.481.771.623,91
12	691	U10201100000000000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	457.759.014,34	(457.777.494,34)	(457.759.014,34)	348.587.000,00	348.587.000,00
13	735	U10202200000000000	DP3AP2KB	-	467.787.500,00	466.207.499,68	467.787.500,00	466.207.499,68
14	758	U10203100000000000	DINAS PANGAN	-	-	-	-	-
15	776	U10205100000000000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	228.794.100,00	228.794.100,00	228.794.100,00	228.794.100,00
16	794	U10207100000000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	117.900.000,00	117.900.000,00
17	840	U10208200000000000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	177.799.000,00	177.799.000,00
18	861	U10209100000000000	DINAS PERHUBUNGAN	588.195.438,99	-	-	16.700.000,00	16.700.000,00
19	911	U10210200000000000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	450.152.370,00	450.152.370,00	450.152.370,00	450.152.370,00
20	932	U10211100000000000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	228.000.000,00	(228.000.000,00)	(228.000.000,00)	58.216.500,00	58.216.500,00
21	955	U10212100000000000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	167.093.859,00	167.093.859,00	306.939.923,00	306.939.923,00
22	981	U10213100000000000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	164.625.500,00	307.061.745,00	304.221.464,92	481.543.245,00	478.702.964,92
23	1000	U10216100000000000	DINAS KEBUDAYAAN	500.086.950,00	(500.086.950,00)	(500.086.950,00)	1.427.390.138,00	1.382.860.138,00
24	1020	U10218100000000000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	182.900.000,00	182.900.000,00
25	1043	U20001100000000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.718.103.922,12	(5.298.747.589,00)	(4.718.103.922,12)	15.344.354.644,20	7.151.422.948,78
26	1070	U20002100000000000	DINAS PARIWISATA	1.028.437.586,00	(1.037.437.586,00)	(1.028.437.586,00)	150.000.000,00	150.000.000,00
27	1106	U20003200000000000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.034.683.500,16	(1.943.839.501,60)	(1.034.683.500,16)	1.230.547.856,00	1.230.547.856,00
28	1125	U20003300000000000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	131.528.684,00	(131.528.684,00)	(131.528.684,00)	2.247.953.014,37	2.247.953.014,37
29	1169	U20004100000000000	DINAS KEHUTANAN	-	-	-	3.621.475.661,43	3.576.936.115,83
30	1196	U20005100000000000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	838.286.377,03	838.286.377,03
31	1214	U20007100000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	35.900.000,00	29.437.999,56
32	1238	U30001100000000000	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	248.292.500,00	376.065.000,00	376.065.000,00	704.357.500,00	704.357.500,00
33	1252	U30002100000000000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	548.481.000,00	548.481.000,00
34	1302	U30003200000000000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	642.719.317,00	642.719.317,00
35	1409	U30003300000000000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	225.242.997,49	117.690.040,35	117.690.040,35	1.376.803.367,52	1.376.803.367,52
36	1516	U30004100000000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	525.495.875,48	(525.495.875,48)	(525.495.875,48)	11.700.000,00	11.700.000,00
37	1539	U30005100000000000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	106.242.612,50	(106.242.612,50)	(106.242.612,50)	262.500.000,00	262.500.000,00
38	1562	U30006100000000000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	-	-
39	1576	U30007100000000000	BADAN PENGHUBUNG	95.407.915,32	(589.398.462,00)	(95.407.915,32)	371.465.972,00	371.465.972,00
40	1582	U40001000000000000	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	198.900.000,01	198.900.000,01
41	1621	U40001300000000000	BIRO HUKUM	-	-	-	205.778.230,00	205.778.230,00
42	1635	U40001400000000000	BIRO PEREKONOMIAN	-	-	-	130.335.208,99	130.335.208,99
43	1677	U40001700000000000	BIRO ORGANISASI	318.533.849,54	(318.933.849,70)	(318.533.849,54)	-	-
44	1691	U40001800000000000	BIRO UMUM	-	-	-	331.489.607,00	81.649.017,00
45	1719	U40002100000000000	SEKRETARIAT DPRD	5.085.482.836,44	(5.367.135.337,00)	(5.085.482.836,44)	2.128.599.540,00	1.546.500.000,00
46	1732	U40011000000000000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	-	-	-	-
47	1746	U40011100000000000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	-	-	-	153.276.706,00	153.276.706,00
48	1757	U40011200000000000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	-	-
49	1771	U40011300000000000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	-	-	-	260.448.000,00	260.448.000,00
50	1785	U40011400000000000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	492.616.580,00	(492.616.580,00)	(492.616.580,00)	902.962.490,00	902.962.490,00
51	1799	U50001100000000000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	196.234.438,00	(196.234.438,00)	(196.234.438,00)	-	-
52	1818	U50001200000000000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	5.250.657.881,73	5.221.754.282,05
Total				17.565.218.522,43	(13.337.006.380,52)	(11.803.903.725,78)	127.829.488.311,09	78.491.625.303,35

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYAASET DIMANFAATKAN PIHAK LAINRPOVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2024

Lampiran 45

No	ID Sotk	ID User	Nama OPD	Saldo Awal	Mutasi Tambah							Total Mutasi Tambah
					Penerimaan dari Cara Perolehan				Penerimaan Internal Pengguna Barang	Koreksi	Reklasifikasi	
					Modal	Modal Bos	Jasa Dikapitalisir	Hibah				
1	3	U1010110000200000	DINAS PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	408	U1010210000000000	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	434	U1010220000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	447	U1010230000000000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	457	U1010260000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	487	U1010270000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	545	U1010330000000000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	562	U1010340000000000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	605	U1010410000000000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	642	U1010520000000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	659	U1010610000000000	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	691	U1020110000000000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	735	U1020220000000000	DP3AP2KB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	758	U1020310000000000	DINAS PANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	776	U1020510000000000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	794	U1020710000000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	840	U1020820000000000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	861	U1020910000000000	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	911	U1021020000000000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	932	U1021110000000000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECI DAN MENENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	955	U1021210000000000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	981	U1021310000000000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1000	U1021610000000000	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1020	U1021810000000000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1043	U2000110000000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1070	U2000210000000000	DINAS PARIWISATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1106	U2000320000000000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	1125	U2000330000000000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1169	U2000410000000000	DINAS KEHUTANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1196	U2000510000000000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	1214	U2000710000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1238	U3000110000000000	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1252	U3000210000000000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	1302	U3000320000000000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	1409	U3000330000000000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	1516	U3000410000000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	1539	U3000510000000000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1562	U3000610000000000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	1576	U3000710000000000	BADAN PENGHUBUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	1582	U4000100000000000	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	1621	U4000130000000000	BIRO HUKUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	1635	U4000140000000000	BIRO PEREKONOMIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	1677	U4000170000000000	BIRO ORGANISASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	1691	U4000180000000000	BIRO UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	1719	U4000210000000000	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	1732	U4001100000000000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	1746	U4001110000000000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	1757	U4001120000000000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	1771	U4001130000000000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	1785	U4001140000000000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	1799	U5000110000000000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	1818	U5000120000000000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total				-	-	-	-	-	-	-	-	-

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYAASET DIMANFAATKAN PIHAK LAINRPOVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2024

Lampiran 45

No	ID Sotk	ID User	Nama OPD	Mutasi Kurang					Total Mutasi Kurang	Saldo Akhir KIB	Saldo Akhir Perhitungan	Selisih
				Penerimaan dari Cara Perolehan	Pengeluaran Internal Pengguna Barang	Koreksi	Reklasifikasi	Penghapusan				
1	3	U10101100000200000	DINAS PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	408	U10102100000000000	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	434	U10102200000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	447	U10102300000000000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	457	U10102600000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	487	U10102700000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	545	U10103300000000000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	562	U10103400000000000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	605	U10104100000000000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	642	U10105200000000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	659	U10106100000000000	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	691	U10201100000000000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	735	U10202200000000000	DP3AP2KB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	758	U10203100000000000	DINAS PANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	776	U10205100000000000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	794	U10207100000000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	840	U10208200000000000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	861	U10209100000000000	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	911	U10210200000000000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	932	U10211100000000000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECI DAN MENENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	955	U10212100000000000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	981	U10213100000000000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1000	U10216100000000000	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1020	U10218100000000000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1043	U20001100000000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1070	U20002100000000000	DINAS PARIWISATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1106	U20003200000000000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	1125	U20003300000000000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1169	U20004100000000000	DINAS KEHUTANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1196	U20005100000000000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	1214	U20007100000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1238	U30001100000000000	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1252	U30002100000000000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	1302	U30003200000000000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	1409	U30003300000000000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	1516	U30004100000000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	1539	U30005100000000000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1562	U30006100000000000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	1576	U30007100000000000	BADAN PENGHUBUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	1582	U40001000000000000	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	1621	U40001300000000000	BIRO HUKUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	1635	U40001400000000000	BIRO PEREKONOMIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	1677	U40001700000000000	BIRO ORGANISASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	1691	U40001800000000000	BIRO UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	1719	U40002100000000000	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	1732	U40011000000000000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	1746	U40011100000000000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	1757	U40011200000000000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	1771	U40011300000000000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	1785	U40011400000000000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	1799	U50001100000000000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	1818	U50001200000000000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total				-	-	-	-	-	-	-	-	-

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYAASET DALAM PENELUSURANRPOVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2024

Lampiran 46

No	ID Sotk	ID User	Nama OPD	Saldo Awal	Mutasi Tambah							
					Penerimaan dari Cara Perolehan				Penerimaan Internal Pengguna Barang	Koreksi	Reklasifikasi	Total Mutasi Tambah
					Modal	Modal Bos	Jasa Dikapitalisir	Hibah				
1	3	U1010110000200000	DINAS PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	408	U1010210000000000	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	434	U1010220000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	447	U1010230000000000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	457	U1010260000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	487	U1010270000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	545	U1010330000000000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	562	U1010340000000000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	605	U1010410000000000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	642	U1010520000000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	659	U1010610000000000	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	691	U1020110000000000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	735	U1020220000000000	DP3AP2KB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	758	U1020310000000000	DINAS PANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	776	U1020510000000000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	794	U1020710000000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	840	U1020820000000000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	861	U1020910000000000	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	911	U1021020000000000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	932	U1021110000000000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECI DAN MENENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	955	U1021210000000000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	981	U1021310000000000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1000	U1021610000000000	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1020	U1021810000000000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1043	U2000110000000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1070	U2000210000000000	DINAS PARIWISATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1106	U2000320000000000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	1125	U2000330000000000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1169	U2000410000000000	DINAS KEHUTANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1196	U2000510000000000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	1214	U2000710000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1238	U3000110000000000	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1252	U3000210000000000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	1302	U3000320000000000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	1409	U3000330000000000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	1516	U3000410000000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	1539	U3000510000000000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1562	U3000610000000000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	1576	U3000710000000000	BADAN PENGHUBUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	1582	U4000100000000000	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	1621	U4000130000000000	BIRO HUKUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	1635	U4000140000000000	BIRO PEREKONOMIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	1677	U4000170000000000	BIRO ORGANISASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	1691	U4000180000000000	BIRO UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	1719	U4000210000000000	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	1732	U4001100000000000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	1746	U4001110000000000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	1757	U4001120000000000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	1771	U4001130000000000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	1785	U4001140000000000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	1799	U5000110000000000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	1818	U5000120000000000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total				-	-	-	-	-	-	-	-	-

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYAASET DALAM PENELUSURANRPOVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2024

Lampiran 46

No	ID Sotk	ID User	Nama OPD	Mutasi Kurang					Total Mutasi Kurang	Saldo Akhir KIB	Saldo Akhir Perhitungan	Selisih
				Penerimaan dari Cara Perolehan	Pengeluaran Internal Pengguna Barang	Koreksi	Reklasifikasi	Penghapusan				
1	3	U10101100000200000	DINAS PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	408	U10102100000000000	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	434	U10102200000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	447	U10102300000000000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	457	U10102600000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	487	U10102700000000000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	545	U10103300000000000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	562	U10103400000000000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	605	U10104100000000000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	642	U10105200000000000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	659	U10106100000000000	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	691	U10201100000000000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	735	U10202200000000000	DP3AP2KB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	758	U10203100000000000	DINAS PANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	776	U10205100000000000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	794	U10207100000000000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	840	U10208200000000000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	861	U10209100000000000	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	911	U10210200000000000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	932	U10211100000000000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECI DAN MENENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	955	U10212100000000000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	981	U10213100000000000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1000	U10216100000000000	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1020	U10218100000000000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1043	U20001100000000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1070	U20002100000000000	DINAS PARIWISATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1106	U20003200000000000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-	-		-	-	-	-	-
28	1125	U20003300000000000	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1169	U20004100000000000	DINAS KEHUTANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1196	U20005100000000000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	1214	U20007100000000000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1238	U30001100000000000	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1252	U30002100000000000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	1302	U30003200000000000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	1409	U30003300000000000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	1516	U30004100000000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	1539	U30005100000000000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1562	U30006100000000000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	1576	U30007100000000000	BADAN PENGHUBUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	1582	U40001000000000000	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	1621	U40001300000000000	BIRO HUKUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	1635	U40001400000000000	BIRO PEREKONOMIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	1677	U40001700000000000	BIRO ORGANISASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	1691	U40001800000000000	BIRO UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	1719	U40002100000000000	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	1732	U40011000000000000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	1746	U40011100000000000	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	1757	U40011200000000000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	1771	U40011300000000000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	1785	U40011400000000000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	1799	U50001100000000000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	1818	U50001200000000000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total				-	-	-	-	-	-	-	-	-

DAFTAR HIBAH MASUK TAHUN 2024

No	SKPD/Unit Kerja	TANAH	PERALATAN MESIN		GEDUNG BANGUNAN		JALAN,IRIGASI JARINGAN	
		HP	HP	AKM	HP	AKM	HP	AKM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
S101011	DINAS PENDIDIKAN	122.400.001,00	4.124.622.688,00	258.895.246,27	17.631.703.400,00	213.151.792,33		
S101021	DINAS KESEHATAN							
S101022	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI							
S101023	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN							
S101026	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR		556.283.500,00		3.000.000.000,00			
S101027	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN							
S101033	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG							
S101034	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI							
S101041	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN							
S101052	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							
S101061	DINAS SOSIAL							
S102011	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		13.673.639.489,00	13.673.639.489,00				
S102022	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, P2KB							
S102031	DINAS PANGAN		230.750.000,00	179.843.750,00				
S102051	DINAS LINGKUNGAN HIDUP							
S102071	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
S102082	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
S102091	DINAS PERHUBUNGAN							
S102102	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK							
S102111	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
S102121	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
S102131	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA							
S102161	DINAS KEBUDAYAAN							
S102181	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN							
S200011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN							
S200021	DINAS PARIWISATA							
S200032	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		1.365.635.000,00	1.365.635.000,00				
S200033	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA		2.674.433.200,00	2.010.949.898,20				
S200041	DINAS KEHUTANAN							
S200051	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							
S200071	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							
S300011	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI							
S300021	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
S300032	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
S300033	BADAN PENDAPATAN DAERAH							
S300041	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH							
S300051	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
S300061	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
S300071	BADAN PENGHUBUNG	1,00						
S400010	SEKRETARIAT DAERAH		4.141.673.000,00	4.141.673.000,00			9.365.486.300,00	1.717.005.821,74
S400013	BIRO HUKUM							
S400014	BIRO PEREKONOMIAN							
S400017	BIRO ORGANISASI							
S400018	BIRO UMUM							
S400021	SEKRETARIAT DPRD							
S400110	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							
S400111	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN							
S400112	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT							
S400113	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH							
S400114	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA							
S500011	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
S500012	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							
	TOTAL	**122.400.002,00**	**26.767.036.877,00**	**21.630.636.383,47**	**20.631.703.400,00**	**213.151.792,33**	**9.365.486.300,00**	**1.717.005.821,74**

DAFTAR HIBAH MASUK TAHUN 2024

No	SKPD/Unit Kerja	ASET TETAP LAINNYA		KDP
		HP	AKM	HP
1	2	10	11	12
S101011	DINAS PENDIDIKAN	10.800.000,00		
S101021	DINAS KESEHATAN			
S101022	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI			
S101023	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN			
S101026	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR			
S101027	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN			
S101033	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG			
S101034	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI			
S101041	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			
S101052	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
S101061	DINAS SOSIAL			
S102011	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
S102022	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, P2KB			
S102031	DINAS PANGAN			
S102051	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
S102071	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
S102082	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
S102091	DINAS PERHUBUNGAN			
S102102	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK			
S102111	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
S102121	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
S102131	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			
S102161	DINAS KEBUDAYAAN			
S102181	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			
S200011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
S200021	DINAS PARIWISATA			
S200032	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
S200033	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA			
S200041	DINAS KEHUTANAN			
S200051	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
S200071	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
S300011	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI			
S300021	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
S300032	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
S300033	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
S300041	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
S300051	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
S300061	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
S300071	BADAN PENGHUBUNG			
S400010	SEKRETARIAT DAERAH			
S400013	BIRO HUKUM			
S400014	BIRO PEREKONOMIAN			
S400017	BIRO ORGANISASI			
S400018	BIRO UMUM			
S400021	SEKRETARIAT DPRD			
S400110	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
S400111	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN			
S400112	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT			
S400113	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			
S400114	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			
S500011	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
S500012	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	TOTAL	**10.800.000,00**	**-**	**-**

DAFTAR TANAH
PADA OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
YANG BELUM BERSERTIPIKAT
TAHUN 2024

NO.	ASET TANAH		LOKASI			OPD PENGGUNA	JENIS HAK	LUAS (M²)	NILAI (Rp)	ASAL PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	KET.
	NAMA	PENGGUNAAN	DESA/KEL.	KEC.	KOTA/KAB.							
1	2	3	4	5	6	6	7	9	10	11	12	13
1	Tanah Bangunan Flat/Rumah Susun	-	-		KOTA PADANG	**DINAS PENDIDIKAN (SEKRETARIAT)**	HP	900	720.000.000,00	Tanah Pengganti		
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	EX SEKOLAH CINA (DISPORA)	JL. ARIEF RACHMAN HAKIM No. 6	Padang Utara	KOTA PADANG	**DINAS PENDIDIKAN (SEKRETARIAT)**	HP	571	456.800.000,00	0	0	
3	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUKITTINGGI	Jl. A. Karim No. 12	Padang Barat	KOTA PADANG	**DINAS PENDIDIKAN (SEKRETARIAT)**	HP	873	698.400.000,00	0	1958	
4	Tanah Bangunan Flat/Rumah Susun	SLBN/SMAN/SMKN	-		KOTA PADANG	**DINAS PENDIDIKAN (SEKRETARIAT)**	HP	900	290.850.000,00	0	0	
5	Tanah Bangunan Tempat Ibadah Lainnya	SMKN 2 PADANG PANJANG	Jl.Syech Ibrahim Musa		KOTA PADANG PANJANG	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	165	5.940.000,00	HIBAH	2024	
6	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMKN 1 BONJOL	Jln. Lintas Sumatera Biduak, Ganggo Mudiak, Kec. Bonjol		KAB. PASAMAN	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	1.500	465.383.000,00	HIBAH	2022	
7	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMAN 1 2 X 11 KAYUTANAM	Jl. PASA TANGAH. KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM		KAB. PADANG PARIAMAN	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	90.000	7.000.000,00	APBD	2003	
8	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMKN 1 IV KOTO AUR MALINTANG	JL.Aur Malintang-Sungai Geringging		KAB. PADANG PARIAMAN	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	18.400	184.000.000,00	APBD	2009	
9	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMAN 1 PAYUNG SEKAKI	Jl.Raya Solok-Alahan Panjang		KAB. SOLOK	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	13.000	216.666.000,00	APBD	2003	
10	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMAN 1 TIGO LURAH	Jl. Raya Solok - Batu Bajanjang KM. 70 Nagari Batu Bajanjang Kec. Tigo Lurah		KAB. SOLOK	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	20.000	24.000.000,00	0	2020	
11	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMAN 2 SUMATERA BARAT	Kab Solok		KAB. SOLOK	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	1	1.437.332.450,00	HIBAH	1978	
12	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMKN 2 LEMBAH GUMANTI	SUNGAI NANAM		KAB. SOLOK	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	23.020	345.000.000,00	APBD	2007	
13	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMKN 1 BUKIT SUNDI	Jl. Solok-Muaro Paneh KM 7 Kec. Bukit Sundi		KAB. SOLOK	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	11.902	119.291.850,00	Pembelian	2014	
14	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMKN 1 GUNUNG TALANG	Jl. Aro Talang		KAB. SOLOK	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	1	2.291.558.000,00	Pembelian	2006	
15	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMKN 1 HILIRAN GUMANTI	JL Padang Laweh		KAB. SOLOK	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	449,96	121.241.000,00	0	2013	
16	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMKN 1 HILIRAN GUMANTI	JL Padang Laweh		KAB. SOLOK	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	4	3.500.000,00	0	2006	
17	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMKN 1 HILIRAN GUMANTI	JL Padang Laweh		KAB. SOLOK	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	150	5.000.000,00	0	2006	
18	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMKN 1 HILIRAN GUMANTI	JL Padang Laweh		KAB. SOLOK	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	329	12.000.000,00	APBD	2007	
19	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMAN 1 SOLOK SELATAN	Jl. Raya Muara Labuh		KAB. SOLOK SELATAN	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	1.800	110.000.000,00	APBD	1991	
20	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMAN 8 SOLOK SELATAN	JL. Batu Bakawik Kp. Baru PL. PanjangLbk. Ulang Aling IndukSangir Batang HariSolok Selatan		KAB. SOLOK SELATAN	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	2.286	150.000.000,00	APBD	2011	
21	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SLBN 1 SANGIR	jl. Golden Arm Kecamatan Sangir		KAB. SOLOK SELATAN	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	2.730	174.720.000,00	HIBAH	2006	
22	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMAN 1 KEC. GUGUAK	Jl. Tan malaka Kubang Tungkek		KAB. LIMA PULUH KOTA	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	14.475	349.800.000,00	Bp.3	1984	
23	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMAN 1 KEC. GUGUAK	Jl. Tan malaka Kubang Tungkek		KAB. LIMA PULUH KOTA	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	2.000	110.000.000,00	Hibah	2017	
24	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMK-PP NEGERI PADANG MENGATAS	Komplek SMKPP Negeri Padang Mengatas		KAB. LIMA PULUH KOTA	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	50.000	1.680.000.000,00	APBD	1994	
25	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMK-PP NEGERI PADANG MENGATAS	Komplek SMKPP Negeri Padang Mengatas		KAB. LIMA PULUH KOTA	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	70.000	1.883.256.000,00	Alih Fungsi	2017	
26	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMAN 1 RAMBATAN	Jl. Simpanggobah Nagari Padang Magek Kec. Rambatan Kab. Tanah Datar		KAB. TANAH DATAR	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	140	22.400.000,00	HIBAH	2024	
27	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMAN 1 RAMBATAN	Jl. Simpanggobah Nagari Padang Magek Kec. Rambatan Kab. Tanah Datar		KAB. TANAH DATAR	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	300	45.000.000,00	APBD	2011	
28	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMAN 1 RAMBATAN	Jl. Simpanggobah Nagari Padang Magek Kec. Rambatan Kab. Tanah Datar		KAB. TANAH DATAR	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	96	25.000.000,00	APBD	2014	
29	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMKN 1 TANJUNG BARU	Tanah Datar		KAB. TANAH DATAR	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	15.000	28.500.000,00	APBD	2005	
30	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SLBN 1 LIMA KAUM	Jl. Jenderal Sudirman, Jor. Tigo Tumpuak, Nagari Limo Kaum, Kec. Limo		KAB. TANAH DATAR	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	1	560.450.000,00	0	1983	

NO.	ASET TANAH		LOKASI			OPD PENGGUNA	JENIS HAK	LUAS (M²)	NILAI (Rp)	ASAL PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	KET.
	NAMA	PENGGUNAAN	DESA/KEL.	KEC.	KOTA/KAB.							
1	2	3	4	5	6	6	7	9	10	11	12	13
31	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMKN 1 PAYAKUMBUH	Jl. Asoka No. 6 Tanjung Gadang Payakumbuh Barat		KOTA PAYAKUMBUH	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	792	5.000.000,00	APBD	2015	
32	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMKN 2 PAYAKUMBUH	Jl. Soekarno Hatta/ Anggrek I		KOTA PAYAKUMBUH	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	1.876	801.853.291,00	APBD	2003	
33	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMKN 2 PAYAKUMBUH	Jl. Soekarno Hatta/ Anggrek I		KOTA PAYAKUMBUH	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	1.300	52.000.000,00	APBD	1982	
34	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMKN 2 PAYAKUMBUH	Jl. Soekarno Hatta/ Anggrek I		KOTA PAYAKUMBUH	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	12.572	17.303.603,00	APBD	2004	
35	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMAN 1 PAYAKUMBUH	Jl. Merapi No 4 Tiakar		KOTA PAYAKUMBUH	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	2.317	658.028.000,00	0	1994	
36	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMAN 1 PAYAKUMBUH	Jl. Merapi No 4 Tiakar		KOTA PAYAKUMBUH	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	1.400	595.000.000,00		2023	
37	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMAN 4 PAYAKUMBUH	JL. Kalimantan,Kel Balai Nan Duo, Kec.Payakumbuh Barat		KOTA PAYAKUMBUH	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	2.250	202.500.000,00	APBD	2004	
38	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMAN 1 KOTO BESAR	Jl. Raya Koto Besar Abai Siat		KAB. DHARMASRAYA	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	29.200	730.000.000,00	Hibah	2011	
39	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMAN 1 IX KOTO	Silago		KAB. DHARMASRAYA	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	20.000	200.000.000,00	HIBAH	2011	
40	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMAN 1 KOTO SALAK	Jl. Pulau Mainan 1,		KAB. DHARMASRAYA	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	15.000	758.750.000,00	APBD	2015	
41	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMAN 2 SUNGAI RUMBAI	Jl. Sudirman, Jr. Sungai Baye, Kec. Sungai Rumbai, Kab. Dharmasraya		KAB. DHARMASRAYA	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	18.930	704.525.434,00	HIBAH	2016	
42	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMKN 1 SITIUNG	Jln Lintas Sumatera Jorong Koto Kenagarian Gunung Medan , Dharmasraya		KAB. DHARMASRAYA	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	19.000	684.000.000,00	APBD	2009	
43	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMKN 1 SIJUNJUNG	Jl. Prof M Yamin SH No 1 Tanjung Ampalu		KAB. SIJUNJUNG	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	63	12.600.000,00	HIBAH	2021	
44	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SLBN 1 KAMANG BARU	Jl. Lintas sumatera Kiliran Jao-Teluk Kuantan, Simpang kamang, Nag. Kamang, kec. Kamang Baru Kab. Sijunjung		KAB. SIJUNJUNG	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	19.000	684.000.000,00	HIBAH	2008	
45	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMAN 3 LUBUK BASUNG	Jalan Masuk		KAB. AGAM	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	250	10.000.000,00	HIbah	1997	
46	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMAN 2 TILATANG KAMANG	Jl.Raya Bukittinggi-Medan Km.4 Gadut		KAB. AGAM	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	5.670	561.600.000,00	Hibah	2012	
47	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMKN 1 AMPEK NAGARI	Jl. Raya Bawan - Manggopoh. Km. 4 Durian Tinggalang Bawan		KAB. AGAM	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	1	95.095.000,00	HIBAH	1982	
48	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	SMKN 2 LUBUK BASUNG	~~Jl. Lintas Manggopoh Pasaman~~		KAB. AGAM	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	30.300	4.072.500.000,00	Dari SMP N 4 Tilkam	1998	
49	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMKN 1 TILATANG KAMANG	Jrg Rawang Bunian Koto Tangah Tilkam		KAB. AGAM	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	6.663	90.632.500,03	APBD	2006	
50	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMKN 1 MATUR	JL. MATUR-PALEMBAYAN Km.4 Sari bulan Kec. Matur		KAB. AGAM	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	26.154	706.158.000,00	APBD	2011	
51	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMKN 1 BASO	Jl. Raya Bukittinggi-Payakumbuh Km 20, Titih Padang Tarok, Kec. Baso		KAB. AGAM	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	17.970	1.652.250.000,00	APBD	2012	
52	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMAN 1 TALAMAU	Jl. Teluk Embun, Kec. Talamau		KAB. PASAMAN BARAT	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	1.110	100.000,00	Hiah	1995	
53	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMAN 1 GUNUNG TULEH	Paraman Ampalu		KAB. PASAMAN BARAT	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	5.508	358.050.000,00	APBD	2006	
54	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMAN 1 SUNGAI AUR	Ranah Air Haji	Sungai Aur		**DINAS PENDIDIKAN**		500	100.000.000,00	HIBAH	2024	
55	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMKN 1 KINALI	Jl. Teuku Umar KM.1 kapundung		KAB. PASAMAN BARAT	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	4.000	200.000.000,00	Hibah Masyarakat	2022	
56	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMAN 1 PAINAN	JL. GURUN SALIDO		KAB. PESISIR SELATAN	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	19.000	908.048.024,00	APBD	1968	
57	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMKN 1 LINGGO SARI BAGANTI	Jln.Raya Simpang Lagan Punggasan Utara		KAB. PESISIR SELATAN	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	20.000	150.000.000,00	HIBAH	2013	
58	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SLBN 1 RANAH PESISIR	Jl. Koto Langsat No 10 Balai Selasa		KAB. PESISIR SELATAN	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	1.503	18.036.000,00	APBD	1999	
59	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMAN 1 SIPORA	JL. Lintas Sioban Mara KM 2		KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	120	1.800.000,00	0	2006	
60	Tanah Bangunan Rumah Tahanan/Rutan	SMAN 1 SIBERUT TENGAH	Dusun Pangasaat		KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	20.000	40.000.000,00	0	2014	
61	Tanah Bangunan Rumah Tahanan/Rutan	SMAN 1 PAGAI SELATAN	Jl. Pagai Selatan KM. 37		KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	30.000	87.000.000,00	Hibah	2016	
62	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMAN 1 PAGAI SELATAN	Jl. Pagai Selatan KM. 37		KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	10.000	120.000.000,00	HIBAH	2015	

NO.	ASET TANAH		LOKASI			OPD PENGGUNA	JENIS HAK	LUAS (M²)	NILAI (Rp)	ASAL PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	KET.
	NAMA	PENGGUNAAN	DESA/KEL.	KEC.	KOTA/KAB.							
1	2	3	4	5	6	6	7	9	10	11	12	13
63	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMAN 1 SIBERUT BARAT	Dsn Betaet Selatan, desa Simalegi		KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	20.000	58.000.000,00	HIBAH	2016	
64	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMAN 1 SIBERUT BARAT	Dsn Betaet Selatan, desa Simalegi		KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	2.000	2.000.000,00	APBD	2012	
65	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMAN 2 SIKAKAP	Jl. Trans Sikakap, Desa taikako		KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	5.000	85.000.000,00	HIBAH	2014	
66	Tanah Bangunan Industri Kendaraan/Otomotif	SMAN 2 SIKAKAP	Jl. Trans Sikakap, Desa taikako		KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	**DINAS PENDIDIKAN**	HP	53.500	288.535.700,00	HIBAH	2014	
67	Tanah Perkebunan Lainnya	Tanah Kebun Bidang Perkebunan Pulau Punjung		Pulau Punjung	Kab. Dharmasraya	**Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura**	HP	2,000	5.416.500,00	GANTI RUGI	1953	
68	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Padang Sibusuk	-	-	Kab. Sijunjung	**Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura**	HP	105	504.000,00	APBD	1954	
69	Tanah Perkebunan Lainnya	Tanah Kebun Bidang Perkebunan Panti	Panti	Panti	Kab. Pasaman	**Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura**	HP	5,000	400.000.000,00	HIBAH	1954	
70	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor Bidang Perkebunan Pariaman	Kampung/Kampuang Baru	Pariaman Tengah	Kota pariaman	**Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura**	HP	625	125.000.000,00	APBD	1973	
71	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Muaro Sijunjung, Kantor	-	-	Kab. Sijunjung	**Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura**	HP	500	32.000.000,00	APBD	1974	
72	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	Muaro Sijunjung	-	-	Kab. Sijunjung	**Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura**	HP	500	32.000.000,00	APBD	1976	
73	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	SATGAS BBI Surian (Dinas Pertanian)	Surian	Pantai Cermin	Kab Solok	**Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura**	HP	330,000	504.900.000,00	APBD	1950	
74	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	SATGAS BBI Padi Sungai Dareh (Pertanian)	Sungai Dareh	Pulau Punjung	Kab. Dharmasraya	**Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura**	HP	170	173.400.000,00	Tanah Adat	1951	
75	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Sungai Lansek	Sungai Lansek	Kamang Baru	Kab. Sijunjung (Sawahlunto Sijunjung)	**Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura**	HP	27,425	1.755.200,00	APBD	1974	
76	Tanah Bangunan Rumah Sakit	UPTD Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4) 5	Lubuk Alung	Lubuk Alung	Kab. Padang Pariaman	**Dinas Kesehatan**	HP	7.500	1.500.000.000,00	pembelian APBD	1970	
77	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor Dinas Kesehatan 5	Jati Baru	Padang Timur	Kota Padang	**Dinas Kesehatan**	HP	822	1.027.800.000,00	pembelian APBD	1973	
78	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor Dinas Kesehatan 4	Jati Baru	Padang Timur	Kota Padang	**Dinas Kesehatan**	HP	1.597	1.995.650.000,00	pembelian APBD	1978	
79	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor Dinas	Pilubang	Sungai Limau	Kab. Padang Pariaman	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	HP	1.506	10.767.900,00	Pindah uu 23	2003	
80	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	Kantor UPTD dan TPI	Padang Sarai	Koto Tangah	Kota Padang	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	HP	21.967	726.884.954,62	Pindah uu 23	2005	
81	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	Pelabuhan/Dermaga	Nagari Air Bangis	Sei. Beremas	Kab. Pasaman Barat	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	HP	3.210	20.000.000,00	Pindah uu 23	2007	
82	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor UPTD	Teluk Kabung Tengah	Bungus Teluk Kabung	Kota Padang	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	HP	4.000	34.800.000,00	APBN	2006	
83	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Rumah Dinas	Sago Salido	IV Jurai	Kab. Pesisir Selatan	**Badan Pendapatan Daerah**	HP	601	12.020.000,00	Hibah	2000	
84	Tanah Bangunan Flat/Rumah Susun	Perumahan	Sungai Beringin	Payakumbuh	Kab. Lima Puluh Kota	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi**	HP	348	4.872.000,00		1980	
85	Tanah Bangunan Flat/Rumah Susun	Perumahan	Kubang	Guguak (Gugu)	Kab. Lima Puluh Kota	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi**	HP	300	4.200.000,00		1980	
86	Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi	Pengendalian Banjir Bt Tiku	Lubuk Basung	Lubuk Basung	Kab. Agam	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi**	HP	1	1.094.032.168,00	Hibah	2008	
87	Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi	Saluran Irigasi	Tigo Jangko	Lintau Buo	Kab. Tanah Datar	**Dinas Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi**	HP	17.932	508.274.900,00	Pembebasan	2011	
88	Tanah untuk Jalan lainnya	0			Kab. Kep. Mentawai	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	6.800	40.120.000,00	0	2012	
89	Tanah untuk Jalan lainnya	0			Kab. Pdg Pariaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	1	6.058.328.000,00	APBD	2012	
90	Tanah untuk Jalan lainnya	TJ Palupuh-Pua Gadih-Kt Tinggi			Kab. Agam - Kab. 50 Kota	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	250	2.755.025.000,00	0	2013	
91	Tanah untuk Jalan lainnya	0			Kab. Bogor	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	1	198.316.000,00	APBD	2013	
92	Tanah untuk Jalan lainnya	0			Kab. Agam - Kab. 50 Kota	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	24.200	121.000.000,00	0	2013	
93	Tanah Kampung	0			Kab. Agam - Kab. Padang Pariaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	474	224.670.000,00	APBD	2013	
94	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	34	15.200.000,00	APBD	2013	
95	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	54	25.182.150,00	APBD	2013	

NO.	ASET TANAH		LOKASI			OPD PENGGUNA	JENIS HAK	LUAS (M²)	NILAI (Rp)	ASAL PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	KET.
	NAMA	PENGGUNAAN	DESA/KEL.	KEC.	KOTA/KAB.							
1	2	3	4	5	6	6	7	9	10	11	12	13
96	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	176	94.710.000,00	APBD	2014	
97	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	286	162.341.000,00	APBD	2014	
98	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	287	162.994.000,00	APBD	2014	
99	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	287	162.994.000,00	APBD	2015	
100	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	287	162.994.000,00	APBD	2015	
101	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	763	433.661.500,00	APBD	2015	
102	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	46	27.882.000,00	APBD	2015	
103	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	64	38.806.000,00	APBD	2015	
104	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	84	50.978.000,00	APBD	2015	
105	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	42	25.490.000,00	APBD	2015	
106	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	73	44.320.000,00	APBD	2015	
107	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	137	84.136.000,00	APBD	2018	
108	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	71	44.005.000,00	APBD	2018	
109	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	287	177.910.000,00	APBD	2020	
110	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	143	89.375.000,00	APBD	2020	
111	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	107	67.100.000,00	APBD	2020	
112	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	50	31.374.000,00	APBD	2021	
113	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	60	37.670.000,00	APBD	2022	
114	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	72	45.289.000,00	APBD	2022	
115	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	265	170.257.000,00	APBD	2022	
116	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	501	322.706.000,00	APBD	2022	
117	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	264	170.466.000,00	APBD	2022	
118	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	158	102.532.000,00	APBD	2022	
119	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	534	347.936.000,00	APBD	2022	
120	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	47	31.721.000,00	APBD	2022	
121	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	87	58.809.000,00	APBD	2022	
122	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	243	164.403.000,00	APBD	2022	
123	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	61	42.624.000,00	APBD	2022	
124	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	61	43.172.000,00	APBD	2022	
125	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	259	184.497.000,00	APBD	2022	
126	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	144	104.223.000,00	APBD	2022	
127	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	190	141.193.000,00	APBD	2022	
128	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	117	88.111.000,00	APBD	2022	

NO.	ASET TANAH		LOKASI			OPD PENGGUNA	JENIS HAK	LUAS (M²)	NILAI (Rp)	ASAL PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	KET.
	NAMA	PENGGUNAAN	DESA/KEL.	KEC.	KOTA/KAB.							
1	2	3	4	5	6	6	7	9	10	11	12	13
129	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	84	64.063.000,00	APBD	2022	
130	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	89	69.789.000,00	APBD	2022	
131	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	31	25.617.000,00	APBD	2022	
132	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	227	190.479.000,00	APBD	2022	
133	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	57	48.055.000,00	APBD	2022	
134	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	254	227.469.000,00	APBD	2022	
135	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	64	60.789.000,00	APBD	2022	
136	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	54	51.348.850,00	APBD	2022	
137	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	77	76.871.000,00	APBD	2022	
138	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	87	88.199.000,00	APBD	2022	
139	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	69	71.355.000,00	APBD	2022	
140	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	175	181.571.000,00	APBD	2022	
141	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	44	45.878.000,00	APBD	2022	
142	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	53	59.411.000,00	APBD	2022	
143	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	34	40.721.000,00	APBD	2022	
144	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	26	31.950.000,00	APBD	2022	
145	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	76	99.181.000,00	APBD	2022	
146	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	27	35.474.000,00	APBD	2022	
147	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	80	109.484.000,00	APBD	2022	
148	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	27	37.418.990,00	APBD	2022	
149	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	33	51.068.000,00	APBD	2022	
150	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	92	167.992.000,00	APBD	2022	
151	Tanah Kampung	0			Kab. Agam	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	17	47.968.900,00	APBD	2022	
152	Tanah untuk Jalan lainnya	0			Kab. Kep. Mentawai	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	30.000	177.000.000,00	0	2022	
153	Tanah untuk Jalan lainnya	Tnh. Jl. Tj. Ampalu-Sijunjung			Kab. Sijunjung	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	249.480	5.488.550.000,00	0	2022	
154	Tanah untuk Jalan lainnya	Tnh. Jl. Simancung-Tj. Ampalu			Kab. Sijunjung	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	127.080	2.795.750.000,00	0	2022	
155	Tanah untuk Jalan lainnya	Tnh. Jl. Simp. Sikabau - Simp.			Kab. Dharmasraya	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	288.600	6.349.200.000,00	0	2022	
156	Tanah untuk Jalan lainnya	Tnh. Jl. Simp. Kt. Baru - Tj.			Kab. Dharmasraya	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	117.300	2.580.600.000,00	0	2022	
157	Tanah untuk Jalan lainnya	Tnh.Jl. Simp. Kt.Bru-Junction			Kab. Dharmasraya	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	54.000	1.188.000.000,00	0	2022	
158	Tanah untuk Jalan lainnya	Tnh. Jl. Indrapura - Ma. Sakai			Kab. Pesisir Selatan	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	74.500	1.639.000.000,00	0	2022	
159	Tanah untuk Jalan lainnya	Tanah Jl. Panti - Simp. IV			Kab. Pasaman - Kab. Pasaman Barat	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	888.960	19.557.100.000,00	0	2022	
160	Tanah untuk Jalan lainnya	Tanah Jl. Simp. IV - Sasak			Kab. Pasaman Barat	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	234.360	5.155.900.000,00	0	2022	
161	Tanah untuk Jalan lainnya	Tnh. Jl. Air Balam-Air Bangis			Kab. Pasaman Barat	Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang	HP	707.880	15.573.350.000,00	0	2022	

NO.	ASET TANAH		LOKASI			OPD PENGGUNA	JENIS HAK	LUAS (M²)	NILAI (Rp)	ASAL PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	KET.
	NAMA	PENGGUNAAN	DESA/KEL.	KEC.	KOTA/KAB.							
1	2	3	4	5	6	6	7	9	10	11	12	13
162	Tanah untuk Jalan lainnya	Tnh.Jl.K. Kerambil-B. Sangkar			Kab. Tanah Datar	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	212.100	4.666.200.000,00	0	2022	
163	Tanah untuk Jalan lainnya	Tnh. Jl. Batusangkar-Gg. Cino			Kab. Tanah Datar	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	152.100	3.346.200.000,00	0	2022	
164	Tanah untuk Jalan lainnya	Tanah Jl. Gg. Cino - Sitangkai			Kab. Tanah Datar	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	149.700	3.293.400.000,00	0	2022	
165	Tanah untuk Jalan lainnya	Tnh. Jl. Sitangkai-Tj. Ampalu			Kab. Tanah Datar - Kab. Sijunjung	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	211.440	4.651.700.000,00	0	2022	
166	Tanah untuk Jalan lainnya	Tnh. Jl. Payakumbuh-Sitangkai			Kota Payakumbuh - Kab. Tanah Datar	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	547.131	12.036.882.000,00	0	2022	
167	Tanah untuk Jalan lainnya	Tnh. Jl. Abai Siat-Bts. Jambi			Kab. Solok Selatan	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	282.200	6.208.400.000,00	0	2022	
168	Tanah untuk Jalan lainnya	Tnh. Jl.Sijunjung-Tn.Badantung			Kab. Sijunjung	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	53.520	1.177.450.000,00	0	2022	
169	Tanah untuk Jalan lainnya	Tnh.Jl.Simp.Pdg. Aro-Lb.Malako			Kab. Solok Selatan	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	189.100	4.160.200.000,00	0	2022	
170	Tanah untuk Jalan lainnya	Tnh. Jl. Pdg. Sawah - Kumpulan			Kab. Pasaman Barat - Kab. Pasaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	1.060.630	23.333.900.000,00	0	2022	
171	Tanah untuk Jalan lainnya	Tnh. Jl. Payakumbuh-Kt Tinggi			Kota Payakumbuh Kab. 50 Kota	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	440.704	9.695.488.000,00	0	2022	
172	Tanah untuk Jalan lainnya	Tnh. Jl. Batusangkar - Ombilin			Kab. Tanah Datar	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	148.640	3.270.100.000,00	0	2022	
173	Tanah untuk Jalan lainnya	Tanah Jl. Solok - A. Panjang			Kota Solok - Kab. Solok	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	494.600	10.881.200.000,00	0	2022	
174	Tanah untuk Jalan lainnya	Tnh. Jl. Psr. Baru-A. Panjang			Kab. Pesisir Selatan - Kab. Solok	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	238.000	5.236.000.000,00	0	2022	
175	Tanah untuk Jalan lainnya	Tanah Jl. Pangkalan - Gelugur			Kab. 50 Kota	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	430.000	9.460.000.000,00	0	2022	
176	Tanah untuk Jalan lainnya	Tanah Jln Manggopoh - Pdg Luar			Kab. Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	854.215	28.846.778.341,06	0	-	
177	Tanah untuk Jalan lainnya	Tnh. Jl. Gg. Cino - Swh. Lunto			Kab. Tanah Datar - Kota Sawahlunto	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	331.240	7.279.350.000,00	0	2005	
178	Tanah untuk Jalan lainnya	0			Kab. Padang Pariaman - Kab. Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	1	999.647.000,00	0	2011	
179	Tanah Kampung	Ganti Rugi Tanah	Ganti Rugi Tanah Jembatan Kuranji - Durian Tarung		Kota Padang	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	8.710	4.978.397.500,00	APBD	2011	
180	tanah kampung lainnya (dst)	0	Ganti Rugi Tanah Jalan Lingkar Utara Payakumbuh		Kota Payakumbuh	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	4.744	2.138.880.000,00	-	2012	
181	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Ganti Rugi Tanah Pemb. Jalan			Kab. Padang Pariaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	42.400	9.065.138.900,00	0	2012	
182	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Ganti Rugi Tanah Jalan Padang - By Pass			Kota Padang	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	22.986	33.441.969.670,00	0	2012	
183	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Ganti Rugi Tanah Pemb. Jalan	Ganti Rugi Tanah Jalan Kumpulan - Bukittinggi		Kabupaten Pasaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	1	43.908.000,00	APBD	2013	
184	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Ganti Rugi Tanah Pemb. Jalan	Ganti Rugi Tanah Jembatan Kembar Pasar Usang		Kab. Padang Pariaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	1.200	218.154.000,00	0	2013	
185	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0	Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan TPA Sampah		Kab. 50 Kota	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	4.363	978.320.000,00	0	2013	
186	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Ganti Rugi Tanah Pemb. Jalan	Ganti Rugi Tanah Jalan Winrip Pasaman Barat		Kabupaten Pasaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	1.994	5.319.902.800,00	0	2013	
187	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	0	Ganti Rugi Tanah Jembatan Fly Over Duku Bt. Anai		Kabupeten Padang Pariaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	2.283	15.283.110.980,00	0	2013	
188	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Ganti Rugi Tanah Pemb. Jalan	Ganti Rugi Tanah Jalan Samudera Olo		Kota padang	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	702	10.762.987.500,00	0	2013	
189	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Ganti Rugi Tanah Pemb. Jalan	Ganti Rugi Tanah Jembatan Batang Samo		Kab 50 Kota	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	1	168.500.000,00	0	2014	
190	Tanah untuk Jalan lainnya	TJ. Surantih-Kayu Aro-Langgai			Kab. Pesisir Selatan	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	167.691	865.990.000,00	0	2014	
191	Tanah untuk Jalan lainnya	Tanah Jalan Tarusan - Carocok			Kota Padang - Kab. Pesisir Selatan	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	107.815	2.366.651.000,00	0	2014	
192	tanah kampung lainnya (dst)	0	Ganti Rugi Tanah Pembangunan Main Stadium Sumbar		Kabupaten Padang Pariaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	332.900	10.907.771.000,00	APBD	2015	
193	Tanah untuk Jalan lainnya	0			Kab. Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	53.271	618.315.600,00	APBD	2015	
194	Tanah untuk Jalan lainnya	0			Kab. Solok Selatan	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	76.500	1.107.949.500,00	APBD	2015	

NO.	ASET TANAH		LOKASI			OPD PENGGUNA	JENIS HAK	LUAS (M²)	NILAI (Rp)	ASAL PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	KET.
	NAMA	PENGGUNAAN	DESA/KEL.	KEC.	KOTA/KAB.							
1	2	3	4	5	6	6	7	9	10	11	12	13
195	Tanah untuk Jalan lainnya	0			Kab. Solok Selatan - Kab. Dharmasraya	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	127.350	2.043.967.500,00	APBD	2015	
196	Tanah untuk Jalan lainnya	0			Kab. Padang Pariaman - Kab. Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	317.185	6.166.756.950,00	APBD	2015	
197	Tanah untuk Jalan lainnya	0			Kab. Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	103.181	3.367.727.500,00	APBD	2015	
198	Tanah untuk Jalan lainnya	0			Kab. Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	67.816	3.963.693.665,00	APBD	2015	
199	Tanah untuk Jalan lainnya	0			Kab. Solok - Kab. Sijunjung	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	364.500	23.328.000.000,00	APBD	2015	
200	Tanah untuk Jalan lainnya	0	Ruas Jalan Tugu Coklat - Parit Malintang SP.134		Kota Pariaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	1.129	1.350.436.000,00	APBD	2018	
201	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	Jalan Taman Siswa No. 1 Padang		Kota Padang	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	14.584	20.633.172.000,00	Eks. Kanwil	2018	
202	Tanah untuk Jalan lainnya	0			Kab. Padang Pariaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	14.429	1.999.620.000,00	0	2020	
203	Tanah untuk Jalan lainnya	0			Kab. Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	414	78.510.000,00	0	2020	
204	Tanah untuk Jalan lainnya	0	Ganti Rugi Tanah Jembatan Kuranji - Durian Tarung		Kota Padang	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	5.735	6.957.526.416,00	0	2021	
205	Tanah untuk Jalan lainnya	0			Kab. Padang Pariaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	1.284	353.700.000,00	0	2022	
206	Tanah untuk Jalan lainnya	0			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	6.878	1.514.000.000,00	0	2022	
207	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Irna Netty			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	83	71.900.000,00	0	2022	
208	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Suherman			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	559	313.305.000,00	0	2022	
209	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Sumiarti			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	72	72.700.000,00	0	2022	
210	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Sumiarti selaku kuasa Kasma Indrawita			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	76	76.800.000,00	0	2022	
211	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Alzarefni selaku kuasa Ilyanis			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	439	354.110.000,00	0	2022	
212	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Alzarefni selaku kuasa Nofaef Efendi (Bangunan Gedung)			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	-	92.837.000,00	0	2022	
213	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Arifin			Kabupeten Padang Pariaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	83	35.440.000,00	0	2022	
214	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Irwanto			Kabupeten Padang Pariaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	63	28.366.000,00	0	2022	
215	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Zulkifli			Kabupeten Padang Pariaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	611	258.616.400,00	0	2022	
216	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Rabima			Kabupeten Padang Pariaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	37	16.478.000,00	0	2022	
217	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Ratna Dewi			Kabupeten Padang Pariaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	46	28.745.600,00	0	2022	
218	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Rosman/Drs. Rosman			Kabupeten Padang Pariaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	132	65.849.000,00	0	2022	
219	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Insan Firdaus			Kabupeten Padang Pariaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	25	11.853.000,00	0	2022	
220	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Fitriati/Fitriati			Kabupeten Padang Pariaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	87	37.679.000,00	0	2022	
221	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Yuliar			Kabupeten Padang Pariaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	35	23.365.000,00	0	2022	
222	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. KT. Yahya/Yahya			Kabupeten Padang Pariaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	224	108.031.400,00	0	2022	
223	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Zulkifli			Kabupeten Padang Pariaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	170	71.808.000,00	0	2022	
224	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Fitria Anggraini			Kabupeten Padang Pariaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	150	82.512.600,00	0	2022	
225	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Nurmia			Kabupeten Padang Pariaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	27	11.613.000,00	0	2022	
226	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Kamisah			Kabupeten Padang Pariaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	276	119.583.000,00	0	2022	
227	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Akimalis			Kabupeten Padang Pariaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	219	98.674.000,00	0	2022	

NO.	ASET TANAH		LOKASI			OPD PENGGUNA	JENIS HAK	LUAS (M²)	NILAI (Rp)	ASAL PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	KET.
	NAMA	PENGGUNAAN	DESA/KEL.	KEC.	KOTA/KAB.							
1	2	3	4	5	6	6	7	9	10	11	12	13
228	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Erman			Kabupeten Padang Pariaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	556	227.725.200,00	0	2022	
229	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Ramanis			Kabupeten Padang Pariaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	74	35.474.000,00	0	2022	
230	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Akimalis			Kabupeten Padang Pariaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	36	15.648.000,00	0	2022	
231	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Nurmaini			Kabupeten Padang Pariaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	150	65.299.200,00	0	2022	
232	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Syahrudin. S			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	153	142.899.000,00	0	2022	
233	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Syahrudin. S			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	142	89.675.000,00	0	2022	
234	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Agusneti			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	27	56.667.450,00	0	2022	
235	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Dahlia			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	359	230.882.000,00	0	2022	
236	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Juliana			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	133	86.928.000,00	0	2022	
237	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Ermayeni			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	54	39.957.000,00	0	2022	
238	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Yeni Sarti			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	40	34.154.000,00	0	2022	
239	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Gustimar			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	68	139.124.000,00	0	2022	
240	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Ifrayedi selaku kuasa Hari Antoni			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	54	34.488.000,00	0	2022	
241	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Arnelis-1			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	114	83.396.000,00	0	2022	
242	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Martini			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	50	109.476.000,00	0	2022	
243	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Budi Arta			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	68	42.300.000,00	0	2022	
244	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Rosma			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	68	74.089.000,00	0	2022	
245	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Yetri			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	66	41.000.000,00	0	2022	
246	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Syafnel			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	192	122.429.000,00	0	2022	
247	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Rahmawati			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	98	204.070.000,00	0	2022	
248	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Fatimah			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	202	234.417.000,00	0	2022	
249	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Eva Susanti			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	51	64.300.000,00	0	2022	
250	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Eva Susanti/Epi Susanti			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	103	102.000.000,00	0	2022	
251	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Farida Hakim-1			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	42	43.756.000,00	0	2022	
252	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Farida Hakim-2			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	130	122.497.000,00	0	2022	
253	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Jasmi			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	68	42.900.000,00	0	2022	
254	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Zawinar Zein			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	125	77.990.000,00	0	2022	
255	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Rosmanidar			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	230	155.400.000,00	0	2022	
256	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Zefrizal selaku kuasa dari Ermawati			Kabupaten Padang Pariaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	234	34.600.000,00	0	2022	
257	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Nurlianis			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	39	97.321.000,00	0	2022	
258	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Firma Erlona			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	86	62.509.000,00	0	2022	
259	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Syafnel			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	174	181.773.000,00	0	2022	
260	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Rosmanidar			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	166	106.300.000,00	0	2022	

NO.	ASET TANAH		LOKASI			OPD PENGGUNA	JENIS HAK	LUAS (M²)	NILAI (Rp)	ASAL PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	KET.
	NAMA	PENGGUNAAN	DESA/KEL.	KEC.	KOTA/KAB.							
1	2	3	4	5	6	6	7	9	10	11	12	13
261	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Arnelis-2			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	97	111.900.000,00	0	2022	
262	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Rahima			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	133	85.275.000,00	0	2022	
263	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Arnalis			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	63	40.250.000,00	0	2022	
264	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Nilawati			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	170	200.387.000,00	0	2022	
265	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Erni Refnita Yarti			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	37	24.404.000,00	0	2022	
266	Tanah untuk Jalan lainnya	Masyarakat Penerima Ganti Rugi An. Ermawati			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	17	10.600.000,00	0	2022	
267	Tanah untuk Jalan lainnya	Jasa Konsultansi Penelitian Publik (Aprissal) Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025)			Kabupaten Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	1	155.777.776,00	0	2022	
268	Tanah untuk Jalan lainnya	Jasa Konsultansi Penelitian Publik (Aprissal) Jalan Simpang Duku (Ketaping) - Pariaman (P.075)			Kab Padang Pariaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	1	124.514.776,00	0	2022	
269	Tanah untuk Jalan lainnya	Jasa Konsultansi Penelitian Publik (Aprissal) Unit Layanan Gangguan Jalan dan jembatan Kondisi Kritis/ Bencana Alam			Kab Padang Pariaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	1	104.461.776,00	0	2022	
270	Tanah untuk Jalan lainnya	Pematangan Lahan Gerbang Batas Provinsi di Kab.50 Kota			Kabupaten 50 Kota	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	1	215.727.768,00	0	2022	
271	Tanah untuk Jalan lainnya	Pengawasan Pematangan Lahan Gerbang Batas Provinsi di Kab.50 Kota			Kabupaten 50 Kota	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	1	19.642.000,00	0	2022	
272	Tanah untuk Jalan lainnya	Pematangan Lahan Gerbang Batas Provinsi di Kab.Dharmasraya			KABUPATEN DHARMASRAYA	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	1	224.473.330,00	0	2022	
273	Tanah untuk Jalan lainnya	Pengawasan Pematangan Lahan Gerbang Batas Provinsi di Kab.Dharmasraya			KABUPATEN DHARMASRAYA	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	1	19.911.000,00	0	2022	
274	Tanah untuk Jalan lainnya	Ganti Kerugian Tanah Bangunan dan Tanaman untuk Pelebaran Jalan Simpang Koto Mambang-Balingka (P,078)	Nagari Kampung Tanjung Koto Mambang Sungai Durian	Patamuan	Padang Pariaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	347	149.427.000,00	0	2023	
275	Tanah untuk Jalan lainnya	Ganti Kerugian Tanah Bangunan dan Tanaman untuk Pelebaran Jalan Simpang Koto Mambang-Balingka (P,078)	Nagari Kampung Tanjung Koto Mambang Sungai Durian	Patamuan	Padang Pariaman	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	507	325.360.000,00	0	2023	
276	Tanah Untuk Jalan Propinsi	Pelebaran Jalan Simpang Manggopoh-Padang Luar (P,025) Nagari Kampung Tangah Kecamatan Batipuh Kabupaten Agam			Kab. Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	420	267.779.000,00	Ganti Rugi	2023	
277	Tanah Untuk Jalan Propinsi	-			Kab. Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	50	19.900.000,00	APBD	2023	
278	Tanah Untuk Jalan Propinsi	-			Kab. Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	93	112.600.000,00	APBD	2023	
279	Tanah Untuk Jalan Propinsi	-			Kab. Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	117	72.700.000,00	APBD	2023	
280	Tanah Untuk Jalan Propinsi	-			Kab. Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	32	32.347.000,00	APBD	2023	
281	Tanah Untuk Jalan Propinsi	-			Kab. Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	165	148.421.000,00	APBD	2023	
282	Tanah Untuk Jalan Propinsi	-			Kab. Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	52	65.693.000,00	APBD	2023	
283	Tanah Untuk Jalan Propinsi	-			Kab. Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	69	98.369.000,00	APBD	2023	
284	Tanah Untuk Jalan Propinsi	-			Kab. Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	105	65.300.000,00	APBD	2023	
285	Tanah Untuk Jalan Propinsi	-			Kab. Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	122	156.869.000,00	APBD	2023	
286	Tanah Untuk Jalan Propinsi	-			Kab. Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	90	142.477.000,00	APBD	2023	
287	Tanah Untuk Jalan Propinsi	-			Kab. Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	180	111.900.000,00	APBD	2023	
288	Tanah Untuk Jalan Propinsi	-			Kab. Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	180	226.540.000,00	APBD	2023	
289	Tanah Untuk Jalan Propinsi	-			Kab. Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	818	456.100.000,00	APBD	2023	
290	Tanah Untuk Jalan Propinsi	-			Kab. Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	106	64.485.000,00	APBD	2023	
291	Tanah Untuk Jalan Propinsi	-			Kab. Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	52	66.066.000,00	APBD	2023	
292	Tanah Untuk Jalan Propinsi	Pelebaran Jalan Simpang Manggopoh-Padang Luar (P,025) Nagari Kampung Tangah Kecamatan Batipuh Kabupaten Agam			Kab. Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	61	42.170.000,00	APBD 2023	2023	
293	Tanah Untuk Jalan Propinsi	Pelebaran Jalan Simpang Manggopoh-Padang Luar (P,025)			Kab. Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	185	111.400.000,00	APBD 2023	2023	

NO.	ASET TANAH		LOKASI			OPD PENGGUNA	JENIS HAK	LUAS (M²)	NILAI (Rp)	ASAL PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	KET.
	NAMA	PENGGUNAAN	DESA/KEL.	KEC.	KOTA/KAB.							
1	2	3	4	5	6	6	7	9	10	11	12	13
294	Tanah Untuk Jalan Propinsi	Pelebaran Jalan Simpang Manggopoh-Padang Luar (P.025)			Kab. Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	30	18.800.000,00	APBD 2023	2023	
295	Tanah Untuk Jalan Propinsi	Pelebaran Jalan Simpang Manggopoh-Padang Luar (P.025)			Kab. Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	30	20.100.000,00	APBD 2023	2023	
296	Tanah Untuk Jalan Propinsi	Pelebaran Jalan Simpang Manggopoh-Padang Luar (P.025)			Kab. Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	92	79.641.000,00	APBD 2023	2023	
297	Tanah Untuk Jalan Propinsi	Berada pada ruas Jalan P.084 Lingkar Selatan (Simp. Tanjung Anau - Simp. Payo Bada) - Batas Payakumbuh			Kab. Agam	**Dinas Bina Marga,Cipta Karya dan Tata Ruang**	HP	141.207	4.074.102.000,00	APBD	2018	
298	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	UPTD TPA Regional (Payakumbuh)	Parik/Parit Rantang	Payakumbuh Barat	Kota Payakumbuh	**Dinas Lingkungan Hidup**	HP	8.107	479.756.482,00	APBD	2024	
299	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	UPTD TPA Regional (Payakumbuh)	Parik/Parit Rantang	Payakumbuh Barat	Kota Payakumbuh	**Dinas Lingkungan Hidup**	HP	21.617	1.223.439.687,00	APBD	2024	
300	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	Tanah Rumah Dinas 1	Lolong Belanti	Padang Utara	Kota Padang	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	HP	1,225	1.997.100.000,00	APBD	1981	
301	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Tanah Kantor Padang Pariaman	Kuranji Hilir	Sungai Limau	Kab. Padang Pariaman	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	HP	1,176	117.600.000,00	APBN	2002	
302	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	ruang belajar	Kalumbuk	Kuranji	Kota Padang	**Dinas Sosial**	HP	1,688	215.220.000,00	pembelian	1977	
303	Tanah Untuk Makam Umum	tanah kuburan	Kalumbuk	Kuranji	Kota Padang	**Dinas Sosial**	HP	500	175.000.000,00	wakaf	1985	
304	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	gedung kantor	Kalumbuk	Kuranji	Kota Padang	**Dinas Sosial**	HP	3,000	382.500.000,00	pembelian	1981	
305	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	Rumah Dinas	Kampung Jawa I	Pariaman Tengah	Kota Pariaman	**Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pariaman**	HP	172	51.600.000,00	APBD	1982	
306	Tanah Bangunan Rumah Sakit	Bangunan Rumah Sakit	Simpang Rumbio	Lubuk Sikarah	Kota Solok	**Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Natsir**	HP	26,215	2.897.000.000,00	Pembelian	1955	
307	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor Pemerintah	Gaduk	Tilatang Kamang	Kab. Agam	**Dinas Perhubungan**	HP	2.300	348.070.000,00	Jual Beli	1974	
308	Tanah Bangunan Terminal Darat	Kantor Terminal	Sago Salido	IV Jurai	Kab. Pesisir Selatan	**Dinas Perhubungan**	HP	9.669	1.109.116.536,00	APBD	1985	
309	Tanah Bangunan Terminal Darat	Kantor Terminal	Silaing Bawah	Padang Panjang Barat	Kota Padang Panjang	**Dinas Perhubungan**	HP	28.223	2.877.727.824,00	APBD	1997	
310	Tanah Bangunan Terminal Darat	Kantor Terminal	Talawi Hilir/Hilia	Talawi	Kota Sawahlunto	**Dinas Perhubungan**	HP	708	106.255.500,00	APBD	2005	
311	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	KANTOR	Pangkalan	Pangkalan Koto Baru	KABUPATEN LIMA PULUH KOTO/KOTA	**Dinas Kehutanan**	HP	300	6.000.000,00		2001	
312	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Tanah Kantor	Padang Tarok	Baso	Kab. Agam	**Dinas Kehutanan**	HP	250	1.250.000,00		1994	
313	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	Tanah Kantor dari KPHL Agam	Lubuk Basung	Lubuk Basung	Kab. Agam	**Dinas Kehutanan**	HP	300	1.500.000,00		2001	
314	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Tanah Kantor dan Perumahan	Muaro	Sijunjung	KABUPATEN SIJUNJUNG (SAWAH LUNTO SIJUNJUNG)	**Dinas Kehutanan**	HP	600	21.600.000,00		2002	
315	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Rumah Dinas	Sarilamak	Harau	KABUPATEN LIMA PULUH KOTO/KOTA	**Dinas Kehutanan**	HP	300	14.400.000,00		2000	
316	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	KPHP Pesisir Selatan	Painan Selatan Painan	IV Jurai	Kab. Pesisir Selatan	**Dinas Kehutanan**	HP	600	28.800.000,00		2009	
317	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Tanah Kantor dari KPHL Agam 1	Manggopoh	Lubuk Basung	Kab. Agam	**Dinas Kehutanan**	HP	525	441.185.163,00		2000	
318	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	Tanah Kantor dari KPHL Agam 3	Lubuk Basung	Lubuk Basung	Kab. Agam	**Dinas Kehutanan**	HP	860	1.462.000,00		2001	
319	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	Rumah Dinas Kehutanan Ulak Karang	Ulak Karang Utara	Padang Utara	Kota Padang	**Dinas Kehutanan**	HP	250	149.810.000,00		2002	
320	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	Rumah Dinas Kehutanan Ulak Karang	Ulak Karang Utara	Padang Utara	Kota Padang	**Dinas Kehutanan**	HP	250	149.810.000,00		2002	
321	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	Rumah Dinas Kehutanan Aur Tajungkang	Aur Tajungkang Tengah Sawah	Guguk Panjang (Guguak Panjang)	Kota Bukittinggi	**Dinas Kehutanan**	HP	5.280	1.768.800.000,00		2002	
322	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	Rumah Dinas	Talu	Talamau	Kab. Pasaman Barat	**Dinas Kehutanan**	HP	253	6.831.000,00		2002	
323	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Tanah Kantor	Lingkuang Aua	Pasaman	Kab. Pasaman Barat	**Dinas Kehutanan**	HP	480	17.280.000,00		2002	
324	Tanah Bangunan Flat/Rumah Susun	Rumah Dinas	Koto Baru	Kubung	Kota Solok	**Dinas Kehutanan**	HP	240	15.360.000,00		2021	
325	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	Rumah Dinas	Panti	Panti	Kab. Pasaman	**Dinas Kehutanan**	HP	2.400	95.000.000,00		1979	
326	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	Diklat Olahraga	Sei/Sungai Sapih	Kuranji	Kota Padang	**Dinas Pemuda dan Olah Raga**	HP	30.000	1.704.905.600,00	0	0	

NO.	ASET TANAH		LOKASI			OPD PENGGUNA	JENIS HAK	LUAS (M²)	NILAI (Rp)	ASAL PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	KET.
	NAMA	PENGGUNAAN	DESA/KEL.	KEC.	KOTA/KAB.							
1	2	3	4	5	6	6	7	9	10	11	12	13
327	Tanah Padang lainnya	Tanah UPTD BPPMT	Parit/Parik	Koto Balingka	Kab. Pasaman Barat	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	HP	30.000	66.216.000,00	0	1981	
328	Tanah Untuk Tugu Batas Wilayah	Batas Wilayah	Tanjung Pauh	Pangkalan Koto Baru	Lima Puluh Kota	**Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah**	HP	1.000	10.000.000,00	HIBAH	2022	
329	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Tanah Ex Cabdin Pendidikan Solok	Nan Balimo	Tanjung Harapan	Kota Solok	**Sekretariat Daerah**	HP	2.850	364.800.000,00	Pembelian	2005	
330	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	Tanah Ex Kantor RPH Kab. Sijunjung	Sungai Lansek	Kamang Baru	Kab. Sijunjung/Sawahlunto	**Sekretariat Daerah**	HP	250	6.750.000,00	Pembelian	2005	
331	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	UPTD. Taman Budaya	Belakang Tangsi	Padang Barat	Kota Padang	**Dinas Kebudayaan**	HP	22.000	13.391.000.000,00		2011	
332	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	UPTD. Museum Nagari Adityawarman	Belakang Tangsi	Padang Barat	Kota Padang	**Dinas Kebudayaan**	HP	26.805	56.290.500.000,00		2011	
	JUMLAH							**11.635.685**	**520.756.032.754,71**			

DAFTAR : REKAPITULASI RUMAH DINAS DAN SURAT IZIN PENGHUNIAN (SIP) TAHUN 2024

No	Data Penghuni			No. SIP	Gol./Type	L. Tnh (M²)	L. Bgnn (M²)	Alamat Rumah Dinas	Sewa/Bulan
	Nama	NIP	Jabatan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT								
1	MUHAMMAD IHSAN, S.Pdi	19780417 201001 1 009	Kasubag TU UPTD BLK Payakumbuh	012/079/VII/BPKAD-2024	II/D	80 M²	70 M²	Jl. Kamboja No. 14 Komp BLK Payakumbuh	Rp 173.250
2	ROSDIANA	19950408 200203 2 024	Ahli Pratama Instruktur	012/080/VII/BPKAD-2024	II/D	68 M²	36 M²	Jl. Kamboja No. 18 Komp BLK Payakumbuh	Rp 89.100
3	DEBY SURYANI, A.Md	19871211 201503 2 006	Instruktur Pelaksana ILK UPTD BLK Payakumbuh	012/081/VII/BPKAD-2024	II/D	80 M²	70 M²	Jl. Kamboja No. 12 Komp. BLK Payakumbuh	Rp 173.250
4	RITA ANGGRAINI, ST	19800308 201502 2 001	Instruktur Pertama ILK UPTD BLK Payakumbuh	012/082/VII/BPKAD-2024	II/D	80 M²	70 M²	Jl. Kamboja No. 16 Komp. BLK Payakumbuh	Rp 173.250
5	CICI SORAYA SUFI, S.STP	19821023 200112 2 002	Kasi Pemasaran dan Informasi	012/083/VII/BPKAD-2024	II/D	50 M²	45M²	Jl. A. Yani No.13 Komp BLK Padang Panjang	Rp 111.375
6	ISMAIL	19691025 200901 1 003	Pranata Barang dan Jasa UPTD Payakumbuh	012/084/VII/BPKAD-2024	II/D	80 M²	54M²	Jl. Kamboja No.13 Komp. BLK Payakumbuh	Rp 133.650
7	GEORGE WIRA SANJANI	19890205 201502 1 005	Instruktur BLK Payakumbuh	012/085/VII/BPKAD-2024	II/D	80 M²	70 M²	Jl. Kamboja No.13 Komp. BLK Payakumbuh	Rp 173.250
8	DESWITA, A.Md	19841215 201001 2 018	Pengadministrasi Umum UPTD BLK Payakumbuh	012/086/VII/BPKAD-2024	II/D	68 M²	54 M²	Jl. Kamboja No.15 Komp. BLK Payakumbuh	Rp 133.650
9	YEFRI FALSON, SP. M.Sc	19780914 200901 1 006	Kasubag TU UPTD BLK Payakumbuh	012/087/VII/BPKAD-2024	II/E	133 M²	70 M²	Jl. Mandala No. 23 B Tunggul Hitam Padang	Rp 173.250
10	SAIFUL BAHRI, SH	19890305 201502 1 004	Pengantar Kerja Pertama Disnakertrans Prov. Sumbar	012/088/VII/BPKAD-2024	II/C	240,5 M²	80 M²	Jl. Garuda No.47 Tunggul Hitam Padang	Rp 198.000
11	ERIZAL	19740614 200701 1 004	Pengadministrasian Umum Disnakertrans Prov. Sumbar	012/089/VII/BPKAD-2024	II/B	368 M²	70 M²	Jl. Puyuh No. 8 Kel. Air Tawar Padang	Rp 173.250
12	MUHAMMAD ALI HOSRI, A.Md	19770820 200604 1 00	Pengolah Data Disnakertrans Prov. Sumbar	012/090/VII/BPKAD-2024	III/D	140 M²	35 M²	Jl. Todak No. 6A Ulak karang Padang	Rp 86.625
13	ELVIRA NOVITA, S.Sos, MH	19650323 198603 2 002	Pengawasa Ketenagakerjaan	012/091/VII/BPKAD-2024	III/D	200 M²	48 M²	Jl. Todak No. 6B Ulak karang Padang	Rp 118.800
14	JON SYAFRIDAL, S.Sos	19770413 200701 1 005	Mediator HI Pertama Disnakertrans Prov. Sumbar	012/092/VII/BPKAD-2024	III/E	133 M²	70 M²	Jl. Garuda No. 16 A Tunggul Hitam Padang	Rp 173.250
15	EKA NOVI RAHMAWATI, ST	19811126 201101 2 003	Fungsional Penguji K3 Disnakertrans Prov. Sumbar	012/093/VII/BPKAD-2024	II/C	370 M²	77 M²	Jl. Garuda No. 16 Tunggul Hitam Padang	Rp 190.575
16	DEDY ANDHIKA, S.Sos	19790506 200902 1 004	Analis Pengembangan SDM Aparatur	012/094/VII/BPKAD-2024	II/C	350 M²	100 M²	Jl. S. Parman No. 119 D Transito Padang	Rp 247.500
17	MUHAMMAD ARIF, ST	19820416 200901 1 005	Pengawas Ketenagakerjaan Muda Kerja Disnakertrans Prov. Sumbar	012/095/VII/BPKAD-2024	II/C	370 M²	77 M²	Jl. Garuda No. 52 Tunggul Hitam Padang	Rp 190.575
18	DEDI CANDRA, S.Pd	19620809 198303 1 010	Fungsional Umum BLK Padang Panjang	012/096/VII/BPKAD-2024	II/E	50 M²	45 M²	Jl. A. Yani No. 17 Komp. BLK Padang Panjang	Rp 111.375
19	DASNELI	19750108 200701 2 005	Pengadministrasi Umum UPTD BLK Padang Panjang	012/097/VII/BPKAD-2024	II/D	54 M²	45 M²	Jl. A. Yani No. 12 Komp. BLK Padang Panjang	Rp 111.375
20	RITA NOVRIANTI, SE, MM	19831112 200803 2 001	Kepala Seksi Pelatihan BLK Padang Panjang	012/098/VII/BPKAD-2024	II/D	54 M²	45 M²	Jl. A. Yani No. 19 Komp. BLK Padang Panjang	Rp 111.375

No	Data Penghuni			No. SIP	Gol./Type	L. Tnh (M²)	L. Bgnn (M²)	Alamat Rumah Dinas	Sewa/Bulan
	Nama	NIP	Jabatan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Drs. SURYADI BOY	19660915 198903 1 008	Kepala UPTD BLK Padang Panjang	012/099/VII/BPKAD-2024	II/C	70 M²	70 M²	Jl. A. Yani, SH No. 01 Komp BLK Padang Panjang	Rp 173.250
22	ELDO RESTU, S,P,M.Cio	19851221 201001 1 019	Pengawas Ketenagakerjaan	012/100/VII/BPKAD-2024	II/C	774 M²	80 M²	Jl. Hiu No 4 Transito Padang	Rp 198.000
23	HERAWATY	19760308 200801 2 002	Pengadministrasi Umum	012/101/VII/BPKAD-2024	III/E	198 M²	35 M²	Jl. Arwana No. 2 C Ulak Karang Padang	Rp 86.625
24	MUHAMMAD HAFAS, A.Md	19850920 201101 1 004	Pengelola Data Disnakertrans Prov. Sumbar	012/102/VII/BPKAD-2024	II/C	133 M²	70 M²	Jl. Mandala No. 23 B Tunggul Hitam Padang	Rp 173.250
25	NURSAL	19690423 200701 1 005	Staf Seksi Bina Syarat Kerja Jamsosial Disnakertrans Prov. Sumbar	012/103/VII/BPKAD-2024	II/C	490 M²	81 M²	Jl. Adinegoro Tabing Padang	Rp 200.475
26	WITNAWATI, A.Md	19820906 201503 2 002	Pranata barang dan Jasa BLK Padang Panjang	012/104/VII/BPKAD-2024	II/D	54 M²	45 M²	Jl. A. Yani No. 03 Komp BLK Padang Panjang	Rp 111.375
27	ERIZAL, A.Md	19631222 198603 1 005	Instruktur BLK Padang Panjang	012/105/VII/BPKAD-2024	II/D	54 M²	45 M²	Jl. A. Yani No.09 Komp BLK Padang Panjang	Rp 111.375
28	RYAN SATRIA, ST	19860423 201502 1 002	Instruktur Penyelia BLK Padang Panjang	012/106/VII/BPKAD-2024	II/D	54 M²	45 M²	Jl. A. Yani No.10 Komp BLK Padang Panjang	Rp 111.375
29	VIDDY KOSFI ASTRO, A.Md	19870526 201503 1 003	Instruktur Pelaksana Lanjutan BLK Padang Panjang	012/107/VII/BPKAD-2024	II/D	36 M²	36 M²	Jl. A. Yani No.10 Komp BLK Padang Panjang	Rp 89.100
30	YULIASTI, S.Kom	19681028 199203 2 004	Pengantar Kerja Muda Dinsanker Prov. Sumbar	012/108/VII/BPKAD-2024	III/D	200 M²	42 M²	Jl. Todak No. 02 Ulak Karang Padang	Rp 103.950
31	GUSFIANTI, S.Sos	19720816 201001 2 004	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	012/109/VII/BPKAD-2024	III/E	200 M²	48 M²	Jl. Todak No. 04 Ulak Karang Padang	Rp 118.800
32	JUPRI JHON	19800818 200901 1 012	Pengadministrasi Umum	012/110/VII/BPKAD-2024	III/E	160 M²	70 M²	Jl. Todak No. 06 C Ulak Karang Padang	Rp 173.250
33	NOVA AZRIANI, A.Md	19861112 202203 2 001	Verifikator Keuangan Disnakertrans	012/111/VII/BPKAD-2024	III/E	650 M²	100 M²	Jl. S. Parman No. 119B Padang	Rp 247.500
34	SATRIA EDI, S.Sos	19700808 199903 1 003	Kepala UPTD BLK Payakumbuh	012/112/VII/BPKAD-2024	II/D	200 M²	132 M²	Jl. Kamboja No. 11 Komp. BLK Payakumbuh	Rp 326.700
35	LOLA YULISMAN, S.Pd	19860626 202321 2 044	Ahli Pratama Instruktur BLK Padang Panjang	012/113/VII/BPKAD-2024	II/C	36 M²	36 M²	Jl. A. Yani No. 18 Komp BLK Padang Panjang	Rp 89.100
								jumlah	**Rp 5.360.850**
2	**DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT**								
1	DJEFRIZAL AMIR, S.Sos	19701231 199202 1 001	Kepala Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Sukarami Solok	012/006/XII/BPKAD-2024	II/C	-	42 M²	Jl. Raya Padang-Solok KM 40 Komp Andam Dewi Sukarami Solok	Rp 103.950
2	DILLA ARIESFIKA, S.Pd.I	19860415201502 2 001	Subag Tata Usaha PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar	012/007/XII/BPKAD-2024	II/C	-	70 M²	Jl. Raya Batusangkar-Padang Panjang KM 6 Jorong Supanjang Nagari Cubadak Batusangkar	Rp 173.250
3	LYZA ZUBIR, SE	19750709 201001 2 005	FU Seksi FM Pedesaan	012/008/XII/BPKAD-2024	III/D	-	20 M²	Jl. Hiu No.12 RT.01/RW.01 Kel. Ulak Karang Selatan Kec. Padang Utara Padang	Rp 49.500
4	M. NUR, S.ST	19690120 199102 1 002	Kasi Pelayanan Kebutuhan Jompo	012/009/XII/BPKAD-2024	II/C	-	40 M²	Jl. Raya Batusangkar-Padang Panjang KM 6 Jorong Supanjang Nagari Cubadak Batusangkar	Rp 99.000
5	ARMAYULIASTRI	19710418 199203 1 002	FU Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	012/010/XII/BPKAD-2024	III/D	-	20 M²	Jl. Hiu No.12 RT.01/RW.01 Kel. Ulak Karang Selatan Kec. Padang Utara Padang	Rp 49.500
6	INDAH TRISNA INSANI .STr. S.Sos	19960621 202203 2 001	Ahli Pratama Peksos PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar	012/011/XII/BPKAD-2024	II/C	-	32 M²	Jl. Raya Batusangkar-Padang Panjang KM 6 Jorong Supanjang Nagari Cubadak Batusangkar	Rp 89.100

No	Data Penghuni			No. SIP	Gol./Type	L. Tnh (M²)	L. Bgnn (M²)	Alamat Rumah Dinas	Sewa/Bulan
	Nama	NIP	Jabatan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	JUNITA, S.Sos	19730416 200901 2 003	Kasi Pengaturan Pengawasan & Perawatan Kasih Sayang Ibu Batusangkar	012/012/XII/BPKAD-2024	II/C	-	36 M²	Jl. Raya Batusangkar-Padang Panjang KM 6 Jorong Supanjang Nagari Cubadak Batusangkar	Rp 89.100
8	ROZA YUNITA, S.Ag	19710615 200901 2 001	Kepala Seksi PKK Tri Murni	012/013/XII/BPKAD-2024	II/C	-	70 M²	Komp Panti Sosial Tri Murni Jl. Sultan Sahril No. 170 Padang Panjang	Rp 173.250
9	SYAFLAN, S.Ag	19750101 201001 1 016	Kepala Seksi PKK Bina Remaja Harapan Padang Panjang	012/014/XII/BPKAD-2024	II/C	-	75 M²	Jl. Sutan Sahrir No.341 Komp Panti Sosial Bina Remaja Harapan Padang Panjang	Rp 185.625
10	HAINIRIWATI	19740426 2007 01 2 020	Pengadministrasi Umum PSAABR Budi Utama Lubuk Alung	012/015/XII/BPKAD-2024	II/C	-	67 M²	Komp PSAABR Budi Utama Jl. Kp. Durian Nagari Pasar Lubuk Alung	Rp 165.900
11	ARJULI EFENDI	19741231 200901 1 004	Pengadministrasian Umun PSAABR Budi Utama Lubuk Alung	012/016/XII/BPKAD-2024	II/C	-	67 M²	Komp PSAABR Budi Utama Jl. Kp. Durian Nagari Pasar Lubuk Alung	Rp 165.900
12	MASRIZAL, SH	19751112 201001 1 006	Pengadministrasi Umum PSAABR Budi Utama Lubuk Alung	012/017/XII/BPKAD-2024	II/C	-	67 M²	Komp PSAABR Budi Utama Jl. Kp. Durian Nagari Pasar Lubuk Alung	Rp 165.900
13	ISKANDAR, S.Pd	19700712 199003 1 007	Kepala UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung	012/018/XII/BPKAD-2024	II/C	-	70 M²	Komp PSAABR Budi Utama Jl. M. Yamin Pasar Lubuk Alung	Rp 173.250
14	ZAINAL SAFAR	19660605 200901 1 004	Staf TU Panti Sosial Tresda Werda Sabai Nan Aluih Sicincin	012/019/XII/BPKAD-2024	II/C	-	45 M²	Komp Panti Sosial Tresda Werda Sabai Nan Aluih Sicincin Jl. Raya Padang-Bukittinggi KM 48	Rp 111.400
15	ERNAL, S.ST.MM	19720525 199203 1 006	Kepala UPTD PSAA Tri Murni Padang Panjang	012/020/XII/BPKAD-20224	II/C	-	90 M	Komp Panti Sosial Tri Murni Jln. Sultan Syahril No. 170 Padang Panjang	Rp 222.750
16	BUSNAIDI	19801124 201001 1 008	Pengadministrasi Umum Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato Kalumbuk Padang	012/021/XII/BPKAD-2024	II/C	-	36 M²	Komp UPTD PSBN Tuah Sakato Jl. Wisma Bunda Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Padang	Rp 89.100
17	HENDRI NOVRIADI SYAM, SH	19761119 201001 1 006	FU Seksi Penanganan Fakir Miskin desa Dinas Sosial Prov. Sumbar	012/022/XII/BPKAD-2024	II/C	-	50 M²	Jl.Wisma Bunda Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Pdg	Rp 123.750
18	SUWITO, S.Sos	19670101 198903 1 011	Kasubag TU Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Sukarami Solok	012/023/XII/BPKAD-2024	II/C	-	32 M²	Jl. Raya Padang-Solok KM 40 Komp Andam Dewi Sukarami Solok	Rp 79.200
19	YUWIL HENDRA	19790803 201001 1 005	FU Sub Bagian Rehsos	012/024/XII/BPKAD-2024	III/D	-	20 M²	Jl. Hiu No.12 RT.01/RW.01 Kel. Ulak Karang Selatan Kec. Padang Utara Padang	Rp 49.500
20	AFRIZAL	19790423 200901 1 010	FU Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	012/025/XII/BPKAD-2024	III/D	-	20 M²	Jl. Hiu No.12 RT.01/RW.01 Kel. Ulak Karang Selatan Kec. Padang Utara Padang	Rp 49.500
21	AL IMAN	19830918 201001 1 016	FU Seksi PSKA	012/026/XII/BPKAD-2024	III/D	-	20 M²	Jl. Hiu No.12 RT.01/RW.01 Kel. Ulak Karang Selatan Kec. Padang Utara Padang	Rp 49.500
22	RATNA ALI	19710225 199303 2 003	JFT Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan UPTD PSBR Harapan Padang Panjang	012/027/XII/BPKAD-2024	II/C	70 M²	70 M²	Jl. Sutan Syahrir No.341 Komp PSBR Harapan Padang Panjang	Rp 173.250
23	ERMANSYAH, Ak, MM	19700314 199903 1 001	Kasi Pelayanan Kebutuhan dan Keperluan PSKW Andam Dewi	012/023/XII/BPKAD-2024	II/C	-	32 M²	Jl. Raya Padang-Solok KM 40 Komp Andam Dewi Sukarami Solok	Rp 79.200
								jumlah	**Rp 2.710.375**
3	**RSJ. HB. SAANIN PROVINSI SUMATERA BARAT**								
1	dr. YOSRIZAL	19890908 201903 1008	Dokter Umum Ahli Pratama	012/136/VII/BPKAD-2024	II/C	50 M²	36 M²	Komp. RSJ. HB Saanin No. 95 Padang	Rp 89.100
2	dr. SRI MULYANTI	19931225 201903 2 019	Dokter Pertama	012/137/VII/BPKAD-2024	II/C	50 M²	36 M²	Komp. RSJ. HB Saanin No. 99 Padang	Rp 89.100
3	NS. SOEJARWO, S.Kep	19900729 201903 1 013	Perawat	012/138/VII/BPKAD-2024	II/C	36 M²	21 M²	Komp. RSJ. HB Saanin No. 100 Padang	Rp 51.975

No	Data Penghuni			No. SIP	Gol./Type	L. Tnh (M²)	L. Bgnn (M²)	Alamat Rumah Dinas	Sewa/Bulan
	Nama	NIP	Jabatan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	DESTARI	19740805 199903 2 006	Perawat	012/139/VII/BPKAD-2024	II/C	36 M²	21 M²	Komp. RSJ. HB Saanin No. 102 Padang	Rp 51.975
5	RIDWAN ABADI, A.Md Kep	19871017 201101 1 001	Perawat	012/140/VII/BPKAD-2024	II/C	36 M²	21 M²	Komp. RSJ. HB Saanin No. 103 Padang	Rp 51.975
6	Ns. OKRITA SUNELVIA DEWI, S.Kep	19771030 199703 2 002	Perawat	012/141/VII/BPKAD-2024	II/C	36 M²	21 M²	Komp. RSJ. HB Saanin No. 104 Padang	Rp 51.975
7	IMRA YUDI PRATAMA, A.Md. S.Kep	19880404 201001 1 002	Perawat	012/142/VII/BPKAD-2024	II/C	36 M²	21 M²	Komp. RSJ. HB Saanin No. 105 Padang	Rp 51.975
8	Ns. CENDRA FITRIA, S.Kep	19780910 200003 2 004	Perawat	012/143/VII/BPKAD-2024	II/E	36 M²	21 M²	Komp. RSJ. HB Saanin No. 106 Padang	Rp 51.975
9	PEL ERIZON, S.Kep	19700416 199703 1 006	Perawat	012/144/VII/BPKAD-2024	II/E	36 M²	36 M²	Komp. RSJ. HB Saanin No. 108 Padang	Rp 89.100
10	Ns. ELYA SESPA, S.Kep	19670508 198803 2 005	Perawat	012/145/VII/BPKAD-2024	II/C	50 M²	21 M²	Komp. RSJ. HB Saanin No. 107 Padang	Rp 51.975
11	IKRAR DINATA	19760616 199903 1 008	Pelaksana	012/146/VII/BPKAD-2024	II/C	50 M²	36 M²	Komp. RSJ. HB Saanin No. 94 Padang	Rp 89.100
12	BAHRI PUTRA LUBIS, A.Md. Fis	19861028 201101 1 003	Psiotherapis	012/147/VII/BPKAD-2024	II/C	50 M²	36 M²	Komp. RSJ. HB Saanin No. 83 Padang	Rp 89.100
13	JENNIFER ASTRA, SST	19830807 201101 2 004	Psioteraphis	012/148/VII/BPKAD-2024	II/C	36 M²	21 M²	Komp. RSJ. HB Saanin No. 84 Padang	Rp 51.975
14	SANTI HARNAINI, A.Mk	19801130 201102 2 002	Perawat	012/149/VII/BPKAD-2024	II/C	50 M²	36 M²	Komp. RSJ. HB Saanin No. 97 RT.05/RW.07 Kel. Limau Manih Selatan Kec. Pauh Padang	Rp 89.100
15	MELYANTI, A.Mk	19730623 199703 2 002	Perawat	012/150/VII/BPKAD-2024	II/C	36 M²	21 M²	Komp. RSJ. HB Saanin No. 101 Padang	Rp 51.975
16	ULFA EKA DEWI	19691108 199003 2 003	Perawat	012/151/VII/BPKAD-2024	II/C	50 M²	36 M²	Komp. RSJ. HB Saanin No. 109 Padang	Rp 89.100
17	YENNI HERLINDA, A.Md	19800426 200701 2 002	Psioteraphis	012/152/VII/BPKAD-2024	II/C	50 M²	36 M²	Komp. RSJ. HB Saanin No. 96 Padang	Rp 89.100
18	INDAH SUCIATI, AMK	19790922 200901 2 002	Perawat	012/153/VII/BPKAD-2024	II/C	50 M²	36 M²	Komp. RSJ. HB Saanin No. 98 Padang	Rp 89.100
								jumlah	**Rp 1.269.675**
4	**RSAM BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT**								
1	drg. H. BUSRIL, MPH	19740227 200212 1 004	Direktur RSAM Bukittinggi	012/001/I/BPKAD-2024	II/C		230	Komp. RSAM Bukittinggi	Rp 280.606
2	dr. EDWAM AKBAR, Sp.Rad	19840413 201403 1 001	Dokter Spesialis Radiologi	012/002/I/BPKAD-2024	II/C		83 M²	Belakang Balok Bukittinggi	Rp 168.100
3	dr. RONIZA BASRI, Sp. An	19821103 200902 1 003	Dokter Spesialis Anestesi	012/003/I/BPKAD-2024	II/C		83 M²	Komp. RSAM Bukittinggi	Rp 144.660
4	dr. VERA YULIA, SpjP. FIHA	19800718 200901 2 002	Spesialis Speisalis Jantung	012/004/I/BPKAD-2024	II/C		42 M²	Komp. RSAM Bukittinggi	Rp 73.202
5	dr. ROSMAWATI, M.Kes (For) Sp.F	19680528 200604 2 004	Dokter Spesialis Forensik	012/005/I/BPKAD-2024	II/C		80 M²	Komp. RSAM Bukittinggi	Rp 139.432
6	dr. LINDA E,Sp.PD	19630911 199001 2 001	Spesialis Penyakit Dalam	012/006/I/BPKAD-2024	II/C		73,5 M²	Komp. RSAM Bukittinggi	Rp 139.432

No	Data Penghuni			No. SIP	Gol./Type	L. Tnh (M²)	L. Bgnn (M²)	Alamat Rumah Dinas	Sewa/Bulan
	Nama	NIP	Jabatan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	dr. RISBENNY, Sp.B	19710926 200501 1 005	Spesialis Bedah	012/007/I/BPKAD-2024	II/C		80 M²	Komp. RSAM Bukittinggi	Rp 139.432
8	dr. HAFIZAR	19870319 201403 1 001	Spesialis Urologi	012/008/I/BPKAD-2024	II/C		191 M²	Komp. RSAM Bukittinggi	Rp 472.725
								jumlah	**Rp 1.557.589**
5	**DINAS ESDM PROV. SUMBAR**								
1	ISMANTO	19801020 200901 1 006	Staf Umum dan Kepegegawaian	012/015/I/BPKAD-2024	II/C	300 M²	70 M²	Komplek Kodam D6 Siteba RT.03/RW.22 Kel. Surau Gadang Kec. Nanggalo Padang	Rp 173.250
2	ANDONI ERIZON, ST	19751023 200604 1 004	Kasi Invetarisasi Air Tanah dan Geologi	012/116/I/BPKAD-2024	II/C	300 M²	70 M²	Komplek Kodam D11 Siteba RT.03/RW.22 Kel. Surau Gadang Kec. Nanggalo Padang	Rp 173.250
3	AZRIL, A.ST	19691221 199103 1 007	Kasi Pengusahaan Pertambangan	012/017/I/BPKAD-2024	II/C	300 M²	70 M²	Komplek Kodam D7 Siteba RT.03/RW.22 Kel. Surau Gadang Kec. Nanggalo Padang	Rp 173.250
4	BENI HARPAN, ST	19831008 201001 1 030	JFT	012/018/I/BPKAD-2024	II/C	300 M²	70 M²	Komplek Kodam D10 Siteba RT.03/RW.22 Kel. Surau Gadang Kec. Nanggalo Padang	Rp 173.250
								Jumlah	**Rp 693.000**
6	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. SUMBAR**								
1	NOVRIAL, SE, MA.Ak	19661105 199403 1 005	Kepala Dinas Perindag Prov. Sumbar	012/063/V/BPKAD-2024	II/B	473 M²	164 M²	Jln. Situjuh No. 14 Padang	Rp 405.900
2	GUNAWAN	19701230 201001 1 004	Staf Bagian Umum & Kepegawaian Disperindag Prov. Sumbar	012/064/V/BPKAD-2024	III/D	200 M²	42 M²	Jl. Andam Dewi No.23 Marapalam Padang	Rp 85.500
3	LILI AHMADIN, S.Sos	19690809 199403 2 006	Kepala UPTD Logam Disperindag Prov. Sumbar	012/065/V/BPKAD-2024	III/D	200 M²	39 M²	Jl. Andam Dewi No.25 Marapalam Padang	Rp 79.000
4	YANUARDI, SE	19840131 201001 1 014	Staf Bagian Umum & Kepegawaian Disperindag Prov. Sumbar	012/066/V/BPKAD-2024	II/B	200 M²	59 M²	Jl. Andam Dewi No.21 Marapalam Padang	Rp 79.000
5	ELVIRA FITRIANI, A.Md	19910430 201403 2 001	Fungsional BPSMB Disperindag Prov. Sumbar	012/067/V/BPKAD-2024	II/C	-	77 M²	Jl. Belibis Air Tawar Padang (Komplek BPMB)	Rp 190.575
6	DARMAN, S.T, M.M	19830707 200604 1 005	Kepala UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Disperidag	012/068/V/BPKAD-2024	II/B	-	157 M²	Jl. Belibis No.3 Air Tawar Pdg (Komplek BPMB)	Rp 388.578
7	ISWAHYUNINGSIH, ST	19791017 200901 2 002	Fungsional BPMB Disperindag Prov. Sumbar	012/069/V/BPKAD-2024	II/C	-	59 M²	Jl. Belibis Air Tawar Padang (Komplek BPMB)	Rp 176.025
8	DESTIMERI	19680706 2007 2 009	Fungsional Umum pada Sub Bagian Keuangan Disperindag Prov. Sumbar	012/070/V/BPKAD-2024	III/D	200 M²	71 M²	Wisma Indah II Blok S/6 Padang	Rp 175.725
9	KRISTINALDI	19661225 199103 1 006	Staf Bidang Pengawasan Disperindag Prov. Sumbar.	012/071/V/BPKAD-2024	II/C	-	57 M²	Jl. Belibis No.3A Air Tawar Pdg (Komplek BPMB)	Rp 141.075
10	HERLISA	19671024 199403 2 006	Fungsional Umum Bidang Industri Non Argo	012/072/V/BPKAD-2024	II/C	-	57 M²	Jl. Belibis No.3A Air Tawar Pdg (Komplek BPMB)	Rp 144.075
								jumlah	**Rp 1.865.453**
7	**DINAS KEHUTANAN PROV. SUMBAR**								
1	YOZARWARDI .P, S.Hut, M.Si	19690406 199701 1 002	Kepala Dinas	012/019/II/BPKAD-2024	II/A	724 M²	262 M²	Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No.13 RT. 01/RW.01 Kel. Flamboyan Baru Padang	Rp 648.450

No	Data Penghuni			No. SIP	Gol./Type	L. Tnh (M²)	L. Bgnn (M²)	Alamat Rumah Dinas	Sewa/Bulan
	Nama	NIP	Jabatan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	RIZKI HAMID NASUTION, S.Hut	19821020 201001 1 018	Kasubag Umum dan Kepegawaian	012/020/II/BPKAD-2024	III/C	80 M²	80 M²	Jl. Kampung Kalawi No. 15 Kel Lubuk Lintah Kec. Kuranji	Rp 198.000
3	YENI EFRIYETTY	19711211 200701 2 007	Staf Dishut Prov. Sumbar	012/021/II/BPKAD-2024	II/D	60 M²	48 M²	Jl. Raden Saleh No. 8 A RT.01/RW.01 Kel Flamboyan Baru Kec. Padang Barat	Rp 118.800
4	SAYOGO HUTOMO, S.Hut. MP	19750228 200303 1 003	Kabid Perencanaan & Pemanfaatan Hutan	012/022/II/BPKAD-2024	II/A	600 M²	228,5 M²	Jl. Beringin III No. 14 Kel. Lolong Belanti Kec. Padang Utara Padang	Rp 565.500
5	LISMAI ANITA	19661231 199103 2 033	Pengadmisnistrasi Umum	012/023/II/BPKAD-2024	II/D	100 M²	84 M²	Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No.8 RT. 01/RW.01 Kel. Flamboyan Baru Padang	Rp 207.900
6	MARDIAS	19681010 200701 012	Pelaksana	012/024/II/BPKAD-2024	II/D	100 M²	84 M²	Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No.9 RT. 01/RW.01 Kel. Flamboyan Baru Padang	Rp 207.900
7	M. RIZAL	19760603 200801 1 005	Staf Dinas Kehutanan Prov. Sumbar	012/025/II/BPKAD-2024	II/D	80 M²	60 M²	Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No.8 RT. 01/RW.01 Kel. Flamboyan Baru Padang	Rp 148.500
8	BERTA DEWINA, S.Hut	19781126 201101 2 003	Pelaksana	012/026/II/BPKAD-2024	II/B	366 M²	105 M²	Jl. Gunung Pangilun No.41/E Kel. Kampung Olo Kec. Nanggalo Padang	Rp 259.875
9	ZEPTIN ALEK VILDIRO, S.Hut, MM	19800910 200312 1 002	Kasi PKSDAE-PM UPTD KPHL	012/027/II/BPKAD-2024	II/B	400 M²	105 M²	Jl. Gunung Pangilun No. 41 C Kel. Kampung Olo Kec. Nanggalo Padang	Rp 259.875
10	NEVIN, S.Hut, M.Si	19641208 198503 1 004	Polisi Kehutanan	012/028/II/BPKAD-2024	III/C	400 M²	120 M²	Jl. Jati Rawang No. 87 Kel Jati Baru Kec. Padang Timur	Rp 297.000
11	SARNI, SH	19650101 199003 1 018	Polisi Kehutanan Madya	012/029/II/BPKAD-2024	II/B	400 M²	105 M²	Jl. Gunung Pangilun No. 41 C Kel. Kampung Olo Kec. Nanggalo Padang	Rp 259.875
12	JUSMALINDA, S.Hut,M.Si	19710113 199701 2 003	Perencana Madya	012/030/II/BPKAD-2024	II/B	366 M²	105 M²	Jl. Gunung Pangilun No.41/D Kel. Kampung Olo Kec. Nanggalo Padang	Rp 259.875
13	MARDIRIZAL	19691021 200701 1 002	Pelaksana	012/031/II/BPKAD-2024	II/C	120 M²	74 M²	Jl. Jati Rawang No. 85 Kel Jati Baru Kec. Padang Timur	Rp 183.150
14	DARSEHA	19720107 200701 2 007	Pelaksana	012/032/II/BPKAD-2024	II/D	120 M²	100 M²	Jl. Sumbawa No. 10 A Kel. Lolong Belanti Padang	Rp 247.500
15	NATRAN HANDRI, S.Hut	19800131 200501 1 007	Analis Hasil Hutan	012/033/II/BPKAD-2024	III/C	80 M²	80 M²	Jl. Kampung Kalawi No. 20 Kel Lubuk Lintah Kec. Kuranji	Rp 198.000
16	BOY MARTIN, SH, Msi	19740616 199403 1 002	Kepala UPTD KPHL Agam Raya	012/034/II/BPKAD-2024	III/C	80 M²	80 M²	Jl. Kampung Kalawi No. 19 Kel Lubuk Lintah Kec. Kuranji	Rp 198.000
17	MUHDIAN PRASETYA DARMAWAN, S.Hut, M.Si	19830304 199903 1 002	Pengendali Ekosistem Hutan Muda	012/035/II/BPKAD-2024	III/C	80 M²	80 M²	Jl. Kampung Kalawi No. 18 Kel Lubuk Lintah Kec. Kuranji	Rp 198.000
18	RIYOS ZANEA PUTRA, SE	19730503 199301 1 001	Kasi TU UPTD KPHL Hulu Batang Hari	012/036/II/BPKAD-2024	III/C	80 M²	80 M²	Jl. Kampung Kalawi No. 17 Kel Lubuk Lintah Kec. Kuranji	Rp 198.000
19	ANDRE JUNIOR DAS GOMES, S.Hut	19740911 199603 1 001	Kasi Perlindungan KSDAE dan PM UPTD KPHP Pessel	012/037/II/BPKAD-2024	III/C	80 M²	80 M²	Jl. Kampung Kalawi No. 16 Kel Lubuk Lintah Kec. Kuranji	Rp 198.000
20	ROMI PERMANA, S.Hut	19801013 200003 1 002	Pelaksana	012/038/II/BPKAD-2024	II/B	80 M²	80 M²	Jl. Kampung Kalawi No. 3 Kel Lubuk Lintah Kec. Kuranji	Rp 198.000
21	CUCU SUKARNA, S.IP	196810 199203 1 003	Kepala UPTD KPHL Lima Puluh Kota	012/039/II/BPKAD-2024	II/D	80 M²	80 M²	Jl Pertanian Kel. Labuah Kota Payakumbuh	Rp 198.000
22	YANDESMAN, S.Hut	19720909 200003 1 004	Kepala UPTD KPHL Sijunjung	012/040/II/BPKAD-2024	II/D	80 M²	80 M²	Jl. Sudirman No. 19 Kel. Muaro Kab. Sijunjung	Rp 198.000
23	PUTRI, A.Md	19990131 202203 2 003	Staf UPTD KPHL Kota Solok	012/041/II/BPKAD-2024	II/D	40 M²	40 M²	Jl. Letnan M. Jamhur Aia Mati Kota Solok	Rp 99.000
24	SUSI HANDAYANI, SE	19780818 200701 2 007	Staf UPTD KPHL Kota Solok	012/042/II/BPKAD-2024	II/D	40 M²	40 M²	Jl. Letnan M. Jamhur Aia Mati Kota Solok	Rp 99.000

No	Data Penghuni			No. SIP	Gol./Type	L. Tnh (M²)	L. Bgnn (M²)	Alamat Rumah Dinas	Sewa/Bulan
	Nama	NIP	Jabatan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	ELLY SURYANI, SE	19710301 200604 2 011	Staf UPTD KPHL Kota Solok	012/043/II/BPKAD-2024	II/D	40 M²	40 M²	Jl. Letnan M. Jamhur Aia Mati Kota Solok	Rp 99.000
26	WELMAN FITRI, S.Sos	19690104 200701 1 007	Staf UPTD KPHL Kota Solok	012/044/II/BPKAD-2024	II/D	40 M²	40 M²	Jl. Letnan M. Jamhur Aia Mati Kota Solok	Rp 99.000
27	ARDHAN YULIAN, S.Hut	19800714 201502 1 003	Pelaksana	012/045/II/BPKAD-2024	III/C	80 M²	80 M²	Jl. Kampung Kalawi No. 2 Kel Lubuk Lintah Kec. Kuranji	Rp 198.000
28	RONNI YULIUS	19860320 200901 1 001	Staf UPTD KPHL Lima Puluh Kota	012/046/II/BPKAD-2024	II/D	-	30 M²	Jl. Sarilamak Labuah Panjang Kab. Lima Puluh Kota	Rp 74.250
29	AFRIAL MUHAMMAD, S.Pt, M.Si	19740801 199903 1 007	Kepala UPTD KPHP Mentawai	012/047/II/BPKAD-2024	III/C	80 M²	80 M²	Jl. Kampung Kalawi No. 12 Kel Lubuk Lintah Kec. Kuranji	Rp 198.000
30	Ir. MGO SENATUNG, MP	19680610 198403 1 008	Kabid Perlindungan dan KSDAE Prov. Sumbar	012/048/II/BPKAD-2024	III/C	80 M²	80 M²	Jl. Kampung Kalawi No. 10 Kel Lubuk Lintah Kec. Kuranji	Rp 198.000
31	FAUZIMAR	19690206 200701 1 009	Pelaksana	012/049/II/BPKAD-2024	III/C	80 M²	80 M²	Jl. Kampung Kalawi No. 8 Kel Lubuk Lintah Kec. Kuranji	Rp 198.000
32	RINI HASMIRA, SH	19740221 200801 2 001	Kasubag TU UPTD KPHL Bukit Barisan	012/050/II/BPKAD-2024	III/C	80 M²	80 M²	Jl. Kampung Kalawi No. 1 Kel Lubuk Lintah Kec. Kuranji	Rp 198.000
33	BAMBANG SUYONO, S.Hut	19720907 199903 1 002	Kabid Perlindungan Hutan dan KSDAE	012/051/II/BPKAD-2024	III/C	80 M²	80 M²	Jl. Kampung Kalawi No. 9 Kel Lubuk Lintah Kec. Kuranji	Rp 198.000
34	RINTA VESWARI, A.Md	19920207 201502 2 003	Bendahara Pengeluaran Dishut Prov. Sumbar	012/052/II/BPKAD-2024	II/D	60 M²	48 M²	Jl. Jaksa Agung S. Soeprapto No. 9 RT.01/RW.01 Kel Flamboyan Baru Kec. Padang Barat	Rp 118.800
35	RICKY MARTIN, S.Psi, M.Si	19751128 200604 1 009	Analis Dmapak Perubahan Iklim	012/053/II/BPKAD-2024	II/D	120 M²	100 M²	Jl. Sumbawa No. 10 B Kel. Ulak Karang Padang	Rp 247.500
36	ARIO TAFTANI, ST	19870207 201403 1 001	Pelaksana	012/054/II/BPKAD-2024	III/C	80 M²	80 M²	Jl. Kampung Kalawi No. 4 Kel Lubuk Lintah Kec. Kuranji	Rp 198.000
37	BUDIMAN K, A.Md	19771116 201101 1 002	Pengurus Barang Milik Daerah	012/055/II/BPKAD-2024	II/B	200 M²	105 M²	Jl. Gunung Pangilun No. 41 A Kel. Kampung Olo Kec. Nanggalo Padang	Rp 259.875
38	SYAFRIL	19670406 200701 1 005	Pelaksana	012/056/II/BPKAD-2024	II/D	80 M²	80 M²	Jl. Jaksa Agung S. Soeprapto No. 9 RT.01/RW.01 Kel Flamboyan Baru Kec. Padang Barat	Rp 198.000
39	RINI PUSPASARI SYAM, SP	19840121 200802 2 001	Analis Laboratorium	012/057/II/BPKAD-2024	III/C	80 M²	80 M²	Jl. Kampung Kalawi No. 7 Kel Lubuk Lintah Kec. Kuranji	Rp 198.000
40	MIKA LESTARIA, S.Hut, M.Si	19820917 200902 2 002	Sub Koordinator Informasi & Peredaran	012/058/II/BPKAD-2024	III/C	80 M²	80 M²	Jl. Kampung Kalawi No. 21 Kel Lubuk Lintah Kec. Kuranji	Rp 198.000
41	NOFRIZAL M, S.Hut	19831105 201001 1 013	Pengendali Ekosistem Hutan Muda	012/059/II/BPKAD-2024	III/C	80 M²	80 M²	Jl. Kampung Kalawi No. 5 Kel Lubuk Lintah Kec. Kuranji	Rp 198.000
42	ALMEN, S.Hut	19780821 201101 1 001	Penyuluh Kehutanan Muda	012/060/II/BPKAD-2024	III/C	80 M²	80 M²	Jl. Kampung Kalawi No. 14 Kel Lubuk Lintah Kec. Kuranji	Rp 198.000
43	SISKA AMELIA, S.Hut	19851119 201001 2 010	Pelaksana	012/061/II/BPKAD-2024	III/C	80 M²	80 M²	Jl. Kampung Kalawi No. 13 Kel Lubuk Lintah Kec. Kuranji	Rp 198.000
44	FATMA YULIS	19771130 200701 2 009	Pelaksana	012/114/V/BPKAD-2024	II/D	110 M²	91 M²	Jl. Jaksa Agung S. Soeprapto No. 9 RT.01/RW.01 Kel Flamboyan Baru Kec. Padang Barat	Rp 222.750
45	MELDA YENI, S.Hut	19960516 202203 2 011	Polisi Kehutanan Pratama	012/115/V/BPKAD-2024	III/C	80 M²	80 M²	Jl. Kampung Kalawi No. 6 Kel Lubuk Lintah Kec. Kuranji	Rp 198.000
46	DASRIZAL ANTOMMY, SE	19971219 202203 1 004	Penyusun Laporan Keuangan	012/116/V/BPKAD-2024	III/C	80 M²	80 M²	Jl. Kampung Kalawi No. 11 Kel Lubuk Lintah Kec. Kuranji	Rp 198.000
47	YON FREDDY, S.Hut	19720303 200501 1 004	Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPHL Bukit Barisan	012/168/XI/BPKAD-2024	III/C	80 M²	80 M²	Jl. Kampung Kalawi No. 19 Kel Lubuk Lintah Kec. Kuranji	Rp 198.000

No	Data Penghuni			No. SIP	Gol./Type	L. Tnh (M²)	L. Bgnn (M²)	Alamat Rumah Dinas	Sewa/Bulan
	Nama	NIP	Jabatan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	SIDIQ PAMUNGKAS, S.Hut	19930508 202301 1 020	Polisi Kehutanan Ahli Pratama	012/169/XI/BPKAD-2024	II/D	60 M²	48 M²	Jl. Jaksa Agung S. Soeprapto No. 9 RT.01/RW.01 Kel Flamboyan Baru Kec. Padang Barat	Rp 118.800
49	SYURYA HADI DHARMA TANJUNG, S.Hut	19950120 202301 1 015	Polisi Kehutanan Ahli Pratama	012/170/XI/BPKAD-2024	II/D	80 M²	80 M²	Jl. Jaksa Agung S. Soeprapto No. 9 RT.01/RW.01 Kel Flamboyan Baru Kec. Padang Barat	Rp 198.000
								Jumlah	**Rp 10.250.175**
8	**DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN HULTIKULTURA PROV. SUMBAR**								
1	FEBRINA TRI SUSILA PUTRI, SP, M.Si	19750209 200003 2 003	Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	012/117/VII/BPKAD-2024	II/A	600 M²	300 M²	Jl. Gandoriah No. 25 Kel. Jati Baru Padang	Rp 330.500
2	THOIBAH	19690510 200901 2 002	Staf UPTD BPPP	012/118/VII/BPKAD-2024	II/C	-	36 M²	Komp Diklat BDP Bandar Buat No. 209 Padang	Rp 89.100
3	DESI RATNA, S.Si	19870217 201502 2 002	Staf UPTD BPPP	012/119/VII/BPKAD-2024	III/C	-	36 M²	Komp Diklat BDP Bandar Buat No. 215 Padang	Rp 89.100
4	SAIDIL ANAM	19890710 201502 1 002	Staf Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan & Hortikultur	012/120/VII/BPKAD-2024	III/C	-	36 M²	Komp Diklat BDP Bandar Buat No. 212 Padang	Rp 89.100
5	GUSNIARNI, SE, M.Si	19710813 199803 2 003	Widyaswara	012/121/VII/BPKAD-2024	II/C	-	36 M²	Komp Diklat BDP Bandar Buat No. 211 Padang	Rp 89.100
6	AMRAL, SE	19750310 200801 1 003	Staf Perkebunan Tanaman Pangan & Hultikutura	012/122/VII/BPKAD-2024	III/C	-	50 M²	Komp Diklat BDP Bandar Buat No. 219 Padang	Rp 123.750
7	NUR EFENDI	19790617 200901 1 008	Staf UPTD BPPP	012/123/VII/BPKAD-2024	II/C	-	36 M²	Komp Diklat BDP Bandar Buat No. 213 Padang	Rp 89.100
8	JONI GUSNALDI	19810609 200901 1 009	Penyusun Laporan Keuangan	012/124/VII/BPKAD-2024	III/C	-	50 M	Komp Diklat BDP Bandar Buat No. 220 Padang	Rp 123.750
9	ABDUL RAHMAN	19770617 200801 1 002	Staf UPTD BPPP	012/125/VII/BPKAD-2024	III/C	-	36 M²	Komp Diklat BDP Bandar Buat No. 214 Padang	Rp 89.100
10	Dr. FERDINAL ASMIN, S.TP, MP	19790910 200801 1 001	-	012/126/VII/BPKAD-2024	III/C	-	36 M²	Komp Diklat BDP Bandar Buat No. 216 Padang	Rp 89.100
11	TRIEVA SANDORA, SP, MM	19700221 200801 2 001	Kasi Pengembangan Prasarana Pertanian	012/127/VII/BPKAD-2024	III/C	-	70 M²	Komp Diklat BDP Bandar Buat No. 223 Padang	Rp 173.250
12	RINOFI	19741025 200003 1 004	Widyaiswara	012/128/VII/BPKAD-2024	III/C	-	70 M²	Komp Diklat BDP Bandar Buat No. 221 Padang	Rp 173.250
13	DEDI ASRIL	19781003 200701 1 101	Staf Sekretariat	012/129/VII/BPKAD-2024	III/C	-	50 M²	Komp Diklat BDP Bandar Buat No. 219 Padang	Rp 123.750
14	SYOFRINALDI NASRIDA PUTRA, SP	19790214 200604 1 005	Kepala UPTD BMSPP	012/130/VII/BPKAD-2024	III/C	-	70 M²	Komp Diklat BDP Bandar Buat No. 224 Padang	Rp 173.250
15	RONI VICHALDRY, SP	19830325 201101 1 006	Staf Bidang Tanhungar	012/131/VII/BPKAD-2024	III/C	-	36 M²	Jl. Delima No. 77 G Rasuna Said Padang	Rp 89.100
16	RINA MARTIN, SP, M.Si	19740825 200801 2 001	Kepala UPTD BBI	012/132/VII/BPKAD-2024	II/C	-	50 M²	I BBI Lubuk Minturun Padang	Rp 123.750
17	SYAIFULLAH	19790731 201212 1 002	Staf UPTD BPSB	012/133/VII/BPKAD-2024	III/C	-	36 M²	I BPSB Bukittinggi	Rp 89.100
18	YOPI PRATAMA, SP	19870903 201403 1 003	Kasi Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih	012/134/VII/BPKAD-2024	III/C	-	36 M²	I BPSB Bukittinggi	Rp 89.100

No	Data Penghuni			No. SIP	Gol./Type	L. Tnh (M²)	L. Bgnn (M²)	Alamat Rumah Dinas	Sewa/Bulan
	Nama	NIP	Jabatan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	YENI ASRIDA, SP, MM	198003 202006 2 008	Kasi Pengembangan Sarana Pertanian	012/135/VII/BPKAD-2024	III/C	-	36 M²	I BMSPP Bukittinggi	Rp 89.100
								Jumlah	**Rp 480.150**
9	**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT**								
1	SUKARLI, S.Pt, M.Si	19721024 200003 1 002	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	012/155/VIII/BPKAD-2024	II/A	600 M²	155 M²	Jl. Gandoriah Kel. Jati Baru kec. Padang Timur Kota Padang	Rp 431.195
2	AIDA YUSTITI, S.Pt	19741217 200801 2 004	Kasi Produksi ternak Unggas	012/156/VIII/BPKAD-2024	II/A	55 M²	55 M²	Jl. Soekarno Hatta Nagari Lingkuang Aua Jorong Pasaman baru Kab. Pasaman Barat	Rp 111.350
3	ZULFAHMI, S.ST	19750510 200801 1 004	Kasi Produksi UPTD Ternak Ruminansia	012/157/VIII/BPKAD-2024	II/C	36 M²	36 M²	Komp. Peternakan UPTD Ternak Ruminansia, Jorong Air Rundiang, Kec. Pasaman Kab. Pasaman	Rp 89.100
								Jumlah	**Rp 631.645**
10	**DINAS PARIWISATA PROVINSI SUMATERA BARAT**								
1	Drs. LUHUR BUDIANDA, Sy, M.Si	19701006 198908 1 001	Kepala Dinas Pariwisata Prov. Sumbar	012/158/IX/BPKAD-2024	II/B	339 M²	233 M²	Jl. Danau Dibawah No.7 RT.02/RW.01 Komp Pondok Mungil Ampang Indah Padang	Rp 569.250
2	ERIANTO	19731111 200701 1 005	Staf Dinas Pariwisata Prov. Sumbar	012/159/IX/BPKAD-2024	II/B	257 M²	150 M²	Jl. Danau Dibawah No.3 RT.02/RW.01 Komp Pondok Mungil Ampang Indah Padang	Rp 371.250
3	RIKO MARTINO	19780323 200801 1 004	Pengurus Barang Dinas Pariwisata Prov. Sumbar	012/160/IX/BPKAD-2024	II/B	257 M²	150 M²	Jl. Danau Dibawah No.2 RT.02/RW.01 Komp Pondok Mungil Ampang Indah Padang	Rp 371.250
4	MEITA RATNA NIG TYAS, M.Si	19850524 200801 2 001	Kasubag Program & Keuangan Dinas Pariwisata Prov. Sumbar	012/161/IX/BPKAD-2024	II/B	257 M²	150 M²	Jl. Danau Dibawah No.4 RT.02/RW.01 Komp Pondok Mungil Ampang Indah Padang	Rp 371.250

No	Data Penghuni			No. SIP	Gol./Type	L. Tnh (M²)	L. Bgnn (M²)	Alamat Rumah Dinas	Sewa/Bulan
	Nama	NIP	Jabatan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Jumlah	**Rp 1.683.000**
11	**DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT**								
1	YUNI ANDRA, SKM, MM	19800614 200501 1 003	Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumbar	012/062/V/BPKAD-2024	II/B	864 M²	123 M²	Jl. Koto Tinggi No.07 Padang	Rp 304.425
								Jumlah	**Rp 304.425**
12	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**								
1	Dr. RETI WAFDA, M.Tp	19670312 199308 2 001	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	012/073/V/BPKAD-2024	II/B	587 M²	153 M²	Jl. Taman Siswa NO. 4 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Padang	Rp 304.425
2	YOFRIANTO, S.St, Pt	19710108 199203 1 007	Kepala pelabuhan Perikanan Sikakap Memtawai	012/074/V/BPKAD-2024	II/D	250 M²	70 M²	Komplek PPP Sikakap Kab. Mentawai	Rp 141.719
3	BASRA	19731220 200003 1 002	Staf Pelabuhan Perikanan Sikakap Mentawai	012/075/V/BPKAD-2024	II/D	250 M²	70 M²	Komplek PPP Sikakap Kab. Mentawai	Rp 141.719
4	AGUS SALIM, SH	19710805 199903 1 002	Kasi Tata Operasional Pelabuhan Perikanan Sikakap	012/165/X/BPKAD-2024	II/D	50 M²	50 M²	Komplek PPP Sikakap Kab. Mentawai	Rp 101.228
5	ERI JUSNITA	19830603 201001 2 005	Kasi TU Wil III Sikakap	012/166/X/BPKAD-2024	II/D	50 M²	50 M²	Komplek PPP Sikakap Kab. Mentawai	Rp 101.228
6	ALI AMRAN, S.Kom	19740602200901 1 008	Kasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan	012/167/X/BPKAD-2024	II/D	50 M²	50 M²	Komplek PPP Sikakap Kab. Mentawai	Rp 101.228
								Jumlah	**Rp 891.547**
13	**RSUD M. NATSIR SOLOK**								
1	dr. FATIMAH SINDI, Sp.A	19841226 201403 2 001	Dokter Spesialis Anak	012/154/VIII/BPKAD-2024	II/C	-	86 M²	Kel IX Korong Kec. Lubuak Sikarah Solok	Rp 212.850
2	dr. HONDRIZAL, Sp.M	19710911 200501 1 004	Dokter Spesialis Mata	012/162/IX/BPKAD-2024	II/C	-	86 M²	Kel IX Korong Kec. Lubuak Sikarah Solok	Rp 212.850
3	dr. ABDUL RAZIQ JAMIL, Sp.B	19710318 200210 1 001	Dokter Spesialis Bedah	012/163/IX/BPKAD-2024	II/C	-	86 M²	Kel IX Korong Kec. Lubuak Sikarah Solok	Rp 212.850
4	dr. VANDRA BINA RIYANDRA, Sp.B-KBD	19860412 201101 1 009	Dokter Spesialis Bedah Digestif	012/164/IX/BPKAD-2024	II/C	-	86 M²	Kel IX Korong Kec. Lubuak Sikarah Solok	Rp 212.850
								Jumlah	**Rp 851.400**

Lampiran 50

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Penetapan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	PKB	BBNKB	PBBKB	PAP	PAJAK ROKOK	JUMLAH
1	Kb. Pesisir Selatan	5.932.976.454,00	2.366.777.559,00	24.609.925.410,00	214.963.037,00	-	33.124.642.460,00
2	Kb. Solok	4.467.770.375,00	1.668.595.566,00	14.051.699.299,00	681.938.320,00	-	20.870.003.560,00
3	Kb. Sijunjung	3.510.374.149,00	1.387.826.657,00	13.050.016.755,00	55.226.710,00	-	18.003.444.271,00
4	Kb. Tanah Datar	4.313.331.423,00	1.517.173.514,00	15.384.862.765,00	990.220.716,00	-	22.205.588.418,00
5	Kb. Padang Pariaman	4.954.087.404,00	1.798.324.117,00	23.113.219.381,00	53.446.673,00	-	29.919.077.575,00
6	Kb. Agam	5.202.076.974,00	1.860.872.309,00	19.942.062.284,00	66.495.159,00	-	27.071.506.726,00
7	Kb. Lima Puluh Kota	4.406.992.083,00	1.670.756.285,00	14.152.945.996,00	54.292.347,00	-	20.284.986.711,00
8	Kb. Pasaman	3.708.305.413,00	1.460.584.967,00	11.064.279.135,00	60.302.213,00	-	16.293.471.728,00
9	Kb. Mentawai	3.760.421.079,00	1.429.450.192,00	12.037.929.689,00	53.233.889,00	-	17.281.034.849,00
10	Kb. Pasaman Barat	4.149.943.475,00	1.710.788.450,00	13.485.175.861,00	322.396.426,00	-	19.668.304.212,00
11	Kb. Solok Selatan	3.621.875.625,00	1.451.608.800,00	13.528.049.207,00	126.487.928,00	-	18.728.021.560,00
12	Kb. Dharmasraya	3.801.253.820,00	1.528.623.806,00	16.321.017.625,00	98.119.667,00	-	21.749.014.918,00
13	Kt. Padang	6.101.262.465,00	2.340.714.492,00	19.150.080.584,00	193.297.637,00	-	27.785.355.178,00
14	Kt. Solok	2.172.079.166,00	779.129.846,00	6.838.855.404,00	55.672.040,00	-	9.845.736.456,00
15	Kt. Sawahlunto	2.249.571.324,00	805.889.009,00	7.865.792.991,00	69.428.144,00	-	10.990.681.468,00
16	Kt. Padang Panjang	1.911.880.247,00	685.425.946,00	5.716.001.692,00	60.417.796,00	-	8.373.725.681,00
17	Kt. Bukittinggi	2.511.364.709,00	844.504.301,00	7.068.136.469,00	54.021.033,00	-	10.478.026.512,00
18	Kt.Payakumbuh	2.455.895.895,00	888.778.511,00	8.372.014.740,00	74.918.542,00	-	11.791.607.688,00
19	Kt. Pariaman	2.421.608.824,00	874.295.597,00	8.539.408.766,00	53.233.889,00	-	11.888.547.076,00
	Total	**71.653.070.904,00**	**27.070.119.924,00**	**254.291.474.053,00**	**3.338.112.166,00**	**-**	**356.352.777.047,00**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
REKAPITULASI KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM MENDAFTAR ULANG 5 TAHUN TERAKHIR

NO	UPTD	2020		2021		2022		2023		2024		JUMLAH	
		UNIT	POKOK	UNIT	POKOK	UNIT	POKOK	UNIT	POKOK	UNIT	POKOK	UNIT	POKOK
1	PADANG	28.357,00	33.826.107.700,00	28.886,00	28.547.242.000,00	31.384,00	26.729.182.350,00	46.508,00	34.966.120.600,00	58.686,00	27.008.388.200,00	193.821,00	151.077.040.850,00
2	BUKITTINGGI	5.967,00	5.640.397.350,00	6.959,00	5.507.749.600,00	7.272,00	5.609.824.100,00	11.798,00	7.552.801.550,00	15.070,00	5.699.222.050,00	47.066,00	30.009.994.650,00
3	BATUSANGKAR	4.601,00	3.967.904.800,00	5.066,00	3.535.396.850,00	5.316,00	3.455.983.200,00	7.650,00	4.360.616.200,00	9.047,00	3.139.660.250,00	31.680,00	18.459.561.300,00
4	PULAU PUNJUNG	5.760,00	6.207.317.450,00	5.183,00	4.569.029.200,00	5.977,00	4.448.526.950,00	7.598,00	5.335.773.600,00	8.395,00	3.548.464.000,00	32.913,00	24.109.111.200,00
5	SARILAMAK	4.952,00	4.095.062.000,00	4.886,00	3.495.064.850,00	4.917,00	3.210.318.450,00	6.997,00	3.976.453.650,00	8.308,00	2.665.280.100,00	30.060,00	17.442.179.050,00
6	AROSUKA	4.139,00	3.792.407.450,00	5.067,00	3.851.804.150,00	5.249,00	3.738.590.400,00	7.486,00	4.873.996.300,00	8.314,00	3.240.938.800,00	30.255,00	19.497.737.100,00
7	PARIAMAN	5.421,00	4.584.178.750,00	5.407,00	4.150.756.700,00	5.793,00	3.825.493.800,00	8.996,00	4.904.313.000,00	11.085,00	3.553.572.150,00	36.702,00	21.018.314.400,00
8	KOTA PARIAMAN	3.299,00	2.934.862.050,00	3.433,00	2.506.020.600,00	3.392,00	2.285.541.650,00	5.715,00	3.141.911.000,00	7.147,00	2.303.364.950,00	22.986,00	13.171.700.250,00
9	SOLOK	3.413,00	3.292.493.150,00	3.950,00	3.113.183.450,00	3.950,00	3.113.183.450,00	5.839,00	3.459.876.750,00	7.064,00	2.610.007.100,00	24.216,00	15.588.743.900,00
10	LUBUK BASUNG	3.534,00	3.157.817.600,00	3.717,00	2.774.718.900,00	4.200,00	2.731.626.300,00	5.963,00	3.591.216.850,00	7.036,00	2.447.282.250,00	24.450,00	14.702.661.900,00
11	LUBUK SIKAPING	3.208,00	2.958.206.050,00	3.672,00	2.696.428.750,00	3.990,00	2.621.179.650,00	5.629,00	3.160.584.450,00	6.463,00	2.161.998.500,00	22.962,00	13.598.397.400,00
12	PADANG PANJANG	2.123,00	1.843.927.800,00	2.231,00	1.632.331.000,00	2.253,00	1.572.427.300,00	3.836,00	2.091.745.850,00	5.027,00	1.555.013.750,00	15.470,00	8.695.445.700,00
13	PAINAN	7.809,00	7.628.042.400,00	7.222,00	5.805.740.150,00	8.899,00	6.254.701.000,00	12.371,00	8.008.367.150,00	14.253,00	5.038.391.450,00	50.554,00	32.735.242.150,00
14	SIMPANG EMPAT	7.322,00	7.217.160.950,00	8.088,00	6.615.379.150,00	10.630,00	6.997.738.550,00	12.946,00	7.823.327.600,00	13.740,00	4.911.707.750,00	52.726,00	33.565.314.000,00
15	PAYAKUMBUH	6.542,00	5.968.408.750,00	7.231,00	5.740.604.150,00	7.822,00	5.367.791.400,00	11.162,00	7.027.444.850,00	12.602,00	4.706.108.700,00	45.359,00	28.810.357.850,00
16	SAWAHLUNTO	1.422,00	1.672.810.700,00	1.620,00	1.588.998.150,00	1.676,00	1.377.111.400,00	2.390,00	1.550.500.950,00	3.123,00	1.170.000.100,00	10.231,00	7.359.421.300,00
17	SIJUNJUNG	4.658,00	4.671.873.150,00	4.531,00	3.738.452.350,00	4.773,00	3.345.121.450,00	6.329,00	4.364.640.400,00	6.944,00	2.787.972.350,00	27.235,00	18.908.059.700,00
18	PADANG ARO	3.117,00	2.865.917.450,00	3.408,00	2.631.629.600,00	3.674,00	2.343.393.200,00	4.516,00	2.774.019.350,00	5.400,00	1.843.297.100,00	20.115,00	12.458.256.700,00
	JUMLAH	105.644,00	106.324.895.550,00	110.557,00	92.500.529.600,00	121.167,00	89.027.734.600,00	173.729,00	112.963.710.100,00	207.704,00	80.390.669.550,00	718.801,00	481.207.539.400,00

PERHITUNGAN POKOK DAN BAGI HASIL DEPOSITO PT. RAJAWALI
TAHUN ANGGARAN 2024
NISBAH BAGI HASIL

NO	BULAN	TOTAL POKOK + BAGI HASIL	NOMINAL DEPOSITO (Rp)													TOTAL s.d 2024
		s.d 2023	SB. 041614	SB. 041612	SB. 041616	SB. 041615	SB. 041611	SB. 041617	SB. 041613	SB. 043551	DS. 010392	DS. 010273	DS. 018027	DS. 018125	DS. 018099	
			1 Juni 2019	1 Juni 2019	1 Juni 2019	1 Juni 2019	1 Juni 2019	1 Juni 2019	1 Juni 2019	1 Juni 2019	23 Juli 2020	22 Jan 2021	7 April 2022	26 Jan 2023	22 Feb 2024	
			47.757.216.628,00	3.947.460.298,00	7.784.163.912,00	4.929.338.869,00	5.616.774.670,00	5.396.712.840,00	5.456.768.816,00	5.810.012.160,00	1.673.295.111,00	1.404.241.626,00	1.315.563.368,00	560.586.376,00	80.435.430,00	
																91.732.570.104,00
1	JANUARI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2	FEBRUARI		218.887.243,00	18.092.526,00	35.677.418,00	22.592.803,00	25.743.551,00	24.734.934,00	25.010.190,00	26.629.222,00	7.669.269,00	6.436.107,00	6.029.665,00	2.569.354,00	-	420.072.282,00
3	MARET		218.887.243,00	18.092.526,00	35.677.418,00	22.592.803,00	25.743.551,00	24.734.934,00	25.010.190,00	26.629.222,00	7.669.269,00	6.436.107,00	6.029.665,00	2.569.354,00	86.021,00	420.158.303,00
4	APRIL		218.887.243,00	18.092.526,00	35.677.418,00	22.592.803,00	25.743.551,00	24.734.934,00	25.010.190,00	26.629.222,00	7.669.269,00	6.436.107,00	6.029.665,00	2.569.354,00	368.662,00	420.440.944,00
5	MEI		218.887.243,00	18.092.526,00	35.677.418,00	22.592.803,00	25.743.551,00	24.734.934,00	25.010.190,00	26.629.222,00	7.669.269,00	6.436.107,00	6.029.665,00	2.569.354,00	368.662,00	420.440.944,00
6	JUNI		218.887.243,00	18.092.526,00	35.677.418,00	22.592.803,00	25.743.551,00	24.734.934,00	25.010.190,00	26.629.222,00	7.669.269,00	6.436.107,00	6.029.665,00	2.569.354,00	368.662,00	420.440.944,00
7	JULI		218.887.243,00	18.092.526,00	35.677.418,00	22.592.803,00	25.743.551,00	24.734.934,00	25.010.190,00	26.629.222,00	7.669.269,00	6.436.107,00	6.029.665,00	2.569.354,00	368.662,00	420.440.944,00
8	AGUSTUS		218.887.243,00	18.092.526,00	35.677.418,00	22.592.803,00	25.743.551,00	24.734.934,00	25.010.190,00	26.629.222,00	7.669.269,00	6.436.107,00	6.029.665,00	2.569.354,00	368.662,00	420.440.944,00
9	SEPT		218.887.243,00	18.092.526,00	35.677.418,00	22.592.803,00	25.743.551,00	24.734.934,00	25.010.190,00	26.629.222,00	7.669.269,00	6.436.107,00	6.029.665,00	2.569.354,00	368.662,00	420.440.944,00
10	OKT		218.887.243,00	18.092.526,00	35.677.418,00	22.592.803,00	25.743.551,00	24.734.934,00	25.010.190,00	26.629.222,00	7.669.269,00	6.436.107,00	6.029.665,00	2.569.354,00	368.662,00	420.440.944,00
11	NOV		218.887.243,00	18.092.526,00	35.677.418,00	22.592.803,00	25.743.551,00	24.734.934,00	25.010.190,00	26.629.222,00	7.669.269,00	6.436.107,00	6.029.665,00	2.569.354,00	368.662,00	420.440.944,00
12	DES		218.887.243,00	18.092.526,00	35.677.418,00	22.592.803,00	25.743.551,00	24.734.934,00	25.010.190,00	26.629.222,00	7.669.269,00	6.436.107,00	6.029.665,00	2.569.354,00	368.662,00	420.440.944,00
13	DES2		218.887.243,00	18.092.526,00	35.677.418,00	22.592.803,00	25.743.551,00	24.734.934,00	25.010.190,00	26.629.222,00	7.669.269,00	6.436.107,00	6.029.665,00	2.569.354,00	368.662,00	420.440.944,00
JUMLAH		**91.652.134.674,00**	**2.626.646.916,00**	**217.110.312,00**	**428.129.016,00**	**271.113.636,00**	**308.922.612,00**	**296.819.208,00**	**300.122.280,00**	**319.550.664,00**	**92.031.228,00**	**77.233.284,00**	**72.355.980,00**	**30.832.248,00**	**3.772.641,00**	**96.777.210.129,00**
TOTAL BAGI HASIL																**5.044.640.025,00**

Rincian Aset Yang Dibatasi Penggunaannya
Yang Bersumber Dari Dana Hibah PT Rajawali
Tahun 2024

No	Uraian	Nomor Bilyet	Tanggal Deposito	Nilai Deposito (Rp)
1	Deposito Dana Hibah PT.Rajawali	DS 012730	8 Januari 2025	505.000.000,00
2	Deposito Dana Hibah PT.Rajawali	DS 018099	22 Februari 2024	80.435.430,00
3	Deposito Dana Hibah PT.Rajawali	DS 018125	26 Januari 2023	560.586.376,00
4	Deposito Dana Hibah PT.Rajawali	DS 018027	7 April 2022	1.315.563.368,00
5	Deposito Dana Hibah PT.Rajawali	DS 010273	22 Januari 2021	1.404.241.626,00
6	Deposito Dana Hibah PT.Rajawali	DS 010392	23 Juli 2020	1.673.295.111,00
7	Deposito Dana Hibah PT.Rajawali	SB 041617	1 Juni 2019	5.396.712.840,00
8	Deposito Dana Hibah PT.Rajawali	SB 041616	1 Juni 2019	7.784.163.912,00
9	Deposito Dana Hibah PT.Rajawali	SB 041615	1 Juni 2019	4.929.338.869,00
10	Deposito Dana Hibah PT.Rajawali	SB 041614	1 Juni 2019	47.757.216.628,00
11	Deposito Dana Hibah PT.Rajawali	SB 041613	1 Juni 2019	5.456.768.816,00
12	Deposito Dana Hibah PT.Rajawali	SB 041612	1 Juni 2019	3.947.460.298,00
13	Deposito Dana Hibah PT.Rajawali	SB 043551	1 Juni 2019	5.810.012.160,00
14	Deposito Dana Hibah PT.Rajawali	SB 041611	1 Juni 2019	5.616.774.670,00
	Jumlah			**92.237.570.104,00**

REKAP BMD MILIK PEMPROV YANG DIPINJAMPAKAIKAN TAHUN 2024

NO.	OPD PENGGUNA	INSTANSI PEMINJAM	NO BAST	NO PERJANJIAN PINJAM PAKAI	TANGGAL	JANGKA WAKTU PINJAM PAKAI		NAMA BARANG	LUAS (M²)	NOMOR RANGKA / MESIN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI	LOKASI	KET
						MULAI	BERAKHIR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	DINAS KESEHATAN	LANTAMAL II	030/663/PBMD/BPKAD/2021	030/662/PBMD/BPKAD/2021	18-Apr-21	5 Tahun		Rumah Dinas	458		1973	961.250.000,00	Jl. Sudirman No. 44 Padang	
			BA/57/VIII/2021	BA/56/VIII/2021		18-Apr-21	07-Apr-26							
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	KONI	030/750/PBMD/BPKAD-2021	030/751/PBMD/BPKAD-2021	01-Oct-21	5 Tahun		Bangunan Kantor	314			215.700.000,00	Jl. Rasuna Said Padang	
			1241/K-SB/KU/X/2021	1240/K-SB/KU/X/2021		01-Oct-21	30-Sep-26							
3	DINAS PERINDAG	KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI	030/978/PBMD/BPKAD/2021	030/1303/PBMD/BPKAD/2021	29-Oct-21	5 Tahun		Sebagian Bangunan Kantor	413		2015	9.328.662.025,00	Ulu Gadut, Padang	
			53/SJ-DAG/Mou/10/2021	53/SJ-DAG/Mou/10/2021		29-Oct-21	28-Oct-26							
4	DINAS SOSIAL	PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK	030/422/PBMD/BPKAD/2022	030/423/PBMD/BPKAD/2022	28-Jun-22	5 Tahun		Tanah bangunan Kantor Pemerintah	13.419,80		1980	10.836.891,09	Arosuka Kab. Solok	
			900/173/BKD-2022	900/107/BKD-2022		28-Jun-22	27-Jun-27	Tanah bangunan Kantor Pemerintah	9.059,72		1980	7.315.995,69		
5	PENGELOLA	BIN	030/380/PBMD/BPKAD/2022	030/448/PBMD/BPKAD/2022	09-Nov-22	5 Tahun		Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1.500		1995	203.280.000,00	Jl. Sawo V Purus Padang	
			05/S.KID/XI/2022	04/S.KID/XI/2022		09-Nov-22	08-Nov-27	Gedung A	±150		1984	263.804.000,00		
								Gedung B	±150		2016	892.965.000,00		
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dirjen pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan	030/219/BAST/PBMD/ BPKAD/2023	030/20/PERJ/PBMD/BPKAD/2023	10-Jul-23	5 Tahun		Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	91,00			-	Air Bangis, Pasaman Barat	Tanah seluas 91 M² merupakan sebagian dari tanah seluas 6.509 M² di komplek PPI Air Bangis UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
			B.3776/PSDKP.1/PL.720/VI/2023	B.3775/PSDKP.1/PL.720/VI/2023		10-Jul-23	09-Jul-28	Tanah Bangunan Tempat Kerja	200,00			-	Carocok, Tarusan	Tanah seluas 200 M² merupakan sebagian dari tanah seluas 19.888 M² di komplek TPI Carocok Tarusan UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	Basarnas-KPP Padang	030/229/BAST/PBMD/ BPKAD/2023	030/021/PERJ/PBMD/ BPKAD/2023	21-Jul-23	5 Tahun		Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	90,00				PPI Kambang, Pesisir Selatan	Tanah seluas 261,36 M² merupakan sebagian dari tanah seluas 20.517 M² dan bangunan seluas 90 M² merupakan sebagian bangunan TPI di komplek PPI Kambang UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
			BA-07/KS.01.01/VII/SAR PDG-2023	PKS-01/KS.01.01/VII/SAR PDG-2023		17-Jul-23	16-Jul-28	Tanah dan Bangunan Mess	40,00					Tanah seluas 60 M² merupakan sebagian dari tanah seluas 20.517 M² dan bangunan seluas 40 M² merupakan sebagian bangunan Mess di komplek PPI Kambang UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
8	Pengelola	Komnasham	030/200/BAST/PBMD/ BPKAD/2023	030/201/PERJ./PBMD/ BPKAD/2023	25-May-23	2 Tahun		Tanah	335,01		1974	565.802.667,38	Jl. Rasuna Said Padang	Tanah seluas 335,01 merupakan sebagian dari tanah seluas 5583 M^2
			37/KL.00/3.5.2/VII/2023	36/KL.00/3.5.2/VII/2023		25-May-23	24-May-25	Bangunan	257,70		1974	250.800.000,00		

NO.	OPD PENGGUNA	INSTANSI PEMINJAM	NO BAST	NO PERJANJIAN PINJAM PAKAI	TANGGAL	JANGKA WAKTU PINJAM PAKAI		NAMA BARANG	LUAS (M^2)	NOMOR RANGKA / MESIN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI	LOKASI	KET
						MULAI	BERAKHIR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Pengelola	BIN	030/417/BAST/PBMD/BPKAD/2023	030/416/BAST/PBMD/BPKAD/2023	06-Oct-23	5 Tahun		Peralatan dan Mesin (Kendaraan Dinas BA 1437 B)		MHFXW43G2F 4094546/ 1TR8837182	2015	301.930.000,00	Padang	Kijang Innova V
			02/S.KID/X/2023	02/S.KID/X/2023		06-Oct-23	05-Oct-28							
10	Pengelola	Polda Sumbar	030/531/BAST/PBMD/BPKAD/2023	030/29/Perj/PBMD/BPKAD/2023	11 Des 2023	5 Tahun		Peralatan dan Mesin (Kendaraan Dinas BA 1097 B)		NMBGUKR10K H018699/ 4N15UGA0847	2019	512.032.500,00	Padang	Mistubishi Pajero/ Jeep
			BA/41/XII/2023/SPRIPIM	BA/91/XII/2023/SPRIPIM		06-Jul-23	05-Jul-28							
11	Pengelola	BIN	030/530/BAST/PBMD/BPKAD/2023	030/28/Perj/PBMD/BPKAD/2023	11 Des 2023	5 Tahun		Peralatan dan Mesin (Kendaraan Dinas BA 1162 B)		MHFAW8EMXK 0214062/ 1TRA685107	2019	402.000.000,00	Padang	Toyota Innova Venturer
			04/S.KID/XII/2023	03/S.KD/XII/2023		06-Jul-23	05-Jul-28							
12	Pengelola	LANTAMAL	030/532/BAST/PBMD/BPKAD/2023	030/30/BAST/PBMD/BPKAD/2023	11 Des 2023	5 Tahun		Peralatan dan Mesin (Kendaraan Dinas BA 1120 B)		MHFGB8GS2K 0896677/ 2GDC559917	2019	522.000.000,00	Padang	Toyota New Fortuner
			BAST/21/XII/2023	BAST/21/XII/2023		06-Jul-23	05-Jul-28							
13	Pengelola	Kapolresta Padang	030/539/BAST/PBMD/BPKAD/2023	030/34/BAST/PBMD/BPKAD/2023	06-Oct-23	Selama Masa Jabatan Kombespol Ferry Harahap		Peralatan dan Mesin (Kendaraan Dinas BA 1045 TQA)		MHFXW43G4F 4095987/ 2ARU134170	2014	521.125.000,00	Padang	Toyota Camry All New
			B/1037.a/XII/2023	B/1037.a/XII/2023		06-Jul-23	selesainya masa Jabatan Kombespol							
14	Pengelola	Kejaksaan Tinggi Sumbar	030/538/BAST/PBMD/BPKAD/2023	030/33/BAST/PBMD/BPKAD/2023	11-Dec-23	5 Tahun		Peralatan dan Mesin (Kendaraan Dinas BA 1932 B)		MRO53AK50E4 505737/ 2ARU122655	2014	540.950.000,00	Padang	All New Camry
			01/L.3.2.3/CPL.2/01/2024	01/L.3.2.3/CPL.2/01/2024		11-Dec-23	10-Dec-28	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Dinas BA 7803 A)		JTFSS22P9J01 80094/ 2KDA983651	2018	444.350.000,00		Hiace Commuter
15	DKP	Dirjen PPS Bungus Kementerian Kelautan Perikanan	030/112/PERJ/PBMD/BPKAD/2024	030/113/PERJ/PBMD/BPKAD/2024	7 Mei 2024	5 Tahun		Tanah	2.248,68		1976	562.170.000,00	Bungus, Padang	
			B.1525/PPSB/PL.720/V/2024	B.1525/PPSB/PL.720/V/2024		07-May-24	06-May-29							

NO.	OPD PENGGUNA	INSTANSI PEMINJAM	NO BAST	NO PERJANJIAN PINJAM PAKAI	TANGGAL	JANGKA WAKTU PINJAM PAKAI		NAMA BARANG	LUAS (M^2)	NOMOR RANGKA / MESIN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI	LOKASI	KET
						MULAI	BERAKHIR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	Pengelola	Pemkot Bukittinggi	030/141/PERJ/PBMD/BPKAD/2024	030/23/PERJ/PBMD/BPKAD/2024	29 Mei 2024	5 Tahun		Bangunan Monumen APDN	172,80		2017	727.240.800,00	Kota Bukittinggi	
			000.2.3.2/13/BK.06/2024	188.45/08/BK.06/2024		29-May-24	28-May-29							
17	Pengelola	Pemkot Bukittinggi	030/356/PERJ/PBMD/BPKAD/2024	030/30/PERJ/PBMD/BPKAD/2024	15 Juli 2024	5 Tahun		Bangunan Monumen Bung Hatta	1.128,28		2003	3.442.619.994,00	Kota Bukittinggi	
			000.2.3.2/19/BK.06/2024	188.45/BK.06/2024		15-Jul-24	14-Jul-29							
18	DKP	Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan	900/1310/DKP.10.3/XI/2024	900/1309/DKP.10.3/XI/2024	21-Nov-24	5 Tahun		Mess/Wisma Bungalow	158		2005	179.940.000,00	Bungus, Padang	
			B.4744/PSDKP.1/PL.720/XI/2024	B.4742/PSDKP.1/PL.720/XI/2024		21-Nov-24	20-Nov-29							
												20.856.774.873,16		

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
REKAPITULASI TRANSAKSI HARIAN (RTH) PEMOTONGAN PAJAK ATAS SP2D YANG DICAIRKAN MELALUI KAS DAERAH TAHUN 2024

NO	NAMA SKPD	JUMLAH SP2D	NILAI SP2D	PPH 21	PPH 22	PPH 23	PPH 25 / 26 / 4 (2)	PPN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DINAS PENDIDIKAN	2.050	1.901.855.362.181	62.496.588.057	1.120.821.876	630.897.759	2.007.777.492	21.839.798.595	88.095.883.779
2	DINAS KESEHATAN	190	173.060.021.946	1.881.400.912	46.965.576	14.203.590	-	774.626.265	2.717.196.343
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT	96	102.611.311.922	2.720.721.009	214.917.027	-	23.960.479	1.678.469.169	4.638.067.684
4	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	72	36.651.491.127	989.827.138	17.136.060	-	3.135.810	148.660.427	1.158.759.435
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M NATSIR	67	62.349.183.705	1.801.834.400	44.648.421	-	15.598.865	421.127.805	2.283.209.491
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	65	44.929.027.675	1.212.210.487	20.962.179	-	11.806.726	202.731.730	1.447.711.122
7	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	434	236.805.957.038	884.482.537	44.708.639	15.965.991	4.488.766.515	19.528.255.602	24.962.179.284
8	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	347	70.480.568.896	492.437.620	8.454.689	11.184.751	897.507.875	5.477.296.489	6.886.881.424
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.314	112.829.939.273	234.548.730	1.335.897	2.330.000	1.871.267.289	10.523.314.899	12.632.796.815
10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	38	10.746.745.725	307.684.525	8.946.153	12.117.395		104.970.815	433.718.888
11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	67	8.041.526.746	287.505.753	16.502.215	8.917.160	3.137.308	161.614.269	477.676.705
12	DINAS SOSIAL	739	82.992.183.127	696.688.226	190.755.639	68.599.120	87.271.220	1.059.026.201	2.102.340.406
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	77	23.592.428.463	993.608.652	-	5.407.656	-	30.348.082	1.029.364.390
14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	49	8.486.216.937	299.113.351	4.945.739	4.295.254	3.035.375	52.734.065	364.123.784
15	DINAS PANGAN	203	18.815.302.733	524.023.149	28.730.336	4.858.245	2.149.072	115.785.122	675.545.924
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	82	15.125.894.727	391.614.267	15.917.844	16.195.335	1.727.215	214.843.167	640.297.828
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	43	5.005.801.928	201.319.213	-	2.335.800	-	13.374.920	217.029.933
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	34	6.444.014.687	288.901.896	-	1.608.800	-	8.848.450	299.359.146
19	DINAS PERHUBUNGAN	82	13.112.532.726	323.458.839	1.734.406	31.862.037	-	187.963.596	545.018.878
20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	100	21.099.219.871	292.365.568	15.574.796	142.891.299	655.495	619.487.596	1.070.974.754
21	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	42	8.003.166.653	388.195.422	1.738.324	2.724.452	-	27.732.196	420.390.394
22	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	84	13.999.454.835	396.077.981	15.694.602	19.557.841	19.976.327	223.408.381	674.715.132
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	140	52.986.983.658	359.260.047	9.619.364	69.130.037	-	145.844.485	583.853.933
24	DINAS KEBUDAYAAN	67	15.097.384.466	337.978.944	3.126.704	79.779.562	2.821.282	405.054.468	828.760.960
25	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	80	11.831.497.939	435.535.247	1.055.746	8.063.520	-	52.279.842	496.934.355
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	159	40.227.861.419	654.212.057	170.416.492	9.373.025	96.628.370	1.577.487.157	2.508.117.101
27	DINAS PARIWISATA	121	15.976.868.719	294.390.019	10.903.077	130.367.628	5.976.906	702.325.711	1.143.963.341
28	DINAS PERKEBUNAN DAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA	423	106.361.788.221	1.435.182.382	457.815.183	8.204.850	485.808.114	4.662.672.384	7.049.682.913
29	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	174	54.131.595.895	637.102.816	461.134.650	14.948.333	14.584.305	643.149.502	1.770.919.606
30	DINAS KEHUTANAN	134	55.556.382.520	1.535.606.494	129.626.199	10.338.952	12.750.152	367.404.708	2.055.726.505
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	59	12.537.395.764	328.621.235	-	28.324.702	36.514.443	375.438.763	768.899.143
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	108	19.749.753.866	554.654.916	28.638.597	36.204.901	-	364.648.336	984.146.750
33	SEKRETARIAT DAERAH	1.748	132.761.388.387	2.830.116.886	236.592.178	52.048.720	172.710.119	2.794.646.982	6.086.114.885
34	SEKRETARIAT DPRD	241	102.014.209.496	6.818.354.371	211.987.298	104.275.752	330.029.611	4.185.393.516	11.650.040.548
35	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	74	12.441.607.867	472.557.560	2.765.812	3.609.095	-	28.315.126	507.247.593
36	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	231	1.156.133.621.656	757.835.371	27.157.773	-	-	199.157.020	984.150.164
37	BADAN PENDAPATAN DAERAH	66	60.161.696.414	2.846.045.010	78.355.957	4.873.085	27.208.881	621.454.232	3.577.937.165
38	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	64	13.300.890.194	444.625.225	3.661.420	1.883.421	1.406.198	53.810.813	505.387.077
39	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	70	15.331.654.488	563.623.032	23.399.999	10.421.243	19.838.352	321.002.284	938.284.910
40	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	51	5.605.343.560	266.475.352	-	5.360.360	-	29.481.982	301.317.694
41	BADAN PENGHUBUNG	74	18.355.562.167	205.671.014	4.445.066	14.294.246	137.393.963,00	148.461.684	510.265.973
42	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	52	11.568.327.589	840.263.530	6.316.932	988.135	31.028.704	230.036.043	1.108.633.344
43	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	87	129.426.772.802	265.196.298	6.969.151	48.807.299	4.948.006	121.842.203	447.762.957
	JUMLAH	**10.498**	**5.018.595.940.009**	**100.987.915.538**	**3.694.478.016**	**1.637.249.351**	**10.817.420.469**	**81.444.325.082**	**198.581.388.456**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DAFTAR UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA
PER 31 DESEMBER 2024

No.	SKPD/Unit Kerja	PENERIMAAN						PENYETORAN					
		PPh Psl 21	PPh Psl 22	PPh Psl 23	PBB/	PPN	JUMLAH	PPh Psl 21	PPh Psl 22	PPh Psl 23	PBB/	PPN	JUMLAH
		(5% dan 15%)	(1,5%)	(2%)	PPh psl 4/26	(11%)		(5% dan 15%)	(1,5%)	(2%)	PPh psl 4/26	(11%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	SALDO AWAL (BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT)						-						
1	DINAS PENDIDIKAN	63.049.595.787	1.270.773.405	684.658.456	2.276.617.578	23.486.348.171	90.767.993.397	63.049.595.787	1.270.773.405	684.658.456	2.276.617.578	23.486.348.171	90.767.993.397
2	DINAS KESEHATAN	2.565.735.315	127.973.686	58.568.790	4.822.692	1.588.996.456	4.346.096.939	2.565.735.315	127.973.686	58.568.790	4.822.692	1.588.996.456	4.346.096.939
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT	5.997.246.917	914.907.745	360.853.997	72.409.219	9.259.002.941	16.604.420.819	5.997.246.917	914.907.745	360.853.997	72.409.219	9.259.002.941	16.604.420.819
4	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	1.704.958.475	121.366.182	15.375.911	16.281.519	894.344.109	2.752.326.196	1.704.958.475	121.366.182	15.375.911	16.281.519	894.344.109	2.752.326.196
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M NATSIR	4.630.124.337	448.353.938	53.644.479	103.892.638	4.499.081.504	9.735.096.896	4.630.124.337	448.353.938	53.644.479	103.892.638	4.499.081.504	9.735.096.896
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	2.719.404.159	442.119.065	22.602.354	66.451.217	3.686.890.421	6.937.467.216	2.719.404.159	442.119.065	22.602.354	66.451.217	3.686.890.421	6.937.467.216
7	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	1.169.070.906	267.938.469	47.163.209	4.515.593.870	21.241.872.124	27.241.638.578	1.169.070.906	267.938.469	47.163.209	4.515.593.870	21.241.872.124	27.241.638.578
8	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	640.818.357	50.214.010	30.112.912	927.805.658	5.878.008.159	7.526.959.096	640.818.357	50.214.010	30.112.912	927.805.658	5.878.008.159	7.526.959.096
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	321.061.980	10.840.671	5.803.050	1.871.267.289	10.593.944.003	12.802.916.993	321.061.980	10.840.671	5.803.050	1.871.267.289	10.593.944.003	12.802.916.993
10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	327.186.275	15.591.578	15.820.509	-	152.604.509	511.202.871	327.186.275	15.591.578	15.820.509	-	152.604.509	511.202.871
11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	318.718.794	23.943.149	18.678.050	3.137.308	248.155.886	612.633.187	318.718.794	23.943.149	18.678.050	3.137.308	248.155.886	612.633.187
12	DINAS SOSIAL	954.930.306	291.533.003	94.043.446	88.696.558	1.508.110.821	2.937.314.134	954.930.306	291.533.003	94.043.446	88.696.558	1.508.110.821	2.937.314.134
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.040.956.952	26.894.852	58.658.474	-	360.069.400	1.486.579.678	1.040.956.952	26.894.852	58.658.474	-	360.069.400	1.486.579.678
14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	438.201.483	22.973.535	31.691.445	6.387.959	148.075.579	647.330.001	438.201.483	22.973.535	31.691.445	6.387.959	148.075.579	647.330.001
15	DINAS PANGAN	588.253.602	39.647.928	23.281.609	3.724.579	240.313.229	895.220.947	588.253.602	39.647.928	23.281.609	3.724.579	240.313.229	895.220.947
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	444.505.366	35.778.791	60.481.697	1.727.215	520.161.410	1.062.654.479	444.505.366	35.778.791	60.481.697	1.727.215	520.161.410	1.062.654.479
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	229.695.213	5.679.140	7.851.794		54.516.426	297.742.573	229.695.213	5.679.140	7.851.794		54.516.426	297.742.573
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	381.015.146	11.317.315	16.383.950	-	109.406.150	518.122.561	381.015.146	11.317.315	16.383.950	-	109.406.150	518.122.561
19	DINAS PERHUBUNGAN	349.084.953	5.596.224	39.385.367	-	235.348.527	629.415.071	349.084.953	5.596.224	39.385.367	-	235.348.527	629.415.071
20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	358.037.765	26.749.006	165.394.041	655.495	725.680.311	1.276.516.618	358.037.765	26.749.006	165.394.041	655.495	725.680.311	1.276.516.618
21	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	420.346.422	8.440.677	21.723.784	-	96.883.904	547.394.787	420.346.422	8.440.677	21.723.784	-	96.883.904	547.394.787
22	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	498.956.556	30.107.715	46.812.652	23.098.378	360.014.927	958.990.228	498.956.556	30.107.715	46.812.652	23.098.378	360.014.927	958.990.228
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	633.990.482	29.136.980	88.716.016	21.036.031	371.186.934	1.144.066.443	633.990.482	29.136.980	88.716.016	21.036.031	371.186.934	1.144.066.443
24	DINAS KEBUDAYAAN	501.593.944	26.322.240	227.041.850	7.955.145	715.881.586	1.478.794.765	501.593.944	26.322.240	227.041.850	7.955.145	715.881.586	1.478.794.765
25	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	466.197.237	7.105.611	17.037.044	-	114.694.358	605.034.250	466.197.237	7.105.611	17.037.044	-	114.694.358	605.034.250
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	756.588.072	201.665.683	21.198.138	102.538.753	1.781.834.759	2.863.825.404	756.588.072	201.665.683	21.198.138	102.538.753	1.781.834.759	2.863.825.404
27	DINAS PARIWISATA	387.134.249	26.211.376	182.565.058	5.976.906	949.963.787	1.551.851.376	387.134.249	26.211.376	182.565.058	5.976.906	949.963.787	1.551.851.376
28	DINAS PERKEBUNAN DAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA	1.535.873.382	494.816.529	34.836.331	571.910.596	5.262.330.529	7.899.767.367	1.535.873.382	494.816.529	34.836.331	571.910.596	5.262.330.529	7.899.767.367
29	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	747.415.426	496.040.383	39.274.670	20.629.552	938.947.767	2.242.307.798	747.415.426	496.040.383	39.274.670	20.629.552	938.947.767	2.242.307.798
30	DINAS KEHUTANAN	1.666.357.964	178.384.565	37.690.593	18.703.783	749.454.452	2.650.591.357	1.666.357.964	178.384.565	37.690.593	18.703.783	749.454.452	2.650.591.357
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	339.582.050	5.413.363	32.860.506	38.962.686	440.013.458	856.832.063	339.582.050	5.413.363	32.860.506	38.962.686	440.013.458	856.832.063
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	626.738.416	45.379.492	57.268.798	3.800.000	534.745.804	1.267.932.510	626.738.416	45.379.492	57.268.798	3.800.000	534.745.804	1.267.932.510
	SEKRETARIAT DAERAH	3.096.954.911	476.032.704	388.999.388	172.710.119	4.510.336.921	8.645.034.044	3.096.954.911	476.032.704	388.999.388	172.710.119	4.510.336.921	8.645.034.044
42	SEKRETARIAT DPRD	6.912.904.053	512.099.349	354.680.468	367.006.964	5.535.177.826	13.681.868.660	6.912.904.053	512.099.349	354.680.468	367.006.964	5.535.177.826	13.681.868.660
43	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	564.901.310	20.324.832	7.942.883	-	118.138.967	711.307.992	564.901.310	20.324.832	7.942.883	-	118.138.967	711.307.992
44	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	899.829.621	37.209.549	9.807.252	-	271.450.089	1.218.296.511	899.829.621	37.209.549	9.807.252	-	271.450.089	1.218.296.511
45	BADAN PENDAPATAN DAERAH	3.000.256.538	113.881.745	75.379.731	28.435.485	1.106.014.784	4.323.968.283	3.000.256.538	113.881.745	75.379.731	28.435.485	1.106.014.784	4.323.968.283
46	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	540.587.475	10.671.698	5.242.306	1.579.703	103.110.032	661.191.214	540.587.475	10.671.698	5.242.306	1.579.703	103.110.032	661.191.214
47	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	732.267.782	30.217.245	24.388.464	19.838.352	413.018.181	1.219.730.024	732.267.782	30.217.245	24.388.464	19.838.352	413.018.181	1.219.730.024
48	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	329.388.822	4.619.887	9.504.397	-	75.064.184	418.577.290	329.388.822	4.619.887	9.504.397	-	75.064.184	418.577.290
49	BADAN PENGHUBUNG	227.321.214	9.310.858	27.676.926	137.393.963	259.885.770	661.588.731	227.321.214	9.310.858	27.676.926	137.393.963	259.885.770	661.588.731
50	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	869.963.030	14.374.522	4.189.677	31.028.704	284.573.437	1.204.129.370	869.963.030	14.374.522	4.189.677	31.028.704	284.573.437	1.204.129.370
51	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	490.698.298	20.933.422	78.993.204	5.830.074	245.895.750	842.350.748	490.698.298	20.933.422	78.993.204	5.830.074	245.895.750	842.350.748
	Total	114.474.449.341	6.958.892.117	3.604.283.677	11.537.905.988	110.669.548.343	247.245.079.465	114.474.449.341	6.958.892.117	3.604.283.677	11.537.905.988	110.669.548.343	247.245.079.465

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DAFTAR UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA
PER 31 DESEMBER 2024

No.	SKPD/Unit Kerja	SISA YANG TERHUTANG					
		PPh Psl 21	PPh Psl 22	PPh Psl 23	PBB/	PPN	JUMLAH
		(5% dan 15%)	(1,5%)	(2%)	PPh psl 4/26	(11%)	
1	2	15	16	17	18	19	20
	SALDO AWAL (BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT)	48.857.600	903.165,00			6.497.903,00	56.258.668
1	DINAS PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-	-
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT	-	-	-	-	-	-
4	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	-	-	-	-	-	-
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M NATSIR	-	-	-	-	-	-
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	-	-	-	-	-	-
7	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	-	-	-	-	-	-
8	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	-	-	-	-	-	-
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	-	-	-	-	-
10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-	-
11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-	-
12	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	-	-
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-	-	-
14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-	-	-
15	DINAS PANGAN	-	-	-	-	-	-
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	-
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-	-
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-	-	-
19	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-
20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	-	-	-	-	-
21	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-	-	-
22	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-	-	-	-	-
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	-	-	-	-	-
24	DINAS KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	-
25	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	-	-
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	-	-
27	DINAS PARIWISATA	-	-	-	-	-	-
28	DINAS PERKEBUNAN DAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA	-	-	-	-	-	-
29	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-	-	-	-	-
30	DINAS KEHUTANAN	-	-	-	-	-	-
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	-	-	-
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	-	-	-
	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	-	-
42	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	-	-
43	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			-	-		-
44	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-	-	-
45	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	-	-
46	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	-	-	-
47	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-	-	-
48	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	-	-	-
49	BADAN PENGHUBUNG	-	-	-	-	-	-
50	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	-	-	-	-	-	-
51	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-	-	-
Total		48.857.600	903.165	-	-	6.497.903	56.258.668

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DAFTAR HUTANG BELANJA PER 31 DESEMBER 2024

NO	NAMA DINAS	NILAI HUTANG (SIPD)				
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	BELANJA BAGI HASIL	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN	8.500.683.729,00	742.272.197,00	28.399.897.921,00		37.642.853.847,00
2	DINAS KESEHATAN	1.812.163.555,00	2.801.258.290,00	31.221.180,00		4.644.643.025,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT	2.362.857.609,00	33.337.762.697,00	262.962.000,00		35.963.582.306,00
4	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	993.253.994,00	1.083.711.484,00	-		2.076.965.478,00
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M NATSIR	1.680.395.704,00	23.529.731.304,83	134.565.252,00		25.344.692.260,83
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	1.027.772.200,00	10.789.828.509,00	722.489.485,00		12.540.090.194,00
7	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	1.032.456.480,00	126.962.043,00	2.588.791.203,00		3.748.209.726,00
8	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	447.277.126,00	171.664.605,00	4.934.725.641,00		5.553.667.372,00
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	224.237.948,00	-	255.933.000,00		480.170.948,00
10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	340.851.943,00	11.573.517,00			352.425.460,00
11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	205.164.210,00	16.589.335,00			221.753.545,00
12	DINAS SOSIAL	677.191.740,00	122.775.162,00	126.291.380,00		926.258.282,00
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	749.380.370,00	33.312.869,00			782.693.239,00
14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	229.648.091,00	18.974.352,00	197.966.317,00		446.588.760,00
15	DINAS PANGAN	406.003.269,00	46.666.319,00	165.381.000,00		618.050.588,00
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	337.014.855,00	564.695.690,75	250.980.800,00		1.152.691.345,75
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	166.616.988,00	12.895.991,00			179.512.979,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	211.862.604,00	2.398.900,00			214.261.504,00
19	DINAS PERHUBUNGAN	304.527.114,00	19.006.231,00			323.533.345,00
20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	261.807.147,00	206.093.831,00	317.200.000,00		785.100.978,00
21	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	302.873.160,00	47.041.754,00			349.914.914,00
22	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	276.939.009,00	102.022.263,00			378.961.272,00
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	302.034.260,00	21.715.498,00			323.749.758,00
24	DINAS KEBUDAYAAN	286.163.373,00	133.585.440,00			419.748.813,00
25	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	350.663.345,00	35.434.321,00			386.097.666,00
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	609.278.490,00	17.471.243,00			626.749.733,00
27	DINAS PARIWISATA	231.387.629,00	21.160.627,00			252.548.256,00
28	DINAS PERKEBUNAN DAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA	1.227.512.026,00	4.112.865.079,00			5.340.377.105,00
29	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	605.861.950,00	47.324.235,00	64.043.819,00		717.230.004,00
30	DINAS KEHUTANAN	1.389.337.070,00	21.090.675,00			1.410.427.745,00
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	252.649.886,00	23.811.490,00			276.461.376,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	437.757.648,00	40.813.522,00			478.571.170,00
	SEKRETARIAT DAERAH					-
33	*BIRO UMUM*	1.991.939.808,00	336.819.685,00			2.328.759.493,00
34	*BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN*		4.513.936,00			4.513.936,00
35	*BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH*	-	-	-		-
36	*BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA*	-	-	-		-
37	*BIRO PEREKONOMIAN*	-	-	-		-
38	*BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT*	-	-	-		-
39	*BIRO HUKUM*	-	153.558,00	-		153.558,00
40	*BIRO ORGANISASI*	-	-	-		-
41	*BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN*	-	-	-		-
42	SEKRETARIAT DPRD	345.765.237,00	1.023.370.785,00	157.000.000,00		1.526.136.022,00
43	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	393.499.526,00	22.767.462,00			416.266.988,00
44	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	634.816.384,00			356.352.777.047,00	356.987.593.431,00
45	BADAN PENDAPATAN DAERAH	546.229.318,00	176.273.018,00			722.502.336,00
46	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	380.659.895,00	20.617.520,00			401.277.415,00
47	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	350.990.338,00	120.779.204,00	-		471.769.542,00
48	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	170.655.229,00	1.983.986,00			172.639.215,00
49	BADAN PENGHUBUNG	256.312.118,00	1.417.617.251,00	-		1.673.929.369,00
50	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	846.480.380,00	6.422.558,00			852.902.938,00
51	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	174.648.456,00	6.836.128,00			181.484.584,00
	JUMLAH	**34.335.621.211,00**	**81.400.664.565,58**	**38.609.448.998,00**	**356.352.777.047,00**	**510.698.511.821,58**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PER 31 DESEMBER 2024

No	NAMA SKPD	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo per 31 Des 2024	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	RS ACHMAD MUCHTAR BUKITTINGGI	1.000.000,00	463.751.666,67	197.891.666,67	266.860.000,00	Sewa Tempat Ft Copy Aulia, Sewa kantor dan Sewa ATM Bank Nagari RSAM, Sewa ATM Bank Mandiri, Sewa Tempat Roti O, Sewa Tempat Kebab Dara
2	RSUD M. NATSIR SOLOK	52.666.666,67	68.000.000,00	67.999.999,67	52.666.667,00	Sewa ATM BNI dan Bank Nagari serta Ruangan Kantor Kas Bank Nagari
3	DINAS PENDIDIKAN	76.399.215,17	-	76.399.215,17	-	
4	PPKD/BPKAD	1.919.483.333,33	13.815.680.555,56	6.014.723.909,99	9.720.439.978,90	Paviliun Bung Hatta, Balai Sidang Bung Hatta, Ruangan KPRI Escape Building Ktr Gubernur, Tanah Komplek GOR, Gedung Rohana Kudus, Tanah utk ATM Bank Nagari Samsat Padang, Tanah dan Bangunan Eks SMK Perbankan di Jl.Sisingamangaraja Pdg, Tanah Mesjid Raya, Ruangan Escape Building Ktr Gubernur Tanah utk ATM Bank Nagari Ktr Gubernur, Tanah utk ATM Bank Nagari Bapenda, Tanah dan Bangunan Kantor di Padang Panjang, Tanah utk ATM Bank Nagari Disdik, Tanah dan Bangunan Balai Transmigrasi.
5	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	35.000.000,00	1.204.969.092,00	1.211.219.092,00	28.750.000,00	Sewa Menyewa dengan Indian Ocean Jetski Club, Penyewaan mesin dan gedung cold storage di PPI Kambang.
6	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	858.065.229.975,00	842.716.066.576,00	15.349.163.399,00	Pajak Air Permukaan an. PT Sawita Pasaman Jaya dan Pajak Kendaraan Bermotor
J U M L A H		**2.084.549.215,17**	**873.617.631.289,23**	**850.284.300.459,50**	**25.417.880.044,90**	

PERBEDAAN LRA DAN LO 2024

KODE REK	PERKIRAAN	LRA	KODE REK	PERKIRAAN	LO	SELISIH +/-
4.	**PENDAPATAN**	**6.482.418.683.405,20**	**7.**	**PENDAPATAN-LO**	**6.555.449.374.755,36**	**(73.030.691.350,16)**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**2.942.563.617.866,20**	**7.1.**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**	**2.926.648.715.900,76**	**15.914.901.965,44**
4.1.1	**PENDAPATAN PAJAK DAERAH**	**2.338.112.925.264,00**	**7.1.1.**	**PENDAPATAN PAJAK DAERAH-LO**	**2.331.128.478.240,00**	**6.984.447.024,00**
4.1.01.01.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	844.845.392.450,00	7.1.1.01.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	829.496.609.200,00	15.348.783.250,00
4.1.01.02.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	395.873.654.800,00	7.1.1.02.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	395.873.654.800,00	-
4.1.01.03.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	638.993.534.545,00	7.1.1.03.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	648.758.896.112,00	(9.765.361.567,00)
4.1.01.04.	Pajak Air Permukaan	14.677.021.417,00	7.1.1.04.	Pajak Air Permukaan-LO	13.275.996.076,00	1.401.025.341,00
4.1.01.05.	Pajak Rokok	443.723.322.052,00	7.1.1.05.	Pajak Rokok-LO	443.723.322.052,00	-
4.1.2.	**PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH**	**382.306.933.091,49**	**7.1.2**	**PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH-LO**	**376.121.559.262,83**	**6.185.373.828,66**
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	374.139.936.380,49	7.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	368.071.271.651,83	6.068.664.728,66
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	7.882.036.311,00	7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	7.765.327.211,00	116.709.100,00
4.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	284.960.400,00	7.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	284.960.400,00	-
4.1.03.	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**122.018.602.181,00**	**7.1.03.**	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO**	**127.297.967.456,00**	**(5.279.365.275,00)**
4.1.03.02.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD		7.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	-	-
4.1.03.02.(	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga	122.018.602.181,00	7.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga	127.297.967.456,00	(5.279.365.275,00)
4.1.04.	**Lain-lain PAD yang Sah**	**100.125.157.329,71**	**7.1.04.**	**Lain-lain PAD yang Sah-LO**	**92.100.710.941,93**	**8.024.446.387,78**
4.1.04.01.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	585.058.880,00	7.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	585.058.880,00
4.1.04.03.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	13.915.100.000,00	7.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	6.014.723.909,99	7.900.376.090,01
4.1.04.04.	Hasil Kerja Sama Daerah	1.850.191.000,00	7.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	2.295.121.000,00	(444.930.000,00)
4.1.04.05.	Jasa Giro	8.490.270.476,08	7.1.04.05	Jasa Giro	8.490.270.476,08	-
4.1.04.07.	Pendapatan Bunga	17.333.203.315,00	7.1.04.07	Pendapatan Bunga	17.333.203.315,00	-
4.1.04.08.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	11.729.731.654,22	7.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	11.703.331.654,22	26.400.000,00
4.1.04.12.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	14.460.403.950,00	7.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	14.460.403.950,00	-
4.1.04.16.	Pendapatan BLUD	31.761.198.054,41	7.1.04.16	Pendapatan BLUD	31.803.656.636,64	(42.458.582,23)
		-	**7.1.04.17.**	**Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) -**	-	-
4.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.525.560.271.539,00**	**7.2.**	**PENDAPATAN TRANSFER-LO**	**3.487.351.918.539,00**	**38.208.353.000,00**
4.2.01.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**3.496.315.733.539,00**	**7.2.01.**	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**3.458.107.380.539,00**	**38.208.353.000,00**
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	3.483.066.449.539,00	7.2.01.01	Dana Perimbangan	3.444.858.096.539,00	38.208.353.000,00
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	*196.436.458.000,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)*	*158.228.105.000,00*	*38.208.353.000,00*
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	*2.146.789.947.987,00*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)*	*2.146.789.947.987,00*	-
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	*217.864.557.320,00*		*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik*	*217.864.557.320,00*	-
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	*921.975.486.232,00*		*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik*	*921.975.486.232,00*	-
4.2.01.06.	Insentif Fiskal	13.249.284.000,00	7.2.01.06	Insentif Fiskal	13.249.284.000,00	-
4.2.02.	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**29.244.538.000,00**	**7.2.02.**	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**29.244.538.000,00**	**-**
4.2.02.02.	Bantuan Keuangan	29.244.538.000,00	7.2.02.02	Bantuan Keuangan	29.244.538.000,00	-
4.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**14.294.794.000,00**	**7.3.**	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO**	**141.448.740.315,60**	**(127.153.946.315,60)**
4.3.01.	**Pendapatan Hibah**	**14.294.794.000,00**	**7.3.01.**	**Pendapatan Hibah**	**141.448.740.315,60**	**(127.153.946.315,60)**
4.3.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		7.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	95.246.092.838,74	(95.246.092.838,74)
4.3.01.02.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Lainnya dan Pihak Lain	-	7.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Lainnya dan Pihak Lain	31.907.853.476,86	(31.907.853.476,86)
4.3.01.05.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	14.294.794.000,00	7.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	14.294.794.000,00	-
5.	**BELANJA DAERAH**	**6.524.664.745.123,96**	**8.**	**BEBAN DAERAH**	**6.416.330.436.191,24**	**(59.093.820.005,34)**
5.1.	**BELANJA OPERASI**	**4.614.017.505.277,85**	**8.1.**	**BEBAN OPERASI**	**5.232.175.179.880,48**	**(20.079.608.666,34)**
5.1.01.	**Belanja Pegawai**	**2.490.554.904.931,00**	**8.1.01.**	**Beban Pegawai**	**2.515.997.454.980,00**	**(25.442.550.049,00)**
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.453.530.290.985,00	8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.456.489.180.785,00	(2.958.889.800,00)
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	446.841.258.106,00	8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	476.087.779.617,00	(29.246.521.511,00)
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif	543.488.101.972,00	8.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif	536.725.240.710,00	6.762.861.262,00
5.1.01.04.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	40.807.622.530,00	8.1.01.04	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	40.807.622.530,00	-
5.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.325.604.130,00	8.1.01.05	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.325.604.130,00	-
5.1.01.06.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.378.447.459,00	8.1.01.06	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.378.447.459,00	-
5.1.01.99.	Belanja Pegawai BLUD	183.579.749,00	8.1.01.99	Beban Pegawai BLUD	183.579.749,00	-
5.1.02.	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.803.917.885.970,85**	**.1.02.**	**Beban Barang dan Jasa**	**1.798.554.944.588,19**	**5.362.941.382,66**
	Belanja Barang	**321.311.498.511,00**		**Beban Barang**	**631.917.871.572,32**	**(310.606.373.061,32)**
5.1.02.01.	Belanja Barang	321.311.498.511,00	8.1.02.01	Beban Barang	341.370.583.238,55	(20.059.084.727,55)
	Belanja Barang Pakai Habis	*320.971.941.161,00*		*Beban Barang Pakai Habis*	*341.031.025.888,55*	*(20.059.084.727,55)*
	Belanja Barang Tak Habis Pakai	*176.053.850,00*		*Beban Barang Tak Habis Pakai*	*176.053.850,00*	-
	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	*163.503.500,00*		*Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi*	*163.503.500,00*	-
5.1.02.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS (Barang)	-	8.1.02.88	Beban Barang dan Jasa BOS (Barang)	150.692.663.505,00	(150.692.663.505,00)
5.1.02.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD (Barang)	-	8.1.02.99	Beban Barang dan Jasa BLUD (Barang)	139.854.624.828,77	(139.854.624.828,77)
	Belanja Jasa	**527.911.367.951,75**		**Beban Jasa**	**830.687.902.585,57**	**(302.776.534.633,82)**
5.1.02.02.	Belanja Jasa	527.911.367.951,75	8.1.02.02	Beban Jasa	511.965.274.777,21	15.946.093.174,54
	Belanja Jasa Kantor	*322.517.754.025,42*		*Beban Jasa Kantor*	*322.348.017.942,42*	*169.736.083,00*
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	*111.363.525.149,00*		*Beban Iuran Jaminan/Asuransi*	*110.013.005.302,78*	*1.350.519.846,22*
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	*11.604.232.527,00*		*Belanja Sewa Peralatan dan Mesin*	*13.278.699.193,67*	*(1.674.466.666,67)*
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	*30.735.905.855,00*		*Belanja Sewa Gedung dan Bangunan*	*30.756.801.563,34*	*(20.895.708,34)*
	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-		*Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi*		
	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	*208.350.000,00*		*Beban Sewa Aset Tetap Lainnya*	*208.350.000,00*	-
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	*23.633.451.583,33*		*Beban Jasa Konsultansi Konstruksi*	*7.514.251.963,00*	*16.119.199.620,33*
	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	*13.709.871.812,00*		*Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi*	*13.709.871.812,00*	-
	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	*38.000.000,00*		*Beban Beasiswa Pendidikan PNS*	*42.000.000,00*	*(4.000.000,00)*
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta	*13.989.877.000,00*		*Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta*	*13.983.877.000,00*	*6.000.000,00*
	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan	*110.400.000,00*		*Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan*	*110.400.000,00*	-
5.1.02.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS (Jasa)	-	8.1.02.88	Beban Barang dan Jasa BOS (Jasa)	88.790.645.529,00	(88.790.645.529,00)
5.1.02.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD (Jasa)	-	8.1.02.99	Beban Barang dan Jasa BLUD (Jasa)	222.548.974.799,36	(222.548.974.799,36)
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	-	8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	7.383.007.480,00	(7.383.007.480,00)

KODE REK	PERKIRAAN	LRA	KODE REK	PERKIRAAN	LO	SELISIH +/-
	Belanja Pemeliharaan	**81.258.413.720,36**		**Beban Pemeliharaan**	**104.610.506.777,30**	**(23.352.093.056,94)**
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	81.258.413.720,36	8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	73.385.955.055,30	7.872.458.665,06
	Belanja Pemeliharaan Tanah	-		*Beban Pemeliharaan Tanah*	-	-
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	*25.547.267.866,00*		*Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin*	*25.482.805.997,00*	*64.461.869,00*
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	*20.927.790.483,36*		*Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan*	*13.021.431.037,30*	*7.906.359.446,06*
	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	*34.783.355.371,00*		*Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi*	*34.881.718.021,00*	*(98.362.650,00)*
5.1.02.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS (Pemeliharaan)	-	8.1.02.88.	Beban Barang dan Jasa BOS (Pemeliharaan)	16.350.080.098,00	(16.350.080.098,00)
5.1.02.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD (Pemeliharaan)	-	8.1.02.99.	Beban Barang dan Jasa BLUD (Pemeliharaan)	14.874.471.624,00	(14.874.471.624,00)
	Belanja Perjalanan Dinas	**209.229.543.077,00**		**Beban Perjalanan Dinas**	**231.338.663.653,00**	**(22.109.120.576,00)**
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	209.229.543.077,00	8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	208.992.804.660,00	236.738.417,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	*201.609.214.191,00*		*Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri*	*201.372.475.774,00*	*236.738.417,00*
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	*7.620.328.886,00*		*Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri*	*7.620.328.886,00*	-
5.1.02.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS (Perjalanan Dinas)	-	8.1.02.88.	Beban Barang dan Jasa BOS (Perjalanan Dinas)	19.048.825.876,00	(19.048.825.876,00)
5.1.02.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD (Perjalanan Dinas)	-	8.1.02.99.	Beban Barang dan Jasa BLUD (Perjalanan Dinas)	3.297.033.117,00	(3.297.033.117,00)
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	11.704.898.750,00	8.1.02.05.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	-	11.704.898.750,00
	- Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	*11.697.548.750,00*		*- Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak*	-	*11.697.548.750,00*
	- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	*7.350.000,00*		*- Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak*	-	*7.350.000,00*
5.1.02.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	274.150.899.411,00	8.1.02.88.	Beban Barang dan Jasa BOS	-	274.150.899.411,00
5.1.02.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	378.351.264.549,74	8.1.02.88.	Beban Barang dan Jasa BLUD	-	378.351.264.549,74
5.1.04.	**Belanja Subsidi**	**1.500.000.000,00**	**8.1.04.**	**Beban Subsidi**	**1.500.000.000,00**	**-**
5.1.04.02.	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.500.000.000,00	8.1.04.02.	Beban Subsidi kepada BUMD	1.500.000.000,00	-
5.1.05.	**Belanja Hibah**	**317.914.266.876,00**	**8.1.05.**	**Beban Hibah**	**317.914.266.876,00**	**-**
5.1.05.	Belanja Hibah kepada Pemerintah	117.199.488.584,00	8.1.05.02.	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	117.199.488.584,00	-
	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	*117.199.488.584,00*		*Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat*	117.199.488.584,00	-
	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-		*Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya*	-	-
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi	121.981.317.412,00	8.1.05.05.	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi	121.981.317.412,00	-
5.1.05.06.	Belanja Hibah Dana BOS	75.729.741.680,00	8.1.05.06.	Beban Hibah Dana BOS	75.729.741.680,00	-
5.1.05.07.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.003.719.200,00	8.1.05.07.	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.003.719.200,00	-
5.1.06.	**Belanja Bantuan Sosial**	**130.447.500,00**	**8.1.06.**	**Beban Bantuan Sosial**	**130.447.500,00**	**-**
5.1.06.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	130.447.500,00	8.1.06.01.	Beban Bantuan Sosial kepada Individu	130.447.500,00	-
5.2.	**BELANJA MODAL**	**765.506.194.874,35**			**-**	**-**
5.2.01.	**Belanja Modal Tanah**	**2.464.373.669,00**			**-**	**-**
5.2.01.01.	Belanja Modal Tanah	2.464.373.669,00				
5.2.02.	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**189.146.437.545,00**			**-**	**-**
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	3.868.715.500,00				
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	3.872.792.500,00				
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	26.959.000,00				
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	1.378.796.139,00				
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	37.510.264.777,00				
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	18.734.351.272,00				
5.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	22.057.221.318,00				
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	13.595.496.537,00				
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	18.169.023.441,00				
5.2.02.15.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja					
5.2.02.16.	Belanja Modal Alat Peraga	20.699.906.434,00				
5.2.02.19.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	117.500.000,00				
5.2.02.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	16.583.232.791,00				
5.2.02.89.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	12.246.428.224,00				
5.2.02.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	20.285.749.612,00				
5.2.03.	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**212.226.274.577,89**			**-**	**-**
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	203.063.622.060,89				
5.2.03.03.	Belanja Modal Bangunan Menara	-				
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	-				
5.2.03.99.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	9.162.652.517,00				
5.2.04.	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**317.619.554.844,46**			**-**	**-**
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	241.973.552.124,46				
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	71.471.485.752,00				
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	3.405.050.798,00				
5.2.04.04.	Belanja Modal Jaringan	-				
5.2.04.99.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	769.466.170,00				
5.2.05.	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	**44.031.478.988,00**			**-**	**-**
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	155.932.678,00				
5.2.05.02.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	96.805.000,00				
5.2.05.03.	Belanja Modal Hewan	147.300.000,00				
5.2.05.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	34.316.220.024,00				
5.2.05.89.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	9.315.221.286,00				
5.2.05.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	-				
5.2.06.	**Belanja Modal Aset Lainnya**	**18.075.250,00**			**-**	**-**
5.2.06.01.	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	18.075.250,00				
5.3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.222.259.811,30**	**8.3.**	**BEBAN TIDAK TERDUGA**	**5.182.916.341,30**	**39.343.470,00**
5.3.01.	**Belanja Tidak Terduga**	**5.222.259.811,30**	**8.3.01.**	**Beban Tidak Terduga**	**5.182.916.341,30**	**39.343.470,00**
5.3.01.01.	Belanja Tidak Terduga	5.222.259.811,30	8.3.01.01.	Beban Tidak Terduga	5.182.916.341,30	39.343.470,00
5.4.	**BELANJA TRANSFER**	**1.139.918.785.160,46**	**8.4.**	**BEBAN TRANSFER**	**1.178.972.339.969,46**	**(39.053.554.809,00)**
5.4.01.	**Belanja Bagi Hasil**	**1.098.402.469.691,00**	**8.4.01.**	**Beban Bagi Hasil**	**1.137.456.024.500,00**	**(39.053.554.809,00)**
5.4.01.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan	1.098.402.469.691,00	8.4.01.01.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan	1.137.456.024.500,00	(39.053.554.809,00)
5.4.02.	**Belanja Bantuan Keuangan**	**41.516.315.469,46**	**8.4.02.**	**Beban Bantuan Keuangan**	**41.516.315.469,46**	**-**

Lampiran 58

KODE REK	PERKIRAAN	LRA	KODE REK	PERKIRAAN	LO	SELISIH +/-
5.4.02.03.	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	41.516.315.469,46	8.4.02.03	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	41.516.315.469,46	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(42.246.061.718,76)**				
6.	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**159.981.015.714,19**			**-**	**-**
6.1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**179.981.015.714,19**			**-**	**-**
6.1.01.	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**	**179.981.015.714,19**			**-**	**-**
6.1.01.07.	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan	179.981.015.714,19				
6.2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**20.000.000.000,00**			**-**	**-**
6.2.02.	**Penyertaan Modal Daerah**	**20.000.000.000,00**			**-**	**-**
6.2.02.02.	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah	20.000.000.000,00				
	SILPA	**117.734.953.995,43**				
		-	**8.1.7.**	**BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**	**591.492.702.995,20**	**(591.492.702.995,20)**
				Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	203.555.135.875,93	(203.555.135.875,93)
				Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	99.453.715.891,08	(99.453.715.891,08)
				Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	287.665.701.305,62	(287.665.701.305,62)
				Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	396.156.883,07	(396.156.883,07)
				Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	363.085.674,50	(363.085.674,50)
				Beban Penyusutan Properti Investasi	58.907.365,00	(58.907.365,00)
		-	**8.1.8.**	**BEBAN PENYISIHAN PIUTANG**	**6.585.362.941,09**	**(6.585.362.941,09)**
				Beban Penyisihan Piutang Pajak	432.725.542,81	(432.725.542,81)
				Beban Penyisihan Piutang Retribusi	5.033.651.399,10	(5.033.651.399,10)
				Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	636.489.837,28	(636.489.837,28)
				Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	450.288.951,90	(450.288.951,90)
				Beban Penyisihan Piutang Transfer	32.207.210,00	(32.207.210,00)
				Beban Penyisihan Piiutang Lainnya	-	-
		-	**8.1.9.**	**BEBAN LAIN-LAIN**	**-**	**-**
				Beban Lain-lain	-	-
				Beban Lainnya	-	-
				SURPLUS/(DEFISIT) OPERASIONAL	**139.118.938.564,12**	
		-		**Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional**	**(8.169.225.401,44)**	**(9.339.343.161,44)**
				Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya	585.058.880,00	(585.058.880,00)
				Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya	8.754.284.281,44	(8.754.284.281,44)
		-		**Pos Luar Biasa**	**-**	**-**
		-		**Pendapatan Luar Biasa**	**-**	**-**
		-		Pendapatan Luar Biasa	-	-
		-		**Beban Luar Biasa**	**-**	**-**
		-		Beban Luar Biasa	-	-
		-		**SURPLUS/(DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL**	**130.949.713.162,68**	

REKAPITULASI ASET PROPERTI INVESTASI
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

No	Kode Barang			Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Nilai Perolehan Rp.	Masa Manfaat	Umur/Bulan	Penyusutan pertahun	Akumulasi Penyusutan Rp.	Nilai Buku Rp.	Beban Rp.
	PROPERTI INVESTASI												
1	1	6		ASET TETAP		2	111.576.619.000,00	600,00	384,00	58.907.365,00	22.620.428.160,00	12.723.990.840,00	58.907.365,00
	1	6	01	PROPERTI INVESTASI TANAH	1990	1	76.232.200.000,00						
	1	6	02	PROPERTI INVESTASI GEDUNG DAN BANGUNAN	1993	1	35.344.419.000,00	600,00	384,00	58.907.365,00	22.620.428.160,00	12.723.990.840,00	58.907.365,00